

KAMUS DUNIA KETIGA

Dieter Nohlen (ed.)

KAMUS DUNIA KETIGA

Sanksi Pelanggaran Pasal 44:

**Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982
Tentang Hak Cipta**

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,— (seratus juta rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,— (lima puluh juta rupiah).

KAMUS DUNIA KETIGA

Negara, Organisasi, Teori, Definisi, Tokoh

Dieter Nohlen (ed.)

PERPUSTAKAAN
PUSAT PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN BAHASA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN

 **rasindo**
GRAMEDIA WIDIASARANA INDONESIA

Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1994

Judul Asli:

LEXIKON DRITTE WELT

Länder, Organisationen, Theorien, Begriffe, Personen
Dieter Nohlen (Hg.), Reinbek bei Hamburg, Rowohlt, 1989

KAMUS DUNIA KETIGA

Negara, Organisasi, Teori, Definisi, Tokoh
Diindonesiakan oleh Titi Soentoro, Aan Effendi,
Hardi Ilham, dan Godjali Harun
GM 050 94.141

Copyright © 1980 Signal-Verlag, Hans Frevert, Baden-Baden

Hak terjemahan Indonesia pada Yayasan Dokumentasi dan
Informasi Buku Sosial-Ekonomi

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

All rights reserved

Desain sampul dan perwajahan oleh Kunta Rahardjo

Diterbitkan pertama kali oleh Penerbit PT Grasindo

Anggota IKAPI, Jakarta, 1994

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh
isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

KAMUS dunia ketiga : negara, organisasi, teori, definisi,
tokoh / Dieter Nohlen (ed.) ; diindonesiakan oleh Titi
Soentoro ... [et al.]. -- Jakarta : Grasindo, 1994.
900 hlm. ; 21 cm.

Judul asli : Lexikon dritte welt : Lander, organisation
theorien, begriffe, personen
ISBN 979-553-373-8

1. Negara berkembang -- Kamus I. Nohlen, Dieter
II. Soentoro, Titi

320.17

Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, Jakarta

Isi di luar tanggung jawab Percetakan

DAFTAR ISI

1. Peta Afrika	i
Peta Asia	ii
Peta Pasifik	iv
Kata Pengantar	xi
Daftar Penulis	xiv
Petunjuk Penggunaan	xvii
Skema: Bidang Tema Pembangunan	xix
Daftar Singkatan	xxi
2. Entri A—Z	1
3. Lampiran	833
Indeks	860
4. Peta Amerika Tengah dan Karibia	877
5. Peta Amerika Selatan	878

Perpustakaan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa	
No. Kasifikasi R 320.103 KAM K	No. Induk : 0890e1 Tgl. : 25-11-97 Ttd. : M-

an independent body of experts, including representatives of the
business community, the labor union, and the government, to
conduct a study of the problem and to report back to the
commission. The study should include a review of the
current situation, an analysis of the causes of the
problem, and a set of recommendations for
improvement. The study should also include a
cost-benefit analysis of the proposed
solutions. The commission should then
decide whether to implement the
recommendations and, if so, how to
pay for them.

KATA PENGANTAR

Kamus Dunia Ketiga ini penting bagi mereka yang membahas masalah strategi pembangunan, problematika Utara-Selatan, dan masalah Dunia Ketiga.

Kamus yang memberikan informasi luas ini mempunyai kombinasi analisis negara dengan entri yang tertata secara informatif dan sistematis berdasarkan definisi-definisinya. Pembahasan tema berorientasi pada permasalahannya, diberikan pengantar dalam masalah pokok ilmu pengetahuan mengenai pembangunan dan pelaksanaan strategi pembangunan. Kamus ini digunakan di sekolah dan perguruan tinggi, dalam ekonomi dan politik, terutama untuk pembentukan kesadaran, dapat memperoleh dasar-dasar informasi dalam pembahasan setiap masalah.

Banyaknya penulis menjamin sifat pluralistis karya ini yang mencerminkan kontroversi dalam diskusi mengenai strategi pembangunan. Para penulis tersebut memperjuangkan suatu pengetahuan dan kesadaran tanggung jawab politik dalam masalah yang berkaitan dengan negara berkembang dan masyarakat internasional. Dengan demikian, *Kamus Dunia Ketiga* merupakan sumbangan pemikiran untuk pembentukan kesadaran politik.

Editor, Dr. phil. Dieter Nohlen, adalah Guru Besar Ilmu Politik di Universitas Heidelberg, Jerman.

Catatan Penerbit : Informasi yang ada dalam kamus ini dikumpulkan sampai akhir tahun 1992.

Dieter Nohlen (ed.)
KAMUS DUNIA KETIGA

Negara, Organisasi, Teori, Definisi, Tokoh

Penulis:

Renate Arndt, Harald Barrios, Fritz Beimdiek, Petra Bendel, Dieter Benecke, Klaus Bodemer, Andreas Boeckh, Otto Boye Soto, Hans-Jochen Diesfeld, Dietmar Dimoser, Mario Fernandez Baeza, Mir. A. Ferdowsi, Michael Fremerey, Gisela Frommer, Felix Gallé, Wolfgang Geiger, Dirk Gerdes, Christiano German, Kambiz Ghawami, Bernd Girrbach, Axel Halbach, Rolf Hanisch, Andreas Hildenbrand, Bernd Hillebrands, Waldemar Hummer, Martin Kaiser, Volker Kasch, Hanna Keitel-Kivouvou, Rainer Knoblauch, Hans-Peter Kotthaus, Joachim Krause, Michael Kreile, Michael Krennerich, Volker G. Lehr, Volker Lenhart, Hans U. Luther, Gero Maass, H.C.F. Mansilla, Hanspeter Mattes, Ulrich Menzel, Martina Müller, Gerd Nickoleit, Roman Niedworok, Hans-Peter Nissen, Dieter Nohlen, Franz Nuscheler, Günther Philipp, Hermann Röhrs, Rainer Sakic, Hartmut Sangmeister, Annette Schmid, Alexander Seger, Karsten Sohns, Karin Stahl, Michael Strübel, Roland Sturm, Rainer Tetzlaff, Rudolf Tippelt, Bernhard Thibaut, George Turner, Achim Wachendorfer, Ute Wachendorfer-Schmidt, Norbert Wagner, Nikolaus Werz, Wichard Woyke, Klaus Ziemer, Wolfgang-Peter Zingel

Pembantu Redaksional:

Michael Krennerich

dan

Petra Bendel, Bernd Hillebrands, Bernhard Thibaut

DAFTAR PENULIS

- ab Prof. Dr. Andreas Boeckh, Gesamthochschule Essen
ah Andreas Hildenbrand, MA, promovendus, Universitas Heidelberg
ajh Axel J. Halbach, Ifo-Institut München
als Alexander Seger, MA, UNFDAC, Wina
as Annette Schmid, MA, UNDP, Havana
aw Dr. Achim Wachendorfer, Friedrich Ebert Stiftung, Buenos Aires
bg Bernd Girrbaach, MA, jurnalis, koresponden khusus untuk masalah politik bantuan pembangunan, promovendus, Universitas Heidelberg
bh Bernd Hillebrands, BD, Universitas Heidelberg
bt Bernhard Thibaut, Universitas Heidelberg
cg Dr. Christiano German, Universitas Katolik Eichstätt
db Dr. Dieter W. Benecke, ketua Inter Nationes, Bonn
dd Dietmar Dirmoser, Universitas Giessen
dg Dr. Dirk Gerdes, dosen, Ostfriesische Landschaft, Aurich
dis kelompok penerjemah dari Yayasan Dokumentasi dan Informasi buku Sosial Ekonomi untuk Kamus Dunia Ketiga
dn Prof. Dr. Dieter Nohlen, Universitas Heidelberg
fb Dr. Fritz Beimdiek, Dipl.-Volkswirt, Lusaka
fg Felix Gallé, Universitas Heidelberg
fn Prof. Dr. Franz Nuscheler, Universität-Gesamthochschule Duisburg
gf Dr. Gisela Frommer, GTZ, Rwanda
gm Dr. Gero Maass, FES, Paris
gn Gerd Nickoleit, proyek GEPA, Schwelm
gp Dr. Günther Phillipp, Diakonische Werk, Karlsruhe

- gt Prof. Dr. George Turner, mantan Senator Ilmu Pengetahuan dan Penelitian Berlin, Universitas Hohenheim
- hb Harald Barrios, Universitas Heidelberg
- hjd Prof. Dr. Hans-Jochen Diesfeld, Universitas Heidelberg
- hk Hanna Keitel-Kivouvou, MA, promovendus, Universitas Heidelberg
- hm Dr. H.C.F. Mansilla, Instituto Boliviano de Cultura, La Paz
- hpk Hans-Peter Kotthaus, Dipl. penerjemah, Sekretaris Jendral untuk Association Parlementaire pour la Coopération Euro-Arabe, Brüssel
- hpm Dr. Hanspeter Mattes, Dipl.-Volkswirt, Deutsches Orient-Institut, Hamburg
- hpn Prof. Dr. Hans-Peter Nissen, Universität-Gesamthochschule Paderborn
- hr Prof. Dr. Hermann Röhrs, Universitas Heidelberg
- hs Dr. Hartmut Sangmeister, Universitas Heidelberg
- hul Dr. Hans U. Luther, Free University Berlin
- jk Joachim Krause, Sekretaris Jenderal dari Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen, Bonn
- kas Karsten Sohns, mahasiswa, Universitas Heidelberg
- kb Dr. Klaus Bodemer, Universitas Mainz
- kg Dr. Kambiz Ghawami, ketua World University Service-Deutsches Komitee e.V., Fachhochschule Wiesbaden
- ks Dr. Karin Stahl, FEST, Heidelberg
- kz Dr. Klaus Ziemer, dosen, Universitas Heidelberg
- muf Dr. Mir. A. Ferdowsi, Geschwister-Scholl-Institut, Universitas München
- mf Prof. Dr. Michael Fremerey, Gesamthochschule Kassel
- mfb Dr. Mario Fernandez Baeza, Universitas Heidelberg
- mik Michael Krennerich, Universitas Heidelberg
- mk Prof. Dr. Michael Kreile, Universitas Konstanz
- mka Martin Kaiser, Dipl.-Volkswirt, Südasien Institut, Universitas Heidelberg
- mm Martina Müller, MA, Universitas Heidelberg
- ms Dr. Michael Strübel, Universitas Heidelberg
- niw Dr. Nikolaus Werz, Universitas Freiburg
- nw Dr. Norbert Wagner, Südasien Institut, Universitas Heidelberg

obs Otto Boye Soto, kodirektur dari Instituto para el Nuevo
 Chile, Santiago
 pb Petra Bendel, Universitas Heidelberg
 ra Renate Arndt, MA, Universitas Heidelberg
 red redaksi
 rh Dr. Rolf Hanisch, Institut untuk masalah internasional,
 Hamburg
 rk Rainer Knoblauch, Universitas Frankfurt
 rn Roman Niedworok, promovendus, Universitas Heidelberg
 rs Dr. Roland Sturm, dosen, Universitas Heidelberg
 rsa Rainer Sakic, GEPA, Jügesheim
 rt Prof. Dr. Rainer Tetzlaff, Universitas Hamburg
 rti Dr. Rudolf Tippelt, Landesinstitut für Allgemeine Weiter-
 bildung, Mannheim
 um Dr. Ulrich Menzel, dosen, Universitas Frankfurt
 uw Dr. Ute Wachendorfer-Schmidt, Heidelberg
 vgl Dr. Volker G. Lehr, Friedrich-Naumann-Stiftung, Bogota
 vk Dr. Volker Kasch, Arbeitsgemeinschaft kirchlicher Entwick-
 lungsdienst, Stuttgart
 vl Prof. Dr. Volker Lenhart, Universitas Heidelberg
 wg Prof. Dr. Wolfgang Geiger, Free University Berlin
 wh Prof. DDDr. Waldemar Hummer, Universitas Innsbruck
 wpz Dr. Wolfgang-Peter Zinger, Südasien Institut, Universitas
 Heidelberg
 ww Dr. Wichard Woyke, dosen, Universitas Münster

PETUNJUK PENGUNAAN

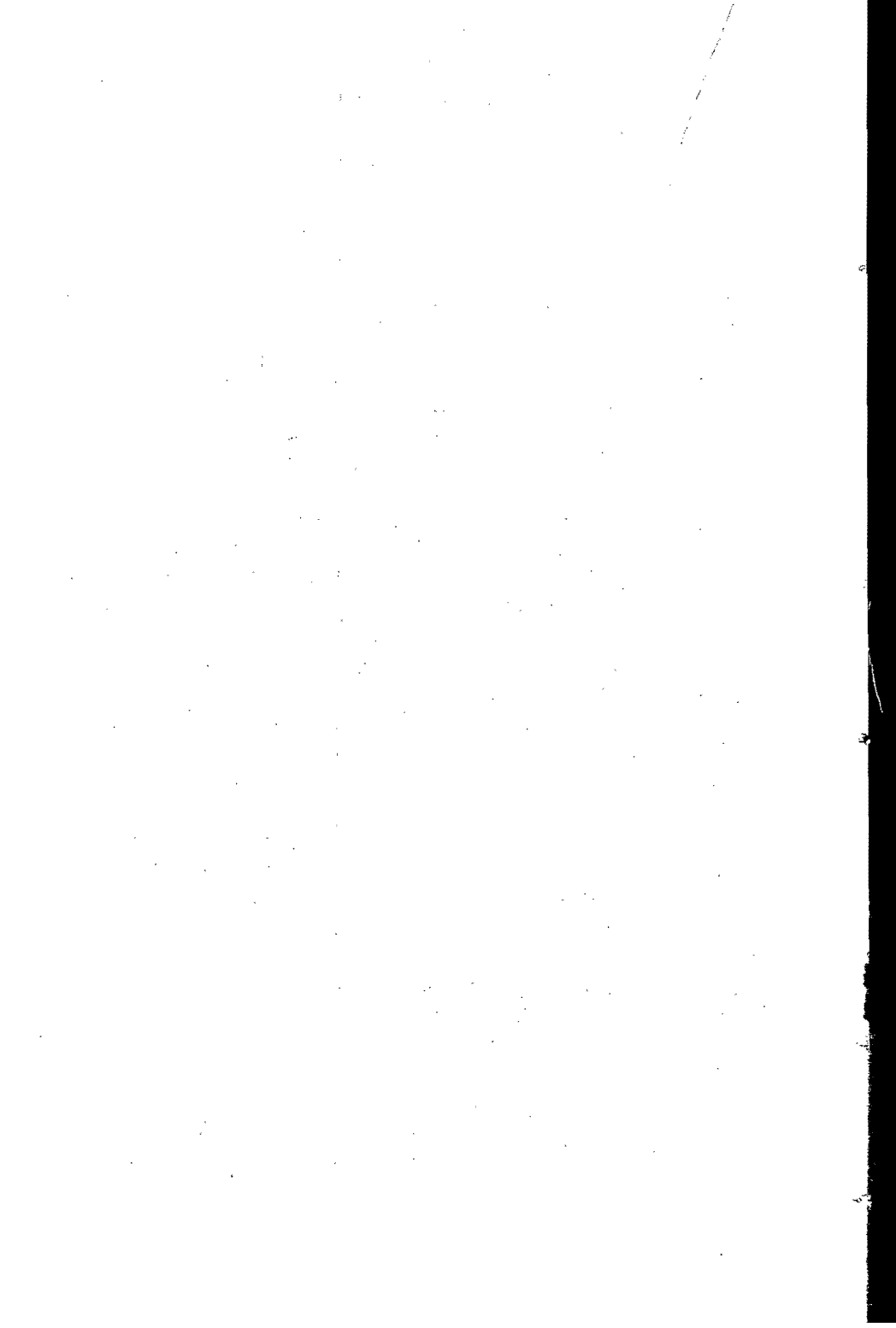
Kamus ini menggunakan dua sistem petunjuk: asteris (*) dan panah (→). Asteris (*) menunjukkan singkatan, definisi, dan sebagainya yang mungkin menjadi pertanyaan pada saat membaca, dan dapat terjawab dengan sendirinya jika mencari dalam kamus. Petunjuk dengan tanda asteris juga membantu menempatkan entri yang dicari dalam kaitan definisi secara sistematis. Misalnya, entri *big push* dengan tanda asteris menunjuk ke entri pertumbuhan dan entri teori pertumbuhan. Dengan tanda panah (→) pembaca bisa mencari entri yang ditunjuk untuk menambah informasi terhadap entri yang sedang dibaca.

Sistem petunjuk ini memberi kemungkinan penggunaan kamus seperti dalam skema di halaman xix, yang dibantu dengan pengaturan entri secara sistematis. Tema kamus terbagi atas masalah pokok * pembangunan, teori keterbelakangan dan strategi pembangunan, serta * politik bantuan pembangunan (entri yang diperlihatkan dengan asteris dibahas dalam kamus). Dengan demikian, bidang-bidang pokok diatur dalam sederet konsep utama yang berhubungan dengan sejumlah entri yang dapat menjelaskan sampai detail permasalahan secara konseptual dan terorganisir.

Perbandingan antarnegara terbatas di bagian tabel yang berada dalam lampiran. Ada beberapa singkatan yang sudah umum digunakan. Daftar singkatan diberikan di halaman xxi. Kepustakaan merupakan petunjuk lanjut literatur untuk pembahasan masalah Dunia Ketiga, banyak disusun oleh redaksi.

Nama penulis diberikan di akhir suatu entri dengan cetak tebal. Daftar singkatan nama penulis ada di halaman xiv.

Alamat redaksi: Institut für Politische Wissenschaft an der Universität Heidelberg, Marstallstr. 6, 6900 Heidelberg, Jerman.



SKEMA: BIDANG TEMA PEMBANGUNAN

	Konsep Pokok	Entri
Masalah inti pembangunan	Penduduk	pelarian dari pedesaan, urbanisasi, Konferensi Penduduk Dunia, UNFPA
	Kesempatan kerja	pengangguran, miskin, marjinalitas, ILO
	Pertumbuhan	akumulasi, kuota tabungan, investasi, produktivitas, pendapatan per kapita
	Pangan/ kesehatan	kurang makan, pelayanan/indikator kesehatan, <i>etnomedicine</i> , <i>Primary Health Care</i> , AIDS, Konferensi Pangan Dunia, FAO, IFAD, WFC/WFP, WHO
	Partisipasi	distribusi pendapatan, Kurva Lorenz, koefisien GINI, serikat buruh, koperasi, <i>community development</i> , demokratisasi, partai-partai politik, minoritas
	Ekologi	Laporan Brundtland, Global 2000, pengungsi karena masalah lingkungan, teknologi gen, desertifikasi
	Ketergantungan	pembagian kerja internasional, neokolonialisme, <i>terms of trade</i> , hambatan perdagangan, utang, alih teknologi, persenjataan

Strategi pembangunan	Pertumbuhan	pendapatan nasional, industrialisasi, substitusi impor, <i>take off</i> , <i>big push</i> , investasi, teori perdagangan luar negeri
	Perubahan sosial	perubahan kultur, akulturasi, dualisme
	Pembangunan yang oto-sentris	ketergantungan, heterogenitas struktural, disosiasi, <i>self-reliance</i> , ikut secara selektif
	Kebutuhan dasar	pembangunan pedesaan, WCARRD, teknologi tepat guna, padat karya, pangan/kesehatan
	Tata ekonomi dunia baru	Piagam, nasionalisasi, program bahan mentah yang terintegrasi, Dana Bersama, indeksasi, STABEX, SYSMIN, hubungan Selatan-Selatan, ECDC, ICDC
	<i>collective self-reliance</i>	Kelompok 77
Politik bantuan pembangunan	Instrumen	bantuan keuangan/kerja sama keuangan, ODA, bantuan/kerja sama teknik, bantuan personal (relawan pembangunan, pakar pembangunan), bantuan proyek, bantuan program, bantuan barang, bantuan humaniter, bantuan struktur, bank-bank pembangunan regional, <i>counterpart</i> , subsidi bunga, <i>grant element</i> , penjadwalan utang
	Organisasi	UN, ECOSOC, UNCTAD, UNDP, UNIDO, GATT, IMF, Bank Dunia, IDA, IFC, MIGA, FAO, WHO, ILO, DAC, BID, ADB, IGH

DAFTAR SINGKATAN

AD	Anggaran Dasar
a.l.	antara lain
AS	Amerika Serikat
cet.	cetakan
dkk	dan kawan-kawan
d.k.l.	dengan kata lain
dll.	dan lain-lain
dlm.	dalam
dsb.	dan sebagainya
DSR	Debt Service Ratio
dst.	dan seterusnya
ed.	editor
ha	hektar
HDW I	Handbuch der Dritten Welt, ed. D. Nohlen & F. Nuscheler, 4 jilid, Hamburg 1974-1978
HDW II	cet. 2, 8 jilid, Hamburg 1982-1983
hlm.	halaman
KTP	Kartu Tanda Penduduk
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LU	Lintang Utara
ME	Masyarakat Eropa
MEE	Masyarakat Ekonomi Eropa
no.	nomor
PDB	Produk Domestik Bruto
pend.	pendapatan
PHK	Pemutusan Hubungan Kerja
PNB	Produk Nasional Bruto
th.	tahun

UU	Undang-Undang
UUD	Undang-Undang Dasar
VOC	Vereiniging Ost-indische Compagnie
vol.	volume
vs	versus

A

AASM → politik bantuan pembangunan ME.

ABEDA → bantuan pembangunan Arab ke Afrika.

absentisme Pemilikan tanah atau perwalian tanah oleh orang-orang yang tidak hidup di tanah tersebut (*absentee landlords*). Mereka hidup di kota dan tidak mengolah sendiri tanah itu, tetapi mengambil hasil melalui pengurusannya atau penggarapnya (*share cropping*). **wpz**

Abu Dhabi → Uni Emirat Arab.

ACAST (*United Nations Advisory Committee on the Application of Science and Technology for Development*) Komite Penasihat PBB dalam hal penerapan pengetahuan dan teknologi untuk pembangunan, didirikan sehubungan dengan Konferensi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Internasional PBB (Jenewa 1963). Tahun 1971 merencanakan aksi sedunia untuk penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menghadapi masalah di negara berkembang. → **UNCST**.

Kepustakaan: UN, *World Plan of Action for the Application of Science and Technology to Development*, New York 1981. **dn**

ACC (*Arabian Cooperation Council*) Kerja sama Ekonomi Arab, berdiri Februari 1989, anggota: Irak, Mesir,

Yordania, dan Yaman Utara. *Tujuan:* secara bertahap mengkoordinasi perencanaan ekonomi, mendorong investasi dan *joint venture*, membuka pasar bersama. Pakta empat negara ini tetap membuka kesempatan bagi negara-negara Arab lainnya untuk menjadi anggota dan bertujuan menjadi pasar bersama seluruh negara Arab. **dn**

ACDA → **CADA**.

ACSAD (*Arab Center for the Studies of Arid Zones and Dry Lands*) Lembaga yang didirikan Liga Arab, meneliti potensi sumber daya alam (misalnya sumber daya air dan bumi) di daerah gurun pasir Irak, Saudi Arabia, Suriah, dan Yordania. **ah**
ADB (*African Development Bank*) Bank Pembangunan Afrika, didirikan di Khartum (1963). Mulai beroperasi tahun 1966, kedudukan di Abijan, Pantai Gading. Tahun 1986 beranggota 50 negara. Pada awalnya masih merupakan bank regional tanpa keanggotaan negara industri karena keterbatasan sumber daya; sejak tahun 1979 dimungkinkan masuknya negara-negara non-Afrika menjadi anggota; tahun 1986 ada 25 anggota non-Afrika. *Tujuan:* pembangunan ekonomi dan kemajuan sosial negara-

negara anggota, prioritas proyek dengan impuls-impuls pembangunan supra-regional; harmonisasi strategi pembangunan nasional untuk keseimbangan pembangunan seluruh Afrika; kerja sama dengan *OAU dan *ECA; tahun 1973 membuat Konferensi Perdagangan dan Pengembangan Sistem Moneter Afrika.

Tahun 1986 mandat modal sebesar 5.250.000 *RE, dua pertiga modal dan hak suara tetap dipegang negara-negara Afrika. Pendirian anak perusahaan dan organisasi penunjang: a. *African Development Fund* (Dana Pembangunan Afrika), didirikan tahun 1972 oleh 16 negara industri; b. atas inisiatif *Africa Development Bank* dan *International Finance Corporation*, didirikan lembaga untuk mendorong investasi swasta di Afrika, berkedudukan di Jenewa dan beranggotakan sekitar 100 perusahaan dari AS, Eropa, dan Jepang.

Titik berat pemberian kredit: sektor pertanian, transportasi, dan energi; ADF bergerak terutama di *Zone Sahel.

Kepustakaan: K.D. Fordwor, *The AFDB Problems of International Cooperation*, New York 1981.

dn
ADB (*Asian Development Bank*) Bank Pembangunan Asia, didirikan tahun 1966; kedudukan di Manila. Anggota (1987): 32 bank regional dan 15 bank nonregional; modal (Desember 1987): 3,84 miliar US\$; saham nasabah 19.476 juta US\$, anggota regional: 12.504 juta US\$, anggota nonregional: 6.972 juta US\$. Dalam rangka ADB didirikan *Asian Development Fund*/ADF (Dana Pembangunan Asia) dengan negara industri Barat sebagai kreditor serta pensubsidi

kredit dan bantuan teknik keuangan; 1980 didirikan dana khusus untuk *bantuan/kerja sama teknik (*Technical Aid Special Fund*) yang menyediakan dana untuk persiapan dan pembiayaan proyek, pembangunan, dan perluasan lembaga strategi pembangunan, serta untuk *rencana pembangunan.

Tugas: membantu investasi modal swasta dan pemerintah dengan tujuan pembangunan negara-negara anggota terlemah (*Developing Member Countries*), terutama sekali melalui ADF, bantuan teknik, kerja sama dengan *PBB, organisasi internasional pemerintah, lembaga pemerintah, dan swasta nasional. *Sektor pembiayaan:* transportasi dan komunikasi (tahun 1987: sekitar 32,5%), industri dan pertambangan nonbahan bakar (26,5%), pertanian dan agro-industri (21,7%), sektor energi (13,6%), dan *infrastruktur (5,6%). Tahun 1987 dibagikan kredit 2.483,5 juta US\$ untuk 48 proyek; di antaranya 576 juta US\$ ke Indonesia, 541,6 juta US\$ ke Pakistan, 393 US\$ ke India, dan 265,7 juta US\$ ke Bangladesh.

Kritik: ADB membantu pembangunan perekonomian nasional yang terlalu berorientasi ekonomi swasta dan terlalu terkait erat ke negara industri Barat. Dalam rangka peningkatan *industrialisasi berorientasi ekspor menurut model *pembagian kerja internasional sehingga *kebutuhan dasar rakyat menjadi terabaikan.

Alamat: P.O. Box 789, Manila, Filipina 2800
Kantor Jakarta: Jl. Merdeka Selatan, Jak-Pus

Materi dari: HIZ III C 710 01/20

dn
AEF (*Afrique Equatoriale Française*) Federasi empat negara jajah-

an Perancis di Afrika-Khatulistiwa tahun 1910-1958/1959: Kongo Tengah (Republik Rakyat Kongo), Gabon, Oubangui-Chari (Republik Afrika Tengah), dan Cad dengan ibu kota N'Djamena.

fn
AFDB (*African Development Bank*)
→ ADB.

AFESD (*Arab Fund for Economic and Social Development*) Dana Arab untuk Pembangunan Ekonomi dan Sosial.

Afghanistan Masuknya tentara Uni Soviet Desember 1979 menjadikan Afghanistan sorotan dunia. Diangkatnya ideologi marxisme-leninisme sebagai pedoman politik pembangunan, terbentur pada struktur masyarakat tradisional dan kesadaran nasional rakyat Afghanistan, yang menentang kekuatan kolonial sejak abad ke-19 dan telah mendapatkan kepercayaan diri dengan adanya pembaruan Islam di Iran (→ islamisasi).

1. Negara pedalaman Afghanistan secara topografi terbagi menjadi tiga daerah: daerah utara antara perbatasan Uni Soviet dan Karakorum; dataran tinggi di tengah yang meliputi lebih dari separo wilayah negara; dan dataran tinggi di barat daya. Negara ini berpegunungan dan hanya sedikit terdapat tumbuhan.

Penduduknya (tahun 1979: 15,5 juta jiwa) dengan pertumbuhan 2,6%/tahun; ibu kota Kabul awal tahun 1989 berpenduduk lebih dari dua juta jiwa, termasuk para pengungsi, secara etnis dan bahasa sangat heterogen. Jumlah warga dari tiap-tiap suku hanya dapat diperkirakan; tahun 1979 diadakan sensus penduduk pertama yang memper-

lihatkan bahwa jumlah penduduk ternyata lebih sedikit daripada yang diduga semula. Sejak masuknya tentara Uni Soviet, 5 juta penduduk meninggalkan negerinya; 2,5-3 juta mengungsi ke Pakistan, 1,5-2 juta ke Iran. Jumlah korban dalam perang saudara ini diperkirakan mencapai satu juta jiwa. Pathanen merupakan kelompok suku terbesar (50%), sebagian besar penduduk termasuk suku-suku besar seperti Durrani dan Ghilzai yang berada dan mendominasi wilayah selatan dan timur; Tadshiken (sekitar 25%) hidup di daerah lembah Kabul Utara, di Hindukush, Badakshan, dan sekitar Herat; kelompok Usbesken dan Turkmenen (sekitar 10%) hidup di daerah barat laut, suku Hazara yang campuran Mongolia (10%) berdiam terutama di dataran tinggi bagian tengah (Hazarajat). Sisanya adalah suku Chahar, Aymak, Belutshen, Nuristani, Persia, dan Kirgisen (5%). Kedua bahasa nasional, Pashtu dan Dari (Parsi) digunakan oleh 50% dan 30% penduduk, agama yang umum dipeluk adalah Islam, sekitar 90% adalah kaum Suni dan lebih dari 5% adalah kaum Syiah.

2. Sejarah Afghanistan modern dimulai abad ke-18. Tahun 1793 Nadir Shah yang berasal dari suku Turkmenen di Iran menghancurkan Kerajaan Mogul dan menaklukkan seluruh daerah barat Sungai Indus. Setelah ia terbunuh, Ahmad Shah Abdali (Durrani) sebagai penggantinya memisahkan Afghanistan dari Kerajaan Iran; sejak itu Afghanistan menjadi negara merdeka, walaupun wilayahnya selalu berganti. Selama

abad ke-19 Afghanistan berada di bawah pengaruh pertikaian antara Rusia dan Inggris yang memperjuangkan hegemoni mereka di Asia (*great game*). Jika para tsar Rusia mencari jalan ke "perairan hangat", Inggris tetap ingin mempertahankan hegemoninya di Samudra Hindia (→ India). Afghanistan tidak dapat ditaklukkan Inggris selama tiga kali peperangan sehingga merupakan salah satu dari sedikit negara berkembang yang tidak pernah menjadi jajahan Eropa. Tahun 1838–1842 Inggris dikalahkan, tetapi tahun 1878–1879 Afghanistan harus mengakui kekuasaan Inggris (Perjanjian Rawalpindi). Tahun 1919 baru dicapai kemerdekaan penuh. Sudah tentu tidak terjadi penguasaan Rusia atas Afghanistan, dan keinginan Rusia mendapatkan jalan ke Samudra Hindia tidak terwujud.

Usaha reformasi Raja Amanullah (1919–1929) yang berpendidikan Barat (larangan poligami dan larangan memakai cadar, wajib sekolah untuk anak laki-laki dan perempuan, pemisahan antara agama dan negara, pembentukan parlemen, aturan berpakaian Eropa) mendapat perlawanan sengit dan berakhir dengan kejatuhannya. Penggantinya, Nadir Shah (1929–1933) dan putranya, Zahir Shah, (1933–1973) menjalankan politik restorasi, terutama dengan memperkuat suku-suku, kemudian politik modernisasi yang berhati-hati; tidak dilakukan reformasi ekonomi dan sosial secara mendasar. Zahir Shah berhasil melaksanakan politik luar negeri dengan menarik keuntungan dari situasi Afghanistan

yang strategis; AS dan negara-negara Barat lain maupun Uni Soviet mendukung besar-besaran pembangunan ekonomi negara ini tanpa mendapatkan imbalan konsesi politik.

Tahun 1973 Zahir Shah digulingkan saudara sepupunya, MP Mohammad Daud yang mengubah negeri itu menjadi republik dan menjalankan sederet nasionalisasi. Pemerintahan yang diktator digulingkan pemimpin komunis tahun 1978. Daud dan keluarganya ditembak mati. Pertikaian antarfraksi dalam pemerintahan (pemimpin pertama Mohammad Taraki ditembak mati penggantinya, Nurul Amin, yang juga harus menyingkir dan digantikan Babrak Kamal) dan perlawanan penduduk, menimbulkan perang saudara; Desember 1979 mengundang invasi Uni Soviet. Sejak itu perlawanan dari suku-suku semakin kuat, antara lain di daerah Pashthunen sepanjang perbatasan Pakistan. Di bawah pimpinan Uni Soviet, politik luar negeri Afghanistan yang netral sejak merdeka ditinggalkan dan tidak ada lagi kedaulatan negara. Bantuan militer secara deras dari AS, Pakistan, Iran, Arab, dan Cina. Bertambahnya pasokan senjata termodern memungkinkan Mujahiddin melakukan perlawanan keras. Pakistan dan Iran juga menawarkan tempat untuk pangkalan beroperasinya Mujahiddin. Mengalir keluarnya sepertiga penduduk menunjukkan bahwa politik dalam dan luar negeri sangat bertentangan dengan harapan sebagian besar penduduk, selain itu akibat situasi kehidupan yang semakin tak tertahankan selama perang saudara. Aksi-aksi

yang dilakukan pemerintah komunis kurang ditujukan untuk pembangunan tatanan sosial ekonomi yang sosialis-tis, melainkan lebih ditujukan untuk memapankan kekuasaan lapisan kecil fungsioner. Namun, kebanyakan pemimpin gerakan gerilya bukan merupakan kelompok reformasi sosial, melainkan lebih merupakan persekutuan berbagai macam kelompok kepentingan, seperti ulama Islam (Suni dan Syiah), kepala suku, tuan tanah, intelektual, dan mantan birokrat.

Kegagalan petualangan di Afghanistan bisa jadi merupakan salah satu faktor penentu terjadinya perubahan di Uni Soviet. Perubahan ini mengakhiri intervensi Uni Soviet di sana. Tahun 1987 masih terlihat seolah-olah Mujahiddin dalam jangka panjang akan kalah karena Uni Soviet makin fleksibel dalam memerangi gerilyawan, antara lain karena keunggulan mutlaknya di udara. Pemasukan Mujahiddin dengan rudal darat ke udara telah mengubah kualitas perang ini; ancaman terjadinya internasionalisasi konflik mulai nyata dalam kasus Pakistan. Konferensi Jenewa April 1988 antara Afghanistan, Pakistan, Uni Soviet, dan AS, menyepakati penarikan tentara Uni Soviet dari Afghanistan; 15 Februari 1989 pasukan terakhir Uni Soviet ditarik. Politik dalam negeri juga dikendalikan Soviet; Tahun 1987 Najibullah menjadi ketua dewan revolusi dan kepala negara, bulan November *Loya Jirga* ("Rapat besar" kepala suku) mensahkan undang-undang baru; Afghanistan kembali menjadi Republik Afghanistan dan non-blok, seluruh pasukan asing harus

keluar dari Afghanistan. Pengunduran diri Uni Soviet dari Afghanistan akhirnya menjatuhkan Najibullah bulan April 1992 yang telah berkuasa selama 13 tahun. Pemerintahan sementara di bawah Sibghatullah Mojaddidi mengambil alih kekuasaan pemerintah komunis dan memimpin Afghanistan masuk ke masa peralihan menuju ke pemerintahan Islam. Juni 1992 Burhanuddin Rabanni menjadi presiden Republik Islam Afghanistan.

3. Berdasarkan struktur produksi, pekerjaan penduduk, perdagangan luar negeri, dan struktur pemukimannya, Afghanistan merupakan negara agraris. Diukur dari pendapatan nasionalnya (tahun 1979: 170 US\$ per kapita) Afghanistan termasuk negara berkembang termiskin. Kepadatan penduduk yang relatif kecil (24 jiwa/km²) memungkinkan penduduknya yang sebagian besar petani dan nomad, menghidupi diri sendiri. Namun, tingkat penyediaan pangan rendah sekali dan distribusinya tidak sama-paling tidak sebelum revolusi; jika panen tahunan buruk diperlukan impor pangan (Uni Soviet, sebelumnya juga AS). Menurut perkiraan FAO (1978-1980) setiap hari rata-rata tersedia 1.833 kilokalori per kepala; lebih dari sepertiga penduduk hidup di bawah batas eksistensi minimum. Harapan hidup sekitar 41 tahun. Setelah satu dasawarsa perang saudara, tidak ada keterangan terperinci mengenai tingkat pembangunan yang aktual. Sebagian besar infrastruktur dan suprastruktur telah hancur, walaupun selama berlangsungnya perang saudara telah dibangun infrastruktur baru dengan bantuan

Uni Soviet, misalnya kilometer pertama rel kereta api yang menghubungkan jaringan kereta api Soviet. Sebagian besar wilayah negara ini tidak dapat digunakan untuk pertanian karena keadaan tanah dan iklimnya. Petani yang menetap, mengolah ladang pertanian sekitar 12% luas wilayah; sekitar 2–3 juta orang nomad beternak domba, kambing, unta, dan kuda, serta berkelana melewati batas negara tetangga. Sekitar 3% tanahnya ditutupi hutan yang makin terancam penebangan liar (penyelundupan kayu ke Pakistan) menjadi padang rumput.

Sektor pertanian terbatas karena kekurangan air dan tanah, serta tingkat perkembangan yang secara umum rendah. Potensi pengairan secara keseluruhan belum terpakai sehingga walaupun terjadi penambahan penduduk, penggunaan teknik-teknik produksi yang lebih baik akan memungkinkan perbaikan penyediaan pangan dan tanaman berserat. Afghanistan hanya kekurangan minyak bumi, tetapi melalui impor gas alam dari Uni Soviet kekurangan ini dapat dipenuhi, terutama jika cadangan batu bara dalam negeri digunakan dalam jumlah besar untuk kebutuhan rumah tangga. Hal ini dapat mengurangi penebangan hutan yang tak terkendalikan, yang mengancam daerah pertanian (erosi). Sebagai negara yang relatif miskin akan bahan mentah, bagi Afghanistan di masa depan timbul persoalan bagaimana cara merealisasi pembiayaan impornya melalui ekspor. Namun, jika berhasil menarik dana dari para pekerja Afghanistan di luar negeri untuk

membiayai pembangunan, negeri ini tidak bergantung lagi pada bantuan luar negeri seperti sekarang. Untuk membangun dan meluaskan industri (sekarang hanya industri tekstil dan bahan makanan) dan sektor tersier diperlukan perluasan sektor pendidikan terlebih dahulu karena Afghanistan tidak mampu bersaing dengan negara berupah rendah lainnya akibat keadaan letak geografis, tidak adanya infrastruktur (selain jalan raya antarkota) dan rendahnya tingkat pendidikan (sedikitnya 80% masih buta aksara). Namun, peluang yang pada dasarnya menguntungkan ini, tidak dapat digunakan selama di Afghanistan berlangsung perang saudara.

Kepustakaan: W. Kraus (ed.), *Afghanistan, Natur, Geschichte, Kultur, Staat, Gesellschaft und Wirtschaft*, Tübingen 1972; G. Frommer, *Das moderne Bildungswesen als Instrument nationaler Entwicklung. Eine Studie zur Theorie der Schule in Afghanistan*, Heidelberg 1981; A. Hyman, *Afghanistan under Soviet Domination 1964–1981*, London and Basingstoke 1982; F.J. Vollmer, "Afghanistan", dlm. *HDW II*, Hamburg 1983, hlm. 51 dst.; J.-H. Grevemeyer, *Afghanistan. Sozialer Wandel und Staat im 20. Jahrhundert*, Berlin 1987; D. Braun, *Afghanistan: Sowjetische Machtpolitik und Islamische Selbstbestimmung*, Baden-Baden 1988. *Kompas*, 29 Juni 1992, "Rabbani, Presiden Baru Afghanistan". wpz

African Medical and Research Foundation → AMREF.

Afrika Selatan Republik Afrika Selatan merupakan satu-satunya negara industri di benua Afrika. Secara efektif dan berdasarkan perkiraan sendiri, Afrika Selatan makin berkembang menjadi suatu tipe khas negara Dunia Ketiga dengan struktur ekonomi dan sosial yang dualistik. Sebagai negara apartheid dengan pemisahan ras berdasarkan undang-un-

dang (→ apartheid), bertahun-tahun Afrika Selatan menjadi bahan berita yang negatif di seluruh dunia. Kemampuan atau ketidakmampuan penduduk mengatasi apartheid akan menjadi penentu nasib negara itu.

1. Republik Afrika Selatan meliputi 1.221.000 km², termasuk negara-negara Transkei, Bophuthatswana, Venda, dan Ciskei yang bebas dan terletak di dalam wilayahnya. Wilayah selatan benua Afrika meliputi seluruh daerah pantai Atlantik di Propinsi Kap, wilayah barat sampai dataran rendah Natal dan di sebelah timur sampai tepi Samudra Hindia. Daerah pedalamannya merupakan dataran tinggi (lebih dari 1.000 m di atas permukaan laut) dengan sedikit lembah, pegunungan yang terpisah-pisah, dan bukit. Dataran tinggi itu menurun ke arah utara sampai ke lembah Kalahari yang tak bersungai dan ke Limpopo. Dataran tinggi itu di sebelah timur, barat, dan selatan memuncak sampai menjadi *great escarpment*, yaitu tebing terjal dengan ketinggian melebihi 3.600 m dari permukaan laut. Dari sana secara bertingkat turun sampai ke dataran rendah di daerah pantai. Iklim subtropisnya ditandai temperatur yang nyaman karena letaknya yang tinggi dan musim kering yang panjang (6–8 bulan). Curah hujan berbeda-beda secara regional dari tahun ke tahun. Sesuai dengan pembagian itu, di dataran tinggi yang kering terlihat semak belukar dan padang rumput, sedangkan tumbuh-tumbuhan di daerah pantai yang lembab semakin lebat ke arah hutan tropis yang selalu hijau. Secara geologi, dataran tinggi itu

merupakan bagian daerah penumpu benua Afrika yang sudah tua dan kaya akan kekayaan alamnya.

2. Ciri khas Afrika Selatan adalah struktur penduduk yang sangat heterogen. Perkiraan tahun 1987 terdapat 34,6 juta jiwa dengan pertumbuhan 2,1%/tahun. Kelompok etnis terbesar adalah kulit hitam sejumlah 25,7 juta, lalu kulit putih sejumlah 4,9 juta, campuran sebanyak 3,1 juta, dan orang Asia (terutama orang India) sebanyak 0,9 juta. Kelompok orang kulit putih dengan pertumbuhan 1,2%/tahun merupakan pertumbuhan paling lambat; tingkat pertumbuhan orang campuran dan India juga rendah, yaitu di bawah 2%/tahun, sedangkan pada orang kulit hitam adalah 2,4%/tahun. *Trend*-nya adalah perluasan dominasi jumlah kulit hitam, sedangkan jumlah kulit putih pada keseluruhan penduduk terus menurun.

Penduduk kulit putih sesuai dengan asalnya, hampir 60% berbahasa Afrikaan (orang Bur dari Belanda) dan sekitar 40% berbahasa Inggris. Sisanya adalah beberapa kelompok kecil kaum pendatang Eropa serta kaum pendatang Portugis dari Angola dan Mozambik (sejak tahun 1975). Orang campuran—berasal dari hubungan terdahulu antara pendatang Eropa dengan penduduk setempat (orang Hottentotten dan Melayu di daerah Kapstadt)—secara kultural kebanyakan berorientasi ke orang Bur, sedangkan orang India (terutama bermukim di daerah Durban/Natal) relatif masih tetap dapat mempertahankan identitas kultural mereka.

Penduduk kulit hitam terbagi dalam 10 etnis terbesar yang ditempatkan di masing-masing *homeland*: Zulu (Kwazulu), Xhosa (Transkei, Ciskei), Tswana (Bophuthatswana), Sotho Utara (Lebowa), Sotho Selatan (Qwaqwa), Vhavenda (Venda), Shangaan (Gazankulu), Swazi (Kangwane), dan Ndebele (Kwandabele).

Etnis yang banyak anggotanya adalah Zulu (20%), diikuti Xhosa (18%). Gereja-gereja Kristen mendominasi (gereja kulit hitam bebas, *Nederduitse Gereformeerde Kerk*, Katolik, Metodis, Anglikan). Sebagai minoritas adalah Hindu, Islam, dan Yahudi. Bahasa resmi adalah Afrikaan dan Inggris. Selain itu ada empat kelompok bahasa utama Afrika: bahasa Nguni (Zulu, Xhosa, Swazi, Ndebele), bahasa Sotho (Sotho Utara dan Sotho Selatan, Tswana), Tsonga/Shangaan, dan Venda.

Secara regional, penduduk terbagi sangat tidak merata. 14 juta orang kulit hitam bermukim di daerah periferi (→ *homeland*) hanya meliputi 14% wilayah negara itu. Sementara di daerah inti metropol (Pretoria/Witwatersrand/Vereeniging, di daerah Kapstadt, Port Elizabeth/Uitenhage, dan Durban/Pinetown) yang hanya meliputi 4% wilayah Afrika Selatan, bermukim 34% penduduk (1980). Tahun 1980 jumlah penduduk kota adalah 48% jumlah penduduk keseluruhan, tetapi sangat terpisah-pisah berdasarkan kelompok ras (kulit putih 89%, Asia 91%, campuran 77%, kulit hitam 33%). Ibu kota dan kedudukan pemerintahan di Pretoria, sedangkan kedudukan parlemen di Kapstadt. Kota terbesar

adalah Johannesburg/Soweto dengan beberapa juta penduduk.

3. Afrika Selatan lahir tahun 1652 dengan pendaratan Jan van Riebeeck di Kapstadt yang mendirikan tempat perbekalan untuk kapal-kapal VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*). Pemukiman orang Eropa mula-mula terbatas di Kapstadt dan *hinterland*-nya (daerah belakang). Baru di abad ke-18 beberapa kelompok orang Bur terus merambah ke pedalaman. Tahun 1795 kekuasaan VOC berakhir. Tahun 1806 Inggris mengambil alih pengawasan di koloni Kap. Sebagai protes terhadap administrasi Inggris, mulai tahun 1835 beberapa ratus ribu orang Bur yang terbagi dalam beberapa kelompok melakukan *grosen trek* (perjalanan besar) ke daerah timur laut sehingga akhirnya berdiri Republik Transvaal dan Oranje-Freistaat merdeka. Tahun 1843 Natal dianeksi Inggris dan tahun 1856 dinyatakan sebagai koloni kerajaan. Penemuan intan (1871) dan emas (1884) menyebabkan tumbuhnya kepentingan ekonomi di Afrika Selatan dan berlangsung imigrasi besar dari Eropa. Konflik Inggris-Bur yang makin menajam menyebabkan pecahnya Perang Bur. Setelah terjadi perdamaian (1902), republik orang Bur menjadi koloni Inggris. Tanggal 31 Mei 1910 berdiri Uni Afrika Selatan dengan 4 daerah: Propinsi Kap, Transvaal, Oranje-Freistaat, dan Natal. Dengan demikian secara *de facto* muncul negara Afrika Selatan yang bebas-mula-mula di bawah pimpinan politik dengan pengaruh pemikiran Inggris-berlandaskan rujukan antara orang Inggris dan orang Bur, semen-

tara mayoritas orang nonkulit putih praktis terkucil dari kehidupan politik. Tahun 1912 diorganisir perlawanan orang kulit hitam dalam *South African Native National Congress*, kemudian muncul *African National Congress*, *ANC.

Tahun 1914 berdiri *Nasionale Party* (NP) yang memperjuangkan kemandirian dalam pembangunan ekonomi dan kultural orang Bur. Partai-partai liberal kelompok penduduk Inggris sampai tahun 1948 tetap berkuasa, ketika secara mengejutkan NP dengan lima mandat lebih banyak bisa memperoleh kemenangan. Sejak itu, NP tidak pernah melepas kekuasaannya. Tahun-tahun berikutnya merupakan masa perluasan apartheid. Oposisi kulit putih tetap tidak berdaya menghadapi kekuasaan NP. Mandat mereka terus turun dalam setiap pemilu.

Tahun 1959 *PAC yang lebih radikal memisahkan diri dari ANC. Protes terhadap UU-KTP tahun 1960 menyebabkan terjadinya pembantaian di Sharpeville (67 korban jiwa) serta pelarangan ANC dan PAC. Adanya protes yang keras dari dunia internasional menyebabkan Afrika Selatan tahun 1961 tidak masuk dalam **commonwealth*. Tanggal 31 Maret 1961 berubah nama menjadi Republik Afrika Selatan.

4. Ciri dasar struktur sosial Afrika Selatan adalah jalinan kompleks elemen-elemen etnis, kultural, kepercayaan, ekonomi, dan sosial dalam sebuah masyarakat kelas dan ras yang sangat dualistik. Ciri struktur yang jelas adalah buruh pengembara. Pekerjaan ini mula-mula me-

rupakan pilihan bagi penduduk di periferi, kemudian mau tidak mau harus dilakukannya demi hidup. Tahun 1982 hampir 60% tenaga kerja yang bekerja di daerah Afrika Selatan "putih" tidak hidup di sana, melainkan hadir di sana pada waktu tertentu. Distribusi pendapatan mencerminkan hasil struktur sosial. Pendapatan per kapita (1980) di daerah inti metropolitan yang berkembang maju (1/3 penduduk, 2/3 PDB) adalah 3.637 Rand, sedangkan orang kulit putih lainnya (sekitar 30% penduduk dan PDB) adalah 2.223 Rand, sedangkan di *homeland* (38% penduduk, 4% PDB) hanya 201 Rand. Pengangguran orang kulit hitam yang hidup di pedesaan maupun di perkotaan, diperkirakan mencapai 20%-30%. Kekurangan di bidang pendidikan dan sangat kurangnya jaminan kesehatan di *homeland*, sudah bukan rahasia umum lagi.

5. Landasan ekonomi Afrika Selatan sampai sekarang adalah kekayaan buminya, terutama emas, lalu intan, platina, batu bara, tembaga, bijih besi, mangan, krom, dan uran. Struktur pertanian yang didominasi pertanian dan peternakan (domba, sapi) sampai paro kedua abad ke-19. Berubah drastis ketika ditemukan intan pertama di Kimberley dan tahun 1884 ditemukan emas di Witwatersrand. Pertambangan terus dikembangkan ketika berlangsung dua perang dunia. Setelah tahun 1945 dilakukan politik industrialisasi yang terutama berlandaskan substitusi impor sehingga menyebabkan transformasi lanjut struktur ekonomi. Kontribusi sektor pertanian untuk PDB

yang semula mendominasi, turun sampai hanya sekitar 6% PDB di tahun '80-an, sedangkan kontribusi pertambangan 14%. Sementara itu, usaha produksi untuk PDB naik lebih dari 30%. PDB tahun 1987 mencapai 164 miliar Rand dan PNB mencapai 157 miliar Rand. Jumlah impor adalah 28 miliar dan ekspor barang (tanpa emas) adalah 25 miliar Rand. Ekspor emas tahun 1987 berjumlah 17,8 miliar Rand.

Meskipun berlangsung proses *diversifikasi yang secara regional terpusat di beberapa pusat ekonomi (daerah inti metropolitan-daerah PWV, Kapstadt, Durban/Pineown, dan Port Elizabeth/Uitenhage-hanya dengan 4% daerah negara tersebut bisa mengeruk 2/3 keseluruhan penerimaan), tetap saja ekspor ditentukan oleh bahan mentah, termasuk emas dengan nilai mencapai 80%. Di pihak impor selain bahan mentah tertentu (minyak bumi) dan barang setengah jadi, makin mendominasi mesin-mesin khusus dan perlengkapan transportasi. Mitra dagang yang tidak bisa diabaikan adalah negara industri Barat. Sementara jumlah perdagangan Afrika turun karena alasan politik, daerah Asia semakin menjadi penting artinya di tahun-tahun terakhir.

Karena jalinan dengan luar negeri sangat besar, pembangunan ekonomi negara tersebut sangat bergantung pada konjungtur dunia secara umum. Masa depan politik yang tidak pasti dan politik sanksi dari negara-negara Barat menyebabkan kegiatan investasi asing yang besar praktis macet sebab pertumbuhan ekonomi yang

kira-kira sepadan dengan pertumbuhan penduduk mengalami penurunan dan perdagangan luar negeri mengalami stagnasi.

6. Ciri yang berlaku dalam sistem politik Republik Afrika Selatan adalah politik apartheid. Dasar dan legitimasi formal adalah UU tahun 1948 yang untuk pertama kalinya memberikan hak ikut bicara politik secara terbatas dalam Kamar yang terpisah kepada penduduk campuran dan Asia. Sebenarnya Parlemen-Tiga-Kamar (178 orang kulit putih di *House of Assembly*, 85 orang campuran di *House of Representatives*, dan 45 orang Asia di *House of Delegation*) tidak memperhatikan mayoritas penduduk kulit hitam (di sini tetap berlaku fiksi bahwa aspirasi politik mereka terbatas di *homeland*). Tahun 1983 hal ini menimbulkan kerusuhan-kerusuhan. Sejak diberlakukannya situasi darurat tahun 1986, situasi tersebut bisa dikendalikan.

Gerakan pembebasan orang kulit hitam, ANC dan PAC, dilarang sejak tahun 1960. Kesatuan gerakan oposisi terpenting adalah *United Democratic Front* (UDF) yang didirikan sejak tahun 1983. Sebagai corong adalah serikat buruh dengan organisasi wadahnya COSATU (*Congress of South African Trade Unions*) dan gerakan kulit hitam. Namun, UU darurat sangat membatasi kemungkinan gerak organisasi-organisasi tersebut. Gerakan *Inkatha* di bawah Buthelezi (pemimpin menteri Kwazulu) menjalankan strategi jalan tengah tanpa kekerasan, meskipun ANC dan partai politik lainnya menolak apartheid. Buthelezi sendiri karena "kegiatan

nya" dengan pimpinan kulit putih, oleh banyak orang lebih dianggap bagian dari kelompok mapan dan bukan sebagai pemimpin oposisi berpengaruh kuat.

Partai pemerintah (kulit putih) adalah *National Party* (NP) yang sejak 1948 berkuasa tanpa terputus. Politik reformasi yang dijalankan sejak tahun '70-an terutama di bidang sosial dan ekonomi, tahun 1982 menyebabkan pemisahan diri *Conservative Party* (CP) yang menganggap bahwa haluan reformasi NP merupakan jalan langsung ke pengambilalihan kekuasaan oleh orang kulit hitam. Di samping CP, *Herstigte Nasionale Party* (HNP), *Afrikaaner Weerstandsbeweging* (AWB), dan *Afrikaaner Volkswag*, terbentuk kelompok ekstrem kanan lainnya yang menentang setiap usaha pelunakan UU apartheid. Pada pemilihan parlemen Mei 1987, *Progressive Federal Party* (PFP) yang kiri-liberal kehilangan statusnya sebagai oposisi resmi dalam CP (pembagian kursi sejak Mei 1987: NP 133, CP 23, PFP 20, NRP 1, dan satu anggota parlemen tanpa partai).

Partisipasi penuh dalam kehidupan politik menurut prinsip-prinsip demokrasi, tetap hanya untuk penduduk kulit putih. Meskipun dilakukan koreksi dan reformasi sistem apartheid, sesungguhnya tidak terlihat adanya keinginan untuk membagi kekuasaan. Bobot spektrum orang kulit putih kanan yang makin meningkat, menyebabkan NP harus berhati-hati dalam melakukan reformasi jika tidak ingin pemilihnya lari ke CP yang konservatif. Partai-partai orang kulit

putih yang liberal, PFP, *National Democratic Movement*, dan *New Republican Party* (NRP)—akhir 1988 bergabung dalam satu partai oposisi kiri. Namun, sistem pemilihan mayoritas yang berlaku menurut model Westminster, tidak memberi peluang kepada sebuah konsolidasi oposisi liberal untuk bisa mengambil alih ataupun ikut dalam pemerintahan.

Kepustakaan: SAIRR, *Survey of Race Relations in South Africa*, Johannesburg (tahunan); G. Vierdag, *Südafrika: Friedlicher Wandel? Möglichkeiten demokratischer Konfliktregelung - eine empirische Untersuchung*, München/Mainz 1978; *Bayerische Landesszentrale für politische Bildungsarbeit, Südafrika: Krise und Entscheidung*, München 1987; R. Hofmeier, "Südafrika", dlm.: *Politisches Lexikon Afrika*, cet. ke-4, München 1988, hlm. 345 dst. ajh
AFTAAAC (*Arab Fund for Technical Assistance to African and Arab Countries*) Dana Arab untuk Bantuan Teknik ke Negara-Negara Afrika dan Arab.

Agenda 21 Hasil Konferensi Lingkungan Dunia Juni 1992 di Rio de Janeiro yang berisi 115 program untuk pembangunan di Dunia Ketiga yang ramah terhadap lingkungan. Sebagian besar program memperlihatkan bahwa perlindungan lingkungan mempunyai dampak di semua bidang kehidupan. Perlindungan lingkungan tidak lagi dilihat sebagai usaha perbaikan, melainkan melihat penyebab-penyebabnya. Oleh karena itu, terlihat bobot yang besar terhadap masalah memerangi kemiskinan, pengadaan kesehatan, dan bantuan pendidikan. Agenda ini merupakan sebuah pernyataan keinginan dan tidak memiliki kewajiban yang mengikat.

Selain itu, setelah melalui perundingan panjang dan rumit, konferen-

si menyetujui pendirian sebuah komisi PBB tersendiri yang bertugas mengawasi pelaksanaan Agenda 21. Komisi ini akan menjadi anggota ECOSOC.

Kepustakaan: Die Beschlüsse des Umweltgipfels: *Konventionen zum Klima- und Artenschutz*, Süddeutsche Zeitung, 15 Juni 1992, dim.: BMZ-Spiegel der Presse 12/92, hlm. 396.

dis

AID (US-AID/Agency for International Development) Aparat bantuan pembangunan AS, didirikan tahun 1961, merupakan badan yang bersifat setengah otonom dari kementerian luar negeri AS, berkedudukan di Washington D.C.; membiayai kantor-kantor regional di Afrika, Amerika Latin, Timur Tengah, dan Asia Tenggara. *Tugas:* membantu dan menjalankan program bantuan AS untuk Dunia Ketiga (a.l. bantuan teknik dan bantuan personal, program bahan makanan, pemasokan barang-barang perlengkapan pertanian dan industri). → politik bantuan pembangunan AS.

Kepustakaan: B. May, *Reagan und die Entwicklungsländer. Die Auslandshilfepolitik im amerikanischen Regierungssystem*, München/Oldenbourg 1987.

dn

AIDS di Dunia Ketiga. Menurut perkiraan WHO jumlah penderita AIDS (*Acquired Immuno Deficiency Syndrome*) tahun-tahun terakhir ini terus meningkat. Sementara jumlah penderita (diperkirakan Amerika Utara: 1.000.000, Eropa: 500.000, Asia: 500.000, Amerika Selatan: 1.000.000, Afrika: 7.500.000, lainnya: 100.000) di negara industri dapat dikatakan sesuai dengan kenyataan, di negara berkembang harus dianggap bahwa penderita yang tidak diketahui dan tidak melapor lebih banyak lagi jumlahnya. Dari data statistik, Afrika

bagian tengah, timur, dan selatan begitu juga Brasilia, beberapa pulau di Karibia, dan Meksiko, merupakan daerah utama penyebaran penyakit AIDS. Di Asia, terutama Thailand, Birma, dan India, virus AIDS berkecamuk dengan cepat. 80% negara berkembang melaporkan adanya kasus AIDS. Mengenai pembawa HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan orang-orang yang mengandung zeropositif di setiap negara, hanya ada penelitian yang sangat berbeda-beda dan tidak dapat dibandingkan sehingga luas dan jalannya penyebaran penyakit hanya dapat diperkirakan secara kasar. Di tiap-tiap daerah penyebaran utama, diperkirakan ratusan ribu bahkan jutaan orang terjangkit penyakit AIDS. Wabah AIDS terutama untuk benua Afrika di selatan Sahara berarti masalah sosial, ekonomi, dan demografi sekarang ini mencapai dimensi yang sangat tinggi. HIV terutama dapat ditularkan secara heteroseksual dan ibu-ibu yang terjangkit ke anak-anaknya. Tingkat penderita dan kematian akibat AIDS semakin bertambah besar dalam kelompok umur pria dan perempuan yang secara ekonomi penting di tiap-tiap negara yang disebutkan dan meninggalkan suatu generasi yatim piatu. Penyediaan obat-obatan secara ekonomis dan personal masih merupakan ilusi. Transfusi darah dan operasi mengandung risiko infeksi. Penularan melalui serangga, seperti malaria, belum terbukti. Pengurangan kecepatan penyebaran penyakit hanya dapat terjadi dalam jangka panjang melalui pencerahan. Pelayanan kesehatan harus berkonsentrasi untuk

mengurangi penularan di kalangan mereka sendiri serta tindakan perawatan. WHO telah memulai program global untuk memerangi AIDS, terutama membantu negara berkembang. → kesehatan.

Kepustakaan: The Panos Institute and the Norwegian Red Cross, *Aids in the Third World*, 1987; B.J. Johnson, *Aids in Africa. A Review of Medical, Public Health, Social Science and Popular Literature. Summary Report*, MISEREOR, Aachen 1988; WHO, *Weekly Epid. Rec.* 63, 309-310, Oktober 1988; Zubairi Djoerban, "Gotong Royong untuk Menghadapi Tantangan AIDS", dlm. *Kompas* 1 Desember 1991, hlm. 3; Manfred Kiener, "Experten halten Kampf gegen die Armut für ein Mittel gegen Aids", *Kolner Stadt-Anzeiger*, 21 Juli 1992, dlm. *BMZ-Spiegel der Presse*, 15/92, hlm. 461-462.

hjd

akulturasi Di dalam sosiologi pembangunan diselidiki perubahan kultur di masyarakat yang sedang berkembang. Proses akulturasi yang timbul akibat pengaruh eksogen melalui kontak kultural dengan "kultur lain, yang sedikit banyak merupakan kultur asing ... (perubahan antarkultur), terjadi dalam proses meniru dan mengambil alih elemen-elemen kultur asing ke dalam kultur sendiri melalui difusi, dan kultur sendiri kemungkinan mengalami perubahan mendalam dan luas" (R.F. Berendt 1965, hlm. 116). Akulturasi dapat berlangsung melalui kekerasan (kolonialisme), tetapi dapat juga melalui usaha membuka diri secara sukarela suatu masyarakat yang belum atau kurang berkembang terhadap peralatan, teknologi, nilai-nilai, dan bentuk organisasi yang berasal dari masyarakat yang lebih berkembang. R.F. Berendt membedakan dua tipe akulturasi: a. penyesuaian pasif-imitatif terhadap kultur yang lebih unggul; b. peng-

olahan dan pengembangan secara aktif dengan titik tolak penggunaan untuk ke butuhan dan peluang suatu negara berkembang.

Kepustakaan: R.F. Berendt, *Soziale Strategie für Entwicklungsländer*, Frankfurt 1965. **dn**

akumulasi Pengertian akumulasi digunakan dalam teori ekonomi klasik dan teori marxis untuk menandakan pemupukan atau pengumpulan kekayaan, terutama alat-alat produksi yang berproduksi. Akumulasi dalam ekonomi kapitalis meliputi pembentukan kekayaan suatu perekonomian nasional yang merupakan komposisi dari kegiatan menabung dan investasi tiap-tiap subjek ekonomi. Bagi Karl Marx asal mula akumulasi merupakan proses historis yang menimbulkan persyaratan eksistensi kapitalisme. Ini terjadi melalui penghapusan hak milik pribadi yang berasal dari kerja sendiri, artinya buruh (petani atau pengrajin) bukan lagi "pemilik pribadi yang bebas dari situasi kerja yang digunakan sendiri", melainkan telah berubah menjadi buruh bebas yang menerima upah. Akumulasi modal yang kemudian menjadi modal, meliputi perubahan balik dari nilai lebih ke dalam modal. Berbasis pada hubungan modal-alat produksi terpenting adalah hak milik kaum kapitalis, dan buruh hanya merupakan pemilik tenaga kerjanya sendiri—akumulasi merupakan dasar untuk kelanjutan reproduksi kapitalis. **hk**
ALAB (*Arab Latin American Bank*) Bank Arab Amerika Latin, didirikan tahun 1978 (kedudukan di Lima), membiayai proyek-proyek di Amerika Latin. Anggota (1983): 28 lembaga keuangan dari 18 negara Arab dan Amerika Latin. **ah**

ALADI (*Asociación Latinoamericana de Integración*) Organisasi Integrasi Amerika Latin. Didirikan 12 Agustus 1980 oleh bekas negara-negara yang tergabung dalam ALALC. ALADI yang berkedudukan di Montevideo secara hukum merupakan penerus ALALC, yang hak dan kewajibannya sejak 13 Maret 1981 beralih ke organisasi baru ini. ALADI tidak lagi dikonsepsikan sebagai zone preferensi regional dalam pengertian Pasal XXIV GATT, melainkan dimengerti sebagai integrasi Selatan-Selatan (\rightarrow hubungan Selatan-Selatan), tipe baru dalam pengertian *enabling clause* GATT. Berbeda dengan multilateralisasi preferensi dalam ALALC, kegiatan ALADI lebih ditujukan pada mekanisme liberalisasi bilateral yang fleksibel dalam kerangka preferensi multilateral regional dan membatasi mekanisme liberalisasi multilateral. Dengan demikian masing-masing anggota ALADI dapat mengadakan perjanjian preferensi satu dengan lainnya. Hal ini tentu saja harus sesuai satu sama lain dan juga sesuai dengan preferensi multilateral regional. Kesulitan utama peralihan dari ALALC ke ALADI terletak dalam pemindahan tingkat liberalisasi yang telah dicapai (*patrimonio histórico*) yang harus dirundingkan kembali. Perundingan baru mengenai 12.300 "konsesi lama" yang telah disetujui dalam ALALC, berakhir tahun 1984. Perundingan kerangka yang direncanakan untuk preferensi multilateral regional dimulai Maret 1985, ketika dilaksanakan kembali "perundingan regional" melalui resolusi 42 dari komite wakil tetap. Setelah berlangsung

perdebatan lama mengenai pengembangan hal yang sama, 9 April 1986 ditandatangani Piagam Buenos Aires, dengan tujuan memperbaiki sistem preferensi perdagangan dan bea, berlaku untuk semua negara Amerika Latin. Juli 1986 di Acapulco dikonkretkan isi peraturan selanjutnya. Dalam deklarasi konferensi dewan menteri ALADI yang ketiga Maret 1987 (Montevideo), mereka memperluas hasil-hasil yang telah diformulasikan. Preferensi bea umum yang berlaku sampai sekarang dari 5% menjadi lebih dua kali lipat pada 27 April 1987, tentu saja dengan gradasi yang harus memperhatikan perbedaan besar dari kesebelas negara anggotanya: negara-negara yang tingkat pembangunannya rendah (Bolivia, Ekuador, Paraguay) menyepakati preferensi di antara mereka sebesar 10%, tetapi bagi negara dengan tingkat pembangunan "menengah" hanya 6% dan tingkat pembangunan "tinggi" hanya 4%. Negara-negara "menengah" menyepakati potongan bea sebesar 10%, negara yang kurang berkembang sebesar 14%, sedangkan tiga negara besar hanya 6%. Sebaliknya, negara besar memberlakukan bea sebesar 10% terhadap negara "menengah" 14% dan terhadap negara lemah bahkan sampai 20%. Sejak 1 Januari 1986 telah berlaku *nomenklatura* bea ALADI yang baru.

Organ-organ: dewan menteri luar negeri (organ tertinggi); konferensi untuk pertimbangan dan penyesuaian (perjanjian preferensi yang telah dicapai); komite wakil tetap (organ tetap); dan sekretaris jenderal. Tahun 1981 dibentuk dewan masalah ke-

uang dan mata uang serta komisi penasihat. Tahun 1985 dibentuk greminium koordinasi dan perundingan untuk perundingan regional yang dibagi menjadi lima subkomisi. ALADI mempunyai hak penuh pribadi, fungsioner internasionalnya mempunyai status diplomat (imunitas dan privilese).

Kepustakaan: Integración Latinoamericana 47/1980, 4 (perjanjian pendirian); W. Hummer, "Lateinamerikanische Integrationsorganisation", dlm.: P. Waldmann (ed.), *Politisches Lexikon Lateinamerika*, cet. ke-2, München 1982, hlm. 283 dst.; J.M. Vacchino, "Momentos claves en la historia de ALALC-ALADI", dlm.: *Integración Latinoamericana* 126, 1987, hlm. 26 dst.; W. Hummer, "Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)", dlm.: M. Schweizer/W. Hummer (ed.), *Derecho Europeo*, Buenos Aires 1987, hlm. 264 dst. **wh** **ALALC** (*Asociación Latinoamericana de Libre Comercio*) atau **LAFTA** (*Latin American Free Trade Association*) adalah zone perdagangan bebas Amerika Latin, didirikan Februari 1960 melalui perjanjian Montevideo, dan berlaku sejak Juni 1961; kedudukan di Montevideo. Anggota 11 negara (Argentina, Brasilia, Chile, Meksiko, Paraguay, Peru, Uruguay, sebagai negara pendiri; Ekuador dan Kolombia sejak tahun 1961, Venezuela sejak tahun 1966, Bolivia sejak tahun 1968).

Tujuan: liberalisasi hubungan ekonomi, menghapuskan hambatan bea dan perdagangan antarnegara anggota melalui perundingan periodik mengenai daftar nasional dan daftar bersama produk-produk yang dibebani bea dalam perdagangan dan secara inter-regional sedikit demi sedikit akan dikurangi. Tujuan komersial ALALC dalam waktu 12 tahun

(sampai tahun 1973) harus dipenuhi. Dalam protokol Caracas tahun 1969 disepakati penundaan penyelesaian zone perdagangan hingga tahun 1980. Namun, sejak tahun 1969 tidak ada kemajuan dalam integrasi. ALALC gagal terutama karena negara anggota tidak benar-benar bertujuan melakukan integrasi regional, melainkan di ALALC hanya melihat perjanjian perdagangan multilateral untuk meningkatkan pertukaran barang, dan dengan demikian merupakan instrumen yang mewakili kepentingan nasional. ALALC menguntungkan negara-negara lebih besar di kawasan itu sehingga mendorong negara-negara kecil membentuk kelompok sub-regional yang bertujuan integrasi ekonomi (pembangunan industri bersama). Sebagai organisasi subregional dalam kerangka ALALC tahun 1969 muncul Pakta Andes dan Kelompok La Plata. Agustus 1980 ALALC dibubarkan dan didirikan ALADI.

dn

ALC → OAU.

ALECSO (*Arab League Educational Cultural and Scientific Organization*) Organisasi untuk Pendidikan, Kebudayaan, dan Ilmu Pengetahuan Liga Arab.

ALIDE (*Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras de Desarrollo*) Asosiasi Bank Pembangunan Amerika Latin, didirikan tahun 1968 di Washington, berkedudukan di Lima. Wadah organisasi 138 bank yang aktif dan 21 gabungan lembaga keuangan (1987) dari 24 negara Amerika Latin dan Karibia.

Tugas: membantu dan mengkoordinasi usaha-usaha strategi pem-

bangunan, terutama di bidang pembiayaan pembangunan. *Tujuan:* menggiatkan kerja sama dan integrasi antarnegara anggota dan memperkuat peluang individu dan kolektifnya dalam sistem internasional. ALIDE berhubungan dengan 18 lembaga internasional dari Inggris, Portugis, Spanyol, Yugoslavia, dan Jerman yang membantu pembangunan di Amerika Latin, serta berhubungan juga dengan lembaga keuangan regional lainnya.

mm
alih teknologi Masalah alih teknologi dari negara industri ke negara berkembang telah didiskusikan sejak tahun '60-an dalam kegiatan-kegiatan PBB. Sejak UNCTAD I (1964) telah berlangsung sebuah konferensi mengenai manfaat ilmu pengetahuan dan teknik di daerah yang kurang berkembang. Kemudian, UNCAST menjadi forum pembahasan alih teknologi. Sejak UNCTAD III (1972) masalah alih teknologi menjadi diskusi pokok, dan dalam strategi PBB untuk dasawarsa ketiga (tahun '80-an) ada usaha-usaha bertujuan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi "untuk pembangunan" (Pogram Aksi tahun 1980).

Pengertian alih teknologi berasal dari ilmu proses teknik seperti diajarkan pada bidang *engineering*, menjadi makin penting dalam diskusi-diskusi internasional. Pengertian alih teknologi sekarang adalah setiap pengetahuan teknik yang dipakai atau yang dapat dipakai dan mempunyai nilai ekonomi. Akibatnya, batas antara teknik dan alih teknologi menjadi kabur. Jika berbicara mengenai alih teknologi, yang dimaksud dapat berupa perencanaan, penggambaran,

risalah ilmiah, teknologi yang terrealisasi dalam mesin atau sistem produksi, serta pengetahuan teknik dan pengetahuan organisasi (**know-how*) yang diperlukan untuk menjalankannya. Sekarang ini yang digolongkan sebagai alih teknologi hanyalah pengalihan *know-how* produksi, tetapi bukan *know-how* penggunaan dan pendidikan, meskipun pada pengalihan teknologi tiga bentuk itu berperan penting. Selain itu, alih teknologi berlangsung dalam bentuk terikat dengan produk: mesin merupakan perwujudan teknologi.

Dengan pengecualian beberapa NIB, negara berkembang tidak mampu membuat sendiri teknologi yang dibutuhkannya dalam ukuran yang berarti. Meskipun sejak tahun '70-an makin banyak dilakukan usaha penelitian dan pengembangan dengan orientasi produksi, dan beberapa negara berkembang malah berusaha mengejar ketinggalannya dengan memakai teknologi tinggi yang mahal (teknologi atom, mikro elektronik), tetap saja negara industri memiliki posisi monopol dalam pasar teknologi internasional. Ini terutama dikarenakan negara industri menggunakan 94% anggaran penelitian dunia dan rata-rata memakai 2,24% PNB-nya untuk penelitian (negara berkembang 0,43%; Amerika Latin 0,5%; Afrika 0,36%). Pengeluaran Jerman misalnya untuk penelitian dan pengembangan adalah beberapa kali lipat daripada PNB banyak negara berkembang. Di negara industri untuk 1 juta penduduk ada 2.900 ilmuwan, sedangkan di negara berkembang 121 ilmuwan

(Amerika Latin 251, Afrika 45), hak paten dan lisensi 95% diregistrasi oleh perusahaan-perusahaan yang berkedudukan di negara industri. Berbeda dari negara industri, sedikit sekali perusahaan di negara berkembang ikut ambil bagian dalam penelitian.

Tidak mungkin membangun industri-industri baru tanpa teknologi. Hampir semua negara berkembang sekarang ini menjalankan politik industrialisasi (apa pun jenisnya). Teknologi yang dibutuhkan untuk itu sampai sekrupnya pun masih diimpor. Selain itu terus dipasok teknologi untuk perawatan industri yang sudah ada untuk menambang bahan mentah mineral, untuk sektor pertanian modern, dan untuk barang konsumsi industrial. Pemasokan teknologi ini sebagian besar datang dari negara industri dan bersama impor teknologi lainnya sangat membebani neraca pembayaran. Misalnya, impor barang investasi Brasilia 16%, Meksiko dan Peru 45% dari ekspor keseluruhan (1985). Sampai tahun 2000 diperkirakan negara berkembang mengimpor barang investasi sebesar 250-300 miliar US\$. Selain itu, ada pengeluaran untuk hak paten, *know-how*, merek-merek dagang, konsultasi teknik; untuk itu beberapa NIB telah mengeluarkan beberapa ratus juta US\$ per tahun. Ini semua merupakan ongkos yang akan semakin tinggi jika struktur industri sebuah negara berkembang semakin rumit. Di samping itu, perlu diperhatikan bahwa sebagian besar ekonomi negara berkembang bergantung pada beberapa barang ekspor saja. Hasil ekspor

(karena ketidakstabilan harga bahan mentah di pasar dunia harus tunduk pada gerak naik-turun periodik) membentuk batas kapasitas impor sehingga membatasi impor teknologi. Di masa jatuhnya harga bahan mentah, impor teknologi sering hanya bisa dipertahankan melalui utang yang terus meningkat.

Ketidakmampuan negara berkembang memproduksi teknologi disebabkan berlakunya pembagian kerja internasional dan tipe industrialisasinya. Dalam *export-economy-model* klasik, hasil ekspor bahan mentah dan produksi pertanian membiayai impor barang konsumsi keseluruhan yang ditentukan dan dipakai konsumen lapisan atas saja. Awal abad ini beberapa negara Amerika Latin membangun industri barang konsumsi tertentu yang selama krisis ekonomi dunia dan Perang Dunia II mendapatkan impuls pertumbuhan yang kuat sehingga sebagian besar impor barang konsumsi dapat digantikan produksi sendiri. Namun, sebagai ganti barang konsumsi harus diimpor barang investasi (perlengkapan) untuk pembuatannya. Hampir tidak ada negara berkembang yang sampai kini berhasil mengurangi secara substansial impor barang teknologi demikian melalui barang produksinya sendiri sebab persyaratan untuk itu adalah kemampuan memproduksi teknologi.

Meskipun anak perusahaan transnasional mendominasi seluruh bidang usaha di banyak negara berkembang dan di sana memproduksi memakai teknologi yang sama berkembangnya seperti di negara induk-

nya, tetapi tidak berarti terjadi pembangunan kapasitas penelitian dan pengembangan di negara berkembang maupun memudahkan akses perusahaan setempat ke teknologi modern. Selain itu, hak paten, rahasia perusahaan, dan perjanjian tidak meneruskan pengetahuan yang ditetapkan pihak perusahaan negara industri menghalangi negara berkembang mendapatkan teknologi modern tersebut. Di negara berkembang tidak bisa dibangun kapasitas penelitian dan pengembangan, terutama karena situasi yang lebih menguntungkan untuk teknologi di negara industri. Di sana tidak hanya tersedia cukup banyak tenaga ahli, tetapi negara juga menunjang penelitian industri dan penelitian dasar di universitas. Penelitian berhubungan dengan produksi dalam lembaga penelitian swasta dan nonuniversitas, di samping jaringan sistem informasi dan bank-bank data untuk perusahaan swasta. Semua ini merupakan alasan untuk tidak memindahkan bagian penelitian, pengembangan, dan konstruksi ke negara berkembang. Apa yang menyebabkan negara industri terus-menerus mampu membuat inovasi teknologi, yaitu adanya jaringan erat dan koordinasi antara negara dan lembaga penelitian dan industri sehingga semua yang ikut ambil bagian dengan dana yang besar dapat bekerja saling mengisi, dengan sedikit pengecualian tidak tersedia di negara berkembang. Di negara berkembang jalinan antara penelitian dan produksi sedikit, negara tidak mampu melakukan perencanaan dan koordinasi; perusahaan nasional tidak bersedia membangun

sarana penelitian dan pengembangan (karena ini merupakan investasi berisiko, tidak bisa diketahui sebelumnya, apakah akan membawa hasil, lagipula teknologi dapat diperoleh dengan murah dan cepat di pasar dunia). Perkembangan konsep dan instrumen politik teknologi di kebanyakan negara berkembang masih berada di tahap awal; politik teknologi terbentur keterbatasan anggaran. Beberapa NIB walaupun demikian berhasil meluaskan kapasitas kelembagaannya dan kemampuan pengendalian operatifnya dalam bidang politik ini. Politik teknologi sub-regional dikonsepsikan dalam rangka Pakta Andes, tetapi proyek integrasi keseluruhan tersebut mengalami kemacetan akibat krisis ekonomi dunia. Meskipun demikian usaha politik teknologi telah menguatkan posisi permintaan banyak negara berkembang di pasar internasional. Masalah dampak teknologi ke lingkungan tetap saja kurang diperhatikan.

Sebuah *trend* makin parahnya ketergantungan teknologi berasal dari peningkatan besar impor persenjataan, di negara berkembang rata-rata meliputi 7% impornya. Pembangunan bidang teknik yang diperlukan untuk sistem persenjataan modern (produksi komplementer, *service* industri, infrastruktur) paling baik akan menghasilkan kapasitas impor yang sangat dibutuhkan dan paling buruk akan memindahkan titik berat kegiatan ekonomi sehingga mendeformasi struktur ekonomi (industrialisasi yang diinduksi secara militer). Dalam semua usaha mensubstitusi impor senjata, tidak muncul efek pengaitan

antara industri persenjataan yang tidak padat karya dan khusus dengan bidang produksi sipil. Beberapa negara berkembang berusaha menyeimbangkan kerugian ini melalui ekspor senjata di jalur Selatan-Selatan. Kini 2% produksi dunia untuk sistem persenjataan besar sebagai produksi lisensi, berasal dari negara berkembang; diramalkan teknologi persenjataan modern akan meluas.

Teknologi negara industri, sipil maupun militer, tidak memperhatikan sumber daya dan faktor spesifik di negara berkembang karena persenjataan memang dikembangkan untuk situasi kurang tenaga kerja secara relatif dan sekaligus tersedia modal. Padahal negara berkembang tanpa kecuali menghadapi masalah pengangguran struktural yang tinggi dan kurang modal. Selain itu, teknologi negara industri untuk pasar-pasar besar; kapasitasnya jarang digunakan di negara berkembang sehingga produksinya mahal. Teknologi tepat guna yang bisa mengatasi masalah ini hampir tidak ada. Kurang dari 1% anggaran ilmu pengetahuan dunia dipakai untuk pengembangan. Tidak diperhitungkan bahwa dalam waktu dekat situasi negara berkembang dapat memproduksi sendiri teknologi yang sepadan. Masalah yang harus terlebih dahulu dipecahkan adalah menciptakan kemampuan asimilasi untuk teknologi dari negara industri. Namun, hal ini pun mensyaratkan suatu perubahan yang mendasar dalam sistem pendidikan (pendidikan untuk teknisi, tenaga terampil, insinyur), pembangunan jalinan antar-lembaga yang mampu mendata in-

formasi mengenai perkembangan teknologi dan menyediakannya untuk semua pihak, serta melakukan perubahan beberapa daerah khusus di beberapa negara berkembang (penyesuaian, penyesuaian).

Kepustakaan: K.W. Menck/S. Greif, *Technologietransfer in Entwicklungsländer*, München 1979; H. Wulf, *Rüstungsimport als Technologietransfer. Die negativen Auswirkungen von Rüstungsimporten auf die Industrialisierung in Peripherieländern*, München, London 1979; L. Brock, *Entwicklung mit Hacke und Schaufel? Zum Problem der Angemessenheit von Technologien für die Länder der Dritten Welt*, *Technologie und Politik*, vol. 5, 1980; A.W. Heston/H. Pack (ed.), *Technology Transfer: New Issues, New Analysis*, Philadelphia 1981; *North-South Technology Transfer: The Adjustments Ahead. Analytical Studies*, OECD Document Series, Maret 1982; B.A. Lucas/S. Freedman (ed.), *Technology Choice in Developing Countries: Internal and External Constraints*, Dublin 1983; SIPRI, *Waffenproduktion in der Dritten Welt*, Reinbek 1986; K.W. Menck, "Technologietransfer deutscher Unternehmen in Entwicklungsländern", dlm.: *APuZ*, vol. 33/34, 1987, hlm. 35 dst.

dd aliran Chicago → monetarisme.

Aljazair Lama menjadi model pembangunan dan menonjol karena berhasil memanfaatkan sumber daya (minyak bumi) untuk pembangunan nasionalnya sekaligus melakukan industrialisasi dan revolusi pertanian. Perdagangan luar negeri, hubungan antara elemen disosiatif dan asosiatif (integrasi ke pasar dunia) terbukti dapat dijadikan model. Namun, masalah pembangunan yang dihadapi Aljazair kini telah menimbulkan keraguan terhadap model pembangunan Aljazair tersebut.

1. Republik Demokrasi Rakyat Aljazair (luas 2,8 juta km²) adalah negara kedua terbesar di Afrika. Sekitar 2 juta km² (85%) wilayahnya

merupakan daerah Sahara Oasis dan Saoura yang hampir tidak ada tumbuhan dan hanya sekitar 288.710 km² di utara merupakan daerah subur. Aljazair kaya akan kekayaan alam: minyak bumi, gas bumi, fosfat, batu bara, timah, tembaga, garam, dan tambang-tambang yang belum digali seperti wolfram, bauksit, mangan, dan uran.

Di selatan, daerah gurun pasir, pada oase terdapat perkebunan kurma tradisional dan bergantung pada kemungkinan pengairannya. Selain itu, ada juga amandel, jeruk, dan sayuran. Daerah padang rumput dimanfaatkan untuk peternakan berpindah (nomad): domba, kambing, sapi, dan unta. Daerah pantai dan daerah hutan dipengaruhi iklim Laut Tengah yang memungkinkan bertanam anggur, jeruk, zaitun, sayuran, dan gandum (daerah produksi pangan hanya mencakup 3% luas negara). Hutan-hutan (1% merupakan semak-semak) saat ini ditanami secara terencana untuk mencegah erosi. Produk-produk pertanian sangat sedikit diekspor (kurang dari 10% ekspor) karena terbatasnya bahan pangan, kecuali anggur, jeruk, dan kurma. Sektor pertanian di Aljazair sejak dulu menjadi basis kegiatan ekonomi karena sekitar 70% penduduk bergantung pada sektor pertanian; sumbangan sektor pertanian terhadap PNB hanya 8%. Usaha produksi semakin penting karena adanya politik industrialisasi yang dipaksakan; kontribusinya dalam PNB adalah 12% setelah pertambangan (36% tahun 1985), tetapi sejak beberapa tahun mengalami stagnasi.

2. Penyebaran penduduk tidak merata, bergantung pada jenis pertanian yang dikelola. Di utara hanya terdapat 15% lahan pertanian terkonsentrasi 95% penduduk, sedangkan di daerah gurun pasir hanya hidup 5% penduduk. Kepadatan penduduk di utara adalah 62 jiwa/km² dan sekitar 0,5 jiwa/km² di selatan. Laju pertumbuhan penduduk Aljazair termasuk tinggi di dunia (tahun 1989: 3,0%/tahun). Jumlah penduduk meningkat dari 2,8 juta (1876) menjadi 11,9 juta (1965). Walaupun lebih dari 1 juta orang Perancis-Aljazair meninggalkan negeri ini setelah berakhirnya perang Aljazair, jumlah penduduk meningkat menjadi 16,3 juta (1974) dan 24 juta (1989).

Aljazair menunjukkan tingkat urbanisasi yang tinggi (tahun 1989: 51%). Pusat ekonomi dan politik Aljazair adalah ibu kota Aljir dengan penduduk 1.483 juta jiwa. Hampir separo penduduk berumur di bawah 15 tahun (tahun 1989: 44%). Dengan perluasan pelayanan kesehatan, walaupun masih ada kesenjangan kota-desa, perbandingan dokter per penduduk semakin baik (dari 1:30.600 tahun 1965 menjadi 1:2.340 tahun 1984). Sejak tahun 1974 tidak dipungut bayaran untuk pelayanan kesehatan. Setelah merdeka dan orang Perancis-Aljazair kembali ke Perancis (tahun 1966 hanya tersisa 64.000 orang), etnis, bahasa, dan agama penduduk menjadi seragam. Sebagian besar penduduk (80%-90%) berbahasa Arab, hanya 10%-20% berbahasa dialek Barbar. Bahasa Perancis sebagai warisan kolonial masih digunakan sebagai bahasa pen-

didikan dan perdagangan. 95% penduduk beragama Islam Suni (mazhab Maliki).

3. Setelah tahun 1830 Aljazair dikuasai Perancis, orang Islam Aljazair terusir dari daerah pemukiman mereka. Dengan pembangunan pemukiman koloni Eropa (*colons*), negeri ini dimasukkan ke dalam Perancis. Setiap perlawanan ditindas secara militer. Sementara sebagian orang Aljazair Islam, terutama lapisan penduduk kota yang dididik secara Perancis, menghendaki politik asimilasi dengan jalan damai (Benjellul, Ferhat Abbas), sebagian lagi menempuh jalan radikal karena sikap kolonial yang kejam. Nasionalisme Aljazair mewakili garis sosial-revolusioner yang keras—a.l. didukung lapisan bawah kota—dan menuntut kemerdekaan politik Aljazair secara penuh (wakilnya: Messali Hadj dan *etoile nord-africain*, M TLD/*Mouvement pour le Triomphe des Libertes Democratiques*, Gerakan untuk Kemenangan Kebebasan Demokrasi). Sikap kejam Perancis di Aljazair akhirnya menimbulkan pandangan bahwa nasionalisme harus diperjuangkan dengan senjata untuk melawan sistem kolonial yang represif. Perjuangan kemerdekaan Aljazair mulai 1 November 1954 dan diorganisasi oleh sayap nasional MTLA (Ben Bella, Khider, Ahmed). Kaum nasionalis yang tergabung dalam front pembebasan nasional sebagai organisasi perjuangan politik dan militer berhasil memperjuangkan kemerdekaan Aljazair (1962) dalam perundingan Evia. Semua ini tercapai berkat keberhasilan mereka memobilisasi

massa pedesaan yang sebelumnya pasif. Setelah mereka melakukan perang gerilya semakin mendapat solidaritas internasional, walaupun ada keunggulan militer pasukan kolonial Perancis.

4. Tuan tanah kolonial di masa kekuasaan Perancis mengkhususkan diri dalam ekspor hasil-hasil pertanian (anggur, jeruk, kayu gabus) yang mendapat prioritas di pasar Perancis, sementara Perancis sendiri memasok barang konsumsi, kebutuhan mesin, dll.; petani kecil Aljazair Islam yang terdesak hanya memproduksi dalam ekonomi subsistensi (391.000 petani memiliki kurang dari 10 ha tanah dan 480.000 buruh tani), berhadapan dengan sektor ekspor pertanian modern (2,8 juta ha). Sering mereka bekerja dengan menerima upah mimi dari tuan tanah kolonial sehingga menciptakan tambahan keuntungan ongkos bagi tuan tanah. Setelah merdeka, proyek pertama pemerintah Ben Bella adalah transformasi sistem pertanian kolonial ke sistem produksi yang sesuai dengan kepentingan nasional: bekas tanah *colon* dikuasai pemerintah dan diubah menjadi sektor sosial dengan memberi petani hak mengelola. Tanah milik pribadi yang kualitas tanahnya cocok untuk pertanian tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Beberapa hal seperti usaha-usaha pertanian yang tidak menguntungkan karena dikelola masyarakat sendiri, terlalu banyak menampung veteran perang dalam usaha pertanian tersebut, menyebabkan terjadi stagnasi produksi pertanian sehingga tahun 1970/1971 dilakukan revolusi pertanian kedua. Kali

ini titik berat pada modernisasi sektor pertanian tradisional dengan tujuan meningkatkan produksi melalui pembagian tanah dan pengembangan koperasi yang menggunakan teknik produksi baru (termasuk pupuk dan bibit). Penggantian Ben Bella oleh Boumedienne mengubah strategi pasca-kolonial. Strategi itu lebih tertuju mempercepat industrialisasi dengan meningkatkan potensi produksi secara maksimal dengan dasar perencanaan ekonomi dan rencana pembangunan melalui: a. penggunaan teknologi termmodern agar sampai tahun 1990 dapat merealisasi peralihan menjadi masyarakat industri; b. mendorong perkembangan industri yang produknya merupakan masukan untuk sektor pertumbuhan lain (*industries industrialisantes*). Sektor pokok strategi ini adalah industri berat (produksi baja), tetapi pengolahan hasil pertanian dalam negeri, bahan mentah (sebagai pupuk) dan minyak bumi tetap diutamakan; c. mendirikan perusahaan nasional baru (*Sociétés Nationales*) dan nasionalisasi semua perusahaan penting, seluruh pertambangan dan industri minyak bumi; yang terakhir ini sangat penting terutama untuk mengendalikan proses pembangunan dan pertumbuhan perekonomian keseluruhan sesuai dengan kepentingan nasional melalui penerimaan dari minyak.

Kelemahan model pembangunan Aljazair mulai terlihat di akhir tahun '70-an. Jatuhnya harga minyak setelah tahun 1981 menguatkan *trend* tersebut, terlihat dengan pembengkakan utang luar negeri Aljazair menjadi 23,6 miliar US\$ (1989). Setelah

kematian Presiden Boumedienne yang digantikan oleh Benjedid (dipilih menjadi presiden Februari 1979), dilakukan reformasi ekonomi yang berjalan lambat tetapi semakin jelas. Isi utama reformasi ekonomi adalah restrukturisasi perusahaan negara yang tidak efisien sekaligus memberlakukan desentralisasi, liberalisasi perdagangan luar negeri, memperkuat sektor swasta, dan reformasi koperasi pertanian. Secara keseluruhan rencana pembangunan nasional itu positif, walaupun ada paksaan reformasi. Setelah awal perencanaan sejak tahun 1962, mulai tahun 1968 direncanakan secara intensif: rencana pembangunan tiga tahun—tahun 1967–1969 (pra-perencanaan); tahun 1970–1973 rencana pembangunan keempat pertama; tahun 1974–1978 rencana pembangunan keempat tahun kedua; tahap peralihan tahun 1978–1979; kemudian rencana pembangunan lima tahun pertama tahun 1980–1984 (investasi sebesar 400 miliar DA, sekitar 40% untuk sektor industri); dan rencana pembangunan lima tahun kedua tahun 1985–1989 (prioritas sektor industri dan bangunan). Penting untuk mengurangi peranan perencanaan dalam sistem ekonomi adalah penghapusan departemen perencanaan November 1987.

5. Deformasi struktur sosial akibat penjajahan Perancis selama 130 tahun sangat berat untuk diatasi kembali dalam waktu singkat. Namun, arah pembangunan yang diambil setelah merdeka membawa perubahan-perubahan tersendiri (misalnya, perbedaan pendapatan menurut cabang industri dan kualifikasi),

yang mengakibatkan bertambahnya ketimpangan pendapatan dan terbentuknya kelas negara yang mempunyai privilese. Mereka itu a.l. para teknokrat dalam pemerintahan dan perusahaan-perusahaan negara. Di bidang kesehatan terlihat keberhasilan sejak tahun 1962. Rakyat Aljazair selama masa penjajahan tidak mendapat pendidikan, dan ketika merdeka sekitar 80% tenaga pengajar meninggalkan negara ini. Besarnya investasi di bidang pendidikan dan datangnya tenaga pengajar baru dari Perancis telah memperbaiki situasi di sekolah-sekolah dan universitas. Prioritas untuk pendidikan terlihat dalam anggaran pembangunan tahun 1988 (18%). Masalah yang tetap ada: a. wajib sekolah di daerah pedesaan masih belum terwujud secara penuh; b. rendahnya anak perempuan yang disekolahkan dan sedikitnya murid perempuan di semua jenis sekolah. Tingkat penduduk yang buta aksara tahun 1982 di atas 90%, dapat ditekan menjadi sekitar 40% tahun 1987, a.l. disebabkan langkah-langkah untuk mendidik orang dewasa. Untuk pendidikan tidak dipungut bayaran dan ditunjang oleh program beasiswa dari pemerintah. Di daerah padang pasir ada banyak pusat pendidikan yang dilengkapi asrama-asrama. Revolusi kebudayaan yang dimulai tahun '70-an diperkuat dengan propaganda nilai-nilai Islam dan Arab, bertujuan menggantikan bahasa Perancis yang digunakan sebagai bahasa pengajaran dengan bahasa Arab (proses arabisasi ini mendapat tantangan dari barbarisme orang Barbar sejak awal

tahun 1980). Pengaruh kebudayaan, teknik, dan ilmu pengetahuan Perancis hingga sekarang secara *de facto* tidak terpatahkan, a.l. karena adanya program pertukaran mahasiswa yang intensif, Perancis sebagai bahasa dalam buku-buku pelajaran, tingginya jumlah buruh tamu Aljazair di Perancis (tahun 1987 sekitar 300.000) dan kuatnya orientasi perdagangan luar negeri ke Perancis: sekitar 50% impor dari ME (tahun 1987 sekitar 50% dari impor keseluruhan) berasal dari Perancis.

6. Perkembangan politik dalam negeri ditentukan oleh Partai Persatuan Aljazair (FLN/*Front de Liberation Nationale*, Front Nasional Bebas) dan Tentara Rakyat Nasional ANP/*Armee Nationale Populaire* (bekas tentara pembebasan) sebagai pengawal revolusi Aljazair. Ketika Ben Bella, sejak tahun 1962, menjadi presiden mencoba mengurangi pengaruh politik ANP, ia dipecat melalui kudeta Juni 1965 oleh Boumedienne yang menjabat ketua ANP dan menteri pertahanan. Setelah rencana ekonomi makin diterima, tahun 1967 terlihat konflik internal FLN yang memecah pengikut FLN ke dalam dua kubu: satu kelompok yang condong pada sosialisme Aljazair dengan warna Islam dan kelompok-akhirnya menang-militer serta teknokrat dipimpin Boumedienne sebagai kader dan lapisan privilese yang mengendalikan politik industrialisasi. Pengeksekutif Piagam Nasional tahun 1976 setelah berlangsung kampanye perdebatan yang luas, plebisit dan pemilihan umum tahun 1976-1977 (yang pertama kali sejak kudeta

tahun 1965) memperlihatkan arah kemudi Boumedienne, yaitu sosialisme revolusioner. Selain itu, berlaku undang-undang baru dan Islam sebagai agama resmi. FLN sebagai partai persatuan dan politik luar negeri yang netral, tetapi condong ke kubu sosialis. Setelah Boumedienne meninggal (Desember 1978), penggantinya, Kolonel Chadli, menjalankan politik liberalisasi yang berhati-hati tanpa mempertanyakan sifat otoriter rezim. Sifat otoriter ini tidak dapat disembunyikan walaupun ada usaha meningkatkan bobot Piagam Nasional tahun 1986 dan diizinkan organisasi hak asasi manusia tahun 1987; hal ini terlihat dalam analisis undang-undang organisasi yang baru tahun 1987. Huru hara Oktober 1988 (berita tak resmi menyatakan 400–500 orang tewas) kelihatannya mendorong usaha reformasi sistem politik (tanggung jawab pemerintah di muka parlemen, Referendum tahun 1988). Kesulitan-kesulitan ekonomi yang dihadapi negara itu mendorong menguatnya kelompok Islam. FIS (*Front Islamique du Salut* = Front Penyelamatan Islam) memenangkan ronde pertama pemilihan parlemen 26 Desember 1991. Namun, FIS tidak berhasil maju terus dengan campur tangan militer dalam proses demokratisasi Januari 1992 dengan alasan menghindari terjadinya perang saudara. Pemilu kemudian dibatalkan, FIS dilarang dan Mohammed Boudiaf, yang hidup di pengasingan di Maroko sejak tahun 1964 karena beroposisi dengan FLN, dipilih menjadi Ketua Dewan Negara. Boudiaf yang berada di tengah kancah per-

tarungan antara kelompok FIS dan FLN serta mengkampanyekan anti-korupsi, tertembak 29 Juni 1992. Ali Kafia yang mempunyai pandangan tidak berbeda dengan Boudiaf kemudian terpilih sebagai Ketua Dewan Negara.

7. Aljazair dalam tahap pasca-kolonial telah berhasil meletakkan dasar untuk mengatasi struktur kolonial. Industri, sebelumnya kurang menonjol, bersama dengan sektor minyak bumi dan bangunan telah menjadi cabang perekonomian yang pertumbuhannya tinggi. Akumulasi di-kendalikan birokrasi pemerintah—terlihat tidak efektif—dibagi dalam rencana pembangunan jangka panjang. Masalah berat yang ada seperti sebelumnya adalah pertumbuhan penduduk yang cepat di atas tanah terbatas. Rendahnya kesempatan kerja di pedesaan dan birokrasi berlebihan, memerlukan perluasan industri yang dapat mengurangi pengangguran generasi muda. Hasil-hasilnya berguna terutama untuk meningkatkan produksi di sektor pertanian.

Kepustakaan: H. Elsenhans, *Frankreichs Algerienkrieg 1954–1962*, Berlin 1974; T. Kozinowski/H. Mattes (ed.), *Nahost-Jahrbuch 1987*, Opladen 1988; W. Fieck, *Algerien. Die wiedergewonnene Würde*, Hildesheim 1987; H. Hubel (ed.), *Nordafrika in der internationalen Politik*, München 1988; H. Mattes, *Wirtschaftsreform, staatlicher Sektor und Privatisierungsdebatte im Maghreb*, Hamburg 1988; Bambang Bujono, "Presiden yang menciptakan musuh", dlm. *Tempo* no. 19, th. XXII, 11 Juli 1992; Hanspeter Mattes, "Algerien-Demokratie oder Kalifat?", *General Anzeiger* 23 Januari 1992, dlm. *BMZ-Spiegel der Presse*, 3/92, hlm. 86.

hpm

Allende Gossens, Salvador Presiden Republik Cile tahun 1970–1973, adalah presiden marxis pertama di

dunia yang muncul melalui pemilihan umum. Kemenangannya serta program revolusinya telah memberikan rangsangan baru untuk teori sosialis. Lahir 27 Juli 1908 di Santiago de Chile, studi kedokteran di universitas Cile, tetapi hampir tidak pernah membuka praktek karena aktif di bidang politik. Berasal dari keluarga borjuis, bergabung dengan kelompok humanis gerakan sosialis, segera memainkan peran penting. Ia menjadi salah seorang pendiri Partai Sosialis Cile (1933) dan tahun 1937 mendapat mandat parlemen pertama untuk partainya. Tahun 1939 menjadi menteri kesehatan dalam pemerintahan front rakyat. Sejak tahun 1945 menjadi anggota senat sampai terpilih menjadi presiden tahun 1970. Tahun 1967 terpilih menjadi presiden senat. Sejak tahun 1952 mencalonkan diri untuk pemilihan presiden. Tahun 1970 kemenangannya sebagai calon dari Persatuan Rakyat tidak hanya mengejutkan lawan politik dan publik dunia, melainkan juga sebagian kawan-kawan politiknya.

Jalan Cile menuju sosialisme gagal akibat kudeta militer 11 September 1973.

Allende bukanlah seorang teoretisi seperti dikatakan Regis Debray. Ia merupakan seorang praktisi dan kontradiktif, disadarinya sebagai bagian hidupnya dan menamakan dirinya sebagai pejuang anti-imperialis dan revolusioner. Kematianya bagi dunia bukan merupakan simbol kegagalan, melainkan menjadi harapan yang tertanam kuat dalam sejarah Cile dan budaya politik negeri ini (tokoh panutannya adalah Presiden

Balmaceda, yang dipaksa bunuh diri oleh kaum oligarki tahun 1891).

Kepustakaan: R. Débray/S. Allende, *Der chilenische Weg*, Neuwied 1972; D. Nohlen, *Feuer unter der Asche*, Baden-Baden 1974.

dn

Alliance for Progress Aliansi untuk Kemajuan, konsep pemerintah AS semasa Presiden Kennedy tahun 1961, sebagai program pembangunan untuk Amerika Latin demi mencegah revolusi selanjutnya di kawasan tersebut setelah Castro menang di Kuba. Agustus 1961 di Punta del Este seluruh negara anggota *OAS, kecuali Kuba, menandatangani Deklarasi untuk Rakyat-Rakyat Amerika dan Piagam Aliansi untuk Kemajuan. Tujuan Aliansi untuk Kemajuan yang dicanangkan dalam waktu 10 tahun a.l. memperkuat lembaga-lembaga demokratis, mempercepat pembangunan sosial dan ekonomi serta *integrasi Amerika Latin, mendorong perusahaan swasta menghidupkan perekonomian, *reformasi pertanian, perbaikan sektor pendidikan, persyaratan kerja dan bidang kesehatan, menaikkan pajak untuk pendapatan tinggi. AS menjanjikan "revolusi damai yang penuh harapan" (Kennedy) dengan memberikan bantuan sejumlah miliar US\$. Aliansi ini di kalangan OAS menyebabkan berlangsungnya reformasi organisatoris (menaikkan tingkat pendidikan fungsioner OAS, wewenang, dan perluasan sumber daya *CIES).

Ekonomi Aliansi ini menjadi alat penetrasi AS ke Amerika Latin; sampai tahun 1969 telah berlangsung transaksi 2 miliar US\$ antara AS dan Amerika Latin. Dalam politik hanya menjadi retorika supra-

struktur untuk stabilisasi sistem yang langsung menghadapi gerakan revolusioner. Dari program reformasi semula, pada pertemuan presiden antarnegara Amerika (1967) hanya tersisa tuntutan untuk integrasi ekonomi kawasan ini. Dua tahun kemudian Aliansi ini dikubur diabaikan.

Kepustakaan: J.W. Nystrom/N.A. Haverstock, *The Alliance of Progress*, Princeton 1966; F.G. Gil, *Latin American United States Relations*, New York 1971; A.F. Lowenthal, "Strukturwandel in den interamerikanischen Beziehungen", dlm.: *Europa Archiv* 16, 1980, hlm. 509 dst.

vgl

amnesty international (ai) Organisasi bantuan untuk tahanan, didirikan tahun 1961, kedudukan (sekretariat internasional) di London; mempunyai seksi-seksi nasional di 47 negara, anggotanya tersebar di 150 negara. Tugas: memperjuangkan hak asasi manusia di dunia; melindungi tahanan politik dan pelarian politik; penyelidikan mengenai jumlah tahanan politik dan situasi tahanan; menyebarkan informasi; dan mengorganisasi petisi. *Pembiayaan*: sebagai organisasi yang mempunyai anggota, ai dibiayai oleh anggota-anggotanya. Penerimaan dan pengeluaran diumumkan setiap tahun.

Prinsip dasar ai adalah tidak bergantung secara politik maupun keuangan. ai tidak mengambil posisi dalam pertikaian ideologi dan tidak mendukung atau memusuhi partai atau agama. Dasar kerja ai adalah apa yang disebut adopsi tahanan politik oleh kelompok anggotanya yang menulis surat kepada pemerintah-pemerintah dan meminta agar mereka dibebaskan. ai mengadopsi tahanan politik yang tidak menggunakan ke-

kerasan dan tidak menganjurkan kekerasan dalam perjuangannya. ai juga menentang penyiksaan dan hukuman mati serta memperjuangkan proses pengadilan yang adil. Sejak tahun 1973 melakukan kampanye untuk menghapuskan penyiksaan; tahun 1978: laporan khusus dengan tema hukuman mati. ai memiliki status penasihat di ECOSOC serta diakui UNESCO, OAS, OAU, dan Dewan Eropa. Laporan ai 1989: 2.229 tahanan di 34 negara telah dieksekusi, sementara 2.826 tahanan divonis hukuman mati.

Setiap kelompok ai merupakan bagian dari struktur nasional dan internasional; mereka hadir di setiap pertemuan dewan internasional yang berlangsung dua tahun sekali untuk menyepakati program dan politik tahun berikutnya. Dewan memilih komite eksekutif internasional yang bersama sekretaris jenderal berwenang untuk tugas harian di sekretariat internasional dan untuk proses pengambilan keputusan. Tahun 1987 ada 47 seksi nasional, 3.863 kelompok adopsi di 51 negara serta lebih dari 700.000 anggota, klien, dan pendukung di 154 negara. ai telah mengadopsi 3.534 tahanan politik yang tidak menggunakan kekerasan. Jumlah kasus yang baru diangkat adalah 1.128 dan jumlah tahanan yang dilepaskan 1.689 orang. Kepustakaan: N. Brieskorn, "amnesty international", dlm.: *APuZ Politik und Zeitgeschichte. Beilage zur Wochenzeitung "Das Parlament"*, Bonn B49/88; L.A. Müller, *Betriff: Amnesty International*, München 1989.

dn

AMREF (African Medical and Research Foundation) Yayasan Kedokteran dan Penelitian Afrika, berdiri

1958, melakukan kerja sama dengan aparat kesehatan di negara berkembang, memberi bantuan kesehatan dan bekerja sama dengan banyak LSM di Afrika Timur. *Tujuan:* menciptakan basis pelayanan kesehatan yang dapat memenuhi kebutuhan di sana. Langkah-langkahnya: *Flying Doctor Service*, klinik berjalan, pendidikan kesehatan, pendidikan dasar dan lanjut tenaga pembantu setempat, serta penelitian obat-obatan untuk daerah tropis.

ah
analisis biaya-hasil → *cost benefit analysis*.

analisis risiko politik Dalam bidang konsultasi politik membantu membuat perkiraan mengenai dampak politik, a.l. melalui perspektif kerja sama ekonomi dengan Dunia Ketiga. Sebagai ganti penilaian risiko keuangan secara ekonomi murni, analisis risiko politik dengan bantuan suatu spektrum metodik yang luas (mulai dari bantuan pengambilan keputusan yang sederhana sampai ke simulasi komputer yang rumit) berusaha menganalisis pengaruh politik yang menghambat, menghalangi atau merugikan perusahaan asing. Tentu saja untuk mendefinisikan "risiko" secara tepat, dibedakan antara risiko makro (perkiraan mengenai situasi politik setiap negara, kerusuhan dalam negeri, pengambilalihan kekuasaan, revolusi, perang) dan risiko mikro (perkiraan dampak sebenarnya atas perusahaan multinasional atau bank, melalui perubahan situasi politik negara sasaran atau negara nasabab). → Asuransi Hermes.

Kepustakaan: D. Ruloff, "Politische Risiko-Analyse und Dritte Welt: zu Begriff, Metho-

den, Theorien und empirische Resultaten", dlm.: PVS 28, 1987, hlm. 259 dst.

fg
ANC (African National Congress) Organisasi nasionalis di Afrika Selatan yang didirikan tahun 1912 di Bloemfontein. Sejak tahun 1960 dilarang di Afrika Selatan, tetapi terus aktif sebagai gerakan perlawanan, dan telah diizinkan kembali sejak tahun 1990. ANC tidak menganggap dirinya sebagai partai, melainkan sebagai gerakan nasional yang dapat merangkul manusia dari seluruh golongan dan warna kulit, dengan tujuan bersama, yaitu meruntuhkan pemerintahan minoritas kulit putih di Afrika Selatan, menghapus *apartheid*, dan mendirikan sosialisme demokratis.

OAU mengakui ANC sebagai wakil rakyat Afrika Selatan. Kedu-dukan ANC di pengasingan adalah di Lusaka/Zambia, dipimpin Oliver Tambo, sejak tahun 1967 menjadi Presiden ANC. Pemimpin ANC sebenarnya adalah Nelson Mandela yang berada dalam tahanan di Afrika Selatan lebih dari 25 tahun, dan di-bebasikan tahun 1990. Di samping strategi ANC yang lama, yaitu kegiatan bawah tanah, perjuangan bersenjata dan mobilisasi politik, belum lama ini muncul kegiatan diplomasi yang aktif di luar Afrika Selatan dengan wiraswastawan, politisi, ilmuwan, dan fungsioner olahraga Afrika Selatan. Tujuan minimal ANC yang pada mulanya menginginkan transformasi sosialis menyeluruh untuk perekonomian Afrika Selatan, sekarang telah berubah menjadi keinginan melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan pertambangan besar dan monopoli bank-

bank dalam sistem perekonomian campuran. Program ideologi ANC adalah *Freedom Charta* yang disahkan tahun 1955.

ANC memiliki kantor di London, New York, dan berbagai negara.

ajh

Angola Republik Rakyat, secara potensial termasuk negara kaya di Afrika. Akan tetapi, kerusakan di dalam negeri yang disebabkan penyeretan Afrika bagian selatan ini ke dalam konflik Timur-Barat, pendudukan organisasi gerilya UNITA (*Uniao Nacional para Independencia Total de Angola*, Uni Nasional untuk Kemerdekaan Penuh Angola) oleh Afrika Selatan dan AS serta kesulitan ekonomi yang dihadapinya, menyebabkan Angola hanya mempunyai kesempatan terbatas untuk berkembang. Setelah dibuat perjanjian perdamaian antara Angola, Afrika Selatan, dan Kuba Desember 1988, masa depan negara ini juga bergantung pada keberhasilan reformasi politik dalam negeri terencana (mengatasi sentralisasi, birokratisasi, pengendalian ekonomi, lemahnya koordinasi dan disiplin, meluasnya korupsi).

1. Angola, termasuk enklave Cabinda, memiliki luas 1.445.700 km². Iklimnya yang menguntungkan, sumber daya air dan tanah yang dapat ditanami, merupakan situasi yang baik untuk mengembangkan pertanian (kacang polong, kacang tanah, jawawut, ubi kayu). Ada juga kekayaan bumi, terutama intan, minyak bumi, dan bijih besi.

2. Penduduk Angola tahun 1989 berjumlah 10 juta jiwa dengan ke-

padatan 7,4 jiwa/km². 90% rakyatnya terdiri atas orang Afrika, suku-suku Bantu dengan bahasa tersendiri; bahasa resmi dan bahasa sehari-hari adalah bahasa Portugis. Sekitar 2/3 penduduk beragama Kristen, terutama Katolik; selebihnya agama-agama tradisional. Sebagian besar penduduk hidup dari kegiatan pertanian (*ekonomi subsistensi). Di tahun-tahun terakhir ini terdapat perubahan besar dalam struktur kependudukan karena arus pengungsi (→ pengungsi) keluar akibat konflik militer yang terus berlangsung dan urbanisasi. Tingkat buta aksara sejak kemerdekaan telah berhasil dikurangi banyak: tahun 1985 berjumlah 59%, berarti 26% lebih sedikit dibandingkan tahun 1975.

3. Angola yang ditemukan tahun 1482 merupakan pemasok budak ke Portugis, terutama untuk dikirim ke Brasilia. Kolonisasi Angola secara intensif dan "penjinakan" rakyat Angola yang melawan sampai akhir Perang Dunia I, berlangsung terutama setelah Perang Dunia II. Orang Portugis membangun perkebunan kopi, kapas, serat sisal, dan tebu, serta mengeruk bahan mentah dari Angola. Di negara jajahan ini, ketika hak milik pribadi hampir tidak dikenal, setiap kekayaan yang tidak dikuasai perorangan menjadi milik pemerintah kolonial Portugis; sampai tahun 1962 sistem kerja paksa masih dipertahankan. Produk pertanian dibeli secara paksa dari orang Afrika. Angola merupakan pasar yang dilindungi untuk barang jadi Portugis berdasarkan suatu sistem kontrol harga dan impor. Menurut doktrin Kesatuan

Luso-Afrika, Angola secara politik, ekonomi, dan sosial merupakan bagian dari Portugis, dan struktur sosial Afrika dihancurkan sama sekali. Perjuangan pembebasan sejak tahun 1961 memaksa pemerintah Portugis melaksanakan reformasi terutama di bidang pendidikan dan ekonomi: Angola dibuka untuk investasi negara-negara Barat; politik diversifikasi di sektor pertanian telah meningkatkan produksi, tetapi juga menimbulkan proletariat desa dengan adanya buruh pengembara, terutama dari daerah Ovibundu. Politik pemukiman dipaksakan (transmigrasi paksa sekitar satu juta manusia dijadikan pagar betis menghadapi serangan gerakan pembebasan); asimilasi dipropagandakan untuk tujuan politik kemasyarakatan. Perkembangan cepat industri menimbulkan arus urbanisasi (meningkatkan penduduk Luanda dua kali lipat antara tahun 1960 dan tahun 1970) dan meningkatnya penduduk Portugis (dua kali lipat antara tahun 1961 dan tahun 1974). Pelaksanaan proses dekolonisasi setelah revolusi Portugis tahun 1974, berarti berakhirnya kolonialisme "yang direformasi" ini.

4. Usaha pembebasan Angola dari cengkeraman kekuasaan kolonial Portugis dilakukan terutama oleh tiga gerakan pembebasan: di utara beroperasi FNLA (Front Pembebasan Nasional Angola) dipimpin H. Roberto yang secara militer kuat, tetapi secara politis kurang terorganisasi; MPLA (*Movimento Popular de Libertacao de Angola*, Gerakan Rakyat untuk Pembebasan Angola) dipimpin A. Neto dan merupakan gabungan berbagai kelompok (Partai

Komunis Angola, penduduk Assimilado dan Mestis, buruh perkebunan kopi). Mereka mendapatkan dukungan etnis di Mbundu, daerah belakang Luanda. UNITA (Uni Nasional untuk Kemerdekaan Penuh Angola) mempunyai basis terutama di kelompok etnis terbesar Ovibundu dan beroperasi di sebelah selatan dipimpin Savimbi. Persaingan antarggerakan pembebasan ini dipertajam oleh kepentingan asing, Uni Soviet mendukung MPLA, AS dan Zaire mendukung FNLA, Afrika Selatan dan AS mendukung UNITA, sehingga mempersulit proses dekolonisasi. Dukungan Uni Soviet dan masuknya pasukan Kuba ke kancah perang saudara ini telah menentukan kemenangan untuk MPLA Februari 1976. Angola menjadi Republik Rakyat Sosialis.

Mengalir keluarnya orang Portugis (sebagian besar adalah tenaga ahli) setelah kemerdekaan, akibat perang saudara dan intervensi asing, menyebabkan kehancuran sistem perekonomian Angola tahun 1975-1976. Kemerosotan ekspor kopi dan intan serta penghentian ekspor bijih besi, membuat Angola makin bergantung pada ekspor minyak bumi (sekitar 70% dari produksi di enklave Cabinda, bagian migas dari ekspor keseluruhan melebihi 90%). Sejak tahun 1976 berlangsung nasionalisasi sektor perbankan, industri, dan sebagian besar usaha pertanian.

Tahun 1976 MPLA mengorganisasi diri sebagai partai kader sehingga menimbulkan konfrontasi di dalam partai. Sebab, hal ini bertentangan dengan prinsip pembangunan

lembaga-lembaga selama perjuangan pembebasan yang bersandar pada partisipasi penduduk dan prinsip *poder popular* yang tertanam dalam Undang-Undang Kekuatan Rakyat. Pertentangan ini makin meruncing setelah usaha kudeta oleh N. Alves tahun 1977. Tahun 1979 Jose Eduardo dos Santos menggantikan mendiang Presiden Neto. Tahun 1987 ia mengumumkan usaha reformasi dan dukungan terhadap ekonomi swasta. Tujuan utama perencanaan negara adalah mengurangi ketergantungan terhadap impor.

5. Setelah beberapa kali menunda, tahun 1985 Angola menjadi anggota Perjanjian Lome III (56% barang yang diimpor berasal dari ME). Konflik dengan Zaire dapat dihentikan. Perundingan yang dimulai Mei 1988 antara Angola, Afrika Selatan, Kuba, dan AS, menghasilkan kesepakatan penarikan 50.000 tentara Kuba dari Angola. Tanggal 22 Desember 1988 Afrika Selatan, Angola, dan Kuba menandatangani perjanjian perdamaian di markas besar PBB di New York yang menetapkan batas waktu selama 27 bulan untuk penarikan tentara Kuba dan kemerdekaan Namibia.

Penarikan tentara Kuba meringankan perekonomian Angola (penempatan setiap tentara Kuba mengeluarkan ongkos 250 US\$ setiap bulannya, keterangan lain menyebutkan 800 US\$). Penandatanganan perjanjian perdamaian Mei 1991 antara Presiden Dos Santos dan pimpinan UNITA, Savimbi, mengakhiri perang saudara yang telah berlangsung selama 14 tahun.

Kepustakaan: G. Bender, *Angola under the Portuguese: The Myth and the Reality*, London 1978; F.W. Heimer, *Der Entkolonialisierungskampf in Angola*, München 1979; L.W. Henderson, *Angola. 5 Centuries of Conflict*, Ithaca dll., 1979; A.J. Klinghoffer, *The Angolan War. A study of Soviet Policy in the Third World*, Boulder (col.) 1980; D. Nohlen/R. Sturm, "Angola", dlm.: *HDW II, 5*, Hamburg 1982, 294 dst.; M. Schümer, "Angola", dlm.: R. Hofmeier/ M.Schönborn (ed.), *Politisches Lexikon Afrika*, cet. ke-4 München 1988; M. Offermann, *Angola zwischen den Fronten*, Pfaffenweiler 1988; Die Welt, "Blutige Unruhen überziehen Afrika", dlm. *BMZ-Spiegel der Presse*, 21/91.

rs/pb
ANRPC (*Association of Natural Rubber Producing Countries*) Asosiasi Negara Produsen Karet Alam, kartel bahan mentah di bidang produk pertanian, didirikan tahun 1970 di Kuala Lumpur, tahun 1982 direkonstruksi. Tujuh negara anggota (India, Indonesia, Malaysia, Singapura, Sri Lanka, Thailand, Papua Nugini), menghasilkan 89% produksi karet alam dunia. ANRPC bermaksud mengkoordinasi produksi dan pemasaran karet alam, memajukan kerja sama teknik antarnegara anggota serta menetapkan harga minimal untuk produk karet mereka.

mm
Antigua dan Barbuda → Karibia.

Antilla-Belanda → Karibia.

AOF (*Afrique Occidentale Française*) Federasi delapan negara koloni Perancis sejak tahun 1922 di Afrika Barat (Mauritania, Senegal, Sudan-Perancis [Mali], Guinea, Pantai Gading, Volta Hulu, Dahomai [Benin], dan Niger) dengan ibu kota Dakar. Federasi ini berdiri tahun 1895–1958/1959.

fn
apartheid Pengertian apartheid (bahasa Afrikaans, sinonim untuk politik pemisahan ras di Afrika Selatan.

Belum lama ini apartheid lebih banyak digunakan dalam pengertian "pembangunan yang dipisahkan"), menandai politik hubungan antarras yang dijalankan Republik Afrika Selatan sejak pengambilalihan kekuasaan oleh *National Party* (NP) tahun 1948. Dasar politik apartheid adalah mempertahankan dominasi minoritas kulit putih. Semua kelompok bangsa bukan berkulit putih (hitam, campuran, dan Asia) mendapat pengakuan hak warga negara yang lebih rendah. Elemen utama politik pemisahan ras tertanam sejak 300 tahun sejarah negara ini, tetapi apartheid baru dilaksanakan secara resmi di bawah *National Party*. Perlu dibedakan antara yang dinamakan *petty apartheid* atau apartheid kecil (pemisahan sosial kelompok-kelompok ras; penciptaan sarana-sarana umum yang terpisah di segala bidang) dan apartheid teritorial. Apartheid teritorial berarti pemisahan ruang lewat penetapan daerah pemukiman terpisah di pedesaan (→ *homeland*), sedangkan *Group Areas Act* mengatur pemisahan daerah pemukiman di daerah Afrika Selatan "putih".

Apartheid sosial dalam seluruh penampilannya semula meliputi semua bidang kehidupan. Akan tetapi, sejak beberapa tahun perlahan-lahan mulai dikurangi, termasuk penghapusan pembatasan kerja dan pendidikan, pengizinan pendirian serikat buruh kulit hitam dan penjaminan hak mogok secara terbatas (1979), penghapusan secara bertahap pemisahan sarana umum, penghapusan larangan kawin campur (1985), perbaikan dalam sektor pendidikan dan

pengajaran untuk orang kulit hitam, kesempatan pembelian tanah di kota-kota Republik Afrika Selatan "putih", pengizinan pembangunan daerah perdagangan campuran ras, pembekuan peraturan kewajiban memiliki paspor khusus bagi orang kulit hitam (1986), dsb.

Apartheid teritorial sama sekali tidak berubah bahkan dikembangkan lebih lanjut sampai fiksi kemerdekaan nasional dalam rangka *homeland*. Hak-hak politik hanya diperoleh orang kulit hitam di *homeland* etnis mereka pada tingkat kota praja di *township* hitam dalam daerah pemukiman "putih". Reformasi UU tahun 1983 yang mulai berlaku tahun 1984, mengizinkan orang campuran dan orang Asia mendapatkan hak turut berbicara politik secara terbatas dalam rangka penciptaan parlemen tiga Kamar yang baru; orang kulit hitam tetap tidak diberi kesempatan. Partisipasi politik mereka tetap terbatas di dalam *homeland*. Orang kulit hitam kota di daerah Republik Afrika Selatan "putih" maksimal hanya menerima status swapraja yang menurut bayangan Pretoria suatu ketika dapat menuju terbentuknya negara kota "hitam".

Perdebatan mengenai penghapusan *Group Areas Act* yang telah berlangsung beberapa waktu, menghadapi perlawanan kuat dari kelompok bangsa Bur. Makin banyak pendukung *Conservative Party* (CP) ekstrem kanan dipimpin Andries Treurnicht pada pemilihan parlemen Mei 1987 dan pemilihan kota praja Oktober 1988, menyebabkan pemberlakuan kembali "apartheid kecil"

di tingkat kota praja dalam hal sarana umum. Kelangsungan penghapusan apartheid kecil terutama disebabkan adanya tekanan ekonomi. Namun, rasa takut kehilangan kekuasaan politik di kalangan orang kulit putih sangat besar sehingga tidak dapat diramalkan akan terjadi perkembangan yang sama di bidang apartheid teritorial. Konsep *Conservative Party* yang merencanakan *homeland* kulit putih masih berupa khayalan Afrika Selatan menjadi negara kulit putih dan kulit hitam. Mengenai oposisi politik orang kulit hitam yang menentang ideologi dan praktek apartheid (→ Afrika Selatan, → ANC, → Mandela, → Tutu).

Kepustakaan: H. Adam, *Südafrika, Soziologie einer Rassengesellschaft*, Frankfurt 1969; E. Runge, *Südafrika - Rassendiktatur zwischen Elend und Widerstand*, Reinbek 1974; G. Albrecht, *Soweto oder Der Aufstieg der Vorstädte*, Reinbek 1977; J.F. Noller, *Theorie und Politik der Apartheid*, Frankfurt 1977; F. Duve, *Kap ohne Hoffnung oder die Politik der Apartheid*, Reinbek 1978; H. Jaenecke, *Die weissen Herren. 300 Jahren Krieg und Gewalt in Südafrika*, Hamburg 1979; M. Cornevin, *Apartheid, Mythos und Wirklichkeit*, Wuppertal 1981; R.v. Lucius, *Südafrika: Schwarze Hoffnung, weisse Reformbereitschaft*, Bonn 1981; AKAARIK/DEAE (ed.), *Südafrika - Handbuch*, Wuppertal 1981; G. Gillessen, *Rassenstaat - Ständestaat - Gottesstaat?*, Stuttgart 1982; L. Thompson/A. Prior, *South African Politics*, New Haven und London 1982; H. Vogt, *Apartheid und Unterentwicklung*, Frankfurt/New York 1982.

ajh

APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana) Sejak tahun 1930: PAP (*Partido Aprista Peruano*) adalah partai yang didirikan tahun 1924 oleh Haya de la Torre di pengasingan di Meksiko. Tujuannya perjuangan anti-imperialis di seluruh benua Amerika bagian selatan, di-

dukung oleh aliansi lapisan menengah (pimpinan), buruh, dan petani. Sejak tahun 1930 secara *de facto* terbatas di Peru, populisme militansi dan konfrontasi dengan kubu penguasa (pemberontakan dan kudeta APRA menemui kegagalan), membangun suatu kebencian terhadap militer. Dengan menyesuaikan diri pada aturan main dalam sistem politik, mereka menunjang berbagai pemerintah borjuis dan oligarki tahun 1939-1962. Mereka bersikap kritis terhadap reformasi politik pemerintah pertama Balaunde (1963-1968) dan rezim militer di bawah Velasco Alvarado (1968-1975). Setelah berlangsung demokratisasi (1978-1980), terjadi pendekatan antara APRA dengan militer yang melihat bahwa kesinambungan politik reformasi hanya dapat dipertahankan melalui tujuan-tujuan politik ekonomi yang dituntut APRA (pembatasan liberalisasi ekonomi dengan mempertahankan beberapa elemen reformasi). Tahun 1985 Alan Garcia memenangkan pemilihan presiden, untuk pertama kalinya pimpinan APRA berkuasa.

hb

Arabian Maghreb Union Uni Arab Magribi, aliansi yang dibangun oleh lima pemimpin negara-negara Magribi, yaitu Aljazair, Libia, Maroko, Mauritania, dan Tunisia tanggal 17 Februari 1989 di Marakesh, sebuah kota di Maroko. Tujuan pokoknya adalah pakta militer (wajib tidak masuk aliansi militer yang memusuhi salah satu negara anggota; semua anggota wajib membantu jika terjadi penyerangan ke salah satu negara anggota). Selain tujuan utama merupakan kepentingan Libia, aliansi ini

tetap terbuka untuk negara Arab dan Afrika lain dengan mencita-citakan suatu integrasi ekonomi, sosial, dan budaya. Lembaga itu dibangun menurut model ME; gremium politik terpenting direncanakan oleh Dewan Kepala Negara (kebulatan pendapat dalam semua keputusan, setiap anggota mempunyai hak veto) yang berganti tiap setengah tahun.

Kesulitan besar aliansi ini adalah konflik Sahara Barat yang belum terselesaikan. Karena Aljazair, Tunisia, dan terutama Maroko mempunyai hubungan baik ke AS, kewajiban membantu Libia dengan adanya langkah militer AS, dipertanyakan.

bh
Arafat, Jassir Lahir tahun 1929 di Yerusalem. Pertama-tama ia bekerja sebagai insinyur dan sejak tahun 1964 membangun kelompok gerilya Palestina *al Fatah*. Sejak tahun 1969 menjabat sekretaris jenderal komite eksekutif dewan pimpinan PLO dan menjadi pemimpin politik bangsa Palestina dalam Konflik Timur-Tengah.

Tahun '70-an tujuan PLO semakin mendapat pengakuan internasional karena langkah-langkah Arafat yang moderat. Bersama negarane-negara Arab yang radikal (a.l. Suriah dan Libia), Arafat merupakan penentang keras persetujuan Camp-David antara Mesir dan Israel tahun 1978. Invasi Israel ke Lebanon tahun 1982 yang mengakibatkan kekalahan militer dan penarikan mundur (hampir seluruh) pejuang Palestina yang dipimpin Arafat dari Beirut, telah menimbulkan perpecahan dalam PLO. Kelompok radikal menolak langkah-

langkah diplomatik dan moderat yang diambil Arafat. Arafat dapat memulihkan kekuatan kembali tahun 1987, terutama setelah pengusirannya dari Suriah (1983). Ia kembali menerima tuntutan-tuntutan lama PLO yang radikal dan memungkinkan rukun kembali dengan lawan-lawannya di fraksi PLO. Setelah itu, dengan kelihaiannya ia tetap mencari pemecahan diplomatik untuk masalah Palestina. Posisi Arafat yang moderat juga berhasil mempengaruhi sidang dewan nasional Palestina tahun 1988 yang menyatakan didirikannya negara Palestina dan sekaligus menyatakan kesediaannya berunding dengan Israel. Arafat dan PLO diakui oleh AS sebagai mitra bicara setelah ia mengukuhkan pengakuan negara Israel dan menolak setiap terorisme dalam pidatonya di muka sidang umum PBB.

Kepustakaan: G. Konzelmann, *Arafat*, Bergisch Gladbach, 1983; P. Jakobs, *Yassir Arafat. Versuch einer Lebensbeschreibung*, Dortmund 1985.

ah/bt
Argentina Ditandai ketidakstabilan politik yang kronis: pelaku utama konflik internal yang sering menyebabkan pergantian rezim, yaitu angkatan bersenjata yang sudah sejak tahun 1930 turut campur dalam proses politik serta gerakan peronisme yang populis. Sejak tahun 1983 Argentina kembali diperintah secara demokratis. Namun, demokrasi ini selalu terancam bahaya akibat tekanan masalah yang besar—krisis ekonomi dan adanya kecenderungan intervensi dari pihak militer. Beban masalah yang ada sekarang adalah timbunan permasalahan dari masa lalu yang belum terselesaikan. Situasi

perekonomian yang parah ini adalah hasil dari kemunduran Argentina selama beberapa dasawarsa. Padahal Argentina pernah menjadi salah satu negara terkaya di dunia.

1. Argentina (luas 2,777 juta km²), berpenduduk (tahun 1989: 32 juta jiwa) relatif tidak padat dihuni. Sumber daya alam terpenting adalah tanah yang dapat digunakan untuk pertanian dan peternakan (sekitar 82% wilayah keseluruhan). Pangsa industri dalam PNB (→ pendapatan nasional) sebesar 34% sangat tinggi jika dibandingkan dengan negara berkembang lainnya; 28% penduduk bekerja di sektor industri. Namun, industri Argentina masih tetap bergantung pada impor bahan dasar, barang setengah jadi dan barang modal, serta hanya mampu mengekspor secara terbatas. Penghasil devisa terbesar seperti sebelumnya adalah sektor pertanian. Empat perlima hasil ekspor berasal dari produk pertanian (terutama gandum dan daging sapi). Sektor pemerintah yang membengkak, menampung sekitar 30% dari angkatan kerja. Baik pendapatan per kapita sebesar 2.360 US\$ maupun harapan hidup sekitar 70 tahun, memperlihatkan nilai tertinggi di Amerika Latin. Sekitar 90% penduduk dapat membaca dan menulis. Argentina secara tradisional mempunyai gerakan serikat buruh yang kuat, yang mengorganisasi persatuan serikat buruh dan terkait erat dengan peronisme. Lapisan menengah relatif besar (meliputi 40% dari jumlah penduduk) secara politik sangat berpengaruh. Argentina dalam hal kebudayaan selalu berorientasi ke Eropa,

selain ke Spanyol dan Italia yang merupakan negara asal dari kaum imigran terbesar di sana, serta ke Perancis dan Inggris.

2. Awal abad ke-19 kepentingan elite Argentina yang menghendaki perdagangan bebas, makin berhadapan dengan kekuasaan kolonial Spanyol yang menguasai perdagangan untuk kepentingan sendiri. Selain itu Argentina terseret ke dalam konflik antarnegara Eropa. Dengan pernyataan kemerdekaan Propinsi La Plata Serikat 9 Juli 1816, berakhirlah kekuasaan kolonial Spanyol yang dimulai dengan penghunian daerah itu tahun 1516. Tahun 1820-an perdagangan luar negeri Argentina ditujukan ke Inggris. Selama di bawah diktator J.M. Rosas (1829–1852), perang saudara kembali pecah antara kaum unitaris dan kaum federalis, telah dimenangkan kaum federalis. Pemanfaatan lebih lanjut potensi pertanian setelah jatuhnya Rosas dan integrasi lanjut ke pasar dunia, membuat Argentina makin bergantung pada gerak naik-turun harga di pasar ekspor dan terjebak dalam krisis utang. Pemisahan diri Buenos Aires tahun 1854 menimbulkan perang saudara selanjutnya dan di akhir perang saudara itu lahir UU tahun 1860 dan pendirian *Republica Argentina*.

3. Tahun 1875–1914 Argentina mengalami kemajuan pesat yang tidak ada duanya karena keberhasilan model perdagangan luar negerinya. Hubungan dagang yang komplementer dengan Eropa, terutama dengan Inggris (ekspor produk pertanian, impor barang jadi) dan pemanfaatan

lebih lanjut potensi pertanian, dinikmati terutama oleh oligarki pertanian dan elite pedagang. Namun, bentuk keterkaitannya ke pasar dunia berakibat ketergantungan Argentina dari luar negeri. Perdagangan bebas yang keras menyebabkan produksi barang jadi tergeser dalam persaingan dengan barang impor dari Eropa. Oleh karena itu, dilakukan industrialisasi terbatas terutama di bidang pertanian. Metode pertanian yang baru dan pembangunan jaringan kereta api dengan bantuan modal Inggris telah menghasilkan *boom* ekspor. Dengan masuknya kaum pendatang baru dari Eropa, jumlah penduduk meningkat tiga kali lipat, tahun 1857-1890 menjadi 3,3 juta. Antara tahun 1871-1914 masuk 5,9 juta pendatang baru; separo berasal dari Italia dan seperempat dari Spanyol. Sekitar tahun 1900 Buenos Aires menjadi kota terbesar di Amerika Latin (dengan jumlah penduduk enam kali lebih tinggi dibandingkan tahun 1854). Partai *Union Civica Radical* (UCR) yang pendiriannya berkaitan erat dengan pemberontakan penduduk kota tahun 1890 (*revolucion del Noventa*), menuntut penghormatan hak-hak penduduk dan pemilihan umum yang bersih. Partai ini cepat mendapat dukungan lapisan menengah kota, tetapi mereka tidak turut serta dalam pemilihan umum yang telah dimanipulasi. Karena hanya 5% kaum pendatang memiliki kewarganegaraan Argentina dan 65% penduduk tidak memiliki hak pilih. Tahun 1912 di bawah Presiden R. Saenz Pena yang konservatif, barulah dilaksanakan hak pilih untuk laki-laki, dan untuk per-

tama kalinya oposisi berhak memiliki wakil di parlemen. Reformasi hak pilih ini telah memungkinkan kemenangan kaum radikal tahun 1916. Pendapatan per kapita Argentina tahun 1914 melebihi Swiss dan sama dengan Jerman. Namun, perdagangan luar negerinya terjebak krisis setelah Perang Dunia I dimulai karena hubungan dengan Eropa terputus. Pemerintah di bawah Hipolito Yrigoyen terutama sibuk mengurus manajemen krisis. Reformasi sosial tidak menyeluruh dan mengecewakan kelompok radikal buruh kota yang baru muncul. Kerusuhan sosial (pemberontakan mahasiswa tahun 1918, "Minggu tragis" tahun 1919) adalah akibatnya. Perekonomian pulih kembali setelah perang berakhir dan kaum radikal dapat memenangkan dua pemilihan selanjutnya. Namun, janji reformasi kembali bertabrakan dengan kenyataan resesi ekonomi. Masa pemerintahan UCR diakhiri kudeta militer 6 September 1930 yang bertujuan melakukan restorasi tatanan konservatif. Hal ini sesuai dengan kepentingan eksportir daerah *pampa* (daging sapi) dan tuan tanah. Untuk itu rezim berusaha menghidupkan kembali hubungan lama dengan Inggris. Melalui perjanjian Roca - Runciman (1933), Inggris mendapat privilese impor yang besar dengan jaminan dapat membeli daging sapi dalam jumlah yang sama. Pertengahan tahun '30-an dijalankan industrialisasi substitusi impor, pertama-tama hanya di bidang industri ringan seperti produksi tekstil dan pengolahan bahan pangan. Karena ada beda pendapat di dalam, militer menyerahkan kekuasaan kem-

bali kepada sipil M. Ortiz yang konservatif. Hubungan semula yang lebih erat dengan AS, akibat perang dunia berkembang menjadi hubungan yang banyak membawa masalah karena Argentina menolak menjadi anggota Aliansi Pan-Amerika dan menolak menyatakan perang terhadap Jerman dan Italia.

4. Tanggal 4 Juni 1943 militer kembali mengambil alih kekuasaan. Kelanjutan pertikaian di dalam tubuh militer adalah munculnya kelompok nasionalis sekitar menteri pertahanan dan Wakil Presiden Juan Domingo Peron sebagai pemenang dengan mengalahkan sayap tradisional. Sekretariat untuk Lapangan Kerja kelompok Peron mendukung pemogokan serikat buruh dan turut campur untuk kemenangan serikat buruh. Tujuan politik ini adalah menyalurkan dan mengorganisasi serikat buruh menjadi kesatuan, sebelumnya terpecah dalam berbagai macam serikat buruh. Peron berhasil mendapat dukungan mayoritas serikat buruh terbesar *Confederación General del Trabajo* (CGT). Ketika negara ada dalam bahaya perang saudara setelah demonstrasi oposisi liberal, Peron dipecat dan ditahan. Beberapa hari kemudian, 17 Oktober 1945, ia diangkat lagi dalam jabatannya setelah organisasi buruh berbaris melakukan aksi protes. Dengan kemenangannya pada pemilihan presiden tahun 1946 (54% suara) dimulai era reformasi: diberlakukan ketentuan hari kerja, cuti yang dibayar, legalisasi penuh serikat buruh, dan asuransi kecelakaan.

Tindakan selanjutnya adalah memberlakukan upah minimal, penyediaan tempat tinggal yang murah, dan nasionalisasi jawatan kereta api yang didominasi Inggris. Industri substitusi impor mendapat dorongan kuat, tetapi sektor pemerintah makin membengkak dan sektor pertanian mengalami stagnasi karena hubungan pemilikan di sektor ini tidak dapat diganggu gugat. Walaupun demikian, Argentina tetap jauh dari status negara yang dapat memenuhi kebutuhan industrinya. Serikat-serikat buruh disatukan di bawah pengawasan organisasi wadah CGT yang berada di bawah pimpinan kelompok Peron. Kampanye hak-hak untuk perempuan yang dilakukan istri presiden, Eva Peron, tokoh pujaan peronisme, berhasil memasukkan kembali hak pilih perempuan tahun 1947. Populisme Peron mendapatkan dukungan massa penduduk. Pada pemilihan kongres tahun 1948 partai Peron memenangkan dua pertiga kursi.

Dengan UU tahun 1949 Peron berhasil mendapatkan hak untuk dipilih kembali. Akhir tahun '40-an rezim ini makin terjebak dalam kesulitan ekonomi: pertanian mengalami stagnasi dan sektor industri belum mampu melakukan ekspor, neraca perdagangan dan neraca pembayaran mengalami defisit. Peron menanggapi kritik dengan tindakan yang sangat represif. Pada pemilihan presiden yang dimanipulasi tahun 1951 ia mendapat 62% suara. Sektor pertanian dan ekspor kembali ditunjang. Penyatuan bidang-bidang kemasyarakatan dalam organisasi besar dan birokratisasi bertujuan mengo-

kohkan kekuasaan Peron. Setelah demonstrasi massa yang diorganisasi kelompok antirezim dan intervensi militer 31 Agustus 1955, diberlakukan keadaan darurat. Tanggal 16 September 1955 pecah pemberontakan militer, Peron mengundurkan diri dan pergi ke pengasingan. Setelah dua tahun kekuasaan militer menyusul suatu periode yang menghormati hak-hak dasar dan memberlakukan negara hukum, tetapi persaingan dalam politik menjadi terbatas karena pelarangan terhadap kaum peronis yang tetap kuat bergerak di bawah tanah. Presiden A. Frondizi (1958-1962) yang berasal dari barisan radikal dan A. Illia (1963-1966) dikudeta militer pada akhir masa jabatannya, ketika mereka mencoba melegalisasi kembali peronisme. Rezim militer yang baru (1966-1973), pertama-tama di bawah Jenderal Onganía, menjalankan proyek modernisasi konvensional, tetapi makin goyah setelah pemberontakan Córdoba (*El Cordobazo*, tahun 1969). Politik perekonomian junta militer-membuka kesempatan investasi asing, memerangi inflasi, stop kenaikan upah-pada mulanya berhasil, makin terjebak ke dalam krisis. Gerilyawan peronis (*Montoneros*), yang menginterpretasikan peronisme sebagai nasional revolusioner, muncul dengan sederet tindakan pembunuhan. Adanya tekanan protes massa dan krisis ekonomi menyebabkan rezim mengizinkan kembali peronisme, dalam masa 18 tahun larangannya (*proscripción*) menjadi gerakan oposisi yang sangat heterogen dan mendapat dukungan kaum buruh serta lapisan

menengah, yang mengharapkan ditegakkannya keamanan dan ketertiban jika Peron kembali. Pada pemilihan tahun 1973 kaum peronis di bawah pimpinan H. Campora (militer melakukan veto menentang pencalonan Peron) memperoleh 49% suara, kaum radikal di bawah Balbin hanya 21%. Ketika Peron Juni 1973 kembali ke Buenos Aires dari pengasingannya di Spanyol, penyambutannya diwarnai tembak-menembak antara *Montoneros* dan serikat buruh. Pemilihan presiden bulan September, setelah pengunduran diri presiden sementara Campora, memberikan Peron kemenangan 60%, Estela "Isabel", istri ketiganya, menjadi wakil presiden. Perang bawah tanah antara kelompok teror kiri dan kanan, serta pembunuhan terhadap pemimpin serikat buruh oleh *Montoneros* terus berlangsung. Peron menjalankan kembali konsep korporatisnya; sebelumnya kekuatan kiri revolusioner memang merupakan alat yang diharapkan untuk merebut kembali kekuasaan, tetapi kemudian menjadi faktor destabilisasi. Setelah Peron meninggal 1 Juli 1974, Isabel Peron mengambil alih pemerintahan. Negara ini kemudian cepat tenggelam dalam perang saudara dan krisis ekonomi. Militer campur tangan memerangi gerilya.

5. Ketika pemerintahan Isabel Peron gagal total, militer 24 Maret 1976 mengambil alih kekuasaan dan menciptakan posisi kekuasaan junta yang luar biasa di bawah Jenderal Videla. Akibat penindasan secara brutal yang belum ada duanya dalam sejarah Argentina, militer kehilangan

dukungan lapisan menengah yang pada mulanya menyambut baik berakhirnya kekacauan dalam negeri. Partai, serikat buruh, dan organisasi massa dilarang sejak tahun 1976. Sebagian besar oposisi pergi ke pengasingan. Penumpasan subversi dijadikan alasan untuk melenyapkan gerilyawan, juga kelompok oposisi dan keluarganya. Tujuan rezim militer adalah mengubah situasi dasar ekonomi dan politik sebelumnya yang telah berusia 33 tahun. Politik perdagangan bebas yang ekstrem dimaksudkan untuk menghidupkan kembali model perdagangan luar negeri tradisional, suatu monetarisme ortodoks yang memerangi inflasi. Swastanisasi ditujukan memperkuat persaingan dan menciptakan rangsangan untuk investasi asing. Program ini menelan ongkos sosial yang tinggi (pengangguran, menurunnya tingkat sosial sebagian lapisan menengah), tetapi hasil-hasil yang diinginkan tidak muncul karena situasi dalam sistem internasional telah banyak berubah dibandingkan dengan masa keberhasilan model tradisional. Keterbatasan kesempatan ekspor dan semakin meningkatnya impor di lain pihak, telah menyebabkan pembengkakan defisit neraca pembayaran.

Impor yang makin bertambah telah mendesak industri dalam negeri. Berhentinya arus investasi asing telah memperbesar defisit neraca pembayaran. Antara Desember 1979 dan Maret 1981 utang luar negeri membengkak dari 8,5 miliar US\$ menjadi 25,3 miliar US\$. Model perekonomian militer telah menemui kegagalan.

an. November 1981 Jenderal L. Galtieri menggantikan pendahulunya Jenderal R. Viola yang hanya memerintah selama setahun dan mengumumkan suatu keterbukaan. Ketika tindakan ini juga tidak dapat mempertahankan kehancuran otoritas rezim, militer mencoba menarik dukungan rakyat dengan pendudukan Falkland/Malvinas yang sensasional 1 April 1982. Kekalahannya dalam perang melawan Inggris tersebut menghancurkan pamor rezim (Konflik Falkland/Malvinas). Di bawah presiden yang baru, Jenderal R. Bignone, militer berunding dengan *Multipartidaria*, gabungan kelompok oposisi demokratis, mengenai persyaratan penarikan mundur militer ke tangsi, sekaligus menganjurkan rapat raksasa dan aksi mogok menuntut demokratisasi. Akhirnya, berhasil disepakati untuk mengembalikan keterlibatan sesuai UU tahun 1860.

6. Tanggal 30 Oktober 1983 untuk pertama kalinya kembali berlangsung pemilihan presiden dan parlemen secara bebas, secara mengejutkan dimenangkan oleh UCR. Partai ini mendapat mayoritas di parlemen dan calonnya, Raul Alfonsín, memperoleh 52% suara untuk presiden; dengan demikian untuk pertama kalinya kaum peronis dikalahkan dalam pemilihan umum yang bebas. Namun, lahirnya demokrasi Argentina yang diikuti banyak harapan, sejak awal dibebani oleh warisan masa lalu: militer tidak menyembunyikan rasa tidak percaya terhadap demokrasi dan menuntut imbalan untuk dirinya yang telah berjasa "dalam perang kotor" menye-

lamatkan negara dari usaha penggulungan kekuasaan oleh komunis. Serikat-serikat buruh yang kembali merupakan faktor kekuatan terpenting tetap didominasi kaum peronis dan berstruktur hierarkis; segala usaha pemerintahan Alfonsin untuk mereformasikannya mengalami kegagalan di Senat yang juga didominasi kaum peronis. Keadaan ekonomi tidak mengalami perbaikan. Setelah pemerintah menaikkan upah dan mengambil posisi keras dalam perundingan terhadap donor luar negeri, Alfonsin mengusulkan tindakan penyehatan ekonomi yang keras dengan *Plan Austral* 14 Juni 1985. Inflasi akan ditekan dengan dibekukannya kenaikan upah dan harga, swastanisasi, dan mengecilkan birokrasi yang membengkak. Semua bertujuan mengakhiri keadaan ekonomi yang sakit, terutama sektor industri. Diberlakukannya mata uang baru (austral menggantikan peso) dimaksudkan untuk menstabilkan nilai tukar. Rencana ini pada mulanya mendapat sambutan positif rakyat (kelompok radikal memenangkan pemilihan kongres tahun 1985). Tingkat inflasi memang turun dalam waktu singkat, tetapi naik lagi menjadi 300% pada paro kedua tahun 1988. Beban utang dalam waktu sama mencapai 56 miliar US\$. Seperti sebelumnya, pembayaran itu menghabiskan hampir 50% penerimaan ekspor. Akibat turunnya harga di pasar dunia, sebagian peningkatan ekspor mengalami kegagalan. Sampai sekarang tidak dicapai hasil nyata dalam perundingan dengan donor internasional, IMF dan Bank Dunia. Swastanisasi

dan perbaikan situasi untuk investor asing hanya mencapai hasil terbatas: persetujuan bilateral dengan Spanyol dan Italia (pengaitannya ditekankan pada usaha mempertahankan demokrasi) ditujukan untuk mengubah utang menjadi investasi langsung, pengampunan sebagian utang serta membangun *joint venture*. Politik perekonomian yang dijalankan Alfonsin ditentang serikat buruh. Kejahatan menginjak hak asasi manusia tetap merupakan tema utama masyarakat Argentina. Penegak keadilan sangat aktif melaksanakan tugasnya: selama berlangsung proses pengadilan terhadap pimpinan junta, yaitu Videla, Viola, dan Galteri tahun 1985, telah didengar kesaksian lebih dari 1.000 orang saksi dan tuntutan penjara seumur hidup untuk terdakwa. Ketika makin berkembang gelombang di dalam tubuh militer, atas inisiatif pemerintah disahkan UU *Punto Final* Desember 1986 yang menetapkan bahwa setelah jangka waktu dua bulan tidak diadakan lagi proses pengusutan atas pelanggaran hak asasi manusia. Namun, dalam jangka waktu yang telah ditetapkan masih terus dilaksanakan proses pengusutan yang baru. Selama berlangsung pemberontakan militer pada minggu Paskah tahun 1987 penduduk memang menunjukkan bahwa mereka mendukung demokrasi, tetapi kesulitan untuk mengakhiri pemberontakan memperjelas ketidakpuasan dalam tubuh militer. Beberapa waktu kemudian dikeluarkan sebuah peraturan yang meringankan hukuman perwira rendahan dan menengah dengan alasan mereka menjalankan

perintah dalam masa darurat. Walaupun demikian terjadi lagi dua pemberontakan militer bulan Januari dan Desember 1988. Baku tembak antara teroris kiri dengan pasukan keamanan di kompleks militer *La Tablada* berlangsung bulan Januari 1989. Kaum peronis memperkuat diri setelah kalahannya pada pemilihan sebelumnya dan setelah tahap pengkonsolidasian kembali melaksanakan arah oposisi yang konfrontatif. Mereka memenangkan pemilihan kongres dan gubernur bulan September 1987. Dengan terpilihnya Carlos Menem sebagai calon presiden dari kaum peronis, bulan Juni 1988 gerak maju *Renovadores* sekitar ketua partai Antonio Cafiero yang ingin mengubah orientasi peronisme menjadi partai sosial demokrat modern, untuk sementara dihentikan. Carlos Menem memenangkan pemilihan presiden 14 Mei 1989. Dapat disimpulkan bahwa perubahan tahun 1983 yang disambut sebagai perubahan historis tidak berlanjut dan perubahan lainnya tidak terlaksana. Demokrasi belum terkonsolidasi, bayangan masa lalu tetap ada.

Kepustakaan: Canton, D./Moreno, J.L./Ciria, A. (ed.), *Historia Argentina. La democracia constitucional y su crisis*, Buenos Aires o. J.; P. Waldmann, *Der Peronismus 1943-1955*, Hamburg 1974; P.G. Snow, *Political Forces in Argentina*, New York 1979; G. Wynia, *La Argentina de Posguerra*, Buenos Aires 1986; D. Rock, *Argentina 1516-1987. From Spanish Colonization to the Falklands War and Alfonsín*, London 1987; D. Nohlen/A. Solari (ed.), *Reforma política y consolidación democrática. Europa y América Latina*, Caracas 1988; G. di Tella/R. Dornbusch (ed.), *The Political Economy of Argentina 1946-1983*, Houndsmill 1989.

hb

Arias Sanchez, Oscar Lahir 13 September 1941 di Heredia, San Jose/ Kosta Rika. Tahun 1987 mendapat hadiah Nobel untuk usaha perdamaian di Amerika Tengah. Rencana Arias merupakan dasar Perjanjian Esquipulas II (→ Konflik Amerika Tengah). Arias studi ilmu hukum di San Jose, ilmu politik di London, dan promosi tahun 1975 di Essex. Tahun '70-an ia mengajar ilmu politik di San Jose. Sejak muda ia menjadi anggota *Partido Liberación Nacional* (PLN). Ia menjadi menteri perencanaan Kosta Rika (1972-1977), anggota parlemen (1978-1981), sekretaris jenderal PLN (1979), dan presiden Kosta Rika (1986).

mik
arus lingkaran produksi Model untuk menjelaskan perdagangan internasional dengan barang industri modern.

*Keuntungan ongkos komparatif produksi dari negara industri ke negara berkembang berjalan dalam tiga tahap. Persyaratan dasarnya adalah eksistensi *gap* teknologi dan *time lag* untuk *alih teknologi antara negara industri dan negara berkembang. Inovasi dan produksi barang berlangsung dalam tahap I, biasanya dekat ke pasar penjualan besar di negara industri. Produk tersebut dalam proses inovasinya padat penelitian dan dalam proses pembuatannya padat **know-how*. Tahap II ditandai pertumbuhan pesat produksi dan permintaan setempat. Dalam tahap II ini proses produksi diubah pada *large scale production* yang *padat modal. Produk ini melampaui permintaan dalam negeri dan mendesak pasar ekspor, a.l. ke negara berkembang. Proses produksi dan jenis barang

terus distandardisasi. Kemudian, dalam tahap III produksi dapat dilakukan di luar negeri (perusahaan transnasional berproduksi di pabrik pasar dunia, atau negara berkembang mengambil alih proses produksi melalui impor barang investasi yang sesuai dan berproduksi dengan lisensi). Setelah keberhasilan substitusi impor, negara berkembang dapat menerobos pasar ekspor dan menggunakan keuntungan ongkos (kerja) untuk produksi yang berstandar. Negara (industri) yang dulunya memiliki inovasi menjadi negara pengimpor. Selain relevansi ekonomi luar negeri dari teori arus lingkaran produksi, teori ini memperlihatkan kaitan antara struktur produksi teknologis dengan perkembangan masyarakat.

hpn
ASEAN (*Association of South-East Asian Nations*) Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara. Didirikan tahun 1967 di Bangkok oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Sejak tahun 1984 Brunei menjadi anggota. Berdirinya ASEAN berkaitan erat dengan perubahan politik yang drastis di kawasan itu (perang Vietnam, penarikan mundur tentara Inggris dari Asia Tenggara sebagai kekuatan pelindung). Berakhirnya perang Vietnam mendorong timbulnya inisiatif yang dulu tentu akan cepat membawa keberhasilan (keamanan dan stabilisasi regional kawasan tersebut). Setelah pertemuan puncak pertama di Bali tahun 1976 mulai tercipta bentuk integrasi ekonomi. Untuk pertama kalinya di Bali disepakati aturan kerja sama dalam kerangka ASEAN (*Treaty of Amity and Cooperation in South-East Asia*)

dan kesepakatan bersama tentang tujuan-tujuan dalam *Declaration of ASEAN Concord*: mendorong kerja sama regional dan memperkuat stabilitas ekonomi dan sosial di kawasan tersebut; kerja sama terutama di bidang bahan mentah, pangan, dan energi; pembangunan bersama proyek-proyek industri besar; dan kemudahan bea untuk mendorong perdagangan sesama negara anggota. Sekretariat ASEAN berkedudukan di Jakarta dan mempunyai fungsi koordinasi.

Organ-organ: a. konferensi puncak kepala negara dan kepala pemerintahan (Bali tahun 1967, Kuala Lumpur tahun 1977, Manila tahun 1987); b. pertemuan menteri luar negeri yang berlangsung setahun sekali dengan wewenang keputusan tertinggi; c. komisi tetap yang merupakan forum perundingan ASEAN sebenarnya; d. komite tetap dan komite *ad-hoc* menyiapkan proyek dan kegiatan; e. sekretariat nasional di setiap negara anggota. Di samping itu ada pertemuan menteri ekonomi yang diikuti lima komisi ekonomi dan tiga komisi khusus dengan sub-komisi masing-masing dan kelompok pakar. ASEAN bukan merupakan lembaga supranasional, di sini berlaku prinsip rotasi.

Hasil-hasil: integrasi ekonomi negara-negara ASEAN melalui penjaminan preferensi bea sampai sekarang belum menghasilkan kemajuan yang berarti. Penyebab utamanya adalah struktur ekspor yang ada di masing-masing negara dan perbedaan tingkat kemajuan di antara sesama negara anggota. Kepentingan melin-

dungi perekonomian dalam negeri sendiri lebih diutamakan daripada keuntungan yang dapat dihasilkan dari peningkatan pembagian kerja regional, serta strategi industrialisasi yang terkoordinasi hanya merupakan keinginan belaka. Di bidang bahan mentah dan energi terdapat titik tolak yang memberikan harapan untuk kerja sama. Patut dicatat adalah langkah pertama menuju politik perdagangan luar negeri bersama. Mitra dagang utama dan investor utama adalah Jepang dan AS, sejak tahun '80-an ME (tahun 1980 perjanjian kerja sama perdagangan dan ekonomi ASEAN - MEE). Kelanjutan hidup ASEAN sangat ditopang oleh kepentingan politik luar negeri bersama, terutama stabilisasi politik kawasan ini (konflik yang berlangsung: masalah Kamboja). Sampai sekarang asosiasi ini hanya dapat diandalkan dalam kerja sama politik (misalnya penyelesaian sengketa antarnegara, keamanan regional, tetapi kerja sama ekonomi mengalami stagnasi). Penampilan bersama negara-negara ASEAN di forum internasional memperkuat kekuatan berunding mereka terhadap negara industri. Politik perekonomian asosiasi ini jelas menganut sistem ekonomi kapitalis dan secara ideologis, baik ke dalam maupun ke luar, anti-komunis. Tetap menjadi masalah adalah ketergantungan besar seluruh negara ASEAN pada ekspor. Kerja sama politik juga akan memainkan peran penting (Deklarasi Manila) di masa depan. Dalam pertemuan puncak keempat di Singapura, ASEAN sepakat mendirikan sebuah zona perdagangan bebas

dalam waktu 15 tahun, dimulai awal tahun 1993 untuk menghadapi kelompok ekonomi kuat Eropa dan Amerika Utara. Sebagai langkah pertama ke arah itu disepakati prioritas bea dalam perdagangan dengan barang industri, produk pengolahan pertanian dan bahan mentah, serta liberalisasi jasa dalam perbankan dan keuangan. Keberadaan ASEAN juga telah menarik negara-negara tetangga lainnya, seperti Laos dan Vietnam yang kini telah mendapatkan status pengamat.

Alamat: Sekretariat ASEAN, Jl. Sisingamangaraja No. 70 A, Kebayoran Baru - Jakarta Selatan.

Kepustakaan: R. Reiter, *Regionale wirtschaftliche Zusammenarbeit von Staaten der Dritten Welt*, Saarbrücken/Fort Lauderdale 1983; W. Rust, *ASEAN - Regionale Zusammenarbeit im Schatten der Grossmächte*, Frankfurt 1985; B. Sen Gupta, *ASEAN - SAARC, Prospects and Problems of Interregional Cooperation*, New Delhi 1988. "ASEAN vereinbart Binnenmarkt, Frankfurter Rundschau", 29 Januari 1992, dlm. *BMZ-Spiegel der Presse*, 3/92, hlm. 90-91; "Partisipasi Laos-Vietnam Tandai Babak Baru ASEAN", *Kompas* 23 Juli 1992.

ra asosiasi (ME dan Afrika) Dalam Pasal 131 Perjanjian ME di Roma diatur masalah hubungan khusus beberapa negara anggota ME dengan negara-negara bekas jajahannya (dahulu merupakan daerah yang bergantung dari luar) ke arah suatu asosiasi. Tujuan asosiasi adalah menunjang pembangunan ekonomi dan sosial negara-negara bekas jajahan. Negara-negara bekas jajahan yang merdeka dengan berlangsungnya "dekolonisasi sampai ke Papua Nugini dan Guinea, memilih asosiasi. Terbentuklah kelompok Asosiasi Negara-Negara Afrika dan Madagaskar (AASM) tahun 1963 di Jaunde, me-

lakukan perjanjian dengan ME mengenai kebebasan bea, kerja sama teknik, dan keuangan. Tahun 1969 perjanjian tersebut diperbarui. Dalam tahun yang sama ME dan EAC di Arusha membuat perjanjian mengenai zone perdagangan bebas. Kelanjutan politik asosiasi setelah masuknya Inggris ke ME adalah Perjanjian Lome. → EDF, → politik bantuan pembangunan ME. dn

Asosiasi Integrasi Amerika Latin
→ ALADI.

ASPAC (*Asian and Pasific Council*)
Dewan Asia Pasifik.

Associated States Kegagalan Federasi Hindia Barat (1962) menyebabkan "delapan kecil" negara di Kepulauan Antila Kecil menggabungkan diri ke Inggris dalam status asosiasi. Asosiasi tersebut di satu pihak memberikan kebebasan administrasi intern dan di lain pihak memberikan perlindungan militer dan bantuan dalam bentuk *grants in aid*. Setelah kemerdekaan Grenada (1974), eksperimen *associated statehood* ini mulai goyah. Setelah tahun 1978 negara-negara lainnya yang ber-

asosiasi lebih menginginkan kemerdekaan. fn

Asuransi Hermes Perusahaan asuransi kredit Jerman yang menjamin investasi perusahaan-perusahaan Jerman terhadap risiko yang berkaitan dengan masalah politik dan ekonomi (ketidakmampuan membayar kembali kredit) di negara yang diinvestasikan. Kerangka wewenangnya naik dari 120 juta DM (1949) menjadi 150 miliar DM (1980) dan 195 miliar DM (1987). Tahun 1987 jumlah permintaan baru yang harus ditutup adalah 40.133; volume jumlah permintaan sekitar 50,7 juta DM. Pembagian regional permintaan menurun. Dibedakan antara jaminan (usaha dengan pemerintah asing dan lembaga hukum) dan garansi (usaha dengan perusahaan asing swasta). Eksportir membayar asuransi jaminan sekitar 1,4% per tahun, sedangkan pada pinjaman sekitar 1,6%-3%, dihitung berdasarkan tingginya investasi. dn

ATP → politik bantuan pembangunan Inggris.

AZAPO → ANC.

B

backward linkages → *external economies, linkage-effects.*

backwash effects → teori perdagangan luar negeri.

BADEA → bantuan pembangunan Arab ke Afrika.

Bahama → Karibia.

bahan dasar Bahan dengan tingkat pengolahan rendah, selain bahan mentah juga sebagian barang setengah jadi dan barang jadi (misalnya kapas dan serat dari bahan kimia). Dipakai untuk pengolahan lanjut barang-barang industri, terkelompok menurut jenis barangnya, industri atau pertanian, serta menurut asalnya, dari dalam atau luar negeri. **dn**

Bahrain 1. Terdiri atas 33 pulau, terletak di Teluk Bahrain antara Saudi Arabia dan Semenanjung Qatar (luas sekitar 691 km²), merupakan teritorial Emirat Bahrain. Pulau terpenting: Bahrain (566 km²), Hawar (41,3 km²), Umm An Nasan (18,9 km²), dan Muharrak (13,8 km²). Merupakan daerah gurun dengan perairan kurang dari 5% luas negara.

2. Sebelum keluarga el-Chalifa yang berkuasa sampai sekarang mengambil alih kekuasaan politik tahun 1782, Bahrain berada di bawah kekuasaan Portugal (sejak tahun 1507)

dan Iran (sejak tahun 1602). Perjanjian dengan Inggris menjadikan Bahrain daerah protektorat di abad ke-19 (Inggris mengurus pertahanan dan politik luar negeri). Tahun 1971 Inggris menarik tentaranya dan mengakui kemerdekaan penuh Bahrain sebagai kerajaan.

3. Bahrain tahun 1987 berpenduduk 416.300 jiwa (orang asing tahun 1981 meliputi 32% penduduk; pertumbuhan penduduk tahunan tahun 1971-1987: 5%, sekitar 33% penduduk berumur di bawah 15 tahun). 81% penduduk adalah orang Arab yang hidup di kota (ibu kota: Manama, tahun 1987 diperkirakan berpenduduk 150.000 jiwa).

4. Struktur ekonomi Bahrain dikuasai oleh industri minyak bumi/ gas bumi. Hanya sedikit penduduk (sekitar 4%) bekerja di sana (tahun 1982: 3% di pertanian; 34,2% di sektor produksi; lebih dari setengahnya di sektor jasa). Sejak tahun '70-an penambangan minyak dikurangi. Dira-malkan bahwa cadangan minyak yang jumlahnya memang sedikit itu akan habis di akhir abad ini. Sektor minyak masih tetap merupakan 70% penghasilan negara. **BABCO** (*Bahrain Petroleum Company*, 60% saham

negara, sisanya dimiliki perusahaan AS CALTEX/*California Texas*), memiliki salah satu rafineri minyak terbesar dan termmodern di Timur Tengah, a.l. mengolah minyak dari Saudi Arabia. Penambangan dan pemasaran seluruh produksi minyak sejak awal tahun '80-an berada di tangan perusahaan negara BANOCO (*Bahrain National Oil Company*). Karena cadangan gas bumi jauh lebih besar daripada minyak bumi, sejak tahun-tahun terakhir digalakkan produksi gas bumi (sebagian besar ada di tangan negara). Sampai sekarang Bahrain menjalankan diversifikasi struktur ekonomi melalui pembangunan instalasi industri yang besar untuk ekspor (aluminium, besi, baja, petrokimia; mitra dagang terpenting: Saudi Arabia); untuk memperbaiki keadaan kebutuhan dalam negeri. Karena pengangguran tahun 1987 mencapai 10% (perkiraan tidak resmi), secara perlahan-lahan mulai dikembangkan industri kecil dan madya.

5. 85% penduduk Bahrain beragama Islam, separo pengikut Suni (Emirnya pengikut Suni) dan separo lagi pengikut Syiah. Oleh karena itu, timbul ketegangan politik terutama sekali sejak terjadi revolusi di Iran (Syiah). Tahun 1987 usaha pengrusakan BABCO oleh teroris yang dididik di Iran berhasil dihindarkan. Tahun 1981 usaha kudeta yang ditunjang Iran dapat digagalkan. Kemudian, dibuat perjanjian pakta pertahanan dengan Saudi Arabia yang beraliran Suni. Bahrain memiliki sistem pendidikan yang baik, 12% biaya pendidikan dikeluarkan dari anggaran negara (1987). 26% pen-

duduk berumur di atas 10 tahun (1984) buta aksara. Sejak tahun 1980 dibangun *Arabian Gulf University* yang dikelola bersama negara-negara Teluk lainnya. Bahasa pendidikan Arab, bahasa nasional Inggris. Pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk.

6. Emir Bahrain (sejak tahun 1961: Syekh Isa bin Sulman el-Chalifa) memerintah dengan Dewan Negara, sebagian besar anggota adalah keluarganya; tidak ada parlemen dan partai.

7. Tahun 1986 selesai dibangun sebuah jembatan sepanjang 25 km yang menghubungkan Bahrain dengan Saudi Arabia. Dengan demikian, tercipta basis turisme dan pembangunan Bahrain sebagai pusat perdagangan. Selain itu ikatan material ke mitra dalam GCC (Kerja sama Negara-Negara Teluk) juga merupakan komponen politik pertahanan untuk Bahrain yang selalu merasa terancam oleh Iran.

Kepustakaan: E.A. Nakleh, *Bahrain. Political Development in a Modernizing Society*, Lexington, dkk. 1976; H. Hecklau, "Bahrain", dlm.: *HDW II*, 6, Hamburg 1983, hlm. 257 dst.; J. Zimmermann, "Bahrain", dlm.: U. Steinbach/R. Robert, *Der Nahe und Mittlere Osten*, vol. 2 Opladen 1988, hlm. 73 dst. **rs**
Baker-Plan Model untuk mengatasi krisis utang internasional (→ utang) yang diajukan mantan menteri keuangan AS, James Baker, dalam Konferensi Moneter Internasional Oktober 1985 di Seoul. *Plan* tersebut menetapkan bahwa 15 negara pengutang utama (11 di antaranya Amerika Latin) yang pada saat itu utangnya telah mencapai sekitar 300 miliar US\$, akan mendapatkan kredit tam-

bahan sebesar 29 miliar US\$ dalam tiga tahun kemudian melalui kreditor internasional pemerintah (IMF, Bank Dunia) dan swasta (bank-bank usaha). Tujuannya adalah agar dapat mengantar negara-negara pengutang tersebut ke tahap pertumbuhan baru sehingga mereka dapat meningkatkan kembali kemampuan membayar utangnya. Sebagai imbalan, negara-negara berkembang ini wajib melakukan reformasi struktur ekonomi sesuai prinsip ekonomi pasar ke arah strategi pertumbuhan yang berorientasi pasar. *Plan* ini berarti mengganti strategi tertentu dalam manajemen krisis utang, dan secara implisit mengakui kegagalan politik austeritas yang disukai IMF (meredam inflasi dan defisit neraca melalui penghematan drastis). Namun, gagasan pokoknya tetap hidup, yaitu negara berkembang dapat mengatasi krisis utang sehingga bisa membayar kembali seluruh utangnya. Inisiatif ini disambut pesimis oleh negara pengutang begitu juga oleh kreditor swasta, dan hanya diterapkan di Meksiko sampai tahun 1988.

September 1988 UNCTAD menyatakan bahwa *Plan* ini gagal, sebagai gantinya menyerukan strategi pencoretan utang secara bertahap dan berangsur.

bt
balanced growth Pertumbuhan berimbang, teori yang diwakili oleh P.N. Rodan dan R. Nurkse yang berpihak pada teori pembangunan ekonomi, mengatakan bahwa *self-sustained growth* (pertumbuhan mandiri) di negara berkembang hanya dapat dicapai melalui penyesuaian konsep secara menyeluruh antara investasi

yang dilakukan sekaligus dan secara timbal balik menciptakan permintaan akan produksi. Elemen strateginya: a. teori *big push* dari P.N. Rosenstein-Rodan; b. teori minimal kritis (*critical minimum effort*) dari H. Leibenstein. Teori-teori ini mengaitkan pertumbuhan PNB dengan pertumbuhan penduduk dan mempostulasi bahwa besarnya investasi modal sedikitnya dapat menimbulkan PNB tahunan rata-rata yang lebih tinggi daripada jumlah penduduk. Teori tandingan-nya: *unbalanced growth*.

dn
Bangladesh 1. Luas 143.998 km², sejak merdeka tahun 1971 merupakan kasus negara berkembang yang "tanpa harapan". Tidak berbeda dengan negara Asia Selatan lain (→ India, → Pakistan), masalah pokok pembangunan: kemiskinan yang tercermin dalam pendapatan per kapita (1989) 180 US\$, masih lebih parah daripada tetangganya di India atau Birma. Negara dengan kepadatan penduduk tertinggi (sekitar 765 penduduk/km²) dan dengan pertumbuhan penduduk tahunan yang tinggi (resmi 2,3%), terus naik menjadi sekitar 115 juta jiwa (nomor 8 di dunia) tahun 1990; tanpa keluarga berencana yang ampuh diperkirakan tahun 2000 penduduk akan mencapai lebih dari 140 juta jiwa. Tanah yang ada sangat sedikit (luas lahan usaha pertanian yang berjumlah 10 juta rata-rata mempunyai tanah 0,9 ha) dan teknik produksi yang terbelakang, tidak memberikan produksi makanan secara cukup; kecuali minyak bumi, hampir tidak mempunyai kekayaan alam. Industri hampir tidak berkembang (kecuali serat yute), tingkat

pendidikan rendah (76% buta aksara), tidak ada wajib sekolah. Situasi kesehatan tidak memadai begitu juga dokter. Tahun 1986: 1 dokter untuk 6.321 penduduk dan 1 tempat tidur rumah sakit untuk 3.335 penduduk.

2. Kehidupan sebagian besar penduduk masih ditentukan oleh pertanian, sangat bergantung dari air. Air terlalu sedikit berakibat kekeringan, terlalu banyak berakibat banjir. Setiap kali air merupakan ancaman bagi penduduk dan ekonomi mereka. Ekonomi luar negeri terbatas pada ekspor beberapa produksi bahan mentah dan pengolahan, terutama sekali berbasis pada serat yute yang sangat cocok tumbuh di Bangladesh. Kebutuhan akan barang impor praktis tidak terbatas karena harus diimpor tidak hanya hasil industri melainkan juga bahan pangan (1/4-nya adalah gandum). Pembiayaan surplus impor berlangsung terutama melalui hibah dan kredit sangat lunak, berasal terutama dari AS, negara industri lainnya, Bank Dunia dan di tahun-tahun terakhir juga dari negara-negara Islam pengeksport minyak. Di samping itu, mengalir masuk devisa (tahun 1985/ 1986: 15,7 miliar Taka) dari pekerja Bangladesh di luar negeri (banyak yang bekerja di Timur Tengah). Keistimewaan Bangladesh adalah homogenitas etnis, bahasa, dan agama: hampir semua penduduk adalah orang Bengali, berbahasa dan menulis Bengali (bahasa sastra kuno) serta memeluk (87%) agama Islam yang menjadi agama negara sejak tahun 1988. Dengan Bengali Barat yang dipisahkan India, Bangladesh berbagi sejarah, asal-usul, bahasa,

dan tulisan, tetapi tidak dalam agama: di Bengali Barat terutama beragama Hindu. Masalah minoritas adalah orang Bihari pelarian (mencapai lebih dari 1 juta manusia) yang berasal terutama dari propinsi Bihar di India dan berbahasa Urdu, setelah terjadi pembagian India (1947) berpihak ke Pakistan. Mereka dituduh berkolaborasi dengan Pakistan Barat selama perang kemerdekaan sehingga bertanggung jawab atas matinya ratusan ribu orang (perkiraan mencapai 3 juta orang). Sebelum tahun 1971 mereka belum juga terintegrasi, dan masih hidup di kamp-kamp pengungsian; ratusan ribu bisa melarikan diri ke Pakistan. Kelompok minoritas terbesar adalah orang Hindu (12,2%), separonya merupakan anggota kasta rendah; lainnya adalah penduduk asli (kebanyakan Buddha, 0,6%) dan Kristen (0,3%).

Di daerah suku Chittagong Hill Tracts terjadi pertikaian bersenjata. Masalah utama negara itu adalah pengadaaan kebutuhan pangan. Menurut perkiraan FAO, pangan 38% penduduk di bawah batas eksistensi minimal, (1978-1980) rata-rata 1.877 kilokalori per hari. Karena hampir seluruh daerah telah dimanfaatkan untuk pertanian, peningkatan produksi pangan hanya bisa dilakukan melalui peningkatan intensitas penanaman (saat ini 154%) dan perbaikan metode penanaman. Hasil per hektar tetap di bawah produksi negara berkembang lainnya, meskipun tanahnya merupakan tanah lumpur subur. Selain masalah peningkatan produksi pertanian yang kelihatannya dapat diatasi secara teknis, juga

ada masalah pemerataan pendapatan yang akut, tercermin pada banyaknya buruh tani tanpa tanah (dan tanpa kerja), pengangguran dan pekerja sambilan di *squatters* (daerah kumuh) di kota-kota. Karena situasi pertanian, perajin dan usaha di pedesaan tidak dapat menyerap tenaga kerja, Bangladesh menghadapi masalah urbanisasi yang berkelanjutan (tahun 1951-1974 penduduk kota meningkat empat kali lipat). Ibu kota Dakka tahun 1951 mula-mula berpenduduk 0,34 juta penduduk, tahun 1986 jumlah penduduk mencapai 4,5 juta penduduk.

3. Api dalam sekam tersebut belum juga membakar karena masih tertimbun masalah lainnya: sampai tahun 1974 masalah kemerdekaan dari penjajah kolonial Inggris dan juga dari India yang sebagian besar beragama Hindu, lalu pertentangan antara Pakistan Barat dan Timur mengenai penganaktirian daerah yang sekarang menjadi Bangladesh; dalam kaitannya dengan keberhasilan memisahkan diri (1971) diutamakan pembangunan kembali instalasi industri dan infrastruktur yang sudah hampir hancur seluruhnya, begitu juga mencari pengganti tenaga-tenaga pemimpin yang melarikan diri ke Pakistan atau ke negara lainnya; masalah integrasi kembalinya 10 juta orang Bangladesh yang pernah melarikan diri sementara ke India.

Penyitaan kekayaan orang Pakistan (Barat) yang menguasai hampir seluruh industri, perdagangan, lalu lintas, dan bank, menyebabkan nasionalisasi secara besar-besaran. Usaha pemimpin kemerdekaan yang

populer, Syekh Mujibur Rahman, mengubah Bangladesh menjadi negara sosialis dengan dukungan Uni Soviet dan India, menyebabkan kelumpuhan ekonomi yang masih tetap belum sembuh akibat perang kemerdekaan. Tahun 1974 Bangladesh mengalami bencana kelaparan lagi setelah kegagalan panen; perbedaan politik dengan AS (embargo Kuba) menghalangi penyembuhan dini melalui pengiriman bahan pangan dari luar negeri. Makin meningkatnya kultus individu, korupsi, dan pertikaian antarfraksi di dalam Liga Awami yang berkuasa serta tarik-menarik antarmiliter dan tentara sukarelawan, hampir menyebabkan pecahnya perang saudara baru. Mujib lalu mengeluarkan UU darurat dan melakukan penangkapan massal. Ia kemudian terbunuh 14 Agustus 1975 di awal sederetan kudeta. November 1975 Jenderal (kemudian presiden) Zia ur Rahman mengambil alih pemerintahan dengan dukungan militer. Sejak Maret 1979 dengan parlemen hasil pemilu dan *Bangladesh National Party* yang didirikannya, berhasil mendapat mayoritas mutlak. Tahun 1981 Zia terbunuh dalam aksi kudeta yang gagal. Lalu, dilanjutkan oleh pemerintah sipil di bawah pemerintahan Presiden Sattar yang dikuatkan dalam pemilu November tahun yang sama. Namun, ia dijatuhkan kembali Maret 1982 oleh Jenderal Hossain Mohammad Ershad yang memimpin sebuah kudeta militer. Pemilu tahun 1988 hanya diikuti sedikit orang dan terutama sekali diboikot oleh pihak oposisi. Dengan jatuhnya Ershad Desember 1990, berakhirilah kekuasaan

militer selama 16 tahun di negara itu. Pemilihan parlemen yang dilakukan awal tahun 1991 cukup *fair* dan tanpa kekerasan. Pemilihan terbersih dalam sejarah negara itu, terpilih Begum Khaleda Zia sebagai perdana menteri pertama. Khaleda Zia sedang menyiapkan peralihan sistem dari presidensial ke demokrasi model Westminster melalui perubahan UUD.

Politik dalam negeri sejak tahun 1975 bertolak belakang dari politik nasionalisasi, tetapi tanpa reswastanisasi perusahaan. Investor asing masih bersikap menunggu sehingga modal asing yang sangat dibutuhkan Bangladesh masuk hanya dalam bentuk bantuan pembangunan, dengan jumlah lebih kecil dibandingkan hibah tahun 1971, tetap berupa kredit meskipun dengan syarat lunak. Tingginya *grant element* menyebabkan beban utang (tahun 1989: 10,7 miliar US\$) menjadi kurang terasa. Namun beban bunga yang berjumlah 108 juta US\$, kurang dari 1,5% utang, bunga dan kewajiban membayar, tetap saja meliputi 25% hasil ekspor (→ utang). Keringanan tertentu neraca pembayaran disebabkan devisa yang dibawa masuk buruh tamu Bangladesh di Timur Tengah.

Setelah Bangladesh tahun 1975 melepaskan diri dari Uni Soviet, menjaga jarak dengan India (kekawatiran akan hegemoni India, pertikaian mengenai arus Sungai Gangga yang diblokkan India, terutama di Farakka dekat Kalkuta), sedangkan bersandar ke Cina akan menyebabkan datangnya sanksi dari India, semuanya ini menyebabkan ekonomi Bangladesh terus bersandar kepada

negara industri Barat. Politik luar negerinya berpegang teguh pada haluan netral sesuai perjanjian dengan negara-negara Islam. Pembabatan hutan di pegunungan Himalaya menyebabkan banjir meningkat. Tahun 1988 Bangladesh mengalami banjir terburuk di abad ini, sedangkan di masa sedikit hujan Bangladesh mengalami musim kering, apalagi India semakin banyak membelokkan arus Sungai Gangga. Kekurangan tanah menyebabkan timbul usaha menghuni delta bagian selatan dan berlangsung pembabatan hutan-hutan bakau Sunderban, yang hancur lagi November 1988 karena angin topan yang besar. Kepustakaan: D. Conrad, *Von der Teilung Indiens zur Teilung Pakistans*. "Staatsrechtliche Aspekte", dlm.: IAF, tahun 4 (April 1973), buku 2, hlm. 136-192; P. Hess, *Bangladesh, Tragödie einer Staatsgründung*, Frauenfeld-Stuttgart 1972; N. Momen, *Bangladesh: The First Four Years 1971-1975*, Dacca 1980; J. Faaland (ed.), *Aid and Influence. The Case of Bangladesh*, London and Basingstoke 1981; W.P. Zingel, "Bangladesh", dlm.: HDW II, 7, Hamburg 1983, hlm. 66 dst.; Frankfurter Allgemeine, "Ein schlimmes Jahr für Bangladesh", 7 Oktober 1991, dlm.: BMZ-Spiegel der Presse, 21/91. wpz

Bank Arab-Amerika Latin → ALAB.

Bank Dunia Bank untuk pembangunan kembali dan pembangunan (*International Bank for Reconstruction and Development*, IBRD) di-konsepsikan tahun 1944 dalam rangka hasil keputusan Bretton Woods, New Hampshire, AS. Perjanjian mengenai Bank Dunia berlaku mulai Desember 1945. Bersama dengan IFC, IDA, dan baru-baru ini MIGA membentuk kelompok Bank Dunia. Kedudukan IBRD-seperti IMF-menurut anggaran dasarnya adalah di negara pemberi

modal dasar terbesar, dalam hal ini di Washington D.C., AS.

IBRD diciptakan karena terlihat adanya kebutuhan besar akan modal jangka panjang untuk membangun kembali dan untuk pembangunan ekonomi semua anggotanya setelah perang dunia berakhir. Mula-mula dana itu dipakai terutama untuk membangun kembali Eropa. Setelah awal tahun 1948—berlandaskan Marshall Plan—dijalankan program AS bernama *European Recovery Program*, sejak tahun 1950 bank ini sebagian besar memberikan bantuan ekonomi ke negara berkembang. Saat ini Bank Dunia merupakan sumber dana terbesar modal kredit untuk negara berkembang. "Tujuan bersama lembaga ini adalah mengangkat tingkat hidup di negara berkembang sehingga sumber daya keuangan dari negara industri dapat disalurkan ke dunia yang sedang berkembang" (Laporan tahunan Bank Dunia tahun 1982, hlm. 3) 30 Juni 1988 Bank Dunia mempekerjakan lebih dari 6.000 pekerja. Di antaranya sekitar 3.500 mempunyai posisi tinggi, mewakili 104 negara.

Keanggotaan dan organ: berdasarkan perjanjian yang disetujui rapat umum tanggal 15 November 1947, IBRD berstatus organisasi khusus PBB. Artinya, secara hukum berdiri sendiri (berbeda dengan UNCTAD, misalnya) dan boleh tidak menjalankan perintah *gremium-gremium* PBB.

Keanggotaan IBRD naik dari 44 negara pendiri tahun 1944 menjadi 151 negara tahun 1988. Selain semua negara kapitalis terpenting juga ada negara-negara sosialis yang ma-

suk Bank Dunia dan menjadi anggota setelah terjadi peralihan kekuasaan sosialis: Aljazair, Cina (Mei 1980 wakil anggota pendiri dialihkan dari Taiwan ke Peking), Etiopia, Guinea - Bissau, Hongaria (Juli 1982), Kamboja, Laos, Mozambik, Nikaragua, Polandia, Republik Rakyat Yaman, Rumania, Vietnam, Yugoslavia, dan Zimbabwe. Uni Soviet yang masih ikut di Bretton Wood tahun 1944, dengan pecahnya "perang dingin" menolak melakukan ratifikasi. Indonesia menjadi anggota IBRD tahun 1966.

Keanggotaan di Bank Dunia mempersyaratkan keanggotaan di IMF. Karenanya sebuah negara yang mengambil kredit pasti melakukan politik moneter, keuangan, dan perdagangan luar negeri yang menjamin integrasi semulus mungkin negara tersebut ke pembagian kerja internasional yang "bebas" (melalui perjanjian kesediaan mengambil kredit dengan IMF), walaupun mengalami masalah neraca pembayaran. Setiap negara mempunyai satu pangsa dalam modal dasar Bank Dunia, yang mencerminkan kekuatan ekonominya (PNB, perdagangan luar negeri, cadangan mata uang). Modal dasar yang disetujui Bank Dunia, menurut perjanjian Bank Dunia, mula-mula ditetapkan 10 miliar US\$ dalam nilai emas pada 1 Juli 1944. Setelah beberapa kali dinaikkan, sampai April 1988 ditetapkan sebesar 171,4 miliar US\$.

Pangsa modal merupakan dasar pembagian hak suara dalam Dewan Pengawas Bank Dunia. Setiap anggota memiliki 250 suara, ditambah

satu suara selanjutnya untuk setiap pangsa modal yang ia berikan. Prinsip "hak suara yang baik hati" ini memberikan pengaruh jauh lebih besar kepada negara-negara berekonomi kuat, berbeda dengan organisasi PBB, yaitu setiap negara hanya memiliki satu suara. Pertengahan tahun 1988 pemilik pangsa modal terbesar mempunyai pangsa suara sebagai berikut (dalam kurun pangsa suara 30 Juni 1980): AS 18,72% (21,11%), Jepang 6,65% (5,3%), Jerman 5,14% (5,32%), Inggris 4,93% (7,82%), dan Perancis 4,93% (5,31%). Lima negara ini berhak selalu menunjuk seorang wakil untuk *Board of Director* (Dewan Pengawas), sementara 17 kursi lainnya dalam *Board* harus perebutkan oleh 146 negara. Bagaimana tidak seimbang situasi suara sampai sekarang, terlihat bahwa lima direktur tersebut mempunyai sekitar 40,97% dari suara keseluruhan, sementara 17 direktur terpilih hanya memiliki 59,03% suara. Meskipun biasanya keputusan dalam *Board* dilakukan secara musyawarah, bukan melalui pemungutan suara, tetapi bobot suara ini memberikan sejenis posisi veto secara politis pada negara industri kaya: tanpa persetujuan mayoritas negara-negara OECD yang kaya, negara berkembang tidak dapat memperoleh kredit.

Organ tertinggi Bank Dunia seperti juga pada IDA dan IFC adalah Dewan Gubernur. Setiap negara anggota menunjuk seorang gubernur atau wakilnya (biasanya menteri ekonomi atau menteri keuangan). Di sini setiap anggota mempunyai satu suara; Dewan Gubernur melakukan

rapat setahun sekali dalam rangka konferensi tahunan bersama Bank Dunia dan IMF. Dewan Gubernur memutuskan mengenai penerimaan anggota baru dan kenaikan modal, tetapi menyerahkan urusan lainnya ke Dewan Eksekutif, merupakan organ pengambil keputusan yang sebenarnya. Kegiatan usaha Bank Dunia dijalankan oleh seorang presiden menurut petunjuk direktorium. Secara formal presiden dipilih oleh Direktur Eksekutif untuk masa jabatan lima tahun, tetapi *de facto* diajukan oleh Presiden AS. Sesuai dengan kesepakatan, presiden seharusnya orang Amerika (sementara Direktur IMF selalu orang Eropa). Presiden merupakan ketua dalam direktorium (tanpa hak suara, kecuali jika jumlah suara sama) dan merupakan pimpinan staf karyawannya.

Presiden Bank Dunia paling terkemuka adalah Robert S. McNamara (April 1968 sampai pertengahan tahun 1981), mantan menteri pertahanan AS memberikan impuls-impuls baru kegiatan Bank Dunia ketika berpidato di Nairobi (1973): perang melawan miskin absolut dan bantuan terhadap pertanian dan industri kecil, terutama ke Afrika Hitam dan negara-negara Asia yang miskin. Pengganti pada 1 Juli 1981 adalah A.W. Clausen, mantan direktur *Bank of America* yang lebih mewakili haluan politik ekonomi pemerintahan Reagan: mendorong sektor ekonomi swasta, mengutamakan kelompok sasaran yang berorientasi pertumbuhan, lebih mengambil jarak terhadap proyek-proyek pedesaan yang berorientasi kemiskinan, tetapi

meningkatkan bantuan teknik dan konsultasi politik untuk negara-negara anggota, terutama negara-negara Afrika di selatan Sahara. B. Conable menjadi presiden tahun 1986. Sampai tahun 1990 ia mempunyai target meningkatkan volume pinjaman sampai sekitar 20 miliar US\$ per tahun, untuk pangsa yang makin tumbuh dalam pinjaman dengan penyesuaian struktur yang cepat dibayar kembali.

Pembiayaan: ada empat sumber:

a. pengambilan kredit netto; b. pembayaran kembali pinjaman; c. hasil netto; d. pembayaran untuk modal dasar. Sumber dana terpenting adalah emisi surat pinjaman dan tabungan swasta pada pemerintahan, bank-bank sentral, dan kreditor lainnya. Pada penjualan surat utang Bank Dunia lama bergantung hanya pada pasar modal AS. Namun, di tahun-tahun terakhir-dengan menguatnya kembali pasar-pasar modal Eropa-Swiss, Jepang, dan Jerman berkembang menjadi sumber dana terpenting untuk Bank Dunia. Pengambilan dana langsung dalam Yen (22%), DM (11%), Frank Swiss (10%), Pound Sterling (5%), dan Gulden Belanda (2%) menutup 50% kebutuhan program. Kumulasi pembayaran kembali pinjaman yang diambil dari Bank Dunia mencapai nilai 8 miliar US\$ di pertengahan tahun 1980. Sampai sekarang Bank Dunia tidak pernah mengalami kerugian akibat tidak adanya bunga dan pembayaran cicilan-aksi penjadwalan utang yang diserukan Kelompok Paris, secara prinsipil mengecualikan kewajiban Bank Dunia. Hal ini tidak disebabkan

oleh nilai prinsipil proyek-proyek yang diuji dan dibiayai Bank Dunia (tidak peduli apakah proyek itu menguntungkan atau membawa bencana, yang pasti negara penerima kredit secara prinsipil telah menjamin akan membayar utang kembali), melainkan oleh posisi kekuasaan politik bank ini di pasar kredit internasional: tidak membayar kredit Bank Dunia tepat pada waktunya, dengan cepat akan berdampak hilangnya kepercayaan semua pasar modal swasta terhadap negara tersebut. Sebaliknya, persetujuan Bank Dunia untuk terus memberi kredit kepada suatu pemerintah, akan memberanikan investor swasta memberikan kredit. Karena Bank bekerja terutama dengan dana dari luar, tingkat bunga yang diberikan kepada peminjam berlaku untuk keseluruhan tempo pinjaman secara prinsipil mengikuti *trend* bunga yang umum berlaku di pasar-pasar modal internasional. Sejak pertengahan tahun 1976 Bank Dunia memakai sebuah rumus bunga yang efektif dan sejak awal tahun 1980 memasukkan ke dalamnya ongkos pencarian modal yang diharapkan. Bunga biasanya ditentukan pada awal tahun untuk 12 bulan. Di pertengahan tahun 1980 bunga pinjaman Bank Dunia adalah 9,25%-untuk itu harus dipertanyakan apakah dengan tingkat bunga demikian masih dapat disebut sebagai bantuan pembangunan. Tempo kredit Bank Dunia mengacu pada jenis proyek yang dibiayai: biasanya berlangsung 15 sampai 20 tahun dengan masa tenggang 5 tahun.

Kegiatan usaha: di satu pihak terdiri atas pembiayaan pembangunan (mencari modal pinjaman) dan di lain pihak memilih, menguji, dan mengawasi proyek-proyek pembangunan yang dibiayai seluruhnya atau sebagian. Bank Dunia (seperti IDA) hanya memberi pinjaman (untuk syarat pembiayaan dari IDA disebut kredit) untuk tujuan "produktif" yang secara ekonomi dan teknis jelas, serta memprioritaskan pembangunan ekonomi negara pengutang. Sekaligus Bank Dunia hanya membiayai proyek tertentu yang tidak dapat memperoleh modal dengan syarat sepadan dari sumber-sumber lainnya (Bank Dunia menurut anggaran dasarnya merupakan *lender of last resort*). Proyek-proyek yang dibiayai Bank Dunia harus diberitakan secara internasional. Pemasok potensial dari negara pengutang tempat proyek itu dilakukan, jika beruntung dapat memperoleh keistimewaan harga (sekitar 10%) untuk menunjang cabang ekonomi nasional atau untuk dapat membuatnya bersaing dalam kepentingan perluasan standar ekonomi pasar internasional. Hal ini memperlihatkan bahwa Bank Dunia secara primer tidak menjalankan kepentingan masing-masing negara (AS, seperti yang sering dianggap), melainkan lebih membantu meluaskan secara internasional aturan main umum sistem ekonomi kapitalis. Sebelum Bank Dunia menyetujui pemberian pinjaman, mula-mula ia menganalisa situasi ekonomi secara umum negara yang menginginkan kredit, dengan cara a.l. meneliti situasi neraca pembayaran, rencana pembangunan, rencana sek-

toral, dan politik investasi negara bersangkutan. Dalam pengujian proyek yang dilakukan selanjutnya terutama sekali dianalisis aspek-aspek ekonomi, teknis, kelembagaan, dan keuangan rencana tersebut untuk meneliti kemungkinan pelaksanaannya dan segi ekonomisnya. Setelah proyek dinyatakan lolos ujian dalam perundingan kredit, diajukan persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh Bank Dunia atau pengambil kredit. Lalu, disetujui dan ditetapkan dalam sebuah *loan agreement*.

Tahun usaha 1988 IBRD menyetujui pinjaman senilai 14,762 miliar US\$ dan baru dicairkan 11,636 miliar US\$. Bank menganggap dirinya sebagai katalisator melalui kegiatannya, terutama di bidang bantuan teknik, memperbaiki persyaratan untuk transfer sumber daya dari sumber-sumber lainnya. Hal yang makin penting di sini adalah pembiayaan bersama kredit-kredit Bank Dunia dan IDA dengan kreditor lainnya. Apa yang menyangkut masalah sektor, Bank Dunia dalam kedua dasawarsa pertama telah mengeluarkan sekitar 2/3 dana untuk lalu lintas dan energi elektronika: masih sampai pertengahan tahun 1978, 2/3 seluruh pinjaman IBRD (10,267 miliar US\$) untuk jalan raya, pembangunan jaringan kereta api dan pelabuhan, serta 21% (9,355 miliar US\$) untuk energi listrik.

Ketika R. McNamara menjadi presiden tahun 1968 politik pinjaman ada berbagai macam: sektor-sektor yang terabaikan seperti pembangunan pedesaan, pendidikan dan keluarga berencana, begitu juga ke-

lompok-kelompok negara di Afrika diprioritaskan dalam pemberian pinjaman. Tahun usaha 1982, 25% pinjaman untuk energi, termasuk kredit untuk penambangan minyak bumi, gas bumi, dan batu bara (tahun 1981: 19%). Sejak tahun 1978 usaha di lebih dari 50 negara dipilih proyek-proyek minyak bumi dan gas bumi; antara tahun 1980 dan 1982 disetujui sekitar 30 proyek, di antaranya 2/3 di Afrika. Sebagai jawaban akan perspektif pembangunan tahun '80-an (resesi ekonomi dunia, *terms of trade* yang semakin jatuh, ongkos energi yang makin mahal), sejak tahun 1980 Bank Dunia memberikan kredit penyesuaian struktur. Tujuannya, menyesuaikan struktur kapasitas produksi suatu perekonomian nasional pada situasi ekonomi luar negeri yang jelas memburuk, agar dalam jangka panjang dapat menyeimbangkan ketidakseimbangan pembayaran (utang devisa!). Selanjutnya, dengan program reformasi demikian juga diciptakan landasan untuk pertumbuhan ekonomi masa depan dan untuk arus masuk modal asing lainnya.

Di bawah tekanan krisis utang dan pembangunan tahun '80-an, Bank Dunia mendapatkan bidang-bidang tugas baru dalam pembiayaan proyek jangka panjang yang melampaui peran lamanya—mendampingi IMF dan GATT—menunjang koordinasi politik ekonomi dunia yang sedang bangun. Perluasan peran Bank Dunia ini mencakup empat elemen pokok: a. menunjang negara pengutang pada pembuatan konsepsi dan pelaksanaan program penyesuaian struktur yang berorientasi pertum-

buhan; b. perbaikan koordinasi bantuan pembangunan dan politik negara industri; c. peran katalisator pada mobilisasi kredit bank swasta tambahan dan investasi langsung untuk menunjang rencana pembangunan negara pengutang; d. pembangunan peran perantara keuangan dan diplomasi Bank Dunia.

Jika di tahun '60-an dan '70-an peningkatan pertumbuhan merupakan mantera ahli-ahli di Bank Dunia, sekarang bunyinya adalah "penyesuaian struktur" (*adjustment*). Pinjaman yang berkaitan dengan hal ini—penyediaan devisa untuk impor suku cadang, bahan mentah, dan produksi awal penting elementer lainnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (ekspor)—dikaitkan secara intensif pada dialog prinsip dengan pemerintah-pemerintah anggota Bank Dunia mengenai perubahan struktural dalam politik anggaran dan ekonomi. Di antaranya adalah usaha-usaha untuk membatasi pengeluaran sektor negara (swastanisasi ekonomi) begitu juga untuk program-program sosial (pengurangan subsidi untuk bahan makanan dasar, bensin, dan pelayanan jasa negara) agar dapat melakukan sebuah terobosan sesuai logika ekonomi pasar.

Jika negara berkembang ingin tetap merupakan bagian yang terintegrasi dari ekonomi dunia dan memperbaiki posisi di dalamnya melalui peningkatan produksi ekspor (termasuk bahan mentah yang diolah), mau tidak mau mereka harus tunduk pada aturan main ekonomi pasar internasional. Selain itu, "dialog" tidak populer antara pakar-pakar lembaga-

lembaga Bretton Wood dan elite di negara berkembang yang berebut kekuasaan di dalam negeri, menimbulkan logika-logika berat tertentu: pemakaian sumber daya yang sedikit (dan dipinjam) itu sering secara tidak produktif oleh pemerintah, secara primer lebih mementingkan legitimasi dan stabilisasi kekuasaannya, menghambat pemanfaatan modal secara efisien dan optimalisasi guna material. Kadang-kadang untuk itu perlu diberi peringatan: hanya dengan melalui tekanan dari Bank Dunia dapat diperbaiki situasi pengadaan sendiri akan bahan makanan di negara-negara Afrika melalui cara rangsangan harga untuk petani. Di lain pihak, pakar-pakar keuangan Bank Dunia mengenali batas tuntutan politiknya, yang pada pelanggaran sebuah pemerintah akan lebih banyak menghasilkan korban sosial dan protes sosial daripada kegunaan ekonomi (dalam arti neraca pembayaran dan neraca perdagangan yang seimbang). Pada perundingan mengenai penyesuaian struktur dari Bank Dunia (dan IMF) di tahun '80-an, akibat sosial yang tidak diinginkan (PHK/ Pemutusan Hubungan Kerja massal dari sektor negara, kegiatan investasi dan impor negara yang dicekik, makin mahalnya kebutuhan hidup di perkotaan), menimbulkan protes dari pihak penduduk (misal di Sudan, Zambia, dan Tanzania), akhirnya menimbulkan sebuah "dialog politik".

Sehubungan dengan pembagian spesifik negara peminjam, dalam tubuh IBRD berlangsung perubahan penting. Dalam jangka waktu tahun 1946-1978, 31,5% pinjaman (sebe-

sar 44,708 miliar US\$ dalam US\$ ketika itu) ke negara-negara Amerika Latin dan Karibia (dengan titik berat di sektor-sektor energi listrik dan jalan raya), 28% ke kelompok negara di Eropa, Timur Tengah, dan Afrika Utara (lalu lintas dan pertanian), serta 21,5% ke Asia Timur dan Pasifik (pertanian dan lalu lintas). Sejak pertengahan tahun '70-an jumlah pinjaman Afrika Hitam ke IBRD dan kredit IDA meningkat, sesuai dengan program Bank Dunia, di antaranya lebih banyak menunjang negara-negara miskin dan kelompok miskin daripada sebelumnya.

"Perang langsung terhadap kemiskinan" sejak pidato McNamara di awal tahun '70-an merupakan merek retorika Bank Dunia. Sebagian besar dana IBRD dan IDA disalurkan ke negara dan kelompok miskin: tahun 1987 diberikan "program bantuan khusus tiga tahun" dari negara industri Barat dipimpin Bank Dunia untuk 17 negara Afrika dengan pendapatan terendah dan masalah utang dalam jumlah 6,4 miliar US\$, dan antara tahun 1979-1988 pinjaman IBRD dan IDA kepada "negara-negara termiskin" naik (artinya, mereka dengan pendapatan per kapita kurang dari 425 US\$ dalam tahun basis tahun 1986) dari 4.581,4 juta US\$ menjadi 7.569,4 juta US\$ (di antaranya 4.130,3 juta US\$ IBRD dan 3.439,1 juta US\$ dana IDA).

Dampak positif sulit dilihat, di satu pihak Bank Dunia memberikan angka-angka manusia yang hidup dalam "miskin mutlak" sejumlah 700-1.000 juta orang dan mem-

beritakan dalam laporan tahunan tahun 1988 bahwa ia belum menemukan pemecahan masalah kemiskinan (sekaligus mengharapkan bisa mendapatkan dampak sosialnya sampai tahun 2000!). Di lain pihak, proyek bertendensi sosial gagal akibat kepentingan penguasa yang sudah mapan (tuan tanah kaya, fungsioner negara yang tinggi, dan perwira militer), yang menghalangi partisipasi sesungguhnya dari bawah.

Cina dengan 14 kredit Bank Dunia dan IDA dalam jumlah keseluruhan 1,7 miliar US\$ tahun 1987-1988 saja merupakan negara penerima kredit kedua terbesar dari Bank Dunia di belakang India (dengan 18 kredit dalam nilai 3 miliar US\$). Bank Dunia terutama menunjang reformasi ekonomi pemerintah di Beijing, dari perencanaan langsung dan pengendalian produksi secara terpusat makin beralih ke kemungkinan campur tangan tidak langsung seperti kurs tukar, bunga, dan politik perpajakan.

Pada reformasi perusahaan seperti sebelumnya ditekankan tanggung jawab untuk keuntungan dan kerugian; selain itu dalam rangka sistem manajemen kontrak dilaksanakan rangsangan prestasi. Kredit pertanian Bank Dunia diharapkan membantu untuk menguji sebuah program terpadu, meramalkan penggunaan tanah yang baru, memberikan harga barang dalam hubungan dengan penghapusan subsidi alat-alat produksi dan menguatkan rangsangan untuk penghasilan gandum ekspor berkualitas tinggi.

Penilaian secara kritis: citra internasional Bank Dunia sebagai lembaga multilateral terpenting di dunia untuk kredit pembangunan telah sangat berubah sejak berdirinya. Dalam dua setengah dasawarsa berdirinya, ia berfungsi sebagai bank yang didominasi AS, terutama membiayai proyek-proyek besar padat devisa dan teknologi untuk kepentingan lapisan atas dan menengah dalam rezim pro kapitalis. Di bawah Robert McNamara ia meluaskan dan memodifikasi programatikanya: terkejut karena kegagalan yang ada sampai sekarang dengan proyek-proyek murni berorientasi pada pertumbuhan dan berdasarkan jumlah "miskin mutlak" di Dunia Ketiga yang melonjak drastis. Tahun '70-an Bank Dunia mengeluarkan slogan *redistribution with growth*, artinya pertumbuhan ekonomi ditambah pemerataan pendapatan yang adil. Namun, usaha untuk lebih banyak keadilan sosial tidak boleh merugikan prinsip efisiensi ekonomi dan keuntungan. Bank Dunia dengan program bantuan pertanian bisa mendapatkan keberhasilan di Asia Selatan dengan peningkatan produksi bahan makanan, perbaikan situasi pendapatan dan hidup kelompok sasaran petani kecil, sementara keberhasilan tidak atau kurang dicapai di Afrika Hitam. Memang proyek-proyek Bank Dunia dan IDA rata-rata mencapai keuntungan ekonomi keseluruhan sekitar 18% (meskipun metode penghitungan sering dipertanyakan). Namun, kegunaannya untuk masyarakat keseluruhan, program tani kecil, proyek infrastruktur besar (dengan ongkos akibatnya yang tinggi) begitu juga semua proyek

yang bertujuan mendapat devisa terus mengubah fungsi sumber daya nasional untuk produksi Bank Dunia, tetap dipertanyakan. Kelihatannya metode bantuan sampai sekarang tidak mengubah situasi politik dan pemilikan, tidak dapat mencapai sebagian besar "miskin mutlak": tani kecil dan nomad di tanah-tanah marjinal, buruh harian, dan buruh pengembara (\rightarrow *share cropping*) dengan kontrak garapan yang tidak pasti, dsb. Memang Bank Dunia berhasil mentransformasi sebagian orang miskin menjadi pengambil kredit, yaitu petani yang memproduksi untuk pasar dan menjadi pelanggan tetap untuk bibit dan pupuk, tetapi sekaligus menyebabkan atau menguatkan polarisasi sosial antara yang relatif diuntungkan dengan penduduk setempat lainnya sehingga menimbulkan ketegangan politik dan sosial.

Selain itu tidak dapat dikatakan dengan pasti, apakah tanpa kredit pembangunan dari Bank Dunia kesengsaraan sosial di Dunia Ketiga akan berkurang daripada yang ada sekarang. Di satu pihak Bank Dunia dengan kredit besarnya untuk proyek-proyek infrastruktur (dalam lalu lintas dan bidang energi) membantu memanfaatkan bekas daerah jajahan untuk ekonomi pasar dan mengaitkannya ke ekonomi dunia kapitalis, di lain pihak ia terperosok dalam gelombang persaingan dan tekanan ekonomi. Sementara ia menciptakan pendapatan kerja baru (misalnya dalam sektor pertanian yang dimodernisasi), di lain pihak ia menghancurkan landasan kehidupan manusia di zone ekonomi prakapitalis (dengan

alasan apa pun juga) yang tidak dapat atau tidak ingin ditarik ke kehidupan ekonomi modern. Orang nomad di tepi Sungai Nil (Sudan) dan petani subsistensi di *Zone Sahel serta korban proyek-proyek modernisasi yang dibantu oleh Bank Dunia seperti penggarap tanah di India, Meksiko atau Brasilia, tempat kehutanan dan pertanian industri merampok sumber daya yang mereka perlukan untuk hidup (tanah, air, hutan alami, pasar lokal, perajin lokal, kesadaran). Tempat dulu tumbuh jawawut dan umbi-umbian untuk konsumsi lokal, sekarang ditanami produksi untuk ekspor misal kapas, nanas, dan bunga potong.

"Penghapusan" Bank Dunia tidak realistis dan tidak diinginkan. Ia harus lebih direformasi sehingga dapat menjalankan fungsi pengendali dan pengantar jalan demi kepentingan bersama masyarakat di satu bumi yang bisa dihidupi selanjutnya: sebuah peringatan ilmiah terhadap perampokan alam dan menginginkan bantuan teknologi proyek-proyek pembangunan sesuai dengan situasi sosial dan ekologi.

Publikasi: Worldbank Atlas, Laporan Perkembangan dunia.

Alamat: 1818 H-Street, N.W. Washington D.C. 20433 USA. Kantor Eropa: 66, Avenue d'Iena, F-75116 Paris. Kantor Jakarta: Jl. H. Rasuna Said, kav. B 10, Jakarta.

Kepustakaan: Deutsche Bundesbank, *Internationale Organisationen und Abkommen im Bereich von Währung und Wirtschaft*, Sonderdrucke No. 3, Frankfurt 1981 (cet. ke-2); R. Tetzlaff, *Die Weltbank: Machtinstrument der USA oder Hilfe für Entwicklungsländer?*, München und London 1980; C. Payer, *The World Bank. A Critical Analysis*, New York and London 1982; A.W. Clausen dll., *Die Weltbank nach 40 Jahren. Herausforderung und Antwort*.

Ein Weltbank Symposium am 17 April 1986 di Bonn, ed. Forschungsinstitut der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, Bonn 1986; T.U. Koll (ed.), Die Weltbank. Struktur, Aufgaben und Bedeutung, Berlin (West) 1988; "Umkämpfte Souveränität". Zur Politik von IMF und Weltbank, dlm.: Peripherie No. 33/34 (Agustus 1988); R. Tetzlaff, "Weltbank und Währungs-fonds als umstrittene 'Krisenmanager' in den Nord-Süd-Beziehungen", dlm.: APuZ (1988) No. 33/34. **rt**

Bank Investasi Eropa → EIB.

Bank Pembangunan Afrika → ADB.

Bank Pembangunan Asia → ADB.

Bank Pembangunan Inter-Amerika → BID, IBD.

Bank Pembangunan Multilateral → MDBs.

Bank Pembangunan Regional Termasuk **Bank Pembangunan Multilateral (MDBs)**, dibentuk untuk membantu pembangunan ekonomi di Amerika Latin (**BID**), Afrika (**ADB**), dan Asia (**ADB**). Bersama dana-dana khusus (**FOE** dan **ADF**) merupakan instrumen terpenting saat ini untuk pembiayaan pembangunan, terutama dalam sistem bantuan pembangunan multilateral.

Tugas-tugas: pembiayaan (mencari dan membagikan dana), integrasi (pertumbuhan ekonomi regional yang seimbang), mobilisasi (modal pemerintah dan swasta), koordinasi (politik pembangunan dan rencana pembangunan negara-negara anggota), dan bantuan teknik. Anggota bank-bank pembangunan regional ini juga negara yang tidak berada di kawasan tersebut, tetapi pembagian dana yang tersedia tetap berdasarkan kawasannya. Syarat pemberian dana bervariasi antara hibah, kredit

berbunga lunak, dan persyaratan komersial sehingga sebenarnya tidak berbeda jauh dengan Bank Dunia jika dilihat aspek-aspek organisasinya (pembentukan cabang-cabang lembaga dan dana khusus yang memberi persyaratan kredit lebih menguntungkan). Aksi strategi pembangunan dapat ditempatkan melalui politik pembagian dana, di antaranya merintaskan **LLDC** melalui bantuan investasi di bidang pemenuhan kebutuhan dasar dan pembangunan pedesaan. Sementara **BID** di Amerika Latin menjadi sumber utama pembiayaan pemerintah dari luar negeri, bank-bank regional di Asia dan Afrika tidak memberikan impuls politik pembangunan yang serupa.

Kepustakaan: W.E. Fischer, "Die Grenzen des Instruments Entwicklungsbank", dlm.: E+ZS/1983, hlm. 18 dst. **dn**

Bank untuk Keseimbangan Pembayaran → BIZ.

bantuan barang Bagian kerja sama keuangan ke negara berkembang yang tidak terikat proyek atau program, untuk membiayai operasionalisasi kebutuhan impor barang dan jasa (untuk pemeliharaan, pemakaian, perjalanan, dan perluasan instalasi produksi yang ada). **dn**

bantuan humaniter Bantuan langsung dan cepat untuk menghapus atau meringankan akibat dari situasi darurat yang akut, seperti bencana alam, banjir, epidemi, dan bencana musim kering. Bantuan bilateral dan multilateral (misalnya **UNCHR**, **UNICEF**) ditujukan langsung kepada penderita. **dn**

bantuan/kerja sama teknik Instrumen politik bantuan pembangunan terpenting di samping bantuan ke-

uangan. Bantuan teknik bertujuan memberi pengetahuan dan kemampuan teknik, ekonomi, dan organisasi ke negara berkembang, serta memperbaiki situasi penggunaannya. *Bentuk*: pengiriman dan pembiayaan penasihat, pendidik, pakar, penilai, dan tenaga ahli lainnya (→ bantuan personal); pengiriman barang perlengkapan dan material; pemasokan alat produksi industri dan pertanian (→ bantuan barang), penyediaan jasa dan karya; membantu pendanaan proyek dan program (→ bantuan proyek) lembaga setempat. Bantuan teknik dilakukan berdasarkan prinsip campur tangan sesedikit mungkin: a. mendorong atau membangkitkan inisiatif dan tanggung jawab sendiri; b. mengirim tenaga ahli selama tidak ada tenaga ahli setempat; c. menghindarkan pengalihan gambaran, pemecahan masalah, dan teknologi yang tidak tepat. **dn**

bantuan kesehatan Berorientasi pada determinan-determinan kesehatan dan berada langsung dalam beberapa bidang yang relevan dengan politik bantuan pembangunan. Sesuai dengan konsep *Primary Health Care*, yang dibantu adalah pelayanan kesehatan dasar dan struktur penunjangnya (rumah sakit desa, laboratorium, logistik obat-obatan, rehabilitasi ortopedi), kesehatan keluarga dan keluarga berencana, serta pencegahan dan pengendalian penyakit tropis dan penyakit akibat kemiskinan. Bantuan untuk sektor kesehatan ini 18% berasal dari LSM, 22% berasal dari organisasi internasional (*UNICEF, *WHO, dsb.) sebagai bantuan reguler dan bantuan program. **hjd**

bantuan keuangan/kerja sama keuangan/bantuan modal Diberikan dengan syarat lunak untuk menunjang pembangunan ekonomi dan sosial negara berkembang. Biasanya bantuan keuangan diberikan sebagai pinjaman. Tingkat pembangunan suatu negara berkembang menentukan tingginya *grant element*. Bantuan keuangan diberikan terutama untuk pembiayaan (sebagian) proyek atau program (→ bantuan proyek), barang impor (→ bantuan barang), bantuan struktur, dan pembiayaan balik bank-bank pembangunan. **dn**

bantuan netto Bantuan netto keuangan; definisi untuk nilai netto bantuan keuangan. Bantuan keuangan netto didapat dari seluruh volume bantuan tahunan negara industri (atau satu negara industri) ke negara berkembang dikurangi pembayaran utang kredit terdahulu dan modal yang mengalir kembali ke negara industri. **dn**

bantuan pangan Pemasokan bahan makanan dengan prioritas tertentu (dalam statistik sering dibedakan dari bantuan barang). Bantuan ini—kecuali dalam kasus bencana alam—dilihat dari aspek strategi pembangunan sama sekali tidak bersifat netral. Sebab, bantuan demikian sebenarnya membantu negara kreditor mengalirkan surplus hasil pertanian secara struktural ke pasar dunia lalu ke negara berkembang (banyak di antaranya bantuan AS dan ME)—tidak peduli apakah diberikan gratis atau harus membayar—cenderung menurunkan harga, tawaran, dan pendapatan pertanian. Dalam sebuah *circulus vitiosus*, bantuan pangan lebih mendorong

pelarian dari pedesaan dan menyebabkan bantuan pangan dibutuhkan lagi. Subsidi konsumen yang diharapkan dengan bantuan pangan, nyatanya lebih membantu kelas menengah ke bawah dan bukan yang miskin. Bantuan ini sering tidak mencapai si miskin di pedesaan (yang tidak mempunyai tanah).

wpz

bantuan PBB untuk pengungsi Palestina → UNRWA.

bantuan pembangunan Istilah baru yang netral disebut kerja sama keuangan dan kerja sama teknik—merupakan istilah untuk semua bantuan material (bantuan modal: kredit, tunjangan, investasi langsung; bantuan teknik: bantuan barang, kredit ekspor) dan bantuan nonmaterial (bantuan teknik: pengiriman tenaga ahli dan konsultan) dari lembaga swasta (ekonomi, gereja, dsb.) dan lembaga pemerintah (bantuan pembangunan pemerintah) di negara industri dan negara berkembang. Diberikan dari satu negara ke negara lain (bilateral) atau melalui organisasi internasional (multilateral, Bank Dunia). Dengan adanya pergeseran yang berlangsung dalam ekonomi dunia, sejak awal tahun '70-an selain instrumen klasik bantuan pembangunan (kerja sama keuangan dan teknik), dibahas bentuk-bentuk baru bantuan (bantuan pembangunan melalui pemerataan SDR, link); bantuan pembangunan melalui dana trustee khusus dari IMF; bantuan pembangunan melalui dana subsidi IMF, pengenaan pajak negara kaya untuk negara-negara miskin serta penarikan pajak pembangunan di negara industri (→ Komisi Utara-Selatan). Pengertian "bantuan

pembangunan" sering dipakai dalam arti yang sama dengan "politik bantuan pembangunan". Sebenarnya pengertian politik bantuan pembangunan lebih luas dan dimaksudkan semua cara, usaha, dan strategi yang direncanakan atau digunakan oleh negara berkembang atau negara industri dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi/sosial.

Tujuan: bantuan pembangunan—membangun suatu perekonomian nasional yang didefinisikan terbelakang—tidak untuk tujuan pembangunan itu sendiri, melainkan dilakukan dengan melihat negara berkembang dalam hubungannya dengan negara industri dan janji keberhasilan jika mengikuti tujuan tersebut. Artinya, (politik) bantuan pembangunan merupakan bagian dari politik keseluruhan. Ia mendapatkan impuls terpenting berdasarkan motivasi nasional, di antaranya motivasi politik luar negeri dan politik ekonomi luar negeri.

Politik bantuan pembangunan membutuhkan kemampuan belajar (pedagogik pembangunan) di masyarakat industri sendiri (= kebutuhan akan perubahan struktur, gaya hidup baru). Secara sektoral kerja sama keuangan berbentuk kredit pembangunan dalam masalah proyek-proyek terpisah (instalasi produksi, instalasi infrastruktur, untuk pemasokan barang; pemasokan barang modal; peningkatan program sektor, subsektor, dan regional; serta pemberian pinjaman ke Bank Pembangunan Regional dan nasional. Titik berat kerja sama teknik ada di bidang pendidikan dan pemasokan barang-barang perlengkapan.

Tidak semua bantuan pembangunan pantas mendapat nama ini. Hanya sekitar 25% bantuan pembangunan merupakan hibah, lainnya harus dikembalikan dengan berbagai syarat. Melihat persyaratan (tinggi bunga, waktu tenggang, dan jangka waktu pinjaman) dan tingkat keuntungannya, kedua bentuk bantuan-kredit ekspor dan investasi langsung-(sekitar separo dari seluruh bantuan) tergolong sama seperti hubungan bisnis biasa. Namun, dalam statistik negara-negara OECD ia dinilai sebagai bantuan pembangunan. Bidang tersendiri bantuan pembangunan terbesar, yaitu bantuan modal atau bantuan kredit dipakai sebagai pembiayaan puncak dan usaha melindungi kegiatan swasta (ekspor, saham). Persyaratan kredit yang berat (hampir mendekati bunga dan tempo kredit seperti dalam pasar biasa) sampai tahun '60-an dan prinsip ikatan pemasokan (hampir 100% di AS, 25% di Jerman), serta bagian yang meningkat dari pemasokan barang (bahan mentah, suku cadang) untuk instalasi industri yang telah berjalan, makin memperlihatkan prioritas kepentingan politik ekonomi sendiri dalam politik pembagian bantuan. Hal ini menghalangi negara berkembang mencari tawaran yang paling menguntungkan di pasar dunia dan membesarkan utang negara-negara tersebut. Sejak pertengahan tahun '60-an (semakin kuat di tahun '80-an sebagai reaksi atas ancaman ketidakmampuan membayar dari beberapa negara pengutang), persyaratan-persyaratan bantuan modal diperbaiki.

Selain penggunaan bantuan secara politik ekonomi, paling tidak sampai akhir dasawarsa pembangunan pertama, kepentingan politik luar negeri negara kreditor (mendesak komunisme, isolasi Jerman Timur) makin menjauhkan arti bantuan ini dari tujuan global sebenarnya, yaitu pembangunan bangsa-bangsa terbelakang.

Terlalu menganggap modal sebagai motor pembangunan dan bantuan modal dalam dasawarsa pembangunan pertama (→ Laporan Pearson)-akibat dari menyamakan pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi (→ teori pertumbuhan) begitu juga kritik yang makin banyak terhadap penyalahgunaan bantuan untuk kepentingan politik luar negeri serta kegagalannya (lihat kekalahan AS di Vietnam, pengakuan dunia terhadap Jerman Timur, politik peredaan ketegangan)-menyebabkan dilakukan revisi bagian-bagian strategi pembangunan di awal dasawarsa pembangunan kedua. Strategi pembangunan PBB untuk dasawarsa pembangunan kedua lalu bertitik berat pada bantuan langsung untuk memperbaiki situasi hidup di bidang pangan, kesehatan, dan keluarga berencana; perbaikan struktur di daerah pedesaan; memerangi pengangguran dan kesempatan kerja; bantuan untuk rencana pendidikan yang berkaitan dengan pekerjaan dan lingkungan; perluasan dan penciptaan suatu skala luas sektor ekonomi usaha dan ekspor; serta peningkatan kemampuan negara berkembang untuk penelitian, perencanaan, dan organisasi.

Cara pemberian bantuan disesuaikan dengan tingkat perkembangan

setiap negara penerima (bantuan teknik gratis ke negara-negara "termiskin dari yang miskin" (LLDC, MSAC, negara pedalaman), kredit untuk negara-negara yang lebih kuat membayar, bantuan teknik yang harus dibayar kembali ke negara-negara minyak (→ OPEC), peralihan titik berat bantuan modal ke berbagai bentuk bantuan teknik (terutama dalam sektor pertanian dan pendidikan) dan bantuan perdagangan, dari bantuan ke satu proyek terpisah (→ bantuan proyek) ke proyek terpadu (kombinasi bantuan teknik dan bantuan modal) dan untuk pembiayaan program. Di tingkat program, kepentingan politik luar negeri jangka pendek dihapus demi kepentingan tujuan jangka panjang (peredaan ketegangan, politik bantuan pembangunan sebagai politik perdamaian); tetapi kepentingan politik ekonomi negara kreditor makin ditonjolkan (peningkatan investasi langsung, bantuan pembangunan untuk mengamankan bahan mentah dan peningkatan ekspor) di antaranya akibat krisis energi. Semakin tajamnya konflik Timur-Barat akibat krisis Afghanistan, Amerika Tengah, dan Polandia, meningkatkan bahaya penggunaan bantuan pembangunan untuk kepentingan politik luar negeri. Tanda-tanda revolusi Iran akhirnya secara konsepsional melahirkan pemikiran pertengahan tahun '80-an untuk makin memperhatikan aspek-aspek sosio-kultural dalam politik kerja sama.

Tanggapan negara berkembang terhadap bantuan pembangunan bersifat ambivalen. Di satu pihak negara berkembang menuduh bantuan pem-

angunan sebagai pengisapan neokolonialisme, tetapi di lain pihak menganggapnya sebagai suatu tindakan memperbaiki citra dosa kolonial dan menuntut-tidak hanya akibat tingkat → utang yang tinggi, kurangnya devisa, dan teknologi-penambahan bantuan dalam bentuk bantuan anggaran yang tidak perlu dikembalikan serta alih teknologi dengan tujuan keseimbangan kemakmuran di seluruh dunia. Sementara dalam perspektif jangka panjang negara industri mengutamakan tujuan-tujuan pengamanan bahan mentah (terutama ME dan Jepang) dan pemanfaatan pasar-pasar penjualan, negara berkembang mengutamakan adanya suatu perubahan struktural dalam perdagangan internasional dan sistem moneter. Bersamaan dengan itu bantuan pembangunan tipe klasik makin terdesak oleh suatu integrasi negara berkembang ke pasar dunia (= konsep negara industri dengan motto: "dagang dan bukan bantuan") dan terdesak oleh usaha-usaha suatu perubahan struktural dalam sistem perdagangan internasional dan sistem moneter dunia (= konsep negara berkembang, tuntutan akan tata ekonomi dunia baru, dengan motto: "prioritas dan bukan penyamaan perlakuan"). Tujuan semula semua politik bantuan pembangunan, yaitu memberikan sumbangan langsung untuk perbaikan situasi hidup penduduk di Dunia Ketiga (→ kebutuhan dasar), di banyak negara berkembang makin dikorbankan demi kepentingan tingkat pertumbuhan yang menguntungkan terutama hanya sekelompok kecil saja. Dorongan untuk mendapatkan devisa

akibat utang luar negeri dan kewajiban membayar kembali, makin menguatkan *trend* ini. Kontradiksi yang mungkin ada antara tujuan pembangunan dengan tujuan lainnya seperti "keadilan sosial" dan "kemerdekaan nasional" terancam terabaikan, begitu juga pertanyaan akan korban/ ongkos sosial dan kemungkinan akibat sosio-kultural dalam politik bantuan pembangunan (kehilangan identitas kultural, kehilangan arti hidup).

Tujuan jangka panjang bantuan pembangunan, yang sejalan dengan waktu menjadi berlebihan, makin bisa cepat dicapai jika negara berkembang berhasil meluaskan pasar dalam negerinya serta melakukan kerja sama teknik dan ekonomi (→ hubungan Selatan-Selatan).

Kepustakaan: D. Kebschull/K. Fassbender/A. Naini, *Entwicklungspolitik. Eine Einführung*, cet. ke-2, Opladen 1976; H.G. Klein, *Entwicklungshilfe - Spezifische Ausserungsform internationaler Politik*, Baden-Baden 1977; J. Betz, *Die Internationalisierung von Entwicklungshilfe*, Baden-Baden 1978; G. Wiegand, *Organisatorische Aspekte der internationalen Verwaltung von Entwicklungshilfe*, Berlin 1978; K. Ringer/E.A. von Renesse/Chr. Uhlig, *Perspektiven der Entwicklungspolitik*, Tübingen 1981; M.v. Hauff/B. Pfister-Gaspary (ed.), *Entwicklungspolitik. Probleme, Projektanalysen und Konzeptionen*, Saarbrücken 1984; G. Braun, *Nord-Süd-Konflikte und Entwicklungspolitik*, Opladen 1985; M. Kaiser/N. Wagner, *Entwicklungspolitik. Grundlagen-Probleme-Aufgaben*, Bonn 1986; F. Nuscheler, *Lern- und Arbeitsbuch Entwicklungspolitik*, cet. ke-2, Bonn 1987.

kb
bantuan pembangunan Arab ke Afrika Negara-negara Arab ang termasuk dalam OPEC serta berbagai lembaga multilateral Arab dan OPEC memberikan bantuan pembangunan ke negara-negara Afrika. Lembaga terpenting bantuan pembangunan

multilateral dari Arab ada-lah *Special Arab Aid Fund for Africa (SAAFA)*, *Arab Bank for Economic Development in Africa (ABEDA dan BADEA)*, *AFTAA-AC*, *Islamic Development Bank (IsDB)*, dan *OPEC Special Fund (OPEC.SF)*. Selain itu, negara-negara Arab di Afrika Utara mempunyai andil dalam modal *African Development Bank (*ADB)*. Sebagian besar bantuan pembangunan dari negara-negara Arab disalurkan secara bilateral dan dilakukan oleh bank pembangunan Arab (misalnya *Kuwait Fund for Arab Economic Development/KFAED*, *Saudi Fund for Development/SFD*, dsb.)

bantuan pemerintah → ODA.

bantuan pendidikan Faktor pembangunan ketiga terpenting selain sumber daya alam dan penyediaan modal adalah tersedianya tenaga kerja terampil. Karenanya, ada tuntutan bahwa dalam semua proyek bantuan teknik dan bantuan keuangan, pendidikan tenaga-tenaga ahli dan pimpinan harus mempunyai peran penting.

dn
bantuan pengetahuan Bantuan pembangunan dalam bentuk bantuan personal dan barang (uang) untuk perluasan sarana ilmu pengetahuan di negara berkembang; bantuan pengetahuan menjadi semakin penting di NIB dan di negara yang kurang berkembang, tetapi di bidang-bidang tertentu secara teknik maju, misalnya India.

wpz
bantuan personal Disebut juga sebagai kerja sama personal, merupakan bagian dari bantuan/kerja sama teknik. Bantuan personal mencakup pengiriman tenaga ahli (pakar pem-

bangunan, tenaga ahli, *relawan pembangunan) ke negara berkembang; pendidikan dan pendidikan lanjut person/tenaga ahli dari negara berkembang; menunjang usaha-usaha *reintegrasi. Bantuan personal bertujuan menyampaikan *know-how* di berbagai bidang, misalnya di bidang pertanian, industri, pendidikan, dan ilmu pengetahuan, infrastruktur material dan sosial, dsb. dn

bantuan program Bentuk khusus *bantuan proyek di bidang *bantuan/kerja sama keuangan, berisi peningkatan rencana investasi yang secara sektoral dan regional terbatas. Bantuan program untuk membantu (bagian) pembiayaan program pembangunan dan mempunyai keuntungan menempatkan bantuan secara terkoordinasi. Sekaligus ada kemungkinan membuat perubahan dana yang perlu di saat program berlangsung. Dibedakan antara program sektor terintegrasi dan program regional (misalnya jalan raya ditambah reformasi pertanian, pengairan, pengadaaan kredit, dsb.) dan program paralel (misalnya rumah sakit, sekolah). dn

bantuan proyek Disebut juga bantuan yang terikat proyek, adalah bagian dari *bantuan modal ke negara berkembang yang mengandung pembiayaan rencana pembangunan, investasi yang terbatas pada tempo, teknik, dan ekonomi. Contoh: pembangunan jalan dari A ke B, jembatan, dan pabrik pupuk. dn

bantuan struktur sosial Mencakup semua usaha untuk meningkatkan *koperasi, *LSM/LPSM, *community development, kerja sosial, radio dan

televisi pendidikan, kerja untuk remaja, dsb. Jadi, merupakan bidang luas dengan berbagai kegiatan politik bantuan pembangunan. dn

bantuan untuk bencana alam *Bantuan pembangunan sebagai bantuan langsung jika terjadi bencana alam, sering merupakan hibah dan sebagai *bantuan barang melalui organisasi-organisasi seperti *Palang Merah. wpz

barang investasi Tepatnya adalah barang investasi instalasi, juga disebut barang modal, merupakan barang-barang dalam produksi industri yang ditentukan untuk investasi instalasi. Jadi, untuk pembangunan, perawatan, perluasan atau perbaikan perlengkapan produksi (mesin, sarana transportasi, dsb.). dn

barang modal → barang investasi.

Barbados → Karibia.

Barbuda → Karibia.

basic needs → kebutuhan dasar.

BATU serikat buruh (di Dunia Ketiga).

batu loncatan Istilah untuk elite penguasa di negara berkembang—dalam model sentra-periferi—menjadi mata rantai antara metropol dan periferi. Mereka ini merupakan bagian integral masyarakat periferi dengan ekonomi yang terintegrasi ke pasar dunia dan tetap dipertahankan terintegrasi (sektor ekspor) ke sana. Seperti metropol yang mendapat keuntungan pada sistem ekonomi dunia, melalui hubungan ini mereka memperoleh posisi istimewa di masyarakat negara berkembang. dn

BCEAO (*Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest*) Bank Sentral Negara-Negara Afrika Barat.

BCIE → MCCA.

BDD (*British Development Division*) Kantor regional departemen bantuan pembangunan Inggris yang berkedudukan di Barbados dan memberikan bantuan bilateral kepada *Commonwealth Carribbean*.

BEAC (*Banque des Etats de l'Afrique Centrale*) Bank Sentral Negara-Negara Afrika Tengah.

beban utang Utang dan bunga dari kredit yang diberikan. Beban utang sejak tahun '70-an untuk banyak negara berkembang dan beberapa NIB (terutama di Amerika Latin), terutama sekali kelompok negara berkembang termiskin, menjadi masalah yang tidak terpecahkan. Besarnya beban utang ditentukan oleh kuota beban utang, yang memperlihatkan beban utang pada utang pemerintah dalam % ekspor barang dan jasa. *Trend* dasar memperlihatkan tingkat pertumbuhan beban utang dan pendapatan ekspor. Beban utang negara berkembang di tahun '60-an tumbuh sekitar 9%/tahun, sementara ekspor meningkat sekitar 7,5%/tahun. Dikotomi antara kedua tingkat pertumbuhan tersebut membesar secara dramatis untuk sebagian besar negara berkembang tahun '70-an dan '80-an. Kuota beban utang (juga disebut kuota atau relasi beban utang) untuk semua negara berkembang tahun 1977 sekitar 17%; tahun 1986 mencapai 26% dengan diferensiasi regional yang makin besar (lihat Tabel 1).

Seluruh beban utang negara berkembang tahun 1986 berjumlah sekitar 137 miliar US\$, di antaranya 70,3 miliar US\$ hanya bunganya saja. Sebagai perbandingan, bantuan

pembangunan pemerintah seluruh negara kreditor bersama-sama (*OECD, *OPEC, *COMECON) berjumlah sekitar 37 miliar US\$ sehingga pembayarannya hanya berjumlah sekitar setengah dari pembayaran bunga.

Tabel 1: Kuota Beban Utang Negara Berkembang (utang dan bunga dlm. % ekspor)

Daerah	1975	1985
Afrika, Sahara bagian selatan	9	31
Cina dan India	10	11
Asia lainnya	17	26
Afrika Utara dan Timur Tengah	7	22
Amerika Latin	29	40
Negara berkembang keseluruhan	13	29
LLDC	13	27
15 negara pengutang besar	24	39

Beban Pembayaran Utang Luar Negeri Indonesia, 1986–2001 (dlm. miliar US\$)

	Cicilan Pokok	Bunga	Jumlah
1986/1987 s.d. 1989/1990	4,7	2,9	7,6
1990/1991	5,4	3,2	8,6
1991/1992 (perkiraan)	6,4	3,6	10,0
1992/1993	7,6	3,9	11,5
1993/1994 s.d. 1995/1996 (proyeksi)	8,5	4,4	12,9
1996/1997 s.d. 2000/2001	10,2	5,2	15,4

Sumber: *Tempo*, 25 Juli 1992

Jatuhnya harga minyak menyebabkan Debt Service Ratio/DSR (jumlah cicilan utang dan bunga dibandingkan nilai ekspor barang dan jasa) melonjak 30,1% tahun 1991. Untuk tahun 1992 diperkirakan akan naik sampai 31,9%.

Kemungkinan jalan keluar atau meringankan beban utang ini adalah penjadwalan utang dan perbaikan struktur kredit (lebih banyak bantuan pemerintah, lebih sedikit kredit bank dengan syarat seperti dalam pasar), di samping sejumlah usaha-usaha politik bantuan pembangunan lainnya, yang di antaranya harus menyangkut perdagangan dunia dan sistem keuangan internasional. **dn**

Belau → Kepulauan Pasifik.
Belize Dulu bernama Honduras-Inggris, merdeka sejak 21 September 1981, terletak di pantai Amerika Tengah dan di sebelah utara Meksiko, berbatasan dengan Guatemala di barat dan selatan. Ibu kota Belmopan. Luas 22.962 km², berpenduduk 170.000 jiwa (1986), dengan etnis Negro dan Mulat (52%), Mestis (22%), juga suku Maya, Cina, India, dan kulit putih. Agama: 2/3 Katolik, 30% Protestan, selain itu Yahudi, Islam, Buddha, dan Hindu. Bahasa negara: Inggris; sedangkan bahasa Spanyol, Maya, dan Kreol adalah bahasa sehari-hari. Belize miskin akan sumber daya mineral dan secara ekonomi bergantung pada penghasilan dua komoditas ekspor andalan, gula dan jeruk. Perkembangan harga gula di pasar dunia—sejak tahun 1975 harga gula jatuh—dan kegagalan panen karena angin topan yang sering muncul di daerah Belize yang subtropis, sampai sekarang merupakan

faktor penentu perkembangan ekonomi, meskipun turisme (penerimaan tahun 1985: 11,8 juta US\$) merupakan sumber devisa yang semakin tumbuh. Perikanan, terutama ekspor (sebagian besar ke AS) udang galah dan udang windu juga makin penting. Miskin sumber daya dan sempitnya pasar dalam negeri menghambat perkembangan industri. Pertanian (tahun 1985: 30% PNB, 50% angkatan kerja, 2/3 hasil ekspor) berperan penting dalam ekonomi. Teknologi yang sudah usang dan keluarnya (terutama ke AS) kelompok penduduk muda yang terdidik (→ *brain drain*), terutama juga pembagian tanah [50% tanah pribadi dimiliki oleh *Belize Estate and Produce Co. Ltd.* (ekspor kayu mulia), tanah pribadi lainnya merupakan objek spekulasi pemilik tanah kaya], menghambat pengolahan tanah secara intensif dan memaksa Belize mengimpor bahan makanan. Pembagian tanah kepada tani kecil, peningkatan pengadaaan sendiri bahan makanan, diversifikasi *cash crops*, menjadi tujuan utama rencana pembangunan. Selain itu, dikembangkan kerja sama regional dalam rangka CARICOM. Setelah merdeka, Belize yang bagi situasi di Amerika Tengah mempunyai PNB per kepala relatif tinggi (tahun 1986: 1.170 US\$), bergantung pada bantuan keuangan Inggris.

Belize lama menjadi pertikaian kepentingan kolonial Inggris dan Spanyol. Tahun 1862 menjadi koloni Inggris, selain mengeruk kekayaan kayu-kayu mulia juga mengolah perkebunan (agro-ekonomi). Keturunan budak-budak yang dulu diimpor (orang Kreol dan "orang Belizia asli")

sekarang memiliki posisi kunci di pemerintah dan ekonomi. Mereka yang menjadi mayoritas beragama Protestan dan bergaya Inggris, berkepentingan akan hubungan yang erat dengan daerah Karibia. Lain halnya dengan orang Mestis dan Indian yang merasa lebih terikat ke Amerika Tengah. Sejak tahun 1984 (pelaksanaan otonomi dalam negeri) *Peoples United Party* (PUP) dipimpin G.C. Price (sejak tahun 1964 perdana menteri) yang secara mayoritas mewakili kepentingan Katolik dan Kreol-Mestis serta berhaluan sosial-demokrat, memenangkan pemilu (sejak tahun 1954 diberlakukan hak pilih). Partai oposisi terpilah-pilah dalam banyak kelompok, mayoritas berada dalam *United Democratic Party* (UDP) yang konservatif dan Protestan. Pemilu 14 Desember 1984 menghasilkan peralihan kekuasaan. UDP yang dipimpin M. Esquivel (perdana menteri baru) mendapat 54% suara, 21 dari 28 kursi. Akibat sistem pemilu mayoritas menurut model Inggris, PUP tetap mempunyai 46% meskipun hanya memiliki 7 kursi, sedangkan partai Kristen demokrat tidak mendapatkan satu kursi pun. UDP dan PUP bersatu menolak tuntutan Guatemala akan daerah Belize. Guatemala yang menamakan dirinya "pewaris kedaulatan Spanyol", dalam suatu perjanjian dengan Inggris tahun 1859 mengakui perbatasan Belize. Namun, karena Inggris tidak memenuhi kewajiban membangun sebuah jalan di antara batas kedua daerah itu seperti dalam perjanjian. Sejak tahun 1940 Guatemala menganggap perjanjian itu tidak berlaku lagi dan menuntut masuknya Belize

ke daerahnya. Oleh karena itu, setelah merdeka, tentara Inggris tetap ada di Belize sebagai pelindung. Belize adalah anggota *Commonwealth* dan termasuk Negara AKP.

Kepustakaan: N. Ashcraft, *Colonialism and Underdevelopment: Processes of Political Economic Change in British Honduras*, New York 1973; C.H. Grant, *The Making of Modern Belize. Politics, Society, and British Colonialism in Central America*, Cambridge 1973; H.F. Illy, "Belize", dim.: HDW II, 3, Hamburg 1982, hlm. 268 dst.

ah

Benin 1. Memiliki sekitar 50 suku bangsa [Bariba, Fon, Yoruba, Dendi, Kreol (keturunan budak dari Brasilia yang telah bebas) merupakan elite sosial di daerah pantai, dsb.]. Panjang dari utara ke selatan adalah 700 km (112.622 km², tahun 1989: sekitar 5 juta penduduk), dengan pantai sepanjang 125 km. Republik Rakyat Benin (sampai tahun 1975 bernama Dahomey) terbagi dalam 3 zone sesuai dengan zone-zone kerajaan sebelum masa prakolonial dan mempengaruhi kepribadian masing-masing daerahnya: daerah utara berpenduduk jarang (73% luas tanah dengan sekitar 23% penduduk) dan sejak zaman kolonial infrastruktur sosio-ekonominya terabaikan, daerah selatan dan daerah barat daya (dulu kira-kira merupakan letak Kerajaan Abomey). Sistem sekolah model Eropa sejak abad ke-19 menghasilkan relatif banyak elite (*Latin Quartier di Afrika Barat*) di daerah pantai.

2. Lulusan sekolah yang relatif banyak dan mempunyai keterampilan, meskipun ada kesenjangan utara-selatan. Setelah merdeka, atas tekanan serikat buruh membengkakkan birokrasi (sampai 80% pengeluaran negara) sekaligus meningkatkan peng-

anggunan di perkotaan (ibu kota Porto Novo 56.000 penduduk, Cotonou 200.000 penduduk). Hal ini menguatkan persaingan regional dan pribadi antara tiga pemimpin politik: Maga (utara), Apithy (selatan), dan Ahomadegbé (Abomey) sehingga mengakibatkan ketidakstabilan politik (tahun 1960-1972: 5 kudeta militer, 4 UUD, 9 pimpinan negara dan pemerintahan).

3. Rezim militer (→ rezim otoriter) yang berkuasa sejak tahun 1972 di bawah Presiden Kerekou, tahun 1975 memproklamkan Republik Rakyat Benin, meskipun telah mengalami usaha kudeta dan invasi tentara selama beberapa jam (1977), dan membuat UUD, mendirikan partai kesatuan yang marxis-leninis dan menjalankan reformasi struktural (a.l. dalam sistem pendidikan, nasionalisasi perdagangan dan industri), dengan tujuan a.l. mengaitkan penduduk pedesaan ke kehidupan politik dan sosial-ekonomi.

4. Pada neraca perdagangan yang secara struktural defisit (impor ditutup oleh ekspor, tahun 1960: 38%, tahun 1980: 9,6%, tahun 1987: 23%), minyak sawit tetap menghasilkan lebih dari separo penerimaan ekspor; setelah itu kapas dan kacang tanah, meskipun ada kesulitan penjualan di pasar dunia. Penduduk pedesaan (sekitar 75% penduduk) memang di tahun-tahun terakhir memproduksi kembali untuk pasar dalam negeri (tapioka, yam, dsb.). Namun, hanya 10% dari lahan pertanian yang dimanfaatkan. Eksploitasi minyak di daerah *offshore* sejak tahun 1983 ha-

nya sedikit meringankan beban neraca perdagangan luar negeri.

5. Meskipun radikal secara verbal, politik ekonomi dan politik luar negeri Benin lebih bersifat pragmatis. Utang luar negeri sebesar 1,2 miliar US\$ yang merupakan 60% penerimaan anggaran, menyebabkan dilakukan politik austeritas yang ketat (walaupun demikian 88% budget investasi dibiayai asing) sehingga harus melakukan penyesuaian struktur. Sebagian besar dari 80 perusahaan negara dan semi negara yang mengalami defisit ditutup, lainnya akan diswastanisasi. Dampak sosial dari politik ini adalah tumbuhnya ketidakpuasan rakyat; tahun 1988 ada isu kudeta. Sebagai sumber penerimaan baru, tahun 1988 negara mengadakan kontrak dengan sebuah perusahaan pialang untuk menyediakan tempat penyimpanan limbah industri yang sangat beracun.

Era demokrasi rakyat selama 21 tahun di bawah Presiden Kerekou berakhir bulan Maret 1991 dengan berlangsungnya pemilihan presiden dan parlemen yang demokratis. Kerekou digantikan oleh Nicephore Soglu.

Kepustakaan: H. Kordes, "Benin", dlm.: *HDW II*, 4, Hamburg 1982, hlm. 128 dst.; F. Odin, *Benin 1972-1982. La logique de l'Etat africain*, Paris 1986; D. Ronen, "People's Republic of Benin: The Military, Marxist Ideology, and the Politics of Ethnicity", dlm.: J.W. Harbeson (ed.), *The Military in African Politics*, New York 1987, hlm. 93 dst.; Die Welt, "Blutige Unruhen überziehen Afrika", dlm. *BMZ-Spiegel der Presse*, 21/91.

kz

Better Living Societies → swadaya.

Bhutan 1. Kerajaan di Himalaya (luas 47.000 km²; penduduk tahun 1989 diperkirakan 1 juta; ibu kota

Thimbu berpenduduk sekitar 20.000 jiwa), terletak di antara Cina dan India. Sebagai kelanjutan takluknya Bhutan kepada India-Inggris (1774), India mengendalikan politik luar negeri dan makin mengawasi politik dalam negeri Bhutan. Bhutan bereaksi dengan politik isolasi yang secara ideologi dan sosial didukung oleh dominasi kaum biarawan Lama. Hal penting dalam politik demikian adalah, penduduk Bhutan masih dapat memberi makan dirinya sendiri meskipun pertanian terbelakang dan terpetak-petak dengan letak yang berpecah.

2. Secara etnis penduduk terbagi dalam tiga kelompok: orang Bhutan keturunan Tibet (berbahasa Dzonka/Tibet yang merupakan bahasa resmi, raja berasal dari kelompok ini, dan mendominasi politik dan budaya), orang bukan Tibet yang juga beragama Lamaisme (agama negara) berbahasa Hindi, dan orang Nepal (agama Hindu, bahasa Nepal). Kelompok orang Nepal yang didiskriminasi berkembang biak lebih cepat daripada kelompok etnis lainnya, lalu mengembangkan kesadaran politik. Ini merupakan salah satu penyebab ketegangan politik di Bhutan, selain masalah sikap terhadap India dan kontradiksi antara tradisi yang telah berumur ribuan tahun dengan modernisasi.

3. Modernisasi tidak menjangkau sistem pendidikan maupun jaminan kesehatan (tingkat kematian anak-anak tertinggi di dunia; tingkat hidup rata-rata 45 tahun) maupun sistem pemerintahan di Bhutan. PNB per kapita 150 US\$/tahun (1986)

menggolongkannya ke salah satu negara termiskin di dunia. Atas tekanan India tahun 1968 dilakukan reformasi UUD Bhutan, dari negara teokrasi-absolut secara formal menjadi negara yang lebih berkonstitusi. Parlemen dengan dua pertiga mayoritas berhak menjatuhkan raja (sejak tahun 1972: Jigme Singhye Wangtshuk) dan menggantinya dengan putra mahkota. Akan tetapi, urusan pemerintahan sampai sekarang masih di tangan lapisan atas Lama yang berbahasa Dzonka kuno.

Kepustakaan: N. Das, *The Dragon Country. A General History of Bhutan*, Calcutta 1974; N. Rustomji, *Bhutan, The Dragon Kingdom in Crisis*, New Delhi 1978; R. Rahul, "Making of Modern Bhutan", dlm.: *International Studies* 19, 1980, hlm 513 dst.

BID (*Banco Interamericano de Desarrollo*) Bank Pembangunan Interamerika (bahasa Inggris: IBD). Didirikan tahun 1959 oleh OAS; beranggotakan 27 negara, termasuk AS dan Kanada. Sejak tahun 1976 negara bukan Amerika juga menjadi anggota; tahun 1987 ada 16 negara Eropa di dalamnya.

Tujuan: bantuan pembangunan ekonomi ke negara Amerika Latin secara keseluruhan; membiayai proyek-proyek pembangunan, memberi konsultasi dan tunjangan teknis-keuangan. Namun, BID membiayai tidak lebih dari 50% ongkos keseluruhan sebuah proyek, biasanya malah hanya 25% sehingga sebetulnya hanya ikut membiayai. Meskipun demikian BID merupakan sumber utama pembiayaan luar negeri di Amerika Latin. BID menyerap sekitar 1/4 dari semua kredit lembaga nasional dan multinasional OECD dan negara-

negara sosialis. Pembagian kredit melalui berbagai dana berdasarkan persyaratan yang berbeda-beda, yaitu dana modal (dengan persyaratan komersial), dana untuk operasi khusus (*Fondo de Operaciones Especiales*, FOE); persyaratan bunga lunak untuk negara-negara yang kurang berkembang pada konvertibilitas mata uang bebas, artinya pinjaman dapat dikembalikan dalam mata uang nasional), dana *trust* Venezuela dan Dana Trust untuk Kemajuan Sosial. Volume kredit tahun 1961–1987: 39 miliar US\$ (tahun 1987: 2,361 miliar). Pembagian sektoral tahun 1961–1987: pertanian 21,3% (tahun 1987: 23,8%); pertambangan dan industri 15,6% (4,2%); pengadaan energi 27,6% (26,7%); transpor/komunikasi 13% (14,7%); kesehatan 9,4% (18,4%); dan pendidikan/ilmu pengetahuan/teknologi 4,3% (3,2%). Dalam rangka BID tahun 1964 didirikan Institut untuk Integrasi Amerika Latin (*Instituto para la Integracion de America Latina*, INTAL), yang melakukan penelitian di bidang integrasi di Amerika Latin begitu juga bantuan BID untuk masalah pengetahuan dan teknik.

Alamat: 1300 New York Avenue, N.W. Washington, D.C. 20577, USA.

dn **big push** Pengertian pokok teori investasi untuk mencapai pertumbuhan (→ teori dan strategi pertumbuhan) yang mandiri, dicetuskan oleh P.N. Rosenstein-Rodan. Menurutny, hanya dorongan investasi kuat yang dapat membuahakan keberhasilan pertumbuhan pendapatan per kapita. Untuk teori ini, selain volume sarana investasi yang juga penting adalah investasi modal dalam waktu

bersamaan dan terpusat, serta pembagian sarana pembiayaan yang berorientasi pada dampak komplementaritas. Teori *big push* berkaitan erat dengan teori *balanced growth*. dn **bilateral, multilateral** Klasifikasi pemberian bantuan, yaitu apakah disalurkan secara bilateral, artinya dua pihak (dari negara ke negara, dari NGO ke NGO, dsb.), atau secara multilateral, artinya berbagai pihak (melalui organisasi internasional, bank, agen, dsb.).

Paling sering dilakukan adalah bantuan secara bilateral. Misalnya, anggota dari kelompok kreditor terbesar–negara-negara DAC–tahun 1987 memberi sekitar 74% bantuan pembangunan pemerintah (ODA) dengan cara bilateral. Juga kreditor dari negara OPEC dan negara-negara blok Timur (→ politik bantuan pembangunan Uni Soviet) menyukai bantuan bilateral.

Ada perbedaan pokok antara bantuan bilateral dan bantuan multilateral, yaitu bantuan bilateral langsung dan sepenuhnya di tangan negara kreditor. Negara ini–tanpa pengaruh negara lain–dapat memberikan bantuannya untuk negara, sektor, dan strategi pembangunan tertentu yang disukai (sayangnya sering terjadi). Bantuan ini diperalat untuk tujuan-tujuan politik saja (politik dalam negeri, politik luar negeri, dan politik pertahanan).

Kebanyakan negara kreditor mengutamakan negara dan daerah yang terkait dengannya secara politik-historis, ekonomi, dan kultural. Perancis mengirim sebagian besar ODA bilateralnya ke negara dan daerah-

daerahnya di seberang lautan dan ke bekas koloninya di Afrika bagian Sahara Selatan. Inggris memprioritaskan bekas daerah jajahannya di Asia Selatan dan Afrika (di antaranya India, Bangladesh, Pakistan, Kenya, dan Zambia). AS membantu negara-negara yang mempunyai nilai strategis (misalnya Israel, Mesir). Jepang menyalurkan dua pertiga bantuannya ke Asia, terutama Asia Timur. Tahun 1983 sekitar 85% bantuan bilateral OPEC mengalir ke negara-negara Arab (Suriah, Yordania, Maroko). Lebih dari 80% dana dari Uni Soviet mengalir hanya ke Kuba, Vietnam, dan Korea Utara.

Hanya politik bantuan pembangunan bilateral yang memungkinkan pengaitan langsung ke kepentingan politik ekonomi dalam negeri si pemberi bantuan (misalnya melalui ikatan pemasokan). Bagi si penerima, bantuan bilateral yang diterimanya merupakan indikator (salah satu) ketergantungan politik dan ekonomi. Negara berkembang yang secara strategis penting dan loyal, biasanya menerima pangsa bantuan bilateral di atas rata-rata, sedangkan negara berkembang yang tidak berarti (di antaranya banyak negara kecil yang miskin) lebih menerima bantuan multilateral.

Bagian terbesar dana bilateral mengalir ke negara berkembang yang sudah relatif maju, sedangkan 80% dana IDA diberikan ke negara-negara dengan pendapatan per kapita rendah (di bawah 425 US\$).

Dalam hal pembagian sektoral dana, ada perbedaan antara kerja sama pembangunan secara bilateral

dan multilateral. Sementara 1/5 bantuan multilateral mengalir ke pertanian (1985/1986), pangsa sektor ini dalam dana bilateral negara-negara DAC hanyalah 12%. Tentu saja negara kreditor mengharapkan keuntungan dari pembiayaan pembangunan dan membiayai secara komplementer dalam sektor bilateral. "Nama baik" Bank Dunia dan IDA didapatkan di sini akibat pelaksanaan proyek-proyek pertanian dan infrastruktur yang mereka biyai.

Dari sisi negara berkembang, bantuan pembangunan multilateral mempunyai keuntungan, yaitu tidak seperti pada program-program bilateral—terkait dengan masalah pergantian kekuasaan politik di suatu negara kreditor dan karenanya menawarkan (juga untuk jangka panjang) basis yang dapat diandalkan untuk sebuah pembangunan jangka panjang. Selain itu, negara berkembang mempunyai kesempatan terbatas dalam lembaga milik politik bantuan pembangunan ME dan organisasi khusus PBB (Bank Dunia, IMF), sedangkan pada organisasi yang langsung di bawah PBB mempunyai kemungkinan untuk turut menentukan politik pembagian dana. *Kerugian*: ongkos administrasi yang tinggi (FAO: 35%), kecilnya pengawasan secara demokratis, masalah birokrasi dan efisiensi (sedikit evaluasi secara bebas), sedikit motivasi untuk penyediaan bantuan pembangunan.

Bantuan pembangunan multilateral tahun '70-an meningkat pesat, ketika hasil politik bantuan pembangunan (diukur dalam PNB) mengalami stagnasi atau jatuh, dengan

demikian membantu stabilisasi pembiayaan bantuan pembangunan. Bagian ODA dari negara-negara DAC yang disalurkan melalui organisasi internasional, naik dari 12% awal tahun '60-an, 20% awal tahun '70-an, dan di atas 34% tahun 1980; lalu turun—terutama karena perubahan arah politik bantuan pembangunan AS di bawah pemerintah Reagan—kembali menjadi sekitar 26% tahun 1987.

Bantuan OPEC tahun 1980: 12%; tahun 1983: 20% mengalir melalui organisasi internasional, di antaranya 40% ke lembaga-lembaga yang banyak anggotanya seperti IDA dan IFAD.

Tahun '80-an pembiayaan bantuan pembangunan multilateral mengalami masa sulit karena politik bantuan pembangunan AS di bawah pemerintah Reagan. AS secara nominal merupakan kreditor terbesar dan pembiaya utama (rata-rata 25%) organisasi-organisasi internasional. Keluarnya AS dari UNESCO (1984) dan menolak melunasi tunggakan iuran ke lembaga bantuan kerja sama pembangunan multilateral (FAO, ILO, IDA), menyebabkan kesulitan besar dalam budget dan kerja dalam organisasi-organisasi ini.

bg
bilateralisme Sebutan untuk kecenderungan motivasi politik luar negeri dan pertahanan dalam memberi bantuan pembangunan bilateral, agar melalui bantuan bilateral dapat memanfaatkan kemungkinan pengendalian politik. Politik bantuan pembangunan AS di bawah Reagan, juga praktek pembagian kredit yang biasa dilakukan blok Timur; diwar-

nai oleh bilateralisme. Ciri-ciri: melihat masalah Utara-Selatan (politik strategi global dan politik pertahanan) dalam perspektif Timur-Barat, diwarnai cara berpikir kawan-lawan, pemberian dana menurut sistem upah–hukuman.

bg
Birma → Myanmar.

Biro Pasifik Selatan untuk Kerja Sama Ekonomi → SPEC.

BIZ (*Bank für Internationalen Zahlungsausgleich*) Bank untuk Keseimbangan neraca pembayaran, berdiri tahun 1930 dengan kedudukan di Basel, Swiss. Pemegang sahamnya adalah bank-bank sentral di Eropa (kecuali Albania, Jerman Timur, Uni Soviet), AS, Kanada, Jepang, Australia, dan Afrika Selatan. Tugas: menjalankan operasi keuangan internasional, meringankan kerja sama antarbank sentral, menghitung tagihan dan kewajiban dalam lalu lintas ekonomi internasional, dan menyeimbangkan jumlah netto. Negara berkembang berhadapan dengan BIZ sering sebagai *trustee*, pemegang mandat dan institusi pelaksana negara industri pada perjanjian keuangan internasional.

bg
BLADDEX → SELA.

BMZ (*Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit*) Kementerian Kerja Sama Ekonomi Jerman, berdiri November 1961 dengan tugas mengkoordinasi kebijakan-kebijakan politik bantuan pembangunan pemerintah Jerman yang terbagi-bagi dalam berbagai kementerian (Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perekonomian, Kementerian Perekonomian di Negara Bagian). Dengan pengakuan atas kemandirian politik

bantuan pembangunan, bidang tugas BMZ tahun 1964 diperluas dengan pengolahan prinsip dan program politik bantuan pembangunan begitu juga perencanaan dan pelaksanaan bantuan teknik. Sejak tahun 1972 BMZ juga menangani bantuan keuangan dalam rangka kerja sama bilateral dan multilateral. Sejak itulah BMZ bertanggung jawab untuk konsep dan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi keseluruhan politik bantuan pembangunan bilateral dan multilateral. Bantuan pembangunan yang disetujui bilateral membutuhkan persetujuan Kementerian Luar Negeri. Perundingan mengenai tema tata ekonomi dunia baru yang dituntut negara berkembang sekaligus merupakan masalah yang harus diputuskan Kementerian Perekonomian. Pada konferensi-konferensi UNCTAD, Jerman diwakili oleh delegasi campuran dan pimpinan dua kementerian yang dapat saja mengambil posisi berbeda.

BMZ diorganisir sebagai berikut. Seorang menteri, seorang sekretaris negara dari parlemen; terbagi dalam tiga bagian: a. berdasarkan negara dan program kerja sama bilateral keuangan dan teknik, koordinasi dan integrasi langkah-langkah politik bantuan pembangunan; b. perencanaan dan evaluasi politik bantuan pembangunan, kerja sama multilateral, bantuan untuk kerja sama dengan ekonomi swasta, pengolahan prinsip dan konsep bantuan untuk bidang politik bantuan pembangunan yang sektoral dan suprasektoral; c. administrasi umum, kerja sama personal dengan lembaga pemerintah dan swasta. Pub-

likasi a.l. *newsletter, materialien*, laporan penelitian; laporan mengenai politik bantuan pembangunan pemerintah Jerman (setahun dua kali); JHE (*Journalisten Handbuch Entwicklungspolitik*) tahunan; seluruh media informasi BMZ ada dalam *Informationsmedien Entwicklungspolitik*.

Alamat: Karl-Marx-Str. 4-6, 5300 Bonn, Jerman.

Kepustakaan: M. Glasgow (ed.), *Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit*, Bielefeld 1983; *ibid*, *Deutsche Entwicklungspolitik: Aspekte und Probleme ihrer Entscheidungsstruktur*, Saarbrücken 1983; BMZ, *Wie wirksam sind Entwicklungsprojekte?* ("BMZ-intern"), 1987.

dn
Bolivar, Simon Salah seorang pejuang penting pertama untuk kemerdekaan di Amerika Latin. Lahir 24 Juli 1783 di Caracas (Venezuela) sebagai putra keluarga tertua di negara itu. Setelah dua kali hidup di Eropa, sejak tahun 1810 menjadi anggota *Sociedad Patriotica* (Persatuan Patriot), yaitu gerakan kemerdekaan yang muncul di Caracas. Tahun 1812-1819 menamakan dirinya pemimpin militer dan menjadi presiden Venezuela setelah merdeka. Tahun 1819-1825 ia memimpin perang kemerdekaan Kolombia, Ekuador (yang bersama Venezuela sampai tahun 1830 mendirikan Republik Kolombia), Peru, dan Bolivia. Ia memperjuangkan bentuk pemerintah yang sentralisasi dan kuat, bentuk antara monarki dan republik, dan memperjuangkan persatuan Ibero-amerika dalam kerangka internasional. Dari pemikiran ini Desember 1824 ia mengundang para pemimpin negara Iberoamerika baru ke sebuah kongres yang berlangsung tahun 1826 di Panama. Walaupun tidak menghasil-

kan persatuan, kongres ini merupakan inisiatif pertama untuk persatuan politik regional di Amerika Latin. Bolivar meninggal 17 Desember 1830 di Kolombia. **mfb**

Bolivia Merupakan kasus klasik negara pengekspor bahan mentah dengan monostruktur. Jatuhnya harga timah tahun 1985 telah mengakhiri era timah yang tidak dapat kembali. Apakah politik stabilisasi ekonomi menemui keberhasilan, masih dipertanyakan. Produksi obat bius secara ilegal tetap merupakan sektor ekonomi penting.

1. Bolivia (luas 1,1 juta km²) terbagi dalam 3 daerah besar: dataran tinggi Andes (Altiplano), daerah lereng pengunungan Andes di bagian timur (Yungas dan Valles), dan dataran rendah di bagian timur. 4/5 penduduk terkumpul di Altiplano, Yungas, dan Valles, merupakan daerah kegiatan ekonomi terpenting, terutama penambangan timah. Industri pengolahan sangat kecil; pertanian di Altiplano sebagian besar berorientasi ke ekonomi subsistensi. Di Yungas dan Valles ditanam produk perkebunan tropis dan *coca*. Dataran rendah di sebelah timur, kecuali dua kutub pertumbuhan pertanian kapitalis (Santa Cruz: kapas, gula, beras; Beni: sapi), merupakan daerah yang belum dibuka. Eksploitasi minyak di dataran rendah sebelah timur memenuhi kebutuhan intern dan menghasilkan sedikit surplus yang dapat diekspor. Sejak jatuhnya harga timah dunia, ekspor gas bumi ke Argentina menjadi sumber devisa terpenting (40%-50% ekspor).

2. Penduduk Bolivia tahun 1989 diperkirakan berjumlah 7 juta. Pertumbuhan penduduk tahunan naik tinggi, 2,8%/tahun. 1/3 penduduk hidup di kota-kota dengan penduduk lebih dari 20.000 orang, 44% penduduk kota hidup di La Paz. Dengan 6 penduduk/km² Bolivia termasuk jarang dihuni; 60% penduduk terpusat di Altiplano. Tingkat harapan hidup 53 tahun (terendah di Amerika Latin). Secara etnis terbagi menjadi 15% kulit putih, 30% Mestis, dan 55% Indian-Quechua, Indian Aymara, dsb. Bahasa Indian merupakan bahasa sehari-hari sebagian besar penduduk.

3. Setelah 300 tahun penjajahan Spanyol, muncul republik pertama (1825-1884) dengan ditandai pertikaian kekuasaan politik selama puluhan tahun antar *caudillo* militer (tahap politik yang terkait dengan lembaga). Di masa ini meluas ekonomi latifundia dengan mengorbankan tanah-tanah orang Indian dan integrasi Bolivia ke pasar dunia sebagai pemasok guano (pupuk dari kotoran burung), sendawa (bahan campuran pembuat mesiu), dan karet alam. *Boom* timah dalam masa republik kedua (1884-1952) memberi keuntungan sangat besar yang tidak dipakai untuk sumber daya pembangunan, melainkan digunakan oleh tiga keluarga untuk membangun kerajaan ekonomi tingkat dunia. Bersama para pengikutnya, "bangsawan-bangsawan timah" memapankan diri menjadi semacam negara supra dan menjadi penentu politik. Setelah perang Chaco (1932-1935), di lapisan menengah, di antara pekerja tambang

timah dan petani, terbentuk gerakan tandingan melawan privatisasi tanah yang di tahun '40-an berpuncak pada pendirian sebuah aliansi nasional revolusioner (MNR). Dalam revolusi tahun 1952 yang dipimpin oleh MNR, oligarki yang memiliki tambang dan tanah kehilangan kekuasaan ekonomi dan politik akibat nasionalisasi pertambangan dan reformasi pertanian yang radikal. Orang Indian yang buta aksara mendapatkan hak warga negara. Politik pemerintah MNR yang tertuju ke industrialisasi substitusi impor antara tahun 1952-1964 akhirnya mereka korbakan demi *export-economy-model* dan kerja sama erat dengan AS. Militer yang terorganisasi baru dengan bantuan AS tahun 1964 melakukan kudeta dan berkuasa sampai tahun 1982. Sejak tahun 1982 orang sipil berkuasa melalui pemilu.

4. Hampir seratus tahun Bolivia menjadi negara produsen timah terbesar dunia. Pertambangan timah merupakan cabang ekonomi dan pembawa devisa terpenting bagi negara di pegunungan Andes ini, dan di masa puncaknya sampai mencapai 77% penerimaan ekspor. Setelah tahun 1952, sektor ekspor didiversifikasi oleh logam lainnya dan produk agroindustri, tanpa berhasil mengatasi monostuktur ekonominya. Kehancuran pasar timah (1985) mendorong sektor timah (sebagian besar milik negara) yang memang sudah defisit dan terbelakang secara teknik, ke kehancuran total; ekonomi keseluruhan terjerumus ke krisis terburuk dalam sejarah Bolivia. Peran tambang timah sebagai motor ekonomi tidak bisa

diambil alih oleh cabang ekonomi lain, baik itu industri pengolahan (yang menurut sensus pabrik terdiri atas 1.200 perusahaan, menyumbangkan 20% PDB dan terutama membuat bahan makanan dan barang konsumsi; barang modal dan teknologi diimpor), maupun pertanian yang tidak produktif yang hanya memenuhi 75% kebutuhan bahan makanan dalam negeri. Timah menyumbangkan 25% untuk PDB, darinya hidup 54% penduduk, sebagian besar di minifundia yang berorientasi subsistensi dan beberapa pusat agroindustri yang sedikit jumlahnya.

Landreform tahun 1952 (8 juta ha dibagikan kepada 200.000 keluarga) tidak memecahkan masalah akses ke tanah. Sampai sekarang setiap tahun berpindah ribuan petani dataran tinggi ke zone pemukiman sebelah timur. Di sana juga ada pusat ekonomi yang ilegal (produksi kokain, penyelundupan, dsb.), yang menghidupi 5%-10% penduduk dan merupakan satu-satunya cabang ekonomi yang berkembang.

5. Bolivia di samping Haiti merupakan negara termiskin di Amerika Latin. Kalori per kapita terendah memenuhi 86% kebutuhan; tingkat kematian anak di tahun pertama dengan 176/1.000 penduduk adalah ketiga tertinggi di benua tersebut. Pelayanan jasa negara (kesehatan, pendidikan, dsb.) terbagi sangat tidak seimbang. Kesenjangan kaya dan miskin sangat kontras: 80% penduduk menikmati 2/5 pendapatan nasional, sementara 5% penduduk menerima 1/3-nya. Ketika berlangsung krisis pertambangan yang

ikut merusak ekonomi keseluruhan, dipecat puluhan ribu buruh tambang, buruh pabrik, dan pegawai negeri. Pengangguran di kota naik bersamaan dengan situasi kesempatan kerja sebesar 20%. Perpindahan penduduk intern dan migrasi yang keluar akibat kemiskinan di desa dan kota meningkatkan jumlahnya.

6. Faktor terpenting dalam pembangunan politik adalah militer dengan kekuatan 23.000 orang (lebih dari 200 kudeta militer sejak kemerdekaan), antara tahun 1964–1982 menentukan arah jalan negara tersebut. Hancurnya diktator "jenderal kokain" (1980–1982) memungkinkan redemokratisasi, tetapi ruang gerak politik sipil tetap saja sempit. Negara itu jatuh dalam kekuasaan kepentingan bersenjata (militer, kartel kokain, dsb.); kemampuan pengendalian negara karenanya kecil, akibat krisis ekonomi. Serikat buruh COB, wakil kepentingan terpenting (juga politik) dari berbagai lapisan dan inti kristalisasi oposisi menghadapi diktator militer, kehilangan pengaruh akibat krisis tersebut, terutama karena pemecatan massal buruh tambang. Partai-partai terpilah-pilah, kaum kiri yang secara tradisional kuat, terpecah-pecah.

7. Secara ekonomi dan politik Bolivia berada dalam tahap perubahan. Pemerintahan Paz Entensoro (1985–1989) memerangi akibat kehancuran ekonomi timah melalui suatu "politik kejutan" (secara tradisional berorientasi ekspor), yang memang meredam hiperinflasi (lebih dari 20.000%), tetapi menelan ongkos sosial yang tinggi. Resesi selalu

menyebabkan banyak orang mencari jalan keluar melalui ekonomi ilegal.

Kepustakaan: J. Deide, *Ideologie und Legitimation einer abhängigen Militärdiktatur: das Beispiel der Regierung Banzer in Bolivien (1971–1978)*, Frankfurt 1981; D. Nohlen, "Bolivien", dlm.: *HDW II*, 2, 1982, hlm. 109 dst; J. Lieser, *Unser Reichtum hat immer unsere Armut hervorgebracht*, Bonn/Trier 1982; D. Dimoser, "Drogen und Politik: Kokainproduktion, Korruption und Macht in Bolivien", dlm.: *Leviathan*, vol. 2, 1985, hlm. 238 dst; K.P. Schütt, "Bolivien: Brüchige Demokratie im Strudel wirtschaftlicher Strukturkrisen", dlm.: *Jahrbuch Dritte Welt* 1986, hlm. 164 dst; W. Hofmeister, "Staat und soziale Bewegung in Bolivien", dlm.: *Zeitschrift für Politik*, vol. 2, 1987, hlm. 171 dst; M. Krempin, *Keine Zukunft für Bolivien?*, Saarbrücken, 1989.

Botswana Merdeka tahun 1966, berbentuk republik. Luas 600.372 km², ibu kota Gaborone. Termasuk negara Afrika Hitam dengan politik paling stabil dan karena kekayaan tambangnya (produsen intan terbesar di dunia) mempunyai pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata negara Afrika lainnya. Namun, di masa depan harus memperhitungkan semakin tajamnya masalah-masalah sosial dan politik (kekurangan pengadaan bahan makan karena musim kering terus-menerus, pengangguran massal).

Tahun 1987 jumlah penduduk diperkirakan 1,17 juta (tahun 1986: 21,7% hidup di perkotaan), kebanyakan dari suku Bantu, Buschman (20.000), Eropa (4.000), dan India (3.000). Meskipun berpenduduk tidak padat, 2 jiwa/km², negara ini memperlihatkan relatif kebanyakan penduduk (selain hutan tropis di timur dan delta Okavango yang berawa dan dicemarkan alat tsetse), 80% daerahnya adalah gurun Kalahari. Kekurangan tanah dan pemanfaatan-

nya yang belum memadai sampai sekarang, menyebabkan sulit mengelola tanah secara intensif. Musim kering yang panjang mengakibatkan hanya sekitar 10% kebutuhan bahan makanan bisa dipenuhi oleh produksi sendiri; sumber utama impor bahan mentah adalah Republik Afrika Selatan (RAS). Meskipun demikian pertanian untuk 50% penduduk (pertumbuhan tahunan rata-rata: di atas 3%) merupakan salah satu basis pendapatan yang penting. Tidak hanya antara buruh kulit hitam dan kulit putih, tetapi juga antara lapisan-lapisan di masyarakat Botswana ada kesenjangan pendapatan yang sangat besar (pemilik peternakan sapi yang berproduksi kapitalistik dan petani kaya/aristokrat Tswana/elite teknokrat berhadapan dengan tani kecil dengan dan tanpa memiliki ternak, buruh pengembara dan Buschman yang termarginalisasi).

Setiap tahun sekitar 21.000 tenaga baru berebutan di pasar kerja; hanya sedikit yang mendapat kerja harian. Kerja mengembara—sekitar 20.000 orang Botswana bekerja di pertambangan milik RAS—menjadi penyebab utama kehancuran struktur keluarga dan kekurangan laki-laki di pertanian.

Basis pertanian adalah ekspor (tahun 1985: 727 juta US\$; mitra dagang utama selain RAS terutama adalah negara-negara ME dan AS) intan (2/3 nilai ekspor keseluruhan), daging sapi (11,5%), serta konsentrasi tembaga-nikel (9,4%). Setelah tahun 1981 ekspor intan mengalami kemunduran karena resesi yang berjangkit di negara industri, tetapi se-

jak tahun 1983 terlihat peningkatan. Setelah stop impor produksi daging sapi (karena wabah mulut dan kuku ternak) dari ME dicabut, ekspor daging sapi naik kembali. Ongkos energi dan air yang tinggi, kekurangan pendidikan (kekurangan tenaga ahli; tingkat buta aksara sampai tahun 1985 bisa diturunkan sampai 29,2%) dan terutama ketergantungan negara pedalaman tersebut dari jaringan lalu lintas milik tetangganya RAS dan Zimbabwe, menyebabkan pembangunan industri terhambatan. Tujuan pembangunan ekonomi kelima (1979–1985) dibandingkan bidang lainnya dapat dikatakan tidak tercapai (harga bahan mentah yang jatuh di pasar dunia, bencana musim kering tahun 1982). Menurut perhitungan, pada dasawarsa seterusnya akan berlangsung kemunduran ekspor daging sapi karena musim kering yang berkelanjutan; serta tambang intan tidak dapat terus ditingkatkan. Titik berat rencana pembangunan adalah menghapus pengangguran yang tinggi, menunjang produksi pertanian dengan tujuan mampu mengadakan sendiri bahan makanan dasar dan mendapatkan sumber-sumber bahan mentah baru (misalnya batu bara). Selanjutnya diinginkan pengurangan ketergantungan dari RAS. Bersama dengan Lesotho dan Swaziland, Botswana membentuk uni bea bersama, tetapi jika terjadi konflik tetap saja RAS dapat memblokir masuknya bahan makanan ke Botswana. Kerja sama regional yang giat dilancarkan dengan negara-negara tetangga dalam rangka *Southern Africa Development Coordination Conference*

(*SADCC), *Preferential Trade Area in Eastern and Southern Africa* (PTA), begitu juga pengelompokan politik negara garis depan merupakan usaha stabilisasi kemandirian ekonomi terutama di bidang transportasi. Selalu saja terjadi pelanggaran perbatasan oleh militer RAS (tahun 1985 penyerangan ke Gaborone karena diduga menyembunyikan gerilyawan), tetapi Botswana tidak mengabaikan tuntutan RAS untuk menolak pelarian anggota-anggota ANC.

Botswana yang muncul dari bekas protektorat Inggris Betschuana-land, secara konstitusi berbentuk demokrasi multipartai (parlemen satu kamar, *House of Chiefs* yang berkonsultasi), tetapi secara nyata merupakan negara satu partai. Sejak tahun 1966 dikuasai oleh *Botswana Democratic Party* (BDP) di bawah Presiden Khama dan Masire (sejak tahun 1980). BDP memperjuangkan pembangunan yang multirasial, tetapi tahun 1984 kehilangan kendali atas hampir semua dewan kota. Presiden Masire tidak sepopuler pendahulunya. Ia menghadapi masalah tribalisme dan peningkatan pesat kesenjangan kota-desa (→ model sentra-periferi).

Kepustakaan: J. Jeske, *Botswana, Lesotho, Swaziland. Agrargeographische Struktur und wirtschaftliche Verflechtung im südl. Afrika*; Weltforum Vlg. 1977; B. Weimer, *Unterentwicklung und Abhängigkeit in Botswana. Untersuchung einiger politisch ökonomischer Determinanten*, Institut für Afrika-Kunde, Hamburg 1981; B. Weimer, "Botswana", dlm.: HDW II, 5, Hamburg 1982, hlm. 314 dst.

ag/pb
Brady-Plan Usul menteri keuangan AS, Nicholas Brady, April 1989, setelah kegagalan *Baker-Plan* untuk

39 negara berkembang dengan utang tertinggi. Brady Plan menetapkan pertama-tama bebas utang sebagian: kredit baru dari IMF dan Bank Dunia diharapkan memungkinkan pembelian kembali surat utang (hanya dari bank-bank internasional) dalam kasus tertentu dengan syarat ringan.

bh
brain drain Mengalir keluarnya tenaga-tenaga ahli dan pimpinan dari negara berkembang ke negara industri sehingga terjadi alih teknologi yang terbalik. Tahun 1970 Bank Dunia menghitung *brain drain* dari negara berkembang ke AS, yaitu 6.400 insinyur, 2.211 dokter, 2.625 ilmuwan; negara berkembang kehilangan 3,66 miliar US\$. Seluruh bantuan pembangunan AS ke negara berkembang (termasuk bantuan senjata) di tahun yang sama berjumlah 3,05 miliar US\$. Antara tahun 1960-1986 diperkirakan mengalir keluar sekitar 1,2 juta tenaga kerja berkualitas tinggi dari negara berkembang, 70% di antaranya ke AS dan Kanada. Kerugian negara berkembang diperkirakan mencapai sekitar 24 miliar US\$.

Di lain pihak, ekspor tenaga ahli (*buruh tamu) merupakan jumlah yang tak kalah pentingnya untuk menyeimbangkan neraca pembayaran negara berkembang. Sebab dan akibat *brain drain* didiskusikan di negara industri terutama pada saat tempat kerja penuh. Sejauh mana penyerapan tenaga ke negara industri dianggap sebagai *brain drain* regulatif, terlihat pada pengalihan tema dari situasi ekonomi ke masalah reintegrasi tenaga ahli dan pimpinan

ke negara asal serta ke negara berkembang lain. *Brain drain* disebabkan berbagai faktor: struktur yang kaku, kurangnya sumber daya, situasi materi, pengangguran, mobilitas, tidak adanya orientasi pada pasar tenaga kerja, salah pengembangan struktural dalam sistem pendidikan, ketidakpastian politik, pengejaran minoritas religius dan etnis di negara asal, kesenjangan pendapatan antara negara berkembang dan negara industri, orientasi kualifikasi kebutuhan negara industri, dsb. Terutama sekali aspek terakhir menyanggah kepercayaan yang sudah berakar bahwa bantuan berbentuk beasiswa ke negara industri untuk manusia dari negara berkembang bertujuan membantu menyediakan tenaga ahli yang diperlukan untuk menggunakan metode produksi industri modern bagi Dunia Ketiga. Akibat salah kira ini di awal dasawarsa pembangunan ketiga terjadi ancaman pertumbuhan dualisme teknologi. Meskipun terlihat jelas adanya kekurangan tenaga ahli dan pimpinan di Dunia Ketiga, tingkat pelarian keluar, terutama tenaga ahli yang dididik di luar negeri, terus meningkat.

Usaha-usaha seperti program-program reintegrasi yang terarah, jurusan dalam pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan, beasiswa *sur-place* dan bantuan uang bagi yang bersedia kembali ke negara asal, seharusnya lebih ditujukan untuk mengurangi beban ganda Dunia Ketiga karena ongkos pendidikan yang mahal di satu pihak dan penggunaan tenaga ahli yang sangat di-

butuhkan dari negara industri di lain pihak.

Kepustakaan: UNCTAD, *The Reverse Transfer of Technology: Its Dimensions, Economic Effects and Policy Implications*, Genf 1975; J. Bhagwati, "The Brain Drain", dlm.: *International Social Science Journal*, vol. XXVIII, 1976, hlm. 691-729; E.A. von Renesse, "Ausländerausbildung in der BRD im Spannungsfeld zwischen Integration und Reintegration", dlm.: P. Meyer-Dohm (ed.), *Bildungsökonomische Probleme der Entwicklungsländer*, Tübingen 1978; N. Agblamagnon, "Apell de la Communaute scientifique et universitaire africaine", dlm.: W. Miller (ed.), *Education and the Diversity of Cultures*, Köln/Wien 1985. vi

Brasilia Selama 20 tahun pemerintah militer di satu pihak dengan Brasilia telah menjadi NIB melalui industrialisasi yang dipaksakan, tetapi di lain pihak makin tumbuh kesenjangan sosial secara regional. Krisis ekonomi tahun '80-an memberi peluang untuk suatu re-demokratisasi. Namun, demokrasi juga sulit mengatasi situasi utang dan menstabilkan ekonomi. Seperti sebelumnya, militer tetap berperan penting di politik dalam negeri.

1. Brasilia adalah negara terbesar (8.511.965 km²) di Amerika Selatan (47,3% luasnya). Penduduk Brasilia sejak 1950 telah meningkat tiga kali lipat (1989: 147 juta, pertumbuhan penduduk tahunan tahun 1980-1989: 2,2%). Diramalkan penduduk sampai tahun 2000 akan mencapai 180 juta jiwa (sekarang lebih dari 50% di bawah 18 tahun). Kemungkinan penurunan tingkat kelahiran tidak terlihat sampai akhir abad ke-21. Sekitar 90% penduduk terpusat pada 1/3 wilayah negara tersebut, yaitu di daerah-daerah padat dekat pantai di sebelah timur laut, tenggara, dan selatan. Pemindahan ibu kota ke pe-

dalaman (Brasilia: tahun 1985 sekitar 1,6 juta penduduk) adalah usaha untuk memanfaatkan daerah belakang. Tingkat urbanisasi naik dari sekitar 36% (1950) menjadi sekitar 73% (1985). Pertumbuhan tahunan tahun 1980-1985: 4,0%, makin banyak penduduk kota yang hidup di daerah kumuh (*favelas*). Menurut perkiraan, sekitar 60% orang Brasilia berkulit putih, kebanyakannya keturunan Portugis, Italia, dan Spanyol, serta sekitar 2 juta keturunan Jerman. Sekitar 25% adalah orang Mulat dan *Caboclos* (campuran antara kulit putih dan Indian), 10%-12% kulit hitam dan *Cafusos* (campuran antara Indian dan kulit hitam), 1% orang Jepang. Sisa orang Indian (sekitar 180.000) hidup berpencar di sebelah utara dan barat negara tersebut. Bahasa nasional adalah Portugis. Dengan 89% Katolik, Brasilia merupakan negara beragama Katolik terbesar di dunia. Namun, banyak di antaranya merupakan pengikut mistik dan spiritisme Afro-Brasilia. Sisanya adalah Protestan, Ortodoks, Yahudi, Buddha, dsb.; secara hukum negara dan gereja terpisah sejak tahun 1891.

2. Dari perspektif teori *dependencia*, sejarah Brasilia dimulai sejak penjajahan tahun 1500, merupakan sejarah ketergantungan struktural. Arus lingkaran produksi andalan ekonomi Brasilia ditentukan oleh pasar dunia: kayu Brasilia di abad ke-16, gula tebu sejak abad ke-17 di daerah timur laut, emas dan batu mulia di abad ke-18 di Minas Gerais, kopi sejak abad ke-19 di Sao Paulo dan Parana. Terbentuk struktur produksi yang murni berorientasi ekspor, ma-

sing-masing bergantung pada pusat-pusat metropol: mula-mula dari Portugis dan beberapa waktu dari Belanda, di abad ke-18 dan 19 dari Inggris dan sejak Perang Dunia I dari AS dan Inggris, kemudian dari Jerman dan Jepang. Di samping produk andalan yang telah disebutkan, Brasilia mengekspor kulit, tembakau, karet, dan kakao. Setiap arus lingkaran secara internal sesuai dengan daerahnya, memberikan daerah yang menjalankannya sebuah era kenaikan ekonomi dan kemakmuran. Setelah masa tersebut berakhir, daerah itu kembali menjadi sebuah ekonomi yang mati dan memiliki struktur sosial yang tak terpakai akibat monokultur. Jadi, di sebagian besar Brasilia keterbelakangan mengikuti suatu perkembangan dan bukan sebaliknya.

3. Tahun 1822 Dom Pedro I menyerukan kemerdekaan dan mendirikan Kerajaan Brasilia. Reaksi penolakan dari pihak pemilik perkebunan terhadap pembebasan semua budak tanpa ganti rugi (1888), tidak adanya seorang putra mahkota, arus anti-monarki dalam gereja ortodoks dan militer yang menginginkan republik, merupakan alasan menggantikan Pedros II tahun 1889 melalui sebuah kudeta militer. Republik federasi mengumumkan bentuk baru "Persatuan Negara-Negara Brasilia". Setelah 5 tahun kekuasaan militer, dimulai "politik para gubernur". Mereka menjamin presiden bantuan kongres melalui perjanjian dengan gubernur, senator, dan anggota parlemen. Politik demikian mengizinkan koeksistensi lembaga formal-demokrat dengan struktur masyarakat tra-

disional pertanian yang feodal. Sampai tahun 1930 gubernur dari daerah yang kaya Sao Paulo, Minas Gerais, dan Rio Grande do Sul, memisahkan diri dari jabatan presiden. Politik "kopi dengan susu" ini, berlandaskan kekayaan dari kopi dan peternakan, tercermin melalui perubahan penting ekonomi dalam tahap peralihan ke republik. Pusat ekonomi pindah dari timur laut dengan produksi gula, kapas, dan kakao yang dulunya menggunakan budak, ke daerah selatan. Sao Paulo dan Minas Gerais secara geografi, ekonomi, dan demografi menjadi pusat negara. Di awal abad ke-20 terjadi kehancuran harga karet alam akibat persaingan dengan orang Inggris dan Belanda di Hindia Belanda. Nasib yang sama dialami juga oleh pasar kopi dengan jatuhnya harga yang disebabkan oleh kelebihan produksi. Bersamaan dengan krisis ekonomi dunia terjadi ketegangan dalam negeri karena sikap Sao Paulo yang tanpa kompromi dalam pemilihan calon presiden. Dalam krisis tahun 1930 ini pecah revolusi. Hegemoni politik "bangsawan kopi" dihancurkan, dan dengan peralihan kekuasaan elite muncul Brasilia modern. Presiden Getulio Vargas menjalankan suatu tata sosial yang maju. Vargas lalu mengamankan pemerintahannya melalui kudeta. Kongres dan partai dibubarkan. UUD "Negara Baru" secara formal menciptakan landasan untuk suatu rezim otoriter dan sentralistik (*get-ulismo*), yang menjalankan industrialisasi substitusi impor. Dalam rangka gerakan demokrasi yang semakin bangkit di Amerika Latin, militer setelah akhir Perang

Dunia II memaksa sang diktator untuk mundur. Dengan pemilihan Jenderal Dutras sebagai presiden, tercipta persyaratan UUD (1946) demokrasi representatif. Di bawah Juscelino Kubitscheck politik substitusi impor *a la* "getulisme" dihapus. Perluasan sektor ekspor secara terarah tahun-tahun berikutnya dan pembukaan negara tersebut untuk investasi langsung asing, memang menimbulkan dinamisasi ekonomi, tetapi juga menyebabkan berlangsungnya transfer laba keluar negeri dan ketergantungan yang lebih besar. Dengan Janio Quadros untuk pertama kalinya sejak tahun 1945 menang di tahun 1961 seorang calon dari partai oposisi UDN (*Union Democratica Nacionalista*, Uni Demokrasi Nasionalis) dan bukan dari dua partai, PSD dan PTB (*Partido Trabalhista Brasileiro*, Partai Buruh Brasilia), yang didirikan Vargas. Reformasi politik yang dilakukan (nasionalisasi perusahaan asing, misalnya Telefon) terus dilanjutkan oleh pengganti Quadros, yaitu Joao Goulart—dalam situasi makin tumbuhnya politisasi dan mobilisasi penduduk (protes mahasiswa, mogok oleh serikat buruh, gerakan buruh tani dan petani). Ketegangan sosial yang makin tumbuh, tingkat pertumbuhan ekonomi yang turun dan mundurnya modal asing, menimbulkan sebuah situasi di mana militer lalu mengambil alih kekuasaan Maret 1964. Militer dalam intervensi ini telah menyiapkan diri secara sistematis dan terarah, terutama melalui perluasan ESG (*Escola Superior de Guerra*) menjadi sebuah pusat studi ekonomi pembangunan dan penge-

tahuan sosial, melalui sebuah formulasi landasan ideologi kekuasaannya, yaitu "Doktrin Pertahanan Nasional.

4. Sistem politik berada di bawah model ekonomi; kerangka politis untuk tujuan pertumbuhan ekonomi dilakukan secara represif. Dengan demikian, diharapkan investasi modal dari luar negeri, dipertahankan etalase demokrasi berlandaskan hukum, meskipun tetap berlangsung penangkapan massal dan teror, serta diyakinkan adanya sebuah iklim investasi yang menarik di Brasilia. Secara prinsipil partai-partai tidak dilarang, tetapi dilakukan perubahan struktur partai. Sebagai saingan partai pemerintah ARENA (*Alianza Renovadora Nacional*, Aliansi Pembaharuan Nasional), diizinkan partai oposisi resmi MDB (*Movimento Democrático Brasileiro*, Gerakan Demokrasi Brasilia) melakukan oposisi terbatas selama pemerintah bersedia menerimanya. Ketika di akhir tahun '60-an politikus sipil, mahasiswa, dan gereja Katolik melakukan oposisi, begitu juga makin banyak kegiatan bawah tanah, Costa e Silva yang mengikuti langkah presiden pertama Castelo Branco, tahun 1968 mengeluarkan UU Kelembagaan nomor 5 (AI-5) tanpa batas waktu. Di antaranya memberikan kewenangan menyangkal hak politik setiap warga negara selama 10 tahun dan menerima mandat untuk legislatif. Jenderal Costa e Silva mewariskan pada penggantinya UU yang berlaku dari tahun 1967-1988 (direformasi tahun 1969). Presiden Medici mempertahankan politik sentralisme otoriter.

5. Sejak pertengahan tahun '70-an di bawah Presiden Jenderal Ernesto Geisel dimulai sebuah pembukaan diri secara berhati-hati. Di bawah penggantinya, Joao Figueiredo, liberalisasi bermuara dalam proses transisi yang mula-mula masih diawasi oleh rezim. Tahap terpenting adalah pemilihan parlemen tahun 1982; pemilihan presiden tidak langsung tahun 1985 dimenangkan partai oposisi yang mengembalikan hak-hak kebebasan manusia dan warga negara serta mengeluarkan UUD baru 5 Oktober 1988. Proses lama dari pertukaran rezim memperlihatkan bahwa militer secara politis sama sekali tidak menjadi lemah dan tidak tersingkir dari posisi penentu politik; militer menjadi lebih mengendalikan diri dan mengundurkan diri dari proses pengawasan.

Tekanan ke arah demokratisasi di satu pihak muncul dari gerakan sosial (1978-1980) dan dari basis serikat buruh yang diperbarui, di lain pihak dari oposisi yang terorganisasi dalam PMDB (*Partido do Movimento Democrático Brasileiro*, Partai Gerakan Demokrasi Brasilia) yang mendapatkan mayoritas mandat dalam kongres (1986). Mereka menggunakan perundingan dengan bidang-bidang kekuasaan yang bersedia melakukan reformasi dan menggunakan kesediaan tersebut untuk bergerak ke arah demokrasi selangkah demi selangkah.

Bahwa elite partai yang melakukan perundingan mempunyai potensi mobilisasi besar, diperlihatkan oleh kampanye pemilihan langsung presiden ("*Diretas ja!*") yang ikut mereka lakukan di awal pemilihan pre-

siden tahun 1985. Memang perubahan UUD yang sesuai dengan itu ditolak dalam kongres, tetapi oposisi dalam gremium pemilihan mendapat suara mayoritas karena terjadi perpecahan dalam partai pemerintah PDS/*Partido Democratico Social*, Partai Demokrasi Sosial (tidak hanya karena calon mereka, Paulo Maluf): dengan pilihan PMDB dan PFL (*Partido de Frente Liberal*, Partai Front Liberal) maka Tancredo Neves (PMDB) terpilih menjadi presiden dan Jose Sarney (PFL) menjadi wakil presiden. Dengan demikian berhasil diterobos sebuah redemokratisasi. Sebelum bisa menjalankan tugasnya, Neves meninggal, digantikan oleh wakilnya. Dengan Sarney, yang menjalankan tugasnya Mei 1985, mantan wakil *Ancien Regime* (sampai tahun 1984 ia menjadi ketua PDS), seorang "konservatif berpikiran maju" menjadi presiden "republik baru" (*Nova Republica*).

Ada berbagai macam motivasi militer mengembalikan kekuasaan kepada sipil. Tetap harus diingat, mereka sebenarnya tidak mempunyai rencana untuk melakukan redemokratisasi Brasilia, meskipun kelangsungan proses tersebut semakin jelas. Sebenarnya, oposisi yang demokratis memberi dinamika kepada proses liberalisasi yang dilakukan pihak rezim untuk mempertahankan kekuasaannya. Dinamika inilah yang pada akhirnya menimbulkan redemokratisasi. Lagipula militer merasa tidak puas ketika kehilangan pengawasan atas proses liberalisasi yang tidak berlawanan dengan perkembangan untuk demokrasi. Ini dapat dijelaskan

bahwa legitimitas rezim yang terutama bertumpu dari kemampuan produksi (keajaiban ekonomi Brasilia 1968-1973), sangat goyah akibat resesi ekonomi tahun 1979-1983. Penggunaan motivasi lain untuk menunjang rezim, misalnya pertahanan ke dalam (menghadapi usaha pengambilalihan kekuasaan oleh pihak kiri) dan ke luar (melawan persaingan Argentina). Dari parlemen semu, yang dipakai oleh rezim sebagai hiasan kelembagaan dan untuk legitimasi, tumbuh sebuah oposisi sesungguhnya.

Setelah tahun 1985 sipil mula-mula memerintah berlandaskan UUD 1962 dan dengan bantuan pasal-pasal tambahan UUD, melakukan koreksi terpenting (pengembalian hak-hak asasi manusia dan hak warga negara, hak pilih untuk buta aksara). Kongres yang terpilih 15 November 1986 lalu melembagakan dirinya sebagai rapat yang mengeluarkan UUD. Setelah diskusi lama dan kontroversial dalam kongres, teks UUD yang diperbarui disahkan Agustus 1988. Dengan mulai berlakunya UUD baru 5 Oktober 1988, proses redemokratisasi Brasilia dianggap selesai.

6. Setelah resesi awal di bawah pimpinan Castelo Branco dan Costa e Silva, 1968/1969 dimulai "keajaiban ekonomi Brasilia" yang berlangsung sampai krisis energi tahun 1973; mempunyai tingkat pertumbuhan tahunan lebih dari 10% antara tahun 1967-1973. Model Brasilia berlandaskan aliansi antara perwira tinggi militer dengan teknokrat sipil. Di bawah bayang-bayang militer diinginkan tingkat pertumbuhan eko-

nomi melalui stop upah, disiplinisasi serikat buruh, dan represi politik. Akibat dua "kejutan minyak" tahun 1973 dan 1979, Brasilia di akhir tahun '70-an, awal tahun '80-an terjebak ke sebuah krisis terberat dalam sejarah. Karena ketergantungan ekspor dan impor energi, ketidak-stabilan ekonomi dunia membawa dampak sangat buruk. Usaha untuk mengadakan energi sendiri (pusat tenaga *Itaipu menggantikan bensin dengan bahan bakar etanol), menimbulkan ongkos baru, dengan turunnya harga minyak tahun 1986 diperlukan subsidi menyeluruh. Dalam beberapa tahun saja utang luar negeri naik drastis, yaitu tahun 1980: 70 miliar US\$, tahun 1986: 110,5 miliar US\$, dan tahun 1988: 120 miliar US\$. Beban utang sampai 55% hasil ekspor. Hiperinflasi upah riil menurun, pengangguran dan pertumbuhan penduduk 2,6%/tahun, menajamkan situasi sosial di sebuah negara yang memang sudah memperlihatkan suatu kristalisasi pendapatan tertinggi di dunia. Sampai sekarang 66% orang Brasilia digolongkan tidak mendapat makanan cukup; 44% keluarga hidup di bawah batas kemiskinan, hanya seperempat dari seluruh rumah tangga mempunyai sistem pembuangan air. Melalui ofensif ekspor (Brasilia sekarang merupakan pengekspor senjata kelima terbesar di dunia), penghematan ketat dalam impor dan proteksionisme dalam bidang informatika, berhasil dihentikan kemunduran pertumbuhan ekonomi (tahun 1983: -3,3%); tahun 1984 tidak terduga mencapai dorongan ekonomi serta

menghasilkan surplus neraca perdagangan.

Pemerintah Sarney dalam memerangi krisis tidak mempunyai konsep menyeluruh, melainkan melakukan satu-satu langkah yang masing-masing berlawanan. *Trend* inflasioner diperangi dengan bantuan "kejutan ortodoks" melalui "Plan Cruzado", diumumkan 28 Februari 1986. *Plan* yang kelihatannya dikonsepkan dari model "Plan Austral"; Argentina merencanakan pembekuan semua harga, penghapusan semua indeksasi harga dan reformasi mata uang (*cruzado* sebagai ganti *cruzeiro*). Melalui efek pemerataan yang timbul, terjadi penguatan daya beli massa yang mengakibatkan peningkatan konsumsi. *Plan* secara tak terduga mendapatkan sambutan baik masyarakat yang ikut ambil bagian dalam pengendalian harga. Tingginya kemenangan pemilu PMDB November 1986 disebabkan oleh hal tersebut.

Ketika Sarney tak lama setelah pemilu mengumumkan "Plan Cruzado II" yang merencanakan peningkatan harga secara meluas untuk-begitu anggapan pemerintah-menghindari sebuah pemanasan konjungtur secara berlebihan, suasana ber-balik. Penyimpangan dari konsep semula yang dilanjutkan dalam masa berikutnya, ditafsirkan sebagai menyalahi janji pemilu dan menyebabkan Sarney tidak populer lagi. Maret 1987 pemerintah menghentikan pembayaran beban utang. IMF tidak banyak membantu dalam keputusan ini; sebuah motivasi untuk moratorium merupakan usaha Sarney mendapatkan kembali popularitasnya. Rencana

mengkambinghitamkan faktor-faktor ekstern, terutama kepada IMF, tidak berhasil, sebab orang Brasilia dalam hal ini menyalahkan pemerintahnya sendiri. Tahun 1987/1988 ekonomi macet kembali, pemerintah tidak dapat mengendalikan inflasi yang makin tumbuh (tahun 1986: 64%, tahun 1987: 228%). Sebuah reformasi pertanian (1985) juga gagal karena perlawanan tuan tanah kaya. Secara keseluruhan politik pemerintahan Sarney dianggap gagal. Ketegangan sosial yang makin meningkat sekarang merupakan masalah terbesar di Brasilia. Pemilu selanjutnya (17 Desember 1989) dimenangkan oleh Fernando Collor de Mello yang berjanji akan memberantas "penyakit inflasi".

Kepustakaan: T.E. Skidmore, *Politics in Brazil, 1930-1964. An Experiment in Democracy*, London a.l. 1967; U. Holtz (ed.), *Brasilien. Eine historisch-politische Landeskunde, Quellen und Anmerkungen*, Paderborn 1981; W. Würtele, *Auf dem Weg zu einer "Authentischen" Gewerkschaftsbewegung in Brasilien*, Heidelberg 1982; G. Zenk, "Brasilien", dlm.: *HDW II*, 2, Hamburg 1982, hlm. 139 dst.; Chr. German, *Brasilien: Autoritarismus und Wahlen*, München/Köln/London 1983; H. Jaguaribe dll., *Brasil 2000*, Rio de Janeiro 1986; E. Altvater, *Sachzwang Weltmarkt*, Hamburg 1987; H. Sangmeister, "Demokratisierung 'Made in Brazil'", dlm.: *Ibero-Amerikanisches Archiv N.F.* 13 (1987), vol. 3, hlm. 307-324; M. Wöhlke, *Brasilien, Anatomie eines Riesens*, München (cet. ke-2) 1987; T.E. Skidmore, *De Castello a Tancredo*, Sao Paulo 1988.

cg/hb
Bretton-Woods-System → Bank Dunia, hubungan Selatan-Selatan, IMF.

Brunei Kesultanan yang terletak di pantai barat laut Pulau Kalimantan, luasnya 5.765 km² dan beriklim hutan tropis. Tanahnya tidak cocok untuk diolah. Kaya akan minyak bumi dan gas bumi. Bidang *onshore* dan

offshore menjadikan Brunei negara terkaya di dunia (tahun 1986 pendapatan per kapita 15.400 US\$).

Penduduk (tahun 1987: 230.000 jiwa) tumbuh cepat (tahun 1973-1985 rata-rata 3,7%/tahun) dan mempunyai tingkat harapan hidup 74 tahun (1987). Sekitar 80% penduduk hidup di perkotaan, terutama di ibu kota Bandar Seri Begawan (45%) dan di pesisir (Tutong, kota-kota minyak Seria, dan Kuala Belait). Secara etnis terbagi dalam Melayu (60%), Cina (19%), India, dan Eropa; agama Islam (60%), Buddha, Konghucu, dan Kristen.

Struktur ekonomi ditentukan oleh sumber daya minyak bumi dan gas bumi yang menghasilkan lebih dari 90% penerimaan ekspor dan lebih dari 90% penerimaan negara. Mitra dagang utama adalah Jepang dan negara-negara ASEAN (bersama-sama 2/3 ekspor) serta AS (12%). Eksploitasi minyak yang dimulai tahun 1929 oleh *Brunei Shell Petroleum Company Ltd.*, separo dimiliki Brunei dan separo lagi oleh *Royal Dutch Shell Group*. Masing-masing 1/3 bagian perusahaan gas cair *Brunei LNG Ltd.* ada di tangan negara, *Royal Dutch Shell*, dan *Mitsubishi*. Dibandingkan sektor minyak, sektor pertanian tidak berarti (tahun 1986 : 1% PNB dan 3% pekerja). Penanaman karet (*perkebunan), merica, dan makanan pokok beras, turun sejak beberapa tahun. Hampir 80% kebutuhan beras harus diimpor dari Thailand, meskipun sejak pertengahan tahun '70-an didirikan perkebunan-perkebunan padi milik negara untuk pengadaaan sendiri. Perusahaan besar milik

negara (misalnya peternakan sapi milik negara di Australia Utara) dan peternakan swasta (*Mitsubishi-farm* dekat ibu kota) memenuhi pengadaan daging di Brunei. Tahun 1986 lebih dari 70% penduduk bekerja di sektor tersier dan 23% di industri. Rencana pembangunan adalah diversifikasi ekonomi (titik berat: pertanian, perhutanan, dan perikanan).

Pendidikan di Brunei dilakukan secara terarah. Sekolah, transportasi ke sekolah, dan tinggal di asrama untuk rakyat, gratis. Jaminan kesehatan juga gratis. Tidak ada wajib militer (tentara sebanyak 4.000 orang didikan Inggris), pajak pendapatan, dan pajak penghasilan. Pekerja boleh pensiun setelah berumur 55 tahun atau di atas 30 tahun.

Kemungkinan besar orang Brunei adalah keturunan keluarga penguasa di Funan (sekitar tahun 680 dihancurkan oleh Khmer). Kekuasaan terbesar ada di tangan Sultan Brunei di abad ke-16; ia mengawasi keseluruhan Kalimantan Barat Laut, serta Kepulauan Sulu dan bagian-bagian Filipina. Sejak abad ke-17 kekuasaannya mulai hancur; konflik dengan Spanyol (Filipina) meningkat. Sejak Inggris tertarik pada pantai barat laut Kalimantan karena masalah keamanan jalan laut ke Hong Kong, Brunei semakin jatuh ke pengawasan Inggris. Tahun 1888-1971 Brunei menjadi daerah protektorat Inggris. Kekuasaan Inggris terputus dalam Perang Dunia II oleh invasi Jepang (1941-1945). Setelah tahun 1959 Brunei mendapatkan sebagian otonomi dan tahun 1971 kedaulatan internal sepenuhnya. Negara itu merdeka

1 Januari 1984. Kekuasaan eksekutif tertinggi ada di tangan pemimpin negara dan pemerintah (Sir Sultan Muda Hassanah-Bolkiah), didampingi lima organ perundang-undangan (Dewan Negara, Dewan Menteri, Dewan Agama, Dewan Pencipta UU, dan Dewan Pengganti Kekuasaan). Sekarang ini, Dewan Pencipta UU dihapuskan. Dalam politik luar negeri, Brunei berusaha menjaga hubungan baik dengan negara-negara tetangga. Brunei adalah anggota Negara AKP dan ASEAN.

Kepustakaan: J.C. Franz, "Brunei", dlm.: *HDW II*, 7, Hamburg 1983, hlm. 301 dst. ah
BSAC → Zambia, Zimbabwe.

Buenos-Aires-Plan Rencana aksi negara berkembang dalam meningkatkan kerja sama ekonomi di antara negara berkembang, diputuskan dalam konferensi TCDC di Buenos Aires (1979). Rencana aksi yang berorientasi pada konsep *collective self-reliance* a.l.: a. *self-reliance*; b. *collective self-reliance* (melalui pertukaran pengalaman, *pool*-pendidikan, bersama-sama mengelola sumber daya teknik); c. penelitian masalah pembangunan (formulasi lebih baik strategi yang sesuai dengan negara berkembang dalam hubungan ekonomi internasional); d. alih teknologi tepat guna dan *know-how* yang ada di antara negara berkembang (memudahkan penyediaan dan kemungkinan penerimaan).

Teks dlm.: HIZ III A03, 17.

dn
buffer stock Gudang penyangga bahan mentah yang dibangun dalam rangka program bahan mentah terintegrasi; dibiayai oleh Dana Bersama berdasarkan Perjanjian Bahan Mentah. Tujuan ketika itu adalah sta-

bilisasi harga bahan mentah. Melalui pembelian di gudang diharapkan dapat meredam gerak naik-turun harga.
→ Perjanjian Bahan Mentah. **dn built-in evaluation** → evaluasi.

Burkina Faso Sampai tahun 1985 disebut Volta Hulu, salah satu negara berkembang termiskin (pendapatan per kapita tahun 1989: 320 US\$). Kekurangan infrastruktur, perluasan gurun pasir (Zone Sahel, desertifikasi) miskin akan sumber daya; merupakan masalah-masalah pembangunan terberat. Perkembangan politik sejak merdeka (1960) termasuk paling menarik di Afrika Barat.

1. Burkina Faso didominasi oleh etnis Mossi yang hidup di daerah tengah (luas keseluruhan 274.000 km²), mencakup hampir separo penduduk Burkina Faso yang berjumlah 9 juta jiwa (1989). Kerajaan suku ini terorganisasi menurut struktur administrasi "feodal" dengan Mogho Naba (kaisar) di puncak kekuasaan yang mempunyai pengaruh politik sejak abad ke-12 sampai sekarang. Di sebelah utara hidup suku nomad Peul (Fulbe) dan Tuareg (keduanya hampir mencapai 10% penduduk), di sebelah barat suku Bobo, Lobi, Mande, Senoufo, Samo, Gurunsi, dsb. Sekitar 30% penduduk beragama Islam, sekitar 60% Animis, dan sekitar 10% Kristen yang pengaruhnya sangat besar terutama karena lapisan pimpinan lahir dalam sistem pendidikan Katolik. Tingkat penyekolahan sekitar 15% (perempuan dianaktirikan; 98% perempuan buta aksara), paling rendah di Afrika. Hanya sekitar 11% penduduk hidup di kota, sekitar 90%

bekerja di pertanian (bagian dalam PDB di masa panen bagus adalah 40%). Lebih dari separo produksi (jawawut, gandum, buncis, jagung, beras, dsb.) untuk makanan petani sendiri. Pengadaan bahan makanan setelah panen tetap tidak pasti. Komoditas ekspor andalan adalah ternak (kemunduran drastis ternak setelah musim kering tahun 1983/1984 dari 7,3 juta menjadi 1 juta ekor), kapas (sekarang mencapai 70% penerimaan ekspor), dsb.; tetapi tidak pernah mencapai nilai impor (defisit neraca perdagangan tahun 1987: 84 miliar F CFA). Neraca pembayaran agak baik karena pemasukan devisa luar negeri berbentuk bantuan pemerintah (misalnya pembiayaan dari luar negeri dalam rencana pembangunan tahun 1986-1990 sebesar 630 miliar F CFA: 85%) dan pribadi (terutama dari sekitar 2 juta orang Burkinabes yang bekerja musiman atau beberapa tahun di luar negeri, terutama di Pantai Gading, karena sedikit terdapat peluang kerja di Burkina Faso). Mengalir masuknya uang dari Pantai Gading (tahun 1987 mempunyai pangsa 37,8% impor dan 32,7% ekspor Burkina Faso), merupakan mitra dagang kedua setelah Perancis, pangsa pelabuhan Abijan sebesar 75% pada ekspor Burkina Faso, membuktikan a.l. bahwa hubungan ketergantungan negara tersebut yang tercipta sejak zaman penjajahan pada tetangga terpenting itu, tetap berlangsung sampai sekarang.

2. Jalur lalu lintas terpenting di Burkina Faso adalah jalur kereta api sepanjang 517 km dari ibu kota Ouagadougou (tahun 1987: 236.000

penduduk) ke batas negara Ivory dan terus ke Abijan. Infrastruktur lalu lintas tidak memadai (sekitar separo jalan sepanjang 16.500 km di musim hujan sulit dilalui, jaringan jalan yang tidak mencukupi terutama utara dan timur) merupakan alasan utama mengapa kekayaan tambang yang dikenal sejak lama (terutama mangan di Tambao, di utara) tidak dikelola. Dari proyek "lini kereta api Sahel" Ougadougou-Tambao (312 km) yang diperdebatkan segi ekonomisnya dan diharapkan menjadi penghubung ke Mali dan Niger, telah selesai dibangun bagian pertamanya (104 km ke Kaya) dengan memakai tenaga sukarela. Industri yang terutama sekali substitusi impor dan mengolah produksi pertanian (tahun 1987: 12% PDB), berkembang sangat lemah karena tidak ada bahan mentah dan ongkos energi yang tinggi.

3. Setelah rezim satu partai yang otoriter dan korup (→ rezim otoriter) dengan presiden pertama M. Yaméogo hancur awal tahun 1966, rezim militer dan sipil saling berganti (kudeta militer tahun 1974, 1980, 1982, 1983, 1987; tiga tahun terakhir menentang pemerintah militer). Tokoh-tokoh utama pertikaian politik adalah serikat buruh yang sangat aktif meskipun jumlah anggotanya sedikit. Beberapa partai kiri dan sayap radikal dalam militer di satu pihak, serta militer demokrat, hierarki Katolik, politikus yang berorientasi Mogho Naba dan terutama sekali Perancis di lain pihak. Masa tenang terpenting setelah jatuhnya Jenderal Lamizana (1966–1980) adalah kudeta pimpinan Kapten Thomas Sankara (1983). Pro-

ses perubahan sosial-revolusioner yang dipimpin oleh Sankara, di Afrika tidak ada duanya. Tujuan utamanya adalah emansipasi kelompok marjinal, terutama sekali perempuan dan petani. Perubahan mendasar struktur politik berarti pemindahan kekuasaan politik dari basis lokal ke sekitar 7.000 *Comites de Defense de la Revolution* (CDR). Kemampuan CDR yang terdiri atas para pemuda, tidak menentu. CDR berhasil memobilisasi massa dengan titik berat politik pembangunannya, perluasan infra-struktur di pedesaan. Tahun 1983–1987 Sankara memerangi korupsi dan menurunkan gaji pegawai negeri dari 70% menjadi 40% pengeluaran negara. Dengan usaha penghematan yang radikal, Sankara semakin menjauhi kelompok-kelompok kiri yang menopang pemerintahannya. Perlawanan mereka ditujukan untuk menentang rencana pembentukan sebuah partai kesatuan. Sankara bereaksi dengan tindakan represif, lalu dijatuhkan dan terbunuh dalam sebuah kudeta, 15 Oktober 1987. Penggantinya, Kapten Blaise Compaore, mengikuti haluan pragmatis. CDR diganti *Comites Revolutionnaires* yang kemampuannya lebih tidak jelas lagi. Politik ekonominya sejak Maret 1988 ditujukan terutama menghapuskan utang luar negeri yang telah meningkat dua kali lipat selama empat tahun terakhir (akhir tahun 1988: 794 juta US\$, artinya rata-rata 104 US\$ per kapita pada pendapatan tahunan sebesar 170 US\$ per kapita, artinya kewajiban utang tahunan sebesar 57 juta US\$, yaitu 1/3 pengeluaran negara). Juni 1991 sebuah pemerintah peralihan mengambil alih kekuasaan

dan membentuk "meja bundar" untuk semua kekuatan politik dengan tujuan demokratisasi negara tersebut.

Kepustakaan: L.Reuke, "Obervolta", dlm.: *HDW II*, 4, Hamburg 1982, hlm. 318 dst.; J. Ziegler/J.-Ph. Rapp, *Thomas Sankara. Un nouveau pouvoir africain*, Paris 1986; P. Englebert/J.-P.Cot 1987: *La révolution burkinabé*, Paris 1987; Die Welt, "Blutige Unruhen überziehen Afrika", Oktober 1991, dlm. *BMZ-Spiegel der Presse*, 21/91.

kz

buruh anak Anak-anak dituntut memberikan kemampuan fisik dan psikis yang melampaui kemampuan umur sehingga tidak membantu perkembangan melainkan menghalangi mereka. Biasanya hal ini berkaitan dengan waktu kerja yang terlalu lama (lebih dari 15 jam/hari) begitu juga perlakuan seperti budak dengan upah sangat rendah (Rp400,00 sehari). Konsekuensi umum: tidak bersekolah atau jarang ke sekolah, tidak ada atau kurang mempunyai kesempatan profesi, kerusakan kesehatan (cacat di umur muda, kecilnya harapan hidup: 30-40 tahun). Menurut ILO (1988) sekarang ini 200 juta anak di dunia terlanda masalah buruh anak. Sebagian besar berada di sektor informal (tak ada jaminan, membelakangi ketentuan perlindungan kerja, pelacuran anak, dsb.). Menurut data PBB terbaru, lebih dari 200.000 anak menjadi tentara dalam perang di Dunia Ketiga (misalnya Perang Irak-Iran). Karena di banyak negara berkembang seluruh keluarga berjuang mempertahankan hidup, pengurangan kerja anak yang tidak manusiawi hanya dapat dilakukan dengan memerangi miskin. *Anti Slavery Society* di London berjuang menghapuskan kerja anak di seluruh dunia. PBB sedang

menyiapkan sebuah deklarasi umum mengenai hak-hak seorang anak.

Kepustakaan: R. Wilke, "Kinderarbeit: Ausbeutung statt Ausbildung", dlm.: *Der Überblick I*, 1982, hlm. 14 dst.; Komisi PBB, *Dokument über die Sklaverei und Folter der Kinder*, Jenewa.

ah

buruh pengembara Di negara-negara Dunia Ketiga pengertian buruh pengembara sulit dibatasi dengan pengertian migrasi buruh. Perlu dibedakan antara pengembaraan intra, inter-regional, dan internasional sering karena ketidakseimbangan pertumbuhan ekonomi. Bentuk buruh pengembara tradisional (kira-kira di Afrika Barat) adalah pencari kerja untuk beberapa bulan di daerah lain pada produsen-produsen kecil.

Semua bentuk kerja pengembara modern adalah sama, yaitu perpindahan dari daerah asal untuk masa relatif lama, sering untuk selamalamanya. Kaum pendatang tersebut bagi "tuan rumah" merupakan tenaga kerja murah dan dapat dipertukarkan, serta tidak perlu melakukan kewajiban jaminan sosial.

Secara keseluruhan jumlah buruh pengembara antarnegara Dunia Ketiga, terutama dari negara berkembang ke negara industri, naik drastis dalam 20 tahun terakhir (→ *brain drain*). Migrasi kerja berlangsung terutama dari Amerika Tengah (Meksiko) dan Kolombia ke AS; dari Bolivia, Cile, Paraguay ke Argentina; dari Mali, Niger, dan Burkina Faso ke Pantai Gading; dari Indonesia ke Saudi Arabia, Malaysia, Brunei; tahun '70-an dari Ghana ke Nigeria (tahun 1983 pengusiran buruh pengembara karena berlangsung krisis ekonomi di Nigeria). Dari

mula-mula kerja pengembara musiman (ekonomi perkebunan) berkembang menjadi migrasi permanen.

Salah satu bentuk khusus buruh pengembara adalah karena kemiskinan dan kurangnya kesempatan kerja-migrasi kerja yang dipaksakan kepada penduduk *homeland* dari Botswana, Lesotho, Mozambik, Malawi, dan Swaziland untuk bekerja di daerah pertambangan di Afrika Selatan. Membanjirnya tenaga kerja asing di sektor jasa dan bangunan di negara-negara Teluk Arab karena pendapatan dan tingkat hidup di sana jauh lebih tinggi di sana.

Di masing-masing negara asal dan daerah asal, buruh pengembara menajamkan disparitas regional. Misalnya, karena ada perpindahan tenaga kerja (terutama di Afrika dan Asia, kebanyakan laki-laki) sering tidak ada tenaga kerja di pertanian.

Kepustakaan: G. Wellmer (ed.), *Wanderarbeiter im südlichen Afrika*, Bonn 1976; W. Mayer/A. Schmidt, "Kapitalistische Durchdringung und Mobilität von Arbeitskraft in Westafrika", dlm.: H. Elsenhans (ed.), *Migration und Wirtschaftsentwicklung*, Frankfurt/New York, 1978, hlm. 117 dst.; G. Mertins, "Migration", dlm.: D. Nohlen/P. Waldmann, *Dritte Welt*, München 1987, hlm. 329 dst.

is/pb
buruh tamu Tenaga kerja yang memiliki kualifikasi maupun tidak, tempat tinggal dan kerja (sementara) berada di luar negara asalnya. Berdasarkan liputan statistik mereka dalam neraca pembayaran dan perhitungan pendapatan nasional diperlakukan layaknya seperti penduduk pribumi. Sedangkan aspek hak dan sosial berbeda dari satu negara ke negara lain. Buruh tamu sebagian besar berasal dari negara berkembang dan bekerja di negara industri

Barat (sekitar 8 juta orang tahun 1980). Sejak pertengahan tahun '70-an negara-negara pengekspor minyak di Timur Tengah membutuhkan banyak buruh tamu. Buruh tamu yang bekerja di Eropa sebagian besar berasal dari Yugoslavia, Turki, Yunani, dan Afrika Utara. Buruh tamu yang bekerja di AS berasal terutama dari Amerika Latin, ada juga yang berasal dari Asia Tenggara. Sedangkan buruh tamu yang bekerja di daerah Teluk, banyak juga orang Arab.

Sejumlah 28 miliar US\$ mengalir ke negara asal buruh tamu (1982). Di masing-masing negara, dana ini bernilai besar menyamai penghasilan dari ekspor barang sehingga menjadi sumber devisa kedua terpenting. Terjadinya resesi ekonomi dunia membuat negara industri berusaha menstabilkan jumlah buruh tamu, mengurangi jika mungkin. Negara-negara Teluk mula-mula mempunyai kebutuhan besar akan buruh tamu, tetapi setelah hasil ekspornya mengalami penurunan drastis, mereka juga mengurangi jumlah buruh tamu yang bekerja di negaranya.

hn
Burundi Bekas jajahan Belgia, termasuk negara berkembang termiskin (CEPGL, LLDC, MSAC, negara pedalaman, Negara AKP). Masalah pembangunan utama adalah pangan rakyat. Konflik etnis (memuncak tahun 1965, 1972, 1988) menentukan proses politik.

1. Lebih 40% tanah seluas 27.834 km² adalah lahan pertanian. Daerah selatan dan utara baik untuk penanaman kopi (tahun 1988: 90% nilai ekspor) dan teh. Burundi Tengah merupakan padang rumput untuk

843.000 sapi Watussi dan domba (perkiraan FAO tahun 1980). Di pertanian bekerja 95% penduduk (bagian pertanian pada PDB: 61%). Kekayaan bumi sedikit.

2. Diperkirakan penduduk Burundi tahun 1989 berjumlah 5 juta jiwa. Dengan 180 penduduk/km² Burundi termasuk salah satu negara terpadat di Afrika. Hampir 40% penduduk hidup di propinsi Kitega (Tengah) dan Ngozi (Utara) serta di ibu kota Bujumbura, yang dihuni oleh hampir seluruh penduduk Burundi. Penduduk desa hidup hanya dari pertanian sendiri. Tekanan populasi terasa berat sejak tahun '50-an sehingga 300.000 manusia dalam waktu tertentu bekerja sebagai buruh pengembara. Penduduk terdiri atas tiga kelompok etnis: sekitar 85% suku Bantu (Hutu), sekitar 14% Tutsi keturunan Hamati, dan sisanya Twa kate. Sekitar 50% penduduk beragama Kristen.

3. Tuan tanah kaya dan sekitar 1.000 bangsawan Burundi mengalami akhir kekuasaan Tutsi tahun 1954. Setelah kemerdekaan (1960) dan dalam rangka reformasi pertanian, sebagian lahan pertanian dengan luas rata-rata 1 ha menjadi milik petani Hutu.

Di samping beberapa ratus ribu petani kecil yang bebas, setelah pembangunan proyek agrobisnis terbentuk lapisan tipis buruh tani. Jatuhnya otoritas istana dan perkembangan tetangga, Rwanda, menimbulkan konflik antara mayoritas Hutu dan minoritas Tutsi yang berpuncak pada kegagalan kudeta militer (Oktober 1965). Hampir seluruh elite Hutu di

negara itu menjadi korban aksi pembersihan oleh tentara kerajaan. Raja yang tetap menjadi bola mainan kepentingan para bangsawan Tutsi, dijatuhkan oleh militer dipimpin Kolonel Micombero November 1966 dan negara diproklamkan menjadi republik. Dengan kudeta militer (1976), perwira-perwira Tutsi dari utara menggantikan kekuasaan Micombero dari kelompok Bururi.

Presiden Kolonel Bagaza terpilih melalui sebuah rancangan UUD (1981). Hampir 99% pemilih memberikan persetujuan (republik presidensial) dan memberikan suara untuk pembentukan negara satu partai. Partai negara UPRONA (*Parti de l'Unite et du Progres National*, Partai Kesatuan untuk Kemajuan Nasional) dibubarkan setelah kudeta militer tahun 1987. Sejak itu, berkuasa sebuah "komite militer pembebasan nasional" di bawah pimpinan Mayor Pierre Buyoya.

4. Struktur sosial Burundi sekarang sebagian masih seperti di zaman penjajahan. Lapisan kecil atas dan menengah (pejabat, karyawan, tentara, dan petani bebas) didominasi oleh Tutsi. Tingkat buta aksara 30%, tetapi kurang dari 5% yang mencapai tahap sekunder. Di samping itu, ada kesenjangan desa-kota dengan 70% tingkat penyekolahan di Bujumbura dan 10% di daerah pedesaan periferi. Sampai tahun '70-an sistem pendidikan dibangun oleh misi Kristen, serta mendominasi sistem kesehatan yang berkembang buruk (tingkat hidup: 48 tahun).

Kepustakaan: W. Weinstein, *Political Conflict and Ethnic Strategies: A Case Study of Burundi*, Syracuse (N.Y.) 1976; G. Philipp, "Burun-

di", dlm.: F. Nuscheler/K. Ziemer, *Politische Organisation und Repräsentation in Afrika*, Halbbd 1, Berlin/New York 1978, hlm. 567 dst; B. Gierbach, "Burundi", dlm.: *HDW II*, 5, hlm. 118 dst.

gp

buta aksara → pemberantasan buta aksara.

Buthelezi, Gatsha Presiden gerakan *Inkhata*; sejak tahun 1970 menjadi perdana menteri *homeland Kwazulu di Republik Afrika Selatan. *Inkhata*, gerakan yang didukung Zulu (menurut data mereka 1 juta anggota, merupakan gerakan Afrika terbesar di negara itu), seperti *ANC, menolak politik *apartheid pemerintah Afrika Selatan. Mereka juga mengkritik pemilahan teritorial Afrika Selatan dalam beberapa negara "merdeka", yang merupakan strategi menstabilkan sistem politik dan ekonomi yang dikuasai kaum kulit putih dengan cara pengusiran rakyat kulit hitam ke daerah *homeland*. *Inkhata* menuntut persamaan hak semua rakyat Afrika Selatan dalam sebuah negara kesatuan (*one man, one vote*). Buthelezi di antara para pemimpin gerakan pembebasan di Afrika bagian selatan, mewakili strategi oposisi yang moderat dan tanpa kekerasan dalam kerangka UU yang ada. Menjadi presiden *South African Black Alliance* (SA-

BA) sejak tahun 1978, merupakan sebuah organisasi multirasial yang anggotanya adalah orang India (*Reform Party*) dan *Coloureds*. Buthelezi *Report* yang diumumkan tahun 1982 oleh sebuah komisi ahli dan politikus atas pencetusannya mengenai masa depan *homeland*, merupakan alternatif terhadap perang bersenjata (saran-saran yang tidak melanggar hukum untuk sebuah pemecahan masalah regional sesuai kebutuhan dan kepentingan semua kelompok rakyat, kritik atas sikap yang merugikan ras, menolak pembagian daerah secara politis, serta menyetujui sistem satu pemerintah dengan wakil-wakil yang seimbang antara orang Afrika Selatan hitam dan putih pada perwakilan kelompok lain yang sesuai).

Peran Buthelezi ambivalen: pihak kelompok kulit hitam radikal menuhunya bekerja sama dengan pemerintah Afrika Selatan, sementara di lain pihak ia memakai posisi perundingan ini untuk melakukan kritik tajam terhadap pemerintah.

Kepustakaan: H.H. Klein, "Der Bericht der Buthelezi Kommission und die Zukunft Südafrikas", dlm.: *Buthelezi-Report, Institut für Internationale Solidarität der Konrad-Adenauer-Stiftung*, St. Augustin 1982.

ah

C

Cabinda → Angola.

Cabral, Amilcar Teoretisi dan organisator perjuangan pembebasan Afrika semasa penjajahan kolonial Portugis. Lahir 12 September 1925 di Kepulauan Kapverde, belajar teknik di Universitas Lissabon dan bekerja di bagian pertanian pemerintahan kolonial sampai ia mendirikan partai Afrika (PAIGC) yang berjuang untuk kemerdekaan Guinea dan Kepulauan Kapverde. Teori revolusinya memperlihatkan keterkaitan antara perjuangan kemerdekaan nasional dan perjuangan melawan neo-kolonialisme, ketergantungan politik, dan pembebasan tenaga produktif nasional. Semua kegiatan politik PAIGC terpusat di daerah pemukiman perkotaan, kemudian sesudah 1959 Cabral mulai mengorganisir para petani. Ketika Cabral menjadi korban pembunuhan 20 Januari 1975, gerakan kemerdekaan telah melanda sebagian besar Guinea Bissau dan berada di bawah pengaruhnya.

Kepustakaan: A. Cabral, *Die Theorie als Waffe*, Wuppertal 1982.

dn

Cad 1. Republik Cad (1.285.000 km², tahun 1989: sekitar 6 juta penduduk), terletak di daerah peralihan antara Sahara dan Afrika Hitam,

paling menderita akibat penarikan batas-batas wilayah negara yang dilakukan penguasa kolonial. Wilayahnya mulai gurun pasir melalui Zone Sahel sampai hutan sabana di selatan, tempat hidup mayoritas penduduk (30 penduduk/km²), sementara di daerah paling utara (46% areal) hanya hidup 1,9% penduduk (sekitar 0,2 penduduk/km²). Di masa prakolonial kekuasaan politik berada pada etnis Tibbu dan Kanuri (sekitar 10% penduduk) di daerah utara yang hidup berpindah dan beragama Islam, kelompok Hausa di daerah Danau Cad (sekitar 10%) dan kelompok Arab-Sudan (sekitar 30%). Setelah merdeka (1960) kekuasaan politik berada pada orang Negro-Sudan (terutama Sara) dan kelompok orang Etiopia di selatan (animis, sebagian sudah dikristenkan) karena Sara ikut dalam administrasi kolonial Perancis dan sampai tahun '70-an memonopoli hampir semua posisi kunci dalam politik.

2. Negara pedalaman Cad termasuk 25 negara termiskin di dunia. Tingkat penyekolahan tahun 1972 adalah 35% (dengan kesenjangan utara-selatan yang besar), terendah di Afrika. Setelah berlangsung 15 tahun

perang saudara, struktur pendidikan harus dibangun kembali seluruhnya. Kekacauan perang dan bencana musim kering tahun 1982-1985 menimbulkan migrasi (500.000 orang dari utara ke selatan, arus pengungsi ke negara-negara tetangga, di antaranya 25.000 orang masih hidup di kamp-kamp pengungsi). Bencana banjir Sungai Logono dan Sari tahun 1988 menyebabkan 50.000 orang kehilangan tempat tinggal. Tahun 1988 di kota-kota yang terletak di selatan (ibu kota N'jamena, 600.000 penduduk) hidup sekitar 18% penduduk (tahun '70-an: 15%). Pertanian yang hanya mungkin dilakukan di selatan (jawa-wut, sorgum, ubi kayu, ubi, dsb.; autarki pertanian mungkin dilakukan karena persyaratan iklim dan politik yang sesuai) dan peternakan (karena bencana musim kering musnah 80% jumlah ternak, permintaan besar akan daging dari negara-negara tetangga tak dapat dipenuhi karena tidak ada kemungkinan pengolahan dan transportasi), merupakan tulang punggung ekonomi. Komoditas ekspor andalan adalah kapas yang dari 20% hasilnya penduduk bergantung. Tahun 1986-1988 harga pasar kapas jatuh sekitar 45%. Kerusakan besar pertanian karena hama wereng tahun 1988. Sejak tahun 1979/1980 perdagangan luar negeri, produksi industri, dan eksploitasi sedikit minyak bumi (memiliki prospek, tetapi belum dimanfaatkan: uran, emas, timah, bauksit) hampir hancur sama sekali. Oleh karena itu, kini dilakukan industrialisasi substitusi impor dan industri pengolahan produk pertanian lokal (6%-8% PNB). Industri terutama terdiri

atas 6 perusahaan negara, di antaranya tiga sedang mengalami kesulitan besar. Hampir tidak ada sektor swasta. Program investasi pemerintah yang dicanangkan untuk tiga tahun, bertitik berat pada perluasan infrastruktur lalu lintas, penjaminan autarki dalam pengadaan bahan pangan, diversifikasi sektor pertanian dan memerangi perluasan gurun (→ desertifikasi). Hal yang menjadi beban besar adalah neraca pembayaran akibat transportasi yang jauh ke pantai Afrika Barat untuk bahan bakar cair yang menelan ongkos empat kali lipat. Rentabilitas eksploitasi tambang minyak bumi di tepi Danau Cad kini sedang dalam tahap pengujian. Bank Dunia akan memberikan kredit untuk pembangunan sebuah instalasi penyarangan.

3. Ketegangan utara-selatan akibat pertentangan demografi, geografik-ekonomi, dan sosial-politik, menajam secara dramatis, ketika pemerintah satu partai yang otoriter di bawah Presiden Tombalbaye pertengahan tahun '60-an secara bertahap menghapuskan kewenangan kepala-kepala suku—terutama daerah utara—dan mendudukkan suku Sara dalam administrasi "modern" di utara. Mereka ini mengendalikan negara seperti zaman pendudukan. Setelah berlangsung sejumlah pemberontakan lokal (disebabkan terutama oleh penarikan pajak beberapa kali), sejak tahun 1966 seorang dokter, Dr. Abba Sidick, berusaha mengkoordinasi dari Libia perlawanan terpisah dalam FROLINAT (*Front de Liberation Nationale du Tchad*). Setelah kehancuran pemerintahan di utara (1968),

Tombalbaye mengundang bantuan tentara Perancis yang dengan keunggulan logistiknya tak lama kemudian berhasil mendesak para pemberontak. Rezim Tombalbaye yang makin despotis dan korupsi makin terlihat jelas dengan terjadinya bencana musim kering, melalui sebuah kampanye "autentisitas" (penggantian nama-nama Eropa dengan nama Afrika, mengubah nama-nama kota dan jalan-jalan yang berbau Eropa, dsb.) dan penggantian partai persatuan yang selama itu ada dengan yang baru (1973), tetap tidak mendapat dukungan besar dari penduduk. Tahun 1975 militer melakukan kudeta (→ rezim otoriter), tetap tidak bisa mencegah proses kehancuran negara. Setelah kehancuran FROLINAT, jumlah kelompok bersenjata yang bersaing menjadi 11. Pesaing utamadengan koalisi yang sering berganti-adalah Goukouni Oueddai dari utara yang mengundang 10.000 tentara Libia (1980); orang terkuat di selatan, mantan kepala polisi, Letkol. Kamougue dan Hissene Habre, Juni 1982 merebut ibu kota, setelah penarikan mundur tentara Libia (tentara Libia tetap menduduki jalur Aouzou sepanjang 114.000 km² yang diduga mengandung uran). Habre kemudian menjadi presiden. Setelah berlangsung penyerangan Goukouni yang dilakukan dengan dukungan Libia, Perancis yang juga berkepentingan meredam pengaruh Libia dan tidak ingin kawasan itu terus tidak stabil (terutama bekas koloni-koloni Perancis), pertengahan tahun 1983 lalu mengirimkan tentara. Sampai tahun 1987 *de facto* di bagian utara dalam

pengawasan Perancis dan bagian selatan dalam pengawasan Libia. Kekalahan militer Libia setelah serangan tak terduga dari Habres yang membuka kesempatan untuk gencatan senjata September 1987 dan ketidakinginan Libia melakukan campur tangan lebih lanjut, memberikan sebuah perspektif perdamaian bagi Cad. Presiden Habre dalam kongres partai persatuan UDIR akhir tahun 1988 mencanangkan bahwa akan ditentukan sebuah UUD melalui referendum. Desember 1990 terjadi kudeta militer dipimpin oleh Idriss Deby yang menjatuhkan Habre dan mengangkat dirinya sebagai presiden. Janji Deby untuk cepat kembali ke demokrasi telah dilanggar sebagian dan ia membatalkan pemilu yang direncanakan akhir tahun 1993.

Kepustakaan: M.P. Kelley, *Chad: Conditions of the State's Survival*, Boulder 1986; G.J. Ngangso, *Tchad, 20 ans de crise*, Paris 1986; R. Buijtenhuijs, *Le Frolinat et les guerres civiles du Tchad: la revolution introuvable, 1977-1984*, Leiden/Paris 1987; A. Dadi, *Tchad: l'Etat retrouve*, Paris 1988; Die Welt, "Blutige Unruhen überziehen Afrika", dlm. *BMZ-Spiegel der Presse*, 21/91. **kz**

CADA (*Concerted Action for Development in Africa*) Disebut juga **ACDA** (*Action Concertee pour le Developpement en Afrique*). Beranggotakan 6 negara: Belgia, Jerman, Perancis, Inggris, Kanada, dan AS. Berkedudukan di Paris; sebagai suborganisasi negara-negara penyandang dana bantuan OECD. **dn**
cadangan penyangga → *buffer stock*.

CADC → **CONDECA**.

CAEU (*Council of Arab Economic Unity*) Dewan Uni Ekonomi Negara-Negara Arab, dibentuk tahun 1964,

beranggota 14 negara (termasuk PLO), *tujuan*: membentuk "Pasaran Bersama Negara-Negara Arab". Harapannya, sampai tahun 1971 pelbagai bea masuk dan pajak antar-negara Arab dapat dihapuskan, lalu diciptakan suatu kesatuan sistem bea cukai dan perpajakan. Konflik antarkelompok negara atau masing-masing negara menjadikan tujuan ini tidak tercapai. Tahun 1977 dibentuk Dana Moneter Arab yang berkedudukan di Abu Dhabi, *tujuan*: membantu para anggota dewan untuk menyeimbangkan neraca pembayarannya dan menstabilkan keadaan moneter di negaranya. Dewan tersebut selanjutnya membentuk sejumlah organisasi (misalnya Lembaga-Lembaga Investasi), dalam hal-hal tertentu dapat dianggap berhasil. fn

CAF → Pakta Andes.

CAFRAD (*Centre Africain de Formation et de Recherches Administratives pour le Developpement*) Pusat Penelitian Administrasi Pemerintahan dan Masalah Pembangunan Afrika.

callampas → marjinalitas.

Camara, Dom Helder Lahir 7 Februari 1909 di Sao Jose (Fortaleza/Ceara), Brasilia, putra seorang wartawan; tahun 1931 ditahbiskan sebagai pastor; antara tahun 1931-1936 menjadi aktivis Gerakan Integralis Brasilia; tahun 1934 menjadi Sekretaris Negara di bidang pendidikan; tahun 1952 membantu Uskup Kepala di Rio de Janeiro; tahun 1952/1964 menjadi Sekretaris Jenderal CNBB (*Conferencia Nacional dos Bispos do Brasil*); salah seorang pendiri CELAM (*Conferencia General del Epis-*

copado Latino-americano); sejak tahun 1964 menjadi Uskup Kepala di Sao Luis (Maranhao), Olinda, dan Recife; tahun 1968 mendirikan sebuah gerakan bernama "Aksi Keadilan dan Perdamaian"; menjadi terkenal karena kegiatannya di antara kelompok miskin dan laporannya tentang kelompok penindas di Amerika Latin; tahun 1985 mengundurkan diri dari jabatannya sebagai uskup, tetapi tetap giat dalam kegiatan sosial kegerejaan. → teologi pembebasan **obs campesino** → minifundia/minifundisme, Meksiko.

CAPEL (*Centro Interamericano de Asesoria y Promocion Electoral*) Pusat Penerangan dan Pelatihan Pemilihan Umum Antarnegara Amerika Latin. Program khusus sebuah Lembaga untuk Hak-Hak Asasi Manusia (IIDH) antarnegara Amerika Selatan; berkedudukan di San Jose, Kosta Rika. Berdiri tahun 1985, bertujuan membantu penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas di Amerika Selatan dan Karibia dengan memberikan penerangan tentang pemilihan umum.

CAPEL memiliki sekelompok tenaga ahli yang terdiri atas guru-guru besar bidang hukum dan ilmu politik serta sejumlah penasihat pelaksana teknis yang sebagian bertugas membimbing langsung di lokasi pemilihan, sebagian lagi menjadi pengamat pelaksanaan pemilihan umum di berbagai negara. Sampai tahun 1988 diselesaikan 14 proyek teknis yang berkaitan dengan penyuluhan pemilihan umum, terutama menyangkut masalah Amerika Latin dan Karibia. pb

Cardenal, Ernesto Pastor dan penyair, sejak tahun 1979 menjadi Menteri Kebudayaan Nikaragua di masa Sandinista. Lahir tahun 1925 sebagai putra petani kaya. Cardenal belajar sastra di Managua, Meksiko, dan New York, tahun 1959 meraih gelar doktor dengan disertasi berjudul "Kerinduan dan Bahasa dalam Lirik Modern Nikaragua". Dua tahun sebelumnya ia memasuki ordo Yesuit, sejak itu belajar teologi di Guernavaca, Meksiko dan di Medellin, Kolombia, tahun 1961 ia mempublikasi "Psalmen". Tahun 1965 ia ditahbiskan menjadi pastor di Managua dan kemudian mendirikan sebuah komune Kristen kecil di Pulau Mancaron yang termasuk gugus danau-danau besar Solentiname di Nikaragua. Tahun 1977 ia menjadi anggota Sandinista; sesudah merdeka 19 Juni 1979 ia memimpin Kementerian Kebudayaan. Politikanya didasari filsafat menentang setiap tindakan yang otoriter. Ia seorang Yesuit dan marxis, revolusioner sekaligus antikekerasan. Ia bercita-cita menciptakan simbiose antara agama Kristen dengan paham marxis sehingga terciptalah sebuah masyarakat baru sebagai realisasi Kerajaan Allah di atas bumi. Asosiasi Bursa Perdagangan Buku Jerman (*Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels*) menganugerahkan Hadiah Perdamaian kepada Cardenal (1980).

dn
CARICOM (*Caribbean Community*) dan CCM (*Caribbean Common Market*) Masyarakat Karibia, didirikan tahun 1973 oleh Barbados, Guyana, Jamaika, Trinidad, dan Tobago, melalui perjanjian Chaguaramas.

Tahun 1974 Belize, Dominika, Grenada, Montserrat, St. Lucia, St. Vincent, dan Grenadine masuk menjadi anggota, tahun 1983 Bahama menjadi anggota, tetapi tidak dalam pasar bersama. CARICOM adalah pengganti CARIFTA (zone perdagangan bebas Karibia) dengan tujuan meluaskan liberalisasi perdagangan menjadi integrasi ekonomi: koordinasi rencana pembangunan di tingkat global dan sektoral, serta melakukan hubungan perdagangan luar negeri dengan negara ketiga (tarif perdagangan luar negeri bersama, tindakan proteksi bersama). Di dalam CARICOM ada kemudahan untuk LLDC (menurut Perjanjian Chaguarama, anggota sendiri merupakan *More Developed Countries MDCs*, sisanya adalah LLDCs).

Organ-Organ: konferensi kepala pemerintahan, pengambilan keputusan dengan suara bulat; Dewan Menteri, setiap delegasi satu negara; 10 Komisi; Bank Pembangunan Karibia (CDB, *Caribbean Development Bank*): Bank Pembangunan Regional yang didirikan tahun 1970, berkedudukan di Barbados; menjadi motor keuangan untuk integrasi CARICOM.

Hasil-Hasil: formal penghapusan bea masuk dan hambatan perdagangan nontarif (→ politik perdagangan luar negeri), penetapan bea masuk bersama, pengharmonisan tindakan pajak dan pendirian lembaga-lembaga penunjang integrasi; situasi materi telah menghambat kemajuan integrasi. Perdagangan internasional dapat ditingkatkan, tetapi sebagian besar melalui ekspor barang jadi dan setengah jadi negara-negara anggota yang lebih

maju. Tahun 1986 sepakat menghidupkan kembali "mekanisme kredit multilateral" yang telah dibekukan tahun 1983. Mekanisme kredit ini melayani pemberian kredit jangka pendek untuk transaksi perdagangan antara anggota CARICOM, termasuk Dana untuk kredit perdagangan jangka panjang.

Permasalahan: mitra yang tidak seimbang, jalinan ekonomi yang kuat dengan negara ketiga (merugikan pembatasan impor), dan sedikitnya kesediaan untuk mengurangi kedaulatan sebagian ekonomi nasional.

Kepustakaan: F.M. Andic dkk., *A Theory of Economic Integration for Developing Countries. Illustrated by Caribbean Countries*, London 1971; S.E. Chernick, *The Commonwealth Caribbean. The Integration Experience*, Baltimore and London 1978; W. König, "Eine ökonomische Bilanz der lateinamerikanischen Integrationsbewegungen", dlm.: M. Mols (ed.), *Integration und Kooperation in Lateinamerika*, Paderborn 1981, hlm. 109 dst.; *Integracion Latinoamericana*, 92/1984, hlm. 23-37, 121/1987, hlm. 18-26.

dn

CARIFTA → CARICOM.

cash crops Hasil-hasil pertanian yang berasal dari perkebunan, seperti kapas, teh, minyak kelapa sawit, tembakau, dll., untuk pasar dunia bukan untuk memenuhi kebutuhan penduduk setempat,

Pro: keuntungan ongkos komparatif dalam perdagangan luar negeri, pemasukan devisa bagi negara yang bersangkutan. **Kontra:** perubahan *food crops* (pangan) yang diperlukan penduduk setempat; ketergantungan negara berkembang dari permintaan dan fluktuasi harga di pasar dunia; *terms of trade* menjadi negatif. Perbaikan melalui → pem-

angunan pedesaan, *tata ekonomi dunia baru.

dn

CASTARAB (*Conference of Ministers of Arab States Responsible for the Application of Science and Technology to Development*) Konferensi Menteri Negara-Negara Arab mengenai penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan.

Castro, Fidel Lahir 13 Agustus 1927 sebagai anak seorang keluarga petani kaya di Mayari (propinsi Oriente/Kuba). Setelah menyelesaikan sekolah Yesuit di Havana, tahun 1945 ia melanjutkan studi ilmu hukum di Universitas Havana. Semasa kuliah ia ikut aktif dalam gerakan mahasiswa. Tahun 1947 ia ikut serta dalam ekspedisi menentang diktator Trujillo yang dipersiapkan oleh orang-orang Dominika di pengasingan dan para aktivis Kuba, tetapi dihentikan sebelum dimulai. Tahun 1947 ia bergabung dengan partai Chibas yang ortodoks, pecahan dari *Partido Autentico* yang didirikan Presiden Grau San Martín, yang berjuang memerangi korupsi dan pengkhianatan terhadap tujuan revolusi tahun 1933 melalui *Autentico*.

Setelah menyelesaikan kuliah tahun 1950 Castro mulai aktif sebagai pengacara di Havana. Ia kemudian menjadi anggota aktif *Partido Ortodoxo* dan tahun 1952 calon untuk Dewan Perwakilan Rakyat tingkat II di Havana, ketika Batista merebut kekuasaan melalui kudeta militer dan menghalangi pemilu yang sudah di ambang pintu. Tahun 1953 ia mengorganisir penyerbuan markas militer Moncada di Santiago de Cuba

yang merupakan tanda untuk pemberontakan rakyat, tetapi mengalami kegagalan. Ia lalu ditangkap dan diajukan ke pengadilan, di sana ia membacakan pembelaannya yang terkenal, "Sejarah akan membebaskan saya dari tuduhan." Tahun 1955 ia mendapat pengampunan dan berangkat menuju tempat pengasingan di Meksiko. Di sana ia mengorganisir pasukan gerilya dan kembali ke Kuba akhir tahun 1956 dan memulai perang gerilya di Sierra Maestra melawan diktator Batista. Setelah perjuangan selama tiga tahun dan kemenangan revolusi Kuba, Batista ditumbangkan. Sejak Februari 1959 Castro menjadi perdana menteri dan setelah pengesahan UU tahun 1976 ia juga menjadi presiden sekaligus panglima angkatan perang, selanjutnya sekretaris pertama Partai Komunis Kuba. Akhir tahun 1979 ia mengambil alih kementerian dalam negeri, pertahanan, kesehatan, dan pendidikan. Dalam konferensi nonblok tahun 1979 di Havana ia dipilih menjadi ketua Gerakan Nonblok (sampai tahun 1983). Castro merupakan pemimpin yang memiliki karisma. Dari segi politis-ideologis ia terpaksa melepaskan keinginan suatu jalan tersendiri untuk pembangunan Kuba dan model revolusi bagi Dunia Ketiga (Castrisme), akibat paksaan situasi ekonomi dalam pembangunan Kuba sehingga akhirnya makin mendekat ke Uni Soviet. Di dalam Gerakan Nonblok, Castro mewakili negara-negara yang menginginkan ikatan yang lebih erat dengan Uni Soviet.

→ Kuba.

ks

caudillo, caudillismo Di Amerika Latin merupakan bentuk kekuasaan yang muncul di abad ke-19, sebagian berdasarkan pengakuan melalui kekerasan dan sebagian lagi pengakuan sukarela dari para pengikutnya. Dalam diri *caudillo* melekat kualitas pemimpin yang memiliki karisma. Walaupun bersifat otoriter dalam gaya kepemimpinannya, tipe *caudillo* dapat juga berkembang dalam sistem politik yang demokratis jika tersedia persyaratan ekonomi dan sosial yang mendukungnya (keterbelakangan, hubungan personal dan hubungan ketergantungan dalam ekonomi, politik, dan masyarakat; → klientelisme). Namun, lahan subur sosial politik *caudillo* makin berkurang karena adanya proses pelembagaan pelaksanaan kekuasaan politik, walaupun berlangsung marginalitas mayoritas penduduk dan kesediaan mereka mengikuti pemimpin yang karismatik.

Kepustakaan: P. Waldmann, "Caudillismo als Konstante der politischen Kultur Lateinamerikas?", dlm.: *Jahrbuch für Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas*, 15/1978 hlm. 191 dst.

dn

CBLT (*Commission du Bassin du Lac Tchad*) Organisasi untuk Penggunaan Sumber Daya Air di Palung Cad, didirikan tahun 1964 oleh Nigeria, Niger, Kamerun, dan Cad; tahun 1983 diaktifkan kembali. Kedudukan: N'Djamena/Cad.

fn

CCEAC (*Communauté Économique des États de l'Afrique Centrale*) Masyarakat Ekonomi Afrika Tengah, didirikan tahun 1983, sejak tahun 1985 berkedudukan di Libreville, Gabon. Anggota: negara-negara UDEAC dan negara-negara CEPGL serta Cad, Sao Tome, dan Principe.

Tujuan: kerja sama yang harmonis dan mendirikan pasaran bersama dengan politik perdagangan bersama.

*Negara pedalaman dan negara terbelakang diutamakan untuk akses ke dana kerja sama dan pembangunan. Terdapat kemungkinan bahwa UDEAC dan CEPGL dilebur menjadi CCEAC. pb

CCM → CARICOM.

CCP (*Conciliation Commission for Palestine*) Komisi Penengah *PBB untuk masalah Palestina.

CDB → CARICOM.

CDC → hubungan Selatan-Selatan, politik bantuan pembangunan Inggris.

CDF (*Capital Development Fund*) Dana Modal Pembangunan, merupakan program khusus yang berada di bawah administrasi UNDP, memberikan bantuan keuangan untuk daerah-daerah paling miskin di *LLDC. ah

CDP → LLDC.

CDPP (*Centre for Development, Projections and Policies*) Pusat Rencanaan Pembangunan, Proyeksi Pembangunan dan Bantuan Pembangunan dari *Department for Economic and Social Affairs* *PBB.

CEAO (*Communauté de l'Afrique de l'Ouest*) Masyarakat Afrika Barat, komunitas ekonomi yang mulai berlaku sejak tahun 1974. Anggota: Benin, Burkina Faso, Pantai Gading, Mali, Mauritius, Niger, dan Senegal. Titik berat kegiatan di bidang perdagangan, selanjutnya program ekonomi regional; perdagangan bebas untuk hasil pertanian, sistem preferensi untuk hasil industri. Suborganisasi: Dana Pembangunan (*Fonds Communautaire de Développement*,

FCD), Dana Solidaritas dan Intervensi FOSIDEC, kesepakatan tidak saling menyerang dan kerja sama militer ANAD (Togo sebagai anggota terasosiasi). Masalah yang dihadapi: bersilangan dengan **Conseil de l'Entente* dan *ECOWAS. pb
CEC → MCCA.

CECAS (*Conference of East and Central African States*) Konferensi Negara-Negara Afrika Tengah dan Timur.

CECLA Komisi Khusus untuk Koordinasi Amerika Latin, didirikan tahun 1963 sebagai lembaga khusus *OAS. Forum negara-negara Amerika Latin "tanpa Amerika Serikat", untuk menyuarakan sikap antidominasi AS di Amerika Latin; prinsip dasar mereka terhadap hubungan AS Amerika Latin tertuang dalam konsensus Vina del Mar tahun 1969. → SELA. dn

CEIM (*Centre d'Etudes Industrielles du Maghreb*) Pusat Penelitian Industri Negara-Negara Magribi.

CELAM Dewan Keuskupan Amerika Latin, didirikan tahun 1955 pada sidang umum pertama keuskupan Amerika Latin di Rio de Janeiro; kedudukan di Bogota/Kolombia. Berawal dari CELAM (diakui Paus pada saat pendiriannya) muncul sederet lembaga dan seksi-seksi organisasi ini di Amerika Latin yang mencakup berbagai macam kegiatan gereja. CELAM menyelenggarakan sidang umum keuskupan Amerika Latin kedua dan ketiga: tahun 1968 di Medellin/Kolombia (titik balik dalam sejarah gereja di Amerika Latin mengenai perannya di masyarakat) dan tahun 1979 di Puebla, Meksiko.

Kepustakaan: H.J. Prien, *Die Geschichte des Christentums in Lateinamerika*, Göttingen 1987.

abs

CENTO (*Central Treaty Organization*) Pakta pertahanan yang lahir tahun '50-an (Inggris, Iran, Pakistan, Turki; AS sebagai pengamat) merupakan penghubung strategis antara Nato dan SEATO. Dibubarkan tahun 1979.

ah

CEPAL (*Comisión Económica para América Latina y el Caribe*) Komisi Ekonomi PBB untuk Amerika Latin dan Karibia, didirikan Februari 1948 sebagai organ ECOSOC. Awalnya hanya untuk negara Amerika Latin, tetapi sejak pertengahan tahun '80-an negara-negara Karibia juga masuk. Berkedudukan di Santiago de Chile. Sebagai lembaga PBB CEPAL mempunyai wewenang untuk semua negara anggota di daerah tersebut. *Tugas*: analisis masalah-masalah pembangunan dan proses pembangunan di Amerika Latin (laporan tahunan); evaluasi proses pembangunan di Amerika Latin, diukur dengan tujuan dasawarsa pembangunan internasional (setiap dua tahun); pendidikan untuk staf perencana masing-masing pemerintahan, konsultasi antarpemerintah (→ ILPES); usaha mendorong integrasi Amerika Latin. Tahun '50-an dan '60-an CEPAL pernah menjadi pusat diskusi ilmu sosial dan ekonomi mengenai keterbelakangan, terutama semasa pimpinan Raul Prebisch. Pendirian ALALC dan MCCA berasal dari inisiatif CEPAL. Posisi pemikiran ekonomi CEPAL membentuk apa yang disebut Cepalismo.

Publikasi a.l.: *Notas sobre la economía y el desarrollo de América Latina* (bulanan),

CEPAL Review (setiap 4 bulan), dan *CEPAL-INDEX* (setiap 6 bulan).

Alamat: Casilla 179 D, Santiago de Chile, Chile.

dn

Cepalismo Posisi atau aliran teori ekonomi yang dikembangkan di dalam CEPAL dan merupakan kritik atas teori perdagangan luar negeri klasik dengan konsep dasar keuntungan ongkos komparatif. Konsep dan pemikiran dasar Cepalismo sebagai berikut. a. Model sentra-periferi; perdagangan antara negara industri dan negara berkembang tidak membawa manfaat yang sama untuk kedua kelompok tersebut. Model perdagangan ini hanya menguntungkan negara-negara sentra (industri) yang dinamis. Pokok penjelasan untuk itu adalah b. *terms of trade* yang semakin merugikan negara berkembang. c. Sejarah perekonomian Amerika Latin dibagi menjadi tiga periode: pembangunan yang berorientasi ke luar (*desarrollo hacia afuera*) = model ekonomi ekspor yang klasik; pembangunan yang berorientasi ke dalam (*desarrollo hacia adentro*) = terutama substitusi impor; dan stagnasi. d. Tahap stagnasi diatasi melalui berbagai paket perubahan struktural di dalam perekonomian Amerika Latin (reformasi pertanian, diversifikasi struktur produksi, industrialisasi, mendorong ekspor, peningkatan tingkat kesempatan kerja, dll.), terutama melalui perluasan pasar. e. Mendorong integrasi (→ ALALC, → MCCA, → Pakta Andes). Dalam diskusi politik, Cepalismo mendapat serangan dari kiri dan kanan, serta menerima kesan yang semakin buruk karena di satu pihak menganjurkan reformasi struktural, di

lain pihak macet dalam reformasi—
 begitulah nasib posisi yang meng-
 ambil posisi jalan tengah.

Kepustakaan: CEPAL, *El pensamiento de la CEPAL*, Santiago 1972; M. Wilhelmy, "CEPAL und die entwicklungspolitische Debatte in Lateinamerika", dlm.: J. Buisson/M. Mols (ed.), *Entwicklungsstrategien in Lateinamerika*, Paderborn 1982, hlm. 217-226.

dn
CEPGL (*Communauté Economique des Pays des Grands Lacs*) Masyarakat Ekonomi Negara-Negara yang Berada di Tepi Danau Besar, gabungan dari kerja sama regional antara Burundi, Rwanda, dan Zaire yang didirikan tahun 1976 (kedudukan: Gisenyi, Rwanda). Program integrasi ekonomi mereka berisi: a. perbaikan infrastruktur lalu lintas dan komunikasi di tiga negara pedalaman; b. pemanfaatan sumber daya perikanan (Danau Tanganyika) dan gas metan (Danau Kivu); c. lalu lintas bebas untuk personal, barang, dan modal; d. pembangunan regional pusat tenaga air Ruzizi; e. pendirian bank pembangunan (sejak tahun 1980: *Banque de Développement Economique des Etats des Grands Lacs*/BDEGL, kedudukan: Goma, Zaire. Rencana di bidang energi (sejak tahun 1979 *Organisation de la CEPGL pour l'Energie des Pays des Grands Lacs*/EGL, kedudukan: Bujumbura, Burundi), penelitian pertanian dan peternakan (sejak tahun 1979, kedudukan: Gitega, Burundi) dan sektor lalu lintas didukung oleh *EDF (→ Perjanjian Lome). Karena sengketa perbatasan dan daerah, sebagian kegiatan ini mengalami stagnasi. Tahun 1985 babak baru dengan tujuan yang lebih luas (pengamanan perbatasan). *Organ-organ*: konferensi

kepala negara, dewan menteri, sekretariat eksekutif. → CCEAC.

Kepustakaan: H. Voss, "Kooperation in Afrika", dlm.: *Afrika-Spectrum* 3, 1980, 3, hlm. 119 dst.

ah
CESCA → MCCA.

Ceylon → Sri Lanka.

CGFPI (*Consultative Group on Food Production and Investment in Developing Countries*) Komisi Konsultatif untuk Produksi Pangan dan Investasi di Negara Berkembang.

CGI (*Consultative Group on Indonesia*) Kelompok Konsultatif untuk Indonesia, terbentuk sebagai hasil penolakan Indonesia 25 Maret 1992 untuk mendapatkan bantuan lewat IGGI yang diketuai Belanda. Runtutan peristiwa penolakan Indonesia terhadap bantuan Belanda dengan alasan Belanda terlalu mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Sebagai ganti, CGI diketuai oleh Bank Dunia mengadakan sidang pertama 17 Juli 1992 di Paris. Sidang ini diikuti 18 negara anggota (sama dengan anggota IGGI terdahulu, tetapi tanpa Belanda). 12 anggota lembaga serta Indonesia setuju memberikan bantuan sebesar 4,94 miliar US\$ untuk tahun anggaran 1992/1993 kepada Indonesia, lebih tinggi 3,99% dari bantuan IGGI tahun 1991/1992. Bantuan terbanyak berasal dari Bank Dunia (1.600 juta US\$), pemerintah Jepang (1.320 juta US\$), dan *ADB (1.219 juta US\$). Donatur anggota IGGI yang tidak memberi bantuan lewat CGI selain Belanda adalah CEC (*Commission of the European Communities*), Spanyol, dan Kanada. Donatur baru adalah Nordic Investment Bank, *IDB, Finlandia, Denmark, dan Korea Selatan.

Kepustakaan: Posthumus, *IGGI*, Amsterdam 1971. A. Margana, "Pronk dan IGGI", dlm.: *Tempo*, no. 5 th. XXII, 4 April 1992. Syatrya Utama, "Keberhasilan Sejumlah Lobi", dlm. *Ediur*, no. 45, Th. V, 1 Agustus 1992, hlm. 78-79; "CGI Berikan Bantuan 4,94 miliar dolar AS", dlm.: *Kompas* 18 Juli 1992. **dis**

CGIAR (*Consultative Group on International Agricultural Research*) Komisi Konsultatif untuk Penelitian Pertanian, didirikan tahun 1971 oleh Bank Dunia, FAO, dan UNDP dengan tujuan menyediakan dana penelitian untuk proyek-proyek pertanian di negara berkembang. → Revolusi Hijau. **dn**

Christ for the Socialism Gerakan yang didirikan tahun 1971 di Santiago de Chile, berasal dari sekelompok pendeta yang memihak orang miskin dan menuntut sosialisme Amerika Latin (→ teologi pembebasan). Dokumen yang dipublikasikan kelompok ini, "Kami melibatkan diri dalam sosialisme" (1971), telah menimbulkan perdebatan sengit dalam gereja dan teologi. April 1972 di Santiago berlangsung kongres I gerakan ini di Amerika Latin dengan peserta lebih dari 400 wakil dari 28 negara. Dokumen penutup kongres menjadi pedoman (diterimanya perjuangan kelas dalam skala global dan menentukan sendiri keputusan politik; konvergensi antara keradikalan, kepercayaan, dan keterlibatan politik; mengartikan kepercayaan sebagai kekuatan yang kritis dan dinamis dalam proses revolusioner) dan sebagai dasar untuk meluaskan gerakan ini ke seluruh dunia.

Publikasi: *"Korrespondenz der Christen für den Sozialismus"* (setiap empat bulan).

Kepustakaan: G. Girardi, *Christen für den Sozialismus-Warum?*, Stuttgart, 1978. **pb**

CIAP (*Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso*) Komite Inter-Amerika dari Aliansi untuk Kemajuan (→ *Alliance for Progress*), organisasi negara-negara Amerika, berdiri tahun 1963. *Tugas*: koordinasi dan pengurusan sarana dan koordinasi kegiatan program pembangunan dari Aliansi untuk Kemajuan. Tahun 1974 dibubarkan. Fungsinya diambil alih oleh CEPICIES, Komite Eksekutif Tetap Dewan Ekonomi Organisasi Negara-Negara Amerika, dengan membantu secara tetap negara-negara Amerika dalam masalah perdagangan, pembiayaan, dan pembangunan. Kedudukan: Washington. **dn**

CID (*Center for Industrial Development*) → Perjanjian Lome, UNIDO.

CIDSE Kelompok Kerja Internasional untuk Perkembangan Sosial dan Ekonomi dari bantuan pembangunan Katolik negara industri Barat, kedudukan di Brussel. *Tujuan*: perjanjian mengenai strategi proyek, koordinasi, dan dokumentasi. **dn**

CIEC (*Conference on International Economic Cooperation*) Konferensi mengenai Kerja Sama Ekonomi Internasional. Kota konferensi Paris, Desember 1975 sampai Juni 1977, peserta 8 negara industri, 19 negara berkembang (di antaranya 7 negara OPEC, tidak ada LLDC). Di luar PBB, berusaha mengolah jalan keluar yang sesuai dalam 4 bidang (energi, bahan mentah, politik bantuan pembangunan, masalah keuangan). Selain beberapa kesepakatan (menyetujui sebuah Dana Bersama sebagai instrumen kunci sebuah program bahan mentah yang terintegrasi; akses negara berkembang yang lebih mudah

Kepustakaan: Posthumus, *IGGI*, Amsterdam 1971. A. Margana, "Pronk dan IGGI", dlm.: *Tempo*, no. 5 th. XXII, 4 April 1992. Syatrya Utama, "Keberhasilan Sejumlah Lobi", dlm. *Editor*, no. 45, Th. V, 1 Agustus 1992, hlm. 78-79; "CGI Berikan Bantuan 4,94 miliar dolar AS", dlm.: *Kompas* 18 Juli 1992.

dis
CGIAR (*Consultative Group on International Agricultural Research*) Komisi Konsultatif untuk Penelitian Pertanian, didirikan tahun 1971 oleh Bank Dunia, FAO, dan UNDP dengan tujuan menyediakan dana penelitian untuk proyek-proyek pertanian di negara berkembang. → Revolusi Hijau.

dn
Christ for the Socialism Gerakan yang didirikan tahun 1971 di Santiago de Chile, berasal dari sekelompok pendeta yang memihak orang miskin dan menuntut sosialisme Amerika Latin (→ teologi pembebasan). Dokumen yang dipublikasikan kelompok ini, "Kami melibatkan diri dalam sosialisme" (1971), telah menimbulkan perdebatan sengit dalam gereja dan teologi. April 1972 di Santiago berlangsung kongres I gerakan ini di Amerika Latin dengan peserta lebih dari 400 wakil dari 28 negara. Dokumen penutup kongres menjadi pedoman (diterimanya perjuangan kelas dalam skala global dan menentukan sendiri keputusan politik; konvergensi antara keradikalan, kepercayaan, dan keterlibatan politik; mengartikan kepercayaan sebagai kekuatan yang kritis dan dinamis dalam proses revolusioner) dan sebagai dasar untuk meluaskan gerakan ini ke seluruh dunia.

Publikasi: "Korrespondenz der Christen für den Sozialismus" (setiap empat bulan).

Kepustakaan: G. Girardi, *Christen für den Sozialismus-Warum?*, Stuttgart, 1978.

pb

CIAP (*Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso*) Komite Inter-Amerika dari Aliansi untuk Kemajuan (→ *Alliance for Progress*), organisasi negara-negara Amerika, berdiri tahun 1963. Tugas: koordinasi dan pengurusan sarana dan koordinasi kegiatan program pembangunan dari Aliansi untuk Kemajuan. Tahun 1974 dibubarkan. Fungsinya diambil alih oleh CEPICIES, Komite Eksekutif Tetap Dewan Ekonomi Organisasi Negara-Negara Amerika, dengan membantu secara tetap negara-negara Amerika dalam masalah perdagangan, pembiayaan, dan pembangunan. Kedudukan: Washington. **dn**
CID (*Center for Industrial Development*) → Perjanjian Lome, UNIDO.

CIDSE Kelompok Kerja Internasional untuk Perkembangan Sosial dan Ekonomi dari bantuan pembangunan Katolik negara industri Barat, kedudukan di Brussel. Tujuan: perjanjian mengenai strategi proyek, koordinasi, dan dokumentasi. **dn**
CIEC (*Conference on International Economic Cooperation*) Konferensi mengenai Kerja Sama Ekonomi Internasional. Kota konferensi Paris, Desember 1975 sampai Juni 1977, peserta 8 negara industri, 19 negara berkembang (di antaranya 7 negara OPEC, tidak ada LLDC). Di luar PBB, berusaha mengolah jalan keluar yang sesuai dalam 4 bidang (energi, bahan mentah, politik bantuan pembangunan, masalah keuangan). Selain beberapa kesepakatan (menyetujui sebuah Dana Bersama sebagai instrumen kunci sebuah program bahan mentah yang terintegrasi; akses negara berkembang yang lebih mudah

ke pasar modal swasta, mendukung CDC melalui organisasi-organisasi internasional, meningkatkan bantuan untuk industrialisasi negara berkembang, dsb.), tidak ada kesepakatan mengenai stabilisasi hasil ekspor, sumbangan negara berkembang untuk pengadaan energi, akses bebas ke pasar-pasar negara industri. Kedua pihak saling tidak memberikan sambutan dalam tuntutan-tuntutan tersebut.

dn
CIES (*Consejo Interamericano Económico-Social*). Dewan Sosial dan Ekonomi Interamerika, merupakan badan koordinasi untuk kegiatan ekonomi dan sosial, didirikan tahun 1939. Sejak tahun 1948 menjadi organ negara-negara Amerika. **dn**
c.i.f. (*cost, insurance, freight*) Penilaian dalam perdagangan internasional untuk impor suatu negara, biasanya meliputi seluruh ongkos dari produksi negara asal sampai dengan pengiriman ke negara tujuan (batas negara), selain ongkos produksi sesungguhnya, ditambah ongkos angkutan dan asuransi. Ekspor dinilai menurut f.o.b.

hpn
Cile Minat politik dan teori pembangunan terhadap negeri Cile timbul terutama karena pemerintahan Allende yang mempropagandakan sosialisme *a la* Cile, yang mengalami kegagalan karena berbagai sebab. Setelah kudeta September 1973 rezim militer di bawah Jenderal Pinochet (→ rezim otoriter) telah mencoba menstabilkan negara ini dengan bantuan politik perekonomian neoliberal (→ moneterisme) tanpa mepedulikan ongkos sosial dan kemanusiaan. Setelah mencapai keberhasilan per-

tumbuhan ekonomi dan memerangi inflasi, yang berlanjut kembali pada awal tahun '80-an, terbuka jalan menuju re-demokratisasi setelah votum masyarakat Oktober 1988 menentang Pinochet.

1. Republik Cile (luas: 756.945 km²) memiliki keadaan "geografis aneh". Wilayahnya memanjang 4.000 km, dengan lebar rata-rata 200 km. Sesuai dengan keadaan yang mencolok ini terlihat keadaan geografis dan iklim yang kontras: daerah utara bergurun dan kering, daerah tengah yang sejuk dan berguna untuk pertanian, serta daerah selatan yang sering hujan dan penuh hutan. Sumber daya negeri ini terletak di pertanian, sampai tahun '30-an telah memberikan sumbangan besar bagi ekspor Cile, tetapi sejak tahun '50-an tidak dapat menjamin pemasokan bahan pangan untuk penduduk Cile. Selain itu pertambangan, sampai Perang Dunia I penambangan sendawa (kalium nitrat) dan tembaga. Bahan mentah mineral lainnya tidak terlalu berarti, produksi minyak bumi hanya mencukupi sepertiga kebutuhan dalam negeri.

Tahun 1975 berpenduduk 10,3 juta jiwa, tahun 1989 diperkirakan menjadi 13 juta jiwa. Pertumbuhan tahunan selama periode 1980-1989 sebesar 1,7%. Penduduk secara etnis homogen dan 50%-60% terdiri atas orang Mestis; 30%-45% kulit putih (terutama keturunan Spanyol); dan 2%-3% keturunan Indian (Araukana). Sekitar 100.000 jiwa keturunan Jerman. Tingkat urbanisasi 83% (1985) sangat tinggi, hampir 2/3 penduduk terpusat di sekitar 10% luas

daratan. Di ibu kota Santiago de Chile (1985: 4,3 juta jiwa) dan kota pelabuhan Valparaiso hidup lebih dari 40% penduduk. Tingkat harapan hidup rata-rata 70 tahun (1980). Bahasa nasional adalah bahasa Spanyol. Penduduk 89% beragama Roma Katolik, 6% Protestan, dan sekitar 25.000 Yahudi.

2. Tidak seperti di sebagian besar negara Amerika Latin, Cile beberapa dasawarsa setelah kemerdekaan politik (1818) telah berhasil mencapai kestabilan sistem politik. Sejak itu Cile diperintah menurut undang-undang, kecuali beberapa tahun semasa basis sosial dari sistem politik diperluas, tetapi lapisan menengah hanya dengan bantuan militer dapat menjamin keikutsertaannya pada pelaksanaan kekuasaan politik. Cile mempunyai dua UUD (1833, 1925), telah mengembangkan lembaga sosial dan politik yang progresif, demokrasi yang berfungsi dan sistem multipartai yang stabil.

Sebaliknya, keadaan ekonomi negeri ini tetap terbelakang. Cile terutama pada awal abad ke-19 terintegrasi ke perekonomian dunia melalui ekspor komoditas pertanian dan mineral, dengan pertambangan sendawa dikuasai oleh modal Inggris. Pertambangan tembaga, yang diperlukan tepat pada waktunya agar mengantikan posisi ekspor mineral yang menurun akibat produksi sendawa sintetis, sejak semula jatuh ke tangan AS. Semakin besar kemunduran produksi pertanian saat pertumbuhan penduduk meningkat pesat, menyebabkan makin besar ketergantungan Cile terhadap ekspor yang tidak

dikontrol dan hanya beberapa persen keuntungan dalam bentuk pajak produksi dan beberapa persen saham ekspor tembaga. Penghasilan dari sendawa dan tembaga ini hanya mencukupi—selama *terms of trade* menguntungkan—sebagian kecil lapisan masyarakat yang mengawasi distribusi pendapatan dan menjalankan gaya hidup mewah. Krisis ekonomi dunia di tahun '30-an menyebabkan pembangunan yang berorientasi ekspor (orientasi keluar) menjadi masalah. Lapisan menengah yang tetap berhubungan erat dengan oligarki pertanian dan borjuasi perdagangan yang dominan, mencoba memimpin pembangunan yang berorientasi ke dalam, yaitu industrialisasi melalui substitusi impor dan melakukan investasi di bidang infrastruktur, membangun pusat-pusat industri dan jasa, serta menggantikan kegiatan lapisan pengusaha pribumi yang semakin menurun.

3. Politik campur tangan negara ini tidak menimbulkan rangsangan yang diharapkan, malahan justru lebih banyak membuat negara berfungsi sebagai penolong modal swasta, tanpa mampu mengubah hubungan kepemilikan dan distribusi pendapatan yang sedang berlaku. Selain tidak ada pengawasan terhadap sektor tembaga, yang darinya penerimaan negara dan rencana pembangunan sangat bergantung, juga tidak dilaksanakan reformasi pertanian. Dampak pertumbuhan sektor industri mengecil ketika substitusi impor mengalami stagnasi. Kemiskinan dan marginalitas makin meluas, terlihat jelas kesengsaraan sosial penduduk

pedesaan dan berkembangnya daerah kumuh. Hak-hak politik, yang dimiliki kembali oleh pemerintah sejak tahun '50-an, tidak dapat menjawab masalah kemiskinan tersebut. Akibatnya, restrukturisasi mendasar terhadap sistem kepartaian Cile, dengan menguntungkan partai-partai yang melaksanakan reformasi sosial, yaitu komunis dan sosialis seperti tahun '20-an dan '30-an di satu pihak dan Kristen demokrat di lain pihak yang mencalonkan Eduardo Frei dalam pemilihan presiden, dapat menarik sebagian besar pemilih, terutama lapisan menengah baru sehingga dapat menjadi partai terkuat di Cile. Tahun 1964 para pemilih mendapatkan alternatif, memilih Frei atau Allende. 56% memilih wakil demokrat Kristen dan menginginkan politik reformasi secara bertahap: nasionalisasi sebagian pertambangan tembaga, reformasi pertanian, reformasi undang-undang, dan pembangunan pedesaan. Reformasi struktur harus sejalan dengan program investasi (industri petrokimia, industri kendaraan bermotor, perluasan produksi tembaga) dan peningkatan produksi terutama sektor pertanian. Dalam perdebatan dengan kelompok kanan yang kembali menguat dengan langkah-langkah lebih radikal yang dituntut partai-partai berhaluan marxis serta tuntutan oposisi di dalam kubu sendiri yang menuntut jalan pembangunan yang bukan bersifat kapitalistis, pemerintahan Frei telah mencapai hasil lebih daripada yang dituntut para pengkritik. Namun, tentu saja hal ini terlalu sedikit untuk memungkinkan penggantian dari kubu demokrat Kristen

untuk melanjutkan rencana reformasi. Tahun 1970 Salvador Allende memenangkan pemilu, didukung oleh partai-partai marxis dan non-marxis, bahkan dalam pemilihan untuk kongres mendapatkan dukungan suara dari demokrat Kristen.

4. Allende mewakili sosialisme *a la Cile* yang menyatukan kelompok radikal partainya, di tahun '70-an dipengaruhi castrisme dan menginginkan perubahan ekonomi, negara, dan masyarakat secara revolusioner, dengan kelompok gerakan kiri revolusioner MIR (*Movimiento de la Izquierda Revolucionaria*) yang disahkan Allende. Front rakyat secara politis dan ideologis heterogen tidak memiliki mayoritas suara di parlemen. Pertikaian politik dalam negeri makin meruncing beberapa bulan setelah Allende memegang jabatan presiden. Perusahaan AS (ITT, CIA, dan kelompok kanan mencoba menggagalkan rencana Allende yang mengizinkan kelompok revolusioner menyita tanah secara langsung dan nasionalisasi perusahaan-perusahaan. Politik perekonomian yang ditempuh bertujuan meningkatkan konsumsi dengan cara pemerataan pendapatan dan memungkinkan menggunakan sepenuhnya kapasitas yang ada. Namun, ketidakpastian hukum tidak merangsang investasi yang diharapkan sehingga tidak dapat mencegah ketimpangan antara kemampuan konsumsi dan produksi. Beberapa bulan kemudian kemajuan ekonomi berganti menjadi situasi kelangkaan barang-barang dan inflasi. Konfrontasi makin meruncing dengan modal asing akibat nasionalisasi pertambangan tembaga tanpa

ganti rugi mendapatkan dukungan dari semua partai di kongres. Tindakan ini telah memperkecil arus pinjaman luar negeri yang besar serta persyaratannya tidak lagi sesuai dengan kebutuhan Cile yang semakin meningkat. Kejatuhan harga tembaga di pasar dunia serta masalah suku cadang dan manajemen di pertambangan tembaga, menggagalkan usaha untuk membuat tembaga memainkan peranan yang menghasilkan devisa dan sumber pembiayaan untuk usaha reformasi yang sedang dijalankan. Reformasi pertanian yang menciptakan hubungan kepemilikan baru, berjalan dengan cepat, tetapi telah mengakibatkan kemunduran produksi pertanian. Di sektor perekonomian negara yang hanya mencakup apa yang dinamakan perusahaan-perusahaan strategis, dimasukkan juga perusahaan yang bangkrut tanpa perencanaan matang sehingga banyaknya perusahaan dengan keuntungan kecil sangat membebani anggaran belanja negara. Banyaknya masalah telah mengurangi basis politik Allende dan membuka kesempatan bagi oposisi dari dalam maupun luar negeri melakukan aksi-aksi yang sebagian ilegal dan sebagian lagi legal (pemogokan, kekalahan suara pemerintah di parlemen) sehingga sangat mempengaruhi nasib pemerintahan Allende. Situasi ini, dengan hilangnya suara dari lapisan menengah, telah merenggut harapan Allende untuk dapat memenangkan pemilu melawan oposisi Kristen demokrat dan kelompok kanan, telah memperkuat strategi perebutan kekuasaan secara revolusioner di dalam maupun di luar per-

sekutuan kelompok kiri. Kelompok militer yang telah lama bersikap loyal terhadap Allende, pada awal kudeta menunjukkan seolah-olah menentang perubahan politik Cile, sehingga mendapat dukungan lapisan masyarakat luas. Namun, segera sesudah itu terlihat bahwa militer menghancurkan sama sekali demokrasi di Cile dan ingin membangun kembali kekuasaan modal besar yang bekerja sama dengan modal asing.

5. Di dalam literatur disebutkan 4 penyebab kegagalan Allende: a. berfungsi serta keterbatasan "Jalan Cile Menuju Sosialisme" dalam teori dan kesulitan praktek yang sukar diatasi, mencoba menyesuaikan strategi reformasi yang diikuti instrumen negara borjuasi dengan strategi revolusioner aksi langsung dan pembangunan kekuatan rakyat; b. politik persekutuan yang keliru antara partai politik dalam front rakyat (tanpa atau dengan menentang Kristen demokrat), berakibat ketidakmampuan pemerintah Allende untuk menarik lapisan menengah; c. langkah-langkah perubahan struktural perekonomian Cile yang tidak terkoordinasi (nasionalisasi pertambangan tembaga, nasionalisasi bank-bank dan industri, reformasi pertanian, dsb.) dan politik perekonomian yang bergerak ke arah krisis (bukannya meningkatkan investasi tetapi konsumsi, neraca pembayaran yang negatif, anggaran belanja negara defisit, tingkat inflasi yang tinggi, macetnya penyediaan kebutuhan pokok); d. intervensi kekuatan dari dalam dan luar negeri terhadap proses politik Cile (politik mengganggu parlemen yang dilaku-

kan partai oposisi, pemogokan perusahaan dalam negeri, politik destabilisasi yang dilakukan CIA, pembekuan kredit internasional, rendahnya harga tembaga di pasar dunia, dll.), banyak memunculkan istilah, seperti persekongkolan, blokade, dan imperialisme dolar.

6. Dengan berkuasanya rezim militer yang berpijak pada Doktrin Pertahanan Nasional, kelompok militer secara radikal telah menghancurkan tradisi demokrasi di Chile. Pemikiran politik yang lain dilarang dan ditumpas (juga yang berada di luar negeri), partai politik dilarang, serta kegiatan serikat buruh dan kebebasan pers ditekan. Memang rezim militer ini telah menghentikan metode kekuasaannya yang sangat brutal, tetapi penindasan terus berlangsung dengan cara lebih halus, misalnya pembersihan di universitas atau deportasi orang-orang yang tidak disukai rezim. Dalam hubungannya yang erat dengan sistem kekuasaan ini, sejak tahun 1973 dilaksanakan model perekonomian aliran Chicago. Restrukturisasi perekonomian secara menyeluruh: reswastanisasi, penurunan bea masuk, dan pembukaan ekonomi dalam negeri terhadap pasar dunia, serta untuk modal asing (karena itu keluar dari Pakta Andes), pengurangan sektor negara, dan politik stabilisasi. Langkah-langkah ini menyebabkan terjadinya konsentrasi pendapatan, kehancuran perusahaan menengah dan kecil akibat tekanan persaingan pasar dunia, peningkatan angka pengangguran (terutama dengan pemecatan di bidang administrasi sektor lapisan menengah) dan terlalu besarnya pe-

nurunan upah (\rightarrow distribusi pendapatan).

Keberhasilan pertumbuhan ekonomi harus ditunggu lama dan harus diinterpretasikan dengan menutupi korban kemanusiaan dan sosial akibat model perekonomian ini. Antara tahun 1979-1980 tingkat pertumbuhan pendapatan nasional setiap tahun rata-rata sebesar 7,3%-8,6%, inflasi dapat ditekan dari 340% (1975) menjadi di bawah 40% (1979). Investasi asing dari Agustus 1974 sampai Juni 1979 seluruhnya berjumlah 4,122 miliar US\$; dari jumlah tersebut 3/4 lebih berasal dari AS. Produksi tembaga dari 500.000 ton di zaman Allende dapat ditingkatkan menjadi 800.000 ton rata-rata setahun. Data-data ini membuat pengikut moneterisme me-muji; di saat model ekonomi ini dilanda krisis mendalam ketika terjadi depresi ekonomi dunia awal tahun '80-an: (1982) terjadi pertumbuhan negatif PDB sebesar -13,1% (pertumbuhan PDB tahun 1973-1982: +1,8%), menurunnya hasil industri sebesar 20%, produksi pertanian menurun sebesar 5,9%; utang luar negeri tahun 1988: 14,8 miliar US\$, bunga dan cicilan utang (*Debt Service Ratio*) sebesar 81% dari nilai ekspor; serta pengangguran di Santiago 30%.

Setelah haluan diubah (memberlakukan kembali intervensi negara dalam perekonomian), perekonomian pulih kembali mulai tahun 1985. Hampir di semua bidang telah diraih kembali keadaan seperti tahun 1980 ketika terjadi *boom* ekonomi (pendapatan per kapita, pendapatan riil, *terms of trade*). Tahun 1986-1988 PDB tumbuh sekitar 5%/tahun, pen-

dapatan per kapita lebih dari 3,6%. Pengangguran di perkotaan menurun, tahun 1988: 11,2%, inflasi 10,9%. Sejak tahun 1986 utang luar negeri menurun (1988: 19,1 miliar US\$), DSR tahun 1982: 49,5%, 1988: 22,6%. Data-data ini terlihat positif dibandingkan negara Amerika Latin lainnya. Banyak yang mengatakan bahwa perekonomian Cile di bawah rezim militer mengalami dorongan modernisasi. Memang perdagangan luar negeri Cile yang mudah goncang tidak berhasil distabilkan melalui diversifikasi ekspor (produk pertanian), tetapi nampaknya persyaratan ekonomi menguntungkan untuk dapat melakukan perubahan sosial yang diperlukan dalam rangka demokratisasi.

7. Pinochet (1977) mengumumkan rencana redemokratisasi bertahap (*Rencana de Chacarillas*), yang bermuara pada pendirian "demokrasi yang otoriter dan dilindungi". Setelah dilangsungkannya referendum yang masih dipertanyakan keabsahannya tahun 1980, mulai berlaku UU baru Maret 1981, yang memberlakukan jabatan presiden sampai tahun 1989 atau 1997 dan memberikan kekuasaan tak terbatas kepada presiden serta militer. Badan-badan pemerintahan di samping presiden adalah dewan nasional (tidak disebutkan dalam UU), dewan keamanan nasional, dan junta militer (panglima ketiga angkatan bersenjata dan kepolisian). Setelah berakhirnya masa peralihan, presiden tetap memiliki posisi kuat: ia merupakan kepala negara, kepala pemerintahan, kepala administrasi, serta bertanggung jawab terhadap keamanan dalam negeri dan luar negeri. Hak-

hak parlemen (kongres nasional) dibatasi demi keuntungan presiden: presiden dapat melakukan veto terhadap setiap rancangan undang-undang dan dalam banyak hal mempunyai hak atas inisiatif sendiri membuat UU dan wewenang mengeluarkan peraturan. Badan yudikatif dapat menggantikan hakim atas permintaan presiden. Administrasi pemerintahan bersifat sentralistik dan aparat pemerintahan sangat bergantung kepada presiden.

UU baru merupakan pengokohan militer secara konstitusional. Militer ditetapkan sebagai penjaga ketertiban sesuai UU, artinya setiap saat ia dapat melakukan tindakan intervensi dengan alasan melakukan perlindungan terhadap "ketertiban kelembagaan" dalam proses politik. Sesuai dengan peranan militer yang dominan, dewan keamanan nasional memiliki wewenang kekuasaan yang sangat besar dan hak pengawasan yang luas terhadap masyarakat.

8. Ketika terjadi krisis ekonomi yang hebat awal tahun '80-an, protes penduduk semakin meningkat akibat kesengsaraan. Sejak itu, partai-partai politik kembali bergerak dan mencoba membangun persekutuan di antara mereka untuk melawan Pinochet. Untuk itu harus diatasi dua masalah besar, yaitu keberatan dan ketidakpercayaan satu sama lain akibat permusuhan antara demokrat Kristen dan kelompok sosialis di bawah pemerintahan front rakyat. Selain itu, terdapat perbedaan strategis dalam menentang rezim militer, terutama antara demokrat Kristen dan sosialis yang moderat di satu pihak dan ko-

munis di lain pihak, yang melancarkan perjuangan dengan kekerasan sejak awal tahun '80-an (gerakan revolusi Manuel Rodriguez). Mula-mula oposisi demokratis ini mengalami kegagalan tahun 1983/1984, tetapi kemudian dapat menggunakan tahap kelemahan rezim, tercermin dengan langkah-langkah liberalisasinya untuk meningkatkan aksi mereka. Ketika perekonomian mulai membaik, rezim militer kembali melakukan pengekan. Walaupun ada gerakan persekutuan politik yang taktis, pada dasarnya mereka tidak bersatu. Percobaan pembunuhan yang gagal terhadap Pinochet (1986) memang menimbulkan kekhawatiran bahwa kekuatan moderat akan kehilangan pengaruhnya dalam pertikaian mereka dengan ekstrem kiri dan kanan. Ketika diadakan plebisit 5 Oktober 1988 keadaan berubah secara mendasar. Bulan Maret, oposisi yang moderat setuju ikut serta dalam plebisit mengenai Pinochet sebagai satu-satunya calon presiden (resminya disebut tanggal 30 Agustus) untuk perpanjangan jabatan presiden selama delapan tahun berikutnya. Suasana otoriter ini mereka manfaatkan untuk memenangkan suara "tidak" dan menolak perpanjangan jabatan Pinochet. Artinya, pertama mendaftarkan partai-partai di dalam daftar partai, dicantumkan hak pilih dalam daftar pemilih yang baru disusun, selain itu kegiatan politik dalam keadaan di mana penduduk baru berhasil mengatasi intimidasi secara perlahan-lahan. Dalam perjalanan kampanye terlihat bahwa partai-partai politik lebih unggul daripada kekuatan "apolitis" pen-

dukung rezim. Demikianlah kelompok "No" (yang menentang Pinochet) menang dengan 54,7% suara. Karena wakil-wakil angkatan bersenjata dalam junta sebelumnya telah dengan jelas akan menerima hasil plebisit ini, yang diulangi lagi pada saat sebelum pemilu dan menyetujui hak-hak partai politik, hilang kemungkinan kudeta yang akan dilakukan Pinochet terhadap UU sendiri. Pemilihan presiden 14 Desember 1989 dilanjutkan dengan pengangkatan presiden baru tanggal 11 Maret 1990. Setelah kemenangan oposisi, dialog berbagai macam partai dalam masalah strategis menjadi mudah. Pihak komunis juga mengakui jalan damai. Pertikaian taktis mengenai pembagian kekuasaan dan posisi awal pada pemilu pertama setelah 16 tahun merupakan gambaran suasana tahun 1989. Dalam pemilihan internal untuk menentukan calon presiden, Demokrat Kristen berusaha keras untuk bersatu. Akhirnya, ketua partai demokrat Kristen sejak tahun 1987, Patricio Aylwin, berhasil menjadi calon presiden dari partainya. Se jauh menyangkut UU yang otoriter, Juni 1989 telah diadakan persetujuan antara rezim Pinochet dan oposisi demokratis yang telah berhasil menggolkan usul reformasinya. Periode pemilihan presiden disingkat menjadi empat tahun. Patricio Aylwin terpilih sebagai presiden sipil pertama di Chile selama 20 tahun terakhir. Ia memenangkan 55% suara menggantikan Pinochet.

Kepustakaan: D. Nohlen, *Chile - Das sozialistische Experiment*, Hamburg 1973; W. Weis-
chet, *Chile. Seine l nderkundliche Struktur und Individualit t*, Darmstadt 1970; D. Nohlen,
Feuer unter der Asche. Chiles gescheiterte Re-

volution, Baden-Baden 1974; D. Nohlen, "Chile", dlm.: HDW II, 2, Hamburg 1982, hlm. 177. dst.; H.W. Krumwiede/D. Nolte, *Chile. Auf dem Weg zur Demokratie*, Baden-Baden 1988.

dn

CILLSS (*Comité Permanent Intér-états de Lutte Contre la Sécheresse dans le Sahel*) Organisasi Negara-Negara Sahel, seperti Mauritania, Senegal, Mali, Burkina Faso, Niger, dan Chad, didirikan setelah terjadi bencana musim kering (1968-1973). *Tujuan*: memerangi akibat yang timbul dari bencana kekeringan dan koordinasi mengatasi perluasan padang pasir. Gambia masuk menjadi anggota akhir tahun 1973 dan Kepulauan Kapverde tahun 1976. Kedudukan: Ougadougou (Burkina Faso). → Zona Sahel.

bg

Cina, Republik Rakyat Laporan pembangunan Bank Dunia menyebutkan pendapatan per kapita Cina tahun 1989 sebesar 350 US\$. Cina masuk daftar urutan bawah dari Bank Dunia dan posisinya terletak di antara India dan Haiti di urutan ke-21 (dari 129 negara), dengan demikian termasuk dalam kelompok Dunia Keempat. Namun, Cina sekaligus merupakan salah satu dari lima anggota Dewan Keamanan PBB dengan hak veto, termasuk lima negara adidaya. Negara ini menganggap dirinya sebagai negara berkembang, juga termasuk dalam kubu sosialis, tetapi tidak menghalanginya untuk menjalankan politik luar negeri yang mengkritik keras Uni Soviet. Negara-negara kapitalis a.l. Jepang, AS, dan Jerman menjadi mitra dagang terpenting Cina. Dalam hubungan ini Cina tidak perlu tampil sebagai negara penge-
mis. Hasilnya: sulit untuk mengukur

Cina dengan ukuran negara berkembang lainnya. Luas negara, jumlah penduduk, kekayaan alam, pasar, dan arti politiknya, telah menjadikan negara ini mitra yang didambakan dan diakui dalam pergaulan politik internasional walaupun pendapatan per kapita rendah.

1. Saat ini wilayah Cina meliputi luas 9,56 juta km² dan mencakup mulai perbatasan Siberia dengan musim dingin yang singkat, sampai daerah tropis Indocina dengan musim pertumbuhan sepanjang tahun. Daerah yang luas di sebelah barat daya, barat, dan utara ditandai oleh daerah pegunungan di atas 3.000 m dan padang pasir. Hanya sekitar 10% wilayahnya (99,25 juta ha) dapat dimanfaatkan untuk pertanian; sebelah selatan Sungai Yangtse dan daerah paling selatan dapat memanen sebanyak tiga kali dalam setahun. Kemungkinan untuk membuka daerah pertanian baru sangat terbatas, di tahun-tahun terakhir belum dapat menutup kembali lahan pertanian yang berkurang akibat pemukiman dan industrialisasi. Daerah-daerah pertanian utama terletak di dataran antara Beijing dan Shanghai, lembah di antara Sungai Yang-tse dan Huang Ho, pailung Sezuang di barat daya serta delta Sikang di Kanton yang sangat subur dan merupakan daerah pemukiman utama penduduk Cina yang berjumlah 1,114 miliar jiwa (1989), sekitar 36,6% hidup di kota-kota. Jadi, hanya tersedia 0,095 ha tanah pertanian per kepala. Kecepatan pertumbuhan penduduk, sampai tahun 1984 dapat ditekan menjadi 1,1%, tetapi sejak itu meningkat kembali, dan upaya pe-

ningkatan hasil lahan pertanian, merupakan masalah pembangunan yang dihadapi Cina. 1,2% dari 1 miliar jiwa, bagaimana pun juga berarti setiap tahun terdapat 12 juta jiwa tambahan harus diberi makan dan 12 juta lapangan pekerjaan baru yang harus disediakan. Kecilnya lahan pertanian juga berarti pengutamaan mutlak produksi pangan. Penanaman padi-padi-padi di daerah selatan, gandum, jawawut, dan sorgum di utara—seperti sebelumnya merupakan hasil utama pertanian Cina, walaupun pada tahun-tahun terakhir terlihat adanya usaha diversifikasi pertanian. Peternakan terbatas di daerah pedalaman Cina dengan cara peternakan kandang (babi dan unggas). Usaha peternakan di daerah padang rumput dan daerah pengembara di utara dan selatan, mempunyai arti penting, dengan sekitar 300 juta ha padang rumput alami merupakan potensi untuk dikembangkan.

Masalah lain adalah distribusi sumber daya air secara musiman dan regional. Di selatan tersedia 75% air dan hanya 38% lahan pertanian, di utara terdapat 52% lahan pertanian dengan hanya 7% sumber daya air. Selain itu, dataran sangat subur yang terletak di sebelah hilir Sungai Huang Ho dan sungai lainnya yang berasal dari daerah lumpur (endapan lumpur sisa zaman es), selalu terancam banjir karena endapan lumpur ini mengendap di hilir sungai dan meninggikan dasar palung sungai sehingga tanggul harus selalu ditinggikan.

Kekayaan alam dan sumber energi—tahun 1985 jumlah penambangan batu bara 872 juta ton dan penam-

banagan minyak 125 juta ton—cukup lengkap dan secara kuantitatif mencukupi untuk basis industrialisasi.

Infrastruktur kurang memadai. Selain pelayaran pantai hanya Sungai Yangtse bagian hilir mempunyai arti, sejak paro pertama abad 20 sepanjang 600 km ke pedalaman dapat dilayari kapal laut. Walaupun ada jaringan kereta api sepanjang 52.100 km—jalan raya jarak jauh sangat sedikit—tidak membuat transportasi berjalan lancar.

2. Cina tradisional merupakan masyarakat agraris dengan sekitar 80% petani dan birokrasi kekaisaran serta pemilik tanah lokal (*gentry*). Kepentingan birokrasi dan *gentry* saling mengisi karena keduanya mendapatkan penghasilan dalam bentuk pajak pertanian dan uang sewa dari pertanian. Di tingkat lokal *gentry* menjalankan tugas administrasi birokrasi, dan sebaliknya pejabat negara atau pasukan kaisar menjadi pelindung terhadap bahaya pemberontakan dan penagih uang sewa dari petani yang menolaknya. Jika di satu pihak kekuasaan *gentry* berdasarkan pemilikan tanah yang tidak diolahnya sendiri, tetapi disewakan (tahun 1930 lebih dari 30% luas lahan), di lain pihak kekuasaan birokrasi diabsahkan secara fungsional. Birokrasi menjalankan tugas-tugas desa seperti membangun tanggul dan saluran-saluran air, lumbung beras, pembagian bibit dalam keadaan darurat, dan perlindungan militer.

Monopoli negara atas garam, besi, perdagangan luar negeri, dan pengangkutan padi-padian, menghambat pembentukan lapisan pedagang jarak

jauh dan borjuasi industri, sebenarnya dapat muncul dengan kekuatan ekonomi sendiri dalam persaingannya dengan sistem kekua-saan yang telah mapan. Di lain pihak uang sewa, beban bunga, dan pajak yang berat telah menekan penghasilan petani sehingga selain usaha pertanian mereka juga harus melakukan kegiatan industri rumah tangga, baik untuk keperluan sendiri maupun untuk dijual di pasar setempat. Pasar yang nyaris autarki ini telah menghambat pembentukan pasar untuk barang konsumsi massal dan kemungkinan lahan investasi untuk suatu industrialisasi. Dengan demikian tidak terjadi perkembangan kota seperti di Eropa dengan basis manufaktur. Kota-kota tetap merupakan pusat administrasi.

Keberadaan masyarakat Cina sebagian besar terikat dengan kegiatan pertanian, hasilnya paling tidak harus meningkat seimbang dengan laju pertumbuhan penduduk. Keruntuhan dinasti Mancu yang berkuasa hingga tahun 1911 berkaitan dengan pengabaian pekerjaan untuk masyarakat terutama pengawasan air. Petani tidak mampu melakukan investasi yang berarti karena rendahnya surplus. *Gentry* terlihat, selama penghasilan mereka dapat dipertahankan melalui peningkatan pajak paksaan terhadap petani, tidak memiliki motivasi untuk meningkatkan produksi. Hasilnya adalah makin memburuknya kondisi pertanian, walaupun dapat dipertahankan keseimbangan yang labil melalui kegiatan padat karya, tetapi berakibat bencana ke-laparan pada musim kering dan banjir. Jawaban klasik terhadap keadaan demikian adalah

pemberontakan petani yang melahirkan dinasti baru, dan tugas pentingnya adalah re-organisasi sektor pertanian.

Usaha reformasi yang dilakukan sebagian birokrasi yang progresif di akhir abad ke-19 menurut model restorasi Meiji di Jepang setelah tahun 1868, yaitu modernisasi dilaksanakan dari atas, mengalami kegagalan. Begitu juga usaha modernisasi yang dilakukan Kuomintang (KMT) pada paro pertama abad ke-20 karena mereka tidak dapat mendobrak struktur sosial dan ekonomi yang ada. Selain itu, sejak pertengahan abad ke-19 pengaruh asing makin meningkat dan telah membatasi ruang gerak pemerintah Cina. Masalah internal yang dihadapi dalam pembangunan pertama-tama adalah stagnasi sektor pertanian ditambah faktor eksternal, yaitu imperialisme dan kolonialisme adikuasa Eropa, AS, serta Jepang. Kekuatan-kekuatan asing berminat terhadap pasar Cina dengan 500 juta jiwa penduduk pada waktu itu, dan berharap dapat memasarkan barang jadi dari Eropa untuk ditukar dengan teh dan sutra yang didambakan. Karena keunggulan militer pihak asing, sejak tahun 1842 dengan diplomasi kapal perang Cina dipaksa secara bertahap mengamankan masuknya perusahaan asing ke pasar Cina. Pembukaan pelabuhan mulai tahun 1842, penyerahan daerah pajak dengan status eksteritorial, pemilahan Cina ke dalam "daerah kepentingan", penjaminan konsesi untuk membangun jalan yang membuka daerah pedalaman, dan hak untuk investasi langsung mulai tahun 1895, bertujuan

menciptakan persyaratan menguasai pasar. Hasil kegiatan asing ini adalah modernisasi sebagian daerah-daerah pantai, yang dengan modal asing telah dibangun industri ringan termasuk jasa untuk melayani pemasokan kota-kota di pesisir dan pengolahan barang ekspor.

Sebagai suatu kegagalan mencolok adalah harapan untuk membahagiakan petani Cina dengan barang konsumsi Barat, yang dicapai justru ketimpangan lanjut antara desa-kota. Memang mereka telah berhasil mengikutsertakan daerah belakang kota-kota pesisir ke dalam perekonomian modern dengan mendesak kegiatan pertanian. Namun, sementara itu daerah belakang sama sekali tidak dijamah dan mendapat tekanan pajak yang makin besar dari kekaisaran yang sedang runtuh. Hal ini kemudian juga dilakukan *Warlords* dan KMT, dengan cara ini berusaha untuk membiayai program persenjataan dan modernisasinya.

Di utara terjadi perkembangan khusus, yaitu berlangsungnya penetrasi Jepang secara bertahap, berakhir dengan dilepaskannya daerah Mancuria dari Cina (1932), dan dalam perang Pasifik menduduki pantai timur. Sebab, motivasi Jepang bukanlah memasarkan barang, melainkan mendirikan basis industri berat dalam rangka peningkatan persenjataan untuk perang melawan AS. Jadi, Cina di tahun '40-an memiliki kompleks industri berat, walaupun kecil, serta industri barang konsumsi yang satu sama lain tidak terorganisir dan tidak diperuntukkan memasok sektor pertanian. Penundaan jalur transportasi

dalam Perang Dunia II dan kekalahan Jepang telah membuat jelas status enklave Cina.

Terlihat ada pengaruh Barat terhadap pimpinan Partai Komunis Cina karena wakil-wakil Kuomintang memerintahkan konsentrasi agitasi terhadap buruh dan revolusi di kota-kota menurut model Eropa yang marxis ortodoks, dikarenakan kenyataan pertanian seperti digambarkan, berakhir tahun 1927 dengan bencana kekalahan. Pada pertengahan tahun '30-an di bawah pimpinan Mao Tse Tung dilaksanakan strategi dengan menitikberatkan mobilisasi petani dan revolusi di daerah pedalaman. Dalam pertempuran dengan pasukan KMT, pangkalan di pedesaan Cina Selatan harus ditinggalkan.

Setelah *long-march* yang terkenal tahun 1934/1935, sisa tentara pembebasan menetap di daerah Yen-an di utara Cina, dan dalam situasi yang buruk—di bawah tekanan pendudukan Jepang dibentuk front kesatuan dengan KMT—dimulai perang perlawanan terhadap Jepang. Kegiatan ekonomi semasa gerilya di daerah Yen-an yang nyaris autarki tahun 1937–1945, merupakan embrio model pembangunan ekonomi Cina dalam pengeritian maois.

Kekalahan dan penarikan mundur pasukan Jepang tahun 1945 telah menyulut kembali konflik dengan KMT, didukung borjuasi Cina yang muncul di kota-kota pesisir, tuan tanah, serta bantuan militer AS.

Dengan janji melakukan reformasi pertanian yang radikal, komunis Cina berhasil memobilisasi massa petani miskin. Dalam perang saudara

tahun 1948/1949 pertama-tama telah berhasil menduduki daerah pedesaan dan kota-kota besar. Kuomintang melarikan diri ke Taiwan.

3. Tanggal 1 Oktober 1949 Mao Tse Tung memproklamkan Republik Rakyat Cina. Langkah pertama adalah di bidang pertanian. Selain penghapusan semua beban sewa dan utang, tahun 1950 sekitar 40% lahan pertanian tuan tanah dibagikan kepada petani miskin. Pemerataan pemilikan tanah yang baru terdiri atas satuan usaha kecil sehingga hampir tidak mungkin melaksanakakan modernisasi sektor pertanian. Apalagi petani yang telah dibebaskan dari beban sewa menggunakan penghasilannya yang meningkat untuk konsumsi tambahan. Peralihan secara bertahap kegiatan tani perorangan ke dalam bentuk kolektif tahun 1952-1956, hendak menciptakan persyaratan kelembagaan yang bertujuan meningkatkan hasil pertanian melalui pemanfaatan lahan, pembangunan pengairan, dan infrastruktur secara padat karya, selama belum tersedia persyaratan industri untuk modernisasi pertanian.

Di sektor industri perkotaan dilakukan langkah-langkah pertama seperti nasionalisasi perusahaan asing, memperbaiki kembali alat-alat produksi yang rusak, dan membangun aparat pemerintah yang berwenang "memegang komando" ekonomi-perdagangan luar negeri, keuangan dan industri berat yang ditinggalkan Jepang. Sekitar tahun 1952 perekonomian mencapai keadaan sebelum perang. Sekaligus dilaksanakan pembangunan perekonomian be-

rencana terpusat. "Kapitalis nasional", pengusaha Cina, yang tidak bekerja sama dengan pihak asing dan Kuomintang serta menguasai industri barang konsumsi, dianggap dapat diajak bekerja sama dengan partai komunis Cina. Sampai tahun 1956 secara bertahap perusahaan mereka diintegrasikan ke dalam perekonomian berencana terpusat, pemilik mendapat ganti rugi dan dijadikan pimpinan usaha yang baru. Jadi, revolusi Cina pertama-tama bersifat sangat anti-feodal dengan mendobrak basis ekonomi kekuasaan lokal *gentry*. Namun, revolusi ini tidak antikapitalis karena menarik "kapitalis nasional" untuk diajak bekerja sama.

Hasil dari penguasaan kota-kota dengan perekonomiannya, juga membuat sayap lama Partai Komunis Cina yang berorientasi serikat buruh perkotaan mendapatkan pengaruhnya kembali. Mereka ini berbeda dengan garis Mao, basis sosialnya bukanlah petani, melainkan buruh perkotaan dan dalam kesepakatannya dengan pengertian pembangunan marxistis ortodoks lebih mengutamakan industrialisasi. Pengaruh ini makin kuat akibat hubungan yang lebih dekat dengan Uni Soviet sejak awal tahun '50-an karena dengan berlangsungnya perang Korea dan boikot AS tidak ada pilihan lain bagi Cina. Uni Soviet siap dan mampu memberikan bantuan pada perencanaan administrasi dan pendidikan menurut model politik industrialisasi, bantuan teknik, bantuan modal, serta pengiriman mesin-mesin, dan instalasi pabrik yang lengkap. Konsekuensinya adalah, berangkat dari peninggalan Jepang

di Mancuria, tahun '50-an dalam rangka rencana pembangunan lima tahun hampir seluruh sumber daya yang tersedia dikonsentrasikan untuk pembangunan industri berat. Sementara itu, industri barang konsumsi dan sektor pertanian untuk sementara diserahkan pada inisiatif "kapitalis nasional" dan petani, tanpa mendapat bantuan yang berarti dari pemerintah.

Walaupun telah meraih keberhasilan, terlihat dari tingkat pertumbuhan industri berat, sejak sekitar tahun 1956 strategi ini menimbulkan sederet permasalahan yang menyulut kritik berbagai pihak. Sayap Partai Komunis yang dekat dengan mantan Presiden Liu Shao Chi, menamakan diri garis "liuistis" terutama mengkritik konsekuensi ekonomi yang terlalu berorientasi pada model industrialisasi Soviet. Usaha memajukan industri berat secara sepihak yang menimbulkan tingginya tingkat investasi, menyebabkan masalah akumulasi karena industrialisasi semacam ini telah mengorbankan pertanian dan konsumsi. Impor mesin dari Uni Soviet makin tidak dapat diimbangi melalui peningkatan ekspor pertanian. Apalagi sejak pertengahan tahun '50-an harus mulai pembayaran kembali kredit dari Soviet sehingga menimbulkan masalah neraca pembayaran yang berat. Oleh karena itu, kaum liuis menyetujui sebuah pertumbuhan yang seimbang dan lebih memperhatikan sektor-sektor lainnya serta pengurangan impor mesin demi lebih menguatkan hasil Cina sendiri.

Kritik haluan maois lebih ditujukan terhadap konsekuensi-konsekuensi politik kemasyarakatan akibat mo-

del industrialisasi Uni Soviet. Berbeda dengan di Uni Soviet, basis sosial Partai Komunis Cina bukanlah kelas pekerja kota yang bisa menikmati keberhasilan politik industrialisasi Stalin dalam jangka panjang, melainkan petani miskin. Dengan demikian Partai Komunis Cina terancam kehilangan basis sosialnya. Selain itu, prinsip-prinsip Uni Soviet dalam hal efektivitas, spesialisasi, dan sentralisasi, juga bertentangan dengan bayangan politik kemasyarakatan kaum maois.

Tahun 1958-1960 mula-mula dijalankan garis maois. Politik "Tiga Bendera"-garis utama pembangunan sosial, pendirian komune-komune rakyat dan "langkah besar ke depan"-menggambarkan usaha-usaha mengisi kekurangan modal melalui kerja, kekurangan pengetahuan teknik melalui antusiasme dan kreativitas, agar dalam waktu singkat dapat mengatasi masalah modernisasi pertanian dan industrialisasi melalui mobilisasi massa secara besar-besaran. Persyaratan untuk itu diharapkan dapat diperoleh dari komune-komune rakyat, masing-masing berisi 50.000 manusia atau lebih, yang dibangun Agustus 1958. Komune rakyat diharapkan dapat menggambarkan sebuah kesatuan terintegrasi dari produksi dan administrasi. Kegiatan-kegiatan seperti memasak, merawat orang jompo, mengasuh anak yang sebelumnya dilakukan perorangan, lalu dilakukan secara kolektif, sehingga setiap tenaga kerja yang tersedia, terutama tenaga cadangan perempuan dapat dimanfaatkan untuk pekerjaan-pekerjaan dalam infrastruktur, pembukaan

tanah dan pembangunan usaha-usaha pertambangan, besi dan baja, dalam industri-industri kecil. Selain itu, ada pemikiran maois bahwa manusia merupakan tenaga produktif terpenting yang dapat berkembang hanya melalui praktek revolusioner dan pengetahuan yang diperoleh melalui-nya, yaitu perjuangan melawan Jepang dan KMT, berlanjut pada perang produksi.

"Langkah besar ke depan" berakhir dengan sebuah malapetaka. Di samping sejumlah kegagalan panen dan penghentian pemasokan barang-barang perlengkapan, sebagai akibat konflik ideologi yang makin meruncing dengan Uni Soviet pertengahan tahun 1960, menjadi penyebab utama adalah krisis disproportional yang besar. Mobilisasi begitu banyak tenaga kerja untuk kegiatan-kegiatan di luar pertanian menyebabkan sangat terbaikannya pertanian. Kampanye produksi besi dan baja memang menyebabkan perluasan besar kapasitas yang menghasilkan produk-produk yang buruk kualitasnya, tetapi tidak ada kebutuhan yang sesuai dengan produksi tersebut. Terutama sekali krisis pertanian, produksi gandum dari 200 juta ton (1958) turun menjadi 143,5 juta ton (1960), diperkirakan (1961-1962) sekitar 23 juta manusia mengalami kelaparan, begitu mencolok sehingga merangsang kecenderungan reswastanisasi dan membahayakan eksistensi lanjut revolusi.

Lalu, "langkah besar" dihentikan, komune-komune rakyat *de facto* dibubarkan, Mao harus menyerahkan jabatan presiden dan mundur ke "garis pimpinan kedua". Manajemen liuistis

mula-mula adalah melegalisasi reswastanisasi dalam pertanian, kerajinan, dan perdagangan kecil. Sekitar tahun 1962-1983, ketika situasi perlahan-lahan membaik, dijalankan sebuah orientasi baru ekonomi keseluruhan. Industrialisasi dilakukan melalui pengembangan pertanian, artinya pendapatan petani yang tumbuh akan membentuk pasar untuk barang konsumsi. Industri perakitan dan kimia perlu berorientasi ke produksi mesin-mesin pertanian dan pupuk buatan. Berbeda dengan "langkah besar", industri kota negara mendapatkan peran menentukan. Daerah-daerah demikian diutamakan dalam pemasokan. Karena keuntungan alami atau dekat kota dan dengan kemungkinan spesialisasi yang berkaitan dengannya, diharapkan bisa meningkatkan panen. Konsekuensinya adalah kesenjangan antara perkotaan dan pertanian di dekat kota di satu pihak dan dengan *hinterland* (daerah belakang) yang terpencil di lain pihak. Primat produksi liuistis dibandingkan primat politik maois, memberikan ruang yang sempit untuk tujuan-tujuan politik kemasyarakatan kaum maois.

Ketika persyaratan organisatoris untuk haluan baru (1965) makin tersedia dan akan direalisasi tahun 1966 dalam rencana pembangunan lima tahun ketiga, haluan maois kembali menguat dan melakukan oposisi. Dalam kelangsungan revolusi budaya tahun 1966-1969 terjadi pertikaian sengit di dalam partai yang menyangkut masalah ideologi dan masalah haluan politik ekonomi, serta pertanyaan untuk siapa hal ini terutama ditujukan. Kaum maois berhasil me-

nantang dan berusaha dalam rangka menghidupkan kembali komune-komune rakyat, membuka daerah pedesaan menurut model brigade panutan *Dadcai* yang dipuji Mao (1964). *Dadcai* terletak di daerah lepas tak bertuan, di mana petani dengan tenaga sendiri secara besar-besaran memberikan keberhasilan besar. Inti pembukaan pertanian adalah pembangunan agroindustri lokal. Dari "langkah besar" orang telah banyak belajar bahwa harus ada penyesuaian dimensi dan struktur produksi usaha-usaha kecil ini pada situasi lokal. Pusatnya adalah produksi input pertanian seperti energi, bahan-bahan bangunan, mesin-mesin pertanian dan pupuk di satu pihak dan pengolahan bahan-bahan pertanian untuk bahan pangan dan tekstil di lain pihak, serta produksi barang-barang konsumsi sederhana untuk kebutuhan pedesaan. Strategi ini berhasil selama bantuan usaha-usaha kecil dapat menghasilkan kenaikan produksi yang tinggi dalam sektor yang sesuai dengan pertanian di luar perencanaan pusat dan pertanian bisa berkembang dengan bantuannya. Puncak gerakan ini tercapai tahun 1972-1973, ketika di sejumlah bidang lebih dari separo produksi dihasilkan melalui usaha-usaha kecil.

Sejak paro kedua tahun 1972 mulai terlihat nyata perlawanan dari sayap partai liuistis yang mencapai puncak dengan rehabilitasi Deng Xiao Ping, pernah menjadi tangan kanan Liu, Agustus 1973. Pidato Chou En Lai mengenai modernisasi Cina sampai tahun 2000 dalam Kongres Rakyat Nasional ke-4, Januari 1975, mem-

berikan aksentuasi baru programatis yang sudah mulai dicanangkan dengan makin banyaknya impor teknologi besar dari Barat. Sampai kematian Mao, 9 September 1976, pertikaian ini belum terselesaikan. Kejatuhan "Empat Bandit" Oktober 1976, penggulingan Hua Guo Peng sebagai ketua partai tahun 1978 dan perubahan prinsip dasar dalam plenum ke-3 Komite Pusat ke-11 bulan Desember 1978, berarti kemenangan haluan liuistis menghadapi maois. "Empat modernisasi" yang dikaitkan dengan prinsip-prinsip dasar pada paro pertama tahun '60-an, dapat dipakai kembali. Di belakang perubahan strategi terbaru selain kontroversi ideologi adalah situasi keterbatasan agroindustri dalam industri kecil yang terlihat dengan menurunnya tingkat pertumbuhan produksi gandum (1974-1977) dan menyebabkan berkurangnya pendapatan per kapita (1976-1977). Lalu, data-data ini menjadi argumentasi menentukan bagi kelompok liuis untuk suatu perubahan haluan setelah kejatuhan "empat bandit".

Haluan modernisasi yang dilakukan terburu-buru dengan melakukan pembelian besar-besaran instalasi pabrik dalam jumlah miliaran dari Barat sejak tahun 1980 dihentikan demi sebuah politik penyesuaian kembali. Tidak lama kemudian, terlihat bahwa Republik Rakyat Cina karena infrastruktur dan tingkat pendidikan, tidak mampu menyerap alih teknologi yang hebat. Ekspor juga tidak meningkat; untuk membayar impor.

Meskipun impor teknologi besar dari negara Barat terus berlanjut, te-

tapi aksen politik baru tahun '80-an adalah bidang reformasi ekonomi. Tindakan paling spektakuler adalah pembubaran komune-komune rakyat secara bertahap. Sebagai gantinya adalah sistem tanggung jawab dalam rangka perjanjian pemanfaatan jangka panjang rumah tangga setiap petani. Ini berarti, *de facto* reswanisasi pertanian kembali ke situasi melanjutkan reformasi tanah di awal tahun '50-an. Sarana-sarana komune rakyat lainnya (stasiun mesin-mesin traktor, industri kecil, dokter-dokter berjalan, dsb.) dibubarkan, dimusnahkan, diswanisasi atau ditempatkan sebagai badan negara terendah dalam administrasi daerah yang dibangun kembali. Bersamaan dengan kemungkinan menjual bebas satu bagian dari produk-produk pertanian, pembukaan kembali pasar-pasar petani, swastanisasi transportasi kecil (sampai ke truk), dan pembebasan sebagian harga pertanian, menimbulkan rangsangan individual untuk mendorong pertumbuhan baru dalam pertanian dan diversifikasi besar produk-produk tanaman berkualitas tinggi dan pemuliaannya (buah-buahan, sayuran, daging, tanaman-tanaman khusus). Perbaikan pendapatan besar ini terutama dinikmati petani-petani yang hidup di dekat kota karena aksesnya ke pasar paling dapat memanfaatkan kebebasan-kebebasan baru tersebut. Tawaran bahan pangan di perkotaan sejak itu diperbaiki secara kualitatif dan kuantitatif, meskipun terjadi kenaikan harga yang pesat (beberapa sampai 100%). Lebih negatif adalah perbedaan sosial dan regional yang terus tumbuh dalam pertanian, ke-

naikan baru pertumbuhan penduduk, dan (diperkirakan) kenaikan buta aksara (sekarang sekitar 200-300 juta manusia). Petani kembali tertarik untuk makin banyak mempunyai anak agar memperoleh lebih banyak tenaga kerja; pemakaiannya terutama bisa dimanfaatkan sebelum masuk sekolah.

Dalam sektor perkotaan, reswanisasi terutama menjangkau sektor industri kecil (perdagangan, jasa, pengrajin, restoran, dsb.) yang analog menyebabkan perbaikan pengadaan. Di sini pengangguran terselubung lalu mendapatkan sarannya. Dalam sektor industri besar negara, politik reformasi belum keluar dari stadium percobaan. Industri dan pemimpin industri (dibandingkan kader-kader partai) memang mendapatkan otonomi yang besar (dalam penggunaan keuntungan dan rencana investasi), tetapi kesediaan prinsipil dari aparat perencanaan dan ekonomi sentral masih dipertanyakan. Berfungsinya pasar terlebih dahulu membutuhkan aturan-aturan baru sistem harga yang terkoyak sampai ke pembebasan harga sama sekali. Sampai kini pada "front harga" hanya dilakukan tindakan setengah-setengah karena dampak inflasioner menyembunyikan bahaya besar politik dan sosial, terutama di bidang harga konsumen. Tuntutan selanjutnya dari para reformis, yaitu pengurangan pengendalian administratif melalui pengurangan, pemudaan dan lebih berkualifikasi dari birokrat-birokrat ekonomi, sampai kini mengalami kegagalan karena perlakuan para kader di semua tingkat. Akibatnya, tahun '80-an selalu terjadi

bolak-balik antara tindakan dan pengumuman reformasi, yang selalu harus kembali dibatasi atas tekanan kelompok konservatif.

Liberalisasi dalam bidang ekonomi luar negeri lebih konsekuen, terutama di daerah-daerah pantai, perusahaan dan kesatuan administrasi bawah makin banyak mendapatkan otonomi. Kini Republik Rakyat Cina tidak sungkan lagi, selain alih teknologi, mengirim ahli dan mahasiswa secara besar-besaran ke luar negeri, mengambil kredit dari Barat, dan mengundang investasi asing dalam bentuk *joint venture*. Dalam zone khusus yang dibangun menurut model zone produksi bebas di Asia lainnya, perusahaan asing diizinkan 100%. Impor yang menguat sejak pembukaan, diimbangi terutama melalui ekspor pabrikat yang padat karya dan penjualan jasa internasional (turisme, pekerja pinjaman, dsb.). Namun, di sini sering ada pembatasan dari pihak aparat sentral karena terjadi dorongan impor yang tak terkendali, terutama barang mewah (kendaraan, elektronika, hiburan).

Perkembangan lanjut bergantung pada kelangsungan pertikaian antara kelompok reformis dan konservatif dalam pimpinan partai. Keberhasilan ekonomi yang tidak dapat disangkal dari haluan baru memang dapat menutupi hal-hal negatif, seperti inflasi yang berpacu, diferensiasi sosial yang tumbuh, pengangguran yang meningkat, dan makin tidak puasny sebagai penduduk yang dalam hubungan kerja negara tidak memiliki pendapatan yang besar. Hal ini memberikan kelompok konservatif alasan

untuk menghentikannya dan memperlihatkan keuntungan-keuntungan ekonomi berencana "di tahun emas '50-an". Pertarungan kekuasaan yang sudah lama berlangsung antara kelompok reformis dan konservatif memberikan indikasi kemenangan sementara kelompok konservatif tahun 1989 di bawah pimpinan Deng Xiao Ping, Liu Peng, dan Yang Shan Kun, dengan jatuhnya ketua partai Hu Yao Bang, Januari 1987. Berkaitan dengan demonstrasi mahasiswa untuk demokrasi, kebebasan pers dan hak asasi manusia Mei/Juni 1989, terlihat bahwa Zhao Zi Yang yang reformis bersedia melakukan dialog sungguh-sungguh dengan para pemrotes. Partai sebaliknya yang belum lama menjanjikan reformasi politik, mengingatkan akan bahaya anarsi dan konter-revolusi. Ini menjadi alasan masuknya tentara ke-27 ke Peking yang mengakhiri demonstrasi mahasiswa. Deng Xiao Ping dengan demikian telah membahayakan karya reformasinya sendiri.

Kepustakaan: W. Franke (ed.), *China, Gesellschaft, Politik, Staat, Wirtschaft*. Handbuch, Reinbek 1977; U. Menzel, *Theorie und Praxis des chinesischen Entwicklungsmodells*, Opladen 1978; ibid, *Wirtschaft und Politik im modernen China. Eine Sozial- und Wirtschaftsgeschichte von 1842 bis nach Maos Tod*, Opladen 1979; B. Staiger, *China. Natur-Geschichte-Gesellschaft-Politik-Staat-Wirtschaft-Kultur*, Tübingen 1981; Xue Muqiao, *Sozialismus in China. Erfolge, Fehlschläge, Perspektiven*, Hamburg 1982; H.F. Vetter, "Chinas neue Wirklichkeit". Gesellschaft, Wirtschaft und Politik nach Mao, Frankfurt 1983; H. Forster-Latsch/J. Noth, *Chinas Weg in die Moderne. Anders als Moskau?*, Frankfurt 1986; K. Grobe-Hagel (ed.), *China. Ein politisches Reisebuch*, Hamburg 1987.

um

CIPEC (Consejo Intergubernamental de Países Exportadores del Cobre)

Dewan Antarnegara dari Negara-Negara Pengeskor Tembaga. Kartel bahan mentah yang berdiri tahun 1967 atas inisiatif E. Frei. Anggota: Cile, Indonesia, Peru, Zambia, Zaire; 3 negara terasosiasi: Australia, Mauritania, Papua Nugini. dn

circulus vitiosus Sering disebut lingkaran setan, merupakan asumsi eksistensi hubungan antara berbagai faktor menurut suatu rangkaian penyebab, masing-masing faktor merupakan penyebab sekaligus dampak untuk dan dari faktor (-faktor) lainnya (penyebab sirkuler). Gambaran *circulus vitiosus* dipakai untuk menjelaskan proses yang makin negatif dan memperlihatkan masalah yang sulit dipecahkan, yaitu bagaimana mematahkan lingkaran setan. Misalnya, penerimaan kecil - tabungan kecil - permintaan sedikit - investasi kecil (- volume produktivitas kecil -/efek kesempatan kerja kecil) - penerimaan kecil. Atau: miskin - kurang pangan (- tingginya kepekaan terhadap penyakit) - prestasi kerja/ produktivitas rendah - miskin yang lebih besar. Situasi awal (miskin) dalam *circulus vitiosus* makin menajam dan terkokohkan. dn

civic action Pemakaian satuan khusus angkatan bersenjata sebuah negara (mula-mula di Amerika Latin) untuk rencana-rencana pembangunan, terutama di bidang infrastruktur (dari pembangunan jalan sampai ke pemberantasan buta aksara) sejak akhir tahun '50-an. *Civic action* berisi reorientasi tugas-tugas militer yang berasal dari keinginan menghadapi maupun mendahului strategi gerilya yang

revolusioner dan menjadikan dirinya disukai penduduk.

Selanjutnya program-program *civic action* mengatur strategi *counterinsurgency* yang dibuat dan dibiayai AS dan militer di Amerika Latin. Selain itu, mereka membangun sebuah kesadaran baru di kalangan militer sebagai sebuah elite pembangunan (penyekolahan dalam masalah-masalah perekonomian, sosiologi, dan teori pembangunan) sehingga meningkatkan kesediaan mereka mengambil alih kekuasaan politik, lebih dari masa silam dalam jangka panjang menyaingi elite politik sipil; kadang-kadang berusaha menjalankan program-program pembangunan. → rezim otoriter. dn

CLASC Sejak tahun 1971 berubah menjadi *CLAT* → serikat buruh (di Dunia Ketiga).

Club of Dacar → Kelompok Dakar.

Club of Paris → Kelompok Paris.

Club of Rome → Kelompok Roma.

CMET (*Comité Maghrébin de l'Emploi et du Travail*) Komite untuk Kesempatan Kerja dan Kerja Negara-Negara Magribi.

CMT (*Comité Maghrébin du Tourisme*) Komisi Turisme Negara-Negara Magribi.

collective self-reliance csr (kemandirian kolektif), menandai penerapan konsep *self-reliance* ke negara berkembang dan kelompok-kelompok mereka. Csr memiliki berbagai isi strategi pembangunan yang berbeda-beda. Dalam hubungan Utara-Selatan tujuan negara berkembang adalah membangun sebuah posisi tawar yang kuat (kekuatan tandingan) terhadap negara industri dan perusa-

haan transnasional agar dapat lebih baik menjalankan kepentingan negara-negara Dunia Ketiga, terutama dalam perundingan mengenai tata ekonomi dunia baru. Beberapa teoretis pembangunan mengartikan csr dalam kaitan ini juga sebagai strategi disosiasi. Kemudian, dalam hubungan Selatan-Selatan csr berkaitan dengan gambaran intensifikasi ekonomi, politik, dan kultural hubungan antarnegara berkembang (bilateral dan multilateral) yang melampaui integrasi regional. Dengan menguatkan kerja sama diharapkan dapat mengatasi hubungan asimetris dan bergantung ke negara-negara industri. Kelompok 77 pada UNCTAD V mengajukan sebuah program csr dalam tuntutan-tuntutannya.

Csr masih merupakan sebuah konsep yang muda dan secara teoretis belum jelas sama sekali. Hal yang jelas misalnya, apakah *self-reliance* negara berkembang merupakan strategi pembangunan individual (terbatas nasional) dengan penggunaan yang bertolak dari csr-atau csr merupakan persyaratan untuk sebuah csr. Hal yang tidak jelas, sejauh mana csr bertemu dengan pasar dunia dan tata ekonomi dunia baru, sejauh mana hubungan Selatan-Selatan menggantikan hubungan Utara-Selatan. Dalam hal ini bisa dibedakan antara strategi keras dan lunak (lihat Matthies 1982, hlm. 382 dst.). Sebuah pelaksanaan csr dalam praktek berhadapan dengan posisi kepentingan yang berbeda-beda dari masing-masing atau kelompok negara berkembang.

Kepustakaan: K.M. Khan dan V. Matthies, *Collective Self-Reliance: Programme und Perspektiven der Dritten Welt*, München/London

1978; S. Amin, "Self-Reliance und die Neue Weltwirtschaftsordnung", dlm.: D. Senghaas, *Kapitalistische Weltökonomie*, Frankfurt 1979, hlm. 317 dst.; K.M. Khan (ed.), *Self-Reliance als nationale und kollektive Entwicklungsstrategie*, München 1980; V. Matthies, "Collective Self-Reliance", dlm.: *HDW II, 1*, Hamburg 1982, hlm. 380 dst.

dn
Colonial Development Acts → politik bantuan pembangunan Inggris.
colonos → hacienda.

COMECON → politik bantuan pembangunan Uni Soviet dan Negara-Negara Eropa Timur.

commodity terms of trade Merupakan diskusi mengenai konsep berdasarkan *terms of trade* dengan mengaitkan indeks harga barang ekspor dan indeks harga barang impor. Berbeda dengan konsep *income terms of trade*, dipertanyakan hubungan pertukaran riil antara bahan mentah dengan barang jadi serta perubahan-perubahannya.

dn
Commonwealth Sebagian besar bekas *empire* Inggris menggabungkan dirinya dalam *commonwealth*. Sekarang 49 negara merdeka tergabung di dalamnya. Dalam 18 negara di antaranya, Ratu Inggris masih merupakan kepala negara mereka. Anggota: Antigua dan Barbuda, Australia, Bahama, Bangladesh, Barbados, Belize, Botswana, Brunei, Dominika, Fiji, Gambia, Ghana, Grenada, Guyana, India, Inggris, Kanada, Kenya, Kepulauan Salomon, Kiribati, Lesotho, Malawi, Malaysia, Maladewa, Malta, Mauritius, Nauru, Nigeria, Papua Nugini, Samoa Barat, Selandia Baru, St. Christopher dan Nevis, St. Lucia, St. Vincent dan Grenadin, Seycheles, Sierra Leone, Singapura, Siprus, Sri Lanka, Swaziland, Tanzania, Tonga, Trinidad dan Tobago, Tuvalu, Ugan-

da, Vanuatu, Jamaika, Zambia; dan Zimbabwe.

Kepala-kepala negara dalam *commonwealth* bertemu setiap dua tahun sekali. Berlangsung juga pertemuan tingkat menteri; pertemuan menteri keuangan setiap tahun untuk membicarakan masalah-masalah ekonomi dunia. Tahun 1965 di London dibangun sekretariat *commonwealth* yang dipimpin seorang Sekretaris Jenderal (kini: Shridath S. Ramphal, Guyana) yang mengorganisasi kegiatan-kegiatan *commonwealth*. Sekretaris juga mengurus dana untuk kerja sama teknik (CFTC) yang dibangun tahun 1971 untuk memungkinkan bantuan pembangunan sosial dan ekonomi dari anggota-anggota *commonwealth*. Inggris menanggung sekitar sepertiga ongkos yang muncul.

Namun, *commonwealth* bukan merupakan gabungan negara-negara dengan tujuan politik dan ekonomi yang sama. Proses keputusan di dalam *commonwealth* berdasarkan konsensus minimal kesediaan untuk melakukan kerja sama. Persatuan bisa dicapai ketika menolak politik apartheid. Afrika Selatan meninggalkan *commonwealth* sejak tahun 1961. Dalam masalah aktual mengenai sanksi ekonomi terhadap Afrika Selatan, Inggris tidak bersedia melakukan boikot sesuai dengan suara mayoritas negara-negara *commonwealth*, dan bersikap menganjurkan sanksi sukarela di bidang investasi baru ke Afrika Selatan dan reklame turisme, serta memberlakukan keputusan ME yang melarang impor besi dan baja dari Afrika Selatan. Sejak Inggris masuk ME, kerja sama ekonomi *common-*

wealth melemah karena penghapusan sistem preferensi di dalam *commonwealth* untuk pertukaran barang antarnegara. Sebagian negara Dunia Ketiga anggota *commonwealth* dari Afrika, Karibia, dan kawasan Pasifik berasosiasi melalui perjanjian AKP (→ Negara AKP) tahun 1975 dengan kondisi khusus ME.

Kepustakaan: *Yearbook of the Commonwealth*, London, setiap tahun; N. Mansergh, *The Commonwealth Experience*, London/Basingstoke, cet. ke-2, 1982, P. Slinn/D. Judd, *The Evolution of the Modern Commonwealth 1902-1980*, London/Basingstoke 1982; A. Smith/C. Sanger, *Stitches in Time: The Commonwealth in World Politics*, London 1982; M. Doerfel, "Ein Bündnis für die Demokratie?", dlm.: *Das Parlament* 36 (1986), no. 42.

rs
Communauté Financière Africaine
→ Franc-Zone (F.-Z.).

Communauté Françaises Menurut referendum UUD Perancis tahun 1958 dibangun federasi (semu) antara Perancis dengan negara-negara otonomnya sebagai kawasan seberang lautan dari AOF (kecuali Guinea), AEF, dan Madagaskar. Runtuh akibat kemerdekaan negara-negara Afrika tahun 1960.

fn
Communauté Rurale → swadaya.

community development Strategi pembangunan yang bertujuan memanfaatkan seoptimal mungkin sumber daya manusia dalam bentuk inisiatif sendiri melalui jalan "pembangunan dari bawah". Hal pokok dalam *community development* adalah: a. keikutsertaan penduduk pada langkah-langkah untuk memperbaiki situasi kehidupan mereka, artinya swadaya dan gotong royong; b. penyediaan sarana teknik, terutama pelayanan dari pihak negara.

Tujuan: situasi politik, ekonomi, dan sosial; program-program yang sesuai: reformasi pendidikan sekolah dan kejuruan; perluasan pendidikan orang dewasa; program-program pemberantasan buta aksara; perbaikan infrastruktur sosial di bidang-bidang kesehatan, tempat tinggal, kerja, perempuan dan remaja; pengaitan kegiatan ekonomi desa ke perekonomian nasional; peningkatan bentuk produksi yang padat modal; administrasi komunal merupakan sel inti kultur politik nasional. Dari para teoretisi *community development* ditetankan "bahwa kriteria keberhasilan bukanlah perubahan materi dalam setiap bidang (seperti berapa banyak jembatan, sekolah, rumah sakit, dewa desa, dsb.); melainkan sejauh mana prinsip dasar ini disampaikan sebagai syarat berfungsinya sarana-sarana tersebut. Jadi, perubahan dalam motivasi, keterampilan, dan hubungan sosial manusia" (Jorges, dlm.: EPHL 1966, hlm. 1066).

Kepustakaan: J.C. Rhie, *Community Development durch Selbsthilfegruppen*, Saarbrücken 1977; A.A. Benini, *Community Development in a Multi-Ethnic Society: The Upper River Division of the Gambia, West Africa*, Saarbrücken 1980.

dn

COMUNBANA → SELA.

concessional terms → IFAD.

CONDECA (*Consejo de Defensa Centroamericana*, juga: *Central American Defence Council/CADC*) Dewan Pertahanan Amerika Tengah, tahun 1964 merupakan usaha yang didorong AS untuk menggerakkan sebuah kerja sama lebih erat antar-militer negara-negara Amerika Latin. Ketegangan antara masing-masing negara (misalnya, antara Honduras

dan El Salvador tahun 1969 yang menimbulkan "Perang Sepak Bola") memblokir pendekatan sebuah pakta pertahanan regional. Konflik Amerika Tengah membuatnya menjadi tidak mungkin dalam jangka menengah.

fn

cono sur Definisi berdasarkan geografi-etnis-sosial untuk negara-negara di sebelah selatan Amerika Selatan, yaitu Argentina, Cile, dan Uruguay.

dn

Conseil de l'Entente Didirikan tahun 1959 oleh Pantai Gading, Benin, Burkina Faso, dan Niger. Tahun 1966 Togo masuk. *Kedudukan:* Abijan (Pantai Gading). Mula-mula hanya merupakan konferensi kepala negara yang primer menjalankan politik luar negeri Pantai Gading. Sekarang lebih merupakan organisasi pembangunan dan ekonomi (sejak tahun 1966 dana kredit dan jaminan). Berlangsung perdagangan bebas dan bea luar negeri bersama di antara mereka.

fn

contra Definisi untuk semua kontra-revolusioner yang di tahun '80-an melawan pemerintah Sandinista di Nikaragua. → Nikaragua, Konflik Amerika Tengah.

Convenio de Panama → SELA.

COPAL/CPA (*Cocoa Producer's Alliance*) Organisasi Negara Produsen Kakao. Kartel bahan mentah di bidang produk pertanian, didirikan tahun 1962 di Lagos (Nigeria). 11 negara anggotanya (Brasilia, Ekuador, Meksiko, Kamerun, Trinidad-Tobago, Ghana, Nigeria; Pantai Gading, Gabon, Sao Tome-Principe, Togo) selain berusaha mendorong hubungan ekonomi dan teknik-pengetahuan antarnegara anggota, juga

meningkatkan konsumsi kakao dan pengendalian pasar kakao. **mm**

Corea-Plan Plan menurut nama Sekretaris Jenderal UNCTAD, Iama-ni Corea, yang diajukan untuk men-stabilkan harga 18 bahan mentah ter-penting dalam konferensi UNCTAD IV di Nairobi tahun 1976. → prog-ram bahan mentah terintegrasi. **dn**
cost benefit analysis cbs, (analisis-biaya-hasil), merupakan proses per-ekonomian nasional untuk menilai investasi pemerintah yang penting untuk rencana pembangunan dan evaluasi. Secara teoretis cbs mem-berikan informasi, apakah suatu lang-kah pemerintah tertentu mempunyai satu atau beberapa alternatif dalam perspektif efisiensi ekonomi. Cbs se-suai prinsip perhitungan ongkos-hasil dalam ekonomi perusahaan, tetapi menggantikan definisi yang pasti dari keuntungan (perusahaan) dengan de-finisi manfaat (masyarakat keseluruh-an) yang kurang pasti. Analisis ini ter-utama terdiri atas penjangkauan dan penjumlahan semua ongkos yang dapat diharapkan dan manfaat sebuah proyek serta perhitungannya untuk mendapatkan manfaat netto. Titik kait antara pengertian "ongkos" dan "manfaat" bukanlah setiap proyek yang dipertanyakan, melainkan per-ekonomian nasional keseluruhan, ar-tinya semua efek ekstern sebuah in-vestasi dikaitkan ke analisis. Manfaat adalah keuntungan kesejahteraan dan ongkos adalah kerugian kesejahtera-an, serta keuntungan yang hilang. Asumsi mendasar cbs adalah negara bertindak dengan berorientasi pada prinsip efisiensi ekonomi dan di an-tara berbagai alternatif perlu memilih

yang paling dapat memberikan keun-tungan kesejahteraan maksimal. Ini memperlihatkan masalah analitis dan normatif yang fundamental, yaitu operasionalisasi "manfaat" dan "ke-sejahteraan" yang sering berlangsung melalui konsumsi ekonomi keselu-ruhan. Jadi, pendapatan nasional da-pat diartikan peningkatan "ekonomis" definisi ini; dan tindakan yang diper-tanyakan mengenai distribusi pemil-ikan barang. Padahal justru di negara berkembang masalah distribusi mem-punyai arti pokok (→ heterogenitas struktural, → distribusi pendapatan).

Instrumentarium metodis cbs te-rus-menerus diperbaiki tidak hanya karena kritik atas konsentrasi efisien-si. Telah dikembangkan proses yang menyertakan aspek distribusi atau ka-dar risiko dari proyek-proyek pemer-intah. Terutama di negara berkem-bang tetap ada masalah sangat praktis pada pencarian data-data yang me-madai dan diandalkan, baik pada pi-hak ongkos (misalnya, bagaimana di-kembangkan harga untuk barang in-vestasi tertentu di pasar dunia?), be-gitu juga pihak manfaat (apakah se-buah jalan benar-benar akan mem-berikan pertumbuhan perdagangan seperti yang diharapkan, atau akan berhadapan dengan faktor-faktor yang sangat berbeda dari yang bisa dijangkau ekonomi, misalnya kul-tural?). Pendekatan cbs yang jelas berprinsip memberikan keputusan in-vestasi pemerintah sebuah dasar yang rasional dan sekuantitatif mungkin sehingga relatif (dalam sorotan peng-alaman) dalam evaluasi proyek. Se-ring orang tetap berpegang pada ukuran efisiensi dari investasi pe-

merintah di negara berkembang pada prosedur kuantitatif.

Kepustakaan: E.J. Mishan, *Elemente der Kosten-Nutzen-Analyse*, Frankfurt 1975; J. Hoffmann, *Erweiterte Nutzen-Kosten-Analyse*, Göttingen 1981.

bt
counterinsurgency Strategi menghadapi revolusi atau mencegah revolusi; semua tindakan militer, para militer, politik, ekonomi, psikologi, dan *civic action* yang dilakukan negara untuk mengatasi pemberontakan. Strategi memerangi perubahan revolusioner yang mendapatkan inspirasi komunis atau diduga komunis, dilakukan terutama oleh AS di Amerika Latin setelah keberhasilan revolusi Kuba. Mempunyai bentuk berbeda-beda: penelitian ilmiah mengenai kemungkinan mencegah perubahan revolusioner (contoh terkenal: proyek *Camelot* tahun 1965 di Santiago de Chile); bantuan ekonomi *Alliance for Progress*, dan bantuan militer (pendidikan militer Amerika Latin dalam program-program anti-gerilya, penyediaan perlengkapan spesifik untuk perlawanan anti-gerilya, bantuan pembiayaan untuk program-program *civic action*).

Kepustakaan: W. Barbet/N. Roening, *Internal Security and Military Power. Counterinsurgency*

cy and Civic Action in Latin America, Ohio 1966.

counterpart Organisasi negara industri di negara berkembang yang menyetujui bantuan teknik untuk rencana pembangunan, mengirimkan tenaga ahli yang bekerja sama dengan tenaga ahli lokal dan relawan pembangunan yang akan meneruskan jika proyek tersebut selesai. Menurut konsepsi negara Barat, *counterpart* lokal harus bisa menjamin bahwa tujuan dan keinginan negara berkembang sesuai dengan isi dan pelaksanaan proyek yang dibantu. Mereka perlu secepat mungkin menggantikan tenaga-tenaga ahli asing.

dn
CPCM (*Comité Permanent Consultatif du Maghreb*) Komisi Konsultasi Tetap Negara-Negara Magribi.

CPUSTAL → serikat buruh (di Dunia Ketiga).

CRD → RCD.

critical minimum effort → *balanced growth*.

CSTD (*Committee on Science and Technology for Development*) Komite PBB untuk Pengetahuan dan Teknologi untuk Pembangunan.

Cuenca del Plata → Kelompok La Plata.

D

DAC (*Development Assistance Committee*) Komite Bantuan Pembangunan OECD, berdiri tahun 1961, kedudukan di Paris. 1979 beranggota 18 negara: AS, Australia, Austria, Belanda, Belgia, Denmark, Finlandia, Inggris, Italia, Jepang, Kanada, Norwegia, Perancis, Jerman, Selandia Baru, Swedia, Swiss, serta komisi-komisi ME. Negara-negara anggota diwakili oleh delegasi-delegasi, setiap tahun diadakan pemilihan ketua baru. *Tugas*: secara umum membantu negara berkembang, dan secara khusus: a. menyusun statistik yang rinci (luas bantuan, bantuan netto, persyaratan kredit pemerintah, utang, dan beban utang negara berkembang); b. pengolahan dasar-dasar teori dan politik pembangunan untuk menguji program tahunan negara-negara anggota menurut tinggi bantuan, maksud, manfaat (\rightarrow evaluasi); c. pengolahan saran, penetapan ukuran, definisi, dan strategi yang dapat menjadi orientasi politik bantuan pembangunan dari negara industri; d. publikasi laporan-laporan tahunan. Konsep pembangunan DAC sejak pertengahan tahun '70-an berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar. Negara-negara anggota DAC sepakat mengevaluasi hasil-hasil

politik pembangunannya dalam pengujian DAC menurut kriteria-kriteria yang mereka olah bersama setiap dua tahun sekali. Selain itu sejak 1981 setiap tahun dalam *joint review* dilakukan pengujian bersama bantuan dari semua anggota DAC, yang hasilnya dipublikasi dalam Laporan Tahunan DAC. Pengujian DAC tidak saja memberikan sebuah gambar yang lebih jelas mengenai bantuan pembangunan, melainkan juga memungkinkan perbandingan bantuan dari masing-masing negara.

Tabel 2 memberikan beberapa kriteria penting untuk perbandingan demikian.

Penilaian kerja sama bantuan sebuah negara meliputi ukuran absolut bantuan pembangunan pemerintah (ODA), dan hubungan antara bantuan dengan kekuatan ekonomi negara pemberi. Anggota-anggota DAC menetapkan target untuk memberikan bantuan, yaitu paling sedikit 0,7% pendapatan nasional untuk ODA. Target ini hanya diraih oleh negara-negara kreditor kecil, terutama dari Skandinavia. Nilai apa yang dimiliki suatu kerja sama ekonomi dalam politik sebuah negara, dapat diperkirakan secara umum dari

Tabel 2: Beberapa kriteria terpilih DAC untuk pengujian bantuan pembangunan pemerintah negara-negara anggota DAC

	Netto ODA						ODA ke LLDCs dlm. % PNB			ODA dlm. % (%/tahun) pengeluaran negara			rat (
	dlm. juta US\$			dlm. % PNB									
	1980	1985	1987	1980/81	1985	1987	1980	1985/86	1986/87	1980	1985	1987	
Australia	667	749	627	0,44	0,48	0,33	0,06	0,08	0,06	1,5	1,5	1,3	
Austria	178	248	196	0,28	0,38	0,17	0,01	0,03	0,03	0,4	0,4	0,3	
Belgia	585	440	689	0,45	0,55	0,49	0,12	0,18	0,13	1,6	1,4	2,0	
Kanada	1075	1631	1885	0,43	0,49	0,47	0,11	0,14	0,13	2,5	2,0	2,1	
Denmark	481	440	859	0,74	0,80	0,88	0,27	0,37	0,31	2,0	2,4	2,9	
Finlandia	110	211	433	0,24	0,40	0,50	0,08	0,16	0,16	0,8	1,4	1,9	
Perancis	4162	3995	6525	0,67	0,78	0,74	0,09	0,17	0,13	3,0	2,9	3,2	
Jerman	3567	2942	4390	0,47	0,47	0,39	0,12	0,14	0,10	2,5	2,6	2,6	
Irlandia	30	39	51	0,16	0,24	0,20	—	0,12	0,08	0,4	0,6	0,5	
Italia	683	1098	2615	0,18	0,26	0,35	0,06	0,18	0,16	0,6	1,0	1,1	
Jepang	3353	3797	7454	0,30	0,29	0,31	0,08	0,05	0,07	0,8	1,1	1,2	

	Bantuan lepas dim. % ODA ^a	ODA multilateral elemen tunjangan seluruh				Jumlah ^d (% PNB)			IDA, IFAD & UNDP (% PNB)		ODA dir
		Seluruh ODA ^b		ODA ke LLCs ^c							
		1987	1980	1986/87	1980	1986/87	1980	1985/86	1986/87	1985/86	1986/87
Australia	65,3	100,0	100,0	100,0	100,0	0,13	0,14	0,09	0,06	0,03	
Austria	—	(70,4)	(79,6)	(100,0)	(100,0)	0,04	0,08	0,05	0,05	0,04	
Belgia	—	98,8	83,3	97,8	92,0	0,04	0,10	0,10	0,06	0,07	
Kanada	—	97,9	99,9	100,0	100,0	0,16	0,19	0,17	0,08	0,07	
Denmark	78,5	97,3	98,5	96,0	100,0	0,28	0,35	0,36	0,12	0,14	
Finlandia	58,3	97,5	98,3	100,0	99,9	0,09	0,17	0,19	0,06	0,06	
Perancis	—	90,0	78,2	—	87,6	0,05	0,08	0,08	0,05	0,05	1
Jerman	67,0	89,3	87,2	100,0	99,3	0,09	0,08	0,07	0,05	0,04	1
Irlandia	—	—	(100,0)	88,0	(100,0)	—	0,07	0,06	0,04	0,04	
Italia	38,2	99,6	93,4	88,6	97,3	0,10	0,08	0,09	0,05	0,06	
Jepang	—	77,7	62,4	(80,5)	86,2	0,13	0,09	0,09	0,05	0,05	1
Belanda	59,9	92,5	96,1	99,8	99,3	0,18	0,24	0,24	0,13	0,14	

pangsa ODA pada pengeluaran keseluruhan negara, serta pada perubahan jumlah dan struktur ODA (misalnya berhubungan dengan pertukaran pemerintahan).

Penting untuk penilaian politik bantuan pembangunan sebuah negara adalah sejauh mana bantuan diberikan kepada negara berkembang yang paling membutuhkan (*LLDC). Selanjutnya ada kriteria-kriteria seperti pangsa bantuan yang tidak mengikat pada ODA keseluruhan dan pada tingginya *grant element* (keduanya perlu sama besar). Dimensi perbandingan selanjutnya adalah berapa banyak pemberi kredit memberikan bantuan kerja sama pembangunan (ODA) melalui organisasi-organisasi internasional (misalnya IFAD, *UNDP, kelompok Bank Dunia [terutama IDA], Bank Pembangunan Regional), sejauh mana politik bantuan pembangunannya berorientasi bilateral.

Alamat: DAC, 2, Rue André Pascal, F-75, Paris 16e, France.

dn/bt

daerah jajahan → koloni.

daerah mandat → daerah yang bergantung dari luar.

daerah yang bergantung dari luar Negara atau kawasan yang secara politik bergantung dari luar dan berada di bawah kekuasaan asing, atau otonominya dibatasi melalui mandat organisasi-organisasi internasional (Liga Bangsa-Bangsa, PBB) atau mandat yang mereka berikan. Daerah yang bergantung dari luar merupakan definisi hukum internasional yang dipakai terutama oleh PBB (Piagam Prinsip Pernyataan Pemerintahan Sendiri, Kewajiban semua negara untuk memberikan laporan teratur mengenai situasi ekonomi dan sosial

dari daerah yang bergantung padanya). Keberhasilan perjuangan membebaskan diri oleh bangsa-bangsa yang berada di bawah penguasaan asing dan penentuan diri sendiri, menyebabkan jumlah daerah yang bergantung dari luar sejak awal dekolonisasi berkurang drastis. dn

Dahomay → Benin.

Dana Bersama Elemen program bahan mentah terintegrasi untuk membiayai Perjanjian Bahan Mentah serta *buffer stock* untuk bahan mentah yang direncanakan. Bertolak dari keputusan-keputusan UNCTAD IV yang tetap menjadi tema perdebatan antara negara berkembang dan negara industri, kedua kelompok dalam persiapan UNCTAD Maret 1979 sepakat dalam hal elemen-elemen dasar Dana Bersama. Dana Bersama akan tetap menjadi sarana pembiayaan murni dan membiayai usaha-usaha yang tercantum dalam Perjanjian Bahan Mentah yang terpisah. Dana Bersama akan mempunyai dua saluran, yaitu saluran pertama membiayai *buffer stock*, saluran kedua membiayai usaha-usaha yang berkaitan dengan politik harga bahan mentah dengan menguntungkan negara-negara yang lebih miskin (misalnya penelitian dan pengembangan, peningkatan produksi, bantuan untuk menjalankan diversifikasi dan pemasaran, dsb.). Modal Dana Bersama sendiri berjumlah 750 juta US\$; 400 juta US\$ untuk saluran pertama dan 350 juta US\$ untuk saluran kedua. Dana dari Dana Bersama sebagian besar berasal dari negara industri (saluran pertama: setiap negara yang ikut serta 1 juta US\$ dan 320 juta US\$ berasal dari

negara industri 68%, negara berkembang 10%, negara-negara sosialis 17%, Cina 5%; saluran kedua: 1/3 langsung dari anggota UNCTAD, 4/5 dari sumbangan). Dana Bersama dipimpin oleh sebuah Komisi Eksekutif yang terdiri atas 28 negara, dengan seorang direktur di puncaknya. Hak suara dalam komisi tidak berdasarkan pangsa modalnya, melainkan terbagi sebagai berikut. Negara berkembang 47%, negara industri Barat 42%, negara-negara sosialis 8%, dan Cina 3%. Keputusan-keputusan penting (perubahan anggaran dasar, keputusan yang menyangkut keuangan) hanya dilakukan dengan mayoritas 2/3 suara.

Kesepakatan resmi mengenai Dana Bersama dicapai Juni 1980 di Jenewa. Perjanjian ini mulai berlaku jika telah ditandatangani paling sedikit oleh 90 negara anggota UNCTAD dan 2/3 iuran langsung telah masuk. Waktu yang telah ditetapkan (31 Maret 1982) diundur beberapa kali. Pada UNCTAD VII tahun 1987 dengan penandatanganan Uni Soviet dan beberapa negara lain, terlihat Dana Bersama akan mulai dapat berlaku. Tetap menjadi masalah adalah Perjanjian Bahan Mentah yang perlu disepakati secara terpisah, dapat masuk sendiri ke Dana Bersama. Jumlah di tahun-tahun terakhir lebih banyak menurun daripada meningkat. Masih menjadi pertanyaan, apakah perjanjian yang kaya (misalnya tembaga) dapat menunjang perjanjian yang miskin (misalnya serat yute dan teh). 1982 hanya empat yang berfungsi, yaitu timah, karet, kakao, dan gula. Sementara itu, (1980-1982) bahan-

bahan mentah itu mengalami kejatuhan harga yang besar. Perjanjian karet alam internasional yang berlaku mulai April 1982 dimasukkan sebagai hal pertama ke Dana Bersama. Pembelian karet untuk gudang keseimbangan hanya berdampak sedikit menaikkan harga.

Kepustakaan: J. Betz, "Der gemeinsame Rohstoff-Fonds, ein marktwirtschaftliches Instrument", dlm.: *VRUE* 1/1979, hlm. 25 dst. **dn**
Dana Eropa untuk Pembangunan
→ EDF.

Dana Internasional untuk Pembangunan Pertanian → IFAD.

Dana Moneter Internasional → IMF.

Dana OPEC untuk Pembangunan Internasional Institusi bantuan pembangunan pemerintah terpenting dari OPEC kepada lembaga-lembaga multilateral. Berdiri tahun 1976 dengan modal awal sebesar 800 juta US\$. Sejak itu, modal awal sudah dua kali naik. Bantuan yang diberikan sampai awal tahun 1985 berjumlah sekitar 3 miliar US\$ untuk 82 negara berkembang dan organisasi internasional dalam bentuk kredit ODA dan *grants*. Pembayaran netto tahunan dari Dana OPEC ini tahun 1982 mencapai puncaknya, yaitu 268,4 juta US\$, kemudian turun menjadi 45,3 juta US\$ (1985), dan 16,7 juta US\$ (1986), akibat penurunan pendapatan dari ekspor minyak.

Kepustakaan: J.F.I. Shihata, *Die Organisation der Erdöl-Exportländer als Gruppe von Geberländern*, dlm.: EA 36 (1981), hlm. 129 dst.; OECD, *Leistungen der OPEC-Länder an die Staaten der Dritten Welt*, dlm.: HIZ III D, 10, 20 (Juli) 1988. **dn**

Dana PBB untuk Kependudukan
→ UNFPA.

Dana PBB untuk Lingkungan → UNEF.

Dana PBB untuk Modal Pembangunan → UNCDF.

DARS → OAU, Sahara Barat.

Dasawarsa Kultur Dunia Dasawarsa Dunia untuk Pembangunan Kultural dicanangkan UNESCO untuk kurun waktu tahun 1988–1997.

Tujuan: mengakui dimensi-dimensi kultural dalam setiap pembangunan, penguatan, dan perkayaan identitas kultural; partisipasi lebih luas (semua lapisan penduduk) pada kehidupan kultural; kerja sama kultural internasional. Terutama dalam kerja sama dengan NGO dan PBB; UNESCO ingin mengisi kerangka tujuan ini dengan proyek-proyek konkret (misalnya menyelamatkan bahasa-bahasa atau barang-barang kultur yang terancam punah; peningkatan pengetahuan mengenai kultur asing). **mik dasawarsa pembangunan** Periode 10 tahun yang ditetapkan PBB untuk strategi dasawarsa berisi tujuan-tujuan global untuk pembangunan negara berkembang dalam bentuk sebuah katalog dengan data-data kuantitas. Dasawarsa Pembangunan I dicanangkan tahun 1961, yang kedua meliputi tahun '70-an, "Strategi Pembangunan Internasional untuk Dasawarsa Pembangunan III dari PBB" diolah dalam Sidang Khusus PBB Agustus/September 1980, disahkan Desember 1980 dan mulai berlaku 1 Januari 1980.

Tujuan global Dasawarsa Pembangunan I berbunyi: pertumbuhan PNB tahunan 5%, pendapatan per kapita 3%, produksi industri diharapkan tumbuh 8,5%/tahun, pertanian tumbuh 4%/tahun; *terms of trade*

negara berkembang diharapkan membaik 10%. Dalam hal pertumbuhan ekonomi, target untuk Dasawarsa Pembangunan II ditingkatkan menjadi pertumbuhan PNB 6%/tahun dan pendapatan per kapita 3,5%/tahun. Secara sektoral diharapkan produksi industri naik 8%/tahun, produksi pertanian 4%/tahun, dan perdagangan 7%/tahun (ekspor agak lebih banyak, impor lebih sedikit). Kuota tabungan internal negara berkembang diharapkan naik 0,5%/tahun; bantuan pembangunan pemerintah dari negara industri ke negara berkembang diharapkan mencapai 0,7% PNB mereka.

Kedua dasawarsa pembangunan ini tidak mencapai tujuan yang diharapkan (terutama di bidang pertumbuhan PNB dan sektor industri). Pengalaman negatif dari Dasawarsa Pembangunan I diperlihatkan oleh Laporan Pearson dan Laporan Jackson. Laporan Brandt dapat dianggap sebagai evaluasi sementara untuk Dasawarsa Pembangunan II.

Makna tujuan-tujuan yang dipropagandakan untuk dasawarsa pembangunan hanya berkaitan dengan pemasokan kriteria-kriteria penilaian sebagai orientasi usaha-usaha pembangunan nasional dan internasional. Juga layak mendapat kritik bahwa ukuran-ukuran strategi pembangunan ini tidak dapat berfungsi hanya dengan memberikan target angka-angka. Selain itu, target angka-angka mengabaikan sumbangan dari negara berkembang sendiri dalam bentuk pelaksanaan reformasi-reformasi struktural (reformasi pertanian, pemerataan pendapatan). Memasukkan kebutuhan dasar sebagai strategi pem-

bangunan yang baru di pertengahan tahun '70-an, memperlihatkan semipitnya strategi dasawarsa tersebut serta perlunya penentuan pendekatan-pendekatan baru selama kelangsungan sebuah dasawarsa pembangunan. Reorientasi baru target angka-angka Dasawarsa Pembangunan III selama belum ada dalam target angka-angka sebelumnya—seperti pertumbuhan ekonomi 7%, peningkatan produksi pertanian 4%, produksi industri 9%—adalah dengan memasukkan ukuran-ukuran sosial yang dapat ditentukan, terutama pengurangan angka kematian anak-anak, peningkatan tingkat harapan hidup, perbaikan tempat tinggal, pendidikan, air minum, serta memerangi kurang makan dan kelaparan. Krisis yang terjadi di awal Dasawarsa Pembangunan III (penurunan volume perdagangan dan investasi, utang, pengangguran), tidak lama kemudian menyebabkan tujuan-tujuan tersebut menjadi tidak realistis.

dn

DCC → politik bantuan pembangunan AS.

Deklarasi Arusha 1. Merupakan pernyataan program Presiden Tanzania, Nyerere, mengenai landasan *ujamaa* dan *self-reliance* dari jalan pembangunan Tanzania menuju sosialisme (1967).

2. Pernyataan dan program aksi Kelompok 77 Februari 1979: a. peningkatan perdagangan antarnegara berkembang dan negara dengan perdagangan luar negerinya berada di tangan negara untuk menguatkan posisi tawar negara berkembang; b. perjanjian mengenai kerja sama antarnegara berkembang serta pendirian

perusahaan dagang multilateral dan perusahaan produksi untuk menghadapi perusahaan transnasional dari negara industri (penyingkiran suatu kekuasaan tandingan di Dunia Ketiga); c. penguatan UNCTAD sebagai instrumen pokok dalam perundingan internasional mengenai perdagangan dan pembangunan, terutama pembangunan sebuah tata ekonomi dunia baru; d. tuntutan ke negara industri, terutama ke AS, Jepang, dan Jerman agar memenuhi aturan pokok PBB mengenai bantuan pembangunan: 0,7% PNB dari dana pemerintah; e. peningkatan akses yang lebih baik untuk produk negara berkembang ke pasar-pasar negara industri.

dn

Deklarasi Bern Semula merupakan nama sebuah manifesto politik terhadap politik bantuan pembangunan Swiss yang ditulis tahun 1968 atas inisiatif teolog-teolog Protestan dan ditandatangani oleh banyak orang, dengan kewajiban bersedia menyisihkan 1%–3% pendapatan selama tiga tahun atau lebih untuk proyek-proyek pembangunan. Dari sini kemudian terbentuk organisasi dengan nama sama, mencakup seluruh Swiss, bebas dan tidak terikat partai politik tertentu. Tujuannya adalah membuka hubungan melalui kegiatan pendidikan mengenai politik pembangunan dan secara sukarela melakukan aksi politik dan sosial. Diutamakan juga kritik terhadap hubungan kekuasaan Swiss ke Dunia Ketiga. Bidang kerja adalah politik ekonomi, pangan dan pertanian, kesehatan dan obat-obatan, serta kultur. Deklarasi Bern membiayai diri dari iuran anggota

(tahun 1988 sekitar 18.000 anggota dan langganan buletin), sumbangan, dan penjualan material. Deklarasi Bern memiliki pendekatan politik kritis-emansipatoris serta memperjuangkan pembebasan dari penindasan dan ketergantungan. Mempunyai hubungan yang tegang dengan politik pembangunan pemerintah Swiss.

Alamat: Quellenstr. 25, CH-8005 Zürich, Swiss.

bg

Deklarasi Cocoyoc Dikemukakan oleh sebuah gremium ilmuwan dalam simposium UNEP/UNCTAD di Cocoyoc (Meksiko) Oktober 1974 – sebagai dokumen pembangunan alternatif tertua—memiliki arti mendasar untuk sebuah orientasi baru politik pembangunan kepada pemenuhan kebutuhan dasar. Kutipan: "Pertama-tama kita harus mendefinisikan, setelah itu sasaran dan tujuan pembangunan. Masalah penting adalah mengembangkan manusia, bukan benda. Manusia memiliki kebutuhan dasar tertentu, yaitu pangan, tempat tinggal, pakaian, kesehatan, dan pendidikan. Setiap proses pertumbuhan yang tidak mengantar pada pemenuhan kebutuhan ini—atau malah mengganggu—merupakan sebuah lawan dari pemikiran pembangunan. Kita sekarang berada dalam sebuah tahap di mana tujuan utama adalah sejauh mana pembangunan dapat memenuhi kebutuhan elementer kelompok-kelompok miskin dalam masyarakat, jumlahnya meliputi 40% dari penduduk itu. Tujuan utama pertumbuhan ekonomi seharusnya adalah menjamin perbaikan situasi hidup kelompok-kelompok ini. Sebuah proses pertumbuhan yang hanya bermanfaat untuk minoritas paling kaya serta ma-

kin membesarkan kesenjangan antarnegara dan internegara, bukan merupakan pembangunan. Ini lebih merupakan pengisapan.

... Harapan bahwa pertumbuhan ekonomi yang cepat bisa 'merembes' dengan menguntungkan massa rakyat, terbukti merupakan ilusi. Oleh karena itu, kita harus membuang pikiran: pertumbuhan dulu, kemudian baru keadilan dalam pembagian manfaat. Pembangunan jangan hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan dasar Pembangunan juga berarti kebebasan berpendapat dan penerusannya secara bebas Ada sebuah kebutuhan sosial yang mendalam untuk ikut bekerja dalam membentuk landasan eksistensinya sendiri dan menyumbangkan sesuatu untuk membentuk masa depan dunia. Terutama sekali pembangunan berarti hak atas kerja, yang kami maksudkan tidak hanya mendapatkan sesuap nasi, melainkan mengejawantahkan diri dalam kerja, hak untuk tidak dikeluarkan oleh proses produksi yang hanya mempergunakan manusia sebagai alat" (dikutip dari *Entwicklungspolitik, Materialien*, no. 49, BMZ, Bonn 1975).

dn

Deklarasi Haager → ekologi.

Deklarasi Rio Deklarasi yang dikeluarkan dalam Konferensi Lingkungan Dunia, Juni 1992 di Rio de Janeiro, Brasilia, mencakup 27 prinsip yang melihat adanya kaitan erat antara manusia dan pembangunan. Inti prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut:

Prinsip 1: Manusia berada di tengah-tengah usaha untuk sebuah pembangunan. Bagi mereka tersedia

kehidupan yang sehat dan produktif, seirama dengan alam.

Prinsip 2: Sesuai dengan piagam-piagam yang dikeluarkan oleh PBB dan prinsip-prinsip hukum internasional, negara-negara memiliki kedaulatan hak untuk memanfaatkan sumber dayanya sesuai dengan politik pembangunan dan politik lingkungan yang dibuat sendiri. Mereka harus menjamin bahwa kegiatan-kegiatan yang berlangsung di dalam wilayah keberlakuan undang-undangnya ... tidak merusak lingkungan negara atau wilayah lain

Prinsip 3: Hak untuk membangun harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga kebutuhan akan pembangunan dan lingkungan sesuai kepentingan generasi masa kini dan masa akan datang.

Prinsip 4: Untuk mencapai pembangunan yang diinginkan, perlindungan lingkungan perlu dijadikan bagian terintegral dari proses pembangunan dan tidak boleh dilakukan secara terpisah.

Prinsip 5: Semua negara dan bangsa perlu bekerja sama dalam tugas penting menghapuskan kemiskinan. Ini merupakan persyaratan yang tidak dapat dielakkan untuk mencapai pembangunan yang diinginkan.

Prinsip 6: Hubungan dan kebutuhan khusus negara berkembang, terutama negara-negara yang sangat kurang berkembang dan paling peka terhadap masalah kerusakan lingkungan, perlu mendapatkan prioritas

Prinsip 7: Negara-negara perlu bekerja sama dengan jiwa kemitraan dunia Negara maju mengenali tanggung jawab yang dipikul terha-

dap keinginan internasional akan sebuah pembangunan—berkaitan dengan beban lingkungan yang disebabkan masyarakatnya, serta berhubungan dengan teknologi dan sumber daya keuangannya.

Prinsip 8: Untuk mencapai sebuah pembangunan dan standar hidup yang lebih tinggi, semua negara perlu mengurangi dan menghapus metode produksi yang tidak ramah terhadap lingkungan dan bentuk konsumsi, serta menunjang politik pendudukan yang sesuai.

Prinsip 9: Negara-negara perlu bekerja sama untuk menguatkan kemampuan yang sudah ada untuk mencapai pembangunan yang diinginkan. Hal ini bisa dilakukan dengan meningkatkan ilmu pengetahuan melalui pertukaran pengetahuan ilmu dan teknologi serta memungkinkan pengembangan, penyesuaian, perluasan, dan pengalihan terutama teknologi-teknologi baru.

Prinsip 10: Masalah perlindungan lingkungan ditangani ... paling baik dengan keikutsertaan semua warga yang terkena. Di tingkat nasional, setiap orang bisa mendapatkan akses yang sesuai ke informasi lingkungan Setiap orang perlu mempunyai kemungkinan untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan. Negara perlu meningkatkan kesadaran masyarakat dan membuka peluang untuk keikutsertaan masyarakat dengan cara menyediakan informasi secara luas

Prinsip 11: Negara-negara perlu mengeluarkan undang-undang perlindungan lingkungan yang efektif.

Prinsip 12: Negara-negara perlu bekerja sama menunjang sebuah sistem ekonomi internasional yang terbuka menuju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di negara-negara. Oleh karena itu, kerusakan lingkungan perlu dihadapi dengan lebih baik. Usaha-usaha politik perdagangan yang baik untuk perlindungan lingkungan tidak boleh mencerminkan diskriminasi atau pembatasan tersembunyi dalam perdagangan internasional

Prinsip 13: Negara-negara perlu mengeluarkan undang-undang yang menghukum penyebab kerusakan lingkungan dan kerusakan ekologi lainnya, serta mengolah masalah ganti rugi bagi korban. Negara-negara perlu juga ... mengembangkan hukum internasional (yang sesuai) sebagai tambahan

Prinsip 14: Negara-negara perlu bekerja sama secara efektif untuk memberatkan atau menghindari pengembalian dan transfer usaha atau substansi yang menimbulkan kerusakan lingkungan yang berat atau dianggap berbahaya bagi kesehatan manusia.

Prinsip 15: Untuk melindungi lingkungan, prinsip prevensi perlu digunakan sesuai dengan kemungkinan yang dimiliki. Di mana ada ancaman kerusakan yang berat atau tidak dapat dibatalkan, kekurangan pengetahuan ilmiah tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk mengelakkan usaha-usaha yang memerlukan dana untuk menghindari kerusakan lingkungan.

Prinsip 16: Lembaga-lembaga pemerintah perlu ... menunjang inter-

nalisis ongkos kerusakan lingkungan dan penggunaan rangsangan ekonomi. Untuk itu, mereka perlu memakai prinsip penyebab

Prinsip 17: Perencanaan yang kemungkinan menimbulkan pengaruh negatif terhadap lingkungan dan keputusannya berada pada pemerintah, harus dilakukan penilaian mengenai pengaruh-pengaruh tersebut

Prinsip 18: Negara-negara perlu langsung memberitahukan negara lain mengenai bencana alam atau situasi darurat lainnya yang kemungkinan dapat menimbulkan kerusakan tiba-tiba pada lingkungan negara lain

Prinsip 19: Negara-negara perlu sebelumnya dan tepat waktu memberitahukan negara lain berkaitan dengan kegiatan yang mungkin melampaui batas wilayah negaranya dengan dampak negatif pada lingkungan

Prinsip 20: Perempuan mempunyai peran penting dalam manajemen dan pembangunan lingkungan. Keikutsertaan mereka secara penuh merupakan sebuah persyaratan yang tidak dapat dielakkan untuk pembangunan yang diinginkan.

Prinsip 21: Kreativitas, idealisme, dan keberanian remaja di dunia perlu dimobilisasi untuk memupuk kerja sama di seluruh dunia

Prinsip 22: Suku-suku asli dan masyarakatnya ... dengan pengetahuan dan tradisinya mempunyai peran penting dalam manajemen dan pembangunan lingkungan. Negara-negara perlu mengakui identitas, kultur, dan kepentingan mereka serta menunjangnya

Prinsip 23: Lingkungan dan sumber daya alam bangsa-bangsa yang ditindas, dikuasai atau diduduki, perlu mendapatkan perlindungan.

Prinsip 24: Perang ... bertentangan dengan sebuah pembangunan yang diinginkan. Oleh karena itu, negara-negara perlu menghormati hukum internasional yang digunakan untuk perlindungan lingkungan di masa konflik bersenjata

Prinsip 25: Perdamaian, pembangunan, dan perlindungan lingkungan saling bergantung satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan.

Prinsip 26: Negara-negara perlu menyelesaikan pertikaian mereka mengenai masalah lingkungan secara damai

Prinsip 27: Negara-negara dan bangsa-bangsa perlu bekerja secara terbuka dan dalam jiwa kemitraan untuk memenuhi prinsip-prinsip deklarasi ini untuk pembangunan selanjutnya.

Kepustakaan: *Die Rio - Deklaration: Recht auf ein produktives Leben im Einklang mit der Natur*, *Süddeutsche Zeitung*, 15 Juni 1992, dlm. *BMZ-Spiegel der Presse*, 13/92, hlm. 397-398.

dis

Deklarasi Vancouver → HABI TAT.

dekolonisasi Sebuah proses historis penghapusan daerah-daerah kolonial Eropa dan pembebasan koloni-koloni setelah Perang Dunia II melalui perolehan kemerdekaan. PBB Desember 1960 mengeluarkan Deklarasi Pemberian Kemerdekaan kepada negara-negara dan bangsa-bangsa terjajah. Resolusi dekolonisasi tersebut menyatakan "pentingnya mengakhiri semua bentuk kolonialisme secara cepat dan tanpa syarat". Sebuah ter-

min untuk pelaksanaannya memang tidak ditetapkan, tetapi PBB melihat pelaksanaan penentuan diri sendiri sebagai salah satu tugas terpenting.

Momen-momen penting dalam proses dekolonisasi adalah India awal tahun 1947, Indonesia Desember 1949, Vietnam Juli 1954, ketika mereka meraih kemerdekaan sepenuhnya. Inggris, Belanda, dan Perancis mendapatkan pengalaman pahit ketika terpaksa harus melepaskan daerah-daerah jajahannya. Negara Afrika Hitam pertama yang merdeka adalah Ghana, bekas Pantai Emas, Maret 1957; dan Zaire, bekas Kongo-Belgia. Portugis yang otoriter paling lama berkuat mempertahankan daerah jajahnya di Afrika. Perang gerilya dalam gerakan pembebasan yang menggerogoti, akhirnya menyebabkan kejatuhan rezim. Dekolonisasi Sahara Barat jajahan Spanyol tahun 1975 mula-mula berakhir menyedihkan dengan aneksi daerah itu oleh negara-negara tetangganya. Dengan selesainya masalah Rhodesia/Zimbabwe—di sana proses dekolonisasi berusaha dimanipulasi dengan pembangunan pemerintah minoritas kulit putih—di awal tahun '80-an, proses dekolonisasi tersisa di beberapa daerah yang bergantung dari luar.

Kepustakaan: W.H. Morris-Jones/G. Fischer, *Decolonisation and After. The British and French Experience*, London 1980; C. Allen, *Decolonisation in Africa. Contemporary African Issues*, London and Basingstoke 1981. **dn**

demokratisasi/redemokratisasi Dalam bidang ilmu sistem-sistem politik dan perubahannya, demokratisasi merupakan peralihan sebuah negara, dari sebuah bentuk kekuasaan otoriter menjadi demokrasi pluralis-

tis; jika sebelumnya telah ada situasi demokratis dalam masa-masa otoriter sebuah negara, prosesnya disebut redemokratisasi. Dalam dasawarsa terakhir (tahun '70-an) proses (re-)demokratisasi di Dunia Ketiga berpusat terutama di Amerika Latin. Jika di pertengahan tahun '70-an Kosta Rika dan Venezuela telah termasuk sebagai negara demokrasi liberal, di awal tahun 1989 Paraguay sebagai negara terakhir yang membuka diri untuk demokratisasi. Di Asia proses demokratisasi terbatas di Filipina dan Korea Selatan. Pada awal tahun '90-an proses demokratisasi melanda benua Afrika. Tidak ada sebuah kesatuan model peralihan (transisi) ke demokrasi. Kelangsungan dan keberhasilan proses demokratisasi sangat bervariasi dan terlihat bergantung dari faktor-faktor jangka panjang, historis, dan struktural; lebih merupakan jangka pendek, situatif, dan prosesusual.

1. Faktor-faktor yang disebutkan pertama berkumpul dalam masalah tradisi politik sebuah negara dan menurut tipe rezim otoriter yang berkuasa ketika berlangsung proses demokratisasi tersebut. Jadi, untuk demokratisasi, sistem politik apa yang pernah dialami oleh sebuah negara, dan apakah pengalaman sejarah menyulitkan usaha-usaha demokratisasi (biasanya situasi pra-otoriter rumit secara politis dan penuh konflik) itu penting. Tipe rezim otoriter penting dalam menentukan bentuk peralihan. Untuk Amerika Latin dapat dibedakan antara rezim otoriter tradisional dan rezim otoriter baru. Dalam kelompok pertama terlihat bahwa dik-

tator-diktator *caudillo*, yaitu seorang diktator ditopang oleh angkatan bersenjata, berkuasa tanpa batas (misalnya Venezuela di bawah Perez Jimenez, Kolombia di bawah Rojas Pinilla, Peru di bawah Odria, Ekuador di bawah Velasco Ibarra), digantikan oleh sebuah demokrasi. Pada diktator-diktator patrimonial yang menarik elite militer dan sipil ke dalam sistem kekuasaannya, membangun etalase-etalase demokrasi dan mempertahankan kekuasaannya dengan bantuan represi, korupsi, dan manipulasi pemilihan (misalnya Nikaragua di bawah Somoza, Republik Dominika di bawah Trujillo, Paraguay di bawah Stroessner), peralihan ke bentuk kekuasaan lain biasanya lebih penuh kekerasan dan lebih revolusioner. Sebab, pengalaman demokratis tidak pernah dialami dan hampir tidak pernah diizinkan terjadi reformasi-reformasi. Tanda-tanda bersama kelompok kedua, yaitu rezim otoriter baru adalah perebutan kekuasaan oleh militer yang memiliki bayangan secara eksplisit mengenai realisasi sebuah tujuan politik (proyek, program). Untuk transisi penting, apa dan bagaimana rezim melembagakan dirinya, dan terutama apa dan dalam bentuk apa diizinkan dan dijalankan partisipasi oleh penduduk, kelompok-kelompok masyarakat, dan kekuatan-kekuatan politik. Di sini ada perbedaan antara rezim eksplisit yang sangat represif, membatasi partisipasi politik, menurunkan tingkat mobilisasi dan politisasi masyarakat (Argentina, Brasilia, Cile, Uruguay), serta rezim implisit yang melarang beberapa bentuk partisipasi (misalnya pemilihan) dan

berusaha mengembangkan bentuk baru (misalnya Peru).

Selain tipe rezim otoriter tersebut, untuk demokratisasi ada kekhususan lain pada masing-masing rezim, misalnya apakah partai, pemilihan, dan parlemen dapat dipertahankan dalam tahap otoriter tersebut; ini sebuah fakta peralihan damai dan bertahap ke demokrasi (Brasilia). Rotasi dalam kepresidenan (Brasilia, Argentina, Uruguay) juga berperan penting. Rotasi tercermin dalam perubahan-perubahan kekuasaan di dalam militer dan kelompok-kelompok yang menopang rezim (kemungkinan juga sebuah hubungan yang mengalami perubahan dari kelompok penunjang rezim terhadap masyarakat) dan memudahkan penyesuaian kepada tuntutan-tuntutan politik dalam transisi.

2. Faktor-faktor jangka pendek, situatif, dan prosedural dapat dibedakan dalam tiga kelompok, yaitu menyangkut situasi eksternal, intern rezim, dan oposisi. Dalam praktek, mereka berkombinasi. Ekstern adalah kekalahan militeris yang dampak internnya tidak dapat ditanggulangi rezim yang berkuasa (Argentina), atau tekanan ekstern umum, kira-kira dalam bentuk penarikan pengakuan internasional terus-menerus, penelanjangan-penelanjangan internasional (misalnya kecaman PBB, kampanye hak asasi manusia), atau melalui intervensi (misalnya AS di Karibia dan Amerika Tengah).

Variabel intern rezim termasuk hubungan antara komponen-komponen militer dan sipil dari sistem politik, serta struktur, contoh perilaku atau konflik yang bersangkutan de-

ngan kelompok-kelompok penunjang militer, terutama lembaga militer. Lalu, mulai terjadi destabilisasi rezim otoriter tipe baru jika koalisi kelompok yang menunjangnya mulai retak dan hancur, tanpa terbentuk koalisi baru atau bisa menstabilkan rezim kembali melalui sumber daya-sumber daya yang dimobilisasi baru (politik dan orang-orang baru yang mewakilinya). Dalam banyak kasus, peralihan kekuasaan merupakan akibat kehancuran koalisi (Ekuador, Peru), serta redemokratisasi yang dicanangkan justru gagal karena sumber daya-sumber daya yang dimobilisasi baru tersebut (Argentina, Uruguay). Penyebab kehancuran koalisi adalah perubahan struktur ekonomi dan sosial sebagai dampak politik rezim otoriter (Brasilia), kegagalan reformasi politik dengan dampaknya terhadap masyarakat dan politik (Ekuador, Peru), kegagalan mencapai target tujuan pembangunan, pupusnya kepercayaan, situasi ekonomi dalam dan luar negeri yang makin sulit (situasi umum Amerika Latin sejak awal tahun '80-an), serta makin tumbuhnya oposisi terhadap rezim. Ada dua momen tambahan yang menyangkut militer. Pertama, diambil risiko ongkos stabilisasi rezim (represi lebih keras) dengan mengorbankan demokratisasi. Kedua, dampak pertahanan kekuasaan terhadap lembaga sendiri (pertarungan kekuasaan intern). Kepentingan persatuan angkatan bersenjata kemungkinan bukan menjadi permasalahan dan jalan keluar demokratisasi, paling baik untuk mereka adalah jika ada jaminan bahwa militer akan dapat ikut menen-

tukan persyaratan-persyaratan demokratisasi dan bisa mendapatkan veto dalam demokrasi.

Oposisi intern terhadap rezim tidak berperan besar dalam rezim otoriter tipe baru. Tidak ada contoh di mana mereka berhasil memaksakan sebuah demokrasi. Meskipun dilakukan pakta-pakta demokrasi dengan partai-partai oposisi (kebanyakan tradisional), dalam proses peralihan hanya berbentuk perundingan-perundingan mengenai UUD. Perjanjian di antara partai-partai politik mengenai sebuah rencana politik di luar masa transisi, misalnya di Cile dengan tahap pendekatan, tidak pernah ada.

Dalam rezim otoriter tipe tradisional, seperti di Amerika Latin, Filipina, dan Korea Selatan, oposisi mempunyai peran penting dalam proses demokratisasi: dalam bentuk gerakan pembebasan nasional dan usaha mereka menggulingkan rezim otoriter (berhasil dilakukan di Nikaragua tahun 1979), dalam bentuk pakta implisit antara oposisi moderat dengan pemerintah AS mengenai pembubaran rezim otoriter dengan tujuan mencegah perkembangan sosial-revolusioner (El Salvador, Guatemala) dalam bentuk mobilisasi massa luas (Filipina, Korea Selatan). → rezim otoriter
Kepustakaan: K. Ziemer, *Demokratisierung in Westafrika?*, Paderborn 1984; M. Mols, *Demokratie in Lateinamerika*, Stuttgart, dll. 1985; F. Nuscheler (ed.), *Dritte Welt-Forschung. Entwicklungstheorie und Entwicklungspolitik*, Opladen 1985; H.-W. Krumwiede, "Militärherrschaft und (Re-)Demokratisierung in Zentralamerika", dlm.: *APuZ* 9/86, 1986, hlm. 17-29; F. Nuscheler (ed.), *Politikwissenschaftliche Entwicklungsländerforschung*, Darmstadt 1986; G.C. O'Donnell/P.C. Schmitter/L. Whitehead (ed.), *Transitions from Authoritarian Rule. Prospects for Democracy*, Baltimore/London

1986; D. Nohlen, "Mehr Demokratie in der Dritten Welt?", dlm. *APuZ* 25-26/88 (1988), hlm. 3-18; D. Nohlen/H. Barrios, "Redemokratisierung in Südamerika", dlm.: *APuZ* 4/89 (1989), hlm. 3-25.

dn
desarrollismo Strategi pembangunan dengan "pembangunan ke dalam" berusaha mengatasi *obstacles to development* intern. Elemen-elemen penting: industrialisasi substitusi impor, diferensiasi aparat produksi, pembentukan dunia usaha modern, tunjangan negara (infrastruktur, bantuan kredit), politik pemerataan, perluasan pasar dalam negeri, integrasi lapisan-lapisan sosial baru, menunjang ekspor. Dari modernisasi diharapkan sebuah pluralisme dan demokrasi yang makin tumbuh.

fn
desertifikasi Menurut UNCOD tahun 1977 di Nairobi desertifikasi adalah perluasan gurun pasir. Menurut perkiraan terdahulu, gurun Sahara di Afrika Utara antara tahun 1958 dan 1975 telah meluas sekitar 100 km ke arah selatan. Gambaran ini dibantah oleh banyak ilmuwan yang melihat a.l. di Zone Sahel bahwa yang terjadi bukanlah perluasan gurun, melainkan makin berkurangnya tumbuhan akibat memburuknya situasi tanah, sebagian disebabkan oleh manusia (peledakan penduduk, perluasan padang semak, dan pembabatan pohon-pohon a.l. untuk mendapatkan bahan bakar). **bh**

Development Committee (DC) Komisi Menteri yang dibentuk Oktober 1974 oleh Bank Dunia dan IMF atas inisiatif negara berkembang. Sejak tahun 1980 beranggota 22 orang: 11 negara industri, 11 negara berkembang, di antaranya 2 OPEC.

Tugas: memberikan laporan kepada Dewan Gubernur Bank Dunia

dan IMF mengenai masalah transfer sumber daya riil ke negara berkembang, konsultasi untuk mengolah usul-usul yang masuk. Titik berat tema di akhir tahun '80-an: masalah utang, penyesuaian struktur negara berkembang, Afrika sebelah selatan Sahara, pembiayaan bersama Bank Dunia/pemberi bilateral/bank-bank usaha.

dn development education → penelitian pendidikan.

Dewan Antarnegara dari Negara-Negara Pengekspor Tembaga → CIPEC.

Dewan Ekonomi dan Sosial Inter-amerika → CIES.

Dewan Ekonomi dan Sosial PBB → ECOSOC.

Dewan Gereja Dunia → WCC.

Dewan Negara-Negara Teluk → GCC.

Dewan Pangan Dunia → WFC.

Dewan Persatuan Ekonomi Arab → CAEU.

Dewan Pertahanan Amerika Tengah CONDECA.

Dialog Arab-Eropa → Liga Arab.

dinas pembangunan Organisasi untuk relawan dari negara industri dan negara berkembang yang menolak keuntungan materi bekerja sebagai relawan pembangunan dalam proyek-proyek bantuan pembangunan untuk waktu tertentu, paling sedikit setahun, dan mengaitkan antara bantuan dan belajar. Dinas Pembangunan ini merupakan elemen bantuan personal yang dimasukkan dalam spektrum luas politik bantuan pembangunan (bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, bantuan teknik, dsb.). Dinas Pembangunan dapat di-

bedakan menurut organisasi penunjang dan asal negara menurut ideologi yang dianut, peran profesi, bersifat pribadi atau resmi, dsb. Jelas bahwa pribadi dan NGO untuk dinas pembangunan di negara industri biasanya dibiayai dari uang masyarakat. Di Jerman, gereja dan organisasi nonpemerintah lainnya serta negara mempunyai dinas pembangunan masing-masing. *Peace Corps* (berdiri tahun 1961) dari AS dan UNDP yang merupakan anggota Dinas Sukarelawan PBB, yaitu UNV (*UN-Volunteers*), paling dikenal di dunia internasional.

Organisasi wadah untuk relawan Eropa adalah *Regional Conference on the International Voluntary Service* (RCIVS).

Alamat: Thomas-Mann-Str. 52, 5300 Bonn 1, Jerman.

Kepustakaan: I. Pinkham, *Service for Development*, Washington 1978.

dn disembodied technology → alih teknologi.

diskriminasi Pembatasan dalam hubungan ekonomi antarnegara dan antarkelompok negara (antara negara berkembang dan negara industri). Misalnya dalam bentuk pembangunan bea, pembatasan kuota, pembatasan perdagangan dan kurs tukar, pencegahan mobilitas faktor-faktor produksi (modal, kerja), politik keuangan internasional, dsb. Liberalisasi perdagangan (putaran-putaran → GATT), proses integrasi (di antara negara berkembang) dan perjanjian asosiasi (→ Perjanjian Lome) berusaha mengurangi dan menghapus diskriminasi.

dn disosiasi Atau pemisahan, merupakan tuntutan yang keluar dari diskusi-

diskusi politik pembangunan di tahun '70-an, terutama oleh D. Senghaas. Pemisahan negara berkembang dari pasar dunia dengan tujuan membangun ekonomi dan masyarakat yang mandiri dan mampu berfungsi, ditopang oleh sumber daya dan kebutuhan sendiri. Teori disosiasi berkaitan dengan teori E. List untuk membantu ekonomi Eropa Daratan di pertengahan abad ke-19 yang sedang terpincang-pincang berlari mengikuti ekonomi Inggris. Ketika itu ekonomi Inggris mengikuti prinsip teori klasik liberal mengenai teori proteksionis "produksi tenaga-tenaga produktif" dalam memanfaatkan potensi pembangunan sendiri. Tuntutan ini juga mengambil pengalaman historis dari proses pembangunan negara industri sekarang dan pembangunan sosialis beberapa negara (Republik Rakyat Cina, Albania, Korea Utara) untuk proses pembangunan negara berkembang dan memformulasikan untuk mayoritas di antara mereka. Konsekuensi dari strategi pembangunan demikian adalah pemutusan hubungan dengan pembagian kerja internasional berdasarkan model ekonomi ekspor, pemutusan hubungan dengan industrialisasi menurut model substitusi impor. Pemutusan hubungan ini hanya untuk sementara, sampai kekurangan-kekurangan struktural yang sedang dialami oleh perekonomian nasional negara berkembang (melalui strategi pembangunan otosentris) dan dampak-dampak sosial (pengangguran, ketimpangan yang mencolok dalam distribusi pendapatan, miskin, utang, dsb.) sudah diatasi sedemikian rupa sehingga negara berkembang

bisa mempunyai hak yang sama di pasar dunia dan bisa memiliki manfaat yang sama dalam berpartisipasi pada doktrin keuntungan ongkos komparatif.

Model disosiasi merupakan model tandingan terhadap model pembangunan integrasi pasar dan asosiasi yang sedang berlaku. Teori ini menghadapi kritik (lihat: Matthies, 1980) dan pengalaman yang ada dari NIB.

Kepustakaan: D. Senghaas, *Weltwirtschaft und Entwicklungspolitik, Plädoyer für Dissoziation*, Frankfurt 1977; V. Matthies, *Neue Weltwirtschaftsordnung*, Opladen 1980.

dn
distribusi pendapatan Setelah kedua dasawarsa pembangunan pertama ditandai oleh strategi pertumbuhan ekonomi (→ teori dan strategi pertumbuhan), tahun '70-an distribusi pertumbuhan tersebut makin dipertanyakan. Di banyak negara berkembang terlihat bahwa meskipun terjadi tingkat pertumbuhan, masalah kemiskinan makin meningkat. Pertumbuhan pendapatan hampir semua secara eksklusif dinikmati elite sosio-ekonomi, artinya oleh tingkat atas 20%-40% penerima pendapatan. Teori *trickle down* yang semestinya dapat menaikkan posisi pendapatan 40% lapisan bawah, tidak terjadi. Bank Dunia (1980) memperkirakan bahwa jumlah manusia yang hidup dalam situasi miskin absolut 800 juta.

Gambar khas yang ada di negara berkembang mengenai distribusi pendapatan pribadi, terlihat berikut ini.

Rumah tangga (terbagi lima)	1	2	3	4	5
Bagian pendapatan (dalam %)	5	7	13	22	53

Rumah tangga dibagi dalam 5 bagian, artinya dalam 5 kelompok, masing-masing merupakan 20% dari penduduk keseluruhan. Kelompok terbawah dari penerima pendapatan (bagian pertama) menerima 5% dari pendapatan keseluruhan, sedangkan 20% teratas (bagian kelima) menerima lebih dari sepuluh kali lipat, yaitu 53% dari pendapatan keseluruhan. 40% kelompok atas bersamasama mendapatkan 75% dari keseluruhan pendapatan, sedangkan 40% kelompok bawah hanya 12%. Kelompok terakhir ini merupakan kelompok miskin.

Kelompok miskin ini terbagi tidak merata di negara berkembang: 3/4 orang miskin hidup di desa sebagai tani kecil, tani gurem, dan tani submarginal yang memproduksi. 1/4 orang miskin hidup di perkotaan sebagai buruh terampil dan buruh yang tidak mendapatkan kerja, sebagai penjual, penganggur, termasuk orang jompo dan sakit tanpa ada jaminan sosial. Penyebab utama rendahnya pendapatan kelompok miskin pedesaan adalah situasi pemilikan tanah yang tidak seimbang, buruknya kualitas tanah yang mereka olah, serta kurangnya kemungkinan pemasaran dan akses ke kredit. Secara politis distribusi pendapatan berada dalam reformasi pertanian yang menyeluruh, berkaitan dengan perubahan mendasar kerangka persyaratan yang telah disebutkan untuk menyingkirkan kemiskinan di pedesaan. Kelompok miskin di kota disebabkan oleh kurangnya kesempatan kerja dan rendahnya pendidikan.

Tahun 1973 Bank Dunia berdasarkan analisis ini mempostulasikan sebuah strategi *redistribution with growth*, tetap berlandaskan pertumbuhan ekonomi, tetapi ingin mengalirkan pertumbuhan lebih banyak ke kelompok miskin. Menurut strategi ini, investasi tambahan akan dibagikan sama rata antara sektor modern dan sektor tradisional, menunjang reformasi pertanian, dan membiayai usaha-usaha infrastruktur.

ILO mengembangkan kesempatan kerja sebagai fokus strategi pembangunan melalui teknologi tepat guna dan produksi yang padat karya, agar dapat memperbaiki distribusi pendapatan (*employment and redistribution*). Suatu peningkatan pendapatan kelompok penduduk terbawah akan meningkatkan permintaan barang untuk → kebutuhan dasar. Produksi barang-barang ini khas dilakukan secara padat karya dan sedikit modal.

Bank Dunia dan ILO dalam sebuah proyek empiris-statistik bersama menyepakati sebuah kesatuan definisi pendapatan pribadi, yaitu pendapatan keseluruhan yang tersedia untuk rumah tangga pribadi terdiri atas upah dan gaji, pendapatan netto dari profesi, pendapatan dari investasi pribadi termasuk pendapatan natural buatan sendiri dan rumah sendiri yang dihuni sendiri, serta transfer asuransi sosial dan pribadi dikurangi pajak langsung. Definisi ini hanya memenuhi sebagian dari kemakmuran sosial yang dihasilkan dari konsumsi barang dan jasa, biasanya dijual dalam pasar. Menurut kesimpulan empiris data-data ini, distribusi penda-

patan pribadi dapat diukur dengan berbagai metode (\rightarrow Kurva Lorenz, \rightarrow koefisien Gini). Selain distribusi pendapatan pribadi yang dapat dihitung untuk perekonomian nasional, untuk setiap daerah maupun sektor, masih terdapat distribusi pendapatan fungsional yang mengukur pangsa-pangsa pendapatan setiap faktor produksi pada hasil produksi (kerja, modal, tanah).

Hipotesis U dari Kuznets yang terkenal, menjelaskan perubahan-perubahan dalam rangka proses pembangunan (diukur dari pendapatan per kapita rata-rata), yaitu dalam proses pembangunan, mula-mula distribusi pendapatan menajam agar pada tingkat pendapatan per kapita rata-rata yang lebih tinggi menjadi seimbang kembali.

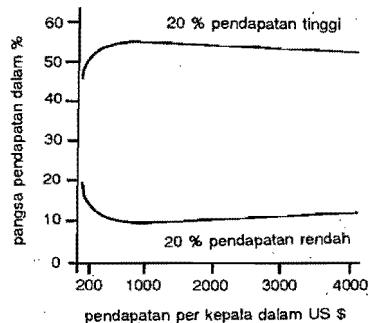
Dasar proses tersebut adalah dalam masyarakat tradisional distribusi pendapatan pada produktivitas yang kecil, relatif egaliter (sama). Dalam kelangsungan industrialisasi, terbentuk sebuah sektor modern dengan produktivitas dan pendapatan yang terikat padanya lebih tinggi. Oleh karena itu, pendapatan keseluruhan masyarakat menjadi tidak sama. Baru pada sebuah tingkat perkembangan yang lebih tinggi, jika *spill-over-effect* yang muncul dari sektor industri meningkatkan kesempatan kerja, distribusi pendapatan cenderung mendekati nilai awal kembali.

Wakil-wakil teori pertumbuhan melihat sebuah konflik antara sasaran distribusi dan pertumbuhan di negara berkembang, yaitu ketidakseimbangan distribusi pendapatan merupakan syarat untuk pertumbuhan ekonomi

yang tinggi sebab kelompok kaya akan membentuk pangsa tabungan yang besar, dapat disalurkan ke dalam investasi yang produktif; sementara kelompok penduduk miskin membelanjakan pendapatannya terutama untuk konsumsi. Suatu pemerataan pendapatan hanya akan meningkatkan konsumsi jangka pendek, tetapi melalui reduksi tabungan akan menyebabkan investasi lebih sedikit sehingga mengurangi peluang pertumbuhan di masa depan.

Tesis konflik yang berasal dari pemakaian makro ekonomi Keynes mendapat sanggahan, yaitu konsumsi si miskin yang lebih tinggi akan meningkatkan produktivitas kerja mereka, konsumsi (mewah) si kaya yang lebih sedikit dapat mengurangi impor, dengan demikian menurunkan kebutuhan devisa dan kebutuhan modal dalam industri yang substitusi impor.

Gambar 1: Distribusi Pendapatan



Permintaan si miskin pertama-tama tertuju pada barang kebutuhan dasar yang diproduksi secara padat karya. Sebuah pemerataan diiringi perubahan struktur proses produksi,

dapat saja mengimbangi efek tingkat tabungan yang menurun (terbatas).

Kepustakaan: I. Adelman/C. Morris, *Economic Growth and Social Equity in Developing Countries*, Standford 1973; M. Bohnet/R. Betz, *Einkommensverteilung in Entwicklungsländern*, München 1975; H. Chenery, dkk., *Redistribution with Growth*, London 1975; Ch. R. Frank/R.C. Webb (ed.), *Income Distribution and Growth in the Less Developed Countries*, Washington D.C. 1977; M.D. Ward, *The Political Economy of Distribution - Equality versus Inequality*, New York 1978; G.S. Fields, *Poverty, Inequality and Development*, Cambridge 1980; T. Paukert/J. Skolka/J. Maton, *Income Distribution Structure of Economy and Employment*, London 1981; H.P. Nissen (ed.), *Towards Income Distribution Policies. From Income Distribution Research to Income Distribution Policy*, EADI-Book Series, 3, Le Tilburg 1983.

hpn

diversifikasi Perluasan struktur produksi atau ekspor suatu perekonomian nasional. Sebuah perusahaan juga dapat mendiversifikasi produk-produknya. Dibedakan antara diversifikasi vertikal, yaitu perluasan dalam bentuk pembangunan berbagai sektor ekonomi serta perluasan program produksi ke sektor produksi hulu dan hilir (bahan dasar, pengolahan bahan dasar, barang setengah jadi, barang jadi, pemasaran); dan diversifikasi horizontal, yaitu perluasan produksi (misalnya pertanian) ke produk lain. Kedua bentuk ini penting dalam strategi pembangunan.

dn

DMC (*Developing Member Countries*) → ADB.

Doktrin Monroe Pesan Presiden AS, J. Monroe, kepada Kongres AS (2 Desember 1923) yang ditujukan melawan keinginan intervensi bekas penguasa-penguasa kolonial Eropa ke republik-republik merdeka di Amerika Latin; tetapi tidak untuk koloni-koloni yang masih ada. Pelaksanaan

ofensif prinsip "Amerika untuk orang Amerika", serta pemisahan antara Dunia Lama dan Dunia Baru, ketika itu masih berada di luar kekuasaan AS. Dengan Doktrin Monroe, mula-mula disalahmengertikan sebagai tawaran kerja sama AS ke tetangga-tetangga di Amerika Latin (Inisiatif panAmerika), dalam perjalanan abad ke-19 berubah radikal menjadi tuntutan hegemoni AS di dunia Barat (Deklarasi Roosevelt, 1904), dan memulai sebuah hubungan yang rumit antara AS-Amerika Latin.

Kepustakaan: H.U. Wehler, *Der Aufstieg des amerikanischen Imperialismus*, Göttingen 1974; L. Brock, *Entwicklungsnationalismus und Kompradorenpolitik*, Meisenheim 1975.

dn

Doktrin Pertahanan Nasional Model ideologi yang dibangun oleh rezim militer sejak pertengahan tahun '60-an di Amerika Latin. Doktrin ini diolah di berbagai pusat studi angkatan bersenjata di berbagai negara, terutama di (didirikan tahun 1949) *Escola Superior de Guerra* (Sekolah Tinggi Perang) di Brasilia.

Landasan: a. konsepsi pertahanan yang diperluas secara global—dalam dan luar negeri—sebagai tujuan teratas untuk negara dan politik; b. pemakaian doktrin *counterinsurgency* AS dan Perancis sebagai alat untuk mempertahankan keamanan nasional; c. penggunaan garis-garis pokok militer untuk politik, terutama dalam hal pembagian masyarakat secara hierarkis, penyederhanaan partai politik dan pengertian negara sebagai organisme yang hidup (geopolitik).

Rezim-rezim militer yang berlandaskan doktrin ini (Brasilia tahun 1964–1985; Argentina tahun 1966–

1973; Uruguay tahun 1973-1984) mempunyai ciri: a. peran kelembagaan angkatan bersenjata (mereka bertindak sebagai "lembaga"); b. kelangsungan kekuasaan; c. penggantian partai-partai politik tradisional oleh kelompok-kelompok teknokrat atau perusahaan sebagai sekutu dalam pelaksanaan kekuasaan politik. Dengan berlangsungnya re-demokratisasi di berbagai negara Amerika Latin, sejak tahun '80-an doktrin ini makin kehilangan maknanya sebagai landasan politik pemerintah.

Kepustakaan: M. Fernandez Baeza, *Nationale Sicherheit in Lateinamerika*, Heidelberg 1981.

mfd

Dominika, Republik Proses perubahan dalam sistem politik Dominika adalah simptomatis untuk sebuah sikap AS di zaman Presiden Carter terhadap negara berkembang yang bergantung kepadanya. Secara tradisional dikuasai oleh sebuah kartel kekuasaan militer, gereja katolik, dan oligarki. Republik Dominika sejak masa jabatan Guzman memperlihatkan pendekatan-pendekatan sebuah demokrasi yang mampu berfungsi.

1. Republik Dominika (merdeka sejak tahun 1844), negara kedua terbesar di Karibia (luas 48.422 km²), meliputi sekitar 2/3 Pulau Hispaniola, sisanya milik Haiti. Akibat jatuhnya harga di pasar dunia, nilai komoditas ekspor andalan, gula, mundur sejak beberapa tahun (tahun 1985: 21,1% ekspor keseluruhan); jumlah panen untuk beras, jagung, ubi kayu, kopi, dan tembakau berkurang (harga energi yang rendah, ongkos yang tinggi untuk pupuk, insektisida, transportasi, kekurangan bantuan kepada pe-

tani kecil). Dengan bantuan kredit Bank Dunia dan BID diinginkan sebuah perbaikan struktur pertanian, terutama sektor kopi (12,2% dari ekspor keseluruhan) dan kakao (7,7%). Kekayaan tambang (bijih besi, garam, saline laut, bauksit) sampai kini masih belum banyak dimanfaatkan; sumber devisa lainnya adalah turisme yang makin meningkat (terutama dari AS).

2. Tahun 1930 sampai ke pembunuhannya tahun 1961, Jenderal Trujillo yang didukung AS menguras Dominika habis-habisan seperti milik pribadi. Masa perang saudara dan kudeta-kudeta militer (1962-1965) diselingi masa pendek sebuah pemerintahan (1963) Juan Bosch yang reformis. Intervensi militer AS mengukuhkan rezim Joaquin Balaguer, seorang wakil militer yang konservatif dan mantan kepercayaan Trujillo. Pada pemilihan presiden tahun 1978, Balaguer dikalahkan calon dari lini reformis, Antonio Guzman (Partai Revolusioner Dominika, PRD), setelah militer berusaha mencegah perhitungan suara. Tahun 1982 Guzman diganti Salvador J. Blanco dari partai yang sama, dan merupakan anggota Sosialis Internasional. Perbedaan dalam partai dan perebutan kekuasaan menghalangi pelaksanaan politik pemerintah. Selain itu, dalam konflik yang dilakukan secara kekerasan ketika pemilihan tahun 1986, calon PRD, J. Majulta, mengalahkan Joaquin Balaguer (41,6%). J. Majulta mewakili Partai Reformis Kristen-Sosial yang konservatif kanan (PRSC). Balaguer lalu memulai sebuah kampanye melawan korupsi terhadap mantan presiden, Blanco.

3. Penduduk Dominika tahun 1989 diperkirakan berjumlah 7 juta (relatif padat: 141,1 penduduk/km²), 55,7% penduduk kota. Ibu kota Santo Domingo merupakan distrik nasional: tahun 1988: 2.390.000 penduduk dibandingkan tahun 1982: 1.233.000 penduduk. Di samping perpindahan penduduk ke kota-kota, ada juga penduduk yang mencari kerja bermigrasi terutama ke AS sehingga meskipun pengangguran tinggi, tetap kekurangan tenaga kerja yang berkualitas. 73% penduduk Mulat, 11% kulit hitam, dan 16% kulit putih.

4. Setelah pembunuhan Trujillos, pemilikan (2/3 industri gula, 1/3 industri lainnya) dinasionalisasi. Politik pemerintah tidak mendapatkan dorongan-dorongan pembangunan baik di zaman Balaguer (korupsi, reswanisasi) maupun di masa jabatan Guzman (penyehatan anggaran negara. Hasil gula tahun 1978: 225 juta US\$, tetapi impor minyak 200 juta US\$; tahun 1979 kerugian akibat topan "David"). Pengangguran menurut data-data resmi 28%; kesempatan kerja kurang, diperkirakan 25%. Garis batas sosial masyarakat Dominika juga sangat dibedakan menurut warna kulit: lapisan atas (sekitar 5% penduduk) dan lapisan menengah (sekitar 25% penduduk) terdiri atas tuan tanah kaya, pengusaha, dan wakil-wakil profesi bebas, administrasi, dan militer, berorientasi ke AS dalam politik dan gaya hidup.

5. Penguasa kolonial Spanyol meninggalkan agama (sekitar 98% Katolik) dan bahasanya di Dominika. Hanya sekitar 15%–20% anak-anak di umur wajib sekolah (7–14 tahun)

menikmati sekolah swasta; dalam sarana-sarana pendidikan pemerintah kekurangan guru, sekitar 1/3 anak-anak hampir tidak pernah atau hanya sebentar menikmati sekolah (kuota buta aksara tahun 1985: sekitar 23%). Infrastruktur sosial lain juga tidak terbagi merata secara sosial dan regional seperti kesehatan, komunikasi massa, dan jaminan sosial (harapan hidup 64 tahun).

6. Kelompok di negara itu yang secara tradisional berpengaruh besar adalah militer, gereja Katolik, dan kelompok kepentingan lapisan atas. Menurut UUD 1966, Republik Dominika adalah republik presidensial dengan pembagian kekuasaan, tetapi *de facto* eksekutif yang berdominasi (pemilihan presiden langsung 4 tahun sekali, wajib pilih di atas 18 tahun). Parlemen (*Congreso Nacional*, dipilih empat tahun sekali) terdiri atas dua kamar (*enadfo*: 27 wakil untuk 26 propinsi, sebuah distrik nasional, dan *Camara de Diputados*: 91 anggota). Dominika bergantung pada AS, mitra dagang utama (sekitar separo ekspor), dengan adanya jaminan pembelian gula yang sangat penting untuk perekonomiannya, melalui pengiriman uang dari orang Dominika yang menetap di AS dan melalui investasi langsung AS.

Kepustakaan: J. Bosch, *Der Pentagonismus oder die Ablösung des Imperialismus?*, Reinbek 1972; W. Grabendorff, *Bibliographie zu Politik und Gesellschaft der Dominikanischen Republik*, München 1973; L. Wilson, "Die Dominikanische Republik am Ende der Ära Balaguer", dlm.: *Berichte zur Entwicklung in Spanien, Portugal und Lateinamerika* 19, 1978, hlm. 12 dst.; I. Bell, *The Dominican Republic*, London 1981; G.A. Pope, *Arms and Politics in the Dominican Republic*, Boulder 1981; A. Hildenbrand/R. Sturm, "Dominikanische Republik", dlm.: *HDW*

II, 3, Hamburg 1982, hlm. 287 dst.; H.J. Wiarda, *The Dominican Republic, A Caribbean Crucible*, London 1983; J. Knippers, *The Dominican Republic: Politics and Development in an Unsovereign State*, Boston 1986; R. Espinal, *Authoritarismo y democracia en la política dominicana*, San Jose 1987; F. Gewecke, *Die Karibik. Zur Geschichte, Politik und Kultur einer Region*, Frankfurt 1988. rs

DPI (*Departement of Public Information*) Departemen Informasi untuk Umum dalam Sekretariat Jenderal PBB.

DTCD (*Departement of Technical Cooperation for Development*) Departemen untuk Kerja Sama Pembangunan Bidang Teknik dari Sekretariat Jenderal PBB.

dualisme (model) Konsep dualisme digunakan untuk menandai ketidakseimbangan dalam struktur sosial di negara berkembang maupun di negara maju. Dalam penggunaannya untuk masyarakat di negara berkembang secara umum ditekankan bahwa meskipun masih dipertikaikan penyebab terbentuknya struktur yang dualistis, dualisme merupakan situasi temporer, berkaitan, dan menyebabkan sebuah homogenisasi sosial melalui langkah-langkah pembangunan negara berkembang.

Model dualisme menggambarkan masyarakat periferi terpisah dalam dua sektor. Pertama, sektor modern, dinamis, terintegrasi ke pasar dunia, dengan demikian mencerminkan peluang-peluang pembangunan negara yang bersangkutan. Kedua, sektor tradisional, mengalami stagnasi dan tidak berkaitan dengan kutub pertumbuhan yang berkembang. Kedua sektor tersebut berkembang tanpa saling berhubungan dan menurut hukumnya sendiri. Oleh karena itu, perspektif

tujuan strategi pembangunan ingin menunjang sektor modern dan mengikuti imperatif pasar dunia yang ditujukan keluar (asosiasi), untuk memungkinkan perluasannya. Sektor tradisional dalam perspektif ini merupakan sektor yang perlu dimodernisasi, resistensi terhadap dinamika organisasi kapitalistis merupakan penyebab keterbelakangan. Asumsi model dualisme sekarang ditanyakan oleh konsep tandingan, heterogenitas struktural. → teori modernisasi, teori *dependencia*. rs

Dunia Keempat Berbagai situasi pembangunan di negara berkembang sehubungan dengan proses-proses pembangunan yang berlangsung berbeda-beda, telah menyebabkan perbedaan *Dunia Ketiga dalam berbagai kategori negara. Dunia Keempat dimengerti sebagai negara berkembang yang sangat kekurangan bahan mentah, modal, dan ekspor yang lemah serta paling tidak berkembang (menurut kriteria *Bank Dunia *pendapatan per kapita di bawah 425 US\$) dan identik dengan *LLDC. Politik pembangunan nasional dan internasional disesuaikan dengan kebutuhan negara berkembang ini melalui orientasi bantuan pembangunan ke *kebutuhan dasar, peningkatan *pembangunan pedesaan, hibah *bantuan modal, preferensi-preferensi khusus dalam perdagangan, dsb.

Pembentukan definisi Dunia Keempat berakar pada gambaran implisit bahwa keterbelakangan merupakan sebuah masalah tingkat perkembangan, seakan-akan Dunia Ketiga terpisah dari negara-negara berkembang termiskin dan sedang menuju jalan men-

capai terutama angka-angka target pembangunan. Namun sebenarnya, keterbelakangan merupakan masalah struktur yang juga mengena baik negara-negara berkembang termiskin maupun negara-negara yang menurut angka-angka ekonomi telah lebih maju.

dn
Dunia Ketiga "Dunia Ketiga merupakan kumpulan negara yang secara struktural heterogen dengan kurangnya pengembangan tenaga produktif (lepas dari pendapatan per kapita), melakukan solidaritas dalam memperjuangkan tujuan-tujuan ekonomi dan politiknya menghadapi "Utara yang kaya", dan karena mempunyai pengalaman sejarah yang sama mengorganisasi diri dalam berbagai aksi kesatuan yang tidak mengikat" (Nohlen/Nuscheler tahun 1982: 17). Untuk penentuan definisi ini ada dua kriteria, yaitu ekonomi dan politik yang saling berkaitan. Ciri definisi ekonomi yang menonjol adalah "heterogenitas struktural, berkaitan dengan kurangnya perkembangan tenaga produktif-bukan tingginya pendapatan per kapita; ukuran ini banyak dipakai oleh organisasi internasional dan negara kreditor dalam politik pembangunan dan politik kreditnya. Kriteria politik berdasarkan pengalaman historis, identitas kepentingan, dan perasaan persaudaraan yang subjektif, tertuang dalam organisasi-organisasi yang tidak mengikat seperti Kelompok 77, gerakan non-blok, dsb.

Asal definisi adalah tahun 1949. Usaha partai komunis di Perancis melakukan politik oposisi terhadap partai-partai kapitalis kanan, dialihkan ke tingkat internasional dengan tokoh-

tokoh di sana. Mula-mula definisi ini berkaitan dengan gambaran sebuah "Jalan Ketiga, yang tidak lama kemudian termanifestasi dalam gerakan nonblok. Bantahan yang selalu muncul bahwa definisi ini merupakan cemoohan dan mendiskriminasi, tidak melihat landasan historis definisi tersebut. Malah sebaliknya, di tahun '50-an yang digolongkan ke Dunia Ketiga hanyalah negara-negara yang ingin menapak jalan ketiga yang nonblok. Tahun '60-an yang makin ditonjolkan adalah perbedaan perkembangan ekonomi dalam hubungan internasional; pengertian ini menyebar ke seluruh pelosok negara berkembang. Sebagai ciri adalah tidak dipakainya istilah Dunia Pertama dan Dunia Kedua, meskipun dalam kasus ini ada tanda-tanda definisi yang lebih jelas (negara industri Barat = terindustrialisasi-kapitalistik; negara dengan perdagangan luar negeri di tangan negara atau negara sosialis = terindustrialisasi-sosialistik). Ciri yang menonjol untuk semua negara Dunia Ketiga adalah keterbelakangan. Ciri ini diperoleh dengan melihat perbedaan tingkat perkembangan negara dan tidak menyertakan penyebabnya. Ciri ini tidak dapat dipakai sebagai istilah untuk kelompok-kelompok negara karena ditentang oleh negara berkembang. Negara berkembang merupakan nama yang paling banyak dipakai internasional, tetapi juga mengikutsertakan sederet negara Eropa dan menutupi bahwa tentu saja negara industri melakukan perkembangan dan terus berkembang—dalam waktu yang jauh lebih cepat daripada negara berkembang sehingga kesen-

jangan antara negara berkembang dan negara industri makin membesar. Dunia Ketiga dengan demikian merupakan pengertian yang relatif netral dan lebih baik daripada istilah negara Selatan yang ditetapkan secara geografis. Definisi ini berhadapan dengan kenyataan bahwa beberapa negara yang terletak di sebelah selatan bola dunia ini juga termasuk negara industri (Australia, Selandia Baru). Tidak ada satu istilah yang bisa memberikan perbedaan-perbedaan yang perlu di antara kelompok negara-negara itu.

Perbedaan antarnegara berkembang sendiri meningkat dalam dasawarsa terakhir, sehingga perlu ada pembentukan subkelompok terutama untuk tujuan politik pembangunan internasional. Tidak ada kesatuan ukuran yang mendasari perbedaan-perbedaan, yang secara historis mengalami perubahan dan bereaksi terhadap tuntutan-tuntutan konkret. Hampir semua negara berkembang menjadi anggota kelompok 77, hampir 80% anggota gerakan nonblok. Organisasi-organisasi politik ini yang menekankan bahwa ada perbedaan besar negara berkembang menurut

kriteria-kriteria politik lainnya—dapat dimengerti sebagai Dunia Ketiga terutama terhadap negara industri—bisa mengubur solidaritas dan kekuatan, bersaing dengan sub-sub kelompok negara berkembang lainnya. Mereka terbagi dalam kriteria-kriteria berikut: menguasai sumber daya minyak bumi dan hasil ekspornya (*OPEC); negara berkembang termiskin (*LLDC) dan yang sangat menderita akibat kenaikan harga minyak, resesi dunia dan bencana musim kering (*MSAC), negara yang dirugikan karena letak geografisnya (*negara pedalaman, kepulauan); serta negara yang berasosiasi dengan ME (*Negara AKP). Kategori selanjutnya berdasarkan tingkat pembangunan yang telah dicapai *NIB (juga *Newly Industrialized Countries*, NIC). Ada tumpang tindih di antara kelompok-kelompok ini. (Tabel 1 di lampiran)

Kepustakaan: I.L. Horowitz, *Three Worlds of Development: The Theory and Practice of International Stratification*, Oxford 1966; I.S. Abdalla, "Heterogeneity and Differentiation. The End of the Third World", dlm.: *Development Dialogue* 2, 1978, 3-21; D. Nohlen/F. Nuscheler, "Was heisst Dritte Welt", dlm.: *HDW II*, 1, Hamburg 1982, hlm. 11 dst. **dn**

E

EAFFRO (*East African Agriculture and Forest Research Organization*) Organisasi Afrika Timur untuk Penelitian Pertanian dan Kehutanan.

EAC (*East African Community*) Komunitas Afrika Timur, merupakan komunitas ekonomi Kenya, Tanzania, dan Uganda yang berumur pendek. Didirikan tahun 1976 dengan tujuan membangun sebuah pasar bersama (EACM). Tahun 1977 pecah akibat ketegangan politik terus-menerus di antara negara-negara anggotanya.

Kepustakaan: R. Hofmeier, "Die Ostafrikanische Gemeinschaft: Fallstudie über Geschichte, Funktionsweise und Zerfall einer regionalen Staatengruppierung in der Dritten Welt", dlm.: V. Matthies (ed.), *Süd-Süd-Beziehungen*, München a.l. 1982, hlm. 273.

dn

EAD (*Europäisch-Arabischen Dialogs*) → Liga Arab.

EADB (*East African Development Bank*) Bank Pembangunan Afrika Timur.

EADI (*European Association of Development Research and Training Institutes*) Asosiasi Institut Penelitian Pembangunan dan Pelatihan Eropa; beranggotakan 130 institut dari 20 negara.

ECA (*Economic Commission for Africa*) Komisi Ekonomi PBB untuk Afrika, didirikan April 1958 oleh

*ECOSOC. Tahun 1979 beranggota 47 negara di samping anggota asosiasi (daerah yang bergantung di Afrika: Perancis, Inggris, Spanyol). Afrika Selatan sejak tahun 1963 dikeluarkan dari keanggotaan. *Tugas*: mendukung negara-negara Afrika untuk kerja sama ekonomi di Afrika dan meningkatkan suatu komunitas negara-negara Afrika. Tugas dibagi ke empat biro regional untuk Afrika Utara, Afrika Tengah, Afrika Barat, dan Afrika Timur. ECA mempunyai sebuah universitas di Nairobi. *Masalah*: heterogenitas ekonomi dan politik di Afrika, kekurangan tenaga ahli di negara-negara tersebut. → OAU, → AFDB, → MULPOC.

Alamat: P.O. Box 3001, Addis Abeba, Ethiopia.

dn

ECAFE (*The Economic Commission for Asia and the Far-East*) Panitia Regional Sosial Ekonomi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB → ESCAP. **ECCM** (*Eastern Caribbean Commonmarket*) Pasar Bersama Karibia Timur, didirikan tahun 1968 oleh **Associated States*, yaitu "Delapan Kecil" dari *Federasi Hindia Barat, bertujuan mengatasi kerugian karena situasi daerah mereka yang sangat kecil, melalui kerja sama erat di antara *CARIFTA

dan *CARICOM. *East Caribbean Dollar*, mata uang persatuan mereka menjadi lemah karena keluarnya pulau-pulau dengan ekonomi terkuat di Karibia Timur, Trinidad, dan Tobago, serta Barbados. ECCM berfungsi sebagai kelompok yang memperjuangkan kepentingan si "kecil" di dalam CARICOM, tetapi gagal melakukan integrasi dalam subregional. dn
ECDC → hubungan Selatan-Selatan.

ECLA (*Economic Commission for Latin America*) Panitia Regional Sosial Ekonomi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB → CEPAL.

ecodevelopment Istilah untuk strategi pembangunan di *Dunia Ketiga yang sesuai dengan lingkungan dalam rangka program lingkungan PBB (*UNEP). Tujuan: penyesuaian pembangunan ke lingkungan secara harmonis. Artinya, pengelolaan sumber daya secara bijaksana dan berjangka panjang serta melestarikan fungsi ekosistem. → *ecofarming*.

Kepustakaan: B. Glaeser (ed.), *Factors Affecting Land Use and Food Production. A Contribution to Ecodevelopment in Tanzania*, Saarbrücken 1980; Themenheft "Ecodesarrollo", dlm.: *Agricultura y sociedad*, 45, 1987. ah

ecofarming Mencoba mengelola lahan yang sesuai dengan situasi ekosistem tropis berlandaskan sistem pertanian berpindah yang tradisional (**shifting cultivation*). Jadi, pertanian yang sesuai dengan situasi setempat. Pemikiran ini berangkat dari adanya sikap pengabaian tanah tropis secara *ekologi pada produksi bahan makanan secara *monokultur. Ciri-ciri *ecofarming*: a. merangkai tanaman pohon dan ladang (sebagian juga dengan beternak) dalam rangka sistem

agrokehutanan; b. konservasi tanah melalui usaha bercocoktanam; c. peningkatan lapisan humus; d. produksi biomassa secara banyak; e. keseimbangan hama dan hewan berguna; f. mempertahankan fungsi dasar ekofisiologi (tanah, air, zat organik); g. mengamankan keragaman jenis dalam biotop. *Ecofarming* berorientasi ke tujuan-tujuan program lingkungan PBB (*UNEP).

Kepustakaan: K. Egger, "Ecofarming - Kern ökologischer Agrarentwicklung?", dlm.: *E+Z*, 8/9, 1982, hlm. 22 dst. ah

economic assistance → politik bantuan pembangunan AS.

economie dominante → teori perdagangan luar negeri.

economies of scale Efek skala yang didapat dari peningkatan *produktivitas mesin yang dipakai melalui perluasan produksi, dan dari tenaga kerja melalui penurunan ongkos per satuan produksi. Perluasan produksi bergantung pada kemungkinan meluaskan pasar, yaitu meluaskan pasar dalam negeri (produksi untuk massa) atau menerobos pasar luar negeri (orientasi ekspor). dn

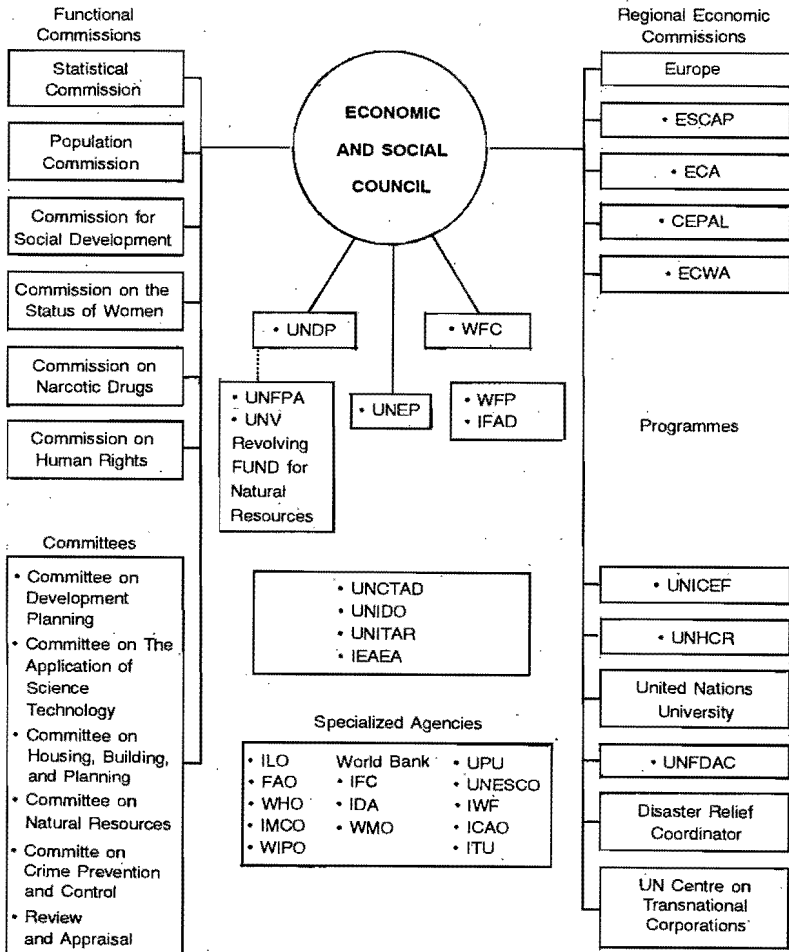
ECOSOC (*Economic and Social Council*) Dewan Sosial dan Ekonomi PBB, berdiri tahun 1945 sebagai salah satu dari 6 organ PBB. Dewan ini beranggota terbatas yang dipilih oleh Sidang Umum PBB dengan mayoritas dua pertiga untuk satu periode selama 3 tahun. Jumlah anggota semula 18, tahun 1965 menjadi 27 dan sejak tahun 1973 menjadi 54 anggota. Komposisinya sesuai dengan keanggotaan dalam PBB: sebagian besar adalah negara industri. Sejak tahun 1973 negara berkembang dengan 37 anggota mempunyai 2/3

ECOSOC

mayoritas suara (68%) dalam ECOSOC (negara industri: 12 anggota 22%; negara dengan perdagangan luar negeri di tangan negara 5 anggota, 9%).

ECOSOC mempunyai tiga tugas utama: a. koordinasi kegiatan ekonomi dan sosial politik; b. mengurus dana PBB yang tersedia untuk tujuan pembangunan ekonomi dan sosial;

Gambar 2: Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC)



ICAO (*International Civil Aviation Organization*, Organisasi Penerbangan Sipil Internasional), IMCO (*Inter Governmental Maritime Consultative Organization*, Organisasi Konsultatif Maritim Antarpemerintah), UPU (*Universal Postal Union*, Uni Pos Dunia), WMO (*World Meteorological Organization*, Organisasi Meteorologi Dunia)

dan c. forum diskusi masalah ekonomi dan sosial dalam pembangunan internasional; bisa muncul laporan, saran, dan resolusi. ECOSOC membawahi banyak komisi, panitia, program, dan organ tambahan: a. panitia yang berhubungan dengan rapat-rapat untuk konsultasi secara intensif masalah-masalah selama rapat; b. panitia *ad hoc* untuk tugas tertentu; c. panitia tetap untuk bidang tugas tertentu (misalnya rencana pembangunan, koordinasi kegiatan); d. Komisi Ekonomi Regional; e. Komisi Fungsional untuk pemasokan data dan saran (misalnya komisi statistik, komisi kependudukan); dan f. organ bantuan (misalnya TAB/Technical Assistance Board). Tugas ECOSOC yang penting adalah koordinasi kegiatan organisasi-organisasi khusus yang secara teratur memberikan laporan kepada ECO-SOC (misalnya FAO, UNESCO), sedangkan Bank Dunia dan IMF makin berdiri sendiri.

Pada tahun '50-an dalam ECOSOC ada banyak diskusi mengenai masalah pembangunan kembali dan kesempatan kerja penuh di negara industri, serta masalah konflik Timur-Barat. Karena negara berkembang merasa didominasi oleh negara industri dalam ECOSOC, mereka berusaha menyuarakan tuntutan politik pembangunannya terhadap negara industri dalam organisasi-organisasi baru, yang pendiriannya (→ UNCTAD, → UNIDO) mulai menghilangkan fungsi-fungsi ECOSOC (puncaknya: interpretasi baru Charta PBB dari pihak negara berkembang tahun 1964/1965 dalam arti bahwa masalah ekonomi dan sosial-politik

hanya ditangani oleh Sidang Umum PBB). Sejak ada perubahan dalam komposisi keanggotaan ECOSOC, *trend* ini berbalik arah dan Dewan tersebut dimasukkan ke dalam organ, di mana dan dengan siapa negara berkembang mencoba memperjuangkan kepentingannya, paling tidak secara verbal dalam usul-usul dan resolusi. Namun, keputusan yang diambil oleh suara terbanyak (setiap anggota dewan mempunyai satu suara) bersifat tidak mengikat.

dn ECOWAS (*Economic Community of West African States*) Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat ini berdiri tahun 1975 di Lagos atas prakarsa Togo dan Nigeria. Beranggotakan 16 negara: Benin, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kepulauan Kapverde, Liberia (*de facto* keluar sejak tahun 1980), Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Pantai Gading, Senegal, Sierra Leone, Togo, dan Volta Hulu.

Tujuan: kerja sama ekonomi, menginginkan integrasi secara bertahap (uni bea selama 15 tahun, pasar bersama, uni mata uang); perspektif jangka panjang: organisasi politik, pendahulu untuk kesatuan Afrika → OAU.

Organ: konferensi tingkat pemimpin negara (= gremium pengambil keputusan tertinggi, memiliki monopoli insiatif); Dewan Menteri, terdiri atas dua wakil dari setiap negara, rapat dua kali dalam setahun, mempunyai hak memutuskan yang minimal; Sekretaris Jenderal dengan kedudukan di Lagos (organ eksekutif yang digunakan setiap 4 tahun oleh konferensi tingkat pemimpin negara),

kritik terhadap struktur pengambilan keputusan: *"Le Traité de Lagos crée une Afrique des Présidents et non une Afrique des Peuples"*; dana kerja sama, kompensasi dan pembangunan (kedudukan di Lome), pembiayaan berasal dari iuran negara anggota, diukur berdasarkan koefisien PNB dan pendapatan per kapita (keputusan berdasarkan suara terbanyak mutlak).

Masalah yang dihadapi: perbedaan struktur yang besar antarnegara anggota (Nigeria yang lebih makmur merupakan daya tarik buruh pengembara yang ilegal dari negara-negara tetangga) dan hipotek kolonial (keanggotaan negara-negaranya ke zone mata uang yang berbeda-beda; strategi pembangunan yang berbeda-beda; keanggotaan ganda dalam organisasi-organisasi yang saling bersaing, misalnya *CEAO, anggota: Negara Pantai Gading, Volta Hulu, Niger, Mali, Senegal; *Mano-River-Union [MRU], anggota: Guinea, Liberia, Sierra Leone). Aturan perjanjian yang tidak jelas, sampai akhir tahun '70-an ada persaingan pribadi antara Sekretaris Eksekutif dan Dana di Lome. Namun, hal ini bisa diselesaikan awal tahun '80-an dalam rangka konferensi pemimpin negara di Lome, dengan hasil Dana di bawah Sekretaris Jenderal. Ketidakpercayaan kelompok inti negara-negara frankofon (bekas jajahan Perancis) yang bergabung dalam CEAO terhadap posisi depan Nigeria, merupakan faktor selanjutnya yang sampai kini membebani kerja sama regional.

Hasil-hasil: realisasi proyek bersama (misalnya tahun 1981 program perluasan telekomunikasi dan jaring-

an lalu lintas) berlangsung tersendat-sendat, perdagangan di antara negara anggota sampai sekarang juga hampir tidak meningkat. Sebuah protokol mengenai politik pertahanan bersama ditandatangani Mei 1981 di Freetown (Sierra Leone). Pada pertemuan puncak ke-6 (Mei 1983) di Conakry (Guinea), ECOWAS mengumumkan rencana penghapusan bertahap batas-batas perdagangan antarnegara anggota. Empat negara yang lebih maju (Pantai Gading, Ghana, Nigeria, Senegal) dalam waktu 4 tahun sudah harus menghapus bea untuk fabrikat yang mempunyai prioritas tinggi dan dalam waktu 6 tahun untuk fabrikat yang bukan dalam kategori ini. Penghapusan bea pada kelompok negara menengah (Benin, Guinea, Liberia, Sierra Leone) berlangsung dalam waktu 6-8 tahun, dan pada negara-negara yang paling sedikit berkembang (Gambia, Guinea-Bissau, Kepulauan Kapverde, Mauritania, Niger, Volta Hulu) direncanakan jangka waktu 8-10 tahun. Sampai sekarang realisasi rencana liberalisasi negara-negara CEAO dan MRU sangat sulit karena rencana perluasan preferensi politik perdagangan pada semua negara ECOWAS (klausul prioritas) secara *de facto* sama artinya dengan penghapusan komunitas integrasi yang bersangkutan. Terlalu pagi jika menilai ECOWAS. Dua faktor penting yang dapat mempertanyakan keberhasilan komunitas ini: a. kuatnya orientasi pada integrasi Eropa yang tidak menawarkan cara mengatasi *heterogenitas struktural dan ketergantungan negara-negara tersebut; b. konstelasi kekuasaan dan kepentingan-

an subregional, yang menentang pemapanaan sebuah maksud politik bersama. Tema-tema selanjutnya dalam pertemuan puncak adalah koordinasi antara CEAO dan ECOWAS, penyatuan mata uang, pembangunan industri, serta aksi bantuan untuk Cad dan Republik Afrika Tengah. → Franc-Zone.

Kepustakaan: H. Voss, "Kooperation in Westafrika: Multilaterale Institutionen und bilaterale Zusammenarbeit", dlm.: *Afrika Spectrum* 14/2 (1979), hlm. 151 dst.; K. Ziemer, "ECOWAS", dlm.: *HDW II*, 4, Hamburg 1982, hlm. 108 dst.; A. Orimalade/R.E. Ubogu (ed.), *Trade and Development in Economic Community of West African States (ECOWAS)*, New Delhi 1984; J.O.C. Onyemelukwe, *Industrialization in West Africa*, London 1984; S.K.B. Asante, "ECOWAS/CEAO: Conflict in West Africa", dlm.: R.I. Onwuka/A. Sesy (ed.), *The Future of Regionalism in Africa*, London 1985. dn

ECU (*European Currency Unit*) Kesatuan Mata Uang sejak 13 Maret 1979 dalam sistem mata uang Eropa (*ECS/European Currency System*, Sistem Mata Uang Eropa), identik dengan *ERE. Nilainya ditentukan melalui keranjang moneter Eropa; bobot setiap mata uang dalam keranjang moneter diperiksa dan diatur kembali setiap lima tahun atau jika ada permintaan. Paritas masing-masing mata uang ke ECU dapat bergerak dalam daerah naik-turun antara plus-minus 2,25%. dn

ECWA (*Economic Commission for Western Asia*) Komisi Ekonomi PBB untuk Asia Barat ini berdiri tahun 1974 dengan 12 anggota (hanya negara-negara Arab) dan sejak tahun 1977 *PLO menjadi anggota. Tugas: bantuan pembangunan ekonomi dan kerja sama, terutama dalam masalah keuangan. *Titik berat*: pengadaan air, pangan, perdagangan, teknologi,

serta *rencana pembangunan secara umum.

Alamat: P.O. Box 27, Bagdad, Irak. dn

EDCS (*Ecumenial Development Cooperative Society*) Kerja sama Oikumene, berdiri tahun 1977 melalui *WCC oleh Bank Kerja Sama Gereja, berkedudukan di Belanda. Dengan modal awal 1 juta US\$, memberikan kredit kepada negara berkembang termiskin dengan syarat lunak. dn

EDF (*European Development Fund*) Dana Pembangunan Eropa ini telah berdiri sejak Perjanjian *Asosiasi pertama antara MEE dengan 18 negarane-negara Afrika dan Madagaskar. Sejak saat itu menjadi alat (jerat) politik bantuan pembangunan Eropa. Dana ini mempunyai arti penting terutama untuk negara berkembang termiskin karena hasil perdagangan luar negerinya rendah, kurang dapat menikmati elemen-elemen bantuan Eropa seperti *STABEX dan *SYSMIN. Perundingan mengenai tinggi, struktur, dan manajemen EDF dalam rangka Perjanjian Lome karenanya selalu kontroversial dan bertele-tele, bahkan, misalnya dalam Lome II, hal tersebut mempengaruhi perdebatan prinsip mengenai klausul hak asasi manusia dan sosial, atau perlindungan investasi yang dituntut oleh ME.

Bantuan ME dalam rangka Perjanjian Asosiasi di tahun '60-an sebesar 730 juta *ERE (Jaunde I tahun 1964-1968) dan 828 juta ERE (Jaunde II tahun 1969-1974), dalam rangka Perjanjian Lome meningkat menjadi 3.074 juta ERE (Lome I tahun 1975-1979) lebih dari 4.627 juta ERE (Lome II tahun 1980-1984) sampai menjadi 7.400 juta *ECU (Lome III

tahun 1985-1990). Secara nominal bantuan EDF dari Lome I ke Lome II naik 50% dan dari Lome II ke Lome III naik sekitar 60%. Namun, kenaikan nominal ini kurang bisa mengimbangi tingkat inflasi, apalagi jumlah Negara AKP yang ikut ambil bagian makin banyak. Jika menghitung juga apresiasi uang, bantuan EDF per kapita penduduk negara-negara AKP dari Lome I ke Lome II malah berkurang sebesar 21%. Jika mengamati seluruh bantuan ME, yaitu dana EDF dan jumlah yang dikeluarkan Bank Investasi Eropa (*EIB) dengan syarat yang biasa dalam pasar (lihat Tabel 3), terlihat bahwa jumlah yang disediakan EIB yang berfungsi sebagai bank dan bukan sebagai agen bantuan pembangunan, dari Lome I (390 juta ERE) ke Lome II (685 juta) lebih banyak meningkat daripada dana EDF yang sepertiganya terdiri atas tunjangan dan selebihnya atas pinjaman dengan bunga yang sangat lunak (1%-0,5%). Tidak samanya peningkatan dana EDF dan EIB pada dasarnya bertentangan dengan usaha-usaha ME yang tercetus dalam semboyan "lebih banyak bantuan untuk yang termiskin". Jika jumlah sekitar 15 miliar DM dibagi dalam 5 cicilan tahunan yang disediakan EDF ke-6 (di bawah Lome III) untuk tahun 1985-1990 dan jumlah ini kembali dibagi oleh 66 negara AKP, yang tersisa adalah jumlah yang tak berarti "Marshall-Plan dari Eropa" jadinya merupakan semboyan yang berlebihan.

Jika membandingkan pembagian EDF ke setiap kelompok negara, pertama terlihat bagian Afrika yang sangat besar dan kedua jelas lebih

mengutamakan bekas jajahan Perancis. Dasar dari masalah mengutamakan dan mengesampingkan adalah—selain realitas politik pembagian dana bahwa mayoritas negara-negara frankofon yang termasuk *LLDC—pendekatan yang lama dan gigih negara-negara frankofon ke delegasi EDF dan instansi pemerintah ME.

Tabel 3: Bantuan keuangan ME ke Lome I-III
(dlm. juta ECU *)

	Lome I ^a Bagian LLDC		Lome II ^b	Lome III
I EDF	3074	57 ^c	4627	7400
Tunjangan	2150	63	2986	5770 ^d
Pinjaman khusus	446		518	—
Risiko modal	99	58	284	290
STABEX	380	70	557	925
MINEX	—	—	282	415
II EIB ^e	390	25	685	1100
Jumlah	3400		5600	8500

^a) European Currency Unit; ^b) masing-masing menurut kenaikan iuran awal akibat makin banyaknya negara-negara AKP yang masuk; ^c) EDF + EIB; ^d) European Investment Bank; ^e) termasuk pinjaman istimewa.

(Sumber: Statistik-Statistik ME)

Masalah yang lebih penting dari masalah negara penerima mana yang mendapatkan bagian terbesar dari EDF jika dihitung pendapatan per kapita adalah masalah apa yang terjadi dengan dana tersebut. Penilaian oleh program pedoman dalam EDF ke-4 (Lome I) memperlihatkan pembagian sektoral sebagai berikut. a. 36% untuk pembangunan pedesaan, 83% dana ini untuk peningkatan produksi ekspor dan—bukan seperti yang dicanangkan sebenarnya—pengadaan pangan untuk sendiri; b. untuk bantuan industri sebesar 12% (tanpa kredit EIB), di sini—bertentangan dengan tujuan perjanjian—dapat dilihat tendensi mem-

biayai proyek besar industri; c. 27% (tanpa kredit EIB) untuk perluasan infrastruktur; d. 15% untuk pembangunan sosial (pendidikan, kesehatan, perumahan, dsb.), yang menurut doktrin kebutuhan dasar sebenarnya merupakan prioritas mutlak; e. 14% untuk STABEX dan 6% untuk ongkos administrasi dan delegasi (berjumlah 180 juta ERE dalam Lome II dialihkan ke anggaran ME). Jika pembangunan tidak hanya dimengerti sebagai pertumbuhan ekonomi tetapi juga perbaikan situasi sosial mayoritas penduduk yang miskin, EDF mempunyai titik berat yang salah.

Jerman menyalurkan 25% pembiayaan EDF (di bawah Lome III) sehingga merupakan negara kreditor terpenting Eropa. Sementara Jerman dan Inggris tidak merasakan keuntungan, Perancis dan Italia yang paling banyak menikmati kegunaannya dalam bentuk kontrak-kontrak.

Negara-negara AKP menggugat sedikitnya komisi kerja sama dalam proses keputusan pembagian dana. Keputusan ada di tangan ME. Paragraf 108 Pasal 6 perjanjian Lome menyatakan "Komunitas bertanggung jawab untuk persiapan keputusan keuangan" Dalam Perjanjian Lome, negara-negara AKP memang mempunyai hak memberikan usul yang tidak dimiliki kedua Perjanjian Jaunde, dapat memberikan prioritas yang sesuai dengan rencana pembangunannya dalam pengajuan permohonan dan dapat ikut berbicara dalam Dewan Menteri bersama dan dalam komisi duta besar ME-AKP mengenai aturan pokok dan politik distribusi; tetapi ME tetap ada di antara

mereka dalam kedua organ di EDF dan EIB yang mengambil keputusan: semboyan kerja sama berhenti jika menyangkut uang.

EDF mempunyai semua kelemahan bantuan pembangunan multilateral, misalnya hanya merupakan kepentingan politik yang tersembunyi dari pihak negara kreditor dan birokrasi yang lamban (setengah tahun sebelum berlangsungnya EDF ke-4, baru 64% dana disetujui dan hanya 27% yang sudah dicairkan); benar-benar tidak mampu untuk disebut sebagai "Marshall-Plan dari Eropa".

→ politik bantuan pembangunan ME.
Alamat: 200 Rue de la Loi, B-1049 Brüssel, Belgia.

Kepustakaan: H. Gerth-Welmann, *Das AKP/EG-Abkommen von Lome*, München/London 1979; K. Focke, *Von Lome I zu Lome II*, Luxemburg 1980; ODI/IDS, *EEC and the Third World: A Survey*, vol. 2, London a.l. 1981/1982 (lihat juga kepustakaan mengenai politik bantuan pembangunan ME).

fin EDI (*Economic Development Institute*) Institut Pembangunan Ekonomi ini berdiri tahun 1955 di Washington dan berada di bawah Bank Dunia. **Tujuan:** memperbaiki manajemen politik ekonomi di negara berkembang. **Usaha:** pendidikan terarah untuk para pengambil keputusan politik pembangunan negara berkembang melalui seminar dan pelajaran (diadakan di Washington dan di negara berkembang) dan sejak tahun 1986/1987 ada program beasiswa Bank Dunia.

mik
efek dominasi → teori perdagangan luar negeri.

efek konter → teori perdagangan luar negeri.

efek skala → *economies of scale*.

EIB (*European Investment Bank*) Bank Investasi Eropa, bekerja sejak tahun 1958 berdasarkan Perjanjian MEE.

Organ: Dewan Gubernur (setiap negara anggota diwakili seorang menteri), mengambil keputusan mengenai peningkatan modal, mengangkat anggota dari gremium lain; Dewan Pengurus (22 anggota); Direktorat (1 presiden; 6 wakil) yang menjalankan usaha. **Struktur modal** (1 Januari 1988): Jerman Barat, Perancis, Italia, dan Inggris masing-masing 19,127%; Spanyol 7,031%; Belgia, Belanda masing-masing 5,320%; Denmark 2,684%; Yunani 1,438%; Portugis 0,927%; Irlandia 0,671%; dan Luksemburg 0,134%.

Tugas: memberi pinjaman dan jaminan untuk proyek-proyek negara Eropa, negara di kawasan Laut Tengah, dan negara yang menandatangani Perjanjian Lome (asosiasi). EIB memberikan kepada Negara AKP bunga lunak setinggi 3% pada pinjaman yang diambil dalam pasar modal, yang ditutup oleh tunjangan dari EDF. Pembiayaan EIB terus naik dalam tiga Perjanjian Lome (tahun 1987 seluruhnya 349,4 juta ECU, tahun 1986: 209,7 juta).

Alamat: 100, Boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Luxemburg.

dn/pb

ejido → Meksiko.

ekologi Menurut seorang zoolog, E. Haeckel, ekologi berarti "hubungan timbal balik semua organisme", jadi ekonomi (rumah tangga) alam (1866). Pengertian modern ekologi adalah invasi ke alam dan "kerusakan ekologi" yang disebabkan oleh manusia. Hal ini dapat didefinisikan sebagai "pengrusakan rumah tangga alam akibat

perubahan psikalis, kimia dan biologi dari air, tanah dan udara" (G. Hartkopf). Ekologi politik adalah struktur interaksi antara masyarakat dan lingkungan, meliputi *input* maupun *output* proses kerja dan proses ekonomi (B. Glaesner).

Ekologi merupakan tema yang menyangkut pembangunan nasional dan regional, serta mempunyai dimensi global. Di Konferensi Lingkungan Sedunia pertama (1972) negara berkembang masih mengambil jarak terhadap perspektif ekologi dan lebih menyukai pembangunan nasional tanpa memperhatikan kemungkinan akibat negatif untuk manusia dan alam. Komisi dunia untuk lingkungan dan pembangunan (Laporan Brundtland) di tahun '80-an mendefinisikan bahwa lingkungan dan pembangunan, serta miskin, ketidak-samaan, dan kerusakan lingkungan saling berhubungan. Generasi masa datang dalam kehidupannya terancam oleh kerusakan lingkungan di negara industri maupun kehancuran lingkungan di negara berkembang. Oleh karena itu, harus dicari jalan keluar bersama untuk mengatasi masalah ekologi, energi, dan iklim global.

Pembahasan situasi krisis lingkungan di negara berkembang mencakup 3 bidang: pertanian, produksi industri, dan daerah-daerah padat di perkotaan. Apa yang menyangkut pertanian, terutama sekali erosi tanah, pembabatan hutan, dan pembakaran hutan-hutan tropis, serta kemusnahan berbagai jenis kehidupan, sangat mengkhawatirkan. Berangkat dari konsep heterogenitas struktural dapat disebutkan bahwa penyebabnya ada-

lah faktor-faktor situasi endogen dan eksogen. Pembangunan sektor modern yang kapitalistis, seperti penebangan hutan untuk industri dan pengubahan bekas hutan menjadi ladang untuk ternak di satu pihak, bersamaan dengan pemanfaatan alami yang mengacu pada ekonomi subsistensi yang tradisional di lain pihak, mengakibatkan perusakan alam secara besar-besaran. Saat ini musnah antara 200.000–250.000 km² hutan tropis setiap tahun. Pohon-pohon baru yang ada, tidak ada artinya dibandingkan kerusakan hutan yang pesat.

Menurut Bank Dunia tahun 1985, telah musnah 40% dari keseluruhan hutan tropis. Penyebab utama adalah perluasan lahan pertanian. Pertumbuhan penduduk, ketidakadilan pembagian tanah (→ reformasi pertanian), dan perluasan ekspor pertanian (→ *cash crops*) juga memaksa kelanjutan pembabatan hutan untuk pengadaan pangan. Dengan demikian, pertanian berpindah (lahan yang telah digarap ditinggal beberapa tahun untuk menciptakan kembali kesuburan tanah melalui penumbuhan hutan), menjadi makin hilang.

Menurut perkiraan FAO, kemusnahan hutan di Afrika sebanyak 70%, di Asia 50%, dan di kawasan Amerika 35%. Selanjutnya, berkurangnya hutan-hutan tropis disebabkan ekspor kayu ke negara industri (hasil penjualan keseluruhan yang diterima negara berkembang saat ini berjumlah 8 miliar US\$/tahun), serta makin kurangnya bahan bakar akibat pertumbuhan penduduk [sekitar 80% penebangan untuk mendapatkan energi; menurut Laporan *World Watch In-*

stitute (WIR) tahun 1988/1989, 3/4 penduduk Dunia Ketiga memerlukan kayu untuk memasak dan pemanasan karena tidak ada sumber energi lain, atau kalau ada terlalu mahal]. Pengrusakan hutan hujan tropis berakibat menurunnya permukaan air tanah di daerah-daerah tersebut, pengeringan tanah, erosi tanah, makin banyaknya banjir, desertifikasi, dan penurunan hasil pertanian.

Akibat desertifikasi dirasakan terutama oleh negara-negara Afrika. 742 juta hektar tanah, lebih dari 1/4 Afrika, sedang berada dalam tahap lanjut menjadi gurun pasir. Di daerah-daerah yang terkena, terutama sebagian besar 19 negara Zone Sahel, situasinya makin kritis dengan perluasan lapisan pasir, memburuknya situasi padang rumput, semakin rusaknya sistem pengairan, dan masalah ladang kering (P. Harison). Selain krisis bahan bakar, kemiskinan, dan keterbelakangan, salah satu akibatnya adalah peningkatan jumlah pengungsi karena kerusakan lingkungan.

Berkaitan erat dengan kerusakan hutan tropis, berlangsung juga proses pemiskinan genetika-biologi dengan kemusnahan habitat. Sekitar 25.000 jenis tanaman dan 1.000 jenis hewan terancam punah. Selain itu, banyak jenis yang belum ditemukan sehingga belum dikenal fungsi dan kemungkinan manfaatnya. Di antara ribuan jenis tersebut, 40% berada di hutan-hutan tropis; tetapi habitat ini sering berjumlah sedikit dan di ruang yang kecil sehingga sangat terancam punah. Dengan penurunan jumlah habitat, di antaranya juga turun cadangan genetika untuk pembibitan tanaman

baru dan keinginan bioteknologi di masa depan (\rightarrow teknologi gen). Produk farmasi negara industri sebagian besar memakai bahan dasar tanaman yang didapat dari negara-negara Dunia Ketiga.

Revolusi Hijau juga merupakan salah satu penyebab krisis ekologi. Pemakaian secara deras bibit yang resisten dan pupuk buatan (pestisida, herbisida, fungisida), mendesak ekonomi subsistensi yang berkembang secara historis. Dengan demikian monokultur dan dalam kaitannya dengan ketergantungan pada pasar dunia, menimbulkan krisis produksi pertanian. Akibatnya adalah kerusakan ekologi, seperti pemupukan berlebihan, hilangnya habitat, beban atas air tanah, bahan makanan tercemar bahan yang merusak sehingga menimbulkan risiko kesehatan pada penduduk.

Selain itu, pengejaran industrialisasi, yaitu penyesuaian pesat pada teknologi yang ada dan penggunaan sumber daya yang melampaui batas, merupakan beban lingkungan di negara berkembang. Hal sangat negatif adalah pencemaran udara dan pencemaran air, apalagi instalasi penyaringan dan pembuangan yang tidak memadai atau tidak ada, serta tidak memadainya penerapan aturan limbah gas (kalapun ada).

Situasi sulit ini dipertajam oleh perkembangan kota, di beberapa negara berkembang berlangsung dalam kecepatan luar biasa. Penduduk kota padat seperti Mexico City, Kalkuta, Bombay, Jakarta, New Delhi, Manila, Teheran, Karaci, dan Bogota, menurut studi Global 2000 akan bertam-

bah dua kali lipat tahun 1980-2000, mungkin malah akan tiga kali lipat. Dengan meluasnya daerah kumuh (\rightarrow tempat tinggal), masalah penyediaan air minum, pembuangan limbah, pencemaran udara, penghabisan alam akan makin potensial, serta akibat negatif untuk kehidupan dan kesehatan penduduk.

Perlu juga diperhatikan bahwa di tahun '80-an ekspor limbah mengandung racun dan radioaktif dari negara industri ke negara berkembang makin legal dan makin dikenal. AS membuang limbahnya ke daerah Karibia, Brasilia, dan Meksiko; negara-negara Eropa bisa mendapatkan izin dari negara-negara di Afrika, seperti Maroko, Benin, Senegal, Kongo, Guinea, dan Nigeria untuk mengekspor limbah industri beracun ke sana; Jepang juga memakai kesempatan ini dalam hubungannya dengan negara-negara Asia Tenggara yang miskin. Keuntungan jangka pendek ini (terutama penerimaan devisa) berakibat negatif untuk kesehatan dan lingkungan. Ongkos untuk penyimpanan atau mengatasi kerugian akibat tumpukan limbah ini sangat mahal artinya bagi negara berkembang. Negara industri dalam hal ekspor limbah beracun ini memakai kesempatan kurangnya kesadaran mengenai lingkungan dalam diri pejabat-pejabat di negara berkembang, korupsi yang meluas dan tidak adanya aturan masalah perlimbahan. Sama saja halnya dengan pemindahan industri yang mencemari lingkungan atau proses produksi yang berbahaya di negara-negara Dunia Ketiga.

Akibat kerusakan lingkungan di negara berkembang mengena langsung terutama manusia yang hidup di sana. Manusia di negara industri juga merasakan bahan beracun ini melalui rangkaian bahan makanan yang sebelumnya diekspor ke negara berkembang (terutama bahan untuk bertanam). Masalah sulit adalah masalah global, misalnya emisi CO₂ yang keluar dari api yang dibakar manusia di hutan tropis memanaskan atmosfer melalui "efek rumah kaca" (sementara di negara industri pembakaran energi yang berasal dari fosil paling banyak menimbulkan emisi).

Jika *trend* demikian terus berlangsung, mencairnya massa es dan kutub-kutub akan menyebabkan kenaikan permukaan air laut. Jika tidak ingin terjadi bencana lingkungan (banjir, badai laut), perlu melindungi pulau atau daerah pantai melalui pembangunan bendungan-bendungan berongkos mahal. Untuk pertanian ada konsekuensi-konsekuensi: turunnya panen, pemindahan besar-besaran daerah penanaman, terlalu banyak atau terlalu sedikit hujan, perubahan sama sekali sistem pengairan, dan makin banyaknya badai.

Selanjutnya, kerusakan produksi pertanian di seluruh dunia akibat kerusakan lapisan ozon, penipisannya disebabkan oleh gas yang keluar dari industri, dan dari metan yang berasal dari peternakan, yang membuat sinar violet merah makin kuat masuk ke bumi.

Akhirnya, masih perlu diteliti, sejauh mana organisasi internasional atau LSM bisa menangani masalah kerusakan lingkungan ini. Di antara

para pakar dan politikus sekarang ini terjadi sebuah konsensus bahwa masalah lingkungan di dunia hanya dapat diatasi melalui "politik dunia" yang ekologis, dilakukan oleh rezim-rezim yang mampu berfungsi (*international governance*). Organisasi-organisasi internasional seperti UNEP, UNDP, FAO, WHO, sesuai dengan mandat yang mereka terima, berusaha mengembangkan kegiatan-kegiatan ke arah sana. Tahun 1985 diresmikan *World Resources Institute* dari FAO dan UNDP, serta *Tropical Forest Action Plan* dari Bank Dunia, dalam waktu 5 tahun menelan investasi 8 miliar US\$ untuk usaha penanaman kembali dan memerangi deforestasi.

Di bawah pimpinan UNEP tahun 1985 berlangsung Konferensi Wina. Di sana dan dalam konferensi kelanjutannya di Montreal (1987), 24 negara dan MEE merundingkan penandatanganan perjanjian untuk melindungi lapisan ozon. Direncanakan, pengurangan pemakaian H₂FC₁₀ dan halogen sebanyak 50% sampai tahun 1995 dibandingkan tahun 1986. Untuk negara berkembang, batas pengurangannya lebih kecil supaya tidak membebani pembangunan. Namun, Perjanjian Montreal dianggap usang oleh para pakar karena nilai batasnya terlalu rendah dan sulit mencapai sasaran di masa depan. Dengan dasar ini, Maret 1989 sebanyak 24 kepala negara dan pemerintahan dalam "Deklarasi Haager" tentu saja dengan menghormati kedaulatan masing-masing—menuntut PBB untuk mengolah ambang batas tertinggi emisi bahan berbahaya dan

di masa depan mengawasi tidak dilanggarnya batas ini. Untuk itu Mahkamah Internasional mendapat peran baru sebagai wasit pada konflik-konflik lingkungan internasional.

Perjanjian lingkungan internasional terbesar kedua (setelah perjanjian mengenai perlindungan lapisan ozon) adalah mengenai penyimpanan dan transportasi limbah beracun. Pada perundingan perjanjian yang diputuskan Maret 1989 ini, timbul konflik antara sejumlah negara berkembang dan negara industri, terutama negara-negara Afrika ingin melarang sama sekali ekspor limbah beracun dari negara industri Barat, sedangkan beberapa negara industri seperti AS dan Jerman ingin supaya pintu tetap terbuka untuk transportasi limbah dari Utara ke Selatan. Pada Konferensi Basler yang diikuti 117 negara dan diorganisir oleh UNEP, di antaranya tercantum: a. larangan transportasi limbah ke-40 negara yang secara prinsipil tidak menginginkan adanya limbah beracun dari luar negeri; b. lalu lintas limbah beracun keluar dari batas-batas negara hanya diizinkan jika negara pengekspor tidak memiliki teknologi pengolahan limbah memadai, sedangkan negara pengimpor memilikinya; c. pembentukan sekretariat yang menerima pengaduan, mengawasi transportasi, dan melakukan pertukaran informasi; d. wajib lapor untuk transportasi limbah berbahaya, baik kepada sekretariat maupun kepada negara-negara yang disinggahi dan harus mendapat persetujuan mereka terlebih dahulu.

Kritikus Konvensi Basler memperlihatkan klausul umum yang meng-

ambang tersebut, yang memungkinkan pelanggaran perjanjian, misalnya perjanjian bilateral mengenai perdagangan limbah antarnegara, serta kurangnya personal sekretariat dan prosedur ratifikasi konvensi yang rumit. Apakah tujuan yang diinginkan, yaitu mengurangi produksi limbah beracun dan mengurangi secara drastis bisnis legal dan ilegal dengan limbah berbahaya, jelas bergantung pada politik perlindungan lingkungan di negara industri sendiri. Tahun 1988 forum "Iklim dan Pembangunan" terlembaga sebagai konferensi NGO di Hamburg. Rencana yang diajukan sebagai usaha untuk menghadapi bencana lingkungan tidak mendapat suara mayoritas. Kritik juga ditujukan terhadap politik Bank Dunia dan IMF: mereka menunjang penebangan kayu di daerah Amazona, membiayai proyek-proyek bendungan raksasa yang menyebabkan kerusakan lingkungan besar-besaran dan krisis utang Dunia Ketiga (→ utang), semuanya menyebabkan kerusakan lingkungan, yaitu melalui ekspor kayu tropis. Tawaran IMF dan Bank Dunia untuk suatu pengujian ketahanan lingkungan dan penyediaan uang untuk program reforestasi, dianggap sebagai ganti rugi yang tidak seimbang terhadap kerusakan sekarang ini yang dianggap sudah tidak bisa diperbaiki lagi.

Politik pembangunan yang adil terhadap lingkungan tidak boleh hanya bertopang pada organisasi internasional. Hal yang juga penting adalah sebuah pengujian ketahanan lingkungan pada proyek pembangunan di negara berkembang sendiri, dengan persyaratan yang sesuai de-

ngan lingkungan, produksi yang berorientasi ekologi, dan teknologi tepat guna yang memperhatikan terjaganya sumber daya alam. Di samping menolak impor kayu tropis, ekspor pestisida, dsb. perlu lebih memperhatikan saran-saran FAO dan OECD. Mereka menganjurkan bahwa untuk ekspor produksi dalam bidang kimia harus memperhatikan undang-undang nasional (uji resmi, kode, petunjuk pemakaian dalam berbagai bahasa, kartu tanda dari usaha perlindungan).

Kepustakaan: BMZ (ed.), "Umwelt und Entwicklung", dlm.: *BMZ-Materialien*, no. 77/1987; J. Freiberg, et al (ed.), *Drei Welten - eine Umwelt*, Saarbrücken 1984; V. Hauff (ed.), *Unsere gemeinsame Zukunft, Weltkommission für Umwelt und Entwicklung*, Greven 1987; M. Wöhlecke, *Umweltzerstörung in der Dritten Welt*, München 1987; P. Harrison, *Afrika stirbt nicht*, Reinbek 1988; Deutscher Bundestag (ed.), *Schutz der Erdatmosphäre: Eine internationale Herausforderung, Zur Sache 5/88*, Bonn 1988; Worldwatch Institute Report, *Zur Lage der Welt 88/89*, Frankfurt 1988.

ms

ekonomi subsistensi Produksi pertanian primer atau seluruhnya untuk pengadaan sendiri dan bukan atau hanya sedikit untuk memasok pasar. Sistem ini tidak tercakup dalam daur-ulang moneter dan perekonomian nasional sebuah negara berkembang. Berbeda dengan kesalahpahaman yang meluas di dunia, perkiraan untuk ekonomi subsistensi ternyata juga masuk dalam perhitungan pendapatan nasional. Ekonomi subsistensi berarti kehidupan pada tingkat subsistensi, kemampuan subsistensinya dipertanyakan. Jadi, ekonomi subsistensi-lain dengan kesalahpahaman selanjutnya dari kritik atas masyarakat industri di negara industri-tidak

memiliki perspektif normatif. Petani subsistensi-termasuk sebagian besar buruh tani tanpa atau dengan pemilikan tanah-membentuk bagian besar penduduk pedesaan miskin yang belum dikaitkan dalam proses pembangunan. Pengaktifannya tidak mudah karena alasan struktur yang sudah mapan (tradisi, pendidikan, struktur pertanian, dsb.).

dn

eksogen Disebabkan dari luar/datang dari luar (kebalikan dari endogen). Dalam diskusi mengenai sebab dan situasi kelangsungan keterbelakangan, faktor-faktor eksogen adalah sesuatu yang tidak berdasarkan sejarah dan masyarakat negara berkembang itu sendiri, melainkan karena situasi di luar atau eksterennya, misalnya pembagian kerja internasional, kolonialisme, dan imperialisme, tata ekonomi dunia yang berlaku, dsb.

dn

Ekuador Sepanjang sejarahnya mengalami beberapa kali pertukaran rezim yang sebagian besar otoriter. Sejak tahun 1979 Ekuador kembali di bawah pemerintahan yang demokratis. Meskipun ada konflik dalam negeri di tahap awal dan masalah ekonomi besar yang belum terselesaikan sampai sekarang, sistem demokrasi tetap dapat dipertahankan. Dua peralihan pemerintah (1984 dan 1988) berlangsung dengan damai dan lancar.

1. Ekuador (luas 269.178 km² - tanpa daerah yang dipertikaikan dengan Peru) dibagi menjadi tiga daerah oleh Pegunungan Andes. Daerah pantai dengan perkebunan berorientasi ekspor (pisang, beras, gula, kakao, kopi); Sierra, daerah tempat

hidup sekitar separo penduduk dengan pertanian untuk pasar dalam negeri (gandum, kentang, peternakan); daerah timur yang jarang dihuni dan menjadi penting karena ada tambang minyak. Dengan ibu kota Quito (sekitar 1,2 juta penduduk) dan kota pelabuhan Guayaquil (sekitar 1,5 juta penduduk), Ekuador memiliki dua sentra yang bersaing dan menjadi pusat usaha industri serta tempat bekerja 80% pekerja industrinya.

2. Dari sekitar 10,2 juta penduduk, sekitar 52,3% hidup di kota. Kepadatan penduduk adalah 38 penduduk/km², pertumbuhan penduduk tahunan rata-rata 2,9%. Komposisi etnis: 40% Indian dan Mestis; kulit putih 10%, kulit hitam dan Mulat masing-masing 5%. Bahasa resmi adalah Spanyol. Orang Indian di Sierra kebanyakan berbahasa *Quechua* dan *Chibcha*. Sekitar 89% penduduk beragama Katolik.

3. Karena *United Fruit Company* lebih menyukai jenis pisang lain, sejak tahun '60-an pangsa pengambil pisang dari AS turun sekitar 30% sampai akhir tahun '70-an; pangsa komoditas ekspor yang pernah sangat penting itu turun drastis (tahun 1979 hanya tinggal 10,5%; tahun 1988: 6,6%). Demikian pula setelah *boom* minyak berlalu (1983: 70,4% penerimaan ekspor) karena jatuhnya harga minyak (1986) dan kegagalan produksi akibat rusaknya tanaman *strawberry* (1987), hanya minyak yang merupakan pembawa devisa terpenting. Komoditas ekspor andalan tahun-tahun terakhir adalah udang (tahun 1988: 18,8% hasil ekspor). Tahun 1988 Ekuador naik menjadi negara pengeksport

udang terbesar di dunia. Bagian penduduk dalam PDB adalah 15,1%—*trend* menurun terus di tahun '80-an. Karena sepertiga pekerja bekerja di sektor ini (33,5%), tetap pertanian mempunyai arti penting. Hanya sekitar 9,5% luas tanah keseluruhan dimanfaatkan untuk pertanian, sebagian besar potensi pertanian belum digali. Pembagian tanah ditandai sangat tidak adil, reformasi pertanian tahun 1972 juga tidak membawa perubahan penting. Menurut sensus pertanian tahun 1974, 2,2% usaha mencakup hampir 50% lahan pertanian. 66% usaha mempunyai lahan kurang dari 5 ha. Di daerah pantai luas usaha pertanian per satuan rata-rata dua kali lipat daripada di Sierra.

4. Indikator perkembangan sosial Ekuador dibandingkan daerah Amerika Latin lainnya ada di daerah tengah sampai bawah: PNB per kapita tahun 1989: 1.020 US\$. Tingkat hidup rata-rata 66 tahun. Tingkat buta aksara 82%. 1 dokter untuk 773 penduduk. 1 tempat tidur di rumah sakit untuk 550 penduduk. Sekitar 20% penduduk di kota tidak mendapat pengadaan air minum, di desa hanya sekitar 10% penduduk mendapat saluran air minum. Sekitar 40% penduduk kota hidup dalam situasi miskin yang ekstrem, dengan akibat kurang makan dan kelaparan. Meskipun mulai ditetapkan UU mengenai lingkungan, kerusakan lingkungan di daerah padat sangat meningkat tahun '80-an (→ ekologi).

5. Tahun 1830 Ekuador berhasil melepaskan diri dari Kolombia Raya dan mendapat kemerdekaan politik. Dalam sejarah ekonominya pernah

mengalami *boom* karet dan kina tahun 1870-an yang berlangsung sampai tahun 1920, diikuti *boom* kopi yang tidak lama. Jatuhnya harga kakao mengakhiri tahap oligarki yang bertopang pada sebuah kompromi politik antara kaum liberal di daerah pantai dengan kaum konservatif di daerah pegunungan. Kemudian, diikuti masa ketidakstabilan ekonomi dan politik (1925-1948). Serangan dari Peru tahun 1941 menyebabkan Ekuador kehilangan daerah di hutan Amazona seluas 200.000 km². Tahun '50-an berlangsung *boom* ekspor pisang, tetapi awal tahun '60-an kembali turun sehingga kembali mengakibatkan situasi yang tidak stabil. *Caudillo Jose M. Velasco Ibarra selama 40 tahun selalu berhasil kembali ke kekuasaan melalui kudeta militer maupun pemilu. Ketika tahun 1972 kaum populis dipimpin A. Bucaram berusaha memenangkan pemilihan presiden, militer melakukan kudeta. Politik reformasi militer yang berorientasi ke model Peru, mula-mula didukung oleh rakyat. Kenaikan harga minyak tahun 1973/1974 (sejak tahun 1973 Ekuador menjadi anggota *OPEC) dan melonjaknya hasil ekspor sebagai akibatnya (tahun 1974 naik 63%), memberikan (→ rezim otoriter) situasi yang menguntungkan bagi rezim militer untuk melakukan reformasi, sayangnya tidak pernah digunakan. Pada akhirnya, situasi mayoritas penduduk menjadi lebih buruk daripada sebelum kudeta militer. Tahun 1976 fraksi militer konservatif menggantikan pimpinan nasional-reformis dipimpin oleh Rodriguez Lara dan membawa secara perlahan

ke arah *demokratisasi yang dengan referendum Januari 1978 mendapat persetujuan mayoritas untuk UUD baru, dan diakhiri dengan pemilihan presiden Juli 1978 dan April 1979.

6. Dari pemilihan presiden tahun 1978 (ronde pertama) dan tahun 1979 (ronde kedua), Jaime Roldos, calon dari koalisi antara kaum populis dan Kristen Demokrat, meraih kemenangan. Konflik antara presiden yang mempunyai hak dekretasi serta veto yang besar berdasarkan UUD tahun 1978 dengan parlemen satu kamar mempunyai potensi obstruksi sama besarnya, terutama antara fraksi populis yang mayoritas dipimpin Bucaram dan presiden yang berasal dari pihak mereka, menjebloskan demokrasi baru tersebut ke tahap awal krisis yang berat. Setelah Roldos meninggal (1981), wakil Presiden Osvaldo Hurtado menggantikannya. Kemenangan dalam pemilu partai kanan-tengah dengan calon, Leon Febres Cordero, tahun 1984 berarti suatu peralihan kekuasaan: pemerintah populis Kristen-demokrat digantikan presiden yang liberal-kanan dengan haluan stabilisasi yang ortodoks (swastanisasi, menunjang persaingan dan investasi langsung asing, meningkatkan hasil ekspor). Konsep ini hancur dengan jatuhnya harga minyak. Situasi ekonomi yang sudah sulit menjadi makin buruk. Demonstrasi massa dan aksi mogok makin bertambah. Dalam pemilu tahun 1988 calon *Izquierda Democratica* (ID) yang sosial-demokrat, Rodrigo Borja, didukung kaum Kristen-demokrat berhasil mengalahkan kaum populis. Ia mengumumkan sebuah stra-

tegi berorientasi pasar dalam negeri untuk mengatasi krisis ekonomi yang berat (tahun 1988 tempat kerja kurang 50%, utang luar negeri mencapai 9,4 miliar US\$), tetapi tetap mempertahankan beberapa elemen politik para pendahulu. Militer, tetap merupakan faktor kekuasaan yang penting, secara keseluruhan tidak menunjukkan keinginan mengambil alih kekuasaan karena melihat situasi ekonomi dan perpecahan internal dengan beberapa pemberontakan. Lagipula, mayoritas fraksi militer reformis sampai sekarang tetap setuju dengan pemerintah. Akan tetapi, hal ini bisa berubah jika terjadi kegagalan ekonomi.

Kepustakaan: A. Abad Franco, *Parteiensystem und Oligarchie in Ecuador*, Berlin 1974; K.-D. Hoffmann, "Ecuador"; dlm.: *HDW II*, 2, Hamburg 1982, hlm. 219 dst.; K.-D. Hoffmann, *Militärherrschaft und Entwicklung in der Dritten Welt. Der Fall Ecuador unter besonderer Berücksichtigung des Militärregimes 1972-1979*, Saarbrücken/Fort Lauderdale 1985; D. Nohlen/H. Barrios, "Redemokratisierung in Südamerika", dlm.: *APuZ 4/1989*, hlm. 3 dst. **hb elemen tunjangan** Ukuran untuk tingkat keringanan pinjaman atau kredit (*grant elements*) dengan syarat pembiayaan (suku bunga, tempo, artinya waktu sampai pembayaran pengembalian modal pertama) berbeda dengan persyaratan yang biasa ada di pasar (diasumsikan tingkat bunga 10%). Sebuah tunjangan yang murni (*grant*) memiliki elemen tunjangan 100%, dengan persyaratan di pasar berjumlah nol. Pinjaman murah bergerak antara kedua batas ini, perbedaan antara elemen tunjangan dan persyaratan pasar terlihat dalam %. Persyaratan IDA (bunga 0,75%/tempo 50 tahun/10 tahun bebas), mi-

salnya mempunyai *grant element* sebesar 83,4%. **dn**

El Salvador Usaha AS untuk membuat model tandingan yang reformistis terhadap revolusi Sandinista di Nikaragua melalui demokratisasi El Salvador, gagal terus. Di akhir masa Presiden Duarte Juni 1989 masih berlangsung perang saudara dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan dan ditolerir oleh pemerintah; konflik-konflik sosial belum terselesaikan.

1. El Salvador dengan luas 21.393 km² adalah negara terkecil, dengan sekitar 5 juta penduduk (perkiraan tahun 1989) adalah daerah terpadat (sekitar 238 jiwa/km²) di Amerika Tengah. Sumber daya alam terpenting adalah tanah vulkanis yang subur (sekitar 60 gunung berapi yang masih aktif); lahan pertanian yang subur di negara kecil ini makin habis. Hutan yang di awal abad ke-19 meliputi sekitar 60%-70% negara itu, telah menciut menjadi sekitar 6% dan nilainya hilang melalui eksploitasi semena-mena (→ ekologi). Erosi tanah dan gempa bumi berulang kali merusak pertanian. Jarang ada bahan mentah mineral, dan tidak ada gunanya digali.

2. Pertumbuhan penduduk di El Salvador tahun '80-an (tahun 1980-1986: 1,2%) termasuk terendah di Amerika Latin. Struktur etnis penduduk: sekitar 85% Mestis, 5% Indian, dan 10% kulit putih. Tingginya angka pengungsi mengoyak data kependudukan yang ada: menurut perkiraan organisasi gereja pemberi bantuan, pertengahan tahun '80-an ada sekitar 700.000-800.000 orang

Salvador melarikan diri ke luar negeri. Bahasa resmi Spanyol bersaing dengan bahasa Indian setempat. Sekitar 95% penduduk beragama Katolik.

3. Bersama negara Amerika Tengah lainnya (1821), El Salvador berhasil mendapat kemerdekaan dari Spanyol. Ketika bergabung dengan Meksiko sampai tahun 1839 berada dalam gabungan Amerika Tengah. Sampai abad ke-20 situasi politik ditentukan oleh rebutan kekuasaan antara oligarki konservatif dan liberal, paling sering dipimpin *caudillos* militer. Kerusuhan petani tahun 1931/1932 mencerminkan konflik yang makin tajam akibat krisis ekonomi dunia antara borjuis kopi dan penduduk pedesaan. Kerusuhan ini berakar pada ekspansi ekonomi kopi yang ekstrem dan kejam sejak pertengahan abad ke-19 dengan memakai kesempatan kemiskinan petani (terkecil dan buruh tani. Pemberontakan terjadi tahun 1932 dan berakhir dengan sebuah *la matanza* (pembantaian): tentara membantai barisan petani yang berbaris menuju ibu kota.

Sampai akhir tahun '70-an ada pembagian kerja dalam aliansi militer-oligarki: militer-melalui kudeta maupun pemilu-berkuasa, tetapi menyerahkan kekuasaan politik ekonomi ke tangan lapisan atas agro-industri. Modernisasi dan diversifikasi (kapas, gula) ekspor pertanian di tahun '50-an serta tahun '60-an berkaitan dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi dan industrialisasi yang padat modal (→ MCCA) sehingga menimbulkan marginalisasi penduduk berkelanjutan. Kepulangan imigran

El Salvador dari Honduras akibat "krisis sepak bola" (1969), menajamkan masalah kekurangan tanah dan tekanan penduduk.

Pemilihan presiden tahun 1972 menandai adanya jalur pemisah dalam perkembangan politik dalam negeri; pemilihan jelas dimanipulasi dengan merugikan J. Napoleon Duarte, calon bersama partai oposisi (diizinkan sejak tahun '60-an). Berkaitan dengan teror yang dilakukan atau ditolerir negara terhadap oposan yang moderat sekali pun dalam masa selanjutnya dan tidak ditepatinya janji reformasi pertanian, di tahun '70-an telah menjauhkan sebuah perubahan struktur pemilikan dan kekuasaan yang ada secara damai. Kelompok gerilya dan organisasi rakyat yang banyak pendukungnya menyerukan aksi mogok, demonstrasi, dan pendudukan tanah.

Pada 15 Oktober 1979 perwira-perwira muda yang ingin reformasi melakukan kudeta, mengumumkan reformasi sosial yang meluas, dan mengikutsertakan kaum Kristen demokrat dan sosial demokrat (PDC/*Partido Demócrata Cristiano*, Partai Kristen Demokrat dan MNR/*Movimiento Nacional Revolucionario*, Gerakan Nasional Revolusioner) dalam pemerintahan. Koalisi militer-sipil pecah tiga bulan kemudian karena perlawanan militer yang konservatif. Penggulingan kekuasaan perwira yang reformis dan represi yang terus-menerus, menyebabkan MNR dan banyak kaum Kristen demokrat yang tergabung dalam MPSC, keluar dari junta. Bersama dengan organisasi rak-

yat dan gerilya tahun 1980 mereka membentuk front oposisi (FDR FMLN/*Frente Democratico Revolucionario-Frente Farabundo Marti para la Liberacion Nacional*, Front Demokrasi Revolusioner-Front Farabundo Marti untuk Kebebasan Nasional). Januari 1981 pecah perang saudara.

Perkembangan politik di tahun '80-an menentukan berbagai kekuatan dalam blok kanan-tengah: militer sebagai "negara dalam negara" mengeluarkan keputusan dengan mengacuhkan pemegang mandat politik yang terpilih (sejak tahun 1982) dan memiliki *de facto* hak veto di semua bidang politik. Selama pemerintahan militer-sipil (dengan PDC, 1980-1982), militer mentolerir a.l. nasionalisasi bank-bank, reformasi pertanian (yang dihentikan tahun 1983), dan atas desakan AS melakukan pemilu (1982). Tentara dengan biaya AS berusaha mengakhiri perang saudara melalui *counterinsurgency* militeris dengan mengorbankan penduduk sipil. Terutama sekali PDC dan ARENA yang ekstrem kanan mempertikaikan mandat politik: PDC (1985-1988) memiliki mayoritas parlementer dan mengangkat presiden (J.N. Duarte) tahun 1985-1989; reputasi internasional dan perannya sebagai garansi bantuan AS memang menjamin ruang gerak politik untuk kaum Kristen demokrat, tetapi ini tidak cukup untuk memenuhi janji pokok Duarte dalam pemilu: mengakhiri perang saudara. Partai ARENA yang ekstrem kanan dan mendominasi parlemen tahun 1982-1984, pada pemilu parlemen tahun 1988 memperoleh 30

dari 60 mandat dan sejak Maret 1989 menempatkan miliuner kopi Alfredo Cristiani sebagai presiden. Mereka mewakili terutama lapisan atas yang bertradisi reaksioner, mendesak Presiden Duarte selama pemerintahannya untuk "membasmi gerilya", menentang keras nasionalisasi dan pengaruh AS. Untuk pertama kalinya partai-partai kiri ikut pemilu tahun 1989. Calon dari ikatan pemilu kiri (Konvergensi demokrasi), G. Ungo, tahun 1979 anggota junta reformis hanya mendapat sekitar 3% suara. Lagipula, gerilyawan telah menyerukan boikot pemilu setelah tawaran mereka untuk ikut pemilu pada pemilu yang diundur enam bulan, diblokir pihak kanan. Hanya sekitar 55% penduduk yang boleh memasukkan suara ke kotak pemilihan.

4. El Salvador merupakan prototip sebuah pertanian ekspor, memiliki sedikit jenis pertanian (kapas, gula, terutama kopi) yang menyumbang 2/3 dari seluruh penerimaan devisa. Akibatnya, ekonomi sangat bergantung pada gerak naik-turun harga dan permintaan di pasar dunia. Pertanian memperlihatkan ciri pertentangan antara usaha besar yang berjumlah sedikit, modern, dan berorientasi ekspor dengan ekonomi subsistensi dan ekonomi (ter)-kecil yang jumlahnya tak terhitung. Ekonomi subsisten kebanyakan berada dalam situasi pengolahan tanah dan penanaman yang tidak pasti (tanah yang berkualitas rendah, kurang modal, dsb.) bercocok tanam bahan pangan dasar (jagung, jawawut, kacang, beras) untuk kebutuhan sendiri dan kebutuhan dalam negeri. Berbeda de-

ngan negara MCCA lainnya, modal asing tidak berperan dalam pertanian dan industri (titik berat: industri pangan, industri makanan, dan industri tekstil) di El Salvador. Monopoli ekonomi dimiliki oleh sekelompok lapisan atas agroindustri—julukan: *las catorce*, si 14 (keluarga)—kepentingannya sangat terganggu oleh nasionalisasi dalam sektor ekspor dan keuangan serta rencana reformasi pertanian di awal tahun '80-an. Lagipula, El Salvador (sedang dalam perang) sangat bergantung pada bantuan ekonomi dan bantuan militer, serta perdagangan dengan AS.

5. Indikator pendidikan dan kesehatan di El Salvador (→ Tabel 4 di lampiran) khas untuk negara berkembang. Situasi kesehatan (terutama sekali di pedesaan) makin buruk karena tingginya jumlah orang yang luka dalam perang. Pendidikan meskipun ada wajib sekolah untuk anak berumur 6–14 tahun dan bebas uang sekolah untuk sekolah negeri, tetap tidak cukup karena kekurangan guru, murid, dan bahan pelajaran. Tingkat harapan hidup tahun 1986 rata-rata (seperti negara Amerika Tengah lainnya yang sedang berkecamuk perang saudara, Nikaragua dan Guatemala) 61 tahun.

Kepustakaan: J. Dunkerly, *The Long War: Dictatorship and Revolution in El Salvador*, London 1982; A.-A. Guha/F. Nuscheler, "El Salvador", dlm.: *HDW II*, 3, Hamburg 1982, hlm. 62 dst.; E.A. Baloyra, *El Salvador in Transition*, Chapel Hill 1982; *ibid.*, "The Seven Plagues of El Salvador", dlm.: *Current History*. Des. 1987, hlm. 143 dst.; W. Gietl, "Counterinsurgency" und Demokratisierung in El Salvador und Guatemala, Ebenhausen 1987; Amnesty International, *El Salvador: "Death Squads" - A Government Strategy*, London 1988; S. Dillon, "Date-line El Salvador. Crisis Renewed", dlm.:

Foreign Policy, no. 73 (1988/1989), hlm. 153 dst.

Kepustakaan selanjutnya → Konflik Amerika Tengah.

mik embodied technology → alih teknologi.

employment and redistribution → distribusi pendapatan.

enabling clause Ketentuan Wewenang, sesuai Pasal XXIV Ayat 8 AD "GATT, adalah pengecualian dari prinsip preferensi utama (Pasal 1 AD GATT) dalam zone preferensi regional berbentuk uni bea yang "klasik", zone perdagangan bebas dan kecenderungan mengizinkan perjanjian untuk itu. Persetujuan GATT untuk setiap preferensi yang lain, perlu *waivers* (pembatalan) dari pihak-pihak GATT yang membuat perjanjian sesuai dengan Pasal XXV Ayat 5 AD GATT. Karena aturan ini jelas dikonsepsikan untuk zone integrasi regional antarnegara industri (Preferensi Utara-Utara), bukan untuk antarnegara berkembang (Preferensi Selatan-Selatan), sejak Konferensi Havana (1948) negara berkembang menuntut dilakukan reformasi klausul ini. Usaha ini hanya berhasil sebagian, yaitu memasukkan Bab IV (Perdagangan dan Pembangunan) ke dalam AD GATT tanggal 8 Februari 1965, serta pendirian sebuah komite untuk perdagangan dan pembangunan November 1964. 25 Juni 1971 diberlakukan "Sistem Preferensi Umum untuk negara berkembang, tetapi tahun 1979 berhasil dimodifikasi Pasal XXIV Ayat 8 AD GATT yang kaku itu.

Pada 28 November 1979 dalam rangka "Putaran Tokyo secara aklamasi antara pihak-pihak GATT di-

sepakati sebuah *enabling clause* yang bertujuan memudahkan pengolahan integrasi regional dan hubungan Selatan-Selatan: (paragraf 2, alinea c): pihak-pihak yang melakukan perjanjian GATT memberi negara berkembang preferensi khusus dari "perjanjian regional atau dunia yang menjanjikan pihak yang kurang berkembang dapat saling menghapuskan bea dan ... saling menghilangkan usaha non-tarif atas hasil-hasil yang dimasukkan dari sesama negara yang kurang berkembang itu". Dengan demikian, zone preferensi dalam hubungan Selatan-Selatan terbebas dari persyaratan Pasal XXIV Ayat 8, alinea a-c dalam AD GATT yang kaku dan pembuatan "zone untuk tempat preferensi perdagangan" yang tidak diizinkan lebih lanjut, serta memberi GATT haluan integrasi ekonomi dalam hubungan Selatan-Selatan. Tanpa langsung memakai Ketentuan Wewenang, ALADI yang didirikan tahun 1980, misalnya, memperlihatkan bagaimana pemakaian aturan integrasi ekonomi yang baru antarnegara berkembang.

Kepustakaan: Y. Abdulwaki, "Differential and More Favourable Treatment. The GATT enabling clause", dlm.: *JWTL* 6/1980; J. Huber, "The Practise of GATT in Examining Regional Arrangement under Article XXIV", dlm.: *JCMS* 1982, hlm. 281, dst. **wh**

encomienda Bentuk pengisapan atas orang Indian di bawah pemerintah kolonial Spanyol di Amerika Latin. Kerajaan Spanyol menganggap daerah yang dikuasainya sebagai hak milik, mewajibkan orang Indian memberi upeti, dan menghadiahkan pinjaman tanah (*mercedes*) kepada orang yang sukses menguasai daerah

lain. Namun, tanah itu tetap sebagai pinjaman dan tidak diberikan hak atas tanah. Melalui *encomienda*, kerajaan memaksa orang Indian bekerja di pertambangan dan perkebunan, sekaligus menghindarkan terjadinya feodalisme di sana. Bentuk latifundia baru di abad ke-19 menggantikan bentuk *encomienda* ini.

dn
endogen Muncul di dalam, datang dari dalam; berkaitan dengan penjelasan mengenai keterbelakangan atau hambatan dalam mengatasi masalah keterbelakangan. Faktor endogen menyebutkan sebab dan situasi tertentu yang ada di dalam negara berkembang, misalnya struktur yang berlaku dalam ekonomi dan masyarakat, kekurangan reformasi atau kesediaan berprestasi, dsb. Teori modernisasi serta teori dan strategi pertumbuhan ekonomi menekankan pentingnya arti faktor endogen, menguji keabsahan suatu pembedaan antara faktor endogen dan (lawannya) faktor eksogen.

dn
energi Menjamin pengadaan energi merupakan salah satu masalah penting dalam perkembangan manusia keseluruhan, terutama dalam kaitan konflik Utara-Selatan dan dalam hubungan Selatan-Selatan.

Dimensi ekonomi sampai kini berada di bagian depan permasalahan energi, di antaranya penyediaan jumlah energi yang cukup untuk jangka panjang dan pembiayaannya. Karena kenaikan pesat harga minyak, pengeluaran negara berkembang pengimpor minyak meningkat dari 8 miliar US\$ tahun 1973 menjadi sekitar 77 miliar US\$ tahun 1981. Akibatnya, neraca pembayaran menjadi kritis,

penurunan pertumbuhan, makin dibutuhkan modal investasi dan arus masuk modal dari negara industri untuk membayar minyak. Perbedaan situasi negara berkembang peng-eksport minyak dan negara berkembang pengimpor minyak ini menyebabkan perbedaan besar di Dunia Ketiga. Jatuhnya harga minyak (1986), memukul keras negara berkembang pengeksport minyak dengan penurunan hasil ekspor 46% dibandingkan tahun 1985 dan di lain pihak agak meringankan beban negara berkembang lain. Masalah ekonomi baru-baru ini makin dibebani ancaman efek rumah kaca (\rightarrow ekologi), terutama disebabkan oleh pelepasan zat asam arang pada pembakaran bahan bakar fosil. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai masalah pemakaian energi yang baik untuk ekosistem bumi.

Energi komersial tahun 1979-1983 bisa dikatakan konstan, meskipun ada konsumsi di seluruh dunia. Namun, sejak tahun 1983 naik 2%-2,5%/tahun. Pangsa energi (1987) yang berasal dari fosil (minyak, gas, dan batu bara) adalah 88%. Tahun 1960-1987 pangsa batu bara turun dari 46% menjadi 30,6%, gas bumi naik dari 14% menjadi 21%, minyak bumi naik dari 38% menjadi 45% (1979), dan jatuh kembali menjadi 37%. Pangsa tenaga air meningkat dari 5,6% (1973) menjadi 6,7% (1987), energi inti dalam kurun waktu tersebut naik dari 0,8% menjadi 5,2%. Jatuhnya harga minyak (1986) menyebabkan kapasitas penambangan, terutama di AS, turun. Situasi ekonomi memaksa melonggarkan penghematan energi sehingga untuk

tahun '90-an diperkirakan harga minyak akan naik, dan kembali lagi berarti kenaikan bagi OPEC.

Pengadaan energi negara industri sangat bergantung pada pasokan dari negara berkembang. Pemakaian energi, diukur dari perbandingan penduduk negara berkembang dan negara industri, terbagi sangat tidak merata. Tahun 1985 pemakaian energi penduduk Amerika Utara dan Eropa Barat (15% penduduk dunia) mencapai 45,2% pemakaian energi dunia, pemakaian di negara-negara Timur, termasuk Cina (30% penduduk dunia) berjumlah 33,1%, Amerika Latin 8,4% (5% penduduk dunia), dan Afrika 11,4% (2,6% penduduk dunia). Pemakaian energi primer komersial per kapita tahun 1986, misalnya di Kanada adalah 32 kali lebih tinggi daripada di India. Dalam kaitan ini perlu diperhatikan bahwa sekitar 70% manusia di negara berkembang memakai kayu sebagai sumber energi terpenting, tidak termasuk energi primer komersial. Namun, karena lebih banyak kayu yang dipakai daripada pohon yang ditanam kembali, kekurangan bahan bakar kayu menjadi masalah energi tambahan di negara berkembang. Menurut perkiraan FAO tahun 1980 saja sekitar 1,3 miliar manusia hidup di daerah kurang kayu; sampai tahun 2000 dikhawatirkan jumlahnya naik menjadi 2,4 miliar manusia.

Karena cadangan minyak bumi makin sedikit dan risiko besar dari energi tenaga inti, pemakaian sumber energi yang bisa diperbarui (regeneratif) makin menjadi penting. Di antaranya termasuk biomassa (*energy*

crops, limbah tanaman dan hewan, kayu yang jumlahnya tidak melebihi jumlah yang ditanam kembali), tenaga air, panas air laut, matahari, angin, serta panas bumi. Sementara itu, energi solar baru dikembangkan dalam percobaan-percobaan dan masih lama baru bisa dipakai, terutama biomassa dan tenaga air sekarang telah mempunyai arti penting, apalagi untuk negara berkembang. Menurut PBB, Brasilia mendapatkan hampir 60% energi dari penyandang energi yang bisa diperbarui: tahun 1986 negara tersebut merupakan produsen *biosprit* (etanol dari tebu yang memenuhi sekitar setengah kebutuhan bahan bakar Brasilia) terbesar di dunia, merupakan produsen kayu bakar terbesar kedua, dan memiliki kapasitas instalasi tenaga air keempat terbesar. India misalnya, sejak tahun 1985 menjalankan program untuk pemakaian energi angin. Sampai tahun 2000 diharapkan mencapai kapasitas 5.000 MW. Sekarang di beberapa negara berkembang ada program untuk mendapatkan energi melalui penghematan energi. Penyandang energi yang bisa diregenerasi juga membawa bahaya ekologi yang besar, misalnya pemusnahan hutan tropis, perusakan tanah melalui monokultur (pemakaian banyak pupuk dan pestisida), serta perampasan lahan yang sangat diperlukan untuk produksi pangan, perluasan penyakit melalui bendungan-bendungan besar, dan perusakan lingkungan sungai.

Semua permasalahan ini tahun '80-an makin diperhatikan di tingkat internasional. Selain program-program kredit dari Bank Dunia, EDF,

*UNDP, dsb., untuk sumber energi alternatif, makin mapan, di antaranya Konferensi Energi Sedunia (Munich tahun 1980, New Delhi tahun 1983, Cannes tahun 1986, Montreal tahun 1989) dan Komite PBB untuk Pembangunan dan pemakaian sumber energi yang dapat diperbarui. Sejumlah komisi menangani masalah energi dalam rangka kerja sama regional Selatan-Selatan (misalnya *OLADE, ASEAN Council for Petroleum; Asia and Pacific Development Centre; Pacific Development Centre; Pacific Economic Cooperation Conference*).

Kepustakaan: M. Massarat, *Weltenergieproduktion und Neuordnung der Weltwirtschaft*, Frankfurt 1980; F.Y. Göricke/M. Reimann, *Treibstoff statt Nahrungsmittel. Wie eine falsche energiepolitische Alternative den Hunger vermehrt*, Reinbek 1982; J.R. Frisch, *Future Stresses for Energy Resources. Energy Abundance: Myth or Reality? World Energy Conference in Cannes 1986/1987*, London 1986; International Energy Agency, *Renewable Sources of Energy*, Paris 1987; *ibid*, *Energy in non-OECD Countries*, Paris 1988; OECD, *Environmental Impacts of Renewable Energy. The OECD Compass Project*, Paris 1988.

bh enklave. Sebuah daerah luar yang dikelilingi oleh daerah sendiri; dalam penelitian mengenai negara berkembang dan sekarang sudah dalam bahasa politik, enklave telah menjadi definisi untuk sektor-sektor ekonomi tertentu di negara berkembang yang terutama hanya terikat dengan pasar dunia. Oleh karena itu, menggunakan teknologi yang sesuai kebutuhan pasar dunia dan sering ada di tangan modal asing. Enklave ekonomi terpisah dari sektor-sektor perekonomian nasional keseluruhan di negara berkembang yang secara geografis mengelilinginya dan sebagian berada dalam tingkat pramodern. Laba yang

dihasilkan di enklave tersebut mengalir ke metropol. dn

EPLF (*Eritrean People's Liberation Front*, Front Rakyat Pembebasan Eritrea) → Etiopia.

EPTA (*Expanded Program for Technical Assistance*) Program Perluasan untuk Bantuan Teknik → UNDP.

ERE Kesatuan Mata Uang Eropa yang berlaku sejak 1 Januari 1978, mulai menggantikan RE dalam lalu lintas pembayaran ME. Nilainya ditentukan oleh keranjang mata uang Eropa. Situasi hubungan perhitungan berubah setiap hari berdasarkan situasi pasar bursa. Sejak tahun 1979 secara taktis identis dengan ECU. dn

ESCAP (*Economic and Social Commission for Asia and the Pacific*) Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia-Pasifik ini sebelum 1974 bernama ECAFE (Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Timur Jauh). Berdiri tahun 1947 dengan 35 negara anggota.

Alamat: Rajadamnern Avenue, Bangkok 2, Thailand.

Kantor Indonesia: Jl. Merdeka 99, Bogor. dn
ESF → politik bantuan pembangunan AS.

Esquivel Perez, Adolfo Lahir tahun 1932, guru besar sastra yang memperjuangkan hak asasi manusia di Argentina. Sejak tahun 1977 memimpin organisasi perdamaian Kristen *servicio Paz y Justicia*. Tahun 1980 mendapat hadiah Nobel Perdamaian. ah

Etiopia Termasuk negara termiskin. Pangan dan etnis merupakan masalah pokok negara itu; meskipun dilakukan reformasi pertanian, program pemindahan penduduk dan pengakuan lebih banyak terhadap otonomi

regional, sampai kini masalah-masalah tersebut belum terselesaikan.

1. Etiopia (luas: 1,22 juta km²) termasuk daerah tropis; daerah dataran tingginya memiliki perbedaan iklim, vegetasi, dan pemanfaatan ruang: Kolla (sampai 1.000 m, panas, miskin hujan), Woina Dega (1.600–2.500 m, iklim sedang, daerah pemukiman utama, tanaman kopi, kapas, dan gandum), dan Dega (di atas 2.500 m, iklim dingin, peternakan). Eritrea dan Danakilland beriklim kering; Ogaden, propinsi perbatasan dengan Somalia di tenggara, terdiri atas padang rumput kering dan bersemak duri. Sumber daya pertanian Etiopia terbengkalai—sekitar 65% areal untuk pertanian. Jumlah hutan dari 40% menjadi 4% areal keseluruhan (→ ekologi) karena penebangan yang tidak terawasi (kayu bakar), perluasan pesat padang rumput dan produksi arang yang tinggi dalam 100 tahun terakhir. Etiopia tidak memiliki banyak kekayaan bumi, selain sedikit platina, nikel, dan potas (kalium karbonat), serta cukup banyak emas (dan garam laut).

2. Tahun 1989 diperkirakan berpenduduk sekitar 49 juta (kepadatan penduduk: 37,8 orang per km²; sekitar 1,5–3 juta orang Etiopia mengungsi ke luar negeri. Secara etnis-kultural, Etiopia sangat heterogen. Etnis terpenting: Oromo (35%), Tigre (20%), dan Amharen (15%) yang sejak zaman kerajaan sampai kini menjadi kelompok pemimpin. Selain itu, ada kelompok-kelompok etnis kecil, seperti Somalis (6%), Danakil, Afar, Gurage, Konso, dan

Arusi. Di Etiopia ada sekitar 70 bahasa dan 200 dialek. Bahasa utama: Oromigua, Amharigua, Tigrigua, *lingua franca* (bahasa resmi) adalah Amharigua. Inggris adalah bahasa internasional yang dipakai. Sekitar 40% penduduk beragama Islam, hampir separonya Kristen.

3. Etiopia memiliki sejarah dan kebudayaan yang berumur lebih dari 2.000 tahun. Kota-kota seperti Axum (Kerajaan Axumit, diperkirakan monoposisit Kristen), Lalibela dan Gondar merupakan pusat-pusat kerajaan yang silih berganti dengan kekuasaan yang beberapa kali terputus karena ancaman luar (masuknya Islam) dan kehancuran di dalam (kerajaan-kerajaan yang saling bertikai). Setelah kerajaan terpecah menjadi banyak kerajaan kecil dengan masuknya pengembara Oromo dari selatan, paro kedua abad ke-19, kekuatan pusat diperkuat kembali oleh empat kaisar (Tewodros II, Yohannes IV, Menelik II tahun 1889-1913, Haile Selassie tahun 1916-1975). Ancaman luar terhadap kerajaan oleh orang Mesir, orang Mahdi, terutama oleh politik kolonial Italia yang bersifat ekspansionistis di bawah pemerintahan Crispi, berhasil dilawan. Setelah tentara Italia kalah (tahun 1890 di Adua) melawan tentara Menelik, Italia harus mengakui kedaulatan Etiopia, tetapi tetap mempertahankan daerah jajahan, Eritrea (1890). Menelik dalam sejumlah perang berhasil menaklukkan daerah selatan dan timur Etiopia yang sekarang, dan dengan politik amharisasinya menindas etnis-etnis setempat (Oromo, Somali, Gurage, Danakil).

Setelah Menelik meninggal, di bawah Ras Tarife, tahun 1930 menobatkan diri sebagai Haile Selassie I menjadi *negus negesti* (raja di raja), mulai dikembangkan sebuah negara modern dengan kekuasaan pusat yang imperialistis dan baru berkonsolidasi setelah 5 tahun masa pendudukan Italia (1935/1936-1941). Amharisasi dan diskriminasi etnis-etnis lain (terutama Oromo) terus berlanjut, sementara reformasi (misalnya izin partai-partai politik, kebebasan pers) yang dituntut oposisi, tetap diacuhkan. Setelah berlangsung bencana kelaparan tahun 1973/1974 militer menjatuhkan kaisar (meninggal tahun 1975). Sebagai manusia terkuat dalam *Provisory Military Administrative Council* (PMAC, bahasa Amhar = *Derg*), muncul Mengistu Haile Mariam dari pertarungan berdarah antara militer dan kelompok-kelompok oposisi (puncak: "teror merah" tahun 1979).

Sejak tahun 1975, *Derg* membuat konsep sosialisme Etiopia dan menjalankan sebuah proses perubahan masyarakat secara mendasar dengan inti "reformasi tanah paling radikal dalam sejarah Afrika" (Bruene tahun 1988): nasionalisasi seluruh tanah tanpa ganti rugi, pembatasan kepemilikan lahan per keluarga maksimal 10 ha, larangan penyediaan lapangan kerja secara pribadi untuk penggarap dan buruh tani. Tindakan-tindakan lain adalah nasionalisasi bank-bank dan industri, reformasi UU kerja (upah minimal, larangan mogok tidak langsung), kampanye pemberantasan buta aksara secara besar-besaran, serta pembentukan persatuan petani

dan komite-komite kota. Politik reformasi *Derg* memang membuat pembagian lebih adil, tetapi masalah kesukuan tetap tidak terpecahkan—sementara itu di beberapa daerah timbul perlawanan sengit terhadap reformasi tersebut. Sampai tercapai stabilisasi situasi kekuatan dalam negeri di bawah Mengistu (1978), berbagai gerakan pembebasan menguatkan dirinya, misal di Eritrea—dianeksi Etiopia tahun 1962 dengan melanggar keputusan PBB tahun 1952 (otonomi dan federasi dengan Etiopia)—EPLF (*tujuan*: negara Eritrea merdeka); di Tigray, TPLF/*Tigre's People Liberation Front*, Front Pembebasan Rakyat Tigre (*tujuan*: otonomi regional dalam negara federasi Etiopia); di tenggara Front Pembebasan Oromo (OLF/*Oromo Liberation Front*), *tujuan*: negara Oromo merdeka. Dengan bantuan Rusia, Jerman Timur, dan tentara Kuba, pemerintah militer tahun 1978 dalam perang Ogaden mengalahkan Somalia dan menghadapi gerakan pembebasan makin dengan tangan besi. Situasi politik dalam negeri paling tidak di pusat, menjadi stabil pada akhir tahun '70-an melalui represi.

Sesuai prinsip sentralisme demokrasi, *Derg* mengawasi berbagai organisasi massa dan tahun 1979 mendirikan Komisi untuk Mengorganisasi Pekerja, tahun 1984 muncul sebagai *Workers Party of Ethiopia* (WPE; Sekretaris Jenderal: Mengistu). Ketika terjadi bencana kelaparan di Afrika Utara tahun 1984, pemerintah menjalankan program pemindahan penduduk dan kolektivisasi. Menurut perkiraan, sampai tahun 1988

sekitar 600.000 manusia dipindahkan ke daerah selatan yang subur, sebagian dengan paksaan dan cara yang tidak manusiawi. Menurut pemerintah, sampai September 1987 sekitar 8 juta manusia dipindahkan ke desa-desa yang baru dibangun. Motif resmi untuk itu berbunyi: menjamin situasi pangan dan pembangunan pedesaan; kritikus melihat dalam tindakan ini sebagai strategi menghadapi berbagai gerakan pembebasan. Februari 1987 melalui referendum Etiopia mempunyai UUD baru. UUD ini mendefinisikan Etiopia sebagai republik demokrasi rakyat dan WPE berfungsi penting. 14 Juni 1987 dilakukan pemilihan untuk rapat nasional (*shengo*) dengan 835 orang anggota dari 2.500 orang calon, yang kemudian memilih dewan negara, presiden negara (Mengistu), dan wakilnya. Setelah *Derg* dihapus (3 September), tanggal 10 September *Shengo* mengumumkan UUD baru dan memberi berbagai daerah lebih banyak otonomi. Namun, cara demikian tidak mengatasi konflik bersenjata: awal 1988 tanpa diduga muncul pemberontakan bersenjata di Eritrea dan Tigray. September 1989 diumumkan pemilihan di 14 daerah dari 29 daerah untuk *shengo* regional.

Dengan masuknya tentara Front Demokrasi Rakyat Revolusioner Etiopia (EPRDF/*Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front*) ke Addis Ababa bulan Mei 1991, berakhir perang saudara yang sudah berjalan 30 tahun di Etiopia. Setelah Mengistu melarikan diri, terpilihlah Meles Zenawi, pimpinan EPRDF, sebagai presiden. Ia menjanjikan se-

buah pemilu yang demokratis dalam waktu 1 tahun.

4. Pertanian menopang ekonomi Etiopia; tahun 1985 sekitar 80% penduduk hidup di pedesaan dan menghasilkan sekitar 44% PDB. Pertanian biasanya dilakukan secara subsistensi. Hanya beberapa hasil pertanian (di antaranya kopi, kulit, minyak kacang, dan kacang-kacangan) merupakan 70%–80% ekspor. Dibandingkan sebagian besar bekas daerah jajahan di Afrika, ekonomi Etiopia terintegrasi hanya sedikit di pasar dunia (→ integrasi). Sejak pertengahan tahun '60-an, Etiopia harus mengimpor gandum dalam jumlah besar. Kendala ekspor untuk produksi pertanian terutama adalah erosi tanah, infrastruktur yang buruk, konflik-konflik bersenjata, dan politik pertanian yang sampai kini tidak bisa memobilisasi sumber daya pertanian Etiopia. Perang dan musim kemarau menimbulkan situasi kurang makan terutama di Eritrea, Tigray, dan Wollo, meningkat secara dramatis sejak tahun 1984 sehingga Etiopia makin bergantung pada bantuan luar negeri, terutama bantuan pangan.

5. Etiopia termasuk negara termiskin di dunia (LLDC, MSAC), PNB 120 US\$ (1989) per kapita, terendah di dunia, demikian pula pemakaian kalori per kapita (→ Tabel 4 dalam lampiran). Harapan hidup memang naik dari 31 tahun (awal tahun '50-an) menjadi 38,5 tahun (akhir tahun '60-an) dan 46 tahun (1986), tetapi tetap rendah dibandingkan di Afrika sekalipun. Pengadaan kesehatan terutama di pedesaan sangat terbelakang. Di antara banyak

dokter yang bekerja di rumah sakit, hanya sedikit orang Etiopia. Kuota melek aksara tahun 1983 adalah 60% (1974: 6%) karena dilakukan kampanye pemberantasan buta aksara besar-besaran (sebagian besar ditunjang UNESCO). Sampai tahun 1985 pengajaran sekolah di seluruh negeri hanya dalam bahasa Amharis—merupakan bahasa asing bagi mayoritas penduduk.

Kepustakaan: B. Benzing/K. Wolde-Giorgis, *Das neue Äthiopien, Vom Kaiserreich zur Revolution*, Köln 1980; F. Halliday/M. Molyneux, *The Ethiopian Revolution*, London 1981; R. Osterkamp, "Äthiopien", dlm.: *HDW II*, 5, Hamburg 1982, hlm. 52 dst.; S. Brüne, *Äthiopien, Unterentwicklung und radikale Militärherrschaft*, Hamburg 1986; ibid, "Äthiopien", dlm.: R. Hofmeier/M. Schönborn (ed.), *Politisches Lexikon Afrika*, cet. ke-4, München 1988; E.J. Keller, "Revolution and State Power in Ethiopia", dlm.: *Current History* 87 (1988), no. 529, hlm. 217 dst.; Die Welt, "Blutige Unruhen überziehen Afrika", 16 Oktober 1991, dlm.: *BMZ-Spiegel der Presse*, 21/91.

mik/ah

etnis, etnisitas Sebutan untuk keanggotaan subjektif ke suatu kelompok etnis. Di negara-negara Dunia Ketiga, etnisitas sering menjadi penyebab konflik. Tanda-tanda sebuah kelompok etnis adalah kebersamaan kultural, terutama bahasa, serta situasi historis yang sesungguhnya atau yang dianggap, artinya sebuah tradisi bersama. Kelompok etnis dapat berubah, batasnya samar, dan tradisinya dapat dimanipulasi. Etnis menjadi penting artinya dalam situasi politik (misalnya dominasi politik, mobilisasi oleh elite, kurangnya peluang partisipasi), sosial (urbanisasi, peluang pendidikan yang tidak sama), atau ekonomi (pembangunan regional yang tidak sama, derivasi relatif), di antaranya dari pendekatan

kultural dapat menjadi kelompok solidaritas yang melakukan aksi sosial dan politik. Situasi yang membuat etnis berperan besar di Dunia Ketiga, diciptakan oleh kolonialisme, di antaranya memilah-milah etnis yang fleksibel ke kesatuan administrasi yang kaku dan dinamakan "suku" (tribalisme). Etnis diperangi dalam negara merdeka karena tidak sesuai dengan *nation building* (ancaman bahaya separatisme).

Etnis makin penting artinya dalam tahun-tahun terakhir, terutama dalam penelitian sosiologi politik di Afrika dan Asia yang mempertanyakan masalah sebab dan mengatasi konflik. Di samping itu diteliti, bagaimana etnis terintegrasi ke dalam sistem politik (kerangka pemikiran kultur-pluralisme). Di sini etnis sering mendapat penilaian berlebihan, dengan cara memberinya arti politik sejak semula. Sebaliknya diabaikan bahwa etnis merupakan akibat situasi politik, ekonomi, dan sosial tertentu, bukan titik tolak strukturalnya. **als** *etnomedicine* Antropologi yang membandingkan masalah kedokteran berdasarkan kultur, yang mengerti kedokteran, penyakit, dan konsep penyembuhan, termasuk konsep "ilmu pengetahuan Barat", sebagai bagian sebuah budaya dan dianalisis (→ pelayanan kesehatan).

hjd *etnosentrisme*, *etnosentris* Dalam diskusi teori pembangunan etnosentrisme dimengerti sebagai pengutamaan nilai dan keyakinan, misalnya Barat (eropasentrisme), dalam menilai hubungan, proses sosial, dan ekonomi daerah budaya yang lain. Dengan demikian didapatkan gam-

baran bahwa orientasi ke kultur masyarakat etnis yang dianggap unggul nilai-nilainya maupun situasi sebenarnya (*ist*) atau seharusnya (*soll*), akan menghasilkan perkembangan yang sesungguhnya. Dalam diskusi teori pembangunan yang dipenuhi asumsi etnosentris; etnosentris lebih merupakan ketidaktahuan daripada kebencian. Sementara teori modernisasi negara berkembang berpatokan kepada masyarakat industri kapitalis sebagai tujuan, teori pembangunan baru—tidak hanya kasus Iran—menekankan arti identitas masyarakat negara berkembang yang alternatif dan lebih sesuai dengan jalan pembangunan.

Kepustakaan: D. Perrot/R. Preiswerk, *Ethnocentrisme et Histoire. L'Afrique, l'Amerique indienne et l'Asie dans les manuels occidentaux*, Paris 1975.

dn *eurokredit* Usaha perkreditan yang dijalankan pusat uang Eropa (London, Luxemburg, Zurich, Paris) bukan dalam mata uang nasionalnya (75% US\$), tidak berada dalam pengawasan negara dan bebas dari wajib mempunyai cadangan minimal. Eurobank membiayai pusat uang *offshore* yang menjalankan eurokredit.

Kepustakaan: D. Lomax/P.T.G. Gutmann, *The Euromarkets and International Financial Policies*, London 1981; E.L. Versluisen, *The Political Economy of International Finance*, Westmead, GB 1981.

dn *evaluasi/kontrol keberhasilan* Semua usaha yang dilakukan untuk melihat hasil proyek atau program bantuan pembangunan. Makin banyak kegiatan bantuan pembangunan di tahun '60-an dan kebutuhan yang timbul akan sistematisasi proses pelaksanaannya, pengertian kontrol keberhasilan yang bersifat statis dan

hanya terbatas pada tahap hasil makin memerlukan pengertian evaluasi yang lebih luas. Evaluasi adalah penelitian sistematis proyek atau program, atau subbagian proyek atau subprogram yang sedang berjalan. Evaluasi dilakukan oleh organisasi penanggung jawab dan biasanya memakai penilai eksternal, yaitu yang tidak ikut menangani perencanaan dan pelaksanaannya. Tidak termasuk evaluasi dalam pengertian di atas adalah: a. pengujian proyek oleh organisasi yang ditugasi menjalankan proyek tersebut; b. perjalanan menjalin hubungan, informasi, dan konsultasi atau tinjauan singkat proyek (*spot checks*) oleh anggota lembaga penunjang; c. pengujian administrasi yang berhak dilakukan melalui hak budget; tetapi untuk rasionalisasi pengujian ini sering dilakukan evaluasi bersama; dan d. pengawasan terus-menerus (pengawasan berjalan) oleh lembaga penguji, termasuk reaksi terhadap usul atau masalah yang diperlihatkan dalam laporan personal proyek setempat—di dunia internasional dinamakan *monitoring*.

1. *Tipe evaluasi*: a. berdasarkan masa pelaksanaan proyek: 1) dalam tahap perencanaan: evaluasi *ex-ante*. Di sini evaluasi berarti memilih dan pra uji sebuah proyek/program dari sederet alternatif berdasarkan kriteria tertentu. Hal yang dievaluasi adalah penemuan, pemilihan, dan pra uji proyek; 2) tahap pelaksanaan: a) *operational-evaluation*, uji nilai ekonomi; yang diperiksa adalah kepatutan dan ketepatan usaha administrasi, pengawasan anggaran, dan perhitungan keuangan; b) *built-in evaluation*,

pengawasan berjalan dalam tahap implementasi; memeriksa efisiensi proyek/program berdasarkan analisis ongkos-kegunaan (→ rencana pembangunan), penggunaan sampai pada hasil yang didapat. Ini merupakan tahap terpenting dan secara kuantitatif terluas; dalam hal bantuan keuangan, di sini dilokalisasi penelitian proyek, pengawasan kemajuan, dan penggunaan serta subpengawasan keberhasilan; c) dalam tahap hasil: *impact evaluation*, melihat apakah tujuan yang dicanangkan benar-benar terpenuhi dan berusaha menilai hasil yang diperoleh untuk perkembangan ekonomi dan sosial bidang yang bersangkutan; b. berdasarkan bahan yang diuji: secara resmi dibedakan antara: 1) evaluasi dalam rangka manajemen proyek dan program yang sedang berjalan; 2) analisis masalah pokok (masalah kunci) sektor, bidang, dan tema yang mempunyai prospek di masa depan; 3) penelitian yang mencakup negara; 4) penelitian masalah pelaksanaan yang spesifik; dan 5) penelitian terhadap lembaga dan sarana.

2. *Evaluasi intern dan ekstern*. Evaluasi intern adalah kontrol diri organisasi, lembaga, atau manusia yang menangani perencanaan dan keputusan usaha yang dilakukan. Evaluasi ekstern berarti, evaluasi dilakukan oleh dinas atau orang tertentu yang tidak ikut ambil bagian dalam perencanaan, pengambilan keputusan, atau dalam manajemen usaha yang sedang diuji.

Dengan praktek evaluasi yang berkembang, penanganan kedua jenis evaluasi ini makin dipertanyakan

karena kegiatan uji pihak eksterne juga makin dikendalikan dan diawasi oleh administrasi yang menangani pembangunan.

3. *Tujuan evaluasi* diturunkan dari pertanyaan, siapa yang memerlukan informasi yang dapat dipenuhi melalui evaluasi. Evaluasi di sini dimengerti sebagai bagian dari perencanaan, pembuatan program, dan proses anggaran. Dianggap terutama sebagai evaluasi intern, dengan alasan bahwa mereka yang mempunyai tanggung jawab terhadap manajemen harus selalu bergantung pada harapan bahwa usaha yang telah diputuskan itu berjalan sesuai dengan bayangannya. Pusat sasaran evaluasi adalah penilaian hasil.

4. *Bahan evaluasi.* Evaluasi dapat dianggap tidak menyeluruh. Kapasitas personalnya yang terbatas memaksa untuk memilih proyek yang akan dievaluasi. Kegiatan menguji dipusatkan terutama pada: a. proyek atau program besar; b. proyek atau program yang mengandung risiko; c. proyek atau program yang rumit; d. proyek atau program jenis baru; e. proyek atau program berjangka panjang.

5. *Evaluasi yang berorientasi kebutuhan - pendekatan baru:* pengujian proyek atau program yang berorientasi pada kebutuhan tidak hanya mempertanyakan, apakah diciptakan lapangan kerja; melainkan lebih dari itu, yaitu: a. siapa mempekerjakan siapa; b. siapa mengkonsumsi produksi yang dihasilkan; dan c. apakah yang dikonsumsi itu memang perlu, apakah memang ada kebutuhan yang pantas untuk itu?

Untuk bisa melihat kebutuhan demikian dibuat anggaran rasional yang menggambarkan kebutuhan (konkretnya: sebuah keranjang barang dari barang pada konsumen terakhir), dibandingkan dengan konsumsi lapisan masyarakat yang berbeda-beda. Pemikiran dasar anggaran rasional ini adalah penolakan sebuah cara hidup dengan situasi bahwa ada yang boros dan ada yang kelaparan.

6. *Kesulitan metode dalam praktek evaluasi:* a. asumsi dasar yang ada dalam setiap proyek pembangunan sering aneh karena perlakuannya sampai sekarang hanya ada dalam masyarakat industri; b. untuk dapat menilai usaha politik bantuan pembangunan tertentu atau dapat menjelaskan kegagalan dalam hubungannya dengan modifikasi perencanaan, evaluasi harus mengenal faktor-faktor terpenting yang mempengaruhi sebuah kegiatan, terutama sekali persyaratan untuk awal kegiatan dan dalam perjalanan proyek, serta sarana yang dipakai untuk kegiatan tersebut, tetapi biasanya hanya terbatas kemungkinannya; c. dasar statistik untuk sebuah analisis situasi awal dan pengujian kontinu pengaruh proyek dan lingkungan sering tidak sempurna; d. pelaksanaan program yang kuasi-eksperimen tidak dimungkinkan karena proyeknya harus berjangka panjang dengan memperhatikan kelompok sasaran dalam bidang sosial, hubungan kausalitas antara kegiatan dan data pengamatan tetap tidak tajam; e. kriteria keberhasilan di satu pihak harus dalam kesesuaian logis dengan tujuan usaha pembangunan, di lain pihak secara empiris

dapat menyebar, artinya dapat didefinisi secara operasional. Sementara hal ini pada variabel ekonomi, teknik, dan ekologi relatif mungkin, terlihat sangat sulit pada variabel sosiologi dan psikologi untuk mengukur dan mengatur tujuan tertentu. Kesulitan metode ini terutama karena praktek evaluasi cenderung mengabaikan dampak sosiologis yang dapat objektif, dampak psikologi dari proyek pembangunan dan dampak non-ekonominya.

7. Masalah pengaitan hasil-hasil evaluasi: dengan pelaksanaan bertahap sistem perencanaan terbaru dan sistem manajemen dalam proses pengambilan keputusan politik bantuan pembangunan (terutama kerja sama teknik) serta perhatian yang meningkat terhadap dampak proyek, sejak awal tahun '80-an makin diperhatikan hubungan antara perencanaan-implementasi-evaluasi dan perencanaan baru.

Kepustakaan: D. Kantowsky (ed.), *Evaluierungsforschung und - praxis in der Entwicklungshilfe*, Zürich 1977; K. Bodemer, *Erfolgskontrolle der deutschen Entwicklungshilfe. Improvisiert oder systematisch*, Meisenheim 1979; E. Oehring *Ex-ante Evaluierung sozioökonomischer Wirkungen von industriellen Entwicklungsprojekten*, Baden-Baden 1980; UNIDO, *Guidelines for Project Evaluation*, New York 1982; P. Mosley, "The Politics of Evaluation: a Comparative Study of World Bank and Ukoda Evaluation Procedures", dlm.: *Development and Change* 14, nr. 4, 1983, hlm. 593 dst.; H.H. Lembke, "Project Appraisal in Development Assistance", dlm.: *Intereconomics*, th. 20, 1985, H. 5, hlm. 239 dst.; D. Schwefel (ed.), *Soziale Wirkungen von Projekten in der Dritten Welt*, Baden-Baden 1987.

kb
export-economy-model Model ekonomi ekspor, adalah model pengaitan ekonomi negara berkembang ke

ekonomi dunia. Lebih dari pengertian pembagian kerja internasional yang intinya juga struktur perdagangan luar negeri antara negara berkembang dan negara industri, model ekonomi ekspor demikian menekankan pada struktur produksi intern dan konsekuensi sosial dari proses pertumbuhan ekonomi yang tergantung dan berorientasi ke luar.

Struktur perekonomian nasional ditentukan oleh sektor ekspor yang karena ketergantungannya dari luar tidak mampu mempunyai pertumbuhan ekonomi yang maju dan berkesinambungan (model ekspor kolonial) atau menghadapi situasi salah pembangunan politik dan sosial yang berat (model ekspor kapitalis yang tergantung). Perubahan kutub ekonomi membatasi kedua model tersebut. Model ekonomi ekspor kolonial ditandai oleh elemen dan masalah dampak sebagai berikut. a. Dominasi barang primer dan keterbatasan hanya pada barang ekspor utama (monostruktur); b. kekuasaan modal asing dalam produksi perkebunan dan pertambangan serta dalam perdagangan (ekspor-impor), konsentrasi terutama pada perusahaan yang secara strategis kurang penting; c. integrasi sektor yang ekspansif ke ekonomi dunia dan pemisahan (desintegrasi) dari ekonomi setempat (enklave, *linkage-effects*) tidak ada produksi untuk pasar dalam negeri; d. efek tempat kerja minimal karena teknologi yang padat modal, ketidakseimbangan ekstrem dalam distribusi pendapatan, marjinalitas; e. penggunaan hasil ekspor untuk konsumsi barang mewah oleh oli-

garki ekspor untuk mempertahankan model tersebut (pembiayaan impor untuk *input* teknologi dan beban utang).

Model ekonomi ekspor kapitalis menyebabkan industrialisasi, perubahan struktur produksi secara mendasar dan terutama sekali diversifikasi perdagangan luar negeri dengan memakai tenaga kerja lokal yang murah.

dan
external economies Ekonomi eksternal, mempunyai efek yang dapat muncul baik di bidang konsumsi maupun di bidang produksi suatu perusahaan, dan menyebabkan ketidaksesuaian antara kegunaan umum dan pribadi dengan ongkos pribadi dan umum. Secara prinsipil perlu diperhatikan siapa yang menyebabkan kerugian/keuntungan, dan siapa yang menerima keuntungan/kerugian.

Dalam teori dan strategi pertumbuhan terutama sekali ditekankan efek induksi yang menimbulkan rangsangan produksi baru pada in-

dustri hulu (*backward-linkage*) atau perusahaan pengolahan lanjut (*forward-linkage*). Selanjutnya, dapat muncul efek ekstern positif untuk produksi dalam negeri dari infrastruktur psikis sebuah negara, yang kembali lagi dapat tercapai melalui dipkerjakannya tenaga kerja tidak terdidik (*learning by doing effects*). Selain itu, muncul efek eksternal negatif (*extern diseconomies*) yang menimbulkan ongkos sosial (kerusakan lingkungan) dan sebagian tidak langsung tergolong di dalamnya. Pengambilan model konsumsi Barat oleh negara berkembang (*snob-effect*, efek pamer internasional) dapat dimengerti sebagai *external diseconomies*. maka
extra-profit Jika dibandingkan dengan tingkat laba yang diperoleh modal di negara industri dan negara berkembang, *extra-profit* dimengerti oleh teori ekonomi marxis sebagai profit/laba yang berada di atas laba rata-rata yang dihasilkan modal di negara induknya. dan

F

FAC (*Food Aid Convention*) Konvensi Pangan PBB yang menetapkan sifat-sifat bantuan pangan dari negara-negara yang memiliki kelebihan pangan. FAC disepakati tahun 1967, 1971, 1980, dan 1986. Distribusi bantuan biasanya melalui WFP. **bt**

Fanon, Frantz Teoretikus revolusi anti-penjajahan, lahir tahun 1924 di Martinique, berasal dari keluarga petani, studi filsafat dan kedokteran di Perancis, berjuang sebagai partisan semasa Perang Dunia II. Fanon pergi ke Aljazair tahun 1953 sebagai dokter, tetapi tahun 1956 melepas jabatannya sebagai pemimpin klinik psikiatri dan membantu gerakan pembebasan nasional FLN. Pernah menjadi duta besar sementara Aljazair di Accra. Fanon meninggal tahun 1961 di New York karena leukemia. Fanon mewakili filsafat kekerasan yang berharap akan mempunyai dampak pembebasan dan integrasi massa yang ditindas dan diisap, sebagai jawaban atas sistem kekuasaan kolonial yang ada. Karya utama: *Yang Terkutuk di Bumi Ini* dan *Aspek-Aspek Revolusi Aljazair*. **dn**

FAO (*Food and Agricultural Organization of the United Nations*) Organisasi Pangan dan Pertanian

PBB, berdiri tahun 1945 sebagai organisasi khusus PBB. Kedudukan: sampai tahun 1951 di Washington, setelah itu di Roma; mempunyai 158 anggota.

Tugas-tugas: meningkatkan standar pangan dan produksi di dunia; memperbaiki hasil-hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan; serta memperbaiki situasi kehidupan penduduk pedesaan.

Kegiatan: FAO mengumpulkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi mengenai masalah pertanian dan politik pangan dunia, terutama negara berkembang, membuat usulan untuk mengatasi permasalahan ini melalui usaha di tingkat nasional dan internasional, memberi bantuan teknik dan bantuan dalam situasi darurat (terutama bahan pangan WFP) pada saat bencana kelaparan, yang diinformasikannya melalui sebuah sistem peringatan awal global. Tahun 1987 menempatkan sekitar 2.000 tenaga ahli pembangunan FAO untuk sekitar 2.700 proyek bantuan teknik; dalam 64 kasus diberikan bantuan situasi bencana alam.

Organisasi: konferensi anggota (setiap dua tahun) memilih sebuah dewan (49 anggota) yang sedikitnya

bertemu sekali setahun, begitu juga direktur jenderal. Selain itu, ada berbagai komisi khusus bidang untuk semua program dan koordinasi kegiatan FAO. FAO merupakan organisasi khusus PBB yang menangani masalah pembangunan, memiliki enam kantor regional yang besar, terwakili di lebih dari 75 negara dan tahun 1987 mempekerjakan sekitar 7.000 pekerja (di antaranya separo di kantor pusat di Roma).

Pembiayaan: anggaran dibiayai dari iuran wajib (dibedakan menurut kekuatan ekonomi) negara anggota, tahun 1988/1989 berjumlah 492 juta US\$ (tahun 1982/1983: 366 juta US\$). Proyek-proyek bantuan FAO hanya sedikit (tahun 1987: sekitar 12%) dibiayai dari anggaran reguler; sebagian besar ongkos proyek (1987) berjumlah 333 juta US\$, sebagian didapat dari dana *trustee* (kebanyakan dana negara industri Barat besar yang sukarela dan berkaitan dengan tujuan) dan sebagian dari dana UNDP. Sejak beberapa tahun, pangsa dana melebihi pangsa UNDP.

Berdasarkan keputusan konferensi anggota tahun 1987, Juli 1988 ditempatkan komisi ekstern yang melakukan revisi umum terhadap tugas-tugas, strategi, dan struktur organisasi FAO yang sejak beberapa tahun mengalami kesulitan keuangan. Dari negara industri datang tuduhan bahwa tugas-tugas operasional FAO (pelaksanaan proyek) tidak efisien dan terlalu menekankan diri sebagai organ utama strategi pertanian dan pangan dalam sistem PBB sehingga membebankan tugasnya.

Alamat: Via delle Terme di Caracalla, 00142 Roma, Italia.

Kantor Indonesia: Jl. Kebon Sirih 82-84, Jakarta Pusat.

bt
fasilitas Afrika Rekening khusus IMF (*Special Facility for Sub-Saharan Africa*) dibentuk dalam konferensi internasional negara-negara kreditor Februari 1985, untuk mengatasi situasi kritis Afrika. Sampai tahun 1988 disediakan 1,9 miliar US\$, sekitar 2/3 sebagai dana langsung dan sekitar 1/3 sebagai pembiayaan bersama. Dana diurus oleh IDA dan dipakai untuk penyesuaian struktur, terutama program untuk perbaikan pengadaan pangan.

dn
fasilitas minyak Rekening khusus IMF, yang dibentuk ketika terjadi kenaikan harga minyak bumi tahun 1974. Dari 3,05 miliar US\$ SDR, sejumlah 2,6 miliar US\$ dibayar oleh negara-negara OPEC. Negara berkembang dan negara industri dapat meminta kredit dari fasilitas minyak dengan bunga 6%-7% untuk tempo paling tinggi 7 tahun. Kredit ini digunakan terutama oleh negara berkembang.

dn
fasilitas pembiayaan keseimbangan Kredit tambahan untuk hak penarikan umum yang diberikan IMF ke negara anggota, jika kondisi-kondisi tertentu terpenuhi: kebutuhan kredit menjadi ada jika penurunan hasil ekspor bersifat alami untuk sementara waktu dan tidak dapat ditanggung oleh negara tersebut. Fasilitas ini dibentuk pertama kalinya tahun 1963 oleh IMF; persyaratan permintaan kredit dan tingginya volume kredit telah diubah beberapa kali; perubahan terbaru tahun 1984. Selain stabilisasi hasil dari ekspor barang, kini negara anggota dapat meminta kredit ke IMF jika terjadi perubahan kon-

jungtur yang mempengaruhi penerimaan dari pengiriman uang oleh buruh tamu yang bekerja di luar negeri dan penerimaan dari sektor *turisme (mulai tahun 1979). Negara-negara dengan defisit pangan dapat mengambil pembiayaan keseimbangan ini (mulai tahun 1981) jika terjadi kenaikan harga impor gandum. Batas penarikan (mulai tahun 1984) untuk kerugian ekspor dan kenaikan impor gandum berlangsung masing-masing 83% dari kuota, dengan ambang atas bersama dari kedua penarikan tidak boleh melampaui kuota 105%. **hpn favelas** → Brasilia, marjinalitas.

FCD → CEO.

F CFA → Franc-Zone.

F CFP → Franc-Zone.

feasibility study Studi proyek di prabidang perencanaan proyek; merupakan studi praprojek yang terutama menguji pertanyaan kelayakan pelaksanaan sebuah proyek; sehingga juga disebut studi kelayakan. **dn Federasi Afrika Tengah** → Zimbabwe.

Federasi Hindia Barat Usaha Inggris memerdekakan sepuluh negara di Hindia Barat milik Inggris tahun 1958 menjadi sebuah federasi, gagal tahun 1962 karena ulah Jamaika, Trinidad, dan Tobago. Mereka meninggalkan federasi dan menjadi tergantung, sementara *little eight* sisanya menjadi *Associated States* di bawah perlindungan setengah kolonial dari "negara induk". **fn**

FELICA (*Federacion Liberal de Centroamerica y del Caribe*) Persekutuan Partai-Partai Liberal Amerika Tengah dan Karibia; memperjuangkan perdamaian dan integrasi

ekonomi regional, kemajuan ekonomi dan sosial, melalui partisipasi yang demokratis, pluralistis berlandaskan proses tanpa campur tangan kekuatan-kekuatan ekstern dan ditunjang oleh parlemen Amerika Tengah. Anggota (1988): Partai Liberal (Honduras); UCD (Guatemala); PLI (Nicaragua); *Accion Democratica* (El Salvador); Partai Liberal (Panama); Partai Liberal *La Estructura* (Republik Dominika); dan *The National Congress* (Grenada). **pb**

FES (*Friedrich Ebert Stiftung*) Didirikan tahun 1925, merupakan yayasan politik Jerman tertua, dekat dengan Partai Sosial-Demokrat Jerman. FES melakukan kegiatan-kegiatan di negara berkembang melalui 7 bidang. *Titik berat kegiatan*: a. pendidikan politik kemasyarakatan untuk memotivasi dan memobilisasi perilaku yang relevan dengan pembangunan pada perorangan maupun kelompok, perluasan partisipasi politik, ekonomi, dan sosial. Kelompok sasaran utama adalah serikat buruh (bidang tersendiri untuk membantu serikat buruh), partai (mewakili posisi progresif dalam pengertian sosialisme demokratis), koperasi, organisasi perempuan dan remaja, organisasi-organisasi *community development*, dsb. FES juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah. Selain kerja sama bilateral (FES ↔ mitra di negara berkembang), FES dalam proyek-proyek kemasyarakatannya berusaha meningkatkan kerja sama antarnegara berkembang (→ hubungan Selatan-Selatan) agar dapat menarik pelajaran dari negara-negara tetangga masing-masing (desentrali-

sasi di Afrika bagian selatan, pendidikan di Amerika Tengah); b. pendidikan orang dewasa: membantu pusat-pusat pendidikan regional; selain pendidikan lanjut kejuruan dari lapisan luas penduduk, juga analisis dan diskusi situasi-situasi masyarakat dan politik di negara berkembang merupakan bagian dari program-program pendidikan untuk membantu menyelesaikan konflik-konflik yang ada (misalnya di Sri Lanka); c. membantu bentuk-bentuk perusahaan yang membuka kemungkinan bagi kelompok-kelompok penduduk yang dirugikan secara politik, ekonomi, dan sosial agar dapat berpartisipasi lebih banyak dalam proses pembangunan (\rightarrow koperasi, \rightarrow pembangunan pedesaan); d. membantu pembangunan sistem informasi dan komunikasi yang relevan dengan pembangunan, terutama media massa; e. penelitian: bidang penelitian negara berkembang membiayai lembaga-lembaga di negara berkembang yang ingin mendorong pembangunan kapasitas penelitian ekonomi, sosial, dan penyuluhan. Program beasiswa untuk mahasiswa serta akademisi Jerman dan bukan Jerman berada di bawah bidang ini (sejak 1945, 30.000 beasiswa, di antaranya 8.000 untuk orang bukan Jerman).

Pembiayaan: terutama dari pemerintah Jerman dan dana yang dapat ditempatkan secara bebas tetapi terbatas (dana sendiri dan sumbangan); mengenai jumlahnya tidak ada informasi. Anggaran FES tahun 1987 sekitar 165 juta DM. Dana untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan negara berkembang secara re-

gional terbagi untuk sekitar 200 proyek di 32 negara berkembang, yaitu Afrika (termasuk Timur Tengah): 34%; Asia: 20%, Amerika Latin: 19%, dan sisanya (Eropa dan supra-regional): 18%. Titik berat sektoral adalah pendidikan. FES mempunyai 120 staf pekerja untuk luar negeri, 32 langsung di proyek. Lembaga penelitian FES mempublikasi berbagai tulisan untuk tema-tema berhubungan dengan Dunia Ketiga (a.l.: analisis dari bidang penelitian negara berkembang; Laporan Triwulan - Masalah Kerja Sama Internasional).

Kantor Indonesia: Jl. Kemang Timur Dalam F 10, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Kepustakaan: Laporan-laporan tahunan FES. **bt FIDES** (*Fonds d'Investissement pour le Developpement Economique et Social*) Dana Investasi untuk Pembangunan Sosial dan Ekonomi, berdiri tahun 1946, merupakan dana yang sebagian besar dibiayai oleh Perancis untuk daerah Perancis di seberang lautan.

fn Fiji Merupakan kepulauan (sekitar 840 pulau, dengan luas keseluruhan 18.500 km², pulau terbesar Viti Levu/10.429 km², ibu kota Suva), terletak di zone pertemuan antara Melanesia dan Polinesia. Penduduk (1986: 707.000 jiwa) didominasi orang India (48,6%) dan pribumi Fiji (46,2%) yang termasuk Melanesia. Minoritas adalah orang Eropa, Rotumas, dan Cina. Ekonomi gula (60% ekspor) yang dibangun oleh penguasa kolonial, menyebabkan Fiji bergantung pada gerak konjungtur harga gula di pasar dunia, meskipun Fiji sebagai Negara AKP mendapatkan harga garansi dari ME. Rencana pembangunan bertujuan mengurangi

ketergantungan Fiji dari monokultur gula melalui diversifikasi tanaman, peningkatan perhutanan, dan perikanan. Proyek-proyek industri ditunjang *incentives* untuk menarik investor asing. Setelah ekspor gula, turisme merupakan penghasil devisa nomor dua untuk negara itu.

Heterogenitas etnis-kultural antara orang India yang berorientasi perkotaan dan menentukan kehidupan ekonomi dengan orang Fiji yang berbeda budaya, organisasi sosial dan menguasai 80% tanah, sering menyebabkan konflik yang diteruskan ke politik dengan adanya sistem kepartaian yang bertopang pada etnis (orang Fiji: *Alliance Party* yang konservatif, orang India: *Labour Party* yang berorientasi kiri dan *National Federation Party*). Pada pemilihan parlemen April 1987 *Alliance Party* yang dipimpin oleh Perdana Menteri R.K. Mara yang memegang pimpinan di Fiji sejak kemerdekaan (tahun 1970, dulu merupakan koloni Inggris) kalah kemudian koalisi *Labour Party/National Federation Party* di bawah pimpinan T. Bavadra mengambil alih kekuasaan. Bavadra menyatakan, Fiji (anggota forum laut selatan, SPF) menjadi nonblok dan menutup pelabuhan untuk kapal-kapal perang AS yang memuat senjata atom. Namun, 14 Mei 1987 Bavadra ditumbangkan kudeta militer (di antaranya banyak orang Fiji) tidak berdarah, dipimpin Kolonel Rabuka dengan tujuan melawan mayoritas orang India dalam pemerintahan baru. Pemerintah militer ditolak oleh luar negeri (a.l. Selandia Baru, Australia, Inggris, penghentian bantuan

pembangunan dari AS). Setelah berlangsung pertikaian kekuasaan antara militer, Bavadra dan Gubernur Jenderal Ganilau yang tidak diakui oleh pemerintah militer, yang diikuti pertikaian berdarah antaretnis yang dominan, Ganilau lalu mengangkat pemerintahan sementara sampai pemilu (Rabuka/perdana menteri, Ganilau/pimpinan negara, Mara, Bavadra/menolak bekerja sama). Persatuan yang dicapai kedua pimpinan partai Mara dan Bavadra untuk membuat pemerintah koalisi sipil di bawah pimpinan Ganilau digagalkan Rabuka dengan kudeta militer baru, 25 September 1987. Rabuka memproklamkan Fiji sebagai republik 6 Oktober 1987 (sebelumnya di bawah Ratu Elizabeth II dari Inggris). Dengan demikian, sejak 17 Oktober 1987 Fiji keluar dari *Commonwealth*. 5 Desember 1987 Rabuka membubarkan rezim militernya dan mengangkat Mara yang pernah berkuasa 17 tahun menjadi perdana menteri, mantan Gubernur Jenderal Ganilau menjadi presiden dan ia sendiri menjadi menteri dalam negeri. Koalisi yang memenangkan pemilihan di bawah Bavadra tidak terwakili dalam pemerintahan yang baru.

Kepustakaan: D. Kampe, "Fiji", dim.: *HDW II*, 8, Hamburg 1983.

ah
Filipina Tahun 1986 berlangsung peralihan kekuasaan ke pelemagaan sistem politik yang lebih demokratis. Namun, mayoritas penduduk negara kepulauan itu jelas tetap hidup pada batas eksistensi minimum.

1. Sejumlah 7.107 pulau di Filipina (luas: 300.000 km²) membentuk kepulauan terbesar di dunia. Pulau utama dari utara ke selatan: Luzon

(dengan ibu kota Manila), kelompok Pulau Visayas dan Mindanao. Rangkaian pegunungan berada di sepanjang kepulauan. Di lembah dan perbukitan dilakukan kegiatan pertanian. Filipina kaya akan kayu mulia tropis serta memiliki tembaga, emas, perak, bijih besi, dan seng.

2. Tahun 1521 Filipina ditemukan oleh Magelhaens. Kekuasaan Spanyol (1565-1898) yang dilawan orang Filipina (1870-1901), diikuti aneksi secara kekerasan oleh AS, sebagai hasil perang Amerika-Spanyol, dan hanya terputus oleh pendudukan Jepang dalam Perang Dunia II. Pemberian kemerdekaan Filipina (1946) oleh AS berkaitan dengan sejumlah persyaratan, seperti pemberian hak pakai untuk dua pangkalan militer AS terbesar di Pasifik, garansi selanjutnya untuk hak istimewa orang Amerika (sampai tahun 1974 pengusahaan AS disamakan dengan pengusahaan pribumi) dan hak veto dalam politik perdagangan luar negeri Filipina.

3. Jumlah penduduk tahun 1989 sekitar 60 juta jiwa. Sekitar 39% penduduk hidup di perkotaan (1984) dan terus berlangsung arus urbanisasi. Di Manila saja hidup hampir 7 juta manusia (tahun 1980: 9.317 penduduk/km²), hampir 1 juta termarjinalisasi di daerah-daerah kumuh. Karena banyak kelompok etnis, bahasa pun sangat beragam. Dari 76 bahasa daerah, hanya tujuh bahasa yang masing-masing dipakai oleh sejuta orang. Bahasa resmi Filipino dipakai oleh lebih separo penduduk (di perkotaan 3/4). Hampir 45% penduduk berbahasa Inggris. 80% pen-

duduk beragama Katolik. Buta aksara dapat diturunkan dari 16,7% tahun 1980 melalui usaha besar dalam sistem pendidikan. Situasi pengadaan kesehatan diperbaiki (harapan hidup tahun 1984: 63 tahun).

4. UUD Filipina yang dibahas tahun 1934/1935 dan berlaku sampai tahun 1972 sangat bersandar pada model AS: presiden, legislatif terdiri atas dua kamar (dewan perwakilan, senat), dua partai (liberale, *Nacionalistas*) yang mempertarungkan kekuasaan, setiap empat tahun sekali pemilihan presiden dan lembaga legislatif secara terpisah (Hanisch 1982). Proses pengambilan keputusan secara demokratis sangat dirugikan oleh pemakaian kelompok satuan pengamanan pribadi, manipulasi pemilihan, dan korupsi demi kepentingan setiap oligarki. Dengan meningkatnya gerakan gerilya akhir tahun '60-an dan awal tahun '70-an, serta gejala krisis ekonomi, Presiden F.E. Marcos yang berkuasa sejak tahun 1965 merasa terancam, baik kekuasaan pribadi maupun sistem politiknya. Tahun 1972-1981 ia memberlakukan terus-menerus situasi darurat dengan menentang beberapa oligarki dan diiringi protes-protes dari gereja Katolik. UU Situasi Perang memungkinkannya Marcos dan istri berkuasa secara diktator yang secara ideologis disebut sebagai jalan ke sebuah "Masyarakat Baru".

5. Dengan penciptaan sebuah zone perdagangan bebas antara AS dan Filipina (1909/1913), ekonomi Filipina secara struktural terintegrasi ke pasar dunia. Dalam sektor pertanian, selain makin banyak beras dan jagung

untuk kebutuhan dalam negeri, makin diperluas *cash crops* (tebu, kelapa, serat *abaca*, tembakau). Dengan pelaksanaan hak pemilikan tanah yang sebelumnya tidak dikenal, petani menjadi penggarap yang harus menyerahkan 50% panen ke pemilik tanah, atau buruh tani tanpa tanah (Hanisch, 1983). Proletarisasi dan pemiskinan penduduk pedesaan mempercepat pertumbuhan penduduk. Sampai sekarang Filipina tetap merupakan negara pengekspor: gula (15%–20% nilai ekspor), kelapa, minyak kelapa, dan kopra (25%–30%), kayu, barang dari kayu (sampai 10%), tembaga, nikel, mineral, dan serat *abaca*. Tahun 1984 hampir 50% pekerja berada di sektor primer, tetapi hanya 15% bekerja di sektor produksi. Setelah Perang Dunia II Filipina berusaha menjalankan industrialisasi substitusi impor melalui pengawasan impor, politik bea yang selektif, keringanan bea, dan kredit murah. Politik ini sangat menguntungkan pemilik tanah yang bermodal kuat; dan gagal terutama disebabkan kecilnya daya serap pasar dalam negeri. Industri tidak dapat banyak menyerap tenaga kerja yang ada, meskipun misalnya produksi semi konduktor (tahun 1982: 14,8% ekspor keseluruhan) dan tekstil meningkat pesat. Personal dalam sektor tersier meluap. Krisis sektor pertanian juga berdampak atas sektor perkotaan, produktivitas rata-rata, upah, dan—karena harga produk pertanian yang meningkat—pendapatan penduduk menurun. Pendapatan penduduk Filipina terbagi sangat tidak seimbang. 4% dari penduduk keseluruhan memiliki lebih dari separo kekayaan negara.

6. "Ekonomi nepotisme" (Hanisch, 1986) rezim Marcos pertama, berlandaskan penggulingan kekuasaan oligarki pertanian yang berkuasa sampai kini dan pengendalian terpusat para teknokrat yang tidak politis; kedua, tumbuh dan meluasnya prinsip patron-klien melalui pembagian sumber daya ekonomi swasta dan negara; ketiga, mempertahankan jaminan, keamanan, dan ketenangan (ancaman gerilyawan komunis *New People's Army* yang muncul makin kuat sejak tahun 1969, situasi perang saudara karena konflik Islam-Kristen di Mindanao). Dengan turunnya tingkat pertumbuhan dan naiknya utang luar negeri, atas desakan IMF Marcos menjalankan reformasi penyesuaian (pengurangan anggaran belanja negara dan defisit anggaran) yang mengena saraf pusat rezim tersebut (turunnya kapasitas, loyalitas massa dapat dibeli dengan keuntungan dan kemudahan-kemudahan tertentu). Koalisi antara teknokrat dan klien pemerintah menjadi retak ketika IMF menjadikan teknokrat sebagai mitra bicara, sementara klien pemerintah merasa terancam langsung dengan adanya reformasi. Pemilihan parlemen (1978) dan pencabutan UU Darurat (1981) tidak dapat mengakhiri krisis yang terjadi terus-menerus. Politikus oposisi B. Aquino ditembak di Manila oleh *hard-liners* yang loyal terhadap rezim ketika kembali dari tempat suakanya di AS. Dari sinilah timbul perpecahan dan polarisasi dalam masyarakat Filipina, makin diperkuat dengan terjadinya pemecatan massal, turunnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan. Pemilihan parlemen tahun 1984 berakhir

dengan kemenangan oposisi (61 mandat; tahun 1978: 16) dibandingkan pemerintah (122 mandat; tahun 1978: 135). Untuk mengembalikan keabsahannya (terutama karena pengaruh politis pada penelusuran pembunuhan Aquino dan memperhatikan AS), Marcos memajukan pemilihan menjadi Februari 1986. Suatu mobilisasi massa menunjang calon oposisi Corazon Aquino, janda pemimpin oposisi yang terbunuh, selama kampanye pemilihan. Langsung setelah pemilihan, baik Marcos maupun Aquino, mengumumkan kemenangan masing-masing. Setelah ada pengakuan terhadap Aquino oleh sebagian tentara, mengesahkan kejatuhan Marcos (Februari 1986) dan terjadi peralihan ke sebuah rezim yang demokratis (akhir tahun 1986) serta pemilihan parlemen baru (Mei 1987) yang dikonsolidasikan secara institusional. Setelah berkuasa selama 6 tahun, Corazon Aquino yang menolak untuk mencalonkan diri kembali sebagai presiden, digantikan presiden terpilih, Fidel Ramos (Juni 1992), mantan menteri pertahanan Filipina. Kepustakaan: H.U. Luther, "Der Mindanao-Konflikt", dlm.: K.M. Khan/V. Matthies (ed.), *Regionalkonflikte in der Dritten Welt*, Köln/London 1981, hlm. 183 dst.; J. Rüländ, *Die Philippinen: Zwischen Repression und Widerstand*, Freiburg 1982; R. Hanisch, "Philippinen", dlm.: *HDW II*, 7, hlm. 407 dst., Hamburg 1983; *ibid*, "Die Regierung Aquino zwischen Militärputsch und kommunistischer Rebellion", dlm.: *APuZ* 25-26/88, hlm. 31 dst.; *ibid*, *Philippinen*, München 1989; U. Nimsdorf, *Anatomie einer Revolution. Herrschaft, Krise und Umbruch in den Philippinen*, Saarbrücken - Fort Lauderdale 1989. "Machtübergabe in Manila", *Frankfurter Rundschau*, 1 Juli 1992, dlm.: *BMZ-Spiegel der Presse* 14/92, hlm. 444.

rs/fg

FLDW (*Freundeskreis Lexikon Dritte Welt*) - Lingkaran Kamus Dunia Ketiga, didirikan tahun 1988, merupakan organisasi tidak mengikat dari para peserta dan mantan peserta penyusun Kamus Dunia Ketiga ini dan publikasi-publikasi serupa dengan tema "Dunia Ketiga, terutama Amerika Latin. Tujuan: pembangunan dan perbaikan hubungan pribadi dan keahlian, transfer teknologi tepat guna di bidang ilmiah sosial. **red FNL/NLF** (*Front National Liberation/National Liberation Front*, Front Pembebasan Nasional) → gerakan pembebasan, Vietnam (Front Pembebasan Nasional/Vietcong). **FNLA** → gerakan pembebasan. **FNS** (*Friedrich Naumann Stiftung*) Yayasan politik yang didirikan 1958, dekat dengan Partai Demokrat Bebas Jerman. Kegiatan-kegiatan FNS yang berkaitan dengan negara berkembang dilakukan dalam 3 departemen. Titik berat kegiatan di negara berkembang: a. pendidikan politik untuk kelompok-kelompok sasaran yang terpilih dan diharapkan dapat menjalankan fungsi multiplikasi; b. peningkatan media, a.l. melalui pendidikan dan pendidikan lanjut jurnalis; c. membantu hak asasi manusia dan hukum melalui penyuluhan-penyuluhan kepada kelompok yang terabaikan; d. mendukung LSM/LPSM. Mitra utama adalah kelompok-kelompok basis lokal, jika ada-organisasi, dan partai liberal.

Sekitar 55% anggaran FNS (tahun 1987: 67,4 juta DM) yang sebagian berasal dari pemerintah Jerman mengalir ke kegiatan-kegiatan di luar Jerman. Tahun 1988 membantu

66 proyek di 40 negara Dunia Ketiga (tahun 1982: 48 proyek). Pembagian dana secara regional: Afrika 17,7%, Asia 30,1%, Amerika Latin 32,3%, sisanya Eropa dan supraregional; titik berat sektoral adalah pendidikan dan organisasi swadaya. FNS memberikan beasiswa untuk mahasiswa Jerman dan bukan Jerman; sekitar 1/3 dari 600 beasiswa tahun 1987 berasal dari negara berkembang.

Kantor Indonesia: Jl. Cipaku 1/28, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

dn
f.o.b. (free on board) Dalam perdagangan internasional, ekspor sebuah negara dinilai sedemikian rupa hingga keseluruhan ongkos (produksi, transpor, dan asuransi) ditanggung sampai batas nasional, pada pengapalan: sampai *on board*. Impor sering dinilai berdasarkan *c.i.f.*
hpn
fokonolona → Madagaskar.

Food Aid Convention → FAC.

Food for Development Program → politik bantuan pembangunan AS.

Food for Peace Program → politik bantuan pembangunan AS.

Food for Work Projects Program jaminan pangan → WFP.

foquismo → gerilya.

foreign assistance → politik bantuan pembangunan AS.

Forum Pasifik Selatan → SPF.

forward linkage → *external economies, linkage-effects*.

Franc-Zone Zone moneter yang terikat melalui kontrak dengan Franc Perancis. Setelah merdeka dari Perancis (1960), tahun 1962 Mauritania, Senegal, Pantai Gading, Volta Hulu (Burkina Faso), Niger, Dahomay (Benin), dan Togo, membentuk unit mata uang Afrika Barat dengan bank sentral sendiri (Franc CFA = *Com-*

munauté Financière Africaine). Bank Afrika Tengah didukung oleh Kamerun, Cad, Republik Afrika Tengah, Republik Rakyat Kongo, dan Gabon (Franc CFA = *Coopération Financière en Afrique Centrale*). 1 Januari 1985 untuk pertama kalinya masuk Guinea Khatulistiwa yang bukan frankofon. Mali yang keluar dari Franc-Zone (1962), kembali dengan situasi buruk (a.l. depresiasi Franc Mali sekitar 50%). Perancis menjamin negara-negara Afrika kurs tukar yang stabil (paritas sejak tahun 1948: 1 F CFA = 0,02 Franc Perancis; 1 FM = 0,01 Franc Perancis) dan konvertibilitas mata uang mereka secara tidak terbatas. Setiap negara mempunyai "rekening operasional" di masing-masing bank sentral yang dapat menjalankan keseluruhan perdagangan luar negeri dan mereka harus membayar 65% (sampai tahun 1972/1973: 80%) dari cadangan emas dan devisanya.

Meskipun tidak disangkal ada keuntungan untuk mitra Perancis, sejak tahun '60-an muncul kritik bahwa lalu lintas bebas uang dan modal di dalam Franc-Zone semasa krisis menguntungkan pelarian modal setempat ke luar negeri (terutama ke Perancis) dan menyulitkan pengawasan arus keuntungan pengusaha asing. Meskipun ada desentralisasi di tahun '70-an, Perancis mendominasi lembaga Franc-Zone, dan negara-negara Afrika secara otomatis harus ikut membuat depresiasi franc. Sejak akhir tahun '70-an, kekayaan luar negeri Perancis sangat turun sehingga argumentasi bahwa Franc Perancis mendapatkan keuntungan dari surplus

perdagangan dengan anggota Afrika dalam Franc-Zone, menjadi makin kuat. Untuk mengokohkan kemerdekaannya ke luar dan ke dalam, Franc-Zone ditinggalkan oleh Guinea (1960), Mauritania (1972), Madagaskar (1973), Jibouti (1 F Jibouti = 0,032 F Perancis), dan Komora (F CFA) (keduanya sejak kemerdekaan 1972). Mata uang dalam departemen luar negeri Perancis dan di Mayotte adalah Franc Perancis, di kawasan Perancis di Pasifik Selatan adalah Franc CFP (*Cours du Franc Pacifique*, 1 F CPF = 0,055 F Perancis).
Kepustakaan: R. Kühn, *Franc-Zone, Währungsunion und Abhängigkeiten*, Bonn (FES) 1977; K. Yansané, *Contrôle de l'activité bancaire dans les pays africains de la Zone Franc*, Paris 1984.

kz

Frei Montalva, Eduardo Presiden Cile (1964–1970), tokoh demokrasi Kristen yang terkemuka di Amerika Latin. Frei lahir 16 Januari 1911 di Santiago de Chile, berasal dari keluarga tingkat menengah turunan Swiss. Ia belajar hukum di universitas Katolik Cile, lalu menjadi guru besar hukum perburuhan di sana. Bersama politikus Katolik Cile yang muda, ia mendirikan partai sosialis-Kristen *Falange Nacional* (1937), kemudian muncul partai Kristen demokrat Cile (1957). Pada pemilu tahun 1961 Frei memperoleh 56,1 suara dan menjadi presiden dari partai Kristen demokrat yang pertama di Amerika Latin; pemilu tahun 1970 ia tidak bisa mencalonkan diri kembali, dan di masa Allende menjadi pemimpin oposisi borjuis-demokrat. Di dunia inter-

nasional ia memusatkan kegiatannya ke gerakan Kristen-demokrat (wakil presiden CDWU/*Christlich Demokratische Welt Union*, Uni Kristen Demokrat Dunia) serta ke bidang koperasi dan pembangunan. Tahun 1977–1979 menjadi anggota tetap *Komisi Utara-Selatan. Frei mempublikasi banyak tulisan politis. Dengan tulisannya, *El mandato de la Historia y las Exigencias del Porvenir* (Tugas Historis dan Tuntutan Masa Depan), mulai akhir tahun 1976 sampai kematiannya (Januari 1982), ia menjadi tokoh oposisi terpenting Cile melawan rezim militer yang berkuasa sejak 1973 → rezim otoriter. mfb
Freire, Paulo → pedagogi pembebasan.

FRELIMO → gerakan pembebasan, Mozambik.

Friedrich Ebert-Stiftung → FES.

Friedrich Naumann-Stiftung → FNS.

FROLINAT (*Front de Liberation Nationale du Tchad*) → gerakan pembebasan, Cad.

Funds in Trust Proyek dana *trustee*, diwalikan oleh berbagai lembaga *PBB, artinya atas nama sendiri, tetapi dijalankan atas pesanan asing (sebuah negara kreditor). *Pembiayaan*: sumbangan khusus yang terikat tujuan dari masing-masing pemberi. Dengan adanya kaitan tujuan dana *trustee*, negara kreditor memiliki kemungkinan mempengaruhi langsung politik organisasi-organisasi pembangunan multilateral. hg

G

Gabon Meskipun sudah merdeka (1960), tetap sangat dipengaruhi politik dan ekonomi Perancis. Tata ekonominya yang liberal-kapitalis dan di tahun-tahun terakhir hanya terjadi sedikit pemotongan terhadap transfer keuntungan investor asing, menjadikan Gabon sangat optimal bagi modal asing. Minyak bumi memang meningkatkan penerimaan negara anggota OPEC tersebut di tahun '70-an, tetapi utangya makin tumbuh karena investasi "mercu suar", konsumsi barang mewah, dan pemborosan kelompok pemimpin yang korup.

1. Luas daerah 271.000 km², berpenduduk sekitar 1-1,2 juta. Fang (20%) adalah kelompok penduduk terbanyak di antara sekitar 7 kelompok etnis dan kelompok bahasa (dengan banyak masing-masing subkelompok) yang mendominasi politik dan ekonomi, kemudian Eshira (20%), Mbede (15%), dsb. Meskipun tingkat penyekolahan di sekolah dasar hampir menyeluruh—kuota tertinggi di Afrika Hitam—tetap kekurangan tenaga ahli sehingga semasa *boom* ekonomi di tahun '70-an menyebabkan kehadiran 100.000 tenaga kerja asing, di antaranya 25.000 orang Perancis (tahun 1960: 4.800). Orang

Perancis tetap mempunyai posisi kunci dalam ekonomi, administrasi, terutama di bidang pendidikan.

2. Berbeda dengan negara Afrika lainnya, pertanian tidak berperan penting dalam ekonomi Gabon, dan makin diabaikan sejak terjadi *boom* minyak bumi di tahun '70-an (akhir tahun '80-an dimanfaatkan hanya 0,5% dari lahan keseluruhan, 88% bahan pangan harus diimpor). Setelah Pantai Gading, Gabon adalah eksportir kayu tropis (terutama Okume) terbesar di Afrika, sedangkan minyak bumi tetap merupakan sumber penerimaan terpenting (tahun 1987: 85% penerimaan ekspor, 65% pemasukan anggaran, 45% PDB). Ekspor yang juga penting adalah mangan (produsen terbesar di dunia) dan uran, setelah selesai pembangunan jalur kereta api sepanjang 650 km "Transgabonais" (lama pembangunan 12 tahun) tidak perlu diekspor lagi melalui Kongo. Biasanya dalam usaha-usaha tersebut Gabon hanya memiliki 25% modal (juga di sektor minyak bumi; pangsanya terbesar dimiliki terutama oleh perusahaan-perusahaan Perancis). Pertumbuhan pesat penerimaan negara sejak pertengahan tahun '70-an menimbulkan

sederet konsekuensi-konsekuensi negatif: investasi-investasi raksasa kurang terkoordinasi, kesenjangan struktural regional makin menajam, dan makin bergantung pada impor bahan pangan. Distribusi pendapatan yang dimonopoli oleh pimpinan politik, sangat tidak seimbang: "kurang dari 2% penduduk memiliki lebih dari 80% keuntungan yang tersisa di negara itu" (Weiland 1982, hlm. 406). Turunnya kuota produksi, jatuhnya harga minyak bumi dan kurs dolar, menyebabkan penerimaan minyak tahun 1987 turun terus (70 miliar F CFA, dibandingkan tahun 1985: 400 miliar F CFA), dan meningkatkan utang luar negeri (tahun 1988: sekitar 2 miliar US\$). Eksploitasi ladang minyak di Rabi Koun-ga dalam hutan tropis dengan ongkos produksi per barel separo lebih murah, menimbulkan harapan tahun 1989 dapat mencapai tingkat produksi tahun 1976. Persyaratan untuk sejumlah perjanjian penjadwalan utang sejak pertengahan tahun '80-an adalah program penyesuaian untuk menyehatkan keuangan negara: likuidasi dan swastanisasi perusahaan negara, pemecatan pegawai negeri, restrukturisasi gaji, dsb. Keberhasilan sedikit pertama adalah tahun 1986 dan 1987 dengan pengurangan turunnya PDB dari 29% menjadi 14%, penurunan defisit anggaran dari 15% menjadi 8,5% PDB, dan penurunan tingkat inflasi dari 6% menjadi 2%. Meskipun neraca perdagangan positif secara teratur (tahun 1987: +166 miliar F CFA), tetapi neraca pembayaran tetap defisit secara kronis (tahun 1987: -40 miliar F CFA) akibat

mengalir keluarnya keuntungan perusahaan-perusahaan asing dan pengiriman uang buruh tamu ke negara asalnya. Mitra perdagangan luar negeri terpenting tetap Perancis (sekitar 50% pemasukan), negara-negara ME, AS, dan Jepang.

3. Secara formal Gabon mempunyai demokrasi presidensial, tetapi Rapat Nasional hanyalah etalase. Presiden Bongo yang dengan PDG membentuk satu partai tahun 1968, lebih berkuasa dibandingkan pendahulunya Leon Mba, yang dijatuhkan tahun 1964 melalui kudeta, tetapi dengan pasukan para Perancis berhasil merebut kembali kekuasaannya. Seperti juga Mba, meskipun kadang-kadang ada ketegangan, Bongo tetap erat bekerja sama dengan negara-negara Barat, terutama dengan Perancis, dan justru di bidang militer (sebuah garnisun Perancis ditempatkan di Libreville) untuk melakukan intervensi-intervensi di Afrika.

Kepustakaan: H. Weiland, "Gabon", dlm.: *HDW II*, 4, Hamburg 1982, hlm. 399 dst.; F. Gaulme, *Le Gabon et son ombre*, Paris 1988; J.F. Barnes, *Gabon*, Aldershot 1989.

kz gains from trade → teori perdagangan luar negeri.

Gambia Berbentuk mata kapak masuk ke Senegal, ibukota Banjul, dulu Bathurst. Luas 11.295 km², merupakan negara Afrika terkecil. Penduduknya (1986: 660.000) terdiri atas etnis Mandinge (40%), Wolof dan Fulbe (masing-masing 12%), Djola dan Sarakole (masing-masing 7%), orang dari Senegal (22.000), dan Eropa (600). Berbentuk kekepalasukuan tradisional dan pengelompokan desa (dengan sistem kasta), Gambia mempunyai struktur sosial yang relatif

stabil. Kesenjangan sosial desa-kota yang menonjol di bidang pengadaan kesehatan dan pendidikan, dikarenakan pertumbuhan penduduk yang pesat (1973– 1985: 3,4%) dan mencerminkan permasalahan pembangunan sosial. Tingkat harapan hidup adalah 43 tahun (1986). Kurang modal (PNB per kapita tahun 1986: 230 US\$), bencana kekeringan (→ Zone Sahel), dan sempitnya pasar dalam negeri, merupakan hambatan-hambatan pembangunan ekonomi. Produksi pertanian ditentukan oleh monokultur kacang tanah (kacang tanah dan minyak kacang tanah: 50% ekspor). Diversifikasi produksi pertanian dan pembangunan industri konsumsi ingin dicapai melalui substitusi impor. Kerja sama dengan Senegal dalam rangka OGMV (*Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Gambie*) mendorong pemanfaatan sungai Gambia untuk pengairan dan pelistrikan. Kekayaan ikan dan turisme (setelah kacang tanah merupakan pembawa devisa terpenting) menawarkan perspektif pembangunan masa depan. Mitra dagang utama dan kreditor pembangunan adalah ME (→ Perjanjian Lome, → STABEX).

Sampai merdeka tahun 1965, daerah ini berada di bawah administrasi Inggris secara *indirect rule*. Proses dekolonisasi sejak tahun 1960 memunculkan partai-partai politik yang berorientasi pragmatis murni, tetapi mereka hampir tidak memperlihatkan program yang berbeda. Posisi-posisi berbeda hanya dalam hal hubungan ke Senegal dan Inggris. PPP (*Progressive People's Party*) yang berhasil mengubah Gambia dari monarki konsti-

tusional menjadi republik (1970) dan ingin bersatu dengan Senegal (Senegambia). Sejak tahun 1960 memerintah dengan koalisi dan partai-partai kecil. Pemilu tahun 1987 PPP memenangkan 31 dari 36 kursi. Stabilitas politik yang ada sampai kini terancam jatuh tahun 1980 dan 1981 (di bawah K.S. Sanyang yang marxistenis). Usaha ini digagalkan oleh Presiden Sir D.K. Jawara (tahun 1987 dengan 60% suara dipilih kembali untuk masa lima tahun keempat), di antaranya dengan masa darurat selama tiga setengah tahun sampai Februari 1985, dan menuntut pembentukan persekutuan Senegambia awal tahun 1982.

Tujuan: uni ekonomi dan mata uang, pemanfaatan Sungai Gambia, saling membantu dalam politik luar negeri dan militer bersama. Dewan Menteri bersama dan parlemen Senegambia merupakan lembaga terpenting dalam persekutuan ini.

Kepustakaan: K. Bernecker, dlm.: *HDW II*, 4 Hamburg 1982, hlm. 171 dst.

ah gamonal(ismo) Sinonim untuk *Kazique (Caciquismo)*, menggambarkan penguasa lokal atau regional dan hubungan kekuasaan lokal atau regional yang informal. *Gamonal* dan orang yang ditaklukkan oleh kekuasaannya mempunyai hubungan timbal balik dan asimetris. Menurut Mariategui (*Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana*, Ed. Amauta, Lima 1969, hlm. 59–63), gamonalismo berakar dalam struktur sosial pertanian. Ia merupakan hasil situasi pemilihan prakapitalis, kekuasaan tuan tanah kaya atas penduduk setempat. **dn**

Gandhi, Mahatma (1869-1948) memberi sumbangan penting untuk kemerdekaan India. Nehru mengenai Gandhi, "Gandhi membawa India menuju kemerdekaan Ia memperlihatkan kepada kita, bagaimana mengatasi ketakutan dan kebencian;ewartakan kerukunan, persamaan, dan persaudaraan; membangunkan kaum tertindas mengenai martabat kerja; dan pengutamaan masalah spiritual." Gandhi belajar hukum di London dan berpraktek 10 tahun sebagai pengacara minoritas India di Afrika Selatan. Sekembalinya ke India tahun 1915 mulai melakukan perlawanan tanpa kekerasan terhadap pemerintah kolonial Inggris. Ia gagal menentang pemisahan politik di India (Pakistan). Arti Gandhi selain peran historisnya adalah pejuang pembebasan India dalam metode perjuangan politik (sekarang berkaitan dengan namanya): perlawanan pasif, pembangkangan sipil, dan tanpa kekerasan. Ia menjadi korban kekerasan dalam pertikaian antara orang Hindu dan Islam di India.

Kepustakaan: B. Mann, *Die pädagogisch-politischen Konzeptionen Mahatma Gandis und Paulo Freires. Eine vergleichende Studie zur entwicklungsstrategischen politischen Bildung in der Dritten Welt*, Frankfurt 1979; G. Gold/R. Attenborough, *Ghandi. Eine bebilderte Biographie*, Bergisch Gladbach 1983; P.S.S. Nehru, *Mahatma Gandhi. Sein Leben und Werk*, Bergisch Gladbach 1983.

dn Garcia Márques, Gabriel Lahir di Kolombia 6 Maret 1928, seorang jurnalis dan penulis, tahun 1982 mendapat hadiah Nobel untuk sastra. Membahas terutama kehidupan orang Mestis yang bergerak di antara realitas dan irealitas di pedesaan Kolombia. Dengan banyak buku (di antaranya *Cien anos de soledad*/Seratus

Tahun Kesendirian) ia merupakan salah seorang penulis *literatura comprometida*, sebuah arus sastra yang secara sosial aktif dan merasa mempunyai keterikatan terhadap kelompok penduduk marjinal.

ah GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan. Berdiri tahun 1947 ketika perundingan untuk membentuk sebuah organisasi perdagangan internasional ITO/*International Trade Organization*, Organisasi Perdagangan Internasional (Piagam Havana, 1947) gagal karena perbedaan gambaran strategi perdagangan para perunding. Untuk menjamin dapat terbentuk kesepakatan dalam banyak perundingan mengenai penurunan bea dari sejumlah prakonferensi Jenewa, negara-negara peserta sepakat menjalankannya bersama dengan beberapa ketentuan politik perdagangan dari Piagam Havana. 23 negara menandatangani kesepakatan tersebut yang kemudian diterapkan sementara sejak 1 Januari 1948. Anggota sampai Januari 1988: 96 anggota penuh, 1 anggota sementara, dan 28 anggota selanjutnya yang menggunakan GATT pada basis *de facto*.

Organ: Rapat Umum semua anggota penuh, setiap negara 1 suara, rapat tahunan; Dewan Negara Anggota menyelesaikan urusan operasional; sekretariat dengan direktur jenderal, kedudukan di Jenewa. Dengan ketentuan-ketentuan untuk menghindarkan diskriminasi oleh mitra dagang melalui prioritas, larangan pembatasan kuota ekspor dan impor, serta prinsip saling memberikan konsesi bea, ingin dicapai *tujuan-tujuan:*

peningkatan taraf hidup, kesempatan kerja penuh, peningkatan pendapatan riil, peningkatan permintaan efektif di seluruh dunia, dan pemanfaatan penuh sumber daya alami ekonomi dunia. Ketentuan pelindung merupakan pengecualian bea jika terjadi kerusakan pasar sektoral; prinsip prioritas tidak berlaku untuk preferensi bea tertentu yang terjadi pada pelaksanaan GATT, selanjutnya ada hak untuk membentuk uni bea dan zone perdagangan bebas. Pembatasan jumlah impor diizinkan jika terjadi kesulitan neraca pembayaran; untuk negara berkembang prinsip resiprositas dibatasi (1966). Instrumen utama GATT adalah perundingan penurunan bea (Putaran Kennedy, Putaran Tokyo, Putaran Uruguay). Namun dengan penghapusan bea, terutama sejak awal tahun '80-an, tumbuh hambatan perdagangan non-tarif (norma-norma teknis, ketentuan impor dan izin, subsidi satu-satu sektor, pembatasan ekspor secara sukarela, dan perjanjian tata pasar terutama pada basis bilateral) yang menguburkan prinsip perlakuan sama terhadap barang dalam negeri dan luar negeri (→ proteksionisme). Tahun 1979 sekitar 60% perdagangan dunia direalisasi menurut aturan-aturan GATT; tahun 1987/1988 hanya sekitar 40%.

Kepustakaan: P. Bratschi, *Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen GATT*, Zürich 1973; G. Heiduk, *Die weltwirtschaftlichen Ordnungsprinzipien von GATT und UNCTAD*, Baden-Baden 1973; GATT, *What it is, What it does*, Genf 1982; J. Betz, "Welthandel, GATT, Proteksionismus und die Entwicklungsländer", dlm.: *Jahrbuch Dritte Welt*, 1987.

pb

GAWI → GTZ.

GCC (*Gulf Cooperation Council*) Dewan Negara-Negara Teluk; didiri-

kan 1981 di Riyadh oleh 6 negara Teluk (Bahrain, Qatar, Kuwait, Oman, Saudi Arabia, Emirat Arab) karena terancamnya instalasi minyak bumi oleh Perang Irak-Iran, dan tidak ingin didominasi oleh Irak maupun Iran. Tujuan terpenting: koordinasi politik luar negeri, politik keamanan dan politik minyak bumi untuk stabilisasi politik dalam negeri melalui peredaman "Revolusi Islam", dan pertahanan kolektif Teluk Persia menghadapi intervensi-intervensi asing (misalnya "pasukan invasi" negara-negara adikuasa).

Kepustakaan: U. Braun, *Der Kooperationsrat arabischer Staaten am Golf. Eine neue Kraft?*, Baden-Baden 1986.

ah/maf

geopolitik → Doktrin Pertahanan Nasional.

GEPLACEA → SELA.

gerakan Inkatha → Buthelezi.

gerakan Pan Menggambarkan kekuatan politik daerah-daerah dengan bahasa atau religius-kultural satu, tetapi terpisah oleh batas politis, bekerja sama erat dan meningkat menjadi penyatuan berbagai negara. Akar historis di abad ke-19. Kongres Pan-Amerika pertama berlangsung tahun 1826 di Panama. Hal pokok adalah gagasan Bolivar untuk sebuah konfederasi Amerika Latin. Tujuan-tujuan Pan-Amerika Latin (dan Pan-Ibero Amerika) diperlihatkan juga oleh program APRA dan indigenisme, yang membahas masalah orang Indian secara individual dan kolektif dalam sastra. Pan-Amerika yang diwakili AS sebaliknya menginginkan berlandaskan Doktrin Monroe—kerja sama di kawasan tersebut. Konsepsi ini mendapatkan terobosan historis (OAS, *Alliance for Progress*), te-

tapi di tahun '70-an makin dipertanyakan dan sejak itu menguatkan kesadaran Amerika Latin dalam organisasi regional dan usaha integrasi ekonomi. → CECLA, → ALALC, → Pakta Andes, → SELA, → MCCA, → CARICOM. Gagasan Pan-Afrika mula-mula mengacu pada situasi orang negro dan permasalahan Afrika. Gagasan ini menjadi nyata ketika tahun 1958 bekas Pantai Emas menjadi negara Afrika pertama yang merdeka, dengan demikian mulai mewarnai komposisi politik Afrika kini. Proklamator Pan-Afrika, K. Nkrumah berusaha membawanya ke pembentukan uni negara-negara Afrika merdeka. Meskipun OAU mengacu pada garis perbatasan politik yang dibuat para penguasa kolonial, gagasan Pan-Afrika tidak dapat dihapus dari sejarah mereka. Pan-Arab dan Pan-Islam menjadi gerakan yang mempunyai kekuatan dengan adanya Konflik Timur-Tengah. → Konflik Timur-Tengah, → Liga Arab, → islamisasi.

dn
gerakan pembebasan Organisasi politik yang menginginkan kebebasan dan kemerdekaan sebuah bangsa yang dijajah atau yang diperlakukan tidak adil. Tidak ada kriteria yang jelas untuk penggunaan terminus gerakan pembebasan. Jadi, bisa saja terjadi bahwa pejuang pembebasan yang sekarang oleh sementara negara dikatakan sebagai "teroris", besok mendapat pengakuan internasional (lihat sejarah ZANU di Zimbabwe atau PLO). Gerakan pembebasan dapat dibedakan berdasarkan: a. tujuannya (antikolonial, nasionalis, sosialis); b. menurut sarana perjuangannya

(perlawanan tanpa kekerasan, perjuangan bersenjata, gerilya); c. menurut kekuatan pendukungnya (negara industri Barat, negara industri Timur, Dunia Ketiga); menurut situasi kerangka perjuangannya: membangun kembali negara sendiri, misalnya ELF/*Eritrean Liberation Front*, Front Pembebasan Eritrea (Etiopia); penggabungan bagian-bagian suku di bawah kekuasaan asing, misalnya WSLF/*West Somalian Liberation Front*, Front Pembebasan Somalia Barat (Etiopia, Somalia); perjuangan kesatuan nasional, misalnya FLN (Aljazair); memperjuangkan daerah negara sendiri, misalnya PLO; dan perjuangan melawan rasisme, misalnya ANC.

Negara industri Barat kebanyakan bersikap menolak gerakan pembebasan di Dunia Ketiga, tidak hanya karena pengalaman perang Vietnam dan banyaknya keberhasilan gerakan pembebasan dalam proses dekolonisasi. Contoh sikap yang berubah adalah pengakuan terhadap pemerintah ZANU di Zimbabwe dan sedikit demi sedikit menghargai PLO. Selain itu, di negara industri Barat ada arus kuat yang menentang perubahan sosial di negara berkembang. Juga ada sederet gerakan pembebasan yang tidak mendapat perhatian negara industri Barat karena dianggap "tidak berarti", seperti F. POLISARIO (Sahara Barat), PFLO (Lebanon), MNLF/*Moro National Liberation Front* (Filipina), dan perjuangan orang Kurdi.

Negara-negara sosialis yang mengacu ke Moskow melihat dalam gerakan pembebasan suatu gerakan

anti-imperialis yang politiknya perlu dibantu, meskipun tidak semua mempunyai program sosialis. Cina, sesuai dengan teori tiga dunia, menunjang gerakan pembebasan dengan materi dan gagasan, serta tentu saja memprioritaskan gerakan pembebasan yang merupakan lawan gerakan pembebasan dukungan Uni Soviet (misalnya menunjang FNLA di Angola melawan MPLA). Kuba malah merupakan negara pertama di Amerika Latin yang mengirim tentara untuk membantu gerakan pembebasan yang sudah selesai atau yang masih berjuang (MPLA).

Keberhasilan terbesar gerakan pembebasan adalah kemenangan FNL di Vietnam Selatan, pengambilalihan pemerintah di Angola (tentu saja melawan gerakan pembebasan UNITA yang ditunjang Afrika Selatan dan AS), PAIGC di Guinea-Bissau, FRELIMO di Mozambik, dan Sandinista di Nikaragua. Berdasarkan pengalaman sejarah dalam literatur ilmiah, muncul tesis bahwa gerakan pembebasan akan berhasil terutama jika ditujukan pada kekuatan pendudukan atau kekuasaan kolonial. Begitu juga relatif mudah tercapai di masa perang antarnegara atau vakum kekuasaan sementara. Jarang ada negara dapat bertahan melawan rezim setempat dan beragitasi di masa damai, misalnya Sandinista.

Kepustakaan: N. Miller/R. Aya, *National Liberation*, New York 1971; A. Iskenderow, *Die nationale Befreiungsbewegung*, Frankfurt 1972; A. Cabral, *Die Revolution der Verdammten*, Berlin (West) 1974; F. Ansprenger, *Die Befreiungspolitik der OAU 1963–1975*, München/Mainz 1975; G. Wellmer (ed.), *Dokumente der südafrikanischen Befreiungsbewegungen von 1943 bis heute*, Bonn 1977; G. Chaliand,

Revolution in the Third World, Harmondsworth 1978; R. Falk/P. Wahl, *Befreiungsbewegungen in Afrika. Politische Programme*, Köln 1980; UNITA, *Der Weg zum nationalen Wiederaufbau Angolas*, Leimen 1988; M. Offermann, *Angola zwischen den Fronten*, Pfaffenweiler 1988; H. Baumgarten, "Befreiungs und Widerstandsorganisationen", dim.: U. Steinbach/R. Robert (ed.), *Der Nahe und Mittlere Osten*, vol. 1, Opladen 1988, hlm. 295 dst.; literatur selanjutnya lihat → gerilya.

rs
gerakan Sarvodaya-Shramadana
→ Sri Lanka.

gerilya Dari bahasa Spanyol yang berarti perang kecil, menggambarkan perang pasukan lokal yang iregular atau kelompok bersenjata melawan tentara musuh atau kekuatan pendudukan dalam perang saudara melawan pemerintah sendiri.

Tanda-tanda perang gerilya: a. persatuan antara gerilyawan dan penduduk sipil; b. hubungan erat tujuan-tujuan militer dan politik (pelaksanaan reformasi-reformasi sosial di daerah yang dibebaskan); c. memperoleh senjata dari gudang senjata musuh dan dari negara-negara sahabat; serta d. metode perang lama dari tentara regular sering tidak mampu melawan gerilya.

Pada prinsipnya, gerilya berlandaskan pada salah satu dari tiga teori dan strategi: a. perang revolusioner yang dikembangkan oleh Mao Tse-tung menghubungkan peran pimpinan militer partai komunis dalam perang gerilya dengan perubahan daerah pedesaan yang dibebaskan gerilya dan melalui revolusi pertanian menjamin adanya bantuan dari penduduk. Mao menyamakan massa rakyat dengan laut, di mana gerilya seperti ikan dalam laut yang menenggelamkan musuh jika seluruh penduduk dimo-

bilisasi; b. gerilya menurut Castro menekankan pada kelompok kecil bersenjata sebagai inti (*foco*) gerakan pembebasan melakukan perang dari pedesaan. *Foquismo* yang diolah dalam tulisan-tulisan Che Guevara dan Regis Debray secara teoretis dan harapan akan sebuah revolusi kontinental di Amerika Latin, menimbulkan banyak gerakan pembebasan (di Argentina, Brasilia, Bolivia, Kolombia, Republik Dominika, Ekuador, Paraguay, dan Peru) terutama di tahun '60-an, jelas karena situasi struktur yang berbeda dengan Kuba menyebabkan banyak kegagalan (Che Guevara ditembak tahun 1967 di Bolivia); c. kesulitan-kesulitan gerilya mempertahankan basis-basis pedesaan di Amerika Latin terhadap aparat militer dengan jumlah besar dan secara teknis lebih unggul, menyebabkan pemindahan sebagian gerilya ke perkotaan, di mana gerilya percaya lebih sedikit menghadapi masalah infrastruktur, tetap anonim dan dapat mengenai musuh dengan berhasil (gerilya kota, misalnya Tupamaros di Uruguay, ERP [*Ejército Revolucionario del Pueblo*] di Argentina, ALN [*Armed Liberation National*] di Brasilia: teoretikus: Marighella).

Metode gerilya mulai dari aksi teror, pendudukan kedutaan besar, penculikan, dsb. sampai perang menghadapi tentara reguler. Gerilya berhasil di antaranya di Cina (1927-1949); Indonesia (1945-1949); Aljazair (1954-1962); Kuba (1956-1959); Vietnam (1946-1975); dan Nikaragua (1962-1979). Akhir tahun '80-an kelompok gerilya yang aktif:

FMLN (El Salvador), M-19 (Kolombia), Sendero Luminoso (Peru), dan LTTE (*Liberation Tigers of Tamil Ealam*, Sri Lanka).

Kepustakaan: Mao Tse-tung, *Theorie des Guerillakrieges oder Strategie der Dritten Welt*, Reinbek 1966; Che Guevara, *Guerilla - Theorie und Methode*, Berlin (West) 1968; C. Marighella, *Minihandbuch der Stadtguerilla*, Berlin (West) 1970; R.F. Lamberg, *Die castristische Guerilla in LA*, Hannover 1971; R. Gott, *Rural Guerillas in LA*, Harmondsworth 1973; F.R. Allemann, *Macht und Ohnmacht der Guerilla*, München 1974; J. Kohl/J. Litt, *Urban Guerilla Warfare in LA*, Cambridge (Mass.) 1974; R.E. Kiessler, *Guerilla und Revolution*, Bonn/Bad Godesberg 1975; P. Waldmann, *Strategie politischer Gewalt*, Stuttgart 1977; *ibid.*, "Vergleichende Bemerkungen zu den Guerillabewegungen in Argentinien, Guatemala, Nicaragua und Uruguay", dlm.: K. Lindenberg (ed.), *Lateinamerika*, Bonn 1982, hlm. 103 dst.; P. Waldmann, "Alte und neue Guerilla in Lateinamerika - Folgen und Folgen aus der Revolution in Nicaragua", dlm.: *VRÜ 16* (1983), hlm. 407 dst.; H.E. Gross (ed.), *Ernesto Che Guevara: Guerilla-kampf und Befreiungsbewegung*, Köln 1986. rs

Ghana Pernah menjadi bintang dalam terobosan gerakan antikolonial, lalu mengalami kehancuran, korupsi, dan keruntuhan politik. Sejak tahun 1983 menjadi "negara model" IMF.

Pantai Emas bekas jajahan Inggris (luas: 238.537 km²) menjadi negara Afrika Hitam pertama yang berhasil merdeka 6 Maret 1957. Penduduk tahun 1989 sekitar 14 juta, pertumbuhan tahunan 2,7%, kepadatan penduduk 60 jiwa/km², ada kesenjangan regional yang besar, pemusatan pembangunan di selatan, sebelah barat Sungai Volta (daerah Accra-Tema dengan luas hanya 1/4 luas negara itu, berpenduduk 60% jumlah penduduk keseluruhan). Perpindahan penduduk dalam negeri menguatkan disparitas regional dan menimbulkan

sektor-sektor urban yang termarginalisir. Tingkat urbanisasi sekitar 35% dan sejak beberapa tahun turun sedikit, terutama karena banyak penduduk kota kembali ke desa akibat krisis ekonomi, serta banyak penduduk bermigrasi ke negara-negara tetangga. Sekitar 1,5–2 juta penduduk sekarang hidup di luar negeri, terutama di Pantai Gading dan Nigeria. Penduduk asli Ghana hampir semua termasuk kelompok suku Sudan. Suku-suku Akan (Ashanti, Fanti, Brong) meliputi 45% dari seluruh penduduk, Mole-Dagbani (16%), Ewe (13%), dan Ga-Adangbe (8%). Bahasa resmi dan komunikasi sehari-hari adalah Inggris. Bahasa ini dimengerti oleh sekitar 60% orang Ghana. Sebagian besar orang Ghana menguasai beberapa bahasa daerah yang jumlahnya lebih dari 70 bahasa tradisional kelompok Kwa dan Gur, sementara Ga dan Twi sebagai *lingua franca* dimengerti dan dibicarakan oleh sekitar 70% penduduk. Sekitar 38% penduduk menganut kepercayaan tradisional, 12% Islam, dan sekitar 40% Kristen. Sistem sekolah yang ditentukan negara, memperlakukan wajib sekolah secara umum umur 6–16 tahun. Tingkat penyekolahan yang pernah tinggi (60%–80% di sekolah-sekolah dasar) menurun. Sistem sekolah yang pernah menjadi kebanggaan di antara sesama Afrika di tahun '70-an, mengalami kejatuhan, bersamaan dengan krisis ekonomi. Pengeluaran pendidikan negara turun dari 6,4% PNB (1976) menjadi 1,7% (1987). Situasi kesehatan juga memburuk secara drastis. Antara tahun 1981 dan

1986 separo dokter yang ada bermigrasi keluar negeri (tahun 1981: 17.200 penduduk/dokter, tahun 1986: sekitar 29.000 penduduk/dokter). Daerah pedesaan tidak memiliki pelayanan dokter. Sistem jaminan sosial yang bagus sejak tahun '70-an, tidak membawa hasil akibat tidak efisiennya aparat pemerintah dan kekurangan biaya.

Ghana menanam pisang, gandum, tumbuhan berumbi, dan sayuran untuk kebutuhan sendiri. Selain dominasi tanaman coklat (45% lahan pertanian), yang masih berperan untuk produksi berorientasi pasar adalah kopi, kopra, kacang kola, karet, serat yute, minyak sawit, dan tembakau. Tulang punggung perekonomian nasional tetap pertanian: kontribusi ke PNB 1985 adalah 52% (industri 13%, jasa 38%). 55% penduduk bekerja di pertanian, di antaranya 42% mandiri (petani, penggarap/*share-holders*). 50% dari mereka menghasilkan *cash crops* (terutama coklat). Ekonomi pertanian berstruktur petani kecil (di bawah 0,8 ha: 30% dari semua usaha, di atas 20 ha: 1,8%), berada di luar "jalur coklat", berorientasi ekonomi subsistensi, kurang berkembang dan 90% bertani dengan metode tradisional. Sektor coklat yang dominan, sesuai harga pasar dunia yang berlaku, merupakan 60%–70% nilai ekspor, membiayai sebagian besar anggaran negara dan menentukan, langsung maupun tidak langsung, pendapatan sebagian besar penduduk yang bekerja. Puncak sektor coklat di akhir tahun '60-an. Sebagai pemasok dunia terbesar, Ghana memenuhi 30%–55% kebutuhan dunia. Produksi

tahunan (tahun 1964/1965: 570.000 ton) di tahun 1970-1984 terus jatuh dan tahun 1983/1984 hanya mencapai 158.000 ton. tahun 1987/1988 diproduksi kembali 220.000 ton coklat.

Sejak merdeka, negara ini mengalami delapan sistem pemerintahan yang berbeda: a. sistem multipartai parlementer (menurut model Westminster), ditandai oleh dominasi *Convention People's Party* (CPP) (1957-1960/1961) dan dipimpin Nkrumah; b. sistem satu partai yang represif, verbal sosialis, secara ekonomi bangkrut dan diktator, yang dijalankan oleh sebuah kelompok sekitar Nkrumah (1960/1961-Februari 1966); c. pemerintah militer *National Liberation Council* (NLC) yang antisosialis dan pro Barat, berhasil berkuasa melalui kudeta (1966-September 1969); d. sistem multipartai yang terpilih secara bebas dengan *Progressive Party* (PP) yang borjuis-konservatif, tribalisme, dan anti-Nkrumah di bawah pimpinan kepala negara K.A. Busia (September 1969-Januari 1972); e. *National Redemption Council* (NRC); sejak tahun 1975: *Supreme Military Council* (SMC) yang terbentuk setelah kudeta oleh perwira-perwira militer dipimpin Kolonel Acheampong, lalu Jenderal Akuffo, merupakan sebuah diktator pendidikan yang populis (1972-Juni 1979). Keluar menyatakan diri pada non-blok dan *self-reliance*, tetapi dengan pragmatisme ekonomi tertentu tidak mengembangkan programatika politik. Kesulitan-kesulitan ekonomi dan tekanan dari penduduk memaksa pemerintah melakukan resivilisasi; f.

berlangsung sebuah intermeso kekuasaan selama 4 bulan (Juni-September 1979) oleh kudeta yang dilakukan perwira-perwira menengah dipimpin Letnan Penerbang Jerry John Rawling dan teman-temannya. Tujuan satu-satunya: pembersihan negara (terutama militer) dari eksponen-eksponen korup (likuidasi tiga pimpinan negara terdahulu: Akuffo, Acheampong, Afrifa). Kemudian, berlangsung penyerahan kekuasaan secara terencana kepada pemerintahan sipil yang terpilih; g. dalam republik yang ke-3 Ghana muncul kembali sebagai sebuah sistem multipartai yang parlementer-presidensial (sejak 24 September 1979). *People's National Party* (PNP) pada pemilihan parlemen merebut 71 dari 140 kursi. Pimpinan mereka Hilla Limann memenangkan pemilihan presiden; h. akhir tahun 1981 melalui kudeta J.J. Rawling kembali ke kekuasaan, dalam posisi puncak *Provisional National Defence Council* (PNDC). Rawling tidak menentukan sikap secara politis-ideologis, tetapi (karena perangnya terhadap korupsi) mendapat simpati luas, terutama penduduk pedesaan dan kaum remaja. Di lain pihak, ongkos sosial yang tinggi dari pelaksanaan program penyehatan, justru mengena kelompok-kelompok perkotaan yang secara politis kuat (mahasiswa, pegawai negeri, serikat buruh), dan termobilisasi dalam potensi oposisi yang besar. "Revolusi" Rawling tidak memunculkan partisipasi yang aktif dan meluas. Dengan pemberlakuan struktur-struktur *grass-roots*, kekuasaan akan diberikan kepada rakyat, yang mendesen-

tralisasi kekuasaan dan mendemokratisasi rakyat. *Defence Committees* yang dibentuk di semua tingkat tidak sesuai dengan keinginan itu. Secara formal, demokratisasi yang dijanjikan terbatas pada kelangsungan pemilihan di tingkat distrik (akhir tahun 1988). Kharisma Rawling merupakan penopang utama sistem politik. Kelangsungan politik tergantung, apakah perhitungan penyehatan dari IMF secara ekonomi dapat sukses dan dipertahankan secara politis.

Keruntuhan berat ekonomi Ghana dimulai akhir tahun '60-an, dan tahun 1983 mencapai titik rendahnya. Penyebab: sangat mengabaikan sektor pertanian (terutama petani coklat) dan politik harga yang salah (harga beli yang rendah oleh *Cocoa Marketing Board* milik negara yang tidak memberi rangsangan produksi kepada petani). Selanjutnya, mengutamakan penduduk perkotaan (subsidi bahan dasar dan bahan pangan), apresiasi yang terlalu tinggi untuk mata uang negara, *Cedi*, serta usaha membangun sebuah negara sosial dengan aparat pegawai negeri yang tidak efisien dan meluber tanpa sumber-sumber keuangan. Akibatnya fatal: tahun 1970-1982 PNB per kapita turun 30%, hasil ekspor turun lebih dari 50%, volume impor turun dua pertiga, upah riil turun sampai 80%, dan kuota investasi dari 12% menjadi 2%. Dengan latar belakang ini Ghana dan IMF, Maret 1983 sepakat menjalankan *Structural Adjustment Programme* (SAP) yang membiayai kredit (817 juta US\$), mula-mula sampai tahun 1987. Sesuai dengan petunjuk IMF, Ghana mendepresiasi

Cedi sebanyak 800%, lalu 100%, meliberalisasi perdagangan (tak ada pembatasan ekspor, menyederhanakan pembagian devisa), dan meningkatkan secara jelas harga beli produksi pertanian untuk komoditas ekspor andalan. Kemudian, dilakukan pemotongan di bidang sosial, pemecatan massal dalam sektor publik, swastanisasi perusahaan-perusahaan negara, penurunan jumlah bahan dasar yang harganya diawasi dari 23 menjadi 8.

Menurut data-data ekonomi, SAP sukses: PNB memperlihatkan tingkat pertumbuhan tinggi (tahun 1985: 6,1%; tahun 1986: 5,3%). Kurs pasar gelap tahun 1986 hanya bernilai 1,6 nilai tukar resmi (tahun 1983: 22 kali lipat). Produksi pertanian meningkat, re-aktivasi ekspor (ekspor kayu tropis sampai tahun 1987 menjadi lima kali lipat) sukses. Pembangunan infrastruktur daerah utara Ghana yang terabaikan menimbulkan migrasi dari daerah utara Ghana. Di sana situasi pekerja yang banyak dan sebagian besar bekerja pada negara menjadi makin buruk secara dramatis akibat inflasi, pemecatan, stop upah, dan kenaikan harga pangan dan bensin. Untuk mengurangi masalah sosial, pemerintah, Bank Dunia, dan IMF Februari 1988 membentuk sebuah program peningkatan sosial, PAM-SCAD, dengan 85 juta US\$ dan 32 proyek besar akan menolng 45.000 pegawai negeri yang dipecat. Rencana *pilot project* ini merupakan reaksi IMF dan Bank Dunia atas diskusi internasional yang kritis dan reaksi atas keresahan setelah pemberlakuan pemungutan biaya untuk uang seko-

lah, rumah sakit, dan tunjangan-tunjangan sosial lain (penutupan universitas setelah terjadi protes mahasiswa tahun 1988). Mulai tahun 1988 Ghana harus membayar utang yang berjumlah 630 juta US\$. Rawling menyatakan akan membayar kembali seluruh utang (cicilan IMF tahun 1982 berjumlah 207 juta US\$). Hal ini hanya akan berhasil melalui pengurangan habis-habisan sumber daya ekspor Ghana. Bidang kunci, tetapih sektor coklat. Hal sulit adalah ramalan bahwa harga pasar dunia untuk coklat turun karena kelebihan penawaran coklat di dunia. SAP tidak mengubah sesuatu dalam masalah-masalah dasar Ghana (ketergantungan ekspor, beban bahan mentah).

Kepustakaan: F. Ansprenger/H. Traeder/R. Tetzlaff, *Die politische Entwicklung Ghanas von Nkrumah bis Busia*, München 1972; R. Hanisch, *Der Handlungsspielraum eines Landes der Peripherie im Internationalen System. Das Beispiel Ghanas*, Saarbrücken 1975; P. Langer, "Ghana", dlm.: F. Nuscheler/K. Ziemer, dkk.: *Politische Organisation und Repräsentation in Afrika*, vol. 1, Berlin, New York 1978, hlm. 749 dst.; F. Schaum, "Ghana", dlm.: HDW II, 4, Hamburg 1982, hlm. 172 dst.; B. Agyeman-Duah, "Ghana, 1982-1986: The Politics of the PNDC", dlm.: *Journal of Modern African Studies*, 25 (4), 1987, hlm. 613-642; D. Pel-low/N. Chazan, *Ghana: Coping with Uncertainty*, Boulder (Col.) 1986; D.L. Ray, *Ghana: Politics, Economics, and Society*, Boulder (Col.) 1986; D. Seth Lumour, *Le Ghana de Rawlings*, Paris 1987.

bg

Global 2000 Sebuah studi yang diolah oleh *Council on Environmental Quality, State Department* atas pesanan Presiden AS Jimmy Carter dan terbit tahun 1980, menganalisis mirip model dunia mengenai ramalan *trend* perkembangan global di bidang kependudukan, pangan, sumber daya, dan lingkungan (ekologi). Ber-

asumsi bahwa *trend* pembangunan dan politik-politik global yang ada sampai sekarang akan terus dilanjutkan, studi ini meramalkan masalah dunia tahun 2000 dalam dimensi-dimensi yang berbahaya.

Hasil-hasil penting (Global 2000, hlm. 26 dst.): pertumbuhan penduduk dunia yang pesat sampai tahun 2000 hanya melambat sedikit. Penduduk dunia (tahun 1975: 4 miliar) akan bertambah 50% dan di tahun 2000 akan mencapai 6,35 miliar. Pertumbuhan penduduk tahunan (tahun 1975: 75 juta) di tahun 2000 akan berjumlah sekitar 100 juta, 90% pertumbuhan ini akan terjadi di negara berkembang termiskin. Kesenjangan antara negara industri dan negara berkembang dalam hal pendapatan per kapita akan membesar, meskipun beberapa negara berkembang mencapai tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi daripada negara industri. Produksi bahan pangan tahun 1970-2000 memang akan naik 90% (per kapita kurang dari 15%), tetapi kesulitan peningkatan produksi ini berlangsung di negara-negara yang sudah mempunyai konsumsi per kapita relatif tinggi. Sebaliknya, konsumsi per kapita di Asia Selatan, Timur Tengah, dan di negara berkembang Afrika, tidak naik atau malah turun di bawah tingkat sekarang yang sudah tidak mencukupi. Karena lahan sampai tahun 2000 hanya akan meningkat 4%, suatu peningkatan produksi pangan akan dicapai hanya melalui hasil-hasil yang lebih banyak. Usaha-usaha yang diperlukan untuk itu, (pupuk, pestisida, energi untuk pengairan, dan bahan bakar untuk mesin-

mesin) sangat bergantung pada pemakaian minyak bumi dan gas bumi. Produksi minyak bumi dunia (meskipun harga minyak mentah meningkat kuat), menurut perkiraan geologi tahun '90-an akan mencapai kapasitas eksploitasi maksimal. Sementara itu, di kebanyakan negara industri tampaknya dapat menjamin kebutuhan yang makin meningkat melalui minyak bumi dan sumber-sumber energi lainnya. Negara berkembang akan makin banyak menghadapi kesulitan akibat kenaikan harga yang akan terjadi. Ramalan-ramalan buruk akan berlangsung untuk 25% manusia, yang primer bergantung pada kayu sebagai bahan bakar; permintaan cadangan yang tersedia akan melampaui 25%. Dalam 20 tahun mendatang kehancuran hutan di seluruh dunia akan meningkat. Sekarang ini setiap tahun punah 18–20 juta ha, kehilangan terbesar adalah di hutan tropis. Sampai tahun 2000 sekitar 40% hutan yang masih ada sekarang di negara berkembang akan punah. Lahan pertanian akan makin terancam oleh erosi, desertifikasi, penggaraman, dsb. Untuk tahun 2050 diramalkan terjadi perubahan penting iklim karena bertambahnya konsentrasi CO₂ dan bahan-bahan kimia yang menurunkan kadar ozon di atmosfer. Pemakaian yang meningkat bahan bakar fosil akan menghasilkan hujan asam yang akan merusak perairan, tanah, dan panen. Dengan kehancuran ruang-ruang hidup diperhitungkan bahwa 20% semua habitat binatang dan tanaman dunia akan punah tanpa bisa dikembalikan.

Jasa Global 2000 adalah memperlihatkan masalah-masalah pokok kemanusiaan di seluruh dunia dalam saling ketergantungan, hubungan, dan *trend* perkembangan. Saran-saran politis yang konkret untuk mengatasi bahaya yang mengancam sebaliknya baru ditawarkan sebagai program aksi yang diilhami Global 2000 dan studi kelanjutan *Global Future-Time Act* tahun 1981 yang juga dilakukan di bawah pemerintahan Carter. Studi ini khusus ditujukan untuk pemerintahan AS dan terbatas untuk AS.

Meskipun hasil Global 2000 mengenai dan menimbulkan diskusi di dunia, namun kedua studi tersebut tidak dibahas lagi oleh pemerintah Reagan.

Kepustakaan: Global 2000, *Der Bericht an den Präsidenten*, Frankfurt 1981; A. Bechmann/G. Michelsen (ed.), *Global Future. Es ist Zeit zu handeln*, Freiburg 1981; Bundesministerium für Forschung und Technologie, *Bericht der Bundesregierung zu "Global 2000" und den darin aufgezeigten Problemen*, Bonn 1982.

ah **Global Negotiations** Konsep negara berkembang (inisiatif nonblok tahun 1979, lalu dipakai Kelompok 77 dan dengan bantuan Komisi Utara-Selatan disampaikan ke negara industri) dalam menuntut sebuah perundingan global terpusat, dengan tujuan mendapat tata ekonomi dunia baru sebagai jalan keluar global. Strategi ini merupakan strategi menghadapi perecahan yang terjadi pada konferensi-konferensi internasional dalam hal dialog Utara-Selatan dan menghadapi *trend* penyerahan masalah Utara-Selatan yang rumit ke sub-sub masalah di berbagai organisasi khusus (UNIDO, FAO, GATT, UNCTAD, IMF). Sampai sekarang

usaha pelaksanaannya gagal terutama karena pertikaian mengenai jenis perundingan dan pelaku keputusan. Sementara kelompok 77 hanya ingin berunding dalam rapat umum PBB atau dalam gremium PBB yang setara (mayoritas negara berkembang), negara industri menyuarakan perundingan di dalam organisasi-organisasi khusus PBB (IMF, Bank Dunia, GATT), di mana mereka mempunyai mayoritas suara. Sejak pertikaian ini menghalangi terjadinya perundingan global dalam Konferensi Cancun 1981, kesempatan untuk melaksanakan aksi-aksi global turun terus.

bg
GNP (Gross National Product) → pendapatan nasional.

Goethe-Institut Didirikan tahun 1951 dalam rangka politik kebudayaan Jerman memelihara bahasa Jerman di luar Jerman dan membantu kerja sama kultural internasional. Di negara berkembang memberikan terutama bantuan pendidikan; titik berat adalah kegiatan menjalin hubungan dan kegiatan di bidang media dan informasi. Selanjutnya memberikan beasiswa untuk belajar bahasa Jerman kepada orang-orang di negara berkembang.

Alamat Indonesia: Jl Matraman Raya no. 23, Jakarta Pusat.

ah
grant element → elemen tunjangan.

Grenada Terletak di bagian selatan Windward Island (→ Karibia), merdeka sejak tahun 1974, menjadi sorotan dunia Oktober 1983 karena invansi AS. Penyebabnya adalah pengambilalihan kekuasaan (1979) oleh *New Jewel Movement* (NJM) yang berorientasi sosialis di bawah pimpinan M. Bishop, mengakibatkan Grenada

terjebak dalam konflik Timur-Barat. AS menganggap Grenada akan dibangun menjadi satelit Kuba (a.l. instalasi sebuah pelabuhan udara besar) dan menduduki pulau tersebut dengan memakai kesempatan terjadinya kudeta berdarah terhadap Perdana Menteri Bishop. Secara formal AS bertopang pada sebuah keputusan organisasi regional OECS. Namun, *de facto* AS selalu melakukan politik intervensi (sebelumnya tahun 1965 di → Dominika) ke "halaman belakang"nya.

Kepustakaan: F. Nuscheler, "Grenada", dlm.: *HDW II*, 3, Hamburg 1982, hlm. 301-312; A. Payne dkk., *Grenada: Revolution and Invasion*, New York 1984.

dn
GSP → Sistem Preferensi Umum.

GTZ (*Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit/GmbH*) Lembaga Kerja Sama Teknik Jerman, didirikan tahun 1974. GTZ menerima tugas-tugas dari BMZ untuk pengujian dan pelaksanaan rencana-rencana bantuan/kerja sama teknik bilateral pemerintah Jerman.

Kegiatan: a. mengirim dan membiayai tenaga ahli untuk proyek-proyek yang telah disetujui, begitu juga penasihat, pendidik, dan pakar; b. memasok perlengkapan dan materi untuk melengkapi sarana-sarana yang dibantu, untuk alat produksi pertanian dan usaha, menyediakan jasa dan tenaga; c. menunjang re-integrasi tenaga-tenaga ahli yang terdidik di Jerman dan ingin kembali ke tanah airnya; d. memberikan subsidi untuk gaji tenaga-tenaga ahli Jerman yang sedang menjalankan kontrak di negara berkembang; e. mengkoordinasi pendidikan dan pendidikan lanjut tenaga ahli serta tenaga pimpinan di negara berkembang sendiri, di negara

berkembang lain, di Jerman maupun di negara-negara industri lainnya; f. memberikan subsidi untuk ongkos pendidikan yang dilakukan perusahaan-perusahaan di negara berkembang; g. membiayai proyek dan program di negara berkembang. GTZ hanya bisa menerima tugas dari pihak ketiga jika ada persetujuan BMZ dan melakukannya dengan mendapat bayaran, begitu juga menyediakan dana sendiri untuk langkah-langkah politik pembangunan (inisiatif sendiri).

Sejak 1 Januari 1989 dalam rangka sebuah restrukturisasi menyeluruh, proyek-proyek GTZ yang selama ini bertitik berat sektoral dialihkan ke titik berat regional. Kerja sama teknik tetap bertitik berat pada bantuan personal. Meskipun jumlah karyawan di beberapa tahun terakhir meningkat (tahun 1987: 1.719 dibandingkan tahun 1982: 1.445), yang bekerja untuk pihak ketiga menurun sejak tahun 1985 (tahun 1987: 279). Selanjutnya, tenaga ahli untuk

Tabel 4: Pembiayaan GTZ dan Distribusi Dana Pemerintah (dalam juta DM)

	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987
Jumlah order	664	574	603	759	898	1007	1391	1403	1304	1397	1211	1414	1550
Subsidi dana pemerintah	522	447	470	560	597	713	827	894	944	1016	996	1042	1081
Dengan pihak ke-3	80	36	36	31	51	135	98	310	281	197	108	153	73
Dana pemerintah menurut sektor													
- pertanian ¹⁾	208	153	164	239	246	274	347	336	379	465	444	459	481
- perdagangan ²⁾	88	86	108	102	104	174	194	215	203	218	210	235	267
- infrastruktur	177	177	169	183	207	203	214	249	247	244	255	265	265
Dana pemerintah menurut daerah													
- Afrika	219	203	226	273	283	344	403	428	449	489	442	462	479
- Asia	195	145	156	161	181	182	202	222	227	270	290	300	278
- Amerika Latin	67	69	74	79	83	100	105	107	102	108	137	145	186
Pangsa LLDC ³⁾	29,2	29,7	29,0	35,4	37,5	40,6	39,6	40,1	38,9	39,4	34,7	32,6	36,6
Pangsa MSAC ³⁾	49,0	53,9	52,1	58,8	59,7	61,3	62,9	62,3	59,8	61,0	54,7	55,6	60,4

¹⁾ dan pembangunan pedesaan.

²⁾ dan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan

³⁾ dalam persen

Sumber: GTZ

jangka panjang dikurangi, dan hanya ditempatkan jika tidak ada tenaga ahli dengan kualifikasi sama di negara setempat.

Alamat Indonesia: GTZ, Skyline Building, Jl. Thamrin, Jakarta Pusat.

Guadeloupe → Karibia.

Guatemala Selama bertahun-tahun rezim militer dan teror negara menentukan situasi politik dalam negeri — merupakan salah satu daerah gejolak dalam 'Konflik Amerika Tengah. Pertengahan tahun '80-an pemerintah militer membiarkan sebuah keterbukaan politik. Usaha demokratisasi nyata terlihat oleh pemerintah sebagai risiko politik: kekuasaan militer menabukan reformasi-reformasi sosial-ekonomi dan melakukakan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia terhadap kelompok-kelompok (para) militer; sedangkan penduduk mendesak perubahan mendasar situasi pemilikan dan kekuasaan yang sangat tidak seimbang.

1. Dengan luas 108.889 km² dan berpenduduk sekitar 9 juta (1989), Guatemala merupakan negara terbesar ketiga dan terbanyak penduduknya di Amerika Tengah. Hampir separo daerah lembah berhadapan dengan Pantai Karibia. Rangkaian pegunungan (*Sierra de Madre, Sierra de los Cuchamontas*, dsb.) berada di daerah tengah Guatemala. Pertanian meliputi sekitar 1/6 luas negara, sekitar 12% padang rumput dan semak belukar. Hutan (hampir 40% luas keseluruhan) makin berkurang karena untuk pertanian. Guatemala memiliki kekayaan bumi yang besar, di antaranya sampai sekarang baru minyak bumi (sejak tahun 1976) yang dieksploitasi dalam jumlah besar.

2. Pertumbuhan penduduk tahun-an 2,9% (1980–1989). Berbeda dengan negara-negara Amerika Latin lainnya, di samping ibu kota Ciudad de Guatemala, juga berkembang banyak perkotaan sebagai sentra-sentra tambahan. Penduduk: di atas 45% adalah Indian (bahasa dan cara hidup Indian), di atas 40% *Ladinos* (cara hidup modern dan kebanyakan berbahasa Spanyol), selain itu penduduk kulit putih dan keturunan Afrika. Tingginya jumlah pengungsi merusak struktur kependudukan: menurut perkiraan organisasi bantuan dari gereja, pertengahan tahun '80-an sekitar 500.000 orang Guatemala melarikan diri ke luar negeri. Sekitar 97% penduduk beragama Katolik, dan gereja mentolerir elemen-elemen pra-Kristen dalam dunia kepercayaan orang Indian.

3. Sebagai daerah inti Kerajaan Maya dan pangkalan angkatan laut Spanyol di masa kolonial Spanyol, dari sana mengurus daerah-daerah jajahan lain di Amerika Latin, secara historis Guatemala mempunyai arti penting untuk Amerika Tengah. Setelah deklarasi kemerdekaan (1821), penggabungan sebentar ke Meksiko dan kegagalan pembentukan Federasi Amerika Tengah, Guatemala menjadi negara merdeka (1839). Konflik antara kaum liberal dan konservatif mewarnai situasi politik dalam negeri di abad ke-19 dan 20. Sementara di masa Presiden liberal J.R. Barrios (1873–1885) ditetapkan landasan-landasan pembangunan negara (pembangunan produksi kopi dan pisang). Sampai tahun '40-an dominasi tetap berada dalam tangan tuan tanah kaya

dan *United Fruit Company* (UFC). Tahun 1944 sebuah pemberontakan mahasiswa menyebabkan perubahan sementara. UUD 1945 memungkinkan reformasi-reformasi substansial, di antaranya pemilihan bebas (Presiden J.J. Arévalo) serta nasionalisasi pemilikan asing dan *latifundia* dalam negeri; di bawah pengganti Arévalo (J. Arbenz) dinasionalisasi a.l. UFC dan dilakukan reformasi pertanian yang mengizinkan perampasan tanah-tanah terbengkalai. Tahun 1954 C. Armas melakukan kudeta dengan bantuan CIA dan oligarki Guatemala dari Honduras dan mengembalikan pemilihan seperti semula. UUD dibatalkan, partai-partai kiri (dan serikat buruh) dibubarkan.

Tahun 1954–1986 secara *de facto* berkuasa kartel penguasa yang terdiri atas militer dan oligarki pertanian, kebanyakan di belakang topeng demokrasi (pemilihan, UUD) (→ rezim otoriter). Militer berkuasa—kecuali intermezo tahun 1966–1970 semasa Presiden J.C. Mendez Montenegro; pemilihan dipakai untuk mempertahankan *status quo*, jika perlu melakukan manipulasi pemilihan (1974, 1978, 1982). Tahap-tahap teror negara yang ekstrem dan selektif saling bergantian. Terutama di bawah pemerintahan Jenderal R. Lucas Garcia (1978–1982) *counterinsurgency* dilakukan secara brutal, dan oposisi moderat sekalipun (dalam partai, serikat buruh dan serikat-serikat campesino) dikejar secara sistematis dan dibunuh. *Amnesty international* (1981) mengatakan bahwa "pembunuhan politik merupakan program pemerintah". Di masa penerus-penerus

Garcia (Jenderal E. Montt dan I.H. Mejia Victores), *counterinsurgency* di pedesaan makin keras (mobilisasi, pembasmian, dan pengusiran massal orang-orang Indian di daerah-daerah konflik). Topeng demokrasi hancur tahun 1982 (situasi darurat, pengadilan luar biasa, larangan kegiatan politik, sensor pers). Tidak hanya karena permasalahan dalam militer dan masalah ekonomi serta pengucilan politik dalam negeri dan isolasi internasional rezim, membuat militer mengizinkan pemilihan Desember 1985. Ruang gerak presiden baru (V. Cerezo) tetap sempit, meskipun ada kehilangan politis dan profil internasional (mengakui kemerdekaan Belize; politik netral-aktif terhadap Nikaragua; inisiatif mendirikan parlemen Amerika Tengah). Aparat represi militer (dan kelompok-kelompok yang bermain dengannya) terus menguasai pengawasan politik; reformasi struktur-struktur sosio-ekonomi—tidak dapat diabaikan untuk konsolidasi usaha demokratisasi—tetap merupakan tabu politik. Sejak Januari 1991 Presiden Jorge Serrano ingin melaksanakan program ekonomi liberal untuk mengatasi dampak politik ekonomi. Namun di lain pihak, militer dan dinas rahasia membuat demokrasi sulit untuk ditegakkan.

4. Pertanian Guatemala terdiri atas beberapa perkebunan modern, *latifundia*, yang dikelola secara ekstensif dan banyak *minifundia*; usaha pertanian terkecil, terletak di dataran tinggi dan sebagian besar merupakan ekonomi subsistensi, menghasilkan bahan pangan dasar (terutama jagung, buncis, kentang) untuk kebutuhan

dalam negeri, dan ditandai oleh metode pengolahan tradisional, kurang pupuk dan modal, situasi transportasi yang buruk dan tanah yang sebagian bernilai rendah. Usaha-usaha pertanian besar memproduksi terutama komoditas ekspor (kopi, kapas, pisang, gula, kardamunggu). Ekonomi Guatemala sangat bergantung pada ekspor komoditas pertanian (sekitar 60% keseluruhan nilai ekspor) serta perubahan gerak permintaan dan harga di pasar dunia. Di sektor dalam negeri (tahun 1985: 19,5% PNB) mendominasi industri pangan, tembakau, minuman alkohol, dan tekstil. Mitra dagang utama adalah AS. Sementara Guatemala di tahun '60-an mengalami kenaikan pertumbuhan ekonomi (tanpa teori *trickle-down*) dan setelah terjadi gempa bumi tahun 1976 (pembangunan kembali) mengalami kenaikan ekonomi yang besar (*boom* gempa bumi). Sejak pertengahan tahun '80-an (analog dengan negara-negara Amerika Latin lainnya) terjebak dalam krisis ekonomi.

6. Pelayanan kesehatan terpusat di ibu kota; daerah-daerah lainnya tidak mendapat pelayanan dokter. Buruknya situasi saniter (tidak ada saluran air dan kanalisasi) dan kurang makan, menyebabkan merajalelanya penyakit-penyakit (infeksi). Dalam sistem pendidikan yang benar-benar terbelakang, wajib sekolah untuk umur 7-14 tahun tidak dapat dilakukan, terutama karena kurangnya sekolah dan pengajar, serta tradisi orang Indian (23 dialek Maya-Quiche), dan *de facto* terbatas pada daerah-daerah perkotaan (kuota bersekolah tahun 1983 sekitar 60%). Tingkat buta ak-

sara di Guatemala (tahun 1985: 45%) merupakan salah satu yang tertinggi di Amerika Latin.

Kepustakaan: U. Kneer/A. Scheuermeier, "Guatemala", dlm.: *HDW II*, 3, Hamburg 1982, hlm. 85 dst.; P. Calvert, *Guatemala. A Nation in Turmoil*, Boulder (Col.) dkk., 1985; W. Giel, "*Counterinsurgency*" und *Demokratisierung in El Salvador und Guatemala*, Ebenhausen 1987; Stuttgarter Zeitung, "Der Mais für die Tortillas ist doppelt so teuer", 12 Juli 1991, dlm.: *BMZ-Spiegel der Presse*, 15/71. Kepustakaan selanjutnya → Konflik Amerika Tengah.

mik
Guevara, Ernesto Che Lahir 14 Juni 1928 di Rosario/Argentina. Tahun 1948-1953 studi kedokteran di Universitas Buenos Aires. Akhir tahun 1953 pergi ke Guatemala untuk membantu reformasi-reformasi sosial di bawah pemerintahan J. Arbenz Guzmán. Setelah terjadi kudeta yang dibantu AS (1954) terhadap Presiden Arbenz, ia lari ke Meksiko. Di sana ia (1955) bertemu dengan Fidel Castro dan sebuah kelompok orang Kuba pelarian. November 1956 bersama Castro dan sejumlah gerilyawan pergi ke Kuba dan ikut ambil bagian dalam perang gerilya tiga tahun yang berhasil mengalahkan Batista. Tahun 1960 Guevara menjadi presiden Bank Nasional dan tahun 1961 menjadi menteri perindustrian. Mulai tahun 1963 Guevara menjalankan suatu sistem ekonomi yang berbeda dari negara-negara sosialis lainnya, yaitu sistem keuangan sesuai anggaran. Pembangunan sebuah masyarakat sosial baginya sekaligus merupakan pendidikan manusia untuk bersikap solider dan manusiawi dalam sebuah dunia yang terbebas. Oleh karena itu, Mei 1965 ia melepaskan jabatan-jabatannya dan kewarganegaraan

Kuba, kemudian menjadi *Guerillero* dalam perjuangan pembebasan di Kongo dan Amerika Latin. Dalam sebuah baku tembak di Higuera/Bolivia ia tertembak mati 9 Oktober 1967 oleh seorang perwira Bolivia.

Kepustakaan: → gerilya.

ks
Guinea Republik Guinea dengan menentang de Gaulle (1958) menjadi negara Afrika Hitam berbahasa Perancis pertama yang memilih merdeka. Selama beberapa tahun sistem politik dan ekonominya menjadi model jalan pembangunan sosialis dan progresif di Afrika Hitam. Setelah terjadi kudeta militer tahun 1984, Guinea membuka diri terhadap Barat.

1. Negara seluas 245.857 km² itu terdiri atas 4 daerah yang secara geografis, iklim, dan etnis berbeda-beda: daerah pantai sangat banyak hujan dan sangat bagus untuk pertanian, dihuni terutama oleh suku Sussu (sekitar 16% penduduk tahun 1988 diperkirakan berjumlah 6,4 juta). Bahasa mereka berkembang menjadi *lingua franca* yang dimengerti di luar daerahnya, di antaranya karena ibu kota Konakri (706.000 penduduk) terletak di pantai. Suku Peul (Fulbe) yang hidup di pegunungan Fouta Djallon meliputi 1/3 penduduk, merupakan kelompok etnis terbesar di Guinea. Di daerah dataran tinggi padang rumput hidup suku Mande, terutama Malinke (30%). Penduduk di daerah hutan pedalaman secara etnis heterogen (Kissi, Kpelle, Toma, dsb.) dan secara ekonomi lebih berorientasi ke negara-negara tetangga, Sierra Leone dan Liberia, karena situasi geografi dan jalan-jalan rayanya. Daerah hutan

akan lebih dihubungkan ke daerah-daerah Guinea lainnya dengan proyek kereta api Transguinea. Namun, realisasi rencana ini masih kekurangan dana. Ketegangan antarsuku, terutama antara Peul, Malinke, dan Sussu makin menajam setelah terjadi kudeta tahun 1984.

2. Pembangunan Guinea yang bertujuan mengatasi struktur ketergantungan eksternal melalui kerja sama terbatas dengan negara industri dan dikendalikan secara politis, sedangkan di dalam negeri membangun struktur basis demokrasi yang sekaligus bertujuan memudahkan mendapat otarki pertanian, diformulasi dalam beberapa tahap. Setelah Guinea memilih merdeka (dengan 92,5% suara dalam referendum tahun 1958), de Gaulle ingin memperlihatkan bahwa Guinea tidak akan mampu hidup tanpa bantuan Perancis, dengan cara memutuskan semua hubungan yang ada antara Perancis dan Guinea. Fungsi negara yang sangat minim dilakukan oleh satu-satunya organisasi yang ada di sana, *Parti Démocratique de Guinée* (PDG). Setelah berlangsung aksi mogok tahun 1953 di negara itu, dipimpin seorang aktivis serikat buruh, Sekou Toure (lahir tahun 1922). PDG yang nasionalis berhasil memobilisasi makin banyak massa sampai ke kemerdekaan. Tujuan pimpinan PDG di bidang kemasyarakatan berorientasi sebagian ke gambaran idealis masa prakolonial, masyarakat yang diwarnai oleh basis demokrasi dan solidaritas sosial (komunokrasi).

3. Awal tahun 1959 hanya 6,2% penduduk yang diperkirakan berjum-

lah 2,9 juta, hidup di kota-kota berpenduduk lebih dari 2.500 orang (lainnya di Konakri). 52,9% PDB dihasilkan dari pertanian tradisional (pertanian dan kerajinan) dan 9,2% selanjutnya dari pertanian yang bertujuan ekspor: pisang, kacang tanah, kopi, dsb.; di tahun '50-an dengan hasil ekspor sekitar 60% merupakan pembawa devisa terpenting. Titik berat rencana pembangunan tetap pada sektor luar negeri yang merupakan sumber devisa terpenting, apalagi setelah meninggalkan *Franc-Zone* tahun 1960. Guinea memiliki cadangan bauksit terbesar di dunia sampai sekarang, dan dieksploitasi sejak pertengahan tahun '50-an. Eksploitasi bauksit di Fria dan Boke dilakukan secara *joint venture*, padanya negara memiliki pangsa 49%, menjadi ketua dewan administrasi dan mendapat 65% keuntungan. Bauksit yang dieksploitasi di Kindia hampir semuanya dipasok ke Rusia untuk membayar kredit. Sektor luar negeri (selain bauksit juga besi yang sulit dicapai di daerah hutan) dengan ekspor bahan mentah yang tidak atau sedikit diolah, tanah lempung (di atas 95%; sisa: buah tropis untuk Rusia), kini mempunyai posisi monopol dalam neraca ekspor.

Pertanian, di akhir tahun '70-an masih mempekerjakan 80% penduduk sejak kemerdekaan, makin terabaikan karena lebih memperhatikan pertambangan. Usaha-usaha reformasi pertanian yang dilakukan dengan propaganda besar-besaran, dalam prakteknya menyebabkan hak milik atas tanah berpindah ke ketua partai lokal, ke mereka yang mampu

membayar buruh tani (tuan tanah kaya, pedagang), dan dapat menguatkan situasi pemilikan mereka. Harga beli (negara) yang rendah, tidak merangsang massa petani meningkatkan produksi; sebagian besar hasil pertanian Guinea (beras, jagung, kacang tanah, pisang, dsb.) diselundupkan ke enam negara tetangga karena di sana harganya lebih tinggi. Oleh karena itu, Guinea sejak beberapa tahun bergantung pada impor pangan (terutama beras dari AS).

Sejak awal tahun '60-an dinasionalisasi bank dan perusahaan asuransi (kebanyakan di tangan Perancis) serta perdagangan dalam dan luar negeri. Pengadaan penduduk dengan barang konsumsi (termasuk bahan makanan) sebagian besar berlangsung melalui pasar gelap, yang diam-diam ditolerir oleh para pejabat pemerintah, selama tidak dijual hasil-hasil dari perusahaan negara. Situasi pengadaan yang buruk menyebabkan terjadi aksi protes tahun 1977 ke istana presiden oleh ribuan perempuan pedagang pasar dan ibu rumah tangga yang secara politik berpengaruh. Hal ini terjadi karena swastanisasi sebagian perdagangan eceran dan sebuah undang-undang investasi baru yang ingin menarik modal asing berinvestasi di Guinea.

Sejak lama neraca dalam sistem pendidikan positif. Tahun 1957/1958-1977/1978 jumlah sekolah dasar naik dari 42.500 menjadi 272.000, di semua jenis sekolah dari 45.000 menjadi 378.000. Lebih konsekuen dibandingkan negara-negara Afrika lain, Guinea berusaha memisahkan diri dari model kurikulum Perancis

dan menyesuaikan isi pengajaran pada kebutuhan masyarakat Guinea, dengan penekanan pengajaran bahasa-bahasa Afrika di kelas dasar. Karena tidak ada perlengkapan material, sistem pendidikan menghadapi masalah besar. Tahun 1988 karena alasan ini kuota penyetoran tinggal 25%. Sejak tahun 1984 bahasa Perancis kembali diajarkan di sekolah dasar.

4. Dalam bidang politik-institusional setelah kemerdekaan, peran PDG yang dominan menjadi sedemikian kuatnya sehingga partai dan negara diproklamirkan sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan (*Parti-Etat*). Jika PDG dalam tahap "demokrasi nasional" (1958-1964) memiliki anggota lebih dari separo penduduk dewasa, menurut S. Touré (1964), ketika eksistensi pertentangan kelas tidak dapat disangkal lagi, PDG diorganisasi dari partai massa menjadi mayoritas revolusioner melawan minoritas kontra-revolusioner. Berdasarkan kerangka UU tahun 1964, jumlah anggota PDG ditetapkan menjadi 1/6 penduduk (di Konakri 30.000). Anggota-anggota aparat partai dan administrasi harus memperlihatkan asal usul kekayaan yang didapat sejak kemerdekaan sehingga menimbulkan perlawanan pihak yang bersangkutan.

Artikulasi pendapat-pendapat yang menyimpang tidaklah mungkin dalam PDG, yang merupakan partai terkuat di negara tersebut. Pengejaran tanpa ampun oposisi yang diduga atau yang sebenarnya, menjadi bagian sistem politik yang berlaku sehingga memberikan julukan Gulag Tropis kepada Guinea. Dugaan ada komplotan permanen menyebabkan pimpinan ne-

gara dan partai melakukan pemberihan secara kejam terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang dianggap berbahaya: terhadap sebagian Peul-Chefferie (1960), serikat buruh marxis (1961), para pedagang (1965), dan militer (1969). Paling brutal adalah terhadap usaha invasi (1970) yang dilakukan orang-orang Guinea pelarian dukungan Portugis dan tahun 1976 kembali kepada Peul. 1/3-1/4 penduduk Guinea beremigrasi ke negara-negara tetangga karena alasan politis, terutama ekonomi.

Politik luar negeri S. Touré sejak awal kemerdekaan menginginkan persatuan Afrika, mula-mula berteman erat dengan rezim progresif di Mali dan Ghana, lalu terisolasi seiring kejatuhan pemerintah di negara-negara tersebut. Isolasi makin menajam karena ada konflik terus-menerus dengan tetangganya, Pantai Gading. Akhir tahun '70-an Guinea mulai mendekati Barat (motivasi: bantuan modal dan alih teknologi) sekaligus bekerja sama dengan Timur (alasan: dekat secara ideologi). Di masa itu strategi pembangunan Guinea sudah dapat dikatakan gagal. Ketergantungan dari luar setelah tahun 1958 dengan memusatkan ekspor ke satu-satunya komoditas (bauksit), makin besar, sektor pertambangan menggambarkan sebuah enklave yang sangat berorientasi ke luar negeri tetapi sangat edikit hubungan ke bidang-bidang ekonomi lain. Tujuan sebuah otarki pertanian tidak dapat dicapai. Dengan mengimpor beras AS yang sangat dibutuhkan, politik anti-Baratnya terbentur batas tertentu.

Sistem politik dan ekonomi S. Touré hanya bertahan seminggu setelah kematiannya (1984). Setelah pengambilalihan kekuasaan oleh militer di bawah Jenderal Lansana Conté dan kehancuran PDG yang dianggap kuat, secara bertahap dilakukan peralihan ke politik ekonomi berorientasi ekonomi pasar. Sampai kini diswastanisasi delapan perusahaan negara (modal Eropa Barat dan Saudi Arabia), direformasi sistem perbankan, serta dijalankan politik pertanian baru yang membantu petani meningkatkan produksi melalui rangsangan materi yang lebih besar sehingga menurunkan impor bahan makanan dan dalam jangka panjang menciptakan landasan untuk industri pengolahan lanjut hasil-hasil pertanian. Keberhasilan sementara, seperti pertumbuhan ekonomi 6% tahun 1987 dan penurunan tingkat inflasi dari 78% menjadi 13% memang tercapai. Namun, arah austeritas-dianjurkan Bank Dunia dan organisasi-organisasi internasional lain dengan pemberian sejumlah kredit menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mencolok.

Kepustakaan: W. Veit, *Nationale Emanzipation, Entwicklungsstrategie und Aussenpolitik in Tropisch-Afrika. Die Beispiele Elfenbeinküste und Guinea*, München 1978; W. Schneider-Barthold, "La grande ouverture de Guinée". *Aussenpolitische Neuordnung und Wirtschaftsreform oder Rückkehr zum Stand der frühen sechziger Jahre*, dlm.: *Afrika Spectrum* 2/1979, hlm. 177 dst.; I.B. Kake, Sékou Touré. *Le Héros et le tyran*, Paris 1987; Guinée: *L'après Sékou Touré, Politique Africaine*, No. 36, 1989.

Guinea-Bissau Penduduk (tahun 1987: 935.000) Republik Guinea Bissau (ibu kota Bissau, akan datang

di Madina do Boé) dengan luas 36.125 km² sebagian besar terdiri atas orang negro dan mulat (Balante 30%, Fulbe 20%, Mandiako 14%, Mandingo 12,5%, Pepel 7%). Bahasa resmi adalah bahasa Portugis, selain itu mempunyai bahasa sehari-hari Sudan dan Kreol-Portugis (Crioulo). 40% beragama Islam (animis, 44.000 Kristen). Produk utama sektor pertanian (tahun 1985: 70% PNB dan 80% angkatan kerja) adalah beras untuk subsistensi dan monokultur kacang tanah (dengan minyak sawit dan kelapa meliputi 80% ekspor). Selain menghapus peninggalan kolonial (monostruktur kacang tanah, kekurangan infrastruktur), pengadaan pangan penduduk sampai kini merupakan masalah pokok strategi pembangunan yang bergantung pada impor bahan makanan dan banyak menelan devisa. Eksploitasi bauksit, fosfat, dan minyak bumi *offshore*, memberi titik tolak untuk sebuah industrialisasi di masa depan. Tahun 1986 tingkat harapan hidup adalah 39 tahun dan PNB 170 US\$ per kapita.

Di awal masa penjajahan Portugis yang berlangsung selama 500 tahun, dibangun pelabuhan-pelabuhan untuk perdagangan budak. Setelah ada larangan internasional untuk perdagangan budak, mereka memaksa petani setempat menanam kacang tanah. Melalui kerja sama dengan sistem kepala suku tradisional kelompok-kelompok Islam, administrasi Portugis bisa membasmi perlawanan terhadap pemerintah kolonial di kalangan pemeluk kepercayaan animis. Berbeda dari Angola dan Mozambik, Guinea-Bissau di bawah penguasa kolonial

rezim Salazar yang otoriter, mengabaikan sama sekali pendidikan dan tidak membangun infrastruktur. Gerakan pembebasan PAIGC (*Partido Africano da Independencia da Guiné e do Cabo Verde*) yang dibangun oleh kaum intelektual dalam *As-similados* (profesi, menguasai tulisan dan bahasa Portugis) di bawah pimpinan A. Cabral, memperoleh kemerdekaan tahun 1974 melalui mobilisasi politis petani dan melalui perjuangan bersenjata sejak tahun 1963. Guinea-Bissau mencoba melakukan politik *self-reliance*, sebuah jalan pembangunan yang sosialis (penasihat militer dan sipil dari Kuba). Bantuan pertanian untuk pengadaan penduduk dengan bahan pangan, menjadi prioritas absolut. Prinsip dasar politik luar negerinya adalah nonblok dan anti-imperialisme. Kegagalan politik pertanian, musim kering (\rightarrow Zone Sahel), dan pertikaian mengenai UUD (1984) republik (Dewan Negara, Rapat Nasional dengan 150 anggota parlemen, 4 propinsi) di dalam PAIGC yang berkuasa di Guinea Bissau dan Kepulauan Kapverde, menyebabkan terjadi kudeta terhadap Presiden L. Chabral. Ia dituduh melakukan korupsi, pembunuhan massal tahanan politik, dan lebih mendiskriminasi orang Guinea (kulit hitam) dibandingkan orang Kapverde (campuran). Kerja sama dengan Kepulauan Kapverde menjadi terbengkalai di masa pemerintahan J.B. Vieira. Kesatuan PAIGC (tahun 1984: 96% suara pada pemilihan dalam Rapat Nasional) menjadi hancur dengan berdirinya PAICV di Kapverde.

Kepustakaan: P. Handyside (ed.), *Revolution in Guinea, Selected Texts by Amílcar Cabral*, New York und London 1969; B. Davidson, *Die Befreiung Guineas*, Frankfurt 1970; D. Nohlen/R. Witzel, "Guinea-Bissau", dlm.: F. Nuscheler/K. Ziemer, *Politische Organisation und Repräsentation in Afrika*, Berlin/New York 1978, hlm. 847 dst.; Ch. Sigrist, "Guinea-Bissau", dlm.: *HDW II*, 4, Hamburg 1982, hlm. 208, dst.; U. Schiefer, *Guinea-Bissau zwischen Weltwirtschaft und Subsistenz*, ISSA, Bonn 1986.

ah

Guinea-Khatulistiwa Luas 28.051 km², ibu kota Malabo, terdiri atas Pulau Bioko (Fernando Póo, bekas koloni Perancis, 2.017 km²), Pagalu (Annobón, bekas koloni Perancis, 17 km²) dan daerah di benua (Mbini, Rio Muni) dengan Kepulauan Elobey (26.017 km²). Penduduk yang terdiri atas suku Bantu (80%, di antaranya Fang, Benga), suku Bubis (45.000), Fernandinos (3.000) di pulau Bioko, serta sekitar 4.000 orang kulit putih (tahun 1986: 381.000), mempunyai tingkat harapan hidup yang sangat rendah (tahun 1986: 45 tahun). Kekayaan kayu, tanah vulkanis yang subur, dan minyak bumi (Bioko) *off-shore*, merupakan sumber daya penting. Iklim yang panas dan lembab sebaliknya menyuburkan penyakit panas rawa, penyakit tidur, lepra, dan penyakit-penyakit lainnya. Sektor pertanian (tahun 1985: 60% PNB, mencakup 75% penduduk) mempunyai peran kunci dalam ekonomi (tahun 1984: PNB per kapita 343 US\$) negara tersebut. Coklat (70%), kopi, dan kayu tropis merupakan komoditas ekspor andalan. Mitra dagang utama Negara AKP ini adalah ME (terutama Spanyol) dan Cina. Industri yang masih sedikit berkembang (tahun 1985: 5% PNB dan

angkatan kerja) terbatas pada penyediaan hasil-hasil pertanian, dan kehutanan dalam negeri. Sumber devisa yang sangat patut dipertanyakan baru-baru ini adalah penyediaan Pulau Annobón sebagai gudang untuk limbah atom dan limbah beracun dari negara industri.

Spanyol, sebagai penguasa kolonial di bawah tekanan gerakan pembebasan (Monalige, Munge, dsb.), melepaskan politik integrasi teritorial ke federasi Spanyol (1959) dan politik asimilasi (perluasan sistem pendidikan). Tahun 1964 Spanyol memberi Guinea-Khatulistiwa otonomi intern. Prioritas kolonial untuk daerah Fernando Póo menciptakan kesenjangan perkembangan antara Fernando Póo dengan Rio Muni yang lebih miskin, tetapi lebih banyak jumlah penduduknya sehingga menajamkan perbedaan-perbedaan antara suku Buni dan Fernandino (keturunan budak-budak yang telah dibebaskan dari Afrika Barat dan Karibia) dengan suku Fang. Tidak seperti orang Fang yang menuntut kemerdekaan penuh, penduduk Fernando Póo ingin tetap tinggal dalam perserikatan Spanyol karena mereka takut terhadap mayoritas orang Fang yang makin besar. Setelah merdeka (12 Oktober 1968) Presiden Macías Nguema, ditunjang oleh militer, polisi, dan remaja negara yang terorganisasi (dengan sarana teror dan penindasan), membangun sebuah diktator yang kejam. Selain likuidasi oposisi dan peleburan semua partai ke satu partai PUNT (*Partido Unico Nacional de Trabajadores*), Tahun 1978 agama Katolik dilarang (80% penduduk beragama Katolik).

Melalui kudeta Agustus 1979, Kolonel T. Obiang Nguema Mbazogo (sampai sekarang kepala negara dan kepala pemerintahan) mendapatkan kekuasaan. Obiang menghukum mati Nguema, pamannya. Sejak kemerdekaan, semua posisi kunci dalam politik dan ekonomi berada dalam tangan *clan* desa Mongomo, asal kedua presiden tersebut. Sebagai partai kesatuan adalah *Partido Democratico Guinea Ecuatorial*. Guinea-Khatulistiwa mendapat bantuan modal (tahun 1988 sekitar 2.000 juta Ptas) dan bantuan teknik dari Spanyol. Sebagai imbalannya, Spanyol mendapat konsesi perikanan dan minyak bumi. Dengan bantuan yang sama, Perancis di tahun-tahun terakhir makin berpengaruh di negara itu.

Kepustakaan: M. Liniger-Goumaz, *La Guinée équatoriale un pays méconnu*, Paris 1980; D. Nohlen, "Águatorialguinea", dlm.: *HDW II*, 4, Hamburg 1982, hlm. 390 dst.

ah
Guyana Republik Kooperatif Guyana berusaha melakukan pembangunan tidak secara kapitalis, melainkan pembangunan berlandaskan kooperasi dan swadaya (*self-help*). Jalan Ketiga ini dipertanyakan karena adanya masalah-masalah ekonomi dan politik yang represif dalam mempertahankan kekuasaannya.

1. 85% Guyana yang merupakan bekas koloni Inggris (luas: 214.969 km²) ditutup oleh hutan tropis. Pemanfaatan pertanian hanyalah di jalur-jalur pantai Guyana yang sangat banyak ditanami tebu (komoditas ekspor terpenting; tahun 1985: di atas 35% nilai ekspor) dan padi. Di pedalaman diperkirakan dan terbukti terdapat sejumlah kekayaan tambang,

yang terpenting adalah bauksit. Ekonomi Guyana tetap bergantung pada ekspor bauksit (30% nilai ekspor), meskipun ada masalah penjualan di pasar bauksit dunia.

2. Dari gerakan serikat buruh tahun '20-an dan '30-an (tahun 1922 berdiri *Guiana Labour Union*, serikat buruh pertama di daerah Karibia), tahun 1950 didirikan *People's Progressive Party* (PPP) oleh orang India bernama Cheddi Jagan, mula-mula terdiri atas berbagai kelompok etnis. Dalam situasi perang dingin, Jagan dituduh komunis (lalu mendapat tekanan politik dari dalam dan luar negeri) sehingga sekelompok anggota PPP yang dipimpin oleh Menteri Pendidikan Pemerintahan Jagan (1953-1964), seorang Afrika bernama Forbes Burnham, memisahkan diri dan membentuk PNC (*People's National Congress*). Pemisahan ideologi ini menajam dan dibungkus oleh pertikaian antarras. Karena kuatir Jagan yang marxis dapat menjadi perdana menteri pertama Guyana merdeka dengan dukungan penduduk India yang meliputi 50% penduduk Guyana serta diuntungkan oleh sistem pemilihan mayoritas relatif, AS menekan Inggris untuk mengundurkan pemberian kemerdekaan negara itu yang dijanjikan tahun 1963 menjadi tahun 1966 dan menetapkan pemilihan tahun 1964 dengan sistem pemilihan yang mengecualikan orang asing, seperti tradisi Inggris. Dengan demikian, Burnham di puncak sebuah koalisi anti-India, berhasil menjadi perdana menteri, dan tetap bertahan sampai kematiannya (1985) melalui keber-

hasilan-keberhasilan pemilihan selanjutnya (dengan bantuan manipulasi pemilihan) dan langkah-langkah represi politik dalam negeri (perbandingan kesatuan keamanan per kepala adalah 1:284 [1964] menjadi 1:37 [1977]). Pengganti Burnham, ketua PNC baru, Desmond Hoyte, posisinya disahkan melalui manipulasi pemilu Desember 1985, melanjutkan gaya pemerintahan Burnham yang represif.

3. Guyana tahun 1986 diperkirakan berpenduduk 970.000 orang. Mereka terpusat di daerah pantai, dan terutama di perkotaan (ibu kota Georgetown tahun 1986 sekitar 170.000 penduduk). Kelompok-kelompok etnis terbagi-bagi sesuai dengan kegiatan ekonominya (orang India di sektor pertanian, orang Afrika di perkotaan). Di atas 51% penduduk adalah orang India, di atas 32% orang kulit hitam, 5% orang India, 2% kulit putih, 0,7% Cina, dan 9,3% campuran.

4. Eksploitasi bauksit (tempat kerja hanya untuk 3,5% angkatan kerja) merupakan cabang industri terpenting. Tahun 1971 dinasionalisasi cabang perusahaan ALCAN dan instalasi-instalasi *Reynolds* (dengan membayar ganti rugi). Namun, Guyana tetap terus bergantung pada perubahan permintaan pasar dunia dan strategi pemasaran perusahaan ALCAN milik Kanada yang mengolah sebagian besar bauksit. Hanya sementara waktu saja bauksit dapat menggantikan komoditas ekspor utama gula (nasionalisasi industri gula tahun 1976). Secara keseluruhan negara mengawasi sekitar 80% kegiatan ekonomi. Pemasaran ekspor gula dan

bauksit, serta sektor keuangan, tetap berada di tangan asing.

5. Struktur sosial Guyana didominasi oleh konflik-konflik etnis dan sosial. Di lapisan terbawah piramida masyarakat adalah pengangguran di perkotaan (jumlahnya terus meningkat) dan pekerja di perkebunan-perkebunan gula. Upah terbaik diterima oleh pekerja tambang, hampir semua orang Afrika. Orang Afrika juga mendominasi aparat negara. Negara, pemberi kerja terpenting di negara itu, mendiskriminasi secara sistematis penduduk India dalam hal pembagian tempat kerja.

6. Masa lalu kolonial Guyana menimbulkan keanekaragaman religius (57% Kristen, terutama Protestan; 33% Hindu; 9% Islam) dan bahasa (9 dialek suku, Patois, Hindi, bahasa resmi Inggris). Dalam sistem pendidikan ada monopoli pendidikan Kristen warisan kolonial. Sebagian besar orang India buta aksara (tahun 1976 jumlah keseluruhan 17%-20%) dan peluang karir mereka kecil (sedikit wakil mereka dalam pemerintahan, pendidikan, dan kesehatan). Kesenjangan pendidikan antarras bersamaan dengan kesenjangan desa-kota karena sekolah-sekolah tinggi terpusat di perkotaan. Pengadaan kesehatan untuk penduduk diperbaiki, namun tidak sesuai dengan pertumbuhan penduduk.

7. Guyana sejak tahun 1970 merupakan *Cooperative Republic* dengan kekuasaan PNC sejak tahun 1980 (referendum yang dimanipulasi mengenai UUD baru) menjadi lebih kukuh secara institusional. Bagi Guyana, tujuan jangka panjang adalah

berkembang menjadi masyarakat non-kapitalis (sejak tahun 1973 PNC merasa sebagai partai sosialis). Koperasi diharapkan dapat mendesak sektor-sektor ekonomi negara dan kapitalis swasta. Sampai pertengahan tahun 1972 sekitar 15% penduduk terorganisasi dalam lebih dari 1.000 koperasi. Sebagian besar koperasi untuk mobilisasi modal dan kredit, sepertiga untuk produk pertanian, peternakan, dan pemasaran, sisanya untuk berbagai fungsi *self-help* (slogan koperasi): produksi industri, pembangunan rumah, penciptaan lapangan kerja dan jasa. Sejauh mana koperasi bisa berhasil dalam peran yang mereka inginkan, belum diketahui. Sekarang ini mendesak masalah-masalah lain. Situasi ekonomi yang sulit (pengangguran akhir tahun '70-an: 30%, 20% angkatan kerja tidak mempunyai kerja tetap) menyebabkan pemerintah dua kali (sampai kini) meminta bantuan keuangan dari IMF (1978, 1979). Hal penting untuk masa depan Guyana adalah, bagaimana mengatasi masalah-masalah tersebut, yang di satu pihak dikarenakan ketergantungan eksternal akibat peran dominan bauksit dalam ekonomi, berkaitan dengan situasi keuangan yang kacau (tahun 1982 Burnham menyatakan negaranya bangkrut dan sampai sekarang tidak bisa diatasi). Di lain pihak, ada ketegangan karena perbedaan-perbedaan ideologi dan sosial dalam kelompok-kelompok etnis yang saling terpisah sampai menggunakan kekerasan.

Kepustakaan: C. Jagan, *The Economic Crisis in Guyana*, Georgetown 1978; K.R. Hope, *Development Policy in Guyana: Planning, Finance and Administration*, Boulder (Col.)

1979; G.K. Danns, *Domination and Power in Guyana: A Study of the Police in a Third World Context*, New York 1982; R. Chandisingh, "Guyana's New Constitution and the Elections of 1980: A Case of People's Power?", dlm.: *Verfassung und Recht in Übersee* 15, 1982, hlm. 145 dst.; W. Rodney, *A History of the Guyanese Working Class, 1881-1905*, London 1982; H. Sellin/J. Siegelberg, "Guyana", dlm.: *HDW II*, 3, Hamburg 1982, hlm. 313, dst.; K.R. Hope, *Guyana: Politics and Development in an Emergent Socialist State*, Kingston 1985.

rs
Guyana-Perancis Merupakan daerah yang bergantung dari Perancis,

luas 91.000 km², tahun 1987 berpenduduk sekitar 89.000. Secara etnis sangat heterogen; pertumbuhan penduduk 2,2% (1970-1977); ibu kota Cayenne. Pusat ruang angkasa Perancis Kourou, di samping kekayaan kayu, merupakan sumber daya pembangunan.

Kepustakaan: F. Schwarzbeck, *Französisch Guyana, Die letzte kontinentale Überseebesitzung in Lateinamerika*, Heidelberg 1982; K. Ziemer, "Guyana", dlm.: *HDW II*, 3, Hamburg 1982, hlm. 457, dst.

ah

H

HABITAT Pusat Pemukiman PBB (UNCHS = *United Nations Centre for Human Settlements*). Konferensi HABITAT pertama berlangsung Mei 1976 di Vancouver dengan tema tempat tinggal yang manusiawi di negara industri dan negara berkembang. Deklarasi Vancouver menuntut perencanaan dan pelaksanaan politik perumahan pemerintah, dengan mengikutsertakan mereka yang memerlukannya dan bertujuan menyediakan tempat tinggal yang manusiawi untuk semua orang, baik di kota maupun di desa. Reformasi undang-undang pertanian diharapkan akan memudahkan pemilikan tanah yang akan dibangun. Untuk rencana bangunan yang baru harus digunakan bahan lokal dan teknologi tepat guna. Tujuan ini dilembagakan dengan pendirian Pusat HABITAT yang berkedudukan di Nairobi. HABITAT di Nairobi mempunyai 160 orang staf dan 60 orang lagi tersebar di setiap benua. HABITAT berada di bawah Komisi PBB untuk Pemukiman yang sejak tahun 1978 pada konferensi tahunannya memberikan laporan mengenai kegiatan memerangi masalah kekurangan tempat tinggal dan mendorong inisiatif baru. Kegiatan HABITAT

pertama-tama terbatas pada kegiatan konsultasi. Dalam proyek-proyeknya diperkenalkan bagaimana memperbaiki daerah kumuh, membangun koperasi untuk membiayai dan mengorganisasi pembangunan tempat tinggal atau mengembangkan dan menggunakan bahan bangunan setempat. PBB sering menekankan dukungan selanjutnya untuk tujuan-tujuan Konferensi Vancouver. Tahun 1987 PBB mengumumkan *International Year of Shelter for the Homeless*, untuk membangkitkan perhatian terhadap keadaan mereka yang membutuhkan tempat tinggal. Sehubungan dengan ini PBB dalam resolusinya (42/146) menekankan *realization of the right to adequate housing*, hak memiliki tempat tinggal sebagai hak asasi manusia. Selain itu, PBB menugaskan komisi untuk pemukiman melalui resolusi 146 dari Sidang Umum PBB ke-42 (*Global Strategy for Shelter to the Year 2000*), merampungkan suatu strategi dunia dengan tindakan konkret memerangi masalah kekurangan tempat tinggal. Titik berat strategi ini terletak pada *enabling approach*, artinya cara pendekatan yang memberikan kesempatan perencanaan dan pelaksanaan sesuai keinginan komu-

nitias dan kelompok pemukiman setempat, sedangkan masing-masing pemerintahan bertugas menyediakan sarana dan bantuan lainnya. HABITAT mengkoordinasi dan mengevaluasi inisiatif PBB ini.

rs hacienda *Hacienda* tradisional adalah usaha pertanian yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sendiri berdasarkan monopoli lahan, sebagian juga monopoli air dan hamba sahaya yang berasal dari penduduk sekitar. Tenaga kerja para *colonos* (di Cile *inquilinos*, di Peru *yanacunas*), hanya mengolah sebagian kecil dari *hacienda*—diwakilkan kepada seorang *mayordomo* jika pemilik tidak tinggal di situ. Para pekerja wajib bekerja selama 3-5 hari dalam seminggu untuk *hacendado*, imbalannya mereka memperoleh sepetak lahan untuk kebutuhan dirinya. Hacienda menggambarkan sistem yang lengkap mengenai hubungan ekonomi, sosial, dan politik antara patron dengan buruh tani yang diisap dan menjadi budak. Namun, melalui modernisasi pertanian—bentuk usaha pertanian ini lenyap. Di pedesaan, juga di *latifundia* dan di perkebunan telah masuk bentuk hubungan pengupahan.

Kepustakaan: G. Siebenmann (ed.), *Die lateinamerikanische Hacienda*, Diessenhofen (Swiss) 1979.

dn Haiti 1. Republik Haiti terletak di sepertiga bagian barat dari Pulau Antila Besar (luas 27.750 km²). 11.800 km² dimanfaatkan untuk pertanian, terutama daerah pantai yang subur. Pangsa pertanian pada PNB tahun 1985 adalah 32%, sementara pangsa pertanian pada ekspor turun sejak tahun '70-an akibat stagnasi dan perluasan industri yang berorientasi eks-

por dan ditopang oleh modal asing. Komoditas ekspor andalan dari sektor pertanian adalah kopi (lebih dari 20%), serat sisal, gula, dan minyak eter. Di samping hasil pertanian, Haiti juga memiliki cadangan besar kayu dan cadangan mineral yang masih kurang diteliti. Hanya bauksit (10% ekspor) dan tembaga dieksploitasi secara komersial dan diekspor oleh perusahaan asing. Sejak industrialisasi yang tergantung dari luar di tahun '70-an, sektor industri makin penting dalam perekonomian (30% ekspor). Tentu saja strategi industrialisasi dengan upah yang sangat rendah, menimbulkan cadangan buruh industri dan ketimpangan sosial; serta karena bersifat padat modal, hanya menciptakan sedikit lapangan kerja (6% angkatan kerja tahun 1985 bekerja di sektor industri) dan sedikit sekali memperbaiki keadaan sosial penduduk. Proses pembangunan Haiti yang kapitalistis dan sangat tergantung dari luar juga mengakibatkan peningkatan utang negara (tahun 1986: 585 juta US\$; tahun 1985: 27,8% dari PNB).

2. Haiti sampai tahun 1804 adalah jajahan Perancis. Sistem ekonomi dan masyarakatnya berdasarkan pada pengisapan budak dari Afrika. Setelah perang pembebasan para budak, Haiti (1804) mendapat kemerdekaan politik dari Perancis dan menghentikan model ekonomi ekspor pertanian yang bersifat kolonial. Nasionalisasi lahan pertanian (66%-99%) dalam dasawarsa selanjutnya gagal karena pembagian lahan-lahan luas kepada pejabat militer dan pejabat pemerintahan; terciptalah suatu struktur pertanian yang feodalistis dengan berbagai ben-

tuk hubungan ketergantungan dan hubungan sewa. Sejak tahun 1883 rezim feodal makin terperosok ke dalam krisis dan selanjutnya membawa kehancuran tatanan politik setelah tahun 1907. Kemudian, Haiti diduduki oleh AS (1915-1934). Pendudukan ini berakibat modernisasi sebagian (penciptaan infrastruktur) dan pengutamaan kepentingan modal AS (UU yang meringankan impor modal, investasi AS di sektor pertanian). Struktur sosial yang timpang bukan saja dipertahankan, tetapi keadaan sosial petani juga makin buruk akibat terusirnya mereka dari lahan pertaniannya. Sejak invasi AS, perekonomian Haiti semakin bergantung pada mitra dagang utamanya, AS.

3. Penduduk Haiti tahun 1989 diperkirakan berjumlah 6 juta jiwa. Kepadatan penduduk 196 orang/km². Tingkat urbanisasi 28% (1989). Ibu kota Port-au-Prince: 800.000 jiwa (1983). Kepadatan penduduk dan kurangnya kesempatan kerja di pedesaan, menyebabkan urbanisasi dan tingkat imigrasi tetap tinggi (tahun 1987 seluruhnya 1 juta orang). Komposisi etnis penduduk: lebih dari 80% kulit hitam, 15%-20% Mulat, dan beberapa ribu orang asing berkulit putih.

4. Sekelompok kecil oligarki berhadapan dengan lebih dari 90% petani, mereka yang tanpa tanah dan yang termarginalisir (→ marginalitas); lapisan menengah sedikit sekali berkembang. Heterogenitas sektor pertanian sangat besar: enklave asing (kopi, coklat, sisal, gula, pisang) memanfaatkan lebih dari 7% lahan pertanian (produktivitas yang tinggi, se-

kitar 30% nilai produksi pertanian). 91% usaha pertanian di bawah 3 hektar menggunakan 62% lahan pertanian (di antaranya produksi subsistensi). Masalah besar adalah kesengsaraan penduduk pedesaan, tingginya pengangguran dan setengah pengangguran. Kuota pengangguran tahun 1987 diperkirakan 50%. Sarana kesehatan dan pendidikan penduduk di pedesaan sangat kurang, 77% buta aksara, harapan hidup 54 tahun.

5. Sekitar 90% penduduk Haiti secara resmi memeluk agama Katolik, bahasa resmi adalah bahasa Perancis. Lapisan atas berorientasi pada penyebaran dan pemeliharaan budaya dan bahasa Perancis, sedangkan penduduk sedikit sekali bersentuhan dengan nilai-nilai ini. Mereka menolak atau memperalatnya sebagai sarana untuk karir mereka. Dengan menjalankan upacara keagamaan sendiri (*voodoo*), yaitu upacara keagamaan Afrika Barat yang bercampur dengan elemen Kristen), bahasa mereka sendiri (Kreolis), dan cara hidup sendiri (*maronnage*), mereka bereaksi dengan cara sendiri terhadap penindasan dan pengisapan dalam masyarakat.

6. Atas tekanan AS dan kerusuhan sosial yang terus berlangsung, diktator Haiti, J.C. Duvalier, jatuh 9 Februari 1986 dan mengakhiri 30 tahun kekuasaan diktator dinasti Duvalier. Namun, harapan akan terjadinya demokratisasi politik dan reformasi struktur sampai sekarang tidak terwujud. Setelah Duvalier melarikan diri, dewan pemerintahan nasional dengan mayoritas militer di bawah Jenderal Namphy, mengambil alih kekuasaan politik. UU baru di-

sahkan Maret 1987 dan diperkuat melalui referendum. UU menetapkan pemilihan langsung presiden dan parlemen setiap lima tahun sekali. Parlemen terdiri atas dua kamar: Kekuasaan presiden menurut undang-undang dibatasi dengan dipilihnya perdana menteri. Pertama kali sejak 30 tahun di Haiti kembali diizinkan keberadaan multipartai, termasuk partai komunis. Rencana pemilihan presiden dan parlemen tanggal 27 November 1987 terpaksa ditunda setelah pengacauan berdarah yang dilakukan oleh kesatuan militer yang setia kepada Duvalier. Setelah kejadian itu, militer menjamin pengawasan terhadap pemilihan umum dan Januari 1988 pemilihan umum kembali dilaksanakan. Pemilu ini diboikot oleh kelompok partai oposisi dan pihak gereja karena ada manipulasi. Dari pemilu ini muncul L. Manigat sebagai presiden baru Haiti. Proses demokratisasi yang sangat terbatas ini berakhir 19 Juni 1988 dengan terjadinya kudeta militer yang dipimpin oleh Jenderal Namphy, yang membubarkan parlemen, memecat Presiden Manigat dan sejak itu menjalankan kekuasaan politik sebagai presiden suatu junta militer. Kemudian, Namphy dikudeta Avril (September 1988). Demonstrasi anti-pemerintah yang berlangsung selama 5 hari berturut-turut memaksa Avril 10 Maret 1990 melarikan diri ke AS. Kekuasaan diambil alih oleh kepala Angkatan Bersenjata Letjen. Herard Abraham. Lalu, ia menyerahkan pemerintahan kepada Ny. Ertha Pascal Trouillot. Ny. Trouillot dilantik sebagai presiden sementara Haiti 13 Ma-

ret 1990. Dalam pemilu yang paling demokratis di Karibia Desember 1990, Pastor Jean-Bertrand Aristide memenangkan jabatan presiden dengan 2/3 suara. Pelantikannya (Februari 1991) sempat terganggu usaha kudeta yang dilakukan militer dipimpin Lafontant yang baru kembali ke Haiti dari pengasingan (Juli 1990). 8 bulan pemerintahan Aristide, Oktober 1991, Haiti kembali diguncang oleh kudeta militer yang dipimpin oleh Raoul Cedra, dengan alasan Aristide berusaha mengurangi kekuatan militer dan tidak mampu mengatasi masalah sosial dan ekonomi negara itu. Aristide melarikan diri ke luar negeri, kongres kemudian memilih Joseph Nerette, seorang mantan guru besar matematika, sebagai presiden sementara sampai diadakan pemilu tahun 1992.

Perekonomian Haiti mengalami stagnasi dan menurunnya bantuan luar negeri akibat ketidakstabilan politik dan sosial yang terus berlangsung. Akibatnya, di masa dekat tidak bisa diharapkan akan terjadi kemajuan ekonomi Haiti yang akan memperbaiki keadaan sosial mayoritas penduduk yang miskin dan memudahkan proses demokratisasi yang baru.

Kepustakaan: U. Fleischmann, *Aspekte der sozialen und politischen Entwicklung Haitis*, Stuttgart 1971; G. Caprio, *Haiti: Wirtschaftliche Entwicklung und periphere Gesellschaftsformation*, Frankfurt 1979; W. Donner, *Haiti. Naturraumpotential und Entwicklung. Eine Länderkunde*, Tübingen 1980; R. Nonnenmann, *Haiti - Probleme der Wirtschaftsentwicklung in einem Land der Dritten Welt*, München 1981; U. Fleischmann, "Haiti", dlm.: *HDW II*, 3, Hamburg 1982, hlm. 328 dst.; *ibid.*, "Ein 'schwarzer Mann' geht", dlm.: *Lateinamerika - Analysen und Berichte 10*, Hamburg 1986; *BMZ-Spiegel der Presse*, no.2/91 hlm. 62, no.

20/91 hlm. 637-638, no. 21/91 hlm. 671-672.

ks
hak asasi manusia dan proses perlindungan internasional 1. Pengertian hak asasi manusia berasal dari prinsip kodrat abad ke-18, menggariskan hak-hak yang ada pada manusia. Martabat manusia membuat hak-hak ini tidak dapat diganggu gugat dan tidak dapat dilepaskan, dan kelangsungan hak-hak ini tidak bergantung pada pengakuan negara. Dengan pelaksanaan dan sanksi-sanksi alam masing-masing undang-undang, hak asasi manusia menjadi hak-hak dasar. Hak warga-negara adalah hak dasar untuk warga negara sendiri-tidak termasuk orang asing. Isi hak asasi manusia dan hak dasar bergantung pada masing-masing tatanan politik masyarakat (negara polisi, negara hukum liberal, negara sosial, dsb.) sehingga ada sederet hak dasar yang berlainan: a. hak sipil (kebebasan dasar); b. hak politik dan kewarganegaraan; c. hak ekonomi; d. hak sosial; e. hak kebudayaan.

Dengan sifatnya yang eropasentris, hak asasi manusia menimbulkan masalah besar dalam hubungan Timur-Barat dan Utara-Selatan karena gambaran manusia individualis dari Barat berhadapan dengan gambaran manusia kolektif dari Timur. Kedua konsep ini selanjutnya sangat kontras dengan gambaran manusia di negara berkembang. Di negara berkembang, keragaman politik, agama, ekonomi, sosial, dan budaya menghasilkan suatu konfigurasi hak asasi manusia yang lain. Baik arah maupun warna dan nilai masing-masing hak asasi manusia berbeda dari suatu lingkungan budaya ke lingkungan budaya

lainnya dan dari satu ideologi ke ideologi lainnya. Dari keadaan ini timbul masalah hak asasi manusia yang berlaku universal dalam sistem masyarakat dan negara yang majemuk sekarang ini. Pencantuman hak asasi manusia di undang-undang dan pengembangannya menjadi hak-hak dasar dalam masyarakat, hak asasi manusia menjadi hukum negara. Penjaminan dan perlindungan hak asasi manusia/hak dasar karenanya juga sebagai kelanjutan dari kedaulatan manusia, menjadi urusan dalam negeri suatu negara, dan hal ini tetap berlaku hingga Perang Dunia II. Pengecualian adalah undang-undang untuk orang asing dalam hukum internasional dan humanisasi hukum perang yang melengkapi individu dengan hak dan kewajiban menurut hukum internasional.

Nyatanya diperlukan lebih dahulu pengalaman dengan diktator-diktator selama kurun waktu antara dua perang dunia dan kekejaman Perang Dunia II, untuk dapat menyadari bahwa perlindungan hak asasi manusia tidak hanya menjadi tanggung jawab negara (tanah air), tetapi harus juga menjadi tanggung jawab perserikatan bangsa-bangsa. Lalu, kesadaran keharusan internasionalisasi-sasi perlindungan hak asasi manusia lalu secara dogmatis berbenturan dengan prinsip kedaulatan (Pasal 2 Ayat 7 dan 1 anggaran dasar PBB): tuduhan yang dilontarkan oleh kekuatan asing atau organisasi internasional ke alamat pemerintah yang represif biasanya ditolak dengan tuduhan balik sebagai turut campur urusan dalam negeri yang bersangkutan. Puncak

problematika ini adalah masalah diperkenankannya intervensi kemanusiaan (misalnya aksi pembebasan sandera di Entebbe tahun 1976 dan di Iran tahun 1980) sebagai aksi intervensi yang diabsahkan karena sifat kemanusiannya.

Walaupun sekarang ini ada kecenderungan internasionalisasi perlindungan hak asasi manusia, tetapi tanggung jawab utama seperti sebelumnya tetap berada di tangan masing-masing negara dan perlindungan hak asasi manusia hanya dapat diaktifkan setelah melemahnya perlindungan/bantuan hukum yang ada di suatu negara (*exhaustion of local remedies*).

2. Perlindungan internasional hak asasi manusia dapat dilakukan dalam dua cara, yaitu melalui perjanjian multilateral dan organisasi internasional (perjanjian universal, regional, supranasional, antarnegara). Berhubung proses perlindungan internasional mempunyai teknik-teknik tersendiri, proses perlindungan—menurut perlengkapan badan pengawasan—dibedakan menjadi: a. proses perlindungan politik, b. proses perlindungan kuasi pengadilan, dan c. proses perlindungan pengadilan. Proses ini dapat dikembangkan menjadi dua macam, yaitu perlindungan hukum untuk umum (badan perlindungan hukum bekerja secara *ex officio*) dan perlindungan hukum untuk perorangan (atas permohonan orang yang terkena atau negaranya; pengaduan perorangan atau pengaduan negara).

3. Sejauh menyangkut perlindungan hak asasi manusia yang bersifat universal dalam kerangka PBB, pengesahan *Universal Declaration of*

Human Rights tanggal 10 Desember 1948 yang merupakan resolusi sidang umum, tidak mempunyai ikatan apa-apa. Desember 1966 disepakati perjanjian internasional mengenai hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (Perjanjian I) dan perjanjian internasional mengenai hak-hak politik dan warga negara (Perjanjian II) yang mulai berlaku tahun 1976. Sistem perlindungan hukum kedua perjanjian tersebut, perjanjian hukum internasional yang mengikat dan ditandatangani oleh negara-negara Barat, Timur, dan negara berkembang, tidak dikembangkan secara efisien dan mengandung mekanisme kontrol yang lemah, walaupun ada badan tersendiri yang menanganinya (Komisi Hak Asasi Manusia PBB di dalam Perjanjian I dan komite hak asasi manusia di Perjanjian II). PBB juga melahirkan perjanjian internasional untuk melindungi hak asasi manusia yang a.l menentang pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan massal suatu suku bangsa, penyiksaan, diskriminasi rasial, diskriminasi perempuan, penyandang cacat, larangan mogok, dan perbudakan. Di samping perlindungan hak asasi manusia di lingkungan PBB, masih ada kelompok negara yang melindungi hak asasi manusia secara regional seperti di Eropa (Konvensi Eropa untuk Melindungi Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar, 4 November 1950), di Amerika dan Afrika.

4. Perlindungan hak asasi manusia di Amerika berpijak pada deklarasi Amerika untuk hak dan kewajiban manusia yang diproklamarikan tahun 1948 di bawah payung OAS.

Selain itu, tahun 1960 didirikan komisi interamerika untuk hak asasi manusia, tahun 1967 menjadi badan utama OAS. Namun, perwujudannya baru berhasil dengan penandatanganan Konvensi Amerika untuk hak asasi manusia (2 November 1969) yang diratifikasi oleh 20 anggota OAS. Dengan berlakunya Konvensi, tahun 1979 didirikan komisi hak asasi manusia interamerika dan pengadilan interamerika sebagai badan tetap. Walaupun telah ada sembilan negara yang tunduk pada kekuasaan hukum pengadilan, rezim otoriter di Amerika Latin menolak mengakui kekuasaan hukum pengadilan. Meskipun selama ini telah ada sembilan kasus yang diajukan ke pengadilan, sebagian besar hanya berupa penilaian.

5. Perlindungan hak asasi manusia di Afrika diwujudkan dalam OAU; tanggal 19 Januari 1981 anggota-anggota menyetujui rancangan piagam hak asasi manusia dan hak bangsa-bangsa (Piagam Banjul), yang menetapkan pendirian komisi hak asasi manusia untuk Afrika. Untuk sementara waktu pendirian pengadilan hak asasi manusia ditunda. Piagam ini mulai berlaku 21 Oktober 1986 dan saat ini mempunyai 35 negara anggota. Walaupun beberapa bagian penting diambil alih dari Konvensi Eropa untuk hak asasi manusia, Piagam Banjul dikembangkan sendiri dan dirumuskan sesuai tuntutan perlindungan hak asasi manusia di negara-negara Dunia Ketiga (saling berkaitan antara hak asasi manusia dan pembangunan).

6. Belakangan ini di luar perlindungan hak asasi manusia yang kla-

sik (hak asasi manusia generasi 1)—banyak tuntutan untuk mengembangkan lebih efisien isi hak asasi manusia yang ada (hak asasi manusia generasi ke-2) dan menuntut pengukuhan hak asasi manusia generasi ke-3 (hak solidaritas internasional, pembangunan, lingkungan yang bersih, pengurangan persenjataan, pangan yang cukup, dsb.) yang tentu saja kini masih merupakan postulat moral politik dan bukan norma hukum internasional. Walaupun dalam masing-masing kasus diakui, misalnya hak untuk solidaritas internasional (menyelamatkan kapal yang rusak, menyelamatkan astronaut dan pengungsi), perjalanan orang miskin, korban kelaparan, atau bencana alam, dll. masih jauh untuk mendapatkan pengakuan dalam solidaritas internasional. Dalam rangka pembentukan kesadaran yang lebih maju dan memenuhi berbagai tuntutan dari negara berkembang (misalnya tata ekonomi dunia baru), masih diperlukan beberapa langkah lagi. Memang harus dipikirkan bahwa saat ini, tiga dari empat negara di dunia berkuasa secara represif—dengan melanggar hak asasi manusia.

Kekerasan struktural dan gambaran yang mencekam mengenai pembenaran penggunaan kekerasan politik tampaknya membuat usaha perlindungan hak asasi manusia yang universal dan efektif dalam beberapa dasawarsa masih merupakan ilusi.

Kepustakaan: F. Hartung, *Die Entwicklung der Menschen- und Bürgerrechte von 1776 bis zur Gegenwart*, Göttingen 1972; amnesty international, *Der internationale Menschenrechtsschutz, Menschenrechte in den Erklärungen und Konventionen der Vereinten Nationen*, Frankfurt 1981; C. Ritterband, *Universeller Menschen-*

rechtsschutz und völkerrechtliches Interventionsverbot, Bern 1982; A. Barthel, *Entwicklung und Menschenrechte. Das Recht auf Entwicklung als Menschenrecht*, Aachen 1986; W. Heinz, *Menschenrechte in der Dritten Welt*, München 1986; E. Riedel, *Theorie des Menschenrechtsstandards*, Berlin 1986. wh

hak dasar → hak asasi manusia.

hambatan perdagangan Dibedakan menjadi hambatan tarif dan nontarif. Hambatan tarif adalah bea yang ditarik oleh negara atas barang yang diekspor, diimpor, dan transit barang. Hambatan nontarif mencakup semua pengaturan, undang-undang, peraturan administratif, dan praktek administratif. Di samping bea, membatasi lalu lintas barang antarnegara, seperti pembatasan impor secara kuantitatif (kuota impor, kontingentasi impor), pembatasan kredit, peraturan perlindungan tanaman dan hewan, formalitas administrasi yang rumit, dsb. → politik perdagangan luar negeri. dn

hambatan perdagangan nontarif → politik perdagangan luar negeri, hambatan perdagangan.

hambatan perdagangan tarif → politik perdagangan luar negeri, hambatan perdagangan.

harapan hidup rata-rata (dalam tahun) Indikator penting, walaupun bukan yang terbaik, untuk mengetahui situasi penyediaan pangan dan kesehatan penduduk suatu negara. Harapan hidup termasuk kelompok indikator yang menunjukkan tingkat pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. Tingkat harapan hidup di negara berkembang sedikit banyak telah mengalami peningkatan. Namun, perbedaan antarnegara (→ Tabel 2 di lampiran) dan antar-kelompok negara seperti sebelumnya sangat besar. Me-

nurut Bank Dunia, harapan hidup untuk negara berkembang dengan pendapatan per kapita yang rendah tahun 1979 adalah 50 tahun, tahun 1986 mencapai 61 tahun, sedangkan untuk negara berkembang dengan pendapatan per kapita menengah tahun 1979 adalah 60 tahun, tahun 1986 mencapai 63 tahun. Di negara industri Barat tingkat harapan hidup tahun 1979 adalah 74 tahun dan tahun 1986 mencapai 76 tahun. dn

Harrod-Domar → rencana pembangunan, teori dan strategi pertumbuhan.

Heckscher-Ohlin → teori perdagangan luar negeri, teori dan strategi pertumbuhan.

heterogenitas struktural Konsep heterogenitas struktural telah menjadi pengertian pokok dalam menganalisis masyarakat terbelakang. Istilah ini masuk dalam diskusi teori di awal tahun '50-an melalui para ekonom CEPAL. Dalam model sentra-periferi yang mereka kembangkan dipimpin Raul Prebisch (→ tesis Prebisch/Singer), diperlihatkan perbedaan mendasar dalam bidang ekonomi, sosial, politik, teknologi, dan budaya antara sentra yang telah maju dan periferi yang masih terbelakang. Dari penggambaran kategori yang dianggap cocok untuk menghadapi keadaan sosial ekonomi Dunia Ketiga dengan asumsi model teori ilmu ekonomi klasik, konsep ini menjadi kategori analitis yang pokok di pertengahan tahun '60-an dalam lingkungan teori *dependencia*. Dalam konsep heterogenitas struktural terlihat jelas adanya perubahan paradigma dalam teori pembangunan; pertama, ia dimengerti

sebagai konsep tandingan terhadap gagasan dualisme, dengan demikian meletakkan inti dari gagasan dualisme, yaitu perbedaan perkembangan internal antara sektor modern yang berkembang dan sektor tradisional yang terbelakang, ke dalam perspektif permasalahan yang baru; kedua, dengan melontarkan pertanyaan mengenai penyebab heterogenitas struktural ia berhasil membangkitkan perhatian kepada masalah hubungan asimetri antara sentra kapitalis dan periferi kapitalis. Dengan demikian, faktor-faktor eksternal yang sampai sekarang tidak diperhatikan dalam perdebatan politik pembangunan menjadi bahan analisis.

Cordova/Silva Michelenia adalah orang pertama yang mencoba membuat konsep teoretis heterogenitas struktural, yang dalam teori *dependencia* resep Jerman menjadi sangat tergeneralisir dan terdramatisir. Heterogenitas struktural terutama dalam teori kapitalisme periferi menjadi salah satu unsur yang penting.

Bagi para ekonom aliran strukturalis, heterogenitas struktural pertama-tama merupakan konsep untuk menggambarkan dan istilah untuk suatu pengertian mengenai realitas ekonomi dan sosial politik yang rumit di negara berkembang yang membedakannya secara mendasar dengan perekonomian negara industri Barat yang berstruktur homogen (Di Filippo/Jadue tahun 1976: 173). Heterogenitas struktural muncul di mana-mana, bahkan di semua bidang sosial politik dan ekonomi. Aspek apa saja dari kenyataan rumit yang

muncul dalam pusat analisis, hanya mempunyai arti teoretis yang kecil, d.k.l., sejauh mana orang dapat mengaitkan heterogenitas struktural pada struktur produksi, tingkat produksi, produktivitas, distribusi pendapatan, konsumsi, tingkat kehidupan, pembagian kekuasaan, dll. Konsep heterogenitas struktural yang dimengerti secara deskriptif sangat cocok untuk pencatatan kuantitatif fakta-fakta yang didefinisikan oleh heterogenitas struktural sendiri.

Sebagian besar definisi heterogenitas struktural menggunakan identifikasi perbedaan yang ada dalam formasi masyarakat. Berbeda dengan masyarakat yang berstruktur homogen, masyarakat dengan struktur heterogen tidak hanya berdasarkan pada satu cara, melainkan banyak cara berproduksi yang satu sama lain berdampingan dan saling berhubungan (dibedakan menjadi: masyarakat primitif, *clan*, cara berproduksi Asia, feodalisme, kapitalisme, dan sosialisme).

Kelompok penulis Hamburg (1974) menyimpulkan dari logika pengertian marxis, bidang-bidang apa saja dari ruang lingkup produksi, sirkulasi, dan distribusi yang akan diteliti, untuk dapat menemukan cara produksi yang berbeda-beda. Penggunaan pedoman penelitian ini untuk negara berkembang sampai sekarang belum dilakukan karena kemampuan analitis konsep heterogenitas struktural yang dikonkretkan sedemikian rupa jauh lebih kecil dibandingkan re-kurs turunan pengertian teoretis pada kategori cara produksi.

Hartmut Elsenhans (1982) mencoba mendefinisikan heterogenitas struktural sebagai perbedaan faktor produktivitas menurut bidang industri. Ketentuan ini juga bukan hal baru karena penulis lain telah memaparkan adanya perbedaan dalam faktor produksi dan produktivitas. Berbeda dengan pengertian yang bersifat deskriptif murni pada mazhab strukturalis, konsep heterogenitas struktural Elsenhans tidak dapat diterapkan pada negara industri. Kapitalisasi menyeluruh di negara industri memunculkan situasi baru, yaitu kemunculan kesenjangan produktivitas menyebabkan modal maupun tenaga kerja mengalir ke sektor-sektor yang tingkat perkembangannya lebih tinggi (kecenderungan keseimbangan tingkat laba). Hal demikian tidak mungkin terjadi di negara berkembang karena di saat gerak conjungtur turun, sekali pun produktivitas sektor usaha yang unggul, tetap jauh lebih unggul dibandingkan sektor yang tertinggal. Arti definisi Elsenhans ini adalah konsep heterogenitas struktural yang deskriptif hanya berlaku untuk Dunia Ketiga sehingga menghasilkan fungsi penjelasan yang tidak dapat dilakukan oleh aliran strukturalis.

Usaha-usaha teoretis untuk mengembangkan dan ketepatan konsep heterogenitas struktural biasanya bertujuan mengolah dan memberi argumentasi untuk kesimpulan teori pembangunan. Hal ini ada pada mazhab strukturalis ekonomi Amerika Latin dengan sederet reformasi yang mengubah struktur: ekstern memajukan perdagangan dunia yang bertujuan menghapus *terms of trade* yang

merugikan negara berkembang (tugas teorema keuntungan ongkos komparatif); intern dalam langkah-langkah seperti reformasi pertanian, diversifikasi struktur produksi, industrialisasi, peningkatan kesempatan kerja dengan besarnya keikutsertaan negara (tugas konsep permainan bebas kekuatan pasar).

Dari analisis struktur keterbelakangan yang baru dan direproduksi semakin dalam, beberapa teoretisi dependensia berkesimpulan perlunya suatu perubahan revolusioner. Dampak dari revolusi Kuba dan strategi gerilya yang dipropagandakan oleh para teoretisi terhadap pemikiran ini, tidaklah besar. Keyakinan yang mewakili teori kapitalisme periferi bahwa integrasi negara berkembang ke pasar dunia tanpa dapat dicegah akan menyebabkan ketergantungan struktural, dengan demikian juga menimbulkan heterogenitas struktural di dalam negeri, telah memberikan praduga terhadap kesimpulan strategis disosiasi. Padahal peluang realisasinya tentu saja terikat pada transformasi sosial politik yang mendasar di dalam negara berkembang sendiri.

Berangkat dari asumsi bahwa struktur ekonomi dan sosial suatu negara kapitalis periferi mendapat suatu otonomi tertentu—hasil dari faktor luar—yang dijadikan landasan dan determinan bentuk integrasi negara berkembang ke pasar dunia; analisis kapitalisme periferi Raul Prebisch sebaliknya terpusat pada pembahasan kondisi internal yang mempertahankan deformasi struktur dalam bidang ekonomi, masyarakat, dan politik; serta memberikan usul-usul konkret

untuk reformasi struktur internal tersebut. Elsenhans juga mengajukan pendekatan yang reformistis dalam politik pembangunan. Masalah ini membuka perdebatan mengenai politik reformasi saat ini di bidang reformasi masyarakat (menyangkut heterogenitas struktural) sampai ke masalah restrukturisasi ekonomi dunia, "Reformasi semacam itu yang bergerak di bawah gelombang revolusi dan disosiasi tetap mempunyai arti penting di Amerika Latin dibandingkan 'konflik antagonis' yang dinantikan" (Esser 1979: 22).

Kepustakaan: A. Córdova/S.Michelena, *Die wirtschaftliche Struktur Lateinamerikas*, Frankfurt 1969; A. Córdova, *Strukturelle Heterogenität und wirtschaftliches Wachstum*, Frankfurt 1973; "Hamburger Autorenkollektiv, Zur Analyse der strukturellen Heterogenität unterentwickelter Gesellschaften", dlm.: *HDW I*, 1, Hamburg 1974, hlm. 115 dst.; A. di Filippo/S. Jadue, "La heterogenidad estructural. Concepto y dimensiones", dlm.: *El Trimestre Económico* 169, 1976, hlm. 167 dst.; D. Senghaas/U. Menzel, *Multinationale Konzerne und Dritte Welt*, Opladen 1976; O. Sunkel, "La dependencia y heterogenidad estructural", dlm.: *El Trimestre Económico* 177, 1978, hlm. 3 dst.; K.Esser, *Lateinamerika. Industrialisierung und Entwicklung*, Frankfurt 1979; R. Prebisch, *Capitalismo periférico. Crítica y transformación*, Mexico 1981; H. Elsenhans, "Die Überwindung von Unterentwicklung durch Massenproduktion für den Massenbedarf - Weiterentwicklung eines Ansatzes", dlm.: *HDW II*, 1, Hamburg 1982, hlm. 152 dst.; D. Nohlen/R. Sturm, "Über das Konzept der strukturellen Heterogenität", dlm.: *HDW II*, 1, Hamburg 1982, hlm. 92 dst.; D. Senghaas, "Autozentrierte Entwicklung", dlm.: *HDW II*, 1, Hamburg 1982, hlm. 359 dst.

dn/rs
hipotesis U → distribusi pendapatan.

Ho Chi Minh Ho (menurut dugaan) lahir di desa Kim Lien di Vinh (Vietnam Utara) 19 Mei 1890, anak

seorang pegawai pemerintah yang nasionalis. Setelah persinggahannya di London, tempat ia bersentuhan dengan gagasan kaum Fabian, tahun 1917 ia berangkat ke Harlem untuk mempelajari problematika ras. Sejak tahun 1918 ia hidup di Paris, berkenalan dengan Chou En Lai dan Léon Blum, dan dengan bantuan mereka membentuk Uni Antarnegara Jajahan yang terdiri atas kaum nasionalis negeri-negeri terjajah. 30 Desember 1920 *Nguyen Ai Quoc* (Nguyen si Patriot), begitulah ia menyebut dirinya, menjadi anggota pendiri Partai Komunis Perancis. Tahun 1924 ia berangkat ke Moskow. Selanjutnya, ia bekerja untuk Komintern di Asia dan seringkali masuk penjara. Tahun 1930 ia mendirikan *Viet Nam Dang Lao Dong* (Partai Buruh Vietnam), sel Partai Komunis Indocina dan tahun 1941 mendirikan *Vietminh* (Gerakan Kemerdekaan Vietnam). Tahun 1944 ia memaklumkan Pemerintahan Sementara Republik Vietnam dan menyebut dirinya Ho Chi Minh (artinya, mencari penerangan). Tahun 1946 ia mengambil alih jabatan perdana menteri dan kementerian luar negeri Republik Demokrasi Vietnam. Dalam perang Indocina I dan II ia merupakan tokoh utama di pihak Vietnam Utara dan menjadi simbol tokoh perjuangan anti-imperialisme bagi generasi muda di negara industri Barat. Ketika meninggal dunia 3 September 1969 dalam usia 79 tahun, Ho adalah presiden Republik Demokrasi Vietnam dan ketua Komite Sentral Partai Pekerja Vietnam yang didirikan 1951.

rs

homeland Sebutan untuk daerah-daerah yang dihuni dan dimanfaatkan oleh penduduk kulit hitam sesuai keinginan pemerintah Afrika Selatan. Seluruhnya (1987) meliputi 37 daerah dengan bentuk tapal kuda yang mengelilingi daerah inti Republik Afrika Selatan yang modern, meliputi sekitar 14% (171.000 km²) luas negara Afrika Selatan. Saat ini ada sepuluh daerah otonom yang mirip negara dengan pemerintahan tersendiri berdasarkan etnis. Empat di antaranya—disebut negara-negara TBVC Transkei (1976), Bophuthatswana (1977), Venda (1979), dan Ciskei (1981)—menurut undang-undang Afrika Selatan merupakan negara merdeka (tanpa pengakuan hukum internasional), sedangkan enam negara lainnya—Lebowa, Qwaqwa, Gazankulu, Kwazulu, Kangwane, Kwan-debele—didorong sedekat mungkin dalam status tersebut.

Tujuan utama politik *homeland* adalah tetap mengamankan keberadaan minoritas kulit putih. Melalui tahap peralihan yaitu otonomi intern, *homeland* akan dikembangkan menjadi negara mandiri di bidang politik dan ekonomi dengan kewarganegaraan sendiri. Republik Afrika Selatan dalam rangka politik "pembangunan yang terpisah" (→ apartheid) dengan *homeland* dalam jangka panjang bertujuan membentuk suatu komunitas negara-negara Afrika Selatan (konfederasi). Negara tetangga seperti Botswana, Lesotho, dan Swaziland serta negara garis depan yang bersedia bekerja sama, akan dimasukkan ke dalamnya. Pretoria melihat *homeland* sebagai contoh untuk koeksis-

tensi dan realisasi hak menentukan nasib sendiri bangsa-bangsa. Namun kenyataannya justru melayani kepentingan ekonomi dan politik Republik Afrika Selatan. Secara politis, *homeland* berkembang menjadi bagian dari politik rasial Afrika Selatan. Melalui posisinya di bidang politik, status sosial, kekuasaan, dan penghasilan, elite pimpinan di *homeland* terikat kuat dengan politik yang dijalankan oleh Pretoria dan karenanya memperlihatkan kerja sama yang erat dengan kulit putih Afrika Selatan. Situasi di dalam menjadi makin penting. Dari daerah-daerah yang "merdeka dan otonom" muncul dua jenis *homeland* yang berbeda dengan dampaknya yang cukup berat akibat batas-batas daerah yang baru, wewenang pemerintah dan wewenang kekuasaan yang berbeda, perkembangan hukum yang menyimpang (terutama hukum perburuhan) dan penduduk *homeland* dengan kewarganegaraan, hak, dan kewajiban yang berbeda-beda. Dasar-dasar hukum perkembangan *homeland* adalah *Promotion of Bantu Self-Government Act 1959*, *Bantu Homeland Citizenship Act 1970*, dan *Homeland Constitution Act 1971*. Walaupun asalnya berstruktur pluralistik dengan struktur luar pemerintahan yang demokratis, kebanyakan *homeland* secara *de facto* berkembang menjadi negara berpartai satu dan bersifat menindas.

Secara ekonomi *homeland* makin menjadi ekonomi transfer yang kelebihan penduduk. Ekspor tenaga kerja dalam bentuk buruh pengembara dan pekerja ulang alik menjadi produk perdagangan terpenting; se-

bagai kompensasi muncul transfer penghasilan dan transfer keuangan lain dari arah yang berlawanan. Melalui fungsi gandanya sebagai cadangan tenaga kerja di satu pihak dan sebagai daerah penampungan penduduk miskin kulit hitam di lain pihak, *homeland* sekarang hampir tidak mampu menanggung beban sosial.

Jumlah manusia yang hidup di *homeland* (1970-1985) meningkat menjadi 14 juta jiwa. Jumlah mereka dari keseluruhan penduduk Afrika Selatan meningkat menjadi 42%. Jika hanya meliputi kulit hitam adalah sebesar 57% dari seluruh orang kulit hitam. Secara ekonomi daerah *homeland* dilanda kemiskinan hebat dan hanya memiliki infrastruktur dan industri yang kurang berkembang serta-kecuali Bophuthatswana-tidak memiliki sumber daya mineral. Cara pengelolaan tradisional, kelangkaan pengetahuan, modal, dan kredit; kurangnya jasa konsultasi; makin memburuknya keadaan tanah akibat meluasnya padang rumput, keretakan tanah, dan erosi, mengakibatkan rendahnya produktivitas pertanian. Sumbangan *homeland* terhadap PDB Afrika Selatan sekarang ini sekitar 5%, sedangkan sumbangan terhadap PNB-berdasarkan pendapatan yang dihasilkan di daerah "putih" Afrika Selatan-sebesar 14%. Pekerja musiman dan pekerja ulang-alik tahun 1980 memberikan sumbangan terhadap PNB *homeland* sebesar 72%. Transfer dari Pretoria menutupi 2/3-3/4 kebutuhan keuangan *homeland*. Tidak adanya basis ekonomi dan konsekuensi negatif pekerja musiman menentukan struktur sosial *homeland*

dengan pengangguran yang tinggi dan tingginya jumlah penduduk perempuan, orang tua, dan anak-anak.

Oposisi kulit hitam (ANC/ *African National Congress*, PAC/ *Pan Africanist Congress*, AZAPO/ *Azania Peoples Organization*, UDF/ *United Democratic Front*) menuntut persamaan politik seluruh orang Afrika Selatan dalam negara kesatuan Afrika Selatan.

Kepustakaan: L. Harding, "Homelands", dlm.: *HDW II*, 5, Hamburg 1982, hlm. 452 dst.; A.J. Halbach, *Südafrika und seine Homelands*, Köln 1988.

ajh/ah

Honduras Merupakan contoh dari sederet "republik pisang". Honduras terintegrasi ke pasar dunia melalui ekspor pisang dan bergantung sepenuhnya pada AS di bidang ekonomi, politik, dan militer. Peran internasional negara termiskin di tanah genting Amerika Tengah ini di tahun '80-an meningkat karena adanya konflik Amerika Tengah; karena letak geostrategisnya (berbatasan dengan Nikaragua, El Salvador, dan Guatemala), Honduras menjadi basis militer AS di kawasan tersebut. Hal ini terlihat makin jelas terutama dari sering berlangsungnya latihan militer bersama pasukan AS, perluasan intensif infrastruktur militer (lapangan udara, stasiun radar, basis militer, dll.) melalui (dan untuk) kepentingan AS serta izin kepada tentara *contra* untuk berpangkalan di Honduras yang dibiayai AS, dengan imbalan bantuan ekonomi dan militer yang besar dari AS.

1. Wilayah Honduras (luas: 112.088 km²) di bagian barat terdiri atas pegunungan, di bagian tengah daerah pegunungan dan dataran ren-

dah Karibia. Sekitar 1/6 daerahnya merupakan lahan pertanian (sebagian besar tidak dimanfaatkan), hampir sepertiganya merupakan padang rumput. Hutan seluas 1/3 luas negara makin berkurang akibat penebangan liar, terutama di daerah timur laut (→ ekologi). Komoditas ekspor andalan adalah pisang dan kopi. Honduras memiliki banyak kekayaan tambang, tetapi sedikit sekali digali. Perusahaan-perusahaan AS mengeksploitasi emas, perak, timah hitam, seng, dan antimon dalam jumlah kecil. Sektor industri yang kurang berkembang mengolah terutama hasil-hasil pertanian dan kehutanan.

2. Tahun 1989 diperkirakan berpenduduk 5 juta jiwa, pertumbuhan tahunan tahun 1980–1989: 3,5% (termasuk yang tertinggi di Amerika Latin). Kepadatan penduduk (tahun 1985: 39 jiwa/km²) dibandingkan negara tetangganya dan tingkat urbanisasinya termasuk rendah (39%). Sekitar 80% penduduknya adalah orang Mestis (campuran Eropa dan Indian), 10% Indian, dan 5% kulit putih. Penduduk keturunan Afrika (2%–3%; bahasa ibu: bahasa Inggris) sebagian besar hidup di dataran rendah Karibia dan di pulau-pulau yang terletak di seberangnya. Bahasa nasional adalah bahasa Spanyol. Sekitar 86% penduduk beragama Katolik (selain itu Protestan dan Yahudi).

3. Sejarah Honduras merdeka (sejak tahun 1838) ditandai oleh usaha-usaha membentuk negara federasi yang selalu gagal, sengketa perbatasan, pergantian pemerintahan dengan kekerasan (tahun 1824–1971: sekitar 125 kali pergantian pemerin-

tahan) dan—di abad ke-20—intervensi militer AS (tahun 1903–1937 tercatat tujuh kali intervensi); AS melalui intervensi mempertahankan kepentingan *United Fruit Company* yang enklave pisangnya mendominasi perekonomian Honduras. Setelah masa kepresidenan sipil yang sangat dipengaruhi oleh kekuatan asing (1949–1963), Honduras berada di bawah kekuasaan militer—tahun 1971/1972 diselingi pemerintahan sipil liberal-nasional.

Sejak tahun 1981 militer mengizinkan pembentukan etalase demokrasi parlemen dengan undang-undang liberal (1982) dan pemilu (1980/1981, 1985) (→ demokratisasi). AS dan militer sangat membatasi ruang gerak pemerintah yang sedang berjalan (1982–1985 Presiden R. Suazo Cordova, sejak tahun 1986 J. Azona) dan memiliki hak veto yang sangat besar atas setiap keputusan pemerintah.

4. Struktur perekonomian Honduras ditandai oleh pertentangan besar antara sektor pertanian tradisional (*minifundia*, *latifundia* yang digarap secara ekstensif) dan sektor modern yang telah dimekanisasi (enklave pisang, sebagian perkebunan kopi, peternakan). Lebih dari 2/3 seluruh usaha pertanian merupakan *ekonomi subsistensi*. Usaha pertanian kecil memproduksi terutama pangan dasar (jagung, beras, kacang-kacangan) yang merupakan kebutuhan dasar penting untuk penduduk Honduras termiskin di Amerika Latin (→ pangan). Di tahun '80-an tingginya produksi kebutuhan dasar pangan memungkinkan pengurangan impor

secara drastis. Sektor pertanian modern berorientasi sepenuhnya ke pasar dunia dan bergantung pada naikturunnya permintaan pasar dunia. Krisis ekonomi Honduras sekarang ini disebabkan a.l. oleh jatuhnya harga produk ekspor pertanian. AS mendominasi perekonomian dan merupakan mitra dagang terpenting Honduras. Perusahaan-perusahaan AS merupakan mayoritas perusahaan transnasional yang bergerak di Honduras; sebagian besar investasi langsung merupakan penanaman modal perusahaan pisang AS. Di sektor industri yang kurang berkembang dikuasai oleh modal asing. AS turut berperan dalam rencana pembangunan Honduras dan mendidik para pengusaha serta perwira angkatan bersenjata.

5. Infrastruktur negara ini terutama untuk kebutuhan ekspor pisang dan kebutuhan kota. Kuota buta aksara rata-rata 40% (1985); ada kesenjangan besar pendidikan antara kota dan desa. Langkah-langkah untuk memperbaiki bidang pendidikan mengalami kegagalan, a.l. karena kekurangan tenaga pengajar dan miskin yang mengancam mayoritas penduduk (kebanyakan penduduk hanya menikmati pendidikan sekolah selama tiga tahun). Bidang kesehatan di luar kota besar (dan tidak dijangkau pelayanan kesehatan dalam perusahaan-perusahaan AS) sangat terbelakang. Kepustakaan: G. Dierke, "Honduras", dlm.: *HDW II*, 3, Hamburg 1982, hlm. 101 dst.; J.A. Morris, *Honduras: Caudillo Politics and Military Rulers*, Boulder/London 1984; R. Gangerl U. Helwerth, "Honduras: Drehscheibe der US-Intervention", dlm.: *Lateinamerika. Analyse und Berichte* 9 (1985), hlm. 178 dst.; P.L. Shepard, "Versäümte Gelegenheit: das Problem der for-

malen Demokratie in Honduras", dlm.: *Lateinamerika. Analysen, Daten, Dokumentation* 3 (1986), Nr. 6/7, hlm. 45 dst.; W. Dietrich, *Honduras*, Heidelberg 1988. Kepustakaan lainnya → Konflikt Amerika Tengah.

rs/mik
Hong Kong Salah satu negara jajahan Inggris terakhir yang padat penduduknya. Sejak tahun 1983 berlaku nama resmi "pemukiman di sebelah tenggara Cina yang diurus oleh Inggris". Atas dasar perjanjian Cina dan Inggris 19 Desember 1984, Hong Kong akan dikembalikan pada Republik Rakyat Cina (RRC) 1 Juli 1997 sebagai *Special Administrative Region*. Seperti halnya Singapura, Hong Kong mengambil arah politik perekonomian berorientasi pasar dunia dikarenakan tidak adanya tanah yang luas. Sekarang ini Hong Kong dengan pendapatan per kapita 10.350 US\$ (1989) dan tingginya tingkat industrialisasi, termasuk NIB.

1. Hong Kong terletak di sebelah tenggara pantai Cina daratan dan meliputi suatu daratan seluas 1.045 km². Jajahan Inggris ini terdiri atas Pulau Hong Kong (79 km²) dengan ibukota Victoria, semenanjung Kowloon (42 km²), dan daerah belakang *New Territories* (924 km²), termasuk 236 pulau-pulau kecil yang kebanyakan tidak berpenghuni. Hong Kong berpenduduk sekitar 6 juta jiwa (1989), sekitar 97% adalah orang Cina dengan beragam suku, 3% orang asing (Filipina 0,7% kelompok nomor dua terbanyak). Tingginya jumlah pendatang telah membentuk piramida penduduk yang tidak seperti biasanya terjadi di negara berkembang. Sebagian besar penduduk berada dalam usia kerja terbaik (tahun 1989 hanya sekitar 22% penduduk di bawah 15

tahun). Bahasa resmi dan perdagangan adalah bahasa Inggris, tetapi bahasa Kanton diizinkan karena besarnya jumlah orang Cina. Secara fisik, geografis, historis, dan demografis, Hong Kong merupakan bagian dari propinsi Cina Selatan, *Guangdong*. Daerahnya bergunung-gunung dan tidak memiliki sumber daya. Hanya 9% dari lahan yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk pertanian. Namun, Hong Kong memiliki keuntungan geografis, satu-satunya pelabuhan dalam di pantai Laut Cina Selatan dan aman dari angin topan sehingga dapat berkembang cepat menjadi tempat perdagangan dan produksi. Peningkatan jumlah penduduk menyebabkan usaha mengeringkan laut untuk tempat pemukiman menjadi penting.

2. Sejak awal abad ke-19 Hong Kong digunakan sebagai pelabuhan oleh penyelundup opium Inggris. Setelah mengalami kekalahan dalam perang opium (1839-1842), Cina harus menyerahkan Hong Kong kepada Inggris untuk waktu lama melalui perjanjian Nanking (tahun 1842 dinamakan perjanjian yang merugikan, mengandung perjanjian istimewa yang membahayakan Cina). Dalam dasawarsa selanjutnya Cina tidak berhasil memasukkan tata dunia Cina tradisional ke dalam hubungannya dengan kekuatan-kekuatan Barat. Tahun 1860, setelah perang candu berikutnya, dalam perjanjian *Tientsien*, Cina harus menyerahkan semenanjung Kowloon kepada Inggris, membuka pelabuhan-pelabuhan, memberikan kewenangan hukum sendiri bagi orang-orang Inggris, mengizinkan

orang-orang Inggris menggunakan sungai-sungai di Cina, dan memberikan kebebasan membeli tanah. Dalam rangka membatasi ruang lingkup pengaruh di antara kekuatan-kekuatan besar, Inggris tahun 1898 memaksakan perjanjian sewa selama 99 tahun untuk apa yang dinamakan *New Territories* dengan maksud mengamankan jajahan secara ekonomi dan mempermudah jalan masuk ke Cina Selatan. Aneksi Inggris ini merupakan tanda kelemahan kerajaan Cina di abad ke-19 dan memungkinkan Inggris mengubah kedudukan Cina menjadi dalam keadaan setengah jajahan. Dalam kelangsungan konsolidasi sistem perdagangan dunia yang dikuasai oleh kekuatan-kekuatan imperialis, makna Hong Kong makin meningkat dari tahun 1842 sampai masa pendudukan Jepang (1941-1945), sebagai pangkalan armada laut, stasiun perdagangan untuk Cina Selatan, tempat penimbunan barang dan makanan untuk perjalanan Asia Timur, serta sebagai tempat bongkar muat barang dan lalu lintas modal. Setelah Perang Dunia II dan dengan berdirinya Republik Rakyat Cina, terjadi gelombang pengungsi ke Hong Kong (tahun 1949-1980 sekitar 1,1 juta pengungsi). Untuk mengatasi tekanan penduduk di daerah yang kurang menguntungkan untuk pertanian ini, diperlukan perubahan struktur perekonomian Hong Kong. Embargo perdagangan yang dilakukan AS terhadap Cina (1951) membuat Hong Kong dilanda krisis, dalam sekejap telah kehilangan basis ekonominya sebagai perdagangan perantara. Dalam waktu

singkat berlangsung perubahan ke arah produksi industri sendiri.

3. Arus pengungsi telah turut menciptakan persyaratan kemajuan industri Hong Kong: tenaga kerja, modal, dan pengusaha. Industri-industri penting berjumlah besar (misalnya industri tekstil yang modern) ditopang oleh inisiatif dan modal yang berasal dari Shanghai. Modal dari seluruh Asia Tenggara makin banyak yang masuk. Bagi pengusaha-pengusaha Eropa, Amerika, Jepang, dan Australia; Hong Kong makin menarik untuk daerah pengaruh kapitalis: rendahnya ongkos kerja, kecilnya jaminan sosial, cepatnya amortisasi untuk modal yang ditanam, dan tingginya serta kebebasan transfer keuntungan sekaligus kestabilan politik. Investasi asing yang sangat besar berasal dari AS (perbankan, industri elektronika, pariwisata). AS merupakan mitra dagang luar negeri terpenting bagi Hong Kong, disusul Jepang dan Jerman. Perekonomian Hong Kong berorientasi ekspor. Ikatan politik dan ekonomi dengan Barat menjamin Hong Kong sebagai pasar penjualan produknya sekaligus terbuka kesempatan mengalirnya modal dari negara-negara ini dari dan ke Hong Kong. Pada awalnya, Hong Kong menitikberatkan industri ringan yang padat karya, murah, dan sederhana. Namun, sejak tahun '70-an memulai produksi padat modal (alasan: makin meningkatnya persaingan dari daerah Asia Tenggara). Dengan produktivitas yang tinggi, sektor pertanian dan perikanan dalam perekonomian keseluruhan menjadi tidak berarti. Massa pekerja aktif di sektor

sekunder dan tersier berada dalam jumlah yang berimbang. Penopang perkembangan ekonomi di Hong Kong adalah perusahaan swasta, sedangkan negara menahan diri. Ketika RRC membuka diri untuk perdagangan luar negeri akhir tahun '70-an, Hong Kong menjadi mitra utamanya. RRC merupakan pemasok bahan pangan utama bagi Hong Kong. Sekarang ini Hong Kong merupakan pusat keuangan terbesar nomor tiga di dunia (setelah New York dan London); pasar emas terbesar nomor tiga di dunia; memiliki pelabuhan peti kemas nomor dua terbesar di dunia; tempat kedudukan perusahaan perkapalan terbesar; eksportir terbesar (1985) untuk garmen, arloji, radio, kerajinan bunga; serta importir terbesar (1985) bahan mentah tekstil, mesin, kerangka arloji, dan tas. Tahun 1988 jumlah pengangguran menurun menjadi 1,6% dan merupakan angka terendah yang pernah dialami, dengan demikian hampir tercapai keadaan kesempatan kerja penuh bahkan berkurangnya tenaga kerja yang cakap. Utang Hong Kong sangat kecil (tahun 1984: 0,8% PNB). Dalam dasawarsa terakhir Hong Kong mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pendapatan masyarakat meningkat pesat. Namun, 5%-10% pekerja hidup di bawah garis kemiskinan. Sejak tahun 1971 mereka mendapat tunjangan keuangan dari negara.

4. Hong Kong diperintah oleh gubernur (sebagai wakil ratu Inggris) yang membawahi dewan eksekutif (15 anggota) dan dewan legislatif (32 anggota). Gubernur (saat ini: Sir David Wilson) lebih merupakan juru

bicara Hong Kong terhadap negara induk dan hanya sedikit mengurus kepentingan Inggris. Undang-undang Hong Kong sejak abad ke-19 tidak mengalami perubahan formal yang penting. Sekarang ini masih berdasarkan *Letters Patent* dan *Royal Instructions* Inggris, yang memberi kerangka ruang gerak administrasi dan pelaksanaannya.

Mulai tanggal 1 Juli 1997 Hong Kong berada di bawah wewenang RRC. Menurut perjanjian pemerintah Inggris-RRC ("Pernyataan Bersama") yang ditandatangani oleh Margaret Thatcher dan Zhao Ziyang pada 19 Desember 1984 (berlaku sejak 27 Mei 1985), setelah 1997 Hong Kong tetap berdiri sebagai daerah administrasi khusus. Pemerintah RRC menjamin Hong Kong suatu otonomi luas selama 50 tahun dan dipertahankannya sistem ekonomi kapitalis (sesuai dengan UUD Lampiran I, Pasal 2), tidak dipraktekannya garis haluan politik sosialis di Hong Kong sampai tahun 2047. Menurut RRC, politik ini juga turut membantu mencapai tujuan nasional yang utama, yaitu penyatuan kembali dengan Taiwan. Selain itu Hong Kong juga dilengkapi dengan wewenang yudikatif. Pemerintah dan badan legislatif di masa depan terdiri atas penduduk setempat. Badan legislatif dibentuk melalui pemilihan. Melalui pemilihan lokal atau konsultasi kepala pemerintahan diganti dan diangkat oleh pemerintah pusat di Peking. Status hukum penduduk setelah tahun 1997 berubah menjadi *British Dependent Territories Citizens* (3,25 juta jiwa), kehilangan status ini dan akan menjadi pemilik *Certificates*

of Identity (1,7 juta jiwa) warga negara RRC. Setelah penyerahan Hong Kong, orang Inggris akan menjadi orang asing, tetapi dapat diangkat sebagai pegawai atau penasihat. Hak memilih dan mendirikan partai menurut pemerintah RRC tidak perlu karena daerah administrasi khusus (sebutan yang akan datang "Hong Kong-Cina") bukan merupakan negara yang setelah diserahterimakan menjadi merdeka.

Penindasan yang keras terhadap gerakan protes di RRC Juni 1989 telah menimbulkan keresahan di Hong Kong dan tuntutan jaminan yang lebih baik untuk masa depan otonomi Hong Kong. Masa depan Hong Kong sebagai pasar terbuka juga bergantung pada kemajuan RRC dalam rangka politik "pintu terbuka" dan "Empat Modernisasi", serta perkembangan ekonomi dunia keseluruhan dan kemampuan bersaing di tingkat regional di daerah ekonomi Asia Tenggara-Pasifik Barat (misalnya menghadapi Singapura).

Kepustakaan: Y.C. Jao, "The Rise of Hong Kong as a Financial Center", dlm.: *Asian Survey* 19 (7), 1979, hlm. 674-694; H.A. Turner, *The Last Colony: But whose? A Study of the Labour Movement, Labour Relations in Hong Kong*, Cambridge 1980; R. Hanisch, "Hong Kong", dlm.: *HDW II*, 8, Hamburg 1982, hlm. 174 dst.; H. Buchholz/P. Schoeller, *Hong Kong, Finanz- und Wirtschafts Metropole, Entwicklungspolitik für Chinas Wandel*, Braunschweig 1985.

ra huasipungo, huasipunguero Sebutan di Ekuador untuk sebidang lahan di latifundia yang diolah oleh seorang *huasipunguero* (dengan anggota keluarganya) dan sebagai kegiatan ekonomi subsistensi buruh tani Indian. Sebagai imbalan meneri-

ma *huasipungo* (dan kemungkinan hak-hak lainnya: air, padang rumput, kayu, dll.), *huasipunguero* menyerahkan sebagian tenaga kerjanya (tidak lebih dari empat hari dalam seminggu) kepada pemilik latifundia tanpa dibayar atau dengan upah yang sangat rendah.

fn
hubungan Selatan-Selatan 1. Awal tahun '70-an ditandai oleh terjadinya tiga krisis internasional, yaitu krisis pembangunan (makin parahnya keterbelakangan dan situasi miskin), krisis politik bantuan pembangunan (kegagalan bantuan pembangunan, kegagalan konsep "bantuan lewat perdagangan", *aid by trade*), dan krisis hubungan ekonomi internasional (ambuknya sistem Bretton Woods; → Bank Dunia). Jawaban atas berbagai tantangan ini adalah tuntutan untuk makin memperkuat kerja sama Selatan-Selatan, artinya kerja sama antarnegara berkembang (*Cooperation among Developing Countries* = CDC).

2. Secara konsepsional diskusi ini berkaitan erat dengan gagasan "kemandirian kolektif negara berkembang", *collective self-reliance* (CSR). Hal ini berhubungan erat dengan: a. gagasan kerja sama bilateral dan integrasi regional yang meliputi intensifikasi hubungan sesama negara berkembang di bidang ekonomi, politik, iptek, dan kebudayaan. Dengan penguatan kerja sama di atas basis persamaan dan penjaminan keseimbangan keuntungan di antara mitra yang bekerja sama (kooperasi yang simetris), sumber daya sendiri dapat dimanfaatkan lebih baik sehingga hubungan yang asimetris dan

bergantung pada negara industri dapat dikurangi (*cooperation against poverty approach*); b. melalui langkah bersama menurut model OPEC dapat dibangun suatu kekuatan tandingan yang lebih kuat terhadap negara industri di pasar dunia dan memperbaiki posisi pasar sendiri (*trade union approach*).

3. Isi maupun organisasi CDC dibagi menjadi kerja sama ekonomi dan kerja sama pengetahuan dan teknologi (TCDC). Di bidang kerja sama ekonomi dibagi menjadi kerja sama industri (ICDC/*Industrial Corporation among Developing Countries*, Kerja Sama Industrial Antar-negara Berkembang) dan kerja sama di bidang pertanian sebagai bagian tersendiri. Tanpa diragukan lagi, kerja sama ekonomi merupakan jenis kerja sama terpenting, diungkapkan sebagai program pertama kali tahun 1970 pada konferensi menteri luar negeri yang ketiga negara-negara nonblok di Lusaka dalam rangka strategi *collective self-reliance*. Perubahan dari formulasi dasar yang umum menjadi formulasi yang berorientasi aksi nyata, terjadi dalam konferensi menteri luar negeri negara nonblok di Georgetown (1972) dengan pengesahan program aksi untuk kerja sama ilmu pengetahuan negara nonblok.

Setelah beberapa konferensi (a.l. konferensi kerja sama ekonomi negara berkembang di Mexico City September 1976), akhirnya dalam pertemuan menteri Kelompok 77 di Arusha (1979) disepakati suatu program aksi yang luas dengan titik berat: a. pendirian suatu Sistem Preferensi Umum untuk perdagangan antarnegara-

ra berkembang; b. kerja sama organisasi perdagangan pemerintah negara berkembang; c. kerja sama moneter dan politik keuangan antarnegara berkembang (perjanjian mengenai perhitungan perdagangan dan perjanjian kredit, uni mata uang, pendirian lembaga keuangan bersifat global, misalnya bank untuk negara berkembang, pembangunan sistem jaminan kredit ekspor); d. tuntutan akan suatu perusahaan multinasional yang bergerak di bidang produksi (*joint venture*); e. peningkatan integrasi dan kerja sama ekonomi subregional, regional, dan interregional; langkah-langkah khusus terutama untuk negara-negara miskin (LLDC). Sejak konferensi Arusha bidang-bidang yang menjadi perhatian adalah sistem preferensi, kerja sama antarperusahaan dagang negara, dan pendirian perusahaan pemasaran multinasional.

4. Negara-negara industri pada prinsipnya setuju terhadap usaha peningkatan kerja sama selatan-selatan. Selain faktor politik keamanan dari fungsi kerja sama ini yang mengurangi konflik, mereka juga mengharapkan dampak yang mendorong ekspor barang dan alih teknologi. Namun, dalam masalah yang lebih rinci dari konsep ini dan pelaksanaannya, mereka mengajukan beberapa keberatan. Pokok perdebatan negara industri dengan Kelompok 77 mengenai kerja sama ekonomi negara berkembang, a.l. penafsiran mengenai usaha-usaha sekitar tuntutan kerja sama ekonomi negara berkembang melalui Kelompok 77, bahwa yang berhak turut bekerja hanyalah ang-

gota kelompok tersebut, bukan negara nonanggota. Negara industri kapitalis (kelompok B) serta negara industri sosialis (kelompok D) bertahan pada keinginan menjadikan lembaga ini bersifat universal, terutama negara industri Barat menolak untuk memainkan "peran cukong" tanpa mendapatkan kesempatan untuk turut berperan mengembangkan kerja sama ekonomi negara berkembang ini.

5. Secara politik praktis kerja sama ini masih dalam tahap awal. Namun, kesimpulan sementara dari kegiatan yang dilakukan di berbagai bidang tidak menunjukkan adanya suatu gambaran yang seragam. Pengalaman hingga sekarang mengenai perjanjian preferensi memperlihatkan anggota relatif bertindak ragu-ragu melakukan langkah liberalisasi, tetapi jika dicapai hasil-hasil nyata, dapat dilihat adanya dampak yang mendorong perdagangan. Kerja sama antarorganisasi perdagangan negara dan organisasi pemasaran multinasional sampai sekarang sangat sedikit. Pengalaman kerja sama di sektor keuangan dan mata uang menimbulkan dampak mendorong perdagangan regional. Sistem pembiayaan ekspor regional ada di Amerika Latin dan di kawasan Arab. Kerja sama industri dalam bentuk patungan ada di Amerika Latin, a.l. dalam Pakta Andes yang keberhasilannya terbatas, yang dapat disamakan adalah kerja sama ekonomi di bidang pertanian. Kerja sama di sektor bahan mentah sampai sekarang lebih banyak meningkatkan persaingan satu sama lain daripada membentuk suatu posisi kuat yang akan berhadapan dengan Utara. Tin-

dakan yang ditujukan menguntungkan negara-negara termiskin sampai sekarang hanya membawa hasil yang sedikit—seperti dalam program aksi untuk tahun '80-an yang disusun UNCTAD Januari 1980. Bahaya bagi mitra yang lebih lemah, yaitu lebih banyak rugi (*back wash effects*) daripada keuntungan (*spread effects*) dari suatu kerja sama multinasional, harus diimbangi dengan peraturan khusus yang menguntungkan LLDC.

6. Kerja sama Selatan-Selatan memperoleh dorongan baru dalam konferensi Kelompok 77 di Caracas (Mei 1981). Di sini ditunjukkan besarnya kapasitas Dunia Ketiga di bidang teknik, industri, pembangkit energi, perdagangan bahan mentah, dan ditetapkan adanya saling memberikan perlakuan istimewa dalam transfer serta mekanisme pelaksanaan UNCTAD untuk kerja sama, implementasi, dan pemeriksaan kegiatan kerja sama ekonomi antarnegara berkembang. September 1982 komisi UNCTAD mensahkan suatu program kerja untuk kerja sama ekonomi di masa depan melalui konsensus. Resolusi kedua tentang pembangunan sistem preferensi perdagangan global telah mengalami kegagalan karena ditentang negara industri. Oktober 1987 di Jenewa atas usul pertemuan puncak negara nonblok di Harare (September 1986) berdiri Komisi Selatan-Selatan, diketuai mantan Presiden Tanzania, Nyerere. Komisi ini merupakan kelompok studi terdiri atas 28 tokoh Dunia Ketiga yang mengolah pedoman kerja sama negara berkembang dalam konsultasi selama tiga tahun serta prosedur taktis baru untuk dia-

log dengan negara industri. Pada pertemuan kedua Maret 1988 di Kuala Lumpur ditetapkan tujuan dan pedoman kerja komisi.

7. Kerangka jangka panjang yang memberi harapan secara umum dapat dilihat di bidang-bidang kerja sama ini. Tuntutan-tuntutan programatik yang luas jelas makin berada di belakang fungsi konkret kerja sama yang lebih pragmatis dan jelas. Namun, kerangka fungsional ini hanya akan berguna untuk politik pembangunan sejauh bagaimana ia ditujukan pada suatu transformasi perekonomian yang tergantung dan terbelakang, agar dapat memenuhi kebutuhan mayoritas penduduk (→ kebutuhan dasar) dan meningkatkan kemampuan berfungsinya perekonomian ini. Akan tetapi, mengingat banyaknya negara berkembang yang hampir bangkrut akibat utang, politik perubahan struktur semacam ini yang ditargetkan untuk jangka panjang mungkin jauh dari jangkauan. Regionalisasi kerja sama Utara-Selatan (ME-Negara AKP; Jepang-ASEAN) yang ada, sering didiskusikan dalam bidang ilmu pengetahuan maupun politik dan telah dilakukan kerja sama di bidang-bidang tertentu dalam perspektif jangka panjang, akan menimbulkan beban bagi kerja sama Selatan-Selatan sebab lewat politik kerja sama selektif akan makin meningkatkan ketergantungan mitra kerja sama Selatan terhadap Utara.

Kepustakaan: K.M. Khan/V. Matthies (ed.), *Collective self-reliance - Programme und Perspektiven der Dritten Welt*, München 1978; K.M. Khan (ed.), *Self-reliance als nationale und kollektive Entwicklungsstrategie*, München und London 1980; M. Ul Hag, "Beyond the Slogan of South-South-Cooperation", dlm.: *World De-*

velopment 8 (1980), hlm. 743 dst.; G. Senviratne, *Economic Cooperation Among Developing Countries*, UNCTAD, UN, Jenewa dan New York 1980; C. Uhlig/Doo-Soon Ahn, *Süd-Süd-Kooperation. Entwicklungs-politisches Instrumentarium zur Förderung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Entwicklungsländern* (= Forschungsberichte des BMZ, vol. 11), München 1981; V. Matthies, "Süd-Süd-Beziehungen, Zur Kommunikation und Kooperation, zwischen Entwicklungsländern", dlm.: *APuZ* 34/1982, hlm. 33 dst.; ibid, "Kollektive Selbst-Reliance", dlm.: *HDW II*, 1, Hamburg 1982, hlm. 380 dst.; E. Oteiza (ed.), *Autoafirmación colectiva. Una estrategia alternativa de desarrollo. Lecturas de El Trimestro Económico*, 49, Mexico-City 1983; UNCTAD, *Official Development Assistance and Economic Cooperation among Developing Countries*, TB/B/C7/57, Jenewa 1984; A. Halbach, *Zunehmende Kooperation der Entwicklungsländern im Rohstoffbereich*, Bagian 1: ifo-Schnelldienst (1985), No. 29, hlm. 18 dst.; Bagian 2: ifo-Schnelldienst (1986), No. 1/2, hlm. 20 dst.; o.V., 'Objectives and Terms of Reference of the South Commission', dlm.: *Nord-Süd-aktuell* (1988), No. 2, hlm. 240 dst.

kb

hukum internasional untuk pembangunan Kebangkitan suatu mayoritas negara baru dengan jumlah di atas 100 negara berkembang akibat proses dekolonisasi sejak tahun '60-an, mau tidak mau menyebabkan orientasi baru hukum internasional tradisional ke arah prioritas perhatian masalah-masalah pembangunan dari dua pertiga dunia sekarang ini, yaitu sekitar 170 negara (Dunia Ketiga). Berkaitan dengan hal ini sejak tahun 1964 dalam literatur hukum internasional terlihat beberapa hukum internasional untuk pembangunan baru (*droit international du développement*), sebagai bagian universal dalam hukum PBB, regional misalnya dalam hukum zona integrasi ekonomi regional, dan hukum sosial internasional yang muncul dalam hukum

transnasional. Perkembangan ini berlangsung bersamaan dengan peralihan dari negara hukum liberal ke negara kemakmuran sosial dan berusaha menghapuskan secara bertahap sebab konflik yang berasal dari masalah sosial-ekonomi. Norma-norma hukum preferensial dalam kaitan khusus pada kebutuhan negara berkembang, makin banyak terdapat dalam bidang-bidang hukum ekonomi internasional: pada bantuan modal internasional (Pasal I anggaran dasar Bank Dunia), dalam hubungan perdagangan internasional (Pasal XXXVI, ayat tentang anggaran dasar GATT, Sistem Preferensi Umum, *enabling clause*, dsb.), dalam hukum perpajakan internasional (misalnya dalam perjanjian pajak ganda). Secara umum, negara berkembang dituntut melakukan secara konsekuen *double standard of morality in international trade* (Myrdal) di semua bidang hukum internasional yang dimaksud, yang pada suatu penanganan sama secara hukum formal (*idem cuique*) *de facto* akan mendiskriminasi negara berkembang. Postulat tidak mendiskriminasi negara berkembang secara material (*suum cuique*) begitu juga pengakuan "hak akan pembangunan" *a la lounge* akan menyebabkan redistributif baru pembagian kerja internasional antara negara industri dan negara berkembang. Perubahan hukum ekonomi internasional dalam spektrum Utara-Selatan berlangsung dengan banyak friksi. Sementara penyesuaian hukum internasional perdagangan dan moneter multilateral untuk kebutuhan pembangunan di Dunia Ketiga berlangsung

tersendat-sendat akibat hambatan besar untuk revisi formal perjanjian-perjanjian multilateral (GATT, IMF, dll.), dalam kerangka penciptaan hukum bantuan modal, bantuan teknik, preferensi dagang, dan bantuan pangan ke negara berkembang telah muncul "hukum bantuan pembangunan" yang meluas. Untuk membantu, kondisionalisasi, dan pembagian bantuan pembangunan berdasarkan saran-saran PBB, UNTAD, DAC, muncul standar yang relevan secara hukum internasional dan yang mulai menguatkan *soft law* ke *hard core law*.

Apakah hukum internasional untuk pembangunan diakui sebagai bagian tersendiri dalam hukum internasional atau tidak, adalah masalah gradual. Meskipun beberapa ciri khas hukum internasional ekonomi sesuai dengan hukum internasional untuk pembangunan, ada perbedaan secara struktural melalui *double standard of morality in international trade*, melalui penolakan *do ut des* komersial dan prinsip resiprositas, meninggalkan model liberalisasi dan perdagangan bebas absolut demi suatu hukum pengendalian ekonomi yang menguntungkan negara berkembang; melalui pengolahan kode perilaku untuk negara dan perusahaan transnasional; melalui perjanjian kerja sama dan asosiasi; melalui *know how*, alih teknologi, dsb.

Kepustakaan: E.U. Petersmann, "Die Dritte Welt und das Wirtschaftsvölkerrecht", dlm.: *ZaöRV* 1976, hlm. 492 dst.; *ibid*, "Internationales Recht und Neue Internationale Weltwirtschaftsordnung", dlm.: *AVR* 1979, hlm. 17 dst.; O. Kimminich, "Das Völkerrecht und die neue Weltwirtschaftsordnung", dlm.: *AVR* 1982, hlm. 2, dst.; M. Silagi, "Entwicklungsvölker-

recht und Neue Weltwirtschaftsordnung", dlm.: *ÖZaöfRVR* 1981, hlm. 177 dst.; H. Stemberg, *Die Charta der wirtschaftlichen Rechte und Pflichten der Staaten*, Berlin 1983; H.D. Evers, *Auf dem Weg zu einer neuen Weltwirtschaftsordnung*, Baden-Baden 1983; G. Feuer, *Droit international du développement*, Paris 1985; O. Wulff, *Entwicklungshilfe zwischen Völkerrechtsordnung und Weltwirtschaftssystem*, Baden-Baden 1986.

wh
Hukum Laut Internasional Diterimanya konvensi hukum laut PBB 30 April 1982 tidak hanya menggambarkan suatu titik balik yang penting dalam perkembangan hukum laut, melainkan juga disebut "pembagian dunia yang ketiga" (Gierloff-Emden). Pembagian zone pinggir laut sekitar benua dan kepulauan menyebabkan penambahan luas sekitar 45 negara pantai (zone ekonomi 200 mil laut untuk seluruh dunia meliputi luas 120 juta km²), dengan demikian membatasi prinsip "kebebasan pemanfaatan laut", seperti masih tertera dalam Pasal 2 persetujuan Jenewa 29 April 1958 mengenai perairan internasional. Rencana pemanfaatan sumber daya dasar laut secara kolektif antarpemerintah juga memperkuat kecenderungan ke arah peng-"kapling"-an lautan dengan dampak merugikan negara pedalaman dan negara berkembang.

Setelah persiapan selama 6 tahun (1967-1973) dan 9 tahun perundingan (1973-1982) Konferensi Hukum Laut Internasional III PBB (UNLOS: *United Nations Conference on the Law of the Sea*) 30 April 1982 mengesahkan konvensi hukum laut dengan keputusan mayoritas (130 setuju, 4 menolak-AS, Turki, Israel, Venezuela-, dan 17 abstain). Penandatanganan konvensi hukum laut ini

berlangsung 10 Desember 1982, tetapi belum diberlakukan karena untuk itu perlu 60 ratifikasi. Sementara ini baru 35 negara yang meratifikasi. Walaupun mayoritas menyetujuinya, a.l. dari kubu negara berkembang, nasib konvensi hukum laut selanjutnya masih tidak menentu terutama karena penolakan sebagian besar negara industri dan Jepang.

Konvensi hukum laut membahas hukum laut umum (pelayaran, perikanan, daerah pantai, dll.), penambangan dasar laut, penelitian laut untuk kepentingan ilmu pengetahuan, transfer teknologi laut, dan rencana pembangunan "mahkamah laut internasional" di Hamburg. Pendahulu konvensi hukum laut tahun 1982 adalah empat konvensi hukum laut Jenewa tahun 1958, yang disusun "progresif", dikembangkan dan disimpulkan dalam konvensi hukum laut yang sekarang. Titik tolak reformasi konvensi hukum laut adalah tahun 1967 ketika ada usul untuk memberi reaksi terhadap dimensi baru pemanfaatan dasar laut dengan pemikiran peraturan yang baru untuk "warisan bersama umat manusia" (konsep *Common heritage of mankind*). Daerah laut dalam hendaknya diurus oleh instansi internasional (instansi untuk masalah dasar laut yang berkedudukan di Jamaika) dan terutama dieksploitasi oleh bagian pelaksananya (yang disebut *Enterprise*), khususnya dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan negara berkembang, a.l. melaksanakan kewajiban alih teknologi.

Untuk konsepsi dasar hukum dalam konvensi hukum laut ada empat gagasan peraturan yang saling bersa-

ing, yaitu kebebasan (pelayaran, melintasi perairan internasional dengan pesawat terbang, dsb.), pembagian (pengaturan sumber daya di daerah depan pantai), regionalisasi (kerja sama antarnegara pantai dalam bidang perikanan, pemeliharaan jenis ikan, dsb.), dan internasionalisasi (eksploitasi bahan mentah mineral dasar laut); gagasan politik yang telah disepakati: demiliterisasi, dekolonisasi, dan tata ekonomi dunia baru.

Konvensi hukum laut sebagai "hasil konflik pembagian di seluruh dunia" (Vitzthum) dengan demikian menguatkan kecenderungan perluasan hak negara pantai zone laut dan sumber daya laut, terutama didukung oleh banyak negara berkembang muda yang sangat mendambakan kedaulatan, dan tentu saja merugikan negara pedalaman dan negara yang secara geografis dirugikan dalam hal hak penangkapan ikan, penambangan minyak dan gas bumi. AS mendapat zone ekonomi terbesar dan tak ternilai di dunia, sekitar 40% Antarktis masuk bagian Uni Soviet dan hanya negara berkembang Brasilia serta Indonesia termasuk dalam kelompok sepuluh negara yang mendapatkan hampir 55% daerah zone ekonomi yang disebutkan di atas. Ketergantungan negara berkembang yang dirugikan dari kelompok negara lain makin besar karena mekanisme kompensasi yang direncanakan tidak berfungsi. Karena konvensi hukum laut menyatukan seluruh peraturan dalam satu "paket" yang hanya dapat diterima atau ditolak secara keseluruhan, akan muncul banyak keberatan terhadap peraturan yang ada

dan memberi peluang untuk perpecahan besar dalam konvensi hukum laut ini. Namun, jika tidak diberlakukan konvensi hukum laut ini, usaha kembali pada konvensi hukum laut "lama" yang berasal dari tahun 1958 tidak mungkin lagi.

Kepustakaan: W. Graf Vitzthum (ed.), *Die Plünderung der Meere*, Frankfurt 1981; W. Graf Vitzthum/R. Platzöder, "Pro und contra Seerechtskonvention 1982", dlm.: *EA* 19, 1982, hlm. 567 dst.; A. Daven/U. Jenisch, "Hamburg als Sitz des Internationalen Seegerichtshofs", dlm.: *EA* 13, 1982, hlm. 415 dst.; A. Studier, "Die neue Weltmeeresordnung", dlm.: *Jahrbuch Dritte Welt I*, München 1983; J. Delbrück

(ed.), *Das neue Seerecht. Internationale und nationale Perspektiven*, Berlin 1984; R. Platzöder/W. Graf Vitzthum, *Seerecht. Textausgabe*, Baden-Baden 1984; S. Wasum, *Der internationale Seegerichtshof im System der obligatorischen Streitbeilegungsverfahren der Seerechtskonvention*, München 1984; C. Duisberg, "Perspektiven der Seerechtsentwicklung", dlm.: *EA* 12, 1985, hlm. 373 dst.; G. Hafner, *Die seerechtliche Verteilung von Nutzungsrechten*, Wina 1987.

wh

human capital → sumber daya.

humanisme Afrika → Kaunda, Zambia.

hutan hujan tropis → ekologi.

I

IAEA (*International Atomic Energy Agency*) Organisasi Energi Atom Internasional, berdiri tahun 1956, beranggota 113 negara (1987), merupakan organisasi internasional bebas yang berada di bawah PBB. Memberi laporan tahunan pada Sidang Umum PBB. *Tugas-tugas*: penelitian, pengembangan, dan konsultasi untuk penggunaan energi atom demi tujuan-tujuan perdamaian, mengawasi pen-taatan perjanjian mengenai tidak di-beri lanjutnya senjata-senjata atom; standardisasi aturan-aturan keamanan, perlindungan dari penyalahgunaan materi-materi nuklir.

Alamat: P.O. Box 100, A-1400 Wien-Ost, Austria.

Kepustakaan: "Uranium. Resources, Production and Demand. Joint Reports by the OECD Nuclear Energy and the International Atomic Energy Agency", Laporan tahun 1980, Paris, 1982.

dn

IBA (*International Bauxit Association*) Persatuan Bauksit Internasional, berdiri tahun 1974. Kedudukan: Kingston/Jamaika, anggota 11 negara: Australia, Republik Dominika, Ghana, Guinea, Guyana, Haiti, Indonesia, Jamaika, Sierra Leone, Suriname, dan Yugoslavia. *Tugas-tugas*: pertukaran informasi antarnegara anggota, politik

harga bersama dalam ekspor bauksit dan aluminium. dn

IBD → **BID**.

IBFG (*Internationale Bund Freier Gewerkschaften*) → serikat buruh (di Dunia Ketiga).

IBRD (*International Bank for Re-construction and Development*, Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan) → Bank Dunia.

ICAP → **CIAP**.

ICDC → hubungan Selatan-Selatan.

ICFTU → serikat buruh (di Dunia Ketiga).

IDA (*International Development Association*) Organisasi Pembangunan Internasional, anak perusahaan Bank Dunia (IBRD), berdiri tahun 1960. Pendiriannya bertolak dari pemikiran bahwa utang luar negeri bilateral dan multilateral banyak negara berkembang (Asia) di akhir tahun '50-an telah mencapai suatu situasi di mana pengambilan kredit lebih lanjut oleh negara-negara ini kelihatannya tidak dapat lagi memakai persyaratan yang komersial. IDA merupakan sebuah lembaga keuangan yang didirikan atas inisiatif AS, bertujuan meringankan bantuan modal. Artinya, memberi kredit dengan syarat yang sangat lebih ringan dibandingkan penawaran

organisasi-organisasi yang melakukan pembiayaan balik seperti bank-bank, misalnya Bank Dunia.

Negara yang dapat memperoleh kredit IDA, begitulah keinginannya, adalah negara dengan pendapatan per kapita maksimal 790 US\$, meskipun dalam praktek hampir 90% dana IDA diberikan kepada negara-negara termiskin (dengan pendapatan per kapita kurang dari 400 US\$). Pada prinsipnya, kredit yang diberikan tidak dikenakan bunga, hanya ada ongkos administrasi sebesar 0,7% dari dana yang diberikan. Kredit ini berjangka waktu 35-50 tahun, dan pembayaran kembali dimulai setelah ada periode tenggang waktu selama 10 tahun.

Tahun 1988 IDA mempunyai 137 negara anggota, dengan keanggotaan ke IMF sebagai syarat sehingga kewajiban-kewajiban tertentu dalam hal politik devisa dan kurs tukar mencontoh IMF. Dalam IDA ada dua kelompok negara anggota: kelompok I mencakup 17 negara industri yang masuk dalam Perjanjian IDA, juga Kuwait, Islandia, Irlandia, dan Selandia Baru. Sisanya membentuk kelompok II, meliputi negara-negara penerima kredit IDA. IDA membiayai diri dari iuran anggota yang diberikan secara sukarela setiap tiga sampai empat tahun sekali (jadi tidak dengan pinjaman ke bank seperti halnya IBRD).

Pada saat IDA menjadi anggota, sebuah negara membayar dana yang jumlahnya proporsional dengan pangsa modalnya ke Bank Dunia. Negara-negara kelompok I pada penandatanganan pertama sebagai anggota memberi seluruhnya dalam emas atau

dalam mata uang yang dapat ditukarkan bebas, sedangkan negara-negara kelompok II hanya 10% dari subskripsinya, dan sisa 90% dibayarkan dalam masing-masing mata uang nasionalnya. Secara resmi IDA memulai kegiatannya September 1960. Sejak tahun 1965 dana telah delapan kali disetorkan sehingga volume seluruhnya mencapai sekitar 50 miliar US\$ (dalam nilai US\$ tahun 1987). Penyetoran ke kas IDA berlangsung juga dengan komplikasi, diiringi oleh masalah distribusi beban internasional dan tunggakan-tunggakan pembayaran karena masalah politik, dipimpin oleh AS. Misalnya, bagi kongres AS sering menjadi duri di mata jika AS harus menyetor 42% (pada IDA-1) dan 27% (pada IDA-6) dari keseluruhan dana yang harus disetorkan, tetapi hanya sedikit (14,7% kumulatif sampai Juni 1981) mendapatkan keuntungan dalam bentuk kontrak-kontrak pemasokan dalam proyek-proyek internasional, sementara negara-negara industri saingan seperti Jepang (15,5%) dan Jerman (13,2%), malah mendapatkan keuntungan. Sering setoran-setoran khusus dari negara-negara anggota kelompok I, terutama dari Swedia, Swiss (bukan anggota), serta Israel, Yugoslavia, Spanyol, Saudi Arabia, dan Kuwait, menyelamatkan IDA dari ancaman berhentinya pembagian kredit selanjutnya. Penyetoran kedelapan dimulai Maret 1988; 33 negara kreditor sepakat menyediakan dana untuk IDA-8 sebesar 12,4 miliar US\$ sampai Juni 1990.

Sebenarnya, IDA tidak lain dari pada dana khusus Bank Dunia untuk

kredit-kredit pembangunan yang murah (*grant element* mencapai sekitar 86%) ke negara berkembang miskin. Selain itu, pada prinsipnya tidak ada perbedaan antara kredit IDA dan pinjaman IBRD. Kedua bentuk bantuan kredit itu sama-sama diberikan ke proyek-proyek pembangunan yang secara ekonomi "sehat dan produktif", berada di bawah kriteria uji Bank Dunia yang ketat dan dikerjakan oleh personal Bank Dunia yang sama. Presiden dan direktur eksekutif Bank Dunia juga menangani pinjaman IBRD dan kredit IDA, selain itu hak suara mengenai kredit-kredit IDA berlangsung asimetris seperti halnya Bank Dunia: 22 negara kelompok I menyatukan 62,79% suara untuk mereka, AS memiliki pangsa suara 18,97% (mula-mula 27,59%).

Dalam 25 tahun terakhir, daftar negara penerima kredit IDA banyak berubah: 86 negara sejak tahun 1961 menerima kredit IDA sejumlah 49,083 miliar US\$; sementara 27 negara telah "lulus" IDA, artinya tidak lagi berhak menerima kredit karena tingkat perkembangannya dan kepantasannya menerima kredit telah mencapai tingkat "utang" yang sesuai dengan persyaratan-persyaratan komersial. India merupakan penerima kredit terbesar, yaitu 15,767 miliar US\$, sekitar 32% kredit IDA keseluruhan. Lalu, diikuti Bangladesh, Cina, dan Pakistan.

Mula-mula IDA terpusat pada proyek-proyek infrastruktur, seperti lalu lintas, pengadaan listrik, dan pembangunan pelabuhan. Di akhir tahun '60-an aktivitasnya meluas ke pertanian; banyak kredit diberikan

misalnya untuk pengolahan teknologi bibit-pupuk dalam rangka strategi Revolusi Hijau di Asia Selatan. Dengan bertambahnya utang luar negeri negara-negara anggota, Bank Dunia lebih banyak menyediakan kredit untuk penyesuaian struktur dan sektor. Sekitar 6 miliar US\$ dana IDA-8 disetujui untuk negara-negara Afrika di sebelah selatan Sahara tahun 1987/1988. Dalam rangka "dialog politik", ingin diiringankan utang dan pembiayaan impor yang berorientasi pertumbuhan.

Untuk negara berkembang yang lebih miskin, IDA merupakan sumber terpenting untuk kredit-kredit pembangunan dengan persyaratan "ringan" sehingga disukai pemerintah-pemerintah di Dunia Ketiga (kecuali sejumlah "saran" politik-ekonomi Bank Dunia dan IMF yang mengganggu kedaulatan negara penerima kredit). Mereka memperdebatkan dampak pembangunan program-program kredit IDA, terutama program-program petani kecil yang "berorientasi kemiskinan" seperti dikatakan presiden Bank Dunia, McNamara, begitu juga kerusakan-kerusakan ekologi oleh bendungan-bendungan yang dibiayai Bank Dunia di Brasilia dan India, serta proyek-proyek mekanisasi di Afrika. Bank Dunia bereaksi terhadap kritik yang datang dari seluruh penjuru dunia dengan mendirikan sebuah departemen lingkungan. Mereka ikut ambil bagian pada pembangunan administrasi-administrasi lingkungan di negara berkembang. Selain itu, IDA diharapkan menarik impuls dan tunjangan dari LSM/LPSM, terutama sekali organisasi

perlindungan lingkungan di seluruh dunia untuk mempropagandakan dan mempraktekkan paradigma pembangunan yang baru. Penyetujuan semua proyek pembangunan perlu bertolak dari ujian beban lingkungan dan sosial yang menyeluruh serta perkiraan teknologi; untuk itu jumlah ekolog, antropolog, dan ilmuwan sosial yang bekerja di sana terus meningkat.

Alamat: 1818, H-Street, N.W. Washington, D.C., 20433, USA.

Kepustakaan: → Bank Dunia.

IDB → BID.

IDCA → politik bantuan pembangunan AS.

IEA (*International Agency of the OECD*) Organisasi Energi Internasional, berdiri tahun 1974 di Paris akibat terjadinya krisis minyak, beranggota 21 negara (1988), bekerja sama dengan negara berkembang dalam proyek-proyek penelitian dan pengembangan di bidang energi (geotermik, batubara, energi inti, dsb.) Mengeluarkan publikasi berkala mengenai pengadaan dan konsumsi energi, harga, dan pajak.

Alamat: IEA, 2, Rue André Pascal, F-75775 Cedex 16, Paris.

IEFR (*International Emergency Food Reserve*) Cadangan Bahan Makanan untuk Situasi Darurat, berdiri tahun 1975 melalui keputusan Sidang Umum PBB. Dari sumbangan sukarela diharapkan setiap tahunnya diberikan 500.000 ton bahan pangan untuk situasi darurat. Tujuan ini baru tercapai tahun '80-an (tahun 1986: 598.000 ton). Pembagian bahan makanan dilakukan oleh WFP.

IFAD (*International Fund for Agricultural Development*) Dana Inter-

nasional untuk Pembangunan Pertanian, organisasi khusus PBB yang didirikan atas inisiatif Konferensi Pangan Dunia akhir tahun 1977. Pikiran pokoknya adalah gagasan tata ekonomi dunia baru dan tanggung jawab bersama negara industri Barat dan negara-negara OPEC terhadap pembangunan daerah pedesaan: dengan landasan sukarela ingin memobilisasi "sumber daya tambahan dengan persyaratan yang sangat menguntungkan (*concessional terms*) untuk pertanian di negara berkembang", terutama untuk kepentingan petani termiskin dan petani miskin yang tidak memiliki tanah.

Setiap tiga kelompok negara yang ikut ambil bagian (OECD: 20 negara; OPEC: 12 negara; negara berkembang lainnya: 107 negara; 1 Juli 1985) tanpa mempedulikan tinggi iurannya, memiliki jumlah suara yang sama (600 dari 1.800 suara) dalam kedua organ IFAD (Dewan Gubernur, Dewan Pengurus). Volume sumber daya tahun 1978-1980 sebesar 1.022 juta US\$, diperoleh dari sumbangan sukarela tiga kelompok negara (OECD 567 juta US\$; OPEC 435 juta US\$; negara berkembang lainnya 19 juta US\$). Pemupukan modal yang disepakati untuk tahun 1981-1983, merupakan tema pertentangan tahunan antara OPEC dan OECD mengenai tingginya iuran setiap kelompok negara. Akhirnya, disepakati pembagian: OECD 620 juta US\$, OPEC 450 juta US\$, dan negara berkembang lain 30 juta US\$. Perbandingan iuran antara negara-negara OECD dan OPEC sekarang ini 60 : 40.

Sampai akhir tahun 1984 IFAD menyetujui 160 proyek di 84 negara dengan volume wajib berjumlah sekitar 2 miliar US\$; selanjutnya bantuan teknik sekitar 91 juta US\$. Sebenarnya, sampai paro kedua tahun 1984 hanya dibelanjakan sekitar 487 juta US\$. Hanya 50% dari semua kredit yang telah disetujui jatuh ke negara-negara "berpendapatan rendah" (pendapatan per kapita kurang dari 300 US\$ tahun 1976).

Laporan evaluasi ekstern menilai positif kerja IFAD: di satu pihak karena struktur paritasnya sesuai benar untuk kerja sama yang setara antara negara pemberi dan negara penerima. Di lain pihak, konsepsi proyek selalu berada dalam pengaitan balik ke setiap kelompok sasaran sehingga bayangan mereka ini selalu diperhatikan pada pemberian dana.

Alamat: Via Del Serafico 107, 00142 Roma, Italia.

fg
IFC (*International Finance Corporation*) Perusahaan Keuangan Internasional, anak perusahaan Bank Dunia. Didirikan tahun 1956, tahun 1987: 132 anggota. Struktur pengambilan keputusan seperti pada Bank Dunia; perbedaannya, IFC mempunyai staf pekerja tersendiri yang terpisah dari Bank Dunia dan IDA, serta mempunyai wakil presiden (Sir William Ryrie) yang memimpin perusahaan.

Tujuan: menstimulasi investasi swasta yang produktif di negara berkembang melalui investasi dan memberi pinjaman ke perusahaan, memberi modal tambahan dalam dan luar negeri, jasa konsultasi, dan bantuan teknik (efek multiplikator dan peran katalisator IFC). Berbeda dari Bank

Dunia, IFC memberi dana kepada sebuah pemerintah tanpa garansi pembayaran kembali.

Sumber-sumber pembiayaan: modal yang masuk bertambah dari 144 juta US\$ (1978) menjadi 722 juta US\$ (1987). IFC membiayai kegiatan-kegiatannya terutama dari iuran modal dasar dari setiap pemerintah yang menjadi anggotanya, mengambil kredit di Bank Dunia serta dari keuntungan yang diperoleh. Pengambilan kredit dari sumber ketiga sampai sekarang tidak berperan banyak. Dana diinvestasikan secara berputar, yaitu IFC menjual secepat mungkin pangsa modalnya ke investor swasta. Persyaratan pembiayaan pada prinsipnya disepakati secara tersendiri untuk setiap proyek dengan memperhatikan risiko yang berkaitan dengannya dan yang sesuai dengan persyaratan umum dalam pasar sehingga persyaratan IFC jelas "lebih keras" dibandingkan persyaratan Bank Dunia dan IDA. Waktu pinjaman IFC adalah antara 6-15 tahun.

Kegiatan usaha: dana yang dimobilisasi dan diinvestasi IFC telah menjadi faktor yang makin penting untuk investasi langsung swasta. Tahun 1980 jumlah IFC, investor, dan kreditor yang bekerja sama meliputi sekitar 6% arus investasi (tanpa keuntungan reinvestasi) dari negara industri ke negara berkembang. Tahun 1956-1987 IFC menginvestasi 7,4 miliar US\$ dalam bentuk pinjaman dan saham di 653 proyek dengan nilai keseluruhan 35 miliar US\$. Mirip Bank Dunia, di tahun '70-an IFC juga mengalami perluasan kegiatan secara besar-besaran. Tahun 1976

IFC mempunyai investasi di 187 perusahaan, sedangkan menurut laporan perusahaan tahun 1987 mempunyai 404 saham dengan nilai 2.765 juta US\$. Tahun usaha 1987 IFC menyetujui 92 proyek di 41 negara (investasi IFC berjumlah 4.343 miliar US\$).

Pembagian regional dan sektoral: tahun 1987, 51% dana disalurkan (berdasarkan volume investasi) ke Amerika Latin/Karibia, 24% ke Asia, 13% ke Afrika, dan 9% ke Eropa/Timur Tengah. Secara sektoral tahun 1982 titik berat adalah ke lembaga keuangan (19%), semen dan baja (16%), agrobisnis (12%), petro (kimia) 10%, dan berbagai bidang industri ringan (24%). Tahun 1987 213 juta US\$ diinvestasikan ke-25 industri pengolahan, 65 juta US\$ ke pengolahan bahan makanan, dan 97 juta US\$ ke proyek-proyek untuk pembangunan pasar-pasar modal.

Sampai kini IFC jelas merupakan lembaga penunjang sektor-sektor ekonomi swasta paling terindustrialisasi di negara berkembang. Mitra usaha utama IFC adalah Brasilia dengan 1.116 juta US\$ yang disetujui IFC untuk 50 proyek, Yugoslavia dengan persetujuan 652 juta US\$ untuk 26 proyek, dan India dengan 513 juta US\$ untuk 41 proyek (persetujuan sampai tahun 1987). Tahun 1988 IFC mengemukakan keinginannya untuk menunjang perusahaan kecil dan menengah di Afrika dengan mendirikan sebuah dana perusahaan di Afrika bernilai 60 juta US\$, untuk itu membuka kantor di Lagos/Nigeria. Untuk memperbaiki arus investasi dan saling mempercayai antarnegara

berkembang dan investor asing, April 1988 disetujui Perjanjian MIGA.

IFC akan makin penting di masa depan karena investasi perusahaan asing ke negara berkembang yang berutang besar (tanpa ko-pembiayaan melalui kredit-kredit Bank Dunia) akan jauh berkurang. Tidak banyak diketahui mengenai manfaat pembangunan dari proyek-proyek yang ditunjang IFC. Dikhawatirkan, seluruh kelompok Bank Dunia justru menjerumuskan negara berkembang yang miskin dan menengah ke dalam utang karena mereka kelihatannya tidak berhasil membantu negara berkembang keluar dari masalah utang. Alamat: 1818 H-Street, N.W. Washington, D.C., 20433, USA.

Kepustakaan: IFC, *Annual Reports*; H.H. Peters, *Internationale Entwicklungsfinanzierung. Die Rolle der IFC im Entwicklungsprozess*, Tübingen/Basel 1978 (Kepustakaan selanjutnya: → Bank Dunia).

gm/rt

IGADD (*Intergovernmental Authority on Drought and Development*) Biro Kerjasama Antarnegara untuk Masalah Musim Kering dan Pembangunan, didirikan tahun 1985 oleh Etiopia, Jibouti, Kenya, Somalia, Sudan, dan Uganda. *Tujuan:* memperangi perluasan gurun pasir dan melakukan pembangunan daerah tersebut. → desertifikasi.

dn IGGI (*Inter-Governmental Group on Indonesia*) Konsorsium Negara Pemberi Kredit untuk Indonesia. Sejak tahun 1967 terbentuk sebuah konsorsium bernama IGGI yang berfungsi mengkoordinasi dan menyepakati jumlah, bentuk, persyaratan serta pengaturan tempo bantuan keuangan untuk Indonesia. Kelompok ini lahir

dari rangkaian pertemuan Indonesia dan beberapa negara industri Barat sejak tahun 1966 (Pertemuan Tokyo September 1966 atas prakarsa Jepang, Pertemuan Paris Desember 1966, dan Pertemuan Amsterdam Februari 1967 atas prakarsa pemerintah Belanda). Pertemuan-pertemuan ini dilakukan selain untuk membahas penjadwalan utang Indonesia di masa pemerintah Soekarno, serta membicarakan suntikan dana baru untuk Indonesia. Hasil laporan IMF yang melakukan penelitian mengenai ekonomi Indonesia sejak bulan Agustus 1966, berperan penting dalam mendorong kesepakatan memberikan bantuan kepada Indonesia.

Bantuan yang diberikan dalam rangka IGGI disalurkan melalui ODA dan non-ODA. Pemberi bantuan dalam rangka ODA dan bersifat bilateral: AS, Jepang, Jerman, Perancis, Belanda, Austria, Italia, Kanada, Selandia Baru, Belgia, dan Denmark; sedangkan dalam rangka ODA dan bersifat multilateral: ADB, IDA, Bank Dunia, IFAD. Bantuan dalam rangka non-ODA diberikan oleh AS, Australia, Belanda, Belgia, Denmark, Inggris, Jepang, Jerman, Kanada, Perancis, Swiss, dan Austria. Bantuan yang diberikan melalui IGGI terus meningkat, tahun 1988/1989: 3,17 miliar US\$, tahun 1989/1990: 4,3 miliar US\$, dan tahun 1990/1991: 4,75 miliar US\$.

Tanggal 25 Maret 1992 Indonesia mengeluarkan pernyataan menolak bantuan dari Belanda dan menyatakan pembubaran IGGI yang diketuai oleh Belanda dengan alasan bahwa selama ini dan berpuncak pada Pe-

ristiwa Dili, Belanda dengan memanfaatkan bantuannya terlalu campur tangan urusan dalam negeri Indonesia. Indonesia kemudian meminta Bank Dunia menjadi ketua CGI yang menjadi pengganti IGGI.

Kepustakaan: Posthumus, *IGGI*, Amsterdam 1971. A. Margana, "Pronk dan IGGI", dlm.: *Tempo*, no. 5 th. XXII, 4 April 1992. Syatria Utama, "Keberhasilan Sejumlah Lobi", dlm. *Editor*, no. 45, Th. V, 1 Agustus 1992, hlm. 78-79; "CGI Berikan Bantuan 4,94 miliar dolar AS", dlm.: *Kompas* 18 Juli 1992. **dis IIF** (*Institute of International Finance*) Institut Keuangan Internasional, didirikan tahun 1983 oleh 35 bank besar dari AS, Eropa, Jepang, dan Amerika Latin sebagai reaksi terhadap masalah utang internasional yang makin besar (kedudukan: Washington). **Tujuan:** IIF ingin menghindari masalah utang berlebihan di masa datang melalui perbaikan arus informasi antara pemberi kredit di negara industri dan penerima kredit di negara berkembang, begitu juga konsultasi politik ekonomi. IIF memberi data kepada anggota data mengenai situasi keuangan dan tujuan politik ekonomi peminta kredit yang menyalurkan hubungan ke bank-bank. Penilaian kelayakan menerima kredit di suatu negara tidak mensyaratkan kerja sama dengan IMF, Bank Dunia, dan BIZ. **ah IINA** (*International Islamic News Agency*, Kantor Berita Islam Internasional) → OIC.

ikatan pemasokan Ikatan kontrak dalam bantuan modal (bantuan pemerintah) untuk menerima pemasokan barang dan jasa dari negara kreditor. Negara berkembang meminta kredit yang tidak terikat dengan pe-

masokan karena dengan demikian bisa mendapatkan harga yang lebih menguntungkan di pasar dunia. Kredit tanpa ikatan pemasokan juga dapat menguatkan perdagangan antar-negara berkembang. Pangsa kredit yang terikat pemasokan pada bantuan pembangunan pihak pemerintah berkurang dari 57% (1967): menjadi 1% (1976), tetapi sejak itu kembali meningkat (tahun 1978: 18%; tahun 1981: 8,7%).

Tahun 1985 pangsa ikatan pemasokan pada kredit adalah 31%, hampir 19 butir lebih tinggi daripada tahun 1980/1981 sehingga berada di tingkat seperti pada awal tahun '70-an.

Alasan untuk itu di satu pihak adalah pemberian kredit sebagai bagian dari pembiayaan campuran (bantuan modal pemerintah plus modal pasar), sementara di lain pihak untuk melindungi efek kesempatan kerja di negara industri, terutama di bidang-bidang sensitif, menurut pemerintah negara industri mengalami kesulitan-kesulitan ekonomi atau koyakan persaingan internasional. Misalnya, 87%–92% bantuan pemerintah Jerman mengalir kembali ke negara industri, di antaranya 2/3 ke Jerman (tahun 1981: di atas 80%). Bantuan modal tanpa ikatan pemasokan pun sebenarnya telah membantu menjamin tempat kerja di masyarakat negara industri.

dn
ikut secara selektif Merupakan partisipasi sebagian atau terpilih negara berkembang di pasar dunia, sebagai strategi pembangunan yang disarankan oleh Laporan Dag-Hammarskjöld tahun 1975. *Tujuan:* mengu-

rangi ketergantungan sebesar mungkin, membesarkan ketidaktergantungan sebesar mungkin, dan menyeimbangkan situasi saling ketergantungan sebisa mungkin. Ikut secara selektif perlu mempunyai hubungan kualitatif ke ekonomi-ekonomi negara industri, bertolak dari masing-masing situasi nasional untuk pemakaian strategi itu dalam proses pembangunan yang ditentukan sendiri dan dalam hubungan ekonomi internasional sebuah negara berkembang yang ditentukan sendiri. **dn**

Illich, Ivan → pedagogi pembebasan.

ilmu ekonomi pendidikan Sejak akhir tahun '50-an menjadi subdisiplin ilmu sosial tersendiri yang dikembangkan dalam kerangka penelitian pertumbuhan ekonomi serta dalam penelitian pendidikan yang berorientasi interdisipliner. *Asumsi dasar:* pendidikan merupakan faktor investasi yang dianalisis dari sisi ongkos dan keuntungan, serta dapat dirancang menurut tujuan yang rasional. Konsep *human-capital* yang klasik berdasarkan pemikiran bahwa selain faktor produksi kerja dan modal, "kemajuan teknik" sebagai faktor ketiga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pendidikan dan penelitian sebagai elemen penting faktor ketiga dapat memperbaiki produktivitas kerja sehingga berdampak menghapus situasi miskin. Perhitungan angka-angka dengan faktor ini berdasarkan berbagai pendekatan ilmiah (*man-power-approach, social-demand-approach*)—dalam perencanaan ekonomi dan pendidikan hanya dapat berhasil dengan persyaratan-

persyaratan tertentu. Pengaruh yang tidak diperhitungkan menghindari ramalan secara tepat mengenai hasil investasi pendidikan. Begitu juga pilihan pendidikan secara individual tidak selalu sesuai dengan keinginan masyarakat. Selain itu, ada pertanyaan pokok, apakah kebutuhan akan kualifikasi benar-benar primer harus didapatkan dari perspektif ekonomi?

Pendekatan ekonomi pendidikan neoliberal dalam tahun-tahun terakhir meluaskan pembahasannya ke negara berkembang dan menemukan hal-hal di luar dugaan, misalnya keluarga miskin terlihat membiayai pendidikan anak-anak dari keluarga kaya karena anak-anak keluarga miskin tidak mendapatkan akses ke sekolah-sekolah tinggi yang dibiayai dari pajak yang ditarik dari keluarga miskin. Di negara berkembang, substitusi tenaga kerja dengan kualifikasi yang serupa lebih kecil dibandingkan di negara industri (*brain drain*). Dalam kerangka pendekatan ekonomi pendidikan marxis, pendidikan dan kualifikasi dianalisis dalam ketergantungannya ke pasar kerja yang tersegmentasi. Kebebasan memilih pendidikan dan profesi dalam analisis ini terlihat sebagai ideologi yang membatasi otonomi politik dan perencanaan pendidikan negara. Kepentingan pemakaian modal dan kepentingan mempertahankan kekuasaan para elite dikatakan menentukan sejauh mana perlu pendidikan dan kualifikasi. Perhatian istimewa belakangan ini di negara berkembang adalah masalah sektor informal. Dalam sektor informal-berlawanan dengan sektor modern, ditandai oleh

teknologi yang sederhana dan padat karya, dimiliki keluarga, sumber daya lokal, ukuran kegiatan kecil-jelas sebagian besar keterampilan didapatkan dalam proses belajar informal di luar sistem pendidikan dan kejuruan (→ pendidikan kejuruan).

Kepustakaan: G. Becker, *Human Capital. A Theoretical and Empirical Analysis*, New York 1964; J. Berg, *Education and Jobs. The Great Training Robbery*, Boston 1971; M. Corney, *Segmented Labor Markets: A Review of the Theoretical and Empirical Literature and its Implication for Education Planning*, IIEP-Working paper, Paris 1978; G. Psacharopoulos, *Education and Work. An Evaluation and Inventory of Current Research*, IIEP-working paper, Paris 1978; W. Sengeberger (ed.); *Der gespaltene Arbeitsmarkt*, Frankfurt/New York 1978.

rti

ILO (*International Labour Organization*) Organisasi Buruh Internasional, berdiri sejak tahun 1919. Mulai tahun 1946 menjadi organisasi khusus PBB dan bekerja sama erat dengannya. Tahun 1986: 150 negara anggota. Di samping pemerintah juga terwakilkan pemberi kerja dan pekerja di semua organ. Dalam sidang umum, yang dilakukan sekali setahun, setiap negara mengirim seorang wakil pemerintah, seorang wakil pemberi kerja, dan seorang wakil pekerja (prinsip tripartit). Dewan Pengurus: 56 anggota (28 wakil pemerintah, 14 wakil pemberi kerja, dan 14 wakil pekerja); Sekretaris Jenderal dengan Direktur Jenderal (Francis Blanchard). Selain itu, konferensi-konferensi regional, komisi-komisi, dan kelompok-kelompok penasihat, serta Institut Internasional untuk Masalah pekerja di Jenewa dan Pusat Internasional untuk pendidikan lanjut ahli dan profesi di Turin.

Tugas: penyingkiran situasi miskin dan pengangguran, pemenuhan kebutuhan dasar mereka yang termiskin, perbaikan situasi kerja dan hidup manusia (dunia kerja baru). **Tugas khusus:** penelitian mengenai masalah kerja dan sosial-politik (jam kerja, perlindungan kecelakaan, jaminan sosial, kerja perempuan, pendidikan kejuruan, dsb.); landasan hukum (asumsi kesepakatan internasional dan saran-saran sejak tahun 1919: 168, respektif 176) yang diratifikasi oleh para pengambil keputusan nasional; bantuan teknik (alih pengalaman dan keterampilan dari negara industri ke negara berkembang untuk memperbaiki pendidikan kejuruan, partisipasi penduduk yang lebih baik dalam proses pembangunan. Di antara studi-studi pembangunan yang menonjol adalah program kesempatan kerja dunia tahun 1969 → kesempatan kerja) dan penelitian "kesempatan kerja, pertumbuhan, dan kebutuhan dasar" yang diajukan pada konferensi ILO tahun 1976 mengenai kesempatan kerja, distribusi pendapatan, dan kemajuan sosial. Kedua dokumen mempunyai elemen penting strategi pembangunan yang mengacu pada kebutuhan dasar mayoritas penduduk miskin, dengan dasar teoretis dan propaganda yang berlangsung terutama melalui ILO.

Keluarnya AS untuk beberapa waktu (tahun 1978/1979 dengan alasan a.l.: politisasi, kegiatan ILO melampaui wewenangnyanya) berarti kerugian penerimaan (sekitar 20%) keuangan ILO yang dibiayai dari iuran anggota. Tahun '80-an, politik AS yang baru terhadap organisasi

PBB (kritik terhadap kerja PBB, dilakukan dengan menunda iuran) kembali lagi menyebabkan masalah-masalah keuangan sehingga menyulitkan situasi kerja. Anggaran ganda tahun 1988/1989 berjumlah sekitar 350 juta US\$. Publikasi a.l.: *International Labour Review*, *Bulletin of Labour Statistics*, *Yearbook of Labour Statistics*, *Women at Work* (masing-masing beberapa kali dalam setahun).

Alamat: 4, Route de Mourillons, CH-1211 Genéve; Kantor Indonesia: Jl. M.H. Thamrin no. 14, Jakarta Pusat.

dn

ILPES (*Instituto Latinoamericano de Planificación Económica Social*) Organisasi Amerika Latin untuk Perencanaan Ekonomi dan Sosial, berdiri atas inisiatif CEPAL dan untuk itu aktif dalam bidang pendidikan administrasi nasional yang menangani rencana pembangunan. Juga menyediakan staf konsultan untuk pemerintah-pemerintah di Amerika Latin.

Alamat: Casilla 1567, Santiago de Chile, Chile.

dn

ILRAD (*International Laboratory for Research on Animal Diseases*) Laboratorium Internasional untuk Penelitian Penyakit-Penyakit Hewan (di Kenya).

IMF (*International Monetary Fund*) Dana Moneter Internasional

1. *Pendirian, tugas, dan organisasi.* Pendirian IMF merupakan hasil "Konferensi Mata Uang dan Keuangan" yang dilakukan PBB di Bretton Woods (AS) Juli 1944. Ke-45 negara peserta menginginkan sebuah tata baru hubungan ekonomi internasional setelah perang dunia, yang memungkinkan perluasan per-

dagangan dunia berdasarkan mata uang-mata uang yang konvertibel dan menghindari pengulangan konflik-konflik perdagangan di masa antara dua perang dunia. "Kesepakatan dana moneter internasional" yang berlaku mulai 27 Desember 1945, bersifat kompromi antara gambaran AS dan Inggris, meskipun AS lebih bisa memaksakan kepentingan karena di masa setelah perang ia berada dalam posisi penguasa dunia tanpa saingan. Negara-negara anggota wajib menahan kurs tukarnya melalui intervensi-intervensi ke pasar devisa pada sebuah jalur batas 1% di atas dan di bawah yang dilaporkan ke IMF, dalam emas atau paritas yang mengacu ke US\$. Setiap negara boleh mengubah kurs tukar sampai 10% dari paritas awal jika terjadi kasus "ketidakseimbangan fundamental" dalam neraca pembayaran. Untuk itu ada kewajiban berkonsultasi dengan IMF. Demi kepentingan liberalisasi perdagangan, pembatasan lalu lintas devisa jangka lama hanya diizinkan untuk gerak modal. Jika terjadi kasus defisit neraca pembayaran sementara, negara-negara yang terkena akan mendapat kredit IMF untuk mengatasinya. Penyediaan likuiditas internasional ini bertujuan membantu negara yang mengalami defisit untuk menyelesaikan neraca pembayaran tanpa melakukan pembatasan lalu lintas perdagangan dan pembayaran atau melakukan langkah-langkah yang sangat deflatoris sifatnya.

Jumlah kuota bergantung tinggi kewajiban iuran (subsripsi), hak mendapat kredit dan hak suara setiap anggota, ditetapkan 8,8 miliar US\$.

Di antaranya AS 31,3%, Inggris 14,8%, Rusia 13,6%, Cina 6,3%, dan Perancis 5,1%. Pada penetapan kuota—seperti yang mudah dikenal—selain kriteria-kriteria ekonomi, juga berperan penting pertimbangan-pertimbangan kekuasaan politik dan prestis. Berkaitan dengan masalah hak suara dalam struktur kuota yang sangat oligarki, ditambahkan sebuah elemen egaliter, yaitu setiap negara mendapat bantuan 250 suara, bernilai 11% dari suara keseluruhan.

Setelah beberapa kali terjadi pengujian dan peningkatan kuota, April 1988 jumlah kuota ke-151 negara anggota adalah 89,99 miliar *Special Drawing Rights*. Dari seluruh hak suara, AS mempunyai 19,14%, Jerman 5,79%, Inggris 6,63%, Perancis 4,81%, Jepang 4,53%, dan Saudi Arabia 3,44%.

Bekas negara sosialis yang menjadi anggota: Rumania (sejak tahun 1972), Hongaria (sejak tahun 1982), Polandia (sejak tahun 1986), dan Vietnam. Uni Soviet memang ikut serta dalam perundingan-perundingan Bretton Woods, tetapi tidak masuk menjadi anggota. Polandia dan Cekoslowakia keluar setelah menjadi anggota selama beberapa tahun. Swiss tidak menjadi anggota meskipun merupakan negara dengan mata uang yang kuat, tetapi ikut aktif di beberapa subbidang kegiatan-kegiatan IMF.

Gremium pengambilan keputusan tertinggi adalah Dewan Gubernur; setiap negara mengutus seorang gubernur dan seorang wakilnya. Dewan Gubernur biasanya bersidang setahun sekali dan mengambil keputusan-keputusan pokok, misalnya penerimaan

anggota baru dan perubahan kuota. Gremium pimpinan sebenarnya yang menjalankan kegiatan sehari-hari adalah Direktorat Eksekutif yang pada akhir April 1988 mempunyai 22 anggota. Ada 6 Direktur Eksekutif berasal dari AS, Inggris, Jerman, Perancis, Jepang, dan Saudi Arabia, sedangkan 16 direktur lainnya dipilih oleh gubernur-gubernur negara anggota lainnya setiap dua tahun sekali. Para direktur eksekutif setiap lima tahun sekali memilih direktur operasional sebagai ketua yang sekaligus merupakan kepala staf karyawan IMF. Tempat kedudukan IMF adalah di Washington D.C.

IMF dalam sistem Bretton Woods: karena para bapak perjanjian Bretton Wood memandang ringan permasalahan tahap rekonstruksi setelah perang dan IMF di bawah tekanan AS menjalankan politik perkreditan yang sangat hati-hati serta dikaitkan dengan persyaratan ketat, tak lama kemudian IMF tenggelam dalam sebuah "tahap mati suri" (Andersen), yang berlangsung sampai tahun 1956. Sementara itu, dengan Marshall Plan (*European Recovery Program*) telah diciptakan instrumen yang membiayai alih sumber daya yang menguntungkan pembangunan kembali Eropa. Bagi penerima bantuan *European Recovery Program*, akses ke dana IMF tertutup sama sekali. Media likuiditas mata uang cadangan berada di luar pengawasan IMF. Untuk itu bank-bank sentral asing memakai US\$ sebagai media cadangan. Tingginya cadangan emas AS dan jaminan pencairan emas (berdasarkan *Gold Reserve Act* tahun 1934) dari Departemen Keuangan AS,

membuat US\$ sama baiknya dengan emas dan selain itu dikenakan bunga. Karena produksi emas dengan harga 35 US\$ per ons emas murni tidak cukup untuk menutup kebutuhan likuiditas internasional yang tumbuh pesat dalam perdagangan dunia, likuiditas diperluas terutama oleh mata uang cadangan US\$. Hal ini terjadi karena AS mengalami defisit neraca pembayaran—inilah privilese mata uang cadangan—yang dapat dibiayai dengan *notenpresse*. Dengan bertambahnya cadangan US\$ pada bank-bank sentral asing, hubungan antara cadangan US\$ negara-negara nasabah dan cadangan emas AS memburuk. Pada akhir tahun '50-an tidak saja dimulai periode berfungsinya sistem Bretton Woods secara "normal", setelah terjadi Krisis Suez (1956) yang menghidupkan kembali IMF (bantuan kredit ke Inggris dan Mesir) dan 12 negara Eropa akhir tahun 1958 beralih ke konvertibilitas luar negeri; muncul juga tanda-tanda pertama krisis kepercayaan terhadap US\$. Penjualan US\$ yang spekulatif diiringi oleh permintaan swasta akan emas. Sampai akhir tahun '60-an AS berhasil mengatasi krisis standar emas-US\$ yang *de facto* darinya berkembang sistem Bretton Woods, melalui langkah-langkah mengurangi defisit neraca pembayaran, memakai instrumen baru kerja sama bank sentral dan menggugah disiplin dalam persekutuan. Dalam Kesepakatan Kredit Umum (1962), anggota Kelompok Sepuluh, yaitu negara-negara dengan mata uang terkuat, menambah dana kredit untuk IMF yang dengan bantuannya akan memerangi gerak modal spekulatif terhadap mata

uang cadangan. Perundingan yang dilakukan oleh Klub Sepuluh mengenai reformasi sistem moneter internasional (1963-1968) tahun 1969 menghasilkan pembentukan sebuah media likuiditas internasional baru, yaitu *Special Drawing Rights* (SDR). Meskipun dipuji sebagai pembaruan revolusioner, perannya sebagai media cadangan tetaplah tidak besar. Kesepakatan distribusi SDR Desember 1978 yang berjumlah 12 miliar SDR tahun 1979-1981 membuat jumlah pembagian SDR keseluruhan menjadi 21,4 miliar SDR. Sejak tahun 1981 tidak ada lagi pembagian SDR.

Antara akhir tahun 1969-akhir tahun 1972 cadangan devisa resmi naik, dari 33 miliar US\$ menjadi 104 miliar US\$. Jumlah keseluruhan cadangan mata uang resmi tanpa emas April 1988 adalah 516,7 miliar SDR.

Kenaikan pesat defisit neraca pembayaran AS dan krisis spekulasi yang terprovokasi terhadap US\$, menyebabkan Presiden Nixon menghapus jaminan pencairan emas untuk US\$ (15 Agustus 1971). Ini adalah awal dari akhir sistem Bretton Woods. Setelah berlangsung keberhasilan stabilisasi berumur pendek, di awal tahun 1973 struktur kurs tukar hancur sama sekali dan digantikan oleh kekuasaan mata uang mengambang yang setengah anarsi.

2. *Reformasi sistem moneter internasional.* Mencari usul untuk mengolah sebuah tata baru hubungan moneter internasional, merupakan tujuan dari komisi kedua puluh Dewan Gubernur di pertengahan tahun 1972. Tema pokok perundingan gremium ini adalah bagaimana memperbaiki

mekanisme penyesuaian neraca pembayaran yang mengembangkan SDR sebagai media cadangan utama dan kembali ke kurs mata uang yang tetap, namun fleksibel. "Rancangan reformasi" (*outline of reform*) yang diajukan oleh komisi Juni 1974, menjadi usang karena realitas krisis minyak dan pergeseran dalam neraca pembayaran yang disebabkannya. Oleh karena itu, komisi memutuskan melakukan beberapa tindakan langsung yang bertujuan mengatasi krisis, misalnya penciptaan fasilitas minyak dan perluasan fasilitas dana. Setelah konsep sebuah reformasi fundamental dikubur, Perjanjian Kingston/Jamaika membawa kesepakatan mengenai reformasi separo-separo, tercantum dalam bentuk baru perjanjian mengenai IMF dan diputuskan April 1976 oleh Dewan Gubernur. Setelah itu, praktek mata uang mengambang disahkan. Memang negara-negara anggota wajib melakukan sederet prinsip-prinsip politik kurs tukar (misalnya menghindari gerak kurs yang "eratis"), tetapi mereka tetap bebas memilih kekuatan kurs tukar konkret. "Pelaksanaan sebuah sistem yang meluas dari aturan kurs tukar pada landasan paritas yang stabil, tetapi mampu menyesuaikan diri" (Ayat IV, 4) bergantung pada mayoritas 85% suara. Dana diberi tugas mengawasi politik kurs tukar anggotanya. Harga emas resmi dihapuskan, dinas moneter negara-negara anggota diizinkan berdagang emas dengan harga pasar. Anggota wajib bekerja sama "untuk menjalankan SDR menjadi media cadangan utama dari sistem moneter internasional"

(Ayat XXII). Struktur pengambilan keputusan dana dimodifikasi sedemikian rupa sehingga keputusan-keputusan terpenting memerlukan mayoritas 85% suara. Dengan demikian, AS dan negara-negara ME mempunyai sebuah minoritas perintang. SDR seperti sebelumnya, jauh dari sebuah media cadangan utama. Perluasan likuiditas internasional sejak awal tahun '70-an terus berlangsung tidak terkendali. Perkembangan kurs US\$ yang tidak stabil menyebabkan sejumlah bank-bank sentral mendiversifikasi cadangan mata uangnya.

3. *IMF dan Dunia Ketiga*. Kaitan (*link) yang dituntut oleh negara berkembang sejak pertengahan tahun '60-an antara SDR dan pembiayaan pembangunan, memang kembali dikemukakan oleh Komisi Keduapuluh IMF dan diterima masuk dalam "rancangan reformasi" sebagai usul dua model, tetapi realisasinya terbentur pada perlawanan beberapa negara industri, terutama AS dan Jerman. Argumentasi tuntutan negara berkembang akan pembagian SDR di atas proporsi masing-masing kuota IMF adalah dengan pembagian SDR baru sehingga negara-negara tertentu yang sering menghadapi kesulitan-kesulitan besar dalam keseimbangan neraca pembayaran, akan bisa mendapatkan cadangan yang sangat dibutuhkannya. Dengan demikian, mengoreksi secara bertahap distribusi dana mata uang yang tidak seimbang dan menghidupkan perdagangan dunia. Sedangkan pihak negara industri berargumentasi, alih sumber daya melalui link akan bisa merangsang inflasi internasional dan menurunkan

kepercayaan terhadap SDR. Pembagian SDR yang disepakati sampai kini sebaliknya tidak mempunyai dampak inflasi yang berarti jika dibandingkan dengan penciptaan likuiditas internasional akibat defisit neraca pembayaran AS. Karena kesepakatan IMF tahun 1976 tidak memberi privilese kepada negara berkembang pada pembagian SDR, keinginan mengubah kuota hanya dapat dilakukan dengan mengubah kesepakatan-kesepakatan IMF.

Negara berkembang lalu tertarik akan suatu penguatan SDR karena mereka hanya memiliki cadangan emas yang sedikit. Demoneterisasi emas yang efektif, seperti diinginkan oleh keputusan Jamaika tahun 1976, tidaklah mungkin karena adanya perkembangan di pasar emas dan sikap bank-bank sentral terpenting. Ini berlaku, meskipun atau mungkin justru karena IMF sendiri menjalankan sebuah program penjualan emas yang dilakukan selama beberapa tahun, dengan cara sepertiga cadangan emas sejumlah 50 juta ons separo dijual kembali kepada negara-negara anggota seharga 35 US\$ per ons, dan sisanya dilelang pada pelelangan emas. Sebagian keuntungan diberikan sebagai kredit kepada LLDCs, dan sebagian lagi dibagikan langsung ke negara berkembang.

Hasil dari pelelangan emas IMF menambah fasilitas khusus untuk mengatasi permasalahan khusus neraca pembayaran yang sering dihadapi negara berkembang. Fasilitas-fasilitas ini sesuai dengan larangan diskriminasi, pada prinsipnya terbuka untuk semua negara anggota,

yaitu: a. fasilitas untuk "mengim-bangi pembiayaan pada perubahan gerak hasil ekspor" (sejak tahun 1963); b. fasilitas untuk membiayai *buffer stock* (sejak tahun 1969), di-berikan kredit untuk negara-negara yang ikut ambil bagian dalam *Perjanjian Bahan Mentah internasional*; c. "dana fasilitas yang diperluas" yang dijalankan tahun 1974, mem-bantu neraca pembayaran jangka me-nengah dengan tempo sampai 10 ta-hun dengan syarat politik ekonomi yang relatif ketat (kondisionalitas); d. fasilitas minyak (1974) yang dicipta-kan sebagai reaksi terhadap kenaik-an harga minyak, sekarang ini sudah tidak berlaku; e. "fasilitas pembiaya-an tambahan" (fasilitas *Witteveen*) yang diaktifkan Februari 1979 de-ngan tujuan menyediakan dana tam-bahan bagi anggota-anggotanya yang menghadapi defisit neraca pembayar-an (tidak berlaku sejak tahun 1984); f. fasilitas penyesuaian struktur, di-bentuk Maret 1986, memberi bantuan bersyarat lunak untuk neraca pem-bayaran negara-negara berpendapatan rendah dan menghadapi masalah de-fisit neraca pembayaran jangka pan-jang dan sedang intensif menguatkan neraca pembayarannya, April 1988, 62 negara mendapatkan fasilitas ini; 25 perjanjian untuk fasilitas ini telah dilakukan; g. fasilitas penyesuaian struktur yang diperluas, dibuat akhir tahun 1987, membantu usaha negara-negara berpendapatan rendah dalam usaha penyesuaian yang berorientasi pertumbuhan melalui tambahan ban-tuan pembiayaan bersyarat lunak. Persyaratan fasilitas ini (1988) sesuai kredit fasilitas penyesuaian struktur.

Dana dari kedua fasilitas ini terikat persyaratan bahwa negara berkemb-ang bersama staf IMF dan Bank Dunia mengembangkan sebuah kon-sep kerangka politik ekonomi. Kon-flik-konflik tertajam antara negara berkembang dan IMF adalah pada pembagian fasilitas kredit secara umum dalam rangka perjanjian penyediaan kredit (kredit *standby*). Kemungkinan menarik kredit bergan-tung pada kuota anggota dan cadang-an mata uang masing-masing yang disimpan IMF. Penarikan otomatis (artinya, pembelian mata uang asing oleh mata uang negara) mungkin se-tinggi pangsa cadangan super (sam-pai 75% kuota) dan sampai 100% kuota, jika ini tidak melampaui jum-lah mata uang negara tersebut dalam IMF (pangsa cadangan). Dalam empat pangsa kredit yang lebih tinggi dari masing-masing 25% kuota, pem-berian kredit mensyaratkan bahwa pemerintah negara anggota yang me-minta kredit wajib memberikan per-nyataan keinginan (*letter of intent*) menjalankan sebuah program penye-suaian yang memungkinkan peng-hapusan defisit neraca pembayaran. Hubungan pemberian kredit dengan persyaratan politik ekonomi (kondi-sionalitas) mencerminkan kontradiksi nasabah-pengutang yang konstitutif dalam politik moneter internasional dan pada IMF berlaku sebagai per-syaratan mutlak untuk berhasil me-nyehatkan neraca pembayaran. Be-berapa tahun terakhir program-pro-gram stabilisasi yang didikte oleh IMF mengakibatkan kerusuhan-kerusuhan sosial di banyak negara, menyebab-kan situasi kehidupan lapisan pen-

didukung miskin menjadi lebih buruk dan menimbulkan polarisasi yang mengancam meledakkan sistem demokrasi yang labil. Perkembangan ini menyebabkan makin banyak kritik terhadap pelaksanaan kondisionalitas.

Pembiayaan defisit neraca pembayaran melalui pasar-pasar Eropa selama tahun '70-an menyebabkan banyak negara berkembang berutang tanpa persyaratan dengan bunga riil negatif. Ketika terjadi peningkatan bunga, penurunan hasil ekspor, dan pemakaian modal yang diimpor secara tidak efisien tiba di batas ketidaklayakan menerima kredit lagi maka mereka harus berpaling kembali ke IMF dan tunduk pada disiplin kondisionalitas. Krisis utang tahun '80-an dengan demikian makin menguatkan posisi IMF. Baik bank-bank usaha maupun negara-negara nasabah kebanyakan melakukan penjadwalan utang. Pemberian kredit-kredit baru bergantung pada kesepakatan negara pengutang dan IMF mengenai sebuah program stabilisasi. Sebagai koordinator operasi penunjang keuangan pemerintah, bank sentral dan bank umum, IMF mengajukan prapersetujuan kredit bank baru dalam memberikan kredit kesediaan, supaya bank-bank tidak menarik diri dari kegiatannya di negara berkembang yang bersangkutan, sementara kredit-kredit IMF dipakai untuk berutang.

Dalam kelangsaan tahun '80-an sudah samar batas antara pembiayaan neraca pembayaran dan bantuan pembangunan, samar garis pemisah antara bidang kerja IMF dan Bank Dunia. Tahun 1979 Bank Dunia beralih memberikan "kredit penye-

suaian struktur". Hal ini-mirip penyediaan kredit dari IMF-ditentukan untuk negara-negara anggota yang sedang sungguh-sungguh memerangi kesulitan-kesulitan neraca pembayarannya. Tugas-tugas yang makin tumpang tindih yang tidak hanya dihasilkan dari peran kedua lembaga tersebut dalam mengatur krisis utang, menyebabkan terjadi pertukaran pengalaman yang intensif antara spesialis kedua organisasi tersebut dan pada koordinasi bantuan-bantuan keuangan. Pada penentuan program-program IMF dan Bank Dunia untuk setiap negara memang dicanangkan perlu menghindari semacam "kondisionalitas yang tumpang tindih", dalam arti kemungkinan saling mengeluarkan hak veto. Namun jelas, kerja sama erat lembaga-lembaga Bretton Woods makin meningkatkan posisi tawar mereka terhadap negara-negara penerima kredit.

Alamat: 19th Street, N.W. Washington D.C. 20431, USA.

Kepustakaan: U. Andersen, *Das internationale Währungssystem zwischen nationaler Souveränität und supranationaler Integration*, Berlin 1977; J. Williamson (ed.), *IMF Conditionality*, Washington D.C. 1984; P. Körner dkk., *Im Teufelskreis der Verschuldung. Der Internationale Währungsfonds und die Dritte Welt*, Hamburg 1985; J. Betz, "Die Stabilisierungspolitik des Internationalen Währungsfonds", dlm.: *Verfassung und Recht in Übersee*, 1986, hlm. 169-185.

mk
immiserizing growth → teori perdagangan luar negeri.

impact evaluation → evaluasi.

imperialisme Politik sebuah negara yang bertujuan menguasai dan mengendalikan bangsa lain yang berada di luar batas negaranya, secara langsung (melalui perluasan daerah negaranya) atau tidak langsung (men-

dominasi politik, ekonomi, militer, budaya), yang tidak mau tunduk terhadap tekanan dan pengaruh tersebut, selain itu kepentingan sendiri diabaikan oleh penguasa imperialis.

Untuk menjelaskan hasrat ekspansi yang ada di negara-negara, dikembangkan sederet teori yang sering hanya membahas sub-sub aspek dari masalah imperialisme atau tahap-tahap imperialisme yang secara historis terpisah-pisah.

1. *Model penjelasan teori kekuasaan imperialis* mengerti politik imperialistis sebagai hasil hasrat menguasai oleh individu-individu yang haus kekuasaan, kelompok-kelompok atau negara yang berpengaruh. Schumpeter mendefinisikan imperialisme sebagai disposisi tanpa objek sebuah negara menjadi ekspansi penuh kekerasan tanpa batas.

Diterapkan ke negara-negara *Dunia Ketiga, imperialisme merupakan usaha menemukan dan menguasai daerah kolonial melalui kekejaman dan keserakahan. Model ini menimbulkan pendapat-pendapat yang absurd mengenai sistem dalam negeri penguasa kolonial selama berabad-abad dan tidak dapat menjelaskan keberhasilan pengaruh kekuasaan tanpa perlu menaklukkan negara (misalnya *British East Indian Company*).

2. *Model penjelasan politik-psikologi* memperlihatkan tesis yang diterima umum dari hasil penelitian terbaru mengenai politik internasional, dalam hal eratnya kaitan antara politik dalam negeri dan politik luar negeri. Imperialisme dalam perspektif ini terutama berfungsi sebagai sebuah politik dalam negeri. Imperialisme

dimengerti "secara sadar sebagai sarana untuk tekanan sosial" (Ansprenger) di dalam negeri yang menyalurkan agresinya yang bertumpuk-tumpuk, keresahan terhadap tata sosial yang tidak adil.

Di samping secara psikologis, hal ini mempunyai konsekuensi-konsekuensi material bagi lapisan bawah yang dimobilisasi. Prosperitas ekonomi negara yang meluas secara imperialistis menjadi terjamin, dan loyalitas mereka yang tidak puas dengan situasi sosialnya dibeli dengan cara "sogok". Berkaitan dengan hal ini wakil-wakil aliran *Third-Worldism* selalu melancarkan kritik terhadap "aristokrat buruh" di negara industri.

3. Dalam *model filsafat-kebudayaan*, imperialisme lebih merupakan suatu legitimasi daripada model penjelasan. Model ini menekankan makna "berkah" yang diterima negara-negara terbelakang dengan adanya penguasaan imperialistis oleh negara-negara maju, terutama di bidang budaya. Ideologi pengabsahan ini melihat imperialisme sebagai "tanggung jawab manusia berkulit putih" (Kipling) untuk menyampaikan nilai-nilai humaniter dan religius kepada Dunia Ketiga yang "biadab". Pemikiran ini berkaitan erat dengan zaman keemasan imperialisme Inggris di akhir abad ke-19 dan terutama sekali dipupuk dengan sebuah kepercayaan yang naif akan sebuah keunggulan kultural yang tercermin melalui *industrialisasi. Negara-negara Dunia Ketiga dalam mencapai kemerdekaannya berusaha menghadapi gambaran nilai asing yang berhasil dipaksakan masuk, dengan mengembang-

kan tradisi, adat istiadat, bahasa sendiri, singkatnya: berusaha mengisi kehidupan baru dalam identitas mereka yang telah terdesak.

4. Model baru dalam memperdebatkan penjelasan teoretis mengenai imperialisme adalah *model ekonomi politik*. Dengan model ini diusahakan membantah model teori petualangan kekuasaan dan mengolah dasar-dasar "objektif" imperialisme, meskipun sering juga gejala imperialisme budaya kurang diperhatikan. Sebab-sebab ekonomi dari imperialisme mula-mula diolah oleh teori "borjuis" yang kritis. C.A. Conant dan terutama J.A. Hobson (Lenin banyak bertopang pada tulisan dalam pengantarannya) bertolak bahwa dengan tingkat perkembangan kapitalisme yang dicapai, dimungkinkan terjadi akumulasi modal secara berlebihan di dalam negeri sebagai akibat pendapatan lapisan masyarakat luas yang terlalu rendah dan permintaan yang kurang akan barang. Melalui investasi di pasar-pasar seberang lautan, imperialisme memungkinkan mengatasi masalah penjualan dan investasi yang terjadi di dalam negerinya. Ada dua hal yang tidak dijelaskan oleh teori imperialisme; yaitu: a. kaitan antara politik ekspansi negara dan investasi asing (investasi asing juga mungkin tanpa melakukan perluasan wilayah negara); b. realitas bahwa sebelum Perang Dunia I hanya setengah investasi asing Inggris dilakukan di daerah-daerah kekuasaannya, hanya 5% investasi asing Perancis dan hanya 2% investasi asing Jerman.

Lenin menambahkan teori yang berargumentasi demikian. Tulisan

"Imperialisme Sebagai Stadium Akhir Kapitalisme" (1916) yang bertopang pada tulisan pendahuluan Bucharin, karya Hilferding, Kautsky, dan Luxemburg, menjadi karya standar teori imperialisme marxis. Tesis-tesisnya dianggap berlaku sampai sekarang tidak saja di negara-negara sosialis, melainkan juga oleh sebagian besar orang-orang kiri di negara-negara industri Barat (Boccarda, Mandel, Nehls).

Menurut Lenin, imperialisme ditandai oleh: a. pemusatan produksi dan modal mencapai tingkat perkembangan yang sudah sedemikian tinggi sehingga menciptakan monopoli yang berperan menentukan dalam kehidupan ekonomi; b. pembauran modal bank dengan modal industri serta terciptanya sebuah oligarki keuangan di atas basis modal keuangan; c. ekspor modal, berbeda dengan ekspor barang, mempunyai arti penting; d. terbentuklah persekutuan-persekutuan kapitalis internasional monopolistis, yang membagi dunia di antara mereka sendiri; e. pembagian dunia secara teritorial di antara kaum penguasa besar kapitalis, telah berakhir.

Teori kapitalisme monopoli negara menambahkan ciri-ciri yang dikatakan Lenin dengan tujuan imperialisme negara-negara kapitalis, yaitu mendesak sosialisme di dunia.

Dalam kritik terhadap tesis-tesis Lenin dikatakan bahwa daftar kriteria yang dibuatnya tidak dapat menjelaskan kriteria imperialisme, bagaimana misalnya di tahun '70-an arus investasi bergerak pada perbandingan 30 : 70 (negara berkembang : negara industri), ekspor modal ke

daerah dan negara jajahan tidak mempunyai arti penting; selanjutnya, seperti pada kritik terhadap Hobson dalam butir b), bahwa "pembagian dunia" di antara penguasa-penguasa kapitalis besar secara politik merupakan proses dekolonisasi dan akhirnya imperialisme, yang menurut Lenin merupakan "stadium akhir kapitalisme" dan "kapitalisme yang sedang sakit", sama sekali belum berakhir.

Perlu dikemukakan bahwa sebuah teori imperialisme yang mengaitkan imperialisme ke perkembangan kapitalisme, sejak semula mengecualikan negara-negara sosialis dari tuduhan imperialisme. Tesis yang banyak diwakili Uni Soviet di-tentang Cina dengan bersandar pada pengertian imperialisme menurut teori kekuasaan. Mereka melihat politik luar negeri Uni Soviet sebagai hasrat akan sebuah hegemoni dan merupakan produk khas imperialisme sosialis-tis Uni Soviet yang perlu di-perangi.

5. Ilmu sejarah non-marxis mengatakan masa tahun 1870-1918 dari perspektif historis-deskriptif sebagai "abad imperialisme". Terutama Inggris sejak pertengahan abad ke-19 membangun dunia jajahannya. Afrika dibagi-bagi di antara Inggris, Perancis, Portugis, Belgia, dan Jerman. Di Timur Jauh Inggris dan Perancis menguasai Asia Timur; Jepang memper-tahankan daerah pengaruhnya di Manchuria terhadap Rusia (perang tahun 1904/1905), Cina sejak tahun 1900 menjadi bola mainan penguasa-penguasa kolonial Eropa.

Jika pengertian imperialisme di-hubungkan dengan kolonialisme, imperialisme dalam periode tertentu di-mungkinkan dibatasi secara mudah. Namun, yang perlu dipertanyakan, apakah tenaga-tenaga pendorong yang menimbulkan imperialisme dan terutama persyaratan-persyaratan ekonominya akan hilang begitu saja dalam proses dekolonisasi. Jadi, imperialisme dimaksudkan hanya dominasi negara; atau apakah imperialisme berubah gejalanya tidak saja sebagian dan sekarang terus berlangsung dalam bentuk neokolonialisme.

6. Kelangsungan dan perubahan imperialisme baru dibahas di antaranya oleh teori *dependencia*. J. Galtung mencoba mengaitkan pengetahuan-pengetahuan dari penelitian perdamaian dengan kritik terhadap imperialisme yang dilakukan oleh teori *dependencia* dalam sebuah Teori Struktural Imperialisme.

Galtung mengerti hubungan ketergantungan negara-negara Dunia Ketiga kepada negara-negara industri sebagai pencerminan kekerasan struktural di dalam hubungan internasional. Namun, imperialisme oleh Galtung tidak hanya ditempatkan di tingkat hubungan antarnegara, ia juga menganalisis posisi-posisi kepentingan antarnegara di sentra dan antarnegara di periferi (model sentra-periferi). Menurut definisinya, imperialisme adalah hubungan sedemikian rupa antara sebuah bangsa di sentra dan sebuah bangsa di periferi sehingga terjadi harmoni kepentingan antara sentra di bangsa sentra dan sentra di bangsa periferi, terjadi disharmoni yang lebih besar di antara bangsa-

bangsa di periferi daripada yang berada di bangsa-bangsa sentra, dan ada disharmoni kepentingan antara periferi di bangsa sentra dan periferi di bangsa periferi.

Model Galtung, yang mengidentifikasi adanya batu loncatan sentra imperialis di sentra bangsa periferi, memungkinkan kelangsungan imperialisme, meskipun terjadi kemerdekaan formal negara-negara Dunia Ketiga. Ia membatasi hal ini tidak hanya pada hubungan ketergantungan ekonomi dan membedakan 5 tipe imperialisme: a. imperialisme ekonomi, b. imperialisme politik, c. imperialisme militer, d. imperialisme komunikasi, dan e. imperialisme kultural. Karena Galtung tidak berhasil menentukan bobot relatif masing-masing imperialisme ini secara lebih persis, dalam daftar ini pun terdapat kelemahan tesisnya.

Kepustakaan: J.A. Hobson, *Der Imperialismus*, Köln/Berlin 1968; W.I. Lenin, "Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus", dlm.: LW 22, hlm. 189 dst.; W.I. Mommsen, *Das Zeitalter des Imperialismus*, Frankfurt 1969; D. Senghaas (ed.), *Imperialismus und strukturelle Gewalt*, Frankfurt 1972; H.U. Wehler, *Bibliographie zum Imperialismus*, Göttingen 1977; A. Mack/D. Plant/V. Dayle, *Imperialism, Intervention and Development*, London 1979; A. Brewer, *Marxist Theories of Imperialism. A Critical Survey*, London 1980; A. Szymanski, *The Logic of Imperialism*, New York 1981; W. Reinhard, "Kolonialismus/Imperialismus", dlm.: D. Nohlen/P. Waldmann (ed.), *Dritte Welt*, München 1987, hlm. 284 dst.

rs
Income terms of trade Konsep khusus dari *terms of trade*. Termasuk dalam hubungan ini adalah indeks hasil ekspor dan indeks harga impor dengan maksud menentukan perubahan-perubahan kapasitas impor sebuah negara. **dn**

indeksasi Dalam politik bahan mentah internasional merupakan proses untuk mengamankan hasil penjualan bahan mentah dari negara berkembang pengekspor bahan mentah. Ada dua konsep: indeksasi langsung, yaitu pengaitan harga bahan mentah pada harga barang industri yang diimpor sehingga hubungan pertukaran riil tidak memburukkan *commodity terms of trade* dan indeksasi tidak langsung, yaitu pembiayaan tambahan dari pihak negara industri kepada negara berkembang pengekspor bahan mentah untuk mempertahankan kapasitas impor dan *income terms of trade* sehingga perubahan-perubahan dalam jumlah ekspor tidak memburukkan situasi hasil penjualan negara berkembang.

Kepustakaan: J.A. Cuddy, *International Price Indexation*, Farnborough/Lexington 1976; St. Baron dkk., *Internationale Rohstoffpolitik*, Tübingen 1977.

dn
India Termasuk negara berkembang miskin (kelompok MSAC). Sekaligus memiliki industri yang sangat berarti dan kapasitas teknologi yang besar. Masalah pembangunan yang pokok tidak terletak pada struktur ekonomi nasional, melainkan terutama dalam tata sosial.

1. Dengan luas 3.287.782 km² India merupakan negara terluas ketujuh di dunia. Tak ada negara lain seperti India yang ditandai oleh kontradiksi-kontradiksi besar topografi dan iklim. Dataran tanah-tanah endapan yang subur di tepi Sungai Gangga berhadapan dengan daerah kering dan padang pasir di India Barat (Rajasthan) dan India Tengah dan dengan hutan hujan tropis di sebelah timur (Assam) dan selatan

(Kerala). Sementara di dataran tinggi Himalaya berlaku iklim subpolar, di daerah barat ditemukan iklim padang pasir yang panas-kering, di timur laut lembab-kering, sebagian besar negara itu beriklim musim (musim panas yang lembab-panas, musim dingin yang dingin-kering, dan musim semi yang kering-panas) dan di bagian selatan iklim tropis. Sesuai dengan jumlah hujan ada empat tipe vegetasi: curah hujan di atas 2.000 mm setahun hujan tropis yang selalu hijau, 1.000–2.000 mm hutan-hutan musim, 500–1.000 mm peralihan dari hutan-hutan musim ke padang semak belukar, dan di bawah 500 mm daerah padang semak belukar. Vegetasi alami telah dihancurkan sebagian besar oleh manusia dan binatang (bercocok tanam dan perluasan menjadi padang rumput), atau sedikitnya diubah. Dataran Sungai Gangga dan Assam sekarang hampir semuanya adalah daerah pertanian terbuka. Dekkan makin dimanfaatkan untuk pertanian, hutan-hutan musim hanya menutupi tepi barat dan timur Dekkan, hutan hujan yang selalu hijau hanya ditemui di daerah pinggir pegunungan barat dan di sebelah timur laut India. Di dataran rendah Gangga-Brahmaputra ada kemungkinan pengairan kanalisasi dengan mengalihkan arus air dari sungai-sungai yang berair sepanjang tahun melalui jaringan sistem kanalisasi sampai ke perladangan; pengumpulan air hujan serta air sungai di kolam-kolam (*tanks*) dan bak-bak penunjang serta penggunaan cadangan air tanah melalui pompa. Jika es di Himalaya terlambat mencair pada musim semi

atau dan iklim musim terlambat atau curah hujan terlalu sedikit, kemungkinan pengairan tidak mencukupi, terjadi kegagalan panen besar-besaran. Bahaya banjir terjadi jika pencairan es dan iklim musim bertemu.

India kaya akan kekayaan tambang dan tenaga air yang baru sebagian digunakan. Penambangan batu bara dan bijih besi di daerah yang sama (Bihar/Orissa) sehingga ongkos transportasi berkurang dan menguntungkan pembangunan sebuah industri berat. Dibandingkan dengan batu bara dan bijih besi, jumlah minyak bumi dan gas bumi lebih sedikit; tahun-tahun terakhir baru ditemukan di Bombay High. 80% kebutuhan energi komersial dapat tertutup dari eksploitasi sendiri.

Mangan yang ditemukan dapat diekspor dalam jumlah besar, India adalah produsen mika terbesar dan produsen mangan nomor enam terbesar di dunia. Bahan mentah penting selanjutnya adalah bijih krom, bauksit, batu kapur, garam batu, dan tembaga. Selanjutnya ada timah hitam, seng, aspal, alkali, antimon, molidan, kobalt, nikel, timah, emas, torium, dan berilium.

2. Penduduk India (tahun 1989 sekitar 818 juta) secara etnis, bahasa, dan kepercayaan adalah heterogen; mempunyai lebih dari 1.600 bahasa dan dialek, dan semua agama terbesar di dunia terwakili dalam jumlah besar. Dengan pemusatan regional setiap kelompok, di India terdapat masalah minoritas yang sangat berbeda-beda yang membebani persatuan negara.

Hampir 40% penduduk berusia di bawah 15 tahun. Antara tahun 1971-1981 jumlah penduduk naik 137 juta atau 25%; sepuluh tahun sebelumnya adalah 24,8%. Pertumbuhan tahunan sekarang adalah 2% (33 kelahiran dan 12 kematian per 1.000 penduduk). Kepadatan penduduk tahun 1989 adalah 249 orang/km², sedangkan tahun 1971 adalah 167 orang (termasuk Jammu dan Kashmir). Kepadatan penduduk di masing-masing daerah adalah 600 orang/km² (Kerala, Bengali). Jumlah buta aksara memang turun, tetapi angka 64% masih tetap tinggi, terutama di pedesaan (77%). 77% dari penduduk hidup di daerah pedesaan (1981), *pelarian dari pedesaan menyebabkan jumlah penduduk yang hidup di perkotaan meningkat pesat: di kota-kota berpenduduk 12 juta orang hidup 42 juta penduduk (1981), di antaranya di Kalkuta 9,2 juta (termasuk kota-kota satelitnya), Bombay Besar 8,2 juta, dan Delhi 5,7 juta. Mayoritas penduduk beragama Hindu (83%), 11% Islam (terutama di India Utara), di antaranya 3/4 kaum Suni dan 1/4 Syiah, di samping Kristen (2,4%), di antaranya sebagian besar Katolik, Sikh (2,0%, terutama di Punjab), Jaina (0,5%), dan Buddha (0,7%), sekitar 200.000 beragama Parsi dan 12.000 Yahudi. Tidak ada data-data mengenai asal usul etnis, tetapi sebagian besar kelompok penduduk mempunyai bahasa Indo-Eropa (Hindi, Urdu, Bengali, dsb. 72%) dibandingkan bahasa Dravida (Telugu, Tamil, dsb. 25%).

Pertengahan abad ke-19 seluruh India berada dalam kekuasaan Inggris. Tidak semua daerah ditaklukkan

dan berada langsung di bawah administrasi Inggris. Dalam banyak kasus, kemerdekaan formal kerajaan-kerajaan dan daerah suku tetap ada. Tahun 1857 terjadi pemberontakan besar pertama melawan kekuasaan perusahaan Hindia Timur milik Inggris (pemberontakan *Mutiny* atau *Sepoy*), yang ditindas secara kejam; kemudian kerajaan Inggris mengambil alih pemerintahan (1858), ratu Inggris menjadi kaisar India (sebagai penerus kaisar Moghul). Di samping kekuasaan teritorial Inggris, kegiatan ekonomi juga meningkat. Di masa awal diutamakan pengawasan atas perdagangan India, diteruskan ke pengawasan pajak, upeti dan di abad ke-19 manufaktur, pertambangan, kereta api, *perkebunan (indigo, kopi, teh, karet), dan industri-industri yang berkembang (serat yute dan kapas). India menyediakan bahan mentah dan tenaga kerja murah, sekaligus merupakan pasar penjualan. Ini juga merefleksikan pengaruh berbagai kelompok orang Inggris di India: setelah pedagang dan para petualang di abad ke-19, makin banyak muncul kaum bangsawan muda (tentara dan administrasi). Berbeda dengan daerah jajahan Inggris di Afrika, Amerika, dan Australia, India tidak merupakan koloni kaum pendatang. Selain beberapa perkebunan, orang Inggris tidak mempunyai pangsa yang besar dalam pemilikan tanah; diukur pada penduduk India, jumlah orang Inggris yang hidup di India selalu sedikit.

Sejak akhir abad ke-19 gerakan pembebasan makin gencar (Partai Kongres, gerakan *Gandhi yang anti-

kekerasan dan pembangkangan sipil). Dua perang dunia menguatkan bobot politik dan ekonomi daerah jajahan, yang melemahkan negara penjajahnya; setelah tahun 1919 (Dyarsi) dan tahun 1935 mendapatkan administrasi sendiri, kemerdekaan tak bisa ditahan lagi. Masalah tersulit pada waktu itu adalah mengorganisasi kehidupan bersama orang Hindu dan Islam, terutama di India utara, di sana bergantian terdapat mayoritas kekuatan. Karena takut akan mayoritas orang Hindu, orang Islam memperjuangkan pembagian India. 15 Agustus 1947 India merdeka, banyak daerah di barat laut dan Bengali Timur jatuh ke Pakistan.

Pembagian dalam bentuk ini tidak diduga, akibatnya terjadi tiga kali perang dengan Pakistan (1947/ 1948, 1965, 1971) dan pengejaran serta pengusiran minoritas agama di kedua negara baru. Di dalam politik dalam negeri, masalah yang utama adalah konsolidasi, integrasi kerajaan-kerajaan, diskusi mengenai undang-undang dasar, dan pertikaian mengenai bahasa yang menyebabkan dalam tata baru India sekarang terdapat 25 negara bagian yang berbeda bahasa dan 6 daerah teritorial. Dari pendirian negara sampai tahun 1977 Partai Kongres merupakan kekuatan politik pemerintah. Setelah ketidakpuasan terhadap politik pemerintah Indira Gandhi (putri perdana menteri pertama, Jawaharlal Nehru) karena politiknya untuk pemaksaan pertumbuhan dan industrialisasi, pelanggaran hak asasi manusia (situasi darurat, sensor pers, penangkapan oposisi) dan sterilisasi massal, menyebabkan oposisi

(termasuk kelompok-kelompok semipalan dari Partai Kongres) bersatu dalam pemilu dan berhasil menjatuhkannya. Dengan politik konservatif dan religius, Morarji Desai sebagai penggantinya, tidak dapat bertahan; pemerintahannya terpecah-pecah dalam perdebatan mengenai larangan minuman keras dan makan daging sapi.

Pemilu Januari 1980 dimenangkan kembali oleh Indira Gandhi. Baik politik dalam negeri maupun luar negeri, tetap dikaitkan dengan haluan lama: ke dalam, pemapanan kekuasaan pusat dan keluar, memerdekakan diri dari ketergantungan terhadap AS (meskipun mendapat banyak bantuan bahan pangan di tahun '50-an dan '60-an), dan bersandar pada Uni Soviet sebagai bobot tandingan dalam pertikaian terus-menerus dengan Pakistan dan Cina (Perang Perbatasan tahun 1962).

Invasi Uni Soviet ke Afghanistan menyebabkan revisi besar-besaran dalam politik luar negeri India: India tidak menginginkan ekspansi lanjut Uni Soviet dan hilangnya Pakistan sebagai negara penyangga. Atas inisiatif Presiden Bangladesh, Zia-ur-Rahman, terjadi pendekatan negara-negara Asia Selatan di dalam *South Asian Association for Regional Cooperation* ('SAARC). Bersamaan dengan itu ketegangan-ketegangan politik dalam negeri makin tajam, dan 1983 meletus konflik-konflik regional di Assam dan Punjab. Sementara huru-hara di Assam terutama ditujukan pada orang Bengali dan orang Islam, orang-orang Sikh yang militan menuntut otonomi untuk Punjab dan

berkumpul di Candi Emas di Amritsar, kemudian diserbu oleh militer setelah berlangsung perang yang sengit. Intervensi ini dirasakan sebagai penghinaan terhadap tempat suci mereka sehingga akhirnya terjadi pembunuhan terhadap Perdana Menteri Indira Gandhi oleh pengawal-pengawalnya (Sikh). Sebagai pengganti, terpilih Rajiv Gandhi, putranya, dan di dalam pemilu dikuatkan dengan mayoritas besar dalam Partai Kongres. Politik liberalisasi dan modernisasi ekonomi India yang dilakukannya, menimbulkan pertumbuhan kuat ekonomi; dengan melakukan politik *self-reliance* (sejak pertengahan tahun '60-an) India memiliki cukup cadangan untuk mengatasi masalah dua tahun panen yang sangat buruk tanpa harus merugikan pertumbuhan. Keluar, Rajiv Gandhi mengikuti garis ibunya, yaitu politik penguasa regional: tahun 1987 "tentara perdamaian" India dikerahkan untuk menghentikan perang saudara antara orang Tamil dan orang Singhali di Sri Lanka, tahun 1988 mengakhiri sebuah usaha kudeta di Maladewa. Dalam pemilihan Desember 1989 Front Nasional berhasil mematahkan dominasi Partai Kongres, Vishwanath Pratap Singh menggantikan Rajiv Gandhi sebagai perdana menteri. Usaha Rajiv Gandhi untuk kembali ke kekuasaan gagal karena ia terbunuh Mei 1991 ketika sedang melakukan kampanye pemilu. Kemudian, pengganti perdana menteri adalah Narasimha Rao.

3. Sementara di satu pihak menurut perkiraan FAO (1972-1974) sejumlah 175 juta penduduk atau 35% penduduk tidak mendapatkan

1.468 kkal yang dianggap sebagai eksistensi minimal (rata-rata 1.970 kkal) dan PNB tahun 1989: 340 US\$ per kapita, termasuk terendah di dunia. Menurut perhitungannya sendiri, dalam produksi industri ia berada di urutan ke-16 (benang katun urutan ke-3, besi urutan ke-9, listrik ke-11, baja ke-15, dan rokok di urutan ke-9). Sektor yang mendominasi tetap pertanian, yang memberikan kontribusi sepertiga dari pendapatan nasional dan seperempat dari ekspor. Ukuran usaha rata-rata (1980/1981) hanya mencapai 1,8 ha, di antaranya 1,6 ha diolah. Hampir separo dari seluruh usaha pertanian berukuran lebih kecil dari 1 ha; 2,7% lebih besar dari 10 ha. Dari 197 juta ha lahan pertanian, tahun 1986/1987 diolah seluas 143 juta ha, termasuk pemakaian lahan beberapa kali sehingga terdapat lahan panen seluas 175 juta ha. Di atas 126 juta ha ditanam gandum untuk pangan, di atas 19 juta ha untuk biji-bijian minyak dan sisanya untuk tumbuhan ekspor. Tahun 1983/1984 sekitar 54 juta ha lahan diairi secara buatan, sedangkan 38 juta ha secara alami. Pemakaian pupuk tahun 1986/1987 berjumlah sekitar 8,8 juta ton (pupuk murni), sedangkan tahun 1969/1970 hanya 2 juta ton. Pemakaian bibit unggul bisa diperluas, dari 11 juta ha (1969/1970) menjadi 54 juta ha (1986/1987). Sayur-sayuran, rempah-rempah, dan buah-buahan ditanam untuk kebutuhan mereka sendiri. Ekspor yang penting adalah teh, kapas, minyak nabati dan biji-bijian minyak, lada, tembakau, kopi, serta kacang mete.

Jumlah ternak tahun 1987 diperkirakan 199 juta sapi (15% jumlah dunia) dan 74 juta kerbau (54%); dipakai untuk membajak dan untuk produksi susu (India adalah produsen terbesar nomor empat di dunia). Hasil yang didapatkan sedikit karena pemberian pangan yang tidak cukup dan kondisi peternakan yang buruk. Pengaruh memuja sapi yang tidak menguntungkan secara ekonomi, terlalu dilebih-lebihkan oleh yang berada di luar India; yang pasti, sapi tidak dipelihara untuk diambil dagingnya. Kulit, kapas, dan kotoran sapi (bahan bakar) merupakan produk terpenting yang berasal dari binatang.

Dengan penambangan 176 juta ton batu bara dan 52 juta ton bijih besi, India termasuk negara tambang terbesar di dunia (1987). Produksi listrik (tahun 1986/1987: 202 miliar kWh) memang banyak untuk sebuah negara berkembang, tetapi hanya merupakan sebuah konsumsi 176 kWh per kapita. Industri sebagian besar adalah milik swasta, negara juga aktif di bidang bahan dasar. Hampir separo produksi industri bisa ditingkatkan semasa tahun '70-an sehingga India saat ini praktis bisa memproduksi semua barang konsumsi dan sebagian besar barang investasi. Selain itu, India memiliki industri nuklir, ruang angkasa, dan persenjataan yang berhasil. Dengan adanya tingkat teknologi yang sebagian tinggi dari industri India, dalam pasar-pasar internasional ia berkembang menjadi pesaing yang berhasil. Ukuran mutlak industri India jangan sampai mengaburkan realitas bahwa India masih

tetap termasuk negara yang paling sedikit berkembang, dilihat dari situasi pemenuhan produk-produk industri untuk pengadaan per kapita.

4. Berbeda jelas dengan keberhasilan-keberhasilan pertumbuhan ekonomi ini, pembangunan sosial mengalami perlawanan-perlawanan akibat tata sosial (sistem kasta) yang hierarkis berlandaskan agama. Ditandai oleh pembatasan jelas kelompok sendiri melalui profesi, endogami, dan solidaritas terhadap kelompok lain. Usaha-usaha membangun organisasi ekonomi dan sosial yang berfungsi, berlangsung memotong hierarki dalam kelompok agama atas kasta/jati (misalnya pada saat pendirian sebuah koperasi desa), mendapatkan kesulitan. Selain anggota kasta "yang tak tersentuh", yaitu orang Hindu yang tidak termasuk salah satu dari empat *varnas* (Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra), penduduk suku (India timur laut dan India tengah) mempunyai posisi khusus. Masalah kasta tidak terbatas pada orang Hindu, terutama kelompok yang tidak dihargai yang melakukan pekerjaan-pekerjaan "tidak bersih" (misalnya segala macam kegiatan membersihkan dan pengolahan kulit), ada juga orang Islam dan Kristen. Posisi istimewa adalah kelompok orang Parsi yang kecil tetapi berpengaruh besar secara politik dan ekonomi.

Pada sebuah kuota tingkat kesempatan kerja 37% (termasuk *marginal workers*), diperlukan 6 juta tempat kerja tambahan setiap tahun. Ia perlu disediakan terutama oleh pertanian atau sektor jasa yang sudah

terlalu penuh. Sektor yang "terorganisasi" (negara dan perusahaan swasta dengan karyawan sepuluh orang dan lebih) tahun 1986 mencakup 25 juta.

Mengenai tingginya *pengangguran tidak ada data yang bisa diandalkan, juga terdapat masalah pemilahan dan jumlah pengangguran musiman, kesempatan kerja kurang. Jika pendapatan dipakai sebagai ukuran, komisi perencanaan India mendapatkan bahwa 30% penduduk kadang-kadang atau sepenuhnya dapat dianggap kurang mendapatkan kerja. Tahun 1973/1974 mereka hanya menerima 13,4% konsumsi pribadi; perkiraan ini masih dapat berlaku sampai sekarang. *Distribusi pendapatan relatif India menurut perkiraan *Bank Dunia hampir identik dengan Jerman—hanya saja dengan tingkat pendapatan yang berbeda.

5. Sebenarnya jika melihat kekayaan tambangnya, potensi energi dan infrastrukturnya, sebenarnya perspektif perkembangan India menguntungkan. India, tidak seperti negara berkembang lainnya, kurang bergantung pada *alib teknologi. Dalam rangka *TCDC, India menawarkan teknologi ke negara berkembang lain. Permasalahan-permasalahan yang terletak pada tata sosial India dan sejarahnya, merupakan penyebab tidak tercapainya keberhasilan pembangunan selanjutnya. Kekayaan yang luar biasa dan *miskin besar yang berdiri bersama-sama telah bisa diamati sejak masa prapenjjaban Inggris; dosa Inggris adalah makin menguatkan perbedaan ini, juga penghancuran pengrajin dan polarisasi melalui penghancuran

terus lapisan menengah. Administrasi dan pendidikan mengacu pada kebutuhan-kebutuhan penguasa kolonial untuk mengurus negara itu dengan personal sesedikit mungkin, tetapi bisa mendapatkan keuntungan setinggi mungkin. Hal ini menyebabkan organisasi-organisasi politik yang mampu berfungsi di tingkat bawah hampir hancur sama sekali. *Pendidikan dulu dan sekarang mempunyai karakter eliter, terutama pendidikan teknik dan ilmu pengetahuan alam sangat diabaikan. Setelah merdeka, India mengambil alih sistem administrasi ini; keputusan-keputusan politik diteruskan secara ragu-ragu kepada satuan-satuan politik bawah (desa, distrik).

Organisasi sosial berlangsung dalam keluarga, kerabat atau kasta, dalam bidang politik ini menyebabkan kemunculan *klientelisme. Karena berbagai kelompok sosial (kasta) di tingkat lokal secara sadar saling memisahkan diri, struktur ini sulit atau hanya perlahan bisa diatasi. Namun, ini berarti bahwa bahan konflik sosial makin bertumpuk yang dalam situasi-situasi krisis (banjir, musim kering, pertikaian agama) menimbulkan konflik-konflik politik. Dengan kondisi ini kelihatannya perkembangan ekonomi yang mungkin ada akan terancam pertama-tama oleh masalah internal.

Kepustakaan: G. Myrdal, *Asian Drama. An Inquiry into the Poverty of Nations*, New York 1968; H. Iyer/C. Krüger, *Indien. Wirtschaftsmacht der Zukunft*, Lugano 1981; H. Kulke/D. Rothermund, *Geschichte Indiens*, Stuttgart 1982; H. Wulf, "Indien", dim.: *HDW II*, 7, Hamburg 1982, hlm. 122 dst.; D. Rothermund, *Indiens Wirtschaftsgeschichte*, Paderborn 1985; D. Kantowsky, *Indien. Gesellschaft und*

Entwicklung, Frankfurt 1986; J. Wiemann, *Indien. Selbstfesselung des Entwicklungspotentials*, Berlin 1988.

wpz

indikator Penunjuk yang dapat diamati atau diukur untuk masalah atau konstruksi politik tertentu yang dianggap tidak bisa diamati. Indikator merupakan penunjuk untuk situasi dan kondisi masyarakat. Misalnya, tingkat buta aksara suatu bangsa mencerminkan tingkat pendidikannya, atau tingkat harapan hidup rata-rata dalam tahun kelahiran merupakan indikator untuk pengadaan kesehatan bagi sebuah bangsa dan status pangannya. Jadi, sebuah indikator adalah lebih daripada yang diukur secara langsung; lebih daripada hanya data-data dan informasi statistik. Untuk mengatasi diskrepansi antara indikator dan konstruksi ini, diperlukan sebuah adekuasi definisi yang mendekatkan "yang sebenarnya dimaksud" dengan satuan-satuan, tanda-tanda, dan modalitas masing-masing indikator yang bisa ditangkap secara statistik-empiris dengan keseluruhannya. Semakin adekuasi ini mampu, semakin baik kelangsungan "pewarnaan kembali semantik". Data-data indikator-indikator pembangunan (ekonomi, sosial, dan politik) merupakan variabel-variabel yang dalam kasus ideal representatif untuk sub-sub aspek dari proses-proses pembangunan yang sudah terdefinisi baik. Tidak terdapat sebuah indikator pun yang cocok untuk mengukur indikator dalam arti umum, meskipun PNB per kapita di masa lalu sering dianggap memiliki sifat umum ini. Indikator-indikator pembangunan apa yang dipilih untuk membuat pernyataan mengenai tingkat perkembangan

dan proses pembangunan, bergantung pada definisi pembangunan yang menjadi landasannya.

"Penggunaan indikator mencerminkan sebuah usaha untuk mengkuantifikasi konsepsi atau definisi pembangunan" (McGranahan).

Penelitian mengenai indikator membahas masalah bagaimana menentukan indikator-indikator sebaik mungkin, artinya yang paling bisa menangkap fenomena-fenomena yang perlu direpresentasikan (misalnya tingkat harapan hidup dianggap indikator yang lebih baik dibandingkan angka penduduk per dokter). Pada penentuan indikator-indikator pembangunan, pertama-tama perlu dijelaskan bahwa setiap konstruksi dapat digambarkan secara cukup hanya oleh satu indikator, atau kompleksitas konstruksi memerlukan penggambaran multidimensional melalui sekelompok indikator. Sesuai dengan tujuan adalah membedakan antara indikator-indikator input (misalnya kuota penyekolahan) dan indikator-indikator output (misalnya tingkat melek aksara), di mana yang berorientasi kepada output pada pokoknya dianggap berargumentasi lebih kuat.

Kesimpulan penghitungan beberapa indikator dapat dilakukan dalam bentuk indeks; konstruksinya jelas menggambarkan pilihan waktu dan masalah serta bobotnya. Misalnya *Physical Quality of Life Index* (PQLI) dari Morris mencakup indikator-indikator output yang seimbang dari tingkat kematian bayi, tingkat harapan hidup, dan kuota melek huruf orang dewasa bersama-sama menjadi indeks pembangunan normatif.

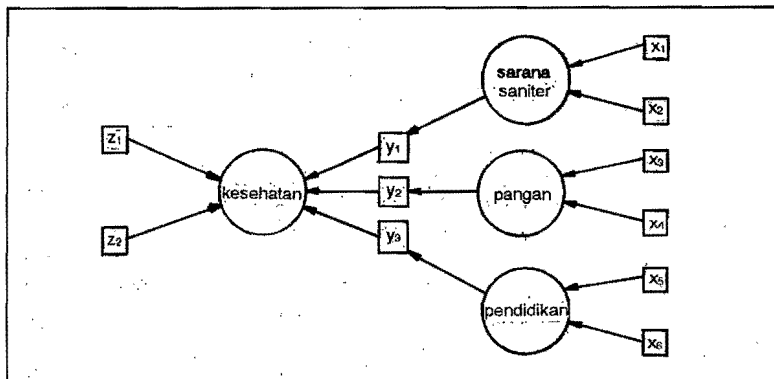
indikator – indikator kesehatan

Sebuah indeks pembangunan perlu memenuhi persyaratan-persyaratan: kemerdekaan dari masing-masing sistem ekonomi dan masyarakat yang diberlakukan, tidak bersifat etnosentris, berorientasi output, peka untuk aspek distribusi, kemungkinan penelitian yang mudah dan dapat dimengerti, serta dapat dibandingkan secara internasional. Jika indikator-indikator pembangunan untuk negara berkembang hanya merupakan data-data "lunak" yang memiliki tingkat otonomi kecil, untuk pengolahan statistiknya memerlukan proses adaptif yang sesuai. Misalnya, pengenalan model secara hermeneutik, analisis jalan atau *soft modelling*. → pembangunan, → pendapatan per kapita. Kepustakaan: D. McGranahan, "Entwicklungsindikatoren und Entwicklungsmodelle", dlm.: *HDW I*, 1, Hamburg 1974, hlm. 208 dst.; G.

Addicks, *Aussagefähigkeit wirtschaftlicher und sozialer Indikatoren der Entwicklungsmessung*, Augsburg 1977; M.D. Morris, *Measuring the Condition of the World's Poor. The Physical Quality of Life Index*, New York 1979; H.-J. Hoffmann-Nowotny (ed.), *Soziale Indikatoren im internationalen Vergleich*, Frankfurt 1980; G. Menges, *Adaptive Statistik: Bemerkungen über neuere Bestrebungen in der statistischen Methodologie*, *Statistische Hefte* 21 (1980), hlm. 182–208; M. Bunge, "Development Indicators", dlm.: *Social Indicators Research* 9 (1981), hlm. 369–385; D. Nohlen/ F. Nuscheler, "Indikatoren von Unterentwicklung und Entwicklung. Probleme der Messung und quantifizierenden Analyse", dlm.: *HDW II*, 1, Hamburg 1982, hlm. 451–485; H. Sang-meister, *Indikatoren der Weltentwicklung*, *EZ* 23 (1982), vol. 3, hlm. 20; D. McGranahan/E. Pizarro/C. Richard, *Measurement and Analysis of Socio-economic Development*, UNRISD, Geneva 1985.

hs
indikator kesehatan Ukuran-ukuran kedokteran, biologi atau ilmu sosial yang mencoba menghitung situasi kesehatan seseorang atau satu

Gambar 3: Model indikator untuk empat bidang kebutuhan dasar



- x₁ penduduk perkotaan dalam % penduduk keseluruhan
- x₂ pangsa penduduk dengan akses ke air yang baik
- x₃ indeks rata-rata produksi pangan per kapita
- x₄ konsumsi kalori per hari dan per kapita dalam % kebutuhan.

- x₅ tingkat penyekolahan primer (laki-laki)
- x₆ tingkat penyekolahan primer (perempuan)
- y₁ tingkat kematian bayi (0–1 tahun)
- y₂ tingkat harapan hidup pada kelahiran
- y₃ tingkat melek huruf (dewasa)
- z₁ penduduk per dokter
- z₂ PNB per kapita

kelompok atau bangsa. Indikator kesehatan tidak dapat menentukan secara persis, sering diikuti kesalahan-kesalahan pengukuran yang tidak dikenal. Angka-angka demografi seperti angka kematian atau penyakit bayi, anak-anak, ibu atau umur dan jenis kelamin (mortalitas, morbiditas), kesuburan atau harapan hidup, merupakan indikator-indikator situasi kesehatan sebuah bangsa. Statistik penyakit, penyakit menular, dan rumah sakit, hanya memberikan sedikit informasi mengenai pengadaan kesehatan di sebuah bangsa.

Indikator-indikator kesehatan tidak langsung merupakan angka-angka untuk dikemukakan, distribusi dan kemampuan pelayanan kesehatan, misalnya kepadatan dokter, angka tempat tidur rumah sakit, kepadatan perawat, kebutuhan vaksinasi dalam sebuah bangsa. Angka-angka yang sering dikontrol ini tidak memberikan gambaran dalam perbedaan ukuran-ukuran ekonomi, sosial, dan politik pendidikan, serta merupakan petunjuk tidak langsung situasi kesehatan sebuah bangsa yang sering berkolaborasi secara formal.

hid
indirect rule Prinsip dikembangkan oleh teoretikus-teoretikus kolonial Inggris yang melihat bahwa penguasa kolonial membatasi diri pada sejenis "penguasa supra" sebuah daerah, sementara masyarakat di daerah bersangkutan mempertahankan sistem politik dan sosial (termasuk person-person pimpinannya), dan dalam perkembangan lanjutan kurang berorientasi pada "negara induk" kolonialnya melainkan kepada sivilisasi setempat. Prinsip-prinsip berlandas-

kan pemikiran yang lebih bertujuan kegunaan daripada filantropis ini (terutama menghemat ongkos) dalam prakteknya jarang dipakai secara penuh (misalnya di Emirat Nigeria Utara). Karena administrasi Inggris sering campur tangan dalam urusan "internal" masyarakat setempat (misalnya melalui penempatan dan penggantian kepala suku), dalam praktek lebih mirip sistem administrasi kolonial "langsung" yang dijalankan Perancis. Melalui *indirect rule* orang Inggris dapat menjatuhkan penguasa lokal dan lapisan-lapisan sosial yang mempunyai kepentingan melanjutkan *status quo* kolonial, sementara "elite modern" yang muncul di bawah penguasa modern tidak dapat terintegrasi ke dalam sistem *indirect rule*.

Kepustakaan: R. von Albertini, *Europäische Kolonialherrschaft 1880-1940*, Zürich 1976; F. Nuscheler/K. Ziemer, *Politische Herrschaft in Schwarzafrika*, München 1980. **kz**

Indonesia 1. Luas sekitar 7 juta km², sedangkan luas daerah daratan dari sekitar 13.000 pulau (hanya 931 dihuni) yang terletak di antara Lautan Pasifik dan Samudra Indonesia hanya 1,9 juta km². Tanah vulkan yang subur dan iklim musim memberikan kondisi yang menguntungkan untuk pertanian dan perhutanan. Kaya akan tambang (minyak bumi, timah, nikel, bauksit, tembaga), di antaranya minyak bumi (1/5 cadangan dunia) yang memiliki arti ekonomi penting, membuat Indonesia jika diukur dari potensi sumber dayanya sebuah negara terkaya di dunia.

2. Setelah pemerintah Belanda mengambil alih negara itu dari tangan VOC dan mengalami *interregnum* (pemerintahan sementara) Ing-

gris sampai paro kedua abad ke-19, politik monopoli merkantilisme Belanda dilanjutkan. Ciri periode ini adalah sistem tanam paksa (*cultuur stelsel*) tanaman ekspor (kopi, karet, gula) di perkebunan dengan mempekerjakan kuli-kuli, menarik bea ekspor dan pajak yang tinggi terhadap petani setempat. Dengan politik ini tercipta dasar-dasar struktur sosial dan ekonomi Indonesia yang dualistik dan ketergantungan monostruktur pada pasar-pasar bahan mentah internasional. Selama periode liberalisme ekonomi atas inisiatif asing muncul perkebunan-perkebunan di Jawa dan daerah timur laut Sumatra, serta perusahaan di sektor pertambangan dan kehutanan. Dualisme antara sektor pengolahan, pertambangan, dan perdagangan yang terutama berorientasi keuntungan dan usaha tani kecil, sampai kini mengiringi disparitas pembangunan daerah karena konsentrasi kegiatan ekonomi dan infrastruktur di Jawa dan di daerah pantai. Administrasi dan ekonomi ekspor yang dikendalikan orang Eropa, perdagangan yang dikuasai orang Cina, dan tidak adanya tingkat menengah Indonesia yang berjiwa pengusaha, maka sisa-sisa peninggalan pemerintah kolonial bersama pertumbuhan penduduk yang pesat, pertentangan etnis-sosial, kepercayaan, serta miskin, buta aksara, dan stagnasi ekonomi, mengiringi Indonesia menuju kemerdekaan. Ketegangan antara sentralisme dan regionalisme, keinginan otonomi masing-masing daerah dan kontroversi religius intra-Islam, membahayakan stabilitas politik dalam negeri yang diperlukan untuk

pembangunan tahun 1949 dan tahun 1958. Tahun 1959 demokrasi parlemen yang lemah gagal total dan Presiden Soekarno dalam rangka "demokrasi terpimpin" mulai kembali ke sistem presidensial dan selanjutnya menunjukkan ekonomi sebuah jalan pembangunan otosentris. Kesulitan-kesulitan menghadapi gerakan-gerakan separatis (PRRI-Permesta dan DI/TII), konfrontasi politik luar negeri dengan Malaysia karena masalah persatuan Malaysia serta tindakan-tindakan keras terhadap orang Belanda dan Cina dalam rangka politik yang mengacu pada tujuan-tujuan utopis, menyebabkan kehancuran ekonomi dan pemiskinan lanjut penduduk pedesaan. Setelah terjadi kegagalan kudeta PKI (1965), di bawah Jenderal Soeharto dimulai politik Orde Baru, dengan pendekatan ekonomi yang teknokratis memakai model teori modernisasi. Perluasan infrastruktur, peredaman tingkat inflasi, pengembalian pemilihan yang telah dinasionalisasi, peningkatan investasi langsung asing, liberalisasi perdagangan luar negeri dan lalu lintas devisa, di samping pertumbuhan ekonomi yang pesat, merupakan tujuan-tujuan pembangunan secara umum. Pembiayaan rencana-rencana pembangunan melalui kredit dari negara industri Barat, peningkatan investasi swasta asing dan impor, menyebabkan jalan pembangunan yang teknokratis ini menemui kesulitan-kesulitan akibat ketergantungan dan keterasingan ekonomi.

3. Pertumbuhan penduduk yang pesat (pertumbuhan tahunan 1980-1989: 2,1%; tahun 1989: 178 juta

penduduk) dengan menelan PNB (→ pendapatan nasional)—pertumbuhan PDB tahun 1980–1986 rata-rata 3,4%—yang tumbuh terlalu sedikit, merupakan masalah utama di Indonesia. Harapan hidup 61 tahun (1989), tingkat kematian anak 8,7% (1986), dan tingkat buta aksara 26% (1989). Sekitar 40% penduduk berumur di bawah 15 tahun, jumlah angkatan kerja (1980–1986) naik rata-rata 2,4%/tahun. Masalah sosial dan ekonomi diperkuat oleh perbedaan besar dalam pembagian regional. Di Jawa, Madura, dan Bali (7,2% luas negara) dengan kepadatan penduduk 440–900 penduduk/km², hidup 64% penduduk (untuk seluruh Indonesia hanya 88 penduduk/km²). Tekanan penduduk dihubungkan dengan berkurangnya kemungkinan kerja dan kegiatan ekonomi subsistensi dalam sektor pertanian, menyebabkan berlangsung migrasi penduduk pedesaan ke daerah kumuh yang padat di kota-kota berpenduduk jutaan (Jakarta tahun 1985 sekitar 8 juta penduduk). Meskipun ada keberhasilan-keberhasilan, program keluarga berencana makin menemukan batasnya yang tidak dapat diatasi akibat cara berpikir penduduk (banyak anak sebagai jaminan masa tua dan jaminan sosial). Dalam rangka transmigrasi, yang merupakan program pemindahan penduduk terbesar di dunia, sekitar 5 juta penduduk dipindahkan ke daerah-daerah kosong atau belum dibuka dengan memberikan rangsangan-rangsangan keuangan dan materi. Untuk itu dibuka lahan-lahan baru dengan cara membuka hutan tropis, akibat kerawanan ekologi di daerah tropis

tidak sesuai untuk pemanfaatan pertanian secara kontinu. Dengan demikian, keberhasilan program pemindahan ini diragukan (tingginya tingkat mereka yang kembali). Keragaman ras, etnis-kultural, dan sosial (sekitar 360 etnis) juga menyulitkan konsolidasi intern dan pembangunan sosial-ekonomi Indonesia. Mayoritas penduduk termasuk rumpun Melayu-Polinesia, ditambah tiga juta orang Cina sebagai minoritas terpenting dalam perdagangan. Sesuai dengan keragaman etnis di Indonesia, Islam (85% penduduk), Buddha, Hindu (Bali), dan Kristen diwarnai oleh sinkretisme religius agama-agama suku Indonesia tua. Usaha-usaha untuk sebuah integrasi nasional tercermin dari bahasa nasional, yaitu Bahasa Indonesia yang dikembangkan dari bahasa Melayu Tinggi.

4. Landasan perekonomian (PNB per kapita tahun 1989: 500 US\$) dengan tingkat kesempatan kerja 52% (1982) dan 26% dari PDB (1986), adalah tetap sektor pertanian, kayu, karet, kelapa sawit, kopra, kopi, tembakau, dan rempah-rempah untuk ekspor dan memproduksi beras sebagai makanan pokok. Praktek sistem pinjaman yang kapitalistis, sebagian besar usaha pertanian kecil (rata-rata di bawah 2 ha) dan kekurangan modal, merupakan faktor-faktor kendala untuk rencana peningkatan produksi. Industri (tahun 1986: 32% PDB, 12% tingkat kesempatan kerja) berkembang relatif lemah. Titik-titik berat bantuan adalah industri yang menunjang perluasan produksi pertanian, mendorong perkembangan daerah (sekitar 80% semua usaha

berada di Jawa) dan mengolah sumber daya lokal. Karena industri barang konsumsi tumbuh dengan lambat, seperti sebelumnya ada kebutuhan besar akan barang konsumsi dan barang investasi. Pertambangan dengan 58% pangsa ekspor (1986), terutama minyak bumi, menentukan pembangunan ekonomi. Selain perusahaan minyak negara, Pertamina, ikut ambil bagian sekitar 45 perusahaan terutama asing dalam eksploitasi minyak. Proyek-proyek ekonomi (*joint venture*) asing yang diizinkan dalam rangka pembangunan industri sejak tahun 1967 sampai sekarang tidak memperbesar penciptaan lapangan kerja, malah menyebabkan pendesakan usaha-usaha lokal. Di tahun '80-an karena harga minyak jatuh, Indonesia terjebak dalam krisis ekonomi yang terlihat dalam melambatnya pertumbuhan (pertumbuhan PDB tahun 1970-1980: 7,8%; tahun 1980-1986: 3,4%). Presiden Soeharto (Maret 1988 dengan suara bulat terpilih untuk kelima kalinya untuk masa jabatan lima tahun) berusaha mengatasi perkembangan ekonomi yang merugikan ini dengan mengurangi pengeluaran rutin. Kenaikan pajak, pembekuan upah, penghapusan subsidi bahan pangan dan pembatalan proyek-proyek pembangunan adalah pokok dari politik penghematan ini. Akibatnya, situasi penduduk miskin yang terutama makin terus memburuk.

5. Pada pemilihan umum untuk parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat bersidang hanya lima tahun sekali untuk memilih presiden), April 1987, Golkar (Golongan Karya) dapat

mempertahankan posisinya dengan 299 kursi dibandingkan PPP (Partai Persatuan Pembangunan: 63) dan PDI (Partai Demokrasi Indonesia: 38; sedangkan partai komunis dilarang sejak tahun 1966). Di dalam negeri pemerintahan Soeharto ditopang terutama oleh militer, sementara filsafat negara Pancasila diharapkan akan bisa menjamin kestabilan sistem politik. Baru-baru ini dalam Golkar muncul tuntutan akan demokratisasi; tujuan utamanya adalah stabilisasi politik dalam negeri setelah akhir era Soeharto. Setelah putus hubungan dengan Republik Rakyat Cina (dibuka kembali pertengahan tahun 1990), Indonesia di bawah Soeharto untuk politik luar negeri berorientasi ke Barat (terutama Jepang dan AS). Dalam rangka kerja sama regional di Asia Tenggara, ASEAN, Indonesia merupakan kekuatan pendorong.

Kepustakaan: B. Dahm, *Sukarnos Kampf um Indonesiens Unabhängigkeit, Werdegang und Ideen eines asiatischen Nationalisten*, Hamburg 1966; B. Dahm, *Emancipationsversuche von kolonialer Herrschaft in Südostasien. Die Philippinen und Indonesien. Ein Vergleich*, Hamburg 1974; G. Deissmann, *Indonesien. Allgemeine Wirtschaftskunde*, Bremen 1978; W. Röll, *Indonesien, Entwicklungsprobleme einer tropische Inselwelt*, Stuttgart 1979; W. Müller, *Bibliographie deutschsprachiger Literatur über Indonesien*, Hamburg 1979; Th. Dams, "Indonesien: Ländliche Armut kein politisches Tabu", dlm.: *E+Z*, 2/1983, hlm. 10 dst.; H. Dürste/M. Fenner, "Zwanzig Jahre 'Neue Ordnung' in Indonesien - Entstehung, Entwicklung, Perspektiven", dlm.: *Internationales Asienforum*, vol. 3/4, 1986, hlm. 273 dst.; D. Kerschull, "Transmigrasi - das indonesische Umsiedlungsprogramm", dlm.: *Internationales Asienforum*, vol. 1/2, 1987, hlm. 95 dst. ah

industrialisasi Termasuk tujuan politik pembangunan yang penting di negara berkembang, dianggap seba-

gai persyaratan untuk mencapai tingkat hidup di negara industri. Secara historis negara berkembang yang sekarang terperosok ke dalam sebuah pembagian kerja internasional dengan mendapatkan peran sebagai pemasok bahan mentah dan merupakan pasar penjualan untuk barang jadi yang diproduksi negara industri. Adanya hak negara berkembang untuk mengindustrialisasi perekonomian nasionalnya, tidak disangkal. Oleh karena itu, negara industri membantu negara berkembang membangun industri pengolahan. Namun, di lain pihak dilarang sebuah industri menurut model negara industri. Tujuan industrialisasi terbentur pada batas alami ekologi: pemakaian energi per kepala akan dapat naik 10 kali lipat daripada nilai sekarang. Suara-suara dari Dunia Ketiga juga memperingatkan perkembangan yang demikian, misalnya Ivan Illich.

Berbagai masalah muncul berkaitan dengan industrialisasi. Dari sisi ekonomi dunia, pangsa negara berkembang pada produksi industri dunia (1987) adalah 13% (jika ditambah Cina sekitar 18%). Pangsa ini cenderung meningkat karena produksi industri di negara berkembang tumbuh lebih cepat daripada negara industri—merupakan salah satu bidang di mana kesenjangan antara negara industri dan negara berkembang kelihatan mengecil. Negara berkembang dalam pertemuan UNIDO II sepakat menetapkan target yang disebut Target Lima, yaitu 25% pangsa negara berkembang dalam produksi industri dunia. Namun, hal ini ditentang oleh negara industri (terutama mengenai

tuntutan transfer sumber daya yang berkaitan dengan tujuan ini) dan *de facto* terlihat sulit dicapai. Dari sisi perekonomian nasional dan politik, industrialisasi menyangkut pemilihan sebuah strategi industri. Beberapa alternatif yang telah mempunyai pengalaman sejarah sebagai berikut. a. Substitusi impor atau industri berdasarkan model ekspor. Hasil-hasil politik pembangunan kedua strategi ini sebagian besar negatif. Industri sebenarnya harus berorientasi terutama kepada pasar lokal yang potensial, artinya kepada pemenuhan kebutuhan penduduk dengan barang-barang sederhana. b. Industri yang padat modal atau padat karya. Dengan beberapa alternatif ini tersentuh beberapa permasalahan. Dengan cara apa dan dalam ukuran bagaimana serta dengan persyaratan, apa tenaga kerja lokal digunakan, demikian juga faktor yang dimiliki negara berkembang (kecuali beberapa negara OPEC)? Efek kesempatan kerja berpengaruh terhadap pasar lokal dan tentu saja terhadap struktur sosial dan politik sebuah negara berkembang. c. Industri ringan atau industri berat, industri barang investasi atau industri barang konsumsi. Alternatif ini biasanya tidak dimiliki kebanyakan negara berkembang karena tidak ada volume modal untuk membangun sebuah industri barang investasi dan industri berat. Hanya sedikit negara berkembang yang memiliki persyaratan-persyaratan ini, seperti misalnya Cina, Brasilia, Venezuela, Nigeria, dan India. d. Teknologi termmodern atau teknologi tepat guna? Sebuah alternatif yang berkaitan dengan butir

a, b, dan c, pada akhirnya harus memutuskan fungsi bagaimana yang harus dimiliki oleh industri: e. Alternatif terakhir adalah keterkaitan atau tidak keterkaitan antara industri dengan sektor-sektor ekonomi lainnya, terutama dengan pertanian. Juga ada permasalahan *forward* dan *backward linkage* serta impuls-impuls pembangunan umum yang bertolak dari industri. Dewan Pembangunan Industri "BID dari UNIDO tahun 1986 mengusulkan: a. rehabilitasi dan perawatan instalasi industri yang sudah ada; b. menunjang industri kecil dan madya; c. menunjang pemitraan antara perusahaan industri dari negara berkembang dan negara industri; d. meningkatkan keaktifan di bidang pendidikan (*human resources*).

Kepustakaan: B. Warren, "Imperialism and Capitalist Industrialization", dlm.: *New Left Review*, 81/1973, hlm. 3 dst.; F. Fröbel *et al*, *Die neue internationale Arbeitsteilung*, Reinbek 1977; K. Esser, *Lateinamerika, Industrialisierungsstrategien und Entwicklung*, Frankfurt 1979.

dn
industrialization by invitation Undangan kepada modal asing dengan penyediaan infrastruktur, zone-zone industri, serta tawaran premi (keringanan pajak dan bea, alih modal yang bebas, dsb.). Model Puerto Rico ini berusaha dicontoh terutama oleh negara-negara Karibia, membebaskan negara pengundang karena harus menyediakan sarana-sarana, apalagi efek kesempatan kerja dari industri yang dipindahkan tersebut tetap kecil.

fn
infrastruktur Dalam pengertian sempit adalah infrastruktur material, yaitu persyaratan material untuk pembangunan ekonomi dalam arti pe-

nyediaan data-data basis seperti hubungan lalu lintas, pengadaan energi, pembuangan limbah air, dan komunikasi (Jochimsen, 1966). Infrastruktur dalam pengertian luas mencakup infrastruktur sosial, yaitu rumah sakit, sekolah, rumah, jaminan sosial, dsb. Kepustakaan: R. Jochimsen, *Theorie der Infrastruktur*, Tübingen 1966.

dn
inisiatif Arusha Konsensus 40 peserta dari 20 negara dalam Konferensi Utara-Selatan mengenai sistem moneter internasional dan tata ekonomi dunia baru di Arusha Juli 1980. Menurutny, sistem moneter dunia Bretton Wood dari tahun 1944 telah hancur karena itu ada kebutuhan yang mendesak akan sebuah *New International Monetary System*. Inisiatif ini menuntut diadakannya *UN-Conference on International Money and Finance*.

Kepustakaan: "The International Monetary System and the New International Order", dlm.: *Development Dialogue*, 1980: 2, hlm. 4-54.
dn
Input-Output-Analyse (Leontief) → rencana pembangunan.

Inquilinos → *hacienda*.

Institut Amerika Latin untuk Rencana Pembangunan Ekonomi dan Sosial → ILPES.

Institut PBB untuk Pelatihan dan Penelitian → UNITAR.

Institut Penelitian PBB untuk Pembangunan Sosial → UNRISD.

INTAL → BID.

Integrasi Pengertian integrasi dipakai dalam penelitian mengenai negara berkembang dalam berbagai hubungan. Secara umum dapat dibedakan dalam integrasi nasional, global, dan regional.

1. Integrasi nasional dimengerti sebagai proses *nation-building*, yai-

tu pembangunan *nation* sebuah negara yang di dalamnya telah dibuat batas-batas pemisah oleh penguasa-penguasa kolonial, yang penduduknya terpisah secara etnis (→ etnisitas, tribalisme), peralihan penyerahan loyalitas dari desa/*clan*/suku ke umum.

2. Integrasi global dimengerti sebagai pengaitan negara berkembang ke pasar dunia, ke pembagian kerja internasional. Model integrasi negara berkembang ke ekonomi dunia dibahas dalam perdebatan mengenai teori dan strategi pembangunan (→ teori *dependencia*, kapitalisme periferi, model sentra-periferi).

3. Integrasi regional dimengerti sebagai gabungan antarnegara dengan karakter dan tujuan yang sangat berbeda-beda. Pengertian definitif untuk integrasi regional tidak ada, dan juga tidak akan dicapai. Sebab, integrasi sebagai definisi yang berhubungan dengan berbagai subbidang (integrasi ekonomi, integrasi politik), sebagai proses yang sedang berlangsung, sebagai stadium (hasil yang dicapai dalam proses penyatuan), dan mencakup berbagai bentuk integrasi (zone perdagangan bebas, uni bea, pasar bersama, uni ekonomi, uni supranasional), dimengerti sebagai tahapan-tahapan proses integrasi yang tidak dilakukan secara paksa (misalnya sebuah proses integrasi bisa langsung diikuti dengan pendirian sebuah pasar bersama). Integrasi Ekonomi Regional (IER) di negara berkembang dipandang sebagai perspektif pembangunan yang penting dan berusaha direalisasi (→ ALALC, → MCCA, → CARICOM, → EAC, → ECOWAS, → Pakta Andes, →

ASEAN, dsb.). Impuls-impuls bertolak dari keinginan integrasi Eropa, yang secara teoretis juga berlaku untuk negara berkembang, dipropagandakan secara politis mula-mula melalui CEPAL, kemudian melalui komisi-komisi ekonomi PBB lainnya. Namun, teori-teori IER berorientasi terutama kepada integrasi Eropa begitu juga kepada persyaratan, fungsi, dan tujuan yang spesifik dari IER di negara-negara industri Barat. Setelah terjadi kegagalan IER di negara industri yang jelas kesalahannya dan karena ada sebab-sebab lain, dengan perlahan dikenali bahwa negara berkembang karena kondisinya yang berbeda, terutama permasalahan pada tingkat integrasi lainnya, yaitu integrasi nasional (→ marginalitas) dan global (→ ketergantungan struktural), memerlukan strategi integrasi yang sesuai untuk situasinya. Teori integrasi untuk negara industri bertolak dari keinginan membangun dasar pengaturan sebaik mungkin dari semua barang dan tenaga kerja yang sudah ada, sementara teori integrasi yang telah diperbaiki dan diterapkan untuk negara berkembang tidak saja untuk bidang ini, melainkan juga untuk barang dan tenaga kerja yang belum ada dan harus diproduksi dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Dalam teori IER demikian, masalah-masalah kesempatan kerja kurang, pengangguran dan anggota-anggota dalam sektor ekonomi subsistensi harus diikutsertakan. IER menurut teori integrasi tradisional hanya merupakan perluasan pasar yang sudah ada, terutama hanya menguntungkan mereka yang telah

mempunyai posisi dalam pasar (sebagai penjual ataupun pembeli). Oleh karena itu, berguna terutama untuk perusahaan-perusahaan dalam sektor modern dengan modal sebagian besar dari asing dan memperluas integrasi vertikal ke pasar dunia melalui integrasi horizontal di antara negara berkembang. IER demikian dapat tidak memerlukan reformasi-reformasi struktur yang perlu dalam negara berkembang (reformasi pertanian, distribusi pendapatan yang adil) untuk meluaskan pasar dalam negeri. Harapan akan efek *spill-over* terbukti semu. Teori IER untuk negara berkembang harus bertolak dari situasi nyata, yaitu ketergantungan negara berkembang. Sebuah teori demikian harus membahas tema integrasi global dan desintegrasi nasional serta mengaitkannya dengan IER, membuat pernyataan-pernyataan konkret mengenai tujuan, alat, metode, dan persyaratan yang sesuai dengan masing-masing negara berkembang dalam ruang ekonomi yang berbeda-beda. Sayang, teori seperti ini tidak ada.

Kepustakaan: H. Johann, *Die wirtschaftl. Integrationsbestrebungen der EL*, München 1973; D. Dorner, *Probleme der weltwirtschaftl. Integration der EL*, Tübingen 1974; W.v. Urff (ed.), *Integration der EL in eine stabile Weltwirtschaft - Probleme, Chancen, Gefahren*, Berlin 1976; M. Mols (ed.), *Integration und Kooperation in Lateinamerika*, Paderborn 1981; A.M. El-Agraa, *International Economic Integration*, London and Basingstoke 1982; H. Keitel, *Zur Theorie der regionalen Wirtschaftsintegration von EL*, Heidelberg 1982. dn

integrasi ekonomi regional → integrasi.

International Council for Adult Education → pemberantasan buta aksara.

International Council for Educational Development → pendidikan dasar.

International Emergency Food Reserve → IEFR.

International Institute for Adult Literacy Methods → pemberantasan buta aksara.

International Institute for Educational Planning → pemberantasan buta aksara.

International Program for the Development of Communication → IPDC.

International Security and Economic Cooperation Program → politik bantuan pembangunan AS.

Inter Press Service → IPS.

investasi Dalam perekonomian nasional ada beberapa pengertian: *investasi bruto*: jumlah semua investasi baru dan investasi kembali; *investasi netto*: pertumbuhan alat produksi dan situasi gudang; *reinvestasi*: penggantian alat produksi yang sudah terpakai melalui produksi. Pengertian ini sering dipakai dalam pengertian bahwa keuntungan yang diperoleh pengusaha asing tidak ditransfer keluar, melainkan diinvestasikan ke anak perusahaan yang sama atau di perusahaan lain di negara penerima investasi. Reinvestasi di sini adalah kebalikan dari penarikan dan repatriasi keuntungan; *tingkat investasi*: pangsa investasi bruto pada PNB; dan *kuota-investasi*: pangsa investasi netto pada PNN. dn

investasi langsung Sarana modal dari negara-negara luar melalui pem-

belian hak pemilikan langsung dalam bentuk pabrik-pabrik cabang, cabang-cabang di dalam negeri tertentu, pangsa-pangsa usaha, tanah dan bangunan, serta reinvestasi keuntungan dari investasi-investasi asing terdahulu. Pihak investor menganggap investasi langsung lebih sebagai bagian bantuan keuangan negara industri ke negara berkembang. Struktur motivasi investasi langsung memperlihatkan sejumlah alasan-alasan pendorong (jaminan posisi dalam pasar, pembukaan pasar-pasar baru, ongkos upah yang murah, jaminan bahan mentah, harapan keuntungan yang tinggi, pemanfaatan politik bantuan pemerintah yang ada). Di antaranya adalah motivasi politik pembangunan.

Tabel 5: Investasi langsung negara-negara DAC ke Dunia Ketiga, dalam miliar US\$

Investasi modal netto	1977	1981	1985
Amerika Serikat	4,9	6,5	0,9
Jerman Barat	0,8	1,4	-0,1
Inggris	1,2	2,3	3,3
Jepang	0,7	3,9	1,0
Perancis	0,3	1,1	0,5
Lainnya	1,6	1,6	1,1
Jumlah	9,5	17,2	7,6

Termasuk keuntungan yang direinvestasi
Sumber: OECD

Sebuah penelitian empiris di awal tahun '70-an memperlihatkan bahwa investasi langsung mengutamakan pembukaan dan penjaminan pasar. Karena ada perubahan situasi persaingan internasional, aspek ongkos-upah untuk investasi langsung sekarang ini dan pemindahan bagian-

bagian produksi yang penting ke negara berkembang mempunyai arti yang sama. Dampak investasi langsung di negara berkembang juga memperlihatkan bahwa perkiraan yang disebutkan di atas perlu dipertanyakan. Dalam perdebatan mengenai sumbangan investasi langsung terhadap politik pembangunan disebutkan dampak-dampak positif: memenuhi kebutuhan modal; meringankan neraca pembayaran; alih *know-how* teknologi dan manajemen; menciptakan lapangan kerja dan mendidik tenaga kerja; diversifikasi struktur ekonomi; menunjang politik substitusi impor dan diversifikasi ekspor; memobilisasi sumber daya dalam negeri selanjutnya. Hal-hal positif ini berhadapan dengan dampak negatif dan ongkosnya: membebani neraca pembayaran akibat tingginya keuntungan yang mengalir keluar dan sedikitnya investasi baru; merebut pasar modal lokal dengan membebani perusahaan-perusahaan dalam negeri; menciptakan dan menguatkan heterogenitas struktural (kepincangan struktur regional dan sektoral/cabang), dengan demikian makin menguatkan struktur-struktur penghambat pembangunan; mengisap tenaga kerja dan sumber daya lokal; memindahkan ongkos awal (infrastruktur) dan ongkos sosial ke negara berkembang; monopolisasi struktur keputusan dalam perusahaan induk; mengendalikankan perkembangan anak perusahaan di bawah strategi perusahaan multinasional di seluruh dunia; mengalihkan teknologi padat modal; mempunyai efek *linkage*

yang kecil; makin mendorong arus *brain drain*, dsb.

Perdebatan yang lebih sering penuh emosi mengenai dampak investasi langsung diiringi oleh data-data dan tendensi-tendensi perkembangan yang baru. a. Hanya bagian kecil dari investasi langsung negara industri Barat ditanam di negara berkembang. b. Pembentukan modal di sebagian besar negara berkembang tetap tidak memuaskan seperti sebelumnya. Pertumbuhan kuota tabungan dan investasi yang diharapkan dalam rencana pembangunan, tidak muncul. c. Bantuan pembangunan dari pemerintah negara industri di masa lalu tetap di bawah 0,7% dari target yang diharapkan, dan sekarang ini tidak ada kepastian untuk meningkatkannya. d. Sebagian besar transfer sumber daya dari negara industri ke negara berkembang terdiri atas kegiatan swasta (investasi langsung, kredit, pinjaman). Turunnya kredit bank sebagai akibat utang banyak negara berkembang dan transfer sumber daya dari negara berkembang ke negara industri dalam bentuk beban utang, makin meningkatkan arti investasi langsung untuk negara berkembang.

5. Negara berkembang mengembangkan instrumen-instrumen untuk acuan investasi langsung kepada tujuan-tujuan pembangunannya (a.l. *joint venture*, pembatasan alih keuntungan) sehingga diharapkan dapat meringankan dampak negatif investasi langsung. Krisis utang telah melemahkan batasan investasi langsung dengan alasan politis.

6. Negara industri menyerahkan investasi langsung ke tangan prinsip-

insip politik pembangunan yang ditetapkan secara nasional dan internasional.

Kepustakaan: H. Hemberger, *Direkte Auslandsinvestitionen - Elemente des Entscheidungsprozesses und Erklärungsansätze*, Frankfurt u. Zürich 1974; D. Schmieder, *Auslandskapital und Entwicklungsstrategie*, Meisenheim 1977; OECD, *Investing in Developing Countries*, Paris 1978; P. Richter, *Der Kapitaltransfer in die unterentwickelten Länder. Theoretische und empirische Analyse seiner Wohlstandswirkungen*, Berlin 1979; D. Kebschull et al, *Wirkungen von Privatinvestitionen in EL*, Baden-Baden 1980; P. Juhl, *Direktinvestitionen in EL unter dem Einfluss politischer Risiken*, München 1983; H. Krägenau, *Internationale Direktinvestitionen*, Hamburg 1987.

dn
IPDC (*International Program for the Development of Communication*) Program Internasional untuk Pengembangan Komunikasi, disepakati 1980 dalam konferensi umum UNESCO ke-21. Tujuan: meningkatkan pembangunan infrastruktur komunikasi di negara berkembang dalam rangka sebuah tata informasi dunia baru, untuk itu memobilisasi serta menentukan bantuan internasional. Organ-organ: direktur, sekretariat, dan dewan antarnegara yang terdiri atas 35 wakil negara-negara anggota (dipilih dalam rapat umum UNESCO berdasarkan sebuah pembagian rata menurut prinsip rotasi). Dewan antarnegara muncul bersama pertama kali tahun 1981 dan mengkoordinasi program. Pembiayaan: bantuan awal dari anggaran tetap UNESCO sebesar 1,75 juta US\$ serta sumbangan (sukarela) dari negara industri dan negara berkembang (saat ini sekitar 5 juta US\$). Sampai sekarang IPDC menunjang terutama pembangunan kantor-kantor berita di negara berkembang, misalnya PANA

(kantor berita Pan-Afrika), dan ALASEI (kantor berita Amerika Latin untuk dinas informasi khusus). Namun, IPDC sampai kini belum dapat memaparkan diri sebagai forum koordinasi internasional untuk bantuan media internasional maupun sebagai instrumen pembiayaan multilateral.

mlk

IPPF (*International Planned Parenthood Federation*) Organisasi wadah dari organisasi swadaya keluarga berencana, London.

IPS (*Inter Press Service*) Didirikan tahun 1964 oleh jurnalis-jurnalis Amerika Latin dan Italia di Roma sebagai koperasi kantor berita. Berada di sekitar 70 negara dan memiliki koresponden tetap atau pekerja honorer. IPS menyuarakan sebuah tata informasi dunia baru, memberikan (dalam 10 bahasa) terutama mengenai proses-proses pembangunan di Dunia Ketiga dan bekerja sama dengan sekitar 50 kantor berita nasional (40 di antaranya di negara berkembang) serta organisasi internasional (UNDP, UNESCO, dsb.). Kantor berita ini mempunyai dua anak perusahaan: *IPS-Communications* memberikan konsultasi kepada kantor berita di negara berkembang mengenai teknologi komunikasi modern dan *IPS-Projects* menjalankan proyek-proyek kecil dengan tujuan mendemokratisasikan komunikasi internasional.

Kepustakaan: D. Salamanca-Orrego, *Inter Press Service (IPS) und die Süd-Süd-Kommunikation*, dlm.: Medium. 2/1987, hlm. 24 dst. **ah/mik**
Irak Irak kembali menjadi sorotan media dunia karena invasinya ke Kuwait 2 Agustus 1990 dengan alasan Kuwait mencuri minyaknya. Invasi

ini selain menimbulkan kecaman terutama dari dunia Barat dan para sekutunya, juga mengundang masuknya pasukan Barat ke dunia Arab dengan alasan membantu mengusir Irak dari Kuwait. Saat ini, AS yang merasa terancam kepentingan keamanan jalur minyaknya bersama tentara multinasional gabungan dari 28 negara menyerang Irak dengan tujuan membebaskan Kuwait tanggal 17 Januari 1991, setelah batas waktu yang ditetapkan Dewan Keamanan PBB agar Irak menarik diri dari Kuwait selambat-lambatnya tanggal 15 Januari 1991, tidak dipedulikan Irak. Dua minggu kemudian perang berakhir dengan kemenangan di pihak AS dan tentara multinasional.

1. Penduduk Irak (luas: 438.445 km²) tahun 1989 diperkirakan berjumlah 18 juta; dengan pertumbuhan tahunan 3,6% (1980-1989), sejak 1957 (6,3 juta) tumbuh lebih dari dua kali lipat. Akibat pelarian dari pedesaan sejumlah 7,2 juta penduduk lebih dari separo terpusat di daerah perkotaan (ibu kota Bagdad tahun 1985: sekitar 3,4 juta penduduk), di propinsi Bagdad sendiri hidup di sekitar 1% luas seluruh daerah 30%-40% penduduk, 75% di antaranya orang Arab, sebagian beraliran Suni sebagian lagi Syiah.

Kelompok minoritas nasional terkuat terbentuk dari sekitar 22% orang Kurdi yang puluhan tahun berjuang untuk kemerdekaan nasionalnya. Salah satu pemecahan masalah orang Kurdi di Irak kelihatannya mulai jelas dengan adanya "Manifesto Maret" 11 Maret 1970 yang menyepakati penyelesaian konflik secara damai. Namun,

perjanjian ini menemui kegagalan akibat interpretasi yang berbeda-beda dalam hal penyerahan otonomi. Tahun 1974 konflik pecah kembali; berakhir Maret 1975 ketika Iran dan Irak dalam Perjanjian Aljir menyelesaikan sengketa perbatasannya. Memang Iran wajib tidak lagi membantu gerakan otonomi orang Kurdi, tetapi tetap memberikan mereka tempat untuk pelarian. Hal ini menimbulkan eksodus sekitar 250.000 *pengungsi Kurdi dari Irak. Setelah berlangsung gencatan senjata dalam Perang Teluk Persia 20 Agustus 1988, Irak dengan menggunakan senjata kimia melakukan pembalasan terhadap orang Kurdi yang membantu Iran dalam Perang Irak-Iran dengan menghancurkan desa-desa mereka. Oleh karena itu, berlangsung kembali gerak pengungsian besar-besaran sekitar 110.000 orang Kurdi, yang sebagian besar mencari perlindungan di Turki.

2. Kekuasaan Osmania diakhiri dengan pembagian kerajaan di antara penguasa-penguasa Eropa pada awal abad ke-20. Penguasa kolonial Inggris memaksa menetapkan batas Irak yang ada sekarang dan memaksa ketergantungan struktural pembangunan melalui pengaitan ke pasar dunia yang kapitalistik, dengan akibat yang belum dapat diatasi sampai sekarang. Kepentingan utama Inggris adalah eksploitasi sumber-sumber minyak Irak dengan bantuan *British Petroleum* (BP) yang mengendalikan *Iraq Petroleum Company* (IPC). Pengawasan ini berlangsung sampai tahun 1972.

3. Di tingkat politik, pemberontakan nasional tahun 1958 dipimpin

Jenderal Kassem berhasil menarik keluar Irak dari pengaruh Inggris-AS dalam sebuah Pakta Bagdad yang anti-Uni Soviet. Karena kontradiksi ekstern dan intern serta tidak ada kesatuan politik, rezim Kassem menemui kegagalan. Tahun 1963-1968 berlangsung sebuah periode ketidakstabilan politik dengan rezim yang berganti-ganti. Dengan pengambilalihan kekuasaan oleh partai *Baath* (Bangun Kembali) yang sosialis-Arab (ASBP/*Arab-Socialist Baath Party*, Partai Arab Sosialis Baath) 17 Juli 1968 dipimpin Jenderal Hassan Al-Bakr, Irak berada kembali di jalan menuju stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. ASBP didirikan 1941 oleh intelektual-intelektual Suriah, Michel Aflaq dan Salah Bitar, yang berperan penting dalam gerakan pembebasan nasional di Suriah, Irak, dan negara-negara Arab lainnya. Mereka merekrut basisnya terutama dari lapisan penduduk menengah dan bawah, pekerja, petani, intelektual, dan tentara. Ideologi dan program ASBP yang mendukung organisasi partai hampir di seluruh negara-negara Arab, mempunyai tiga prinsip "kesatuan" (bangsa Arab dari Atlantik sampai Teluk Persia), "kebebasan" (pembebasan dunia Arab dari pewalian politik dan ekonomi serta pembebasan dari ketidakadilan sosial di dalam negeri), dan "sosialisme" (pengorganisasian kehidupan sosial berdasarkan keadilan sosial dan kerja sama semua kelas masyarakat). Setelah bertahun-tahun menghadapi kesulitan, ASBP berhasil menyelesaikan konflik-konflik utama di dalam dirinya, sebagian dengan penindasan

politik, dan memapankan diri sebagai faktor kekuasaan politik, ekonomi, dan sosial. Sampai sekarang kekuasaan pemerintah terus-menerus berada di tangan Front Nasional-Demokratis-Progresif yang dikuasai ASBP, yaitu sebuah koalisi kaum Baath, komunis, Partai Demokrasi Kurdi, dan berbagai kelompok nasionalis.

4. Nasionalisasi seluruh sektor minyak bumi (sejak tahun 1972) menentukan kelangsungan perkembangan sosial-ekonomi Irak. Perluasan sektor publik dan peningkatan penerimaan dari minyak akibat kenaikan harga minyak mentah, memungkinkan pelaksanaan rencana-rencana pembangunan dalam hal perubahan struktur ekonomi dan sosial yang sesuai dengan ideologi ASBP. Meskipun ingin memenuhi pengadaan sendiri dalam bidang pangan sampai akhir periode perencanaan tahun 1976-1980, pengeluaran untuk impor bahan pangan diperkirakan naik dari 677,3 juta US\$ menjadi 1,37 miliar US\$ tahun 1980. Perkembangan negatif ini ingin dihadapi oleh pemerintah di tahun '80-an melalui program pembangunan pertanian yang meluas, yang merencanakan a.l. penggandaan lahan melalui pembangunan sistem pengairan yang lebih besar dan peningkatan produktivitas melalui usaha besar pertanian dengan perusahaan-perusahaan pengolahan yang terintegrasi (kompleks agroindustri). Namun, hal ini tidak bisa tercapai karena berlangsung perang Irak-Iran. Justru yang terjadi sejak mulai perang adalah utang Irak sekitar 80 miliar US\$ terhadap Perancis (pemasok utama senjata) terhadap emirat-emirat nega-

ra Teluk karena harus membeli persenjataan dan penurunan ekspor minyak. Investasi untuk pembangunan instalasi-instalasi yang hancur diperkirakan sekitar 30 miliar US\$.

Produk pertanian terpenting adalah gandum, jawawut, beras, kapas, tembakau, terutama kurma (80% ekspor kurma dunia berasal dari Irak). Karena kekurangan tenaga kerja di semua bidang ekonomi dan besarnya jumlah remaja, titik berat politik pembangunan berada di bidang pendidikan dan perbaikan situasi hidup. Landasan untuk itu adalah kampanye pemberantasan buta aksara besar-besaran sejak tahun 1977. Dalam tahun pendidikan 1979/1980 angka keseluruhan murid dan mahasiswa naik hampir seperempat penduduk keseluruhan. Politik luar negeri Irak mengikuti nonblok dan berkembang setelah keluarnya Mesir dari Liga Arab dan negara-negara Arab pengeksport minyak (OAPEC), Irak menjadi pemimpin negara-negara Arab. Setelah Shah Iran jatuh, Irak ingin mengisi kekuasaan di Teluk Persia, melanggar perjanjian dengan Iran tahun 1975, yang dalam kasus demikian akan memanggil sebuah pengadilan, kepala negara Saddam Hussain 17 September 1980 menyatakan perjanjian tersebut tidak berlaku lagi. Keinginannya, mendapatkan kembali kedaulatan atas Schat-al-Arab, diperlihatkan oleh pemimpin Irak tersebut tanggal 23 September 1980 dengan melakukan serangan kilat ke Iran, yang hasilnya tidak seperti yang diharapkan Irak (Perang Irak-Iran). Ekonomi luar negeri Irak dalam tahun-tahun ter-

akhir adalah meluaskan hubungan terutama ke negara-negara MEE, tidak hanya dalam aspek politik karena MEE sejak tahun 1977 mempunyai sikap netral dalam Konflik Timur-Tengah dan Irak bergantung pada bantuan MEE untuk membangun kembali negaranya. Namun, hubungan ini kelihatannya terganggu dengan invasi Irak ke Kuwait. Dalam hal ini negara-negara ME jelas berada di posisi sekutu mereka, yaitu AS.

Kepustakaan: A. Kelidar (ed.), *The Integration of Modern Iraq*, London 1979; R. Nyrop (ed.), *Iraq. A Country Study*, Washington 1979; A. Alkazaz, *Die Entwicklung der irakischen Wirtschaft. Ba'th Strategie in der Praxis* (Mitteilungen des Deutschen Orient-Instituts, no. 16), Hamburg 1981; N. Wimmer, *Irak-Eine revolutionäre Demokratie: Das politische System, die Baath-Partei, die Kurden*, Innsbruck 1981; T. Niblock, *Iraq. The Contemporary State*, London 1982; P. Hünsele, "Irak", dlm.: *HDW II*, 6, Hamburg 1983, hlm. 267 dst.; M.A. Ferdowsi, "Irak", dlm.: P.J. Opitz (ed.), *Das Welflüchtlingsproblem. Ursachen und Folgen*, München 1988, hlm. 179 dst. **hpk/maf**

Iran Sementara dampak Revolusi Iran terhadap politik dunia dan perkembangan politik dalam negeri Iran setelah lebih dari 9 tahun sampai sekarang belum terselesaikan, telah dapat dipastikan bahwa di Iran sebuah strategi pembangunan yang tergantung total dari luar negeri, sangat represif dan mengabaikan kebutuhan penduduk, telah menemui kegagalan. Revolusi Iran dan apa yang terjadi sampai kini tidak saja memberikan pelajaran kepada para politikus, melainkan juga kepada para teoretikus pembangunan yang ingin memperlihatkan sebuah jalan baru untuk mengatasi ketergantungan dan

keterbelakangan negara-negara Dunia Ketiga.

1. Hampir separo luas Iran (1.648.000 km²), terdiri atas padang pasir. 19 juta ha ditutupi hutan, hanya 14,1 juta ha merupakan lahan pertanian, dan 5 juta ha terbenkakai. Kerusakan ekologi memaksa petani meninggalkan 1/10 dari lahan yang ada tahun 1975-1985. Di daerah pertanian hidup sebagian besar orang Iran dari pertanian (sekitar 37% angkatan kerja). 80% lahan diolah untuk gandum, sisanya untuk "tanaman India" seperti tebu, kapas, tembakau, bit gula, teh, dan biji-bijian minyak. Beternak juga merupakan bagian tradisional dalam pertanian Iran. Pertumbuhan penduduk yang cepat (pertumbuhan tahunan tahun 1987/1988: 3,9%) membutuhkan impor pertanian yang besar. Kecilnya investasi dalam sektor pertanian menyebabkan autarki yang diinginkan di bidang bahan pangan pokok tidak dapat dicapai dalam waktu dekat.

Meskipun ada kerugian-kerugian besar (kehancuran dalam Perang Irak-Iran, turunnya harga di pasar dunia), sektor minyak bumi dan gas bumi tetap merupakan salah satu cabang ekonomi terpenting. Iran selain Uni Soviet memiliki cadangan gas bumi terbesar di dunia; gudang minyak buminya termasuk yang terbesar di Timur Tengah. Kekayaan tambang terpenting lainnya adalah uran dan tembaga (1,5% dari cadangan dunia), nikel, besi, batu bara, dan magnesium.

2. Iran adalah negara dengan banyak suku bangsa. Di samping sekitar 50% orang Persia yang ter-

utama hidup di daerah Iran tengah dan selatan, minoritas terpenting adalah orang Aserbeijan Turkataris (barat laut), Kurdi (tenggara), Arab (barat daya), dan Turkmene (utara). Tahun 1989 Iran berpenduduk sekitar 53 juta jiwa (31,4 penduduk/km²); jumlah penduduk perkotaan meningkat pesat beberapa tahun terakhir akibat pe-larian dari pedesaan (tingkat urbanisasi tahun 1989: 56%, sedangkan tahun 1966: 38%).

Lebih dari 90% orang Iran beragama Islam, 95% di antaranya adalah pengikut aliran Syiah dan 3% Suni; sisanya adalah Kristen dengan pengikut gereja Armenia, Yahudi, Bahais, dan penganut agama Zaratustra Kuno.

3. Di abad ke-19 Iran merupakan daerah rebutan kepentingan Inggris dan Rusia dan menjadi setengah koloni Inggris sejak penemuan minyak di akhir abad ke-19 melalui eksploitasi terutama oleh perusahaan Inggris. Sejak awal abad ke-20 berlangsung lima peristiwa besar yang menggunakan sistem politik Iran sehingga mengubah sebagian atau keseluruhan.

- Revolusi "konstitusional". (1905–1911); sebuah gerakan demokrasi, anti-feodal dan anti-imperialisme, dilakukan oleh kekuatan-kekuatan liberal kaum bangsawan, imam, dan tuan tanah melawan monarki absolut.
- Kudeta oleh Reza Khan 21 Februari 1921, yang mengangkat dirinya sebagai raja dan mendirikan dinasti Pahlevi sampai dijatuhkan tahun 1979. Kudeta terjadi setelah berlangsung pasang kekuatan-kekuatan nasional-demokrasi yang dibantu situasi kemenangan revolusi Oktober di

Rusia. c. Penghapusan perjanjian-perjanjian yang menyangkut minyak bumi sebagai usaha untuk mendapatkan kemerdekaan nasional. Di bawah tekanan massa rakyat, parlemen (1951) harus mengesahkan nasionalisasi minyak bumi. Perdana Menteri Mos-sadegh, pemimpin front nasional, ingin melakukan reformasi mendasar, tetapi dijatuhkan tahun 1953 oleh sebuah kudeta yang dilakukan CIA (*Central Intelligence Agency*). d. Pelantikan rezim Shah, ditunjang oleh AS, membuka pintu untuk modal asing. Oposisi ditindas dan dikejar-kejar. e. Revolusi 12 Februari 1979 dan perubahan bentuk negara melalui referendum Maret 1979 menjadi Republik Islam Iran.

4. Strategi pembangunan Iran di-realisisi sejak tahun 1960 dalam sebuah Revolusi Putih dengan isi terpenting adalah reformasi pertanian dan industrialisasi. Reformasi-reformasi ini dilakukan untuk mencegah menajamnya ketegangan-ketegangan sosial, menciptakan basis kelas baru untuk kepentingan rezim, serta membuka pasar penjualan dan lahan investasi baru untuk modal asing. Reformasi pertanian dijalankan dalam tiga tahap (1962/1963, 1963–1967, 1968–1971). Sesuai dengan ketentuan UU, tahap pertama tanah dibeli dari tuan-tuan tanah, sebagian dengan harga terlalu tinggi dan dijual kepada petani dalam masa pembayaran cicilan 15 tahun dan bunga 15%. Dengan penjualan pabrik-pabrik industri milik negara, didapatkan pembiayaan program tersebut. Setiap tuan tanah berhak mempertahankan 1 desa atau masing-masing 1/6 dari 6 desa dan

mewalikan bagian-bagian selanjutnya pada anggota-anggota keluarganya. Keseluruhan perkebunan dan tanah-tanah yang diolah dengan mesin dikecualikan dari "pembagian". Secara keseluruhan, lebih dari 11.000 desa—sekitar 1/2 desa yang ada—dan 4,7 juta ha dari 8,2 juta ha padang rumput dikecualikan dari reformasi pertanian. Menurut angka-angka resmi, 1.246 juta dihabiskan untuk reformasi penggarapan, 57.000 untuk pembelian, dan 156.000 untuk pembagian. Sekitar 2,2 juta keluarga tani memiliki tanah antara 0,5 dan 1 ha, separonya kurang dari 1 ha. Tahap ke-3 ditandai oleh pembentukan perusahaan berdasarkan saham (tahun 1978: 93) dan koperasi (tahun 1975: 2.717). Untuk itu, 33.660 pemilikan petani diperoleh melalui pertukaran dengan saham yang berhak mendapatkan dividen, sedangkan dalam koperasi di masa datang hanya akan tertinggal 20% dari lingkaran mantan tani kecil dan pemegang saham sekarang. Karena banyak petani tidak mampu membeli tanah yang digarapnya untuk memasukannya ke perusahaan, sekitar 592.000 keluarga kehilangan posisi yang diperolehnya selama tahap 2. Selanjutnya, tahap ini ditandai oleh pembentukan perusahaan agroindustri besar yang menciptakan modal dan tuan tanah yang menjadi kaya akibat reformasi tanah, persyaratan-persyaratan yang menguntungkan untuk berinvestasi ke pertanian.

Mereka mendapat tanah-tanah subur dekat kota, sistem pengairan, keringanan pajak dan bea, serta subsidi-subsidi besar. Hal ini menyebab-

kan kehancuran lanjut petani yang tidak mampu bersaing karena kekurangan modal awal, peralatan yang sudah usang, dan kekurangan air. Akibatnya, pelarian dari pedesaan. Setiap tahun lebih dari 500.000 petani meninggalkan desa untuk mencari kerja. Menurut statistik sekarang, 60% petani hidup di bawah eksistensi minimum. Hasil-hasil pembangunan pertanian yang penuh risiko menjadi lebih jelas dengan angka-angka berikut: kontribusi produksi pertanian terhadap PNB turun dari 38% (1955) menjadi 23% (1967) dan turun menjadi 9,6% (1976). Tahun 1983: 12,6%.

Industrialisasi ditandai oleh perkembangan-perkembangan yang salah, terutama dalam tubuh perusahaan-perusahaan perakitan yang merakit bagian-bagian produksi yang hampir 80% berasal dari luar negeri. Selanjutnya, satuan-satuan industri yang terjadi tidak memiliki mata rantai-mata rantai yang diperlukan. 90% usaha industri merupakan industri kecil (dengan pekerja kurang dari 9 orang). Memang jumlah usaha kecil naik menjadi dua kali lipat (1966–1976), tetapi produktivitas menurun drastis. Usaha besar (dengan pekerja lebih dari 10 orang) yang merupakan 10% industri Iran, menghasilkan 65% dari nilai industri keseluruhan. Hanya 40 usaha (terutama dari bidang besi dan baja, petrokimia dan kendaraan) mempekerjakan lebih dari 1.000 pekerja. Satuan-satuan ini muncul hampir semuanya dengan modal asing atau sebagian campuran. Konsentrasi kuat secara regional (45% usaha besar berada di sekitar Teheran, jumlahnya meliputi 12% pen-

duduk keseluruhan), makin menguatkan kegagalan ini. Meskipun ada subsidi besar dari negara, kontribusi industri terhadap PNB tidak naik secara berarti, tahun 1977 hanya 12,4%. Selain sederet peraturan yang melindungi modal asing, dijamin 100% alih keuntungan. Oleh karena itu, tidak hanya jumlah perusahaan asing yang tumbuh (tahun 1964: 32; tahun 1976: 300), jumlah modal asing di Iran (terutama dalam industri perakitan dan perbankan) juga naik, dari beberapa ratus juta US\$ menjadi lebih dari 3 miliar US\$ (1977). Untuk kurun waktu setelah revolusi Islam, tidak ada data-data sebagai perbandingan struktur dan perkembangan ekonomi Iran.

Perdagangan luar negeri Iran sangat bergantung pada perkembangan dalam pasar energi dunia. Angka tertinggi sampai kini dicapai oleh ekspor tahun 1983 dengan jumlah 20,2 miliar US\$. Sampai tahun 1986 turun menjadi 9 miliar US\$, lalu dilakukan pembatasan impor: volume impor turun 43% dari tahun 1983 ke tahun 1986.

5. Struktur sosial Iran memperlihatkan kepincangan mencolok. Tahun 1987 ada 38,4% buta aksara (tahun 1975: 58,2%), tingkat buta aksara di propinsi Isfahan, Semnan, dan Teheran (kecuali daerah kota) mencapai 60%-70%, di ibu kota 18%. Di Iran ada 581 rumah sakit, 38% di antaranya ditangani swasta. Di Teheran saja ada 35% dari seluruh rumah sakit dengan sebagian besar dokter (keseluruhan 1 dokter untuk 2.682 penduduk; tingkat harapan hidup tahun 1985: 60 tahun).

Jumlah pengangguran sejak tahun '70-an meningkat kuat (tahun 1976-1983: tingkat kenaikan 67%, kemudian turun sedikit akibat perluasan perang Irak-Iran); kesempatan kerja kurang berjumlah tinggi dan beban-beban tambahan muncul karena tetap tingginya tingkat kelahiran dan naiknya jumlah lulusan sekolah tanpa tempat kerja.

Pemerintah Islam berusaha menungjung kelompok-kelompok yang dirugikan (kepincangan besar dalam distribusi pendapatan selama pemerintahan rezim Shah) melalui pembagian kerja untuk situasi darurat dan subsidi bahan pangan. Tahun 1986 sebanyak 21 juta orang Iran hidup di bawah garis kemiskinan.

6. Revolusi tahun 1979 mengubah secara prinsipil struktur politik Iran. Berbeda dengan harapan-harapan oposisi nasional-demokrasi ketika melawan rezim Shah, di bawah pimpinan revolusi Ayatollah Khomeini, kaum imam yang konservatif-tradisional mengambil alih kekuasaan politik dan menyingkirkan kaum imam yang liberal (Ayatollah Shariat-Madair, ditahan sejak tahun 1981).

Mereka mendominasi Dewan Revolusi yang didirikan Khomeini. Dewan ini tidak bisa dilawan politikus Bazargan yang borjuis-liberal yang mendapatkan mandat dari pimpinan pemerintahan. Untuk pengerjaan rancangan UUD Republik Islam Iran yang diputuskan melalui referendum Maret 1979, ditetapkan sebuah parlemen melalui pemilu. UUD yang diolah dan disahkan melalui sebuah referendum (pemilih menghadapi alternatif sebuah Republik Islam atau

mempertahankan monarki; sebuah penjelasan mengapa banyak yang menginginkan Republik Islam), merupakan pencerminkan komposisi parlemen ini. Ciri penting UUD ini adalah memberikan pimpinan agama (*walajate Faghib*) suatu kekuasaan absolut tanpa batas. Pimpinan ini yang setelah kematian Khomeini (1989) ditunjuk oleh sekelompok ahli (terdiri atas 83 imam Syiah tingkat tinggi yang dipilih rakyat), tidak saja merupakan panglima tertinggi militer, juga merupakan tingkat tertinggi yudikatif, melalui pemilu boleh menggantikan presiden. Hal ini pernah terjadi tahun 1980 dengan Presiden Bani Sadr (sejak tahun 1981 mendapatkan suaka di Perancis) yang dipilih tahun 1980 dengan suara mayoritas. Selain itu, pimpinan agama menunjuk anggota-anggota Dewan Pertahanan tertinggi dan menentukan 6 anggota dari 12 orang Dewan Pengawas (DP) dari kelompok imam. Enam anggota DP selanjutnya ditentukan oleh parlemen dengan usulan Dewan Pengadilan tertinggi yang dua anggotanya kembali ditunjuk oleh pimpinan agama. Tugas-tugas DP adalah meneliti UU yang dikeluarkan parlemen, apakah sesuai dengan UUD dan hukum Islam. Untuk itu hanya anggota-anggota imam yang mempunyai hak untuk mengambil keputusan. DP berhak menolak setiap UU yang dikeluarkan parlemen dan harus mensahkan pencalonan seseorang untuk pemilihan presiden.

Tindakan rezim baru terhadap oposisinya sejak pengambilalihan kekuasaan, memperlihatkan dengan tujuan apa dilakukan pembangunan

sistem kekuasaan baru yang absolut. Ini terlihat a.l. dalam UU pers yang baru-lebih represif dibandingkan di bawah rezim Shah—di mana hampir semua koran non-Islam atau yang tidak diawasi oleh para imam, dilarang. Oleh karena itu, organisasi-organisasi yang progresif dan revolusioner harus lebih bekerja di bawah tanah. Hanya partai republik Islam, organisasi para mullah yang ultra-konservatif, menikmati semua kebebasan. Aksi-aksi pembersihan yang dilakukan atas nama Islam menelan korban sekitar 15.000 jiwa sampai tahun 1982. Suku-suku bangsa minoritas mengalami represi yang sangat keras.

Tuntutan-tuntutan kaum minoritas nasional di Belushistan, Khusistan, Kurdistan, dan Turkeman Sahra, ditindas oleh tentara dan satuan-satuan Pasdara.

Akibat paling jelas dari revolusi adalah di bidang kultural, terutama dilakukan penghancuran sekularisme dan modernisme asal Barat. Perempuan diwajibkan kembali memakai cadar, larangan bagi perempuan untuk berenang di tempat umum, penutupan bioskop, dan islamisasi radio dan televisi. Revolusi kultural ini karenanya terlihat lebih bersifat religius dan bukan nasional karena elemen-elemen Persia Kuno dalam musik dan kebudayaan rakyat juga terkena. Termasuk radikal adalah pelaksanaan hukum Islam yang bertopang pada *kisas* Islam dan ancaman hukuman gantung jika melanggar salah satu dari sekitar 109 delik, yaitu mulai dari tanda-tanda dipengaruhi iblis sampai ke dugaan yang tidak benar

mengenai pemerintah. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika menurut *amnesty international* di paro kedua tahun 1981 saja sekitar 2.440 hukuman gantung telah diregistrasi oleh pemerintah Iran.

Perubahan mendasar juga terlihat di bidang pendidikan. Sementara kegiatan di sekolah-sekolah terbatas pada pengolahan kembali buku-buku sekolah dan pemecatan guru-guru yang tidak disukai, untuk universitas diberlakukan peraturan kuota. Tempat cadangan disediakan untuk mantan pelaku revolusi, mereka yang ikut berperang dan keluarga korban perang. Akibatnya, kurang dari 5% pendaftar tidak diterima masuk. Di tahun 1986 sekitar 557.000 calon (dibandingkan 300.000 di tahun 1984) lulus ujian masuk, tetapi hanya 10% lulus ujian. Lebih dari separo gagal menghadapi mata ujian agama yang merupakan ujian tambahan.

Walaupun berlangsung kampanye besar-besaran dalam politik dalam negeri dengan memakai bendera Islam, tetapi di sektor ekonomi dan sosial-politik hampir tidak terlihat adanya pendekatan-pendekatan tata ekonomi Islam. Jika melihat kegiatan-kegiatan *Jihad-e-Sasandegi* (Perang Jihad untuk pembangunan) yang dimulai sejak tahun 1979 dengan banyak propaganda dan modal tetapi sekarang menurun, nasionalisasi bank-bank dan industri, pengubahan Yayasan Pahlevi menjadi Yayasan Mostazafin. Reformasi tanah yang telah dicanangkan, tetap merupakan sebuah keinginan karena adanya perbedaan pandangan ideologis internal mengenai masalah pemilikan dalam

Islam. Meskipun secara resmi bunga dilarang, hukum Islam ini dijalankan belakangi dengan cara bank menarik ongkos administrasi 8%-12% untuk kredit dan nasabah ikut ambil bagian sekitar 8% dari keuntungan bank. Akibat tindakan-tindakan yang tanpa konsep ini, pemerintah sekarang menghadapi masalah-masalah pengangguran, inflasi (tahun 1981: 30%-40%/tahun, tahun 1982-1986: 12,5%/tahun), dan tingkat harga yang melonjak pesat terutama di bidang bahan pangan (menurut perkiraan tidak resmi tahun 1987: 65%-70%/tahun). Justru yang terakhir ini bisa menyebabkan kegiatan-kegiatan pertanian dan produksi kembali menjadi menarik, dengan demikian memungkinkan pemerintah-meskipun hanya untuk jangka pendek-bisa menyelesaikan masalah pengangguran dan urbanisasi.

Di bidang politik luar negeri saat ini, Iran lebih melakukan sebuah politik yang fleksibel, setelah pada awalnya karena alasan-lasan hubungan erat rezim Shah dengan Barat, terutama AS, melakukan provokasi konfrontasi dengan peristiwa sandera, tanpa berarti berpaling ke Uni Soviet. Jelas pecahnya perang dengan Irak (September 1980) berperan besar dalam sikap ini, juga adanya ketergantungan pemerintah Iran untuk memenuhi kebutuhan akan bahan pangan, mesin, senjata, dan suku cadang. Oleh karena itu, volume perdagangan luar negeri, terutama dengan Jepang dan Eropa Barat, naik, dengan jumlah lebih dari 1,4 miliar US\$ tahun 1987.

Setelah perang Irak-Iran berakhir, pimpinan pemerintahan pasti akan menghadapi masalah-masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang sebenarnya, yang lama telah diabaikan sehubungan dengan berlangsungnya perang.

Meskipun Iran dalam dua tahun terakhir mengambil kredit perdagangan dalam jumlah sedikit, kebutuhan pembiayaan yang diperkirakan berjumlah 80 miliar US\$ menghadapkan negara tersebut ke sebuah tantangan besar. Selain itu, sejak tahun 1979 konflik yang makin berkembang di antara "oligarki penguasa" mengenai reformasi tanah dan peranan ekonomi swasta di perdagangan luar negeri, belum terselesaikan. Sementara kelompok radikal menginginkan sebuah reformasi ekonomi yang meluas. Jika pemerintah harus mempunyai peran yang lebih besar dan mewakili kehendak pembagian pemilikan tanah yang luas kepada mereka yang tidak memiliki tanah, di lain pihak mullah yang konservatif, para pedagang, dan orang-orang Bazaar bersama kelompok pragmatis menginginkan politik pintu terbuka dan perdagangan luar negeri yang bebas. Sering kali pemimpin revolusi Khomeini meredam kasus ini dengan menguntungkan pihak kelompok pragmatis. Setelah kematiannya (3/4 Juni 1989, digantikan oleh Presiden Ali Chamenei), belum ada seorang pun yang bisa mempunyai otoritas politik dan religius sekaligus.

Kelompok apa pun yang berhasil menang, jelas bahwa situasi awal jauh lebih sulit daripada di awal revolusi. Selain kehancuran akibat pe-

rang dan berkurangnya penerimaan ekspor minyak, Iran tidak saja berhadapan dengan krisis ekonomi yang berkelanjutan, melainkan juga masalah ketergantungan yang tetap ada dan jumlah penduduk sejak tahun 1987 adalah 34 juta menjadi 48 juta. → Perang Irak-Iran, islamisasi/re-islamisasi.

Kepustakaan: F. Halliday, *Iran: Analyse einer Gesellschaft im Entwicklungskrieg*, Berlin 1979; U. Tilgner (ed.), *Umbruch im Iran. Augenzeugenberichte - Analysen - Dokumente*, Hamburg 1979; A.M. Behrawan, *Iran: Die programmierte Katastrophe*, Frankfurt 1980; Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung (ed.), *Religion und Politik im Iran*, Frankfurt 1981; Mir A. Ferdowsi, "Iran", dlm.: *HDW II*, 6, Hamburg 1983, hlm. 288 dst.; B. Nirumand, *Iran - hinter den Gütern verdorren die Blumen*, Reinbek 1985; D. Gholamasad, *Die Entstehung der "Islamischen Revolution"*, Hamburg 1985; H.G. Ebert/H. Fürtig/H.G. Müller, *Die Islamische Republik Iran*, Köln 1987; I. Motadel, *Iran - Von der Shah Dynastie zum Islamischen Gottesstaat*, Paffensweiler 1987.

māf

IRO (*International Refugee Organization*) Organisasi Pengungsi Internasional.

IsDB (*Islamic Development Bank*) Bank Pembangunan Islam, tujuan: membantu pembangunan ekonomis-sosial negara-negara anggotanya (tahun 1986: 42, seluruh anggota "OIC") serta persatuan negara-negara Islam sesuai prinsip-prinsip Islam. Pembayaran sampai tahun 1985: di atas 3,7 miliar US\$. → bantuan pembangunan Arab ke Afrika, UNIDO.

mik

islamisasi/re-islamisasi Sebuah istilah yang sangat singkat dan tidak persis untuk sebuah fenomena yang dapat diamati sejak pertengahan tahun '60-an di daerah Arab (terutama di Timur Tengah), tetapi baru peristiwa Iran sejak tahun 1978 men-

jadikannya pusat perhatian. Karena negara-negara Islam langsung terkena, lebih sesuai jika disebut revitalisasi Islam.

Ciri di sini adalah usaha untuk memperoleh jalan pembangunan spesifik tersendiri, seperti bentuk-bentuk yang dicari oleh negara-negara lain di Afrika, Asia, dan Amerika Latin (*sarvodaya* Gandhi di India dan Sri Lanka, *Jutsee* di Korea Utara, *ujamaa* di Tanzania, dan identitas Indio pra-Kolombia di Amerika Tengah dan Selatan). Pencarian akan identitas sendiri ini dimengerti sebagai penolakan terhadap kultur Eropa; dapat juga diinterpretasi sebagai reaksi terhadap krisis modernisasi dan merupakan bagian dari usaha-usaha emansipasi global yang makin terlihat jelas di negara berkembang. Variasi Islam sekarang muncul ke depan karena adanya ketergantungan besar negara-negara Barat ke daerah ini (pengadanan minyak).

Keinginan saat ini akan sebuah identitas sendiri bersandarkan penolakan terhadap kolonialisme dan neokolonialisme, tidak saja dalam sistem ekonomi, melainkan juga budaya, seperti diperlihatkan dalam penelitian mengenai imperialisme. Oleh karena itu, hal ini tidak saja muncul akibat situasi pemiskinan material massa yang berkaitan dengan asimetri-asimetri sosial-ekonomi di negara berkembang sehingga perlu memakai kembali definisi-definisi sosio-kultural. Sebab, dalam periode kolonialisme penetrasi ekonomi juga diiringi penetrasi kultural (misalnya penghapusan struktur pendidikan tradisional masa prakoloni-

al), tanpa dapat menawarkan massa sebuah identitas pengganti untuk jangka panjang.

Bassam Tibi—berlandaskan Durkheim—dalam kaitan ini menyebutkannya sebagai suatu anomie kultur. Anomie menandai "penghapusan kultur sosial yang menyebabkan pemisahan ekstrem norma dan tujuan sebuah kultur, serta kemampuan anggota-anggota kelompok untuk bersikap menurut norma-norma ini sesuai dengan situasi sosial masing-masing Jika struktur sosial dan budaya tidak disesuaikan satu dengan lainnya, sementara tindakan dan perilaku struktur sosial menjadi penata dengan tidak mengikutsertakan struktur budaya, timbullah ketegangan yang menyebabkan terhapusnya norma dan kekurangan norma" (Merton, 1957). Karena internalisasi norma-norma yang lebih unggul (Barat/kolonial) oleh anggota-anggota kultur yang kalah (negara berkembang/koloni) berkaitan dengan janji dan jerat, akan timbul penolakan terhadap norma-norma ini jika realitas janji-janji tersebut tidak memenuhi harapan; penolakan ini akan semakin tajam jika kelompok elite sebagai pelaku sistem politik yang terlembaga secara lemah dalam masyarakat berkembang, yang mengarah ke negara sekuler dan menerima bentuk-bentuk hidup baru, tidak berhasil mengaitkan massa ke dalam proses ini.

Revitalisasi Islam adalah variasi Islam dalam proses penolakan dan penyadaran kembali, seperti diperlihatkan Iran. Penjelasan religius-sosiologis tambahan untuk fenomena ini berasal dari kemampuan imanen

agama yang mentransformasikan dunia "yang tidak tertentu" ke "tertentu". Arti untuk negara-negara dalam tahap *take-off* dengan sebuah ambivalensi identitas, tidak boleh dipandang enteng.

Sebagai keistimewaan re-islamisasi dan persyaratan spesifik mendasar negara-negara Islam, harus diperhatikan kekuatan potensial Islam, sebagai ideologi politik begitu juga dalam kasus Iran, sebagai sistem pemerintahan politik-religius.

Revitalisasi konkret Islam di Timur Tengah dan awal mobilisasi Islam sebagai faktor politik sejak dari tahun 1965. Ketika itu Raja Saudi Arabia, Faisal, khawatir akan ancaman akut politik Nasser, memanggil sebuah Konferensi Islam, yang terrealisasi tahun 1969 dengan pertemuan di Rabat. Sampai sekarang, konferensi ini meliputi 42 negara anggota dari daerah Arab serta negara-negara Asia dan Afrika (→ OIC). Pada perkembangan ini yang menarik-tidak hanya pendanaan besar dari Saudi Arabia—adalah menguatnya kelompok-kelompok Islam seperti Persaudaraan Islam di Mesir dan Partai Islam di Pakistan.

Ciri lain untuk re-islamisasi adalah tumbuhnya kelompok konservatif-nasionalis dan imam-konservatif di antara gerakan ini, sulit dijelaskan dengan kekuatan yang menumbuhkan identitas pengertian "bangsa" untuk sebagian besar negara-negara ini: Islam menggambarkan identitas primer.

Secara keseluruhan, pencarian negara berkembang akan identitas sebagai usaha penciptaan ekuivalensi alternatif untuk mendapatkan kembali ke-

merdekaan kultural, terlihat semakin menjadi persyaratan penting serta penambahan untuk kemerdekaan politik dan ekonomi yang diinginkan (→ *self-reliance*, → pembangunan otosentris).

Kepustakaan: R.K. Merton, *Social Theory and Social Structure*, New York 1957, hlm. 175; D. Khalid, *Re-Islamisierung und Entwicklungspolitik*, Köln 1982; N. Luhmann, *Funktion der Religion*, Frankfurt 1982; E. Gellner, *Leben im Islam. Religion als Gesellschaftsordnung*, Stuttgart 1985; B. Tibi, *Der Islam und das Problem der kulturellen Bewältigung sozialen Wandels*, Frankfurt 1985. **maf**

Itaipu Proyek bilateral terbesar yang sampai sekarang disepakati dalam rangka kerja sama ekonomi Kelompok La Plata. Proyek ini merupakan perjanjian antara Brasilia dan Paraguay untuk membangun bendungan Itaipu di sebelah hulu Parana, bendungan terbesar di dunia. Setelah penjalanan penuh tenaga air (sekitar 14 miliar US\$) diharapkan mulai tahun 1989 dihasilkan 12,6 juta kWh setiap tahun, enam kali lipat dari bendungan Aswan di Mesir. Energi yang didapatkan dibagi dua untuk kedua negara tersebut. Karena Paraguay mempunyai cukup energi, ia menjual bagiannya ke Brasilia dengan persyaratan lunak. Selain itu, Paraguay mendapatkan penghasilan besar dari ekspor energi (mulai tahun 1989 setiap tahun 600 juta US\$). Turbin-turbin pertama ditempatkan akhir tahun 1982.

Kepustakaan: D. Nohlen/M. Fernandez Baeza/O. Bareiro (ed.), *Kooperation und Konflikte im La-Plata-Bekken*, Saarbrücken/Fort Lauderdale 1986; G. Kohlhepp, *Itaipu-Socio-economic and ecological Consequences of the Itaipu Dam*, Braunschweig/Wiesbaden 1987. **dn**

ITO → GATT.

ITU (*International Telecommunication Union*). Uni Telekomunikasi Internasional dari PBB.

J

Jalan Ketiga Konsep yang diperdebatkan secara politik dan ilmiah, bertolak dari asumsi bahwa negara berkembang dapat menapak Jalan Ketiga dengan tidak mencontoh pembangunan kapitalistis model negara industri Barat maupun mengikuti dogma strategi pembangunan negara-negara sosialis. Jalan Ketiga menginginkan sebuah cara baru secara kualitatif dan setiap elemennya tetap bebas. Ketidakjelasan pengertian ini diakibatkan karena dalam praktek, Jalan Ketiga mencakup semua usaha pembangunan alternatif yang membatasi diri dari pembangunan kapitalistis dan sosialis-tis. Konsep ini melihat dan benar-bahwa panutan pembangunan yang dipakai oleh masyarakat negara berkembang sampai kini berdasarkan legitimasi eropasentris, lalu mempostulasi kemungkinan pembangunan otonom yang lebih sesuai dengan persyaratan-persyaratan spesifik dan tradisi-tradisi yang ada di negara berkembang. Jadi, Jalan Ketiga sesuai dengan makna jati diri secara teoretis-ideologis yang dimajukan oleh masing-masing kelompok politik yang mempropa-gandakan sebuah jalan pembangunan alternatif. Misalnya, "Revolusi dalam Kebebasan" kelom-

pok Kristen demokrat (1964-1970) serta "Jalan Cile Menuju Sosialisme" (1970-1973), berkembang dari suatu pengertian jati diri untuk Jalan Ketiga.

Jalan Ketiga berkaitan dengan proses perubahan sosial-ekonomi dan ideal politik kemasyarakatan. Strategi-strategi Jalan Ketiga dalam proses perubahan sosial-ekonomi, ditandai oleh pelaksanaan perubahan secara damai dan reformistis-berbeda dengan penundukkan kekuasaan secara paksa. Jalan Ketiga dalam sistem politik dan ekonomi berisi prinsip-prinsip yang pluralistis: dalam ekonomi, berbagai sektor yang berbeda-beda akibat hubungan pemilikan atas alat-alat produksi, yaitu sektor negara, swasta, dan koperasi, harus berdiri berdampingan; dalam politik harus tetap berlaku pemisahan kekuasaan dan hak-hak dasar liberal. Tidak ada aturan-aturan pokok mengenai komposisi elemen-elemen (berapa banyak kapitalisme swasta, berapa banyak pasar, berapa banyak perencanaan, seberapa jauh pluralitas politik). Reformisme sulit untuk disatukan dalam satu pengertian. Juga untuk beberapa pendukung Jalan Ketiga, konsep ini dimengerti sebagai tahap peralihan ke

situasi-situasi sosialis, jadi mempunyai arti taktis.

Pelaksanaan strategi Jalan Ketiga dalam politik mengalami kegagalan (→ Cile, Peru), tidak harus berarti menentang konsep itu sendiri. Sebab, penyebab kegagalan-kegagalan tersebut lebih banyak terletak pada kesulitan dan tantangan yang ditemukan dalam strategi mengatasi keterbelakangan. Selain itu, ada acuan bersifat dogmatis dalam diri para teoretikus pembangunan yang erat berpegang kepada model-model yang dipaksakan oleh para adikuasa, dan karena kelemahan sebuah konsep yang tidak memuaskan para teoretikus.

Kepustakaan: H.C.F. Mansilla (ed.), *Probleme des Dritten Weges*, Darmstadt/Neuwied 1974; C. Leggewie, "Nichtkapitalistischer Entwicklungsweg - Alternative, Bluff oder Herrschaftsideologie?", dlm.: *HDW I*, 1982, him. 395 dst; M. Wölke, *Ein Dritter Weg für die Dritte Welt? Nachholende Nationenbildung im Schnittpunkt entwicklungspolitischer und hegemonialer Interessen*, Baden-Baden 1985.

Jalur Gaza → Konflik Timur-Tengah.

Jamaika Jalan pembangunan Jamaika sejak tahun 1980 ditentukan oleh IMF dengan konsekuensi negatif yang berat bagi penduduk. Kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh angin topan Gilbert tahun 1988 memperberat masalah ekonomi negara tersebut.

1. Jamaika (luas: 10.962 km²) terdiri atas 3 daerah: a. daerah pegunungan di pedalaman; b. perbukitan kapur dan dataran tinggi (*Cockpit Country*), endapan komoditas ekspor penting, bauksit, terbesar di dunia (cadangan antara 700-1.000 juta ton); c. dataran rendah di pesisir dan lembah-lembah di pedalaman memung-

kinkan pertanian karena iklim laut tropisnya. Struktur produksi yang berorientasi ekspor (perusahaan besar produsen gula, pisang, dan jeruk) menyebabkan sebagian besar bahan makanan harus diimpor.

2. Dikuasainya Jamaika oleh Inggris (1655), berakibat pengintegrasian pulau ini ke pasar dunia. Tiga tahap ketergantungan struktural memperlihatkan perkembangan lebih lanjut: a. tahun 1655-1833: Jamaika menjadi pusat produksi gula dan rum (semacam minuman keras) Kerajaan Inggris, dimungkinkan melalui pendatangan tenaga kerja murah dari Afrika (Jamaika merupakan pusat perdagangan budak di Karibia); b. tahun 1834-1952: kemunduran produksi gula dan dominasi produksi pisang yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan multinasional AS (*United Fruit Company*) dalam kurun waktu tertentu; c. sejak tahun 1952: selain ekspor komoditas pertanian (gula penghasil devisa nomor 3 terbesar), penambangan bauksit (oleh perusahaan multinasional Kanada dan AS) yang berkaitan dengan orientasi lebih lanjut ke Amerika Utara dan turisme (80% turis berasal dari AS) menduduki tempat pertama dan kedua pada penerimaan pemerintah.

3. Tahun 1989 Jamaika berpenduduk sekitar 2 juta jiwa. Kepadatan penduduk (216 jiwa/km²) adalah nomor 2 di Kepulauan Antila Besar setelah Puerto Rico. Tingkat urbanisasi tinggi (penduduk kota: 52%). Mayoritas penduduk kota hidup di ibu kota Kingston (tahun 1982: 100.637 jiwa). Konsekuensi kelebihan penduduk relatif ini adalah imi-

grasi (tertinggi tahun 1962: 39.000; di Inggris hidup 200.000 orang Jamaika), kemudian dibatasi melalui pembatasan-pembatasan imigrasi di negara-negara tujuan imigrasi. Komposisi penduduk adalah hasil masa kolonial, terbanyak kulit hitam (77%), kemudian suku Mulat (19%), India (1,2%), Cina dan kulit putih merupakan kelompok minoritas. Orang India, kebanyakan sekarang petani kecil, datang ke Jamaika sebagai kuli kontrak setelah ada pelarangan perbudakan (1833).

4. Perubahan basis ekonomi Jamaika sejak tahun '50-an memperluas kemungkinan kerja. Tahun 1985 masih tetap 21% pekerja bekerja di pertanian, yang sering membuka kesempatan kerja hanya pada musim panen sehingga sering menyebabkan kesempatan kerja kurang (→ kesempatan kerja). Struktur kepemilikan tanah ditandai keberadaan berdam-pingan usaha tani besar dan tani kecil. Usaha tani kecil muncul setelah berlangsungnya pembebasan budak. Sektor pertambangan, industri, dan energi tahun 1985 menyerap 21% angkatan kerja. Pertambangan, terutama bauksit, menyerap 1% angkatan kerja. Di sektor tersier bekerja 58%, sebagian besar di industri turisme. Pengangguran (tahun 1985: 26%) dan inflasi (tahun 1985: 30%) adalah masalah pokok negara tersebut. Distribusi pendapatan ditandai kepincangan-kepincangan regional, sosial, dan ras yang tajam (kesenjangan kota dan pedesaan, marginalitas sebagian penduduk kota, diskriminasi kulit hitam). Beberapa keluarga menguasai perusahaan-perusahaan besar dan bank-

bank, 10% penduduk menguasai hampir 1/2 dari pendapatan nasional.

5. Bahasa nasional Jamaika adalah Inggris, selain itu *Patois* (dialek). Di Jamaika berlaku wajib sekolah umur 6-15 tahun, yang tidak selalu dapat dijalankan karena kekurangan ruangan sekolah dan guru (tingkat melek huruf di atas 80%). Pelayanan kesehatan (pengadaan kesehatan oleh negara dan pengadaan dokter) biasanya tidak dipungut biaya. Sejak tahun 1966 berlaku asuransi nasional (tunjangan hari tua, tunjangan jika suami meninggal, tunjangan untuk anak yatim piatu, dan tunjangan kecelakaan). 75% penduduk beragama Kristen Protestan, 8% Katolik, selain itu Hindu dan Islam. Identitas Afrika berpengaruh besar di antara orang kulit hitam yang termarginalisir dan gerakan *Rastafarians*-nya.

6. Dua partai besar JLP (*Jamaica Labour Party*) dan PNP (*People's National Party*) di Jamaika yang merdeka sejak tahun 1962, setiap dua pemilu bergantian memegang kekuasaan negara yang dibangun menurut model Inggris. Tahap pertama pembangunan politik Jamaika ditentukan oleh strategi *industrialization by invitation* yang dijalankan oleh JLP maupun PNP, sedangkan kegagalannya menurut PNP terutama akibat ketergantungan neokolonial. Dalam rangka mensukseskan sosialisme demokrasi (asas-asas: cinta sesamanya seperti dalam agama Kristen, *self-reliance*) yang mulai dijalankan oleh Perdana Menteri Manley tahun 1974, dilakukan sederet reformasi sosial politik yang dibiayai melalui peralihan perusahaan bauksit yang asalnya mo-

dal asing menjadi *joint venture* dengan mayoritas saham pada Jamaika. Modal dalam negeri (pelarian modal, pergininya ke luar negeri lapisan atas yang kaya) dan modal asing (kemunduran investasi, boikot oleh turis AS), bereaksi dengan melakukan strategi destabilisasi. Usaha yang dilakukan tahun 1977-1980 untuk menggantikan hilangnya penerimaan negara karena tidak mendapat kredit IMF, gagal akibat penolakan pemerintah Manley yang tidak mau melakukan penyehatan ekonomi Jamaika dengan mengorbankan kelompok miskin. Krisis ekonomi Jamaika akibat utang luar negeri mencapai puncaknya: negara berada di ambang kebangkrutan, inflasi 30%, kerusuhan kekerasan merupakan kejadian sehari-hari. Pemilihan tahun 1980 JLP dipimpin Edward Seaga yang segera membuat semua kebijaksanaan untuk menjadikan negara tersebut dapat dipercaya dan menguntungkan untuk investasi langsung asing melalui politik pendekatan kepada pemerintah AS (Reagan) dan kebijaksanaan yang sesuai dengan persyaratan IMF untuk menstabilisasi ekonomi menurut contoh Puerto Rico (→ Puerto Rico). Setelah terjadi *boom* (1981/1982) akibat pertumbuhan permintaan konsumsi nasional, negara tersebut mengalami krisis neraca pembayaran terus-menerus sehingga dilakukan devaluasi mata uang dan pengetatan politik pengencangan ikat pinggang yang disyaratkan oleh IMF (kenaikan pajak, pengurangan pengeluaran jasa pemerintah dan pengeluaran-pengeluaran sosial, peningkatan harga melalui pemajakan impor). Masa depan

ekonomi Jamaika terancam kelangsungan pemindahan produksi bauksit ke tempat lain oleh perusahaan-perusahaan multinasional, terjadi juga pada masa pemerintahan Seaga yang sangat ramah pada pengusaha. Investasi-investasi besar yang diumumkan oleh AS tidak direalisasi, hanya jumlah turis AS memang meningkat setelah tahun 1980. Narkotika (terutama ganja) berkembang menjadi komoditas ekspor (ilegal) terpenting. Pada pemilihan parlemen tahun 1989, Manley (kepala pemerintah yang pernah terpilih) dari PNP menang. Ia berjanji untuk mengarahkan politik negara lebih kuat pada kepentingan nasional dan mengerem pengurangan anggaran sosial yang dituntut oleh IMF.

Politik luar negeri pemerintahan Manley tahun '70-an menduduki tempat atas di tingkat internasional sebagai wakil kepentingan Dunia Ketiga, dan Jamaika menjadi pendiri sederet organisasi regional negara berkembang (tahun 1973 *CARICOM*, tahun 1974 *IBA*, tahun 1975 *NAMUCAR* dan *SELA*). Negara tersebut di bawah Seaga dikembalikan pada fungsinya sebagai pos depan yang bergantung pada AS di Karibia. Jamaika ikut ambil bagian sebagai "tukang pukul" pada invasi AS ke Grenada tahun 1983.

Kepustakaan: T. Munroe, *The Politics of Constitutional Decolonization, Jamaica 1944-1962*, Kingston 1972; T. Lacey, *Violence and Politics in Jamaica, 1960-1970*, Manchester 1977; C. Stone, *Democracy and Clientelism in Jamaica*, Eastbourne 1981; R. Sturm, *Jamaica*, dlm.: *HDW II*, 3, Hamburg 1982, hlm. 343 dst.; R. Sturm, "Wahlen und gesellschaftlicher Wandel: Der Fall Jamaica", dlm.: D. Nohlen (ed.), *Wahlen und Wahlpolitik in Lateinamerika*,

Heidelberg 1983; M. Kaufman, *Jamaica under Manley*, London 1985; E.H. Stephens/J.D. Stephens, *Democratic Socialism in Jamaica*, Basingstoke/London 1986; A.J. Payne, *Politics in Jamaica*, London 1988. rs

Jibouti 1. Republik Jibouti merdeka sejak tahun 1977 (luas 21.783 km², tahun 1988 berpenduduk sekitar 480.000, di antaranya sekitar 160.000 hidup di ibu kota Jibouti) berciri ketegangan antarkelompok suku bangsa Afar yang meliputi 30% penduduk (daerah pemukiman utama: Etiopia) dan Issa (suku bangsa dari Somali; selanjutnya orang Arab yang mengendalikan perdagangan dan sekitar 10.000 orang Eropa), yang dahulu berada di daerah di luar tuntutan aneksi Etiopia dan Somalia. Sejak tahun 1979 berlangsung normalisasi hubungan ke Etiopia. Jibouti menjadi penting karena letaknya yang strategis di pintu Laut Merah (Perancis setelah kemerdekaan Jibouti membiayai pangkalan militer yang sangat modern untuk angkatan laut dan udara), sementara sebagai salah satu negara termiskin di dunia (hampir tidak memiliki kekayaan tambang, hampir tidak ada industri, di perkotaan 50% pengangguran, penduduk hidup mengembara dalam iklim yang sangat kering-panas), secara ekonomi bergantung pada penerimaan dari kereta api Addis-Abeba-Jibouti, pelabuhan (penyediaan perbekalan untuk kapal-kapal), dan terutama dari konsumsi 4.500 tentara Perancis (termasuk anggota-anggota keluarganya) yang ditempatkan di Jibouti, serta bantuan keuangan dari Perancis dan Saudi Arabia. Hampir seluruh perdagangan luar negeri terdiri atas impor (terutama dari Perancis dan negara-

negara ME lainnya; tahun 1987: impor 280,7 juta US\$, ekspor 45 juta US\$). Beban berat adalah masalah pengungsi yang mencari perlindungan dari perang-perang di Semenanjung Afrika.

2. Perancis di masa kolonial mengadu domba Afar dan Issa, masing-masing bersandar pada kelompok-kelompok etnis yang dianggap loyal. Oposisi politik (terakhir Issa) sampai pertengahan tahun '70-an sangat didiskriminasi. Partai-partai berdiri terutama dengan kriteria etnis, tidak lama setelah kemerdekaan kembali bersaing dan menimbulkan beberapa krisis pemerintahan. Presiden Hassan Guoled Aptidon makin berkuasa dan populer, tahun 1979 membentuk *Rassemblement populaire pour le progrès* dengan alasan bahwa persatuan nasional harus dikuatkan, dan tahun 1981 menjadi partai kesatuan. RPP dalam pemilihan tahun 1987 dengan 87% suara kembali memenangkan (semua) 65 kursi dalam Rapat Nasional; Presiden Guoled (90,3%) terpilih kembali.

Kepustakaan: B. Girrbach, "Djibouti", dlm.: *HDW II*, 5, Hamburg 1982, hlm. 67 dst.; R. Otayek, *Djibouti: construction nationale et contraintes strategiques*, Bordeaux (CEAN) 1985.

kz
joint venture Pemitraan usaha antara pemodal dalam negeri dan asing dalam modal usaha dari negara industri dan negara berkembang. Modal dalam negeri biasanya berasal dari negara, sedangkan dari asing berasal dari ekonomi swasta. *Joint venture* merupakan bentuk baru transfer modal yang berusaha menghentikan dampak-dampak negatif dari investasi langsung. dn

K

Kaledonia Baru → Kepulauan Pasifik.

Kamboja Sejak invasi tentara Vietnam (1979), berada di bawah pengaruh Vietnam. Januari 1989 Vietnam mengumumkan menarik semua tentaranya dari sana.

1. Lebih dari 50% (luas: 181.000 km²) berupa hutan. Kamboja memiliki cadangan ikan air tawar terbanyak di Asia Tenggara. Di musim hujan terbentuk daerah banjir yang meluas dari Sungai Mekong dan arus air keluar dari danau besar. Penumpukan lumpur yang subur memungkinkan bertanam padi secara intensif. Potensi pertanian dan perhutanan Kamboja sekarang ini mengalami pemiskinan yang luar biasa dengan ancaman bahaya kelaparan secara terus-menerus.

2. Rakyat Khmer tidak pernah terancam sedemikian rupa dalam periode sejarahnya yang bermula dengan Kerajaan Funan (abad ke-3 sampai 6) dan mencapai puncak budaya di abad ke-12 dan 13 ketika Kamboja menjadi penguasa di Asia Tenggara (Kerajaan Angkor). Periode-periode penguasaan oleh asing dimulai tahun 1431 dengan penaklukan Angkor oleh orang Thai dan pemindahan pusat kerajaan ke Phnom Penh. Tahun-

tahun berikutnya selalu terancam dari daerah barat dan timur, *de facto* Kamboja sekitar abad ke-19 berada di bawah kekuasaan ganda Vietnam-Thailand. Perjanjian protektorat yang dipaksakan dengan Perancis (1864) dan masuknya Kamboja ke *Union Indochinoise* (1887), memang meloloskan Kamboja dari ancaman Vietnam dan dapat mempertahankan Kerajaan Khmer, tetapi negara itu menjadi koloni Perancis. "Setelah masa pendudukan Indocina oleh Jepang dalam Perang Dunia II, Raja Norodom Sihanouk yang ditunjuk tahun 1941 oleh gubernur jenderal Perancis sebagai penguasa, tahun 1945 memproklamkan kemerdekaan. Ini merupakan sebuah aksi yang dibatalkan Perancis, yang masuk kembali setelah kapitulasi Jepang. Tahun 1949 Kamboja sebagai *associated state* dari Uni Perancis memang secara formal merdeka, tetapi Perancis memiliki kekuasaan tertinggi atas hukum, angkatan bersenjata, mata uang, dan politik luar negeri" (Kreile 1982). Kuatnya perlawanan anti-Perancis dan anti-monarki menyebabkan Sihanouk melakukan ofensif diplomatis-latar belakang kekalahan Perancis di Vietnam—dengan memproklamkan kemerdekaan

kaan. total Kamboja (1953). Tahun 1955 Sihanouk mengundurkan diri sebagai raja dan mendirikan *Sangkum Reastr Niyum* (Komunitas Rakyat Sosial) demi ayahnya. Sejak itu, semua kursi dalam Rapat Nasional, basis keabsahan baru, dimenangkan oleh rezim Sihanouk.

3. Proses perubahan sosial yang diterapkan Sihanouk, seperti nasionalisasi lanjut bidang-bidang ekonomi, tidak banyak mengubah polarisasi sosial yang kuat di Kamboja. Massa petani kecil yang sebagian besar dalam tingkat ekonomi subsistensi, berhadapan dengan sebuah elite birokrasi (termasuk keluarga raja) yang memiliki kekuasaan besar atas sebagian besar tanah. Manufaktur dan perdagangan sebagian besar dikendalikan oleh minoritas-minoritas etnis, terutama orang Cina (Kreile 1982).

4. Masalah ekonomi yang muncul semasa perang Vietnam menguatkan oposisi pihak kanan terhadap Sihanouk (*Khmer Serei*) dan pihak kiri (*Khmer Rouge*). Penggulingan Sihanouk Maret 1970 oleh kekuatan militer kanan dipimpin Lon Nol, mengakhiri politik netral Kamboja yang berhasil dilakukan selama sepuluh tahun dan menyeret Kamboja berpihak ke AS di masa Perang Indocina kedua: sampai tahun 1975 AS melemarkan 685.000 ton bom ke Kamboja. 700.000 korban jiwa dan 3,4 juta pengungsi merupakan neraca yang menyeramkan se usai perang. April 1975 ibu kota Phnom Penh (tahun 1985 sekitar 650.000 penduduk) jatuh ke gerakan pembebasan Khmer Merah, dengan demikian merupakan

penutup masa perang saudara yang berlangsung lima tahun. Sihanouk yang dalam pengasingan bersekutu dengan Khmer Merah (*Front Uni National Kampuchea*) kembali dijatuhkan—kali ini oleh bekas sekutu. Lalu, Khmer Merah dipimpin Pol Pot dan organisasi revolusioner, *Angka*, mempraktekkan suatu komunisme pertanian berdasarkan pembebasan radikal kota-kota dari penduduk, penghapusan sistem keuangan, kepemilikan pribadi, dan jasa publik, serta menjalankan ekonomi barter dan pembagian. Sekitar sejuta orang mati, di samping kehancuran ekonomi, merupakan hasil dari rezim yang menakutkan ini. Rezim Pol Pot berakhir Desember 1978 dengan invasi Vietnam dan pengambilalihan kekuasaan oleh Front Persatuan Kamboja untuk Keselamatan Nasional (*Front d'Union Nationale du Kampuchea pour le Salut National*) dipimpin oleh mantan Khmer Merah Heng Samrin. Perjanjian hubungan luar biasa dengan Vietnam Februari 1979 menyebabkan vietnamisasi menyeluruh politik dalam negeri Kamboja. Politik rezim baru di tahun-tahun pertama adalah kemandirian dalam produksi bahan pangan. Untuk itu ditunjang inisiatif petani dan dijamin adanya pasar bebas. Pengadaan kebutuhan sendiri memang belum dapat dipenuhi, jumlah panen padi berada di bawah tingkat sebelum perang. Sejak tahun 1980 berlangsung program pembangunan kembali dengan bantuan Uni Soviet, dengan tujuan mampu memproduksi sendiri kebutuhan pupuk, semen, dan kertas. Pemuliaan dan ekspor bahan mentah tanaman diharapkan dapat

menunjang neraca perdagangan luar negeri. Di bidang pendidikan (tingkat buta aksara tahun 1980: 52%) dan kesehatan (tahun 1984: seorang dokter untuk 36.400 penduduk) juga dilakukan usaha besar-besaran dan mendapatkan bantuan terutama dari organisasi-organisasi PBB. Secara relatif hal-hal ini-jika dilihat kehancuran-kehancuran akibat perang-menggambarkan keberhasilan besar dan memberikan pemerintahan Samrin dan Perdana Menteri Hun Sen yang ditempatkan Vietnam, kepercayaan dan dukungan rakyat Kamboja. Meskipun daerah-daerah penting berada di bawah kekuasaan Republik Rakyat Kamboja Samrin, di daerah-daerah perbatasan terdapat perlawanan dari Kamboja Demokrasi (KD) yang ditunjang oleh negara-negara Barat dan Cina serta mendapat pengakuan PBB sebagai satu-satunya perwakilan yang sah. Kelompok ini terdiri atas pengikut mantan pemimpin negara Sihanouk, gerakan gerilya Khmer Merah (keluar diwakili oleh Khieu Samphan dan Son Sann, sementara Pol Pot tetap bermain di belakang layar), dan KPLNF yang borjuis-anti-komunis di bawah Son Sann. Kekuatan koalisi yang sangat heterogen dalam KD ini bertopang pada angkatan bersenjata yang direkrut terutama dari kamp-kamp pengungsi yang dibiayai PBB sepanjang perbatasan ke Thailand, dan bertujuan menjatuhkan pemerintah di Phnom Penh yang setia kepada Vietnam. Meskipun Vietnam menang dalam Perang Indocina dengan melakukan taktik gerilya, sekarang harus menghadapi gerilyawan KD, tanpa keber-

hasilan besar. Adanya masalah-masalah ekonomi yang makin besar dan kebutuhan membiayai angkatan bersenjata sebanyak 150.000 kepala di atas tanah Kamboja, merupakan suatu hal yang mahal untuk Vietnam sebagai "pelindung". Akhirnya, pendekatan Uni Soviet dan Cina membantu pencarian jalan keluar masalah Kamboja. Diplomasi beras di awal tahun 1989 dan pernyataan Vietnam untuk menarik pulang tentaranya September tahun yang sama, memberikan kesimpulan Uni Soviet mulai menerima peran Cina yang tumbuh bersama sejarah sebagai penguasa di daerah Asia Tenggara. Jalan penyelesaian masalah Kamboja makin nyata dengan penandatanganan perjanjian damai 23 Oktober 1991 di Paris di antara pihak-pihak yang bertikai dan kembalinya Norodom Sihanouk, 14 November 1991, dari 15 tahun pengasingan di Peking.

Kepustakaan: W. Shawcross, *Schattenkrieg*, Frankfurt 1980; A. Barth/T. Terzani, *Holocaust in Kambodscha*, Hamburg 1981; P. Schier, "(K)eine Lösung für Kambodscha?", dlm.: *Jahrbuch Dritte Welt*, Hamburg 1983, hlm. 185 dst.; *ibid*, "Der Krieg um Kambodscha ein Konflikt ohne Ende?", dlm.: *APuZ* 37/1983, hlm. 33 dst.; M. Kreile, "Kambodscha", dlm.: *HDW II*, 7, Hamburg 1983, hlm. 345 dst.; O. Weggel, *Indochina: Vietnam, Kambodscha, Laos*, München 1987. rs/fg

Kamerun 1. Republik Kamerun yang terletak di perbatasan antara Afrika Tengah dan Afrika Barat (luas 475.000 km²) dengan perbedaan iklim-geografi yang besar (dari hutan tropis di selatan sampai daerah kering di utara) dan penduduk yang beraneka ragam, mencerminkan "Afrika kecil". Secara etnis, Kamerun terbagi lebih dari 200 kelompok bangsa dan

bahasa. Sekitar 30% penduduk tahun 1989: 12 juta, hidup di daerah utara, tempat Emirat Fulba Islam memerdekakan Kirdi (kafir), setelah kemerdekaan mulai kehilangan kekuasaannya. Di daerah selatan hidup kelompok suku Bantu dan Semibantu (maksimal 10.000 orang Pygmaen hidup di hutan-hutan tropis), Beti, Bamun, Bassa, dsb. Suku Bamileke ditakuti karena kekuasaan ekonominya berkembang pesat dan menyebar keluar daerah sukunya di sebelah barat daya. Ibukota Jaunde (1987) memiliki sekitar 700.000 penduduk, kota pelabuhan terpenting adalah Duala dengan sekitar 1,5 juta penduduk; hampir 70% penduduk hidup di kota-kota berpenduduk kurang dari 5.000 jiwa. Tahun 1987, 70% dari sekitar 3,6 juta angkatan kerja berada di bidang pertanian (14% di industri, 16% di sektor jasa).

2. Pertanian yang bertopang pada usaha keluarga kecil (hanya di daerah barat sebagian besar produksi dikendalikan *Cameroons Development Corporation*), merupakan sektor pertanian terpenting. Komoditas ekspor andalan adalah kakao, kopi, dan kayu (tahun 1987 sekitar 50%). Struktur pertanian di seluruh negara relatif terdiversifikasi (kacang tanah, kapas, dsb.), secara regional sebagian adalah monokultur karena alasan-alasan ekologis (→ ekologi). Pertanian di Kamerun tetap autarki; kurang dari 10% impor terdiri atas bahan pangan dasar. Jatuhnya harga pasar dunia untuk bahan mentah sejak tahun 1984 menimbulkan kerugian penerimaan, baik *cash crops* terpenting maupun minyak bumi (sampai akhir tahun

1987 mengalami penurunan penerimaan sebesar 60%), eksploitasinya dilakukan pertama kali tahun 1977 di daerah pantai dan tahun 1985 mencapai puncaknya dengan produksi 9 juta ton, dan sejak itu turun sedikit (tahun 1987: 8,35 juta ton). Sampai tahun 1984/1985 Kamerun termasuk negara di Afrika yang berkembang relatif baik (neraca perdagangan dan neraca pembayaran positif, tingginya utang hanya meliputi 20% dari PDB, beban utang hanya 8% dari nilai ekspor, cadangan di luar negeri sebesar 170 miliar CFA), sejak itu mengalami perubahan mendasar. Utang luar negeri tahun 1987 mencapai 3,5 miliar US\$ (32% PDB). Persyaratan IMF dan Bank Dunia untuk kredit selanjutnya bagi Kamerun adalah likuidasi dan swastanisasi perusahaan negara dan sektor-sektor paralel yang merugi (30% pangsa dalam PDB), bank-bank, pembekuan gaji pegawai negeri, pengurangan pegawai di sektor publik, penghapusan subsidi sosial, dsb. Untuk mengamankan pembangunan ekonomi (titik berat yang direncanakan: pembangunan sebuah industri pengolahan produk pertanian lokal) dan untuk "masa setelah era minyak bumi" (mulai sekitar tahun 2000), dalam tahun-tahun terakhir diistimewakan perluasan jaringan lalu lintas jalanan dan kereta api. Peran Perancis sebagai mitra dagang Kamerun di tahun '80-an memang terus menjadi relatif, tetapi tetap berjumlah jauh di atas separo jumlah nilai perdagangan luar negeri negara-negara MEE.

3. Kamerun yang sejak tahun 1884 merupakan daerah protektorat Jerman, setelah Perang Dunia I di-

bagi sebagai mandat antara Perancis dan Inggris, yang mendapatkan bagian lebih kecil di barat. Partai-partai yang terbentuk setelah Perang Dunia II membangun *Union des Populations du Cameroun* (UPC) bersifat nasionalistis dan bertujuan menyatukan Kamerun yang terbagi dua. Setelah peristiwa kerusuhan tahun 1955 UPC dilarang, Ruben Um Nyobe sebagai pemimpin melakukan gerakan bawah tanah. A. Ahidjo yang diangkat menjadi perdana menteri, konservatif dan berasal dari utara, bergantung pada militer Perancis untuk memerangi pemberontakan-pemberontakan UPC di masa setelah merdeka (1960) sampai pertengahan tahun '60-an. Referendum di Kamerun bagian Inggris tahun 1961 di utara memberikan mayoritas untuk penggabungan ke Nigeria, sementara di selatan rasa takut terhadap suku Ibo yang menguasai perekonomian menghasilkan votum (persetujuan) penggabungan ke Kamerun yang sudah merdeka. Setelah mendirikan *Union Camerounaise* (UC) sampai tahun 1964 yang secara *de facto* menjadi satu-satunya partai di Kamerun Timur dan berhasil melebur partai-partai yang masih ada di Kamerun Barat tahun 1966 kepada UC menjadi partai persatuan (*Union Nationale Camerounaise/UNC*). Ahidjo (1972) menyingkirkan kendala terakhir untuk dapat berkuasa sebagai presiden dengan menghapus negara bagian yang berdiri sejak 1 Oktober 1961 tersebut. Ahidjo, penindas oposisi yang ada, mundur secara mengejutkan November 1982 (penggantinya sesuai dengan UU adalah Perdana Menteri Paul Biya berasal dari

selatan). Namun, tidak lama kemudian ia ingin memakai posisinya sebagai ketua UNC untuk batu loncatan kembali ke kekuasaan. Berlangsunglah perebutan kekuasaan berdarah yang dimenangkan oleh Biya. Biya lalu membubarkan UNC dan mendirikan partai persatuan baru, *Rassemblement du Peuple Camerounais* (RPC). Persaingan dalam pemilihan di dalam partai dan pemilihan parlemen di tingkat nasional dan lokal (dengan perspektif jangka menengah sebuah sistem multipartai) mematahkan *establishment* politik dari kekuasaan yang ada dan menguatkan posisi Biya. Sampai sekarang masih tetap berlanjut adalah Kamerun dibagi tiga akibat perbedaan-perbedaan etnis dan geografis di bidang politik, yaitu daerah barat yang berbahasa Inggris, utara yang bernapaskan Islam, dan daerah selatan yang menguasai ekonomi. Kepustakaan: J.F. Bayart, *L'Etat au Cameroun*, Paris 1986; *Politique Africaine* 22, 1986 (Tema: *Le réveil du Cameroun*); I.W. Zartmann/M.G. Schatzberg (ed.), *The Political Economy of Cameroon*, Alderhot 1989. **kz**

kapitalisme periferi Dengan pengertian ini sedang berusaha diintegrasikan berbagai aspek dan hasil-hasil penelitian dari kerja teori *dependencia* ke dalam sebuah pendekatan ilmiah-teoretis. Menurut Dieter Senghaas, pokok untuk teori kapitalisme periferi adalah mengerti keterbelakangan sebagai "sebuah momen integral sistem ekonomi kapitalis, juga berarti masyarakat internasional, yang berkembang secara historis dan didominasi oleh metropol-metropol kapitalis". Pada tingkat ekonomi berarti bahwa perubahan struktur di negara industri sesuai dengan perubahan

di negara berkembang yang disampaikan melalui pasar dunia; perkembangan negara industri dan keterbelakangan di Dunia Ketiga adalah komplementer.

Dengan demikian, teori kapitalisme periferi berbeda dengan model teori modernisasi, dan berbeda dengan teoretikus-teoretikus *dependencia* yang memberikan "perkembangan keterbelakangan" (Frank). Ciri sebuah transfer yang makin tumbuh dari Dunia Ketiga ke negara industri, sedangkan perkembangan negara berkembang makin terbelakang. Brasilia merupakan contoh negara berkembang dengan dinamika ekonomi yang dapat terbaca dari pertumbuhan PNB. Namun, teori kapitalisme periferi menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi di Dunia Ketiga merupakan pertumbuhan deformis akibat pengaitannya ke pasar dunia kapitalistis: a. produktivitas relatif mengalami stagnasi dalam sektor pertanian yang tidak berorientasi ekspor (pengadaan sangat kurang); b. tidak ada stagnasi perkembangan produksi barang-barang konsumsi massa, berbeda dengan produksi barang-barang mewah yang sebagian berkembang (cermin struktur pendapatan); c. tidak ada stagnasi perkembangan sektor barang produksi mandiri yang menyediakan barang-barang perlengkapan untuk produksi barang konsumsi, produksi sela, dan produksi alat produksi (ketergantungan teknologi); d. hasil dari a-c: kurang adanya pengaitan balik sebuah produksi barang konsumsi massa termasuk sektor pertanian.

Sementara kapitalisme metropol berkembang di dalam sebuah struktur reproduksi yang koheren, mengikuti kebutuhan-kebutuhan yang muncul dari logika dan keseimbangan struktur produksi sendiri; kapitalisme periferi tidak mengikuti kebutuhan negara-negara Dunia Ketiga, melainkan kebutuhan negara industri. Konsekuensi sosial adalah heterogenitas struktural di negara berkembang. Untuk mengatasi hal ini dan keterbelakangan, Senghaas menyarankan Dunia Ketiga sebuah strategi disosiasi dari pasar dunia yang kapitalistis. Dengan demikian, memungkinkan bagi Dunia Ketiga untuk mengatasi ketergantungan struktural dan menapakkan sebuah jalan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhannya (pembangunan otosentris).

Kepustakaan: D. Senghaas (ed.), *Peripherer Kapitalismus*, Frankfurt 1974; *ibid*, *Weltwirtschaftsordnung und Entwicklungspolitik*, Frankfurt 1977; *ibid*, *Von Europa lernen. Entwicklungsgeschichtliche Betrachtungen*, Frankfurt 1982.

rs

Karibia 1. *Luas*: Bahama, sekitar 700 pulau, 20 dihuni dan 300 pulau karang dan batu-batu karang, 13.935 km²; Dominika, 790 km²; Barbados, 430 km²; Grenada, 305 km²; St. Christopher & Nevis (dinamakan St. Christopher Kitts, 168 km²; Nevis, 93 km²), 262 km²; Anguilla, 91 km²; Antigua & Barbuda, 442 km²; St. Lucia, 603 km²; St. Vincent & Grenadin, 389 km²; Kepulauan Turks & Caicos (Turks 6 pulau, 2 dihuni; Caicos 24 pulau, 4 dihuni), 430 km²; Kepulauan Cayman, 3 pulau: Grand Cayman, Cayman Brac, Little Cayman, 259 km²; Kepulauan Virgin, 174 km²; Montserrat, 84 km²; Guade-

loupe, 1.770 km²; Martinique, 1.102 km²; Antila Belanda, 989 km², 6 pulau: Saba (13 km²), St. Eustatius (21 km²), St. Maarten (34 km²), Aruba (190 km²), Bonaire (288 km²), Curacao (443 km²); Kepulauan Virgin-AS, 344 km², 3 pulau: St. Croix (212 km²), St. Thomas (83 km²), St. John (49 km²).

Akibat ekonomi kolonial, situasi Karibia sebagian besar berubah dan disesuaikan pada kebutuhan-kebutuhan monokultur pertanian. Sekarang, sebagian besar Karibia bergantung terutama pada ekspor hasil-hasil pertanian.

Dominika: pisang; Barbados: gula; Grenada: kakao, pisang, biji pala (1/3 produksi dunia); St. Christopher & Barbuda: gula; Nevis: kapas; Antigua: gula, kapas; St. Lucia: pisang; St. Vincent: gula, pisang; Turks & Caicos: binatang laut; Cayman: produk dari kura-kura; Virgin: ternak, ikan, sayur-sayuran; Montserrat: kapas, sayur-sayuran, jeruk; Guadeloupe & Martinique: pisang, gula.

Turisme, terutama dari AS (tahun 1986: 63%) makin penting bagi ekonomi. Selain turisme dengan kapal-kapal pesiar, tahun 1980-1986 angka pengunjung naik 22%. Negara-negara Karibia terkaya karena turisme adalah Bahama dan Kepulauan Cayman. Dari negara-negara Kepulauan Karibia terkecil hanya Curacao dan Aruba yang terindustrialisasi dalam jumlah berarti. Hal ini dikarenakan letaknya yang dekat dengan ladang-ladang minyak Venezuela sehingga cocok untuk tempat penyediaan kapasitas-kapasitas penyulingan minyak.

2. Hampir semua pulau di Karibia ditemukan Columbus dalam empat perjalanannya ke Amerika. Orang Spanyol meluaskan kegiatan ekonomi di daerah-daerah yang baru mereka kuasai, sebelumnya hanya terbatas pada penangkapan ikan dan berburu, melalui impor ternak (peternakan) dan tanaman berguna (tebu, pisang, jeruk). Orang-orang Indian asli dipaksa bekerja, melakukan perlawanan sengit dan tidak lama kemudian musnah. Lalu, mulai didatangkan orang-orang Afrika sebagai budak (abad ke-16). Spanyol berusaha memonopoli perdagangan dengan koloni-koloni ini yang membawa keuntungan, dengan cara melarang masuk kapal-kapal asing (kecuali Portugis) sehingga bermunculan bajak-bajak laut (Willis, Morgan) dan usaha-usaha penaklukan yang dilakukan penguasa-penguasa besar dari Eropa (di abad ke-17 Inggris menguasai: St. Kitts, Nevis, Jamaika, Bahamas, Barbados, dsb.; Perancis: Guadeloupe, Martinique; Belanda: Kepulauan Antila lainnya). Abad ke-18 merupakan zaman emas perdagangan segitiga: Afrika (budak)-Karibia (gula, dsb.)-Eropa. Penghapusan perbudakan (di koloni Inggris tahun 1833; Perancis tahun 1848; Belanda tahun 1863; Spanyol: Puerto Rico tahun 1873, Kuba tahun 1898), makin kuatnya persaingan gula-bit di Eropa, dan pemilahan tanah akibat pengambilan tanah oleh bekas budak (terutama di Jamaika, Trinidad, Kepulauan Windward), menurunkan peran Karibia dalam perdagangan dunia. Basis kegiatan ekonomi berubah dari pertengahan abad ke-19 sampai awal abad ke-20 oleh

kerja kontrak (indentur, sampai tahun 1917) dan spektrum hasil-hasil pertanian yang masih berorientasi ekspor. Sejak Perang Dunia II di beberapa daerah Karibia terbentuk struktur ketergantungan baru. Hal ini akibat penemuan kekayaan-kekayaan tambang (minyak: Trinidad, Curacao, Aruba; bauksit: Jamaika, Guyana) dan industrialisasi yang berkaitan (ketergantungan impor instalasi dan teknologi) serta turisme. Keterkaitan pada penguasa kolonial berlanjut dengan adanya dominasi AS (penetrasi melalui perusahaan transnasional, pengaruh budaya Amerika Utara, dsb.).

3. Arus pendatang tenaga kerja, Indian dan terutama Afrika, karena adanya ekonomi perkebunan, menyebabkan etnis-etnis ini menjadi mayoritas penduduk Karibia. Jumlah anak-anak dan remaja dalam jumlah penduduk keseluruhan, tinggi.

Jumlah penduduk: Bahama tahun 1987: 240.000; Dominika tahun 1987: 94.000; Barbados tahun 1987: 250.000; Grenada tahun 1988: 115.000; St. Christopher (tahun 1985: 48.000) – Nevis (12.000) – Anguilla (tahun 1987: 7.000); Antigua & Barbuda tahun 1988: 81.500; St. Lucia tahun 1986: 140.000; St. Vincent tahun 1986: 150.000; Turks & Caicos tahun 1987: 8.500; Cayman tahun 1987: 22.900; Virgin tahun 1983: 11.000; Montserrat tahun 1985: 12.000; Guadeloupe tahun 1987: 335.300; Martinique tahun 1987: 328.500; Antila Belanda tahun 1986: 270.000 (Aruba 68.141, Saba 1.062, Bonaire 10.087, Curacao 164.599, St. Eustasiun 1.483, St. Maarten 20.096); Virgin-AS tahun 1986: 110.000.

4. Setelah penghapusan perbudakan, kekuasaan politik dan ekonomi Karibia tetap berada di tangan kulit putih dan elite orang Kreol. Bagi orang kulit hitam dan kulit berwarna hal ini di abad ke-19 menjadi sebab mengapa mereka tetap menjadi pemilik tanah kecil, pekerja kota dan pedesaan yang tidak ahli dan dibayar murah atau penganggur. Dengan demikian, struktur sosial mengikuti secara ketat batas pemisah rasistis dan mengokohkannya secara kultural dan ideologis. Temuan kekayaan tambang, industrialisasi, dan kemerdekaan politik, terutama sekali sejak Perang Dunia II, mendorong kemunculan pekerja ahli dalam jumlah sedikit (penggantian kerja pertanian yang padat karya menjadi industri-industri padat modal), akademikus dan personal pemerintahan. Hal ini memungkinkan munculnya borjuasi kulit hitam dan Indian kelas menengah yang bersifat kebarat-baratan dalam proses pemapanan kultural dan politik. Dengan demikian, masalah perbedaan pendapatan dan cara berpikir rasis, tidak diatasi. Masalah utama penduduk Karibia tetap pengangguran, marginalitas yang makin tumbuh akibat arus masuk manusia ke sub-sub sentra dan paksaan melakukan emigrasi.

5. Bahasa, anutan kepercayaan, sarana pendidikan dan sosial di negara-negara Karibia diwarnai oleh masa lalu masing-masing dan masa kini kolonialnya. Selain sisa-sisa kultur Afrika dan Asia, di daerah pengaruh Inggris–dari perspektif sejarah–berlaku bahasa Inggris dan Protestan, di daerah pengaruh Spanyol dan

Perancis berlaku masing-masing bahasa tersebut dan agama Katolik.

6. Tidak ada daerah lain di bumi ini di mana terjadi pemilahan ruang kecil dalam teritorial dengan bermacam-macam status politik seperti di Karibia. Meskipun cita-cita kemerdekaan sekarang makin penting, kawasan ini tetap ditentukan oleh masing-masing penguasa kolonial dan intensinya.

1) Daerah pengaruh Inggris: selain 8 negara merdeka yang menjadi anggota *Commonwealth*, termasuk lima daerah koloni utama dengan administrasi internal yang terbatas (Anguilla, Cayman, Virgin, Montserrat, Kepulauan Turks & Caicos). Mayoritas pemerintah dalam eksekutif dibentuk oleh partai mayoritas dalam gremium yang mengeluarkan UU. Pimpinan partai diangkat menjadi pimpinan pemerintahan oleh gubernur yang dilengkapi a.l. dengan kekuasaan atas polisi. Keputusan akhir dalam masalah pokok politik (UUD, politik luar negeri, dan keamanan) tetap berada di tangan Inggris.

Negara-negara yang sudah merdeka (dari utara ke selatan): sejak tahun 1973: *Bahama*: parlemen dua kamar, senat terdiri atas 16 *House of Assembly* yang dipilih dari 49 anggota. Setelah pemilihan tahun 1987: Perdana Menteri L.O. Pindling (*Progressive Liberal Party*), selain *Free National Movement*. Sejak tahun 1981: *Antigua & Barbuda*: parlemen dua kamar, senat terdiri atas 17 orang yang diangkat dari 17 anggota Dewan Perwakilan. Setelah pemilihan tahun 1984: Perdana Menteri V.C. Bird (*Antigua Labour Party*), selain *Antigua*

Carribean Liberation Movement, *Progressive Labour Movement*. Sejak tahun 1978: *Dominica*: *House of Assembly* terdiri atas 21 anggota terpilih. Setelah pemilihan tahun 1985: Perdana Menteri Mrs. M.E. Charles (*Dominica Freedom Party*), selain *Dominica Labour Party*, *United Dominica Party*. Sejak tahun 1979: *St. Lucia*: parlemen dua kamar, senat terdiri atas 11 *House of Assembly* yang dipilih dari 17 anggota. Setelah pemilihan tahun 1982: Perdana Menteri J. Compton (*United Workers Party*), selain *St. Lucia Labour Party*, *Progressive Labour Party*. Sejak tahun 1979: *St. Vincent*: parlemen satu kamar terdiri atas 13 anggota terpilih dan 6 senator diangkat. Setelah pemilihan tahun 1984: Perdana Menteri J. Mitchell (*New Democratic Party*), selain *St. Vincent Labour Party* dan *United Popular Movement*. Sejak tahun 1966: *Barbados*: parlemen dua kamar, senat terdiri atas 21 anggota terpilih dan 27 *House of Assembly* diangkat. Setelah pemilihan tahun 1986: Perdana Menteri E. Sandiford (*Democratic Labour Party*), selain *Barbados Labour Party*. Sejak tahun 1974: *Grenada*: parlemen dua kamar, 15 orang senat ditunjuk dan 15 Dewan Perwakilan terpilih. Setelah pemilihan tahun 1984: Perdana Menteri H. Blaize (*New National Party*), selain *National Democratic Congress*, *Grenada United Labour Party*, dan *Maurice Bishop Patriotic Movement*. Sejak tahun 1983: *St. Christopher & Nevis*: parlemen satu kamar, *House of Assembly* terdiri atas 411 anggota terpilih dan 3 anggota diangkat. Setelah pemilihan tahun 1984: Perdana Menteri K. Sim-

monds (*People's Action Movement*) berkoalisi dengan *Nevis Reformation Party*, selain *Labour Party*.

2) Daerah pengaruh Perancis: *Guadeloupe* dan *Martinique* sejak tahun 1946 departemen Perancis. Mereka mengirimkan masing-masing tiga utusan ke Rapat Nasional Perancis dan 2 utusan ke senat. Spektrum partai seperti Perancis. Selain itu, ada sempalan-sempalan yang menyuarakan kemerdekaan kepulauan tersebut, misalnya *Patriotes Martiniquais*.

3) Daerah pengaruh Belanda: *Antila Belanda* merupakan federasi dengan administrasi intern sendiri, adalah bagian dari Belanda. Gubernur yang diangkat oleh Kerajaan Belanda untuk masa yang tidak ditentukan, mewakili pimpinan negara dan mengangkat pemerintah dengan memerlukan kepercayaan dari Dewan Perwakilan (*Staten*, 22 anggota). Pimpinan pemerintahan: D.E. Martina. Pada pemilihan tahun 1986 partai nasional mendapatkan 41,4% suara, Gerakan Antila Baru: 27%. Partai-partai di sebelah utara kepulauan tersebut berdasarkan masing-masing pulau dan kepentingannya. Dalam masalah kemerdekaan, ada perbedaan antara yang pro pemisahan dari Belanda (*Curacao & Aruba*) dengan pulau-pulau lainnya. Sejak 1986 Aruba memiliki status istimewa. Kemerdekaannya telah disepakati tahun 1996.

4) Daerah pengaruh AS: *Kepulauan Virgin-AS* (milik AS) memilih seorang gubernur yang bertanggungjawab kepada Kementerian Dalam Negeri AS. Ia mempunyai hak veto terhadap parlemen kepulauan itu (15

anggota) yang dilengkapi dengan kewenangan legislatif.

7. Sampai sekarang tidak ada usaha untuk melakukan politik pembangunan bersama semua negara Karibia. Di daerah pengaruh Inggris pun dilakukan usaha-usaha integrasi yang sebagian besar ditunjang oleh negara induk (Federasi Hindia Barat tahun 1958-1961: Barbados, Trinidad & Tobago, Grenada, Jamaika, St. Lucia, St. Kitt-Nevis, Montserrat, Antigua, Dominika, St. Vincent dan-a.l. dengan negara-negara ini-CARIFTA/*Caribbean Free Trade Area*, Zone Perdagangan Bebas Karibia tahun 1968, CARICOM tahun 1973, CDB tahun 1970: kedudukan di Barbados) dan pengaruh pasar dunia yang mendominasi selalu dipertanyakan. Modernisasi (minyak, gula, pisang, dsb.) yang terbatas pada enklave-enklave, dipercepat melalui pemberian keuntungan-keuntungan politik perpajakan, bea, dan lainnya berhasil dijalankan. Dengan adanya UU yang menguntungkan tersebut, Bahamas menjadi tempat yang disukai oleh perusahaan-perusahaan kotak surat.

Sektor-sektor padat modal yang dikuasai modal asing (jaringan hotel AS, perusahaan-perusahaan agrobisnis, perusahaan-perusahaan multinasional minyak), mendominasi perekonomian kawasan tersebut. Produktivitas pertanian tradisional rendah karena teknologi yang dipakai sudah usang. Pertanian tidak bisa memberi cukup makan kepada penduduk pedesaan yang makin tumbuh sehingga mereka pergi ke sub-sub sentra yang berkembang, lalu memperbesar situasi pengangguran dan yang termar-

jinalisasi. Karena produksi pertanian berorientasi pada ekspor, bahan pangan harus diimpor dalam jumlah besar. Harganya yang tinggi menguatkan kecenderungan inflasioner dan memperbesar kesenjangan tingkat konsumsi. Di seluruh negara-negara Karibia ada sebuah kecenderungan penajaman kontradiksi-kontradiksi sosial, yang di masa lalu pernah menimbulkan kerusuhan-kerusuhan sosial. Kawasan tersebut lalu muncul sebagai "halaman belakang" AS di tahun '80-an dalam dua pengertian: a. sebagai tempat transfer dan kadang-kadang tempat produksi obat bius untuk pasar AS serta merupakan kota tempat transaksi usaha-usaha keuangan yang berkaitan dengan perdagangan obat bius; b. sebagai tempat ofensif AS menghadapi komunisme di masa pemerintahan Reagan. Inisiatif Karibia yang dicanangkan oleh presiden AS setelah invasi Grenada untuk sebuah pembangunan ekonomi kawasan tersebut melalui pembukaan pasar AS untuk negara-negara kepulauan itu, tahun 1984 terbukti menemui kegagalan. Sebab, justru komoditas andalan negara-negara Karibia tertutup oleh aturan-aturan perdagangan bebas. Namun, beberapa negara berhasil mengubah diri menjadi tempat industri pengolahan yang mengeduk keuntungan dari upah tenaga kerja murah dan pembebasan pajak yang ditawarkan dengan akses bebas ke pasar AS.

Kepustakaan: F. Nuscheler, "Struktur-und Entwicklungsprobleme der Karibik", dlm.: *HDW II*, 3, Hamburg 1982, hlm. 196 dst.; M. Wöhleke, *Die Karibik im Konflikte entwicklungspolitischer und hegemonialer Interessen*,

Baden-Baden 1982; F. Ambursley/R. Cohen (ed.), *Crisis in the Caribbean, Kingston etc.*, 1983; R. Sturm, "Bahamas, Barbados, Trinidad und Tobago", dlm.: S. Mielke (ed.), *Internationales Gewerkschaftshandbuch*, Opladen 1983, hlm. 229 dst., 238 dst., 1094 dst.; A. Payne/P. Sutton/T. Thorndike, *The Rise and Fall of the Grenada Revolution*, London 1984; J. Thesing, "Wandel im karibischen Raum", dlm.: *APuZ* 13/1984, hlm. 37 dst.; C. Stone, *Power in the Caribbean Basin*, San Francisco 1985; M. Will, *Revolution or Order? The Politics of Change and Institutional Development in the Caribbean Basin*, Boulder (Col.) 1986; R. Tardanco (ed.), *Crises in the Caribbean Basin*, London 1987; F. Gewecke, *Die Karibik. Zur Geschichte, Politik und Kultur einer Region*, Frankfurt 1988.

rs
kartel bahan mentah Organisasi negara produsen bahan mentah (tidak hanya negara berkembang) bertujuan memberikan kekuasaan pada negara produsen untuk mengendalikan harga bahan mentah dan menaikkan hasil penjualan. Kartel ini menjanjikan negara berkembang pangsa yang lebih tinggi dalam pengolahan (diversifikasi vertikal) dan pemasaran bahan mentah.

OPEC merupakan contoh kesuksesan kartel bahan mentah. Setelah berlalu masa krisis minyak, para penawar berusaha menawarkan bahan mentah lainnya ke pasar dunia dengan model OPEC dan politik kartel yang sebagian ditunjang oleh anggota-anggota OPEC untuk fosfat, bauksit (*IBA), pisang (*UPEB), tembaga (*CIPEC), bijih besi, karet (*ANRPC), wolfram yang sebagian sudah dijalankan sejak tahun '60-an (*CIPEC). Untuk beberapa bahan mentah (kopi, kayu, produksi dari kayu) hanya terbentuk organisasi-organisasi regional. Kemampuan kartel bahan mentah tertentu terkait pada

persyaratan-persyaratan tertentu: homogenitas, kemampuan penggudangan, keterbatasan substitusi produk, tingkat monopol tawaran, dsb., yang tidak dimiliki bahan mentah lainnya. Selain itu, tidak ada solidaritas di antara negara berkembang-perlu dipikirkan bahwa kartel bahan mentah berkeinginan mengurangi perbedaan penerimaan beberapa negara berkembang dan negara industri, tetapi perbedaan ini justru makin besar di antara negara berkembang sendiri—begitu juga kesediaan negara industri untuk menyerah atas tekanan dari negara berkembang sehingga tujuan primer kartelisasi, yaitu peningkatan harga penjualan untuk bahan mentah yang diekspor, tidak tercapai. Mei 1978 didirikan sebuah organisasi wadah semua organisasi produsen dan eksportir bahan mentah (APEC). Piagam ini mengakui hak semua negara untuk menggabungkan diri dengan organisasi-organisasi produsen bahan mentah.

Kepustakaan: R. Hanisch, "Produzentenvereinigungen von Entwicklungsländern", dlm.: V. Matthies (ed.), *Süd-Süd-Beziehungen. Zur Kommunikation, Kooperation und Solidarität zwischen Entwicklungsländern*, München u.a. 1982, hlm. 187 dst.

dn
KAS (*Konrad Adenauer Stiftung*) Yayasan politik Jerman yang dekat dengan partai Kristen demokrat, didirikan tahun 1964. Terutama membantu lembaga, program, dan proyek-proyek pendidikan politik di negara berkembang. *Tujuan:* memperdalam kesadaran akan keadilan sosial di negara bersangkutan, meningkatkan minat swadaya dan inisiatif swasta, membentuk lapisan masyarakat luas yang mendapat informasi dan bertin-

dak secara demokratis, serta memperbaiki partisipasi politik dan mendorong pelaksanaan kepentingan kultural, sosial, ekonomi, dan politik. Mitra utama di negara berkembang: lembaga pendidikan politik, himpunan industri kecil dan madya, serikat buruh, lembaga penelitian, serta media dan organisasi yang aktif di bidang sosial. Tahun 1987 KAS membantu 200 proyek pembangunan di 70 negara berkembang, terutama di bidang pendidikan politik (25,4%), serikat buruh (14,6%), dan koperasi (13,6%). Secara regional tersebar: Amerika Latin (58,4%), Afrika (17,1%), dan Asia (15,6%). Tahun 1986 sekitar 50% (sekitar 68,4 juta) pengeluaran KAS untuk proyek-proyek pembangunan (tahun 1985: 63,4 juta DM). Tahun 1987 membiayai 1.687 beasiswa, di antaranya 241 untuk negara berkembang (terutama Asia). 90% anggaran KAS (tahun 1986: sekitar 142,3 juta DM) terutama berasal dari pemerintah Jerman.

Kantor Indonesia: Jl. Kemang Selatan 12/3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

bt
Kaunda, Kenneth Presiden Zambia dan ketua negara garis depan, lahir tahun 1924, setelah aktif dalam *African National Congress* Rhodesia Utara tahun 1958; tahun 1960 mendirikan gerakan kemerdekaan yang radikal bernama *United National Independence Party* (UNIP). Tahun 1964 adalah tahun kemerdekaan Zambia; Kaunda menjadi presiden menteri dan presiden negara. Dengan nama "humanisme Zambia", Kaunda mencoba merealisasi di Zambia jalan pembangunan yang diwarnai pemikiran-pemikiran sosialis (→ Zambia). Ia menyuarakan pembebas-

an utang untuk Afrika serta usaha-usaha tekanan ekonomi terhadap politik apartheid Afrika Selatan. Dalam konflik Rhodesia, mula-mula Kaunda berperan sebagai penghubung antar-pimpinan politik Afrika dengan pemerintahan kulit putih yang dipimpin Smith. Setelah usaha-usahanya menemui kegagalan, ia menunjang politik gerakan pembebasan Rhodesia/Zimbabwe melawan kekuasaan kulit putih, terutama melalui penyediaan pangkalan-pangkalan gerilya, sampai pemilihan Mugabe di Rhodesia (1980).

Kepustakaan: K.D. Kaunda, *Humanism in Zambia and a Guide to its Implementation*, Lusaka 1968.

ah
kebutuhan dasar, strategi pembangunan berorientasi pada kebutuhan dasar Pencipta formal konsep strategi pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan dasar adalah ILO, yang mengemukakan sebuah program aksi "Kerja, Pertumbuhan, dan Kebutuhan Dasar" dalam Konferensi Kesempatan Kerja Sedunia (Jenewa) Juni 1976. Sebenarnya, tuntutan untuk mengaitkan pembangunan ekonomi dengan pembangunan sosial telah banyak disuarakan oleh berbagai pihak sejak awal tahun '70-an (Laporan Pearson, D. Nohlen/F. Nuscheler, Deklarasi Cocoyoc, Bank Dunia). Tujuan utama strategi pembangunan berorientasi kebutuhan dasar adalah pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs*) untuk sebanyak mungkin manusia di dalam sebuah jangkauan waktu yang dapat diterima secara politis. Strategi pembangunan yang bertujuan pemenuhan kebutuhan dasar, meliputi dua komponen penting: a. penjaminan per-

engkapan minimal dengan barang konsumsi pribadi, terutama pangan, pakaian, dan rumah yang sesuai, serta peralatan rumah tangga dan mebel; b. penyediaan jasa publik mendasar, seperti pengadaan air minum, instalasi sanitasi, transportasi, pelayanan kesehatan, dan sarana pendidikan. Selain itu, strategi pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan dasar mengandung partisipasi politik dari kelompok-kelompok sasaran, yang dimengerti sebagai kebutuhan dasar nonmaterial. Kelompok sasaran strategi pembangunan ini adalah kelompok (manusia) suatu bangsa yang konsumsi individu dan/atau spesifik kelompok tidak mencapai nilai standar absolut atau relatif barang konsumsi kebutuhan dasar privat dan/atau umum. Kriteria batasan kelompok sasaran adalah ukuran dan struktur perlengkapan barang, jenis akses sumber daya, pembatasan pemakaian faktor-faktor produksi serta ciri-ciri sosial.

Sebagai kerangka definisi pembuatan konkret strategi pembangunan yang berorientasi kebutuhan dasar, dapat dikonsepsikan sebuah hierarki tujuan hidup yang elementer, di dalamnya dapat berlangsung spesifikasi dan kuantifikasi barang privat dan umum, tersedia untuk pemenuhan kebutuhan dasar sebuah kelompok sasaran serta memungkinkan akses kelompok sasaran kepadanya. Kebutuhan dasar yang dikemukakan konsep ILO secara prinsipil diakui ada di mana-mana, tetapi penetapan konkret tingkat absolut atau relatif dan/atau konsumsi barang privat dan/atau kolektif yang perlu dicapai melalui

strategi-strategi pembangunan berorientasi kebutuhan dasar, hanya dapat dibuat dalam masing-masing konteks sosial, kultural, dan politik yang ada dalam sebuah kelompok penduduk, selama kebutuhan (dasar) dimengerti sebagai perasaan kekurangan secara subjektif.


Strategi-strategi berorientasi kebutuhan dasar perlu mempunyai tujuan lebih daripada hanya "sedekah internasional" ataupun sebagai pemberian jaminan sebuah eksistensi minimum yang dapat diobjektifkan. Sebab, pemenuhan kebutuhan dasar bukan dimengerti sebagai tujuan akhir pembangunan, melainkan sebagai langkah (pertama) untuk pemenuhan kebutuhan kemanusiaan. Tujuan (antara) kebutuhan dasar—secara menyeluruh dimengerti sebagai tersedianya ketenteraman badaniah, jiwa, dan sosial dalam lingkungan yang wajar untuk hidup, dan ini kembali lagi dimengerti sebagai persyaratan penting untuk bertanggung jawab atas diri sendiri (*self-reliance) dan kemampuan partisipasi manusia—dihasilkan dari sebuah pandangan sosial-etis dan sosial-emansipatoris mengenai pembangunan. Namun, tujuan pemenuhan kebutuhan dasar sekaligus mempunyai sebuah karakter fungsional-instrumental, sejauh mana kesehatan, pendidikan, dan pangan, serta pemenuhan kebutuhan dasar lain dimengerti sebagai faktor-faktor persyaratan ekonomi dari produktivitas manusia.

Strategi pembangunan berorientasi kebutuhan dasar diajukan oleh berbagai organisasi internasional menjadi program—paling tidak untuk

sementara waktu—, meskipun ada juga yang hanya sebagai rumus kompromi (*UNICEF: Strategi untuk Jasa-Jasa Dasar, tahun 1976/1977; *WHO 1978: Kesehatan untuk Semua sampai Tahun 2000; *PBB: Strategi Pembangunan Internasional untuk Dasawarsa Pembangunan Ketiga, tahun 1980; Konferensi Khusus PBB untuk Negara-Negara yang Paling Sedikit Berkembang, tahun 1981). Penekanan konsep kebutuhan dasar dalam rancangan-rancangan politik pembangunan yang dibuat organisasi-organisasi internasional diterima oleh banyak pemerintah negara berkembang mulai dari sikap pesimis sampai menolak. Sebab, dalam konsep ini mereka melihat adanya usaha negara-negara industri untuk mengalihkan perhatian dari tuntutan akan sebuah tata ekonomi dunia baru dan mengalihangi program-program industrialisasi dalam negeri sendiri. Sejak pertengahan tahun '80-an, negara-negara donor terpenting dan organisasi-organisasi penyandang dana multilateral kembali membuang strategi pembangunan berorientasi kebutuhan dasar untuk kembali ke jalur konsep pembangunan yang berorientasi pertumbuhan. Berpaling dari orientasi kebutuhan dasar dengan alasan a.l. landasan teoretis yang kurang kuat dan kesulitan pelaksanaan.

Sejauh mana diolah implikasi-implikasi teoretis dan politik konsep kebutuhan dasar, makin menguat pula kelangsungan pertikaian politik pembangunan sekitar konsep ini. Sebab, strategi-strategi pembangunan berorientasi kebutuhan dasar tetap berkaitan erat dengan teori yang luas

kebutuhan dasar, strategi pembangunan ...

Hierarki tujuan elementer		Komponen-komponen sejumlah barang yang berorientasi kebutuhan dasar
Bertahan hidup pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar material dan nirmaterial		Barang yang memungkinkan ikut ambil bagian secara "rata-rata" pada kebiasaan konsumsi Partisipasi dalam pengambilan keputusan yang menyangkut situasi hidup dan kerja sendiri
Bertahan hidup produktif		Akses ke alat-alat produksi (terutama tanah) Pendidikan dasar fungsional Pangan tambahan Perlindungan terhadap penyakit-penyakit yang melemahkan
Bertahan hidup terus-menerus		Rumah yang memadai Perlindungan terhadap penyakit yang mematikan
Bertahan hidup saja		Pangan, air minum (masukan minimal fisiologis)

mengenai keterbelakangan dan pembangunan. Akibatnya, cara mereka memerangi miskin atau penghapusan defisit-defisit dalam pemenuhan kebutuhan dasar berbeda-beda sebagai tugas sosial-politik, pemerataan pendapatan, barang dan jasa, politik peningkatan pertumbuhan ekonomi dan/atau produktivitas. Selain jalan keluar secara teknokratis untuk pemenuhan kebutuhan dasar material yang dihasilkan dari rancangan-rancangan strategi, diikutsertakan juga partisipasi, kebutuhan-kebutuhan individual-kejiwaan, dan kultural ke dalam konsep.

Belum ada sebuah teori pemenuhan kebutuhan yang sesuai tempat dan cukup terdeferensiasi yang dapat memberi petunjuk-petunjuk tindakan secara langsung untuk pelaksanaan politik pembangunan; yang ada hanya pengetahuan rinci mengenai setiap aspek dari pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi dengan hubungan-hubungan kausalitas yang tetap tidak jelas. Strategi pembangunan berorien-

tasi kebutuhan dasar perlu tetap menjadi bagian dari pembahasan politik pembangunan karena setidaknya ia tetap terbuka untuk kemungkinan dan kepentingan pembangunan yang ditentukan sendiri. Sebab, menurut tingkat pengetahuan yang ada sekarang, tidak ada alasan-alasan fisik maupun teknik yang tertutup untuk pemenuhan kebutuhan dasar material bagi penduduk dunia di masa depan. Kepustakaan: Internationales Arbeitsamt (ILO), *Beschäftigung, Wachstum und Grundbedürfnisse*, Genf 1976; S.J. Burki/M. Ul Haq, "Meeting Basic Needs: An Overview", dlm.: *World Development*, vol. 9, 1981, hlm. 167-182; P. Streeten et al, *First Things First: Meeting Basic Human Needs in the Developing Countries*, Oxford 1981; W. Lütkenhorst, *Zielbegründung und Entwicklungspolitik. Das Grundbedürfnisziel in methodologisch-theoretischer Perspektive*, Bochum 1982; F. Nuscheler, "'Befriedigung der Grundbedürfnisse' als neue entwicklungspolitische Lösungsformel", dlm.: *HDW II, I*, Hamburg 1982, hlm. 332-358; F. Stewart, *Basic Needs in Developing Countries*, Baltimore 1985; P. Abel/H. Sangmeister, "Modellierungsprobleme des Grundbedürfniskonzeptes", dlm.: *Jahrbuch für Sozialwissenschaften*, vol. 37, 1986, hlm. 40-61. **hs**

kekerasan struktural Istilah ini dikembangkan oleh seorang Norwegia bernama Johan Galtung dalam konteks diskusi mengenai penelitian tentang perdamaian. Menurut Galtung, kekerasan ada jika manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga realisasi aktual somatis dan pemikirannya lebih kecil daripada realisasi potensialnya. Jadi, struktural merupakan penyebab untuk diskrepansi antara kemungkinan-kemungkinan manusia dan realisasinya. Galtung membedakan a.l. kekerasan individu dan kekerasan struktural. Kekerasan pertama disebabkan oleh tokoh-tokoh nyata, sedangkan kekerasan kedua tidak mungkin. Kekerasan terbentuk dalam sistem sosial, tercermin dalam hubungan-hubungan kekuasaan yang tidak sama, dan berakibat kesempatan-kesempatan hidup yang tidak sama (misalnya ketidakseimbangan distribusi pendapatan, kesempatan pendidikan, dsb.). Galtung memakai pengertian kekerasan struktural sinonim dengan pengertian ketidakadilan sosial. Analisis Galtung bertemu dengan kritik atas kapitalisme di negara berkembang. Ia mengabsahkan perjuangan melawan sistem-sistem yang secara sosial tidak adil (→ gerilya, dsb.), dan untuk seterusnya menolak usaha-usaha penindasan langsung. Kritik atas pengertian kekerasan struktural ditujukan terhadap tuduhannya secara umum bahwa sistem-sistem politik bersama lembaga dan bentuk-bentuk masyarakat memberikan dasar-dasar hubungan kekerasan, dan keyakinannya bahwa ketidakadilan sosial bersifat reformis, bisa diatasi

tanpa perubahan struktur secara mendasar.

Kepustakaan: J. Galtung, "Feudal Systems, Structural Violence and the Structural Theory of Revolutions", dlm.: *Proceedings of the International Peace Research Association, Third General Conference, Assen 1970*, hlm. 207 dst.; J. Galtung, "Gewalt, Frieden und Friedensforschung", dlm.: D. Senghaas (ed.), *Kritische Friedensforschung*, Frankfurt 1971, hlm. 55 dst.

rs

kelas negara Temuan-temuan mendasar diskusi pembangunan secara teoretis yang dikembangkan dari teori *dependencia*, tidak merasa puas dengan penjelasan mengenai keterbelakangan sebagai konsekuensi ketergantungan struktural negara berkembang dari pasar dunia. Dipertanyakan proses penyampaian politik dan administratif dari hubungan-hubungan ketergantungan ini serta dibahas hubungan antara negara dan pembangunan di negara berkembang. Karena negara periferi kini relatif memiliki otonomi dan ruang gerak pengambilan keputusan, perhatian ditujukan kepada pelaku dari proses pengambilan keputusan, tokoh-tokoh dalam aparat negara, dan fungsi-fungsi tertentu yang membedakan mereka secara kualitatif dengan pelaku di negara industri. Kelompok pimpinan pusat di negara berkembang menurut H. Elsenhans, adalah kelas negara sehingga tidak termasuk seluruh pekerja pada negara. Sesuai dengan definisi kelas dari Marx, kelas negara termasuk siapa "berdasarkan kekuatan jabatan ikut ambil bagian pada perampasan surplus produksi sebagai pendapatan aparat, pembagian surplus produksi pada konsumsi dan investasi, pada keputusan-keputusan investasi, pengendalian kerja, dan

memiliki tugas-tugas kepemimpinan dalam aparat negara, perusahaan-perusahaan negara dan dalam organisasi-organisasi politik dan sosial yang terintegrasi ke negara" (Elsenhans 1981, hlm. 122). Peralihan dari keanggotaan kelas negara ke "klien organisasi" dari pekerja lainnya yang bergantung pada kelas negara dalam sektor negara, berlangsung lancar. Lebih jelas daripada susunan personal dalam kelas negara adalah fungsi-fungsi mereka. Dalam situasi paksaan antara harapan sebuah tingkat hidup yang makin tinggi dan fakta proses pemiskinan di negara berkembang, memberikan lapisan-lapisan yang menjalankan negara suatu keharusan mengabsahkan privilese. Represi saja tidak cukup untuk menstabilkan terus-menerus. Para pemilik privilese merasa terpaksa untuk campur tangan dalam proses akumulasi modal dengan menetapkan prioritasnya sendiri dan melakukan investasi-investasi strategi pembangunan. Mereka melakukan hal ini tidak sebagai pribadi. Mereka tidak mempribadikan sumber daya negara sehingga ditolak pengertian borjuasi negara atau borjuasi administrasi yang dipakai sinonim untuk kelas negara oleh Elsenhans, melainkan merupakan kelas kaum birokrat yang secara kolektif merampas surplus produksi masyarakat. Hanya pemikiran politik, bukannya persaingan pasar yang memaksa mereka melakukan intervensi sehingga konsumsi mewah atau pendirian program-program mercu suar yang tidak berguna tetapi berguna untuk propaganda, sesuai dengan tujuan-tujuan mereka. Kerangka pengambilan kepu-

tusan mereka hanya dibatasi oleh keinginan akan privilese untuk dirinya di satu pihak dan desakan-desakan akan legitimasi yang muncul secara periodis di lain pihak.

Hal rumit dalam teori kelas negara terutama kurangnya kepekaan untuk mendeferensiasi struktur-struktur dan lembaga-lembaga politik sampai pembentukan subsistem di berbagai negara berkembang, bukan Afrika, sebagai hasil persaingan elite terbatas. Dalam kasus demokrasi di Amerika Latin ditemukan bahwa tidak lamanya kepala atau menteri sebuah pemerintahan serta berlangsungnya pertukaran elite tidak hanya di tingkat negara pada setiap pertukaran pemerintahan, merupakan penyebab ketidakstabilan politik.

Kepustakaan: T. Evers, *Bürgerliche Herrschaft in der Dritten Welt. Zur Theorie des Staates in ökonomisch unterentwickelten Gesellschaftsformationen*, Köln/Frankfurt 1977; H. Elsenhans, *Abhängiger Kapitalismus oder bürokratische Entwicklungsgesellschaften Versuch über den Staat in der Dritten Welt*, Frankfurt/New York 1981; R. Hanisch/R. Tetzlaff (ed.), *Staat und Entwicklung. Studien zum Verhältnis von Herrschaft und Gesellschaft in Entwicklungsländern*, Frankfurt/New York 1981; H. Elsenhans, "Staatklasse, Umverteilung und die Überwindung von Unterentwicklung. Versuch einiger nichtpolemischer Klarstellungen zum 'Ansatz von Harmut Elsenhans'", dlm.: *Peripherie* (1986), no. 22/23, hlm. 149-165. rs

Kelompok Brazzaville Didirikan di Brazzaville 1960 oleh wakil-wakil negara-negara bekas kelompok AOF dan AEF (kecuali Guinea dan Mali), Kamerun dan Madagaskar, tahun 1961 mendirikan *Organisation Africaine et Malgache de Cooperation Economique* (OAMCE) dan merupakan konferensi kepala negara dan

pemerintahan *Union Africaine et Malgache* (UAM), tahun 1964 dibubarkan. Pendahulu OCAM; merupakan inti Kelompok Monrovia yang konservatif.

fn
Kelompok Casablanca Didirikan tahun 1961 oleh Maroko, Mesir, Guinea, Mali, Ghana, dan pemerintahan suaka Aljazair, terutama untuk konferensi pemimpin negara, pendekatan-pendekatan untuk kerja sama ekonomi. Berhaluan progresif dan pan-Afrika.

fn
Kelompok Contadora Merupakan kelompok empat negara Amerika Latin: Kolombia, Meksiko, Panama, dan Venezuela (diberi nama menurut pertemuan perdana menteri pertama di Pulau Contadora, Panama, Januari 1983). Tahun 1985 terbentuk sebuah "kelompok penunjang" Amerika Latin (Brasilia, Argentina, Uruguay, Peru). Inisiatif Contadora berusaha tanpa hasil untuk menyepakati sebuah pengaturan secara damai Konflik Amerika Tengah. Rencana perdamaian dari Presiden Kosta Rika Arias (1987) berkaitan dengan Akta Contadora (yang terakhir tahun 1986). → Kelompok Delapan.

Kepustakaan: B. Bagley dkk. (ed.), *Contadora and the Central American Peace Process*, Boulder/Colorado 1985; S. Kurtenbach, "Frieden in Zentralamerika? Die Contadora-Initiative", dlm.: *Jahrbuch Dritte Welt* 1987, München 1987, hlm. 139 dst.

as/mik
Kelompok Dakar Organisasi yang didirikan tahun 1974 oleh sekitar 100 tokoh dari negara berkembang dan negara industri; merupakan forum diskusi mengenai kerja sama antara negara berkembang dan negara industri mengenai industrialisasi negara berkembang. Kelompok ini meng-

organisasi pertemuan-pertemuan bertema politik pembangunan.

dn
Kelompok Delapan Berdiri 1987, merupakan kelompok negara yang pada pertengahan tahun '80-an dalam Kelompok Contadora dan kelompok penunjang berusaha mencari jalan keluar Konflik Amerika Tengah: Kolombia, Meksiko, Panama, Venezuela, Argentina, Brasilia, Peru, dan Uruguay. *Tujuan:* mempererat kerja sama antarnegara anggota dengan basis konsultasi secara teratur dan bantuan untuk usaha-usaha integrasi (misalnya perdagangan interregional). Sesuai dengan prinsip-prinsip pendiriannya, Kelompok Delapan pernah membekukan keanggotaan Panama sampai tercipta kembali situasi yang demokratis.

mik
Kelompok La Plata Meliputi Argentina (34%), Bolivia (19%), Brasilia (17%), Paraguay (100%), dan Uruguay (80%), teritorialnya di palung La Plata sebesar pangsa-pangsa tersebut April 1969 menandatangani Perjanjian La Plata di Brasilia. Perjanjian ini diharapkan dapat menunjang perkembangan yang harmonis dan integrasi fisik kawasan itu, selain itu dianggap sebagai alternatif untuk usaha-usaha integrasi yang dilakukan ALALC.

Palung La Plata (*Cuenca del Plata*) merupakan muara Sungai Rio de la Plata (290 km) dan pertemuan sungai-sungai besar Parana (4.000 km), Paraguay (2.500 km), Uruguay (2.200 km), beserta anak-anak sungainya. Dengan 3,2 juta km² merupakan lembah sungai terbesar di dunia; saat ini hidup 80 juta manusia. Secara ekonomi sejak dulu merupakan

lahan-lahan pertanian untuk pertanian ekspor; melalui dorongan pertumbuhan ekonomi Brasilia yang berada di sebelah barat daya dalam hubungannya dengan tempat-tempat industri Argentina, palung tersebut juga merupakan kutub pertumbuhan industri Amerika Selatan. Sumber daya energi hidroelektrika dari sungai-sungai besar yang perairannya dipakai oleh pertanian dan lalu lintas juga sangat memberikan harapan.

Organ: Konferensi Menteri Luar Negeri (dengan kewenangan mengambil keputusan, bertemu setahun sekali); Komite Koordinasi Antarpemerintah CIC/*Combat Information Center* (eksekutif), kedudukan di Buenos Aires; Dana Pembiayaan FONPLATA, kedudukan di Sucre/Bolivia; komisi-komisi *ad hoc*, *Tripartitas*, untuk proyek-proyek konkret.

Tujuan politik integrasi dari perjanjian La Plata terbatas pada usaha-usaha integrasi fisik (bendungan, jalan raya, jembatan, perluasan jaringan komunikasi); perjanjian kerja sama yang kebanyakan bersifat bilateral terbatas pada proyek-proyek spesifik. Proyek-proyek binasional pertama adalah pemanfaatan arus untuk energi (Itaipu, Yacyreta, Corpus), rencana lainnya (misalnya jembatan di atas La Plata antara Montevideo dan Buenos Aires) sedang dalam perencanaan. Di awal tahun '80-an terlihat jelas kemunduran dalam kegiatan-kegiatan sistem La Plata, meskipun berlangsung hubungan bilateral maupun multilateral yang makin membaik di antara negara-negara anggota. Dalam pertemuan menteri luar negeri ke-15 (Desember 1984) ditemukan beberapa

pa kesulitan yang menghambat kerja sama. Dengan program aksi yang baru (dibahas dalam pertemuan menteri luar negeri ke-17 tahun 1988), diharapkan bisa mendapatkan bentuk baru: sistem praperingatan untuk bahaya banjir di kawasan itu, pengawasan bersama terhadap kualitas air, perlindungan terhadap sumber daya alami, lalu lintas kapal dan transportasi di sungai, serta kerja sama di daerah-daerah perbatasan. Sekaligus disepakati bantuan kepada FONPLATA; sampai sekarang merupakan lembaga paling berhasil dalam sistem La Plata.

Perjanjian La Plata juga membantu meluaskan hubungan di antara negara-negara anggota—meskipun tidak langsung—merupakan inisiatif Argentina, Brasilia, dan Uruguay. Sejak tahun 1986 makin banyak memiliki perjanjian-perjanjian kerja sama.

Kepustakaan: INTAL/BID, *El proceso de integración en América Latina en 1984*, Buenos Aires 1985; D. Nohlen/M. Fernández Baeza/O. Bareiro (ed.), *Kooperation und Konflikt im La-Plata-Becken*, Saarbrücken/Fort Lauderdale 1986; *Integración Latinoamericana*, no. 131, 1988.

dn/ra

Kelompok Monrovia Dinamakan menurut konferensi 20 negara Afrika tahun 1961 di Monrovia (Liberia). 12 negara anggota Kelompok Brazzaville sebagai inti, yang lain adalah Togo, Kongo-Leopoldville (Zaire), Nigeria, Sierra Leone, Etiopia, Somalia, Tunisia, dan Liberia. Merupakan pengelompokan konservatif, yang konsepnya berhasil dijalankan pada pendirian OAU. Lawan dari Kelompok Casablanca yang radikal.

Kelompok Paris Nama untuk negara-negara industri Barat penyan-

dang donor yang sejak tahun 1956 dalam rapat-rapat *ad-hoc* mengenai masalah-masalah utang negara berkembang mengorganisasi penjadwalan utang multilateral. Pembahasan itu mengenai kredit yang dijamin pemerintah.

dn
Kelompok Roma Organisasi yang didirikan tahun 1968 oleh tokoh-tokoh politik, ekonomi, dan budaya (tahun 1988 sekitar 100 anggota), terutama negara industri, kini terjebak dalam krisis orientasi akibat kerja lanjut mereka. Kelompok ini tahun 1972 muncul dengan publikasi sebuah studi "Batas Pertumbuhan" (model dunia) lebih dari 10 juta eksemplar, dijual dalam 37 bahasa, yang dibuat berdasarkan model simulasi komputer yang sangat sederhana dipimpin D. Meadows dari *Massachusetts Institute of Technology* (MIT). *Hasil:* umat manusia sedang menghadapi bencana ekologi jika tidak dicapai pertumbuhan nol penduduk dan produksi industri di seluruh dunia. Suatu keseimbangan sistem dunia dapat dilaksanakan secara optimal jika pertumbuhan penduduk sampai tahun 1975 dan produksi industri sampai tahun 2000 dapat dihentikan. Kritik terhadap ramalan, terutama terhadap saran-saran yang diajukannya, datang dari Dunia Ketiga (→ model Bariloche).

Laporan kedua "Manusia pada Titik Balik" (1974) berpaling dari tujuan pertumbuhan nol untuk masa mendatang. Laporan ini muncul terutama menentang pertumbuhan yang tidak terkendalikan dan menyarankan pertumbuhan terarah untuk daerah-daerah terbelakang.

Laporan ketiga "Akhir Pemborosan" (1976) tidak lagi membahas hasil-hasil perhitungan model dunia, melainkan meneliti kemungkinan-kemungkinan ilmu pengetahuan dan teknik untuk mengatasi kesulitan-kesulitan pengadaan dalam bidang energi, bahan mentah, pangan, yang diperkirakan akan muncul.

Laporan RIO (*Reform of the International Order*, Reformasi Tata Internasional) juga muncul tahun 1976 di bawah pimpinan penerima hadiah Nobel Jan Tinbergen dan 21 pakar. Laporan ini berkaitan dengan inisiatif negara berkembang untuk sebuah tata ekonomi dunia baru, yang untuk mencapainya studi ini ingin memberikan langkah-langkah pertama yang realistis. *Tujuan:* kehidupan bermartabat dalam kemakmuran untuk umat manusia keseluruhan di tahun 2000.

Kelompok ini melanjutkan kerja studinya, dari sikap pesimis menjadi penelitian kemungkinan untuk mengatasi ancaman-ancaman yang muncul. Kepustakaan: D. Meadows, *Die Grenzen des Wachstums*, Stuttgart 1972; M. Mesarovic/E. Pestell, *Menschheit am Wendepunkt*, Stuttgart 1974; D. Gabor/U. Colombo et al., *Das Ende der Verschwendung. Zur materiellen Lage der Menschheit*, Stuttgart 1976; J. Tinbergen (ed.), *Wir haben nur eine Zukunft. Reform der internationalen Ordnung. Der RIO-Bericht an den Club of Rome*, Opladen 1977; A. Peccei (ed.), *Das menschliche Dilemma*, Wien dll., 1979; A. Peccei/E. Pestell/M. Mesarovic dll., *Der Weg ins 21. Jahrhundert. Alternative Strategien für die Industriegesellschaft*, Genf/Tokyo 1983. **dn/bh**

Kelompok Sepuluh Merupakan kelompok negara industri Barat terpenting yang menjadi anggota Kesepakatan Kredit Umum dari IMF: Belgia, Jerman, Perancis, Inggris, Italia,

Jepang, Kanada, Belanda, Swedia; dan AS. Swiss masuk menjadi anggota tahun 1983, sehingga sering disebut Kelompok Sebelas. Untuk perluasannya, termasuk Denmark, Irlandia, dan Luksemburg. 1983/1984 Kelompok Sepuluh memutuskan menambah kredit kepada IMF untuk dibagikan selanjutnya, dari 6,4 menjadi 17 miliar US\$. *Special Drawing Rights*. dn

Kelompok 77 Gabungan negara-negara berkembang yang didirikan tahun 1964 (*UNCTAD I) dan diresmikan tahun 1967 di Aljir. Ketika itu kelompok ini beranggotakan 77, tetapi sejak 1 Januari 1982 mempunyai 125 anggota. Mereka bertemu terutama sebelum konferensi UNCTAD untuk posisi dasar bersama. Dari konferensi-konferensi Kelompok 77 dihasilkan impuls-impuls penting untuk politik negara berkembang terhadap negara industri. Konferensi terpenting adalah Februari 1979 di Tanzania yang mengeluarkan Perjanjian Arusha. Namun, kesatuan dan solidaritas Kelompok 77 makin dipertanyakan karena adanya kesenjangan yang makin besar antarnegara berkembang dan terutama antarkelempok negara berkembang (*OPEC, *LLDC, *MSAC, negara pedalaman, *NIC), yang juga mengancam kekuatan perundingannya sehingga sedang diusahakan penguatan Kelompok 77 sebagai organisasi.

Kepustakaan: K.P. Sauvart, *The Group of 77: Evolution, Structure, Organization*, New York 1981; ibid (ed.), *The Collected Documents of the Group of 77*, New York 1981 dst.; ibid, "Die Gruppe der 77", dlm.: V. Matthies (ed.), *Süd-Süd-Beziehungen. Zur Kommunikation, Koopera-*

tion und Solidarität zwischen Entwicklungsländern, München, dfl. 1982, hlm. 129 dst. dn

keluarga berencana Merupakan usaha-usaha politik kependudukan dari organisasi-organisasi nasional dan internasional yang bertujuan mengawasi pertumbuhan penduduk di negara berkembang. Keluarga berencana bertolak terutama dari proses kelahiran dan penurunan kesuburan secara terarah (pengendalian kelahiran). Mempertahankan tetap sedikitnya jumlah anak yang dilahirkan seorang ibu, tidak hanya bergantung pada pengetahuan mengenai kehamilan dan praktek-praktek pencegahannya yang mengatur jumlah anak. Konsep ini juga bergantung pada pandangan masyarakat yang bersangkutan, lapisan sosial, dan keluarga dalam masalah jumlah anak dan pembatasannya, yang berkaitan dengan tingkat perkembangan ekonomi sebuah negara berkembang. Selama ini keluarga berencana terbatas pada problematika pembangunan umum dan membutuhkan, sebelum menemui keberhasilan, kerja pencerahan dan persiapan propaganda. Metode-metode pengaturan kesuburan ditentukan oleh tingkat penjelasan: mula-mula pengunduran masa kelahiran berturut-turut, lalu alat-alat pencegah kehamilan (kontraseptiva) seperti kondom, pil antihamil, dan pencegah kehamilan intrauterus. Hampir di semua negara berkembang terdapat program-program keluarga berencana. Namun, kebutuhan besar akan keluarga berencana menghilang. Pada Konferensi Penduduk Dunia di Mexico City ditekankan arti posisi perempuan dalam keluarga dan masyarakat untuk keberhasilan keluarga beren-

cana dan politik kependudukan. Program-program internasional dilakukan oleh UNFPA yang mengeluarkan lebih dari 50% pengeluarannya untuk program-program pembangunan di negara berkembang.

Kepustakaan: C. Oswald, *Familienplanung als volkswirtschaftliches Investitionsproblem*, Diesenhofen (Schweiz) 1979; J. Schmid, *Bevölkerung und soziale Entwicklung*, Wiesbaden 1984.

dn
kemampuan absorpsi Juga disebut kapasitas absorpsi, secara umum berarti kemampuan penerimaan, pengolahan, dan adaptasi sumber daya yang tersedia oleh suatu negara berkembang (terutama pada hibah dan pinjaman modal, barang, tawaran proyek, dsb.). Dalam pengertian ekonomi nasional, kemampuan absorpsi adalah setiap volume dana (investasi) yang dapat dipakai secara efisien dalam kurun waktu tertentu.

Suatu masalah berat dalam kerja sama pembangunan adalah situasi umum kurangnya kemampuan absorpsi negara berkembang. Penyebab utama, keterbatasan permintaan dalam negeri (daya beli penduduk miskin yang kecil), masalah persaingan dan penjualan di sektor ekspor, teknologi padat karya yang sering dipakai (akan efisien dalam jumlah besar), serta di sisi tawaran kekurangan pelayanan jasa publik yang efektif, tenaga kerja ahli dan *know-how* (karena kekurangan devisa), hanya dapat dibeli secara terbatas dari negara industri. Di pihak kreditor masalahnya makin sulit terutama dalam bantuan keuangan karena sering tidak ada usaha-usaha komplementer yang mengiringi atau sulit ditentukan secara struktural dan waktu. Dengan

penggunaan sejumlah usaha yang telah dipertimbangkan (misalnya instalasi pabrik untuk pusat pendidikan kejuruan; proyek pengairan di pedesaan, pembangunan jalan raya untuk meningkatkan penjualan) sekarang ini diusahakan (terutama pembangunan pedesaan) mengurangi beban masalah.

Pada LLDC atau negara-negara miskin serupa, kemampuan absorpsinya paling kecil. Sesuai kelompok sasarannya, terutama diperlukan sekali usaha-usaha yang berorientasi ke kebutuhan dasar dan kemiskinan. Jika hal ini dilakukan dengan sejumlah usaha-usaha kecil (yang sering beraneka ragam), rendahnya kemampuan absorpsi dibebani lagi dengan masalah administrasi lokal (pendidikan kurang, korupsi, masalah struktural dengan birokrasi kreditor). Jika adaptasi yang efisien pada proyek-proyek berorientasi kemiskinan—justru terancam oleh kekuasaan elite nasional melalui sebuah perubahan sosial, masalah kemampuan absorpsi ekonomi dan administrasi tercermin dalam kurangnya kemampuan absorpsi lapisan pimpinan politik. Rendahnya kemampuan absorpsi terlihat dari sering adanya perbedaan besar antara volume dana yang disetujui (dari kreditor) dan dana yang diterima dan dikelola secara *de facto* (oleh negara berkembang). Dengan demikian misalnya organisasi pertanian IFAD (kelompok sasaran: petani kecil, si miskin tanpa tanah) sejak berdiri 1978 sampai akhir 1988 telah menyetujui dana sebesar 2,238 miliar US\$, tetapi hanya mencairkan 1,2 miliar US\$.

Kepustakaan: W. Stevens, *Capital Absorptive Capacity in Developing Countries*, Leiden 1971.

bg

Kementerian Kerja Sama Ekonomi Jerman → BMZ.

Kenya Dibandingkan sebagian besar negara Afrika, neraca perkembangan ekonomi dan politik Kenya sampai kini relatif sukses. "Faktor-faktor kritis untuk perkembangan lanjut berada dalam kombinasi pertumbuhan penduduk yang tetap tinggi, makin kurangnya tanah garapan dan makin terkonsentrasinya pemilikan tanah, perluasan kerusakan-kerusakan ekologi, peningkatan harapan sosial sebagai hasil politik pendidikan yang relatif berhasil, terus berlangsungnya perpindahan ke daerah perkotaan dan makin bertambahnya pengangguran di perkotaan seperti miskin absolut yang terus ada pada sebagian besar penduduk pedesaan" (Hofmeier 1982, hlm. 151).

1. Kenya (luas sekitar 583.000 km²) miskin akan sumber daya mineral, hanya 17% dari seluruh wilayahnya dapat diolah untuk pertanian (terutama "dataran tinggi putih" yang terletak di sebelah utara dan barat ibu kota Nairobi). Tanah yang dilintasi oleh lembah yang memanjang dari utara ke selatan dan dataran yang meninggi dari barat ke timur (Gunung Kenya 5.200 m), memiliki aneka ragam zone vegetasi dan iklim. Pemandangan dan fauna sejak pertengahan tahun '60-an menjadi penghasil devisa terpenting melalui turisme setelah kopi dan teh.

2. Pembagian regional sekitar 24 juta penduduk (1989) Kenya ditentukan oleh situasi iklimnya. Daerah terpadat adalah di tepi Danau Vic-

toria di dataran tinggi bagian tengah. Kemajuan di bidang kesehatan dan turunnya angka kematian pada angka kelahiran yang relatif konstan, menyebabkan pertumbuhan penduduk tahunan menjadi 3,9%. Menurut Bank Dunia, tingkat harapan hidup tahun 1965–1989 naik dari 43 tahun menjadi 59 tahun. Pangsa penduduk perkotaan (16,7%) makin besar karena makin banyak pelarian dari pedesaan dan menimbulkan makin besarnya disparitas pembangunan regional. 98,5% penduduk adalah orang Afrika yang terbagi dalam 42 kelompok etnis dengan paling sedikit 30 bahasa masing-masing dan lebih dari 100 dialek. Kikuyu (20%), Luo (13,8%), Kamba (10,8%), Luhya (13,1%), dan Kelenjin (10,8%) adalah suku-suku terbesar. Di antara mereka berlangsung konflik-konflik politik-tribalisme mengenai kekuasaan politik dan ekonomi. Bahasa nasional Kiswahili yang menjadi bahasa nasional dan bahasa resmi sejak tahun 1974 makin mendesak bahasa Inggris (bahasa elite) dan bahasa-bahasa Bantu. Jumlah penduduk India, Pakistan, Arab, dan Eropa makin berkurang akibat dijalankannya politik afrikanisasi sejak tahun 1967 yang ditujukan untuk menyingkirkan kaum minoritas tersebut. Di samping minoritas religius Islam dan Hindu, sebagian besar menganut agama Kristen dan agama-agama suku tradisional yang dipengaruhi Kristen.

3. Titik berat ekonomi Kenya (PNB/kepala 1989: 360 US\$) adalah produksi dan pengolahan hasil-hasil pertanian. Sebagian besar tenaga kerja berada di pertanian yang kontribusi-

nya ke PDB 1989 adalah 31% (tahun 1979: 34%).

Usaha tani kecil ekonomi subsistensi berhadapan dengan usaha besar ekonomi perkebunan yang padat modal dan berorientasi ekspor; sampai sekarang sebagian besar berada di tangan orang India dan Eropa. Dalam rangka politik afrikanisasi sejak tahun 1960 berlangsung reformasi pertanian dan program pemin-dahan orang-orang Afrika ke produksi pasar. Jagung (makanan pokok), gandum, dan ubi jalar diproduksi untuk pasar dalam negeri bersama-sama peternakan dan produksi susu yang berkembang baik, merupakan landasan pengadaan pangan. Musim kering dan politik harga tahun 1980/1981 mengganggu pengadaan sendiri yang biasanya baik sehingga dibutuhkan impor pangan dalam jumlah banyak. Teh, serat sisal, piretrum, dan kopi, merupakan produk ekspor terpenting. Baru-baru ini buah-buahan, bunga, dan sayur-sayuran juga diekspor ke Eropa dengan pesawat udara. Di antara negara-negara Afrika Timur, industri Kenya paling maju (tahun 1989: 20% dari PDB), didominasi usaha-usaha industri barang konsumsi. Ekonomi swasta ditunjang pemerintah dan pangsa negara bertambah dengan afrikanisasi perusahaan-perusahaan asing secara bertahap. Hal utama yang ditunjang adalah usaha-usaha menciptakan tempat kerja baru melalui metode-metode produksi padat karya. Kekurangan energi primer sampai sekarang merupakan faktor pembatas industrialisasi selanjutnya. Untuk itu harus diimpor listrik dari Uganda. Perluasan pem-

bangkit tenaga air Tana River dan pemanfaatan tenaga bumi diharapkan dapat memperbaiki situasi energi di masa datang. Pertambangan (soda, garam) tidak berperan besar di Kenya yang miskin akan kekayaan tambang. Mitra dagang terpenting Kenya adalah negara-negara yang pernah menjadi anggota Komunitas Afrika Timur (Tanzania, Uganda) (→ EAC), AS, Jepang, dan terutama ME.

Sejak beberapa tahun jumlah turis mengalami stagnasi (tahun 1980: 360.000; tahun 1984: 358.000) begitu juga dengan pendapatan kotor darinya (tahun 1980: 1.700 juta Shs). Kenya menjalankan sebuah *mixed economy* dengan orientasi liberal-kapitalis. Peluang investasi untuk investor swasta (dalam negeri dan asing), fungsi pengendalian negara dan ikut sertanya negara secara aktif dalam bentuk perusahaan-perusahaan. Infrastruktur berkembang baik. Faktor-faktor fisiogeografi serta pengaruh-pengaruh politik ekonomi (misalnya peran kunci suku Kikuyu dalam politik dan ekonomi), menyebabkan terjadinya disparitas pembangunan regional yang besar di Kenya.

4. Setelah orang Portugis di akhir abad ke-15 membangun pangkalan perdagangan, orang Arab di pantai timur berkuasa sampai munculnya pengaruh-pengaruh Inggris di abad ke-19. Penyelesaian pembangunan jalur kereta api dari Mombasa ke Danau Victoria menandai awal pencaplokan dalam negeri Kenya sebagai bagian dari daerah protektorat Inggris di Afrika Timur, masa itu tanah-tanah paling subur direbut oleh kaum pendatang Eropa. Petani-petani yang du-

lunya mandiri (Luo, Kikuyu) melalui kerja rodi, pajak, dan penggusuran berubah menjadi buruh tani di usaha-usaha pertanian milik orang-orang Eropa. Sampai akhir tahun '40-an kaum pendatang menguasai administrasi dan mengendalikan ekonomi karena mereka memiliki tanah, barang, tenaga kerja, teknologi produksi dan pasar. Setelah Perang Dunia I H. Thukus membentuk *Young Kikuyu Association* melawan perampokan tanah, paksaan memiliki kartu identitas dan kerja rodi (pajak pondok dan pajak kepala) di pertanian-pertanian "dataran tinggi putih". Setelah terjadi pemberontakan Mau-Mau (1952-1960), KANU (*Kenya African National Union*) mendorong dekolonisasi. Di samping KANU (Kenyatta, Odinga, Mboya) yang dijalankan orang-orang Kikuyu, Luo, dan Kamba berorientasi sentralistik, kelompok suku-suku kecil membangun KADU (*Kenya African Democratic Union*) yang berorientasi regional. Di bawah pimpinan Kenyatta, negara itu merdeka tahun 1963. Sayap konservatif di dalam KANU (Kenyatta, Mboya) berhasil berkuasa-dikuatkan dengan bubarnya KADU—mewakili politik modal asing yang pro-Barat dan menguntungkan pemilikan pribadi. Kenyatta berhasil membangun pengaruh *clan* keluarga dan basis politik (kelompok Kiambu di dalam Kikuyu), serta menindas dengan keras oposisi yang muncul (misalnya penangkapan Odinga, pembunuhan Mboya dan Kariuki).

Sejak Kenyatta meninggal (22 Agustus 1978), D.A. Moi yang tidak berasal dari elite kekuasaan Kikuyu

melainkan dari suku yang lebih kecil (Kalenjin), menjadi presiden dan ketua KANU. Di satu pihak dengan pengertian *Nyayo* (bahasa kisuhili, artinya tumpukan kaki), Moi ingin menandai keabsahan dan kontinuitas politik. Di lain pihak, ia berusaha menyingkirkan situasi-situasi buruk (korupsi, pembagian tanah ke pengikut partai) yang diwariskan era Kenyatta dengan sebuah politik populis. Pertikaian kekuasaan regional dan etnis serta kesulitan-kesulitan ekonomi yang makin tumbuh (masalah pengadaaan pangan), membahayakan stabilitas politik Kenya. Tahun 1982 sebuah kudeta yang dilakukan oleh sebagian angkatan udara, berhasil digagalkan; mencerminkan reaksi atas makin kerasnya haluan politik dalam negeri. Di bawah pemerintahan Moi, penangkapan dan pembunuhan lawan politik (misalnya pengeluaran Odinga dari partai kesatuan KANU) merupakan kejadian rutin. Perubahan UUD yang dilakukan Juli 1988 menguatkan peran presiden, yang di bulan Februari terpilih ketiga kalinya untuk masa jabatan lima tahun.

Politik luar negeri Kenya adalah menjaga hubungan baik dengan negara-negara industri Barat. Selain tuntutan daerah dari pihak Somalia yang tidak jelas, terutama sekali hubungan ke Uganda tegang (baku tembak di perbatasan akhir tahun 1987: kedua negara saling menuduh telah mendukung opsi di masing-masing negara). Peredaan ketegangan dalam hubungan Kenya ke Tanzania diharapkan melalui rujukan dengan Uganda. Kenya menganggap hubungan baik yang ada di antara Uganda dan

Libia sebagai sebuah ancaman terhadap rezimnya sendiri yang pro-Barat.

Kepustakaan: W. Leifer (ed.), *Kenya*, Tübingen 1977; D. Bergschlosser, *The Social and Economic Bases of Politics in Kenya. A Structural and Cultural Analysis*, Berkeley 1979; R.L. Collison, *Kenya* (Bibliography), Oxford 1982; R. Hofmeier, "Kenya", dlm.: *HDW II*, 5, Hamburg 1982, hlm. 131 dst.; ibid, "Kenya", dlm.: R. Hofmeier/M. Schönborn, *Politisches Lexikon Afrika* (cet. ke-4), München 1988. ah

Kenyatta, Jomo Dalam bahasa Kikuyu artinya tombak api, lahir tahun 1891, putra seorang petani suku Kikuyu. Tahun 1945 di Inggris bersama-sama Nkrumah mendirikan *Pan African Federation*. Sekembalinya ke Kenya ia dituntut ikut serta dalam pemberontakan Mau-Mau (1952-1960) dan tahun 1953 dipenjara selama tujuh tahun oleh Inggris. Sebagai pimpinan KANU (*Kenya African National Union*) setelah menang pemilu tahun 1963 (Kenya merdeka), ia menjadi perdana menteri Kenya. Sejak tahun 1964 menjadi presiden negara, tahun 1969 dengan melarang oposisi KPU (*Kenya People's Union*: Odingas dari suku Luo) ia menjadikan Kenya sebuah negara satu partai, dan sebagai presiden yang populer berkuasa secara otoriter melalui wewenang-wewenang khusus. Pengistimewaan anggota-anggota suku Kikuyu dalam pembagian posisi-posisi penting, menyebabkan makin tumbuh kritik terhadap Kenyatta. Sebagai sahabat Barat ia menjadikan Kenya sebuah negara yang paling stabil ekonomi dan politik di Afrika Timur. Kenyatta meninggal 22 Agustus 1978. ah

Kepulauan Bermuda → Karibia.

Kepulauan Cayman → Karibia.

Kepulauan Kapverde Pulau utama Sao Tiago, ibu kota Praia terletak di seberang pantai Senegal, luas 4.033 km², dan berpenduduk 335.000 jiwa (1986). Dengan PNB per kapita 460 US\$ (1986) termasuk negara berkembang termiskin. Pangsa bantuan luar negeri berjumlah 70% dari PNB.

95% penduduk menganut agama Roma Katolik. Selain berbahasa Portugis yang bercampur elemen-elemen Afrika, yaitu Criulo, bahasa resmi adalah Portugis. Penduduk terdiri atas suku bangsa Mulat (70%), kulit hitam (28%), dan kulit putih (1%). 55% tenaga kerja aktif di sektor primer. Ikan dan produksi ikan olahan meliputi 50% ekspor, selain garam, pisang, dan minyak dari tumbuh-tumbuhan. Mitra dagang utama adalah Portugis (60%), negara-negara ME lainnya, dan AS. Industri yang kurang berkembang (tahun 1985: 4% PNB) terbatas pada pengolahan produksi perikanan dan pertanian. Kendala pembangunan terbesar adalah kurang air secara akut karena termasuk di "Zone Sahel" yang sering menyebabkan bencana musim kering.

Sampai kemerdekaannya tahun 1975, Kepulauan Kapverde merupakan pelabuhan bongkar muat perbudakan yang dilakukan orang Portugis sejak tahun 1555. Ekonomi perkebunan (kakao, kapas, serat sisal) yang dilakukan tuan-tuan tanah Portugis dengan memakai tenaga kerja orang kulit hitam, makin tertelan oleh erosi tanah dan periode musim kering di pertengahan abad ke-19 sehingga banyak penduduk bermigrasi ke AS, Brasilia, dan Portugis. Setelah berlangsung pemisahan Kepulauan Kap-

verde dan Guinea Bissau (1878) yang selama itu di berada dalam satu administrasi gubernur Portugis, Kapverde di bawah rezim Salsar (1926) memulai sebuah politik transmigrasi baru. Selama pelaksanaan, banyak petani lokal dan tuan tanah kaya kehilangan tanah karena diambil oleh *Banco Nacional Ultramarino*. Dalam rangka penggulingan kekuasaan di Portugal (1974), gerakan pembebasan PAIGC (*Partido Africano da Independencia de Guine e do Cabo Verde*) yang didirikan kaum borjuis kecil Kapverde di Guinea-Bissau, sebagai partai persatuan berhasil memenangkan pemilihan pertama (Desember 1980) sejak kemerdekaannya dengan memenangkan 56 kursi. Tujuan PAIGC yang berkuasa di Guinea-Bissau dan Kepulauan Kapverde adalah federasi kedua negara tersebut, tetapi sebuah kudeta di Guinea-Bissau (1980) menyebabkan berhentinya usaha-usaha kerja sama tersebut. Tahun 1981 atas dorongan presiden negara Pereira (dikukuhkan tanggal 13 Januari 1986) melembaga sayap partai Kapverde menjadi PAICV (*Partido Africano da Independencia do Cabo Verde*). Partai kesatuan baru tersebut berasal dari gagasan Cabral, pada pemilihan Desember 1985 memenangkan seluruh 83 kursi. Program-program untuk memerangi erosi tanah dan reformasi pertanian (UU tahun 1982) memperlihatkan bahwa pemerintahan di bawah Perdana Menteri P. Pires menitikberatkan sektor pertanian dalam politik pembangunannya. Politik luar negeri kepulauan yang miskin, secara sosial terbelakang dan terkuras

habis secara ekologi (*LLDC, *MSAC, *Negara AKP, *CILLSS), adalah nonblok.

Kepustakaan: Chr. Sigrist, "Kapverdische Inseln", dlm.: *HDW II*, 4, Hamburg 1982, hlm. 218 dst.

ah
Kepulauan Marshall → Kepulauan Pasifik.

Kepulauan Pasifik 1. Di Kepulauan Pasifik (luas sekitar 985.000 km²) hidup sekitar 7,6 juta manusia, memiliki sekitar 1.200 bahasa dan lebih banyak lagi dialek-dialek. Seluruh kawasan ini meliputi sekitar 2.000 pulau di atas 8 juta km² dan memiliki status politik yang sangat berbeda-beda. Beberapa negara mini yang terbentuk setelah kemerdekaan pulau-pulau tersebut dengan letak yang sangat berjauhan, memiliki lebih sedikit penduduk daripada di sebuah ibu kota propinsi. Sebagian besar miskin, tidak mempunyai sumber daya atau satu produksi sekalipun; mereka tidak dapat mengembangkan ekonomi dengan kekuatan sendiri, membangun infrastruktur sosial dan material yang diperlukan untuk dapat memberi makan kepada penduduk yang tumbuh sangat pesat dan memberikan mereka pekerjaan; **export-economy-model* yang berlangsung di masa kolonial mengoyakkan struktur produksi dan bergantung pada gerak harga di pasar dunia; jarak jauh antarpulau menciptakan tambahan kerugian untuk persaingan. Alam juga merupakan faktor yang harus dipikirkan dalam strategi pembangunan. Bencana alam tidak saja selalu merusak ekonomi keseluruhan, juga invasi ke ekologi menjadikan manusia merusak lingkungan dan dalam kasus ekstrem membuat keseluruhan pulau tidak dapat dihuni

lagi (eksploitasi fosfat di Banaba dan Nauru). Jika negara-negara kecil di Kepulauan Pasifik ingin melepaskan ketergantungan dari kekuasaan bekas-bekas penjajah dan mempunyai pengaruh terhadap keputusan kekuatan besar yang dilakukan di daerahnya (Pasifik sebagai lahan percobaan persenjataan nuklir atau tempat pembuangan limbah atom), mereka harus mempunyai kerja sama regional yang makin kuat di masa datang.

2. Kawasan Pasifik secara etnis-kultural terbagi atas tiga daerah besar:

a. MELANESIA (Kepulauan Hitam, luas sekitar 956.000 km²): 1) *Fiji; 2) Kaledonia Baru (luas 19.058 km², penduduk tahun 1985: 145.000 jiwa, ibu kota Noumea: 60.100 penduduk, teritorial Perancis); 3) Vanuatu (luas 14.763 km², penduduk tahun 1986: 280.000, ibu kota Vila: 15.800 penduduk, merdeka sejak tahun 1980); 4) *Papua Nugini; 5) Salomon (luas 29.788 km², penduduk tahun 1986: 280.000, ibu kota Honiara tahun 1985: 26.000 penduduk, merdeka sejak tahun 1978); 6) Irian Jaya (luas 412.800 km², penduduk di atas 1 juta, menjadi propinsi Indonesia). b. MIKRONESIA (kepulauan kecil, luas sekitar 3.300 km², penduduk sekitar 364.000): 1) Kiribati (luas 886 km², penduduk tahun 1985: 63.843, ibu kota Bairiki tahun 1983: 2.100 jiwa, merdeka sejak tahun 1979); 2) Guam (luas 549 km², penduduk tahun 1986: 110.000, ibu kota Agana, tahun 1983: 5.000 jiwa, teritorial AS dengan administrasi sendiri); 3) Belau (luas 487 km², penduduk tahun 1985: 14.800, ibu kota Koror, tahun 1980: 7.685 jiwa, merdeka sejak tahun 1981); 4)

Mikronesia Serikat (luas 473 km², penduduk tahun 1981: 115.000, ibu kota Kolonia, tahun 1980: 5.550 jiwa, merdeka sejak tahun 1982); 5) Mariana (luas 473 km², penduduk tahun 1987: 18.000, teritorial AS dengan administrasi sendiri); 6) Kepulauan Marshall (luas 181 km², penduduk tahun 1984: 34.900, ibu kota Uliga: 7.600 jiwa, tahun 1988 masih daerah perwalian AS yang hanya diakui oleh AS); 7) Nauru (luas 21,4 km², penduduk tahun 1983: 8.042, ibu kota Yaren, merdeka sejak tahun 1968). c. POLINESIA (luas sekitar 25.000 km², penduduk sekitar 1,58 juta jiwa): 1) Kepulauan Cook (luas: 240,6 km², penduduk tahun 1981: 17.754, ibu kota Avarua, berasosiasi ke Selandia baru, administrasi sendiri); 2) Pulau Paskah (luas: 165 km², penduduk 1.800 jiwa, kota utama: Hangeroa, teritorial Cile); 3) Polinesia-Perancis (luas 3.521 km², penduduk tahun 1983: 166.753, ibu kota Papeete, tahun 1983: 78.813 jiwa, teritorial Perancis); 4) Hawaii (luas 16.705 km², penduduk tahun 1980: 965.000, ibu kota Honolulu: 365.000 jiwa, negara bagian AS ke-50); 5) Niue (luas 259 km², penduduk tahun 1986: 2.531, kota utama Alofi, berasosiasi ke Selandia Baru, administrasi sendiri); 6) Pitcairn (luas 4,6 km², penduduk tahun 1986: 62, teritorial Inggris); 7) Samoa (luas 197 km², penduduk tahun 1982: 33.920, kota utama Pago Pago, tahun 1980: 3.075 penduduk; pusat administrasi Fagatogo, 1.340 jiwa, teritorial AS dengan administrasi sendiri); 8) Samoa (di Sisifio) (luas 2.842 km², penduduk tahun 1986: 163.000, ibu

kota Apia, tahun 1984: 36.000 jiwa, merdeka sejak 1962); 9) Kepulauan Tokelau (luas: 10 km², penduduk tahun 1985: 1.703, kota utama Fakaofo, teritorial Selandia Baru); 10) Tonga (luas 699 km², penduduk tahun 1986: 110.000, ibu kota Nuku'alofa, tahun 1986: 28.900 jiwa, merdeka sejak 1970); 11) Tuvalu (luas 24,6 km², penduduk tahun 1985: 8.229, ibu kota Vaiaku, tahun 1980: 2.120 jiwa, merdeka sejak tahun 1978); 12) Wallis dan Futuna (luas 274 km², penduduk tahun 1987: 14.800, kota utama Mata Utu, teritorial Perancis).

Kepustakaan: F. Nuscheler, "Struktur und Entwicklungsprobleme der südpazifischen Inselwelt", dlm.: *HDW II*, 8, Hamburg 1983; K.M. Schellhorn, *Politische Entwicklungen im Südpazifik*, Sankt Augustin 1988; W. Wagner (ed.), *Strukturwandel im Pazifischen Raum*, Bremen 1988.

rs

Kepulauan Salomon → Kepulauan Pasifik.

Kepulauan Turc & Caicos → Karibia.

Kepulauan Virgin → Karibia.

kerawanan ekologi di daerah tropis Dampak kombinasi iklim tropis, air, proses pembentukan tanah, metabolisme tumbuhan, serta proses pembentukan geomorfologi, menghasilkan kerawanan alami untuk pemanfaatan pertanian di hutan hujan tropis sehingga produksi bahan pangan terbatas pada bentuk monokultur padi-padian dan umbi-umbian di lahan luas yang berada pada sebuah tingkat di bawah daerah penanaman di daerah subtropis dan sedang yang serupa. Karena dalam iklim tropis dengan situasi alitis tidak terbentuk lagi mineral lempung, ilit, klorit,

tetapi didominasi oleh monmorilonit dan mineral-mineral lempung yang miskin akan asam kersik kaolinit dan gipsit, tanah hanya memiliki kapasitas pertukaran kation yang rendah (kemampuan tanah untuk menyimpan bahan makanan yang masuk dan menyalurkannya ke jaringan akar). Usaha-usaha mengimbangi kekurangan gizi alami di tanah tropis melalui pasokan gizi buatan (pupuk) menemui kegagalan karena sebagian besar pupuk tidak diolah oleh tanah, melainkan melalui pencucian mengalir keluar kembali ke sungai-sungai tropis sebagai pupuk yang berbahaya untuk ekologi.

Tugas membuat berfungsinya penangkap gizi (*nutrient traps*) dan mentransferkan hubungan-hubungan mineral ke dalam substansi yang diolah dalam tanaman, baru terlaksana di daerah tropis melalui jamur tanah (*Mycorrhizae*) di jaringan akar. Dengan berlangsungnya penebangan besar-besaran di hutan tropis, jamur tanah yang sangat penting artinya bagi ekosistem menjadi rusak. Kehilangan substansi humus di permukaan tanah dan mengalir keluarnya mineral yang makin erosi dari tanah menjadi tidak terlindung terhadap hujan tropis yang kuat, merupakan konsekuensi lanjutnya. Tanaman monokultur yang baru ditanami tidak mengizinkan pembentukan baru jamur tanah, yang dapat menghentikan kehilangan gizi ini. Sistem ladang berpindah tradisional (*shifting cultivation*) sebaliknya merupakan sebuah bentuk pemanfaatan yang sesuai dengan situasi spesifik tropis dari hutan hujan, dan merupakan perang-

sang perkembangan pertanian di daerah tropis (*ecofarming*).

Kepustakaan: W. Weischert, *Die Ökologische Benachteiligung der Tropen*, Stuttgart 1977. ah

Kerja Sama Amazona Sebuah kesepakatan kerja sama daerah Amazona yang ditandatangani 3 Juli 1978 oleh delapan negara (Bolivia, Brasilia, Ekuador, Guyana, Kolombia, Peru, Suriname, Venezuela) atas inisiatif Brasilia. Luas kawasan itu (secara hidrografik) 5.870.000 km²; teritorial negara yang berada di kawasan Amazona: Brasilia 63,8%, Peru 15,9%, Bolivia 11,9%, Kolombia 5,8%, Ekuador 2,1%, Venezuela 0,9%, Guyana 0,1%; kepadatan penduduk: 1 penduduk/km². *Potensi*: tambang bijih besi dan mineral, kayu, cadangan air dunia dan produsen zat asam dunia. *Tujuan kesepakatan*: pembangunan yang harmonis di daerah Amazona dengan melindungi lingkungan dan pemanfaatan sumber daya secara rasional; perbaikan infrastruktur fisik, mempercepat pembangunan ekonomi dan sosial. *Organ*: Konferensi Menteri Luar Negeri, mengolah prinsip-prinsip untuk pelaksanaan kesepakatan, terdiri atas wakil-wakil diplomatik negara-negara yang bersangkutan, bertemu setahun sekali; sekretariat, dilakukan oleh negara yang akan melangsungkan pertemuan dewan berikutnya (bergantian menurut abjad); Komisi Nasional dan Komisi Khusus. Keputusan membutuhkan suara bulat. Keputusan-keputusan untuk pembangunan dan kerja sama regional sampai sekarang bertitik berat pada perluasan jalur-jalur lalu lintas, pelayaran, dan kesehatan.

Kepustakaan: "Teks Perjanjian", dlm.: *Integración Latinoamericana* 27, 1978, hlm. 62

dst.; W. Hummer, "Der Amazonas Pakt", dlm.: P. Waldmann, *Politisches Lexikon Lateinamerika*, cet. ke-2, München 1982, hlm. 360 dst.; *Integración Latinoamericana*, 91, 1984, hlm. 31 dst. dn

Kerja Sama Regional untuk Pembangunan → RCD.

Kerja Sama Segitiga Kerja sama untuk bantuan pembangunan dari dua kreditor (negara atau organisasi internasional) dan satu negara penerima; setiap pihak memberikan sesuai kemampuannya (dan keuntungan komparatifnya). Misalnya, negara industri: *know-how*, pengalaman; OPEC: modal; negara berkembang: tanah, tenaga kerja. bg

kesehatan Definisi: menurut WHO, kesehatan bukan hanya berarti tidak adanya penyakit, melainkan diformulasikan positif sebagai hukum alam, merupakan keadaan sehat jasmani, rohani, dan sosial untuk tindakan-tindakan politis (apakah itu politik kesehatan, sosial, atau pembangunan). Kesehatan bukan saja berarti tidak ada gangguan, melainkan juga kekuatan untuk hidup dengannya (Rössler, 1977).

Determinan-determinan kesehatan: perdebatan mengenai kebutuhan dasar—seperti 100 tahun sebelumnya mengenai higiene—telah membuat jelas hubungan antara kerangka situasi sosio-ekonomi, politik, dan ekologi dengan kesehatan. Sebagai indikator pembangunan yang peka, kesehatan berarti juga tidak adanya faktor-faktor yang menimbulkan penyakit. Sebagian besar penyakit (tidak hanya karena infeksi!) terutama sekali dapat dicegah dengan memerangi kemiskinan. Telah dikenal kemungkinan untuk mencegah dan mengurangi.

Penyebab penyakit tidak langsung a.l. (gambar 4) pengangguran, rendahnya pendidikan, tidak adanya jaminan sosial, penindasan terhadap perempuan, ketidakbebasan, penghinaan, kesuburan yang tinggi (\rightarrow keluarga berencana), penderitaan menjadi pengungsi, dan rencana pembangunan yang salah; mengatasinya adalah tugas politik pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan dasar: pencegahan penyakit primer (prevensi) di bidang usaha-usaha kesehatan melalui penghapusan faktor-faktor pembawa risiko kesehatan. Prevensi sekunder berada di bidang kedokteran preventif; prevensi melakukan usaha-usaha pencegahan, pengenalan awal dan imunisasi, serta penyuluhan gizi dan kesehatan di tempat prevensi primer tidak terjangkau atau tidak ada. Penanganan si sakit dalam pengertian ini adalah prevensi tersier: penyembuhan dari penyakit atau mengatasi komplikasi-komplikasi dan kerusakan-kerusakan akibat pada perorangan, keluarga, dan masyarakat. Kesehatan dengan demikian menjadi tujuan dan persyaratan untuk pembangunan.

Situasi di Dunia Ketiga: situasi kesehatan digambarkan tidak cukup hanya oleh indikator kesehatan karena situasi tersebut bergantung pada kualitas, banyaknya pelayanan kesehatan, dan dapat dipercayainya data-data statistik. Realitas bahwa sekitar 45% penduduk di negara berkembang berumur di bawah 15 tahun dan 25% perempuan berada di umur mampu melahirkan, menyatakan bahwa sebagian besar penyakit spesifik untuk kelompok tersebut. Di bagian

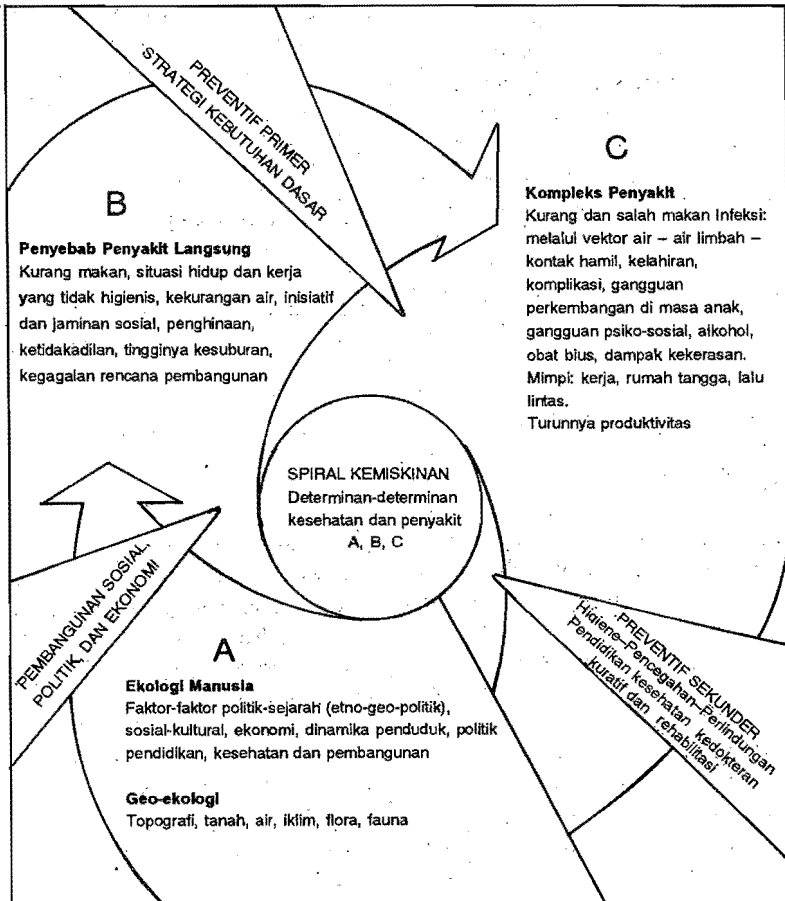
depan penyakit adalah miskin. 40% dari kasus kematian pada kelompok umur di bawah 5 tahun. WHO dan UNICEF (1986) memperkirakan bahwa setiap tahunnya ada 500.000 kasus kematian ibu pada saat melahirkan, di Asia mencapai 62%, di Afrika 30%, di Amerika Latin 7%, tetapi hanya 1% di negara industri. Lebih dari 14 juta kematian pada anak di bawah 5 tahun karena penyakit mencret 5 juta (35%), malaria 3 juta (21%), penyakit pernapasan yang akut 1,3 juta (9%), dan tetanus pada bayi 0,8 juta (5,7%). Sebagian besar kematian karena penyakit banal ini disebabkan kurang makan. Sederet penyakit tropis (penyebab penyakit, penularan, dan sebab-sebab lainnya berkaitan dengan iklim dan biotop tropis) terutama malaria, sistosomiasis (*bilharziose*), tripanosomiasis amerika (penyakit *chagas*), filarirose, dan parasit usus, makin banyak. Keberhasilan satu-satunya dalam memerangi penyakit-penyakit tropis adalah pemusnahan cacar (1973). Sakit panas kuning merajalela terus di daerah panas, begitu juga meningitis epidemika, panas dengue, pes, penyakit tidur (tripanosomiasis afrika) atau leismaniase (benjolan orien, kala azar dan leismaniase amerika latin). Penyakit infeksi yang umum ada, terutama tuberkulosis, lumpuh pada anak-anak (poliomielititis) dan hepatitis serta penyakit kelamin, terutama AIDS mendapatkan tempat penularan yang baik di negara berkembang. Penyakit-penyakit tropis diuntungkan penyebarannya melalui tekanan peledakan penduduk, perluasan pertanian dan pengairan di daerah yang sebe-

lumnya kurang dihuni serta peningkatan kepadatan penduduk pada penurunan tingkat higiene. Kemunduran-kemunduran perkembangan, tingginya kesuburan, ketidakstabilan politik, pemiskinan penduduk, dan pelayanan kesehatan umum, salah perencanaan pembangunan, perang saudara, dan bencana alam, berperan penting pada situasi makin memburuknya kesehatan.

Di daerah pedesaan seperti dalam proses urbanisasi, penyakit merupakan kendala pokok dalam peningkatan produktivitas kerja untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan pembangunan.

Kepustakaan: Weltbank, *Weltentwicklungsbericht 1984, 1986, 1987*, UNO-Verlag, Bonn; J.P. Grant, UNICEF (ed.), *Zur Situation der Kinder in der Dritten Welt*, 1984, Wuppertal

Gambar 4: Determinan-Determinan Kesehatan dan Penyakit



Sumber: Diesfeld 1982

1984; UNICEF, *The State of the World's Children* 1987, Oxford 1987; H.-J. Diesfeld, *Gesundheit in der Dritten Welt - eine Einführung*, Darmstadt 1989; H.-J. Diesfeld/S. Wolter, *Medizin in Entwicklungsländern*, Frankfurt/Bern 1989.

hjd

kesempatan kerja Dengan berlangsungnya dasawarsa pembangunan kedua, politik kesempatan kerja menjadi titik berat pemikiran politik pembangunan. Kesempatan kerja dan penciptaan lapangan kerja diakui sebagai elemen penting pembangunan dan dianggap sebagai instrumen terbaik untuk memerangi pengangguran. Bukannya penciptaan lapangan kerja melalui pembangunan, seperti yang diformulasikan strategi dasawarsa, melainkan pembangunan melalui penciptaan lapangan kerja, merupakan sebuah perspektif baru yang diutarakan oleh ILO dan diangkat menjadi inti program kesempatan kerja dunia yang dikemukakan tahun 1969 dan sejak itu dikembangkan. Sebuah strategi pembangunan berorientasi kesempatan kerja perlu mengendalikan investasi ke pengembangan tenaga kerja, ke daerah pedesaan (di mana hidup sebagian besar massa penganggur dan pekerja musiman), ke instalasi padat karya, dan ke produksi barang-barang konsumsi yang diperlukan untuk hidup. Hal pokok adalah mengenali bahwa pertanian lebih menawarkan kesempatan-kesempatan kerja kepada manusia dan memberinya makan dibandingkan sektor ekonomi. Tidak jauh lagi darinya adalah langkah untuk prioritas politik dari pemenuhan kebutuhan dasar dan pembangunan pedesaan.

Namun, kesempatan kerja hanya merupakan sebuah elemen pembangunan; pengangkatan tingkat kesempatan kerja bukan satu-satunya langkah politik pembangunan yang mencukupi. Hal itu telah diperlihatkan ECOSOC dalam rangka pendekatan terintegrasinya untuk analisis dan rencana pembangunan (lihat *HDW I*, hlm. 104) tahun 1973. Kesempatan kerja harus berjalan paralel dengan peningkatan produktivitas dan pertumbuhan. Keterbelakangan karena tidak adanya produksi maupun tidak terintegrasinya sebagian penduduk yang termarginalisir dalam proses pembangunan, serta produktivitas kerja yang terbelenggu, perampasan dan pemborosan surplus produk yang disebabkan dan ditandai oleh minoritas sosial. Berdasarkan situasi rumit ini, usul-usul penyelesaian yang sederhana seperti dalam literatur tidaklah cukup, misalnya mempropagandakan sebuah hidup dari panen sendiri dalam ekonomi subsistensi.

Sektor subsistensi tidak memberikan negara berkembang perspektif politik kesempatan kerja maupun politik pembangunan. Pelaksanaan strategi kesempatan kerja secara politik dan politik pembangunan sulit karena di satu pihak mempersyaratkan sebuah reformasi struktur (reformasi pertanian), di lain pihak menimbulkan dampak-dampak lain (migrasi), yang secara regional dapat mempertajam masalah pengangguran dan kemiskinan. Oleh karena itu, politik kesempatan kerja harus meliputi program pembangunan yang berkaitan secara regional dan nasional (impor barang investasi, teknologi te-

pat guna, program pendidikan, usaha-usaha pemerataan pendapatan, dsb.). Pada akhirnya perlu didiskusikan, apakah kesempatan kerja merupakan tujuan atau alat.

Kepustakaan: ILO, *Beschäftigung, Wachstum und Grundbedürfnisse*, Genf 1976; G. Stauding, *Labour Force Participation and Development*, Genf 1978; W. von Uff (ed.), *Wachstum, Einkommensverteilung und Beschäftigung in EL*, Berlin 1978; H.-P. Neuhoof, "Der arbeitsorientierte Entwicklungsweg - Grundlagen einer alternativen Entwicklungspolitik", dlm.: *HDW II, 1*, Hamburg 1982, hlm. 211 dst.; ILO/PREALC, *Mercado de Trabajo en Cifras, 1950-1980*, Genf 1982; J. Betz, "Beschäftigung und Migration in der Dritten Welt", dlm.: *Jahrbuch Dritte Welt* 1985, hlm. 101 dst.

dn

Kesepakatan Kredit Umum Kesepakatan Kelompok Sepuluh mengenai pembiayaan kembali untuk IMF yang berasal dari pemerintah dan bank sentral sebelas negara industri terbesar.

dn

ketentuan wewenang → *enabling clause*.

keterbelakangan → pembangunan.

ketergantungan Dalam perdebatan politik pembangunan, ketergantungan dimengerti bukan sebagai bentuk ketergantungan yang ada (bagaimana pun juga semua bergantung pada semua, juga negara industri pada negara berkembang), melainkan ketergantungan struktural. Pengertian ini menandai penyampaian atau pencangkakan struktur kebutuhan dan dinamika reproduksi negara maju ke perekonomian-perekonomian di negara berkembang, yang mengakibatkan terjadinya heterogenitas struktural serta memunculkan dan mengokohkan keterbelakangan (berbeda dengan situasi tidak berkembang).

Dalam pengertian ini ketergantungan menjadi definisi yang paralel dengan keterbelakangan, hubungan satu dengan lainnya (ketergantungan sinonim dengan penyebab atau dampak dari keterbelakangan) dalam literatur diperdebatkan, tetapi sering sama sekali tidak terefleksi. → teori *dependencia*.

dn

ketergantungan pada bahan mentah

Dalam masalah bantuan pembangunan, ketergantungan negara industri akan bahan mentah dari negara berkembang berperan besar. Namun, negara industri Barat mempunyai berbagai kemungkinan untuk mengurangi ketergantungannya pada bahan mentah, dengan demikian mengubur peluang negara berkembang dalam menjalankan politik kartel bahan mentah dengan berhasil. Kemungkinan tersebut a.l.: a. pemanfaatan lebih banyak gudang-gudang di negara industri; b. penurunan konsumsi melalui penghematan oleh pembaruan teknik; c. substitusi melalui produk-produk buatan (misalnya serat yute, sisal; seluruhnya bisa digantikan serat-serat buatan); d. pengolahan kembali material tua dan limbah (tingkat pengolahan kembali timah hitam di Jerman Barat tahun 1980 adalah 45%, seng 20%-25%). Di lain pihak, penggunaan strategi 2 dan 4 berarti memperlambat eksploitasi cadangan bahan mentah yang tidak bisa diregenerasi kembali sehingga mengulur cadangan untuk generasi mendatang.

dn

keuntungan ongkos komparatif

Teori yang berasal dari D. Ricardo ini sampai sekarang menjadi prinsip fundamental teori ekonomi luar negeri.

keuntungan ongkos komparatif

Teori ini menjelaskan, negara mana dengan barang apa (akan) menguntungkan dalam hubungan perdagangan internasional sehingga dapat memberikan argumentasi mengenai struktur produksi dan perdagangan serta keuntungan dari perdagangan luar negeri. Hal ini bukanlah (seperti dimaksudkan A. Smith) menyangkut eksistensi perbedaan ongkos absolut, misalnya negara 1 dapat memproduksi barang A dengan ongkos lebih murah daripada negara 2, dan negara 2 ini dapat memproduksi barang B dengan ongkos lebih murah daripada negara 1 sehingga kedua negara dapat mengkhususkan diri pada produksi yang masing-masing absolut murah dan saling menukarkan jumlah barang dengan sesuai sehingga mengakibatkan tingkat konsumsi setelah ada pertukaran dalam perdagangan internasional di kedua negara menjadi lebih tinggi daripada sebelumnya. Argumentasi pokok teori keuntungan ongkos komparatif adalah meskipun kedua pihak melakukan perdagangan yang menguntungkan kedua pihak, jika negara 1 bisa memproduksi barang A dan barang B lebih murah daripada negara 2, perbedaan ongkos akan berbeda tingginya. Negara 1 harus mengkhususkan diri pada ekspor barang demikian yang dapat diproduksinya dengan ongkos relatif sedikit, demikian juga negara 2.

Dalam contoh angka-angka merupakan tingginya ongkos per satuan barang A dan B yang diproduksi di negara 1 dan 2. Terlihat bahwa negara 1 baik dalam produksi barang A maupun barang B memiliki keuntungan ongkos absolut. Hal ini relatif

Negara	Ongkos produksi per satuan	
	Barang A	Barang B
1	80	100
2	120	200

paling tinggi pada produksi barang B. Sebaliknya, kerugian ongkos absolut dirasakan negara 2 relatif paling sedikit pada produksi barang A. Setelah dilakukan perdagangan internasional, negara 1 mengkhususkan diri pada produksi dan ekspor barang B, sedangkan negara 2 pada barang A. Bagaimana keuntungan dari perdagangan luar negeri ini dibagi di antara negara-negara tersebut, tidak dapat diperoleh dari teori keuntungan komparatif ini.

Dari logika teori ini, perdagangan luar negeri hanya menjelaskan dari sisi tawaran, membangun sebagian besar pengembangan lanjut teori ekonomi luar negeri neoklasik, dengan cara mempertanyakan kembali premis-premis mendasar dan penyebab perbedaan ongkos. Politik perdagangan internasional adalah sejauh mana ia mempostulasikan perdagangan bebas (GATT), berlandaskan teori ini. Hubungan perdagangan antara negara industri dan negara berkembang dijelaskan sebagian besar oleh teori keuntungan ongkos komparatif ini, terutama untuk perdagangan produk-produk industri dengan bahan mentah (yang disebut barang Ricardo). Teori keuntungan ongkos komparatif ini bersifat statis, artinya berkaitan dengan keuntungan ongkos komparatif pada kurun waktu tertentu. Dalam proses pembangunan struktur, keuntungan ongkos kompa-

ratif dapat berubah, misalnya melaukan politik perlindungan bea untuk waktu tertentu sehingga melanggar keuntungan ongkos komparatif yang berlaku.

hpn

Khomeini, Ayatollah Ruhollah Lahir 24 September 1902, berasal dari sebuah keluarga imam Islam tua. Pada umur 19 tahun ia pindah dari kota kelahirannya, Khomein, ke Arak (Iran) untuk melanjutkan pendidikan pada seorang teolog Islam, Ayatollah Haieri. Tahun 1922 ia menemani gurunya ke Qom dan membantu membangun kota tersebut menjadi Pusat Studi-Studi Islam. Pada umur 30 Khomeini telah mencapai tingkat teologi tertinggi, yaitu tingkat seorang *Ijtihad*.

Meskipun Khomeini tahun 1941 telah membahas dengan sangat kritis diktator Reza Khan dalam buku pertamanya, *Membuka Selubung Rahasiasia*, ia baru muncul di panggung politik sehubungan dengan pemberontakan Khordad melawan Revolusi Putih Shah, yang mengakibatkan ia diusir ke Turki (November 1964). Dari sana ia bermigrasi ke Nadjaf (Irak), sebuah kota ziarah Syiah, sampai ia diusir oleh pemerintah Irak atas tekanan rezim Shah. Dalam pengasingan di Neauphle-le-Chateau, sebuah kota satelit Paris, sebagai tokoh simbol dan pimpinan karismatik perlawanan, ia memimpin perjuangan rakyat Iran melawan rezim Shah. Sekembalinya ke Iran (1 Februari 1979) dan pembangunan sebuah negara Republik Islam Iran, Ayatollah Imam Khomeini juga menjadi pimpinan Revolusi Islam berdasarkan UUD, dan menurut Pasal 5 UUD November

1979 juga mendapatkan *welayat-e-Amr* (Kewenangan Memimpin) jika tidak ada imam ke-12. Sampai saat kematian (3/4 Juni 1989), Khomeini tetap merupakan otoritas politik pusat dan agama.

Kepustakaan: F. Riyahi, *Ayatollah Khomeini*, Frankfurt 1986; B. Nirumand/K. Daddjou, *Mit Gott für die Macht. Eine politische Biographie des Ayatollah Chomeini*, Reinbek 1987.

maf

Klm-II-Sung-isme → Korea Utara.

Kiribati → Kepulauan Pasifik.

klausul prioritas Mewajibkan sebuah negara untuk memperlakukan secara sama mitra dagangnya dalam politik perdagangan. Jika sebuah negara memberikan keringanan politik perdagangan tertentu (terutama keuntungan bea), ia harus juga memberikan negara-negara lainnya klausul prioritas. Klausul prioritas melarang memojokkan posisi sebuah negara (klausul prioritas = larangan melakukan diskriminasi). Tujuan globalnya adalah perluasan perdagangan dunia dan pembagian kerja internasional.

Dalam perjanjian-perjanjian bilateral dibedakan antara klausul prioritas tidak terbatas/absolut dan terbatas/relatif (menutup keringanan-keringanan tertentu dan/atau kesepakatan mengenai resiprositas) dalam perjanjian-perjanjian multilateral antara klausul prioritas mutlak (pemberian keuntungan secara otomatis kepada negara-negara ketiga) dan bersyarat (pemberian keuntungan bergantung pada imbalan, sebagian resiprositas penuh).

Dalam perjanjian multilateral yang besar, yaitu GATT, semua negara anggota diwajibkan melaksanakan klausul prioritas absolut. Penge-

cualian: uni-uni bea (misalnya MEE), zone-zone perdagangan bebas (misalnya ALALC), dan aturan-aturan khusus untuk negara berkembang. Hal ini berhasil diperjuangkan oleh Kelompok 77 pada UNCTAD di New Delhi (1968). Sejak hal itu berlangsung (berkaitan dengan perdagangan dengan negara berkembang) dalam hukum bea internasional semacam sistem preferensi (bea prioritas) untuk barang-barang negara berkembang, sering dilakukan kebebasan bea secara absolut-terhadap klausul prioritas untuk negara berkembang sering sulit. MEE memberikan kepada semua negara berkembang yang tidak berasosiasi dengannya akses pasar yang bebas penuh-paling tidak *de jure* dalam rangka sistem preferensi umum dan Negara AKP yang berasosiasi dengannya sesuai dengan Perjanjian Lome.

Penggantian klausul prioritas dengan preferensi-preferensi negara berkembang mempunyai efek positif untuk negara berkembang, tetapi pada prakteknya sangat terbatas oleh pembatasan jumlah klausul khusus dan Perjanjian Pembatasan Diri (terutama dalam politik perdagangan ME). **bg klientelisme** (klientelisme politik) Definisi ini pada beberapa tahun terakhir makin banyak muncul dalam sosiologi politik di negara berkembang. Definisi ini mempersyaratkan adanya hubungan pribadi antara dua tokoh (kelompok-kelompok tokoh), yaitu klien berada dalam hubungan ketergantungan ke patron ("tuan"). Keduanya memiliki sarana yang tidak sama, dan saling menukarkannya untuk kepentingan masing-masing pi-

hak. Spektrum pemakaian, tempat struktur klien dianalisis, mencakup partai-partai politik, kelompok-kelompok kepentingan, birokrasi, politikus karir, dan integrasi politik (di Dunia Ketiga misalnya hubungan antara instansi politik pusat dan klien, yang tanpa peran perantara lembaga-lembaga pusat modern sulit menjangkau massa penduduk terutama di pedesaan), sampai pada hubungan ketergantungan politik luar negeri. Luasnya jangkauan menyebabkan definisi ini kehilangan ketepatannya.

Kepustakaan: J.-F. Médard, "Lé rapport de clientèle: du phénomène social à l'analyse politique", dlm.: *Revue Française de Science Politique* 1976, hlm. 103 dst.; S.N. Eisenstadt/R. Lemarchand (ed.), *Political Clientelism, Patronage and Development*, Beverly Hills/London 1981; M. Caciagli, "Klientelismus", dlm.: D. Nohlen/P. Waldmann (ed.), *Dritte Welt*, München 1987, hlm. 277 dst.

kz know-how (Inggris: tahu bagaimana) Pengertian yang berasal dari bahasa bisnis AS, menandai seluruh pengetahuan teoretis dan pengalaman sebuah perusahaan yang didapatkan dari proses pembuatan barang, bidang penjualan, proses manajemen, perencanaan, organisasi kerja, dsb. Serupa lisensi, *know-how* yang secara hukum tidak dapat dilindungi secara mutlak, diperjualbelikan antarperusahaan melalui kontrak-kontrak.

ah kode perilaku Dalam rangka politik teknologi negara berkembang ingin diberlakukan sebuah kode perilaku untuk alih teknologi. Tujuannya a.l. menghalangi praktek-praktek bisnis yang restriktif dari perusahaan transnasional, penurunan ongkos alih teknologi ke negara berkembang, penguatan posisi tawar negara berkembang dalam alih teknologi. Namun,

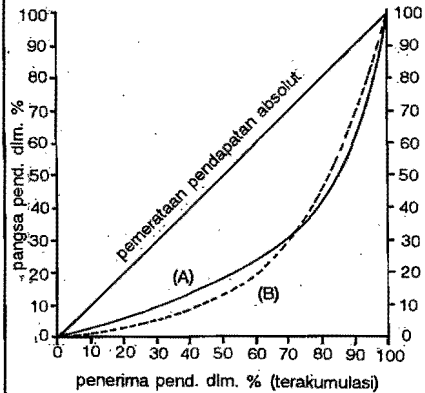
negara industri menentang adanya kode perilaku yang disahkan secara hukum karena khawatir bahwa perusahaan-perusahaan negara industri dapat kehilangan kesediaan mentransfer teknologi ke negara berkembang akibat adanya pengawasan yang makin ketat. Kesepakatan mengenai sebuah kode perilaku yang bersifat tidak mengikat memang tidak cukup, tetapi dapat menguatkan posisi negara berkembang.

Kepustakaan: W. Fikentscher, *The Draft International Code of Conduct on the Transfer of Technology - A Study in Third World Development*, Weinheim 1980.

dn
koefisien GINI Merupakan ukuran yang paling sering dipakai untuk menggambarkan distribusi pendapatan perorangan di sebuah negara atau sebuah daerah dalam satu-satunya indikator. Perhitungan koefisien GINI berdasarkan Kurva Lorenz. Koefisien GINI didefinisikan sebagai hubungan luas antara Kurva Lorenz dengan diagonal-diagonal ke seluruh luas di bawah diagonal-diagonal tersebut. Pada distribusi pendapatan yang absolut sama, koefisien GINI sama dengan nol karena Kurva Lorenz identik dengan diagonal-diagonal. Pada distribusi yang benar-benar tidak sama, koefisien GINI mencapai sebuah nilai maksimal 1. Dalam kasus ini Kurva Lorenz identik dengan sumbu, koefisien GINI terletak di antara 0 dan 1.

Koefisien GINI memenuhi kriteria Pigou-Dalton: sebuah pemerataan dari penerima pendapatan kecil dan penerima pendapatan besar, meningkatkan nilai GINI. Berbagai situasi distribusi dapat menyebabkan nilai koefisien GINI identik.

Gambar 5: Koefisien GINI



Kedua Kurva Lorenz, A dan B, bersama dengan diagonal membentuk isi luas yang sama besar sehingga koefisien GINI identik. Lagi pula situasi distribusi yang mendasar berbeda satu sama lain. Situasi A memperlihatkan bahwa distribusi pendapatan di daerah bawah merata (0-70), sedangkan di daerah atas tidak sama (70-100). Dari situasi pembagian B jelas terlihat bahwa penerima pendapatan bawah (dibandingkan A) mendapatkan bagian pendapatan yang jauh lebih sedikit, dalam bagian atas. Sebaliknya, distribusi lebih merata.

Ukuran distribusi lainnya berusaha menghindari kerugian koefisien GINI. Namun, masalah pokok tetap ada, yaitu pengukuran distribusi terdiri atas perhitungan perbedaan-perbedaan dan tidak menggambarkan akumulasi ukuran aditif yang sama, misalnya perhitungan PNB (\rightarrow pendapatan nasional). Atas dasar itu timbul masalah bahwa angka-angka pengukuran distribusi global secara implisit mengandung penilaian-penilaian tertentu.

hpn

Kolombia Dalam negeri Kolombia berlangsung eksistensi bersama antara stabilitas institusional dan situasi ekonomi yang baik dengan perpecahan sosial dan makin tumbuhnya kekerasan. Gerilyawan kiri, pasukan pembunuh kanan, dan pembunuh-pembunuh dari bisnis-bisnis kokain, telah menyingkirkan monopoli kekuasaan negara di seluruh negara itu; lebih dari 10.000 pembunuhan hanya di tahun 1987 merupakan tanggung jawab mereka. Politik perdamaian yang dicanangkan oleh Presiden Barco tidak mendapatkan banyak kesempatan.

1. Di kawasan pegunungan Andes (dengan lembah Magdalena dan Cauca) hidup lebih dari 3/4 penduduk Kolombia (luas 1,14 juta km²). Komoditas pertanian dan ekspor andalan adalah kopi. Eksploitasi emas, batu bara (70% cadangan Amerika Latin), dan minyak makin berperan dalam perdagangan luar negeri. Selain itu, Kolombia memiliki sedikit bijih besi, tembaga, timah hitam, perak, dan platina, serta produksi batu zamrud terbesar di dunia. 3/4 ekspor dihasilkan dari produksi pertanian (selain kopi, makin banyak buah-buahan dan bunga potong).

2. Kolombia berpenduduk 32 juta jiwa (1989), pertumbuhan penduduk tahunan jelas mengalami penurunan, tetapi masih 2% per tahun. Setiap orang kedua hidup di sebuah tempat dengan penduduk 20.000 jiwa atau lebih; penduduk pedesaan mengalami stagnasi dengan berlangsungnya urbanisasi. Separa penduduk terdiri atas orang Mestis, 1/4 orang Mulat, 1/5 orang kulit putih (kulit hitam 5%,

Indian 2%). Bahasa nasional adalah Spanyol yang dipakai hampir di semua tempat; 2% penduduk berbicara dalam bahasa Indian. 98% penduduk beragama Katolik.

3. Tahun 1819 dengan tentara yang terdiri atas gerakan kumpulan yang heterogen dan anti-Spanyol, Simon Bolivar berhasil mengalahkan penguasa kolonial sehingga memungkinkan pendirian Kolombia Raya. Berlawanan dengan intensi Bolivar, dalam negara yang baru itu struktur-struktur kolonial tetap aktif (perbudakan, UU yang bersifat rasis terhadap orang Indian, pajak-pajak kolonial); oligarki orang Kreol mengambil alih peran orang Spanyol. Kekuasaan politik selama puluhan tahun tetap dipertikaikan antarkelompok *hacendado* di daerah. Dalam rangka konflik ini tahun 1830 Venezuela dan Ekuador yang sekarang, memisahkan diri dari Kolombia Raya; sisanya merupakan persatuan yang tidak mengikat (federalistis) daerah-daerah yang terus otonom sampai akhir abad tersebut. Tahun 1849 berdiri partai konservatif dan partai liberal yang sejak itu mendominasi kehidupan politik di Kolombia: keduanya merupakan persekutuan heterogen dari kelompok-kelompok kepentingan regional dan sosial. Kelompok liberal memerintah tahun 1849-1885, semasa *boom* tembaku dan mengacu pada doktrin perdagangan bebas. Kemudian berkuasa *Regeneración* yang konservatif (1886-1930), lalu mengokohkan kekuasaan pusat, membuka jalan untuk modal AS ke sektor bahan mentah (pisang, minyak), tetapi di lain pihak juga melindungi manufaktur nasional

terhadap persaingan luar negeri dan membantu sektor ini. Keuntungan dari *boom* kopi (sejak tahun 1887), Perang Dunia I dan krisis ekonomi dunia, telah memberikan kesempatan melakukan akumulasi dalam negeri.

Tahun 1930–1946 kaum liberal melanjutkan haluan industrialisasi, di bawah Lopez Pumarejo menjalankan politik reformasi dan sosial serta meluaskan ruang gerak serikat buruh dan oposisi kiri. Politik ini menjadi bahaya bagi hegemoni partai-partai tradisional dalam bentuk gerakan radikal kiri di bawah Gaitans. Tahun 1946 pihak konservatif mengambil alih pemerintahan, dan membubarkan kongres dengan kekerasan, menduduki administrasi dengan anggota-anggota partainya, menyatakan oposisi kiri sebagai ilegal dan menyingkirkan pihak liberal. Gerilya menghadapi pemerintah ilegal ini dan tidak lama kemudian dapat mengembangkan dinamikanya sendiri, membenamkan Kolombia selama 10 tahun dalam sebuah perang saudara (*violencia*), yang menelan 200.000–300.000 korban jiwa dan membahayakan eksistensi politik kedua partai tradisional tersebut. Liberal dan konservatif lalu bersekutu dalam Front Nasional untuk menghadapi diktator militer Rojas Pinilla (1953–1957), dan sejak tahun 1958 membagi seimbang pemerintahan dan pos-pos birokrasi di antara mereka. Sistem pembagian kekuasaan ini, meskipun berjangka waktu sampai tahun 1974, tetap berlangsung sampai ke pemilihan Virgilio Barco menjadi presiden (1986).

4. Sekitar tahun 1900 perkebunan kopi berpusat di Antioquia, tempat

selama masa kolonialisasi Pegunungan Andes meluas ke lapisan petani kecil dan menengah yang bebas. Sejak itu, perkebunan dan petani memproduksi komoditas pertanian dan ekspor terpenting Kolombia, dalam waktu tertentu memberikan kontribusi 85% untuk penjualan ekspor. Sekarang 3/4 dari jumlah 300.000 usaha kopi keseluruhan memiliki kurang dari 4 ha (pangsa produksi 35%); 42% adalah *minifundia* dengan luas tanah kurang dari 1 ha. Sejak berhasil meningkatkan ekspor bahan mentah baru-baru ini (emas, batu bara), mendiversifikasi komoditas pertanian yang dapat diekspor dan menjual barang-barang manufaktur di pasar dunia, pangsa kopi dalam perdagangan luar negeri turun (sesuai dengan harga pasar dunia untuk masing-masing komoditas) 30%–50% dari hasil ekspor. Secara keseluruhan pangsa pertanian dalam PDB adalah 20% dan menciptakan 1/3 lapangan kerja (industri 30%/40%). Produksi bahan pangan dasar tidak mencukupi pengadaan pasar dalam negeri (impor bahan pangan sampai 10%). Seperti sebelumnya, struktur pertanian ditandai oleh kuatnya pemusatan pemilikan dan pendapatan. Menurut sensus terakhir, 0,7% usaha memiliki tanah di atas 41%, sementara 60% usaha berdesak-desakan di atas 4% areal lahan dan separo penduduk pedesaan tidak memiliki akses ke tanah. Kolombia membayar kemajuan-kemajuan yang dicapainya melalui modernisasi pertanian dengan makin banyaknya orang yang meninggalkan pedesaan.

Perkembangan ekonomi Kolombia dulu dan sekarang secara keseluruhan berkaitan erat dengan konjungtur kopi. Sejak tahun 1900 dan terutama sejak tahun 1920, borjuasi perdagangan makin kuat, yang menginvestasi keuntungan-keuntungannya dari berbagai *boom* kopi ke industri barang-barang konsumsi bersifat substitusi impor. Kemunduran impor yang merupakan saingannya ketika berlangsung krisis ekonomi dunia, dimungkinkan pengurangan beban kapasitas, pertumbuhan industri yang pesat dan perluasan sektor industri setengah jadi. Sampai akhir tahun '40-an investor-investor dalam negeri saja yang mendorong industrialisasi. Lalu, berlangsung arus masuk modal AS secara deras dan denasionalisasi industri yang ada. Sekarang, dari 100 perusahaan besar, 91 perusahaan dikendalikan langsung atau melalui saham oleh asing; 27 dari perusahaan ini menghasilkan 15% produksi industri. Hasil penjualan kegiatan ekonomi ilegal (penyelundupan, perkebunan, ekspor mariyuana, produksi kokain) hasil penjualannya melampaui nilai ekspor kopi. Dari cabang ekonomi ilegal ini muncul fraksi baru lapisan atas (*clase emergente*) yang makin menonjol dalam ekonomi legal dan politik.

5. Distribusi pendapatan di Kolombia sangat tidak seimbang. 2/3 penduduk berpendapatan kurang dari 300 US\$/tahun; 40% dari seluruh penduduk dan 2/3 dari penduduk pedesaan hidup di bawah batas kemiskinan resmi yang ditetapkan, 150 US\$/tahun; dan terkaya 5% mendapatkan 2/5 dari pendapatan nasional.

Pengadaan kesehatan terutama untuk orang miskin dan penduduk pedesaan, sangatlah kurang: 6 dokter untuk 10.000 penduduk, 90% dokter berpraktek di perkotaan. Situasi pangan dan perumahan untuk penduduk Kolombia lebih buruk daripada rata-rata di Amerika Latin; meluasnya penyakit karena situasi miskin, seperti tbc. Pengangguran resmi adalah 15%, bekerja kadang-kadang sekitar 30%, dan yang terjamin secara sosial hanya 16%. Tiga juta anak berumur 5-14 tahun harus bekerja dengan upah murah agar dapat memberikan sumbangan pada kehidupan keluarga. Tingkat penyekolahan hanya 77%, di pedesaan 60% (buta aksara 12%). Kemiskinan di pedesaan (perkampungan kumuh dan sektor jasa informal) tumbuh terus dengan terjadinya pelarian dari pedesaan, dari minifundia-minifundia yang sudah berlebihan padatnya. Sedikit sekali kemampuan industri menyerap dan menciptakan lapangan kerja sedikit sekali. Dari sekitar 200.000 pencari kerja per tahun, hanya 40.000 mendapatkan pekerjaan.

6. Menurut UUD, Kolombia adalah republik dengan sistem presidential (di daerah-daerah tertentu masih berlaku versi tahun 1886) dengan parlemen dua kamar (dewan perwakilan dan senat) dan memiliki hak pemilihan secara umum. Realisasi UUD selama 130 tahun bertukar terus-menerus oleh partai liberal dan partai konservatif. Sistem dua partai itu bisa saja dalam waktu lama dapat saling menyesuaikan kepentingan-kepentingan lapisan atas yang memimpin (sampai sekarang kedua partai itu

berhubungan erat dalam perusahaan-perusahaan) dan menjalankan kepentingannya secara populis, maupun kekerasan. Namun, sejak munculnya gerakan-gerakan buruh yang terorganisasi dan partai-partai kiri, mereka tidak lagi mampu mengolah konflik-konflik sosial dan masyarakat secara politis. Hal ini tidak berubah meskipun mereka menyatakan kekuatan-kekuatan politik baru adalah ilegal, menutup akses tokoh-tokoh baru ke sistem politik, tidak jarang melalui manipulasi pemilihan, pembelian hak suara, dan mempengaruhi media massa. Ongkosnya adalah berkurangnya legitimitas dan kekuatan integrasi politik negara dan makin kurangnya penduduk yang ikut dalam politik (dalam pemilihan jarang lebih dari 50%). Orang-orang tanpa partai dari lingkungan liberal dan konservatif, maupun dari gerakan protes di tahun '70-an tidak berhasil mengusahakan sebuah landasan usaha politik baru. Aksi mogok terbesar tahun 1977 yang dilakukan oleh empat dari lima organisasi serikat buruh (mewakili 1,7 anggota dari 4.000 organisasi buruh), tetap tanpa hasil. Gerakan wadiah kiri, FIRMES, yang berusaha memapkan diri sebagai alternatif politik dalam sistem tradisional, hanya bergerak sedikit. Gerakan gerilya yang makin kuat dan beroperasi di pedesaan terjadi akibat sebuah politik yang mempertahankan privilese klien partai-partai tradisional dan menjawab dengan represi, bukannya dengan integrasi terhadap aksi oposisi dan konflik-konflik sosial.

Setelah berbagai pemerintahan tanpa hasil berusaha menghancurkan

dan mengejar tanpa ampun gerilya dan berusaha menyingkirkan hak-hak demokrasi dan politik, Presiden Betancur yang konservatif (1982-1986) mengajukan sebuah rencana perdamaian. Agustus 1984 memungkinkan sebuah perjanjian perdamaian dengan organisasi-organisasi gerilya *FAR/Fuerzas Armadas Rebeldes*, *Tentara Pemberontak Fuerza* (aktif sejak tahun 1966), *EPL/Ejercito Popular de Liberacion*, *Tentara Pembebasan Rakyat* (aktif sejak tahun 1968), dan *M-19* (aktif sejak tahun 1970). Meskipun banyak kemunduran, usaha perdamaian ini tidak gagal sama sekali. Presiden Barco yang liberal (sejak tahun 1986) melanjutkan dialog dengan gerilya, dan berusaha meluaskan kemungkinan partisipasi politik. Tahun 1988 berlangsung untuk pertama kalinya pemilihan langsung wali kota. Sebuah reformasi administrasi diharapkan bisa mendesentralisasikan kompetensi-kompetensi keputusan dan menumpulkan konflik-konflik sosial melalui program-program sosial yang berorientasi pada kebutuhan dasar. Belum dapat ditemukan cara untuk mengatasi akibat desintegratif dari kegiatan sektor narkoba yang ilegal.

7. Dengan sebuah strategi diversifikasi ekspor, tahun '80-an Kolombia memiliki tingkat pertumbuhan tertinggi di Amerika Latin (juga pendapatan nasional per kapita). Komoditas ekspor dapat diperluas melalui modernisasi produksi pertanian dan pemanfaatan sumber-sumber baru bahan mentah yang mengurangi ketergantungan dari ekspor kopi. Utang luar negeri dapat dikatakan sedikit;

penjadwalan utang sampai kini tidak perlu. Kemajuan didapatkan dengan mengorbankan masalah-masalah sosial yang makin tumbuh; distribusi pendapatan tetap ekstrem tidak seimbang; kemungkinan bertahan hidup dalam sektor subsistensi telah hancur, kemiskinan di perkotaan makin tumbuh. Untuk menghindarkan penduduk lain terseret dalam kegiatan ekonomi ilegal dan untuk memutuskan spiral kekerasan, pembangunan selanjutnya tidak hanya berisi pertumbuhan, tetapi juga pemerataan. Apakah program-program sosial Presiden Barco bisa menghasilkan sesuatu, belum bisa diramalkan.

Kepustakaan: U. Zelinsky, *Parteien und politische Entwicklung in Kolumbien unter der Nationalen Front*, Meisenheim am Glan 1978; A. Boeckh, *Interne Konsequenzen externer Abhängigkeit. Eine vergleichende empirische Analyse der Dependenz am Beispiel der Industriearbeiterschaft Venezuelas, Kolumbiens und Perus*, Königstein/Ts. 1979; K. Meschkat/P. Rohde/B. Töpfer, *Kolumbien. Geschichte und Gegenwart eines Landes in Ausnahmezustand*, Berlin 1980; H.W. Krumwiede, "Kolumbien", dlm.: HDW II, 2, hlm. 245 dst., Hamburg 1982; J.H. Wolff, "Sind Kolumbiens 'Parteien' Parteien?", dlm.: *Jahrbuch für Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas*, 1984, hlm. 323 dst.; P. Mossmann, "Frieden in Kolumbien?", dlm.: *Jahrbuch Dritte Welt*, 1985, hlm. 199 dst.; H. Ribe, "Die wirtschaftliche Stellung der Migranten und Nicht-Migranten in Kolumbien", dlm.: *Anuario*, vol. 15, 1985, hlm. 143 dst.

dd koloni → daerah yang bergantung dari luar.

kolonialisme Menandai proses perluasan kekuasaan dan pengaruh Eropa ke negara-negara luar Eropa. Pelaku kolonialisme adalah negara maupun kelompok ekonomi atau kepercayaan, yang melakukan ekspansi ke daerah-daerah yang sampai saat itu "belum

dikenal" dengan sering memakai dukungan "negara-negara induk".

Sebelum kemunculan imperialisme pada akhir abad ke-19, kolonialisme kebanyakan terbatas pada pangkalan-pangkalan perdagangan, ditambah sederet pangkalan yang strategis, mencakup zone-zone pesisir dari kontinen-kontinen yang baru ditemukan di daerah kekuasaan dan perdagangan. Penguasaan kolonial negara-negara keluar Eropa bertujuan terutama membesarkan kekayaan negara (merkantilisme) melalui eksploitasi koloni. Terbukti sangat membawa keuntungan adalah eksploitasi dan perampasan logam-logam mulia di Amerika Latin dan perdagangan segitiga antara Afrika, Amerika, dan Inggris yang dikuasai Inggris. Budak-budak Afrika dibeli dengan harga murah dan dijual sebagai tenaga kerja ke Amerika. Dari sana dikirim gula, rempah-rempah, rum, kapas, dsb. ke Inggris dan ditawarkan dengan harga yang tinggi di pasar lokal dan pasar Eropa.

Pemanfaatan sebelah pihak dalam pertukaran kolonial dengan menguntungkan orang Eropa karena keunggulan militernya dan terutama monopoli transportasi dalam dunia pelayaran. Selain itu, mitos antropologi rasa rendah diri kulit berwarna mengabsahkan perlakuan terhadap mereka hanya sebagai objek kepentingan Eropa. Pengisapan ekonomi diiringi semangat misi agama dan humanisme yang menyamakan penghancuran identitas bangsa-bangsa di luar Eropa mengatasi masa kebiadaban. Dengan demikian, landasan deformasi sosial negara-negara "Dunia

Ketiga yang sekarang telah diletakkan, meskipun bentuk konkret telah berubah. Interaksi asimetris antara penguasa kolonial dengan koloni-koloninya juga dipropagandakan oleh liberalisme yang merupakan doktrin politik luar negeri pengganti merkantilisme. Teori keuntungan ongkos komparatif yang dicetuskan David Ricardo (1772-1823) sampai sekarang masih dipakai sebagai alasan politik yang ingin tetap membatasi kegiatan ekonomi negara-negara Dunia Ketiga hanya pada produksi bahan mentah (atau proses pembuatan yang sederhana) karena mereka dapat menghasilkannya dengan murah. Hasil kolonialisme adalah melupakan struktur-struktur ekonomi yang memungkinkan hal ini. Liberalisme meneruskan hal ini dengan cara lain. Meskipun perbudakan dihapuskan pada abad ke-19, akses ke pasar dan bahan mentah koloni tetap terbuka untuk orang Eropa. Persaingan barang jadi Eropa yang murah dan tidak adanya pembatasan bea yang melindungi, menghalangi pembangunan industri-industri nasional dan melanjutkan pembangunan monokultur sepihak di koloni. Pada akhir abad ke-19 kolonialisme berkaitan dengan doktrin imperialisme. Tidak saja penguasaan pasar, melainkan juga penguasaan teritorial lalu menjadi pusat perhatian kepentingan kaum kolonialis. Tahun 1914 lebih dari separo penduduk dunia berada langsung di bawah kekuasaan kolonial, sedangkan daerah-daerah yang terbagi-bagi sesuai dengan daerah kepentingan seperti Cina, Persia, dan Turki secara formal berdaulat, tetapi terawasi se-

cara politis dan bergantung secara ekonomi.

Meskipun berlangsung proses dekolonisasi, setelah Perang Dunia II menyebabkan banyak negara-negara menjadi merdeka, tetap terlihat adanya struktur-struktur ketergantungan yang mendasari deformasi sosial negara-negara Dunia Ketiga akibat kolonialisme, seperti keterikatan ekonomi, militer, kultural, dan politik pada bekas negara induk. Oleh karena itu, dilontarkan pertanyaan, apakah kemerdekaan negara bekas koloni secara otomatis mengakhiri kolonialisme; atau bukannya banyak tanda-tanda memperlihatkan bahwa kolonialisme tetap berlanjut dalam bentuk yang telah berubah, sebagai neokolonialisme, selama pandangan politik negara industri atau negara berkembang tidak mengalami perubahan secara mendasar, serta pada tingkat internasional pasar dunia yang kapitalistis tetap merupakan media yang menentukan hubungan antara negara industri dan negara berkembang.

Kepustakaan: F. Ansprenger, *Auflösung der Kolonialreiche*, München 1966; F. Fanon, *Die Verdammten dieser Erde*, Frankfurt 1966; E. Williams, *Capitalism and Slavery*, cet. ke-10, New York 1966; R. von Albertini, *Europäische Kolonialherrschaft 1880-1940*, Zürich/Freiburg 1976; E. Galeano, *Die offenen Adern Lateinamerikas*, Wuppertal 1977; J.-H. Grevemeyer (ed.), *Traditionelle Gesellschaften und europäischer Kolonialismus*, Frankfurt 1981; K. Hammer, *Weltmission und Kolonialismus. Sendungsideen des 19. Jahrhunderts im Konflikt*, München 1981; D.K. Fieldhouse, *The Colonial Empires*, London and Basingstoke 1982; R.v. Albertini, *European Colonial Rule, 1880-1940: The Impact of the West in India, Southeast Asia and Africa*, Oxford 1983; W.

Reinhard, *Geschichte der europäischen Expansion*, 4 jilid, Stuttgart 1983. **rs**

Komisi AS untuk Hak Asasi Manusia → hak asasi manusia.

Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan → Laporan Brundtland.

Komisi Inter-Amerika untuk Hak Asasi Manusia → hak asasi manusia.

Komisi Kawasan Pasifik Selatan → SPC.

Komisi Khusus untuk Koordinasi Amerika Latin → CECLA.

Komisi PBB untuk Hak Asasi Manusia → hak asasi manusia.

Komisi Penengah PBB untuk Masalah Palestina → CCP.

Komisi Selatan-Selatan → hubungan Selatan-Selatan.

Komisi untuk Pembangunan Danau Cad → CBLT.

Komisi Utara-Selatan Merupakan komisi bebas untuk masalah pembangunan internasional (juga disebut Komisi Brandt), yang diketuai oleh Willy Brandt atas dorongan Presiden Bank Dunia, Robert McNamara. Didirikan untuk mengolah usul-usul jalan keluar dari masalah-masalah Utara-Selatan yang sangat mendesak setelah perundingan dalam Dialog Utara Selatan menemui jalan buntu. 18 anggota komisi (10 dari negara berkembang, 8 dari negara industri; di antaranya E. Frei/Cile, E. Heath/Inggris, A. Malik/Indonesia, O. Palme/Swednia), pertemuan konsultasi setiap dua tahun, 10 pertemuan di 9 negara (Desember 1977–Desember 1979). Maret 1980 diajukan Laporan Brandt. Setelah publikasi Laporan Brandt, berlangsung lima pertemuan lanjut atas undangan pemerintah-pe-

merintah nasional dan komisi-komisi: Den Haag (1980), Berlin Barat (1980), Kuwait (1982), Brussel (1982), dan Ottawa (1982). Karena kecewa terhadap kelangsungan pertemuan puncak Utara-Selatan dalam Konferensi Cancun, terutama memperhatikan resesi ekonomi di seluruh dunia, dalam pertemuan di Kuwait komisi sepakat mengolah sebuah memorandum untuk usaha-usaha memecahkan masalah yang mendesak di negara-negara Dunia Ketiga. Memorandum ini disebut Laporan Brandt Kedua, diputuskan di Ottawa, dipublikasi 1982. Komisi Brundtland (Laporan Brundtland), komisi khusus bebas PBB, bekerja mengikuti Komisi Utara-Selatan sejak tahun 1983.

Kepustakaan: W. Brandt (ed.), *Hilfe in der Weltkrise. Ein Soforiprogramm. Der 2. Bericht der Nord-Süd-Kommission*, Reinbek 1983. **dn**

Komite Konsultasi Tetap Negara-Negara Maghribi → CPCM.

Komora Kepulauan yang terletak di antara Madagaskar dan benua Afrika (Grande Comore: 1.148 km²/ibu kota Moroni; Anjouan: 424 km²; Moheli: 220 km²; Mayotte: 374 km², milik Perancis) berasal dari gunung berapi, miskin akan sumber daya alam, beriklim musim, dan perkembangan ekonominya terhambat oleh bencana angin topan tropis. Penduduk campuran Afrika-Arab-Madagaskar (tahun 1986: 409.000 penduduk, tanpa Mayotte sekitar 50.000 penduduk), 10% di antaranya hidup di perkotaan, 95% beragama Islam (minoritas Katolik, terutama di Mayotte, dan Protestan). Kecuali Moheli, pulau-pulau lain padat penduduknya. Islam menguasai sistem pendidikan. Perkembangan ekonomi (1986: pendapatan

per kapita 320 US\$) ditentukan oleh ekspor vanili, esens minyak wangi, serat sisal, kopra, kakao, dan cengkeh. Ekspor yang pernah berada seluruhnya di tangan perusahaan-perusahaan perkebunan Perancis (*Societe Bambao*), sekarang dikendalikan oleh tuan-tuan tanah Arab. Kelangsungan struktur feodal tradisional Islam dan penduduk yang sebagian besar hidup dari ekonomi subsistensi, merupakan ciri khas pertaniannya (tahun 1985: 50% PNB, 65% penduduk). Hal yang kuat adalah ketergantungan pada impor bahan pangan dan minyak bumi. Pengambil terpenting ekspor dari Negara AKP ini adalah Perancis (sekitar 50%), negara-negara ME lainnya, negara-negara Afrika Timur, dan Madagaskar (10%). Industri dan pariwisata masih kurang berkembang, tetapi mendapat bantuan dari bank pembangunan (CDB) yang didirikan tahun 1982. Selain itu, negara (2/3) juga punya saham EIB dan CCCE (*Caisse Centrale de Cooperation Economique*, Departemen Bantuan Pembangunan Perancis) dengan masing-masing 1/6 bagian.

Sampai tahun 1947 Komora dan Madagaskar merupakan teritorial Perancis di seberang lautan. Mulai tahun 1962 Komora makin mendapatkan otonomi keuangan dan administrasi. Tahun 1972 Presiden Ahmed Abdallah terpilih oleh sebuah gabungan pemilihan (*Unite*) antara partai-partai pemerintah (UMMA, Partai Komunitas Islam; RDPC: *Rassemblement Democratique du Peuple Comorien*; UDC: *Union Democratique Comorienne*) yang mewakili kepentingan kelompok *clan* keluarga Islam serta

pedagang Islam serta oposisi PA-SOCO (*Parti Socialiste Comorien*). Setelah referendum (1974) yang menyatakan tetap bergabung dengan Perancis (64%), kecuali Pulau Mayotte, sekitar 90% penduduk menyatakan ingin merdeka, ia lalu menyatakan kemerdekaan untuk tiga pulau lainnya tanggal 6 Juli 1975. Makin bertambahnya kritik terhadap proklamasi kemerdekaan yang terburu-buru dan gaya kepemimpinannya, menyebabkan kejatuhannya dan digantikan oleh Ali Soilih yang diangkat oleh sebuah Dewan Revolusi Nasional. Ali Soilih berusaha mengubah struktur negara (desentralisasi administrasi) dan masyarakat (penghapusan sistem feodal) dengan memakai metode revolusioner. Dalam politik luar negerinya ia memutuskan hubungan dengan Perancis. Lalu, Perancis menarik pulang pakar-pakarnya dan menghentikan bantuan ekonomi. Setelah terjadi sebuah kudeta yang dibiayai oleh negara-negara Arab, tahun 1978 Abdallah kembali menjadi presiden dan subsidi-subsidi dari Perancis dilanjutkan (juga sebagian dari bantuan pembangunan Kuwait dan Saudi Arabia). Bantuan pembangunan dari Perancis mencapai 30% PNB. UUD baru tahun 1978 bersifat federalis (*Republique federale islamique des Comores*), dan sejak tahun 1982 muncul partai kesatuan *Union Comorienne pour le Progres* (UCP, Uni Komora untuk Kemajuan), yang mewakili sosialisme Islam dan demokrasi. Pada pemilihan parlemen (Maret 1987) dengan memberlakukan pembatasan-pembatasan terhadap uni oposisi yang menginginkan sebuah

Uni Republik Demokrasi Komora (URDC/*Union Republique Democratique Comoriene*), UCP dapat memenangkan seluruh 42 kursi. Terhadap rezim Abdallah yang sejak perubahan undang-undang dasar Desember 1985 tidak hanya terpilih sebagai kepala negara (bulan Oktober terpilih kembali untuk masa jabatan enam tahun) melainkan juga sebagai perdana menteri, militer beberapa kali melakukan usaha kudeta (Maret 1985, Desember 1987). Masa depan Pulau Mayotte tidak jelas, menurut referendum tahun 1976 (99% ingin tetap termasuk Perancis) tetap menjadi milik Perancis sebagai *collectivite territoriale*. Presiden Perancis yang baru-baru ini memberikan sinyal persetujuan untuk penggabungan pulau itu ke Republik Islam Komora, mendapatkan kritik dari OAU dan PBB.

Kepustakaan: K. Ziemer, "Komoren", dlm.: F. Nuscheler/K. Ziemer, dll., *Politische Organisation und Repräsentation in Afrika*, Berlin/New York 1978, vol. 2, hlm. 979 dst.; J.P. Breitengröss, "Komoren", dlm.: HDW II, 5, Hamburg 1982, hlm. 206 dst.

ah komunalisme Dalam literatur merupakan istilah yang dipakai/dinilai bersifat kontradiktif. Di satu pihak menandai pemakaian kembali prinsip-prinsip kerja sama komunitas desa tradisional Afrika yang ingin dihidupkan kembali dalam rangka *community development*, koperasi, dan pembangunan pedesaan (→ *ujamaa*, *fokonolona*, → Madagaskar). Di lain pihak, komunalisme dimengerti sebagai perilaku yang berorientasi fenomena etnis, religius, dan/atau kultural. Dengan demikian, pengertian ini mengangkat konflik-konflik etnis, kepercayaan dan kultural, oleh kelompok-

pokkelompok masyarakat. (a.l. → tribalisme).

dn Konferensi Alma Ata → *Primary Health Care*.

Konferensi Bandung Pendahulu konferensi-konferensi nonblok; merupakan konferensi Asia Afrika pertama April 1955, yang dihadiri 23 wakil negara Asia dan 6 negara Afrika. Mengeluarkan "Lima Prinsip Kehidupan Bersama yang Damai" berkaitan dengan prinsip-prinsip India kuno: saling menghormati kedaulatan teritorial, saling tidak menyerang, saling tidak mencampuri urusan dalam negeri yang lain, persamaan dan saling membantu, kehidupan bersama yang damai.

Kepustakaan: D. Schröder, *Die Konferenzen der Dritten Welt*, Hamburg 1968.

dn Konferensi Cancun Pertemuan puncak 22 kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara industri (9) dan negara berkembang (13) yang berlangsung Oktober 1981 di Meksiko. Ditekankan pentingnya kerja sama internasional yang lebih erat dan perundingan global; didiskusikan a.l. mengenai pengadaan bahan pangan dan pembangunan pedesaan, bahan mentah, perdagangan dunia dan industrialisasi negara berkembang, energi dan transfer sumber daya ke negara berkembang.

dn Konferensi Dunia mengenai Ilmu Pengetahuan dan Teknik untuk Pembangunan → UNCT.

Konferensi Dunia mengenai Reformasi Pertanian dan Pembangunan Pedesaan → WCARRD.

Konferensi Gurun PBB → UNCOD.

Konferensi Hukum Laut → Hukum Laut Internasional.

Konferensi Islam → OIC.

Konferensi Kerja Sama Ekonomi Internasional → CIEC.

Konferensi Lingkungan Dunia Dilakukan tahun 1972 oleh PBB di Stockholm, diikuti 113 negara tanpa Uni Soviet, Polandia, Hongaria, dan Cekoslowakia karena tidak diikutsertakannya Jerman Timur. Tema pokok adalah hubungan antara lingkungan dan pembangunan. Pengertian lingkungan saja menjadi perdebatan. Bagi negara berkembang, lingkungan tidak terbatas pada alam saja, melainkan meliputi kelaparan dan penderitaan di Dunia Ketiga. Negara berkembang khawatir akan pengurangan kemungkinan-kemungkinan membangun perekonomiannya dengan alasan pembatasan pertumbuhan secara ekologi sehingga menentang gambaran-gambaran yang dilontarkan dalam perdebatan mengenai pertumbuhan nol dan pertumbuhan yang terkualifikasi. Akhirnya, konflik ini tidak berlanjut karena wakil-wakil ekonomi dan negara industri menginginkan pertumbuhan dan perkembangan industri di negara berkembang. Kepentingan ekonomi kelompok-kelompok negara tercermin dalam saran-saran konferensi yang membebani politik lingkungan dalam ukuran dunia.

Dalam pernyataan mengenai lingkungan yang manusiawi, dikemukakan: a. memanfaatkan sumber daya secara lebih berhati-hati; b. tidak membuang bahan-bahan beracun ke lingkungan; c. memperhatikan masalah-masalah ekologi dalam industrialisasi dan politik pembangunan; d. saling menukar informasi internasional dan kerja sama di semua tingkat; e. proses pembangunan di negara ber-

kembang perlu menghilangkan lapar dan penderitaan; f. langkah-langkah melindungi lingkungan tidak boleh membatasi kemungkinan pembangunan di negara berkembang. Untuk pembahasan terus-menerus masalah lingkungan didirikan UNEP. Mei 1982 Sidang Umum PBB memanggil sebuah konferensi khusus Dewan Pemerintah UNEP di Nairobi yang memperlihatkan bahwa tujuan-tujuan dasar Stockholm tidak tercapai dan situasi lingkungan di seluruh dunia makin buruk. Juni 1992 berlangsung Konferensi Lingkungan Dunia di Rio de Janeiro, Brasilia, membahas masalah: a. usaha-usaha melindungi hutan tropis; b. pengembangan lanjut fasilitas lingkungan global (GEF, *Global Environment Facility*) oleh Bank Dunia; c. Program Aksi Agenda 21 untuk kerja sama masa depan dalam hal lingkungan dan politik pembangunan. Pembiayaan untuk program aksi ini datang dari pihak negara industri. Konferensi yang diikuti sekitar 178 negara dan sejumlah besar lembaga swadaya masyarakat menghasilkan sebuah deklarasi, dua konvensi, dan satu program aksi. → Agenda 21; Konvensi mengenai Perlindungan Keanekaragaman Hayati; Konvensi mengenai Perubahan Iklim; Deklarasi Rio; Global 2000; Laporan Brundtland.

Kepustakaan: M.R. Biswas/A.K. Biswas, "Stockholm und 10 Jahre danach", dlm.: *E+Z* 8/9, 1982, hlm. 4 dst.; Umwelt und Entwicklung, *Auslandskurier* 6/92, dlm. *BMZ-Spiegel der Presse*, 12/92, hlm. 360-361. dn

Konferensi Lingkungan PBB → Konferensi Lingkungan Dunia.

Konferensi Pangan Dunia Berlangsung tahun 1974 di Roma; dilakukan

oleh Sidang Umum PBB atas inisiatif AS dan nonblok. *Pokok pembahasan:* bantuan kepada produksi, bantuan pangan dan perdagangan produksi pertanian dunia. *Hasil utama:* pernyataan untuk melenyapkan kemiskinan dan kurang makan; penonjolan nilai sektor pertanian dalam proses pembangunan, produksi bahan pangan di negara berkembang serta reformasi pertanian. Konferensi menyaranakan pendirian IFAD dan WFC. → pangan.

mlk
Konferensi PBB mengenai Perdagangan Dunia dan Pembangunan → UNCTAD.

Konferensi PBB mengenai Perkotaan dan Pemukiman → HABITAT.

Konferensi Penduduk Dunia Dilakukan PBB, sampai sekarang pernah dilakukan di Roma (1954), Beograd (1965), Bukares (1974), dan Mexico City (1984). Terutama sejak konferensi tahun 1974, masalah kependudukan menjadi tema internasional. Diakui bahwa: a. politik kependudukan berkaitan erat dengan tujuan perbaikan kualitas hidup penduduk sebuah negara; b. keluarga berencana merupakan sebuah investasi sosial; c. prinsip bahwa sebuah negara mempunyai kedaulatan pada formula politik kependudukan. Konferensi ke-3 memutuskan sebuah rencana aksi penduduk dunia dengan target sampai tahun 1985: penurunan pertumbuhan penduduk di negara berkembang dari 2,4% menjadi 2%, di seluruh dunia dari 2% menjadi 1,7% (negara industri 0,8% menjadi 0,7%), peningkatan tingkat harapan hidup dari 62 tahun menjadi 74 tahun, artinya peningkatan 12 tahun di Ame-

rika Latin, 17 tahun di Asia, dan 28 tahun di Afrika; penurunan tingkat kelahiran di negara berkembang dari 38 menjadi 30 per seribu. Di Mexico City ditekankan terutama posisi perempuan dalam keluarga dan masyarakat serta arti mereka dalam keluarga berencana. → penduduk, → perempuan di Dunia Ketiga. dn
Konferensi Penduduk PBB → Konferensi Penduduk Dunia.

Konferensi Perdagangan Dunia → GATT.

Konferensi Perempuan Dunia → perempuan di Dunia Ketiga.

konfesionalisme → Lebanon.

Konflik Amerika Tengah Sejak kemerdekaan Amerika Tengah (1821) lebih sering terjadi krisis-krisis politik, meskipun politik di kawasan itu tidak stabil sejak dulu. Setelah keberhasilan revolusi Sandinista di Nikaragua menandai awal dari konflik Amerika Tengah, dengan ciri-ciri utama: a. konflik Amerika Tengah meliputi tiga pusat konflik (Nikaragua, El Salvador, Guatemala) yang terutama dilakukan secara militer; b. meskipun konflik secara militer tidak berhubungan satu sama lain, tetapi dalam politik, ekonomi, dan psikologi mengenai ke seluruh kawasan itu; c. konflik Amerika Tengah sangat terinternasionalisasi, AS mempunyai peran kunci menentukan situasi kekuatan militer dan dalam kasus perang *contra* merupakan penyebab konflik; d. usaha-usaha menyelesaikan konflik meliputi seluruh Amerika Tengah.

Formasi konflik: di Nikaragua dibedakan antara revolusi dan perang *contra*. Dengan kemenangan revolusi

Sandinista Juli 1979 setelah Kuba, sebuah rezim yang sosialis-revolusioner lain menjadi mapan di "halaman belakang" AS. Tahun 1981 untuk pertama kalinya muncul perlawanan dari kelompok kontra-revolusi (*contras*) yang dibangun besar-besaran, dikoordinasi dan dibiayai oleh AS. Setidaknya sampai akhir tahun 1987 perang *contra* masih berlangsung.

Di El Salvador tahun 1979/1980 terbentuk front-front perang saudara yang jelas: sebuah gelombang represi berdarah mengejar para revolusioner atau yang dianggap revolusioner; berbagai kelompok gerilya sejak tahun 1980 makin aktif dan mengkoordinasi diri di akhir tahun tersebut. Februari 1981 pecah perang saudara, setelah pemberontakan rakyat yang diserukan oleh front oposisi FDR/FLMN yang kiri-revolusioner mengalami kegagalan. Meskipun masih dilakukan *counterinsurgency* (pemboman daerah terutama tahun 1983-1985), gerilya melakukan perang menggerogoti pemerintah, pemerintah yang Kristen-demokrat dan (sejak tahun 1989) ekstrem kanan.

Kelompok gerilya di Guatemala berperang sejak tahun '60-an melawan pemerintah militer; pernah sementara waktu hampir musnah dan mencuat kembali di awal tahun '80-an. Meskipun berlangsung penggabungan tahun 1982, kelompok gerilya tetap kecil. Selain itu, pemerintah militer sampai pertengahan tahun '80-an melakukan kegiatan *counterinsurgency* secara besar-besaran berkaitan dengan program-program pembangunan, mencerminkan "pembunuhan

besar-besaran" (Grenz) terhadap penduduk Indian. Menurut pernyataan militer, gerilya yang makin berkurang jumlahnya itu lebih merupakan gangguan daripada ancaman.

Penyebab-penyebab utama konflik Amerika Tengah: meskipun revolusi di Nikaragua, perang saudara di El Salvador dan Guatemala mempunyai persyaratan situasi nasional masing-masing, tetapi masalah berakar pada kompleks persoalan historis yang serupa: pertentangan antara perkembangan sosio-ekonomi dan stagnasi politik-militer. Di tahun '50-an, '60-an, dan '70-an Amerika Tengah mengalami kenaikan ekonomi sebagai akibat sebuah pertumbuhan padat modal yang dipaksakan dan berorientasi ekspor (sebagian dalam rangka MCCA), dengan mengorbankan terutama petani kecil yang menjalankan sektor bahan pangan dasar. Muncul kelompok-kelompok sosial baru, yaitu proletariat desa dan kota serta (di sisi laba) sebuah lapisan menengah. Sementara di Kosta Rika struktur sosial yang muncul melambatkan polarisasi ekonomi; semakin besarnya ketidakadilan pembagian menandai situasi negara-negara lainnya. Penentu krisis adalah sistem-sistem politik yang tidak dapat mengolah perubahan ekonomi dan sosial: pemerintah di Nikaragua, El Salvador, dan Guatemala mengokohkan situasi ketidakadilan sosial dan *status quo* politik. Kurangnya ruang gerak politik legal, berkaitan dengan teror dari pihak negara meskipun menghadapi oposisi yang moderat sekalipun dan rontoknya bangunan-bangunan demo-

krasi, makin mendorong oposisi politik di tahun '70-an ke arah radikal.

Meskipun perang *contra* tanpa diragukan merupakan akibat revolusi Sandinista dan menjadi subur melalui polarisasi politik dalam negeri, pembangunan, koordinasi, dan pembiayaan *contra* jelas merupakan alat terselubung dari politik AS di bawah pemerintahan Reagan. Identitas kepentingan antara pemerintah AS dengan berbagai kelompok *contra* sampai sekarang jelas tidak ada.

Dimensi nasional dan regional konflik Amerika Tengah: revolusi Sandinista membuat trauma seluruh kawasan. Perilaku politik dalam dan luar negeri masing-masing elite politik dan militer serta kaum kiri revolusioner di El Salvador dan Guatemala, memberikan kesan bahwa struktur kekuasaan dan pemilikan yang sudah terlalu mapan di Amerika Tengah dapat digoyahkan melalui kekerasan. Dalam rangka konflik Amerika Tengah berlangsung militerisasi kawasan tersebut—terlihat dalam pemaksaan persenjataan dan penumpukan kekuatan militer dan (dalam kasus demiliterisasi Kosta Rika) dinas rahasia, pecahnya perang saudara, perluasan Honduras sebagai batu loncatan AS di kawasan itu, pangkalan-pangkalan *Contra* di Honduras (dan Kosta Rika), dsb. *Stockholm International Peace Research Institute* (SIPRI) tahun 1988 memberikan angka korban perang lebih dari 100.000 orang; El Salvador (1979–1987): sekitar 17.000 orang militer dan 40.000 orang sipil tewas; Guatemala (1967–1987): 2.000 orang militer, 43.000 orang sipil; Nikaragua

(1981–1987): 9.000 orang militer, 3.000 orang sipil. Meskipun ini merupakan perkiraan kasar, terlihat nyata tingginya jumlah orang sipil di antara para korban di Guatemala dan El Salvador. Pertengahan tahun 1986 sekitar 2,5–3 juta orang Amerika Tengah mengungsi: sekitar 1,5 juta orang Guatemala (di antaranya 1 juta pengungsi pedesaan, *desplazados*, yang tidak dapat diliput oleh statistik UNHCR), sekitar 1,3 juta orang El Salvador (500.000) dan 20.000–40.000 orang Nikaragua karena alasan-alasan politik menjadi pusat perhatian dunia internasional. Amerika Tengah dan daerah-daerah perbatasan Meksiko dan Belize berkembang menjadi "kepulauan kamp-kamp pengungsian" (Nuscheler).

Secara ekonomi, konflik Amerika Tengah selain kerugian sangat besar akibat perang langsung dan tidak langsung, menyebabkan kelumpuhan MCCA. Sekaligus mengalir masuk bantuan ekonomi dan militer besar-besaran ke kawasan tersebut (kecuali ke Nikaragua dan Guatemala) mulai mengatasi kerusakan-kerusakan ekonomi. Ekonomi Nikaragua—dibantu terutama oleh blok Timur, terkucil dari pasar AS dan kredit-kredit multilateral—tahun 1988 macet sama sekali.

Dalam kaitannya dengan konflik Amerika Tengah secara politis muncul pernyataan-pernyataan formal-demokratis dari militer di El Salvador dan Guatemala: pemerintah AS mendesak legitimasi bantuan ekonomi dan militer pada pemilihan dan perbaikan situasi katastrofe dalam hal hak asasi manusia. Selain itu, iklim

perang saudara yang dipaksakan AS di El Salvador, Guatemala, dan di bawah bendera lain di Nikaragua, berhadapan dengan sebuah keterbukaan demokratis. Secara regional, pemerintah Kosta Rika, El Salvador, dan Honduras muncul bersama untuk menentukan perilaku mereka terhadap pemerintah Sandinista dalam hal politik AS. Dengan perjanjian Esquipulas II, pemerintah Amerika Tengah menjauhkan diri dari politik Nikaragua Reagan.

Dimensi internasional konflik Amerika Tengah: dengan penolakan rezim-rezim di Amerika Tengah yang secara tradisional berhubungan dengan AS, oposisi sosialis-revolusioner di sana makin bersikap sangat anti-Amerika, ketika pemerintah Reagan (1981-1988) menginterpretasikan krisis dalam perspektif konflik Timur-Barat sebagai kehilangan kekuasaan di tingkat global. Sejak tahun 1981 pemerintah AS melakukan sebuah politik *reassertionism*, konsep pokoknya: *containment* (peredaman) dan *roll back* (pendesakan balik), terhadap sesuatu yang dianggap ekspansi komunis. Hal ini secara konkret berarti sebuah "politik" destabilisasi politik, ekonomi, dan militer (sebagian tersembunyi) terhadap pemerintah Sandinista, serta bantuan militer dan ekonomi terutama untuk pemerintah El Salvador, Honduras, Kosta Rika (dan Guatemala) dengan tujuan agar mereka bisa mempersenjatai diri dan menjadi imun menghadapi kelompok kiri revolusioner dan mempengaruhi mereka dalam hal politik AS terhadap Nikaragua. Namun, kongres AS membatasi dana tersebut (a.l. *Boland-*

Amendments, stop bantuan militer untuk *contra* di pertengahan tahun 1987, memblokir bantuan militer dan bantuan ekonomi besar-besaran ke Guatemala sampai berlangsungnya pemilihan Desember 1985).

Uni Soviet mengacu aktivitas di Amerika Tengah kepada Nikaragua melalui pengiriman senjata (terutama untuk perang menghadapi *counterinsurgency*); bantuan ekonomi menjamin dapat berlangsungnya pemerintahan Sandinista tanpa mendorong pembangunan sebuah masyarakat sosialis (seperti di Kuba). Castro-bersimpati dengan kelompok kiri revolusioner di Amerika Tengah-meskipun memberikan bantuan ekonomi dan pengiriman ribuan relawan pembangunan dan penasihat militer ke Nikaragua, mengaktifkan diri untuk sebuah perundingan jalan keluar di El Salvador, sebuah kesepakatan antara Nikaragua dan AS serta untuk inisiatif Kelompok Contadora. Pengusaha menengah regional lainnya-Meksiko, Venezuela, Kolombia (dan Panama)-berusaha melalui inisiatif Contadora, terutama menarik keluar kawasan tersebut dari konflik Timur-Barat dan bersama-sama kelompok penunjangnya (Argentina, Brasilia, Uruguay, Peru) suatu ketika berubah menjadi kutub tandingan Amerika Latin menghadapi kekuasaan hegemoni AS. Eropa Barat bersikap diplomatis dan ekonomis terhadap kawasan itu: dengan mendukung inisiatif-inisiatif perdamaian serta memberikan bantuan ekonomi dan perdagangan.

Usaha-usaha pemecahan konflik: usaha yang mempunyai jangkauan ter-

luas untuk menyelesaikan konflik Amerika Tengah sampai kini adalah inisiatif Contadora dan perjanjian Esquipulas II. Untuk menghindari sebuah perang regional (Honduras-Nikaragua) dan menghindari kemungkinan intervensi AS, inisiatif Contadora yang dilakukan tahun 1983 bertitik berat dalam bidang politik keamanan. Negara-negara Amerika Tengah September 1983 mengesahkan sebuah katalog tujuan yang berisi 21 butir (a.l. mengakhiri perang, pembekuan senjata ofensif, penarikan sarana-sarana militer asing, larangan mendukung pasukan ireguler), tetapi dengan berbagai alasan sebuah akte perdamaian (1984-1986) ditolak. Sebab utama: "ketidaksetujuan pemerintah AS terhadap sebuah perjanjian yang mengakui eksistensi dan kelangsungan revolusi Sandinista di Nikaragua" (Kurtenbach, 1988). Usaha-usaha Contadora gagal meskipun ada dukungan kuat dunia internasional (*PBB, *OAS, ME, gerakan nonblok, kelompok penunjang) dan dengan rencana Arias tahun 1987 dipakai kembali (kali ini oleh negara-negara Amerika Tengah sendiri). Berdasarkan rencana Arias, presiden-presiden Amerika Tengah 7 Agustus 1989 di Esquipulas/Guatemala menandatangani sebuah perjanjian perdamaian (Esquipulas II atau Perjanjian Guatemala). Dengan mengecualikan pertentangan-pertentangan politik keamanan, titik beratnya adalah politik dalam negeri, terutama masalah bentuk negara yang dalam rencana Contadora lebih merupakan masalah sampingan. Titik berat: dialog pemerintah dengan oposisi tak bersenjata, usaha

sebuah gencatan senjata dengan gerilyawan, penghapusan situasi darurat, pemberian hak-hak politik, pluralisme politik (partai) dan negara hukum, pemilihan bebas, amnesti politik dan tidak mendukung kelompok-kelompok gerilyawan, pelarangan penggunaan teritorialnya untuk mendestabilisasi negara lain.

Perjanjian ini direalisasi secara bertahap: di El Salvador kelompok kanan memblokir integrasi politik kaum gerilya dengan cara menolak tawaran mereka untuk ikut pemilihan tahun 1989 jika ada pengunduran pemilihan selama 6 bulan (dan menerima hasilnya). Akibatnya, perang saudara makin sangat tajam; jalan keluar politik semakin menjauh dengan terjadinya kemenangan kaum kanan (Maret 1989). Di Guatemala kekuasaan militer dan "pasukan pembunuh" terus menentang demokratisasi dan integrasi para gerilyawan. Sebaliknya, pemerintah Nikaragua dengan reformasi-reformasi demokratis dan amnesti meluas (awal tahun 1988 dan tahun 1989) membuka jalan untuk pemilihan bebas tahun 1990—di luar dugaan—menjatuhkan pemerintahan Sandinista; sebaliknya, presiden-presiden Amerika Tengah Februari 1989 sepakat mengolah sebuah rencana untuk pembubaran kelompok *contra*.

Kepustakaan: D.E. Schulz/D.H. Graham (ed.), *Revolution and Counterrevolution in Central America and the Caribbean*, Boulder/London 1984; R.S. Leiken (ed.), *Central America. Anatomy of Conflict*, New York 1984; S.C. Ropp/J.A. Morris (ed.), *Central America. Crisis and Adaption*, Albuquerque 1984; W. Grabendorff dli. (ed.), *Political Change in Central America: Internal and External Dimensions*, Boulder/London 1984; K.

Coleman/G.C. Hearing (ed.), *The Central American Crisis*, Wilmington/Delaware 1985; R.E. Feinberg/B.M. Bagley, *Development Postponed*, Boulder/London 1986; W. Grenz, "Flüchtlingsströme", dlm.: *Latinamerika. Analysen, Daten, Dokumentation* 3 (1986), No. 6/7, hlm. 75 dst.; R. Fagen, *Forging Peace*, New York 1987; H.-W. Krumwiede, *Revolution in Zentralamerika als Problem westlicher Aussenpolitik*, Ebenhausen 1987; ibid, "Der Arias-Friedensplan für Zentralamerika", dlm.: *AP* 39 (1988), hlm. 63 dst.; W. Dietrich, *Menschenrechte und Menschenrechtsschutz in Zentralamerika*, Saarbrücken 1988; F. Nuscheler, "Das Flüchtlingsproblem in Zentralamerika", dlm.: *sowi* 17 (1988), 1, hlm. 20 dst.; S. Kurtenbach, *Zentralamerika: Frieden in Sicht?*, dlm. *Jahrbuch Dritte Welt* 1989, München 1988, hlm. 187 dst. mik

Konflik Arab-Israel → Konflik Timur-Tengah.

Konflik Eritrea → Etiopia.

Konflik Falkland/Malvinas Perang yang berlangsung memperebutkan Kepulauan Falkland/Malvinas tahun 1982 antara Argentina dan Inggris, di dunia internasional terlihat seperti sebuah anakronisme.

1. Kepulauan Falkland terletak di Atlantik Selatan, 450 km dari pantai Argentina, terdiri atas dua pulau utama, yaitu Falkland Timur dan Falkland Barat serta sekitar 200 pulau. Berpenduduk sekitar 1.800 jiwa, sebagian besar keturunan Inggris. Perekonomian bertopang terutama pada peternakan domba dan ekspor benang wol. Selain itu, ada milik kolonial Inggris *Falkland Dependence* yang tidak dihuni, termasuk di antaranya Georgia Selatan, Shetland Selatan, dan Graham Land Antarktis, yang juga dituntut oleh Argentina. Kekayaan perikanan kawasan tersebut menarik untuk ekonomi. Baik Argentina maupun Inggris selamanya tidak ber-

usaha sungguh-sungguh untuk memanfaatkan potensi sumber daya laut yang kaya itu (**offshore* minyak bumi dan gas bumi). Pecahnya perang tidaklah disebabkan masalah di bidang persaingan ekonomi, tetapi lebih banyak akibat konflik yang berakar pada sejarah kolonial Inggris dan Spanyol; eskalasi tiba-tiba tahun 1982 lebih berasal dari faktor-faktor internal kedua pihak tersebut.

2. Penemuan kepulauan itu saja telah menimbulkan perdebatan dan terutama dinyatakan Inggris sebagai miliknya (1592). Meskipun Inggris merampas kepulauan itu dan menamakannya *Falkland Sound*, penyerbuan dan penghuniannya berlangsung setelah ekspedisi seorang Perancis, Bougainville (1764) yang menamakan pulau itu *Malouines*. Sekaligus berlangsung penghunian Inggris di sebelah barat pulau tersebut. Sebagai protes terhadap desakan kolonial ke daerah Spanyol tersebut, Perancis menyerahkan kepulauan itu kepada Spanyol dengan ganti rugi. Tahun 1771 dengan suatu syarat, Inggris mengakui kedaulatan Spanyol atas Malvinas. Setelah berlangsung pertikaian mengenai kemerdekaan Argentina, mula-mula kepulauan tersebut tidak ada yang menduduki. Tahun 1820 Malvinas diduduki oleh Argentina. Penguasaan Inggris atas kepulauan itu tahun 1832/1833 diuntungkan oleh situasi pertikaian masalah perikanan antara AS dan Argentina sehingga AS menarik dukungannya terhadap tuntutan Argentina akan Malvinas. Sejak itu, Malvinas menjadi milik Inggris.

3. Masalah internasional konflik tersebut terletak pada tumpang tindihnya prinsip-prinsip hukum yang saling bersaing. Hal pokok adalah kontradiksi antara prinsip dekolonisasi yang seharusnya menyerahkan kepulauan tersebut kembali ke Argentina, dan hak menentukan sendiri oleh penduduk Malvinas yang ingin tetap bersama Inggris. Inggris menyatakan diri sebagai penemu dan penghuni pertama Malvinas; hak-hak ini tidak ditarik kembali dengan adanya perjanjian tahun 1771/1774 tersebut dan kekuasaan *de facto* sejak tahun 1833 merupakan status pemilikan tambahan. Argentina yang tidak dapat disangkal merupakan penerus hukum penguasa kolonial Spanyol sebaliknya merasa sebagai pemilik sah Malvinas dan mengaitkan letak geografis dan kemiripan geologis kepulauan itu dengan daratan Argentina. Oleh karena itu, konflik itu tidak dapat diselesaikan di tingkat hukum internasional, melainkan memerlukan suatu jalan keluar politis.

4. Sidang umum PBB tahun 1965 menganjurkan agar kedua pihak mengadakan perundingan untuk mencari jalan keluar konflik tersebut dengan memperhatikan prinsip dekolonisasi dan hak menentukan diri sendiri. Dalam perundingan-perundingan bilateral yang kemudian dilakukan, didapatkan kemajuan-kemajuan sehingga tahun 1971-1974 dapat ditandatangani tiga perjanjian yang mengaitkan lebih erat Malvinas ke daratan Argentina. Dalam resolusi PBB tahun 1973 perundingan dipercepat dengan tujuan mengakhiri situasi kolonial. Sejak adanya laporan

Komisi Shackleton dari Inggris (1976), Inggris bersedia mengadakan perundingan mengenai masalah kedaulatan. Namun, ketika penduduk Malvinas dalam sebuah pemungutan suara tahun 1981 jelas tetap ingin mempertahankan *status quo*; delegasi Inggris kembali menyatakan bahwa masalah kedaulatan tidak dapat dirundingkan lagi. Hal ini kembali menajamkan konfrontasi keduanya. Alasan-alasan politik dalam negeri, yaitu situasi ekonomi Argentina tahun 1981/1982 memburuk dengan dramatis, pertikaian-pertikaian internal dalam diri junta militer, menyebabkan Argentina akhirnya menduduki kepulauan tersebut 2 April 1982. Gelombang antusiasme nasional di Argentina kelihatannya menguatkan perhitungan pihak militer, reaksi Inggris sama sekali tidak diperhitungkan. Pemerintah Inggris yang juga karena masalah ekonomi berada dalam situasi terjepit, lalu mengirimkan armada perang. AS memiliki kewajiban persekutuan terhadap keduanya, setelah gagal menjadi perantara, melepaskan sikap netralnya dengan berpihak ke Inggris. Setelah berlangsung beberapa pertempuran laut dan perampasan kembali ibu kota Port Stanley oleh Inggris, perang berakhir dengan menyerahnya tentara Argentina di Malvinas tanggal 15 Juni 1982.

5. Kekalahan Argentina memberikan dorongan terakhir mundurnya militer dari kekuasaan; perang untuk politik luar negeri itu tidak menyebabkan Argentina meninggalkan kubu Barat, seperti dikhawatirkan sebelumnya. Argentina yang demokratis tetap menyatakan tuntutan-tuntutan

seperti sebelumnya. Namun, Inggris tetap bersikeras untuk berunding mengenai masalah kedaulatan. Oktober 1986 terjadi konfrontasi lagi ketika zone perbatasan Inggris meluas ke kepulauan tersebut sehingga merugikan perjanjian perikanan antara Argentina dan Uni Soviet. Sejak itu, tidak ada hasil-hasil perundingan, konflik itu tetap bagaikan api dalam sekam.

Kepustakaan: D. Sabaté Lichtschein, *Problemas argentinos de soberania territorial*, Buenos Aires 1979; R.O. Schultze, "Falkland-Inseln", dlm.: P. Waldmann (ed.), *Politisches Lexikon Lateinamerika*, München 1982, hlm. 334 dst.; M. Ehrke, "Argentinien und der Krieg im Südatlantik", dlm.: *Jahrbuch Dritte Welt I*, München 1983, hlm. 134 dst.; J.C. Puig, *Malvinas regimen internacional*, Buenos Aires 1983; A.I. Haffa, *Beagle-Konflik und Falkland (Malvinas)-Krieg. Zur Aussenpolitik der argentinischen Militärregierung 1976 bis 1983*, München/Köln etc. 1987; C. Bluth, "The British Resort to Force in the Falklands/Malvinas Conflict", dlm.: *Journal of Peace Research*, 24 (1), 1987, hlm. 5-20.

hb

Konflik Ogaden → Etiopia, Somalia.

Konflik Timur-Barat → nonblok, perang di Dunia Ketiga, Konflik Utara-Selatan, persenjataan.

Konflik Timur-Tengah Pokok Konflik Timur-Tengah adalah pertikaian dua bangsa mengenai haknya atas tanah Palestina. Akibat perang Arab-Israel sejak tahun 1948, konflik ini meluas menjadi konflik teritorial negara antara Israel dengan negara-negara Arab tetangganya. Akar historis Konflik Timur-Tengah terletak di Eropa abad ke-19. Reaksi terhadap antisemitisme yang makin tumbuh di Eropa memunculkan gerakan zionisme politik yang bertujuan mendirikan sebuah negara Yahudi di Palestina,

agar dapat menciptakan sebuah rumah nasional untuk komunitas kepercayaan Yahudi.

Setelah Perang Dunia I Palestina (sebelumnya bagian dari Kerajaan Osmania) sebagai mandat liga bangsa-bangsa diserahkan ke Inggris yang sudah sejak tahun 1917 wajib membantu membangun sebuah "rumah nasional" bagi orang Yahudi (*Balfour-Declaration*). Inggris membantu perpindahan orang Yahudi. Karena kekuatan mereka di keuangan, pengetahuan teknik, dan melalui pembelian tanah secara sistematis, bisa makin mendesak penduduk Arab. Protes-protes orang Arab terhadap kolonialisme pemukiman zionis (a.l. mogok umum tahun 1936-1939) mula-mula menekan Inggris, lalu mengurangi imigrasi Yahudi sejak tahun 1939. Imigrasi ilegal yang berlangsung terus terutama sejak akhir Perang Dunia II, menimbulkan konflik Inggris-Yahudi yang mulai meluas ke pertikaian-pertikaian kekerasan antara orang Arab dan Yahudi. 29 November 1947 PBB memutuskan membagi Palestina menjadi dua negara (sebagian Arab dan sebagian Yahudi) dan sebuah zone internasional (Yerusalem). Rencana pembagian ini (resolusi PBB 183) menemui kegagalan. 14 Mei 1948 orang Yahudi memproklamasikan negara Israel. Sehari kemudian, terjadi perang Arab-Israel pertama, yang menyebabkan Israel dapat meluaskan kawasan negaranya dan sekitar 750.000 pengungsi Palestina kehilangan tanah air. Yordania menganeksi tanah Yordan Barat; Jalur Gaza berada di bawah administrasi Mesir. *Status quo* baru men-

jadi tema konfrontasi total antara Israel dan negara-negara Arab yang bersatu (→ gerakan Pan), terutama karena permusuhan terhadap negara Yahudi. Untuk mendapatkan dukungan kepentingannya, negara-negara Arab ini lalu mengacu ke Barat dan tahun 1956 ikut ambil bagian dalam "ekspedisi menghukum" Mesir dalam rangka krisis Suez yang dilakukan oleh Inggris dan Perancis.

Sejak pertengahan tahun '50-an Konflik Timur-Tengah menjadi fokus Konflik Timur-Barat, AS berada di pihak Israel dan Uni Soviet dengan bantuan negara-negara Arab yang berorientasi sosialis dan anti-Barat (Mesir, Suriah) berusaha memasukkan kepentingan strategi globalnya ke kawasan tersebut.

Juni 1967 dalam sebuah serangan (Perang 6 Hari) Israel berhasil mengalahkan Mesir, Yordania, dan Suriah, serta menduduki Semenanjung Sinai milik Mesir, Tepi Barat milik Suriah, Yerusalem Timur dan Pegunungan Golan milik Suriah. Akibatnya, orang-orang Palestina dengan bantuan perjuangan gerilya dan dalam bentuk terorganisasi PLO, menuntut tanah Palestina yang seluruhnya berada dalam kekuasaan Israel dan menimbulkan masalah pengungsian dalam dunia internasional.

November 1967 Dewan Keamanan PBB dengan Resolusi 242 berusaha menciptakan dasar-dasar untuk jalan keluar politik masalah Konflik Timur-Tengah. Resolusi ini menuntut Israel mengundurkan diri dari seluruh daerah yang didudukinya, memberikan semua negara di Timur Tengah hak atas eksistensi

yang tidak terancam dalam sebuah batas yang aman dan menuntut jalan keluar yang adil dari masalah pengungsian. Sejak itu, butir-butir ini menjadi elemen inti dalam banyak usaha perdamaian. Namun, tahun 1967-1971 semua pendekatan menemui kegagalan karena kurangnya kesediaan kedua pihak untuk melakukan kompromi. Israel yang makin bersikap menolak karena adanya aksi-aksi teror PLO, mulai membangun perumahan-perumahan Yahudi di daerah yang diduduki.

Mesir menjauh dari Uni Soviet setelah meninggalnya Nasser tahun 1970 dan perang Arab-Israel keempat bulan Oktober 1973 yang menguatkan kesadaran orang Arab karena berhasil merampas kembali sebagian Semenanjung Sinai, menyebabkan pergeseran-pergeseran kekuatan Konflik Timur-Tengah pada tingkat internasional dan regional sehingga pada akhir tahun '70-an memperlihatkan kemungkinan sebuah jalan keluar politis. Pemakaian "senjata minyak" (1973/1974) oleh OPEC dan makin banyaknya pengakuan internasional kepada PLO serta tuntutan menentukan diri sendiri oleh orang Palestina, sejak tahun 1973 mengubah pandangan dunia dengan tidak menguntungkan Israel. Dalam rentetan Perang Oktober, AS dapat berperan sebagai perantara yang diakui (Konferensi Timur Tengah di Jenewa, Desember 1972, perjanjian gencatan senjata antara Israel di satu pihak dengan Mesir/Suriah di lain pihak tahun 1974/1975). Puncak prestasi AS sebagai perantara setelah muncul inisiatif perdamaian Presiden Sadat

dari Mesir (perjalanan ke Israel) adalah Perjanjian Camp David (September 1978) yang diharapkan dapat menjadi landasan untuk jalan keluar perdamaian yang menyeluruh, tetapi kenyataannya malah menjadi penajaman baru Konflik Timur-Tengah. Perjanjian ini di satu pihak mengandung prinsip-prinsip perjanjian perdamaian bilateral antara Israel dan Mesir dan di lain pihak merupakan sebuah rencana jalan keluar masalah Palestina: Tepi Barat dan Jalur Gaza akan mendapatkan administrasi sendiri untuk sebuah masa peralihan (diformulasikan sangat kabur), sementara itu akan dirundingan status kawasan tersebut. Hanya bagian pertama perjanjian itu direalisasi dengan perjanjian perdamaian Israel-Mesir Maret 1979, penarikan diri Israel dari Semenanjung Sinai sampai April 1982. Masalah pokok Konflik Timur-Tengah, yaitu masalah Palestina, dengan berbagai alasan tetap tidak terpecahkan: a. Pemerintah Israel di bawah pimpinan Perdana Menteri Begin dengan *Likud-Block* yang nasionalis tidak bersedia mengakui masalah Palestina (di antaranya intensifikasi program pemukiman di daerah-daerah yang diduduki, aneksi Yerusalem Timur tahun 1980), Mei 1979 perundingan otonomi dihentikan; b. negara-negara Arab di bawah pemimpin-pemimpin radikal (terutama Suriah, Libia, PLO) sejak semula menolak perjanjian Camp-David. Setelah penandatanganan perjanjian Israel-Mesir tersebut, Dewan Liga Arab memutuskan memberlakukan boikot umum terhadap Mesir (a.l. mengeluarkan Mesir sebagai anggota

Liga Arab, memutuskan hubungan diplomatik); c. sebagai reaksi terhadap revolusi di Iran (1979), penyerbuan Uni Soviet ke Afghanistan (1979) dan pecahnya Perang Irak-Iran (1980), AS memperlihatkan kembali kepentingan globalnya dalam politik Timur Tengah, dan karenanya berdiri lebih dekat ke Israel (*strategic consensus*) sehingga tidak berlaku lagi sebagai instansi perantara dan sebagai "rem" politik penghunian yang dilakukan Israel.

Juni 1982 → Lebanon menjadi panggung utama Konflik Timur-Tengah ketika tentara Israel menyerbu masuk ke negara itu untuk menghancurkan PLO yang melakukan perang gerilya dari Lebanon Selatan. Pengepungan kota Beirut selama berminggu-minggu berakhir setelah berlangsung perundingan-perundingan dengan perantaraan AS dan penarikan mundur pejuang-pejuang PLO. Inisiatif perdamaian akibat krisis Lebanon menemui kegagalan di satu pihak karena sikap Israel yang menolak keras mengembalikan daerah yang didudukinya sampai sekarang, dan di lain pihak juga dikarenakan Konflik Timur-Tengah setelah dike-luarkannya Mesir dari kubu Arab dan pecahnya Perang Teluk, menjadi panggung pertikaian kepemimpinan Arab.

Sebuah inisiatif Presiden Reagan (September 1983) menginginkan jalan keluar masalah Palestina dan masalah pengungsian dalam rangka sebuah konfederasi Palestina-Yordania. Negara-negara Liga Arab dalam bulan yang sama mengajukan rancangan perdamaian (Pernyataan De-

lapan Butir dari Fez), di samping tuntutan-tuntutan maksimal yang ada (a.l. penarikan mundur Israel dari seluruh daerah yang diduduki, pendirian sebuah negara Palestina dengan ibu kota Yerusalem Timur, dan untuk pertama kalinya merupakan pengakuan tidak langsung terhadap Israel berisi kesediaan melakukan pemecahan politik Konflik Timur-Tengah). Israel menolak kedua rencana tersebut. Namun, perkembangan lanjut di Lebanon yang menyebabkan tahun-tahun berikutnya keinginan akan perdamaian menjadi makin jauh. Israel berusaha mendamaikan Lebanon di bawah bendera Israel melalui perjanjian dengan Presiden Lebanon yang Kristen, A. Gemayel (1983), menajamkan perang saudara yang sedang berlangsung dan selanjutnya meluaskan posisi kekuatan-kekuatan radikal Arab dan kelompok-kelompok fundamentalis Islam dengan bantuan Suriah. Dalam perkembangan ini terjadi suatu radikalisasi dan tahun 1984 terjadi perpecahan dalam PLO yang dapat diselesaikan tahun 1987, setelah pemimpin PLO yang moderat, *Arafat, kembali mengakui posisi maksimal terdahulu orang Palestina (misalnya menolak jalan keluar dengan mendirikan dua negara). Tahun 1985 Arafat bersama Raja Hussein dari Yordania berusaha membuat sebuah usul perdamaian yang berisi pengakuan tidak langsung kepada Israel.

Pemberontakan penduduk sipil Palestina di tanah Yordan Barat dan Jalur Gaza (*intifada*) di akhir tahun 1987 dan sebuah langkah Raja Hussein dari Yordania menyebabkan dari

pihak orang Palestina tercipta persyaratan-persyaratan untuk "jalan keluar dua negara" dalam konflik Palestina yang belum pernah ada sebelumnya.

Juni 1988 Raja Hussein untuk terakhir kalinya menyatakan merelakan Tepi Barat yang dianeksi Yordania tahun 1950 dan sejak tahun 1967 diduduki Israel, sekaligus mengakui pendirian sebuah negara Palestina merdeka di bawah pimpinan PLO. Tanggal 15 November 1988 Dewan Nasional Palestina (PNR, parlemen Palestina dalam pengungsian) di Aljir memproklamkan berdirinya negara Palestina di atas tanah Palestina dengan ibu kota Yerusalem Timur. Sekaligus PNR secara langsung mengakui Israel dan menolak segala bentuk terorisme serta menyatakan kesediaan PLO untuk melakukan perundingan langsung dengan Israel dalam sebuah konferensi perdamaian internasional. Dengan simpati *intifada*, kekuatan-kekuatan pragmatis di sekitar Arafat berhasil menang. Hal ini tidak berubah karena sikap menolak Israel serta pengakuan terhadap PLO tahun 1988 oleh AS sebagai mitra perundingan. Alasan resmi Israel menolak mentah-mentah PLO sebagai pihak perunding adalah karena tujuan PLO sebenarnya ingin menghancurkan Israel dan hal ini merupakan taktik sementara Israel. Politik pemukiman Perdana Menteri Shamir (Likud, koalisi dengan partai buruh; tahun 1990 akan mencapai 100.000 penghuni Israel), membuat jelas bahwa sampai sekarang Israel tidak bersedia melepas tanah Yordan Barat (apalagi Yerusalem Timur)

ataupun memberikan kemungkinan partisipasi ekonomi, sosial, dan politik, yang ketiadaannya merupakan penyebab utama dari gerakan *intifada* kepada penduduk Palestina.

Sampai Januari 1989 telah 65 negara mengakui negara Palestina secara resmi. Gambaran bahwa sebuah negara demikian langsung secara *de facto* merupakan bagian dari Timur Tengah yang damai, sekarang ini kelihatannya sangat tidak pasti. Apalagi kekuatan-kekuatan radikal di dalam dan di luar PLO yang didukung Suriah dan dalam bentuk kelompok-kelompok teror Islam fundamentalis, seperti sebelumnya merupakan potensi kekerasan dalam Konflik Timur-Tengah, yang bersikap menolak jalan keluar dua negara.

Kepustakaan: F. Schatten, *Dauer Krise Nahost, Eine Quellensammlung*, Darmstadt 1976; United Nations, *Die UN-Resolutionen zum Nahost-Konflikt*, Berlin 1978; J. Bunzel, *Israel und die Palästinenser. Die Entwicklung eines Gegensatzes*, Wien 1982; Ch. Hacke, *Amerikanische Nahostpolitik. Kontinuität und Wandel von Nixon bis Reagan*, München, dll., 1985; A. Flores, *Intifada. Aufstand der Palästinenser*, Berlin 1988; T. Koszinowski/H. Mattes (ed.), *Nahost Jahrbuch 1987*, Opladen 1988; U. Steinbach, "Israelisch-Arabischer Konflikt", dlm.: Steinbach/R. Robert (ed.), *Der Nahe und Mittelere Osten*, vol. 1, Opladen, 1988, hlm. 639 dst.; A. Höttinger, "Arafats Friedensangebots an Israel", dlm.: EA 20 (1989), hlm. 39 dst.

bt/ah

Konflik Utara-Selatan Menandai konfrontasi antara negara berkembang dan negara industri yang menjadi masalah pokok hubungan internasional dalam paro kedua abad ini. Konflik ini berdasarkan perbedaan peluang-peluang pembangunan politik dan ekonomi antara negara berkembang dengan negara industri. Merupakan

masalah konflik kepentingan politik pembagian dan ekonomi luar negeri antara pihak-pihak berkonflik, masing-masing dilengkapi dengan potensi pengaruh dan kekuasaan yang sangat tidak seimbang. Hubungan konflik yang ada tidak dapat dicakup secara jelas dengan nama Utara-Selatan yang berorientasi geografis karena di satu pihak tidak semua negara di sebelah utara bumi termasuk negara berkembang dan di lain pihak negara-negara sosialis Timur yang terletak di utara juga sulit dimasukkan dalam negara industri. Utara-Selatan merupakan nama antara negara industri Barat dan negara berkembang di Afrika, Asia, dan Amerika Latin sehingga sebenarnya merupakan Konflik Barat-Selatan, yang mempunyai pengaruh penting dalam Konflik Timur-Barat.

Persepsi konfrontasi antara negara industri dan negara berkembang sebagai Konflik Utara-Selatan muncul dengan terjadinya krisis minyak di awal tahun '70-an. Krisis minyak disebabkan kenaikan harga minyak bumi secara sepihak oleh negara-negara produser yang tergabung dalam OPEC. Arti sumber daya energi yang sedikit itu di satu pihak menyebabkan jelasnya posisi ketergantungan negara industri terhadap energi dan bahan mentah, di lain pihak memungkinkan negara berkembang melakukan strategi ancaman dengan landasan solidaritas terhadap negara industri. Dalam sekejap, Dunia Ketiga muncul sebagai faktor kekuasaan baru dalam politik dunia, dengan tujuan menghapuskan perbedaan struktur melalui tata ekonomi

dunia baru. Tuntutan utamanya adalah sebuah tata ekonomi dunia baru dengan elemen-elemen pokok program bahan mentah yang terintegrasi dan khusus Dana Bersama. Meskipun pertikaian mengenai tata ekonomi dunia baru sejak itu merupakan inti politis konflik, jangkauannya meliputi semua tingkat hubungan antara negara industri dan negara berkembang, a.l. sistem mata uang dunia baru, tata informasi dunia baru, pengaturan baru pemanfaatan lautan. Dari semua tuntutan Dunia Ketiga ini sampai kini sedikit yang telah terealisasi dan itu pun telah menyimpang jauh dari konsep-konsep semula. Sekaligus terlihat bahwa solidaritas antarnegara Dunia Ketiga terus menurun. Sejak awal tahun '80-an dalam hubungan Utara-Selatan telah tercapai kembali situasi awal yang ditentukan oleh hegemoni dan ketergantungan. Dunia Ketiga setelah kemunculannya melawan hegemoni negara industri melalui pembentukan kekuasaan tandingan di tahun '70-an, kembali jatuh ke situasi ketidakberdayaan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor: kesenjangan perkembangan yang makin besar antarnegara berkembang yang menimbulkan perbedaan penempatan titik berat dalam hubungan mereka masing-masing ke negara industri dan melemahnya kemampuan bertindak Dunia Ketiga sebagai tokoh internasional; krisis ekonomi dunia terberat sejak tahun '30-an, yang terutama sekali mengenai Dunia Ketiga dengan sangat negatif; krisis pertumbuhan, krisis utang, dan krisis pangan di tahun '80-an; jatuhnya harga bahan mentah; protek-

sionisme negara industri terhadap pe-saing-pesaing dari Dunia Ketiga; turunnya arti OPEC dan hilangnya karakter mereka sebagai model organisasi kekuatan tandingan dari Dunia Ketiga. Setelah berlangsung sepuluh tahun perundingan sampai pertengahan tahun 1984, tidak ada elemen dari tata ekonomi dunia baru yang terealisasi—sebuah indikasi tajamnya Konflik Utara-Selatan. Sejak itu, kelihatannya hanya dalam kasus Dana Bersama yang dalam waktu dekat akan memberikan hasil.

Kepustakaan: A.G. Friedrich (ed.), *Der Nord-Süd-Dialog zu Beginn der 80er Jahre*, Baden-Baden 1982; G. Braun, *Nord-Süd-Konflikt und Entwicklungspolitik*, Opladen 1985; J. Betz, "Nord-Süd-Beziehungen", dlm.: D. Nohlen/P. Waldmann (ed.), *Dritte Welt*, München/Zürich 1987, hlm. 390-398; H. Elsenhaus, *Nord-Süd-Beziehungen. Geschichte-Politik-Wirtschaft*, Stuttgart 1987 (cet. ke-2); D. Nohlen/R. Wagner, "Nord-Süd-Konflikt", dlm.: W. Woyke, *Netzwerk Weltpolitik*, Opladen 1989. **dn/ra**
Kongo (Brazzaville) Republik (Rakyat sejak tahun 1970) Kongo merupakan negara Afrika Hitam pertama dengan partai kesatuan yang menganut diri marxis-leninis dan proletaris. Sejak sekitar dua dasawarsa, partai ini berusaha membangun negara, ekonomi, dan masyarakat menurut prinsip-prinsip dasar sosialisme ilmiah. Tahun 1988 negara ini memiliki utang per kapita tertinggi di Afrika.

1. Luas Kongo (342.000 km²) dalam beberapa hal terbagi menjadi bagian utara dan bagian selatan yang jelas berbeda: a. secara geografi-iklim: dataran tinggi Bateke yang terletak di sebelah utara dan berpadang rumput di dekat ibu kota Brazzaville (sekitar 470.000 penduduk) serta hutan hujan

tropis yang sulit dijalani dan daerah rawa di muara Sungai Ubangi dan Kongo, di selatan terletak daerah dataran tinggi Niari yang subur; b. secara demografi: perkiraan 1,4 juta penduduk berasal lebih dari 70 etnis, dapat dibedakan antara M'Boschi (16%) yang mendominasi daerah utara, sementara di selatan hidup anggota-anggota kelompok Kongo (Bakongo, Basundi, Balali, dsb.) yang berjumlah 40% dari penduduk keseluruhan; c. 60% penduduk hidup sepanjang jalur kereta api Pointe Noire (laut)-Brazzaville, tempat berlangsungnya sekitar 90% perdagangan luar negeri. Sementara itu, daerah hutan hampir tidak berpenghuni (sekitar 30.000 orang Pygmaen). Hal tidak tertahan adalah urbanisasi, terutama kaum remaja dari daerah utara dan tengah, menyebabkan di perkotaan setiap tahun sekitar 60.000 tenaga kerja berdesak-desakan di pasar kerja sehingga terus menaikkan angka pengangguran.

2. Sumber pendapatan terpenting ekonomi Kongo adalah eksploitasi minyak bumi (tahun 1987 sekitar 90% hasil ekspor, 75% penerimaan pajak, dan 50% PDB) yang dikembangkan tahun '70-an. Pendapatan tidak dipakai untuk mengatasi kekurangan struktural ekonomi Kongo. Pertanian sangat diabaikan. Pangsa pertanian pada PDB tahun 1987 adalah 8%, kurang dari 1% lahan dimanfaatkan untuk pertanian, impor bahan pangan melonjak dua kali lipat antara tahun 1982 dan tahun 1985 saja. Jaringan jalan raya yang tidak mencukupi menghambat pengadaan Brazzaville dengan bahan pangan dan

memblokade-begitu juga penyelundupan dari negara-negara tetangga, terutama dari Zaire-perluasan sektor pengolahan. Ekonomi kayu (tahun 1969 masih meliputi 60% ekspor, tahun 1987: 5%) telah kehilangan maknanya. Pendapatan dari minyak mula-mula digunakan sebagian besar untuk perluasan lanjut aparat negara, dalam jangka pendek menciptakan lapangan kerja, tetapi kemudian menaikkan pengeluaran untuk personal sebanyak dua kali lipat tahun 1978-1982. Haluan sosialis dalam politik ekonomi yang dicanangkan sejak tahun 1970, terbatas terutama pada nasionalisasi seluruh perusahaan asing yang ada dan pembangunan usaha-usaha sejenis. Tetap bertahan dominasi sekitar 200 perusahaan Perancis. Ekonomi upeti, ketidakmampuan kepemimpinan dalam perusahaan negara, dan tidak adanya moral kerja, menyebabkan sejak akhir tahun '70-an kenaikan defisit bersamaan dengan jatuhnya harga minyak sejak tahun 1986 dan sekaligus turunnya kurs dolar, bengkaknya utang luar negeri menjadi 1.000 miliar F CFA atau 1,5 kali PNB (beban utang tahun 1987 adalah 45% nilai ekspor). Program penghematan yang dituntut IMF (a.l. restrukturisasi sekitar 100 perusahaan negara dan swastanisasi yang paling tidak berjalan) belum dapat terpenuhi meskipun berlangsung pemecatan ratusan pegawai negeri (80.000 pegawai negeri). Pengeluaran negara tahun 1985: 330, tahun 1987 turun: 180, dan turun lagi tahun 1989: 121 miliar F CFA, tetapi akhir tahun 1988 pendapatan tidak dapat menutupi kewajiban lancar. Sektor

swasta tetap saja tidak dapat menyumbang banyak untuk kehidupan ekonomi meskipun sejak beberapa tahun dijanjikan situasi-situasi yang menarik untuk investor asing. Dalam perdagangan luar negeri, posisi ekspor AS di tahun '80-an berada di tempat teratas (tahun 1987: 45,5%, Perancis 15%, ME 48%). Sementara neraca perdagangan kurang lebih seimbang (tahun 1987 impor 296 miliar F CFA, ekspor 281 miliar F CFA), neraca pembayaran memperlihatkan defisit yang kronis (tahun 1986: 200 miliar F CFA, tahun 1987: 150 miliar F CFA).

3. Presiden F. Youlou yang berkuasa sejak kemerdekaan (1960), digulingkan oleh sebuah pemogokan umum (1963). Pemerintah pengganti dijalankan oleh militer dan intelektual (partai kesatuan: sejak tahun 1964: *Mouvement National de la Revolution/MNR*, sejak tahun 1970 menjadi *Parti Congolais du Travail/PCT*), melakukan haluan kiri radikal secara verbal untuk politik dalam dan luar negeri. Tenaga pendorong selain serikat buruh adalah organisasi pemuda dari partai. Dengan tingkat penyekolahan tertinggi di Afrika Hitam (sekarang: 95%), tidak mendapatkan kemungkinan kerja yang memadai sehingga menciptakan massa pengangguran yang sebagian besar terdiri atas remaja dan mudah dipolitisasi serta tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah. Meskipun ada doktrin negara yang marxistis-leninis, terbentuk sebuah kelas negara (puncak pimpinan partai, militer, administrasi) dengan privilese-privilese yang mengundang kritik dari pelajar, mahasiswa,

dan serikat buruh (banyak demonstrasi massa) terutama sejak tahun 1953. Hal ini dan persaingan yang terus ada antara sistem patron yang ditentukan terutama oleh tribalisme menyebabkan rezim-rezim di Kongo tahun '60-an dan '70-an ditandai oleh ketidakstabilan politik secara terus-menerus. Tahun 1977 Presiden Massemba-Débat (1963-1968) membunuh penggantinya, M. Ngouabi. Presiden baru, Y. Opango, dijatuhkan tahun 1978 dalam sebuah kudeta legal oleh saingan pribadi, D.S. Nguesso, seperti pendahulunya, adalah seorang militer sejak tahun 1963. Dampak paling jelas dari haluan marxis sejak tahun '60-an terlihat dalam perundang-undangan (UUD tahun 1963, 1970, 1973, 1977, 1979) yang memberikan kedaulatan rakyat sejak tahun 1970 untuk sementara waktu ke partai kesatuan yang kurang dari 200 anggota; tahun 1970-1973 dan tahun 1977-1979 malah menghapuskan parlemen. Tata ekonomi dan masyarakat tidak banyak mengalami perubahan, meskipun perubahan sosialis makin keras diserukan. Juni 1991 Andre Milongo menjadi pimpinan suatu pemerintahan sementara sampai diadakan pemilu tahun 1992. November 1991 disahkan UUD baru.

Kepustakaan: H. Bertrand, *Le Congo*, Paris 1975; G.N.T. Hung, *Agricultural and Rural Development in the People's Republic of Congo*, Boulder 1986; V.T. Le Vine, "Military Rule in the People's Republic of Congo", dlm.: J.W. Harbeson (ed.), *The Military in African Politics*, New York 1987, hlm. 123-140; *Le Congo, banlieu de Brazzaville, Politique Africaine* 31, 1988; C. Allen/M. Radu, *Benin and the Congo*, London 1989; Die Welt, "Blutige Unruhen überziehen Afrika", dlm.: *BMZ-Spiegel der Presse*, 21/91. kz

Kongres Nasional Afrika → ANC.
Konrad Adenauer Stiftung → KAS.
kontingentasi → GATT.

Konvensi Afrika untuk Hak Asasi Manusia → hak asasi manusia.

Konvensi Amerika untuk Hak Asasi Manusia → hak asasi manusia.

Konvensi mengenai Perlindungan Keanekaragaman Hayati Merupakan hasil Konferensi Lingkungan Dunia di Rio de Janeiro, Juni 1992. Tujuannya adalah perlindungan di seluruh dunia terhadap jenis-jenis hewan dan tumbuhan serta ruang hidupnya. Sementara negara industri menitikberatkan perlindungan jenis dalam ruang hidup alaminya, negara berkembang menginginkan suatu alih teknologi yang luas. Amerika Serikat menolak menandatangani konvensi ini dengan alasan a.l. bahwa konvensi ini menghalangi bioteknologi dan berlawanan dengan perlindungan hak paten. Lebih dari 150 negara menandatangani konvensi ini.

Kepustakaan: Die Beschlüsse des Umweltgipfels: *Konventionen zum Klima-und Artenschutz*, Süddeutsche Zeitung, 15 Juni 1992, dlm.: BMZ-Spiegel der Presse 12/92, hlm. 396. **dis**
Konvensi mengenai Perubahan Iklim Hasil Konferensi Lingkungan Dunia di Rio de Janeiro, Juni 1992. Pusat perhatian konvensi ini adalah tujuan menurunkan kadar emisi CO₂ di seluruh dunia pada tingkat tahun 1990. Namun, konvensi ini tidak menentukan sampai kapan batas penurunan ini dilakukan. Amerika Serikat menentang konvensi yang ditandatangani oleh lebih dari 150 negara.

Kepustakaan: Die Beschlüsse des Umweltgipfels: *Konventionen zum Klima-und Artenschutz*, Süddeutsche Zeitung, 15 Juni 1992, dlm.: BMZ-Spiegel der Presse 12/92, hlm. 396. **dis**

Konvensi Pengungsi PBB → pengungsi.

koperasi Dilakukan di seluruh dunia di bidang ekonomi yang sangat berbeda-beda. Harapan khusus dikaitkan dengan negara berkembang, tetapi sampai kini hanya sedikit yang terpenuhi.

1. *Ciri-ciri/struktur internal*: koperasi adalah komunitas manusia dengan keanggotaan dalam sebuah usaha bersama dan dikendalikan secara demokratis serta bertujuan memperbaiki situasi ekonomi dan sosial mereka. Pengertian ini mencerminkan karakter ganda koperasi yang rumit, tetapi menguntungkan. Koperasi merupakan komunitas manusia dan sebuah perusahaan. Selain itu, tujuan telah ditetapkan secara jelas, yaitu perbaikan situasi anggotanya. Pada gilirannya koperasi mempunyai perbedaan pokok dengan sebuah perusahaan modal: dalam koperasi berlaku aturan main yang demokratis (1 orang–1 suara, pemilihan yang selalu ada, prinsip suara terbanyak, tidak ada diskriminasi terhadap kelompok minoritas).

Elemen ekonomis terpenting adalah kriteria identitas: anggota-anggota merupakan pemilik dan penarik manfaat (langganan, pemasok, pekerja) perusahaan mereka. Latar belakang gagasan ini adalah sejumlah prinsip-prinsip koperasi, ada yang bersifat doktrin dan ada yang pragmatis, berlandaskan garis pionir dari Rochdale (misalnya kenetralan politik dan kepercayaan, pimpinan dan pengawasan yang demokratis, penjualan tunai dengan harga pasar dan pembagian keuntungan, jumlah anggota yang tidak

terbatas, pendidikan perkoperasian). Selain itu, yang dikenal sebagai inisiator-inisiator koperasi di dunia adalah R. Owen, Ch. Fourier, L. Blanc, H. Schultze-Delitzsch, dan F.W. Raiffeisen. Bapak koperasi Indonesia adalah Moh. Hatta. Koperasi memiliki paling sedikit 4 organ. a. Rapat anggota yang dapat diikuti seluruh anggota. Rapat ini berlangsung paling sedikit setahun sekali. Dalam rapat anggota diambil keputusan-keputusan mengenai kelompok serta masalah-masalah lain yang penting (anggaran dasar, pemilihan gremium pemimpin, laporan tahunan, dsb.) yang dilakukan berdasarkan prinsip 1 orang-1 suara. b. Pengurus, terdiri atas paling sedikit 5 anggota koperasi yang kebanyakan dipilih oleh rapat anggota untuk masa kepengurusan satu tahun (lebih baik 3 tahun). Tugas mereka adalah menyiapkan atau mengambil keputusan kepemimpinan untuk kelompok dan usaha. c. Dewan pengawas: terdiri atas paling sedikit 3 anggota koperasi yang biasanya dipilih/ditentukan oleh rapat anggota. Mereka melakukan pengawasan kepemimpinan usaha dan keputusan pengurus demi kepentingan anggota. d. Pimpinan perusahaan: anggota atau bukan anggota koperasi. Ia bekerja atas tugas dari pengurus dan bertanggung jawab kepadanya (tidak langsung ke rapat anggota). Karena pengetahuannya, dalam perusahaan sering menjadi pimpinan sebenarnya dari koperasi. Ada banyak kemungkinan untuk mengikutsertakan anggota ke keputusan sosial dan perusahaan (komite untuk kredit, disiplin, pembangunan gudang, masalah transportasi, dsb.). Selain itu, koperasi

di negara berkembang makin banyak memakai kemungkinan mendelegasikan pengujian ekonomi ke lembaga-lembaga eksternal (asosiasi, perusahaan akuntansi).

2. *Tipe-tipe koperasi*: koperasi pertanian, konsumsi, tabungan dan kredit, kerajinan, industri, pembangunan perumahan, asuransi, pengadaan listrik, pengadaan air, pendidikan, hiburan, dan banyak macam lagi. Koperasi-koperasi ini memenuhi tiga fungsi ekonomi pokok untuk para anggotanya: mencari, menjual, dan/atau memproduksi (mengolah) barang dan jasa. Fungsi-fungsi ini sering dijalankan sekaligus (misalnya koperasi pertanian: mencari bibit, pupuk, kredit, barang konsumsi, pemasaran produk pertanian, produksi bersama para anggota dan/atau pengolahan lanjut produk-produk anggotanya; menabung: koperasi multi-aktif).

Selain perbedaan fungsional ini ada juga koperasi berdasarkan tanggung jawab (terbatas pada tabungan modal atau jaminan yang secara tidak terbatas meliputi semua nilai kekayaan anggota), keterbukaan (kemungkinan menjadi anggota untuk semua orang yang berminat atau terbatas hanya untuk kelompok sasaran, misalnya petani kecil), saling ketergantungan antara anggota dan usaha koperasi (antara kelompok yang benar-benar autarki dengan kegiatan yang tidak berorientasi kelompok), dan tingkat integrasi (koperasi primer dengan anggota sebenarnya sebagai anggota dan koperasi sekunder dengan koperasi primer sebagai anggota). Perilaku terhadap sesama anggota, gremium pemimpin, dan usaha

koperasi berbeda-beda menurut jenis dan tingkat solidaritas kelompok, partisipasi dalam proses komunikasi dan pengambilan keputusan, partisipasi dalam usaha koperasi. Peluang keberhasilan dari berbagai tipe koperasi juga tidak dapat dinilai secara kesatuan.

3. *Harapan perkembangan dan faktor-faktor keberhasilan:* khususnya agen-agen pembangunan internasional memiliki harapan besar akan sumbangan koperasi untuk proses pembangunan. Fungsi-fungsi pembangunan yang diperhatikan sebagai berikut.

- Perbaikan situasi anggota melalui harga tinggi dalam penjualan (rendah pada pencarian); akses ke kredit; jaminan penjualan; mendapatkan barang-barang bernilai tinggi; pembayaran yang sesuai dengan produktivitas, dsb. Suatu "pengisapan" anggota melalui usaha koperasi tidak ada dari motivasi keuntungan (kecuali karena administrasi yang tidak efisien).
- Situasi anggota yang lebih baik melalui penjaminan kelompok, integrasi sosial, dan kenaikan sosial.
- Situasi lebih baik secara kultural melalui proses komunikasi, informasi, dan pendidikan internal (yang ditunjang).
- Perubahan makro-ekonomi dan perubahan sosial melalui pengaktifan persaingan dengan menguntungkan penduduk yang lebih miskin (pemerataan pendapatan yang dihasilkan, penciptaan sebuah lapisan menengah, rangsangan untuk pertumbuhan ekonomi, lebih banyak keadilan sosial dan ekonomi serta peluang kenaikan sosial, sehingga potensi pribadi pemimpin dapat lebih baik di-

gunakan dalam proses pembangunan).

Di negara berkembang terlihat adanya diskrepansi besar antara apa yang secara teoretis mungkin dengan hasil-hasil kerja koperasi sebenarnya yang dicapai. Penyebab pokoknya adalah kurang diperhatikannya faktor-faktor: a. keterbukaan sosial dari koperasi dan kesediaan melakukan politik ekspansi secara aktif; b. kesediaan melakukan inovasi oleh pemimpin koperasi; c. komunikasi yang intensif antara gremium pemimpin dengan anggota; d. menggali potensi pembiayaan sendiri melalui rangsangan untuk menabung; e. sanksi jika melakukan pelanggaran dari perjanjian bersama; f. pendidikan dan pendidikan lanjut para anggota secara permanen; g. rotasi dan jabatan pemimpin; h. tujuan perencanaan yang sesuai dengan realitas; i. integrasi (koperasi) dengan koperasi-koperasi lainnya; j. mempengaruhi negara dalam hal sebuah sikap netral dan berkeinginan baik.

Seperti perorangan, sebuah koperasi juga lemah untuk dapat ikut mempengaruhi proses pembangunan sehingga diperlukan bantuan dari struktur-struktur integrasi horizontal dan vertikal yang kini telah ada di mana-mana. Bantuan politik pembangunan bisa menguntungkan, tetapi perlu dibatasi pada langkah-langkah yang dapat dilakukan dan tidak berusaha mengeksport sebuah "model jadi" untuk mengembangkan kerja sama yang sesuai dengan tempat masing-masing, meskipun terdapat kesamaan koperasi yang ada di seluruh dunia.

Kepustakaan: D.W. Benecke, *Kooperation und Wachstum in den Entwicklungsländern*, Tübingen 1973; E. Boettcher, *Kooperation und Demokratie in der Wirtschaft*, Tübingen 1974.

db

Koperasi Pembangunan Oikumene
→ EDCS.

Korea Selatan Kesuksesan industrialisasi yang berorientasi ekspor telah membantu ekonomi Korea Selatan mengalami *take-off*. (→ NIC). Tuntutan partisipasi lapisan menengah yang baru muncul, telah mendorong ke suatu peningkatan demokratisasi sistem politik.

1. Korea Selatan mempunyai luas 99.143 km² dengan penduduk 22 juta jiwa. Hanya 23% tanah yang tidak subur diolah untuk pertanian, 67% adalah daerah hutan, dan 10% merupakan padang rumput dan areal pemukiman. Korea Selatan sangat padat dihuni (tahun 1987: 424 penduduk/km²; bandingkan dengan Belanda: 429 penduduk/km²). Bersamaan dengan industrialisasi dalam 15 tahun terakhir terjadi pelarian dari pedesaan dan urbanisasi besar-besaran (tingkat urbanisasi tahun 1985: 65,4%). Dalam usaha mengembangkan sentra-sentra regional tercermin usaha-usaha desentralisasi pemerintah yang ingin mengatasi masalah infrastruktur yang diakibatkan oleh urbanisasi. Di ibu kota Seoul dan daerah-daerah pemukiman di sekitarnya (9 juta penduduk), hidup hampir 1/4 penduduk Korea Selatan.

2. Korea Selatan merupakan satu dari sedikit negara berkembang yang mempunyai basis etnis dan bahasa yang homogen. Kultur tua dan tulisan tersendiri merupakan mata rantai penting dari identitas dan sejarah nasional. Dulu, Korea Selatan hampir se-

lalu didominasi oleh tetangganya, Cina. Untuk melawan pengaruh luar, kerajaan Korea melakukan isolasi sehingga dikenal sebagai "kerajaan pertapa". Menguatnya kerajaan Jepang telah melepaskan Korea dari daerah hegemoni Cina, tetapi hanya untuk menjadi koloni Jepang sekitar tahun 1910 (gubernur jenderal, sejak tahun 1942 menjadi propinsi). Selama 26 tahun kekuasaan kolonial Jepang telah mewarnai kultur politik dan struktur ekonomi Korea. Jepang mengembangkan Korea (pertanian, industri, infrastruktur) dengan sebelah pihak mengacu pada kebutuhan-kebutuhan Jepang. Misalnya, Korea di tahun '30-an dipaksa mengirim sekitar separo produksi beras ke Jepang untuk dapat memberi makan secara murah para pekerja industri di sana. Selain itu, ada politik Jepang yang mirip apartheid di bidang pendidikan, yang memungkinkan orang Korea hanya dalam pengecualian mendapatkan pendidikan tinggi atau posisi pemimpin dalam administrasi. Bahasa dan tulisan Korea pun dilarang oleh penguasa kolonial. Tahun 1948 Dr. Syngman Rhee berkuasa di Korea Selatan dengan bantuan besar dari AS, di utara berkuasa Kim Il Sung-ditunjang komunis (→ Korea Utara). Perang Korea (1950–1953) yang dimulai sebagai perang saudara dan mendapatkan dimensinya setelah ada campur tangan kekuatan-kekuatan asing, memisahkan negara itu menjadi dua sepanjang 38⁰ Lintang Utara. Selanjutnya, "antikomunisme dan ideologi berbaris ke utara" di Korea Selatan menjadi alat penyatu ideologi yang mengabsahkan represi dalam

negeri sampai kini. April 1960 Syngman Rhee dijatuhkan oleh demonstrasi-demonstrasi mahasiswa, kemudian berlangsung sistem kabinet yang demokratis, tetapi berumur pendek di bawah John Chang sebagai perdana menteri yang didukung oleh AS. Mei 1961 pemerintahan sipil Korea yang pertama dijatuhkan oleh sekelompok perwira muda dipimpin Park Chung Hee yang kemudian menjadi presiden. Penindasan politik yang makin lama makin kejam berlangsung selama 18 tahun, sebelum Park dibunuh oleh pemimpin dinas rahasianya sendiri (Oktober 1979).

3. Di bawah kekuasaan Park Chung Hee melalui UU Yushin (1972) menjadi tidak terbatas, struktur ekonomi Korea Selatan berubah secara radikal. Dari negara pertanian terbelakang di tahun '50-an yang eksistensi pemerintahannya dapat terus bertahan atas kiriman bantuan AS, dalam waktu kurang dari dua dasawarsa menjadi sebuah NIC yang ditandai oleh industrialisasi pesat dan pertumbuhan yang menonjol.

"Keajaiban ekonomi" makin mengherankan sebab Korea Selatan berpenduduk padat, tetapi tidak memiliki sumber daya alam yang dapat diandalkan. Penjelasan untuk keberhasilan ini adalah pengaitan habis-habisan Korea Selatan ke pembagian kerja internasional (artinya, terutama sekali pengisapan habis-habisan tenaga kerja yang tersedia). Dengan landasan mempertahankan upah tetap rendah melalui represi dan pengawasan ketat serikat buruh, pemerintah Korea Selatan berhasil mengundang masuk modal asing dan kredit

sehingga masuk ke suatu ketergantungan industrialisasi yang berorientasi terutama ke pasar dunia. Akibat politik "ekspor habis-habisan" ini tidak hanya pengukuhan tingkat upah yang sangat rendah (dengan alasan persaingan), melainkan juga pengabaian secara sistematis pertanian dengan akibat-akibat seperti pelarian dari pedesaan, terbentuknya perkampungan kumuh, kurang makan (→ pangan), pengangguran dan ketergantungan dari gerak naik-turun di pasar dunia.

Jumlah pekerja tahun 1985 adalah sekitar 15 juta jiwa, di antaranya di pertanian dan perikanan sebanyak 25% (tahun 1965: 58,6%), industri 31% (tahun 1965: 10,4%), dan sektor jasa 44% (tahun 1965: 31%). Restrukturisasi yang dipaksakan menekan ongkos tinggi, misalnya tingkat pengadaan bahan pangan sendiri turun dan tahun 1974 mencapai titik rendah dengan angka 65% (tahun 1981: 88%). Pengabaian pertanian kini telah diakui pemerintah Korea Selatan sebagai titik terlemah dalam politik pembangunannya. Meskipun dilakukan reformasi pertanian secara menyeluruh 1949 (bersamaan dengan pemerataan tanah di Korea Utara), banyak petani kecil terjebak kembali dalam ketergantungan dari garapan (sekitar 35% penduduk) dan tingkat hidup penduduk petani jauh berada di bawah penduduk kota.

4. Dalam jangka waktu lama Korea Selatan menjadi contoh untuk *"circulus vitiosus"* suatu industrialisasi yang bergantung dari luar negeri dan yang tidak sesuai dengan kebutuhan penduduk dan pasar dalam

negeri. Karena untuk dapat mengekspor, negara yang miskin akan bahan mentah itu pertama-tama harus membeli material-material bahan mentah mahal yang akan diolah lanjut dan membeli dari luar negeri teknologi dan energi (minyak, batu bara) yang diperlukan untuk pengolahan. Sebagian besar industri kunci dan keseluruhan pengadaan minyak berada di tangan asing (terutama Jepang dan AS) atau harus dibiayai dengan kredit luar negeri. Keuntungan yang dihasilkannya sebagian besar mengalir keluar (misalnya sebagai bunga modal) atau diinvestasikan dalam bentuk *joint venture*. Hasil-hasil pertanian dipertahankan secara buatan melalui harga beli yang ditetapkan oleh pemerintah, agar dapat memberikan bahan pangan kepada pekerja dengan harga murah sehingga bagian untuk upah dari produk yang dihasilkan sekecil mungkin mampu bersaing di pasar dunia. Berdasarkan tingginya kadar impor dari produk yang diekspor, impor (barang mewah) Korea Selatan dalam 20 tahun terakhir naik lebih cepat daripada ekspor. Dengan demikian, utang luar negeri Korea Selatan naik pesat (tahun 1981/1982 sekitar 25 miliar US\$) sehingga membuat pengambilan kredit makin sulit. Kenaikan bunga di tahun-tahun terakhir dan ekspor murah dari Cina merupakan pukulan untuk Korea Selatan dan menjadi rangsangan untuk mengkhususkan diri dan intensifikasi lanjut produksi (atas pengorbanan pekerja). Dengan latar belakang faktor-faktor ini jalan pembangunan yang ditelusuri oleh Korea Selatan sampai akhir

tahun '70-an dinilai secara pesimistis. Terjadi perdebatan, apakah Korea Selatan dapat dijadikan model untuk negara berkembang lainnya.

5. Perdebatan yang dimulai awal tahun '80-an mengenai NIC mulai mengubah pandangan pemerintah Korea Selatan: mereka menyetujui diversifikasi industri yang tercermin dalam berpalingnya dari industrialisasi berat dan mengalihkan perhatian ke elektronika, mikro-elektronika, dan teknologi informasi. Dengan demikian, Korea Selatan tidak lagi berfungsi sebagai negara berupah murah, melainkan mampu melakukan produksi kerja sama dan pesanan melalui struktur industri yang sudah maju dengan sebagian pekerja yang sudah mempunyai tingkat kualifikasi tinggi.

Asumsi yang terbantah juga adalah perlawanan, mogok, dan demonstrasi yang diakibatkan distribusi pendapatan yang tidak seimbang hanya dapat dikendalikan secara represif: di awal tahun '80-an masih terjadi pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia, pengejaran oposisi, dan sensor pers (misalnya pemberontakan Kwangju pertengahan tahun 1980); di tingkat sistem politik kini terjadi perubahan-perubahan penting. Hak-hak partisipasi berpuncak Juni 1987 dalam gelombang demonstrasi di seluruh negara, terutama dilakukan oleh mahasiswa radikal melawan rezim Chun Doo Hwan yang berhasil berkuasa melalui sebuah kudeta militer tahun 1980, dan pengganti yang ditunjuk, yaitu Roh Tae Woo. Berdasarkan dukungan luas mahasiswa melalui penduduk Korea Selatan dan mengingat Olimpiade yang dilang-

sunikan September/Oktober 1988, Roh secara mengejutkan dan tanpa syarat memenuhi tuntutan oposisi. Pemilihan presiden langsung Desember 1987 yang menurut pengamat-pengamat internasional berlangsung relatif *fair*, memberikan kandidat rezim Roh sebuah mayoritas relatif sebesar 36,6% dari suara yang diberikan dan mengalahkan kedua calon oposisi terpenting Kim Young Sam dan Kim Dae Yung yang saling bertikai dan tidak dapat bekerja sama. Situasi awal pemilihan parlemen April 1988 dengan partai-partai oposisi mendapatkan mayoritas mandat, juga mengejutkan: untuk pertama kalinya dalam sejarah setelah perang, partai pemerintah tidak mengendalikan parlemen.

Kepustakaan: Du-Yul Song, *Wachstum, Diktatur und Ideologie in Korea*, Bochum 1980; H.U. Luther, *Südkorea-ein Modell für die 3. Welt?*, München 1981; *ibid*, "Korea-Süd", dim.: *HDW II*, 8, 115 dst., Hamburg 1983; U. Menzel, *In der Nachfolge Europas. Autozentrierte Entwicklung in den ostasiatischen Schwellenländern Süd Korea, Taiwan, Nördlingen* 1985; H. Maull dkk., *Korea*, München 1987; M. Pohl, "Südkorea 1987/1988: Der schwierige Weg zur Demokratie", dlm.: *Jahrbuch Dritte Welt* 1989, hlm. 278 dst., München 1988.

hul/fg

Korea Utara Republik Demokrasi Korea dalam rangka hubungan erat-nya ke Uni Soviet dan Cina menapak sebuah jalan pembangunan dengan kepercayaan terhadap kekuatan sendiri, yang tidak ragu-ragu untuk bertikai dengan kedua adikuasa tersebut. Bagi wakil-wakil disosiasi Korea Utara merupakan contoh keberhasilan suatu restrukturisasi ekonomi dengan cara memisahkan diri dari pasar dunia.

1. Korea Utara meliputi 121.000 km², sekitar 55% teritorial Semenanjung Korea (di Korea Selatan: 23%) dimanfaatkan untuk ekonomi pertanian yang sebagian besar bercocok tanam (padi, jagung, jawawut, kacang polong). Pengadaan bahan bakar dan energi bertopang pada potensi kekuatan tenaga air yang besar serta pertambahan antrasit dan batu bara coklat. Untuk pembangunan industri pertambangan dan industri pengolahan yang bertopang kepadanya, adanya bijih besi, krom, nikel, wolfram, kobalt, mangan, tembaga, timah hitam, seng, aluminium, grafit, asbes, mika, dan banyak lainnya, sangatlah penting. Industri kimia selain batu bara juga berbasis kapur, barit, pirit, apatit, fluorit, dan potas, serta tersedia batu dan tanah yang diperlukan oleh industri bangunan.

2. Menurut perkiraan PBB, tahun 1985 Korea Utara berpenduduk sekitar 20 juta jiwa, meliputi 31% dari keseluruhan penduduk semenanjung tersebut. Sejak tahun 1982 pertumbuhan penduduk adalah 2,3%/tahun, kepadatan penduduk mencapai 167 orang/km² (1985). Sekitar 4/5 penduduk hidup di dataran rendah dan pegunungan di daerah barat dan sebuah jalur pantai yang sempit sepanjang Laut Jepang. Untuk kelangsungan industrialisasi yang dipaksakan ditransfer tenaga kerja dari pertanian ke industri. Hal ini menimbulkan kenaikan pesat jumlah penduduk kota tanpa muncul fenomena-fenomena pendamping yang negatif seperti di Korea Selatan (perkampungan kumuh, marginalitas, pemekaran sektor jasa). Selain Pyongyang

(1,5 juta penduduk) terdapat paling sedikit delapan kota berpenduduk lebih dari 100.000 jiwa (tingkat urbanisasi tahun 1985: 63,8%). Tingginya pangsa anak-anak, remaja, dan umur sekolah (wajib sekolah umur 10 tahun) dalam struktur penduduk dan tentara yang berjumlah 500.000 orang, mempertahankan kuota angkatan kerja tetap rendah. Dari investasi yang besar di sektor pendidikan (dengan titik berat pendidikan politeknik) diharapkan dapat meningkatkan kemajuan teknik di masa depan yang hemat akan tenaga kerja, bersama-sama dengan masuknya generasi lebih muda ke dunia kerja, dapat mengatasi masalah kekurangan tenaga kerja yang kronis. Di antara republik rakyat di Asia, Korea Utara memperlihatkan tingkat perkembangan yang relatif tertinggi. Keterbatasan kemungkinan memilih konsumsi individu diimbangi pengadaan kebutuhan dasar yang sangat murah dan jasa sosial yang baik (tahun 1983: 1 dokter untuk 417 penduduk).

3. Setelah berlangsung masa penguasaan kolonial Jepang selama 35 tahun atas Korea, tahun 1945 Uni Soviet menduduki bagian utara dan AS bagian selatan Semenanjung Korea. 38⁰ Lintang Utara untuk sementara waktu menjadi pembatas zone-zone kekuasaan. Memburuknya iklim politik internasional juga menimbulkan pertikaian dalam masyarakat di kedua bagian daerah, hanya dapat diselesaikan sesuai keinginan masing-masing penguasa pendudukan. Konflik antara kaum nasionalis kiri dan kaum konservatif dengan demikian terkristalisasi menjadi pertentang-

an nasional utara-selatan yang makin memperdalam pemisahan. Kelompok-kelompok kiri Korea Utara di pengungsian (di Yanan/Cina, Uni Soviet) kembali (di bawah perlindungan Uni Soviet) dan bersatu membentuk partai (komunis) buruh, yang kemudian menjadi tenaga pendorong dalam front kesatuan nasional. Reformasi-reformasi sosial-revolusioner tahun 1946 (perampasan milik orang-orang Jepang dan milik tuan-tuan tanah kaya setempat, pembagian tanah dan UU sosial) melalui transfer surplus pertanian ke industri dan bantuan teknik dari Uni Soviet, memungkinkan keberhasilan di tahap awal dan menyebabkan rezim baru menjadi populer di mata buruh dan petani, tetapi menyebabkan mengalir keluarnya penduduk ke Korea Selatan. Ketika di Korea Selatan berdiri Republik Korea dengan Rhee yang konservatif sebagai presiden (dengan dukungan AS), di utara berdiri Republik Demokrasi Rakyat Korea (9 September 1948) dengan pemimpin partisan Kim Il Sung sebagai presiden. Usaha untuk mengakhiri pertikaian kekuasaan yang meluas menjadi masalah nasional secara militer, menyebabkan pecahnya Perang Korea (1950-1953). Dalam perang tersebut tentara AS dan PBB berada di pihak Korea Selatan, sementara sukarelawan-sukarelawan Cina di pihak Korea Utara. Kecuali masalah pergeseran teritorial, dampak lebih besar adalah perang yang membawa banyak kerugian untuk kedua pihak dan dalam jangka panjang makin menjauhkan bentuk pembangunan ekonomi kedua negara yang terpisah itu,

keterasingan sosio-kultural dan permusuhan kuat ideologi politik keduanya. Tahun 1953 hancur 85% instalasi industri dan 20% lahan pertanian. Rencana pembangunan 3 dan 5 tahun yang dipenuhi tepat pada waktunya (1954-1960) telah mengatasi kerusakan-kerusakan akibat perang, menyelesaikan sosialisasi semua bidang ekonomi, serta menciptakan industri barang investasi yang relatif terdiversifikasi dan bertopang terutama pada pengolahan bahan mentah lokal. Perkembangan ini dimungkinkan melalui mobilisasi internal potensi-potensi produktivitas sekaligus membatasi konsumsi dan bantuan ekonomi (sebagian hibah) dari Uni Soviet, Cina, dan negara-negara Eropa Timur. Tahun 1960 industri telah meliputi 53% dari pendapatan nasional, sementara pertanian hanya 27%. Awal tahun '70-an sektor permesinan ikut ambil bagian dalam industri lebih dari 30% dan mampu memenuhi kebutuhan akan mesin-mesin berat dan mesin pres. Industri kimia memberikan pengadaan selain untuk pertanian (pupuk), juga industri tekstil, dengan memakai serat-serat buatan yang dibuat dengan dasar sumber daya lokal.

Di tahun '50-an Korea Utara mengalami pertarungan fraksi yang sebagian berlangsung keras di dalam partai buruh Korea (*Tschosson Nodongdang*) dan awal dari kampanye mobilisasi massa secara besar-besaran (gerakan *Tschollima*) untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Kritik yang muncul di hari ulang tahun Partai Komunis Uni Soviet ke-20 (1956) terhadap kultus individu, untuk waktu tertentu telah pernah

mengancam posisi ketua partai, Kim Il Sung. Dalam semua masalah pertikaian yang penting (kolektivisasi pertanian, pengutamaan pembangunan industri berat, tidak menjadi anggota COMECON), dengan fraksi partisannya ia berhasil menang atas oposisi fraksi Uni Soviet dan fraksi Yen-an. Posisinya sebagai ketua dalam partai buruh Korea Utara sejak itu tidak terbantah. Tahap "belajar dari Uni Soviet" berakhir dengan suatu politik percaya akan kekuatan sendiri (*Jutshe*) yang dalam kemerdekaan ekonomi, politik, dan kultural mencari jalan Korea menuju sosialisme. Di kubu nonblok dan pihak kreditor, Korea Utara dihormati karena posisinya yang *self-reliance*. Di tahun '70-an dilakukan usaha-usaha pertama melakukan hubungan ke pemerintah Korea Selatan. Hal ini makin kuat dilanjutkan dalam rangka Olimpiade Seoul musim panas (1988), tetapi tidak tercapai kesepakatan kedua negara tersebut. Penyatuan kembali secara damai (dalam bentuk konfederasi yang tidak mengikat) tetap merupakan tujuan pokok politik Korea Utara.

Penyebab stagnasi ekonomi yang muncul di tahun '80-an dibandingkan tahun '70-an bukan dikarenakan utang luar negeri (1988: 4 miliar US\$) akibat alih teknologi, melainkan karena tidak adanya orientasi baru dalam ekonomi: pertanian dan industri bertemu dengan batas kapasitas alaminya dan tidak dapat lagi menghasilkan tingkat pertambahan. Orientasi reformasi dan menguatnya pembukaan diri ke negara industri Barat (*joint venture* September

1988), dengan bersandar ke Cina, mendapat perlawanan dari kelompok yang berkuasa di sekitar Kim Il Sung, ingin tetap melanjutkan resep kuno dan terus menjalankan pembangunan otosentris.

Kepustakaan: G. Wontroba/U. Menzel, *Stagnation und Unterentwicklung in Korea*, Meisenheim 1978; R. Jutta-Reisse, *Agrarpolitik und Kimilsungismus in der Demokratischen Volksrepublik Korea*, Königstein/Ts. 1979; R. Machetzki, "Korea-Nord", dlm.: *HDW II*, 8, hlm. 90 dst., Hamburg 1983; V. Grabowsky, "Nordkorea: Personenkult im Sozialismus", dlm.: *Deutsche Zeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur*, 1986, vol. 18, hlm. 56 dst.; *ibid.*, "Die Demokratische Volksrepublik Korea im Vorfeld des Umbruchs", dlm.: *APuZ*, 36/37/1988, hlm. 42 dst.; R. Machetzki/M. Pohl (ed.), *Korea*, Stuttgart 1988.

Kosta Rika Tahun 1987 Presiden Kosta Rika, Oscar Arias Sanchez, motor pendorong perjanjian Esquipulas II, menerima hadiah Nobel sehingga menaikkan gengsi Kosta Rika yang memang sudah dikenal sebagai Swiss Amerika Tengah. Namun, krisis ekonomi dan politik di dalam negeri makin menggoyahkan fundamen demokrasi Kosta Rika yang relatif homogen (jika dibandingkan negara Amerika Latin lainnya), yaitu struktur sosial yang demokratis, kemakmuran ekonomi, demiliterisasi, dan netral dalam politik luar negeri.

1. Kosta Rika (luas: 50.900 km²), setelah El Salvador merupakan negara terkecil di Amerika Latin. Tanah vulkanis yang subur dan iklim yang menguntungkan menyebabkan pertanian dan peternakan menjadi sektor ekonomi terpenting. Komoditas utama dan ekspor: kopi, pisang, gula, daging sapi. Selain itu, sebagian besar produksi meliputi jagung, kacang-

kacangan, jawawut, ubi kayu, dan padi gunung dengan basis ekonomi subsistensi untuk kebutuhan sendiri dan kebutuhan dalam negeri. Selain belerang dan bauksit, Kosta Rika hanya memiliki sedikit bahan mentah lainnya.

2. Kosta Rika berpenduduk sekitar 3 juta tahun 1989 (kepadatan penduduk: 53,5 penduduk/km²); terpusat di dataran tinggi daerah tengah (di atas 1/3 luas keseluruhan hidup sekitar separo penduduk). Berbeda dengan negara-negara di Amerika Tengah lainnya, penduduk kulit putih merupakan etnis mayoritas; selain itu, Mestis (15%), Indian, dan kelompok penduduk keturunan Afrika. Di negara yang kecil itu hidup sekitar 200.000-250.000 orang asing, sebagian merupakan pemegang suaka politik dan pengungsi. Bahasa negara: Spanyol. 95% penduduk beragama Katolik.

3. Kosta Rika ditemukan tahun 1502 oleh Columbus. Miskinnya negara itu akan bahan mentah menghindari terjadinya kolonisasi secara cepat. Tahun 1821 Kosta Rika mendapatkan kemerdekaan politik dan sampai tahun 1836 bergabung dengan Federasi Amerika Tengah. Di pertengahan abad ke-19 muncul imigran dari Spanyol Utara, berlangsung penghunian besar-besaran. Struktur migrasi, berkaitan dengan tidak adanya kenaikan ekonomi terdahulu yang berbasis tanaman ekspor, berbeda dengan negara Amerika Tengah lainnya, telah memberi kesempatan tumbuhnya struktur sosial yang relatif homogen dengan landasan kepemilikan petani kecil. Penanaman kopi

tahun 1808 dan ekspansinya sejak tahun 1938 menciptakan ketergantungan ekspor dan memunculkan bangsawan kopi sebagai lapisan pimpinan politik (sampai tahun 1870). Tahun 1878 dengan pembukaan perkebunan-perkebunan pisang milik AS, tercipta sebuah enklave ekonomi yang berorientasi ekspor. Pemerintah liberal sejak awal telah melakukan reformasi-reformasi sosial dan mengkonsolidasi sebuah tata politik yang demokratis, terhenti untuk sementara waktu karena berlangsungnya pemberontakan militer tahun 1917/1918 dan perang saudara tahun 1948.

Setelah Perang Dunia II, dijalankan sebuah industrialisasi yang dipaksakan dan dikendalikan oleh negara, dengan titik berat mula-mula pada pengolahan bahan mentah pertanian melalui usaha kerajinan dan usaha perdagangan kecil, lalu diperluas ke bidang industri ringan (kimia, farmasi, pengolahan karet, dan metal) dengan basis modal asing. Struktur ekonomi Kosta Rika—ekspor hasil pertanian dan industri (sejak tahun '60-an) yang ditujukan ke MCCA, meskipun ada strategi substitusi impor tetap sangat bergantung pada bahan mentah dan produk setengah jadi—menyebabkan ekonomi menjadi peka terhadap pengaruh-pengaruh luar. Turunnya *terms of trade* dan kegagalan MCCA dalam rangka krisis politik di Amerika Latin, serta kegagalan politik ekonomi dan fiskal, mendorong ekonomi Kosta Rika ke sebuah krisis berat tahun '70-an. Krisis ini memang dapat diringankan pada tahun-tahun terakhir dengan

bantuan makin besarnya ekspor ke AS, bantuan ekonomi dari AS secara besar-besaran dan banyak perundingan penjadwalan utang, tetapi tetap saja jangka panjang tidak stabil: utang makin tinggi (akhir tahun 1986: sekitar 4,5 miliar US\$) dan ekonomi sangat bergantung pada pasar AS serta *good will* kreditor dan pemerintah AS.

4. Krisis ekonomi dan krisis manajemen (persyaratan ketat dari IMF dan Bank Dunia: pengurangan subsidi publik serta pengeluaran untuk pendidikan dan sosial; kenaikan harga, tarif, dan pajak yang sampai kini hanya separo terpenuhi), mempercepat polarisasi struktur ekonomi dan sosial yang diawali dengan industrialisasi. Investasi yang diperkuat (terutama asing) di sektor-sektor terpenting, pertanian dan industri, menyebabkan terjadinya penguatan konsentrasi pendapatan, tanah, dan modal. Dibandingkan dengan negara-negara Amerika Tengah lainnya meskipun jumlah usaha kecil dan menengah masih banyak, tetapi struktur pemilikan tanah—sejak tahun 1974 setiap 39% usaha pertanian memiliki lebih dari 200 ha meliputi 54,4% lahan—jika diperhatikan tetap memperlihatkan hubungan-hubungan feodalistis. Indikator-indikator sosial (→ tabel 4 dalam lampiran) sebaliknya menggembarakan, sedangkan dalam bidang pendidikan dan kesehatan terdapat kesenjangan kuat desa-kota.

5. Menurut UUD tahun 1949 Kosta Rika merupakan sebuah demokrasi presidensial dengan parlemen satu kamar. Anggota parlemen tidak boleh memilih presiden untuk kedua

kalinya dalam periode jabatan yang berurutan. Militer dihapus tahun 1949. Partai-partai Kosta Rika bersifat dualistik: *Partido Liberacion Nacional* (PLN), berorientasi sosial-demokrat dan sejak tahun 1982 memiliki mayoritas dalam parlemen dan presiden, versus koalisi liberal-konservatif yang mendirikan partai PUSC tahun 1983. Intern partai-partai sangat terkoyak-koyak; perilaku mereka dalam pemberian suara tidak mempunyai kesatuan. Adanya rencana pemerintah Reagan untuk memakai Kosta Rika seperti Honduras dalam hal politik destabilisasinya terhadap Nikaragua, menguatkan keinginan Presiden L.A. Monge tahun 1983 untuk berpegang pada kenetralan Kosta Rika yang sudah ada sejak lama, tetapi dalam rangka konflik Amerika Tengah berlangsung sebuah militerisasi negara itu dengan bantuan *know-how*, pendidikan, dan bantuan militer AS: persenjataan secara deras dan penguatan kekuatan pengaman, pendirian sebuah pasukan *counterinsurgency* dan kesatuan paramiliter (OPEN) yang selalu siaga; pangkalan *contra* pada perbatasan ke Nikaragua ditolerir. Presiden Arias (sejak tahun 1986) jelas berpaling dari politik pendahulunya yang pro AS, secara aktif mencari jalan keluar konflik Amerika Tengah dan mendorong terjadinya sebuah perjanjian perdamaian regional. Di dalam negeri ia melakukan demiliterisasi, sementara politik ekonomi tetap berpegang pada sistem ekonomi yang sangat berorientasi ekspor. Kepustakaan: U. Fanger, "Costa Rica", dlm.: *HDW II*, vol. 3, Hamburg 1982, hlm. 43 dst.; C.D. Ameringer, *Democracy in Costa Rica*, New York 1983; A. Maislinger (ed.), *Costa*

Rica: Politik, Gesellschaft und Kultur eines Staates mit ständiger aktiver und unbewaffneter Neutralität, Innsbruck 1986; L. Gudmundson, "Costa Rica's Arias at Midterm", dlm.: *Current History* 86 (1987), no. 524, hlm. 417 dst.; literatur selanjutnya → Konflik Amerika Tengah. mik/ks

kredit anggaran Kredit untuk bantuan pembangunan dari pemerintah ke pemerintah, tidak terikat pada persyaratan penggunaan tertentu dan bertujuan untuk menyeimbangkan anggaran. wpz

kredit Eropa Usaha perkreditan yang dilakukan oleh pusat-pusat uang (London, Luksemburg, Zurich, Paris) dalam mata uang nonlokal (dengan 75% US\$), tidak di bawah pengawasan negara dan terbebas dari kewajiban cadangan minimal. Bank-bank Eropa membiayai pusat uang *offshore* di mana berlangsung usaha kredit Eropa.

Kepustakaan: D. Lomax/P.T.G. Gutmann, *The Euromarkets and International Financial Policies*, London 1981; E.L. Versluisen, *The Political Economy of International Finance*, Westmead, GB 1981. dn

Kuba Sejak revolusi, Kuba melakukan pembangunan besar-besaran, dengan kemajuan terutama di bidang sosial. Krisis ekonomi, tingginya utang luar negeri, masalah organisasi internasional serta dampak politik *perestroika* Uni Soviet, menghadapkan kembali negara itu ke masalah besar yang usaha pemecahannya berisikan penolakan terhadap politik reformasi ekonomi Uni Soviet.

1. Kuba dengan luas 110.922 km² merupakan pulau terbesar di Kepulauan Antila Besar. Sektor terpenting adalah pertanian (sekitar 50% negara dapat dimanfaatkan untuk pertanian). Pertanian berkonsentrasi pada komo-

ditas utama ekspor, gula (mempunyai situasi penanaman yang baik karena iklim tropis, tetapi juga bergantung pada iklim: masa kering, angin topan). Kontribusi gula pada ekspor Kuba masih berjumlah 70%-85% penghasilan ekspor dari sektor ini, tetapi mengalami penurunan akibat jatuhnya harga gula terus-menerus. Monokultur tebu memerlukan impor bahan pangan yang tinggi (30% impor keseluruhan) di masa Kuba prarevolusi, penanamannya dikurangi melalui diversifikasi pertanian untuk menutup kebutuhan sendiri; makin banyak ditanam jagung, padi, kacang polong, jawawut, tembakau, kopi, dan jeruk (untuk ekspor); perluasan peternakan (sektor kedua terpenting setelah gula); produksi susu dan perikanan, kultivasi lahan tambahan.

Di tenggara Kuba terdapat bijih besi yang penting artinya. Pertambangan dan pengolahan industri dari kekayaan bumi berkonsentrasi terutama pada produksi nikel. Karena tidak memiliki cadangan energi dan bahan mentah sendiri, pemaksaan perluasan sebuah industri berat tidak dilanjutkan (bergantung pada impor minyak mentah Uni Soviet sejak tahun 1959). Sebaliknya, pembangunan industri Kuba mengacu pada kebutuhan pertanian seperti perluasan industri gula, industri bahan pangan (daging, ikan), industri pengolahan produk pertanian (bir, rum, tembakau), pengolahan produk sampingan dari tebu (kertas, pakan ternak), perluasan industri kimia (pupuk buatan, serat buatan), pembuatan mesin-mesin pertanian, dan semen. Turisme sejak tahun '80-

an makin penting sebagai sumber devisa (tahun 1986: 110 juta US\$).

2. Tahun 1511 Kuba masuk dalam sistem kolonial Spanyol. Sesuai dengan tradisi feodal Spanyol, terbentuk sebuah masyarakat kolonial yang secara politik dan ekonomi bergantung pada Spanyol. Kuba menjadi simpul perdagangan Spanyol dan basis pengadaan. Saat itu, ekonomi berlandaskan peternakan (ekspor kulit) yang ekstensif, dilakukan di latifundia serta produksi tembakau dalam usaha kecil (serta perdagangan budak). Perekonomian gula di abad ke-19 mengalami masa kenaikan pesat (jatuhnya Haiti sebagai produsen gula, berdirinya AS, liberalisasi politik perdagangan Spanyol tahun 1918). Di Kuba berlangsung produksi perkebunan gula yang monokultur dan berbasis pengisapan budak-budak yang diimpor dari Afrika serta berproduksi untuk kebutuhan produsen Spanyol dan AS. Setelah perang kemerdekaan kedua melawan Spanyol (1895-1898), Kuba mencapai kemerdekaan politik, tetapi terbatas karena adanya campur tangan AS dalam perang (kepentingan ekonomi) dan hak intervensi AS (*Platt Amendment*) yang tertancup dalam UUD Kuba. Pada masa berikutnya, Kuba berubah sama sekali menjadi pulau gula yang perkembangan ekonominya bergantung pada konjungtur gula dunia dan gerak naik-turun ekspor. Tahap baru ketergantungan struktural dan politik Kuba ke AS dan keterbelakangan yang diakibatkannya berlangsung sampai tahun 1959 (pendesakan ekonomi Kuba oleh modal AS: tahun 1958: 13 perusahaan gula AS memproduksi 40%

gula; modal AS mengendalikan 36% tanah, 90% pertambangan, keseluruhan pengadaan energi; transfer keuntungan ke AS menghambat perkembangan yang mandiri).

Kemenangan revolusi Kuba tahun 1959 di bawah pimpinan Fidel Castro mengakhiri hubungan ketergantungan struktural Kuba ke AS. Embargo perdagangan oleh AS (sejak tahun 1960), pengeluaran Kuba dari OAS, dan boikot ekonomi negara-negara OAS dengan mendapat dukungan AS, memaksa Kuba melakukan hubungan perdagangan yang intensif ke negara-negara sosialis (terutama Uni Soviet). Saat itu juga revolusi yang pada mulanya bersifat radikal-demokrat dan anti-imperialis, menjadi semakin radikal (terutama setelah terjadi usaha invasi ke Kuba oleh tentara bayaran Kuba dan AS yang dibantu oleh AS). Dengan bantuan kredit terutama dari Uni Soviet dijalankan pembangunan ekonomi dan perubahan Kuba yang sosialis. Tahun 1972 Kuba menjadi anggota COMECON. Sebagai mitra dagang utama, kreditor, dan penerima gula terbanyak sekarang adalah Uni Soviet; sebelum tahun 1959 adalah AS. Namun, ketergantungan baru Kuba ini tidak terbukti merupakan ketergantungan struktural, melainkan memungkinkan mengatasi keterbelakangan di berbagai bidang.

3. Penduduk Kuba tahun 1987 diperkirakan 10,3 juta jiwa (kepadatan penduduk: 89/km²); tingkat urbanisasi 71%; ibu kota La Habana (1981) berpenduduk 1,92 juta jiwa. Pelarian dari desa yang meluas sebelum revolusi, menurun dengan me-

ngecilnya kesenjangan desa-kota. Pertumbuhan penduduk tahunan 1980-1986 adalah 0,9%, terendah di Amerika Latin. Dengan perluasan sistem kesehatan sejak revolusi a.l. tingkat harapan hidup menjadi 75 tahun dan tingkat kematian turun 1,6%. Gelombang imigrasi (tahun 1959-1962: sekitar 200.000; tahun 1966: 56.408; tahun 1972: 19.455) dengan motivasi politik setelah revolusi mencapai puncak tahun 1980. Tahun 1980 sekitar 147.000 emigran meninggalkan negara itu karena alasan materi dan politik. Susunan etnis penduduk juga mencerminkan bahasa dan agama masa kolonial: kulit putih sekitar 70%, Mulat dan Mestis 15%-17%, kulit hitam 12% lebih, Cina 0,5%; sekitar 90% penduduk beragama Katolik; bahasa nasional adalah Spanyol.

4. Revolusi Kuba mengubah secara mendasar struktur sosio-ekonomi Kuba. Sebelum revolusi: orientasi kegiatan ekonomi (investasi, infrastruktur) pada kebutuhan sektor gula yang berorientasi ekspor terbentuk hipertrop; tidak adanya industri nasional yang berorientasi ke pasar dalam negeri; pendirian beberapa industri asing (AS) yang padat modal, enklave asing tidak berintegrasi ke daur ulang ekonomi nasional dan tidak menciptakan lapangan kerja; konsentrasi tinggi tanah di Amerika Latin: 57% tanah dimiliki oleh 2,8% usaha pertanian, 15% tanah milik, dan 78,5% usaha. Konsekuensi sosial: tingginya kuota pengangguran dan pekerja sambilan (tawaran kerja musiman, bergantung pada panen tebu); tahun 1956 9% menganggur selama musim panen, setelah panen 21%;

situasi pendapatan yang sangat tidak seimbang (dirugikan terutama petani subsistensi dan tani gurem [32%] serta lapisan perkotaan yang termarginalisir [23%]); kesenjangan besar desa-kota.

Setelah revolusi Kuba membangun sebuah ekonomi berencana terpusat, alat-alat produksi perlahan-lahan berpindah menjadi milik negara. Dua reformasi pertanian tahun 1959 dan 1963 menasionalisasi semua pemilikan tanah di atas 67 ha (63% dari usaha pertanian). Kampanye besar-besaran untuk kolektivisasi sukarela mulai tahun 1986 diharapkan dapat mengurangi jumlah usaha swasta yang masih ada. Sampai tahun 1968 seluruh industri nasional dan luar negeri seperti perdagangan, bank, lalu lintas, kesehatan, dan pendidikan juga dinasionalisasi. Sekaligus dilakukan usaha pemerataan drastis dengan membebaskan lapisan yang dulu mendapatkan privilese (oligarki, lapisan menengah). Salah satu masalah terbesar sebelum revolusi, yaitu pengangguran, dapat dihapuskan. Dengan rasionalisasi usaha dan birokrasi yang dilakukan mulai tahun 1978 muncul kembali sebagian melalui penciptaan kegiatan yang tidak produktif dari masalah tersebut pengangguran (tahun 1979: 5,4%).

Setelah terjadi perdebatan dalam perencanaan tahun 1963/1964 dijalankan sebuah sistem perencanaan dan pimpinan yang tersentralisasi: sistem pembiayaan yang sesuai dengan anggaran (pimpinan usaha sentral, distribusi dana secara sentral, mesin dan sumber daya, pengaliran kembali ha-

sil yang diterima dan keuntungan ke dinas sentral yang menanganinya). Paralel dengan itu, sebuah sistem rangsangan moral (penghapusan upah dan pembayaran uang lembur, upah zaman, kerja lebih sukarela tidak dibayar) diharapkan dapat menaikkan produktivitas kerja dan menghapuskan perbedaan pendapatan. Untuk perencanaan keseluruhan proses produksi dan distribusi serta penetapan rencana pembangunan, dilakukan oleh dinas perencanaan sentral JUCEPLAN. Usaha swasta pertanian dikaitkan melalui organisasi tani kecil ANAP. Kurangnya perhatian pada rentabilitas ekonomi dan perhitungan ongkos, terlalu tersentral, pimpinan birokratis, dan tidak adanya pengaitan tingkat-tingkat bawah ke perencanaan, kurangnya koordinasi rencana tersendiri dan rencana khusus, a.l. menjadi penyebab tujuan perencanaan yang tidak realistis, disorganisasi ekonomi dan penurunan produktivitas kerja.

Setelah terjadi krisis tahun 1970 mulai dihapuskan sentralisasi berlebihan dalam aparat perencanaan dan pimpinan serta mengorganisasi ekonomi menurut kriteria efektivitas dan rentabilitas. Tahun 1978 dijalankan sistem perhitungan ekonomi Uni Soviet, yaitu selain otonomi keuangan dan usaha produksi yang otonom terbatas, dimasukkan juga hubungan uang-barang mencakup perusahaan dan produksi menurut keuntungan dan rentabilitas. Rangsangan kerja material (pembayaran sesuai jumlah kerja yang dihasilkan, kerja per satuan) dan pelaksanaan skala upah yang berbeda-beda sesuai dengan

tingkat kualifikasi dan tanggung jawab politik, diharapkan dapat menaikkan produktivitas kerja, tetapi juga menguatkan perbedaan pendapatan dengan menguntungkan pimpinan pabrik, fungsioner partai, atau personal teknik. Sebagai tambahan reformasi ekonomi tahun 1980 diizinkan untuk pertama kalinya pasar bebas penjualan produksi lebih, bertujuan memperbaiki situasi penawaran barang konsumsi. Perkembangan cepat sebuah ekonomi paralel yang swasta-kapitalis makin menyedot sumber daya sektor negara sebagian melalui korupsi dan penyelewengan, tumbuhnya sebuah lapisan kapitalis baru yang terdiri atas spekulan, moral kerja yang menurun, dan kurangnya perencanaan yang berlanjut, serta krisis ekonomi yang terus-menerus. Tahun 1986 dengan politik *rectification* dilakukan koreksi yang berbeda dengan reformasi-reformasi ekonomi politik *perestroika* Uni Soviet. Pasar bebas dilarang, penggunaan mekanisme pada pembangunan sosialisme dilarang dan ditonjolkan pentingnya rangsangan kerja yang moralis.

5. Usaha-usaha yang dilakukan setelah kemenangan revolusi untuk mengubah struktur sosial, ketidakseimbangan sektoral dan regional, menghasilkan sebuah persamaan masyarakat yang makin besar. Misalnya, sewa rumah turun sampai 10% dari pendapatan dan tercipta sebuah kesehatan sistem jaminan sosial (usia tua, penyakit, cacat). Pendidikan sekolah dan kesehatan dibangun dalam kuantitatif dan kualitatif serta gratis.

Langkah pertama adalah kampanye pemberantasan buta aksara

tahun 1961 yang menurunkan angka tingkat buta aksara dari 23,6% menjadi 3,9%. Berkaitan dengan itu diperluas secara sistematis pendidikan orang dewasa (fakultas untuk buruh dan petani, kursus pendidikan lanjut teknik, sekolah-sekolah malam). Untuk mengintegrasikan perempuan ke dalam proses pendidikan dan kerja menyeluruh, dibangun taman kanak-kanak dan tempat penitipan anak. Untuk mengatasi ketidakseimbangan regional di antaranya dibangun sekolah-sekolah baru dan diciptakan peluang kerja di pedesaan. Reformasi pendidikan termasuk pendidikan yang berkaitan dengan praktek (hubungan pelajaran dan kerja produktif) dan pengalihan isi pelajaran ke bidang teknik ilmu pasti dan ilmu alam. Untuk pelajar dan mahasiswa, sarana pelajaran, penginapan, akomodasi, dan pakaian gratis; mahasiswa mendapatkan beasiswa. Pengadaan kesehatan dibangun terutama di pedesaan, di mana sebelum revolusi hanya ada satu rumah sakit. Tempat pendidikan kesehatan banyak dibangun, bidang pengadaan kesehatan diperluas. Penyakit-penyakit rakyat seperti polio, gastroenteritis, malaria, dan tipus direkam. Tingkat penyakit dan kematian turun.

Meskipun ada rasionisasi barang konsumsi yang di tahun '60-an dilakukan untuk hampir semua produk, tingkat hidup dan situasi materi mayoritas rakyat Kuba yang dulu miskin, jelas mengalami perbaikan. Namun, terutama setelah penghapusan pasar bebas dan krisis ekonomi yang ada kini, diperhitungkan terjadi jalur sempit pengadaan selanjutnya dan

kenaikan harga yang rendah untuk jasa publik (misalnya sistem transportasi).

6. Setelah perang kemerdekaan (1895-1898) perkembangan politik Kuba ditentukan oleh hegemoni AS. Sebuah demokrasi borjuis-parlemen-ter yang mampu berfungsi, tidak dapat berkembang (pemerintah yang sering berganti dan bergantung pada AS, korupsi, diktator, penindasan politik). Kudeta militer yang dilakukan Batista tahun 1952 diiringi pemerintahan diktator yang kejam dan korup, merupakan momen pencetus perkembangan gerakan revolusioner Kuba yang berada dalam tradisi perang kemerdekaan dan pemberontakan rakyat (1933) melawan diktator Machado. Tahun 1955 di bawah pimpinan Fidel Castro setelah perang gerilya selama tiga tahun, berhasil menjatuhkan Batista melalui sebuah mogok umum. UU tahun 1940 dinyatakan tidak berlaku dan kewenangan mengeluarkan UU diserahkan kepada Dewan Menteri. Semua partai politik yang pernah berkolaborasi dengan Batista dilarang.

Struktur politik Kuba yang revolusioner sampai pengesahan UUD tahun 1976 dalam sebuah referendum rakyat, ditandai oleh kecilnya tingkat kelembagaan dan formalisasi kekuasaan politik. Pendekatan-pendekatan kelembagaan terjadi dalam pembangunan Partai Komunis Kuba (PCC/ *Partido Comunista de Cuba*) dan organisasi-organisasi massa. UUD sosialis tahun 1976 mengatasi kekurangan kelembagaan ini. Organ pembuat UU tertinggi kekuasaan negara adalah rapat nasional yang dipilih

secara tidak langsung, memilih dewan negara (31 anggota), serta mengangkat menteri dan anggota-anggota pengadilan tertinggi. Pemisahan negara dan pemerintahan diimplikasikan oleh pembentukan sebuah dewan menteri sebagai organ eksekutif tertinggi; ketua dewan negara (presiden, sejak tahun 1976 Fidel Castro) sekaligus merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan serta panglima tertinggi angkatan bersenjata. Rapat-rapat komunitas yang dipilih rakyat membentuk tingkat terbawah struktur negara sebagai organ kekuasaan negara; memilih anggota-anggota rapat propinsi dan rapat nasional. Selain itu, UUD menetapkan status PCC sebagai kekuatan pemimpin dalam negara dan masyarakat serta menjamin hak organisasi-organisasi massa. Sampai tahun 1970 meskipun ada ketergantungan ekonomi dari Uni Soviet, Kuba tetap menjaga terus kemandirian politiknya. Dalam politik luar negeri bersandar terutama pada politik koeksistensi damai Uni Soviet, mengutuk konflik Cina-Uni Soviet, kritik atas politik partai komunis yang ortodoks, dan mendukung gerakan gerilya di Amerika Latin, sedangkan secara ideologis terutama dalam teori pembangunan sosialisme dan komunisme dengan usaha-usaha penyamaan masyarakat yang berkaitan dengan hal ini serta bersandar pada struktur ekonomi dan politik negara-negara sosialis yang ada (terutama Uni Soviet). Dengan kegagalan revolusi di Amerika Latin yang diharapkan, Kuba di tahun '70-an secara politik dan ideologi makin mengimbangi Uni Soviet. Politik *rec-*

tification yang dilakukan tahun 1986 dan kritik yang berkaitan dengannya terhadap *perestroika* Uni Soviet, telah menyulut pertentangan politik-ideologi lama.

7. Meskipun masalah ekonomi dan ketergantungan ekonomi luar negeri terus berlanjut, Kuba berhasil mengatasi masalah-masalah struktural dan sosial yang merupakan ciri khas negara terbelakang dan tergantung, serta menjalankan sebuah pembangunan ekonomi yang homogen. Titik berat strategi pembangunan agroindustri dan sektor terpenting ekonomi Kuba adalah tetap pertanian (terutama sektor gula) dan ekonomi luar negeri. Krisis ekonomi yang berat di Kuba sekarang ini karena krisis ekonomi dunia, jatuhnya harga gula, dan makin besarnya utang negara yang hanya dapat diatasi dengan bantuan ekonomi dan keuangan dari Uni Soviet, memperlihatkan bagaimana pekanya model pembangunan Kuba yang berlandaskan ketergantungan sangat besar dalam jangka menengah pada satu produk ekspor pertanian sebagai sektor utama pembangunan ekonomi.

Untuk perkembangan ekonomi Kuba dan kelanjutan hasil-hasil sosial dari revolusi, hubungan selanjutnya ke COMECON, terutama ke Uni Soviet (kredit, harga prioritas, dsb.), mempunyai arti sangat penting. Timbul pertanyaan, apakah Uni Soviet dalam rangka politik *perestroika*, dengan politik bantuan ekonomi Uni Soviet yang berusaha mencari orientasi ke kriteria rentabilitas dan efisiensi, tetap bersedia untuk mensubsidi ekonomi Kuba dalam jumlah yang sama seperti sekarang (bantuan

Uni Soviet ke ekonomi Kuba diperkirakan 1-3 juta US\$ per hari). Tahun 1987 Castro menolak membayar kembali kredit Uni Soviet yang ada sampai sekarang. Perbedaan-perbedaan Kuba-Uni Soviet mengenai bantuan ekonomi Uni Soviet, memperjelas aspek selanjutnya yang bermotivasi politik luar negeri dari kritik Kuba terhadap politik reformasi Uni Soviet, *perestroika*.

Oleh karena itu, Kuba terus berusaha meluaskan hubungannya ke negara-negara nonsosialis, terutama ke negara-negara Dunia Ketiga. Selain perjanjian kerja sama bilateral dengan negara-negara Dunia Ketiga, Kuba menjalankan politik perdagangan bersama dengan negara-negara ini (misalnya inisiatif mengenai utang, bantuan pembangunan Kuba ke-36 negara berkembang, mendukung gerakan pembebasan di Afrika, Nikaragua, keanggotaan di CARICOM). Keanggotaan Kuba dalam organisasi nonblok tidak menghalangi sikap Kuba yang tetap akan berkaitan erat dengan Uni Soviet.

Kepustakaan: P.M. Sweezy/L. Huberman, *Sozialismus in Kuba*, Frankfurt/M. 1970; H. Thomas, *Cuba or The Pursuit of Freedom*, London 1971; M. Harnecker, *Cuba, Dictadura o democracia*, Madrid 1976; J. Levesque, *The USSR and the Cuban Revolution: Soviet Ideological and Strategic Perspectives 1959-1977*, New York 1978; J.L. Dominguez, *Cuba. Order and Revolution*, Cambridge (Mass.)/London 1978; F. Mires, *Kuba: Die Revolution ist keine Insel*, Berlin 1978; H. Fabian, *Der kubanische Entwicklungsweg*, Opladen 1981; K. Stahl, *Kuba - eine neue Klassengesellschaft?*, Heidelberg 1987; M. Rediske, "Kuba: Auf Gegenkurs zur Perestroika", dim.: *Lateinamerika. Analysen und Berichte* 12, Hamburg 1988.

ks

Kultus Voodoo → Haiti.

kuota akumulasi Pangsa pendapatan nasional yang digunakan untuk investasi (kuota investasi).

Dalam pengertian Marx adalah bagian surplus lebih yang digunakan untuk akumulasi. Dalam teori akumulasinya, Marx memperlihatkan bahwa pengusaha makin menggunakan metode-metode padat modal dalam proses produksi sehingga modal konstan (mesin) tumbuh lebih cepat daripada modal variabel yang dibeli faktor produksi kerja. Akibatnya, (intern) konsentrasi produksi dan modal, ditambah sentralisasi modal dalam bentuk gabungan-gabungan eksternal.

hk
kuota desersi Jumlah anak/remaja dalam % dari masing-masing kelompok umur yang meninggalkan sekolah sebelum mencapai kelas tertentu atau tamat sekolah.

dn
kuota drop-out Jumlah anak dari seluruh anak yang bersekolah dalam sebuah kelompok umur, dalam tahap sangat awal gagal di sekolah, meninggalkannya dan jatuh ke situasi buta aksara.

dn
kuota ekspor Hubungan nilai ekspor sebuah perekonomian nasional ke PDB; memperlihatkan sejauh mana sebuah perekonomian nasional bergantung pada ekspor, serta berapa besar kontribusi ekspor barang dan jasa ke pendapatan nasional.

dn
kuota produksi Disebut juga kontingensi produksi, menandai jumlah produksi yang disepakati oleh negara produsen dan eksportir barang tertentu sebagai reaksi terhadap situasi kelebihan tawaran, agar dapat mencegah kelebihan penawaran produk di pasar dunia, dengan demikian tidak dapat

dihindari jatuhnya harga karena adanya mekanisme pasar bebas.

dn
kuota tabungan Jumlah persen → pendapatan nasional yang tidak digunakan langsung untuk konsumsi, melainkan ditabung. Kuota tabungan adalah suatu indikator untuk pembentukan modal sebuah negara dengan demikian memperlihatkan kemampuannya untuk melakukan investasi yang produktif. Di negara berkembang kuota tabungan rendah karena rendahnya tingkat pendapatan. Peningkatan kuota tabungan merupakan persyaratan penting untuk peningkatan pembentukan modal lokal dan pengurangan ketergantungan dari impor modal. → bantuan keuangan, investasi langsung.

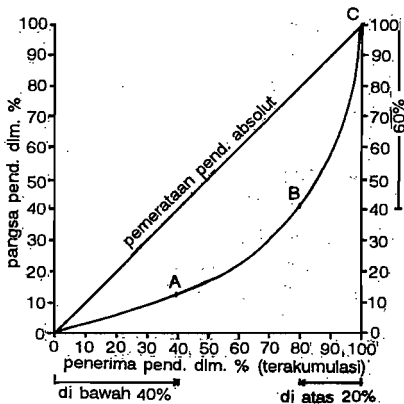
dn
kuota upah → distribusi pendapatan.

kurang makan Merupakan sebuah penghambat terbesar dalam pembangunan individu, keluarga, dan masyarakat. Kurang makan yang diderita seorang perempuan hamil berakibat terhadap perkembangan anaknya. Kurang makan, terutama di usia kanak-kanak, menyebabkan perlambatan pertumbuhan jasmani dan kejiwaan, peka terhadap penyakit, kelemahan imun, memperburuk situasi di masa sedang sakit, meningkatkan mortalitas, dan menurunkan produktivitas kerja. Kekurangan energi dan protein (putih telur) dengan gambaran klinisnya: marasmus (distropi bayi) dan kwasiorkor. Situasi kurang makan lainnya yang penting berkaitan dengan vitamin, asam amino, dan asam lemak. Penyebab absolut bukan kurang makan, melainkan distribusi yang tidak seimbang dalam masya-

rakat dan keluarga, variasi pangan yang buruk dalam perubahan kultur, tabu makanan (\rightarrow pangan).

Kurva Lorenz Merupakan diagram yang banyak dikenal untuk penggambaran distribusi pendapatan per-orangan. Pada sumbu horizontal diatur penerima pendapatan menurut tingginya pendapatan, tetapi bukan jumlah absolutnya, melainkan jumlah persen kumulasinya.

Gambar 6: Kurva Lorenz



Pada sumbu vertikal diberikan bagian pendapatan persentual yang berhubungan. Diagonal OC merupakan garis distribusi yang sama absolut, misalnya 20%/40%/60% dari penduduk mendapatkan masing-masing 20%/40%/60% dari seluruh pendapatan. Kurva Lorenz OABC menggambarkan benar-benar situasi distribusi (di sini merupakan sebuah distribusi khas untuk negara berkembang). Titik A memperlihatkan bahwa 40% terbawah dari penerima pendapatan mendapatkan 12% dari seluruh pendapatan. Titik B memper-

lihatkan bahwa bagian pendapatan 80% tingkat bawah memperoleh 40% dari pendapatan keseluruhan (respektif 20% bagian atas mendapatkan bagian di atas 60%).

Jika Kurva Lorenz semakin menjauhi diagonal, makin tidak sama distribusi pendapatan. Kasus ekstrem yang berlawanan dengan diagonal tercapai jika Kurva Lorenz bertemu dengan sumbu OE dan EC. Dalam situasi ini seseorang memperoleh keseluruhan pendapatan dan penduduk lainnya tidak sama sekali: batas hipotetis distribusi pendapatan yang sama sekali tidak sama. Semua situasi pendapatan yang nyata ada digambarkan oleh Kurva Lorenz, letaknya berada di antara diagonal dan sumbu. Berdasarkan Kurva Lorenz diperhitungkan ukuran distribusi pendapatan. Koefisien GINI sering dipakai. **hpn Kuwait** Jika diukur dari jumlah penduduk negara **OPEC**, Kuwait merupakan salah satu negara terkaya di dunia. Sistem yang berlaku memberikan kesempatan bagi penduduk untuk ikut menikmati kekayaan ini dalam jumlah tertentu saja (terutama dalam bentuk jaminan sosial). Mereka sama sekali tidak mempunyai kekuasaan memiliki kekayaan tersebut.

1. Emirat Kuwait (luas 17.818 km²) terletak di barat laut pantai Teluk Persia. Wilayah gurunnya merupakan daerah terpanas di dunia. Air minum sedikit (tidak ada sungai dan danau; air tanah adalah payau, campuran air tawar dan air asin) dan harus dibuat dengan membuang kadar garam dari air laut. Bercocok tanam hanya mungkin dengan ongkos yang sangat tinggi dan pengair-

an secara buatan. Tumbuhan yang sangat sedikit dengan semak belukar selama ratusan tahun memberikan situasi hidup yang pas-pasan bagi orang nomad. Kuwait merupakan negara minyak. Cadangan minyaknya di daratan dan *offshore* di Teluk Persia diperkirakan meliputi 10% cadangan dunia, selain itu Kuwait memiliki banyak gas bumi. "Ongkos untuk penambangan dan transportasi minyak ke pelabuhan-pelabuhan termasuk terendah dari semua negara penambang karena ada gudang sangat banyak dan berada dalam tekanan yang demikian besar sehingga minyak tidak perlu dipompa pada saat eksploitasi. Tidak ada hambatan daerah serta tidak ada gangguan transportasi karena iklim" (Hecklau 1978, hlm. 387).

2. Penguasa Kuwait dapat mempertahankan otonomi tertentu di dalam negeri selama ratusan tahun (tahun 1756 pendirian dinasti penguasa oleh Syekh Sabah al-Owel). Tahun 1922 (Perjanjian Uquair) antara Saudi-Arabia, pemerintah mandat Inggris, dan Emir Kuwait ditetapkan batas-batas antara negara-negara ini. Untuk mencapai sebuah kompromi mengenai penarikan garis batas antara Saudi Arabia dan Irak, Kuwait harus menyerahkan 2/3 teritorialnya kepada Saudi Arabia. Tahun 1965 ditetapkan sebuah zone netral dalam sebuah perjanjian dengan dampak pembagian daerah sama besar antara Kuwait dan Saudi Arabia pada tahun 1969. Sebagai ganti rugi terhadap kehilangan daerah Kuwait, pemerintah Irak mengakui perbatasan Kuwait ke Irak. Tahun 1961 Kuwait merdeka.

3. Penduduk Kuwait tahun 1989 berjumlah sekitar 2 juta. Mereka tumbuh cepat (tahun. 1980-1989: 4%/tahun). Penyebabnya adalah tingginya angka kelahiran, turunnya tingkat kematian (tahun 1989: tingkat harapan hidup 74 tahun), dan terutama karena arus masuk penduduk dari negara-negara Arab, Iran, India, dan Pakistan akibat berlangsungnya *boom* minyak (jumlah orang asing sekitar 60% dari jumlah seluruh penduduk). Pendatang tidak selalu merasakan hak yang sama seperti penduduk asli Kuwait sehingga dapat mengakibatkan ketegangan sosial. Karena eksploitasi minyak dan gas tidak padat karya, penduduk terkonsentrasi di perkotaan (tahun 1985: 93,7%, ibu kota aglomerasi Al-Kuwait dan Al-Salmija, tahun 1985: 1,9 juta penduduk).

Penduduk Kuwait yang sebagian besar adalah orang Arab, sekitar 92% menganut agama Islam (Sunī/Syiah: 70/30), 6% beragama Kristen. Bahasa negara adalah bahasa Arab, bahasa perdagangan terpenting, dan bahasa kedua adalah bahasa Inggris. Dengan kekayaan minyak, cara hidup penduduk asli Kuwait mengalami perubahan besar: bahan pangan dasar disubsidi oleh negara (hampir semua bahan pangan harus diimpor), pendidikan, pengajaran, dan kesehatan dibangun dan diperluas, serta gratis (tahun 1985: 1 dokter untuk 629 penduduk, berlaku wajib sekolah, sejak tahun 1962-1966 pendirian universitas Kuwait/pemberian beasiswa yang tinggi untuk studi di luar negeri). Selanjutnya, di Kuwait berlaku kebebasan pajak.

4. Kuwait merupakan monarki konstitusional. Posisi Emir yang sejak tahun pertama kekuasaannya telah menentukan pengganti dari pihak keluarganya, menurut UUD tahun 1962 tidak dapat diganggu gugat. Ia menjadi panglima tertinggi angkatan bersenjata dan bersama rapat nasional menjalankan legislatif serta bekerja sama dengan pemerintahan menjalankan eksekutif. Kepala negara sejak tahun 1978 adalah Emir Jabar al Ahmad al Jabar as Sabah. Kementerian terpenting dipegang oleh keluarga Emir (luar negeri, minyak bumi, dalam negeri, dsb.). Parlemen (50 anggota, periode 4 tahun) hanya mempunyai arti kecil secara politis. Hak pilih hanya dimiliki laki-laki, dan yang melek aksara (tahun 1989: 70%), serta keluarganya hidup di Kuwait sebelum tahun 1920. Partai tidak diizinkan di Kuwait. Kekuasaan Emir terganggu ketika berlangsung invasi Irak ke Kuwait tanggal 2 Agustus 1990. Ia beserta keluarga melarikan diri ke Saudi Arabia. Dengan bantuan AS dan tentara multinasional Februari 1991 Kuwait dibebaskan. Pembebasan ini berongkos mahal. AS berhasil mengokohkan keberadaannya di kawasan Teluk. Berdasarkan perjanjian perlindungan AS terhadap Kuwait dari serangan luar yang berlaku 10 tahun, AS diizinkan menempatkan sekitar 4.000 tentaranya di Kuwait dan mendapatkan hak guna pangkalan militer untuk angkatan lautnya. Peran negara-negara Arab lain di kawasan tersebut, a.l. Mesir dan Suriah, menjadi tersingkir.

5. Dihitung dari jumlah warga negaranya cadangan minyak membuat Kuwait menjadi negara terkaya di dunia. Dari kekayaan ini selain keluarganya hanya sedikit penduduk yang dapat ikut menikmati, terutama pengusaha swasta yang ditunjang negara dengan usaha bantuan ekonomi dan pemilik tanah yang dibeli dengan harga tinggi oleh negara untuk perluasan kota, instalasi industri, dan sarana infrastruktur.

6. Eksploitasi dan pengolahan minyak bumi dan gas bumi sejak nasionalisasi keseluruhan ekonomi minyak (1975-1977) berada di tangan negara. Penerimaan dari ekspor minyak berjumlah lebih dari dua pertiga pendapatan negara (biasanya sekitar 80%). Di tempat kedua adalah pendapatan dari tabungan luar negeri dari keuntungan minyak. Usaha untuk meluaskan basis ekonomi satu-satunya negara itu dilakukan dengan pemanfaatan gas bumi sebagai motor pembangkit tenaga termo-elektrik dan saluran instalasi penghilangan kadar air asin, pembuatan gas cair, pembangunan industri petrokimia dalam negeri dan perluasan perikanan (pemasokan udang ke AS).

Kepustakaan: H. Hecklau, "Kuwait", dlm.: *HDW II*, vol. 4, Hamburg 1978, hlm. 383, dst.; M.W. Khouja/P.G. Sadler, *The Economy of Kuwait, Development and Role in International Finance*, London/Basingstoke 1979; Y.S.F. Al-Sabah, *The Oil Economy of Kuwait*, London 1980; S.Y. Alessa, *The Manpower Problem in Kuwait*, London 1981; H.U. Schedler, "Kuwait", dlm.: *HDW II*, 6, Hamburg 1983, hlm. 386, dst.; U. Steinbach/R. Robert (ed.), *Der Nahe und Mittlere Osten*, vol. 2, Opladen 1988, hlm. 223 dst.; *Der Spiegel*, *Amerikanische Präsenz im Golf verankert*, no. 42, 14 Oktober 1991, hlm. 193. rs

L

Ladinos Manusia keturunan campuran Afrika dan Indian yang berbahasa Spanyol, mengambil adat istiadat orang Spanyol dan menonjol karena kemampuan imitasinya. Istilah ini juga sering dipakai untuk campuran orang Indo-Eropa. *Ladinos* mempunyai arti yang sama seperti Mestis, *Cholo*, atau *Caboclo*. Proses ladinisasi menyebabkan orientasi ke kultur yang berkuasa dengan konsekuensi sosial dan politiknya. fn
LAFTA → ALALC.

Lagos Plan of Action Konferensi puncak ekonomi OAU yang dipersiapkan oleh ECA di Lagos (1980), menyepakati sebuah rencana aksi dengan semboyan *collective self-reliance*, a.l. merencanakan mula-mula penciptaan zone ekonomi bebas bea (*preferential trade areas*), meluaskan pertukaran perdagangan antar-Afrika, dan sampai tahun 2000 mendirikan sebuah komunitas ekonomi kontinental. fn

landlocked countries → negara pedalaman.

landreform → reformasi pertanian.

Laos Dalam rangka *perestroika* Uni Soviet, negara Laos yang dikuasai pemerintah komunis sejak tahun 1975 mulai melakukan pembukaan politik

dan ekonomi (terutama terhadap NIB di dekatnya) sejak beberapa tahun terakhir.

1. Republik Demokrasi Rakyat Laos merupakan negara pedalaman yang relatif sedikit dihuni karena bentuknya yang memanjang dan kekurangan infrastruktur (tidak ada jalur kereta api, beberapa jalan untuk segala cuaca), menghadapi masalah lalu lintas dan transportasi yang besar, serta menyulitkan usaha distribusi bahan pangan dan barang-barang bantuan.

2. Ciri-ciri pokok penduduk Laos adalah keragaman etnisnya menjadi penghambat untuk persatuan nasional dalam arti sebenarnya. Tahun 1989 dari sekitar 4 juta penduduk, hanya sekitar separo orang Laos dataran rendah, lainnya adalah suku-suku yang hidup di pegunungan (Lao Theung, Yao Ka, dan H'mong, yang juga dinamakan Meo), dan kelompok minoritas Thai, Mon-Khmer, serta Shan. Oleh karena itu, lebih dari separo penduduk terdiri atas minoritas kultural dengan 68 kelompok bahasa dan kepercayaan serta adat istiadat yang sangat berbeda-beda. Bangsa-bangsa minoritas ini mengakui penguasa Laos hanya secara for-

mal, tetapi mereka menuntut hak otonomi dan sering sangat memusuhi usaha-usaha integrasi maupun pengendalian oleh pemerintah pusat.

3. Kerajaan di Lan Xang (Jutaan Gajah) Laos bersatu pada abad ke-14, mencapai puncak keemasannya di abad ke-17, kemudian sedikit demi sedikit digerogeti oleh Kerajaan Thai yang lebih kuat (di selatan dan barat) dan Vietnam yang ekspansif (sepanjang perbatasan timur). Akhirnya, di abad ke-19 Laos menyempit menjadi taklukan yang harus mengirim upeti ke Kerajaan Thai. Tahun 1893 ketika Perancis menjadikan Laos daerah protektoratnya, integritas teritorial terjamin. Masa penjajahan Perancis tidak membawa suatu perkembangan Laos karena Laos hampir tidak mempunyai bahan mentah (kecuali timah) yang dapat ditambang tanpa ongkos besar. Pembangunan sebuah ekonomi perkebunan (seperti di Vietnam bagian selatan) terbentur pada situasi tanahnya. Dalam rangka konferensi Jenewa tahun 1953 Laos memang mendapatkan kemerdekaan formal, sementara itu kerajaan kecil itu terpecah-pecah oleh pertikaian fraksi-fraksi kelas atas. Sementara kelompok pro Barat mencari hubungan erat Laos ke Thailand dan AS, fraksi di sekitar Pangeran Souvana Phouma menjalankan haluan netral, dan "Pangeran Merah" Souphanouvong menggabungkan diri ke Pathet Lao (didirikan tahun 1956) yang pro komunis.

Setiap fraksi mendapat dukungan dari kelompok suku lain di negara bersuku banyak tersebut. Laos terseret ke Perang Indocina dan tidak lama kemudian infrastrukturnya yang

sedikit dibom habis oleh angkatan udara AS. Dari perjanjian gencatan senjata Februari 1973 muncul kelompok koalisi baru dengan Pathet Lao (sejak tahun 1957) sebagai kekuatan terkuat. Ketika Desember 1975 dicanangkan Republik Rakyat Demokrasi Laos, "Pangeran Merah" Souphanouvong tetap sebagai pemimpin dan menjadi presiden pertama. Namun, usaha pemerintah untuk menapak jalan pembangunan ekonomi dan politik yang mandiri, gagal karena situasi buruk dan politik Vietnam yang berkuasa.

Setelah tahun 1975 Vietnam menempatkan tentara pelindung dan melakukan pembersihan politik, dengan akibat anggota-anggota elite politik dimasukkan ke kamp pendidikan atau harus melarikan diri ke Thailand (akhir tahun 1986 sekitar 86.000 pengungsi Laos di kamp-kamp pengungsi di Thailand).

4. Usaha-usaha pembangunan pemerintahan Laos sangat terbatas. Tidak ada sistem administrasi yang efisien dan mencakup seluruh negara untuk dapat memenuhi pengadaan penduduk dan distribusi bantuan kedokteran. Penyakit (malaria, disentri, tbc) menyebar luas, jarang ada dokter dan rumah sakit. Situasi membaik sejak peralihan kekuasaan tahun 1975, tetapi perbandingan rata-rata 1 dokter untuk 5.000 penduduk (1987) tetap tidak memuaskan.

Selain beberapa usaha penggergajian, industri bahan makanan, dan pabrik bir, Laos hampir tidak memiliki industri pengolahan. Usaha produksi menurut IMF hanya menyumbangkan hanya 4% ke PDB dan

hanya mempekerjakan 1% dari 2 juta angkatan kerja Laos. 3/4 penduduk bekerja di pertanian dan perikanan darat. Pengadaan pangan sendiri yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar merupakan tujuan utama pemerintah Laos dan terlihat tercapai tahun 1981 dengan perluasan lahan pertanian dan instalasi pengairan.

Hampir 2/3 negara terdiri atas hutan. Sumber penerimaan terbesar adalah penjualan kayu mulia dan hidro-energi dari bendungan Nam Ngum yang dibangun dengan bantuan asing, terutama dari Thailand. Insinyur-insinyur Vietnam kini sedang mulai mencari prospek baru kekayaan bumi Laos.

Bantuan pembangunan datang dari Uni Soviet dan negara-negara Barat, sementara Thailand tetap merupakan mitra dagang terpenting. Karena Laos hanya sedikit mengeksport dan barang konsumsi hampir semuanya harus diimpor, negara itu memiliki defisit neraca perdagangan yang besar (tahun 1987: 152 juta US\$), sampai kini hanya dapat dipenuhi dengan kredit dari negara-negara Eropa Timur.

5. Setelah kegagalan kampanye kolektivisasi dan pengendalian pertanian yang besar, pemerintah sejak tahun '80-an berusaha mempropagandakan revolusi "halus" untuk merangsang produksi pasar bebas dan perdagangan di perbatasan. Dalam rangka gelombang reformasi Uni Soviet dan bersandarkan Vietnam, sejak pertengahan tahun '80-an terlihat usaha liberalisasi dan demokratisasi terbatas di bidang politik dan ekonomi: UU pemilihan yang dikeluarkan April 1988 serta pemilihan di

tingkat daerah dan propinsi sedang dilakukan Juni 1988, memperlihatkan arah ini. Untuk pertama kalinya sejak tahun 1975 dilakukan pemilihan di tingkat nasional pada April 1989. Pemberian otonomi usaha yang relatif akhir 1985 memungkinkan tanggung jawab yang lebih besar dan fleksibilitas pimpinan usaha. Sebuah UU *joint venture* Juli 1988 memberikan situasi yang menguntungkan untuk investasi langsung asing di Laos (misalnya izin 100% pangsa modal asing dalam perusahaan), selama mereka memperbaiki infrastruktur, meningkatkan turisme atau ekonomi ekspor.

Politik luar negeri Laos di tahun-tahun terakhir mendapatkan ruang gerak lebih besar melalui perundingan-perundingan dengan Thailand, Cina, dan AS, dan mengurangi isolasi politik serta ketergantungan sebelah pihak dari Vietnam. Contoh: Laos memperlihatkan kesulitan-kesulitan suatu masyarakat sosialis dengan landasan ekonomi subsistensi. Meskipun peluang perkembangan tetap terbatas, terlihat mulai ada pemerataan dalam keseimbangan kekuatan regional yang dapat memberikan dampak penting bagi Laos. → Vietnam.

Kepustakaan: H.U. Luther, "Laos", dlm.: *HDW II*, 7, Hamburg 1983, hlm. 361 dst.; O. Wegel, *Indocina: Vietnam, Kamboja, Laos*, München 1987.

hul/fg

Laporan Brandt *Komisi Utara-Selatan yang diketuai oleh Willy Brandt, mantan kanselir Jerman Barat, Maret 1980 mengajukan laporannya, "Menjamin Kelangsungan Hidup"; tuntutan-tuntutan ditujukan baik ke negara industri maupun negara berkembang. Ia mengemukakan banyak usul untuk

jalan keluar situasi sosial internasional yang dianggap dramatis (miskin; lapar; stagnasi ekonomi dunia dengan inflasi; kekacauan moneter internasional; kenaikan utang; proteksionisme; ketegangan besar antarnegara dalam persaingan energi, pangan, dan bahan mentah; peledakan penduduk dunia dan makin banyaknya pengangguran di Utara dan Selatan; makin terancamnya lingkungan, perlombaan persenjataan yang mengancam; dsb.). Komisi menginginkan jalan keluar yang memadai dengan memperhatikan kepentingan semua pihak. Pemikiran khusus ditujukan pada pembiayaan pembangunan. Komisi mengusulkan cara pendanaan otomatis, yaitu pembiayaan pembangunan terlepas dari keinginan setiap penyanggah keputusan di masing-masing negara. Hal yang dipikirkan adalah pajak atas perdagangan, bisnis senjata, anggaran pertahanan, transportasi udara dan laut, serta minyak bumi yang diperdagangkan internasional. Pemajakan atas keuntungan perusahaan tingkat dunia baru yang mengeksploitasi kekayaan bumi di dasar laut. Kemungkinan pembiayaan alternatif dianggap dapat dilakukan dengan perluasan *Special Drawing Rights* dan pemanfaatan cadangan emas dalam IMF. Pemikiran-pemikiran ini membentuk bagian integral tuntutan meningkatkan transfer sumber daya ke negara berkembang. Dalam kaitan ini komisi memberanikan diri mengusulkan sebuah dana pembangunan dunia baru dengan anggota di seluruh dunia dan mitra yang sama haknya dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Dalam bidang ke-

lembagaan, komisi mengusulkan pertemuan puncak kepala negara dan pemerintahan dari negara berkembang dan industri dengan pengikut yang terbatas (di sini memang pantas ada kritik terhadap konferensi-konferensi raksasa birokrasi dan elite fungsioner internasional yang tanpa hasil), terutama harus menangani sebuah program langsung tahun 1980-1985. Untuk *emergency program* ini komisi mengajukan tuntutan: a. lebih banyak bantuan pembangunan dari negara industri: 0,7% dari PNB sampai tahun 1985, 1% sampai tahun 2000 untuk bantuan pembangunan pemerintah; b. kesepakatan dengan strategi energi internasional: penjaminan pengadaan secara teratur, penghematan energi besar-besaran, peningkatan harga minyak mentah secara bertahap dan terencana, pengembangan bersama sumber energi alternatif dan dapat diperbarui; c. pembangunan sebuah program pangan yang mencakup dunia: peningkatan produksi keseluruhan pembangunan pedesaan di negara berkembang; d. reformasi dalam sistem ekonomi internasional: penciptaan sebuah sistem moneter internasional dan sistem keuangan yang efisien dengan hak sama untuk semua mitra, reformasi perdagangan dunia ke arah perbaikan posisi negara berkembang. Laporan Brandt mendapat sambutan besar di dunia dan menjadi tema diskusi dan perdebatan parlemen. Meskipun banyak usulnya diterima oleh organisasi-organisasi internasional (Bank Dunia, IMF), dampak langsung laporan tersebut tidak seperti yang diharapkan komisi. Memang komisi dalam Konferensi Cancun

(Meksiko) menekankan kembali pentingnya perundingan global, tetapi tanpa hasil jika melihat pemecahan masalah di negara berkembang.

Kritik terhadap laporan Brandt menekankan bahwa ia terlalu menyorot bantuan pembangunan dari luar, artinya penanggulangan keterbelakangan terutama transfer sumber daya dari negara industri ke negara berkembang, dan mengabaikan kendala-kendala pembangunan di negara berkembang sendiri. Kurang diperhatikan pentingnya usaha negara berkembang itu sendiri dan reformasi yang sudah lama seharusnya dilakukan di beberapa negara berkembang.

Februari 1982 di Bonn, Jerman Barat, komisi Utara-Selatan mengajukan laporan keduanya dengan judul "Bantuan dalam Krisis Dunia", yang membahas masalah sistem keuangan dan pembiayaan internasional. Melihat situasi ekonomi dunia yang memburuk sejak keluarnya laporan pertama dan ancaman bahaya depresi di seluruh dunia dengan pengangguran massal di negara industri dan kehancuran ekonomi di beberapa negara Dunia Ketiga, komisi menuntut sebuah program langsung politik keuangan dan ekonomi. Titik beratnya adalah perbaikan pembiayaan pembangunan dengan peningkatan dana IMF yang tersedia. Usul konkretnya: a. pembagian baru *special-drawing-rights* dengan harus memperhatikan kebutuhan-kebutuhan khusus negara berkembang dalam pembagian; b. peningkatan kuota IMF paling sedikit 100%; c. perluasan dan pembesaran perjanjian kredit umum; d. penguatan kerja sama informal an-

tara Bank Dunia, IMF, kreditor resmi pemerintah, dan bank-bank swasta pada penjadwalan utang; e. penggantian bantuan pembangunan pemerintah ke negara berkembang termiskin (0,15% dari PNB negara pemberi). Titik berat selanjutnya adalah usul-usul konkret untuk perdagangan dunia.

Kepustakaan: W. Brandt, *Das Überleben sichern*, Köln 1980; O. Matzke, "Tabuisierung der Grundprobleme. Was bedeutet der Brandt-Report?", *dlm.: liberal* 7/8, 1981, hlm. 527 dst.; J.B. Donges, *Der Nord-Süd-Dialog in der Sackgasse? Eine Nachlese zum Brandt-Report*, Kieler Diskussionsbeiträge August 1981; W. Brandt (ed.), *Hilfe in der Weltkrise*, Reinbek 1983; Friedrich-Ebert-Stiftung (ed.), *Unfähig zum Überleben? Reaktionen auf den Brandt-Report*, Berlin 1983; W. Brandt, *Der organisierte Wahnsinn. Wettrüsten und Welthunger*, Köln 1985.

dn/ah

Laporan Brundtland Atas keputusan sidang umum PBB pertengahan tahun 1983 dibentuk *World Commission on Environment and Development* sebagai komisi khusus PBB yang diketuai seorang perempuan Norwegia bernama Gro Harlem Brundtland (tahun 1974–1970 menteri lingkungan; tahun 1981 dan sejak tahun 1986 perdana menteri). Komisi yang beranggota 23 orang dari 21 negara (13 negara berkembang dan 9 negara industri), mengajukan laporannya, "Our Common Future", April 1987. Laporan ini mempunyai bobot besarnya keikutsertaan wakil-wakil negara berkembang dan sifat aklamasi keputusan dalam komisi, yang melakukan rapat di seluruh dunia serta melakukan *hearing* dengan para pakar bersangkutan dan umum.

Laporan itu tidak ingin memasok model dunia dan ramalan yang dipoles berlebihan. Demikian pula sa-

ran-sarannya untuk bidang-bidang yang diteliti seperti penduduk, pangan, kemusnahan habitat, energi, industri, dan pemukiman, tidak lebih daripada posisi yang sudah dikenal. Namun, yang baru adalah usaha menangani lingkungan (ekologi) dan pembangunan dalam saling ketergantungannya dan sebagai kesatuan. Dalam tradisi Laporan Brandt dan Komisi Palme mengenai Keamanan Bersama (berkaitan dengan konflik Timur-Barat) dikembangkan tesis dasar bahwa hanya dengan bersatu, Utara dan Selatan dapat membuka masa depan yang terjamin karena ekosistem dunia ditandai oleh jaringan global yang kuat dan kerusakan lingkungan yang parah (misalnya kerusakan lapisan ozon atau hujan tropis) dengan akibat tidak terbatas hanya di Utara atau di Selatan saja, tetapi di keduanya.

Masa depan bersama untuk kemanusiaan, menurut Komisi, akan hanya dapat dalam rangka sebuah tahap baru pertumbuhan ekonomi, terutama di negara berkembang karena miskin memaksa perampokan landasan hidup alami dan menjadi penyebab utama kehancuran lingkungan. Kriteria pertumbuhan yang diinginkan (di Utara dan Selatan) perlu sesuai dengan ketahanan sosial dan ekologi. Jadi, di negara berkembang perlu cara yang sesuai ekologi untuk memungkinkan pemenuhan kebutuhan dasar dan pembangunan yang meluas. Untuk itu pertama-tama perlu mencari jalan keluar cepat dari krisis utang. Sekaligus negara industri harus mengubah gaya hidup dan struktur ekonomi, yang perluasannya di seluruh dunia tidak

tertahan oleh biosfer (misalnya konsumsi energi). Bagaimana kriteria ini dapat diterapkan dalam praktek politik, komisi melihat peluang mengarahkan seluruh dunia ke jalan sebuah *sustainable development*, sebuah pembangunan yang harmonis dan berkesinambungan yang memenuhi kebutuhan masa kini (di Utara dan di Selatan), tanpa memiliki risiko bahwa generasi mendatang tidak dapat melakukannya.

Laporan yang bertujuan membenarkan suatu perubahan kesadaran secara global, publikasinya mendapat sambutan pers. Laporan ini telah menjadi dokumen utama dalam pertikaian mengenai lingkungan dan pembangunan di tingkat PBB. Namun, sampai kini tidak terlihat kesediaan negara industri melakukan langkah-langkah penting yang dalam jangka panjang tidak merugikan kepentingannya, tetapi juga tidak merugikan negara berkembang.

Kepustakaan: V. Hauff (ed.), *Unsere gemeinsame Zukunft. Der Brundtland-Bericht der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung*, Greven 1987.

bh

Laporan Dag-Hammarskjöld Laporan dari Yayasan Dag Hammarskjöld Swedia serta konferensi tahun 1975 yang dilakukannya (150 peserta dari 48 negara) mengenai pembangunan dan kerja sama internasional.

dn

Laporan Jackson Hasil studi yang dilakukan seorang Australia, R. Jackson, atas pesanan UNDP mengenai kerja sama antarorganisasi PBB dengan lembaga-lembaga internasional, membuka sejumlah kekurangan. Laporan ini mendorong penciptaan sistem pembangunan yang terintegrasi,

ditopang oleh dua lembaga utama: UNDP untuk koordinasi bantuan teknik dan persiapan dalam studi-studi proyek serta Bank Dunia untuk bantuan modal. UNDP dapat berkembang dalam arti yang diusulkan. Kepustakaan: Jackson, *United Nations, A Study of the Capacity of the United Nations Development System*, 2 jilid, Genf 1969.

dn
Laporan Linowitz Laporan dan saran terhadap politik luar negeri AS untuk menghadapi Amerika Latin, terbentuk dalam dua bagian (Oktober 1974/Desember 1976) ke presiden AS, menekankan (berbeda dengan pendahulunya, Laporan Rockefeller): a. interdependensi AS dan Amerika Latin dalam konteks sistem internasional global; b. kepentingan membantu bentuk demokrasi kehidupan bersama di Amerika Latin, terutama mendesak penjaminan hak asasi manusia, mengembangkan hubungan yang normal dengan Kuba; c. memberi kemungkinan akses yang lebih baik untuk produk-produk Amerika Latin ke pasar AS dan kesepakatan kode perilaku antara AS dan Amerika Latin untuk modal asing; d. pembatasan persenjataan dan penghapusan bantuan militer AS.

dn
Laporan Pearson Penelitian Bank Dunia mengenai hasil-hasil bantuan pembangunan selama 20 tahun, kesalahan yang dilakukan dan perbaikan metode di masa depan. Penelitian ini dilakukan oleh sekelompok pakar dipimpin menteri luar negeri Kanada, Lester Pearson. Laporan yang diajukan tahun 1969 ini hanya menilai pengaruh negara yang menerima bantuan pembangunan dari Barat dan menjalankan strategi sesuai teori modernisasi. Hasil dan saran: a. im-

por dari negara berkembang perlu diliberalisasi; b. pada produk pertanian dan bahan mentah, negara industri perlu lebih memperhatikan situasi negara berkembang; c. bantuan untuk investasi langsung di negara berkembang; d. perbaikan iklim investasi di negara berkembang; e. syarat yang menguntungkan untuk bantuan pembangunan pemerintah ke negara berkembang (penurunan tingkat suku bunga, pemanjangan tempo pinjaman, penghapusan ikatan pemasokan); f. peningkatan bantuan pembangunan negara industri dari 1% bantuan pembangunan pemerintah menjadi 0,7% dari PNB (sampai tahun 1975); g. keringanan pembayaran untuk negara berkembang—beban utang; h. perlu adanya peningkatan pangsa bantuan pembangunan multilateral pada bantuan pembangunan pemerintah dari 10% menjadi 20% sampai tahun 1975; i. penentuan bantuan modal dan bantuan teknik yang lebih baik; j. usaha-usaha menghadapi pertumbuhan penduduk yang tinggi; k. perluasan bantuan pendidikan dan penelitian. Negara industri bertanggung jawab atas model pembangunan negara berkembang yang Barat-kapitalis—menyambut hangat laporan ini, sementara kebanyakan negara berkembang bersikap pesimis terhadapnya.

Kepustakaan: L. Pearson, *Partners in Development, Report of the Commission on International Development*, New York, Washington, London 1969.

dn
Laporan Pembangunan Dunia Dengan tujuan menganalisis masalah pembangunan dunia secara menyeluruh dan terus-menerus, Bank Dunia sejak tahun 1978 setiap tahun mem-

publikasikan Laporan Pembangunan Dunia. Setiap laporan membahas masing-masing titik berat tema dan mempunyai lampiran tabel dengan indikator sosial dan ekonomi. Untuk membuat *ranking* tingkat perkembangan negara berkembang, dilaporkan PNB per kapita (*pendapatan per kapita). Laporan Pembangunan Dunia dapat diperoleh di → Bank Dunia. ah

Laporan Rio → Kelompok Roma.
Laporan Rockefeller Laporan dan saran untuk politik luar negeri AS terhadap Amerika Latin, diserahkan 30 Oktober 1969 kepada Presiden Nixon, menekankan: a. hubungan khusus antara AS dan Amerika Latin; b. perlunya hubungan pragmatis tanpa mengabaikan situasi kekuasaan politik di negara-negara Amerika Latin dan politik isolasi terhadap Kuba; c. membantu perdagangan dan *pembagian kerja internasional, *investasi langsung dan investasi AS tanpa pembatasan ke negara-negara Amerika Latin; d. arti secara strategi militer Amerika Latin untuk AS dan perluasan bantuan militer. → Laporan Linowitz. dn

latifundia, latifundisme Istilah ini dipakai untuk pemilikan tanah besar yang berbeda dari *perkebunan dalam hal tingginya pemusatan tanah dan kecilnya produktivitas. Namun, pengertian latifundia berkaitan erat dengan perkebunan dan **hacienda* jika dampak pengawasan sosial dan politik atas tanah kurang diperhatikan. Tuan tanah (*patron*) menguasai daerah lingkungannya dan berpengaruh di tingkat nasional, ditopang oleh status dan pendapatan yang membuatnya dapat menguasai tanah. Latifun-

dia tidak hanya menandai struktur pemilikan tanah, terutama juga kekuasaan politik dan masyarakat yang melandasinya. Pengertian demikian menjelaskan mengapa, terutama di Amerika Latin, kurang berhasil dilakukan perubahan struktur pemilikan tanah yang menghambat pembangunan dalam reformasi pertanian. dn
LDC (Less Developed Countries) Istilah untuk *negara berkembang dalam statistik organisasi-organisasi *PBB. Menyimpang dari sini, *Bank Dunia memakai istilah *Developing Countries* (DC) untuk negara berkembang. Kategori khusus: *LLDC, *MSAC, *negara pedalaman, dan *NIB. ah
learning by doing effect → *external economies*.

Lebanon Sejak pertengahan tahun '70-an Lebanon menjadi pusat konstelasi konflik dan krisis di Timur Tengah, sedang berada dalam situasi hancur akibat perang saudara dan intervensi militer dari negara-negara tetangganya.

1. Republik Lebanon mencakup daerah seluas kira-kira 10.400 km², dengan perbatasan Laut Tengah di sebelah barat, Suriah di sebelah utara dan timur, serta Israel di selatan. Sekitar 360.000 ha merupakan lahan pertanian, terutama di bagian selatan dataran Bekaa di pedalaman (gandum dalam sistem ladang dengan pengairan) dan jalur sempit pantai (jeruk, kurma, pisang). Lebanon tidak memiliki bahan mentah yang penting, tetapi potensi pembangunan negara ditentukan oleh letaknya yang strategis untuk tempat bongkar-muat

dalam perdagangan antara Eropa dan dunia Arab.

2. Penduduk Lebanon pertengahan tahun '80-an diperkirakan berjumlah 2,7 juta-3,3 juta; lebih dari 50% hidup di ibu kota Beirut dan sekitarnya. Struktur penduduk ditandai oleh tingginya jumlah penduduk asing. Di Lebanon hidup sedikitnya 350.000-500.000 pengungsi Palestina, kelompok pendatang lainnya yang besar adalah orang Suriah dan Kurdi.

3. Sejak tahun 1516 merupakan bagian Kerajaan Osmania. Sejak dulu Lebanon diwarnai tata sosial dan politik yang terbentuk dari kelompok Druse (sekte esoteris yang muncul dari kelompok Islam Syiah) dan Maronite (komunitas agama Katolik) dengan landasan marga, patriarkat, dan saling mengawasi. Sampai abad ke-19 kaum Maronite lebih dapat meluaskan posisi melalui hubungan dagangnya yang erat dengan Katolik Eropa dibandingkan kaum Drusen (tuan tanah kaya). Sejak itu, muncul kekuatan asing sebagai pelindung berbagai komunitas agama, dan Lebanon di bawah pengaruh kuat Eropa. Pertikaian antara Druse dan Maronite yang berkaitan dengan Perancis memuncak tahun 1858 dalam perang saudara, sementara Inggris yang memikirkan keamanan Kerajaan Osmania mendukung kaum Druse.

Tahun 1861 terbentuk otonomi propinsi Mont Liban melalui perjanjian di antara penguasa-penguasa Eropa. Daerah yang dihuni hampir 75% kaum Kristen ini diperluas dalam rangka pembagian Kerajaan Osmania setelah Perang Dunia I (1920) dengan

memasukkan daerah yang sebagian besar dihuni oleh orang Islam, lalu diumumkan sebagai daerah mandat Perancis bernama Lebanon Raya. Setelah pendirian republik Lebanon (1926), munculnya partai-partai yang berciri kepercayaan di tahun '30-an dan kesepakatan Pakta Nasional antara presiden negara Maronite dengan perdana menteri Syiah, makin kuat tekanan terhadap penguasa mandat yang memerdekakan Lebanon. Desember 1946 tentara Perancis terakhir meninggalkan negara itu.

4. Prinsip struktur yang menguasai masyarakat Lebanon adalah konfesionalisme, berkaitan dengan tingginya keterikatan setiap orang ke komunitas asalnya (marga). Gerak migrasi dalam kaitannya dengan konflik-konflik agama sudah sejak ratusan tahun menimbulkan keragaman agama dan sosio-kultural di Lebanon yang sampai kini sangat mewarnai konstelasi konflik sosial, proses politik, dan semua bidang penting kehidupan. Dari 17 komunitas agama yang diakui negara, sebagian besar memiliki pengadilan dan lembaga pendidikan sendiri. Kelompok agama terpenting kini terbagi menurut perkiraan (tidak pasti) 30% Syiah, 20% Suni, 20% Maronite, 7% Druse, masing-masing 5% Kristen Yunani dan Kristen Armenia Ortodoks. Masalah komposisi kekuasaan yang pasti antara Kristen dan Islam diperdebatkan dengan sengit karena jawaban mereka bergantung pada pembagian kekuasaan politik di Lebanon.

Sistem negara Lebanon dibangun menurut prinsip keagamaan yang menjamin semua komunitas agama

yang diakui suatu jumlah untuk posisi dan jabatan pemerintahan yang sesuai dengan jumlah pangsa penduduk mereka. Penetapan masing-masing bagian sampai kini berlandaskan sensus terakhir yang dilakukan tahun 1932. Penentuan ini merupakan bagian Pakta Nasional tahun 1943 (yang diputuskan secara lisan) dan kelompok Kristen menjadi mayoritas dalam parlemen; hak atas posisi presiden oleh seorang Maronite (sejak tahun 1982 A. Gemayel), sementara kaum Sunni mendapat posisi perdana menteri dan Syiah presiden parlemen. Gagasan sistem politik yang pluralistik dan kompromistis ini (demokrasi *konkordans*) dalam realitasnya didominasi oleh beberapa keluarga penguasa (→ klientelisme). Partai-partai politik tidak dapat mengembangkan diri dan berperan secara mandiri. Mereka sangat terikat dengan kepercayaan dan dipimpin oleh keluarga yang sama yang juga berada di puncak pimpinan masing-masing kelompok agama.

5. Dalam rangka pembangunan sosial-ekonomi yang pesat sejak kemerdekaan (terutama di daerah Beirut berlangsung urbanisasi pesat; tahun 1959: 450.000 jiwa, tahun 1975: 1,2 juta jiwa), ketegangan antaragama pun meningkat yang diperluas oleh konflik regional (model sentra-periferi) dan sosial, tidak dapat diselesaikan dalam situasi politik yang ada. Di satu pihak bagi muslim yang berorientasi Arab pengaturan berdasarkan agama makin tidak dapat diterima karena terus mengokohkan mayoritas politik Kristen yang berorientasi Barat; di lain pihak sistem itu tidak memberikan kelompok penduduk

yang dirugikan dalam pembangunan (semua kelompok agama, tetapi lebih banyak kaum Druse dan Syiah), peluang memperjuangkan kepentingan mereka sehingga politik modernisasi pro Barat yang dilakukan Presiden Chamoun (1952–1958) mendapat perlawanan kaum muslim yang dijiwai nasserisme dan tahun 1958 menimbulkan perang saudara, berakhir dengan intervensi AS (tidak terjun ke pertempuran). Namun, konflik terus bergejolak di bawah selimut kaku keagamaan. Hal ini dipertajam dengan arus masuk pendatang pengungsi Palestina (Perang Enam Hari tahun 1967, pengusiran PLO dari Yordania tahun 1970). Kaum Kristen Lebanon khawatir kehilangan mayoritas kekuasaan dengan berlangsungnya integrasi orang Palestina. Pertikaian perang mereka dengan Israel menyebabkan daerah selatan Lebanon yang netral secara *de facto* sejak tahun 1949 menjadi panggung Konflik Timur-Tengah dan menyebabkan penduduk sipil Lebanon menjadi sasaran serangan balas dendam Israel. Sampai pertengahan tahun '70-an di Lebanon makin banyak dibentuk tentara sipil. Berkaitan dengan pertikaian mengenai politik negara terhadap orang Palestina dan perubahan aturan proporsi kekuasaan, Maret 1975 pecah perang saudara.

6. Konflik Lebanon bukan saja merupakan perang saudara, melainkan sekaligus menjadi fokus jalur-jalur ketegangan regional di Timur Tengah. Kekuatan-kekuatan pengaruh eksternal terpenting di satu pihak diwakili Suriah, paling lambat sejak tahun 1978/1979 (perdamaian Arab-

Israel) berambisi mendapatkan posisi pimpinan di dunia Arab, di lain pihak adanya kepentingan keamanan serangan Israel terhadap PLO dan negara-negara Arab. Dalam pertarungan mengenai pengawasan daerah pemukiman dan wilayah, muncul berbagai aliansi dan konstelasi tentara Kristen (tentara Lebanon dari partai *Kataeb* Presiden A. Gemayel yang Maronite, Tentara Lebanon Selatan Katolik-Ortodoks, beberapa bagian tentara reguler), "tentara rakyat" Druse, partai progresif sosialis W. Jumblats, milisi N. Berri yang dipimpin gerakan *Amal* yang Syiah, *Hizbollah* yang Syiah-fundamentalis, dan "tentara pembebasan rakyat" yang nasseristis. Kaum Suni tidak memiliki organisasi militer sendiri. PLO yang terpilah-pilah dalam berbagai friksi dan tentara berusaha menguatkan posisinya terhadap Israel dengan berganti-ganti aliansi di Lebanon, tetapi selalu terancam tekanan di antara front-front yang berhadapan.

Tahun 1975/1976 bertarung terutama di Beirut (Beirut Barat: campuran kepercayaan, Beirut Timur: daerah pemukiman Kristen) milisi Kristen melawan orang Palestina yang didukung Suriah. Kompromi antara Kristen dan Islam yang dirundingkan di Damaskus diketuai Suriah, tahun 1976 menyebabkan perpecahan antartentara reguler Lebanon; dan di pegunungan Lebanon terjadi konfrontasi milisi Druse dan bagian-bagian tentara Islam di satu pihak dengan milisi Kristen di lain pihak. Setelah terjadi perpindahan front spektakuler Suriah yang berkepentingan menghalangi posisi dominasi PLO di Lebanon, di paro

kedua tahun 1976 terjadi perjanjian gencatan senjata yang pengawasannya dilakukan oleh tentara perdamaian Arab (*de facto* tentara Suriah), yang menduduki posisi-posisi strategis di Lebanon. Hasilnya, konflik beralih ke bagian selatan Sungai Litani di negara itu, tempat orang-orang Palestina berpindah, dari sana melanjutkan pertempuran melawan Israel. Setelah terjadi serangan Israel Maret 1978 dan pengirisan tentara perdamaian PBB *UNIFIL yang ditempatkan di daerah perbatasan sampai kini (1989), konflik makin menajam antara tentara Lebanon Selatan (terdiri atas sebagian besar Kristen dan Syiah) dan Palestina memperebutkan pengendalian Lebanon Selatan. Dengan contoh peredaan ketegangan Israel-Mesir, politikus Kristen Lebanon berusaha melakukan pendekatan ke Israel sehingga tentara perdamaian Suriah yang makin dirasakan sebagai tentara pendudukan oleh rakyat Lebanon, kembali melakukan tekanan militer ke milisi Kristen. Tahun 1979/1980 tersulut suatu pertarungan antara orang Palestina dan *Amal* memperebutkan daerah pemukiman Syiah di Beirut Barat Daya, tempat penyingkiran orang Palestina setelah mereka terusir dari daerah pemukiman mereka yang terletak di sebelah timur kota itu. Dengan invasi Israel Juni 1982, setelah pengepungan Beirut, menyebabkan mundurnya PLO di bawah pengawasan kontingen tentara internasional. Puncak yang menyedihkan dari konflik Lebanon. Seizin tentara Israel, milisi Kristen melakukan pembunuhan kejam di kamp Palestina di Sabra dan Shatila, setelah Presiden B. Gemayel

yang baru terpilih terbunuh 14 September 1982. Usaha Israel, seiring dengan Presiden A. Gemayel (pengganti saudaranya yang terbunuh) mendamaikan Lebanon sesuai keinginannya (perjanjian Lebanon-Israel tahun 1983, penarikan tentara Suriah dan larangan segala kegiatan di Lebanon yang melawan Israel), memang mendapat dukungan AS, tetapi gagal dengan keberhasilan Suriah memobilisasi front perlawanan yang terdiri atas kelompok Druse dan *Amal* di Lebanon, untuk melawan ratifikasi perjanjian ini. Setelah terjadi banyak perang saudara dan penarikan tentara perdamaian PBB-AS dari Lebanon, Gemayel mengumumkan perjanjian Maret 1984. Selain itu, tekanan militer pertengahan tahun 1985 yang dipimpin Suriah dan kekuatan-kekuatan Islam Lebanon (komando bunuh diri), berhasil mengusir tentara Israel sampai ke tepi paling selatan negara itu. Ketika pada tahun yang sama milisi Palestina kembali ke Lebanon, mula-mula di Saida di sebelah selatan Lebanon, tidak lama kemudian di Beirut Barat, terjadi konstelasi konflik baru Palestina-Kristen dan Syiah-Palestina. Konflik terakhir ini menyebabkan berlangsungnya pengepungan kamp-kamp Palestina di Saida dan Beirut oleh kelompok *Amal* selama tahun 1987.

Akhir tahun 1985 pimpinan milisi-milisi terpenting berusaha mengakhiri perang saudara melalui jalan keluar politik dengan bantuan Suriah. Usaha ini gagal karena banyak anggota parlemen (Islam dan Kristen) dan juga Presiden Gemayel menolak untuk memberikan persetujuan. De-

ngan demikian, jalan keluar Suriah terhindar (tahun 1987 rencana jalan keluar Suriah kedua menemui kegagalan), tetapi bukan kelanjutan pertikaian di Lebanon dalam konstelasi konflik lama (Syiah melawan Palestina) dan baru (Kristen lawan Kristen, Druse lawan Syiah, *Amal* yang Syiah lawan *Hizbollah* yang Syiah). Dengan kembalinya pasukan Suriah ke Beirut tahun 1986, 1987, dan 1988, jelas bahwa Suriah dalam perang yang menghancurkan tersebut merupakan kekuatan asing terkuat, yang tanpa keikutsertaannya tidak dimungkinkan suatu akhir konflik di Timur Tengah. Perkembangan ini sama sekali tidak memberikan harapan perdamaian di Lebanon karena diiringi munculnya kekuatan-kekuatan Islam fundamentalis yang tidak ingin menghidupkan kembali penyelesaian konflik yang berorientasi kompromi di negara yang secara kultural dan agama sangat heterogen.

7. Masih di akhir tahun '70-an Lebanon diukur dari banyak indikator pembangunan mendapat posisi tertinggi di Timur Tengah. Tahun 1979 satu dokter untuk sekitar 580 penduduk (sebagai perbandingan, Jerman Barat: 450; Suriah: 2.360), penyebab pokok adalah tingginya tingkat swastanisasi sistem kesehatan sehingga bidang ini sangat bergantung pada solidaritas marga. Sama juga keadaannya dengan sistem pendidikan, sektor swasta kaum Kristen dan penduduk kota yang berorientasi Barat lebih maju dalam pendidikan dibandingkan dengan sekolah-sekolah negeri untuk penduduk pedesaan. Tahun 1973 kuota penyekolahan di

sekolah dasar adalah 98% (perkiraan), kurang dari 20% adalah buta aksara.

Ekonomi Lebanon relatif stabil sampai tahun 1982, dan negara itu mencapai neraca pembayaran positif karena pengiriman devisa oleh buruh tamu Lebanon yang bekerja di negara-negara Teluk. Struktur ekonomi sampai pecahnya perang saudara dan sampai awal tahun '80-an ditandai oleh lalu lintas asing (sampai tahun 1975) yang berkembang; arti Beirut sebagai pusat perdagangan dan keuangan di Timur Tengah sehingga sektor jasa yang utama menyumbang lebih dari 60% ke PDB. Sektor industri yang ditandai oleh kuatnya konsentrasi pemilikan dan beberapa perusahaan di daerah Beirut, antara tahun 1965-1975 tumbuh relatif besar dengan rata-rata tahunan 6% dan saat meletus perang merupakan yang termodern di kawasan tersebut. Tahun 1980 pangsa produksi industri pada PDB adalah sekitar 10% (tanpa sektor pengadaan, bangunan, dan pertambahan). Sebaliknya, pertanian makin tidak berarti. Sudah sejak awal tahun '70-an pertanian menyerap kurang dari 20% angkatan kerja (tahun 1960: sekitar 50%), awal tahun 1980 pangsa di PDB sekitar 7%; sepertiga pangan yang diperlukan produksi di dalam negeri.

Akhir tahun '80-an hampir tidak ada basis ekonomi dan sosial Lebanon yang tersisa. Setelah invasi Israel (1982), perdagangan dan ekonomi runtuh sama sekali. Tahun 1986 industri (banyak perusahaan yang memindahkan kegiatannya ke luar negeri, misalnya ke Yordania) hanya memproduksi dengan seperempat kapas-

itas karena hancur, kehilangan tenaga kerja, dan pelarian investasi. 85% barang kebutuhan sehari-hari harus diimpor; tahun 1987 cadangan devisa Lebanon juga digerosoti. Perang sampai tahun 1988 telah menelan korban jiwa 130.000 manusia, kenyataan bahwa akhir tahun '80-an seluruh generasi orang Lebanon hidup dengan pengalaman terus-menerus dalam situasi permusuhan kekerasan antarkelompok penduduk sehingga dapat diramalkan betapa sulit memobilisasi penduduk untuk usaha bersama membangun kembali setelah dicapai perdamaian di negara itu.

Kepustakaan: E. Gellner/J. Waterbury (ed.), *Patrons and Clients in Mediterranean Societies*, London 1977; W. Köhler, "Libanon", dlm.: *HDW II*, 6, Hamburg 1983, hlm. 399 dst.; Th. Hanf, "Libanon-Konflikt", dlm.: U. Steinbach/R. Robert (ed.), *Der Nahe und Mittlere Osten*, vol. 1 Opladen 1988, hlm. 663; M. Kuderna, "Libanon", dlm.: U. Steinbach/R. Robert (ed.), *Der Nahe und Mittlere Osten*, vol. 2, Opladen 1988, hlm. 235 dst.; T. Koszminsky/H.P. Maties (ed.), *Nahost Jahrbuch* 1987, Opladen 1988.

bt/ah
**Lembaga Swadaya Masyarakat/
Lembaga Pengembangan Swadaya
Masyarakat → LSM/LPSM.**

Lesotho 1. Kerajaan Lesotho seluas 30.355 km², merupakan negara terkecil di Afrika. Di daerah pegunungan dengan ketinggian di atas 2.000 m hidup sekitar 2 juta (1989) orang Sotho (juga disebut Basotho atau Basuto) dari kelompok suku Bantu Selatan, merupakan penduduk etnis yang homogen. Pertumbuhan tahunan (tahun 1980-1989: 2,7%) relatif kecil; sebaliknya kepadatan penduduk rata-rata 52,7 penduduk/km² sangat tinggi. Di daerah lembah sebelah barat yang merupakan satu-satunya daerah yang

dapat dimanfaatkan untuk pertanian, dapat mencapai 150 penduduk/km². Tingkat urbanisasi tetap sedikit karena masih sedikitnya lapangan kerja. Pusat-pusat misi Kanada-Perancis mengkristenkan hampir 70% orang Basotho (40% di antaranya Katolik-Roma) dan memberantas buta aksara separo penduduk melalui sistem pendidikan yang mereka kuasai. Situasi geografinya yang khusus sebagai negara pedalaman yang di semua sisinya dikelilingi oleh Republik Afrika Selatan, berpengaruh sangat besar atas struktur politik dan sosial-ekonomi negara itu.

2. Di awal abad ke-12 kepala suku Moshoeshoe I berhasil menyatukan *clan* Sotho yang tadinya sendiri menjadi bangsa Basuto. Dengan mendudukkan anggota-anggota *clan* dalam posisi-posisi penting (*place-system*), Moshoeshoe menciptakan oligarki kepala suku *Sons of Moeshoeshoe* yang sampai kini menjadi kelompok elite di Lesotho. Inggris menganeksi Lesotho tahun 1868, dan tahun 1884 resmi menjadi koloni Inggris. Pembangunan organ-organ perwakilan akhir tahun '50-an memimpin ke arah dekolonisasi (merdeka 4 Oktober 1966) melalui pembentukan partai-partai politik. Pada pemilihan umum pertama (1965) *Basutoland National Party* (BNP) menang di bawah kepala suku Leabua Jonathan yang konservatif dan ramah terhadap Afrika Selatan, selain itu juga mendapat dukungan negara-negara Barat dan misi Kristen. Mula-mula Leabua Jonathan berusaha menentang hak kekuasaan tradisional Raja Moeshoeshoe II, lalu berusaha membasmi

oposisi sosialis dan anti-Afrika Selatan *Basutoland Congress Party* (BCP). 20 Januari 1986 Perdana Menteri Leabua Jonathan digulingkan. Raja Moeshoeshoe II tetap menjadi kepala negara, tetapi penguasa sesungguhnya sejak itu adalah Justinus Metsing Lekhanya (kepala pemerintahan dan ketua dewan militer).

3. Dengan PDB 340 US\$ per kapita (1989) Lesotho termasuk LLDCs dan MSACs. Selain sedikit tambang intan, Lesotho hampir tidak memiliki bahan mentah. Pertanian yang hanya mungkin di 12% tanahnya, termasuk paling terbelakang di dunia (satuan usaha yang sangat kecil, sangat sedikit mekanisasi). Pangsa pada PDB turun dari 65% (1965) menjadi 24% (1989). 80% penduduk bergantung pada pertanian, 25% di antaranya tidak memiliki tanah. Namun, pemanfaatan turisme dari daerah pegunungan menawarkan peluang pembangunan (tahun 1986: sekitar 4% PDB). Iklim yang buruk, erosi, perluasan rumput dan semak, metode bercocok tanam yang terbelakang, dan faktor-faktor kendala lainnya, menyebabkan Lesotho hanya mencapai 39% kuota pengadaan sendiri (1983/ 1984). Lesotho hanya dapat memberikan kerja dan pendapatan pada sebagian penduduk. Oleh karena itu, 50% angkatan kerja laki-laki dan 10% angkatan kerja perempuan terpaksa harus mencari kerja di Afrika Selatan untuk dapat memberi makan keluarganya (yang harus ditinggalkan di Lesotho). Meskipun ada bantuan pembangunan (tahun 1980-1989: 1.016 juta US\$) secara intensif untuk melepaskan ketergantungan

dari Afrika Selatan, tetap saja separo PNB diperoleh dari sekitar 115.000 orang Basotho yang bekerja di pertambangan Afrika Selatan. Hampir semua kebutuhan penduduk perkotaan dipasok melalui impor dari Afrika Selatan. Ketergantungan eksistensi ini menyebabkan Lesotho menjadi bagian dari sistem *Bantustan* yang dilakukannya Afrika Selatan, meskipun ia mempunyai kedaulatan nasional. Sejak tahun 1910 Lesotho terikat ke Afrika Selatan, Namibia, Botswana, dan Swaziland, dalam sebuah uni bea dan uni mata uang (alat pembayaran adalah *Rand* Afrika Selatan). Selain itu, Afrika Selatan adalah mitra dagang terpenting.

4. Setelah merdeka, Jonathan membangun kekuasaannya melalui UU darurat dan pembasmian kekuatan-kekuatan oposisi. Ketika pada pemilihan di tahun '70-an terlihat BCP akan menang, ia membatalkan pemilihan, menanggukuhkan UUD, menangkap pimpinan BCP, dan membasmi secara kejam pemberontakan di pegunungan yang timbul karena tindakan-tindakannya itu. BCP terbagi menjadi kelompok pengasingan di luar negeri dan kelompok dalam negeri yang dilarang tahun 1974 (dengan tuduhan merencanakan kudeta). Tahun 1985 berlangsung lagi pemilihan parlemen (diboikot oposisi), DNP memenangkan seluruh 60 kursi. Akhir tahun '70-an beberapa bagian BCP menjadi radikal. Sejak tahun '80-an berlangsung aksi-aksi gerilya bersenjata LLA (*Lesotho Liberation Army*, sayap militer BCP), dan pihak pemerintah melakukan aksi teror terbuka, a.l. *Police Mobile Unit* (PMU) yang didukung

oleh "bantuan polisi" Jerman dan komando pembunuhan yang mereka lakukan sehingga negara itu menghadapi situasi seperti perang saudara.

Jatuhnya Jonathan tahun 1986 diawali dengan blokade Afrika Selatan (Lesotho, tidak seperti Mozambik, tidak mau dipaksa menandatangani sejenis Perjanjian Nkomati). Namun, para pelaku kudeta mengatakan bahwa mereka bertindak sendiri. Raja Moeshoeshoe yang mendapatkan kembali hak-haknya dijadikan penasihat, tetapi sebenarnya ada di bawah kekuasaan dewan militer. Dewan militer ini dipimpin Mayor Jenderal Justin Lekhanya yang melarang partai-partai politik. April 1988 kembali diberlakukan situasi darurat karena kriminalitas yang makin meningkat. Mulai terlihat adanya konflik-konflik dalam koalisi militer yang berkuasa, kaum monarki, dan elite pendidikan. Musuh mereka bersama, Leboua Jonathan, meninggal tahun 1987 di Pretoria karena sakit.

Sampai tahun 1971 pemerintah Jonathan melakukan sebuah politik luar negeri dan politik Afrika Selatan yang jauh melampaui ukuran kerja sama yang sangat perlu. Langkah sewenang-wenang Afrika Selatan membuat Lesotho menjalin hubungan diplomatik ke hampir seluruh negara blok Timur, minta bantuan nonblok dan OAU, masuk ke kerja sama regional SADCC, makin mengkritik apartheid, dan mendukung secara verbal terhadap ANC dan PAC serta mengizinkan anggota-anggota kedua organisasi itu tinggal di Lesotho, merupakan pencerminan politik baru. Batasnya terlihat Januari 1983 ketika

tentara elite Afrika Selatan berkekuatan 100 orang menyerbu Lesotho, dengan helikopter maju sampai ibu kota Maseru dan dalam sebuah aksi berdarah menghancurkan tempat tinggal ANC (dan sasaran-sasaran lain). Pemerintah yang baru lebih ramah terhadap Afrika Selatan dibandingkan rezim Jonathan, dan setelah kudeta mengusir ratusan anggota ANC. Meskipun secara resmi mereka menyetujui sanksi terhadap Afrika Selatan, sikap mereka ambivalen. Produk-produk Afrika Selatan dikecualikan dari sanksi AS jika diangkut melalui Lesotho. Oleh karena itu, Lesotho berusaha menarik eksportir dan investor Afrika Selatan agar mereka secara legal dapat memasok pasar-pasar Afrika Selatan yang terblokir. Meskipun menjadi anggota SADCC, ketergantungan pada Afrika Selatan tidaklah berkurang. Sebaliknya, sebuah proyek besar yang ditandatangani Oktober 1986 dan dibiayai oleh Bank Dunia dan lembaga-lembaga keuangan Barat, akan memberikan pengaliran air ke daerah pemukiman di sekitar Johannesburg (Afrika Selatan) untuk jangka panjang dari bendungan di dataran tinggi Lesotho yang kaya akan air. Proyek bendungan yang sampai kini terbesar di dunia akan semakin mempererat hubungan ekonomi dua negara yang sangat tidak seimbang itu.

Kepustakaan: Z. Cervenka dkk., *Botswana, Lesotho, Swaziland*, Bonn 1974; J. Jeske, *Botswana, Lesotho, Swaziland, Agrarische Struktur und wirtschaftliche Verflechtung im südlichen Afrika*, München 1977; R. Weisfelder, "Lesotho - die Entwicklung eines aussenabhängigen Landes", dlm.: *Afrika. Spektrum* 3, 1981, hlm. 333-344; S.M.

Willet/D.P. Ambrose, *Lesotho: A Comprehensive Bibliography*, Oxford 1981; E. Adam/F. Nuscheler, "Lesotho", dlm.: *HDW II*, 5, Hamburg 1982, hlm. 332 dst.; J.E. Bardill/J.H. Cobbe, *Lesotho. Dilemmas of Dependence in Southern Africa*, Boulder/Col. 1985; J. Hanlon, "Lesotho. Bellowing from the Mountain-Top", dlm.: J. Hanlon, *Beggar your Neighbours*, Indiana/London 1986, hlm. 107-129; J.H. Cobbe, "Economic Aspects of Lesotho's Relations with South Africa", dlm.: *Journal of Modern African Studies* 26, hlm. 71-89. **bg**

Liberia 1. Negara pantai yang terletak di bagian tropis Afrika Barat (112.370 km²; 2,3 juta penduduk; tahun 1986: pertumbuhan penduduk 3,5%/tahun), memiliki tambang bijih besi bernilai tinggi dan berbagai mineral lainnya, serta persyaratan yang menguntungkan pembangunan di sektor primer (iklim yang cocok, tanah yang subur, perairan yang kaya akan ikan, kayu tropis).

2. Dalam kelangsungan pembebasan budak di akhir abad ke-18 dan di abad ke-19, gerakan-gerakan filantropis berusaha memukimkan kembali bekas-bekas budak di Afrika. Sekitar tahun 1820 dengan bantuan negara, perusahaan-perusahaan kolonial AS mendirikan daerah-daerah pemukiman di pantai Liberia sekarang. Tahun 1839 sebagian pemukiman kolonial itu bergabung dalam *Commonwealth of Liberia* dan memproklamkan kemerdekaannya 16 Juli 1847.

3. Struktur sosial ditandai oleh pertentangan tajam antara sekelompok kecil lapisan atas "Americo-Liberian" (keturunan pendatang, hanya meliputi 3% penduduk) dan mayoritas massa etnis pribumi yang dirugikan (sekitar 30 suku dari kelompok Kwa, Mande, Kru, dan West-atlantic). Kelompok Americo-Liberi-

an yang berkuasa dan mendiskriminasi penduduk asli dengan cara-cara mirip kolonial, mentranspor struktur hukum dan UUD AS ke Liberia. Struktur tradisi dan norma, serta bahasa, agama, dan gaya hidup daerah selatan AS, masih terlihat sampai sekarang.

Sampai pengambilalihan kekuasaan oleh militer (1980), sekelompok kecil dinasti keluarga menguasai seluruh posisi kunci dalam negara, masyarakat, dan ekonomi, serta mendapatkan keuntungan dari distribusi pendapatan paling tidak adil di seluruh Afrika: 5% kelompok lapisan atas menguasai 61,7% pendapatan, 20% kelompok bawah harus memuaskan diri dengan 5,3% pendapatan. Revolusi (militer pribumi) juga tidak melakukan perubahan. Pertentangan sosial dan korupsi makin meningkat.

4. Dalam perekonomian nasional Liberia, 70% penduduk yang hidup di pedesaan bergantung pada pertanian (hanya produksi subsistensi; hampir tidak ada kelebihan untuk pasar lokal): pertanian membentuk landasan hidup untuk 90% penduduk. Namun, politik pembangunan pemerintah sama sekali tidak menyentuh mereka. Mereka lebih tertarik akan modal dalam dan luar negeri dan mengacuhkan kebutuhan-kebutuhan pertanian. Pelarian dari pedesaan, masalah-masalah sosial di perkotaan (di Monrovia 60%-70% menganggur), meningkatnya impor bahan pangan (40% kebutuhan beras dan ubi kayu) serta menguatnya kesenjangan pembangunan regional antara daerah pantai dan *hinterland* (daerah belakang),

merupakan akibat-akibatnya. Hanya perkebunan-perkebunan karet berorientasi ekspor dan komersial yang berada dalam tingkat produksi tinggi, yang terutama menguasai pasar dan berada dalam pemilikan asing, mempunyai konsesi penanaman (terutama *Firestone*). Sampai sekarang tanaman karet memiliki nilai ekonomi yang tinggi (komoditas ekspor kedua terpenting, tahun 1984: 21% ekspor/ efek kesempatan kerja: 11,5% angkatan kerja), sementara sejak tahun '60-an penambangan bijih besi merupakan sektor ekonomi paling menonjol (kontribusi ke PDB tahun 1984: 12,9%, pangsa dalam ekspor 79%). Sektor ini juga dikendalikan oleh beberapa perusahaan transnasional. Akibatnya, pendapatan yang tercipta di Liberia mengalir dalam jumlah sangat tinggi ke luar negeri; negara itu kehilangan 1/4 penerimaan dalam negerinya. *Open-door policy* (keterbukaan ekonomi oleh kegiatan ekonomi asing, penjaminan situasi persyaratan yang sangat menguntungkan, mengakui perusahaan bebas) yang dilakukan pemerintah Tubman dan Tolbert terdahulu, tetap merupakan garis pokok ideologi ekonomi Liberia setelah revolusi. Tidak diragukan bahwa politik elite Americo-Liberian dan lapisan menengah pribumi yang kemudian tumbuh, memberikan kemakmuran untuk mereka. Namun, mayoritas penduduk Liberia tidak ikut menikmati proses pembangunan ini.

Pekanya (karena sangat bergantung dari luar) ekonomi Liberia menyebabkannya terjerumus dalam krisis di awal tahun '80-an. Resesi dunia

menyebabkan turunnya permintaan dan harga secara drastis terhadap komoditas ekspor andalan Liberia, yaitu karet dan bijih besi. Krisis utang serta pelarian modal ke luar negeri dan tidak adanya investasi swasta setelah kudeta, makin menyulitkan situasi ini. Program penyehatan IMF dan bantuan ekonomi yang sangat besar dari AS (tahun 1982: 75 juta US\$) diharapkan dapat mengerakkan kembali ekonomi. PDB yang dihasilkannya (tahun 1986: 990 US\$ per kapita) turun (tahun 1980-1984 turun 2,8%/tahun), sementara utang luar negeri naik melebihi 1,1 miliar US\$ (1986). Karena kesulitan-kesulitan pembayaran, tahun 1986 IMF untuk sementara memberikan bantuan keuangan selanjutnya.

5. Sejak abad lalu sistem politik Liberia ditandai oleh kekuasaan satu-satunya partai, *True Whig Party* (sejak tahun 1884 semua presiden dari partai ini). Secara *de facto* sistem satu partai mereka sebagai wakil kepentingan oligarki Americo-Liberian berhasil menjamin kekuasaan politik ekonomi secara tidak terbatas melalui sistem patron, ekonomi anak emas, dan korupsi. Oposisi yang muncul dibasmi sejak embrio, baik melalui tindakan legal maupun tindakan kekerasan. Politik Liberia yang stabil di pertengahan atau akhir tahun '70-an goyah. Sejak tahun 1974 muncul aksi-aksi protes dari gerakan serikat buruh Liberia yang berpengaruh secara politis, terjadi kerusuhan beras April 1979, lalu berpuncak pada kerusuhan Paskah (1980). Di sini terlihat kemunculan *Progressive Alliance of Liberia* (PAL) dan *Movement for Justice in Africa*

(MOJA) sebagai kelompok oposisi dengan programatika sosialis yang kabur.

18 April 1980 sekelompok tentara Liberia berpangkat rendah (semua anggota mayoritas penduduk pribumi Afrika) dipimpin Sersan Mayor S.K. Doe yang saat itu berumur 28 tahun, melalui kudeta berdarah berhasil merampas kekuasaan, melikuidasi banyak anggota pemerintahan dan elite terdahulu serta membawahi negara itu dengan sebuah Dewan Penyelamat Rakyat yang beranggotakan 18 orang (*People's Redemption Council*/PRC), yang memerintah sejak itu dan menjadikan Doe kepala negara dan kepala pemerintah. Keinginan reformasi yang mulanya ada, tidak bertahan lama. Di bawah tekanan masalah ekonomi dan di bawah pengaruh kuat AS, klik perwira yang tidak jelas secara politis tersebut, tidak terdidik dan hampir tidak mempunyai pengalaman sama sekali, membuang jauh-jauh keinginan akan perubahan substansial dalam politik ekonomi dan masyarakat. Setelah berlasung ekso-dus modal asing dan pakar, diterima program penyehatan IMF yang menstabilkan sistem. Bantuan militer (pembangunan pemukiman-pemukiman tentara, pemasokan senjata, pengiriman tentara elite dan pendidik; latihan bersenjata bersama AS setiap tahun) dan peningkatan secara deras bantuan ekonomi (tahun 1980-1988: 500 juta US\$), pemerintah Reagan menyogok lingkaran pro Amerika dalam militer dan PRC, yang cepat menghadapi wakil-wakil *self-reliance* dan nonblok.

Juli 1984 melalui pemungutan suara disahkan UUD baru. 15 Oktober 1985 berlangsung pemilihan yang menguatkan Doe sebagai presiden. Partai terkuat dalam senat adalah *National Democratic Party of Liberia*/NDPL (21 kursi), *Liberal Action Party*/LAP (3 kursi), *Liberian Unification Party*/LUP (1 kursi), dan *Unity Party*/UP (1 kursi). Sebuah usaha kudeta November 1985 dibasmi secara brutal, partai-partai oposisi disiksa oleh militer, LUP dilarang. Meskipun ada pemilihan, rezim makin represif, makin korup, dan makin tunduk ke AS daripada dulu. 16 Maret 1988 posisi puncak dalam kementerian keuangan diduduki oleh penasihat AS, merupakan langkah menghadapi korupsi dan tidak adanya lapangan kerja. Tahun 1988 harian *Suntimes* dan *Footprints* dilarang. Tahun 1988 berlangsung sebuah proses melawan terdakwa akibat kerusakan mahasiswa dan usaha kudeta ke-8 sejak kekuasaan Doe. Untuk itu militer dan dinas rahasia beraksi. Sejak 24 Desember 1989 pecah perang saudara dengan munculnya pemberontakan yang dipimpin oleh Charles Taylor, seorang keturunan campuran Liberia-Amerika, melalui Pantai Gading. Maret 1990 kelompok pemberontak terbagi dua dengan keluarnya Prince Johnson yang mengadakan perlawanan sendiri. 10 September 1990 Doe tertangkap oleh kelompok Prince Johnson, kemudian dibunuh. Dengan kematian Doe, 3 orang menjadikan diri sebagai Presiden Liberia, yaitu Prince Johnson, Charles Taylor, dan Amos Sawyer (seorang pengacara dan profesor, mendapat dukungan 15

negara ECOWAS). Bekas para pengawal Doe menunjuk Brigien David Nimley sebagai pimpinan sampai pemerintahan sementara di bawah Amos Sawyer yang ditunjuk ECOWAS memasuki Liberia. Pemerintahan sementara tersebut merencanakan pemilu di bulan Oktober 1991.

Kepustakaan: R. Kappel, *Liberia, Wirtschaftliche und politische Entwicklung 1971-1980*, Hamburg 1980; ibid, *Ökonomie, Klassen und Staat in Liberia*, Bremen 1982; R. Kappel, "Liberia", dlm.: *HDW II*, 4, Hamburg 1982, hlm. 227 dst.; A. Cassel, *Liberia: History of the First African Republic* (2 jilid), New York 1987; J.G. Liebenow, *Liberia: The Quest for Democracy*, Bloomington (In.), 1987; *Kompas*, 13 September 1990; *BMZ-Spiegel der Presse*, 19/90, hlm. 594.

bg/dls

Libia Minyak bumi dan revolusi telah mengubah pesat negara di Afrika Utara yang dulu paling terbelakang.

1. Libia (luas: 1.759.540 km²) merupakan peralihan dari Afrika Utara yang semitis-barbaris ke Afrika Hitam yang negroida. Letak geografis ini mencerminkan pemilahan historis Libia menjadi 3 daerah: propinsi Tripolitania berorientasi Magribi, propinsi Cyrenaika dengan pusat Sebha dipengaruhi Mesir, dan sebagian besar penduduk negroida. Areal tanah 95% terdiri atas padang pasir, di antaranya 125.000 ha diairi. Hanya di daerah antara 30 dan 50 km jalur melintang Cyrenaika dimungkinkan pertanian kering (tanaman zaitun, pohon amandel, citrus, dan gandum); di Fezzan ada pertanian basah (kurma, sitrun, melon, tomat, buncis). Secara keseluruhan karena kecilnya produktivitas, kekurangan air dan ukuran usaha yang tidak besar, tingkat upah yang rendah dan pelarian dari pedesaan menyebabkan pertanian hanya

dapat memenuhi sekitar 40% kebutuhan pangan dasar sehingga Libia bergantung pada impor. Peternakan yang dilakukan kaum nomad mempunyai peluang penjualan yang baik di kota-kota yang hampir semua terletak di daerah pantai. Kegiatan ekonomi didominasi oleh sektor minyak bumi: setelah penemuan minyak bumi pertama di palung Sirte tahun 1959, dalam masa 10 tahun Libia naik menjadi produsen minyak bumi nomer empat di dunia. Cadangan minyak bumi sekarang berjumlah sekitar 3,2 miliar ton, cadangan gas bumi sekitar 800 miliar kubik. Jumlah produksi per tahun dikurangi jumlah maksimal 160 juta ton (1970) menjadi 72 juta ton (1973), sejak itu selalu di bawah 100 juta ton. Hasil devisa yang diperoleh (tahun 1987: 6 miliar US\$) sejak tahun 1981 (21 miliar US\$) tidak cukup lagi untuk menjamin dana keuangan pembangunan industri Libia. Selain minyak bumi yang merupakan komoditas ekspor terpenting (hampir 99% nilai ekspor), Libia tidak banyak memiliki produk pertambangan. Temuan yang kini menarik adalah uran, ditemukan di sebelah selatan Libia dan di daerah Cad Utara yang dituntut Libia.

3. Situasi politik dan sosio-ekonomi Libia sejak kemerdekaan (1951) ditentukan oleh dua peristiwa: awal penambangan minyak bumi tahun 1959 dan pengambilalihan kekuasaan oleh militer sejak September 1969. Sementara Libia sebelum merdeka-tanpa industri dan pertanian yang sangat bergantung pada iklim (sebelum Perang Dunia II tanah-tanah terbaik dimanfaatkan oleh kolonial pertanian

Italia)—termasuk negara termiskin di dunia, sampai ditemukannya minyak tahun 1951 hanya dapat bertahan sebagai negara atas bantuan keuangan internasional dan pembayaran subsidi AS dan Inggris (imbalan penggunaan daerah Libia sebagai pangkalan militer). Situasi ini berubah sama sekali setelah tahun 1959. Kelebihan modal yang tiba-tiba dari sektor ekonomi yang hanya mempekerjakan 1% dari angkatan kerja, makin banyak menyumbangkan kontribusi ke PNB (tahun 1980: 60% sampai tahun 1987 turun menjadi: 27%) mengenai masyarakat tradisional yang tidak mempunyai kemampuan mengendalikan kekayaan baru tersebut. Dana memang dipakai untuk pembangunan jalan (misalnya jalan raya ke Sabha yang terletak 800 km sebelah selatan), pembangunan sekolah, rumah sakit, dan pemukiman baru, tetapi kebanyakan dana dihaburkan tanpa kerangka pembangunan yang bijaksana. Lalu, muncul penambahan beban sebagai konsekuensi sosial kekayaan baru yang dibagi tidak merata: pelarian dari pedesaan, kemunduran produksi pertanian, munculnya perkampungan-perkampungan kumuh di sekitar kota-kota pantai seperti Tripolis, Benghazi, dan Derna, merupakan ketegangan sosial yang besar. Sistem kekuasaan Raja Sanusi Idris, yang penopangnya adalah elite suku tradisional, terbukti tidak mampu mengatasi masalah sosio-ekonomi. Setelah terjadi revolusi September (1969) pemerintah baru berusaha mencapai keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan mengatasi ketegangan sosial. Pengeluaran pembangunan

mendapatkan sebuah struktur baru, penggunaannya dipusatkan pada pembangunan sebuah industri sendiri (penting untuk masa pasca era minyak), peningkatan produksi pertanian (a.l. dengan perluasan lahan pertanian, di mulai tahun 1990 proyek besar sungai buatan di Cyrenaika akan membawa kemajuan-kemajuan lanjut) dan kegiatan besar di bidang perumahan dalam kaitannya dengan usaha-usaha besar di bidang pendidikan. Tindakan-tindakan seperti nasionalisasi perusahaan asing yang beroperasi di Libia, nasionalisasi sektor perbankan dan asuransi, penjalanan perusahaan minyak dalam *joint venture* dengan paling sedikit 51% pangsa Libia (ada yang 100%), diharapkan akan mengembalikan hak-hak lama rakyat Libia dan mengurangi ketergantungan dari luar negeri; sementara garansi upah minimum, pelayanan kesehatan gratis, hak atas kerja dan sebuah sistem perpajakan yang progresif, bertujuan mengatasi ketegangan sosial. Setelah tahun 1973 (rencana pembangunan tiga tahun pertama tahun 1973-1975) kegiatan negara di semua bidang ekonomi diperluas, dan dijalankan hak turut menentukan yang meluas oleh para buruh di perusahaan-perusahaan, serta sebuah sistem jaminan sosial yang patut dicontoh. Masalah terbesar Libia seperti sebelumnya adalah kekurangan tenaga kerja berkualitas sehingga harus diimpor tenaga kerja dan pakar dari Mesir, Palestina, Eropa Barat dan Timur, India, dan makin banyak Asia Timur. 35% pekerja tahun 1980 adalah orang asing. Dalam kelangsungan krisis keuangan ta-

hun 1981/1982 (dua rencana pembangunan lima tahun tahun 1981-1985 dan tahun 1986-1990 menjadi tidak terpenuhi) jumlah ini dikurangi banyak melalui pengusiran besar-besaran (misalnya tahun 1985: 35.000 orang Tunisia).

4. Ratusan tahun penindasan orang Libia oleh Turki, Italia, pemerintah militer Inggris dan Perancis, serta peran besar kekuatan-kekuatan Barat setelah kemerdekaan sampai tahun 1969, menyebabkan terjadinya krisis identitas. Harapan, dengan kembali ke nilai-nilai tradisional Islam dan warisan Arab dapat mengatasi penolakan semua pengaruh asing (kapitalis Barat maupun komunis Timur yang ateis). Larangan alkohol, pelacuran, judi, tulisan Latin, pelaksanaan kembali hukum Islam dalam KUHP, penarikan zakat, dsb. juga berada dalam aspek tersebut di atas, dan merupakan sebuah pencarian jalan pembangunan sendiri yang tertuang dalam Teori Universal Ketiga yang ditulis oleh Muammar al-Gaddafi tahun 1973. Isi pokok: tuntutan akan persatuan Arab, sosialisme dalam hal keadilan sosial pada produksi dan distribusi serta jaminan kebebasan (dimengerti secara khusus) dan demokrasi, tertuang dalam "Buku Hijau" yang terbit dalam tiga bagian sejak tahun 1976. Sistem pendidikan diperluas besar-besaran setelah revolusi dan kini mencakup semua anak laki-laki dan perempuan dalam umur wajib sekolah. Meskipun demikian sampai sekarang masih ada 40% buta aksara di Libia, sebagai hasil kurangnya sarana pendidikan semasa kolonial dan pasca perang. Justru pendidikan orang

dewasa dilakukan dengan upaya besar. Dalam pelayanan kesehatan revolusi mendapatkan hasil yang besar: pendirian rumah sakit-rumah sakit baru atau stasiun pembantu hampir di seluruh pelosok negeri, tahun 1974 penurunan tingkat kematian telah mencapai 0,8% sehingga harapan hidup naik menjadi 60 tahun.

5. Tindakan pertama setelah revolusi tahun 1969 adalah menyingkirkan pangkalan-pangkalan militer Inggris dan AS dari wilayah Libia dan pembukaan ke negara-negara Arab. Kemudian, muncul Federasi Republik Arab (1971), merupakan usaha pembauran total dengan Mesir (1973) dan Tunisia (1974). Di dalam negeri, Dewan Komando Revolusioner (DKR) yang mula-mula beranggotakan 12 orang (Ketua: Kolonel Gaddafi) dan pimpinan politik yang dibentuk oleh Dewan Menteri yang ditunjuk oleh DKR, berusaha memobilisasi rakyat untuk melakukan transformasi sosial dan ekonomi seperti direncanakan. Namun, tidak kembali pada parlemen yang dibubarkan tahun 1969 atau pendirian partai-partai politik tipe lama—menurut Gaddafi sangat melemahkan politik dalam negeri di bawah monarki, turut menyebabkan perpecahan bangsa Arab—, melainkan mula-mula mengambil model Mesir: suatu Uni Kekuatan Rakyat yang Aktif, dalam bentuk Uni Arab Sosialis (UAS/*Arab Socialist Union*), terdiri atas petani, buruh, tentara, intelektual, dan perusahaan yang tidak menindas. Karena sifat UAS yang elitier tidak memberikan keberhasilan mobilisasi yang diharapkan, April 1973 Gaddafi me-

lakukan sebuah revolusi rakyat dan budaya, elemen terpentingnya adalah penciptaan komite-komite rakyat dalam administrasi perusahaan, sekolah, rumah sakit, radio, dan administrasi lokal. Tahun 1975 setelah UAS dihidupkan kembali, diubah menjadi Konferensi Basis Front Rakyat (KBFR) yang memilih pimpinan komite dan wakil-wakilnya (dengan mandat imperatif) ikut dalam Konferensi Rakyat Umum (KRU) untuk menjalankan kepentingan rakyat di tingkat nasional. Selanjutnya, KRU terdiri atas wakil-wakil komite rakyat dan organisasi sampingan (organisasi mahasiswa, perempuan, buruh). Komite rakyat dari sekolah, rumah sakit, dan administrasi lokal mempertanggungjawabkan kegiatannya terhadap KBFR dan organ eksekutif lokal dari Komite Rakyat Umum yang melakukan fungsi sebuah kabinet di tingkat nasional dan dipilih setiap tahun oleh KRU. Dalam rapat luar biasa KRU Maret 1977 sistem kekuasaan rakyat ini diubah, DKR dihapuskan dan Libia mendapat nama Sosialis Libia Rakyat Arab Jamhiriya (tanah tempat rakyat berkuasa).

Meskipun DKR dihapus, militer tetap mempunyai posisi dominan dalam negara (artinya, kelompok orang seperti Gaddafi, Gallud, dsb.): tahun 1977–1979 sebagai Sekretaris Jenderal KRU, sejak tahun 1979 Pimpinan Revolusi didukung oleh komite revolusi (fungsi mobilisasi) yang dibentuk di seluruh pelosok negeri.

6. Orientasi baru dalam politik dalam dan luar negeri terlihat sejak tahun 1987 terutama disebabkan efek negatif perang Cad dan krisis eko-

nomi karena ideologi (misalnya penghapusan perdagangan dalam negeri swasta sejak tahun 1980). Penguatan kegiatan ekonomi dan tindakan liberalisasi (tahun 1988: pembebasan tahanan politik, pengesahan piagam hak asasi manusia, penghapusan pembatasan bepergian ke luar negeri, dsb.) serta pengawasan lebih ketat komite revolusi telah ikut menstabilkan politik dalam negeri.

Politik luar negeri Libia mempunyai orientasi baru ke Uni Soviet (terutama sejak tahun 1974) dan anti-imperialisme yang radikal (terutama konflik dengan AS tahun 1981 dan 1986) mendekatkan Libia ke negara-negara sosialis. Elemen pokok politik luar negeri Libia adalah strategi investasi asing yang terpusat ke Eropa (terutama Italia dan Malta), sebuah kegiatan misi Islam global dan perluasan ideologi serta penempatan tindakan-tindakan teror negara (likuidasi lawan politik sejak tahun 1980). Politik luar negerinya adalah pengaitan erat ke Eropa Barat; Italia dan Jerman (Barat) mengimpor misalnya 50% minyak bumi dan melakukan 50% ekspor barang investasi dan barang konsumsi ke Libia.

Kepustakaan: R. Badry, *Die Entwicklung der Dritten Universal Theorie (DUT) Muammar al-Quaddafis in Theorie und Praxis*, Frankfurt 1986; H. Mattes, *Die innere und äussere islamische Mission Libyens*, Mainz/München 1986; *ibid*, *Die militärische Konfrontation zwischen Libyen und den USA*, Hamburg 1986; Chr. Opperschall und Ch. Teuber, *Libyen. Die verkannte Revolution*, Wien 1987; H. Brill, *Libyens Aussen-und Sicherheitspolitik*, Baden-Baden 1988; T. Koszinowski/H. Mattes (ed.), *Nahost-Jahrbuch* 1987, Opladen 1988. hpm

LIBOR (*London Inter Bank Offer Rate*) Menandai variabel-variabel su-

ku bunga; di pusat bank London memberikan kredit jangka pendek sampai enam bulan. Negara berkembang di tahun '70-an dan terutama tahun '80-an makin banyak mengambil utang luar negeri dengan persyaratan LIBOR. Berdasarkan masing-masing bonitas nasabah pada suku bunga LIBOR masih dibebani kenaikan bunga (*spreads*). Suku bunga nominal tahun 1974 adalah 7%, dengan demikian untuk sementara waktu berada di bawah tingkat inflasi AS, berarti di bawah suku bunga riil negatif tahun 1979, yaitu 10%. Tahun 1979–1982 suku bunga riil di atas +22% dan membebaskan negara berkembang dengan pembayaran bunga yang tak terduga tingginya, a.l. menyebabkan pecahnya krisis utang internasional. → utang.

hpn
LIC (*Low Income Countries*) → Laporan Pembangunan Dunia.

Liga Arab Liga negara-negara Arab didirikan tahun 1945 oleh 7 negara merdeka: Mesir, Irak, Yaman, Lebanon, Saudi Arabia, Suriah, dan Transyordania (sekarang Yordania).

Dalam rangka dekolonisasi di Afrika Utara dan Timur Tengah jumlah negara anggota menjadi 23 sampai sekarang; Mesir dikeluarkan dari keanggotaan karena tahun 1979 melakukakan perjanjian perdamaian bilateral dengan Israel. Dalam pertemuan puncak di Casablanca Mei 1989, Mesir diterima kembali. Tahun 1979 kedudukan Liga Arab dipindahkan dari Kairo ke Tunis.

Tujuan-tujuan terpenting: a. meluaskan hubungan di antara sesama anggota; b. perlindungan kemerdekaan dan kedaulatan anggota; c. mem-

pertahankan kepentingan Arab terhadap kekuatan lain; d. pelebaran dan menjaga agar tidak terjadi pertikaian. *Organ pengambil keputusan tertinggi:* Dewan Liga, bersidang dua kali setahun; 16 komisi untuk ekonomi, politik, masalah minyak, hukum, hak asasi manusia, kultur, kesehatan, dsb. Suborganisasi dan komisi ahli yang berdiri kemudian untuk meningkatkan dan mengkoordinasi kerja sama antar-negara Liga Arab, terutama di bidang ekonomi, pengetahuan, kultur, dan militer. *Organ eksekutif:* Sekretaris Jenderal yang wewenang keputusannya sangat terbatas dan kemungkinan pengaruh politiknya bergantung terutama pada kekuatan meyakinkannya (sejak tahun 1979 Chedli Klibi, Tunisia).

Pendirian dan kelangsungan Liga Arab merupakan pencerminan keinginan negara-negara anggota berdasarkan sejarah dan kultur untuk sebuah persatuan dunia Arab. Pemilahan oleh kekuasaan asing dan kolonialisme jelas menyebabkan perkembangan kepentingan-kepentingan partikular dan saling membenci dalam hubungan persaingan antar-Arab (misalnya Suriah versus Irak), menghalangi realisasi tujuan-tujuan Liga Arab.

Tujuh negara Liga Arab sekaligus merupakan anggota OAU dan beberapa negara Arab menjadi pemuka gerakan nonblok. Oleh karena itu, Liga Arab mengartikan dirinya sebagai sebuah organisasi Dunia Ketiga dan berusaha, misalnya dengan dukungan bantuan pembangunan Arab ke Afrika, mendorong perkembangan hubungan Selatan-Selatan.

Dengan bantuan Dialog Arab-Eropa yang dilembagakan atas inisiatif Arab (1974), Liga Arab berusaha mengintensifkan hubungannya ke ME dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan politik negara-negara Arab (terutama sikap ME dalam Konflik Timur-Tengah, posisi hukum buruh tamu Arab di ME), serta tuntutan politik ekonomi dan perdagangan (alih teknologi, penghapusan batasan perdagangan ME). Dialog ini sampai sekarang tidak memberikan banyak hasil, disebabkan tidak bersedianya Liga Arab ikut membicarakan masalah-masalah yang menyangkut Konflik Timur-Tengah dalam dialog tersebut.

Pertemuan puncak luar biasa November 1987 di Amman/Yordania terutama mengharapkan sikap Liga Arab dalam Perang Irak-Iran. Pada konferensi puncak di Aljir tahun 1988 tuntutan akan konferensi internasional untuk perdamaian Timur Tengah dikuatkan dengan ikut sertanya PLO sebagai wakil Palestina. Pertikaian antara Suriah dan Irak membuat menundung pertemuan Mei 1989, mencerminkan sikap Liga Arab dalam Konflik Timur-Tengah dan masalah Lebanon.

Kepustakaan: R. Robert, "Die Liga der Arabischen Staaten", dlm.: *APuZ* 23/1980, hlm. 25 dst.; U. Steinbach/R. Robert (ed.), *Der Nahe und Mittlere Osten*, vol. 2, Opladen 1988. **hpk**

ligas campesinas → swadaya.
lingkaran setan → *circulus vitiosus*.
lingua franca Semula nama untuk bahasa Italia yang dimasukkan elemen-elemen Arab dan dipakai oleh penguasa Venesia dan Genua di tepi Laut Tengah sebagai bahasa lalu lintas perdagangan. Secara umum merupa-

kan bahasa lalu lintas dan dialek yang terbentuk secara buatan atau alami dari sebuah daerah berbahasa banyak. Misalnya di negara berkembang: Swahili (Afrika Timur), Hausa (Afrika Barat), Hindustani (India), Inggris-Pidgin (Pasifik Barat), dsb. **ah** link Pengaitan *Special Drawing Rights* (SDR) dengan bantuan pembangunan, merupakan tuntutan negara berkembang agar SDR digunakan untuk melayani bantuan pembangunan dan bagian-bagian dari distribusi SDR dipisah-pisahkan ke negara berkembang. → IMF. **dn** linkage-effects Kemampuan investasi langsung dan teknologi yang diimpor untuk menggantikan investasi selanjutnya dan investasi tambahan lainnya. Dibedakan antara: a. *backward-linkage* (pengaitan ke belakang): rangsangan untuk investasi lanjut di bidang pemasokan dalam hal teknologi industri yang memungkinkan pemanfaatan bahan mentah lokal; b. *forward-linkage* (pengaitan ke depan): rangsangan untuk investasi lanjut dalam tingkat produksi selanjutnya, pengolahan lanjut di dalam negeri produk yang berasal dari industri yang dilakukan oleh modal asing. **dn** LLDC (*Least Developed Countries*) Kelompok negara berkembang yang menurut keputusan sidang umum PBB 18 November 1971 adalah negara-negara paling terbelakang. Huruf ganda superlatif L untuk *Least* membedakannya dari LDC (*Less Developed Countries*, Semua Negara Berkembang). Sekitar 9% penduduk dunia hidup di LLDC. Penggolongan negara berkembang ke LLDCs ber-

langsung menurut tiga indikator (sekarang oleh ECOSOC): PDB per kapita di bawah 355 US\$ (dulu: 100 US\$), kuota industri pada PDB di bawah 10%, tingkat buta aksara (kelompok umur di atas 15 tahun) di atas 80%. Sebenarnya, LLDCs harus memenuhi semua kriteria di atas. Namun, pelaksanaannya menyimpang karena kepentingan politik. Dengan demikian dua dari tiga negara yang melampaui nilai ambang dari komisi Tinbergen, *Committee for Development Planning* (CDP) digolongkan sebagai LLDC (daftar CDP). Di antara para pelak-sana, daftar ini dianggap agak kaku. Kebiasaan pemakaiannya terbatas karena pencoretan negara-negara seperti misalnya Botswana yang sudah dapat meninggalkan kategori-kategori LLDC (hanya memenuhi satu kriteria) tidak dapat dibiarkan secara politis. Oleh karena itu, Bank Dunia pada pemakaian kategori ini membuat kategori sendiri (LICs, *Low Income Countries*). Tahun 1971 sebanyak 25 negara tergolong LLDCs; perluasan daftar tahun 1975 menjadi 28, tahun 1977 menjadi 30, tahun 1981 menjadi 31, tahun 1982 menjadi 36, dan akhir tahun 1987 menjadi 44.

Kategori LLDC menjadi penting secara politis ketika sebuah keputusan sidang umum PBB Desember 1979 dan saran UNCTAD yang sama pentingnya Juni 1979, menuntut program khusus yang besar untuk LLDCs dengan tujuan mencapai sebuah minimal akan kebutuhan dasar di sana. Untuk itu PBB memberlakukan sebuah konferensi khusus LLDCs besar-besaran (Paris, September 1981) yang diikuti oleh lebih dari 100 negara dan

organisasi kreditor. Namun, tetap tanpa hasil seperti program langsung UNCTAD (1979-1981). Tuntutan negara berkembang dalam *Substantial New Programme of Action* (SNPA): penggantian transfer dana keseluruhan (pemerintah dan swasta) sampai akhir tahun '80-an; meniga kali lipatkan bantuan pembangunan pemerintah (*ODA) sampai tahun 1984, mengempat kali lipatkan sampai tahun 1990; 0,15% PNB sebagai ODA untuk LLDCs, 0,20% mulai tahun 1986; kuota LLDC minimal 30% pada semua program. Hal ini diterima oleh sebagian besar negara industri secara prinsipil, tetapi tidak diterima untuk perencanaan tertentu. Penentang keras terutama adalah Jerman, Inggris, dan AS.

Tabel 6: PNB per kapita di negara berkembang dan LLDC (dalam US\$ Tahun 1978)

Kategori	1960	1970	1980	1990 ¹⁾
LLDCs	167	172	183	193
Seluruh negara berkembang	402	552	674	903

¹⁾ Proyeksi

Sumber: Bank Dunia

Kesenjangan perkembangan antara negara berkembang dan LLDC membesar secara dramatis di tahun '60-an dan '70-an. Produksi pertanian di LLDCs mencakup 50% PNB, turun lebih dari 10% tahun 1970-1980. Berbeda dengan negara berkembang lainnya (menurut UNCTAD, Bank Dunia, dan Laporan Brandt) situasi sosial-ekonomi di LLDCs hanya dapat diperbaiki melalui bantuan pembangunan pemerintah dari luar karena potensi pembangunannya yang

sangat rendah meskipun usaha sangat besar dan perubahan struktur intern. Sekarang saja mereka membiayai di atas 50% impor dan investasi di LLDCs, 84% datang dari DAC, 13% dari OPEC, dan 3% dari negara-negara blok Timur.

Persiapan proyek yang sering sulit dilakukan di LLDCs sampai tahun 1988 adalah 279,1 juta DM untuk dana beasiswa dan tenaga ahli. Pergeseran aksien dari bantuan proyek ke bantuan program serta penanggungan ongkos lokal yang muncul (ongkos devisa) diharapkan dapat mengurangi masalah kecilnya kemampuan absorpsi LLDCs. Pengutamaan LLDCs oleh program khusus internasional (preferensi LLDC) tidak diragukan dalam pengetahuan dan praktek. Beberapa negara berkembang melihat bahaya pengklasifikasian Dunia Ketiga melalui preferensi LLDC. Selain itu, Konferensi Paris jelas memperlihatkan bahwa banyak negara berkembang yang meskipun miskin, tidak tergolong dalam LLDCs, takut bahwa bantuan khusus akan merugikan bantuan untuk dirinya. Kelemahan pokok konsep ini adalah tipe strukturalnya. Konsep ini berada di jangkauan yang terbatas, didasari oleh pendekatan negara dan bangsa. Tahun 1981 (menurut Bank Dunia) hidup 300 juta manusia di LLDCs, sekitar 196 juta dalam miskin absolut. Namun, ini hanya mencakup sekitar 20% *absolute poor* yang ada di seluruh dunia. 80% hidup di luar LLDCs. Mereka tidak terjangkau oleh preferensi LLDC. India memiliki miskin absolut lebih banyak dari jumlah LLDCs keseluruhan meskipun bukan

LLDCs. NIB sendiri mempunyai banyak zone miskin (daerah kumuh, daerah yang diabaikan). Mereka hanya akan dapat dijangkau oleh politik yang berorientasi kelompok sasaran yang sama sekali tidak ada dalam konsep LLDC. Dengan demikian, praktek yang dilakukan banyak negara kreditor pantas dikritik, terutama dengan memperlihatkan kuota bantuan LLDC yang tinggi mengacuhkan orientasi miskin dan kebutuhan dasar. Selain itu, kebetulan historis pada penarikan garis batas kolonial menentukan ketidakmampuan konsep. Jika sebelah timur laut Brasilia dulu merupakan negara merdeka, ia dapat mendapatkan keringanan LLDC. Jika Benin tidak kebetulan sebuah negara merdeka, melainkan negara bagian Nigeria yang "kaya minyak" maka ia tidak akan mendapatkan bantuan khusus. Sebaliknya, penunjang preferensi LLDC menekankan kemampuan praktek dan kemampuan digunakan sebagai instrumen dari konsep tersebut. Dalam pendekatan negara nasional mereka melihat sebuah konsesi realitas politik dan menunjukkan bahwa politik yang berorientasi ke kelompok sasaran akan menemukan batasnya pada situasi tidak harmonis dengan elite negara berkembang pada prinsip kedaulatan rakyat. Statistik LLDC dapat dilihat dalam tabel 1 di lampiran.

bg
local planning → rencana pembangunan.

long term contract process → Perjanjian Bahan Mentah.

low-intensity conflict LIC disebut juga *low-intensity warfare*, yaitu konsepsi politik militer yang dikembangkan

kan AS awal tahun '80-an khusus untuk Dunia Ketiga. Elemen-elemen konflik tingkat rendah terutama adalah *counterinsurgency*, operasi *contra*, artinya pengorganisasian subversi dan pemberontakan, *counterterrorism*, sebagai pemerangan terorisme secara ofensif dan militeris, serta perlu menghindarkan daerah operasi militer yang terbatas di bawah suatu perang konvensional, yang ongkos serta risiko di dalam dan di luar negeri makin tinggi. Tujuan strategi LIC adalah penguasaan tidak secara militer, melainkan pengawasan sosial di kawasan tidak stabil di Dunia Ketiga yang dianggap oleh AS misalnya, sebagai pemasok bahan mentah atau dalam perspektif politik penting secara strategis.

Kepustakaan: J. H  ppler, *Krieg im Frieden - Amerikanische Strategien f  r die Dritte Welt. Counterinsurgency and low-intensity warfare*, K  ln 1986.

bh

LSM/LPSM (Lembaga Swadaya Masyarakat/Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat) Pernah dikenal dengan istilah NGO (*Non-Government Organization*), tetapi dalam perkembangannya lebih dikenal dengan istilah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM). Nama NGO ditinggalkan tahun 1983 dan diganti dengan nama LSM/LPSM dengan pemikiran bahwa *Non-Government* diterjemahkan menjadi nonpemerintah yang dapat dimengerti sebagai antipemerintah sehingga ada baiknya tidak lagi memakai istilah NGO itu. *Swadaya* mengandung dimensi menentukan diri sendiri. Biasanya, LPSM adalah organisasi besar dengan berbagai jenis kegiatan; salah

satu fungsinya adalah membantu LSM tingkat lokal yang lebih kecil. Namun dalam praktek, perbedaan ini agak samar.

1. *Definisi*: LSM/LPSM didefinisikan sebagai organisasi yang dibuat oleh masyarakat sendiri untuk mengisi kebutuhannya atau memecahkan berbagai masalah sosial-ekonomi yang dihadapinya, seperti masalah miskin, keterbelakangan, dan diabaikan dalam pembangunan. Pelakunya adalah para relawan yang terikat dengan motivasi, minat, dan kepedulian yang sama; memiliki otonomi dalam membuat keputusan; fleksibel dalam perencanaan dan manajemen; berorientasi nonprofit. Secara umum, dekat dengan masyarakat dan legal (M.M. Billah/N. Djamas/E. Djunaidi, 1984). Mereka juga memberikan ciri-ciri: a. organisasi didirikan atas inisiatif masyarakat (non-pemerintah) sebagai manifestasi partisipasi dalam proses pembuatan keputusan; b. organisasi bebas memilih staf karyawan dan menentukan dasar-dasar prioritas kegiatan; c. berorientasi nonprofit; d. mempunyai berbagai kegiatan primer, seperti kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, dan pembangunan pedesaan; e. dana berasal dari berbagai sumber, yaitu dari pemerintah daerah, lembaga donor nasional dan internasional, kedutaan asing, serta hasil penjualan produksi sendiri; f. biasanya, organisasi memakai bentuk yayasan, tetapi ada juga yang berbentuk asosiasi dengan anggota relawan; tidak dibayar, hanya pelaksana program yang dibayar; g. sebagian besar berafiliasi keagamaan; h. sebagian besar tidak bergantung

pada partai politik yang ada, meskipun ada yang bersimpati ke gerakan politik yang ada, tetapi tidak mempunyai hubungan resmi.

Di samping LSM/LPSM dalam negeri ada juga sekitar 100 (1984) LPSM luar negeri dengan pusat kedudukan di negara-negara industri Barat yang memberikan dana ke Indonesia. Berdasarkan kegiatannya mereka dapat diklasifikasi menjadi: a. mengacu pada program pelatihan dan penelitian, misalnya *Ford Foundation*, *Rockefeller Foundation*, *Agricultural Development Council*, dan *Asia Foundation*; b. mengacu pada proyek-proyek kesehatan, pembangunan pedesaan, motivator pangan dan proyek gawat-darurat. Jadi, mengacu untuk memenuhi kebutuhan dasar kelompok masyarakat termiskin. Pendanaan mereka biasanya didapatkan dari: a. perusahaan transnasional dan lembaga besar legal, seperti *Ford Foundation*, *Rockefeller Foundation*, *Volkswagen Stiftung*, *Toyota Foundation*; b. pemerintah asing, misalnya *CARE (Cooperative for American Relief Everywhere)* dan *Asia Foundation* dari pemerintah AS; *NOVIB (Nederlandsche Organisatie vor Internationale Ontwekeling Samenwerking)*. Organisasi Belanda untuk Kerja Sama Pembangunan Internasional); *ICCO*; *CEBEMO (Catholic Organization for Joint Financing of Development Programmes)*, Organisasi Katolik untuk Pembiayaan Bersama Program-Program Pembangunan) dari pemerintah Belanda; *FNS*; *FES* dari pemerintah Jerman; c. pembiayaan masyarakat, misalnya *Foster Parents Plan* dengan cabang di Kanada,

Australia, dan Belanda; *Christian Children's Fund* dan *World Neighbour of the United States* di AS; OXFAM di Inggris.

2. *Tumbuh dan perkembangan:* banyak yang mengatakan bahwa LSM berakar atau berlatar belakang sejak awal abad ini, lalu ada yang menjadi gerakan politik, misalnya Sarekat Islam dan Boedi Oetomo, sementara yang lain tetap berkecimpung di bidang kesejahteraan sosial dan masyarakat. Pada tahun '60-an kegiatan LSM ditandai oleh kegiatan yang mengacu pada kelompok kecil dengan landasan kepentingan bersama serta kegiatan amal. Akhir tahun '60-an dan awal tahun '70-an mulai banyak tumbuh LSM di mana-mana. Perhatian pokok mereka ditujukan pada pengembangan masyarakat yang merupakan bagian dari kritik mereka terhadap ketidakmerataan pembangunan dan pencarian strategi alternatif atau kebutuhan pokok yang langsung dapat menguntungkan mayoritas kaum miskin. Di awal tahun '80-an mulai disadari pentingnya partisipasi pembangunan dalam masyarakat. Oleh karena itu, muncul tipe LSM yang berorientasi pada perubahan struktural dan kelembagaan di bidang ekonomi, politik, dan sosial.

Berdasarkan katalog yang dikeluarkan Bina Desa tahun 1988, di Indonesia ada sekitar 440 LSM yang tersebar di seluruh Indonesia, terbanyak adalah di Jawa (62,7%), paling sedikit di Kalimantan Selatan dan Jambi (masing-masing hanya ada 1 LSM), dan di beberapa propinsi tidak ada LSM (Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan

Timor Timur). Bidang gerak kegiatan LSM adalah kesehatan (16,9%), hukum (4,9%), lingkungan hidup (11,9%), koperasi (20,7%), industri kecil (16,9%), pendidikan dan pelatihan (16,6%), serta penelitian (12,1%).

3. *LSM/LPSM dan pemerintah:* dalam hubungannya ke pemerintah, LSM/LPSM lebih berfungsi menjalankan dan membantu program pemerintah, di mana pemerintah tidak dapat menjangkau daerah atau sektor tertentu sementara kelompok-kelompok komunitas tersebut berhubungan baik dan erat dengan LSM. Selain itu, LSM juga berfungsi sebagai komunikator yang menghubungkan pemerintah dengan kelompok komunitas tertentu, di tempat aparat pemerintah tidak mampu menyentuh masyarakat terbawah, atau masyarakat bawah yang tidak mempunyai akses ke fasilitas dan program bantuan pemerintah. Meskipun demikian pemerintah tetap berusaha lebih mengawasi LSM, salah satu caranya adalah dengan UU Keormasan tahun 1985. UU yang dikhawatirkan akan mengekang kebebasan bergerak LSM, banyak mengundang kritik dari LSM yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi, bantuan hukum dan hak asasi, serta pembangunan dan pendidikan. Upaya pengawasan ini akan menjadi jelas dengan keluarnya Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 8/1988 mengenai Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat. Titik berat instruksi ini adalah menginventarisasi LSM, membina, dan menciptakan iklim yang lebih baik untuk kerja sama LSM-

pemerintah, mengkoordinasi kegiatan LSM dengan instansi daerah yang terkait, melaporkan keberadaan dan kegiatan LSM ke menteri dalam negeri.

4. *Kritik*: kritik-kritik yang dilon-tarkan terhadap LSM terutama adalah masalah ketergantungan besar mereka ke donatur luar negeri, dan dana itu akhirnya lebih banyak terpakai untuk membiayai kelangsungan hidupnya sendiri dibandingkan untuk masyarakat sasarannya. Kadang juga terjadi bahwa LSM yang besar mengklaim kegiatan LSM kecil sebagai kegiatan mereka, agar dana tetap dapat mengalir ke mereka. Kegiatan-kegiatan LSM lebih bersifat mengobati, tetapi bukan membangun sebuah kemandirian yang politis dalam masyarakat. Seorang pengamat LSM juga mengatakan bahwa dalam praktek LSM

Indonesia yang diamatinya, ia tidak melihat bahwa LSM dekat dengan kaum miskin, memiliki staf yang idealistis dan bermotivasi tinggi, efektif dalam pembiayaan dan birokrasi yang luwes, seperti sering dikatakan para pendukung LSM.

Kepustakaan: Bina Desa, *Katalog. Profil LSM/LPSM Indonesia*, Jakarta 1988; Departemen Dalam Negeri, "Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat"; M.M. Billah/N. Djamas/E. Djunaedi, *A Bird's-Eye View of Non-Government Organization in Indonesia*, Indhira, Jakarta 1984; P. Hannam, "Pengembangan Bentuk Pembangunan Alternatif: Pengalaman LSM di Indonesia", dlm.: *Prisma* no. 4, 1988; M.M. Billah/A.H.G. Nusantara, "Lembaga Swadaya Masyarakat di Indonesia: Perkembangan dan Prospeknya", dlm.: *Prisma* no. 4, 1988; Arief Budiman, "Menampung Aspirasi Masyarakat Lapisan Bawah", dlm.: *Prisma* no. 4, 1988; P. Eldridge, "LSM dan Negara", dlm.: *Prisma* no. 7, 1989.

dis

M

Machismo → Meksiko, perempuan di Dunia Ketiga.

Madagaskar Luas 587.041 km² (dengan Pulau Nosy-Bé 293 km² dan St. Marie du Madagascar 165 km²) adalah pulau keempat terbesar di dunia. Hampir 21% penduduk (tahun 1989: 11 juta penduduk) hidup di perkotaan (ibu kota Tananariva). Pertumbuhan penduduk tahunan adalah 2,9% (rata-rata tahun 1980-1989), dan terbagi tidak merata (lebih dari 1/4 hidup di atas 4% areal di zone tepi timur dari dataran tinggi Madagaskar). Tahun 1989 tingkat harapan hidup adalah 51 tahun dan kuota buta aksara adalah 33%. Perbedaan etnis dari penduduk campuran Afro-Asia disebabkan oleh berbagai gelombang pendatang, paling dominan adalah pendatang dari Melayu-Indonesia. Merina (26%) dan Betsileo (12%) di dataran tinggi, Betsimi-saraka (15%) di pantai timur, dan Sakalava Negro di pantai barat, merupakan suku-suku terpenting dari 18 suku. 1% penduduk adalah orang asing (Perancis, India, Cina). Bahasa Malagasi yang melayu-polinesia adalah bahasa negara resmi selain Perancis. 50% penduduk berkepercayaan animis, 25% Katolik, 20% Protestan, dan 5% Islam. Epidemi malaria

Desember 1987-Mei 1988 berakibat sangat buruk (sekitar 100.000 korban jiwa).

Iklim tropis Madagaskar dan tanah yang subur menguntungkan pertanian, dalam negara miskin ini (menurut Bank Dunia dalam 16 tahun terakhir PNB per kapita turun terus, tahun 1989: 230 US\$) punya peran penting (tahun 1989: 31% PDB, 75% angkatan kerja). Beras, ubi kayu, jagung, dan kacang polong ditanam untuk subsistensi dan pasar dalam negeri. Komoditas ekspor andalan adalah kopi (40%), tembakau, serat sisal, vanili (80% kebutuhan dunia), dan cengkeh. Negara tujuan ekspor pertanian (80% hasil ekspor senilai 331 juta US\$ tahun 1986) yang merupakan sumber devisa adalah Perancis (1/3), negara-negara ME lainnya, AS, Jepang, dan Uni Soviet. Teknik bercocok tanam dan beternak yang kuno serta kurangnya pemanfaatan lahan (hanya 5% areal negara itu merupakan lahan pertanian), menghindari peningkatan produksi beras untuk penduduk yang makin meningkat jumlahnya. Hal ini menyebabkan ketergantungan impor (beban devisa). Perluasan lahan pertanian, peningkatan hasil per hektar, dan perbaikan pemasaran

dengan demikian menjadi tujuan utama program investasi untuk sektor pertanian. Untuk itu Madagaskar yang termasuk Negara AKP mendapat bantuan keuangan dari EDF. Kekurangan modal dan sempitnya pasar dalam negeri menyebabkan industri masih dalam tahap permulaan (tahun 1986: 16% PDB, 9% angkatan kerja). Penambangan mineral (krom, grafit, mika) masih sulit karena jaringan lalu lintas yang belum memadai. Selain minyak bumi di barat laut, Madagaskar menawarkan potensi hidroelektrik besar yang belum dimanfaatkan untuk mendapatkan energi dari sungai-sungai yang terjun memanjang ke arah timur.

Sebelum Madagaskar dimasukkan ke dalam kerajaan kolonial Perancis, Merina menaklukkan kerajaan-kerajaan dan *clan-clan* keluarga yang muncul sejak tahun 1500 dan membangun sebuah kerajaan yang terdiri atas masyarakat bangsawan, orang bebas, dan tani budak. Aturan dipertahankan oleh rapat umum (*fokonolona*) yang dipimpin oleh pimpinan-pimpinan keluarga. Semasa pemerintah kolonial, struktur ekonomi Madagaskar melalui langkah-langkah infrastruktur (bank, perusahaan dagang Perancis) dan diversifikasi pertanian (baru: kopi dan vanili) serta pengutamaan impor Perancis, berorientasi ke kebutuhan Perancis. Ketidaksamaan hukum dan sosial antara orang Madagaskar dan Perancis menimbulkan gerakan nasionalis yang ditindas secara keras oleh Perancis. Tahun 1956 Ph. Tsirana mendirikan *Parti Social Democrate* (PSD), pengikutnya ada yang berasal dari suku-suku daerah pesisir yang

moderat (suku di pegunungan lebih radikal). Tahun 1960 Tsirana berhasil mencapai kemerdekaan. Presiden Madagaskar Tsirana, wakil dari sosialisme yang berorientasi Barat melanjutkan kerja sama dengan Perancis menghadapi perlawanan partai dataran tinggi yang marxis-radikal (AKFM/*Antakon'ny Kongresin'ny Fakaleovantenan'ni Mandagasikara*, Partai Kongres untuk Kemerdekaan Madagaskar). Konflik lama antarsuku dan antarkelas antara Merina (lapisan pemimpin) dan suku-suku daerah pesisir (petani) tersulut tahun 1972 ketika Marina mengganti bahasa Perancis di sekolah-sekolah dengan bahasa Malagasy (*malgachisation*) yang ditentang suku-suku daerah pesisir sehingga terjadi penggulingan berdarah Tsirana. Penggantinya, Jenderal Ramanantsoa, dalam rangka sebuah strategi pembangunan otosentris menekankan kembalinya kedaulatan rakyat dalam politik dan ekonomi setelah *fokonolona* hidup kembali. Sejak tahun 1975 Madagaskar dipimpin Presiden D. Ratsiraka yang dikukuhkan pada pemilihan presiden 7 November 1982 untuk masa 7 tahun. Ia membangun sebuah tata masyarakat sosialis sampai tahun 2000. Titik beratnya adalah tindakan-tindakan dalam negeri: pembangunan sektor pertanian dan agroindustri dengan tujuan pengadaaan bahan pangan, desentralisasi pembangunan politik, ekonomi, dan sosial dengan basis demokrasi dalam rangka sistem *fokonolona* yang baru dikonsepsikan (panutan *ujamaa*), pengurangan disparitas pendapatan sektoral/regional, pengawasan negara terhadap industri-industri kunci, mal-

gachisation sistem pendidikan serta mobilisasi *Avantgarde de la Révolution de Malagasy* (AREMA) yang didirikan tahun 1976. Sesuai UUD tahun 1975, presiden dewan revolusi tertinggi (CSR) adalah organ eksekutif terpenting. Politik luar negeri (*tous azimuts*) Madagaskar ditandai oleh keanggotaan nonblok, mendukung gerakan pembebasan di Afrika Selatan, meningkatkan kerja sama dengan negara-negara sosialis Afrika (Tanzania, Mozambik), dan tuntutan penarikan semua pangkalan militer di Lautan Hindia (Zone Perdamaian di Lautan Hindia). Sejak akhir tahun '70-an hubungan dengan Barat makin intensif karena besarnya kebutuhan akan bantuan ekonomi asing (Perancis, ME). Arah pertikaian dan persaingan etnis dalam partai-partai regional yang bergabung dalam Front Nasional (a.l. AREMA/117 kursi pada pemilihan parlemen Agustus 1983, AKFM/KDRSM = *Parti du Congrès pour l'Indépendance de Madagascar*/9 kursi) serta defisit regional dan ekonomi (a.l. kekurangan bahan bakar dan pangan) yang menimbulkan kerusuhan, tetap menjadi peristiwa biasa dalam politik dalam negeri Madagaskar. Tahun 1987 Presiden Ratsiraka mengumumkan mundurnya pemilihan presiden yang rencananya dilakukan tahun 1988. Pemilihan ini akan dilakukan bersama dengan pemilihan presiden tahun 1989. Kesulitan-kesulitan ekonomi menimbulkan banyak demonstrasi. Ada 16 kelompok penting bergabung dalam Hery Velona dan sejak tanggal 10 Juni mereka membanjiri Plaza 13 Mei di pusat kota Antananarivo. Me-

reka menuntut reformasi dan menggil mogok umum. Usul Ratsiraka untuk bekerja sama dengan oposisi mengolah UUD dan mengubah hak pemilihan, ditolak oleh oposisi yang kini makin keras menuntut dirinya untuk mundur.

Kepustakaan: R. Archer, *Madagascar depuis 1972. La Marche d'une Révolution*, Paris 1976; H.D. Sick, *Madagascar*, Darmstadt 1979; B. Gierbach/D. Nohlen, "Madagascar", dlm.: *HDW II*, 5, Hamburg 1982, hlm. 216 dst.; M. Covell, *Madagascar*, London dll. 1987; M. Franke, "Umsturz auf der Pefferinsel, Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt", 30 Agustus 1991, dlm.: *BMZ-Spiegel der Presse*, 18/91.

ah
Maghreb Union → Uni Arab-Magribi.

Mahkamah Afrika untuk Hak Asasi Manusia → hak asasi manusia.

Mahkamah Inter-Amerika untuk Hak Asasi Manusia → hak asasi manusia.

Mahkamah Internasional Kedudukan: Den Haag, organ hukum PBB yang dihadapannya hanya negara sebagai pihak yang bertikai. Mahkamah Internasional menangani pertikaian hukum antarnegara dan kasus pertikaian politik internasional, tetapi tidak menentang keinginan satu pihak. Ia memutuskan berdasarkan kedaulatan rakyat dan mayoritas suara. dn
Maladewa 1. Negara Kepulauan Maladewa (dari perkiraan 1.200-2.000 pulau hanya sekitar 200 pulau yang dihuni), terletak di sekitar 400 mil laut sebelah barat daya Sri Lanka dan juga sejauh itu dari pantai selatan India. Tanah kapur yang kering (karang), kekurangan air, dan lalu lintas transportasi yang buruk, menghambat peningkatan produksi pertanian (pangsa PNB tahun 1985: 25%; terutama kelapa, jawawut, umbi-umbian).

Sekitar 45% tenaga kerja bekerja di penangkapan ikan, tetapi pangsa ekspor perikanan turun drastis akibat jatuhnya harga ikan tuna di pasar dunia. Turisme (pangsa PNB sekitar 35%) berkembang menjadi cabang ekonomi paling dinamis dan menjadi sumber penerimaan terpenting di Maladewa—termasuk LLDC, yang kehilangan sumber devisa terpenting dengan dibangunnya pangkalan angkatan laut Inggris di Gan tahun 1976 (Maladewa sampai sekarang penting karena letaknya yang strategis).

2. Orang Inggris merupakan penjajah kolonial terakhir yang sejak islamisasi kaum Suni (1153) menundukkan sultan yang berkuasa. Maladewa ditemukan oleh Portugis (1507–1573), lalu orang Belanda (1656–1796). Protektorat Inggris Maladewa merdeka tahun 1965. Kepala negara sampai tahun 1978 adalah A.I. Nasir yang memerintah negara itu secara otoriter seperti perusahaan keluarga dan memanfaatkannya untuk kepentingan sendiri. Penggantinya, M.A. Gayoom (tahun 1983 dan tahun 1988 terpilih kembali) melakukan liberalisasi politik dalam negeri dan membuka negara keluar. Ia mengikuti secara ketat garis netral. Maladewa tidak memiliki militer sendiri. November 1988 telah berlangsung usaha kudeta ke-3 terhadap Gayoom, kudeta itu berhasil dibasmi oleh tentara India yang diminta bantuannya. Motifnya adalah pertikaian kepentingan dari lapisan pemimpin bangsawan tradisional yang merupakan keluarga mantan Presiden Nasir dan elite ekonomi yang baru muncul bersamaan dengan kenaikan ekonomi. Sistem kasta tra-

disional telah dipengaruhi oleh hukum Islam dan beralih menjadi pembagian dalam kelas-kelas sosial berdasarkan posisi ekonomi.

3. Maladewa tahun 1987 berpenduduk sekitar 195.000 penduduk yang terbagi tidak merata di berbagai pulau. Ibu kota Male tahun 1986 berpenduduk sekitar 46.000 penduduk (20,4% penduduk perkotaan). Dengan sekitar 654 penduduk/km², Maladewa merupakan negara berpenduduk terpadat di Asia Selatan. Bahasa nasional: Dihevi.

4. Situasi sosial penduduk, terutama di pulau-pulau kecil, ditandai oleh tidak adanya pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan. Sulit untuk mengatasi masalah ini karena jumlah penduduk yang sedikit (60% pulau berpenduduk kurang dari 500 penduduk), jarak antarpulau yang relatif jauh dan situasi lalu lintas yang buruk, serta kekurangan pangan. Usaha keras negara dan bantuan WHO dapat mencapai hasil besar di tahun-tahun terakhir. Tingkat harapan hidup naik dari 47 tahun (1983) menjadi 54 tahun (1986). Sistem pendidikan meskipun ada usaha modernisasi, masih tetap berlandaskan sekolah agama tradisional. Pada tingkat melek aksara yang relatif tinggi (tahun 1983: 86,7%) tidak ada, terutama sarana pendidikan lanjut.

5. Maladewa berbentuk republik presidensial; Islam adalah agama negara. Dalam parlemen satu kamar dipilih 48 orang untuk masa jabatan 5 tahun dan mewakili 8 anggota parlemen yang ditunjuk presiden. Sampai sekarang tidak terjadi pembanguan partai-partai politik. Hak pre-

siden yang sangat besar (a.l. dapat mengumumkan situasi darurat sampai tidak terbatas) menjamin posisinya yang dominan.

Kepustakaan: W. Senfleben, "Die Republik Malediven", dlm.: *Zf. für Wirtschaftsgeographie I*, 1977, hlm. 20 dst.; World Bank, *The Economy of the Maldives*, Washington 1980; J. Metzner, "Malediven", dlm.: *HDW II*, 7, Hamburg 1983, hlm. 168 dst.

rs/bh

Malawi Terletak di sebelah tenggara Afrika dengan luas 118.000 km² (sekitar 1/5 Danau Malawi), memiliki kombinasi yang menarik antara orientasi politik dalam negeri, luar negeri, dan politik pembangunan: jalan pembangunan kapitalis yang sangat ditopang oleh pertanian (dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar fisik relatif sukses). Kekuasaan terpusat pada satu orang (*one man state*), merupakan negara polisi yang sangat represif (banyak pelanggaran hak asasi manusia, politik luar negeri yang ramah ke Afrika Selatan [RAS]).

1. Negara pedalaman yang kecil itu (perdagangan luar negeri berlangsung melalui Mozambik, Zimbabwe, dan RAS) mempunyai topografi yang buruk untuk infrastruktur dan miskin bahan mentah. Pengalihan mineral yang tidak banyak secara teknis sulit dan kebanyakan tidak menguntungkan. Namun, ada potensi energi hidroelektrik tertentu (sekitar 1.100 MW). Sumber daya utama adalah pertanian yang dapat dilakukan di atas sekitar 50% areal negara itu dan bergantung pada 80% penduduk (tahun 1989: 8 juta, pertumbuhan tahunan 3,4%). Suku-suku (Bantu) terpenting adalah Chichewa 50%, Lomwe 14%, Yao 13%, dan Tumbuka 9%. 57% penduduk ber-

agama Kristen, 16% Islam, dan sekitar 20% penganut animisme.

2. Tahun 1891 Inggris mengumumkan *Central Africa Protectorate* (tahun 1907 ganti nama diganti menjadi Njassaland). Tempat ini terutama menjadi penyedia cadangan tenaga kerja murah untuk pertambangan dan perkebunan di Rhodesia dan Afrika Selatan. Tahun 1953 dengan melawan kehendak Afrika Selatan, Malawi bergabung dengan Rhodesia Selatan dan Rhodesia Utara (kini Zimbabwe dan Zambia) menjadi Federasi Afrika Tengah. Tidak lama kemudian gerakan antikolonial *Njassaland African Congress* (NAC) menuntut penghapusan federasi yang didominasi oleh pendatang kulit putih di Rhodesia dan menempatkan Dr. H.K. Banda tahun 1958 (seorang mantan buruh pengembara, lalu studi di AS dan berpraktek sebagai dokter di Ghana) di puncak pimpinan. Di bawah pimpinannya, perlawanan dengan cepat mendapatkan dinamikanya dan mendesak pemerintah kolonial. Akibatnya, diberlakukan situasi darurat, penangkapan para pemimpin partai dan pelarangan NAC. Anggota partai yang tidak ditangkap, sebagai penerus organisasi mendirikan *Malawi Congress Party* (MCP) untuk meneruskan perjuangan NAC, berhasil membebaskan para tahanan dan di bawah pimpinan Banda pada pemilihan umum pertama tahun 1961 berhasil memenangkan 22 dari 28 kursi. Tahun 1963 keluar dari federasi dan mempunyai otonomi sendiri.

Tanggal 6 Juli 1964 negara itu merdeka (lalu dinamakan Malawi) dan dua tahun kemudian memprok-

lamirkan republik presidentil (sebagai negara satu partai) di dalam *Commonwealth* Inggris.

3. Sistem politik sampai sekarang ditandai oleh monopoli kekuasaan MCP dan suborganisasinya (misalnya *Womens League*, terutama *Youth League* yang loyal dan militan)—terutama—kekuasaan Banda yang otoriter dan represif. Sang *Ngwazi* (penyelamat) menyatakan diri sebagai Bapak Bangsa yang disiplin tetapi adil (*Kamuzu knows best*), mendegradasi rapat partai dan rapat nasional menjadi tempat-tempat aklamasi saja. Pada pemilihan umum diumumkan calon yang diajukannya—tidak ada partisipasi.

Sejak tahun 1971 ia telah mengamankan kekuasaannya yang besar melalui UUD (dan mengangkat dirinya sebagai presiden seumur hidup); selain itu kini presiden MCP; perdana menteri; dan menteri luar negeri, pertanian, kehakiman, kekayaan bumi, serta pengadaan dan sektor publik. Kesewenang-wenangan polisi, Liga Pemuda dan dinas rahasia, sensor pers yang ketat, teror terhadap kelompok minoritas (tahun 1974 deportasi Saksi Jehova), larangan mogok untuk serikat buruh serta politik personal-hukuman-upah dalam pemerintahan dan administrasi—semuanya dikendalikan Banda—membasmi setiap embrio perlawanan. Gerakan oposisi (berbagai asal) hanya ada di luar negeri (terutama di Zambia): *Malawi Freedom Movement* (MAFREMO), *Congress of the Second Republic* (CSR), *The Peoples Democratic Party* dan *Socialist League of Malawi* (LESOMA), sayap dalam negerinya

di awal tahun 1982 terpecah sebagai *Malawi Democratic Union*, untuk dapat mengorganisasi perlawanan di dalam negeri.

Tahun 1983 pemimpin oposisi, Dr. A. Mpakati, yang hidup di pengasingan ditembak di Harare dan pemimpin oposisi lainnya, O. Chirwa, diculik di Zambia, dibawa ke Malawi dan bersama istrinya dijatuhi hukuman mati (hukuman belum dilakukan).

Politik luar negeri Malawi sangat berorientasi Barat dan radikal anti-komunis. Satu-satunya negara Afrika yang mempunyai hubungan diplomasi dengan RAS sejak tahun 1971, serta ke Israel dan Taiwan. Kerja sama politik dan ekonomi yang erat dengan elite kulit putih (Rhodesia putih dan Portugis) di Afrika Selatan pada tahun '70-an, menyebabkan Malawi terisolasi sama sekali di Afrika dan OAU. Berlangsung hubungan yang tegang terutama dengan Mozambik, Tanzania, Zimbabwe, dan Zambia. Politik Afrika Selatan mendestabilkan negara garis depan (dalam kasus Mozambik) sangat membantu Malawi karena RENAMO yang kanan dan ditunjang Afrika Selatan sejak tahun 1981 mengizinkan dibagunnya pangkalan. Hal ini menajamkan perang di negara tetangga (1980–1986) dan membawa kerugian sangat besar untuk Malawi. Sebelum tahun 1981, 90% ekspor Malawi dikapalkan di pelabuhan Nacala dan Beira di Mozambik. Tahun 1983 dan 1984 jalur kereta api ke Malawi dihancurkan oleh RENAMO dan tidak diperbaiki dengan alasan ongkos dan keamanan. Pengapalan melalui Port Durban serta jalan memutar melalui

Mozambik yang perlu dilakukan akibat perang, sangat menaikkan ongkos transportasi sehingga harus diimbangi dengan sepertiga hasil ekspor. Malawi sangat dibebani masalah pengungsi. Sampai tahun 1988 dari Mozambik Utara mengalir setengah juta korban perang dan korban lapar ke Malawi Selatan sehingga tidak dapat dicukupi pengadaannya oleh Malawi. Malawi mengusir RENAMO (sama sekali) ketika September 1986 kepala negara Zimbabwe, Zambia, dan Mozambik mengancam akan memblokir semua perbatasan negara itu dan menembakkan rudal. Meskipun ada revisi politik regional (misalnya pengiriman tentara untuk melindungi jalur lalu lintas Mozambik), peran Malawi di kawasan itu mencurigakan. Melalui SADCC sampai kini Malawi terintegrasi ke negara-negara garis depan hanya secara teknis, tetapi sedikit politik. Malawi tetap menjadi anggota SADCC, a.l. dengan perspektif setelah era Banda.

4. Dengan PNB 180 US\$ (tahun 1989, pertumbuhan riil tahun 1965-1989: 1%), Malawi termasuk LLDC, selain itu MSAC, dan LIC. Bidang ekonomi pokok adalah pertanian. Kontribusinya ke PDB adalah 35% (1989) dan sekitar 90% ke ekspor. Komoditas ekspor andalan adalah tembakau (tahun 1985: 43%), teh (23%), dan gula (sekitar 10%). Sekitar 85% hasil pertanian diproduksi oleh petani kecil (mekanisme yang rendah), sebagian besar untuk pasar dalam negeri atau untuk ekonomi subsistensi. Produksi ekspor 75% berasal dari perkebunan (13% areal negara). Pangsa industri terus tumbuh (tahun

1989: 19% PDB), efek kesempatan kerjanya tetap minimal. Impor didominasi barang jadi dan setengah jadi. 38% (1985) impor datang dari Afrika Selatan, 54% (1985) ekspor pergi ke negara-negara ME. Pengusaha terbesar adalah Banda sendiri. Ia memiliki 4.999 dari 5.000 pangsa dalam perusahaan terbesar negara itu, *Press-LTD*, sebuah *holding* dari pabrik bir, perusahaan pers dan tembakau, agroindustri, dan hotel. Ia menginvestasikan keuntungan a.l. untuk objek-objek mercu suar seperti *Kamuzu Academy*.

5. Konsep pembangunan: negara menentukan titik berat politik pembangunan dan politik investasi melalui agen-agen setengah pemerintah dalam sebuah sistem ekonomi yang kapitalis dan terbuka keluar. Melalui rangsangan keuangan dan tata politik (juga dengan imbalan untuk anti-komunisme) Malawi menerima modal asing dalam jumlah sangat banyak dan disambut dengan tindakan-tindakan politik pasar kerja (politik upah murah, larangan mogok). Jadi, jalan pembangunan Malawi bertujuan pemanfaatan maksimal keuntungan ongkos komparatif Malawi: tenaga kerja murah, tanah subur. Pada penilaian konsep pembangunan Malawi ada ketidakpastian. Malawi lama mendapat keberhasilan luar biasa (meskipun rezim Banda layak dikritik). Pertumbuhan PDB tahunan (tahun 1960-1970: 4,9%, tahun 1979-1980: 6,3%, tahun 1980-1989: 2,7%) lama tidak dapat disusul oleh negara berkembang yang setara. Malawi secara tradisional dapat mengadakan kebutuhan sendiri dan meru-

pakan eksportir bahan pangan, hasil dari membantu sektor pertanian (terutama usaha kecil), meluaskan infrastruktur pertanian dan menolak proyek-proyek yang padat modal. Masih belum ada masalah pelarian dari pedesaan dan daerah kumuh (tingkat urbanisasi tahun 1989: 12%), menurut tingkat pemenuhan kebutuhan dasar (fisik) adalah baik. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi riil, rata-rata di tahun '70-an 6,3% turun menjadi 2,4% (1986); sebagian karena pertumbuhan penduduk (3,2%/tahun) yang pesat. Program pencegahan kehamilan tidak menjangkau, tekanan pedesaan sangat besar (ukuran lahan usaha di bawah 1 ha). Malawi termasuk negara pertanian terpadat di huni di dunia. Kini Malawi memiliki tingkat kematian anak nomor empat tertinggi di Afrika (320 dari 1.000 kelahiran); sebab utama adalah kurang makan. 1988 ekspor turun, neraca pembayaran defisit, dan setelah apresiasi mata uang negara, *kwacha*, sebanyak 30%, inflasi naik 22%. Perkembangan ini jelas membebaskan modal sosial. Kesehatan tetap tidak memuaskan (tahun 1989: 47.320 penduduk/dokter). Sistem pendidikan bertujuan membantu kelompok elite. Tidak ada wajib sekolah, berlaku uang sekolah. Kuota penyeskolahan di sekolah dasar adalah 60%, tetapi pada sekolah menengah (yang mahal dan dilakukan dalam bentuk internat) hanya 5% dan di universitas (sampai tahun 1984 bebas uang kuliah) 0,01%.

Tahun 1988 Banda berumur 88 tahun menabukan masalah penggantian. Calon yang terlalu keras suara-

nya, dipecat dari jabatannya, diusir keluar negeri atau meninggal dalam situasi yang mencurigakan. Meskipun demikian muncul tiga nama calon: Cecilia Kadzam, kepercayaan Banda; John Tembo, bendahara MCP dan mitra dagang Banda; Maxwell Pashane, perdana menteri yang terlalu sederhana. Kematian Banda akan meninggalkan vakum politik yang eksplosif.

Kepustakaan: F. Nuscheler, "Malawi", dlm.: Nuscheler/K. Zimmer, *Politische Organisation und Repräsentation in Afrika*, Berlin/New York 1978, hlm. 1197 dst.; C. Lineau, *Malawi, Geographie eines unterentwickelten Landes*, Darmstadt 1981; G. Braun/H. Weiland, "Malawi", dlm.: HDW II, 5, Hamburg 1982, hlm. 342 dst.; D. Lösch, *Markt oder Staat für die Dritte Welt? Wirtschaftssystem und Wirtschaftspolitik in Entwicklungsländern, illustriert am Beispiel der Republik Malawi*, Hamburg 1983; A. Spring, *Agricultural Development in Malawi. A Project for Women in Development*, Boulder (Col.) 1988. bg

Malaysia 1. Malaysia adalah produk buatan penguasa kolonial Inggris di Asia Tenggara. Federasi Malaysia dengan Malaysia Barat dan Malaysia Timur yang terbentuk tahun 1963 meliputi dua daerah yang masing-masing terpisah oleh Laut Cina Selatan dengan jarak 600 km; Semenanjung Malaysia yang merdeka sejak tahun 1957 dan jalur dari barat ke timur di sebelah utara Pulau Kalimantan, di luar kesultanan Brunei yang kaya akan minyak (pemerintahan protektorat Inggris berakhir tahun 1983), yaitu Serawak dan Sabah. Semenanjung Malaysia terletak di sebelah selatan tanah genting Kra di Thailand dan di ujung selatan berhubungan dengan Singapura melalui bendungan kereta api dan jalan raya. Tahun 1963–1965 Singapura juga

merupakan wilayah Malaysia. Malaysia Barat hanya meliputi 40% areal negara (333.400 km²) yang dihuni sekitar 83% penduduk (tahun 1989: sekitar 17 juta jiwa, 2,7 juta di antaranya hidup di Serawak dan Sabah).

Iklim Malaysia adalah tropis-khatulistiwa, dipengaruhi oleh letak pulau dan iklim musim. Temperatur rata-rata adalah 30°C, dengan kelembaban udara rata-rata 82%–86% dan jumlah hujan yang tinggi sepanjang tahun, tidak terputus oleh musim kering.

Separa daratan Malaysia masih tertutup oleh hutan tropis (daerah nomor empat terbesar di dunia). Untuk menghadapi masalah penebangan hutan besar-besaran, terutama di Malaysia Timur (dari sana berasal sekitar 1/4 ekspor kayu keras dunia) yang kelihatannya akan menghabiskan sumber daya dan devisa serta membawa bahaya lingkungan yang besar (→ ekologi), pemerintah sejak tahun 1980 menurunkan kuota ekspor untuk kayu bulat dan memberlakukan larangan ekspor 16 jenis kayu tropis. Sekaligus ada rencana meningkatkan produksi kayu dengan penanaman jenis pohon yang cepat tumbuh. Karena situasi iklim, tanahnya mempunyai kualitas rendah. Untuk pemanfaatan pertanian, hanya cocok untuk tanaman keras dan sawah. Selain potensi tanah yang dimanfaatkan untuk perkebunan yang berorientasi ekspor dengan komoditas andalan karet, kelapa sawit, tebu, nanas, dan kakao, Malaysia memiliki kekayaan tambang. Karena menggunakan politik diversifikasi, Malaysia (1985) merupakan produsen karet terbesar di dunia dan timah (19%) yang

nilainya makin turun, serta kelapa sawit (sekitar 40%). Selain minyak dan gas bumi, bauksit, tembaga dan bijih besi, kayu tropis, hasil-hasil pertanian (terutama lada dan rempah-rempah), dan produk olahan dari zone produksi bebas, Malaysia memiliki sejumlah komoditas ekspor lainnya.

2. Struktur sosio-ekonomi Malaysia sekarang merupakan hasil historis permainan situasi awal ekologi, situasi geografi, kaum pendatang, dan intervensi kekuatan-kekuatan asing.

Kelebatan hutan hujan membatasi pemukiman negara itu secara alami, mula-mula sepanjang sungai dan mempertahankan jumlah penduduk pada tingkat yang rendah. Pertumbuhan penduduk yang berarti baru terjadi dengan kedatangan anggota-anggota etnis asing yang mendesak penduduk asli. Orang asli kini tinggal sekitar 50.000. Arus kaum pendatang (berakhir dengan terjadinya Perang Dunia II), dapat dibagi dalam tiga tahap. Semasa tahap malaysianisasi pertama Kepulauan Melayu zaman dulu yang kini menjadi Indonesia dapat dijelaskan sebagai gerak perpindahan regional, dua tahap berikutnya adalah kedatangan orang Cina (adanya tambang tembaga) dan India (karena perkebunan karet), berkaitan erat dengan penaklukan Malaysia oleh kekuasaan kolonial dan pengaitan sektor ekspor ke hubungan pasar dunia dengan sekaligus mengisi kekurangan tenaga kerja. Tahun 1911 jumlah penduduk Cina telah mencapai 30%, India sekitar 10%, kira-kira sepadan dengan jumlah sekarang. Jumlah orang Melayu sebagai etnis penduduk

terbanyak, menurut sensus penduduk tahun 1980, makin meningkat (59%), sementara itu, penduduk asli dengan alasan politis juga dimasukkan dalam kelompoknya.

Antara tahun 1970-1980 penduduk Malaysia naik 34%. Pertumbuhan penduduk tahunan (tahun 1980-1989: 2,6%) turun lambat. Dengan situasi keterbatasan pasar dalam negeri sebagai kendala pokok untuk pertumbuhan ekonomi menyeluruh, pemerintah kembali mempropagandakan keluarga beranak banyak. Struktur umum ditandai oleh jumlah remaja yang tinggi (tahun 1989: 37,8% di bawah 15 tahun), tingkat harapan hidup adalah 70 tahun (1989) cukup tinggi. Karakter pertanian Malaysia yang jelas berlaku, tercermin dalam tingkat urbanisasi yang relatif kecil (4,9%/ tahun): sekitar 38% penduduk hidup di daerah perkotaan yang berpenduduk di atas 10.000 jiwa; ibu kota Kuala Lumpur dan daerah sekitarnya dibandingkan ibu kota di Asia Tenggara lainnya hanya berpenduduk sedikit, sekitar 1 juta orang.

3. Struktur sosial Malaysia ditandai oleh identitas keanggotaan etnis dan kesempatan kerja (orang Melayu sebagai produsen kecil beras dan karet, orang Cina dan India di pertambangan timah dan perkebunan), sampai kini hanya sebagian yang mengalami perubahan. Dengan demikian, di pedesaan hidup lebih dari 80% orang Melayu yang sebagian besar hidup di bawah batas kemiskinan, tetapi di sana hanya sekitar 40% orang Cina. Meskipun pendapatan di antara kelompok etnis sangat tidak sama, tidak ada kesadaran kelas. Jalur

konflik masyarakat berlangsung antaretnis, masing-masing memiliki bidang kehidupan sosio-kultural sendiri. Berdasarkan perbedaan struktur norma, bahasa, dan agama sangat berbeda satu sama lain (komunalisme), dan jarang terjadi asimilasi masyarakat. Islam memang agama negara, tetapi masyarakat bebas beragama (Buddha, Hindu, Kristen) dijamin dalam UUD. Di bidang pendidikan dasar yang dibangun baik diberikan pelajaran dalam bahasa Melayu, Cina, dan Tamil. Masa yang akan datang, bahasa Malaysia sebagai bahasa nasional akan menggantikan bahasa Inggris sebagai bahasa pelajaran di sekolah lanjutan dan universitas. Karena politik melayunisasi ini, dilarang pendirian sebuah universitas berbahasa Cina.

4. Dengan pendapatan yang intern sangat tidak seimbang, PNB rata-rata Malaysia 2.160:US\$ (1989) per kapita-tertinggi kedua setelah Singapura di ASEAN-termasuk NIB. Pertumbuhan ekonomi riil yang tinggi tahun '70-an (sekitar 8%/tahun) tidak dapat dicapai di paro pertama tahun '80-an, terutama karena resesi pasar dunia dan kejatuhan drastis harga bahan mentah (*terms of trade*: tahun 1980: 100; tahun 1986: 64). Untuk tahun 1988 diperhitungkan pertumbuhan ekonomi akan 4% (tahun 1987: 15%) karena harga bahan mentah yang naik kembali. Dengan demikian, struktur ekonomi Malaysia mencerminkan ciri khas keterbelakangan: ketergantungan yang ekstrem dari ekspor bahan mentah yang hampir tidak diolah di dalam negeri; dominasi sektor primer (pertanian dan per-

tambangan) yang menyerap hampir separo angkatan kerja, kini menurun dengan menguntungkan sektor produksi perdagangan (tahun 1984: 38% PDB), 90% berlangsung di Malaysia Barat. Perubahan pembangunan sektor industri dari orientasi sejak tahun '70-an ke substitusi impor menjadi industrialisasi ekspor dengan bantuan sejumlah rangsangan negara untuk modal asing (misalnya pembangunan 'zone produksi bebas), terbatas pada barang konsumsi, elektronika, tekstil, pengolahan kayu; pembangunan sebuah industri kendaraan bermotor sedang dilakukan. Pada tingkat inflasi yang rendah seperti sebelumnya (tahun 1980-1986 rata-rata 1,4%) karena masalah ekonomi, sesuai dengan kegiatan investasi negara yang meningkat, meningkat juga utang luar negeri (beban utang tahun 1970: 1,7% dan tahun 1986: 8,7% dari PNB); pengangguran naik (pada perbedaan regional yang ekstrem) menjadi 9,1% (1987).

5. Malaysia terdiri atas 13 negara bagian (di antaranya 9 kesultanan, 2 teritorial negara bagian) dengan pemilihan monarki parlemen dan sistem legislatif dua kamar (anggota *Commonwealth*), secara politis dikuasai oleh persekutuan elite dari tiga etnis. Struktur politik ini paling tidak menjamin adanya wakil formal dari semua etnis yang hidup di negara itu, mempunyai landasan kompromi kekuasaan yang dirundingkan dengan penguasa kolonial Inggris, yaitu jaminan hak-hak istimewa orang Melayu (bumiputra) yang tertanam dalam UUD, dengan demikian jelas mempunyai posisi pimpinan politik

yang tetap tidak dapat dijamah, meskipun sebagai tandingannya ada posisi orang Cina yang secara ekonomi relatif kuat. Rumus ini terjadi setelah perang gerilya antikelonial yang dilakukan oleh *Malayan Communist Party* (MCP) dalam periode yang disebut *emergency* (1948-1960), berhasil ditindas. Sekaligus gerakan buruh yang kuat dan terutama terdiri atas buruh Cina yang membentuk basis MCP dan merupakan faktor kekuatan politik dalam negeri Malaysia, berhasil dipatahkan. Dengan demikian terbuka jalan untuk gabungan birokrat Melayu yang bergabung dalam *Malayan National Organization* (UMNO) dan pedagang Cina yang mengorganisir diri dalam *Malaysian Chinese Association* (MCA). Bersama dengan *Malaysian Indian Congress* (MIC) mereka membentuk aliansi tahun 1974 yang diperluas oleh beberapa partai oposisi menjadi front nasional (*Barisan Nasional*). Koalisi dalam parlemen masing-masing memiliki mandat lebih dari 2/3. Kesinambungan persekutuan elite ini, secara formal diabsahkan melalui pemilihan, sangat dibantu oleh politik yang represif dan diskriminatif terhadap serikat buruh dan partai-partai oposisi melalui *Internal Security Act*. Ancaman berbahaya dari persekutuan kekuasaan ini adalah kerusuhan rasial setelah pemilihan, Mei 1969. Sebagai reaksi terhadap situasi nyata kehidupan sebagian besar penduduk pedesaan dan perkotaan yang terus memburuk, Partai Islam (PI) dan partai oposisi Cina *Democratic Action Party* (DAP) berhasil mendapatkan banyak suara. Setelah terjadi dua tahap situasi

darurat, negara menjawab ancaman terhadap kekuasaannya ini dengan sebuah konsep pembangunan baru, *New Economic Policy* (NEP), yang diimplementasikan dengan awal, *Malaysian Plan*, kedua (1971-1975). Kerusuhan rasial membentuk momen historis untuk sebuah kelompok di dalam UMNO yang sejak lama menuntut kekuasaan politik orang Melayu atas negara. Kenyataan bahwa M. Mahathir dan Musa Hitam memimpin kritik terhadap politik mantan Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman, yang mula-mula dikeluarkan dari partai dan sejak tahun 1981 menjadi perdana menteri, wakil perdana menteri, dan pimpinan partai, jelas menandai kelangsungan pertukaran elite dari elite partai yang aristokrat menjadi berorientasi kapitalis. Karena NEP secara drastis berbalik dari politik *Laissez-faire* negara melalui formulasi tujuan politik dan pembagiannya sendiri: menyingkirkan kemiskinan absolut dan pemerataan kekayaan produksi sampai tahun 1990 berdasarkan: Melayu (30%), orang Malaysia lainnya (40%), dan luar negeri (30%). Instrumen pokok kuota andil modal dan kesempatan kerja NEP untuk Melayu, peningkatan pangsa pemilikan Melayu melalui pembangunan perusahaan negara. Tahun 1982 kepala pemerintah Mahathir yang terpilih kembali tahun 1986 (koalisi pemerintah Barisan Nasional pada pemilihan parlemen mendapatkan 148 dari 177 kursi) memperpanjang NEP sampai di atas (1990). Mahathir dituduh menajamkan konflik etnis melalui politik berat sebelah yang menguntungkan penduduk Me-

layu, makin banyak korupsi dan salah pelaksanaan ekonomi, serta gaya kepemimpinannya yang otoriter. Dengan demikian Mahathir dalam pemilihan intern UMNO April 1987 dengan suara pas-pasan tetap berhasil menjadi ketua partai dan kepala pemerintahan. Akhir tahun 1987 karena terus berlangsung konflik antara Melayu dan Cina ia bersikap keras terhadap kritikus pemerintah (penangkapan, larangan rapat, pembredelan sejumlah koran). Atas dorongan kekuatan-kekuatan oposisi di dalam UMNO maka partai dikatakan ilegal oleh pengadilan tertinggi tanggal 5 Februari 1988 (pemilihan pengurus melanggar UU). Ketika partai baru yang didirikan Mahathir (ia tetap menjadi kepala pemerintahan), UMNO Baru, tidak mencapai jumlah suara yang dibutuhkan, ia a.l. menghapuskan kewenangan pengadilan, menginterpretasikan UU, dan menguji kemampuan UUD, secara praktis mengangkat dan menurunkan hakim tertinggi. Memang Mahathir dapat keluar sebagai yang terkuat dari situasi ini, tetapi pertikaian dengan kekuatan oposisi terus berlangsung. Selain itu, kesenjangan yang makin tumbuh antara elite bumiputra Melayu di daerah perkotaan, terutama petani Melayu yang hidup dalam situasi miskin absolut yang tidak mendapatkan hasil dari NEP, terus meningkatkan potensi konflik di Malaysia.

Kepustakaan: J.D. Purcell, *Rice Economy, Employment and Income in Malaysia*, Honolulu 1971; P.P. Courtenay, *A Geography of Trade and Development in Malaya*, London 1972; M. Amin/M. Caldwell, *Malaya. The Making of a Neo-Colony*, Nottingham 1977; R.S. Milne/D.K. Mauzy, *Politics and Government in Malaysia*, Singapura 1978; W. Senfleben, *Background to*

Agricultural Land Policy in Malaysia, Wiesbaden 1978; B. Andaya/L. Andaya, *A History of Malaysia*, London/Basingstoke 1982; D. Snodgrass, *In-equality and Economic Development in Malaysia*, Oxford 1982; V. Kasch, "Malaysia", dlm.: *HDW II*, 7, Hamburg 1983, hlm. 386 dst.; *ibid*, *Agrarpolitik in Malaysia. Zur Rolle des Staates im Entwicklungsprozess*, Baden-Baden 1984; K.A. Pretzell, "Malaysias 5. Entwicklungsplan und der 6. Entwicklungsplan Thailands. Vergleichende Notizen", dlm.: *Südostasien aktuell*, 1, 1987, hlm. 70 dst. vk/bh

Mali 1. Seperempat wilayah keseluruhan: 1.204.000 km² Republik Mali (sampai tahun 1960: Sudan-Perancis) berada di Gurun Sahara, sementara lebih dari separo negaranya yang sebagian merupakan pegunungan dan sebagian dataran rendah, merupakan padang rumput dan semak.

2. Kepadatan penduduk di sebelah selatan Mali 100 kali lebih besar daripada di daerah utara, tempat hidup berpencar suku nomad "putih" (Tuareg, dan beberapa Tuareg Mauren). Karena pemerintah Mali memakai bencana musim kering di awal tahun '70-an untuk membalas dendam atas pemberontakan orang Tuareg tahun 1963/1964, dengan cara tidak memberikan bantuan, jumlah orang Tuareg kurang 7% (di tahun '70-an) dari perkiraan 8 juta penduduk Mali tahun 1989 (pertumbuhan tahunan 2,5%), akibat kematian "alami" dan eksodus massal ke Niger. Suku Peul yang dulu juga nomad (Fulbe, lebih dari 10%) kini menjadi peternak bermukim; bercocok tanam sebagian besar dilakukan oleh 1/4 penduduk dari suku-suku Mande (Bambara, Malinke, Sarakole, Diula, dsb.), Songhai, Senufo, dll. Struktur masyarakat lama yang berubah dengan sangat lambat, terhierarki sa-

ngat ekstrem pada kebanyakan etnis: sampai masa kolonial budak, kasta (bergantung profesi) seperti tukang besi dan pengamen, orang bebas (mayoritas penduduk: petani dan pedagang yang juga mempunyai pengaruh politik), bangsawan. Meskipun ada perpindahan ke perkotaan selama musim kering di Sahel, akhir tahun '80-an, 80% penduduk masih hidup di pedesaan. Sementara bahasa resmi Perancis dimengerti oleh 10% penduduk (65% Islam, sisanya sebagian besar animis), Bambara dan Arab adalah bahasa sehari-hari.

3. Jalan pembangunan sosialis (a.l. politik kolektivisasi di pertanian, pendirian BUMN-BUMN yang tidak rentabel) yang dipropagandakan *Union Soudanaise Rassemblement Democratique Africain* (US-RDA) sebagai rezim satu partai di bawah Modibo Keita, menemui kegagalan setelah pecahnya federasi dengan Senegal yang hanya berlangsung dua bulan sejak September 1960. Tahun 1967 Mali kembali ke Franc-Zone dalam situasi parah, yang ditinggalkan tahun 1962 oleh pemerintahan Keita untuk memenangkan politik dalam negeri (terutama terhadap kaum pedagang) dan ruang gerak politik luar negeri yang lebih besar. Rezim militer (→ rezim otoriter) di bawah Presiden Moussa Traore (1968) juga mempunyai tujuan terlalu tinggi: rencana ekonomi terpenuhi hanya 50%; di atas 90% dibiayai luar negeri. Pembangunan ekonomi mendapat kesulitan karena letaknya (→ negara pedalaman) yang tanpa pantai (barang impor menjadi makin mahal sekitar 50%

karena ongkos transpor) dan buruknya infrastruktur lalu lintas.

Tulang punggung ekonomi adalah sektor pertanian (tahun 1976: 60% PDB, tahun 1989: 50%); meskipun harga kapas jatuh sampai 50% di dua tahun terakhir, tahun 1987 tetap membawa hasil ekspor 41%. Masa depan komoditas ekspor terpenting kedua (kacang tanah) suram karena menghadapi saingan produsen kacang kedelai Asia. Pusat politik pertanian negara masa depan adalah pengaturan baru perairan (pembangunan sebuah bendungan untuk meluaskan lahan pertanian) serta perluasan perkebunan pohon karet-akasia yang ditunjang karena alasan ekologi (melawan perluasan padang pasir ke selatan, → desertifikasi) dan perdagangan. Berlangsungnya bencana musim kering tahun '70-an dan '80-an karena kurang air dan kurang padang rumput; ternak yang dulu meliputi 5,3 juta sapi, 11,2 juta kambing dan domba, 220.000 unta, dan 145.000 kuda, turun sekitar 80%, yang memaksa banyak orang nomad untuk bermukim sehingga menimbulkan masalah dan konflik baru. Industri yang tidak berkembang (pangsa dalam PDB tahun 1989: 12%) terutama bertitik berat pada pengolahan hasil-hasil pertanian, hampir 3/4 terkonsentrasi di sekitar ibu kota Bamako (tahun 1988: 650.000 penduduk) dan semuanya dimiliki negara. Pembangunan mendapat saingan sektor informal yang jumlahnya pada kegiatan ekonomi diperkirakan 50%. Setelah kegagalan usaha penyehatan sektor negara tahun 1979 (60% pengeluaran negara untuk gaji pegawai negeri) dan kenaikan

pesat utang luar negeri (tahun 1987: 101% PDB, beban utang 43% dari hasil ekspor, pangsa bantuan keuangan pada PDB 30%), pemerintah harus tunduk pada tuntutan Bank Dunia dan IMF untuk melakukan reformasi struktur secara mendasar dan melikuidasi atau menswastanisasi lebih dari 80% perusahaan negara, yang mau tidak mau menyebabkan terjadi pemecatan. Ada kekayaan tambang (bauksit, mangan, bijih besi, uran), tetapi belum dimanfaatkan. Tahun '80-an dimulai penambangan emas dalam jumlah sedikit. Di sektor perdagangan luar negeri yang kronis defisit (penutupan impor melalui ekspor: 53,7%), Perancis sampai kini tetap merupakan pemasok dan penerima terpenting, diikuti oleh Pantai Gading dan Belgia.

4. Politik luar negeri Mali berhaluan nonblok. Politik dalam negeri tahun '70-an adalah melakukan resivilisasi perlahan, yang menyebabkan penerimaan UUD tahun 1974 dan pembentukan partai kesatuan *Union Democratique du Peuple Malien* tahun 1979 (UDPM; Sekretaris Jenderal: Presiden Traore). Sejak itu, secara teratur dilakukan pemilihan presiden dan parlemen (dengan daftar UDPM dan 99,9% hasil). Maret 1991 kekerasan berdarah di Mali menjatuhkan Presiden M. Traore dan digantikan Letkol. Amadou Saomani Toure yang berjanji akan menyerahkan jabatan pada presiden terpilih dalam pemilu tahun 1992. Usaha kudeta berikutnya bulan Juli 1991 berhasil digagalkan.

Kepustakaan: R. Meyer, *Mali - Demokratisierung und ihre gesellschaftspolitischen Grundlagen*, Bonn 1980; H.K. Barth, *Mali: eine*

geographische Landeskunde, Darmstadt 1986; D. Cissoko, *La fonction publique en Afrique noire: le cas du Mali*, Rouen 1987; A. Gaudio, *Le Mali*, Paris 1988; Die Welt, "Blutige Unruhen überziehen Afrika", dlm.: *BMZ-Spiegel der Presse*, 21/91, hlm. 661.

kz

Malvinas → Konflik Falkland/Malvinas.

Mandela, Nelson Rolihlahla Lahir 18 Juli 1918 di dekat Umtata di Transkei. Setelah lulus sekolah masuk Fort Hare University College, tempat pertama ia mengembangkan minat politik dan berteman dengan pemimpin ANC, Oliver Tambo. Karena ikut dalam aksi mogok mahasiswa (1940), ia dipecat dari universitas dan melanjutkan studi di Johannesburg. Tahun 1944 bersama Sisulu dan Tambo, ia mendirikan *African National Congress League* dan menjadi presiden (1950). Tahun 1952 Mandela bersama O. Tambo membuka praktek pengacara kulit hitam pertama di Afrika Selatan. Dalam tahun yang sama ia ditangkap dengan tuduhan melakukan kegiatan komunis dan ditangkap lagi tahun 1956 bersama pemimpin politik lainnya. Setelah perundingan selama empat setengah tahun, ia dibebaskan (1961). Setelah keluar dari tahanan, Mandela bergerak di bawah tanah dan mendirikan sayap militan ANC (*Umkhonto we Sizwe*). Tahun 1962 ia meninggalkan Afrika Selatan secara diam-diam, muncul dalam *Pan African Freedom Movement Conference* di Addis Ababa, mendapatkan pendidikan gerilya di Aljazair dan bertemu dengan oposisi buruh di London. Kembali ke Afrika Selatan ditangkap dengan tuduhan secara ilegal meninggalkan Afrika Selatan dan dipenjara selama 5 tahun.

Pembongkaran kantor pusat ANC yang rahasia semasa ia dipenjara dan penemuan dokumen-dokumen revolusioner, menyebabkan ia didakwa pengkhianat (1963). Tanggal 12 Juni 1964 Mandela bersama 7 terdakwa lainnya dihukum seumur hidup dan dibawa ke penjara di Robben Island. Ia dipenjara sekitar 27 tahun. Mandela menjadi simbol perlawanan orang kulit hitam di Afrika Selatan. Sejak tahun 1982 pendirian, *Release Mandela Campaign* menuntut seruan nasional dan internasional yang tidak terhitung banyaknya untuk pembebasan Mandela. Desember 1988 setelah Mandela sembuh dari sakit paru-paru, ia ditempatkan di penjara di Kapstadt. Mandela dibebaskan 2 Februari 1990.

ajh

Mano-River-Union (MRU) Organisasi yang didirikan tahun 1973 oleh Sierra Leone dan Liberia untuk menunjang kerja sama ekonomi. Kedudukan: Freetown (Sierra Leone). Tahun 1980 Guinea masuk. Tujuannya adalah membangun sebuah uni bea. Tahun 1981 perjanjian mengenai perdagangan antarnegara. Karena kesulitan keuangan dan ketegangan politik di antara negara anggota, MRU menjadi tidak ada arti di tahun-tahun terakhir.

fn

manpower approach → ekonomi pendidikan.

Mao Tse-tung Lahir 26 Desember 1893 di desa Shao Shan di propinsi Hunan sebagai anak petani. Setelah mendapat pendidikan sebagai guru sekolah dasar (saat itu ia berkenalan dengan Liu Shao-chi), tahun 1918 ia pergi ke Peking dan bekerja sebagai pustakawan pembantu di universitas

(bertemu dengan Chou En-lai dan Deng Siao-ping). Ia bergabung dengan kelompok yang memperjuangkan Revolusi Bolsewik di Cina dan tahun 1921 menjadi anggota pendiri Partai Komunis Cina. Setelah kegagalan taktik Komintern untuk bekerja sama dengan *Kuomintang*, Mao menjadi yakin bahwa revolusi seharusnya adalah revolusi petani; ia makin diterima dalam partai. Tahun 1931 ia memproklamkan Dewan Republik Cina pertama di daerah pegunungan Chingkangshan. 15 Oktober 1934 bersama sekitar 5.000 pejuang dan keluarganya mematahkan pengepungan Dewan Republik oleh *Kuomintang* dan melakukan *long march* yang terkenal. Sekitar 23.000 manusia ikut dalam tiga tentara front; praktis berlangsung perang tidak terputuskan melawan *Warlords* dan *Kuomintang* hampir dua tahun dan berjalan lebih dari 12.000 km. Di propinsi Shansi di Sungai Yennan, Mao mendirikan Dewan Republik Kedua, yang pendiriannya merupakan landasan reformasi pertanian dan pembangunan usaha-usaha industri kecil. Di masa Yennan, Mao menulis (1937) "Mengenai Kontradiksi dan Mengenai Praktek"; landasan teoretis untuk interpretasi marxismenya. Setelah kehancuran Jepang dan kemenangan dalam perang saudara, Mao (1 Oktober 1949) memproklamkan Republik Rakyat Cina. Mao dengan sejarah dan masa depannya ditandai oleh reformasi pertanian (1949), "Kampanye 100 Bunga" (1956), "Langkah Besar ke Depan" (1958), pemutusan hubungan ke Uni Soviet (1960), terutama Revolusi Kebudayaan (1966). Mao me-

ninggal 9 September 1976 dalam usia 83 tahun.

rs
marjinalitas Pengertian marjinalitas pertama-tama ditujukan ke sektor-sektor penduduk yang mengalami kelangsungan pelarian dari pedesaan dan industrialisasi di daerah miskin di periferi (pinggiran) kota-kota besar (*callampas, favelas, poblaciones, villas miserias, perkampungan kumuh*). Di tahun '60-an istilah ini makin sering dipakai untuk "sektor-sektor penduduk yang jika dibandingkan kelompok masyarakat lainnya, secara struktural tersingkir dari hubungan kerja yang stabil pada produktivitas dan pendapatan yang memadai" (A. Cordova 1973, hlm. 13 dst.). Penentuan definisi ini menganggap bahwa penyebab marjinalitas adalah kurang mampunya ekonomi-ekonomi negara berkembang menyerap tenaga kerja lokal, sebagai akibat ketergantungan negara berkembang pada pasar dunia. DESAL/*Centro para el Desarrollo Economico y Social de America Latina*/Pusat Pembangunan Sosial Ekonomi Amerika Latin (1967) mengerti marjinalitas sebagai tidak adanya partisipasi aktif (keikutsertaan dalam proses pengambilan keputusan) dan pasif (tidak mendapatkan hasil sosial) karena desintegrasi internal, atomisasi, dan kekurangan solidaritas dari sektor-sektor yang bersangkutan. Dalam teori *dependencia* kelompok yang termarjinalisir adalah kelompok penduduk yang terisap di kota dan desa. A. Cordova membedakan tiga tipe marjinalitas: a. kelompok penduduk yang hidup dalam situasi pra-kapitalis: semua jenis pekerjaan yang tidak dibayar, terutama pertanian

dalam ekonomi subsistensi; b. penduduk yang bekerja tidak atau di bawah kualifikasi yang dimilikinya, serta tidak terintegrasi dalam proses produksi; c. tenaga kerja yang telah terintegrasi, lalu terlempar keluar dari proses produksi. Ketiga tipe itu tampak cocok untuk menjangkau berbagai situasi marjinalitas dalam dimensi ruang dan waktu.

Pembedaan lainnya adalah marjinalitas relatif (berdasarkan penindasan ras, politik, sosial, dan kultural) dan absolut (pemotongan akses yang ada ke pendapatan yang cukup dan stabil). Marjinalitas absolut memperlihatkan analisis dan reformasi mekanisme akibat eksogen, yang menghindarkan akses sektor-sektor penduduk luas memperoleh pendapatan yang cukup, akibat keterbatasan struktural alat produksi yang tersedia. Kepustakaan: DESAL, *Marginalidad en América Latina. Un ensayo de diagnóstico*, Santiago de Chile/Barcelona 1969; A. Cordova, *Strukturelle Heterogenität und wirtschaftliches Wachstum*, Frankfurt 1973; V. Beinholt-Thomsen, "Marginalität in Lateinamerika - Eine Theoriekritik", dlm.: *Lateinamerika, Analysen und Berichte* 3, 1979, hlm. 45-85; D. Nohlen/F. Nuscheler, "Was heisst Unterentwicklung", dlm.: *HDW II, 1*, Hamburg 1982, hlm. 25-47.

dn

Maroko 1. Dengan sekitar 458.730 km² dan akan 710.850 km² jika termasuk bagian utara Sahara Barat yang dianeksi (karena garis perbatasan yang tidak jelas dengan Aljazair). Setelah Tunisia, Maroko merupakan negara terkecil di Afrika Utara. Namun, dengan 25 juta penduduk (1989) termasuk negara terpadat kedua setelah Mesir di antara negara-negara Arab. Sebagian besar Maroko berbentuk pegunungan. Daerah

utara dan tengah Maroko mendapatkan banyak hujan dan memiliki iklim yang sejuk, di sebelah selatan iklim gurun, dan daerah timur Maroko, di daerah bayangan hujan Pegunungan Atlas, jelas memperlihatkan iklim kering. Maroko memiliki kekayaan mineral yang besar, terpenting adalah fosfat (50% cadangan dunia), besi, mangan, seng, kobalt, garam, tembaga, serta ladang minyak dan gas bumi. Bahan mentah diekspor karena tidak ada kemungkinan pengolahan sendiri, dengan demikian (terutama fosfat mentah) menjadi penghasil devisa terpenting. Seperti sebelumnya, yang terpenting adalah pertanian antara tahun 1975-1987 memberikan kontribusi rata-rata 20% ke PDB dan mempekerjakan 46% (1987) angkatan kerja. Sekitar 70% penduduk bergantung pada pertanian karena keluarga yang besar dan situasi kesempatan kerja kurang yang kronis. Lahan pertanian keseluruhan Maroko (tahun 1986: 84.000 km²) terdiri atas sekitar 40% perladangan, 65% padang rumput, dan 5% tanaman keras (buah sitrun, pohon amandel, zaitun, ladang sayuran) yang sangat penting untuk ekspor.

2. Karena pertumbuhan tahunan tinggi (tahun 1989: 2,6%), penduduk Maroko sejak merdeka naik lebih dari dua kali lipat (tahun 1951/1952: 9,81 juta penduduk). Kepadatan penduduk berkurang dari daerah pantai ke pedalaman. Lebih dari 2/3 penduduk hidup di atas 1/10 areal tanah. Urbanisasi (tahun 1989: 47%) mengakibatkan munculnya daerah-daerah kumuh yang besar, terutama di pinggiran Casablanca dan Rabat, tempat

yang diperkirakan 800.000 manusia tidak mempunyai rumah. Kota terbesar di Maroko adalah Casablanca dengan penduduk di atas 2,5 juta, lalu ibu kota Rabat dengan 1 juta penduduk (termasuk Sale, 1987). Kenaikan penduduk yang pesat makin dipercepat dengan infrastruktur kedokteran yang relatif baik. Jumlah penduduk yang diliput oleh statistik sedikit dalam jumlah absolut dan relatif: tahun 1982: 6 juta, tahun 1985: 6,7 juta (30% penduduk). Khas untuk struktur kesempatan kerja adalah sedikitnya jumlah perempuan (tahun 1985: 1,3 juta) yang bekerja, seperti biasa di negara-negara Arab. Tingginya pengangguran (diperkirakan sekarang 15% dari angkatan kerja) mendorong imigrasi pekerja (sekitar 1 juta), terutama ke Perancis dan Libia. Komposisi etnis memperlihatkan jelas lapisan dasar kelompok Barbar karena lebih dari 40% penduduk adalah orang Barbar asli. Pengaruh invasi Arab pada abad ke-7 dan 11 terlihat dalam jumlah orang Arab atau Arabo-Barbar yang meliputi 50% dari seluruh penduduk. Bahasa yang dominan adalah bahasa Arab (70% penduduk). Jumlah pendatang Eropa (sebagian besar Roma-Katolik, jumlah tahun 1952: 0,5 juta = 5,2% penduduk) yang datang semasa protektorat Perancis, berkurang drastis setelah Maroko merdeka, pengaruh ekonomi juga turun terus. Jumlah orang asing yang diregistrasi tahun 1986 adalah sekitar 60.000. Orang Maroko hampir semuanya Suni-Malik (Islam adalah agama negara).

3. Ekonomi Maroko setelah merdeka ditandai oleh pertentangan ta-

jam sektor (pertanian) tradisional dan modern, meskipun sejak tahun 1956 (terutama intensif sejak tahun 1973) kekuasaan asing atas sektor modern didesak oleh marokonisasi. Proses ini berisi pembagian tanah pertanian yang dimanfaatkan oleh *colons* asing pada pedagang kota yang setia kepada raja dan borjuis pertanian di pedesaan (muncul sejak tahun 1956), selain tentara yang absolut loyal kepada raja, merupakan penopang sistem kekuasaan. Struktur sosio-ekonomi tidak berubah karenanya, malah mengokohkan stagnasi ekonomi Maroko. Sektor pertanian tradisional dengan lebih dari 1 juta minifundia sampai sekarang hampir tidak dimodernisasi karena bangsawan tanah sebagai wali tanah suku kolektif atau sebagai pemilik tanah menyabot demokratisasi pengambilan keputusan dalam produksi dan pembentukan koperasi, tetapi di pihak sendiri mendapatkan keuntungan dari semua reformasi pertanian.

Dengan awal rencana pembangunan tahun 1960—dibangun dengan basis yang ditinggalkan Perancis—diinginkan industrialisasi yang cepat dengan pangsa negara yang besar. Kegiatan negara yang diinginkan pemerintahan Ibrahim ditolak oleh borjuasi pertanian (raja merupakan pemilik tanah dan industri terbesar di Maroko), yang lebih mengutamakan investasi swasta. Konsep industrialisasi rencana pembangunan pertama sampai tahun 1973 tetap tidak ada artinya, sebagai akibat pertumbuhan pengangguran dan kekurangan investasi industri swasta sehingga membuat industrialisasi kembali menjadi

tujuan rencana teratas. Rencana pembangunan lima tahun mengandung investasi sejumlah 26,3 miliar Dirham, 37% di antaranya untuk industri. Tingkat hidup penduduk perkotaan dan pedesaan meskipun ada pertumbuhan pendapatan per kapita (tahun 1989: 880 US\$) sama sekali tidak membaik sejak awal rencana ekonomi karena inflasi yang kuat dan monopoli surplus produksi oleh lapisan penguasa. Secara politis kesengsaraan ini tercetus dalam krisis setelah tahun 1970 (percobaan pembunuhan terhadap raja tahun 1971/1972 dan 1973). Angka-angka statistik memperlihatkan stagnasi ekonomi terutama dalam sektor pertanian yang padat karya dengan produksi pangan per penduduk (pada ketidakstabilan mutlak produksi) terus turun sehingga membutuhkan makin banyak impor. Industri (pangsa yang tinggi oleh modal asing ditujukan untuk pemanfaatan tenaga kerja murah atau keuntungan komparatif lainnya), tumbuh tahun 1960–1968 sebesar 5%/tahun, dalam rangka paksaan industrialisasi indeks produksi naik pesat dari tahun 1970 (100) sampai tahun 1977 (155), tetapi kenaikan ini menjadi lambat karena beban perang Sahara Barat, jika dilihat tahun 1978 (100) indeks tahun 1986 adalah 120 (lihat juga tabel lampiran). Aneksi Sahara (→ Sahara Barat) dan pertarungan yang menelan ongkos tinggi melawan gerakan pembebasan POLISARIO yang beroperasi di sana, telah memburukkan situasi ekonomi Maroko sejak tahun 1977 dan menyebabkan terjadi utang (1987) yang berjumlah sekitar 16 miliar US\$ (sesuai 350% ekspor tahun

1987). Dengan sebuah program darurat (1978–1980) Maroko berusaha mengatasi perkembangan ini dan menyehatkan ekonomi untuk rencana pembangunan ekonomi kedua tahun 1981–1985 (volume investasi: 110 miliar Dirham). Tidak adanya kesediaan investasi swasta (69% investasi diharapkan dibiayai sektor swasta) dan situasi ekonomi yang buruk secara umum (a.l. tercermin dalam kerusuhan berdarah tahun 1981/1982 di Casablanca) menyebabkan rencana hanya terpenuhi sebagian. Tindakan-tindakan penyehatan yang dilakukan tahun 1983/1984 atas tekanan IMF (a.l. peningkatan harga yang ditetapkan negara untuk bahan pangan dasar), sebagian besar dihapus setelah terjadi revolusi roti, tetapi kembali mengalir ke program penyehatan tahun 1986–1988 dalam bentuk yang sudah dimodifikasi. Rencana baru tahun 1988–1992 adalah investasi setinggi 205 miliar Dirham dengan titik berat sektor pertanian. Kemungkinan dari akhir konflik Sahara Barat tahun 1989 akan membantu mencapai lebih banyak tujuan rencana.

4. Setelah merdeka, banyak orang Perancis dan Spanyol keluar dari Maroko (terutama guru, teknisi, dokter) sehingga dalam jangka pendek memburukkan situasi pendidikan dan kesehatan (situasi ekonomi umumnya). Wajib sekolah umum mulai berlaku setelah tahun 1963. Menurut perkiraan tahun 1979 hanya 30% dari usia 6–13 tahun yang bersekolah, tahun 1984 menjadi 63%. Kuota buta aksara dengan 70% relatif tinggi. Pengadaan sarana pendidikan ditandai oleh disparitas regional yang

kuat, sebuah struktur yang juga merupakan ciri bidang kesehatan. Perbandingan dokter-penduduk tahun 1976 mencapai 1 : 12.400 seperti tahun 1965 dan 1985 adalah 1 : 6.200. Standar kesehatan minimal di pedesaan dan daerah kumuh perkotaan seperti sebelumnya menyebabkan tingginya angka kematian anak. Disparitas pendapatan yang sangat tidak seimbang pada semua upah yang rendah, menyebabkan banyak orang Maroko kekurangan kalori (→ pangan).

5. Berdasarkan perjanjian yang disepakati dengan Perancis November 1955 (Maroko merdeka 2 Maret 1956), Sultan Muhammad V melembagakan sistem kekuasaan dengan kekuasaan monarki absolut. Kekuasaan ini-meskipun ada janji verbal demokratisasi dalam *Charte Royale* tahun 1958-sampai kini tertanam dalam semua UUD Maroko (tahun 1961, 1962, 1970, 1972, yang dimodifikasi tahun 1980). Kekuasaan bertopang pada lapisan sosial yang didominasi kaum borjuis pertanian, pemerintah yang tunduk kepada raja, dan tentara yang loyal. Memang raja tunduk pada tekanan kekuatan-kekuatan politik yang berhasil memerdekakan Maroko tahun 1956, baik bersenjata maupun melalui aksi-aksi lainnya, dan merampas pemilihan beberapa elite pedesaan yang jelas berkolaborasi dengan penguasa kolonial Perancis-Spanyol, tetapi raja juga mencegah bahwa kekuatan-kekuatan antikolonial menggantikan Perancis dan Spanyol dalam aparat pemerintahan, dan menempatkan para pengikutnya yang berasal dari borjuasi pedesaan. Polisi dan militer mengambil alih peng-

amanan kekuasaan dan menjadi terprivilese karena posisi ini sehingga kemudian terjadi pertarungan kepentingan. Para perwira (terutama jenderal) hampir semuanya berasal dari borjuasi pedesaan. Ada dua pengelompokan yang berhadapan sejak kemerdekaan. Pertama, kelompok pengikut raja, sering merupakan "calon bebas", baru-baru ini terbagi dalam: 1) *Rassemblement Nationale des Independants* berdiri tahun 1978; 2) *Parti National Democrate* berdiri tahun 1981, dan 3) *Union Constitutionnelle* berdiri tahun 1983. Kedua, oposisi utama sekarang adalah partai *Istiqlal*, Kekuatan Uni Rakyat Sosialis (didirikan tahun 1974 sebagai sayap kiri UNFP) dan Partai Progresif Sosialis. Justru dominasi kekuatan yang setia kepada raja (dimobilisasi dengan aksi nasional seperti berbaris damai ke Sahara-Spanyol dan menentang oposisi legal), bertanggung jawab atas blokade transformasi sosial. Selain itu, eksistensi sebuah oposisi semu yang loyal tidak menutup adanya kampanye yang terus berlangsung melawan kaum sosialis dan serikat buruh.

Kepustakaan: A. Beramdane, *Le Maroc et L'Occident*, Paris 1987; S. Faath, *Marokko. Die innen-und aussenpolitische Entwicklung seit der Unabhängigkeit*, Hamburg 1987; H. Hubel (ed.), *Nordafrika in der internationalen Politik*, München 1988; T. Koszinowski/H.P. Mattes (ed.), *Nahost-Jahrbuch 1987. Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in Nordafrika und im Nahen und Mittelere Osten*, Opladen 1988. hpm
marronage → Haiti.

Marti, Jose Penyair dan pahlawan nasional Kuba (1853-1895), gugur dalam perang kemerdekaan Kuba melawan penjajah Spanyol. Perlawanannya dilakukan melalui pidato dan

tulisan. Marti mengorganisir perang pembebasan (tahun 1892 berdiri *Partido Revolucionario Cubano*), tetapi ia-tidak menikmati kemenangan. Karya sastranya terlihat dalam syair lagu yang termasuk *folklore* internasional terbaik (*Guantanamera, Cuando sali de Cuba*, dll.). Banyak politikus Amerika Latin, terutama Fidel Castro, menjadikannya sebagai panutan. Selain anti-kolonialisme, tujuan pokok pemikiran Marti adalah melawan aneksi Kuba oleh AS; mengkonsentrasikan pembangunan pada pertanian/reformasi pertanian; mengangkat tingkat pendidikan petani; menghapuskan monopoli modal; menggabungkan semua kekuatan politik untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, terutama kemerdekaan politik.

dn Martinique → Karibia.

masalah Palestina → Arafat, Konflik Timur-Tengah, PLO.

Masyarakat Afrika Barat → CEAO.

Masyarakat Afrika Timur → EAC.

Masyarakat Ekonomi Afrika Timur → EAC.

Masyarakat Karibia → CARICOM.

Mauritania Republik Islam Mauritania secara geografi dan etnografi merupakan rantai penghubung antara Afrika Utara dan Afrika Hitam (negara Zone Sahel), terkena bencana musim kering tahun '70-an dan '80-an. Keinginan ekspansi (→ Sahara Barat) tidak dapat didukung secara ekonomi dan politik. Titik berat strategi pembangunan sekarang adalah pembangunan infrastruktur (pengadaan air di desa-desa, pembangunan jalan, memerangi perluasan gurun), menunjang pertanian, dan pembangunan sebuah industri yang dituju-

kan memenuhi kebutuhan penduduk akan bahan dasar.

1. Mauritania merdeka sejak tahun 1960, luas sekitar 1.037.000 km², 70% terletak di daerah gurun yang menjorok ke Sahara. Sekitar 3/4 penduduk (2 juta) tahun 1989 (di atas 80% hidup di daerah selatan) adalah orang Maura (sekitar 1/3 campuran orang Barbar, Arab, dan kulit hitam), lainnya adalah etnis Afrika Hitam (Tukulör, Sarakolle, dsb.), yang di masa kolonial, tidak seperti orang Maura, masuk sekolah Eropa sehingga dalam waktu lama pascakolonial hampir semua terwakili di posisi-posisi pimpinan.

Memang hampir seluruh penduduk beragama Islam, tetapi sampai sekarang ada konflik ras yang berakar pada perlawanan terhadap makin tumbuhnya dominasi atas politik dan kultur orang Maura oleh orang kulit hitam. Setelah berlangsung kerusuhan bertahun-tahun yang mengiringi pertikaian, tahun 1968 bahasa Arab diberlakukan sebagai bahasa resmi di samping bahasa Perancis, yang rencananya menjadi bahasa pertama secara obligatoris makin terus diundurkan.

2. Secara formal Mauritania sejak merdeka adalah republik presidensial dengan UUD yang mencontoh Republik Kelima Perancis. Namun, partai pemerintah PPM (*Parti du Peuple Mauritanien*) sejak tahun 1965 *de jure* juga merupakan partai persatuan. Presiden Mokhtar Ould Daddah (pemimpin pemerintah sejak tahun 1957) di awal tahun '70-an berusaha melakukan tindakan-tindakan yang memberi tanda akan melonggarkan keter-

gantungan dari Perancis, (a.l. tahun 1972 keluar dari Franc-Zone, mata uang baru: Ouguiya, dijamin oleh negara-negara Arab; tahun 1974: nasionalisasi perusahaan transnasional: terutama perusahaan pertambangan Perancis), untuk menghadapi kritik yang muncul dalam kerusuhan pelajar (kuota penyesuaian pertengahan tahun '80-an baru 33%; 82% penduduk buta aksara) dan keributan terus-menerus dengan serikat buruh (banyak aksi mogok di pertambangan). Aneksasi bagian selatan Sahara Barat yang dilakukan tahun 1975/1976 sesuai perjanjian dengan Spanyol dan Maroko, sampai akhir tahun '60-an masih menuntut seluruh daerah Mauritania, melampaui kapasitas Mauritania. Tidak dapat menghadapi secara militer serangan-serangan gerakan pembebasan POLISARIO, Mauritania lalu bergantung pada keberadaan tentara Perancis, terutama Maroko. Serangan terarah terhadap tempat-tempat produksi dan jalan transportasi, menyebabkan ekspor bijih besi hancur sama sekali, meskipun tentara Mauritania tumbuh kurang dari 2.000 orang (1974) menjadi 20.000 orang (1978). Presiden Ould Daddah digulingkan tahun 1978 oleh militer. Resivilisasi sistem politik yang dicanangkan (a.l. UUD dengan sistem multipartai) terblokir oleh pertarungan kekuasaan yang ada sampai sekarang di antara militer (sejumlah usaha kudeta dan 3 kali kudeta berhasil; presiden sejak tahun 1984: Kolonel Maaouya Ould Sid'Ahmed Taya). Dalam pemilihan presiden secara bebas untuk pertama kalinya Januari 1992 diduga berlangsung manipulasi serta hanya 50%

penduduk ikut memilih. Kolonel Maaouya Ould Sid'Ahmed Taya memenangkan 60,6% suara atas saingan utamanya, Ahmed Ould Daddah, mantan presiden Mauritania.

3. Sejak merdeka determinan pokok ekonomi Mauritania telah mengalami dua kali perubahan. Sekitar tahun 1960 ekonomi Mauritania yang dalam masa kolonial relatif pendek, di lembah Senegal menghasilkan sekitar 100.000 ton jawawut/tahun dan di oase sekitar 15.000 ton kurma. Mayoritas penduduk yang sampai awal tahun '70-an di atas 2/3 adalah penduduk nomad, hidup dari peternakan (dulu 23% PDB). Pembawa devisa terpenting yang di pertengahan tahun '60-an menyebabkan neraca perdagangan positif adalah pertambangan di daerah gurun (bijih besi, sedikit tembaga) yang baru dimulai tidak lama sebelum merdeka. Sektor ekstratif yang padat modal ini dulu hanya mempekerjakan 4.000 orang (30% di antaranya orang Eropa), terutama tetap tanpa hubungan ke pertanian. Setelah serangan POLISARIO terhadap jalur kereta api dari Zouerate ke Nouadhibou (650 km), pusat perekonomian Mauritania lumpuh, meskipun normal kembali tahun 1979 setelah terjadi perundingan antara Mauritania dan POLISARIO yang melepas Sahara Barat. Namun, kini krisis pasar baja (95% ekspor bijih besi ke Eropa) menyebabkan turunnya secara drastis penerimaan, lalu makin buruk dengan jatuhnya kurs US\$. Instalasi penambangan bijih besi baru di Guelb kembali dijalankan dengan jumlah investasi yang sangat besar (500 juta US\$),

kini mengekspor hanya 2 juta ton/tahun, bukannya 15 juta ton yang diharapkan, dan harus mengurangi pekerja dari 6.360 orang tahun 1984 menjadi 4.450 orang tahun 1988. Kekayaan mineral lainnya a.l. dengan kadar bijih besi 65% di dekat Zouerate, mempunyai prospek masa depan (selanjutnya ada tembaga, fosfat, dan cadangan gips yang dikenal terbesar di seluruh dunia). Sampai kini akibat peluang penjualan yang buruk, penambangan belum dilakukan. Komoditas ekspor andalan sekarang adalah ikan (18% PDB, 25% nilai ekspor, 54% diekspor ke Jepang). Dalam sektor industri, beban Bank Dunia dan IMF kepada negara turun dengan menguntungkan pihak swasta. UU investasi yang sangat liberal disahkan tahun 1989. Masalah sosial yang mendesak adalah kenaikan pesat urbanisasi akibat bencana musim kering, a.l. mengakibatkan pengangguran tahun 1977: 36% menjadi 66% (1988), sulit diliput oleh statistik. Ibu kota Nouakchott direncanakan untuk 15.000 penduduk, sebagian besar hidup di tenda dan gubuk dari kaleng di daerah pinggiran. Sebuah program untuk pemukiman kembali petani di pedesaan, dilakukan mulai tahun 1985. Setelah turun hujan cukup banyak, dihasilkan panen gandum 122.000 ton (1987–1988) untuk memenuhi 40% kebutuhan. Tujuan terdahulu untuk pertanian mandiri sampai tahun 1985, sudah dibuang. Rencana tiga tahun (1989–1991) bertujuan memenuhi kebutuhan 60% gandum dan 50% produk susu serta 30% buah *agrumen*.

Kepustakaan: F. de Chassey, *Mauritanie 1900-1975: de l'ordre colonial à l'ordre néo-*

colonial, Paris 1978; Centre de Recherches et d'Etudes sur les Sociétés Méditerranéennes/ Centre d'Etude d'Afrique Noire (ed.), *Introduction à la Mauritanie*, Paris 1979; H. Mattes/E. Stetter, "Mauretanien", dlm.: *HDW II*, 4, Hamburg 1982, hlm. 262 dst.; K. Ziemer, "Mauretanien", dlm.: S. Mielke (ed.), *Internationales Gewerkschaftshandbuch*, Opladen 1983; "Wahlbetrug in Mauretanien?", Frankfurter Rundschau 27 Januari 1992, dlm.: *BMZ-Spiegel der Presse* 3/92, hlm. 84–85.

KZ

Mauritius 1. Pulau Mauritius (luas 1.865 km², ibu kota Port Louis), Pulau Agalega, Rodrigues, dan Cargados Carajos (kepulauhan) berasal dari gunung berapi dan sering terancam angin topan tropis. Penduduk (tahun 1989: 1 juta penduduk) terdiri atas orang India (66%), Kreol (29%), Cina (3%), dan kulit putih (14.000). Agama: Hindu (50%), Katolik (26%), Islam (16%), Protestan (3%), dan Buddha (0,6%). Bahasa: Inggris (bahasa negara), Kreol-Perancis, dan India. Dibandingkan dengan negara-negara Afrika lainnya, kuota buta aksara (tahun 1989: 17%) adalah sangat rendah, harapan hidup (tahun 1989: 70 tahun) relatif tinggi.

2. Mauritius yang termasuk Negara AKP (tahun 1989: PNB per kapita 1.990 US\$) secara ekonomi bergantung pada ekspor monokultur gula. 60% hasil ekspor dan 70% lahan pertanian dimanfaatkan untuk produksi gula. Ketergantungan ekspor gula berhadapan dengan ketergantungan impor barang konsumsi, pangan, dan minyak bumi. Selain ekspor gula, pariwisata merupakan sumber devisa penting. Dengan zone produksi bebas (EPZ/*Export Processing Zones*) ditawarkan rangsangan (a.l. pembebasan pajak, upah murah) untuk menarik investor asing (terutama

dari negara Asia, Republik Afrika Selatan) dalam produksi tekstil dan garmen, yang akan menunjang pembangunan dan diversifikasi industri. Industri sejenis enklave dan murni berorientasi pasar dunia dalam bentuk EPZ jelas merupakan ketergantungan yang sangat besar dari luar negeri.

Utang luar negeri terus naik dan tahun 1984 berjumlah 526,5 juta US\$. Dalam sektor pertanian (tahun 1989: 13% PNB, 25% penduduk) akan diusahakan lepas dari ketergantungan pada gula melalui diversifikasi produk pertanian (tembakau, teh, bunga). Selanjutnya, diintensifkan produksi pangan (kentang, sayuran, unggas). Kekayaan ikan yang ada di perairan Mauritius memang untuk ekspor dan ditanggap besar-besaran (terutama Jepang dan Uni Soviet), tetapi sumber daya pembangunan ini tidak banyak dimanfaatkan untuk pengadaan kebutuhan kalori penduduknya. Sementara ini telah didirikan armada penangkapan ikan sendiri, *National Fishing Corporation*.

3. Mauritius pertama-tama dimiliki VOC (1558), lalu perusahaan dagang Perancis-India yang ada di Mauritius (tahun 1715 bernama *Ile de France*) mengelola perkebunan (kopi, rempah-rempah, kapas) dengan budak dari Afrika dan Madagaskar. Tahun 1810 diduduki Inggris dengan budak, kuli kontrak India, diarahkan ke produksi monokultur gula. Setelah penjaminan otonomi intern (1966), kelompok politik pecah dalam masalah kemerdekaan politik, tetap tinggalnya Inggris atau reorientasi ke Perancis. *Mauritian Labour Party* (MLP, atau *Parti Travailleurs*) yang mewakili

petani kecil dan buruh India dipimpin S. Ramgoolam, menuntut kemerdekaan total dari Inggris. *Parti Mauricien Social Democrate* (PMSD) yang di satu pihak mewakili kepentingan bangsawan gula dan elite Kreol, dipimpin G. Duval sejak tahun 1963, makin banyak mendapat dukungan dari lapisan bawah Kreol karena takut kehilangan pasar gula *Commonwealth* dan untuk melindungi *Hindu-Domination* (tahun 1965 kerusuhan rasial antara buruh India dan Kreol), ingin supaya Inggris tetap tinggal di sana. Dengan kemenangan *Independence Party*, gabungan antara *Labour Party*, *Muslim Committee of Action* (MCA: kepentingan pedagang Islam), dan *Independent Forward Bloc* (IFB: penekanan kultur Hindu) dalam pemilu 12 Maret 1968 berhasil diraih kemerdekaan Mauritius. Mula-mula Inggris meninggalkan Pulau Diego Garcia sebagai pangkalan angkatan lautnya yang disewakan ke AS (1976). Kekuasaan pemerintah koalisi borjuis-konservatif dipimpin Perdana Menteri Ramgoolam yang menindas oposisi melalui larangan mogok, manipulasi pemilihan, dan UU darurat, berlangsung sampai pemilihan parlemen 12 Juni 1982. Dalam pemilihan ini menang sebuah koalisi partai-partai yang berorientasi kiri dipimpin *Mouvement Militant Mauricien* (MMM) yang didirikan tahun 1969 oleh P. Berenger yang makin berpengaruh dalam berposisi ke Ramgoolam (meninggal Desember 1985). Koalisi pemerintah yang dilakukan oleh Perdana Menteri A. Jugnauth (MMM, *Parti Socialiste Mauricien*/PSM, dan *Organisation du Peuple*

Rodrigais/OPR) setelah pemilihan Agustus 1987 kembali berkuasa. Politik dalam negeri berusaha melakukakan sosialisme khas Mauritius. Perubahan UUD yang diumumkan setelah kemenangan pemilihan tahun 1982 untuk perubahan monarki ke republik, tidak terealisasi sampai kini. Pengurangan ketergantungan dari Afrika Selatan berhaluan nonblok dan turut memperjuangkan terciptanya zone perdamaian di Lautan Hindia, merupakan elemen-elemen politik luar negeri Mauritius.

Kepustakaan: U. Leffler/R. Tetzlaff, "Mauritius", dlm.: *HDW II*, 5, Hamburg 1982, hlm. 257 dst.

ah

mayordomo → hacienda.

MCCA Pasar Bersama Amerika Tengah, disepakati Desember 1960 antara Guatemala, El Salvador, Honduras, dan Nikaragua, setelah ada prastudi dari CEPAL; Kosta Rika masuk tahun 1962. *Tujuan*: penciptaan sebuah pasar bersama dalam masa 5 tahun dan sebuah uni bea; menunjang industrialisasi. *Organ*: Dewan Ekonomi (CEC); terdiri atas menteri-menteri ekonomi; Dewan Eksekutif (CETG) terdiri atas wakil-wakil menteri ekonomi dan pejabat tinggi SIECA (*Secretariat de Integracion Economico de Centroamericano*, Sekretariat untuk Integrasi Amerika Tengah); Sekretariat (SIECA); Bank Amerika Tengah untuk Integrasi Ekonomi (BCIE/*Banco Centroamericano de Integracion Economica*). *Hasil-hasil*: peningkatan perdagangan intra-zone dan pertumbuhan ekonomi di tahun '60-an; peningkatan besar investasi asing ke negara-negara MCCA, terutama di sektor industri; melambatnya proses

pertumbuhan dan integrasi di tahun '70-an, ditandai oleh perang bola antara Honduras (yang merasa dirugikan dalam MCCA) dan El Salvador; penajaman situasi ketergantungan dan heterogenitas struktural (naiknya laba modal asing, tumbuhnya perbedaan pendapatan intern). Krisis MCCA (sejak tahun 1969) menyebabkan pembuatan orientasi baru (1972, 1975/1976): sebagai ganti perdagangan adalah pembangunan ekonomi dan sosial, pertumbuhan yang seimbang; meningkatkan ekonomi dan masyarakat sosial Amerika Tengah (CESCA/*Comunidad Economico Sociale Centroamericano*, Komunitas Ekonomi Sosial Amerika Tengah). Ketidakpastian politik karena proses revolusi di Nikaragua dan El Salvador menyebabkan CESCA tidak teratifikasi. MCCA menjadi lumpuh dengan berlangsungnya Konflik Amerika Tengah. Dalam proses peredaan ketegangan konflik, terlihat adanya kesediaan terutama dari ME untuk membantu model-model baru integrasi ekonomi.

dn

MDBs (*Multilateral Development Banks*) → Bank Pembangunan Multilateral, bilateral, multilateral, pembiayaan kembali.

Meksiko Perkembangan Meksiko ditandai oleh pertentangan-pertentangan tajam. Negara tempat berlangsungnya revolusi anti-imperialis pertama di Dunia Ketiga, terlihat makin jauh dari tujuan-tujuan revolusi yang selalu kembali diucapkan. Meskipun ada kekayaan minyak bumi, negara yang secara internasional termasuk termaju di antara negara berkembang pada akhir tahun

'80-an terjebak dalam krisis yang menajam. Setelah sekitar 60 tahun kekuasaan satu partai, dimungkinkan suatu keterbukaan demokratis sistem politik.

1. Meksiko (luas 1,98 juta km²), merupakan negara ketiga terbesar di Amerika Latin setelah Brasilia dan Argentina. Sekitar 80% kawasannya adalah daerah kering dan setengah kering, yang tidak dapat diolah tanpa pengairan buatan. Meskipun ada industrialisasi yang maju, Meksiko masih merupakan negara pertanian; pertanian membentuk landasan kehidupan untuk sekitar separo penduduk; sekitar separo areal keseluruhan dimanfaatkan untuk pertanian. Di daerah selatan yang lembab-basah ditanam kopi, kakao, pisang, dan tembakau; di daerah utara yang kering dilakukan peternakan yang ekstensif. Meskipun ada berbagai program bantuan negara, sampai kini tidak berhasil mengatasi kesulitan dalam sektor pertanian (terutama karena metode pertanian yang tua, pengairan yang tidak mencukupi, infrastruktur yang kurang, pemilahan pemilikan, dan pelarian dari pedesaan). Oleh karena itu, bahan pangan dasar harus diimpor dalam jumlah besar. Kekayaan ikan yang besar di perairan Meksiko sampai kini sedikit dimanfaatkan karena kecilnya kapasitas penangkapan dan pengolahan.

Meksiko memiliki kekayaan tambang yang besar. Ia menjadi produsen terkemuka terutama untuk perak, CaF₂ (kalsiumfluorid), seng, mangan, timah hitam, tembaga, dan belerang. Sejak tahun '70-an minyak bumi menjadi makin penting. Meksiko

dengan cadangannya (tahun 1986: 71 miliar barel) dan jumlah eksploitasi (tahun 1987: 143,5 juta ton) merupakan produsen nomor empat di dunia.

2. Dengan 85 juta penduduk (1989) Meksiko merupakan bangsa berbahasa Spanyol terbanyak dan setelah Brasilia merupakan negara di Amerika Latin dengan penduduk terbanyak. Jumlah penduduk dalam 20 tahun terakhir telah menjadi dua kali lipat. Ledakan penduduk terutama disebabkan kemajuan yang didapatkan di bidang kesehatan; tingkat harapan hidup pun sangat meningkat (tahun 1965: 60 tahun; tahun 1989: 69 tahun). Sejak tahun 1972 dilakukan keluarga berencana yang didukung negara, dengan mendapatkan hasil terbatas.

Lebih dari 92% penduduk beragama Katolik, merupakan kekuatan masyarakat yang besar meskipun ada pemisahan radikal antara negara dan agama. Jumlah penduduk Indian diperkirakan turun 10%. Sebelum sekelompok kulit putih datang, penduduk lainnya terdiri atas orang Mestis. Orang Indian yang tidak berdaya menghadapi kekuatan Spanyol, di tahun 1970 hanya meliputi 2,1% penduduk; 5,7% lainnya berbahasa Spanyol dan Indian. Orang Indian di daerah utara hampir punah, di daerah pegunungan di tengah dan terutama di daerah selatan dan utara relatif masih banyak.

Ledakan penduduk dan pelarian dari pedesaan makin menajamkan proses urbanisasi (tahun 1989: 72%). Di daerah ibu kota Mexico City hidup sekitar 19 juta manusia (kota berpen-

duduk jutaan lainnya: Guadalajara dan Monterrey). Pemerintah sampai kini berusaha (tidak berhasil banyak) menghadapi beban berat lingkungan (→ ekologi) di daerah-daerah padat.

3. Revolusi besar pertama abad ini meletus tahun 1910 di Meksiko, dan mengakhiri kekuasaan diktator Jenderal Porfirio Diaz selama 30 tahun yang memodernisasi ekonomi negara dengan modal asing. Hampir 2/3 investasi Meksiko antara tahun 1900-1910 dibiayai oleh luar negeri. Di lain pihak, Porfiriat menyiksa *campesinos* dengan segala macam cara, merebut tanah dan menjebak mereka menjadi budak dalam latifundia yang meluas. Akhirnya, lebih dari 90% petani tidak memiliki tanah. Karena tuan tanah kaya makin mengubah pertanian dari produksi bahan pangan dasar menjadi produk untuk bahan mentah yang membawa keuntungan pasar dalam negeri dan barang ekspor, ongkos hidup naik pesat, sementara upah nominal mengalami stagnasi. Kekuatan revolusi yang semula liberal-borjuis untuk melawan rezim yang represif dan kejam, menjadi pemberontakan petani tanpa tanah. Oligarki lama dilikuidasi. Setelah perang saudara yang menelan korban lebih dari sejuta orang Meksiko reda, dikeluarkan UUD tahun 1917 yang berlaku sampai sekarang. Dulu, UUD memberikan pemilihan langsung dan melarang pemilihan kembali presiden, mengandung penentuan yang detil dan di masa itu menentukan arah untuk reformasi pertanian menyeluruh dan perlindungan buruh, bersifat nasionalis dan anti-pendeta. Tahun-tahun berikutnya,

pertikaian kekuasaan yang sering penuh kekerasan dari *jefes revolucionarios* menentukan kehidupan politik. Setelah tahun 1928 *caudillo* Obregon dibunuh oleh seorang fanatikus agama. Presiden Calles, penggantinya, menggunakan krisis sebagai alasan untuk menyatukan kekuatan-kekuatan yang ada dalam satu partai. Pendamaian negara menjadi tujuan terdekat revolusi yang diakui oleh semua pihak; sebagai ganti *caudillismo*, muncul politik yang terlembaga.

Partai "resmi" sejak tahun 1946, *Partido Revolucionario Institucional* (PRI), sampai tahun 1988 melahirkan semua presiden negara, gubernur semua negara bagian, dan hampir semua walikota di sekitar 2.400 kota. PRI terbagi dalam tiga sektor: *sector agrario* (tahun 1971: 6 juta penduduk), *sector obrero* (tahun 1971: 3 juta penduduk), dan *sector popular* (tahun 1971: 2 juta penduduk). Sektor-sektor identik dengan organisasi wadah buruh tani dan tani kecil, serikat buruh dan persatuan lapisan menengah. Tuntutan kelompok-kelompok masyarakat disalurkan melalui sektor-sektor partai. Persaingan terbuka tidak terjadi dalam proses pembentukan keinginan dalam partai, dan selalu berada di bawah politik pemerintah. Tanpa menduduki jabatan partai, presiden negara menjalankan kepemimpinan partai yang sebenarnya. Dalam masa jabatannya yang berlangsung 6 tahun ia dilengkapi dengan kekuasaan yang hampir absolut. Dengan membangun sebuah lingkaran pimpinan sendiri, *familia revolucionaria*, ia juga menunjuk pilihan calon presiden PRI, penggan-

tinya. Partai-partai oposisi sejak tahun '60-an makin banyak diikutsertakan dalam sistem; dengan bantuan hukum partai dan pemilihan yang dimanipulasi sempurna, mereka dikooptasi dan dikendalikan pemerintah. Melalui keikutsertaan dalam pemilihan, mereka ikut melegitimasi sistem dan untuk mendapat imbalan sejumlah mandat terbatas; jalan untuk ke pemerintahan tetap tertutup bagi mereka. Sejak tahun 1979 sekitar 100 dari 400 kursi parlemen disediakan untuk oposisi. Partai yang sampai kini muncul ilegal atau baru, diizinkan untuk sementara waktu. Partai oposisi terpenting sampai tahun 1988 adalah *Partido Acción Nacional* (PAN), partai lapisan menengah yang Katolik. Melalui persekutuan yang lihai dengan kelompok kiri lainnya di tahun-tahun terakhir, *Partido Comunista Mexicano* (PCM) makin menonjol. Pada pemilihan anggota parlemen tahun 1982 PRI mendapatkan 299 mandat, sementara partai-partai oposisi: PAN 51, *Partido Popular Socialista* (PPS) 10, *Partido Socialista Unificado* (PSUM) dengan penggabungan PCM 17, *Partido Democrata Mexicano* (PDM) 12, *Partido Socialista de los Trabajadores* (PST) 11 mandat. Sistem pemilihan mengamankan dominasi PRI dan sekaligus memecah belah oposisi. Meskipun ada wajib pemilihan, setiap orang kedua tidak memilih—konsekuensinya adalah pemilihan di Meksiko tidak dapat mengubah situasi kekuasaan.

Dengan pemilihan presiden dan parlemen 6 Juli 1988 kelihatannya tesis ini menjadi goyah. Calon pre-

siden PRI, Salinas de Gortari, setelah hasil akhir (yang dimanipulasi) mendapatkan hanya 50,4% suara, calon dari gabungan partai *Frente Democrata Nacional* (FDN) mendapatkan 31,1%. PAN dengan 17% jauh dari yang diharapkan. Untuk pertama kalinya dua partai kiri penting, PCM dan *Partido Mexicano de Trabajadores* (PMT) berkumpul menjadi *Partido Mexicano Socialista* (PMS). Calon mereka, Heberto Castillo, mengundurkan diri sebelum pemilihan dengan menguntungkan Cardenas. PRI kehilangan mayoritas absolutnya pada pemilihan parlemen; PRI memang menang di daerah pedesaan yang terbelakang, tetapi harus kehilangan mayoritasnya di empat negara bagian dan di ibu kota negara. Untuk pertama kalinya dengan demikian empat politikus oposisi terwakili dalam senat; PRI dalam parlemen hanya memiliki 20 kursi lebih banyak.

Sebab berkurangnya kekuasaan PRI terutama adalah kesengsaraan ekonomi Meksiko, yang sangat membatasi ruang gerak hubungan klientelisme tradisional penduduk ke PRI melalui serikat buruh dan organisasi masyarakat. Kegagalan negara makin besar setelah bencana gempa bumi September 1985, yang sangat merusak daerah Mexico City. Pengalaman dalam organisasi swadaya masyarakat menimbulkan iklim politik baru. Terutama akibat menjauhnya De la Madrid dari populisme pendahulunya, gaya kepemimpinannya yang lebih teknokratis, terutama politik yang berorientasi paksaan ekonomi, ikut menyebabkan hilangnya makna jabatan presiden, terutama

peralihan jabatan. Berdasarkan hasil pemilihan dan perubahan politik ini, parlemen menjadi ajang pertikaian antara pemerintah dan oposisi. Mayoritas PRI juga terancam oleh oposisi internal yang bobotnya makin besar. Presiden memang dapat memerintah dengan menentang parlemen, tetapi karena situasinya yang sulit, Salinas de Gortari lebih mencari kerja sama dengan parlemen. Oleh karena itu, lembaga ini menjadi penting dan dapat membawa perubahan yang demokratis dari sistem politik.

4. Setelah 20 tahun meletusnya revolusi, postulat pokoknya seperti pembagian *hacienda* besar dan perampasan kembali kedaulatan nasional atas bahan mentah, hanya terealisasi sedikit. Politik pemerintah makin mengambil bentuk konservatif. Berakhirnya pembagian tanah yang memang sudah sedikit itu dan dampak sosial dari krisis ekonomi dunia tahun 1929, meningkatkan ketidakpuasan para *campesinos* dan buruh. Haluan berganti dengan mulainya jabatan Presiden Cardenas (1934-1940). Dilakukan reformasi pertanian yang meluas dengan menguntungkan kaum *ejidos*, yaitu komunitas tanah berdasarkan pemilikan bersama. Cardenas membagikan sekitar 18 juta ha tanah—di atas 9% seluruh areal negara—lebih banyak dari semua pendahulunya. Tahun 1938 industri minyak yang berada di tangan asing juga dinasionalisasi. Pembatasan impor dan kredit yang dilakukan AS sebagai balasan, membawa kesulitan negara itu yang diperburuk dengan

terjadinya pelarian modal dan kenaikan harga.

Pemerintah berikutnya memang tidak mengendalikan dengan gaya sama, tetapi secara keseluruhan jelas merupakan haluan konservatif. Mereka menunjang sebuah modernisasi modal dan menguatkan inisiatif swasta dari perdagangan, bank, dan industri. Diuntungkan oleh permintaan yang meningkat karena Perang Dunia II, Meksiko mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat sampai tahun '70-an, rata-rata di atas 6%/tahun. Di sektor-sektor lain juga dilaporkan ada keberhasilan. Misalnya, di bidang pendidikan dan kesehatan; tingkat buta aksara dapat dikurangi dari 58,0% (1940) menjadi 10% (1989). Namun, sekaligus *milagro mexicano* (keajaiban pembangunan Meksiko) menyebabkan menajamnya disparitas regional dan sosial. Kesenjangan antara 32 negara bagian makin membesar antara tahun 1940-1970. Disparitas pendapatan makin membesar; 10% keluarga terkaya dapat meningkatkan pangsa mereka dalam pendapatan keseluruhan dari 35,7% (1958) menjadi 39,2% (1970), sementara pangsa 10% termiskin turun dari 2,3% ke 1,4%.

Pemerintah Echeverria (1970-1976) berusaha mengubah strategi dan melakukan politik reformasi yang mahal secara infrastruktur dan berorientasi distribusi. Utang negara dan luar negeri naik pesat, defisit dalam neraca perdagangan luar negeri dan inflasi yang tertumpuk bertahun-tahun, meluncur pesat. Terjadi konfrontasi terbuka dan keras antara pemerintah dan kepentingan swasta; akhirnya pengusaha mentransfer jumlah uang yang

sangat besar ke luar negeri. Tahun 1976 Meksiko di masa pascarevolusi mengalami krisis ekonomi terbesar (PDB tahunan turun dari 7,6% tahun 1973 menjadi 1,7% tahun 1976; devaluasi pertama Peso sejak 22 tahun).

Dengan percepatan eksploitasi minyak bumi (pangsa ke hasil ekspor tahun 1982: 75%) dan politik yang ramah terhadap perusahaan, pemerintah berikutnya di bawah Lopez Portillo (1976-1982) kembali meraih pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sebaliknya, inflasi terus berlangsung tanpa berkurang. Antara tahun 1977-1979 peningkatan upah minimal resmi (tahun 1979: sekitar 16%) selalu di bawah tingkat inflasi (tahun 1979: sekitar 20%); tujuan restrukturisasi hubungan pemilikan semakin terlaksana. Meskipun ada kemajuan industrialisasi, akhir tahun '70-an hanya sekitar 40% angkatan kerja Meksiko bekerja di pertanian, yang memberikan kontribusi hanya sekitar 9% ke PDB. Lebih dari separo seluruh usaha pertanian adalah minifundia yang dilakukan secara subsistensi, biasanya tidak memberi cukup makan kepada pemiliknya. Produksi pertanian tetap ketinggalan dari pertumbuhan penduduk. Meksiko yang mandiri dalam hal ini di tahun '70-an, harus makin mengimpor bahan pangan dasar.

Meksiko pada pergantian jabatan presiden oleh Miguel de la Madrid (1982-1988) berada dalam situasi krisis ekonomi dan keuangan akibat jatuhnya harga minyak bumi. Tingkat inflasi sekitar 100% (1982), pertumbuhan negatif (minus 0,5%), defisit anggaran sekitar 18,5% dari PNB

dan utang pemerintah setinggi 23 miliar US\$, sampai akhir tahun 1984 merupakan pinjaman. De la Madrid di awal masa jabatannya memulai sebuah program penyehatan (terutama peningkatan pajak, pembatasan impor, devaluasi Peso), targetnya dapat dicapai sebagian dalam masa dua tahun. Dengan demikian, tingkat inflasi sampai tahun 1984 turun sekitar 60%, defisit neraca perdagangan tunggal separo, dan perdagangan luar negeri menghasilkan surplus. Dengan bantuan serikat buruh jumlah upah dikurangi, misalnya dalam sektor publik, sekitar 20%. Tahun 1984 Meksiko berhasil mendapatkan persyaratan yang relatif menguntungkan untuk pembiayaan kembali utang luar negerinya. Setelah itu, pemerintah membuka Meksiko untuk modal asing dan mengurangi andil negara dalam ekonomi Meksiko. Program swastanisasi ini juga berarti mundurnya peran negara dari masyarakat. Hal ini tidak saja ditolak keras oleh oposisi-oposisi kiri, juga di dalam PRI. Sejak tahun 1985, sebelum harga minyak bumi jatuh, ekonomi kembali memperlihatkan *trend* perkembangan yang negatif, makin berat akibat penerimaan dari minyak turun. Berbeda dengan yang biasa dilakukan para pendahulunya, De la Madrid dalam tahun-tahun terakhir masa jabatannya tidak melakukan haluan ekspansi yang populis, melainkan tetap mempertahankan politik penghematan.

Ketika Oktober 1987 ditunjuk menteri perencanaan dan anggaran, Carlos Salinas de Gortari, konstrukstur sesungguhnya dari politik penghemat-

an dan swastanisasi De la Madrid, sebagai calon PRI untuk masa jabatan presiden berikutnya (1988-1994), jelas bahwa di masa mendatang politik ini tidak akan dihapus. Sesuai dengan itu kekuatan klientelisme korporatis dalam Meksiko, basis kekuasaan tradisional PRI menurun. Penentu masa depan politik Meksiko tidak saja pertarungan kekuasaan antara sayap tradisional dan arus teknokratis-modernisasi di dalam PRI.

Kepustakaan: R.D. Hansen, *The Politics of Mexican Development*, Baltimore 1971; M. Mols/H.W. Tobler, *Mexiko, Die institutionalisierte Revolution*, Köln 1976; F. Wehner, *Grundlagen einer mexikanischen Verfassungsgeschichte*, Hamburg 1976; W. Grabendorff, *Bestimmungsfaktoren und Dimensionen der Aussenpolitik Mexikos*, Ebenhausen 1977; V.G. Lehr, *Der mexikanische Autoritarismus*, München 1981; M. Mols, *Mexiko im 20. Jahrhundert*, Paderborn, dll. 1981; D. Nohlen/V. Lehr, "Mexiko", dlm.: *HDW II*, 3, Hamburg 1982, hlm. 119 dst.; E. Durán, "Mexiko unter Präsident de la Madrid", dlm.: *EA* 10/1985, hlm. 297 dst.; M. Ehrke, "Mexiko 1986: Das politische System unter dem Druck der Wirtschaftskrise", dlm.: *Jahrbuch Dritte Welt*, 1987, München 1986, hlm. 153 dst.; *ibid*, "Mexiko: Die Wahlen vom 6 Juli 1988 - ein Ende der Einparteienherrschaft?", dlm.: *APuZ* 4/1989, hlm. 51 dst.

vgl/bh

Mesir Sementara Nasser menentukan sosialisme Arab untuk Mesir dengan berhubungan erat ke kubu sosialis, penggantinya, A. Sadat, dalam politik dalam dan luar negerinya beralih haluan (keterbukaan Mesir untuk bantuan keuangan dan teknologi terutama dari AS, perjanjian perdamaian dengan Israel). Selama ini Mubarak berkonsentrasi pada penyehatan ekonomi, tetapi di akhir tahun 1987 berhasil keluar dari pengucilan Mesir dengan membuka kembali hubungan diplomatik dengan sebagian

besar negara-negara Arab yang terputus akibat politik terhadap Israel yang dilakukan Sadat.

1. Daerah pemukiman dan pertanian Mesir hanya meliputi 3,5% wilayahnya, hampir semuanya berada di daerah lembah Nil. Pertanian, seperti sebelumnya, menyerap sebagian besar penduduk (tahun 1989: 19%, industri 30%). Sistem pengaturan saluran dan sungai diperbaiki (tahun 1970: pembangunan bendungan Aswan selesai dengan danau buatan seluas 5.500 km²), untuk pengendalian pengairan Sungai Nil dan perluasan lahan pertanian.

Tanah Nil yang subur dengan pengairan sepanjang tahun, memberikan dua sampai tiga kali panen. Pangsa terbesar produksi pertanian adalah kapas berkualitas tinggi (20%) yang hampir semuanya diekspor. Produk lainnya dari pertanian yang padat karya adalah beras, jagung, gandum, gula (dan daging); karena produksi berada jauh di bawah kebutuhan, perlu impor bahan pangan yang dari tahun ke tahun makin tinggi (sekarang setiap tahun sekitar 40% impor keseluruhan). Peternakan sangat kekurangan padang rumput yang selalu hijau. Kekayaan tambang Mesir belum dieksploitasi semua; yang terutama ditambang adalah bijih besi, fosfat alam, minyak bumi, dan garam. Eksploitasi minyak naik pesat setelah Sinai berhasil direbut kembali; penemuan sumber minyak baru membuat Mesir di tahun '80-an maju menjadi produsen minyak bumi tingkat menengah.

2. Penduduk Mesir (tahun 1989: 51 juta) terpusatkan di daerah per-

tanian yang hanya seluas 35.580 km² sehingga dengan pertumbuhan penduduk tahunan yang tinggi (tahun 1989: 2,5%) kepadatan penduduk juga naik pesat: dari 30 penduduk/km² (1966) menjadi 53 penduduk/km² (1988), dalam hal luas keseluruhan adalah 845 penduduk/km² (1966) serta 1.180 penduduk/km² (1980) dalam hal tanah pertanian. Tingkat urbanisasi meningkat antara tahun 1960 dan tahun 1987 dari 38% menjadi 45%; ibu kota Kairo dengan daerah sekitarnya tahun 1987 berpenduduk 12 juta; jumlah remaja di bawah 15 tahun sejak tahun 1966 relatif stabil sekitar 40%. Sejak tahun 1965 dijalankan keluarga berencana dengan tujuan menurunkan angka kelahiran menjadi 1,7%. Secara etnis Mesir kurang terdeferensiasi: di Mesir Utara hidup masyarakat Fellache yang relatif homogen dan merupakan nenek moyang Arab bangsa Mesir kuno. Jumlah kelompok minoritas kurang dari 1% (di Mesir bawah: orang Suriah, Lebanon, dan Yahudi). Orang Arab murni adalah orang Beduin diperkirakan berjumlah 100.000. 93% penduduk beragama Islam-Suni (Islam adalah agama negara) dan 7% Kristen Kopt.

3. Protektorat Inggris atas Mesir berlangsung sampai Februari 1922 ketika Kerajaan Mesir di bawah Raja Fuad (1926–1936) merdeka, tetapi dengan syarat yang berkaitan dengan pertahanan negara dan perlindungan kepentingan asing. Kudeta 23 Juli 1952 oleh Serikat Perwira Bebas dipimpin Jenderal Gamal Abdel-Nasser menjatuhkan putra Fuad, Faruk. Bagi Nasser jalan sebuah revolusi demo-

kratis yang dilakukan tentara merupakan satu-satunya alternatif untuk melakukan reformasi radikal yang sangat diperlukan untuk mencapai kemerdekaan penuh Mesir yang masih berada di bawah hegemoni Inggris.

Revolusi Mesir telah mengubah secara mendasar struktur sosial-ekonomi Mesir dalam tiga tahap. Tahap pertama (1952–1956) rezim militer Nasser (→ rezim otoriter) berkoncentrasi pada transformasi struktur-struktur politik, artinya penghapusan monarki (1953), penjauhan elite politik tradisional dari posisi kunci politik, dan pembubaran partai-partai politik. Dalam rangka realisasi sebuah masyarakat industri yang modern dan berorientasi nasional, diinginkan terutama perbaikan ekonomi tingkat kehidupan orang Fellache/petani kecil. Sebagai titik tolak adalah UU pertanian yang dikeluarkan tahun 1952 dan dimodifikasi tahun 1958, dapat mengurangi pembagian tanah yang sangat tidak seimbang (sebelum revolusi 94,3% pemilik tanah menguasai 35% tanah pertanian, sebaliknya tahun 1786 mereka hanya menguasai 17%), meskipun ada kesulitan birokrasi dan celah dalam UU melalui perampasan pemilikan tanah besar dan pembukaan tanah baru: tahun 1965 94,5% pemilik tanah memiliki 57,1% tanah. Pemilikan tanah luas dibatasi menjadi 200 *feddan* (85 ha), tahun 1961 menjadi 100 f, dan tahun 1969 menjadi 50 f.

Dalam tahap II (1956–1961) rezim militer makin menguatkan rencana ekonomi (tahun 1957 pendirian sebuah komite perencanaan) untuk mencapai pertumbuhan industri yang

diinginkan dan selanjutnya menyeimbangkan pendapatan.

Kurangnya kesediaan kerja sama antara borjuasi industri Mesir dan dinas perencanaan menyebabkan dalam tahap III (1961–Juni 1967) berlangsung nasionalisasi menyeluruh (bank, seluruh industri berat, industri kunci) sehingga negara menguasai sektor industri modern. Nasionalisasi berlangsung sesuai semboyan Nasser tahun 1961, sosialisme Arab. Tidak tersentuh oleh politik ini adalah kepemilikan kelas menengah (pedagang, pengrajin, pemilik tanah ukuran menengah dan usaha industri yang lebih kecil). *De facto* terkristalisasi sebuah *mixed economy*, negara ikut ambil bagian di atas 50% nilai keuntungan nasional (tahun 1953: 15%).

Di bawah Sadat struktur dasar ini dimodifikasi dengan politik pembukaan keluar tahun 1975. Tidak saja ketergantungan dari bantuan keuangan, bantuan ekonomi, dan bantuan pangan dari luar negeri diperbesar, tetapi juga penetrasi dalam masyarakat Mesir dengan barang konsumsi Barat.

Konstelasi ini terus berlanjut di bawah Presiden Mubarak (sejak pembunuhan terhadap Sadat Oktober 1981); berhubungan dengan bantuan ekonomi dan militer AS untuk mempertahankan Perjanjian Camp-David tahun 1979 yang dilakukan Sadat dengan Israel. Dengan paksaan masalah ekonomi yang makin tumbuh (a.l. kemunduran penerimaan devisa dari ekspor minyak dan transfer yang berasal dari buruh tamu Mesir di luar negeri) dan tekanan IMF, menyebabkan pemerintah berkeputusan melaku-

kan reformasi pertama tahun 1987 (penghapusan subsidi, kurs tukar baru, dsb.), pelaksanaannya secara konsekuen masih dipertanyakan karena dampak sosial yang negatif untuk penduduk.

4. Dengan awal revolusi Mesir yang diperluas dan direorganisasi terutama sistem pendidikan dan kesehatan. Adanya tunjangan negara yang tinggi menghasilkan perbandingan dokter-penduduk dari 1:3.782 (1952) menjadi 1:770 (1984), tingkat harapan hidup naik menjadi 60 tahun (1989). Meskipun ada pelayanan kedokteran, misalnya dengan tempat di rumah sakit, tetap ada perbedaan besar antara desa-kota.

Usaha yang lebih besar dilakukan dengan perluasan sistem pendidikan: kuota penyesuaian pada anak-anak antara 6–12 tahun rata-rata kini 84%, tingkat aksara naik dari 30,3% (1960) menjadi 50% (1987).

5. Penggulingan borjuasi pertanian dan industri serta perkembangan aparat perencanaan menumbuhkan sebuah kelas militer yang setia kepada rezim dan menduduki semua posisi kunci di pemerintahan. tahun 1963 Nasser membangun sebuah partai kesatuan Uni Sosialis Arab (USA), merupakan aliansi kekuatan-kekuatan rakyat yang aktif (buruh, petani, tentara, intelektual, kapitalis nasional yang tidak melakukan pengisapan) dengan wakil minimum 50% petani dan buruh dalam organisasi USA. *Tujuan*: merealisasi "demokrasi sebenarnya" dan "sosialisme Arab".

Setelah Nasser meninggal tahun 1970, Sadat melanjutkan haluan pendahulunya dalam tiga hal: berdasar-

kan situasi ekonomi yang gawat, dilakukan pembukaan diri untuk modal asing; haluan pro Soviet yang dilakukan Nasser dalam rangka politik luar negerinya anti-imperialis dan karena alasan pembelian senjata (Juli 1972 pengusiran penasihat militer Soviet); pengizinan kubu politik di luar USA, November 1976 untuk pemilihan nasional membentuk partai tersendiri. Transformasi ke arah sistem multipartai ini dilakukan Sadat Agustus 1976 (pembubaran USA bulan Juli) dengan pembentukan sebuah partai nasional-demokrasi tersendiri (1979) dan mendapat 310 dari 360 mandat dalam rapat nasional.

Pembunuhan Sadat oleh aktivis Islam Oktober 1981 tidak menyebabkan perubahan mendasar dalam politik dalam dan luar negeri. Presiden Mubarak berpegang pada perjanjian perdamaian dengan Israel dan menyetujui *open-door-policy*, tetapi mengemukakan orientasi produksi lebih besar yang tercermin dalam rencana pembangunan 5 tahun 1982-1987 (tujuan: peningkatan pangsa PDB produksi industri sebesar 154%).

Kini situasi pengadaan dengan bahan pangan penting, memburuk; urbanisasi yang pesat menyebabkan kesulitan mendapatkan rumah dan beban sistem transportasi, tingginya tingkat inflasi (tahun 1986: 22,6%) menyebabkan turunnya penerimaan riil. Lebih menonjol lagi dalam masalah ini adalah naiknya utang luar negeri (tahun 1988 sekitar 40 miliar US\$) dengan penjadwalan utang yang diperlukan secara periodik dan pengangguran yang tidak dapat diatasi sehingga memaksa banyak orang Me-

sir bekerja di negara-negara minyak lainnya (dengan transfer kembali yang besar, misalnya tahun 1981: 13 miliar US\$); sejak terjadi krisis keuangan umum sarana ini makin terhambat.

6. Demokratisasi politik Mesir terbentur pada potensi konflik sosial karena situasi ekonomi yang memburuk. Sebagian besar penduduk tetap menolak politik rujukan Sadat dengan Israel. Oleh karena itu, Mesir menjadi terisolasi di dunia Arab dan hubungan diplomatiknya putus, meskipun bantuan keuangan Arab tidak dihentikan sama sekali.

Penyebabnya, seperti juga untuk normalisasi hubungan dengan sebagian besar negara Arab (kecuali Aljazair, Libia, dan Suriah) adalah dukungan kuat Irak dalam Perang Irak-Iran; Iran menggantikan Uni Soviet sebagai musuh utama politik ideologi dengan Mesir. Konfrontasi dengan Iran juga memperlihatkan bahwa oposisi Islam yang kuat sejak tahun '70-an terbentuk sebagai reaksi terhadap politik Sadat yang tidak mendukung ajaran sosial-politik Syiah yang militan, melainkan memapankan sebuah tata Islam dengan berbasis Islam Suni. Batas untuk organisasi Islam fundamental di Mesir adalah sempit; apalagi sejak tahun 1979 (perubahan UUD) *syariah* dijadikan sumber utama perundang-undangan. Bagian moderat dalam oposisi Islam yang bersedia bekerja sama dengan pemerintah, karenanya ditolerir, sementara kelompok-kelompok radikal dikejar-kejar negara dengan segala cara. Pada pemilihan parlemen April 1987 persaudaraan muslim dapat meraih 35

dari 448 kursi, tetapi tidak membahayakan mayoritas absolut partai nasional demokrat Mubarak (348 kursi). Keberhasilan Mubarak (terpilih kembali Oktober 1987) tidak mengaburkan kenyataan bahwa ada kerusuhan-kerusuhan politik (mogok, pemberontakan dinas rahasia tahun 1986), yang mengancam haluan liberal yang dilakukan secara hati-hati. Kepustakaan: A. Abdel-Malek, *Ägypten, Militär-gesellschaft*, Frankfurt 1971; A.H. Nossier, "Die sozio-politischen Bedingungen der wirtschaftlichen Entwicklung, dargestellt am Beispiel Ägyptens" (disertasi), Bochum 1979; P. Pawelka, *Herrschaft und Entwicklung im Nahen Osten: Ägypten*, Heidelberg 1985; G. Krämer, *Ägypten unter Mubarak. Identität und nationales Interesse*, Baden-Baden 1986; H. Hubel (ed.), *Nordafrika in der internationalen Politik*, München 1988; Th. Koszinowski/H.P. Mattes (ed.), *Nahost-Jahrbuch 1987, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in Nordafrika und dem Nahen und Mittleren Osten*, Opladen 1988. hpm

Mestis Keturunan dari orang tua berbagai ras, terutama Eropa dan Indian. dn

metropol Berasal dari bahasa Yunani, mula-mula dipakai untuk ibu kota kemudian menjadi istilah untuk hubungan dalam negara antara ibu kota (misalnya Paris) dan propinsi, kemudian digunakan untuk hubungan antara negara dan kelompok negara. Pengertian yang terakhir ini tidak saja merupakan perbedaan pembangunan (modern/dinamis/menarik-terbelakang/statistik/kampung), melainkan juga merupakan gambaran mengenai penyebab perbedaan perkembangan: pengisapan oleh negara-negara metropolitan yang identik dengan negara industri Barat, terutama dengan penguasa-penguasa ekonomi terkemuka. → teori *dependencia*. dn

MIC (*Middle Income Countries*) → Laporan Pembangunan Dunia.

MIGA (*Multilateral Investment Guarantee Agency*) Agen Garansi Investasi Multilateral, berdiri 12 April 1988, anak perusahaan Bank Dunia. Tujuan: memperbaiki iklim investasi untuk investasi langsung asing di negara berkembang. Untuk itu digunakan *Investment Guarantee Program* dan dinas konsultasi serta bantuan untuk pemerintah di negara berkembang. Anggota MIGA terbuka untuk semua anggota Bank Dunia dan Swiss; sampai September 1988, 71 negara telah menandatangani perjanjian MIGA, di antaranya 44 meratifikasi.

Organ: MIGA diurus oleh sebuah Dewan Gubernur (setiap negara mempunyai seorang wakil), sebuah Dewan Pengawas (sekarang 14 direktur, 11 di antaranya Direktur Eksekutif Bank Dunia) dan seorang wakil presiden sebagai pimpinan perusahaan (Y. Terasawa/Jepang). Presiden: B.B. Conable/AS (sekaligus presiden Bank Dunia).

Pembiayaan: MIGA memiliki modal sendiri sebesar 1.082 miliar US\$, di antaranya 687 juta US\$ didanai 1 Oktober 1988. Negara anggota membayar iurannya seproporsi iuran mereka ke pangsa modal di Bank Dunia; pembayaran tunai mereka harus 10% iuran dalam bentuk mata uang yang konvertibel dan 25% nonkonvertibel, sisanya sesuai kebutuhan.

Investment Guarantee Program menjamin pangsa investasi asing, perjanjian jasa dan manajemen, perjanjian lisensi dan *franchise* di negara

berkembang serta kesepakatan lainnya yang berisi transfer *know-how* dan alih teknologi dari negara industri ke negara berkembang. Atas permintaan sebuah negara dapat juga dijamin transfer investasi di negara berkembang dari pihak investor dalam negeri. Program ini menjamin investasi seperti di atas (pilihan) terhadap berbagai bentuk risiko yang tidak komersial: pelarangan dan pembatasan transfer modal; perampasan dan tindakan-tindakan serupa; perang, revolusi, kerusuhan politik serta pelanggaran perjanjian dalam kasus tertentu oleh negara penerima. Kapasitas asuransi MIGA keseluruhan berlangsung maksimal satu setengah kali dari modal yang disepakati, kini sekitar 1 miliar US\$. Tidak lebih dari 5% kapasitas asuransi keseluruhan (sekarang sekitar 50-60 juta US\$) perlu terikat dengan setiap investasi, tetapi MIGA dimungkinkan bersama dengan agen asuransi nasional dan swasta ikut mengasuransi proyek-proyek yang lebih besar. Hal ini diurus oleh agen sebagai pengurus dana tambahan (dana sebenarnya terpisah), selama setiap negara anggota menginginkan mengasuransi investasi tambahan. Kapasitas asuransi dengan demikian hanya dibatasi oleh keinginan anggota untuk mengambil alih kewajiban asuransi.

Tempo asuransi secara umum berlangsung 3-15 tahun, tingginya asuransi maksimal 90% jumlah investasi yang diasuransikan. Ganti rugi tidak saja dibayar secara penuh (kecuali jika terjadi perang, kerusuhan politik, dsb.), begitu juga sebagian kerugian investasi. Tingginya premi asuransi:

biasanya 0,3%-1,5% jumlah asuransi per tahun dan per kelompok risiko serta 0,6%-3% untuk semua bentuk risiko per tahun.

Alamat: 1818 H-Street, N.W. Washington, D.C. 20433 USA.

mik Mikronesia → Kepulauan Pasifik.

Military Assistance Program → politik bantuan pembangunan AS.

MINEX (*Mineralischer Exporterlöse*) → SYSMIN.

minifundia, minifundisme Usaha pertanian kecil atau sangat kecil. Minifundia sering berkaitan erat dengan latifundia; sering juga disebut kompleks latifundia-minifundia. Konsentrasi tanah membolehkan *campesino* mendapatkan tanah yang terencil, kecil dan berkualitas buruk. Penyebab lain adalah pembagian warisan. Memang ada perkebunan minifundisme untuk tanaman tertentu (misalnya kopi di Kolombia), tetapi minifundia biasanya berkaitan dengan ekonomi subsistensi. Kemajuan teknologi dihalangi oleh kurangnya pendidikan dan informasi, kurang modal, keterbatasan pada pengambilan kredit, dan keterbatasan lahan yang diolah.

minimum learning needs → pendidikan dasar.

minoritas Pengertian minoritas mempunyai beberapa arti: sebagai kelompok yang jumlahnya lebih sedikit, sebagai pengertian tandingan dari mayoritas (dalam hal representatif organisasi, asosiasi, partai); untuk Dunia Ketiga yang paling berarti adalah kelompok manusia yang secara ras, kultur (bahasa), dan/atau agama berbeda dari mayoritas populasi atau bagian penduduk lainnya. Minoritas juga menandai kelompok yang dirugikan atau merasa dirugi-

kan dalam masyarakat, biasanya kelompok pinggiran (→ marjinalitas).

Dilihat secara historis, munculnya tuntutan sebagai minoritas etnis, agama atau nasional, akan pengakuan perlindungan hukum atau penjaminan hak istimewa, persamaan sosial, dsb., berkaitan dengan pembentukan negara nasional (→ nasionalisme). Di negara Dunia Ketiga yang multietnis, berlangsung penarikan garis perbatasan dalam rangka dekolonisasi tanpa memperhatikan daerah pemukiman etnis-etnis. Sering adanya privilese atau marjinalisasi kelompok etnis, menyebabkan terjadinya konflik-konflik intern yang tidak dapat mencegah usaha-usaha perlindungan minoritas sebagai hak dasar dalam UUD. Hanya sedikit dapat ditemukan jalan keluar federalistis, hal ini sering tidak dapat disepakati karena adanya tradisi pemerintahan tradisional yang terpusat. Organisasi internasional (gabungan bangsa, PBB) menangani masalahnya dalam deklarasi, perjanjian-perjanjian melindungi minoritas dan tindakan-tindakan untuk mengurangi kesengsaraan minoritas (misalnya pengungsian).

Kepustakaan: F. Ermacora, *Minderheitenschutz in der Arbeit der Vereinten Nationen*, Wien 1964; W. Lindig (ed.), *Völker der Vierten Welt*, Reinbek 1981; D.L. Horowitz, *Ethnic Groups in Conflict*, Berkeley 1986; D. Rothermund, J. Simon (ed.), *Education and the Integration of Ethnic Minorities*, London 1986; K. Eikenberg, "Ethnische Konflikte in der Dritten Welt", dlm.: *Jahrbuch Dritte Welt* 1987.

dn
miskin Diskusi mengenai miskin sebagai tanda dan struktur data keterbelakangan di pertengahan tahun '70-an dengan terlihatnya pemiskinan absolut dan pengolahan konsep miskin absolut yang sesuai untuk itu, men-

dapatkan dimensi baru. Miskin relatif dimengerti sebagai kesenjangan kemakmuran antara negara berkembang dan negara industri dan di dalam negara berkembang sendiri antara daerah-daerahnya serta antara lapisan sosial (→ distribusi pendapatan). Mantan Presiden Bank Dunia, R. McNamara, mendefinisikan kemiskinan absolut dalam pidatonya di Nairobi tahun 1973 sebagai berikut. Kemiskinan absolut ... ditandai oleh keadaan persyaratan hidup yang tidak manusiawi seperti penyakit, buta aksara, kekurangan makan, dan keterlantaran sehingga korban kemiskinan absolut ini tidak pernah dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia yang paling mendasar. Ratusan juta manusia di negara berkembang menderita dalam kondisi hidup yang tidak manusiawi: sepertiga sampai setengah dari 2 miliar manusia di negara berkembang kelaparan atau menderita kekurangan makan; 20%-25% anak-anak di negara berkembang meninggal dunia sebelum mencapai umur 5 tahun; yang tidak meninggal akan mengalami hidup dalam kemiskinan, otak mereka menjadi rusak, badan mereka menjadi cacat, dan daya tahan hidup mereka menjadi lemah akibat kekurangan makan; harapan hidup manusia di negara berkembang 20 tahun lebih pendek daripada di negara industri. D.k.l. hidup manusia di negara berkembang diperpendek 30% dari usia yang dapat dicapainya Sejak lahir, manusia-manusia ini telah divonis mati lebih dini; 800 juta manusia buta aksara dan anak-anak mereka walaupun semakin diperluasnya sektor pendidikan akan tetap buta aksara ...

Keadaan ini akan semakin memburuk dan menentukan nasib 40% manusia di negara berkembang. Data-data kuantitatif untuk mengukur miskin di Dunia Ketiga tidak lagi diteliti sejak akhir tahun '70-an, dan angka-angka yang ada dianggap sangat tidak pasti. Tahun 1980 jumlah miskin absolut (didefinisikan dengan konsumsi kalori per hari kurang dari 2.250 satuan) untuk Asia (tanpa Cina, Jepang, dan Timur Tengah) diperkirakan sekitar 40% penduduk (350–450 juta). Bank Dunia melaporkan jumlah kemiskinan absolut di seluruh dunia sebanyak 700 juta–1 miliar manusia dan selama tahun '80-an jumlah tersebut semakin meningkat. Tahun 1985 sebanyak 21 dari 35 negara berkembang dengan pendapatan rendah yang diteliti, telah ditemukan bahwa penggunaan kalori per kepala menjadi lebih kecil dibandingkan 20 tahun yang lalu. Berbagai lembaga berusaha memberi diferensiasi lanjut untuk menentukan konsep miskin dan menentukan batas kemiskinan—merupakan persyaratan untuk sebuah politik yang terarah untuk memerangi miskin. IDA mengembangkan lima inti indikator kemiskinan absolut dan menentukan batas kemiskinan secara kuantitatif sebagai berikut. Pendapatan per kapita 150 US\$; pemakaian kalori setiap hari 2.160–2.670; harapan hidup di bawah 55 tahun; kematian anak-anak lebih dari 33 per seribu; tingkat kelahiran lebih dari 25 per seribu. Lebih sederhana adalah *Physical Quality of Life Index* (PQLI) dengan indikator harapan hidup, kematian anak-anak, dan tingkat buta aksara. ILO membuat 2 batasan kemiskinan, yaitu disamakan

dengan pendapatan rata-rata seorang buruh tidak terdidik di sebuah pabrik besar dari industri pengolahan di India (sangat miskin) dan disamakan dengan pendapatan yang besarnya 1 Rupee per hari (miskin sekali). Nilai pendapatan di negara berkembang lainnya dapat dihitung dengan bantuan harga dari "sekeranjang barang" yang khas. Karena perkiraan miskin yang berkaitan dengan pendapatan absolut dan berhubungan dengan kekayaan, sebuah studi terbaru Bank Dunia menyebutkan *food adequacy standards* sebagai indikator penting untuk mengukur kemiskinan. Manusia yang mengalami kemiskinan absolut adalah mereka yang harus menggunakan lebih dari 70% pendapatannya untuk membeli bahan makanan dan seringkali menderita lapar (batas kalori: 2.250). Manusia yang harus menggunakan lebih dari 80% pendapatannya untuk membeli bahan makanan dan terancam kekurangan makan yang berat diklasifikasikan sebagai ultra miskin.

Kepustakaan: F. Fröbel dkk. (ed.), *Die Armut des Volkes*, Reinbek 1974; M. ul Haq, *The Poverty Curtain. Choices for the Third World*, New York 1976; G. Adler-Karlsson, *Der Kampf gegen die absolute Armut*, Frankfurt 1978; M.D. Morris, *Measuring the Conditions for the World's Poor. The Physical Quality of Life Index*, New York dll. 1979; Global 2000, *Der Bericht an den Präsidenten*, Frankfurt 1980; W.P. McGreevey (ed.), *Third World Poverty*, Lexington/Toronto 1980; M. Lipton, *The Poor and the Poorest*, World Bank. Discussion Papers 25, Washington 1988. dn

miskin absolut → miskin.

mixed economy Ekonomi campuran. Tata ekonomi nasional dengan pangsa modal pengusaha separo pada swasta dan separo pada pemerintah. Di negara berkembang biasanya dapat

dibedakan tiga pemilik modal: swasta nasional, pemerintah nasional, dan modal asing. **dn** MNLF → gerakan pembebasan, Filipina.

model Bariloche Model dunia hasil sebuah kelompok peneliti dari negara-negara Dunia Ketiga, dinamakan menurut yayasan Bariloche/Argentina yang menunjang penelitian, dan dianggap sebagai model tandingan terhadap laporan Kelompok Roma. Jika Kelompok Roma menekankan arti keterbatasan pertumbuhan yang bertolak dari sedikit dan habisnya sumber daya, model Bariloche dalam argumentasinya memfokuskan diri pada keterbatasan penderitaan. Visi masa depan Kelompok Roma untuk sebagian besar manusia telah menjadi realitas yang sangat kejam. Namun, penyebabnya tidak terletak dalam keterbatasan fisik bumi, melainkan karena situasi sosio-ekonomi dan politik, akibat ketidakseimbangan pembagian kekuasaan sehingga tidak dapat diatasi. Secara rinci dibantah asumsi berkurangnya sumber daya (jumlah bahan mentah keseluruhan di dunia tidak mungkin diramalkan, terutama eksploitasi dan pemanfaatannya bergantung pada tingkat teknologi dan situasi ekonomi) dan menyarankan sebuah politik pertumbuhan yang berorientasi ke kebutuhan dasar penduduk di negara berkembang. Model matematis digunakan untuk menghitung, melihat ruang waktu, dan persyaratan, yang dapat dicapai sebuah pemenuhan kebutuhan dasar yang memadai. Baik persyaratan yang dibuat dalam model, maupun gambaran tujuan politik kema-

sarakatan dari kelompok Bariloche (masyarakat persamaan, partisipasi penuh dan tidak konsumtif) sebagian bersifat kabur atau utopis dan jauh dari realitas saran-saran strategi pembangunan yang sesuai dengannya. Kritik yang layak terhadap Kelompok Roma paling tidak memperlihatkan adanya pemikiran alternatif, bagaimana manusia dapat bertahan hidup menurut pandangan negara berkembang.

Kepustakaan: D. Meadows, dll., *Die Grenzen des Wachstums*, Stuttgart 1972; H.v. Nussbaum (ed.), *Die Zukunft des Wachstums*, Düsseldorf 1973; A.O. Herrera/H.D. Scolnik dll., *Grenzen des Elends. Das Bariloche-Modell: So kann die Menschheit überleben*, Frankfurt 1977. **dn**

model dunia Penelitian masa depan di tahun '60-an terutama masih mempertanyakan peluang dan kemungkinan di seluruh dunia (!) dari kemajuan teknologi dan industri, serta permasalahan dampak politik, sosial, dan kultural dari perubahan masyarakat yang diakibatkannya.

Awal tahun '70-an ditandai oleh pembangunan yang berbahaya, akhir dunia dan sumber daya menjadi tema studi dan model global yang dilakukan di mana-mana, berdasarkan pendekatan metodik dapat dibedakan dalam 4 kelompok (Bechmann: 1985, 25 dst.): model simulasi komputer (misalnya dua laporan pertama dari Kelompok Roma, kecuali model Bariloche, biasanya berusaha meliputi perkembangan sekarang yang kompleks dan struktur-struktur di bidang penduduk, pangan, sumber daya, dan lingkungan (→ ekologi) berdasarkan sebuah model dan memoleskan tambahan ke masa depan; situasi dan analisis lingkungan yang kebanyakan

bersifat deskriptif (misalnya *Global 2000); katalog aksi untuk mereformasi sistem ekonomi dunia (misalnya *Laporan Brandt); saran-saran untuk bertindak dalam hal perlindungan lingkungan, politik kependudukan, dan penghematan sumber daya (misal *Laporan Brundtland).

Meskipun ada banyak perbedaan, studi-studi ini mempunyai kesamaan dalam perkiraan mereka mengenai masalah kunci kemanusiaan yang dapat dikenali sekarang. Meskipun banyak berpengaruh terhadap pendapat publik, saran tindakan mereka sampai kini hampir tidak ada yang direalisasi dalam aksi politik konkret.

Kepustakaan: W.D. Eberwein, "Die Zukunft als Problem der Gegenwart. Weltmodelle - Rückblick und Ausblick", dlm.: *APuZ* 34/1984, hlm. 3-19; A. Bechmann (ed.), *Globale Umwelt-politik - Wissen ohne Konsequenz. Eine synoptische Darstellung der Ergebnisse der wichtigsten Weltmodelle und globalen Handlungsprogramme, Werkstattberichte des Instituts für Landschaftsökonomie*, Berlin 1985. **bh**

model ekonomi ekspor (Export-Economy-Model) Sebagai model pengaitan sebuah ekonomi negara berkembang ke ekonomi dunia. Lebih dari pengertian pembagian kerja internasional yang juga berinti struktur perdagangan luar negeri antara negara berkembang dan negara industri, model ekonomi ekspor ini mengacu pada struktur produksi intern dan konsekuensi sosial dari suatu proses pertumbuhan ekonomi yang tergantung dan mengacu ke luar negeri.

Dalam struktur perekonomian nasional, sektor ekspor sangat menentukan karena ketergantungannya dari luar tidak dapat mendorong ke arah suatu proses pertumbuhan ekonomi yang maju dan berkesinambungan

(model ekspor kolonial), atau pertumbuhan tersebut dicapai dengan mero-sotnya masalah sosial dan politik yang sangat rumit (model ekspor kapitalis yang tergantung). Perubahan kutub ekonomi membatasi kedua model tersebut. Model ekonomi ekspor kolonial ditandai oleh elemen dan dampak berikut: a. dominasi barang primer dan pembatasan pada beberapa komoditas ekspor andalan (*monostruktur); b. hegemoni modal asing dalam produksi *perkebunan, pertanian, dan perdagangan (ekspor-impor), tingginya tingkat pemusatan pemilikan lokal pada perusahaan strategis sisanya yang sering berada di bawahnya; c. integrasi sektor ekspor yang berkembang ke ekonomi dunia dan lepas dari ekonomi lokal (desintegrasi). (*enklave, *linkage-effects* yang kecil), tidak ada produksi untuk pasar dalam negeri karena teknologi padat modal, ketidakseimbangan ekstrem dalam distribusi pendapatan, *marginalitas; e. pemakaian hasil ekspor untuk konsumsi mewah oligarki ekspor dan untuk mempertahankan model (pembiayaan impor untuk *input* dan beban utang).

Model ekonomi ekspor yang kapitalis dan tergantung mendorong terjadinya industrialisasi serta perubahan, sejauh struktur produksi masih mungkin memakai tenaga kerja lokal yang murah terutama pada diversifikasi perdagangan luar negeri. **dn**
model pembangunan Strategi pembangunan menetapkan adanya kepentingan membuat keputusan yang mendasar antara kemungkinan alternatif pembangunan ekonomi, sosial, dan politik. Keputusan ini misalnya ber-

dasarkan tipe struktur produksi, pengawasan atas alat produksi, pembagian ruang dan sektoral kutub-kutub pertumbuhan, jenis hubungan ke pasar dunia, jenis dan tingkat otonomi nasional, pembagian manfaat pembangunan sosial-ekonomi, jenis dan tingkat partisipasi politik penduduk, dsb. sehingga model pembangunan dimengerti sebagai kasus tersendiri yang menggeneralisasi sejumlah bidang permasalahan ini untuk sebuah alternatif. Oleh karena itu, model pembangunan terdiri atas hubungan berbagai keputusan dasar menjadi sejumlah besar situasi sehingga memperlihatkan sifat-sifat tertentu yang membedakannya dari yang lain. Alternatif konkret, misalnya sektor industri-sektor pertanian; industri berat-industri ringan; pertumbuhan-distribusi, padat modal-padat karya; orientasi ekspor-orientasi pasar dalam negeri; orientasi konsumsi-orientasi investasi; integrasi pasar dunia-disosiasi; tergantung-otonom-otosentris (→ pembangunan yang otosentris); otoriter/represif-demokratis/partisipatoris, dsb. Keputusan tertentu, kombinasi dan struktur hubungannya membuat sebuah model pembangunan.

dn
model sentra-periferi Berusaha menjelaskan hubungan ketergantungan dalam masyarakat dunia sekarang ini. Model ini dapat dipakai untuk analisis keterbelakangan di beberapa tingkat, dipakai terutama oleh peneliti dari aliran teori *dependencia* dan pendekatan sistem dunia.

1. Global: asumsi dasar adalah sebuah struktur hierarkis masyarakat dunia yang muncul secara historis

melalui pasar dunia, berkembang secara kapitalistik dan diwarnai oleh pembagian kerja internasional. Bangsa-bangsa kapitalis yang berkembang sangat maju membentuk sentra, sementara negara berkembang membentuk periferi. Model ini terutama menonjolkan kesamaan antara pembangunan (negara industri) dan keterbelakangan (negara berkembang). Kedua proses ini berlandaskan suatu interaksi keterbelakangan periferi dengan sentra. Dengan pemindahan ongkos pembangunan sebuah daerah ke kesatuan wilayah lainnya—begitu tesisnya—, kemungkinan pertumbuhan otonom menjadi terbatas. Dengan demikian dianggap bahwa keterbelakangan disebabkan eksternal dan merupakan proses situasi ketergantungan eksternal dari faktor-faktor penentu struktur dan proses di negara-negara Dunia Ketiga. Oleh karena itu, analisis berdasarkan teori *dependencia* bertolak dari hubungan ketergantungan setiap negara dan manifestasi intern masyarakat di periferi (→ heterogenitas struktural, → kapitalisme periferi) serta analisis sistemik dunia dari sistem dunia dan perubahannya (sebuah hukum gerak).

2. Regional: dibandingkan dengan negara lain yang daerahnya berkembang lebih maju (seperti Israel, Brasilia, Afrika Selatan) dapat menjadi subsentra militer dan ekonomi, menjadi sentra di periferi dengan otonomi tertentu (I. Wallerstein, H. Jaguaribe).

3. Nasional: di dalam bangsa di periferi dan sentra, model ini juga dipakai (kolonialisme internal). Meskipun teori-teori terbaru berusaha menjelaskan keterbelakangan relatif

di daerah tertentu bangsa sentra kapitalis dengan instrumen teori *dependencia* (perdebatan mengenai regionalisme Eropa Barat), perlu ditunjukkan bahwa sentra-periferi di dalam sebuah negara berkembang dalam konteks heterogenitas struktural merupakan sesuatu yang lain. Sentra nasional kebanyakan kota-kota besar merupakan tempat pembuatan semua keputusan yang menyangkut masyarakat di sana. Hal ini terkait ke sistem perbankan, komunikasi, dan lalu lintas internasional (sering terletak di pantai). Hubungan ke bangsa sentra biasanya dapat berlangsung lebih lancar daripada ke *hinterland* nasional, periferi. Di sentra berdiam perusahaan transnasional, meskipun dalam jumlah terbatas, tercipta kesempatan kerja baru; di sini barang konsumsi mewah menampakkan diri untuk tingkat kehidupan yang hanya dapat dicapai oleh segelintir manusia. Di hadapannya adalah periferi negara yang sebagian besar pertaniannya dilengkapi dengan alat produksi yang kurang berkembang, kurang produktif, proses ekonomi berlandaskan sebagian pada perdagangan barter, periferi dibebani masalah peledakan penduduk. Akibat perbedaan sentra-periferi adalah percepatan urbanisasi. Sentra menjadi daya tarik migrasi massal yang hanya sedikit dapat memenuhi apa yang diharapkan, tetapi sebagian besar mendapatkan kehidupan di *slums*, dalam marginalitas.

Galtung dalam teori struktural imperialisme mengaitkan aspek nasional dan internasional model sentra-periferi. Untuk mempertahankan ketergantungan struktural, menurut Gal-

tung, berlangsung kerja sama antarlapisan atas periferi yang mewakili sentra nasional secara sosial yang menentukan kepentingan mereka melalui pasar dunia.

Kepustakaan: D. Senghaas (ed.), *Imperialismus und Strukturelle Gewalt*, Frankfurt 1972; D. Senghaas (ed.), *Kapitalistische Weltökonomie*, Frankfurt 1979.

rs
model Westminster Model UUD yang berorientasi ke UUD Inggris. Jadi, ada pemerintahan parlementer, sistem multipartai, pemilihan mayoritas relatif dalam lingkaran satu pemilihan. Inggris berusaha agar negara-negara yang merdeka dari kekuasaan kolonialnya memberlakukan model Westminster, tanpa memikirkan persyaratan sosio-ekonomi, politik-kultural yang berbeda di negara berkembang sehingga model Westminster ini tidak mampu banyak berfungsi.

dn
moneterisme Mencerminkan revolusi tandingan dalam teori uang untuk melawan keynesianisme. Moneterisme dikembangkan pertama kali oleh Milton Friedman dari aliran Chicago. Berbeda dengan Keynes, dalam teori ini jumlah uang mempunyai bobot yang lebih besar. Argumentasi kaum moneteris berlangsung dengan latar belakang teoretis dari teori kuantitas terbaru yang mempostulasikan sebuah korelasi erat antara volume uang yang besar dan nilai uang. Teori ini berkembang di negara industri dan dijamin melalui materi empiris dari AS—tidak diterima begitu saja—, dipakai analog oleh kaum moneteris untuk menganalisis fenomena inflasi di negara berkembang. Karena dikatakan bahwa inflasi selalu dan di mana-mana merupakan fenomena moneter, dalam pengertian

bahwa inflasi hanya dapat tercipta melalui pertumbuhan pesat jumlah uang yang relatif ke *output*.

Alasan terjadinya suatu pertumbuhan moneter dapat sangat berbeda-beda, tetapi sebab pokok inflasi di negara berkembang menurut pendapat kaum moneteris, terletak pada politik fiskal yang tidak disiplin dalam strategi pembangunan yang berusaha menutup pertumbuhan yang diinginkan dari pendapatan nasional dengan bantuan defisit anggaran yang tinggi, bukan melalui pengambilan kredit dari publikum melainkan dibiayai melalui suatu politik kredit yang ekspansif. Tujuan pertumbuhan ekonomi menurut kaum moneteris dengan demikian menjadi terancam oleh inflasi karena menurut mereka kecenderungan inflasioner berkaitan dengan dampak negatif atas proses pertumbuhan: a. inflasi berkurang untuk investasi lokal sumber daya yang ada karena mendorong penerima pendapatan untuk mentransformasikan tabungan potensial ke peningkatan konsumsi aktual. Selain itu, inflasi menstimulasi ekspor modal dan mengejutkan impor modal; b. sumber daya yang tersisa bukan dipakai untuk investasi yang relevan dengan strategi pembangunan yang penuh risiko, melainkan makin banyak dipakai dengan orientasi penjaminan nilai dan investasi yang tidak produktif (misalnya tanah), atau dalam sesuatu yang bersifat spekulatif (misalnya dalam investasi *Euro-Dollar*); c. dana yang dipakai untuk pemanfaatan produktif sesungguhnya, cenderung membangun industri yang secara ekonomi tidak efisien karena

tangan tidak terlihat mekanisme harga dan persyaratan inflasi tidak menjamin alokasi optimal sumber daya. Dari analisis ini kaum moneteris berkesimpulan bahwa tujuan strategi pembangunan untuk mencapai pertumbuhan yang lebih besar akan gagal jika sebelumnya tidak tercapai tujuan stabilitas. Hanya pada stabilitas tingkat harga didapatkan jaminan bahwa salah alokasi yang disebutkan dapat dicegah dan dapat membuka ruang gerak pertumbuhan yang lebih besar. Sebagai tugas pembuat keputusan politik ekonomi diformulasi bahwa stabilitas menyeimbangkan anggaran dan menahannya serendah mungkin sehingga harus dapat mencegah ekspansi kredit yang besar, harus menjalankan mata uang yang bebas dan konvertibel serta sedapat mungkin menjamin sebuah kurs tukar yang satu dan konvertibel agar dapat membuat peluang berfungsinya sistem ekonomi pasar bebas, hanya mungkin pada harga yang relatif stabil. Dari pendekatan penjelasan yang mulanya murni teori uang, berlanjut dengan konsekuensi politik ekonomi yang mempunyai kebersamaan dengan banyak elemen neoliberalisme. Ekonomi pasar bebas dan tangan tidak terlihat dari mekanisme harga diharap dapat membantu terobosan di front yang luas. Ongkos sosial yang berkaitan dengan politik demikian, terutama dalam sebuah penajaman distribusi pendapatan, tidak diperhatikan. Dalam pusat politik pembangunan adalah mencapai tujuan pertumbuhan setinggi mungkin dan merata dengan stabilitas harga selanjutnya. Pengalaman empiris yang jelas

dengan politik ini adalah Cile di bawah Pinochet dan Brasilia.

Kepustakaan: M. Friedman, *Inflation-Causes and Consequences*, London 1963; W. Baer/I. Kerstenetzky (ed.), *Inflation and Growth in Latin America*, Homewood (III) 1964; P. Kalmbach, *Der Neue Monetarismus*, München 1973.

hpn

Mongolia, Republik Rakyat 1. Iklim dan bentuk daratan (pegunungan Gurun Gobi, padang rumput) di Mongolia yang terletak di antara Uni Soviet dan Cina, memungkinkan kegiatan pertanian hanya di sebagian kecil wilayah negara (terutama usaha pertanian negara). 11% Mongolia adalah hutan. Hasil perburuan (terutama mantel bulu) mempunyai kontribusi yang penting dalam ekspor. Peternakan tradisional yang dilakukan terutama dalam koperasi setelah dilakukan kolektivisasi (sebagian ternak berada di tangan swasta), merupakan sektor ekonomi yang dominan di negara itu. Penambangan berbagai kekayaan bumi (terutama bijih besi, bijih timah hitam dan bijih tembaga, emas dan perak) masih dalam tahap permulaan.

2. Secara historis bangsa Mongol sangat berpengaruh di abad ke-12 dan 13 (Jenghis Khan), ketika Khan Raya merupakan yang terkuat di dunia. Setelah jatuhnya Kerajaan Mongol, Mongolia sampai abad ke-20 berada di bawah kekuasaan Cina. Negara itu merdeka tahun 1921 dengan bantuan tentara Uni Soviet. Partai Rakyat Mongolia yang revolusioner tahun 1924 membangun sebuah demokrasi rakyat menurut model Moskow. Mereka mendapatkan 99,99% suara pada pemilihan parlemen satu kamar (370 anggota) tahun 1986 (kepala negara

dan kepala partai sejak Desember 1984: Schambyn Batmunch).

3. Penduduk Mongolia tahun 1989 berjumlah sekitar 2 juta, dengan demikian 1,2 penduduk/km² (ibu kota Ulan Bator tahun 1984: sekitar 470.500 penduduk, tingkat urbanisasi: 52%. 87% penduduk adalah orang Mongol (serta bangsa Turki, Cina, Rusia). Tahun 1980-1985 jumlah pekerja di pertanian turun banyak, dari 40% menjadi 33,5%, usaha produksi naik dari 22% menjadi 24,7%. Sejak tahun 1960 berlaku wajib sekolah umum (hampir tidak ada buta aksara). Dalam bidang kesehatan tahun 1985: 2,4 dokter untuk 1.000 penduduk (harapan hidup: 62 tahun).

4. Mongolia sangat bergantung pada Uni Soviet (tahun 1985: sekitar 99% impor Mongolia, 70% ekspor). Rencana pembangunan berorientasi pada kebutuhan COMECON. Dengan demikian, Mongolia berada dalam konflik dengan Cina, tempat hidup lebih banyak orang Mongol daripada di Mongolia dan yang menganggap Cina sebagai tanah air orang Mongol yang sebenarnya. Di tahun-tahun terakhir terlihat peredaan ketegangan antara kedua negara; Desember 1988 mereka menandatangani perjanjian mengenai perbatasan bersama. Uni Soviet menarik sebagian tentaranya, sekitar 70.000 (diperkirakan) dari Mongolia, yang ditempatkan berdasarkan perjanjian persahabatan tahun 1966. Tahun 1987 AS dan Mongolia bersepakat melakukan hubungan diplomatik.

Kepustakaan: C.R. Bawden, *The Modern History of Mongolia*, London/New York 1968; B.

Grossmann, "Mongolische Volksrepublik", dlm.: *HDW I*, 4, 1978, hlm. 463 dst. **rs/bh**

monitoring → evaluasi.

monokultur/monostruktur Pembangunan pertanian/perekonomian terutama untuk menghasilkan produk (mentah) yang ditentukan ekspor. Banyak negara berkembang ditandai oleh monokultur (misalnya Zambia tembaga lebih dari 85% ekspor, Burundi sampai 90% kopi, Kuba sampai 85% gula, Gabon 85% minyak bumi), sebagian karena mereka memiliki sumber daya penting, di lain pihak karena mereka dipaksa oleh penguasa kolonial untuk masuk ke pembagian kerja internasional kolonial. Berlawanan dengan teorema keuntungan ongkos komparatif, monokultur terbukti menjadi jerat untuk negara berkembang. Monokultur di lawan dengan tindakan strategi pembangunan dari diversifikasi dan industrialisasi, tetapi juga tindakan untuk membuat arus lingkaran ekonomi yang sempurna di ekonomi negara berkembang. → pembangunan otosentris. **dn**

Montserrat → Karibia.

Mozambik Sejak pertengahan tahun '80-an menjadi korban politik destabilisasi yang dilancarkan Afrika Selatan. Tentara pemberontak RENAMO yang sebagian besar dikendalikan oleh Afrika Selatan menghancurkan bekas koloni ini melalui perang yang sangat brutal terhadap penduduk sipil. Republik Rakyat Mozambik yang pernah marxis-ortodoks telah mengoreksi pembangunan sosialisnya, serta memberlakukan ekonomi pasar dan kerja sama dengan negara industri Barat.

1. Mozambik terletak di sebelah tenggara Afrika (luas 799.380 km²)

mempunyai kemungkinan pertanian yang baik, terutama di lembah Sungai Zambesi dan Limpopo. Aneka ragam kekayaan tambang masih sedikit diteliti dan belum dimanfaatkan; yang penting adalah tambang batu bara di Moatize di propinsi Tete (cadangan lebih dari 6 miliar ton) yang terbengkalai karena hancurnya jalur kereta api. Mozambik memiliki cadangan tenaga air yang besar dan memiliki tenaga air terbesar di Afrika yang dihasilkan oleh bendungan Zambesi di Cabora Bassa, yang hanya dipakai 1% akibat peledakan salurannya. Kapasitas di atas 2.000 MW adalah 30 kali lipat dari kebutuhan Mozambik (listrik dipasok ke pertambangan Afrika Selatan di Transvaal). Sebuah potensi ekonomi yang besar adalah letaknya yang menguntungkan untuk jalur lalu lintas. Dengan kereta api dan pelabuhan Maputo, Beira, serta Nacala, sejak dulu Mozambik merupakan tempat transit yang sangat penting untuk negara-negara pedalaman di Afrika sebelah selatan (dan rute alternatif melalui Afrika Selatan). Namun, sejak awal perang hampir semua jalan terputus, perdagangan dan pengadaan hampir lumpuh sama sekali.

2. Sejak abad ke-17 di Mozambik berkembang perdagangan budak untuk Brasilia. Di abad ke-19 Portugis menaklukkan suku-suku Mozambik di pedalaman yang melakukan perlawanan sampai tahun 1920. Penduduk Afrika diisap secara ekonomi melalui pelaksanaan pajak kepala, kerja paksa, perampasan tanah, dan pembangunan latifundia untuk produksi ekspor.

3. Tahun 1989 penduduk Mozambik diperkirakan berjumlah 15 juta, di antaranya sekitar 1,2 juta hidup di ibu kota Maputo. Dengan kepadatan 18,1 penduduk/km², Mozambik termasuk negara yang jarang dihuni di Afrika. Pengungsi akibat perang menyebabkan tingkat urbanisasi naik sekitar 15%-20% (tahun 1980: 9%). Dari 250.000 kaum pendatang Portugis dulu, kini tersisa hanya beberapa ribu saja, sekarang ditambah 20.000 orang Asia. Sejak mulai perang RENAMO telah membunuh sekitar 100.000 manusia, 1 juta melarikan diri ke negara-negara tetangga (Zimbabwe, Malawi), 1,5 juta terusir dari tanahnya sendiri. Penduduk Afrika yang meliputi lebih dari 90% (Bantu, Zulu), sangatlah heterogen. Ada 15 kelompok bahasa yang lebih besar; bahasa Portugis tetap menjadi bahasa resmi setelah Mozambik merdeka. Di sebelah utara dan pantai berkembang agama Islam (10% penduduk), 50% penduduk berkepercayaan animis, 18%-20% Katolik, dan 4%-5% Protestan. Situasi dalam bidang pendidikan dan kesehatan termasuk salah satu yang terburuk di dunia. Portugis hampir tidak memberikan pelayanan kesehatan dan tidak menciptakan akses pendidikan kepada penduduk pribumi. Ketika merdeka, Mozambik memiliki tingkat buta aksara tertinggi di dunia. Ketika itu hampir semua guru dan dokter meninggalkan Mozambik. Dengan anggaran sosial yang tinggi, pemerintah Mozambik setelah tahun 1975 mula-mula berhasil membangun sistem kesehatan dasar yang meluas. Perang telah menghancurkan semua keberhasilan (yang dipuji di dunia

internasional). Sampai tahun 1988 RENAMO (menurut sebuah laporan *UNICEF) telah menghancurkan 2.018 sekolah yang merupakan 75% dari semua sarana pendidikan dan mengusir lebih dari 5.000 guru. Dengan demikian, setengah juta anak (1/3 dari semua wajib sekolah dasar) tidak memiliki pendidikan. Selanjutnya, dengan menghancurkan 595 pos kesehatan dan klinik kecil berarti menghancurkan 1/3 infrastruktur kesehatan dasar di Mozambik. Sekitar 2-3 juta orang tidak mendapat pelayanan kesehatan. Angka kematian anak-anak meningkat dua kali lipat sejak mulai perang, dan sekarang merupakan yang tertinggi di dunia. Dari 1.000 kelahiran, meninggal 375 anak sebelum mencapai umur 5 tahun (bandingkan: Botswana 100, Tanzania 185). Menurut UNICEF, hampir 45% anak meninggal akibat perang dan bencana kelaparan yang ditimbulkannya. Tahun 1988 terjadi defisit 710.000 ton gandum, serta 204.000 buncis, gula, dan minyak. Akhir tahun '80-an Mozambik hanya dapat memberi makan 10% penduduk dan hanya dapat bertahan hidup dengan bantuan darurat internasional besar-besaran (tahun 1988: 680 juta DM).

4. PDB per kapita tahun 1988 berada di bawah 100 US\$. Menurut statistik PBB, Mozambik termasuk negara keempat termiskin di dunia; Bank Dunia menggolongkan Mozambik sebagai negara termiskin di dunia. Sektor kunci ekonomi tetap pertanian (pangsa PDB tahun 1985: 40%), menyerap 84% angkatan kerja, menghasilkan 75% hasil ekspor

(1984). Berbeda dari banyak negara berkembang, struktur ekspor pertanian Mozambik secara prinsipil terdiversifikasi (gula, teh, serat sisal, kapas, kopra, kacang mete, dsb.). Akibat perang, sebagian besar kegiatan ekspor menjadi terbengkalai; dengan demikian misalnya ekspor kacang mete tidak mempunyai arti, meskipun Mozambik pernah menjadi produsen terbesar di dunia. 80% pekerja di sektor pertanian hidup dari ekonomi subsistensi. Hanya 6% bekerja di koperasi dan 14% di usaha pertanian negara. Peran kunci petani kecil ini baru disadari pemerintah sejak ada orientasi baru politik luar negeri dan strategi ekonomi di pertengahan tahun '80-an.

Sumbangan sektor produksi dan yang dihasilkannya menurut statistik pemerintah adalah 36%, tetapi realitasnya dalam hal hasil dan kesempatan kerja hampir tidak berarti. Permesinan dan baja, pengolahan pangan dan sektor tekstil sejak merdeka mengalami kejatuhan besar (eksodus pakar-pakar Portugis, kurang modal karena tidak ada investasi asing). Perang menghasilkan sesuatu yang lain. Pada masa di titik rendah (1986/1987), orang di pedesaan bergantung pada kegiatan subsistensi, di kota kegiatan perang. Pabrik-pabrik hanya memasok rata-rata 10% kapasitasnya jika tidak berhenti berproduksi.

Krisis ekonomi Mozambik disebabkan esktern (politik destabilisasi yang dilakukan Afrika Selatan melalui RENAMO) dan intern. Karena takut terhadap sosialisme FRELIMO tidak lama setelah merdeka, 90% dari 25.000 orang Portugis meninggalkan

negara itu, di antaranya guru, insinyur, dan manajer. Mereka tidak dapat diganti karena Portugis tidak mendidik tenaga ahli kulit hitam. Mereka membawa pergi semuanya (mulai dari kapal terbang sampai ternak) yang dapat bergerak. Sebelum merdeka ada 12.500 kendaraan bermotor besar, setelah itu menjadi 6.400. Ratusan pabrik dihancurkan, atau pemiliknya membawa pergi dokumen-dokumen penting. Kerusakan juga disebabkan oleh jalan pembangunan sosialis-ortodoks. Perkebunan yang tertinggal diubah menjadi khas seperti di negara blok Timur, sedangkan manajernya kurang mengerti bagaimana mengurus sebuah pabrik besar. Ratusan ribu orang dipindahkan secara paksa. Gereja ditutup, kepala suku diturunkan, pembangkang ditahan di "pusat pendidikan". Perdagangan swasta dilarang.

Dengan kongres FRELIMO tahun 1983 dimulai sebuah orientasi politik ekonomi dan politik luar negeri baru. Tahun 1984 Mozambik menjadi anggota Bank Dunia, IMF, dan Perjanjian Lome dari ME. Sebuah program rehabilitasi ekonomi, PRE, beberapa kali mendevaluasi secara drastis mata uang negara melalui program penyehatan (gaya IMF), mengurangi dominasi pasar gelap, membatasi subsidi pengadaan di perkotaan (pembagian kupon), sekaligus menaikkan (tahun 1988, sepuluh kali lipat) harga garansi pembelian hasil pertanian dari petani swasta. Inisiatif swasta dirangsang, dilakukan program kembali ke desa, didukung pengusaha swasta dengan kredit murah dan konsultasi teknik. Sejak tahun

1987 PRE dengan jelas telah memperbaiki pengadaan zone-zone yang terlindungi (kota), tetapi tidak membawa keberhasilan apa-apa di pedesaan (80%-85% areal negara) akibat perang.

Meskipun tidak ada statistik resmi, tetap ada ketergantungan terus dari Afrika Selatan. Barang-barang konsumsi, setengah jadi dan perlengkapan yang penting (terutama suku cadang) datang dari Republik Afrika Selatan. Meskipun pelabuhan-pelabuhan Mozambik (terutama Beira) diperbaiki dengan bantuan besar dari dunia internasional dan 10.000 tentara elite Zimbabwe menjaga koridor Beira (jalan sepanjang 300 km, *pipeline*, dan jalur kereta api ke perbatasan Zimbabwe) dengan ongkos yang sangat tinggi (2 juta US\$/hari), sebagian besar perdagangan luar negeri seperti sebelumnya dilakukan melalui Afrika Selatan.

5. Hampir selama 500 tahun Mozambik berada di bawah kekuasaan kaum pendatang dari Portugis—dengan kerja paksa tanpa dibayar, rasisme yang penuh kekerasan dan pengisapan sedemikian rupa sehingga Portugis menjadi penguasa kolonial terkejam di Afrika. Tahun 1964 berdiri *Frente de Libertacao de Mocambique*, FRELIMO (Front Pembebasan), yang ditanggapi dengan sangat brutal oleh Portugis. FRELIMO yang pada mulanya tidak memiliki ideologi mapan, meminta bantuan Barat untuk perlawanan bersenjata, tetapi ditolak oleh Barat dan mitra NATO (*North Atlantic Treaty Organization*) mendukung Portugis. Dengan bantuan yang deras dari negara-negara blok

Timur (yang juga memiliki pengalaman kolonial dengan Portugis Barat), FRELIMO lalu menjadi gerakan sosialis, dan Samora Machel, presiden Mozambik pertama memproklamkan negara itu sebagai republik rakyat yang marxis-sosialis. FRELIMO menjadi partai kesatuan menurut panutan Moskow. Oktober 1986 Machel meninggal akibat pesawat terbangnya jatuh secara misterius dan penuh teka-teki ketika sedang melintas Afrika Selatan. Sejak itu, Joachim Alberto-Chrisano memimpin negara itu (presiden negara dan partai). Sebagai seorang pragmatis, sampai kini tanpa memutuskan hubungan baik dengan teman-teman di negara sosialis ia memobilisasi bantuan ekonomi dan bantuan darurat secara deras dari Eropa Barat dan AS, sampai ke bantuan militer (Swedia, Italia, terutama Inggris).

6. Akhir tahun '80-an di seluruh Mozambik berlaku keadaan perang akibat ulah *Resistencia Nacional Mocambiquana*, RENAMO (Inggris: MNR). Mereka memiliki 10.000–12.000 tentara bersenjata (infanteri ringan), yang tidak disiplin, pengelompokan tidak ketat (20–600 orang), kurang komunikasi satu sama lain, kurang terjamin, dan kurang makan. Pemerintah di Maputo mengawasi (hampir) semua kota—dalam lingkaran 20–30 km. RENAMO terlalu lemah untuk merebut daerah itu, tetapi di padang semak-belukar tentara yang tanpa harapan itu (20.000 orang) jauh lebih unggul. Mereka mengawasi hampir seluruh daerah pedesaan Mozambik, tetapi tidak berusaha menjalankan sebuah konsep politik

dalam "daerah yang terbebaskan", seperti biasa dilakukan oleh gerakan pembebasan. RENAMO menyatakan dirinya radikal antikomunis, tetapi tidak mengembangkan sebuah program politik. Mereka memiliki kantor di Washington dan Lisabon, serta penghubung di Kanada, Afrika Selatan, Kenya, Brasilia, dan Jerman. Mereka dibiayai oleh lingkaran ultra-kanan di Afrika Selatan, Portugal, dan AS. Tahun 1986 terbit sebuah studi dari US State Departemen yang berkesimpulan bahwa RENAMO menjalankan sebuah kekejaman secara sistematis dan terkoordinasi terhadap penduduk sipil, termasuk penembakan, eksekusi dengan pisau dan kampak, pembakaran manusia hidup-hidup, pemukulan, pencekikan, membiarkan kelaparan, dan membenamkan ke air. Menurut pemerintah AS, RENAMO melakukan sebuah *holocaust* paling brutal sejak Perang Dunia II terhadap penduduk sipil Mozambik yang tidak berdosa.

RENAMO didirikan tahun 1975 oleh dinas rahasia Rhodesia untuk mengacaukan perang pembebasan Zimbabwe yang terbentuk di Mozambik. RENAMO terdiri atas bekas agen rahasia, pembelot Mozambik, dan pembangkang politik, tetap tanpa hasil sampai tahun 1979 ketika dinas rahasia Afrika Selatan membiayai kelompok yang masih kecil ini di Transvaal timur, memberinya senjata dan melatihnya. Tahun 1979 Afrika Selatan mengembangkan Strategi Nasional Total-sebagai reaksi terhadap perubahan geopolitik di kawasan itu sejak tahun 1975. Sebelum tahun 1975 Afrika Selatan terlindung oleh

jalur negara-negara boneka putih (Namibia, Rhodesia, Angola Portugis, Mozambik). Setelah itu, bekas-bekas koloni Portugis dikuasai oleh pemerintahan yang sosialis dan paling lambat tahun 1979 (kemerdekaan Zimbabwe) dianggap Afrika Selatan sebagai ancaman total (*Total Onslaught*). Sebagai jawaban dikembangkan sebuah doktrin destabilisasi seluruh Afrika bagian selatan (*Total National Strategy*). Selain Angola, terutama Mozambik menjadi negara terpenting (karena mempunyai pelabuhan). Untuk negara garis depan Mozambik merupakan satu-satunya alternatif untuk jalur perdagangan melalui Afrika Selatan. Jika jalur ini diisolasi, Afrika Selatan (setelah berlangsung sanksi) akan menutup perbatasannya. Oleh karena itu, RENAMO bertugas mempertahankan agar ekonomi dan sistem transportasi Mozambik tetap tidak dapat berfungsi. Politik destabilisasi dilakukan terutama oleh aparat Afrika Selatan yang dikuasai orang Bur. Dunia perdagangan yang berbahasa Inggris dan liberal (tentu karena kepentingan ekonomi) tidak setuju akan tindakan tersebut, kementerian luar negeri ingin menciptakan Afrika Selatan ruang gerak baru bagi Afrika Selatan yang terisolasi melalui sebuah perjanjian. Akhir tahun 1984 Afrika Selatan dan Mozambik menandatangani perjanjian perdamaian Nkomati, yang tertera bahwa Mozambik tidak mendukung ANC sementara Afrika Selatan tidak mendukung RENAMO. Meskipun bantuan Afrika Selatan berkurang, banyak dokumen memperlihatkan bahwa Afrika Selatan melanggar perjan-

jian tersebut. Sementara aparat keamanan dalam inisiatif swasta kooperatif terus menunjang RENAMO dan mengendalikannya, tahun 1988 pemerintah Afrika Selatan berusaha melakukan pendekatan diplomatik. Misalnya, saluran tenaga air Cabora Bassa yang pernah disabotase, diaktifkan kembali dengan bantuan Afrika Selatan dan dilindungi secara militer. Setelah berlangsung proses perdamaian di Angola/Namibia, apakah Mozambik juga akan menghadapi jalan keluar diplomatik yang serupa atau negara itu makin menjadi kunci politik destabilitas Afrika Selatan terhadap negara-negara front, masih tidak terjawab.

Kepustakaan: P. Meyns, *Befreiung und Nationaler Wiederaufbau von Mozambique*, Hamburg 1979; J. Hanlon, *Mozambik, Revolution im Kreuzfeuer*, Bonn 1986; P. Johnson/B. Martin, *Destructive Engagement - Southern Africa at War*, Harare 1986; J. Hanlon, *Beggar your Neighbours-Apartheid Power in South Africa*, London 1987; P. Meyns, *Das südliche Afrika nach Nkomati - die Regionalpolitik von Botswana, Mozambik und Zimbabwe*, Hamburg 1987; E. Adam, "Mozambik: Reformpolitik - Weg aus der Krise?", dlm.: AP 39 (1988), hlm. 186 dst.; J. Becker, *Angola, Mozambik und Zimbabwe. Im Visier Südafrikas*, Köln 1988; G. Braun, "Pretorias Totale Strategie im südlichen Afrika", dlm.: *Afrika-Spektrum* 1988, no. 5, hlm. 5 dst.

bg

MPLA → Angola, gerakan pembebasan.

MSAC (*Most Seriously Affected Countries*) Menurut Sekretaris Jenderal PBB, MSAC adalah kelompok negara berkembang paling terkena krisis ekonomi dunia sehubungan dengan peningkatan harga energi. Untuk mereka ini Sidang Umum Istimewa PBB Mei 1974 membuat sebuah program khusus. Sebagai kriteria un-

tuk penggolongan negara berkembang ke MSACs adalah pendapatan per kepala yang rendah; kenaikan harga yang tajam pada impor terpenting dibandingkan ekspor; ongkos transportasi dan transit yang meningkat; kesulitan mendapatkan hasil ekspor yang mencukupi; beban utang yang tinggi (→ utang); cadangan mata uang yang rendah; arti perdagangan luar negeri yang relatif besar dalam proses pembangunan. Berdasarkan kriteria yang lebih ringan dibandingkan daftar LLDC, jumlah MSAC meningkat cepat. Mula-mula ada 28 negara di daftar MSAC; jumlahnya naik di atas 33 dan 42, tahun 1976 menjadi 45. Dengan semiliar manusia, hampir separo manusia di Dunia Ketiga hidup di MSACs. → tabel di lampiran. dn

Mujahiddin Bahasa Arab: *mujahid*, pejuang dalam perang suci, pejuang pembebasan Islam fundamentalis, misalnya di Afghanistan di tahun '80-an melawan pemerintah komunis dan tentara Uni Soviet. wpz

MULPOC (*Multinational Programming and Operational Centres*) Sebuah pusat yang didirikan ECA di lima daerah (untuk Afrika Utara di Tanger, untuk Afrika Barat di Niamey, untuk Afrika Tengah di Yaounde, untuk CEPGL di Gisenyi, untuk Afrika Timur dan Selatan di Lusaka) dalam rangka menunjang kerja sama dan integrasi regional, terutama di zone-zone preferensi yang oleh ECA ingin didorong agar hubungan perdagangan dan lalu lintas menjadi lebih baik. fm

MULTIFERT → SELA.

multilateral Bantuan pembangunan/kerja sama pembangunan disebut

multilateral jika diberikan melalui organisasi-organisasi internasional (seperti Bank Dunia, UNDP, Bank Pembangunan Regional). → bilateral.

dn
Mutual Security Act → politik bantuan pembangunan AS.

Myanmar Usaha menapak Jalan Ketiga (jalan Myanmar mencapai sosialisme) untuk membangun negaranya, sekarang terlihat tidak berhasil: konflik etnis tidak dapat diatasi dan keinginan menghapus modal harus ditinggalkan, sedangkan dari rakyat tumbuh tekanan ke arah demokratisasi sistem politik.

1. Myanmar (luas 676.552 km²) dihiasi dua pegunungan yang berderet ke arah utara-selatan, memiliki kekayaan kayu jati, timbel, seng, perak, timah, wolfram, batu mulia, lahan-lahan pertanian (di antaranya sawah berteras), dan lembah Sungai Irawadi yang luas. Delta sungai ini menghasilkan sebagian besar panen padi. Di sungai juga dibangun gudang cadangan minyak dan gas bumi.

2. Zaman keemasan pertama dialami Myanmar di antara abad ke-11 dan 13 dalam Kerajaan Pagan. Abad ke-19 Inggris menganeksi Myanmar dan menempatkannya di bawah wakil raja di India. Tahun 1937 Myanmar menjadi daerah jajahan Inggris langsung. Perlawanan terhadap pendudukan Jepang (1942-1945) di bawah Jenderal Aung San, peletak batu pertama kemerdekaan Myanmar tahun 1948. Tahun 1962 Jenderal Ne Win mengadakan kudeta militer. Dewan Revolusi melawan republik dengan tujuan mempertahankan kesatuan nasional yang terancam oleh aksi-aksi

bersenjata komunis dan kelompok etnis (Karen, Shan). Dengan berlangsungnya peralihan kekuasaan, "Jalan Myanmar" menuju sosialisme menjadi doktrin pemerintah dan menjadi dasar UU tahun 1974.

3. Penduduk Myanmar tahun 1989 diperkirakan berjumlah 41 juta. Hanya 24% (1985) hidup di perkotaan (ibu kota Yangon berpenduduk sekitar 2,5 juta). Hampir 1/4 penduduk etnis Birma mendominasi kelompok etnis lainnya: Shan (9%), Karen (7%), Tshin (2%), Katshin (1%), India (1%), Cina (1%-2%), dan lainnya.

3. Buddha adalah agama negara (85% penduduk). Sekarang telah dibangun sistem sekolah dasar yang merata ke seluruh negeri. UU diperluas sejak tahun 1962 (pada kesenjangan desa-kota tahun 1965: 1 dokter untuk 11.860 penduduk, tahun 1981: 4.930 penduduk; tingkat hidup rata-rata tahun 1986: 59 tahun).

4. Nasionalisasi industri dan perdagangan yang dilakukan setelah tahun 1962 mengenai banyak orang India dan Cina. Perwira militer dan fungsioner partai (*Burma Socialist Programme Party*, BSPP) sejak itu membentuk lapisan atas baru. Usaha merealisasi sosialisme ditandai oleh pengisolasian diri (tahun 1979 Myanmar meninggalkan nonblok) dan peningkatan industrialisasi dengan landasan pengolahan produksi pertanian lokal. Rintangan untuk proses industrialisasi ini adalah lemahnya devisa negara yang dikarenakan isolasi tersebut (tidak ada pariwisata) dan politik pertanian pemerintah yang tidak menghasilkan teknologi impor sehingga

ga memasukkan Myanmar ke golongan MSAC (tahun 1986: utang dan bunga mencapai sekitar 55% hasil ekspor). Pertanian 60% untuk ekspor merupakan sumber penerimaan terpenting Myanmar (terutama beras). Meskipun berlangsung perampasan tanah milik petani kaya (sejak tahun 1953) dan pembagian ke petani serta pembangunan koperasi, pertanian tetap tidak berkembang. Petani, terutama di masa panen yang buruk, lebih suka menjual produknya tidak ke negara melainkan ke pasar gelap yang ditolerir negara. Situasi pengadaan buruk, terutama di kota, dan tahun 1974/1975 menyebabkan pertikaian berdarah dengan militer. Dengan kembali ke mekanisme-mekanisme ekonomi pasar (tahun 1977 legalisasi perusahaan swasta) dan membuka hubungan ke negara industri Barat, dicoba menemukan jalan keluar dari kesulitan-kesulitan ekonomi negara.

Masalah yang tetap rumit adalah perang saudara yang terus berlangsung di dalam negeri. Lebih dari selusin kelompok pemberontak direkrut bukan dari etnis Myanmar, dengan biaya terutama dari perdagangan opium di "segitiga emas", mengendalikan sebagian besar negara yang

terisolasi itu. Tahun 1986 hampir 1/4 pengeluaran negara untuk tentara.

Setelah berlangsung kerusuhan terus-menerus, sebagian besar bersifat kekerasan, dan demonstrasi massa serta aksi mogok menentang BSPP serta untuk demokratisasi negara itu, untuk pertama kalinya Agustus 1988 sejak kudeta, Maung-Maung sebagai orang sipil muncul di puncak kekuasaan BSPP dan negara. Ia mencabut UU Darurat yang diberlakukan beberapa minggu sebelumnya di ibu kota, mengumumkan reformasi yang bersifat ekonomi pasar serta pemilu mengenai sistem multipartai. Junta yang berkuasa sejak September 1988 dengan kepala pemerintahnya, Saw Maung, kini masih belum berpikir untuk melakukan demokratisasi.

Kepustakaan: K. Fleischmann, *Die neue Verfassung der Union von Birma*, Hamburg 1976; J. Silverstein, *Burmese Politics. The Dilemma of National Unity*, New Brunswick (N.Y.) 1980; D.I. Steinberg, *Burma's Road Toward Development. Growth and Ideology under Military Rule*, Boulder (Col.) 1982; K. Fleischmann, "Birma", dlm.: *HDW II*, 7, Hamburg 1983, hlm. 105, dst.; D.I. Steinberg, *Burma. A Socialist Nation of Southeast Asia*, London 1983; Die Welt, "Myanmar lehnt sich an China an", 1 Oktober 1991, dlm.: *BMZ-Spiegel der Presse*, 20/91, hlm. 636. rs/bh Myrdal, Gunnar → teori perdagangan luar negeri, *terms of trade*, *unbalanced growth*.

N

Namibia Dalam perjalanan menuju kemerdekaan bekas Afrika Barat daya (SWA/*South West Africa*) ini sejak awal tahun '80-an dibebani oleh krisis karena periode musim kering, jatuhnya harga bahan mentah, dan karena ketergantungan kuat dari penguasa kolonial Afrika Selatan.

1. Penduduk Namibia (luas 823.168 km² tanpa Teluk Walfisch) sangat heterogen: sekitar 1,8 juta penduduk adalah orang Ovambo dengan jumlah setengah juta merupakan kelompok etnis terkuat, selanjutnya Kavango (sekitar 110.000), Herero (90.000), Damara (89.000), Khu-Khun, Caprivan, Buschmann, Rehoboth-Baster, dan Himba; sekitar 7% adalah orang kulit putih, di antaranya 20.000 keturunan Jerman. Pertambahan penduduk yang tinggi (3,2%), selain pertumbuhan penduduk (44% penduduk berumur kurang dari 15 tahun), juga dikarenakan arus pengungsi yang datang dari Angola. Sejak tahun 1978 terlihat urbanisasi yang makin meningkat (tingkat urbanisasi tahun 1985: 51%); ibu kota Windhuk tumbuh dari 36.000 penduduk (1969) menjadi 105.100 penduduk (1983).

Kekurangan air di tanah yang kering itu membatasi pembangunan pertanian, industri, dan pertambangan. Pertambangan (tahun 1986: 83%) yang dikuasai oleh perusahaan transnasional berperan penting dalam ekonomi. Intan, berbagai metal, dan uran diekspor terutama ke Eropa Barat dan Afrika Selatan. Produk pertanian dari kegiatan di padang rumput (semak belukar) yang ekstensif dan mengancam secara ekologi, penting untuk ekspor (80%-90% dari nilai produksi pertanian keseluruhan) terutama untuk kesempatan kerja. Karena penangkapan ikan yang terlalu berlebihan di laut yang penuh dengan plankton, penangkapan ikan dan industri perikanan terjebak dalam krisis. Selain itu, Afrika Selatan membangun industri pengolahan sejenis yang menyainginya.

Masalah pembangunan terbesar adalah apartheid struktural. Meskipun ada pencabutan beberapa undang-undang apartheid (daerah pemukiman, tempat kerja, "merusak keturunan"), terus berlangsung ketimpangan etnis dan regional antara orang kulit hitam dan kulit putih, terutama di bidang pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan: sis-

tem pendidikan yang terbagi tiga (untuk kulit putih, kulit berwarna, dan kulit hitam), dengan sangat merugikan kulit hitam, menyebabkan sekitar 1/2 kelompok penduduk ini buta aksara. Pertanian komersial dilakukan sebagian besar oleh kulit putih: sekitar 40% potensi tenaga kerja melakukan kegiatan ekonomi subsistensi. Sementara di antara kulit putih hampir tidak ada pengangguran; pengangguran di antara kulit berwarna dan kulit hitam sangat nyata, terutama di sebelah utara negara itu. Selain itu, 1/5 angkatan kerja bekerja sebagai buruh pengembara di Afrika Selatan.

2. Setelah penguasa kolonial Jerman (Afrika Barat Daya-Jerman tahun 1884/1890-1915) berakhir, daerah itu diserahkan sebagai daerah protektorat Afrika Selatan. Penolakan Afrika Selatan (1946) untuk menyerahkan Afrika Barat Daya itu menjadi daerah perwalian PBB, dan pelaksanaan politik apartheid di sana, menyebabkan Sidang Umum PBB tahun 1966 memutuskan untuk menarik mandat yang diberikan tersebut; daerah yang kini bernama Namibia lalu berada di bawah Dewan PBB untuk Namibia, tetapi *de facto* tetap menjadi milik Afrika karena Afrika Selatan menolak keputusan PBB tersebut. Penolakan pemerintah Afrika Selatan yang menurut PBB adalah ilegal dan seruan Sidang Umum PBB agar dilakukan perjuangan pembebasan (1973), dijawab oleh Afrika Selatan dengan menguatkan integrasi Namibia melalui UUD (pembangunan *homelands*, perluasan apartheid).

Dalam konferensi "Bangsal Olah Raga" tahun 1975 di bawah SWAPO

(*South West Africa People's Organization*), Afrika Selatan mendorong perkembangan sebuah UUD untuk Namibia, sementara kekuatan-kekuatan Barat dengan persetujuan PBB menyiapkan rencana kemerdekaan. Meskipun ada perundingan antara Afrika Selatan dengan lima negara Barat, tetap SWAPO dan negara garis depan menajamkan perang di Namibia dan Angola Selatan. Tahun 1977 ditempatkan administrator jenderal Afrika Selatan; "Rencana Waldheim" dan resolusi PBB nomor 435 (persiapan kemerdekaan, pemilihan umum bebas di bawah pengawasan PBB, gencatan senjata antara SWAPO dan tentara Afrika Selatan) ditolak oleh Afrika Selatan. Desember 1978 Afrika Selatan melakukan pemilihan umum sebelah pihak untuk rapat yang mengeluarkan UUD, dengan tidak mengikutsertakan SWAPO, NNF (*Namibia National Front*) dan NPLF (*Namibia People's Liberation Front*).

"Aliansi Bangsal Olah Raga" yang demokratis (ras campuran) di bawah D. Mudge dan AKTUR (*Aktion Front for the Retention of Turnhalle Principles*, Front Aksi untuk Mempertahankan Prinsip-Prinsip Turnhalle) yang konservatif merupakan partai-partai terkuat yang ditolak oleh PBB karena dituduh melakukan manipulasi pemilu yang tidak sah. Setelah mundurnya Dewan Menteri yang *de facto* dikuasai oleh kelompok kanan di bawah D. Mudge (1980-1983), Afrika Selatan menempatkan pemerintah peralihan yang terdiri atas beberapa partai, tetapi ditolak pengakuannya oleh dunia internasional (pengecualian

SWAPO, tidak ada legitimasi melalui pemilihan, kewenangan kekuasaan sentral Afrika Selatan). Dengan perjanjian perdamaian yang disepakati antara Afrika Selatan, Angola, dan Kuba (Afrika Selatan mensyaratkan penarikan mundur tentara Kuba dari Angola sebagai penarikan mundur dirinya dari Namibia), ditentukan kemerdekaan Namibia. Tanggal 21 Maret 1990 diproklamlirkan kemerdekaan Namibia dengan Sam Nujoma sebagai presiden, disaksikan oleh wakil-wakil PBB, negara-negara Afrika lainnya, serta De Klerk dari Afrika Selatan.

Kepustakaan: Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE), *Perspectives of Independent Development in Southern Africa, The Cases of Zimbabwe and Namibia*, Berlin 1980; H. Melber (ed.), *Namibia - Kolonialismus und Widerstand. Materialien für Unterricht, und Bildungsarbeit*, ISSA Bonn 1981; AKAFRIK/DEAE (ed.), *Südafrika-Handbuch, Südafrika, Namibia, Zimbabwe*, Wuppertal 1982; W. Schneider-Barthold, "Namibia", dlm.: *HDW II*, 5, Hamburg 1982, hlm. 466 dst.; H. Bley, "Namibia", dlm.: R. Hofmeier/M. Schönborn, *Politisches Lexikon Afrika*, München 1988 (cet. ke-4), hlm. 243 dst.; N. Mbumba et al., *Ein Land, eine Zukunft: Namibia auf dem Weg in die Unabhängigkeit*, Bremen 1988; "Frankfurter Allgemeine Zeitung", 22 Maret 1990, dlm.: *BMZ-Spiegel der Presse*, 7/90.

ah/pb
nasionalisasi Dimengerti sebagai pengambilalihan alat produksi (modal) dan sumber daya (tanah, sumber daya) yang berada di tangan swasta asing oleh penguasa nasional. Nasionalisasi bertopang pada tindakan negara, dapat dirundingkan, dan dapat juga dilakukan secara revolusioner. Biasanya perubahan hubungan pemilikan berhubungan dengan pembangunan atau perluasan sebuah sektor negara atau yang tersosialisasi dari ekonomi (→ *mixed economy*), dengan

mengalihkan bidang dan perusahaan yang strategis ke pemilikan negara sehingga modal swasta nasional dapat mengalami nasionalisasi. Masalah ganti rugi selalu mempunyai dampak politik yang besar. Dipertanyakan, apakah pada nasionalisasi dipakai hukum nasional atau internasional. Negara berkembang menunjuk posisi **extra-profit* yang diperoleh perusahaan asing sebagai jumlah ganti rugi. **Piagam Hak dan Kewajiban Negara-Negara dalam Ekonomi* tahun 1974 yang diputuskan dengan mendapat perlawanan dari negara industri Barat, mengakui dalam Ayat 2 hak setiap negara untuk menasionalisasikan pemilikan asing, dan harus berdasarkan hukum dalam negerinya: "Jika masalah ganti rugi dalam masing-masing kasus dipertikaikan, masalahnya diatur menurut hukum dalam negeri negara yang melakukan nasionalisasi dan undang-undang yang dimilikinya" Sebaliknya, negara industri berpegang pada berlakunya hukum internasional dan pengaturan yang *fair* untuk ganti rugi dalam hal tinggi dan prosesnya. Posisi ini berusaha mereka perlihatkan melalui ancaman dan penolakan memberikan kredit dalam lembaga-lembaga kredit internasional seperti Bank Dunia dan IMF, jika tidak langsung, tetap akan dapat dilakukan di waktu yang akan datang, seperti beberapa contoh yang ada (Cile, Peru).

Motivasi untuk nasionalisasi di negara berkembang terutama merupakan upaya mencegah transfer modal oleh perusahaan asing, mengalihkan kekuasaan keputusan dan pengendalian atas produksi dan harga

di tangan lokal, memanfaatkan keuntungan perusahaan untuk tujuan-tujuan pembangunan sosial-ekonomi nasional, memperbaiki situasi persyaratan rencana pembangunan, serta melakukan restrukturisasi ekonomi yang dianggap perlu untuk meluaskan sektor negara.

Dalam diskusi politik, nasionalisasi sebagian besar merupakan motivasi ideologi (anti-imperialisme, anti-neokolonialisme). Dalam praktek, puncak politik nasionalisasi di negara berkembang adalah awal tahun '70-an dan dimulai tahun '30-an, sebagai hasil strategi politik yang ambivalen. Jika melihat negara-negara OPEC yang karena politik kartelnya berfungsi baik, dapat melakukan politik harga dan berhasil menjalankan nasionalisasi, tetapi untuk bahan mentah lainnya nasionalisasi tidak memiliki terobosan; nasionalisasi ada yang diringkankan atau malah dibatalkan. Dalam beberapa kasus, perusahaan yang telah mengalami nasionalisasi tidak lagi memiliki rentabilitas terdahulunya, yaitu motivasi politik-ideologi mendesak motivasi ekonomi. Tidak lama kemudian sektor negara itu membebani negara. Hal penting bagi strategi pembangunan terutama kasus nasionalisasi yang berhasil adalah keuntungan besar tetap tinggal di masyarakat negara berkembang. Namun, di sini terlihat bahwa kekayaan dibagikan menurut cara lama dan makin membesarkan jarak antara kaya dan miskin. Jadi, nasionalisasi tidak hanya berarti transfer sumber daya yang telah ada dari pemilikan asing ke borjuasi dalam negeri. Jika nasionalisasi tidak di-

pakai untuk stabilisasi elite penguasa di negara berkembang, tuntutan nasionalisasi secara strategi pembangunan berkaitan dengan reformasi struktur secara mendasar di dalam negara berkembang.

dn nasionalisme Pengertian nasionalisme sangat diperdebatkan. Kesepakatan hanya dalam hal: tidaklah mungkin untuk memberlakukan satu definisi untuk semua kasus. Sebuah definisi sempit dapat berbunyi: nasionalisasi dimengerti sebagai politik yang bertugas menjalankan tujuan-tujuan nasional. Pengertian luas sulit dalam hal nasionalisme di Dunia Ketiga. Meskipun ada usaha-usaha melakukan solidaritas melampaui batas negara (gerakan Pan), tetapi politik nasionalis biasanya dalam hal penyatuan negara yang menjadi berdaulat melalui proses dekolonisasi.

Nasionalisme di Dunia Ketiga dapat dibedakan dalam tujuan nasional (modernisasi, anti-kolonialisme, pembebasan nasional, sosialisme) atau pelaku sosialnya (populisme, kelompok etnis nasionalis, oligarki nasional). Ke dalam negeri politik nasionalis adalah usaha *nation-building*, meskipun ada pasar yang terus berhubungan sebelah pihak dengan pasar dunia, tribalisme, serta ada kemungkinan komunikasi dalam negara (tidak ada sarana infrastruktur yang diarahkan ke kebutuhan negara) dan meskipun ada sektor pendidikan yang kurang berkembang, terus diupayakan menciptakan sebuah tradisi negara bersama. Tindakan-tindakan untuk nasionalisasi perekonomian di negara Dunia Ketiga atau pertukaran secara sadar elite politik dari asal

yang bukan lokal (afrikanisasi, dsb.), untuk mengatasi neokolonialisme dan merebut kemerdekaan politik, yang sesuai dengan prinsip internasional dalam hal hak untuk menentukan diri sendiri, serta kemerdekaan ekonomi masing-masing negara. Ke-luar, nasionalisme adalah reaksi negara berkembang dalam sebuah dunia negara-negara nasional, sementara di antara negara-negara Dunia Ketiga adalah masalah wakil kepentingan negara (tata ekonomi dunia baru, tata informasi dunia baru) di tingkat internasional.

Politikasi identitas nasional di Dunia Ketiga bukan merupakan proses yang tanpa masalah: "Meskipun ada keinginan kemandirian nasional, ada pengambilan jarak ke penguasa-penguasa 'imperialis', dan ada penghidupan kembali nilai-nilai dan tradisi sendiri, sekarang ini terbukti bahwa di akhir abad ke-20 diinginkan satu-satunya bentuk mengatasi eksistensi: sivilisasi teknik-industrial yang belum kehilangan daya tariknya di Dunia Ketiga—berbeda dengan masalah kesadaran dan krisis yang ada di metro-pol" (Mansilla).

Kepustakaan: K.W. Deutsch/R.L. Merritt, *Nationalism and National Development, An Introductory Bibliography*, Cambridge (Mass.) 1970; B. Tibi, *Arab Nationalism: A Critical Inquiry*, London/Basingstoke 1980; T.V. Sathya-murty, *Sociology of Nationalism*, London 1982; H.A. Winkler (ed.), *Nationalismus in der Welt von heute*, Göttingen 1982; B. Anderson, *Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*, London 1983; J. Blaschke, "Von der Modernisierung durch Nationenbildung zu den Folgen industrialisierter Arbeitsteilung", dlm.: *Peripherie* 18/19 (1985), hlm. 24 dst.; H.C.F. Mansilla, *Die Trugbilder der Entwicklung. Elemente einer kritischen*

Theorie der Modernisierung, Paderborn, dll., 1986.

Nasser, Gamal Abdel Lahir 15 Januari 1918 sebagai putra seorang pejabat pos Mesir Atas. Sejak masih menjadi pelajar menengah atas, ia (1935/1936) aktif dalam demonstrasi anti-Inggris. Setelah studi hukum selama satu semester, Nasser menjadi kadet (1937) dalam angkatan bersenjata Mesir, pada saat yang kira-kira sama dengan kelompok yang di kemudian hari menjadi "Perwira Bebas", setelah sejak tahun 1936 karir perwira juga terbuka untuk bukan anggota lapisan atas pemilik tanah. Setelah Revolusi 23 Juli mula-mula Jenderal Nagib yang populer menjadi ketua Dewan Revolusi serta kepala negara dan kepala pemerintahan. Setelah terjadi pertikaian politik dengan Nagib, Nasser yang merupakan pemimpin "Perwira Bebas", tahun 1954 maju di puncak Dewan Revolusi dan negara. Melalui politiknya yang sangat anti-kolonial dan anti-imperialisme demi kemerdekaan nasional, Nasser tidak saja menjadi pemimpin yang diakui di Mesir dan tokoh simbolis keinginan akan persatuan nasional, melainkan juga di seluruh dunia Arab. Nasser juga menjadi tokoh pemimpin politik di Dunia Ketiga, terutama melalui kegiatan-kegiatannya dalam rangka gerakan nonblok. Nasser meninggal 28 September 1970.

hpk nasserisme Termasuk satu dari berbagai variasi teori sebuah Jalan Ketiga antara kapitalisme dan komunisme. Khas untuk nasserisme adalah teori mengikuti aksi politik. Sebuah kelompok masyarakat, "Perwira Bebas", mengambil kekuasaan politik

dengan tujuan mengakhiri tirani dan korupsi serta menciptakan Mesir yang bebas dan kuat. Baru dalam kelangsungan konsolidasi kekuatan sendiri, dikenali perlunya menjamin kekuasaan itu dengan ideologi. Masih tahun 1954, Nasser menulis risalah "Filsafat Revolusi" yang mempunyai tugas teoretis mencari tujuan yang kita kehendaki. Dengan "Piagam Aksi Nasional" yang disahkan 1962 oleh Kongres Rakyat Kekuatan-Kekuatan Progresif, tercipta kerangka ideologi yang koheren. Nasser mendefinisikan ideologi sekuler-nasionalis dan sekaligus religius-pan Islamisme sebagai sosialisme, dengan alasan: "Islam bukan hanya sebuah agama, melainkan juga sebuah sistem dunia yang mewartakan keadilan di dunia, menjamin persamaan, dan kesempatan yang sama untuk semua". Melalui pemaknaan tradisi Islam dan elemen-elemen sosialis imanen, nasserisme membatasi diri terutama dengan menentang marxisme dan sosialisme variasi Eropa, dan sejak 1957 mempropagandakan "Sosialisme Demokratis-Kooperatif", mencari Jalan Ketiga. Lebih rumit daripada "Sosialisme Arab ala Nasser-Mesir" yang dimengerti sebagai nasserisme, adalah elemen politik luar negeri nasserisme, yang bertujuan anti-imperialisme dan kenetralan positif dalam pengertian gerakan non-blok.

Kepustakaan: S. Hanna/G. Gardner (ed.), *Arab Socialism, A Documentary Survey*, Leiden 1969.

hpk/maf

nation-building Pendekatan *nation-building* dalam pustaka ilmiah berasal terutama dari karya K.W. Deutsch. Dengan bertopang pada pengalaman historis Eropa Barat, Deutsch ber-

usaha mengolah perkembangan masyarakat yang membentuk kesatuan nasional. Industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi diidentifikasi olehnya sebagai variabel penentu untuk menjalankan proses perubahan sosial, komunikasi intra-masyarakat yang makin tumbuh, penguatan mobilisasi sosial penduduk dan modernisasi masyarakat, hasilnya adalah struktur masyarakat negara industri sekarang. Pemakaian pendekatan *nation-building* di negara berkembang berlangsung dalam konteks teori modernisasi. Dengan kata lain, yang diharapkan adalah perkembangan masyarakat di negara berkembang, meskipun bergeser waktu, dapat berlangsung analog dengan negara industri Barat, sebuah asumsi yang dibantah oleh realitas pembangunan dan dikritik terutama dalam rangka teori *dependencia*.
Kepustakaan: K.W. Deutsch/W.J. Foltz (ed.), *Nation-Building*, New York 1963; K.W. Deutsch, *Nationenbildung, Nationalstaat, Integration*, Düsseldorf 1972; S.N. Eisenstadt/S. Rokkan, *Building States and Nations*, 2 jilid, Beverly Hills und London 1973.

rs

Nauru → Kepulauan Pasifik.

Negara AKP (Afrika, Karibia, Pasifik) mula-mula merupakan 46 negara di Afrika, Karibia, dan Pasifik yang bersama ME menandatangani Perjanjian Lome (1975). Maret 1977 diterima 6 negara lainnya (Komora, Seychelles, Suriname, Kapverdik, Sao Tome dan Principe, Papua Nugini). Lome II (1979) ditandatangani oleh 58 negara berkembang. Dalam perjanjian Lome III (masa berlaku tahun 1985–1990) termasuk 66 negara: Afrika 45, Karibia 13, dan kawasan Pasifik 8. → lihat tabel 1 dalam

lampiran, → politik bantuan pembangunan ME.

dn
negara berkembang (*LDC/Less Developed Countries*) Apa pengertian negara berkembang dan bagaimana tanda-tanda dasar sebuah definisi untuknya, masih diperdebatkan. Perbedaan penting dalam usaha memberikan definisi adalah apakah keterbelakangan dimengerti sebagai situasi/stadium atau sebagai struktur. Negara berkembang ditentukan berdasarkan definisi, dan secara politis menurut angka-angka pembangunan ekonomi dan sosial (→ pembangunan/teori-teori pembangunan) maupun melalui struktur pengaitannya ke pembagian kerja internasional dengan konsekuensi-konsekuensinya. Kedua perspektif definisi tersebut berada dalam asumsi teoretis mengenai penyebab dan persyaratan mapannya keterbelakangan. Perspektif pertama kebanyakan hanya implisit, sementara yang kedua secara sadar mengaitkan pengertian negara berkembang dengan penjelasan klausul mengenai keterbelakangan.

Di dalam asumsi teoretis, negara berkembang terbelakang atau tertinggal berdasarkan tanda-tanda tingkat perkembangan produktivitas yang rendah dibandingkan negara industri sekarang, oleh ilmuwan ekonomi disebutkan kriteria dan persyaratan yang utama secara ekonomi, dan sosio-kultural dikembangkan oleh sosiolog pembangunan, sebagai definisi pembangunan ekonomi untuk definisi negara berkembang. Ada sederet katalog tanda-tanda ekonomi yang melihat adanya kebersamaan negara berkembang: pendapatan per kapita

yang rendah; kegiatan investasi dan tabungan yang rendah; intensitas modal yang rendah, diukur dari penggunaan modal per pekerja, dan rendahnya produktivitas kerja; tingkat pendidikan teknik yang rendah, kurangnya *know-how* pengusaha dan manajer; hegemoni sektor ekonomi primer dalam bentuk mempekerjakan sebagian besar angkatan kerja di pertanian dan dominasi beberapa produk sektor primer dalam struktur produksi serta ada sebagian monoproduk; kurang atau tidak cukupnya infrastruktur material. Ilmuwan ekonomi, serta ilmuwan sosial, dan gremium-gremium internasional yang ingin menentukan tingkat keterbelakangan sebuah negara berkembang, menambahkan tanda-tanda keterbelakangan dengan indikator sosial. Hal terpenting: harapan hidup pada kelahiran dan kematian anak sampai umur ke-4 untuk tingkat kesehatan yang rendah; pemasukan kalori dan protein per hari untuk pangan yang tidak cukup; jumlah buta aksara di antara penduduk dewasa dan kuota desersi sebagai hasil yang tidak mencukupi dalam bidang pendidikan.

Tanda-tanda penentu sosio-kultural negara berkembang lebih sedikit memiliki kesempatan dibandingkan kriteria-kriteria sosial-ekonomi. Tanda-tanda tersebut juga tidak dipakai untuk pembedaan antarnegara berkembang, meskipun tidak dikenali bahwa dengannya menunjukkan masalah pembangunan yang penting. Perhatian yang kecil terhadap tanda-tanda ini untuk tujuan membuat definisi, disebabkan a.l. bahwa kriteria-kriteria ini secara konseptual lebih

sulit dibuat dan sulit diukur, akibatnya perbandingan negara lebih banyak memberikan kesulitan. Tanda-tanda sosio-kultural adalah *'nation-building-process'* yang tidak selesai; kecilnya mobilitas sosial; hegemoni model perilaku tradisional, berlandaskan peran yang ditentukan dalam bidang sosial yang terbatas ketat (keluarga, kekerabatan, *clan*, marga, etnis) dan dalam hubungan pribadi, artinya kecilnya diferensiasi sosial. Kemungkinan pemenuhan kebutuhan individual, karir individual, hubungan yang terpilih bebas, dsb. itu kecil.

Berhadapan dengan tanda-tanda endogen penting untuk keterbelakangan, definisi negara berkembang yang mengerti keterbelakangan sebagai struktur, menekankan faktor eksogen sebagai faktor penyebab. Menurut negara berkembang adalah negara yang secara asimetris dan dirugikan terkait ke pembagian kerja internasional, yang struktur produksinya berorientasi pada pasar dunia dan pemenuhan kebutuhan di negara industri. Arus lingkaran ekonomi dari perekonomian negara berkembang tidak tertutup, tidak ada sektor-sektor penting (sektor konsumsi, sektor barang investasi) atau hanya berkembang sedikit. Ekonomi dan masyarakat negara berkembang adalah heterogen struktural (→ teori *dependencia*). Tanda-tanda keterbelakangan yang disebutkan di atas sebagai keterbelakangan ekonomi, diinterpretasikan dalam perspektif masalah ini, kalau perlu dikoreksi. Sebuah negara yang pendapatan per kapitanya relatif tinggi hingga jauh di atas ketetapan batas internasional yang membatasi

negara kaya dengan negara miskin, dalam rangka definisi strukturalis dari keterbelakangan adalah sebuah negara berkembang. Organisasi internasional dan negara industri dalam strategi bantuan pembangunan mengacu pada kriteria-kriteria kuantitatif dan sedikit kualitatif. Misalnya, Venezuela tidak digolongkan ke negara berkembang karena pendapatan per kapita relatif tinggi dan merupakan negara OPEC. Perspektif strukturalis tidak menyangkal adanya perbedaan berbagai kelompok negara berkembang (→ Dunia Ketiga). → tabel-tabel dalam lampiran.

Kepustakaan: B. Fritsch (ed.), *Entwicklungsländer*, Köln/Berlin 1968; T. Szentes, *Politische Ökonomie der Entwicklungsländer*, Frankfurt/Köln 1974; HDWI, jilid 1, Hamburg 1974; K.G. Riegel, *Politische Soziologie unterindustrialisierter Gesellschaften: Entwicklungsländer*, Wiesbaden 1976; D. Nohlen/F. Nuscheler, "Was Heißt Unterentwicklung", dlm.: HDW II, 1, Hamburg 1982, hlm. 25 dst.

dn
Negara BLS → Botswana, Lesotho, Swaziland.

negara garis depan Disebut juga negara yang berada di tepi daerah konflik atau negara garis konflik. Persekutuan informal berdiri tahun 1974, mula-mula sebagai kelompok kepentingan di dalam Organisasi untuk Persatuan Afrika (OAU), tetapi akhirnya bekerja di luar struktur organisasi tersebut. Inisiator kelompok ini, yaitu Presiden Nyerere (Tanzania) dan Kaunda (Zambia, ketua sejak tahun 1985), bereaksi sedemikian rupa terhadap ofensif politik luar negeri kepala negara Afrika Selatan, Forster, untuk menerobos isolasi negaranya di Afrika Hitam. Zambia, Botswana, dan Mozambik menggabungkan diri tahun 1974, Angola tahun 1976 dan

Zimbabwe (setelah penggantian pemerintah Smith di Rhodesia/Zimbabwe) tahun 1980, yang mula-mula berusaha mencari strategi pembebasan Rhodesia dan Namibia (pada mulanya juga Angola) melalui konferensi-konferensi *ad hoc*. Tujuan negara garis depan adalah melenyapkan pemisahan ras (→ apartheid) di Afrika Selatan. Jika jalan damai tidak cukup, negara garis depan mendukung pertempuran secara keras dari gerakan pembebasan. Pos utama gerakan pembebasan Afrika Selatan ANC ada di Lusaka/Zambia. Reaksi Afrika Selatan terhadap politik negara garis depan ini adalah serangan militer. Persatuan negara garis depan terancam oleh berbagai posisi di dalam kelompok itu terhadap Afrika Selatan, mulai dari radikalisme verbal sampai ke keinginan berkomunikasi yang jelas dan disebabkan oleh dilema ketergantungan enam negara dari negara apartheid tersebut. Melalui perluasan jalur kereta api Limpopo dari Zambia ke Mozambik, tercipta sebuah jalan transportasi yang bebas ke Lautan Hindia tanpa perlu melalui Afrika Selatan.

rs
negara industri baru Dengan istilah ini biasanya dalam diskusi strategi pembangunan dimaksudkan negara industri Barat, menurut kriteria Bank Dunia adalah negara-negara anggota OECD tanpa Yunani, Portugis, Spanyol, dan Turki.

Kepustakaan: M.G. Schmidt (ed.), *Westliche Industrie-gesellschaften*, München 1983. **dn**
Negara-Negara Persemakmuran → *Commonwealth*.

negara pedalaman Negara tanpa akses langsung ke laut (*landlocked countries*); merupakan kategori ne-

gara berkembang yang mendapatkan perlakuan khusus karena letak geografisnya yang khusus dan masalah infrastruktur serta perdagangan yang ditimbulkannya, dalam rangka bantuan pembangunan bilateral dan multilateral dari LLDC. Sejak tahun 1979 Dewan Pengurus UNDP menunjang dana khusus yang berada di bawahnya untuk negara berkembang yang jauh dari pantai tersebut dalam rangka membantu proyek-proyek mengatasi masalah transportasi. **dn**
negara dengan perdagangan luar negerinya berada di tangan negara Negara yang dulu monopoli negara pada perdagangan luar negeri; dalam statistik internasional adalah Albania, Bulgaria, Cekoslowakia, Cina, Hongaria, Jerman Timur, Korea Utara, Kuba, Polandia, Rumania, dan Uni Soviet. Korea Utara dan Kuba digolongkan sebagai negara berkembang oleh DAC. **dn**

negritude Definisi yang dipakai oleh penulis-penulis Afro-Amerika dan Afrika berbahasa Perancis di akhir tahun '30-an, kini merupakan reaksi terhadap usaha asimilasi besar-besaran penguasa kolonial Perancis dan menuntut kembali ke nilai-nilai kultur Afrika. Hal ini penting untuk jati diri seluruh generasi intelektual Afrika yang memungkinkannya mereka menemukan identitas kultural yang dianggap membebaskan dan kembali ke penghargaan terhadap harkat diri. Negritude tidak terjebak dalam rasisme yang terbalik, melainkan mengangkat humanisme Afrika yang dilakukan oleh nilai-nilai dasar kultur Afrika yang juga menyerap elemen-elemen kultur lain yang sesuai de-

ngannya (berasimilasi, tetapi tidak diasimilasikan). Wakil penting dari negritude adalah L.S. Senghor, penulis yang berasal dari Martinique dan politikus Aime Cesaire (lahir tahun 1913).

Kepustakaan: A. Irele, "Négritude und African Personality", dlm.: *Intern, Afrika-Forum* 1972, hlm. 452 dst.; A. Kumerloeve, *Négritude und afrikanische Kultur. Die Idee der Négritude als Form eines kulturellen Nationalismus*, Hamburg 1972; L.S. Senghor, *Liberté III: Négritude et civilisation de l'universel*, Paris/Dakar 1979. kz

neokolonialisme Negara industri Barat sering dituduh melakukan sebuah politik neokolonialisme oleh negara-negara Dunia Ketiga. Neokolonialisme mula-mula dimengerti sebagai sikap bekas penguasa kolonial terhadap koloninya yang dulu, dan pada dasarnya tidak berubah terhadap negara berkembang sekarang. Negara berkembang memang merdeka secara politis, tetapi adanya ketergantungan politik dalam kenyataannya merupakan kemerdekaan semu. Dengan demikian, neokolonialisme adalah bentuk imperialisme. Penguasaan langsung negara-negara Dunia Ketiga dalam masa penjajahan digantikan oleh politik penguasaan tidak langsung yang lebih membawa hasil, tidak berlangsung di tingkat negara yang jauh lebih sulit diketahui.

Mekanisme neokolonialisme terutama mengikuti aturan main yang didikte pasar dunia yang kapitalis untuk interaksi antara negara berkembang dan negara industri. Penguasa ekonomi terkemuka di dunia, AS, baik di tingkat negara maupun bukan negara, setelah perang dunia merupakan yang paling diuntungkan dari sistem pengisapan neokolonial-

isme ini. Neokolonialisme dapat mempunyai berbagai bentuk dan didapat melalui berbagai kelompok masyarakat yang berbeda-beda. Pelaksanaan neokolonialisme menjadi mudah jika negara-negara industri menemukan lapisan atas di negara berkembang bersangkutan yang bersedia menjalankan negaranya sesuai dengan tuntutan-tuntutan pasar dunia. Bentuk apa pun yang diambil oleh neokolonialisme pada akhirnya akan berdampak memburuknya posisi negara berkembang dibandingkan negara industri. Mekanisme-mekanisme neokolonialisme sebagai berikut.

a) *Militer*: pendidikan perwira, polisi, dan militer dari sebuah negara berkembang di negara industri dan kesediaan yang akhirnya sering muncul untuk menjalankan *status quo* intern dan "nilai-nilai" negara pendidiknya. Pengiriman senjata untuk negara berkembang (bergantung pada pendidik dan suku cadang). Kegiatan dinas rahasia di negara berkembang.

b) *Politik*: pembangunan zone-zone pengaruh dan organisasi internasional oleh negara industri Barat, terutama dalam hal konflik Timur-Barat (gerakan tandingan negara-negara Dunia Ketiga: gerakan non-blok).

c) *Kultural*: kegiatan misioner di negara berkembang, stasiun radio dan televisi serta bioskop yang dibangun secara komersial oleh negara industri, berdampak melemahkan identitas kultural negara berkembang yang bersangkutan (→ tata informasi dunia baru). Tokoh dalam film-film Hollywood sebagai pusat orientasi baru, menggantikan nilai-nilai tradisional.

Jarang terlihat adalah pengaruh negara industri pada pembangunan sistem pendidikan.

d) *Komunikasi*: pembangunan sebuah sistem telekomunikasi dan sebuah jalur lalu lintas udara oleh negara industri di negara berkembang (bergantung pada pendidik dan suku cadang). Negara industri mengendalikan sistem transportasi transkontinental dan sarana komunikasi lainnya, misalnya satelit, di seluruh dunia.

e) *Teknologi*: ketergantungan negara berkembang dari *know-how* dan impor teknologi negara maju.

f) *Sosial*: *brain drain* akademikus dan tenaga kejuruan, imigrasi ke negara industri. Usaha-usaha lapisan atas di negara berkembang untuk mencapai tingkat hidup negara industri dan menjiplak kebiasaan hidup mereka.

g) *Keuangan*: ketergantungan negara berkembang pada kredit dan uang (dan jasa) bantuan pembangunan menimbulkan usaha-usaha mengendalikan politik keuangan negara berkembang. Terutama sekali perlu disebutkan di sini adalah lembaga-lembaga keuangan seperti Bank Dunia atau IMF, memberikan uang hanya kepada negara berkembang yang sesuai dengan politik ekonomi mereka dan mengikuti persyaratan yang mereka tetapkan dan awasi.

h) *Ekonomi*: pengisapan Dunia Ketiga melalui perusahaan transnasional pada akhirnya jauh lebih banyak mentransfer kembali modal dari negara berkembang ke negara asal, daripada yang diinvestasikan. Pertukaran tidak seimbang yang berlangsung melalui *terms of trade*

yang tidak adil antara negara berkembang dan negara industri, menyebabkan negara berkembang lebih banyak memberikan bahan mentahnya sebagai imbalan barang jadi dari negara industri.

Secara sistematis kaitan-kaitan di Dunia Ketiga ini dibahas pertama kali oleh Kwame Nkrumah. Ia melihat neokolonialisme sebagai stadium akhir imperialisme. Menurut Nkrumah, sosok neokolonialisme adalah negara yang dikuasai neokolonialisme secara teoretis merdeka dan memiliki semua tanda negara yang merdeka, tetapi kenyataannya, sistem ekonomi dan politik dikendalikan dari luar. Nkrumah melihat pembagian Afrika menjadi banyak negara kecil sebagai strategi untuk memudahkan menguasai benua itu secara neokolionalistis. Oleh karena itu, ia memperjuangkan sebuah Afrika yang bersatu. Menurut Nkrumah, dengan bantuan negara-negara sosialis dan basis persatuan Afrika dimungkinkan penyelesaian konflik-konflik kelas yang baru muncul dan terbentuk dalam neokolonialisme dengan jalur front tidak lagi berlangsung dalam negara industri, melainkan antara negara kaya dan negara miskin (buruh di negara industri mendapatkan keuntungan dari neokolonialisme), dengan menguntungkan negara berkembang di Afrika.

Sistematisasi ilmiah definisi neokolonialisme, misalnya bertolak dari analisis Nkrumah, hampir tidak pernah dicoba. Kendala utama untuk pengembangan lanjut definisi neokolonialisme demikian adalah pemakaian polemik neokolonialisme sebagai

jargon pertikaian politik sehingga istilah yang menjadi mode di akhir tahun '60-an dan awal tahun '70-an sekarang jarang sekali dipakai dalam studi-studi penelitian negara berkembang.

Kepustakaan: K. Nkrumah, *Neo-Colonialism. The Last Stage of Imperialism*, London/Idadan/Nairobi 1965; J. Käkönen (ed.), *The Mechanics of Neo-Colonialism*, Mänttä 1974; P. Friedländer/G. Liebscher, *Neokolonialismus in der Krise*, Berlin (DDR) 1978; T. Mende, *De l'aide à la recolonisation*, Paris/Frankfurt/New York 1982.

Nepal 1. Kerajaan Nepal (luas 147.181 km²) terdiri atas dataran (Terai) yang berbatasan ke India Utara, sebuah daerah pegunungan dengan lembah-lembah sungai yang subur (misalnya Kathmandu) dan rangkaian utama pegunungan Himalaya (a.l. Mount Everest). Sampai kini hampir tidak ditemui kekayaan tambang di Nepal (*LLDC).

2. Kerajaan lebih 2/3 penduduk hidup di daerah pegunungan (kelebihan penduduk relatif dan bencana kelaparan menyebabkan makin banyak yang pindah ke Terai), terutama bekerja di pertanian (tahun 1986 diperkirakan 60%).

3. Tradisi negara Nepal berasal dari abad ke-18, ketika Kathmandu ditaklukkan oleh sebuah dinasti yang berasal dari India. Awal abad ke-19 terjadi pertikaian dengan India-Inggris, yang lalu dikesampingkan karena adanya pengambilan kekuasaan oleh dinasti Rana. Sampai perluasan turisme di paro kedua abad ke-20, neraca pembayaran positif terbesar Nepal berasal dari upah tentara bayaran Gurkha dalam dinas ketenteraan Inggris.

4. Sejak tahun 1972 yang menjadi raja adalah Maharajadiraja Birenda Bir Bikram Shah Deva. Pada tahun 1982, 22 tahun setelah diberlakukannya kembali pemilihan parlemen *Panchayat* yang keputusannya diawasi oleh raja, hanya wakil-wakil organisasi yang diakui pemerintah (misalnya perempuan, buruh) dan tidak dari partai, boleh ikut serta; setelah pemilihan tahun 1986 masuk sekitar 60% anggota parlemen baru.

5. Penduduk Nepal tahun 1989 berjumlah sekitar 18 juta jiwa. Tahun 1989 hidup 9% penduduk di perkotaan (ibu kota Kathmandu tahun 1982 telah [bertumpuk] berpenduduk di atas 800.000 penduduk). Dalam agama dan masyarakat didominasi, kelompok etnis Brahmana Chettri (pangsa penduduk tahun 1981: 58,4%) yang melarikan diri ke Nepal karena desakan Islam. Bahasa negara: Nepali, agama Hindu (89,5% penduduk), dan penilaian/pendudukan profesi berdasarkan masyarakat kasta, berasal dari mereka. Sistem kesehatan (tahun 1983: 1 dokter untuk 24.687 penduduk, tingkat harapan hidup tahun 1989: 52 tahun) dan pendidikan (tahun 1985: 74,4 buta huruf) Nepal tidak berkembang, meskipun di tahun-tahun terakhir didapatkan keberhasilan (sejak pertengahan tahun '70-an sekolah dasar tanpa bayar).

6. Secara ekonomi, Nepal ingin mengurangi ketergantungannya dari India: 52% ekspor (terutama ternak hidup dan beras) ke India, dari sana datang 57% impor (1983/1984).

Kepustakaan: W. Donner, *Nepal. Raum, Mensch und Wirtschaft*, Wiesbaden 1972; L.F. Stiller/R.P. Yadav, *Planning for People. A Study of Nepals Planning Experience*, Kathmandu 1979;

T. Hagen/J.T. Scholz, *Nepal, Profile of a Himalayan Kingdom*, London 1981; H.C. Rieger, "Nepal", dlm.: *HDW II*, 7, Hamburg 1983, hlm. 181 dst.

rs

neraca jasa Perbandingan ekspor dan impor sebuah negara (misalnya hak paten, lalu lintas perjalanan, ongkos sampingan pada ekspor-impor) yang tidak terlihat, artinya bukan dalam bentuk lalu lintas barang atau modal.

dn

neraca modal → neraca pembayaran.

neraca pembayaran Perbandingan nilai semua transaksi ekonomi luar negeri sebuah negara dalam sebuah periode tertentu, diliput secara sistematis dan dibagi dalam sub-sub neraca, misalnya neraca perdagangan (ekspor, impor, dan perdagangan transit), neraca jasa; neraca modal (pengambilan/pemberian kredit, keterikatan/tuntutan, masuk/keluar devisa dan emas), neraca devisa (perubahan cadangan mata uang sebuah negara).

dn

neraca perdagangan → neraca pembayaran.

Neruda, Pablo Lahir di Neftali Reyes, di Parral/Cile, 12 Juni 1904; penyair, diplomat, dan politikus. Antara tahun 1927-1940 sebagai Konsul Cile di berbagai negara; tahun 1945 menerima hadiah nasional Cile untuk sastra; sejak tahun 1945 senator dalam kongres Cile sebagai wakil partai komunis. Tahun 1949-1952 di pengasingan; tahun 1971 menerima hadiah Nobel untuk sastra, puncak karyanya. Tahun 1971-1973 sebagai duta besar Cile di Perancis. Syair Neruda mengenai kudeta di Cile yang diterbitkan tidak lama setelah kematiannya, 22 September 1973, dimulai dengan kali-

mat, "Nixon, Frei, dan Pinochet ...", dituduh sebagai plagiat dari syair "Las satrapias" (para Satrapan) tahun 1948 dari "Canto General" yang dimulai dengan kalimat "Trujillo, Somoza, Carias ...".

Karya: *Obras Completas*, Buenos Aires 1967; *Ich bekenne, ich habe gelebt*, Darmstadt 1974;

Letzte Gedichte, Darmstadt 1975.

obs

NGO → LSM/LPSM.

NIB Negara Industri Baru, NIC (*Newly Industrializing Countries*), negara setengah industri, negara di jalan menuju industrialisasi, negara dengan pendapatan menengah, dsb., merupakan istilah-istilah yang memperlihatkan bahwa dalam pembahasan mengenai politik pembangunan tidak ada definisi yang dapat berlaku umum. Tanda-tanda yang digunakan: produksi per kapita tahun 1979 di atas 1.000 US\$ (Bank Dunia); pangsa yang tinggi dan makin tumbuh pada produksi industri dunia dan dalam ekspor barang jadi dunia (OECD); kombinasi pendapatan per kapita yang tinggi dan tanda-tanda struktur sosial (ME); indikator untuk kemampuan bersaing internasional dan potensi peningkatan yang dianggap ada pada ekspor barang jadi (pemerintah Inggris); pendapatan per kapita tahun 1976 di atas 630 US\$ dan berbagai indikator nonekonomi (BMZ); potensi ekonomi dan militer regional; pendapatan per kapita tahun 1978 antara 1.100-3.500 US\$ dan pangsa industri pengolahan pada PNB adalah 20% lebih (Bela Balassa). Berdasarkan berbagai tanda yang berbeda-beda ini terdapat sejumlah daftar yang tumpang tindih dari 10 (OECD) sampai 29 (BMZ) NIB.

daftar yang tumpang tindih dari 10 (OECD) sampai 29 (BMZ) NIB.

Di belakang semua ini tersembunyi kepentingan identifikasi dari masing-masing lembaga dan penulis. Jika menyangkut NIB yang makin menjadi saingan yang mengancam negara industri, ditekankan hal dinamika industrialisasi dan pangsa barang jadi dalam ekspor. Jika diutamakan praktek pemberian bantuan keuangan (misalnya tinggi tingkat bunga pada kredit), diperhatikan beberapa indikator nonekonomi tambahan, seperti harapan hidup rata-rata, tingkat buta aksara, dan distribusi pendapatan. Jika tertarik pada penjelasan teoretis fenomena strategi pembangunan, ditonjolkan strategi industrialisasi yang berorientasi pasar (industrialisasi ekspor) atau berorientasi pasar dalam negeri (substitusi impor) dan politik ekonomi luar negeri yang bersifat liberal atau intervensionistik.

Aspek yang disebutkan terakhir menjadi sangat menarik karena dengan melintas semua kubu teoretis dan ideologis mengajukan sebuah pembahasan baru mengenai kemungkinan atau ketidakmungkinan secara mendasar adanya sebuah pembangunan yang menyusul sehingga mempertanyakan asumsi yang berlaku sebagai dogma dalam kubu teori modernisasi dan analisis teori *dependencia* mengenai penyebab perkembangan dan keterbelakangan.

Secara prinsipil dapat dikatakan bahwa di kawasan *anglo-saxon* dinamika industrialisasi merupakan kriteria penting, sementara di kawasan berbahasa Jerman diskusi lebih meluas dan lebih banyak memperhati-

kan indikator-indikator sosial dan politik. Dari berbagai perspektif teori pembangunan dapat diformulasikan sebuah model indikator, meliputi situasi, indikator, dan nilai.

Dilema dasar untuk semua NIB adalah bahwa di awal tahun '60-an tingkat pertumbuhan yang diamati (terutama industri) di banyak kasus menyebabkan disparitas sektoral (dibandingkan dengan pertanian) dan regional yang makin tumbuh, terutama pembangunan ekonomi tidak atau hanya sedikit beriringan dengan pembangunan politik dan sosial. Kebalikannya, pertumbuhan ekonomi dan keberhasilan ekspor barang jadi sangat dilatarbelakangi oleh sistem politik yang represif (upah murah, hari kerja yang lama, buruh anak, larangan serikat buruh, dan oposisi yang terorganisir), hampir tidak ada perlindungan kerja, tidak ada jaminan sosial dan perlindungan lingkungan. Sebab, hanya dengan demikian dapat dijamin terlaksananya "keuntungan komparatif" internasional (tenaga kerja murah dengan produktivitas kerja yang tinggi = upah murah) dalam bidang-bidang yang padat kerja dengan teknologi kuno (tidak ada ongkos pengembangan).

Tampaknya yang berguna adalah sebuah perbedaan antara tipe NIB → Taiwan yang berada di Asia Timur, berorientasi ekspor dengan proses modernisasi menyeluruh di semua tingkat (pendidikan, kesehatan, administrasi pemerintahan) dengan NIB yang lebih berorientasi pasar dalam negeri, misalnya NIB yang dapat ditemui di Amerika Latin, dengan disparitas sektoral, regional, dan sosial

berikut. Hong Kong, Singapura, Taiwan, Malaysia, Korea Selatan, Brasilia, Meksiko, Spanyol, Portugis, Yunani, Yugoslavia, Israel, dan Afrika Selatan.

Kepustakaan: B. Yoffie, *Power and Protectionism. Strategies of the Newly Industrializing*

Countries, New York 1983; C. Bergmann, *Schwellenländer. Kriterien und Konzepte*, München 1983; U. Menzel, *In der Nachfolge Europas. Autozentrierte Entwicklung in den Ozeanischen Schwellenländern Südkorea und Taiwan*, München 1985; U. Menzel/ D. Senghaas, *Europas Entwicklung und die Dritte Welt*, Frankfurt 1986.

um

Indikator Struktural untuk Menggolongkan NIB

Situasi	Indikator	Usulan Nilai
1. <i>Struktur dan Kemampuan Sektor Pertanian</i>		
Kemampuan	Kombinasi dari: pertumbuhan pertanian di awal industrialisasi dan indeks GINI (tanah)	rata-rata 3% di atas 20 th. < 0,5
Pembagian Pemilikan		
Jalinan Agroindustrial	pangsa prasarana pertanian pada nilai produksi bruto pertanian (= koefisien pertanian) pangsa prasarana pertanian pada nilai hasil produksi bruto pertanian (= koefisien hasil pertanian)	40% (0,4)
2. <i>Dampak Pembukaan Pasar Dalam Negeri</i>		
Pertumbuhan Permintaan	Kombinasi dari: pertumbuhan per kapita PNB di awal industrialisasi dan indeks GINI (pendapatan)	rata-rata 40% di atas 20 th. < 0,5
Pengendalian Permintaan		
3. <i>Koheren</i>		
Tingkat penjalinan ekonomi keseluruhan	pangsa seluruh prasarana pada nilai PNB atau pangsa prasarana dalam negeri pada nilai PNB	45% 35%
4. <i>Homogenisasi</i>		
Kemerataan pemenuhan dalam pembagian penciptaan sektoral PNB dan kesempatan kerja (pertanian, industri, jasa)	jumlah nilai persen dalam penyimpangan profil pembagian dari penciptaan PNB dan kesempatan kerja atau indeks GINI ketimpangan sektoral	menurun 20 0,2
5. <i>Kematangan</i>		
Pemindahan industri yang padat modal dan padat <i>skill</i>	pangsa permesinan, teknik elektro dan kendaraan bermotor pada industri pengolahan	18%
6. <i>Kemampuan Persaingan Internasional</i>		
Kemampuan hasil yang didapatkan	pangsa permesinan, teknik elektro dan kendaraan bermotor pada ekspor	20%

Sumber: Menzel/Senghaas 1986, hlm. 157/158

NIC → NIB.

Niger Tergolong *LLDC; *MSAC, *Negara AKP; dalam strategi pembangunannya sangat bergantung pada satu sumber daya, yaitu uran.

1. Niger, merdeka sejak tahun 1960, secara geografis dan etnografis terletak di kawasan peralihan antara Afrika Utara dan Afrika Hitam. Sahara (→ Zone Sahel) meliputi 3/4 dari Niger seluas 1.187.000 km² (di utara hidup kurang dari 0,1 penduduk/km²), dan terus meluas ke selatan. Di daerah selatan berkumpul sekitar 85% penduduk, tahun 1988: 7,25 juta, dengan 87% penduduk hidup di pedesaan (pertumbuhan penduduk tahunan 3,1%, sedang disiapkan program keluarga berencana). Suku Tuareg yang nomad (sebelum berlangsung bencana musim kering di awal tahun 70%, meliputi 11% penduduk) dan suku Peul yang sudah bermukim (Fulbe 14%) dianggap sebagai "Afrika Putih". Kepercayaan yang ada: Islam 90%, animis 8%, dan Kristen 2%. Suku berbahasa Haussa meliputi 45% penduduk dan dimengerti hampir di mana-mana di daerah utara, mendominasi perdagangan, sementara suku Djerma dan Songhai (21% penduduk) yang tinggal di ibu kota Niamey (tahun 1988 berpenduduk 420.000), sampai kini dapat mempertahankan posisi penting politis yang didapatkannya sejak zaman kolonial.

2. Di masa kolonial infrastruktur sosio-ekonomi Niger yang letaknya terpencil sekitar 700 km dari pantai terdekat dan kurang menarik secara ekonomi bagi Perancis, tidak berkembang sehingga di awal tahun '80-an pemenuhan kebutuhan dasar pen-

duduk sama sekali tidak tercapai: air bersih hanya dinikmati 27% penduduk, 1 dokter untuk 45.000 penduduk, dsb. Sampai kini tingkat penyekolahan untuk usia 6-11 tahun di bawah 20%, 10% di sekolah menengah, dan 0,3% di sekolah menengah atas (Universitas Niamey didirikan tahun 1971 memiliki 3.000 penduduk). 70% penduduk hidup dari pertanian, 16% lainnya dari peternakan. Kedua sektor ini mengalami kerugian besar akibat bencana musim kering di tahun '70-an dan '80-an. Pertanian kini memberikan kontribusi sekitar 25% PDB, peternakan sekitar 15%. Arti dari industri pengolahan yang sangat sederhana di tahun-tahun terakhir menurun akibat kegagalan politik perpajakan, dan terutama turun terus karena meningkatnya perdagangan barang sejenis yang datang dari Nigeria (tahun 1972: 10,3% PDB, sekarang 2%-3%).

3. Rezim Diori Hamanis (sejak tahun 1960 presiden negara dalam sistem UUD yang mencontoh sebuah Republik Perancis V yang ditempatkan sejak tahun 1958 oleh Perancis), baru di pertengahan tahun '60-an menindas perlawanan bawah tanah dari partai nasionalis, *Sawaba*, terlarang yang dipimpin Djibo Bakaris, setelah itu menjadi rezim yang benar-benar kaku dan korup dengan partai persatuannya (PPN/*Parti Progressiste Nigerien*) yang bertopang pada sekelompok kecil elite. Setelah pengambilalihan kekuasaan oleh militer di bawah Seyni Kountche tahun 1974 (pengganti setelah kematiannya tahun 1987: Kolonel Ali Seybou), dipropagandakan sebuah "Sosialisme Afrika"

dengan masyarakat yang berorientasi pada struktur prakolonial, dengan dasar hukum *Charte Nationale* yang diperoleh melalui referendum.

4. Setelah dimulai eksploitasi uran dan kenaikan harga pasar dunia di awal tahun '70-an, rezim militer menaikkan pangsa negara pada perusahaan uran dari 16% menjadi 33%. Ekspor bijih uran membuat Niger (1979) menjadi produsen nomor enam di dunia dengan 40% eksportnya. Setelah harga uran jatuh di tahun '80-an (penurunan penerimaan sekitar 2/3 dari 10 tahun terakhir, meskipun Perancis dan Jepang membeli harga uran dua kali lipat dari harga pasar yang murah), penerimaan dari konsentrasi uran berada di atas 75% penerimaan ekspor (bijih besi 8%). Tahun 1987 ditambang 164.000 ton batu bara kualitas rendah; yang mempunyai prospek masa depan adalah ladang minyak bumi sebanyak 1 juta ton, tetapi belum dianggap rentabel untuk ditambang, bijih besi (650 juta ton), fosfat (500 juta ton), litium (350.000 ton), mangan (100.000 ton), kaolin, dan marmer. Orientasi baru adalah politik pertanian. Luas lahan untuk *cash crops* (dulu produk pertanian terpenting adalah kacang tanah, sekarang kapas), dikurangi drastis; luas lahan untuk produksi kebutuhan sendiri dinaikkan dua kali lipat (pangsa investasi pertanian dalam rencana pembangunan lima tahun 1987-1991: 40%), meskipun berkurang banyak akibat kualitas tanah turun. Tujuan pengadaan pertanian sendiri jarang dapat dicapai. Data struktur yang penting untuk ekonomi di akhir tahun '80-an dan tindakan-

tindakan sesuai dengan negara tetangga: utang luar negeri 1,5 miliar US\$, sejumlah kesepakatan penjadwalan utang multilateral (→ IMF, Bank Dunia, Kelompok Paris) yang bertujuan menunjang sektor ekonomi swasta dan likuidasi serta swastanisasi perusahaan negara dan setengah negara, dsb. Niger yang merasakan bobot pasar barang-barang sejenis yang berasal dari negara tetangganya, Nigeria, yang jauh lebih kuat, untuk masa yang tidak dapat ditentukan bergantung pada kehendak mitra ekonominya, terutama pada hujan yang cukup untuk hasil panennya.

Kepustakaan: J. Triaud, "L'Islam et l'Etat au Niger", dlm.: *Le Mois en Afrique* 192/3, 1981, hlm. 9-26 dan 194/5, 1982, hlm. 35-48; R. Meyer, "Niger", dlm.: *HDW II*, 4, Hamburg 1982, hlm. 278 dst.; R. Charlick/J. Thomson, *Niger*, Aldershot 1989.

kz

Nigeria Republik Federal Nigeria (termasuk OPEC, Negara AKP) berkembang menjadi pemuka politik dan ekonomi Afrika Hitam karena hasil minyak buminya di tahun '70-an. Akibat *boom* minyak bumi (dengan mengabaikan sektor pertanian, dengan dampak pelarian meninggalkan desa, inflasi, dan kesulitan pengadaaan) yang menurun memburuk karena situasi pasarnya; selain itu ada ketidakstabilan politik (perpecahan karena tribalisme, berbagai kepercayaan, lima kudeta sejak merdeka) yang sedang berusaha diatasi oleh pemerintah militer sekarang di bawah Jenderal Ibrahim Babangida.

1. Nigeria (923.772 km²) dengan penduduk sekitar 103 juta merupakan negara berpenduduk terbanyak di Afrika. Secara etnis bekas daerah jajahan Inggris, merdeka 1 Oktober

1960, sangatlah kompleks (434 kelompok etnis). Suku bangsa yang terbesar Hausa-Fulbe (21,3%) di utara, Yoruba (21,2%) di barat laut, dan Ibo (18,4%) di tenggara meliputi hampir 60% penduduk keseluruhan dan jelas mendominasi daerahnya. Politik kolonial Inggris yang menjamin Islam di daerah utara sebuah pemerintahan otonomi dan tidak mencampuri secara kultural dalam rangka *indirect rule*. Sementara itu, daerah selatan yang kurang terorganisasi relatif cepat diterobos oleh misi-misi Kristen sehingga menimbulkan kesenjangan pendidikan dan kesenjangan utara-selatan. Semua ini bersama persaingan antar-etnis menjadi pendorong penting dalam proses politik. Persaingan etnis dan kerangka UUD yang menguntungkan tribalisme merupakan situasi penyebab kerusuhan, kudeta militer, dan perang saudara tiga tahun (penghancuran negara Ibo, Biafra tahun 1967-1970). Penegakan kembali demokrasi Oktober 1979 setelah berlangsung 13 tahun kekuasaan militer, menyebabkan Nigeria menjadi pendahulu redemokratisasi di Afrika Hitam.

2. Dengan kepadatan penduduk menengah 110 penduduk/km² Nigeria termasuk negara terpadat di Afrika. Pertumbuhan penduduk tahunan diperkirakan 2,5%-3,5%. Hampir separo penduduk lebih muda dari 15 tahun. Tingkat harapan hidup naik dari 34 tahun (1960) menjadi 51 tahun (1989). Pelarian dari desa yang terus berlangsung dan berusaha diatasi oleh pemerintah sejak tahun '80-an, menyebabkan kota-kota tumbuh pesat. Ibu kota Lagos tumbuh dari

665.000 penduduk (1963) menjadi 1.125.000 penduduk (1984).

3. Struktur ekonomi Nigeria ditentukan oleh penumpukan tidak terintegrasi dari sektor ekspor yang terorganisasi modern, ekonomi moneter ke ekonomi lokal. Lebih dari 2/3 angkatan kerja masih bekerja di usaha pertanian kecil (sebagian besar produksi *subsistensi*), sementara sektor industri yang berorientasi ke tingkat negara industri dan makin *padat modal*, hanya mempekerjakan sekitar 2% angkatan kerja. Pangsa produk pertanian (kapas, kakao, kacang tanah, sawit, karet) pada ekspor keseluruhan jatuh dari 61,8% (1965) menjadi 3% (1984). Di daerah padang rumput yang banyak hujan dimungkinkan peningkatan besar produksi gandum, tetapi bantuan pemerintah untuk pertanian terbatas pada perkebunan besar, sementara petani kecil tidak mendapatkan rangsangan produksi. Produksi bahan pangan dasar tetap di bawah permintaan sehingga sebagian besar harus dipenuhi melalui impor. Perdagangan luar negeri Nigeria tetap didominasi oleh perkembangan pasar minyak bumi (sekitar 90% penerimaan ekspor), meskipun dilakukan usaha-usaha meluaskan industri dan pertanian; jumlah eksploitasi minyak turun sekitar 75% tahun 1980-1986. *Diversifikasi industri* Nigeria (industri barang konsumsi, perakitan kendaraan bermotor) yang direncanakan dalam rencana pembangunan nasional dan pembangunan sebuah industri bahan dasar (besi, baja, petrokimia) disulitkan oleh kekurangan besar tenaga kerja kejuruan (apalagi setelah terjadi pengusiran

pekerja asing tahun 1983 dan 1985) dan kelemahan infrastruktur. Tahun 1985 pemerintah mengumumkan situasi darurat dan memberlakukan sebuah program penyehatan yang bertitik berat pada pertanian besar dan mekanisasi pertanian; kesepakatan penjadwalan utang tahun 1988 dengan negara kreditor dan IMF (utang luar negeri tahun 1987 sekitar 26 miliar US\$) berisi langkah-langkah liberalisasi ekonomi.

4. Keragaman bahasa dan pengaruh kepercayaan menghalangi integrasi nasional. Bahasa terpenting adalah bahasa tiga etnis terbesar, yaitu Hausa, Yoruba, Ibo, dan Inggris sebagai bahasa resmi terintegratif. Sementara Kristen meluas terutama di selatan, Islam menentukan struktur sosial di utara. Sekitar 45% orang Nigeria beragama Islam, 38,4% Kristen, dan sisanya menganut kepercayaan yang banyak terdapat di Afrika. Angka buta huruf dapat diturunkan dari 84,6% (1962) menjadi 57,6% (1985). Tahun 1976 diberlakukan wajib sekolah gratis, tetapi karena keterbatasan personal dan keuangan mendapatkan hasil yang berbeda-beda di setiap negara bagian.

5. UUD Nigeria merdeka berorientasi ke model Westminster. Tanda utamanya adalah parlemen dua kamar di tingkat pusat dan regional, sebuah pemerintahan yang bertanggung jawab ke parlemen dan pemilihan berdasarkan mayoritas relatif di pemilihan. Struktur federasi-tiga daerah: utara, barat, dan timur-yang tidak seimbang menyebabkan pembentukan partai-partai daerah yang berakar pada tradisi politik masing-

masing etnis mayoritas. Sistem pemilihan menyebabkan pengokohan sistem satu partai di daerah dan menghalangi integrasi nasional. Karena keterbelakangan ekonomi dan disparitas pendapatan antardaerah, bersama dengan sebuah politik penajaman pertentangan konflik, menyebabkan kehancuran "demokrasi panutan di Afrika". Setelah kudeta militer kedua tahun 1966, struktur federal yang lama dihancurkan. Legislatif dan eksekutif dari pusat dan 12 negara bagian diawasi oleh angkatan bersenjata. Pada penegakan demokrasi kembali (dengan UUD yang mengacu pada AS dengan sistem pemerintahan presidensial, senat, dan parlemen) yang berusaha menguatkan integrasi nasional melalui perluasan partai dan perwakilan sedikitnya satu menteri dari negara bagian di kabinet pusat, menyebabkan berlangsung kudeta tahun 1983 oleh sekelompok perwira tinggi. Politik pemerintah yang represif di bawah Jenderal Muhammed Buhari (pelarangan partai-partai, kebebasan pers, dan diskusi politik terbuka) menyebabkan 29 Oktober 1985 jatuh melalui kudeta baru tidak berdarah. Di bawah presiden dan panglima angkatan bersenjata Jenderal Ibrahim Babangida, pemerintah sekarang melalui konsultasi dengan semua penduduk berusaha mencari sebuah tata baru politik dan mengolah UUD yang tidak berorientasi ke asing. Simbolis untuk usaha mengatasi perpecahan etnis dan religius adalah dengan pembangunan ibu kota baru Abuja. Desember 1987 diadakan pemilihan komunal; pemberian kekuasaan kepada pemerintah

sipil direncanakan 1992. Politik luar negeri Nigeria termasuk menghapuskan apartheid di Afrika Selatan dan mendukung kerja sama di Afrika Barat (ECOWAS) serta berorientasi pada prinsip-prinsip nonblok.

Kepustakaan: E.M. Joye/K. Igweike, *Introduction to the Nigerian 1979 Constitution*, London and Basingstoke 1982; I.W. Zartmann (ed.), *The Political Economy of Nigeria*, New York 1982; W. von Lonski/Th. Rauch, "Nigeria", dlm.: HDW II, 4, Hamburg 1982, hlm. 296 dst.; K. Eitner, *Nigeria. Auswahlbibliographie*, Hamburg 1983.

rn/pb

Nikaragua Dengan revolusi di Nikaragua tahun 1979 untuk kedua kalinya setelah Castro di Kuba, berkuasa sebuah pemerintah yang sosialis-revolusioner di "tradisional halaman belakang AS"–melawan kehendak "raksasa di utara". Dampaknya terhadap negara-negara lain di benua itu: revolusi menandai pecahnya Konflik Amerika Tengah. Perang "Goliath" (AS) melawan "Daud" (Nikaragua) selanjutnya menentukan politik dan ekonomi di Nikaragua.

1. Nikaragua dengan luas 139.000 km² adalah negara terluas di Amerika Tengah, memiliki sumber daya alam yang sebagian belum dimanfaatkan. Sekitar 40% (dari potensi 70%) luasnya dimanfaatkan untuk pertanian. Produk: terutama komoditas andalan (kapas, kopi, pisang, gula) dan bahan pangan dasar (beras, jagung, buncis, jawawut). Daging dan ikan diekspor dalam jumlah besar. Selain itu, Nikaragua memiliki kekayaan tambang yang hanya sedikit dieksploitasi, yaitu emas, perak, timah hitam, dan seng. Dalam sektor industri mendominasi agroindustri, industri tekstil, dan kimia.

2. Tahun 1989 diperkirakan ada 4 juta penduduk. Pertumbuhan tahunan 1980–1989 adalah 3,4%. Hampir separo penduduk berusia di bawah 15 tahun. Kepadatan penduduk secara regional sangat berbeda: sekitar 2/3 penduduk hidup di pantai Lautan Pasifik (15% luas negara); di daerah tengah berjumlah sedang, di daerah pantai Atlantik sangat sedikit dihuni. Ibu kota: Managua (sekitar 682.000 penduduk); tingkat urbanisasi: 56% adalah orang Mestis yang merupakan 60%–70% penduduk, kulit putih 17%, kelompok penduduk keturunan Afrika 10%–15%, dan Indian 4%–6%. Bahasa nasional Spanyol di daerah Atlantik bersaing dengan bahasa Inggris dan beberapa bahasa Indian (terutama Chibcha). Sekitar 95% penduduk beragama Katolik.

3. Setelah penguasaan orang Spanyol (1522–1524), daerah pantai Pasifik ditandai oleh politik kolonial Spanyol. Pantai Atlantik *de facto* berkembang mandiri; untuk beberapa waktu di sana berdiri negara Mosquitia yang mendapat kemerdekaan dari Spanyol dan sebuah protektorat Inggris. Tahun 1821 Nikaragua (bersama negara-negara Amerika Tengah lainnya) mencapai kemerdekaan; pembubaran gabungan negara Amerika Tengah yang berdiri tahun 1839 membuat berdirinya "negara" Nikaragua dengan pemerintahan baru di bawah Presiden Zelaya (1893–1909), yang dapat merebut semua daerah negara itu. Masa pasca-kolonial ditandai perang saudara antaroligarki yang bersaing, intervensi tentara-tentara bayaran AS serta diktator-diktator yang konservatif dan liberal. Struktur eko-

nomi Nicaragua yang berorientasi ekspor berakar pada ekspansi tanaman kopi akhir abad ke-19, penanamannya dipaksakan di bawah Zelaya (pembangunan infrastruktur, rangsangan keuangan).

4. Dalam kelangsungan pertikaian mengenai hak siaran, (1912) AS mengadakan intervensi dan menguasai negara itu sampai tahun 1933 (kecuali 1925/1926); modal AS lalu mengawasi setiap perkebunan, terutama transportasi, perbankan, dan bea. Secara politis AS mengukuhkan kekuasaannya melalui pemerintahan boneka dan pembangunan sebuah garda nasional (1927). Karena tekanan militer dari tentara pemberontak dipimpin pejuang kemerdekaan, A.C. Sandino, tahun 1932 tentara AS ditarik mundur setelah berhasil menempatkan J.B. Sacasa sebagai presiden dan A. Somoza Garcia sebagai panglima angkatan bersenjata. Sandino menyetujui sebuah perdamaian; ia dan para pemimpin tentara garda nasional (yang telah dibubarkan) dibunuh tahun 1934.

5. Tahun 1936 Somoza berkuasa melalui kudeta dan mendirikan dinasti diktator Somoza sampai tahun 1979: di masa kekuasaannya, Nicaragua dalam politik luar negeri berkembang menjadi sekutu setia AS, di dalam negeri-ditopang oleh Garda Nasional dan bantuan AS serta ditolerir untuk masa lama oleh oligarki tradisional (pakta Chamoro/Somoza tahun 1950)-mengundang reaksi politik. Kegiatan ekonomi (investasi, pembangunan infrastruktur, pemberian kredit) setelah Perang Dunia II berkonsentrasi pada ekspansi, diver-

sifikasi, modernisasi sektor pertanian (dalam rangka strategi substitusi impor dari MCCA) dan industrialisasi; sebaliknya, penanaman bahan pangan dasar diabaikan (tidak ada kredit, tidak ada jasa, *input* yang menjamin produksi dan meningkatkan yang ditopang negara). Akibatnya, pertumbuhan ekonomi yang pesat sampai tahun '70-an dengan ongkos heterogenitas struktural, pertentangan tajam sosial, dan ketergantungan luar negeri. Pengangguran yang tinggi dan kesempatan kerja kurang berakibat marginalisasi lapisan penduduk pedesaan (terutama petani kecil di daerah pantai Pasifik dan tengah), pekerja musiman dan industrialisasi yang padat modal. Pemusatan tanah dan pemilihan yang ekstrem terutama di tangan keluarga Somoza berhadapan dengan situasi miskin massa penduduk. Berkaitan dengan desintegrasi politik kelompok-kelompok sosial baru (buruh, lapisan menengah kota, dsb. yang muncul karena perubahan sosial ekonomi) dan represi yang brutal terhadap keinginan-keinginan reformasi sosial di tahun '70-an, sebagian besar penduduk menjadi radikal dan memberi dukungan luas terhadap kekuatan sosial-revolusioner dalam bentuk Front Kemerdekaan Nasional Sandinista (FSLN/*Frente Sandinista de Liberacion Nacional*) yang didirikan tahun 1962. Tekanan ekonomi dari monopoli kekuasaan Somoza serta metode memperkaya diri yang dilakukan keluarga Somoza telah berakibat pemutusan hubungan Somoza dengan lapisan pedagang yang tidak berhasil memberikan alternatif-alternatif yang reformistis kepada

Somoza. Berlangsung sebuah pemberontakan rakyat di bawah pimpinan FSLN, didukung oleh gereja dan lapisan pedagang. Juli 1979 rezim Somoza jatuh.

6. Setelah revolusi, FSLN dengan cepat mendapatkan mayoritas dalam lembaga-lembaga politik negara. Keputusan-keputusan politik yang meluas *de facto* berlangsung dalam pimpinan FSLN, *comandantes* menduduki posisi pusat negara. Lembaga politik: sampai pemilihan *de facto* pemerintah (pro) Sandinista dan sebuah kabinet pemerintahan, para Sandinista (artinya anggota FSLN) memiliki posisi kementerian, bersama dengan kewenangan legislatif dan eksekutif. Dalam pemilihan bebas November 1984 (7 partai, ikut pemilihan: 75%) Daniel Ortega (FSLN) menjadi presiden, FSLN memenangkan 2/3 mandat parlemen. Namun, oposisi dirugikan oleh situasi darurat sebelum tahap pemilihan dan oposan *Coordinadora Democratica* (sebagian besar oposisi borjuis) tidak ikut pemilihan atas tekanan AS. Meskipun ada kewenangan penuh presiden (tidak umum di Amerika Latin), UUD tahun 1987 menetapkan pembagian kekuasaan horizontal dan memisahkan kekuasaan dalam legislatif, eksekutif, dan yudikatif (sering ada di Amerika Latin). Di luar lembaga politik ini, rezim (sesuai dengan tuntutan sebuah demokrasi yang parsipatoris) berusaha mengokohkan diri dalam masyarakat melalui organisasi-organisasi massa Sandinista.

Iklim politik setelah revolusi diwarnai dengan pemisahan terbuka kekuatan Sandinista dan borjuis, serta

situasi darurat yang diberlakukan di seluruh negara Maret 1982 (akibat perang *contra* yang didorong dan dibiayai oleh AS). Tahun 1984/1985 pemilihan dilonggarkan selama setahun, dan dicabut Januari 1988 dalam rangka perjanjian Esquipulas II (→ Konflik Amerika Tengah). Terutama sekali situasi darurat membatasi ruang gerak oposisi politik karena pemerintah tidak membedakan secara jelas antara oposisi legal dan pendukung *contra*. Namun, pemerintah Sandinista tidak melakukan pembunuhan politik secara sistematis dan "menghilangkan" seseorang dari kekuatan negara (seperti yang berlangsung di El Salvador dan Guatemala misalnya). Konflik dengan hierarki gereja dan politik yang salah terhadap minoritas Indios, menimbulkan polarisasi politik dalam negeri.

7. Legitimasi pemerintah Sandinista di dalam negeri dalam jangka panjang bergantung pada tercapainya tujuan-tujuan pokok pemerintah, yaitu menghapuskan situasi pemilikan yang sangat timpang dan kemiskinan sosial dalam rangka sebuah pembangunan ekonomi kembali. Hal penting di sini adalah reformasi pertanian: setelah revolusi tanah-tanah milik Somoza (sekitar 20% kebun dan padang rumput Nikaragua) dinasionalisasi dan dipakai sebagai sumber negara untuk devisa yang sangat diperlukan. Tahun 1981 penduduk baru merasakan hasil dari perampasan tanah yang terbelengkalai dan berada dalam situasi yang tidak dapat dipakai: tahun 1986 sekitar 17% lahan dipakai untuk usaha negara, 10% koperasi kredit dan jasa, 10% koperasi

produksi, 11% tuan tanah kaya (38-380 ha), dan 7% petani kecil (di bawah 38 ha). Koperasi diprioritaskan pada pembagian tanah dan kredit. Sebagian besar pertanian dan industri (sesuai konsep sebuah *mixed economy*) sampai kini berada di tangan swasta. Namun, perbankan dan perdagangan luar negeri dinasionalisasi. Pembatasan bunga garapan, larangan bentuk garapan yang mengisap (*colonato, aparceria, mediera*), upah minimum secara hukum, pengaturan waktu kerja dan cuti serta pembayaran lanjut untuk buruh tani jika sakit, mendukung usaha-usaha reformasi tanah. Jaminan sosial selanjutnya berusaha mengatasi situasi parah di bidang pendidikan, kesehatan, pangan: wajib sekolah, sekolah tanpa bayar, kampanye anti-buta aksara yang menurunkan jumlah buta aksara dari sekitar 52% menjadi 12%, pembangunan pelayanan kesehatan, pengadaan kesehatan gratis, subsidi bahan pangan untuk waktu tertentu (sekaligus membantu produsen), dsb.

Efek jaminan sosial menjadi tidak berarti akibat krisis ekonomi. Jika masa pascarevolusi berlangsung pertumbuhan ekonomi dengan adanya dukungan luas internasional (pertumbuhan PDB, tingkat pengangguran dan inflasi yang dapat dikurangi dengan drastis), ekonomi Nikaragua sejak pertengahan tahun '80-an mengalami krisis besar: tingkat inflasi naik pesat sehingga upah riil turun drastis serta kurangnya pengadaan yang besar, menurunkan secara drastis tingkat hidup umum. Utang luar negeri yang tinggi, defisit perdagangan, dan anggaran merupakan pencerminan krisis.

Penyebabnya adalah berbagai hal: intern tidak adanya rangsangan produksi, kurangnya sistem pembagian yang terpusat serta boikot investasi dan pelarian modal oleh lapisan pengusaha karena beban negara dan polarisasi dalam negeri. Secara historis hal ini semua berakar pada "peninggalan" Somoza: kerusakan akibat perang, utang luar negeri yang tinggi, kas negara dan devisa yang kosong serta struktur ekonomi yang sangat bergantung pada gerak harga dan permintaan di pasar dunia. Namun, penentu parahnya situasi ekonomi adalah eksternal, terutama turunnya *terms of trade*, tekanan ekonomi dan militer pemerintah Reagan: embargo kredit dan impor; tekanan terhadap IMF, Bank Dunia, dan IDA; kredit multilateral untuk tidak membantu; embargo perdagangan tahun 1985; terutama perang *contra* yang dibiayai oleh AS. Kerusakan perang yang besar, anggaran pertahanan yang membengkak (tahun 1987 lebih dari separo pengeluaran negara) dan perekrutan tenaga kerja yang penting, sangat membebani ekonomi Nikaragua. Selain itu, terjadi bencana alam: banjir tahun 1982, musim kering tahun 1987, dan angin topan Joan September 1988.

Satu-satunya jalan dari keparahan ekonomi dan sosial Nikaragua adalah mengakhiri perang. Jika pemerintah AS dan Sandinista dapat bekerja sama, ekonomi Nikaragua dapat menjadi kuat, dapat melakukan tindakan-tindakan sosial, serta dapat mengintegrasikan oposisi militer dan politik Nikaragua. Hal ini kelihatannya lebih mungkin dicapai sekarang

dengan kekalahan FSLN dalam pemilihan 25 Februari 1990 (40,8% suara) dari koalisi antara Ny. Violetta Chamoro dan UNO (Serikat Oposisi Nasional, terdiri atas 14 partai) yang memenangkan 54,3% suara, dengan mendapat dukungan AS.

Kepustakaan: J.A. Booth, *The End and the Beginning: The Nicaraguan Revolution*, London 1982; W. Lutterbach, "Nicaragua", dlm.: *HDW II*, jilid 3, Hamburg 1982, hlm. 152 dst.; amnesty international, *Nicaragua: The Human Rights Record*, London 1986; F.D. Colburn, *Post-Revolutionary Nicaragua: State, Class, and the Dilemmas of Agrarian Policy*, Berkeley 1986; M.B. Vanderlaan, *Revolution and Foreign Policy in Nicaragua*, Boulder/ London 1986; M.P. Baltonado et al, "Die Rechtsordnung im nachrevolutionären Nicaragua: Anspruch und Wirklichkeit", dlm.: *VRÜ 20* (1987), hlm. 195 dst.; F. Niess, *Das Erbe der Conquista*, Köln 1987; R.J. Spalding (ed.), *The Political Economy of Revolutionary Nicaragua*, Boston dll., 1987; W. Dietrich, *Nicaragua*, cet. ke-3, Heidelberg 1988. Kepustakaan selanjutnya → Konflik Amerika Tengah.

mik
Nkrumah, Kwame Kepala pemerintahan negara Afrika Hitam yang pertama merdeka (1957), Ghana (dulu Pantai Emas). Lahir tahun 1909; sejak tahun 1935 studi sosiologi, teologi, pendidikan, dan filsafat selama 10 tahun di AS, kemudian dilanjutkan studi hukum di *London School of Economics*. Sejak di AS ia aktif politik di antara mahasiswa Afrika, selanjutnya mengembangkan gagasan pan-Afrika dan sosialis di Inggris serta mengorganisasi kongres pan-Afrika ke-6, menyerukan gerakan kemerdekaan di Pantai Gading, dan memimpin perjuangan melawan penguasa kolonial. Tahun 1949 Nkrumah mendirikan *Convention People's Party* (CPC) yang menjadi partai mayoritas karena karismanya. Setelah mencapai kemer-

dekaan, Nkrumah menjalankan pemerintahan yang sangat represif, secara ideologis diberi alasan perjuangan melawan neokolonialisme. Ia tidak berhasil merealisasi gagasan pan-Afrika dan melakukan reformasi struktur yang radikal dalam program politik dalam negerinya. Kejatuhannya (1966) mencerminkan kegagalannya.

dn
nonblok, gerakan nonblok Penger-tian dan tujuan politik nonblok berkaitan erat dengan perkembangan historis gerakan nonblok. Gerakan ini muncul dalam rangka proses dekolonisasi setelah Perang Dunia II, dengan dasar orientasi politik bersama yang mengikat dari masing-masing negara dalam menghadapi kubu-kubu kekuasaan di dalam konflik Timur-Barat. Pimpinan politik gerakan nonblok dalam tahap pemunculannya di Yugoslavia, India, dan Mesir adalah Tito, Nehru, dan Nasser. Untuk konferensi puncak pertama di Belgrado tahun 1961, prakonferensi di Kairo mengolah kriteria-kriteria sebuah negara "nonblok": melakukan politik yang tidak memihak terhadap kubu penguasa di Timur maupun Barat dan koeksistensi damai; tidak ikut ambil bagian dalam pakta militer yang berasal dari pertikaian Timur-Barat; mendukung gerakan pembebasan nasional. Namun, dalam prakteknya kriteria-kriteria ini diberlakukan sangat longgar. Pada akhirnya sebuah negara digolongkan nonblok jika diterima menjadi anggota baru oleh negara-negara yang sudah masuk dalam gerakan nonblok. Tahun 1978 kantor koordinasi gerakan nonblok mendefinisikan tanda-tanda dasar gerak-

an nonblok: tidak memihak blok, tidak adanya pakta militer dengan para adikuasa serta perlawanan terhadap imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, rasisme, termasuk apartheid, melawan semua bentuk penguasaan asing. Angka anggota gerakan nonblok terus naik, sejak tahun '70-an di Lusaka (Pertemuan Puncak Lusaka) menjadi 101 (Pertemuan Puncak Harare). Organisasi gerakan nonblok sangat longgar dan informal, tidak ada piagam pendirian maupun anggaran dasar organisasi yang menentukan lembaga tertentu. Sarana kerja penting adalah konferensi di berbagai tingkat (pertemuan puncak, konferensi menteri luar negeri, menteri, dan duta besar), persiapan tahun 1976 dibangun sebuah kantor koordinasi dengan 25 orang anggota berkedudukan di kantor PBB di New York (anggota: Afrika 12, Asia 8, Amerika Latin 4, Eropa 1). Tugas selanjutnya biro koordinasi: pelaksanaan keputusan, pelaksanaan fungsi yang diberikan dalam PBB, persesuaian dengan Kelompok 77. Ini juga meringankan negara yang mengetuai gerakan nonblok di antara konferensi-konferensi puncak (dan persiapannya). Konferensi puncak pernah dilakukan di Belgrado (1961), Kairo (1964), Lusaka (1970), Aljir (1973), Kolombo (1976), Havana (1979), New Delhi (1983), Harare (1986), Beograd (1989), dan Jakarta (1992). Titik berat bidang dampak politik gerakan nonblok berpindah dari pertikaian Timur-Barat dan dari masalah dekolonisasi ke Konflik Utara-Selatan. Dalam dasawarsa pertama dikemukakan lebih banyak ma-

salah politik, terutama politik keamanan, "yang jelas mencerminkan situasi mengancam negara dengan militer lemah dan politik tidak stabil dalam konflik Timur-Barat, perang dingin dan politik memihak yang mewarnai hubungan internasional, misalnya penghapusan blok militer, masalah pelucutan persenjataan, prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri, integritas teritorial semua negara serta penentuan sendiri nasional dan penguatan PBB" (Matthies). Dalam dasawarsa kedua ditekankan masalah kemerdekaan ekonomi dan pembangunan dalam program gerakan nonblok, dan berhasil diperdebatkan di dunia internasional, misalnya pelaksanaan dialog Utara-Selatan, seruan untuk tata informasi dunia baru. Persyaratannya dilakukan oleh gerakan nonblok bekerja sama dengan Kelompok 77 yang meningkatkan bobot Dunia Ketiga dalam hubungan internasional (→ hubungan Selatan-Selatan). Tuntutan utama sejak tahun '70-an relatif konstan. Sesuai dengan dinamika masalah pembangunan, muncul alasan-alasan baru yang mengubah prioritas, terutama radikalisme bervariasi yang dapat menaikkan tuntutan. Di sini berperan sebuah pertanyaan, negara mana yang menjadi presiden. Berbeda dengan di Havana, di New Delhi terdengar suara yang moderat.

Di bawah tingkat (konsensus) dari antikolonialisme dan sebuah katalog tuntutan global dari gerakan nonblok terhadap negara industri, muncul ketegangan besar di dalam gerakan nonblok sendiri sebagai hasil preferensi ideologi dan orientasi setiap negara di

gerakan nonblok. Selain itu, muncul pertikaian di seluruh dunia, terutama karena Kuba menimbulkan krisis berat, yaitu menginginkan persekutuan nonblok dengan Uni Soviet untuk melawan imperialisme dalam konferensi Havana. Mayoritas nonblok tetap berpegang pada prinsip mengambil jarak ke kedua kubu adi kuasa, yang di New Delhi makin mendapatkan pengakuan. Hal ini terlihat juga pada konferensi Harare tahun 1986, baik Nikaragua maupun Indonesia (keduanya merupakan calon resmi) ingin menjadi negara pelaksana untuk pertemuan puncak tahun 1989, dengan demikian menjadi ketua sampai tahun 1992: karena Nikaragua erat ikatannya ke Kuba dan karena Indonesia bersandar kuat ke AS. Pada pertemuan menteri luar negeri di Nikosia (1988), Belgrado disepakati menjadi pelaksana untuk tahun 1989. Lebih jelas dari tahun-tahun terdahulu, tidak dilakukan penentuan sikap dan penolakan pendudukan Afghanistan dan Kamboja.

Ketegangan di dalam nonblok berlangsung karena masalah sengketa perbatasan dan dalam masalah-masalah konkret mengenai perbedaan kepentingan yang makin besar antar-negara anggota dan kelompok negara (negara anggota OPEC, NIB, LLDC) dalam gerakan nonblok. Di New Delhi misalnya, negara-negara OPEC menolak menguatkan keseimbangan sumber daya antarnegara berkembang miskin dan kaya. Namun, kehancuran gerakan nonblok tidak diharapkan; gerakan ini lebih banyak mengkonsolidasi diri dan terus berkembang dalam rangka hubungan Se-

latan-Selatan, terutama dalam perluasan secara konsekuen *collective self-reliance*. Sejak tahun '80-an dalam problematika gerakan nonblok ditekankan masalah politik dan ekonomi (pelucutan senjata regional, penyelesaian pertikaian secara damai, penjadwalan utang, pengaktifan kembali dialog utara-selatan, dsb.) dan penyelesaiannya dianggap menjadi tugas.

Kepustakaan: G. Baumann, *Die Blockfreien-Bewegung: Konzept, Analyse, Ausblick*, Melle 1982; V. Matthies, "Die Bewegung der Blockfreien - einige bibliographische Notizen", dlm.: *VRÜ* 2/1982, hlm. 197 dst.; ibid, *Die Blockfreien: Ursprünge, Entwicklung, Konzeptionen*, Opladen 1985; G. Baumhöger/K. Helmstedt, *Die Gipfelkonferenz der Blockfreien* (Harare 1986), Aktueller Informationsdienst, Afrika, Beiheft 19, Hamburg 1987.

dn/ra
Nyerere, Julius Kambaragene Putra seorang kepala suku Burito, lahir tahun 1922 di Butiama di tepi Danau Victoria. Ia mendapat pendidikan di Makarere College (Uganda) menjadi dokter, dan tahun 1946-1949 mengajar di Tabora, Tanganyika. Tahun 1949-1952 belajar di Universitas Edinburgh (Skotlandia). Kembali mengajar di negaranya (1953-1955), Tahun 1954 mendirikan *Tanganyika African National Union* (TANU) dan tahun 1960 menjadi Perdana Menteri Tanzania. Tahun 1964 sampai mundur tahun 1985, Nyerere adalah Presiden Tanzania yang mencerminkan stabilitas dan kontinuitas negara itu. Sejak itu ia menjadi ketua partai kesatuan Tanzania CCM (tahun 1987 dipilih kembali). Gagasan Nyerere mengenai *self-reliance* dan sosialisme yang dipropagandakan (*ujamaa*) mempunyai pengaruh besar di Dunia Ketiga dan dalam diskusi-diskusi mengenai model pembangunan alternatif, menyum-

bangkan untuk kesadaran diri negara berkembang. (→ Tanzania).

Kepustakaan: J.K. Nyerere, *Afrikanischer Sozialismus, Texte zur Arbeit Dienste in Übersee*,

5, Stuttgart 1974; *ibid*, *Freiheit und Entwicklung, Text 10 zur Arbeit Dienste in Übersee*, Stuttgart 1975; *ibid*, *Bildung und Befreiung*, Frankfurt/M. 1977.

ah

O

OAMCAF (*Organisation Africaine et Malgache du Cafe*) Organisasi Kopi Afrika-Madagaskar.

OAMCE → Kelompok Brazzaville.

OAPEC (*Organization of Arab Petroleum Exporting Countries*) Organisasi Negara Arab Pengeskor Minyak, didirikan tahun 1968 di Beirut (Lebanon) oleh Saudi Arabia, Kuwait, dan Libia (dulu monarki seperti kedua negara lainnya), dengan tujuan sebuah kerja sama regional terutama di sektor minyak bumi dan energi (penelitian, perencanaan industri, transportasi); kedudukan: Kuwait. Negara anggota tahun 1988: Mesir (sejak tahun 1979 dikeluarkan karena membuat perjanjian perdamaian dengan Israel), Aljazair, Bahrain, Irak, Qatar, Kuwait, Libia, Saudi Arabia, Suriah, dan Uni-Emirat Arab. *Organ*: Dewan Menteri Perminyakan (pertemuan setahun dua kali), Sekretaris Jenderal; selain itu direncanakan hakim pengawas. *Kegiatan*: OAPEC melakukan penelitian teknik (pembangunan kapal tanker) di Abu Dhabi (Saudi Arabia) dan sebuah dok kapal di Aljazair. Sebanyak 7 negara anggota OAPEC sekaligus merupakan anggota OPEC dan berusaha saling menyesuaikan politik harga dan produksi di dalam organisasi yang

lebih besar. Di tahun '70-an negara-negara anggota berkepentingan menjadikan politik minyak bumi sebagai instrumen politik luar negeri Arab dalam kaitannya dengan Konflik Timur-Tengah, dengan demikian di luar aspek ekonomi murni dalam kerja sama. Pernyataan bersama untuk persatuan Islam-Arab di dalam OAPEC seperti dalam Liga Arab tidak dapat menutup perbedaan-perbedaan besar politik-ideologi masing-masing negara anggota.

Alamat: P.O. Box 20501, Kuwait.

Kepustakaan: OAPEC (ed.), *Sources and Problems of Arab Development*, Kuwait 1980; S. el-Gebali, *Die OAPEC als Organisation zur Interessenvertretung der arab. Ölländer*, Frankfurt/Bern 1981; K.J. Gantzel/H. Mejcher (ed.), *Oil, the Middle East, North Africa and the Industrial States*, Paderborn dll., 1984. **bt**

OAS (*Organization of American States*) OEA (*Organizacion de los Estados Americanos*), Organisasi Negara-Negara Amerika, berdiri sebagai organisasi multiguna regional pertama PBB pada Konferensi Inter-Amerika IX di Bogota. Setahun sebelumnya, AS dan negara-negara Amerika Latin—berdasarkan Perang Dingin yang menjalar—dalam Pakta Rio menyepakati suatu pertahanan kolektif menghadapi serangan dari

luar benua tersebut (*Tratado Inter-Americano de Asistencia Reciproca*, TIAR). Kewajiban ini dimasukkan dalam Piagam OAS. Selanjutnya, negara-negara OAS yang menandatangani piagam ini sepakat mengatur secara damai pertikaian yang terjadi di antara mereka, saling menghargai hak menentukan sendiri di masing-masing negara dan membantu kerja sama ekonomi dan kultural.

Organ teratas OAS mula-mula adalah Konferensi Inter-Amerika; tahun 1967 digantikan oleh Sidang Umum yang dilakukan setiap tahun. Dengan Dewan Tetap dan Sekretaris Jenderal, Washington merupakan pusat kedudukan OAS. Organ selanjutnya adalah Dewan Ekonomi dan Dewan Sosial, Dewan untuk Pendidikan, Pengetahuan dan Kultur (IACESC), Komisi Inter-Amerika untuk hak asasi manusia, sejak tahun 1979 sebuah Mahkamah Inter-Amerika untuk hak asasi manusia.

Sebelum pendirian OAS, negara-negara Amerika Latin sepakat melakukan bantuan untuk pembangunan ekonomi. Keinginan ini hampir tidak dilakukan; malah OAS makin menjadi instrumen penangkal kegiatan berorientasi kiri. Dengan terjadinya revolusi Kuba, tahun 1962 marxisme-leninisme dicanangkan tidak dapat hidup berdampingan dengan sistem Inter-Amerika, dan Kuba dikeluarkan dari OAS. Setelah melakukan invasi di Republik Dominika tahun 1965, AS melalui persetujuan OAS berhasil menambah beberapa tentara Amerika Latin, tentara Inter-Amerika.

Tahun 1969 negara-negara Amerika Latin dalam komisi khusus OAS,

*CECLA, untuk pertama kalinya memformulasikan dengan satu suara dan deklarasi bersikap kritis terhadap AS mengenai pembagian kerja internasional. Tahun-tahun berikutnya dalam OAS, mereka menjadi wakil-wakil kepentingan yang makin sadar menghadapi AS dan menggagalkan usaha yang dilakukan AS tahun 1974 dalam sebuah Dialog Baru. Tahun '80-an pertentangan antara AS dan negara-negara Amerika Latin dalam OAS makin tajam, terutama dalam kaitan Konflik Falkland dan Konflik Amerika Tengah. AS selama perang Falkland/Malvinas tidak berpihak pada mitra OAS, Argentina, melainkan secara terbuka berpihak kepada Inggris yang menjadi sekutunya di NATO. Di Amerika Latin makin kuat usaha-usaha, di luar OAS dengan mengecualikan AS dan memasukkan Kuba—untuk mengembangkan bentuk dan lembaga kerja sama baru.

Alamat: Pan American Union Building, Washington, D.C. 20006, USA → SELA

Kepustakaan: L. Bröck, *Entwicklungsnationalismus und Kompradorenpolitik. Die Gründung der OAS und die Entwicklung der Abhängigkeit Lateinamerikas*, Meisenheim am Glan 1975; R. Zimmering, "Entwicklungstendenzen in der Organisation der Amerikanischen Staaten (OAS)", dlm.: *Asien, Afrika, Lateinamerika*, vol. 3, 1987, hlm. 506 dst. vgl.

OATUU → serikat buruh (di Dunia Ketiga).

OAU (*Organization for African Unity*) Organisasi untuk Persatuan Afrika, sekarang dengan 50 negara anggota merupakan organisasi regional terbesar di dunia. Tahun 1984 negara POLISARIO (→ Sahara Barat) diterima menjadi negara anggota ke-51, dengan akibat keluarnya Maroko.

Selain itu, kecuali Republik Afrika Selatan, setiap negara merdeka di Afrika menjadi anggota OAU. Tahun 1990 Namibia menjadi anggota.

Sebagai pelembagaan gagasan Persatuan Afrika, OAU (bersama ECA) dalam hal organisasi kelembagaan merupakan pengikat Afrika (satu-satunya). Konflik antar-Afrika (Cad, Sahara Barat) sampai perpecahan OAU yang menyebabkannya tidak mampu mengeluarkan keputusan, menimbulkan krisis identitas sejak pertengahan tahun '70-an yang berusaha diatasi dengan menangani bidang-bidang tema baru (utang, masalah ekonomi, hak asasi manusia) serta lebih banyak realisme politik dan pendekatan autokritik.

Mei 1963 OAU didirikan oleh 30 negara merdeka Afrika setelah lama dipertikaikan dan dua pertemuan tanpa hasil (Akra tahun 1958, Addis Ababa tahun 1960). Sudah dalam tahap awal, bersatu melalui gagasan pan-Africanisme (dalam perjuangan pembebasan melawan kolonialisme merupakan rantai pengikat), berdiri organisasi regional dan partikular yang mempunyai berbagai tujuan (seperti UAM, OCAM). Pada pendirian sudah saling berhadapan dua (juga tiga) kubu. Kelompok Casablanca-radikal, progresif-sosialis-mewakili pan-Africanisme yang militan dan ingin, dipimpin Kwame Nkrumah (Ghana) dan Sekou Toure (Guinea), merupakan organisasi supranasional dengan konsep federal (Afrika Serikat). Mereka menuntut sebuah tugas kedaulatan negara, serta sebuah perubahan dari batas-batas daerah yang dibuat oleh penguasa kolonial untuk

mengatasi fragmentasi politik-ekonomi Afrika. Kelompok Brazzaville yang konservatif, terdiri atas bekas koloni Perancis, sebaliknya menuntut sebuah gabungan yang longgar (klausul tidak mencampuri urusan dalam negeri, tidak mengubah garis perbatasan yang dibuat penguasa kolonial). Beberapa negara moderat mengikuti kehendak kelompok Brazzaville-darinya terbentuk Kelompok Monrovia-, dan setelah berlangsung gelombang besar dekolonisasi (1960) serta konflik pertama yang besar (Kongo tahun 1960, Maroko/Aljazair tahun 1962), kubu-kubu tersebut bersedia berkompromi. Di sini yang banyak dipakai terutama adalah konsep kelompok Brazaville/Monrovia yang moderat.

Organ: Konferensi Puncak tahunan dari kepala pemerintah dan kepala negara. Sampai tahun 1983 berlangsung bergiliran di negara yang berbeda dengan kepala pemerintah atau kepala negara secara tradisi menjadi ketuanya selama setahun. Karena OAU dalam praktek ini tidak mampu lagi membuat konsensus, pertemuan puncak kemudian selalu berlangsung di kota berdirinya, Addis Ababa. Keputusan dan resolusi mereka (tidak mengikat secara hukum, sanksi dapat tidak dijalankan) *de jure* memerlukan mayoritas dua pertiga, tetapi dijalankan sebuah prinsip konsensus. Organ selanjutnya: Dewan Menteri, terutama politik yang penting adalah Dewan Menteri Luar Negeri (persiapan konferensi puncak, pelaksanaan keputusan, penanganan setiap masalah), rapat paling sedikit dua kali dalam setahun; Sekretaris Jenderal, dilengkapi dengan fungsi yang kurang, mengkoor-

dinasi kegiatan-kegiatan OAU di antara dua konferensi; komisi penengah dan komisi perujuk untuk kasus pertikaian antar-Afrika (tetapi sering dipakai komisi *ad hoc*); komisi khusus tujuh bagian untuk ekonomi dan sosial, pendidikan dan kultur, kesehatan, higiene dan pangan, pertahanan, lalu lintas dan jaringan telepon, pengetahuan dan teknologi, serta hukum. Sebuah komisi untuk masalah pengungsi dan sebuah biro pengawasan boikot terhadap Afrika Selatan berada di bawah Sekretaris Jenderal. Selain itu, masih ada komite pembebasan yang didirikan tahun 1963, ALC (*African Liberation Committee*) yang mengkoordinasi gerakan pembebasan nasional daerah yang masih menjadi koloni, dibantu dengan sedikit dana dan diorganisasi kampanye publik internasional.

Tujuan (menurut piagam): a. peningkatan persatuan dan solidaritas antara negara-negara Afrika; b. koordinasi dan pengokohan kerja sama untuk merealisasi sebuah hidup yang lebih baik bagi bangsa-bangsa Afrika; c. pertahanan kedaulatan, integritas teritorial dan kemerdekaan (tetapi OAU bukan merupakan pakta militer); d. penghancuran semua bentuk kolonialisme (serta neokolonialisme menurut pandangan OAU, tetapi tidak ada yang sepakat dengan definisi itu); e. mendukung kerja sama internasional dengan landasan Piagam PBB dan Deklarasi hak asasi manusia.

Selain yang ditulis di atas kertas tersebut ada lima tugas pokok OAU: a. perjuangan melawan kolonialisme dan rasisme; b. perwakilan bersama

kepentingan dalam Afrika terhadap luar, kerja sama dengan organisasi-organisasi internasional; c. penanganan konflik (persengketaan daerah yang disebabkan masalah daerah terbagi, sengketa perbatasan, serta etnis-historis) di dalam dan antarnegara Afrika; d. integrasi ekonomi, pengorganisasian kerja sama ekonomi antar-Afrika (sejak tahun '70-an), serta (sejak tahun '80-an) mengatasi krisis utang; e. sejak tahun 1981 tema hak asasi manusia menjadi tema OAU selanjutnya (dulu tabu). Sebagai jawaban atas rezim seperti Bokassa atau Idi Amin, dikeluarkan Oktober 1986 Piagam Afrika untuk Hak Asasi Manusia dan Hukum Internasional. Sebuah komisi yang dibentuk Juli 1987 bertugas memperhatikan apakah piagam ini dipegang.

Sebagai tema baru yang masuk agenda OAU tahun 1988 adalah masalah *dumping* limbah nuklir dan limbah industri beracun yang berasal dari negara-negara industri Barat ke Afrika. Hal ini atas permintaan Nigeria dalam sebuah resolusi dikecam sebagai "sebuah kejahatan terhadap Afrika dan bangsa-bangsanya". Bersamaan dengan itu diperkirakan 12 negara anggota OAU telah membuat atau sedang merundingkan kontrak dengan perusahaan-perusahaan negara industri mengenai hal ini.

Dalam tahap awal bidang aksi pokok adalah pembebasan saudara-saudara mereka yang masih berada di bawah penjajahan kolonial (melalui bantuan politik, ideologi, dan materi untuk perjuangan pembebasan). ALC mengakui perlunya perjuangan pembebasan bersenjata dan digunakan

sebagai pusat koordinasi terutama di Guinea-Bissau, Mozambik, Angola, dan bekas Rhodesia (sekarang Zimbabwe), sekarang masih di Afrika Selatan (meskipun tidak efisien dan gagal). Keberhasilannya berbeda-beda di setiap negara, di Afrika bagian selatan bekerja tokoh lain (konferensi *Commonwealth*, negara garis depan atau politikus tertentu), yang lebih sering membawa hasil. Hal rumit a.l. sulitnya negara-negara dalam OAU menjalankan wajib iurannya. Dana OAU tidak pernah terisi seperti dalam kesepakatan. Dalam konflik Sahara Barat ALC tidaklah aktif. Alasan: *POLISARIO* bukanlah sebuah gerakan pembebasan dalam pengertian OAU karena mereka bukan bertujuan membebaskan diri dari kolonialisme, melainkan memerangi satu anggota OAU.

Meskipun demikian negara *POLISARIO*, *DARS* (*Democratic of Arab Republic Sahara*, Republik Demokrasi Sahara Arab), diterima menjadi anggota, setelah berlangsung perdebatan sengit selama dua tahun, yang dua kali menggagalkan pertemuan puncak dan hampir memecah belah OAU.

Bidang kerja paling berhasil adalah politik luar negeri OAU: di panggung Afrika sering bertikai, tetapi memperlihatkan solidaritas yang sangat mengherankan—terutama dalam sidang-sidang umum PBB—, dengan cepat menciptakan forum dengan publik yang penting, membawa masalah Afrika yang spesifik (kolonialisme, rasisme, Afrika bagian selatan) secara konsekuen, sukses bekerja dengan negara berkembang lain—ter-

utama dengan Asia (masalah yang serupa) dan Arab (keanggotaan ganda OAU/ Liga Arab, saling berganti solidaritas dalam Konflik Timur-Tengah dan Afrika Selatan), serta menggunakan (karena jumlahnya yang banyak) kekuatan suaranya yang besar (PBB: sekitar 30%, nonblok: sekitar 55%, Kelompok 77: sekitar 40%) merupakan instrumen pokok. Atas inisiatif OAU kini praktis berlangsung semua konferensi internasional dari prakonferensi Afrika untuk penyesuaian suara dan koordinasi. OAU ingin menekankan kepentingan dalam Afrika. Tahun 1986 OAU berhasil mendesak dilakukannya Sidang Umum Luar Biasa PBB yang sampai kini baru terjadi sekali mengenai situasi darurat benua itu. Dengan tradisi bersama dalam gerakan Afro-Asia dan penulisan nonblok dalam piagam OAU, ada hubungan baik dengan organisasi nonblok. Sebagai contoh adalah kemunculan Afrika yang dikoordinasi OAU terhadap ME pada perundingan-perundingan Lome. Kerja Kelompok 77 (yang menonjol adalah orang-orang dari Amerika Latin yang lebih pengalaman dalam ekonomi) menunjang kesadaran pentingnya masalah ekonomi di antara para pemimpin Afrika (serta OAU).

OAU tidak tertarik jika tema-tema ekonomi yang berlangsung sampai pertengahan/akhir tahun '70-an, dianggap sebagai kesalahan pokok. Dalam bidang ekonomi tidak berpengalaman dan tidak berminat karena berkonsentrasi dalam masalah politik (dekolonisasi, rasisme *nation-building*), para pendiri OAU lama percaya bahwa kemerdekaan bangsa

secara otomatis akan memberikan kemakmuran ekonomi. Kepercayaan pembangunan ekonomi yang dicanangkan ke seluruh dunia melalui UNCTAD (1966), 10 tahun kemudian baru menyentuh OAU, dengan keterlambatan hampir 10 tahun. Sebaliknya, ECA (sebuah organ PBB di bawah ECOSOC) sudah sejak awal aktif dalam hal ekonomi pan-Africanisme (pendirian ADB dan berbagai gremium penelitian dan perencanaan), dalam konferensi pendirian OAU telah mengajukan sebuah konsep (dengan banyak elemen *collective self-reliance*), tetapi ditolak dengan alasan merupakan *low politics*. Hubungan persaingan antara ECA dan OAU (ingin saling menjadikan yang lain sebagai subordinasinya) berakhir tahun 1969/1970 dengan sebuah kerja sama yang konstruktif. Tahun 1973 berlangsung kerja sama dalam konferensi pertama OAU/ECA di tingkat menteri, di mana *African Declaration on Cooperation, Development and Economic Independence* dalam konferensi OAU berikutnya dijadikan piagam ekonomi OAU. Resolusi pertama yang primer berisi ekonomi ini ditangani kembali Februari 1979 ketika OAU membuat sebuah simposium pakar mengenai perspektif-perspektif ekonomi sampai tahun 2000 di Monrovia. Kerja yang menjadi landasan ini membuat pertemuan puncak ekonomi (pertama). OAU April 1988 sebagai kesuksesan diplomasi. Dengan rencana aksi Lagos (*Lagos Plan of Action*) diajukan sebuah konsep detil untuk integrasi ekonomi Afrika. Setelah penciptaan empat zone integrasi regional, akan diciptakan

untuk tahun 2000 sebuah pasar bersama Afrika. Sejak Lagos paling tidak ada kegiatan di tingkat konsepsi perencanaan. OAU dan ECA berusaha mengkoordinasi pendekatan-pendekatan (sekitar 40) kerja sama ekonomi regional dan subregional di bawah wadah kelembagaan mereka di Afrika karena perspektif keberhasilan masih samar dan regional sangat berbeda-beda. Untuk membangun jaringan organisasi yang sudah ada, OAU dan ECA mendirikan sebuah lembaga penunjang, yang membawa sebagian keberhasilan, misalnya *Pan-african Telecommunication Network* (PAN-AFTEL) yang ditopang oleh satelit, hubungan kabel laut pusat-pusat Afrika Barat, trans-Sahara dan jalan raya trans-Afrika. Akhir tahun '80-an merupakan masa sepi, yang ada kebanyakan kegagalan: proyek jalan pan-Afrika terbengkalai, *Pan African News Agency* (PANA) yang didirikan tahun 1983, sebuah sistem jaringan semua negara Afrika, menghadapi kebangkrutan ekonomi. Dengan kekecualian SADCC, organisasi-organisasi regional bekerja tanpa hasil.

Tingkat integrasi ekonomi di Afrika tetap sangat rendah, pangsa perdagangan Afrika dalam perdagangan luar negeri Afrika keseluruhan mengalami stagnasi di bawah 5% pasar. Hal ini makin disesalkan dengan terjadinya balkanisasi Afrika di sebagian negara-negara kecil yang miskin sumber daya, terputusnya ruang-ruang ekonomi dan terfragmentasinya pasar, sebuah integrasi justru merupakan imperatif strategi pembangunan; terutama melihat realitas bahwa ada persyaratan pembangunan

yang baik: cukup segala jenis bahan mentah, energi (minyak, batu bara, air), potensi yang besar akan tenaga kerja sehingga potensi pasar penjualan cukup besar. Tidak adanya modal dan *know-how* sebenarnya dapat diperoleh melalui banyak pendekatan kerja sama Afro-Arab.

OAU menghadapi banyak sekali kendala struktural pada integrasi ekonomi (dan politik) Afrika. Benua yang meliputi 54 negara dengan banyak keragaman, fragmentasi sehingga kepentingan nasional masing-masing sangat berbeda-beda. Berdasarkan jumlah penduduk (berdasarkan ukuran potensi pasar) dimulai dari Nigeria (103 juta penduduk), sampai ke pulau mini Seychelles (7.000 penduduk). PNB per kapita Libia adalah 7.500 US\$/tahun (1983), sementara Mozambik adalah 100 US\$/tahun (1987). Negara yang kaya sumber daya (misalnya Nigeria, Zaire atau Aljazair) berhadapan kontras dengan negara miskin tanpa harapan (seperti Somalia, Burkina Faso, Mali, dsb.). Model pembangunan yang dipakai juga berbeda; pada tetangga terbesar pun (misalnya Pantai Gading/Guinea, Zaire/Angola, Mozambik/Malawi) mereka berbeda jauh. Ditambah lagi dengan heterogenitas sistem politik (pemerintah militer, sistem satu partai atau multipartai yang dipegang sipil, diktator, → rezim otoriter), serta orientasi politik dalam dan luar negeri. Sebagai akibat sejarah kolonial, struktur-struktur ekonomi mirip dan tidak komplementer (membebaskan bahan mentah, berorientasi ekspor, monokultur, spektrum barang ekspor yang sama) serta berorientasi ke

metropol. Akibatnya, persaingan antarnegara dan tidak ada rangsangan (kurangnya barang yang dapat diper-tukarkan) untuk perdagangan dalam Afrika. Kendala selanjutnya adalah keanggotaan ke berbagai zone mata uang (CFA-Franc di negara-negara *francophon*, US\$ di Liberia, dsb., serta infrastruktur antarnegara yang hampir tidak ada (masalah lalu lintas dan komunikasi diarahkan ke metro-pol)).

Keberhasilan internasional didapatkan OAU Mei/Juni 1986 ketika berlangsung Sidang Istimewa PBB untuk masalah gawat di Afrika. Di sana diputuskan rencana ekonomi yang telah diolah OAU, yang akan membantu Afrika sebuah program investasi sampai tahun 1990 sejumlah 128 miliar US\$ (*United Nations Program of Action for African Economic Recovery and Development* tahun 1986-1990). November 1987 negara-negara OAU berhasil memperlihatkan kebersamaan situasi ekonomi mereka terhadap para kreditornya. Dalam sebuah pertemuan puncak khusus mengenai krisis utang Afrika disepakati bahwa beban utang Afrika yang berjumlah lebih dari 200 miliar US\$ akan diselesaikan tidak dengan konfrontasi, melainkan dengan kooperasi. OAU menempati posisi moderat, mengakui kewajiban untuk membayar kembali utang, tetapi menuntut penghapusan utang untuk LLDC di Afrika, Zone Sahel, dan negara garis depan. Beban utang negara lain dijadwalkan untuk 10 tahun, penjadwalan utang di masa depan dan kredit diberikan tanpa bunga dalam tempo 50 tahun. Kredit yang akan datang

dapat dipakai dalam mata uang lokal. Bahwa satu benua dapat memformulasi sebuah posisi bersama dalam masalah utang yang demikian pentingnya, dapat dikatakan sebagai keberhasilan. Tahun 1989 direncanakan konferensi-konferensi besar selanjutnya dengan keikutsertaan negara kreditor.

Sangat berbeda dengan bidang politik dalam negeri; ruang gerak OAU, terutama kemunduran kemampuan mereka menangani konflik, sangat dipersempit. Karena situasi gawat, mereka harus mengutamakan tujuan global persatuan Afrika sebagai intermezo penanganan konflik antar-Afrika. Di sini berlaku jargon *try OAU first*: konflik perlu ditinggalkan dalam kerangka dalam Afrika dan diatur oleh OAU menurut 3 prinsip: a. hak menentukan sendiri dari bangsa-bangsa (menurut interpretasi PBB hanya di dalam batas kolonial); b. integritas teritorial; c. kedaulatan batas daerah yang dibuat penguasa kolonial. Hal ini juga berhasil di tahun-tahun awal berdasarkan etnis konflik dengan keberhasilan sendiri-sendiri (berhasil dalam persengketaan perbatasan, tidak ada harapan pada perang pembagian daerah). Kecenderungan negara (yang rapuh secara politik dan lemah secara ekonomi), mencari bantuan dan perlindungan dalam kasus konflik, mula-mula tidak menyebabkan internasionalisasi dan polarisasi krisis. Afrika merupakan zone pengaruh eksklusif dari negara-negara Barat. Konflik tipe lama (murni Afrika, misalnya Nigeria/Biafra tahun 1967, Guinea-Ekuator/Gabon tahun 1972, Mali/Volta Atas tahun

1974) sering sengit dan penuh kekerasan, tetapi jarang yang berlangsung lama dan cenderung ke penyelesaian definitif. Hal ini berubah besar di pertengahan tahun '70-an. Didorong oleh perang Vietnam yang dilakukan AS, Uni Soviet dan wakilnya (terutama Kuba) mulai bermain di Afrika. Diawali dengan konflik di Tanjung Afrika, terjadi pengaitan penguasa asing (dari masing-masing kubu yang berbeda), menjadi implementasi konflik Timur-Barat sehingga polarisasi politik-ideologi Afrika dan OAU. Sekarang lebih dari separo negara-negara OAU melakukan perjanjian militer dan pertahanan dengan penguasa-penguasa luar Afrika. Tahun 1989 ada 45 pangkalan militer (termasuk hak pemakaian sarana militer) di dan sekitar Afrika. Nonblok murni (seperti menurut piagam) sudah jarang. Hal ini berdampak menguatkan konflik-konflik di Afrika (persenjataan yang makin banyak, eskalasi yang lebih cepat), terutama pengalihan permanen sistem dunia Timur-Barat. Kualitas konflik baru ini tidak bisa lagi diatasi oleh OAU. Anggaran tahun 1987/1988 sebesar 25 juta US\$ (yang benar-benar masuk hanya 3%) kurang dari 1/8 anggaran OEA yang beranggotakan 28 negara, asal personalnya sekitar 600 merupakan miniatur dibandingkan "panutan" Eropa ME yang lebih dari 18.000. Namun, kapasitas material minimalnya bukan penyebab ketidakmampuan bertindak OAU.

Beban terus-menerus yang berat untuk OAU adalah konflik berkesinambungan (yang terinternasionalisasi) di Cad, terutama Sahara Barat.

Berbagai insiatif penengah OAU terbukti sama sekali gagal. Konflik antara Libia dan Cad tidak bisa diselesaikan dengan pengiriman tentara perdamaian OAU yang kecil (1981) dan sebuah komite yang dibentuk tahun 1988 dipimpin Gabon yang bertugas menyelesaikan masalah perbatasan. Sulit untuk diputuskan apakah jalur Azouzou masuk ke Cad atau Libia. Bidang konflik Sahara Barat dan Cad (1982), dalam "tahun gelap" OAU, hampir menyebabkan bubarnya organisasi itu karena mereka benar-benar terpecah dalam dua masalah mengenai penerimaan negara POLISARIO dan delegasi mana yang mewakili Cad (pemerintah Habre atau Queddei yang diusir oleh Habre dan merupakan anak perlindungan Gaddafi). Tahun 1982 dua konferensi yang sudah direncanakan, tidak dibuka, anggaran tidak ditetapkan, ketua baru tidak dipilih, dengan demikian melanggar piagam OAU—sebuah kevakuman dan kejutan untuk seluruh Afrika.

Juni 1983 (dengan kembali ke pan-Afrika) di Addis Ababa (kota pendirian dan kedudukan OAU) berhasil dilakukan konferensi puncak ke-19 yang menjadi penyelamat (sementara) OAU, tetapi sejak pertengahan tahun '70-an krisis identitas OAU terus berlangsung. Sejak kemerdekaan bekas koloni-koloni Portugis, paling lambat sejak kemerdekaan Zimbabwe (1979), persekutuan negara yang antikolonialisme dan antirasisme praktis telah kehilangan tujuan yang dulu menyatukannya. Tema terakhir dengan beberapa efek adalah Namibia dan Afrika Selatan.

Di sini juga seperti sebelumnya dikeluarkan resolusi dengan suara bulat. Akan tetapi, ketika Namibia merdeka tahun 1990, sebagian besar OAU justru mengecam Afrika Selatan secara agresif.

Tidak adanya keberhasilan menyebabkan frustrasi. OAU tidak ikut ambil bagian dalam semua proses-proses politik-diplomasi yang penting untuk Afrika (misalnya perjanjian Nkomati antara Afrika Selatan dan Mozambik; perjanjian perdamaian Namibia/Angola antara Afrika Selatan, Kuba, dan Angola; rujukan antara Somalia dan Etiopia tahun 1988; dst.). Pada konflik-konflik penting (perang di Sudan Selatan, Eritrea, Tigray, dsb.) mereka tidak melakukan apa-apa sesuai dengan kriteria yang mereka atur sendiri (tidak ikut campur, menabukan batas kolonial). Semua bidang kerja baru OAU sama sekali tidak memiliki elemen anti-kolonial dan antirasisme yang menyatukan mereka. Dalam perspektifnya, bagi OAU terutama sekali masalah ekonomi adalah baru, sulit, dan kontroversial. Kini kepentingan yang berbeda muncul secara jelas, misalnya dalam masalah utang (Ghana bersedia membayar, Zaire tidak), atau dalam masalah impor limbah beracun dari negara industri Barat. Banyak elite yang berkuasa juga tidak memiliki minat menyertakan perjuangan bersama untuk pembebasan ekonomi setelah perjuangan bersama pembebasan politik Afrika karena mereka mendapatkan keuntungan dari struktur ekonomi yang berlaku. Akhir tahun '80-an terlihat peredaan ketegangan konflik antarnegara. Tahun

1988 pelaku pertikaian masalah Sahara Barat, yaitu Aljazair dan Maroko, kembali membuka hubungan diplomatik, ada sebuah tawaran perdamaian dari Libia untuk Cad, rujukan antara Etiopia dan Somalia, terutama yang penting adalah perjanjian perdamaian yang diusahakan AS mengenai Angola/Namibia, yang merupakan harapan berakhirnya konflik berat (dan terinternasionalisasi) di Afrika bagian selatan. Dalam hal ini Uni Soviet dalam rangka perestroika Gorbachev berperan penting ingin mengakhiri ambisi politik kekuasaannya di Afrika, dapat menentukan perubahan struktur konflik di Afrika dalam tahun '90-an.

Sekarang OAU berusaha keras mendefinisikan tujuan dan tugas untuk anggota-anggotanya secara meyakinkan, realistis, dan bermotivasi. Persatuan dan identitas mereka terancam jika tidak ada sebuah negara Afrika yang berkepentingan terhadap eksistensinya. Politik yang terbentuk kini tidak dapat diharapkan dari OAU, sebagai ganti adalah temuan yang menyakitkan dari sebuah kesadaran diri. Keberhasilan OAU adalah ia tetap ada, meskipun terjadi banyak pertikaian dan krisis.

Kepustakaan: F. Ansprenger, *Die Befreiungspolitik der Organisation für Afrikanische Einheit (OAU) 1963-1975*, München 1975; F. Nuscheler/K. Ziemer, *Politische Organisation und Repräsentation in Afrika*, 2 jilid, Berlin/ New York 1978; E. Häckel, "Die Organisation für Afrikanische Einheit. Legitimationsfunktion einer internationalen Organisation", dlm.: *Internationales Afrikaforum* 1979/21; F. Nuscheler/K. Ziemer, *Politische Herrschaft in Schwarzafrika. Geschichte und Gegenwart*, München 1980; Ph. Kunig, *Das völkerrechtliche Nicht-einmischungsprinzip - Zur Praxis der Organisation der Afrikanischen Einheit (OAU) und des*

afrikanischen Staatenverkehrs, Baden-Baden 1981; E. M'buyinga, *Pan-Africanism or Neo-colonialism; The Bankruptcy of the OAU*, London 1982; F. Nuscheler, "Struktur und Entwicklungsprobleme Schwarzafrikas" (mit ausführlicher landesübergreifender Bibliographie), dlm.: *HDW II*, vol. 4, hlm. 11 dst., Hamburg 1982; G. Baumhögger, "Die Organisation der Afrikanischen Einheit (OAU) am Scheideweg?", dlm.: *Jahrbuch Dritte Welt I*, München 1983, hlm. 221 dst.; A. Sesay/O. Ojo/O. Fasehun, *The OAU after Twenty Years*, Boulder (Col.) 1984; J. Mfoulou, *L'OUA - Triomphe de l'Unité ou des Nationalités?*, Paris 1987; B. Neuberger, *National Self-Determination in Postcolonial Africa*, Boulder/Col. 1987.

bg

OCAM (*Organisation Commune Africaine et Malgache*) Organisasi Bersama Afrika-Madagaskar, didirikan tahun 1961 oleh anggota Kelompok Brazzaville untuk kerja sama ekonomi, sosial, kultural, dan teknik. Dibubarkan tahun 1985; dana jaminan tetap ada meskipun dengan nama baru *Fonds Africain de Garantie et de Cooperation Economique* (FAGACE).

fn

OCAS → **ODECA**.

OCBN (*Organisation Commune Benin-Niger des Chemins de Fer et des Transports*) Organisasi Bersama Benin-Niger untuk Sistem Kereta Api dan Transportasi.

ODA (*Official Development Assistance*) Bantuan Pembangunan Pemerintah; menurut definisi DAC, ODA adalah semua bantuan yang berasal dari lembaga-lembaga pemerintah termasuk dari negara bagian atau daerah atau perwakilannya kepada negara berkembang atau lembaga-lembaga multilateral untuk pembangunan ekonomi dan perbaikan situasi hidup di negara berkembang. Bantuan ODA ini diberikan dengan syarat lunak (pada kredit dan pin-

jaman dengan elemen tunjangan paling sedikit 25%). ODA terpisahkan dari bantuan yang berasal dari ekonomi swasta dan bantuan pemerintah yang mengikuti persyaratan pasar (\rightarrow investasi langsung, politik bantuan pembangunan).

ODA dari Kelompok Kreditor Terpenting

	dlm. miliar US\$			dlm. % PNB		
	1970	1980	1985	1970	1980	1985
DAC	6,9	26,7	29,4	0,34	0,37	0,35
OPEC	0,4	7,0	3,6		0,35	0,65
COMECON	1,0	1,8	3,53	0,14	0,12	0,24

Pangsa Kelompok Kreditor Utama pada ODA Keseluruhan (dlm. %)

	1981	1983	1986
DAC	68	76	79
OPEC	22	14	10
COMECON	8	9	10

ODA Negara-Negara Industri Barat Tahun 1991

	Jumlah dlm. miliar US\$	% PNB*
Amerika Serikat	11,5	0,20
Jepang	11,0	0,32
Perancis	9,5	0,80
Jerman	6,8	0,40
Inggris	3,2	0,32
Italia	2,9	0,25
Kanada	2,6	0,45
Belanda	2,5	0,88
Swedia	2,1	0,92
Denmark	1,2	0,96
Norwegia	1,2	1,14
Spanyol	1,2	0,23
Australia	1,1	0,38
Finlandia	0,9	0,76
Belgia	0,8	0,41
Swiss	0,8	0,32
Austria	0,5	0,34
Portugal	0,2	0,28

Sumber: OECD

Pada tahun 1991 sekitar 58 miliar US\$ mengalir bantuan pembangunan pemerintah negara industri Barat ke Dunia Ketiga. Sekitar 2/3 berasal dari 4 negara besar (AS, Jepang, Perancis, dan Jerman), tetapi jika diukur dari PNB, Norwegia, Denmark, Swedia, dan Belanda memberikan pangsa bantuan terbesar dari PNB mereka. **dn** ODCA (*Organización Demócrata Cristiana de América*) Organisasi Negara-Negara Amerika Tengah untuk Partai-Partai Kristen-Demokrat di Amerika, berdiri tahun 1947 di Montevideo. Kedudukan: Caracas, anggota Uni Dunia Kristen Demokrat CDWU. **dn** ODECA (*Organización de Estados Centroamericanos*) Organisasi Negara-Negara Amerika Tengah (juga disebut OCAS, *Organization of Central American States*), didirikan tahun 1951 oleh Kosta Rika, El Salvador, Guatemala, Honduras, dan Nikaragua, dalam rangka usaha integrasi Amerika Tengah (\rightarrow MCCA).

Tujuan: pembangunan persatuan politik di Amerika Tengah. Dari pernyataan bersama dan keinginan setiap negara secara verbal (a.l. tahun 1963), merupakan proyek yang tidak menghasilkan sesuatu, akibat strategi *counterinsurgency* yang dilakukan AS. **dn**

ODM \rightarrow politik bantuan pembangunan Inggris.

OEA \rightarrow OAS.

OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan, berdiri tahun 1961, tempat kedudukan: Paris, 24 anggota: AS, Australia, Austria, Be-

landa, Belgia, Denmark, Finlandia, Inggris, Irlandia, Islandia, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Luksemburg, Norwegia, Perancis, Portugis, Selandia Baru, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki, dan Yunani. Yugoslavia merupakan anggota asosiasi. OECD merupakan organisasi terpenting negara industri Barat (60% pangsa dalam produksi industri dunia, 73% pangsa pada perdagangan dunia), dan instrumen koordinasi dari politik ekonomi negara industri Barat. *Tujuan:* pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tingkat kesempatan kerja yang tinggi, stabilitas keuangan di negara-negara anggota; peningkatan perdagangan dunia; membantu negara berkembang (tindakan politik perdagangan, bantuan kredit keseluruhan meliputi 4/5 bantuan pembangunan di dunia).

Organ: dewan, terdiri atas semua anggota; bersidang sekali setahun, kedua dipilih setahun sekali; Sekretaris Jenderal; Komisi, a.l. komisi bantuan pembangunan, DAC, tahun 1974 mendirikan Lembaga Energi Dunia (IEA) untuk mengatasi kesulitan dalam pengadaan energi dan neraca pembayaran. Publikasi mengenai kesepakatan dan prinsip kerja sama internasional dan politik pembangunan, a.l. aturan dasar OECD untuk perusahaan multinasional, Juni 1976. Publikasi OECD (kota publikasi: Paris): *DAC-Report/1982*; *Geographical Distribution of Financial Flows to Developing Countries/1982* (*Disbursements - Commitments - External Debt - Economic Indicators*); *OECD - Economic Outlook*; *OECD - Economic Surveys*; *OECD - Employment Outlook 1988*; *OECD: Activities of*

OECD in 1988, Report by the Secretary-General, OECD-Nachrichten (Bonn).

Alamat: 2, rue Andre Pascal, F-75 Paris.

Kepustakaan: H. Hahn/A. Weber, *Die OECD*, Baden-Baden 1976; D. Menke, "Die OECD-Aufbau, Zweck, Möglichkeiten", dlm.: *Bank-informationen* 9, 1980, hlm. 43 dst.; M.G. Schmidt (ed.), *Westliche Industriegesellschaften* (vol. 2, Pipers Wörterbuch zur Politik, ed. D. Nohlen), München 1983.

dn
OECS (*Organization of Eastern Caribbean States*) Organisasi Negara-Negara Karibia Timur. 7 pulau di Karibia Timur—Antigua, Barbuda dan Redonda, Dominika, Grenada, Montserrat, St. Kitts-Nevis, St. Lucia, St. Vincent dan Grenadin—sejak tahun 1968 bergabung dalam Pasar Bersama Karibia Timur (ECCM), dengan demikian membentuk sebuah ruang integrasi ekonomi subregional dalam rangka CARIFTA (1968) dan organisasi-organisasi setelahnya, CARICOM (1973) dan CCM (1973). Di bidang politik juga ada pendekatan kerja sama subregional, misalnya Federasi Hindia Barat (1958–1962) dan proyek yang gagal (1965) dari Federasi Karibia Timur, dan dalam rangka negara Hindia Barat yang terasosiasi (1967).

Pendalaman selanjutnya dari kerja sama subregional adalah mendirikan negara/wilayah Karibia Timur, OECS, melalui perjanjian Basseterre (St. Kitt-Nevis) tanggal 18 Juni 1981. Mereka terbuka untuk semua negara di daerah Karibia. *Tujuan:* harmonisasi politik luar negeri, meningkatkan integrasi ekonomi dan kerja sama infrastruktur antarnegara anggota. *Organ:* Dewan Kepala Negara Anggota sebagai organ tertinggi; komite untuk masalah luar negeri, untuk per-

tahanan dan keamanan dan untuk masalah ekonomi; masing-masing sebuah sekretariat untuk masalah politik (St. Lucia) dan ekonomi (Antigua). Selain itu dibentuk sebuah komisi keseimbangan untuk penyelesaian konflik secara damai. Dalam rangka mekanisme integrasi dan kerja sama politik dan ekonomi yang lebih luas dari CARICOM dan CCM, maka OECS subregional mempunyai fungsi meningkatkan *bargaining power* 7 negara anggotanya.

Kepustakaan: W. Hummer, "Organisation der Staaten der Ostkaribik", dlm.: P. Waldmann/U. Zelinsky (ed.), *Politisches Lexikon Lateinamerika*, cet. ke-2 1982, hlm. 400 dst.; M.D. Pollner, A.T. Bryan, dan N. Boissiere, dlm.: *La Comunidad del Caribe, Integración latinoamericana* 121 (1987).

wh

OERS → OMVS.

offshore Definisi yang dipakai dalam geologi dan disiplin-disiplin yang berkaitan dengannya dan dalam eksploitasi minyak, menunjukkan tempat-tempat minyak bumi dan gas bumi yang disimpan terlebih dahulu di daerah pantai dan terletak sampai 200 m kedalaman laut di daerah pantai. Sebagai contoh adalah banyak tempat penyimpanan di Teluk Persia serta Teluk Meksiko (tempat penyimpanan minyak dan gas bumi di darat disebut *onshore*).

ah

OIAC (*Organisation Interafricaine de Café*) Organisasi Kopi Inter-Afrika.

OIC (*Organization of the Islamic Conference*) Organisasi Konferensi Islam, berdiri Mei 1971 di Jedah/Saudi Arabia, tahun 1988 memiliki 46 anggota (termasuk PLO). Afghanistan dikeluarkan sebagai anggota setelah invasi tentara Uni Soviet

ke sana. **Tujuan:** meningkatkan solidaritas Islam di antara negara-negara anggota dan melindungi kepercayaan Islam; berjuang melawan diskriminasi ras dan kolonialisme, mendukung PLO; kerja sama di bidang ekonomi, sosial, pengetahuan, dan kultural. **Organ:** Konferensi Puncak Islam (tidak tertentu), Konferensi Menteri Luar Negeri (organ eksekutif, bersidang paling sedikit sekali setahun), Sekretaris Jenderal (kedudukan: Jedah), Mahkamah Islam Internasional (sejak tahun 1987, kedudukan di Kuwait), suborganisasi a.l. IINA (*International Islamic News Agency*) yang didirikan tahun 1972, IsDB (*Islamic Development Bank*), dan Dana Solidaritas Islam (ISF, *Islamic Solidarity Fund*). **Kegiatan:** Komisi Yerusalem (program rahasia untuk pembebasan negara dan daerah yang diduduki Israel), Deklarasi Mekah (pembangunan kembali hak nasional orang Palestina, penarikan mundur Uni Soviet dari Afghanistan), usaha menengahi Perang Irak-Iran, serta bantuan program untuk Zone Sahel. OIC menjaga hubungan ke Liga Arab dan nonblok.

Kepustakaan: M.D. Ahmed, "Organisation Islamischer Konferenz", dlm.: T. Koszinowski/H. Mattes (ed.), *Nahost Jahrbuch* 1987, Opladen 1988, hlm. 174 dst.

dn/ah

OLADE (*Organización Latinoamericana de Energía*) Organisasi Energi Amerika Latin, berdiri sejak tahun 1974. Kedudukan: Quito/Ekuador, menjalankan kepentingan regional negara-negara OPEC.

ah

OLAS (*Organización Latino-Americana de la Solidaridad*) Organisasi Solidaritas Amerika Latin, berdiri tahun 1966. Merupakan organisasi pe-

nunjang gerakan pembebasan revolusioner di Amerika Latin serta ekspor revolusi Kuba. Sejak akhir tahun '60-an bubar bersama dengan kegagalan gerilya di Amerika Latin. Tidak memiliki kegiatan.

OLDEPESCA → SELA.

Oman Merupakan daerah yang sangat strategis. Di satu pihak dapat menguasai Selat Hormuz yang merupakan salah satu rute tanker minyak terpenting di dunia, di lain pihak (1980) Oman menandatangani perjanjian mengizinkan AS memakai instalasi militernya untuk Cadangan Serangan Teluk milik AS (*Rapid Deployment Force*). Dengan demikian, Oman menjadi titik tolak potensial untuk aksi perang "mempertahankan" ladang-ladang minyak.

1. Daerah Kesultanan Oman (sekitar 300.000 km²) juga meliputi Semenanjung Musadam di Selat Hormuz yang dipisahkan dari bagian lainnya oleh teritorial Uni Emirat Arab. Bagian terbesar negara itu (80% gurun, 15% pegunungan) tidak dapat dimanfaatkan untuk pertanian atau dihuni untuk waktu lama. Orang Beduin beternak, terutama di sebelah selatan Oman (sapi, kambing, domba, unta), di sekitar 2% areal (daerah gurun, oase) ditanam terutama kurma, sitrun, pisang, tomat, dan gandum. Oman memiliki-relatif sedikit-cadangan minyak bumi dan bahan mentah lainnya (terutama tembaga dan gas). Dengan bantuan Jepang, Korea, dan Selandia Baru, Oman memanfaatkan kekayaan ikan di perairannya.

2. Sejarah Oman diwarnai oleh konflik antara imam (pemimpin agama orang Ibaditen, didukung suku-

suku pedalaman Oman) dan kekuasaan sultan. Dengan runtuhnya kekuasaan perdagangan Oman, kesultanan makin bergantung pada bantuan Inggris, yang dengan bantuannya Sultan sering dan akhirnya dapat mengalahkan imam. Sejak tahun 1970 Kesultanan Oman merupakan negara berdaulat. Hubungan yang baik dengan Inggris terus ada (penasihat Inggris, sultan Oman sekarang, Sultan Qaboos bin Said, mendapat pendidikan di Sandhurst, menggantikan ayahnya tahun 1970 dengan bantuan Inggris).

3. Penduduk Oman tahun 1989 diperkirakan 1 juta, sebagian besar hidup berpencaran di oase-oase (tingkat urbanisasi tahun 1989: 10%, ibu kota Muskat, sekitar 100.000 penduduk). Bekas perluasan kekuasaan Oman jelas berpengaruh atas komposisi penduduk sekarang. Di samping bukan-Oman (tenaga ahli Barat, kaum pendatang keluarga pedagang India dulu, kaum pendatang baru India dan Pakistan yang melakukan pekerjaan-pekerjaan mudah), hidup Oman-Afrika (2%), Persia (3%), dan keturunan Belutshistan (4%), selain suku-suku pribumi (88%). Sekitar 5% penduduk adalah orang nomad.

4. Keturunan bekas budak secara sosial lebih didiskriminasi oleh orang Oman bukan Arab. Mereka bersama-sama dengan buruh tamu merupakan lapisan bawah yang hidup di daerah perkotaan Oman yang tumbuh pesat. Selain pemimpin suku-suku tradisional yang terkemuka dalam masyarakat adalah kaum pedagang dan pengusaha serta pejabat tinggi negara.

Pengadaan penduduk tahun-tahun terakhir di bidang kesehatan dan pendidikan, jelas membaik. Infrastruktur Oman juga diperluas, sementara kekurangan tempat tinggal terutama untuk lapisan bawah, tetap besar.

5. Strategi pembangunan Oman di tahun '60-an dan '70-an ditentukan (1965-1975) oleh konflik antara sultan yang berkuasa sebagai penguasa absolut (tahun 1981 ditempatkan Dewan Penasihat Negara dengan tujuan mengubah Oman menjadi kesultanan dengan sistem parlemen) dengan kaum pemberontak di propinsi sebelah selatan Dhofar (sejak tahun 1979 di Oman). Didukung oleh Republik Demokrasi Rakyat Yaman PFLOAG (Front Rakyat untuk Pembebasan Daerah Arab di Teluk yang diduduki) melakukan sebuah gerakan untuk menggantikan penguasa tradisional. Tahun 1974 mereka mengubah nama menjadi PFLO dan memusatkan perhatian ke Oman. Akhir gerakan pemberontakan ini adalah penarikan dukungan untuk PFLO oleh Republik Demokrasi Rakyat Yaman (akibat tekanan Saudi Arabia), penguatan angkatan bersenjata Oman oleh Inggris, amnesti umum untuk pemberontak dan hadiah uang, pakaian, pangan, dan perlengkapan rumah kepada penduduk Dhofar serta perluasan sarana infrastruktur di sana.

6. Pembangunan pesat di Oman sejak kudeta tahun 1970 terutama berlandaskan pada penerimaan dari sektor minyak (tahun 1974 negara mengambil 60% *Petroleum Development Ltd. Oman*). Sejak tahun 1980 (rencana pembangunan kedua) negara berusaha dengan bantuan rang-

sangan untuk investasi swasta sebuah diversifikasi struktur ekonomi. Konsentrasi sektoral (perdagangan, perbankan, bangunan) dan regional (daerah sekitar Muskat) dari investasi sampai kini tidak dikurangi.

Karena pembangunan sampai sekarang terutama ditopang oleh tenaga kerja asing (tahun 1985: 300.000, berjumlah dua kali lipat dari angkatan kerja Oman), pendidikan potensi tenaga kerja pribumi yang berorientasi pada kebutuhan pembangunan menjadi tugas politik yang mendesak. Dalam hal ini bidang-bidang yang tidak diperhatikan terutama adalah pertanian dan usaha produksi.

Kepustakaan: F.A. Clement, *Oman. The Reborn Land*, London/New York 1980; F. Scholz, "Oman", dlm.: *HDW II*, 6, Hamburg 1983, hlm. 420 dst.; W. Zimmermann/F. Scholz, "Oman", dlm.: U. Steinbach/R. Robert (ed.), *Der Nahe und Mittlere Osten*, vol. 2, Opladen 1988, hlm. 293 dst.

rs
OMDKRB (*Organization for the Management and Development of the Kagera River Basin*) Organisasi untuk Pengurusan dan Pengembangan Palung Kagera.

OMVG → Gambia.

OMVS (*Organisation pour la Mise en Valeur de Fleuve Sénégal*) Organisasi untuk pemanfaatan Sungai Senegal, secara bertahap (sejak tahun 1964) didirikan tahun 1972 oleh Senegal, Mauritania, dan Mali. Organisasi Afrika Barat paling efektif untuk memanfaatkan palung sungai. Pendahulunya. OERS (*Organisation des Etats Riverains du Fleuve Sénégal*) sampai tahun 1972, termasuk Guinea. Titik berat program pembangunan tahun 1974 yang berjangka

waktu 40 tahun adalah pembangunan dua bendungan.

ongkos oportunitas → teori perdagangan luar negeri.

OPEC (*Organization of the Petroleum Exporting Countries*) Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak, didirikan tahun 1960 di Bagdad oleh Iran, Irak, Kuwait, Saudi Arabia, dan Venezuela. Pusat kedudukan: Kuwait. Anggota susulan: Qatar (1961); Indonesia dan Libia (1962); Abu Dhabi (1967), sejak tahun 1974 VAE/*Vereinigte Arab Emirate*, Uni Emirat Arab; Aljazair (1969); Nigeria (1971); Ekuador (1973); Gabon (1975) (masing-masing tahun menjadi anggota penuh). **Organ:** konferensi, terdiri atas delegasi-delegasi negara anggota, merupakan organ tertinggi, bersidang dua kali dalam setahun, setiap negara mempunyai satu hak suara, keputusan memerlukan kebulatan suara, pada penerimaan anggota baru diperlukan 3/4 suara mayoritas anggota dan persetujuan anggota pendiri. (Kriteria untuk penerimaan: ekspor minyak mentah harus merupakan landasan utama ekonomi). Dewan gubernur terdiri atas gubernur-gubernur yang diajukan dan dikuatkan dalam konferensi. Di bawah pengawasannya keputusan-keputusan konferensi dijalankan oleh sekretariat yang dibawahhi oleh seorang Sekretaris Jenderal, masa jabatan 2 tahun, dilakukan berdasarkan sistem rotasi negara anggota sesuai tanggal masuknya sebagai anggota. Sejak tahun 1965 sekretariat berkedudukan di Wina. Tujuan menurut anggaran dasar: koordinasi dan kesatuan politik minyak negara-negara anggota serta

perlindungan kepentingan individual, kolektif mereka; stabilisasi harga minyak bumi di pasar internasional; penjaminan pendapatan untuk negara pengekspor, pengadaan yang mencukupi dan teratur untuk negara konsumen dan pembungaan yang *fair* dari modal mereka untuk investor asing.

Dalam dasawarsa setelah pendiriannya, OPEC terutama sekali memperjuangkan stabilisasi harga untuk minyak mentah dan peningkatan pangsa negara pengekspor pada penerimaan dari negara pembeli, menjang perusahaan asing, mengekspor, memasarkan, dsb. Keberhasilan politik kartel yang berisi pertikaian berat dengan perusahaan-perusahaan transnasional minyak, baru terlihat di awal tahun '70-an. Jika penerimaan anggota OPEC meningkat (1962-1970) sekitar 13,5%, tahun 1970-1971 hanya 55,3%, meskipun jumlah ekspor tahun 1962-1970 rata-rata hanya 12,9%, sementara tahun 1970-1971 hanya naik 7,4%. Keberhasilan dan perubahan dalam pasar minyak ini, terutama makin sedikitnya minyak bumi sebagai akibat embargo sebagian dari negara-negara Arab pengekspor, menyebabkan kemajuan pesat dalam pelaksanaan tujuan-tujuan ekspor yang mulai diformulasikan akhir tahun '60-an. Sasaran mula-mula adalah pangsa yang tidak stabil dalam modal saham dengan basis konsesi perusahaan-perusahaan minyak internasional yang bekerja di negara pengekspor. Sebagai konsep yang berfungsi adalah partisipasi dari 51% saham setelah tahun 1971, artinya kekuasaan memutuskan mengenai pro-

duksi berada di tangan negara peng-eksport. Dalam perusahaan *joint venture* dicari koperasi dengan perusahaan-perusahaan minyak yang memiliki modal dan teknologi serta tetap ada kemungkinan laba untuk modal internasional. Pemerintah-pemerintah yang sosial revolusioner meninggalkan tujuan-tujuan yang biasa ini di tahun-tahun berikutnya dan melaksanakan nasionalisasi menyeluruh (Aljazair tahun 1970, Irak tahun 1972, Libia tahun 1973, serta Venezuela tahun 1975). Dengan demikian pengawasan produksi dan harga minyak berpindah ke tangan negara-negara OPEC yang dalam tahun-tahun berikutnya praktis menentukan harga pasar untuk minyak bumi.

Sejak itu OPEC menjadi model sebuah kartel bahan mentah yang sukses; berkembang menjadi pemuka Dunia Ketiga, tanpa melihat perbedaan besar yang dimiliki oleh masing-masing negara anggota mengenai sistem politiknya dan tujuan politik kemasyarakatannya, tanpa melihat ketegangan berkelanjutan antara mereka mengenai politik minyak bumi yang harus diikuti (politik harga dan politik cadangan minyak). Di awal tahun '80-an kemampuan bersatu anggota OPEC untuk menentukan politik minyak bumi bersama, turun drastis. Alasan untuk itu a.l. perubahan tawaran (penawar baru minyak bumi di pasar dunia: Inggris, Norwegia, Meksiko) dan permintaan (penghematan minyak mentah di negara konsumen dan mencari energi lain serta pengembangannya), serta perbedaan intern antara negara-negara OPEC berpenduduk banyak yang me-

iliki kesulitan neraca pembayaran (misalnya Indonesia, Nigeria, Venezuela) dan berpenduduk sedikit yang memiliki surplus devisa yang tinggi (Saudi Arabia, Uni-Emirat Arab, Kuwait). Kartel bahan mentah yang pernah sangat berhasil sedang menghadapi masa percobaan pecah.

Dampak negatif politik harga pada negara berkembang pengimpor minyak berusaha dikurangi melalui kenaikan harga minyak langsung dalam impor energi dan melalui kenaikan harga tidak langsung dalam impor barang jadi oleh negara-negara OPEC melalui perjanjian kredit bilateral meliputi 2/3 pembayaran netto ke bantuan pembangunan pemerintah mereka, serta dana nasional dan multilateral (Dana Kuwait/1961, Dana Abu-Dhabi/1971, Dana OPEC/1976) untuk pinjaman berbunga ringan, volumenya (tahun 1980: 9,1; tahun 1981: 7,8 miliar US\$) hanya dapat mengimbangi 70% dari kehilangan modal sebagai akibat kenaikan harga dan situasi pasar yang memburuk dari minyak bumi serta masalah neraca pembayaran beberapa negara anggota di tahun '80-an menurun (tahun 1986: 4,5 miliar US\$). Pangsa OPEC pada ODA keseluruhan mengakibatkan perkembangan sebagai berikut. Tahun 1970: 4,7; tahun 1975: 28,9; tahun 1980: 24,3; tahun 1985: 9,7. Negara-negara OPEC dari Arab memberikan 97,5% bantuan pembangunan ke negara OPEC (1980), Saudi Arabia memberikan 44%, jumlah Saudi Arabia dan Kuwait dalam OPEC-ODA adalah 94% (1986). Negara-negara OPEC juga memberikan sumbangan

besar pada pembiayaan lembaga multilateral seperti Bank Dunia dan IMF, tetapi dengan persyaratan komersial.

Alamat: Dr. Karl-Lueger-Ring 10, A-1010 Wina 1, Austria.

Kepustakaan: A. Galli, *Die sozio-ökonomische Entwicklung der OPEC-Staaten - Auswirkungen und Perspektiven des Devisenreichtums*, München 1979; W. Ochel, *Die Industrialisierung der arabischen OPEC-Länder und des Iran - Erdöl und Erdgas im Industrialisierungsprozess*, München 1979; I.F. Shithata/R. Mabro, "The OPEC Aid Record", dlm.: *World Development* 7 (2) 1979, hlm. 161-173; A. Abu-Shokor, *Gibt es eine gemeinsame OPEC-Front? Widersprüche und Gemeinsamkeiten in der Strategiebildung*, Bochum 1981; R. Hanisch, "Die OPEC", dlm.: V. Matthies (ed.), *Süd-Süd-Beziehungen. Zur Kommunikation, Kooperation und Solidarität zwischen Entwicklungsländern*, München d11., 1982, hlm. 151 dst.; F. Mayer, *Petro-Atlas. Erdöl und Erdgas*, cet. ke-3, Braunschweig 1982.

open-door policy → Liberia.

operational evaluation → evaluasi.

Organisasi Bauksit Internasional → IBA.

Organisasi Buruh Internasional → ILO.

Organisasi Energi Amerika Latin → OLADE.

Organisasi Energi Atom Internasional → IAEA.

Organisasi Kesehatan Dunia → WHO.

Organisasi Negara-Negara Amerika → OAS.

Organisasi Negara-Negara Amerika Tengah → ODECA.

Organisasi Negara-Negara Peng-eksport Minyak → OPEC.

Organisasi Non-Pemerintah → LSM/LSPM.

Organisasi Pangan dan Pertanian PBB → FAO.

Organisasi PBB untuk Anak-Anak → UNICEF.

Organisasi PBB untuk Pembangunan Industri → UNIDO.

Organisasi PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan → UNESCO.

Organisasi Pembangunan Internasional → IDA.

Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan → OECD.

Organisasi untuk Pengembangan Sungai Senegal → OMVS.

Organisasi untuk Persatuan Afrika → OAU.

Organisasi untuk Solidaritas Amerika Latin → OLAS.

ORIT → serikat buruh (di Dunia Ketiga).

P

PAC (*Pan Africanist Congress*)

Kongres Pan-Afrika, memisahkan diri tahun 1959 dari ANC yang jauh lebih terkenal dan bersaing dengannya. PAC (seperti juga ANC) dilarang oleh pemerintah Afrika Selatan (1960). Dalam masa pendek eksistensinya, PAC dengan retorika yang radikal mendapat dukungan besar. Menurut ideologinya, Afrika Selatan adalah milik orang kulit hitam; orang kulit putih dianggap hanya sebagai kaum pendatang. Berbeda dengan ANC yang tidak rasis, membuka Afrika untuk semua warna kulit, PAC hanya memiliki anggota berkulit hitam. Karena ada pertikaian sayap internal dan kekurangan dalam hal organisasi, setelah dilarang PAC kehilangan artinya, tetapi kini menjadi pembicaraan kembali karena kegiatan-kegiatan gerilyanya. PAC yang beroperasi dari pengasingan di Tanzania, tahun 1988 memiliki lebih dari 700 pejuang bersenjata.

ajh
padat karya Teknologi atau produksi yang pembuatannya sebagian besar memakai tenaga kerja manusia, kurang memakai mesin. Lawannya: padat modal.

dn
padat modal Teknologi atau produksi yang pembuatannya sebagian

besar memakai mesin, hanya sedikit (dan sering hanya yang mempunyai keahlian khusus) tenaga kerja manusia. Lawannya: padat karya. **dn**
PAIGC → Cabral, Guinea-Bissau, Kepulauan Kapverde.

pakar pembangunan Elemen dari bantuan personal. Berbeda dengan relawan pembangunan, pakar pembangunan merupakan tenaga ahli berkualitas tinggi.

dn
Pakistan Politik dalam negeri Republik Islam Pakistan (MSAC) sejak kemerdekaan tidak stabil, dan Pakistan menjadi strategis karena ada peristiwa-peristiwa di kawasan tersebut (Iran, Afghanistan). Sejak itu, pembangunan sosial dan postulat demokrasi makin terancam dikorbankan demi konfrontasi pemikiran politik luar negeri.

1. Pakistan terletak di bagian barat laut sub-benua Indo-Pakistan dan peralihan ke Asia Barat Laut (dataran tinggi Iran). Dengan luas 796.095 km², Pakistan berpenduduk (1989) 107 juta, pertumbuhan tahunan 1980-1989: 3,2%. Separa dari kawasan negara adalah tanah pegunungan yang tidak subur di sebelah barat, serta gurun dan padang belukar sepanjang perbatasan ke India (Thar), daerah

lainnya hanya dapat dimanfaatkan sebagai padang rumput. Sebagian besar produksi pertanian berlangsung di sisa seper-empat wilayahnya sepanjang Sungai Indus dan anak-anak sungainya di daerah lima arus sungai (Punjab); di sini hidup 3/4 penduduk dan berada di hampir kota-kota besar. Kepadatan penduduk di daerah tersebut lebih tinggi dari rata-rata 135 penduduk/km²; jumlah penduduk perkotaan sekitar 30%. Ibu kota: Islamabad (250.000 penduduk), kota terbesar Karachi (tahun 1981: 5,2 juta penduduk).

2. Tingkat perkembangan Pakistan agak tinggi dibandingkan dengan negara di Asia Selatan lainnya; PNB tahun 1989 berjumlah 370 US\$, distribusi pendapatan sangat tidak seimbang. Menurut perkiraan FAO, 26% penduduk tidak mencapai eksistensi minimum yang ditetapkan, 1.814 kkal/hari pangan (rata-rata tahun 1983-1985: 2.186 kkal); 74% penduduk di atas 10 tahun buta aksara. Hanya 26% penduduk mempunyai akses ke air minum, dan hanya 10% memiliki saluran pembuangan air yang benar. Satu tempat tidur di rumah sakit untuk 1.780 penduduk, 1 dokter untuk 2.910 penduduk (tetapi separo dokter bekerja di luar negeri); harapan hidup 55 tahun).

Pembangunan di Iran dan Afghanistan kembali memperlihatkan arti geopolitik Pakistan: Pakistan memisahkan Uni Soviet (kecuali sebuah jalur sempit Afghanistan) dan Cina dari Lautan Hindia dan berusaha melawan tuntutan wilayah dari tetangganya, Afghanistan (Pashtunistan) dan India (Kashmir). Sebaliknya,

Pakistan mempunyai hubungan baik dengan tetangganya yang lain: dengan Iran, Pakistan memiliki masalah minoritas Belutsha di daerah perbatasan dan juga memiliki sikap konservatif dalam hal agama. Pakistan menganggap Cina yang bermusuhan dengan India sebagai sekutu; Cina membiayai dan membangun sebuah jalur lalu lintas dari Kashmir ke Sinkiang (Karakorum).

3. Politik dan agama sejak dulu saling menentukan di Pakistan: sebelum merdeka Pakistan termasuk India-Inggris, tetapi tidak memiliki politik sendiri atau kesatuan administrasi. Di zaman prakolonial masing-masing subdaerah mandiri atau berada di bawah kerajaan-kerajaan besar di kawasan tersebut, yang terakhir di bawah Kerajaan Moghul (→ India) dan setelah penaklukannya oleh Nadir Shah (1739) berada di bawah Afghanistan (sejak tahun 1747). Negara-negara yang *de facto* memiliki otonomi adalah di Sind, Balushistan, dan Kerajaan Sikh di Punjab, ditaklukkan Inggris dalam tahap akhir ekspansi (1836-1846). Daerah suku-suku di sepanjang perbatasan Afghanistan tidak pernah ditaklukkan benar-benar dan terus mempunyai otonomi, yang sebagian tetap diakui oleh pemerintah Pakistan. Meskipun Inggris menguasai daerah ini dengan alasan strategis, tidak lama kemudian mereka mulai memanfaatkan lembah Indus dengan pembangunan kanal-kanal (1859) dan jalur-jalur kereta api (1860) yang menjadikan Punjab dan Sind pemasok penting bahan mentah pertanian (ka-

pas, gandum, beras) yang tidak diolah di sini.

Kekhawatiran akan dikuasai pemerintahan orang Hindu setelah di seluruh India berlangsung kemerdekaan, muncul tuntutan akan negara Islam sendiri (Resolusi Pakistan tahun 1940), pembatasan teritorialnya mengundang masalah karena di luar Balushistan dan propinsi perbatasan barat laut tidak merupakan daerah yang murni Islam; di seluruh India Utara hidup orang Islam dan Hindu (di Punjab dan Sikh) dengan mayoritas bergantian secara berdampingan. Negara yang pada akhirnya merdeka 14 Agustus 1947 (bersamaan dengan India), terdiri atas dua teritorial terpisah lebih dari 1.500 km oleh teritorial India: di barat terdiri atas Balushistan, propinsi perbatasan barat laut, Sind, dan bagian barat Punjab, sedangkan di timur adalah Bengali bagian timur (→ Bangladesh).

4. Dengan bersandar ke AS setelah dasawarsa pertama konsolidasi politik dan stagnasi ekonomi (integrasi dan ganti rugi kepada pengungsi, pembubaran kerajaan, diskusi UUD), dan pengambilalihan kekuasaan oleh militer (Ayub Khan), dijanjikan sebuah haluan pertumbuhan ekonomi yang dipaksakan, berlandaskan substitusi impor dan diversifikasi ekspor pada produk pengolahan dengan basis pertanian (tekstil katun). Setelah keberhasilan di tahap awal, Pakistan menjadi "model" untuk negara berkembang. Negara industri Barat lalu menghentikan bantuan pembangunannya karena Pakistan berperang dengan India (1965)—sebuah pukulan yang dampaknya terasa ter-

hadap industri Pakistan sampai sekarang. Pemakaian bibit unggul dalam pertanian (gandum) menimbulkan kenaikan pesat produksi (Revolusi Hijau) sehingga Pakistan (Pakistan Barat) selama tahun '60-an dapat memperoleh pertumbuhan ekonomi sampai 8%. Ketidakpuasan terhadap pembangunan sosial, pemunculan administrasi militer, dan penindasan politik, menyebabkan penggulingan Ayub Khan (1969) oleh militer di bawah Jenderal Yahya Khan. Dengan anggapan militer terlalu dibebani dan dirusak oleh pemerintah, Yahya Khan melakukan pemilihan umum dan bebas: di Pakistan Barat dimenangkan oleh Zulfikar Ali Bhutto dan *People's Party* dengan sebuah program "sosialisme Islam" dan di Pakistan Timur dimenangkan oleh Syekh Mujibur Rahman dan *Awami Liga*-nya, menginginkan otonomi Pakistan Timur. Karena kemenangan Mujibur Rahman di Pakistan Timur hampir total dan 55% bagian penduduk di sana, untuk pertama kalinya merupakan mayoritas parlemen, pemerintahan jatuh ke Pakistan Timur. Penolakan Bhutto dan militer untuk menyerahkan pemerintahan ke Mujib, menimbulkan perang saudara. Akhirnya, Pakistan Timur memisahkan diri lalu merdeka dengan bantuan India (Bangladesh). Sejak itu, Pakistan hanya terdiri atas bekas bagian barat dari negara itu.

Perang saudara secara ekonomi dan politik menimbulkan isolasi internasional terhadap Pakistan yang berhasil diselesaikan oleh Bhutto secara lihai dengan bersandar ke Cina, Iran, dan negara-negara Arab, pendekatan

ke India, pengakuan kemerdekaan Bangladesh, dan menerima bantuan ekonomi Rusia (pabrik baja Karachi). Namun, politik nasionalisasinya (industri besar, perbankan, asuransi) menyebabkan kelumpuhan ekonomi, program sosial yang dicanangkan (pendidikan sekolah dasar umum, keluarga berencana, reformasi pertanian) tidak dapat mengatasi kesulitan-kesulitan di masa awal. Lalu, bantuan ekonomi dari negara industri Barat kembali diberikan dan sejak tahun 1973 bantuan dari negara-negara Arab serta pengiriman devisa dari buruh tamu Pakistan di negara-negara Arab (terutama di Saudi Arabia, Kuwait, dan Uni Emirat Arab) memungkinkan Pakistan mengimpor bahan untuk pengadaan yang melampaui ekspor. Sementara pertengahan tahun '70-an ekonomi tampak membaik, muncul kesulitan-kesulitan politik. Bhutto bertopang pada popularitasnya yang besar, terutama penduduk pedesaan, buruh industri sebagian birokrat dan intelektual. Ekonomi penganakemasan orang-orang sekeliling partai, pemata-mataan oleh dinas rahasia dan penangkapan oleh polisi-bersamaan dengan kenaikan harga dan kekecewaan umum terhadap kegagalan program sosial-politik—menumbuhkan ketidakpuasan dan menjadi penggabungan oposisi yang memang kalah dalam pemilihan Maret 1977 (semula dibuat untuk menguatkan posisi Bhutto), tetapi tuduhan manipulasi pemilihan telah memobilisasi perlawanan yang sedemikian besarnya sehingga terjadi kerusuhan mirip perang saudara dan—5 Juli 1977—terjadi sebuah kudeta militer

dipimpin Jenderal Zia-ul-Haq, ditunjang oleh imam Islam dan *Jamaat-i-Islam* yang ortodoks. Ia memulai politik islamisasi, termasuk pemberlakuan hukum Islam dan sebuah tata ekonomi Islam (pajak pendapatan dan kekayaan religius, penghapusan bunga).

Karena kekuasaan yang tidak demokratis, politik yang islamistis (pembakaran kedutaan besar AS tahun 1979) dan penolakan Pakistan untuk menandatangani perjanjian mencegah persenjataan atom dan memberikan pengawasan internasional untuk mengawasi instalasi atomnya, bantuan ekonomi AS ke Pakistan dihentikan tahun 1979. Sikap AS ini berubah sama sekali setelah terjadi invasi Uni Soviet ke Afghanistan Desember tahun yang sama: Pakistan menjadi "negara garis depan" dan menjadi basis untuk *Mujahiddin* Afghanistan, yang mengorganisir perang saudara di Afghanistan dari Pakistan. Dengan menikmati bantuan militer dan pembangunan dari negara-negara Barat, negara-negara Islam dan Cina, devisa ditransfer oleh buruh tamu di luar Pakistan (sampai 3 miliar US\$) dan dari sektor pertanian karena iklim yang menguntungkan, lebih dari satu dasawarsa Pakistan mencapai pertumbuhan tahunan dan pendapatan nasional lebih dari 6%. Meskipun banyak suara liberalisasi pemerintah, ekonomi tetap terbatas, reswanisasi perusahaan-perusahaan negara berlangsung lambat; negara-negara luar bereaksi dengan menunggu "islamisasi" ekonomi. Setelah percobaan *shoora* (parlemen) dilakukan pemilihan dengan mengecualikan politikus

oposisi yang penting. Zia melalui referendum tahun 1984 menguatkan haluannya dan mengendalikan Pakistan setelah perubahan UUD tahun 1985 menjadi demokrasi terpimpin. Penandatanganan perjanjian Jenewa untuk penarikan kembali tentara Rusia dari Afghanistan April 1988, merupakan akhir dari kekuasaannya setelah terjadi ledakan gudang amunisi tentara untuk *Mujahiddin* di tengah-tengah ibu kota (ratusan mati), Zia meninggal secara misterius (Juli 1988) demikian pula terjadi dengan pemimpin militer dan duta besar AS (Agustus 1988). Sebelumnya, ia membubarkan parlemen, memecat pemerintah, dan menetapkan pemilihan; penggantinya presiden sipil Ishaq Khan, mengizinkan adanya partai-partai. Dari pemilihan bulan November, PPP di bawah Benazir Bhutto, putri Zulfikar Bhutto, keluar sebagai pemenang. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern seorang perempuan menjadi kepala pemerintahan di sebuah negara Islam. Setelah menang pemilihan Benazir Bhutto menghadapi militer yang membuatnya tidak mungkin melanjutkan politik ayahnya. Awal Agustus 1990 Benazir Bhutto dipecat dari jabatannya sebagai perdana menteri oleh presiden Ishaq Khan dengan tuduhan melakukan korupsi dan nepotisme. Usaha Benazir untuk merebut kembali posisinya dalam pemilihan tanggal 24 Oktober 1990 menemui kegagalan. Dalam pemilihan, yang dituduh oleh pihak Benazir sebagai penuh manipulasi, Nawaz Sharif menang. Ia seorang pemimpin Aliansi Islam Demo-

krasi dan mempunyai hubungan sangat dekat dengan Zia.

Politik dalam negeri Pakistan di tahun '80-an makin rumit: tuntutan otonomi regional di Sind dan Baluchistan ditangani secara keras; semasa penarikan mundur tentara Uni Soviet (15 Februari 1989) tidak hanya 3 juta pengungsi Afghanistan di Pakistan, melainkan juga basis-basis militan *Mujahiddin*; Pakistan berkembang menjadi pusat perdagangan persenjataan internasional dan perdagangan obat bius.

5. Seperti sebelumnya, pertanian Pakistan mendominasi (28% PNB). Potensi produksi yang ada tidak dimanfaatkan secara penuh. Hal ini memerlukan penggunaan bibit yang diperbaiki, pupuk, pemberantas hama tanaman, informasi, dan konsultasi yang lebih baik, perluasan jalur-jalur pemasaran serta kredit pertanian. Sebuah perluasan lahan hanya mungkin di tanah yang kurang membawa hasil; ini membuat penguatan rekultivasi lahan menjadi tidak subur karena pengairan yang tidak mencukupi atau tidak benar (penggaraman, basah, erosi), serta tindakan-tindakan untuk mencegah kerugian lahan pertanian selanjutnya. Hal penting adalah perluasan sistem pengairan meliputi seluruh lembah Sungai Indus dan anak-anak sungainya, termasuk yang terbesar di dunia. Setelah di dasawarsa terakhir dibangun instalasi pengairan (Tarbela, Mangla) dan tanah dilalui oleh kanal-kanal sepanjang ratusan kilometer, masalah di masa depan terutama adalah perlindungan terhadap bahaya banjir, saluran-saluran pembagian lanjut dan

pompa (untuk pemanfaatan air tanah), serta pengaturan baru hukum air. Tidak kurang pentingnya adalah langkah-langkah di bidang kelembagaan, terutama melalui *landreform* baru karena yang telah dilakukan sampai sekarang (1959, 1972, 1977) mudah dilangkahi, terutama di Sind.

Sangat kritis adalah masalah buruh tani tanpa tanah dan pelarian dari pedesaan sehingga menyebabkan penumpukan permasalahan pengangguran dan kesempatan kerja kurang di perkotaan. Pada tingkat perkembangan yang rendah dari industri Pakistan kemampuannya menyerap jumlah angkatan kerja makin kecil. Seperti sebelumnya, titik berat terletak pada industri tekstil, sedangkan pembangunan sebuah industri bahan dasar sendiri, hanya berlangsung lambat.

Dalam jangka panjang Pakistan dapat memanfaatkan potensi tenaga air yang kini masih sedikit dan cadangan gas buminya yang besar, untuk pengadaan energi dan tambang tembaga yang besar (rencana eksploitasi di Chagai dengan bantuan Cina) dan krom untuk pengolahan; cadangan batu bara dan bijih besi sebaliknya berkualitas buruk dan/atau terletak di daerah yang belum dibuka.

Masalah regional sangat mendasak karena di Balushistan ada gerakan separatis kuat yang terlihat dalam rangka tuntutan daerah oleh Afghanistan dan keinginan Uni Soviet mempunyai jalan ke Lautan Hindia. Dengan ketegangan regional yang makin tumbuh, juga di Sind dan propinsi barat laut perlu diperhitungkan karena daerah Punjabi yang hidup hampir 60% penduduk, sudah terlalu

padat. Berlangsungnya ketegangan politik dalam dan luar negeri menyebabkan peran militer dalam kehidupan ekonomi dan politik akan terus bertahan, meskipun pemerintahan militer diktator sudah berakhir: di beberapa tahun anggaran militer menelan lebih dari separo penerimaan pemerintah pusat, karenanya langkah-langkah pembangunan hanya dapat dilakukan dengan utang di dalam dan luar negeri (tahun 1986: 11,8 miliar US\$). Ketergantungan Pakistan dari luar negeri dalam tahun-tahun terakhir terus tumbuh, pembiayaan kelebihan impor tidaklah mungkin tanpa ada transfer devisa dari buruh Pakistan di luar negeri. Ketegangan regional menumpuk dalam tekanan sosial dan politik Pakistan yang akan pecah jika sarana imigrasi ke negara-negara Timur Tengah berhenti karena rasa khawatir negara-negara tersebut akan membanjirinya orang asing atau karena resesi internasional.

Kepustakaan: M.U. Malik/M. Schimmel, *Pakistan. Das Land und seine Menschen*, Tübingen/Basel 1976; W.-P. Zingel, *Die Problematik regionaler Entwicklungsunterschiede in Entwicklungsländern. Eine theoretische und empirische Analyse Pakistans*, Wiesbaden 1979; *ibid*, "Pakistan", *dlm.: HDW II*, 7, Hamburg 1983, hlm. 195 *dst.*; *ibid*/S. Zingel-Ave Lallement (ed.), *Pakistan in its fourth Decade*, Hamburg 1983; S.J. Malik, *Islamisierung in Pakistan 1977-1984*, Stuttgart 1989. **wpz**

Pakta Andes Dalam perjanjian Cartagena (26 Mei 1969) bergabung 5 negara anggota ALALC, yaitu Bolivia, Chile, Kolombia, Ekuador, dan Peru dalam Pakta Andes. Venezuela (ikut serta dalam praperundingan) masuk 1 Januari 1974, sedangkan Chile keluar dari Pakta 30 Juni 1976.

Tujuan: pasar bersama melalui penghapusan batas perdagangan antarnegara, tarif bea luar negeri bersama, program industrialisasi bersama, harmonisasi politik ekonomi dan sosial; dengan demikian mengatasi integrasi ALALC yang terbatas dan penggunaan prinsip-prinsip CEPAL.

Tujuan dan keputusan secara rinci: a. penghapusan bea intern sampai tahun 1980, kesatuan bea luar negeri sampai tahun 1975; b. program sektoral untuk pembangunan industri (PSDI): penyesuaian rencana industrialisasi; kontingentasi nasional; c. keputusan 220, tahun 1987 (pengganti keputusan 24 dari tahun 1970): perbedaan antara perusahaan nasional, campuran, dan asing, yaitu yang pertama di atas 80%, kedua antara 51% dan 80% harus merupakan modal anggota Andes (seperti 24). Perusahaan asing di Kolombia, Peru, dan Venezuela dalam waktu 10 tahun harus mengalihkan sampai 51% pangsa-nya ke perusahaan nasional di Bolivia dan Ekuador dalam waktu 37 tahun; bidang-bidang strategis tidak diberikan pada modal asing; penetapan aturan dasar untuk impor teknologi (misalnya tidak ada jalinan antara kewajiban terhadap pemasok).

Organ: a. organ tertinggi adalah komisi, terdiri atas masing-masing seorang wakil negara anggota; keputusan dilakukan dengan dua pertiga mayoritas, pada program dengan pengembangan industri dengan suara bulat; b. junta (gremium segitiga, disamakan dengan komisi, mengolah konsep untuk komisi); c. dengan *Protocolo Modificatorio* dari Mei

1987 Parlemen Andine dan Mahkamah Andine (yang sudah ada sejak lama) juga diakui sebagai organ atas; di tingkat konsultasi bekerja komite ekonomi dan sosial (pengusaha dan serikat buruh); Dana Moneter Andine bertopang pada neraca pembayaran dan mengkoordinasi politik moneter. Di tahun '70-an disepakati perjanjian tambahan untuk bidang kebudayaan, kesehatan, dan untuk berbagai masalah hukum asuransi.

Hasil: pertumbuhan dalam perdagangan subregional (pangsa pada ekspor keseluruhan tahun 1981: 4%) sampai kini merupakan hasil terbaik dari usaha-usaha integrasi, tetapi tidak memuaskan. Program industri bersama (metal, petrokimia, otomobil) tetap tanpa hasil berarti. Target untuk liberalisasi perdagangan di antara Pakta Andes dan untuk pembangunan sebuah bea luar negeri, tidak tercapai.

Permasalahan: sedikitnya kesediaan menanggung risiko dan kekuatan keuangan perusahaan nasional; ketergantungan dari teknologi asing; persaingan produk ketiga yang murah; sengketa perbatasan Ekuador/Peru (1981); penarikan diri sementara Bolivia; makin tumbuh kecenderungan melakukan proteksi dan kelemahan lembaga. Krisis ekonomi di tahun '80-an sangat mengena semua gerak integrasi regional dan subregional. *Protocolo Modificatorio del Acuerdo de Cartagena* merupakan sebuah usaha untuk mengaktifkan kembali proses integrasi melalui perubahan-perubahan institusional.

Kepustakaan: W. Hummer, "Neueste Entwicklung im fortschreitenden Integrationsprozess in Lateinamerika", dlm.: *Jahrbuch des Öffentli-*

chen Rechts 29, 1980, hlm. 527 dst.; F. López-Casero/P. Waldmann, "Nationaler Entwicklungsstand und regionale Integration. Der Andenpakt aus der Perspektive der Mitgliedsstaaten", dim.: M. Mols (ed.), *Integration und Kooperation in Lateinamerika*, Paderborn 1981, hlm. 175 dst.; Integración Latinoamericana (Buenos Aires), no. 128 dan 134, 1987.

dn/ra

Pakta Asia Tenggara → SEATO.

Pakta Bagdad → CENTO.

Pakta Rlo → OAS.

Palang Merah Organisasi bantuan sukarela terbesar di dunia (kedudukan: Jenewa) yang didirikan tahun 1863 atas dorongan seorang penulis Swiss, Henry Dunant, memberi bantuan ke negara berkembang melalui Liga Usaha Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, Komite Palang Merah Internasional, dan Palang Merah Nasional, terutama bantuan untuk bencana alam dan bantuan pangan. Dalam pengertian bantuan pembangunan jangka panjang melalui pembangunan Palang Merah dan Setengah Bulan Merah di negara-negara Dunia Ketiga, memperbaiki infrastruktur kesehatan dan memungkinkan pemenuhan kebutuhan dasar. Selain itu, Palang Merah berusaha membangun sarana perlindungan dari bencana alam melalui kerja proyek di seluruh dunia, agar gerakan Palang Merah dalam memberikan bantuan bencana alam menjadi lebih berhasil. Juga di bidang usaha rehabilitasi setelah bencana alam, berlangsung kerja proyek.

ah

PANA → OAU.

panafrikanisme → Kenyatta, Nkrumah, gerakan Pan.

PANAFTEL → OAU.

Panama Sejarah Republik Panama tidak terlepas dengan Terusan Panama (dan AS). Seperti sebelumnya,

AS dengan kepentingan militer, ekonomi, dan politik menjalankan hukum secara *de facto* untuk menentukan perkembangan negara kecil ini: akhir tahun '80-an AS berusaha menggulingkan penguasa represif di sana, Jenderal Noriega.

1. Luas Panama keseluruhan adalah 75.650 km² (dengan zone Terusan Panama) berada di bagian selatan bumi dan di jalur tersempit tanah genting Amerika Tengah. Terusan itu membagi dua negara menjadi bagian timur dan barat; sejumlah rangkaian pegunungan memisahkan daerah utara Karibia yang selalu lembab (terutama hutan belantara) dan Pasifik di sebelah selatan dengan iklim tropis berganti (terutama lahan pertanian). Hampir separo bagian negara itu ditutupi hutan yang sebagian belum dijajah (daerah orang Indian) dan belum dimanfaatkan untuk kehutanan. Sumber daya Panama terpenting adalah letaknya—sebagai jalan transit antara dua lautan, Panama berada di tengah—terutama digunakan untuk Terusan Panama. Namun, hasilnya sampai sekarang tidak dinikmati oleh negara itu sendiri. Panama merupakan tempat bongkar-muat (zone perdagangan bebas, *colon*). Panama di bawah "bendera murah" merupakan armada terbesar di dunia. Letak Panama mendukung terciptanya sebuah pusat keuangan internasional di tahun '70-an. Selain itu, tanahnya merupakan potensi pembangunan alami. Tanaman utama dan komoditas ekspor adalah pisang, tebu, dan kopi. Untuk pasar dalam negeri ditanam a.l. padi, jagung, buncis, dan tembakau. Selanjutnya, peternakan dan penangkapan

ikan (ekspor kerang, udang dsb.), makin penting. Panama memiliki banyak kekayaan tambang (tembaga, bauksit, antimon, seng, kaolin, wolfram, timah). Namun, hanya penambangan tembaga yang direncanakan.

2. Penduduk Panama tahun 1989 diperkirakan berjumlah 2 juta orang; mereka hidup terpusat di sentra ekonomi di sekitar zone Terusan. Di zone Terusan hidup sekitar 31.000 penduduk AS, di antaranya sekitar 7.500 adalah personal militer. Tingkat urbanisasi tahun 1989 53%, ibu kota Panama City berpenduduk sekitar 550.000 penduduk. Bahasa nasional resmi adalah Spanyol, bahasa resmi di Terusan adalah Inggris, yang juga dipakai sebagai bahasa pergaulan. Kurang lebih 93% penduduk beragama Katolik. Akibat diisolasi, orang Indian dapat mempertahankan bahasa (*chibcha*), kepercayaan, dan adat istiadat mereka sendiri.

3. Panama ditemukan oleh Columbus dan ditaklukkan oleh Spanyol. Letak Panama yang strategis penting (sudah sejak masa kolonial tanah genting Panama digunakan sebagai transit perdagangan), mewarnai sejarah selanjutnya dan menguntungkan kemunculan sebuah oligarki perdagangan yang menjadi kelas dominan. Tahun 1821 Panama sebagai propinsi terintegrasi ke negara bebas Kolombia, dapat melepaskan diri tahun 1903 dengan pengaruh AS dan kemudian merdeka. Pemisahan Panama dari Kolombia disebabkan adanya kepentingan AS dan perdagangan Spanyol pada pembuatan sebuah terusan antara Lautan Atlantik dan Pasifik. Perjanjian Terusan tahun 1903

menjamin AS hak penggunaan dan kedaulatan di atas Terusan untuk waktu tidak terbatas beserta 10 mil di sepanjang kiri dan kanan zone Terusan. Untuk mempertahankan Terusan, AS membangun pangkalan-pangkalan militer di zone Terusan. Makin banyaknya kritik dari Spanyol dan publik internasional menyebabkan tahun 1936 dibuat sebuah revisi perjanjian (penarikan hak intervensi AS, penarikan ongkos sewa), tahun 1960 menjadi pengakuan nominal kedaulatan Panama atas zone Terusan. Tahun 1963 sebagai akibat pertikaian mengenai bendera, terjadi pemutusan hubungan diplomatik antara AS dan Panama, dan tahun 1979 menyebabkan ratifikasi sebuah perjanjian baru yang merencanakan penyerahan hak kedaulatan atas Terusan dan zone Terusan ke Panama sampai tahun 2000. Selanjutnya, perjanjian itu berisi: a. jaminan kenetralan Terusan; b. hak AS untuk menempatkan Terusan di bawah pengawasan militer AS jika kenetralannya terancam; c. penyerahan langsung 55% zone Terusan ke Panama; d. pengurusan terusan dilakukan oleh sebuah komisi AS-Panama yang diketuai oleh komandan militer yang ada di zone Terusan; e. pengaturan baru penerimaan terusan untuk Panama. Butir b dan d merupakan tema pertikaian antara AS dan Panama karena teks perjanjian yang semula dibatasi oleh kongres AS ditambah keinginan-keinginan lain pada saat ratifikasi. tahun 1982 hak kedaulatan secara hukum diserahkan kepada Panama.

4. Tahun 1968 Jenderal Omar Torrijos berhasil mengambil alih ke-

kuasaan melalui kudeta tidak berdarah dan membubarkan demokrasi presidensial, serta menstabilkan situasi melalui aliansi antara militer dengan bagian-bagian buruh, petani, mahasiswa, dan pengusaha. Dengan karisma pribadi, retorika anti-imperialisme dan nasionalisme, keberhasilan politik dalam negeri dalam masalah terusan serta reformasi politik, sosial, dan ekonomi, Torrijos dapat mengukuhkan dirinya di tengah-tengah penduduk; misalnya reformasi pertanian, menunjang metode dan produk tanaman baru, hukum kerja yang baru, reformasi sekolah, dan di bidang politik adalah UUD tahun 1972 yang memang di satu pihak terlembaga sebuah pemusatan kekuasaan pada eksekutif (→ rezim otoriter), tetapi di lain pihak juga merupakan organ kekuasaan rakyat dan berbagai bentuk dari partisipasi penduduk (terutama penduduk pedesaan) pada penyiapan keputusan-keputusan politik (*poder popular*). Garda Nasional di bawah panglima angkatan bersenjata Torrijos berfungsi sebagai penjamin *Revolucion Panamena*. Akhir tahun 1970 Torrijos melakukan politik pembukaan diri (kembali politikus di pengasingan, mengizinkan kembali partai-partai dan pemilihan sebagian), setelah kematiannya tahun 1981 (kemungkinan karena serangan teror), menjadi macet. Presiden sipil sejak tahun 1978 (A. Royo, R. de la Espriella, N. Ardito Barletta, E. Delvalle, M. Solis) "melayani militer sebagai hiasan demokrasi", sebagai "bumper" menghadapi penduduk jika dilakukan langkah-langkah yang tidak populer, sebagai mitra perundingan

untuk kredit internasional dan "demokrasi etalase terhadap AS, Eropa, dan negara-negara Amerika Latin" (Minker, 1988). Terutama setelah tahun 1983 melalui UU kekuasaan terpusat pada militer dengan satu-satunya jenderal, yaitu Manuel Antonio Noriega yang diangkat tahun 1983. Tahun 1984 terjadi manipulasi dalam pemilihan presiden umum yang menguntungkan anak lindungan Noriega, Barletta. Aliansi pendukung rezim Torrijos makin hancur. Konflik antara serikat buruh yang kuat dan terorganisir serta kepentingan nasional dan multinasional pada perluasan sektor perdagangan dan keuangan, antara militer dan oposisi sipil (yang berhubungan baik dengan AS) serta bisnis senjata dan obat bius yang terjalin antara Noriega dan AS (terutama akibat posisi yang berbeda-beda terhadap Amerika Tengah, terutama Nikaragua), pecah di pertengahan tahun '80-an dan terus memuncak pesat: tahun 1987/1988 AS (didukung oleh oposisi intern) berhasil memaksa Jenderal Noriega mundur melalui instrumen politik luar negeri yang meluas tetapi kurang terkoordinasi dari tuntutan resmi melalui kampanye pers, proses pengadilan, permintaan ekstradiksi, pencoretan uang bantuan sampai menguatkan tentara di zone Terusan, ancaman intervensi militer dan sanksi ekonomi yang berat. Namun, Noriega tetap dapat mempertahankan kekuasaan, setelah ia mengambil alih kekuasaan Presiden Delvalle 25 Februari 1988; rapat nasional di hari berikutnya memecat Delvalle. Terutama sekali loyalitas tentara menjamin Noriega

kelangsungan rezim selama masa pemerintahan Reagan dan pemilihan presiden Mei 1989, untuk pertama kalinya oposisi menyatukan mayoritas penduduk untuk melawan rezim. Noriega membatalkan pemilihan dan menteror oposisi. Tanggal 20 Desember 1990 pemerintah AS melakukan invasi ke Panama dengan 26.000 tentara, alasannya menangkap Noriega untuk dihadapkan ke pengadilan AS dengan tuduhan berkomplot mengirim obat bius ke AS. Guillermo Endara kemudian menjadi presiden Panama.

5. Tanda-tanda ekonomi Panama adalah sektor tersier yang berkembang dengan didorong oleh pembangunan sebuah sentra perdagangan, keuangan, dan jasa internasional sejak awal tahun '70-an. Perkembangan ekspansif pusat keuangan dan perdagangan disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu letak geografi Panama, Terusan dan infrastruktur yang meluas, UU perbankan dan keuangan yang sangat liberal, stabilitas politik di bawah Torrijos, adanya tentara AS terus-menerus di zone Terusan, serta kenyataan bahwa mata uang Panama adalah US\$; mata uang Panama, *Balboa*, dianggap sama sekali tidak konvertibel, hanya sebagai logam simbolis. Pertanian (1984) memberikan kontribusi hanya 9% ke PDB (tahun 1960: sekitar 23%), mempekerjakan sekitar 1/4 angkatan kerja (tahun 1972 sebagai hasil reformasi pertanian: 38,5%), dan merupakan separo dari semua ekspor. Sektor industri (tahun 1984: 18,8% PDB) baru berkembang di tahun '50-an dengan titik berat industri pangan dan alkohol

serta tembakau (pasar dalam negeri). Kilang minyak bumi negara di Colon yang mengolah minyak dari Venesuela, merupakan usaha industri Panama terpenting yang berorientasi ekspor. Awal tahun '80-an ekonomi Panama mengalami stagnasi, a.l. akibat krisis ekonomi internasional. Tahun 1987/1988 konflik-konflik politik menajamkan secara pesat masalah ekonomi (utang luar negeri yang tinggi, defisit anggaran yang meningkat, dsb.), terutama dalam bentuk pelarian modal dan sanksi ekonomi AS. Dengan demikian pemerintah Reagan menghentikan bantuan militer dan ekonomi, membekukan kekayaan Panama di bank-bank AS, dan melaksanakan kuota gula, memasukkan iuran Terusan Panama ke rekening yang tertutup, dan melarang (Maret 1988) perusahaan AS dan pribadi melakukan pembayaran ke negara Panama. Akibatnya, a.l. kebangkrutan banyak perusahaan industri Panama, kemunduran perdagangan, dan makin sedikitnya US\$ di Panama sehingga menyulitkan pengadaan gaji pegawai negeri dan pembayaran uang pensiun.

6. Tingkat upah di Panama berbeda menurut daerah dan sektor, di zone Terusan yang tertinggi, tetapi tetap berbeda menurut kewarganegaraannya. Panama mengembangkan UU kerja (upah minimal, jaminan tempat kerja setelah empat tahun bekerja, gaji bulan ke-13) yang kemudian dibatasi. Di Panama berlaku wajib sekolah untuk anak umur 7-15 tahun, sekolah gratis. Sistem kesehatan sangat diperluas sejak tahun 1968. Pendidikan dan indikator kesehatan

termasuk baik di Amerika Latin: harapan hidup (1989): 73 tahun; kematian anak tahun 1960: 56,5 per seribu, tahun 1986: 24 per seribu; tingkat buta aksara tahun 1989 sekitar 12%. Ada kesenjangan desa-kota yang besar.

Kepustakaan: A. Schubert, *Panama: Geschichte eines Landes und eines Kanals*, Berlin 1978; St. C. Ropp, *From Guarded Nation to National Guard*, New York 1982; A. Ebbecke-Nohlen/D. Nohlen/E. Koch, "Panama", dlm.: *HDW II*, 3, Hamburg 1982, hlm. 176 dst.; M. Minker, "Panama und die USA: Krise um einen General?", dlm.: *Jahrbuch Dritte Welt* 1989, München 1988, hlm. 207 dst.; S.C. Ropp, "Panama's Defiant Noriega", dlm.: *Current History* 87 (1988), no. 533, hlm. 417 dst.

ka/mik
pangan Tahun 1974 *Konferensi Pangan Sedunia mengemukakan keinginannya untuk menyinkronkan kelaparan dalam waktu satu dasawarsa. Dasawarsa tersebut telah berlalu, dan negara berkembang tetap menghadapi masalah struktural kelaparan dan *kurang makan yang berkaitan langsung dengan situasi kesehatan (terutama penyakit infeksi biasa yang mewabah) di negara berkembang. Pengertian kelaparan adalah makan yang secara kuantitatif kurang kalori dan protein, sedangkan kurang makan adalah kekurangan spesifik akan satu atau beberapa zat makanan, vitamin, dan mineral. Statistik mengenai luasnya masalah ini (a.l. dari *FAO, *World Bank, *WFC) berbeda satu dari lainnya; penyimpulan secara empiris sulit, lagi pula pemerintah-pemerintah di negara berkembang bermain politik dengan daftar kelaparan. Selanjutnya, kurang ada penentuan yang tepat mengenai kebutuhan minimal manusia akan zat-zat makanan. Namun yang pasti, ratusan juta ma-

nusia di negara berkembang menderita kelaparan kronis—jumlah mereka terus meningkat.

Masalah pangan berakar dalam berbagai faktor yang diukur berbeda-beda secara nasional dan regional. Sebuah analisis perlu memisahkan tiga dimensi masalah tersebut secara tajam: kebutuhan akan bahan makanan, produksi bahan makanan berikut pembagiannya, dan struktur permintaan akan bahan makanan.

1. Kebutuhan akan bahan makanan terutama sekali bergantung pada pertumbuhan penduduk. Sebagian besar negara berkembang memperlihatkan tingginya angka kelahiran dan menurunnya kematian bayi dan anak-anak di tahun '60-an dan '70-an; perkembangan ini tetap berlanjut, tetapi tidak terjadi peralihan demografis (→ penduduk). Akibatnya, kenaikan tajam kebutuhan akan bahan makanan.

2. Sementara produksi bahan makanan di dunia naik, berlawanan dengan banyak ramalan di tahun '70-an (misalnya dari studi-studi *Kelompok Roma, *Global 2000), hampir semua negara berkembang (kecuali India) jika diukur dari kebutuhannya, memproduksi bahan makanan terlalu sedikit. Tingkat produksi yang rendah disebabkan oleh sumber daya alamnya (iklim, tanah, dsb.); potensi produksi negara berkembang belum dipakai sepenuhnya: lahan untuk produksi bahan makanan dasar (gandum, umbi-umbian) dapat diperluas secara terbatas, dan hasil panen lahan yang ditanami (meskipun dengan memperhatikan aspek ekologi dan sosial-kultural) meningkat pesat. Paket-paket

usaha untuk itu a.l. mengandung perbaikan penyiapan tanah dan pupuk, penggunaan bibit unggul (dan resisten), perlindungan tanaman, serta perbaikan penyimpanan hasil panen. Penghambat suatu peningkatan produksi lebih banyak ditemukan pada situasi sosial, ekonomi, dan politik; penanaman dan peternakan barang ekspor (teh, kopi, kapas, tembakau, daging) oleh tuan tanah kaya bersaing di banyak daerah dengan penanaman bahan makanan dasar yang dilakukan oleh petani kecil. Dalam jangka panjang, pemerintah di negara berkembang (sering di bawah tekanan masalah neraca pembayaran dan beban utang) lebih memprioritaskan tanaman ekspor sebagai satu-satunya sumber devisa terbanyak sehingga mengabaikan sektor bahan pangan dasar. Di banyak tempat, suatu politik harga negara yang mempertahankan harga bahan makanan dasar agar tetap rendah secara politis untuk konsumen perkotaan, serta beban utang yang tinggi dan situasi hubungan pemilikan yang ada (nama pemilikan tanah yang tidak pasti, perjanjian sistem garapan, lahan penanaman yang sempit), tidak merangsang petani kecil untuk berproduksi melampaui kebutuhannya sendiri atau malah menginvestasi ke penelitian pertanian modern (dan sesuai dengan ekologi). Selain meningkatkan produksi sendiri bahan makanan di negara berkembang, perlu diperbaiki infrastruktur (pedesaan) di negara berkembang sebab kelaparan terutama juga adalah masalah distribusi.

3. Ukuran pokok permintaan adalah tingkat daya beli dan distribusi

daya beli di antara penduduk. Sebuah analisis struktur permintaan memperlihatkan inti masalah pangan adalah miskin. Secara umum daya beli di negara berkembang terlalu rendah dan sangat ekstrem tidak dibagi rata. Sebagian besar manusia yang tidak mendapatkan makanan secara cukup, tidak memiliki tanah untuk menanam bahan makanan dan tidak memiliki daya beli untuk mendapatkan bahan pangan. Dengan demikian masalah kelaparan berkaitan langsung dengan hubungan pemilikan, serta tingginya angka pengangguran dan kesempatan kerja kurang di negara berkembang.

Tidak ada resep paten untuk jalan pemecahan masalah pangan. Namun, jelas bahwa strategi jalan keluar hanya akan membawa hasil jika memperhatikan situasi spesifik di masing-masing negara dan berdampak pada pembangunannya secara menyeluruh. Hal yang tidak dapat diabaikan di antaranya adalah politik distribusi pendapatan yang menguntungkan lapisan penduduk miskin dan reformasi pertanian. Bantuan pangan saja tidak menyingkirkan sebab-sebab masalahnya.

Kepustakaan: J. Collins/F. Lappé, *Vom Mythos des Hungers*, Frankfurt 1980; E.C. Zurek/A. Rahmzadeh, *Perspektiven der Welternährung*, Köln 1984; F. Krusen, *Ernährung 2000*, München 1986; H. Schuhmann, *Futtermittel und Welthunger*, Reinbek 1986; K.G. Wold, *Der internationale Agrarhandel und die Bekämpfung des Hungers*, Stuttgart 1986; P. von Blanckenburg, *Welternährung*, München 1986; O. Matzke, "Ernährung", dlm.: D. Nohlen/P. Waldmann (ed.), *Dritte Welt*, München 1987; F. Nuscheler, *Lern- und Arbeitsbuch Entwicklungspolitik*, Bonn 1987; W. Hein, "Das Welternährungsproblem zwischen Überproduktion und Hungersnöten", dlm.: *Nord-Süd aktuell* 2/1988. mik

Pantai Gading *Model pembangunan Pantai Gading (Cote d'Ivoire) yang secara sadar membuka diri ke pasar dunia dan melakukan pembangunan ekonomi dengan bantuan modal asing yang dalam jangka panjang menyebabkan kesamaan hak dalam sistem internasional, untuk para pengkritik maupun penunjang pernah lama menjadi contoh untuk sebuah obsesi liberal-kapitalistis sebuah negara berkembang. Dengan jatuhnya harga pasar dunia untuk kakao dan kopi, negara itu di tahun '80-an terjebak dalam sebuah krisis ekonomi yang berat.

1. Dengan luas 322.466 km² dan berpenduduk sekitar 12 juta (pertumbuhan tahunan 4,1%), Pantai Gading yang merdeka sejak tahun 1960 termasuk negara ukuran menengah di Afrika. Secara iklim dan zone vegetasi terdiri atas daerah selatan yang berhutan lebat dengan hutan hujan dan hutan lembab, serta daerah utara yang terletak di zone Sudan berupa sabana lembab dan kering. Etnis dan bahasa Pantai Gading terbagi lebih dari 60 kelompok, di satu pihak-dikarenakan penarikan batas daerah oleh penguasa kolonial—menyebabkan letak sentranya sebagian ada di luar negara. Kekuasaan politik dan ekonomi dimiliki suku Baule (23% penduduk) di daerah selatan dan tenggara yang merupakan produsen kakao dan kopi terbesar. Ketegangan laten disebabkan jumlah orang asing yang tinggi (tahun 1986: 2,84 juta, pertumbuhan tahunan 6,3%), 90% berasal dari negara-negara Afrika tetangganya. Sekitar 100.000 orang Lebanon dan Suriah yang tidak di-

percaya dan diamati oleh penduduk pribumi, menguasai perdagangan antara dan sebagian perdagangan kecil, serta sektor bangunan. Dari sekitar 50.000 orang Perancis yang bekerja (pada kemerdekaan 7.000), sekitar 20.000 bekerja sebagai relawan pembangunan. Sebagian besar memiliki posisi pemimpin dalam ekonomi dan sebagai penasihat dalam kementerian.

2. Untuk mempercepat pembangunan negara, diundang modal asing dalam jumlah besar dengan disediakan pelayanan yang sangat baik (hanya 10% keuntungan netto harus ditinggalkan di negara itu). Selain meningkatkan perusahaan asing, terutama lokal, dibangun secara sistematis perusahaan negara dan campuran dengan andil negara. Hasil politik ini adalah "keajaiban ekonomi Afrika" dengan angka pertumbuhan yang melonjak tinggi dari PNB (tahun 1960–1970: 8%/tahun, tahun 1970–1979: 6,7%/tahun). Penopang ekonomi ekspor adalah sektor pertanian, dengan tiga komoditas (kopi, kakao, kayu mulia) memberikan 4/5 hasil ekspor. Melalui perluasan terus lahan pertanian dan perambahan pada pembabatan hutan (3.000.000 ha/tahun) tanpa dilakukan penanaman kembali, luas hutan dari 17 juta ha di awal abad ini menciut menjadi 2,5 juta sekarang (→ ekologi). Pantai Gading sejak akhir tahun '70-an merupakan pemimpin dalam produsen kakao, nomor tiga di dunia untuk produksi kopi, tetapi tanamannya sudah tua (panen kopi tahun 1985/1986: 270.000 ton, tahun 1987/1988: 196.150 ton) sehingga dilakukan program penanaman kembali besar-besaran. Program diversifikasi

yang dilakukan sejak tahun '60-an dalam sektor pertanian telah membuat pertanian negara itu menjadi mandiri dan Pantai Gading menjadi produsen kapas Afrika terbesar (200.000 ton/tahun). Titik berat pembangunan industri adalah substitusi impor dan sebuah industri ringan pengolah bahan mentah lokal yang hanya menawarkan kemungkinan perkembangan terbatas. Meskipun ada tingkat pertumbuhan yang tinggi di bidang industri (tahun 1960: 6% PDB, tahun 1987: 16,5% PDB), kritikus politik pembangunan Pantai Gading, seperti misalnya Samir Amin, mengatakannya sebagai sebuah "pertumbuhan tanpa perkembangan", apalagi investasi swasta dalam bidang produksi sampai pertengahan tahun '70-an sebagian besar berada di tangan asing (tahun 1970 misalnya 80% Perancis) yang mentransfer keluar keuntungan, sementara negara Pantai Gading harus menanggung ongkos pembangunan infrastruktur yang sesuai (misalnya dalam sistem transportasi). Akibat negatif yang biasanya selalu diasumsikan dalam model teoretis pembangunan yang tergantung dari luar, terlihat sebagian besar di bidang sosio-ekonomi di Pantai Gading. Titik berat pembangunan ekonomi berada di daerah selatan dan tenggara; perusahaan industri terpusat hampir 70% di daerah bekas ibu kota Abijan (sekitar 1,8 juta penduduk, ibu kota sejak tahun 1981: Yamoussoukro dengan 120.000 penduduk). Distribusi pendapatan sangat tidak seimbang (perbandingan antara upah minimal yang ditetapkan undang-undang dalam industri dan gaji awal seorang karyawan dengan posisi pemimpin

tahun 1982: 1:15 sampai 1:25), tidak adanya daya beli massa memblokir munculnya sebuah permintaan yang sesuai sehingga menghalangi perluasan pasar dalam negeri.

3. Sejak merdeka presiden negara adalah Houphouet-Boigny (tahun 1945-1958 anggota parlemen dari Rapat Nasional Perancis, tahun 1956-1958 Menteri Perancis). UUD mencontoh AS dan Republik V Perancis. Partai kesatuan adalah *Parti Démocratique de la Cote d'Ivoire* (PDCI) yang sebelum merdeka digunakan oleh kelompok pemimpin di sekitar Houphouet sebagai alat untuk memobilisasi massa penduduk, tetapi kemudian difungsikan untuk menjamin privilese lapisan pemimpin administrasi politik yang mapan. Mereka hampir tidak terkendali menggerogoti sektor negara yang tidak bisa dibiayai lagi sejak kehancuran besar harga pasar dunia untuk kakao dan kopi di akhir tahun '70-an. Pembaruan-pembaruan politik (terutama beberapa calon PDCI untuk mandat parlemen menggantikan kesatuan daftar) dan reformasi kegiatan negara tahun 1980 tidak dapat mengatasi kemacetan struktur (kurangnya pengawasan atas pemimpin politik dan ekonomi) yang terletak dalam sistem sosial-politik seperti yang diinginkan. Jaminan utama untuk kestabilan Pantai Gading sampai kini adalah sekitar 600.000 keluarga penanam yang untuk mereka kas stabilisasi negara untuk produk pertanian negara menjamin harga pembelian kopi dan kakao. Dengan jatuhnya harga pasar dunia sejak tahun 1986 untuk setiap kilo kakao yang diekspor negara membayar 5-6

FF sehingga kas stabilisasi untuk pertama kali sejak penciptaannya memperlihatkan defisit 285 miliar F CFA. Jika perkembangannya tetap demikian, tidak akan membawa dampak jangka menengah dan jangka panjang terhadap stabilitas politik Pantai Gading.

4. Sebagian Pantai Gading masih memiliki standar hidup lebih tinggi dari negara-negara yang berbatasan dengannya, tetapi pendapatan ini tidak terbagi rata antara regional dan kelompok. Harga konsumen yang dinaikkan atas persyaratan IMF, telah meningkatkan ketegangan sosial di tahun '80-an. Jatuhnya harga untuk komoditas ekspor andalan sejak tahun 1986, perkembangan ekonomi menjadi dramatis: tahun 1988 (setelah 545 F CFA surplus neraca perdagangan) hanya tersisa 35 miliar F FACA, tetapi 217 miliar FFA defisit dalam neraca pembayaran (8% PDB), utang luar negeri setinggi 10 miliar US\$ yang di tahun 1987 telah meliputi 77% PDB dan negara memproklamkan Pantai Gading sebagai tidak mampu membayar kembali (perundingan penjadwalan utang yang sulit dengan Kelompok Paris). Tahun 1988 untuk pertama kalinya penurunan PDB sekitar 8%. "Model Pantai Gading" terlihat mulai sirna cahayanya.

Kepustakaan: Y.A. Faure/J.F. Médard (ed.), *Etat et Bourgeoisie en Cote d'Ivoire*, Paris 1982; K. Zimmer, *Demokratisierung in Westafrika? Die politischen Systeme von Senegal, Elfenbeinküste und Togo nach zwei Jahrzehnten Unabhängigkeit*, Paderborn 1984; B. Wiese, *Elfenbeinküste: Erfolge und Probleme eines Entwicklungslandes in den westafrikanischen Tropen*, Darmstadt 1988.

kz. Papua Nugini Negara yang terletak di Pasifik (luas 462.840 km²) ini

terdiri atas bagian timur Pulau New-Guinea (Irian), Kepulauan Louisiade, Kepulauan D'Entrecasteaux, Kepulauan Bismarck, dan banyak pulau kecil lainnya. sekitar 70% Papua Nugini ditutup oleh hutan. Lebih dari 3/4 angkatan kerja bekerja di pertanian (perkebunan dan usaha kecil; ekonomi subsistensi makin mundur), tahun 1984 menghasilkan sekitar 50% ekspor (kopi, kakao, kopra, minyak sawit, kayu); Papua Nugini memiliki tambang yang penting (terutama tembaga dan emas); tahun 1984: sekitar 40% hasil ekspor).

2. Di abad ke-16 untuk pertama kalinya pelaut Eropa singgah di Papua Nugini; di abad ke-19 Papua Nugini untuk pertama kalinya separo dikuasai Jerman dan separo lagi Inggris. Tahun 1905 Inggris menyerahkan daerah kekuasaannya di Papua Nugini ke Australia, yang ikut mewalikan daerah Jerman sebagai federasi negara. Tahun 1946 Papua Nugini diserahkan oleh PBB ke Australia sebagai daerah perwalian. Tahun 1975 negara itu merdeka. Australia terus memberi bantuan anggaran (sekitar 20% anggaran negara), menempatkan pemimpin di administrasi, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, serta mengawasi eksploitasi bahan mentah.

3. Penduduk Papua Nugini tahun 1989 berjumlah sekitar 4 juta. Sekitar 16% penduduk hidup di perkotaan (ibu kota Port Moresby tahun 1986, sekitar 142 ribu penduduk). Di Papua Nugini hidup sekitar 1.000 suku bangsa dengan lebih dari 600 bahasa yang berbeda-beda (tanpa dialek). Bahasa resmi dan bahasa

pelajaran adalah Inggris. Untuk komunikasi antarsuku dipakai terutama bahasa Neo-Melanesia (*Pidgin* yang diturunkan dari bahasa Inggris). Sekitar 68% penduduk buta aksara. Meskipun ada usaha besar pihak negara, sarana infrastruktur dan sistem kesehatan (masalah utama: memengaruhi malaria dan cacar) baru di tahap awal. Sebagian besar penduduk Papua Nugini beragama Kristen yang disebarkan oleh misionaris-misionaris Protestan dan Katolik, tetapi kepercayaan animis tetap banyak dipercaya penduduk (kultus cargo, dsb.).

4. Persatuan negara Papua Nugini lahir karena ada tuntutan otonomi berbagai kelompok suku. Untuk mengatasi tuntutan ini selain ibu kota Bougainville, daerah East New Britain dan Eastern Highland menjadi propinsi yang mempunyai otonomi lebih besar. Papua Nugini adalah anggota *Commonwealth*. Ratu Inggris adalah kepala negara. Parlemen satu kamar beranggotakan senat yang terpilih, di samping 10 wakil propinsi dari 90 daerah pemilihan. Juli 1988 Rabbie Namaliu dari *Pangu Parti* (berkoalisi dengan *Melanesian Alliance* dan partai-partai lebih kecil lainnya), melalui sebuah mosi tidak percaya kepada parlemen menjadi kepala negara ke-4 sejak tahun 1975. Akhir tahun 1987 pemerintah mengumumkan berpaling dari orientasi ke Barat dalam politik luar negerinya dan mengajukan permintaan menjadi anggota nonblok. Dalam pemilu Juli 1992 Paia Wingti berhasil mengalahkan Namaliu dengan kemenangan tipis. Dalam pemerintahan Wingti terdapat 3 koalisi partai besar, yaitu

PDM (*People's Democratic Movement*), PPP (*People's Progress Party*), dan LNA (*League National Advancement*), serta 20 anggota independen.

Kepustakaan: F. Steinbauer, *Das unabhängige Papua-Neuguinea*, Wiesbaden 1976; D. Woodford, *Papua New Guinea, Initiation and Independence*, Brisbane 1976; E. Löffler, "Papua-Neuguinea, Entwicklungsland im Umbruch", dlm.: *Geographische Rundschau* 33, 1981, hlm. 17 dst.; ibid, "Papua-Neuguinea", dlm.: *HDW II*, 8, Hamburg 1983; "Ikran Nusa Bhakti, Kemenangan Wingti dan Stabilitas Politik di PNG", *Kompas*, 23 Juli 1992. rs

Paraguay Berbeda dengan negara Amerika Latin lainnya, Paraguay tidak pernah memiliki sejarah demokrasi, melainkan lebih sering dikuasai oleh pemerintah otoriter. Dengan pergantian diktator Jenderal Alfredo Stroessner 3 Februari 1989, berakhir lah sebuah rezim otoriter terlama dalam sejarah Amerika Latin (sejak tahun 1954). Meskipun ada sebuah liberalisasi, latar belakang penguasa baru Jenderal Andrés Rodríguez serta kelanjutan struktur kekuasaan rezim Stroessner, membuat khawatir bahwa sebuah demokratisasi akan menghadapi kesulitan-kesulitan besar.

1. Sumber daya negara pedalaman Paraguay (luas 406.752 km²) yang memiliki hubungan ke laut hanya melalui Sungai Paraguay, terbatas pada produk pertanian, kehutanan, dan penangkapan ikan serta beberapa kekayaan tambang (mangan, besi, tembaga), dengan eksploitasi tidak berarti.

2. Paraguay berpenduduk sekitar 4 juta orang, merupakan daerah yang paling sedikit dihuni di antara negara-negara Amerika Latin. Tingkat urbanisasi adalah 47%. Ibu kota

Asuncion berpenduduk sekitar setengah juta penduduk. Pertumbuhan penduduk 3,2%/tahun, merupakan salah satu yang tertinggi di Amerika Latin. Tahun 1989 lebih dari 41% penduduk berusia kurang dari 15 tahun. Pembagian geografi penduduk sangat tidak merata: sementara di daerah Asuncion terpusatkan sekitar 75% penduduk, di daerah barat Grand Chaco yang meliputi 3/5 daerah keseluruhan, hidup hanya 3% penduduk. Penduduk Paraguay secara etnis relatif homogen: lebih dari 95% adalah orang Mestis; kulit putih dan Indian adalah minoritas. Sekitar 50% menguasai bahasa nasional Spanyol; yang lebih sering dipakai adalah bahasa Guarani. 90% penduduk beragama Katolik dan 2% Protestan.

3. Pertanian—terutama peternakan (7% PDB), kapas, kacang kedelai, jagung, ubi kayu, gandum, ikan, dan kayu—dengan 28,7% kontribusi ke PDB dan menyerap 48% angkatan kerja, merupakan sektor terpenting seperti sebelumnya. Hampir seluruh ekspor terdiri atas komoditas pertanian. Sekitar 95% produksi pertanian dihasilkan di daerah timur, terutama di lembah La Plata. Usaha pertanian besar didominasi oleh pangsa besar dari modal asing. Tahun 1981 terlihat bahwa hanya 0,9% usaha memiliki tanah di atas 1.000 ha, yang memanfaatkan 78,5% lahan keseluruhan. Sebuah reformasi pertanian memang telah menguatkan integrasi petani kecil di tahun '70-an yang memproduksi kapas dan kacang kedelai, tetapi ini tidak mengubah apa-apa dalam hal perbedaan besar pemilikan. Hampir separo negara me-

rupakan hutan, 90% di antaranya ada dalam pemilikan pribadi. Pembabatan hutan tanpa penanaman kembali dalam jangka panjang menimbulkan masalah ekologi. Komoditas ekspor andalan adalah kapas, kedelai (bersama-sama di atas 80% pangsa ekspor), dan kayu. Ekspor sejak tahun 1985 mengalami kemunduran sehingga sejak bertahun-tahun menyebabkan neraca perdagangan negatif dan defisit. Penyelundupan (terutama kokain) diperkirakan lebih dari 50% volume perdagangan yang tercatat. Di dalam negeri juga berlaku sektor ekonomi informal, terutama di sektor bangunan. Paraguay termasuk negara di Amerika Latin yang paling rendah terindustrialisasi: sektor produksi (16,5% PDB) terutama terdiri atas usaha pengolahan produk pertanian. 70% usaha produksi berpusat di Asuncion dan kawasan sekitarnya. Pembangunan tenaga (terutama tenaga air Itaipu) memberikan dorongan pertumbuhan untuk sektor bangunan dan sektor tersier. Karena prioritas produk pertanian dalam sektor ekspor dan peran dominan modal asing, Paraguay secara struktural tetap bergantung pada pasar dunia.

4. Struktur sosial Paraguay ditandai oleh ketidakmerataan. Sebagian besar penduduk hidup di tingkat ekonomi subsistensi. Indikator sosial Paraguay adalah yang terburuk di Amerika Latin. Di bidang kesehatan terlihat pemusatan di daerah Asuncion (75% rumah sakit, rata-rata di pedesaan 1.045 penduduk/tempat tidur di rumah sakit), 1 dokter untuk 1.800 penduduk. Harapan hidup 67 tahun. Tingkat buta aksara 12%.

5. Asuncion tahun 1536 menjadi ibu kota koloni Spanyol Rio de la Plata. Kemerdekaan diperoleh Paraguay dalam perang melawan Argentina dan Spanyol tahun 1811-1813. Batas-batas wilayah Paraguay yang ada sekarang merupakan hasil dari perang melawan aliansi Argentina, Brasilia, dan Uruguay (1865-1870) yang dibiayai oleh Inggris, sementara itu Paraguay kehilangan 2/3 penduduk dan daerah yang luas, begitu juga dalam perang Chaco (1932-1935) melawan Bolivia, Paraguay kehilangan 2/3 daerah yang dipersengketakan. Terintegrasinya Paraguay ke pasar dunia setelah tahun 1870 dengan cepat membentuk partai-partai politik yang mencerminkan berbagai fraksi oligarki (*colorados*; liberal/*Azules*), tetapi tidak mampu membentuk pemerintah yang stabil. Semasa tahap konstitusional (1870-1936) oposisi selalu menghadapi represi, manipulasi pemilihan demi keuntungan partai-partai pemerintah yang fraksi-fraksinya saling berperang, sebagian dengan kekerasan. Usaha menasionalisasi rezim "febreristis" (kudeta Februari 1936) untuk menjalankan reformasi-reformasi sosial, gagal tahun 1937 akibat kudeta baru dari oligarki liberal. Mereka lalu mewakilkan kekuasaannya ke militer, kemudian mengukuhkan kekuasaannya melalui UUD tahun 1940 secara konstitusional. Tahun 1947 berlangsung perang saudara berdarah antara berbagai fraksi militer dan partai-partai politik yang dimenangkan oleh *Colorados*. Berlangsung kekuasaan satu partai *Colorados* (resmi: *Asociación Nacional Republicana*). Ketika ne-

gara itu berada kembali di tepi perang saudara, panglima angkatan bersenjata, Jenderal Stroessner mengambil alih kekuasaan (1954). Landasan kekuasaannya adalah *pacto politico-militar* yang dipaksakan. Komando militer masuk ke partai *Colorado*, Stroessner menjadi pemimpin partai. Sistem lalu bertopang pada tradisi seperti konstitusi semu, manipulasi pemilihan, klientelisme partai, dan yang dominan adalah posisi militer. Tahun 1967 atas tekanan AS (*Alliance for Progress*) berlangsung sebuah reformasi yang mula-mula memberikan oposisi harapan besar, dengan hasil hanya perluasan konstitusionalisme semu. Situasi darurat yang berkelanjutan menghentikan penghormatan terhadap hak asasi manusia oleh aparat negara. Sebagian partai dilegalisasi dan ikut serta dalam pemilihan parlemen dan presiden yang berlangsung sekali dalam lima tahun, dengan cara mereka membuat daftar calon; sementara partai-partai lain dilarang dan seperti dahulu melakukan gerakan bawah tanah dan beroperasi dari pengasingan, dan sekarang sebagian besar bergabung dalam *Acuerdo Nacional* (AN). Kemenangan *Colorados* sering terjamin. Partai dengan mayoritas relatif mendapatkan 2/3 kursi parlemen. Di luar masalah oposisi sebenarnya tidak dapat ikut pemilihan, hasil pemilihan selalu dimanipulasi secara terbuka.

6. Rezim yang ditandai oleh besarnya pengawasan terhadap rakyatnya, di tahun '80-an karena stagnasi ekonomi (utang luar negeri tahun 1988: 2,5 miliar US\$), isolasi internasional, dan makin runtuhnya oto-

ritas sang diktator yang sudah menua serta tidak mampu menentukan siapa penggantinya, terjebak dalam kesulitan-kesulitan. Represi yang dalam beberapa tahun sebelumnya mulai dikurangi, kembali dipertajam. Agustus 1987 di kubu *Colorados* pecah pertikaian terbuka antara *Militantes* dan *Tradicionalistas* yang kritis terhadap Stroessner. Pertikaian yang tidak dapat dibendung meskipun dilakukan semua kekerasan, akhirnya menyebabkan kudeta 3 Februari 1989 menelan korban 500 orang. Jenderal A. Rodriguez di bawah Stroessner juga menduduki posisi tinggi, menggantikan Stroessner. Presiden yang baru mencabut sensor pers, rujukan dengan gereja, menempatkan teknokrat-teknokrat sipil dalam kabinet baru, melakukan dialog dengan oposisi (liberal otentik, febris sosial-demokrat dan kristen-demokrat), dan sesuai dengan UUD menetapkan pemilihan tanggal 1 Mei 1989. Jangka waktu yang cepat ini mendapat kritik oposisi. Dalam pemilihan memang semua partai boleh ikut serta, kecuali partai komunis yang terus dilarang. Namun, karena UU pemilihan tetap sama seperti sebelumnya dan kemenangan waktu persiapan menghadapi partai oposisi (1,4 juta anggota), tidak diragukan lagi kemenangan *Colorados*. Mereka mendapatkan 65% suara dalam pemilihan parlemen, Jenderal Rodriguez dengan demikian dikukuhkan sebagai presiden dengan 75% suara.

Kepustakaan: F. Schmelz, *Paraguay im 19. Jahrhundert. Ein früher Fall dissoziativer Entwicklung*, Heidelberg 1981; O. Bareiro, "Paraguay", dlm.: *HDW II*, 2, Hamburg 1982, hlm. 273. dst.; D. Nohlen/M. Fernández

Baeza/O. Bareiro (ed.), *Kooperation und Konflikte im La-Plata-Becken*, Saarbrücken/Fort Lauderdale 1986; J.J. Prieto, *El estatuto electoral cuestionado. Analisis de la ley paraguaya*, Asunción 1988; E. Acevedo/J.C. Rodriguez, *Manifiesto democrático. Una propuesta para el cambio*, Asunción 1988. hb

partai politik di Afrika 1. *Model berdirinya partai politik*: titik tolak berdirinya partai politik di sebagian besar wilayah Perancis dan Inggris di Afrika, merupakan perkembangan kelembagaan. Pendirian dan perkembangan partai-partai yang berlangsung di koloni Inggris kurang sinkron dibandingkan koloni Perancis yang menganut prinsip-prinsip dasar sentralisme metropolitan. Di sana berlangsung reformasi yang meluas dari tahun 1945/1946 menurut sebuah contoh kesatuan lembaga representatif teritorial, sehingga membuat pemilihan menjadi diperlukan. Terutama sekali pemilihan yang dilakukan untuk pemilihan Rapat Nasional Perancis, dengan teritorial koloni sebagai satu daerah pilih, ada rangsangan organisatoris untuk pendirian partai-partai politik. *Rassemblement Démocratique Africain* (RDA) yang mendominasi sebagian besar koloni Perancis di Afrika Barat dan Tengah, seperti juga banyak partai nasionalis, lebih menginginkan sebuah persamaan hak orang Afrika dengan kaum kolonialisnya. Partai administrasi, pengelompokan yang ditunjang oleh pejabat kolonial yang terutama terdiri atas penerima honor pemerintah, tidak memiliki dukungan rakyat dan bertujuan mencegah perebutan mandat parlemen oleh wakil-wakil partai nasionalis. Setelah Inggris dan Perancis berunding dengan partai-partai

nasionalis, biasanya dapat dihasilkan kemerdekaan (sekitar tahun 1960) dengan menyerap partai-partai administrasi.

Model pendirian lain terlihat tanpa dorongan lembaga parlemen gerakan nasionalis yang didirikan antara dua Perang Dunia di Afrika Utara dan Madagaskar, yang mendesak kemerdekaan lebih besar dari Perancis; selanjutnya adalah partai-partai yang sebagai organisasi politik terbentuk dari gerakan pembebasan yang militan (Aljazair, koloni-koloni Portugis), dan banyak partai yang diizinkan atau didirikan oleh militer setelah mengadakan kudeta militer di masa kemerdekaan.

2. *Tipe partai-partai Afrika*: sejak awal tahun '60-an ada usaha untuk membuat tipologi partai-partai Afrika, tetapi sampai sekarang belum berhasil benar. Tipologi berakar terutama pada tuntutan dan deklarasi partai, kurang merupakan hasil empiris. Kriteria ukuran untuk penyusunan tipologi di satu pihak membentuk haluan ideologi partai, di lain pihak prinsip-prinsip organisasi dan hubungan partai-negara. Coleman/Rosberg (1964) membedakan tipe dasar revolusioner-sentralistis dan pragmatis-pluralistis, yang menjadi bervariasi dalam pengategorian selanjutnya, tetapi tidak dipertanyakan secara prinsipil. Dalam kasus pertama dipropagandakan ideologi yang dilengkapi dengan potongan-potongan marxis dan diarahkan ke organisasi partai dengan contoh sentralisme-demokrasi, akhirnya pengaitan semua organisasi masyarakat yang penting ke organisasi partai. Sejauh mana

partai-partai Afro-komunis yang sejak tahun '70-an menyatakan dirinya berlandaskan sosialisme ilmiah dan marxisme-leninisme di Republik Rakyat Kongo, Benin, Etiopia, Angola, dan Mozambik dengan ideologi yang dipropagandakan dapat lepas dari partai revolusioner-sentralistis, tidak dapat dilihat dengan pasti akibat kekurangan studi-studi empiris. Partai yang bertipe pragmatis-pluralistis lebih berhaluan ideologis daripada pluralistis dan dalam hubungan partai-negara berbeda dengan kategori pertama, yaitu tidak ada subpengaturan negara di bawah partai, melainkan lebih merupakan sebuah pluralisme yang terkendali antara partai dan masyarakat (Nuscheler tahun 1983: 48). Dalam konsepsi politik pembangunan mereka mengarah pada sebuah integrasi ke pasar dunia; lebih kuat berorientasi ekonomi pasar dan biasanya menjalankan sebuah politik luar negeri yang pro-Barat. Partai-partai yang revolusioner-sentralistis (termasuk Afro-komunis) sebaliknya menginginkan terutama sebuah strategi pembangunan yang autarki berorientasi *collective self-reliance*, dan politik luar negeri berhaluan netral, serta dalam kasus partai-partai Afro-Komunis, sebagian jelas berhaluan pro-Soviet.

3. *Struktur organisasi*: struktur organisasi dan kekuatan anggota membuat perbedaan kriteria partai kader (dan patron) dan partai massa (Hodgekin 1971; Schachter-Morgenthau 1970). Sekarang tuntutan akan partai Afrika sebagai partai massa dengan keanggotaan, dalam kasus ekstrem seperti MPR di Zaire, men-

cakup semua warga negara mulai lahir. Partai kader seperti PCT di Republik Rakyat Kongo, yang pada awalnya hanya beranggotakan kurang dari 160 orang (sekaligus melalui UUD menuntut dijalkannya kedaulatan rakyat), atau PRPB di Republik Rakyat Benin yang pertengahan tahun '80-an hanya beranggotakan 2.300 orang, merupakan pengecualian.

Jika melihat tuntutan yang menurut La Palombara/Weiner (tahun 1966: 6) harus dipenuhi, dapat digolongkan partai politik yang: a. kontinuitas dalam organisasi; b. organisasi permanen di tingkat lokal dengan hubungan yang formal ke aparat partai nasional; c. tekad bulat pimpinan untuk mendapatkan kekuasaan menentukan di semua tingkat; d. mendapatkan dukungan publik, terutama pada pemilihan. Jika demikian, setelah 25 tahun merdeka banyak partai Afrika berhadapan dengan kesulitan besar, terutama jika ingin memenuhi tuntutan kedua. Karena di luar struktur organisasi permanen yang sebagian hanya diaktifkan secara sporadis-di masa pemilihan-, biasanya "mesin politik" merupakan inti sebenarnya dari organisasi partai. Berdasarkan masing-masing negara, mereka membuat koalisi dengan kelompok elite politik kota dan penguasa klien yang sebagian besar mengawasi penduduk desa. Menurut Lemarchand (tahun 1972: 85 dst.) dapat dibedakan dua "mesin politik": a. "neotradisional" dengan organisasi partai yang terdiri atas struktur klien-terselebung dalam ukuran tertentu di tingkat lokal tanpa menjadi identik dengannya; b. "lebih ortodoks" de-

ngan patron dan kegunaan material membentuk elemen sebenarnya dari koalisi. Dalam kedua kasus sentra politik (masih) belum mampu mencapai langsung tingkat lokal di seluruh pelosok negeri sehingga bergantung pada perantara. Biasanya, mereka hanya masuk ke pimpinan sentra sampai ke basis jika sesuai dengan kepentingan.

Dalam hubungan partai-administrasi negara, sejak kemerdekaan telah berlangsung banyak perubahan besar. Pada mulanya sebagian partai terpaksa menggantikan aparat negara yang belum ada (misalnya di Guinea). Dengan pemantapannya, distribusi sumber daya yang tersedia disalurkan lebih banyak bukan melalui partai, melainkan melalui aparat negara pascakolonial yang di posisi puncak terdapat kepala negara (dan partai) yang dilengkapi dengan segala kewenangan. Kemudian, banyak partai menjadi pengikut aparat negara, malah di tempat mereka mempostulasikan hegemoni politiknya di depan negara. Bahwa tuntutan dan arti sebenarnya partai-partai, meskipun keanggotaan nominalnya sering sangat jauh berbeda, terlihat jelas pada banyak kudeta militer. Partai-partai yang dianggap paling baik terorganisir sekalipun, menghilang tanpa ada perlawanan berarti dari pihak partai atau massa yang dapat ditariknya (misalnya CPP di Ghana dan USRDA/Union Soudanaise Rassemblement Democratique Africain di Mali pada tahun '60-an atau PDG di Guinea 1984).

4. *Sistem partai persatuan*: pen-cerminan demokrasi Afrika? Sistem

partai persatuan sudah sejak kemerdekaan terdapat di kebanyakan negara Afrika. Partai persatuan dapat hidup sejak lahir, seperti TANU di Tanganyika, atau partai yang dominan membuat oposisi partai berfusi dengannya, secara paksa atau sukarela, atau mereka membangun perintang administrasi untuk oposisi (melalui UU pemilihan), atau memberikan rangsangan materi untuk pimpinan, menarik secara individual personal pimpinan, atau melarang melakukan segala bentuk kegiatan oposisi. Sekarang hanya sedikit negara di Afrika yang memakai sistem multipartai.

Sistem satu partai yang juga merupakan pencerminan demokrasi Afrika memperlihatkan bahwa karena di banyak negara Afrika partai-partai terpenting mempunyai basis terutama etnis, pemilihan malah terancam oleh pertentangan etnis yang tidak ditopang oleh integrasi nasional. Banyak masyarakat Afrika yang berkonsentrasi pada musyawarah, jauh dari prinsip keputusan suara terbanyak dan tugas nyata oposisi. Sistem satu partai tidak dapat memenuhi banyak tuntutan yang menjadi keabsahannya. Oleh karena itu, meskipun terjadi pemusatan semua kekuatan, hasil politiknya jauh dari meyakinkan—apalagi yang dilakukan oleh sistem multipartai. Mobilisasi massa yang dipostulasikan oleh banyak partai dan di sejumlah negara dalam waktu tertentu juga dicapai, tidak banyak dimanfaatkan untuk mengarahkan partisipasi penduduk secara meluas dalam hal politik, sosial, dan ekonomi (sehingga meningkatkan hasil pembangunan masyarakat). Sebaliknya, mereka ke-

banyakan diperuntukkan glorifikasi politikus pimpinan, terutama kepala negara dan kepala partai. Terutama sekali partai biasanya dimanfaatkan untuk mempertahankan privilese dalam pemerintah dan aparat administrasi yang mendapat keuntungan dari negara pascakolonial dan lapisan yang sering korup. Dua tipe dasar di negara yang sejak tahun '70-an memiliki partai persatuan (di satu pihak Tanzania dan Zambia, di lain pihak Kenya dan Pantai Gading) dengan elemen-elemen pemilihan yang bersaing (lebih banyak calon daripada kursi yang diperoleh), dapat dianggap sebagai cerminan peluang partisipasi penduduk yang lebih besar.

Banyaknya kudeta militer mendokumentasikan secara jelas kegagalan partai-partai politik di Afrika. Namun, alasan-alasan yang diberikan oleh militer dalam jangka waktu yang berbeda-beda setelah kudeta untuk pendirian partai persatuan (usaha sistem multipartai di Ghana, Nigeria, dan Volta Hulu [sejak tahun 1984: Burkina Faso] sering diakhiri dengan beberapa kali kudeta militer), memperlihatkan bahwa partai-partai di Afrika tidak mampu mengatasi defisit legitimasi dan partisipasi.

Kepustakaan: J.S. Coleman/C.G. Rosberg (ed.), *Political Parties and National Integration in Tropical Africa*, Berkeley dll. 1964; J. La Palombara/M. Weiner (ed.), *Political Parties and Political Development*, Princeton 1966; R. Schachter-Morgenthau, *Political Parties in French Speaking West Africa*, Oxford 1970; Th. Hodgekin, *African Political Parties*, Gloucester. 1971; R. Lemarchand, "Political Clientelism and Ethnicity in Tropical Africa", dlm.: *American Political Science Review* 66/1972, hlm. 68 dst.; K. Ziemer dlm., *Politische Parteien im frankophonen Afrika*, Meisenheim 1978; F. Nuscheler/K. Ziemer dlm., *Politische*

Organisation und Repräsentation in Afrika, Berlin/New York 1978; *ibid*, *Politische Herrschaft in Schwarzafrika*, München 1980; D. Nohlen/F. Nuscheler (ed.), *HDW II*, 4, 5, dan 6, Hamburg 1982/3; D. Berg-Schlosser, "Afrika zwischen Despotie und Demokratie", *dlm.*: *APuZ* 14/1984, hlm. 13. dst.

kz
partai politik di Amerika Latin 1.
Peran partai: partai-partai di Amerika Latin dibandingkan dengan Dunia Ketiga lainnya sebagian besar merupakan realitas politik dalam masyarakat. Setiap negara di Amerika Selatan mempunyai sejarah panjang partai dan pemilihan seperti berbagai demokrasi di Barat (Nohlen tahun 1978: 29). Namun, hanya sedikit partai memiliki kekuatan dalam sistem politik (Kosta Rika, Kolombia, Venezuela, Cile, dan Uruguay sampai awal tahun '70-an) sehingga dapat mengkonsolidasi diri untuk waktu lama. Lebih menjadi ciri partai-partai itu adalah mereka terus bersaing dengan faktor-faktor kekuasaan lainnya, terutama militer yang di tahun '70-an mengambil alih kekuasaan di sebagian besar negara Amerika Selatan.

Dalam sistem otoriter (rezim otoriter) dengan pemilihan yang dimanipulasi, partai mempunyai arti tertentu (Brasilia sampai tahun 1985). Melalui perjanjian dengan berbagai partai dan kelompok kepentingan, partai dapat menunjang ke arah pembukaan demokrasi. Partai dalam proses (re-) demokratisasi sering harus melakukan kompromi dengan militer; di satu pihak memungkinkan peralihan pemerintah, tetapi di lain pihak mengizinkan militer mempunyai posisi dalam masyarakat yang memberikan semacam hak veto pada keputusan politik.

Berdasarkan keragaman partai dan peristiwa politik yang bergantian, di Amerika Latin ada tipologi partai yang meliputi berbagai negara, dan usaha membuat klasifikasi hanya dapat dilakukan dengan terbatas. Terminologi yang ada (partai kelas, partai rakyat, partai ideologi) rumit. Di abad ke-19 malah ada partai honorer. Di awal abad ke-20 terbentuk kelompok kepentingan yang lebih besar. Dengan kemunculannya dan partisipasi yang makin tumbuh dari lapisan menengah dan bawah, terjadi pembentukan partai massa. Partai-partai baru biasanya terlihat dengan anggota poliklasik, tetapi secara programatis mengacu ke kelas sosial tertentu (misalnya partai sosialis di Cile).

Sebuah pembedaan antara "partai status, partai reform, dan partai revolusioner" (Lindenberg tahun 1973: 140) hanyalah mungkin dalam kasus tersendiri dan untuk masa yang terbatas. Selain itu, sulit untuk menyusun partai berdasarkan fungsi perkembangannya atau tingkat modernitasnya. Pertama, tidak diperhatikan aspek kekuasaan. Kedua, dalam masing-masing partai bercampur elemen modern dan tradisional dengan cara tersendiri. Ketiga, perkembangan politik terakhir memperlihatkan bahwa keberadaan sistem partai tidak langsung berkaitan dengan tingkat modernisasi masyarakat (Werz tahun 1983: 12—27). Untuk lebih dapat memperhatikan keistimewaan proses politik, diperlukan "definisi partai Amerika Latin" (Lindenberg tahun 1973: 132) dan definisi sementara (Sartori tahun 1976: 244, dst.). Tetap

dipertanyakan, apakah diperlukan instrumen teoretis khusus untuk Amerika Latin. Berbagai partai berorientasi secara historis ke pengelompokan Eropa dan sekarang termasuk federasi partai multinasional.

2. *Kelahiran dan pandangan historis*: dapat ditetapkan empat periode partai (Bernard tahun 1969; Cifuentes tahun 1983) sebagai berikut. a. Semasa gerakan pembebasan dari Spanyol terbentuk pengelompokan pertama di sekitar pimpinan militer (*caudillo). Mulai tahun 1840 di hampir seluruh negara berdiri dua partai, yaitu konservatif dan liberal. Mereka lebih memiliki karakter kelompok honorer daripada kelompok mapan, selain itu hak pilih pasif dan aktif sampai akhir abad lalu tetap terbatas. Perbedaan adalah dalam bentuk negara yang diinginkan. Kelompok konservatif kebanyakan didukung oleh tuan tanah memperjuangkan sebuah pemerintah terpusat dan mempertahankan privilese gereja. Kelompok liberal lebih didukung oleh lapisan kota, menuntut elemen federatis tertentu dan perdagangan luar negeri yang bebas. Di akhir abad lalu di Argentina, Chile, dan Uruguay terbentuk kelompok radikal dari lapisan menengah kota yang memperjuangkan demokratisasi hak pilih dan hak warga negara. b. Selama kelangsungan urbanisasi, konsolidasi negara nasional dan tumbuhnya partisipasi lapisan penduduk yang lebih besar, terbentuk sejak akhir tahun '20-an partai-partai nasional-revolusioner yang anti-imperialis dan sosial-reformis. Mereka dipengaruhi oleh gagasan revolusi Meksiko (1910-1917)

dan reformasi Universitas Cordoba (1918). *Alianza Popular Revolucionaria Americana* (APRA) yang didirikan tahun 1924 oleh seorang Peru, Haya de la Torre, mempunyai orientasi tertentu. Selain partai politik klasik yang berkembang menjadi partai massa dan rakyat di subbenua tersebut, berlangsung pengelompokan komunis dan sosialis yang lebih kecil. c. Setelah terjadi krisis ekonomi dunia tahun 1929, di kota-kota besar Amerika Selatan muncul gerakan populis yang kuat, yang menyatukan elemen-elemen kekuasaan karismatis-otoriter dan terpilih melalui pemilihan. Presiden yang populis di Argentina dan Brasilia menunjang pembangunan partai-partai dengan dana negara. Partai-partai lain, seperti Partai Revolusi (PRI) Meksiko yang terlemah, mengalami tahap populis yang singkat. Setelah kehancuran populisme di tahun '50-an, partai yang berorientasi sosial-demokrat dan Kristen-demokrat Amerika Latin menjadi mode. d. Simpati terhadap revolusi Kuba (1959) dan makin tumbuhnya masalah ekonomi, menimbulkan radikalisasi politik di tahun '60-an. Partai-partai tidak saja berada di bawah represi militer, melainkan juga menghadapi gerakan gerilya yang menginginkan perubahan radikal. Muncul sempalan partai pemuda berorientasi kiri, terutama pada partai yang semula nasional-revolusioner dan sedikit pada kelompok Kristen-demokrat (Chile). Setelah kegagalan gerilya Fokis dan kelangsungan kekuasaan militer dalam waktu lama, di tahun '80-an di Amerika Latin mulai ada proses re-demokratisasi. Dari pengalaman seja-

rah terbaru terlihat ada kesediaan musyawarah pada partai-partai; di berbagai negara ada usaha mengukuhkan demokrasi melalui pakta-pakta politik.

3. *Keluarga politik*: keluarga politik di Amerika Latin jika dibandingkan dengan Eropa, mempunyai perbedaan ideologi dan program. Nama partai sering tidak sesuai dengan isi dan perilaku partai. Meskipun demikian hampir semua partai memiliki kebersamaan program, a.l. strategi nasional yang bertujuan modernisasi cepat dan reformasi dengan menguntungkan si kaya. Perbedaan-perbedaan berikut ini yang mungkin ada. a) *Partai konservatif*: di abad ke-20 partai ini telah kehilangan pengaruhnya. Jarang ada partai dengan program yang jelas konservatif, hanya ada pengelompokan kecil yang tidak berarti, kecuali partai konservatif Kolombia, nama ini juga masih dipakai. b) *Partai liberal dan radikal*: liberal kehilangan makna, kecuali di Kolombia dan Honduras, tetapi partai-partai liberal di sana tidak mempunyai kesamaan dengan pengelompokan di abad ke-19. Partai-partai radikal berasal dari lapisan menengah kota, yang terbentuk di sekitar abad peralihan di Argentina, Chile, dan Uruguay; mereka memperjuangkan demokratisasi sistem politik dan pembatasan pengaruh gereja, serta memakai programatika sosial-demokrat. c) *Partai-partai Kristen-demokrat*: muncul setelah Perang Dunia II atau baru berdiri tahun '50-an, mula-mula sebagai partai korporasi-falangistis (Chile, Venezuela). Program mereka dipengaruhi oleh klik-klik sosial Paus dan prinsip so-

sial Katolik Perancis baru (*Maritain*). Dengan tuntutan seperti *participación popular* (partisipasi rakyat), integrasi kelompok marjinal, reformasi sistem pendidikan dan keinginan sebuah masyarakat komunitaris, telah memberikan kelompok Kristen-demokrat sebuah wajah reformistis yang dalam praktek pemerintahan hanya sedikit direalisasi. Terutama sekali di Chile, Venezuela, dan El Salvador, Kristen-demokrat merupakan partai massa. Kristen-demokrat Amerika Latin bergabung dalam ODCA dan masuk dalam Uni Kristen Demokrat Dunia. d) *Partai-partai yang berorientasi sosial-demokrat*: di tahun '30-an partai-partai ini sebagian muncul dengan antusiasme APRA, dapat juga disebut sebagai nasional-revolusioner. Cirinya adalah haluan antiimperialis, antifeodal, dan nasionalis; mereka memperjuangkan sebuah peran aktif negara dalam nasionalisasi. Tahun '50-an di Kosta Rika dan Venezuela, partai-partai ini berkuasa dengan nama *Partido Liberación Nacional* (PLN) dan *Acción Democrática* (AD). Ketika mereka berkuasa dilaksanakan program yang semula setahap demi setahap. Bersama dengan partai-partai Kristen-demokrat di Chile dan Venezuela, mereka membentuk organisasi massa yang sangat terorganisasi baik. Konferensi Caracas (1976) membuka hubungan yang makin kuat antara partai-partai ini dengan Sosialis Internasional (SI). e) *Partai dan gerakan populis*: jika populisme didefinisikan sebagai tahap historis, termasuk ke dalamnya peronisme di Argentina dan pemerintah Vargas di Brasilia. Ter-

utama sekali penulis-penulis Amerika Latin meluaskan definisi populisme dan memasukkan ke dalamnya partai-partai yang secara umum berorientasi nasional-revolusioner dan sosial-demokrat. Di tingkat ideologi gerakan populis ditandai oleh campuran ambivalen antara gambaran nasionalis, sosial-reformis, dan etatis. Mereka kebanyakan terbentuk di sekitar tokoh karismatis, yang lebih berperan dibandingkan struktur partai yang stabil. Profil populis tertentu mewarnai hampir semua partai massa di Amerika Latin. f) *Partai-partai komunis*: meskipun partai komunis di banyak negara termasuk partai-partai yang pertama berdiri (masa pendirian tahun 1919-1930), kelompok komunis Amerika Latin yang berorientasi Moskow, tidak dapat mengembangkan pengaruh besar. Mereka tunduk pada skema tahapan marxis, berusaha membentuk front rakyat bersama kekuatan progresif lainnya dan hanya dengan kekecualian saja mempropagandakan pengambilalihan kekuasaan dengan senjata. Hal yang menarik di sini adalah revolusi Kuba dilakukan oleh pemberontak yang setelah menang mengadakan hubungan dengan partai komunis Kuba dan mengembangkannya sebagai partai negara. Di tahun '60-an dengan kemunculan gerilya Castro-Guevara terjadi perpecahan dalam partai komunis, merupakan sebuah pertentangan antara konsep revolusi Amerika Latin keseluruhan dari Kuba dan haluan yang dipegang oleh partai komunis di Amerika Tengah dan Selatan (Goldsberg tahun 1971; Lowy tahun 1980). g) *Partai-partai sosialis*: par-

tai-partai sosialis yang muncul terutama di Amerika Selatan awal abad ini, didirikan oleh serikat buruh (terutama di Cile). Di negara-negara kecil Karibia dan di daerah koloni Perancis setelah tahun 1930 juga berdiri partai-partai sosialis yang di tahun '70-an mengambil alih kekuasaan di sejumlah negara. Partai-partai sosialis yang ada di negara-negara lain merupakan kelompok sempalan partai sosial-demokrat atau partai komunis, dan tidak memiliki pengaruh politik yang besar. h) *Partai-partai revolusioner* (anarki, troztkis, maois): gerakan anarsi yang relatif kuat muncul di awal abad ini di Argentina, terutama di antara kaum pendatang Italia dan Spanyol. Kelompok troztkis kemudian muncul di Cile, Bolivia, Argentina, Meksiko, dan Peru. Selain organisasi politik kecil yang legal dan setengah legal, mereka terutama terdiri atas gerilyawan militan. Pengaruh kaum maois terbatas pada kelompok mahasiswa; hanya di Peru mereka dapat mempunyai pengaruh yang lumayan.

4. *Organisasi partai dan demokrasi dalam partai*: partai-partai di Amerika Latin lebih merupakan gabungan longgar atau kelompok konglomerat (Hirsch-Weber tahun 1969: 211) dan sebagian menamakan dirinya sebagai gerakan. Tanda lain adalah lemahnya organisasi mereka dan kurangnya demokrasi intern. Hal ini disebabkan ketidakstabilan politik dan tahap munculnya pelarangan partai. Selain itu, ada alasan-alasan struktural: lapisan sosial yang kabur dalam masyarakat Amerika Latin (Faletto tahun 1982: 124 dst.) dan

keterbatasan peluang partisipasi lapisan bawah dan di partai. Memang berdasarkan anggota dan pemilih sering merupakan partai multikelas atau partai rakyat (*partidos populares*); tetapi di dalam organisasi mendominasi sebuah inti kecil pimpinan atau seorang politikus yang populer. Pada partai-partai nasional-revolusioner terdahulu berlaku semacam sentralisme demokrasi, terlihat a.l. dari generasi pendiri atau kelompok kecil lainnya yang menduduki posisi tinggi. Pendiri partai yang terkenal seperti Haya de la Torre (APRA) atau R. Betancourt dari Venezuela (AD), sampai kematiannya mewarnai haluan partai. Personalisasi kekuasaan juga disebabkan arus-arus internal sering memakai nama masing-masing pemimpin. Program-program politik lebih berada di belakang layar. Personalisme juga ditunjang oleh UUD presidensial di negara-negara Amerika Latin. Kekuasaan yang jarang didapat hampir tidak mempunyai fungsi pengawasan dan pemberi keputusan dalam rapat partai yang dilakukan dalam periode yang tidak teratur. Kebanyakan partai hanya memiliki iuran anggota yang minimal dan bergantung pada sumbangan pribadi atau negara. Pengecualian adalah organisasi partai komunis yang ketat dan partai-partai kiri kecil lainnya. Pembiayaan partai oleh negara sering berupa dana kampanye pemilihan. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan partai hanya terbatas semasa pemilihan; sebaliknya mereka sangat sedikit melakukan pendidikan. Setelah sebuah kemenangan pemilihan dana negara dan posisi merupakan

sarana pembiayaan terpenting untuk partai (→ klientelisme).

5. *Sistem partai*: meskipun ada pertukaran rezim dan tahap lama penguasa otoriter, mengherankan bahwa sistem partai memperlihatkan sebuah kesinambungan. Pada proses demokratisasi melalui pemilihan bebas muncul sistem-sistem partai yang serupa dengan sedikit modifikasi seperti sebelumnya dalam tahap otoriter. Dapat dibedakan tipe-tipe berikut. a) *Sistem dua partai*: berdasarkan aturan proporsional yang menentukan pembagian kekuasaan antarpolisi (Front Nasional di Kolombia sejak tahun 1958), atau terbentuk melalui pemilihan khusus (Uruguay, Honduras). Namun, kedua partai yang dominan terpecah dalam berbagai kelompok yang sebagian memiliki calon sendiri sehingga tidak dapat lagi dikatakan sebagai sistem dua partai yang murni. Venezuela di tahun '60-an memiliki struktur multipartai yang berkembang menjadi satu sistem dengan dominasi dua partai massa, tahun 1983 dapat bersatu dengan 91% suara. b) *Sistem multipartai*: ada di sebagian besar negara-negara Amerika Latin. Negara yang mempunyai *trend* ke struktur dua partai adalah Argentina, Kosta Rika, dan Republik Dominika. Sistem partai yang sangat terpolarisasi dan terfragmentasi terdapat di Bolivia dan El Salvador. Dalam tahap akhir (1970-1973) Chile juga termasuk dalam sistem partai yang terpolarisasi. c) *Sistem dengan satu partai yang dominan*: di Meksiko melalui manipulasi pemilihan dan komplotan negara dengan partai revolusi, PRI, telah sangat membatasi

kebebasan pers dan oposisi yang ada dan partai oposisi sehingga praktis tidak dimungkinkan peralihan kekuasaan. Kuba menurut UUD tahun 1976 adalah sebuah negara sosialis, setelah PCC sejak tahun '70-an berkembang menjadi penopang rezim. Nikaragua pascarevolusi memiliki Front Pembebasan Sandinista (FSLN) karena hubungannya dengan negara, militer, dan Komite Mempertahankan Revolusi, mempunyai pengaruh besar sehingga ruang gerak partai-partai oposisi menjadi terbatas.

Kepustakaan: J.-P. Bernard *et al*, *Tableau des partis politiques en Amérique du Sud*, Paris 1969; W. Hirsch-Weber, *Politik als Interessenkonflikt*, Stuttgart 1969; B. Goldenberg, *Kommunismus in Lateinamerika*, Stuttgart 1971; K. Lindenberg, "Politische Parteien in Lateinamerika", dlm.: W. Grabendorff (ed.), *Lateinamerika - Kontinent in der Krise*, Hamburg 1973, hlm. 131-179; G. Sartori, *Parties and Party Systems*, Cambridge 1976; M. Lowy, *Le marxisme en Amérique Latine de 1909 à nos jours*, Paris 1980; R.J. Alexander (ed.), *Political Parties in the Americas*, Westport 1982; E. Faletto, "Estilos alternativos de desarrollo y opciones políticas", dlm.: S. Bruna *et al*, *América Latina: Desarrollo y perspectivas democráticas*, San José 1982, hlm. 103-145; D. Nohlen/F. Nuscheler (ed.), *HDW II*, 2, 3, Hamburg 1982; N. Werz, *Parteien, Staat und Entwicklung in Venezuela*, München 1983; R. Cifuentes, *Zur Typologie politischer Parteien in Lateinamerika. Die Fälle Chile und Argentinien*, Heidelberg 1983; C.O. Maoláin (ed.), *Latin America Political Movements*, London 1985.

niw
partai politik di Asia: 1. *Situasi kini dan sejarah*: kecuali di beberapa monarki suku dan feodal negara-negara Arab di Teluk, Yordania, dan Brunei, sekarang di semua negara Asia partai-partai ikut secara legal dalam proses politik. Namun, fungsi dan arti mereka sebagai instrumen pendidikan keinginan politik, tidak

sama. Hanya di sedikit negara ada kebebasan pendidikan politik dan mereka menentukan politik pemerintah (India, Sri Lanka). Partai-partai di kebanyakan negara Asia selalu dilarang dan dibubarkan, partai yang radikal dan beroposisi tidak diizinkan, didesak, sehingga harus bekerja di bawah tanah atau partisipasinya dalam proses politik dihalangi dan dirugikan. Partai-partai kebanyakan tidak mampu mengorganisasi, mewakili semua kepentingan masyarakat dan membawanya ke pendidikan keinginan politik.

Mereka sering hanya menjadi perantara untuk melaksanakan kepentingan tokoh negara atau elite lokal, dan ada beberapa yang harus berbagi kekuasaan dengan militer (Thailand), atau bergantung pada militer (Indonesia) atau selalu menghadapi kembali serangan dan kudeta dari pihak militer yang membatasi ruang gerak mereka atau malah menghancurkannya (Pakistan, Bangladesh, Thailand). Hanya sedikit partai yang berkesinambungan, termasuk di antaranya partai tertua di Asia, yaitu Partai Kongres dan *Kuomintang*, keduanya didirikan sebelum peralihan abad (tahun 1885 dan 1894), dan sampai kini masih tetap merupakan kekuatan politik yang menentukan di India dan Cina (sejak tahun 1949 hanya di Taiwan); meskipun dalam Partai Kongres ada persaingan dan pertikaian antarsayap serta perpecahan. Partai-partai yang berorientasi ideologi (partai komunis, *Baath*) juga mempunyai tradisi yang tua, malah pernah mengalami masa ilegal. Kontinuitas tertentu juga diperlihatkan oleh par-

tai-partai dalam demokrasi persaingan di negara merdeka, sementara pendirian partai "dari atas" sering terbukti tidak bertahan lama, jatuh menjadi korban restrukturisasi baru atau hancur karena beban sistem.

2. *Tipe Partai.* a) *Partai dan gerakan kemerdekaan:* partai-partai pertama terpenting muncul dari gerakan nasional dan kemerdekaan, yaitu *Congres Party* di India, *Moslem-liga* di Pakistan, *Anti-Fascist People's Freedom League* di Myanmar, Partai Nasional Indonesia, *Nacionalistas* di Filipina, dan *Awami League* di Bangladesh. Dalam perjuangan kemerdekaan yang hanya dilakukan secara militer di Indonesia dan Bangladesh (sebagai perang separatis), banyak kepentingan yang saling bertentangan dijadikan satu, kemudian pecah setelah tujuan bersama telah tercapai. Partai-partai ini terpisah dari kehidupan politik-kecuali Partai Kongres-sering akibat kudeta militer atau penggulingan kekuasaan. Dalam kasus Filipina hal yang terakhir justru dilakukan oleh ketua partai dan presiden negara (1972), dengan mengizinkan partai-partai kembali (1978) mendirikan sebuah partai pemerintah sendiri yang baru, sementara *Nacionalistas* yang bangun kembali hanya mempunyai peran kecil dalam oposisi. b) *Partai dengan landasan etnis/regional:* di kebanyakan negara Asia terdapat masalah sentra-periferi yang besar dan minoritas etnis-kultural, yang integrasi (hak sama) ke negara nasional tidak dilakukan oleh suku-suku mayoritas atau dengan sengaja menolak integrasi demikian. Oleh karena itu, terbentuk banyak partai dengan

dasar etnis, religius, atau regional. *Liga Muslim* di India-Inggris yang sengaja memisahkan Pakistan dari India, merupakan salah satu partai demikian. Namun, India sampai sekarang menghadapi banyak konflik etnis/religius/regional yang menimbulkan pendirian partai-partai. Selain itu, pendirian gerakan separatis bersenjata berusaha mendapatkan negara sendiri dalam federasi India. *Mizos* dan *Nagas* (di timur laut India) misalnya, sukses dalam hal ini, sementara perjuangan kaum *Sikh* dengan pembunuhan terhadap Perdana Menteri India, Indira Gandhi (1983), memang mendapatkan masa jaya sementara, tetapi masalahnya belum terselesaikan. Partai-partai Hindu seperti *Jana Sangh* dan *Shiva Sena* yang lebih kecil dan radikal, partai *Sikh Alkali Dal* dan partai orang Tamil *Dravida Munnetra Kazhagam* tidak ingin menyulitkan Partai Kongres dalam persekutuan politik. Partai-partai ini di tingkat masing-masing negara kembali dapat menerobos dan mengambil alih kekuasaan. Akibat titik berat regionalnya dan sistem pemilihan mayoritas (sistem Inggris), meskipun tertinggal jauh dari Partai Kongres, mereka yang merupakan partai-partai dengan ideologi India Kuno berhasil mengirimkan sebagian anggotanya ke parlemen pusat (*Lok Sabha*).

Kelompok minoritas di Birma (Karen, Shan), Irak (sampai tahun 1975 orang Kurdi), Mindanao (orang Islam di Mindanao) juga memperjuangkan pendirian negara sendiri atau otonomi. Di Sri Lanka berlangsung konflik antara Tamil (*Tamil United Liberation Front*, yang kini

merupakan partai oposisi terpenting dalam parlemen) dan Singhala, makin menjadi pertikaian separatis penuh kekerasan. Keragaman etnis-religius di Lebanon berusaha diatasi dengan pembagian kekuasaan di antara masing-masing kelompok etnis-religius. Partai-partai juga berorientasi ke model ini meskipun ada perbedaan ideologi. Konsensus multiagama ini tetap rapuh dan pecah dengan adanya dampak asing dan intervensi dalam rangka perluasan konflik Palestina (→ Konflik Timur-Tengah), serta dengan meletusnya ketegangan antarkelompok agama yang sukses ekonominya dan yang kurang sukses. Keduanya bermuara dalam sebuah perang saudara yang sejak satu dasawarsa belum juga berakhir.

Di Malaysia masalah multietnis dianggap berhasil dinetralisasi sampai kini. Orang Malaysia menyebut dirinya sebagai negara dengan suku-suku bangsa yang berusaha menyamakan dirinya dengan orang Cina yang lebih sukses dalam ekonomi melalui pengawasan di bidang politik. Kelompok elite di kedua kelompok bangsa lainnya, orang India selain Cina, menyatakan setuju dengan penurunan tingkat partisipasi mereka dalam kekuasaan. Terjadi pembentukan tiga partai etnis yang beraliansi di bawah pimpinan *United Malay National Organisation* (UMNO). Aliansi multietnis ini berhadapan dengan banyak fraksi oposisi di dalam partai, yang sebagian mengartikulasi tuntutan multietnis, tetapi sebenarnya hanya bertopang pada satu kelompok etnis. Ketika aliansi tahun 1969 dengan susah payah dapat memenangkan pe-

milihan, terjadi kerusuhan berdarah antara orang Cina dan Malaysia, diberlakukan pelarangan sistem parlementer dan akhirnya dapat meluaskan Aliansi Front Nasional (1973) yang berkuasa, mencakup 10 partai. c) *Haluan dan ideologi partai*: dalam beberapa partai yang berakar pada etnis di Lebanon dan Malaysia, terlihat suatu kesadaran ideologi. Dalam kelompok partai ideologi ada spektrum kanan beberapa partai Islam (di Malaysia, Indonesia, sejak tahun 1979 *Islamic Republican Party* di Iran). Sebagai partai sosial-demokrat a.l. *People's Action Party* (PAP) yang berkuasa di Singapura (tetapi dikucilkan dari Sosialis Internasional). *Burma Socialist Programme Party* (didirikan tahun 1962) dan partai *Baath* (didirikan tahun 1974) merupakan partai-partai nasionalis kiri. Selain itu, *Baath* merupakan satu-satunya partai yang mempunyai organisasi supranasional (di beberapa negara Arab), tetapi di Irak dan Suriah berkuasa sayap-sayap yang saling bermusuhan.

Partai-partai komunis sudah berdiri di negara-negara Asia besar sejak tahun '20-an dan '30-an. Dampak perpecahan dalam gerakan komunis dunia juga terlihat di Asia. Di Sri Lanka selain sebuah partai komunis (berorientasi Moskow) juga ada partai trozkis (berdiri tahun 1935) yang terkucil dari internasional, ketika untuk pertama kalinya mereka membentuk sebuah partai borjuis (1964) bersama partai komunis. Di Filipina (sejak tahun 1969) ada dua partai komunis, di India ada tiga (sejak tahun 1964 dan 1967), masing-masing satu

beralih ke perang gerilya bersenjata. Hanya di beberapa negara (bukan komunis) partai komunis dapat aktif. Partai komunis mempunyai pengaruh besar semasa Soekarno di Indonesia, sampai tahun 1965 ketika mereka gagal mengambil alih kekuasaan melalui kudeta dan mengalami pogrom berdarah. Di beberapa negara bagian India (Kerala, Bengala Barat) partai komunis beberapa kali berusaha mengambil alih kekuasaan, di Suriah (sejak tahun 1970) dan Sri Lanka (1964-1965, 1970-1975/1977) mereka dapat ikut memerintah untuk sementara waktu. Kurang dari 7 negara partai komunis dapat berkuasa dengan bantuan tentara Soviet (Mongol, Korea Utara) atau dengan kekuatan sendiri melalui perang gerilya (Vietnam, Kamboja) atau melalui sebuah kudeta (Afghanistan), masing-masing titik berat ditentukan oleh pertikaian fraksi masing-masing partai komunis—dengan atau tanpa intervensi asing. d) *Partai honorer*: tampaknya partai honorer tidak mempunyai arti di Asia. Partai ini merupakan instrumen kelompok kecil elite yang mempunyai pengikut dalam sistem klientel, terorganisasi sangat longgar dan mengabdikan kepada individu, bukan ke sebuah program atau partai. Tidak jarang terjadi pertukaran partai dan fraksi pimpinan partai dan pengikutnya, dan tidak jarang turut serta karena daya tarik materi. Akses pribadi ke jabatan negara dan menduduki posisi tersebut, merupakan motivasi pokok dan sementara yang terorganisasi dalam partai. Klik sebagai prinsip organisasi (*de facto*) tidak hanya dapat ditemui dalam partai honorer. Terutama sekali

hubungan kekerabatan berperan penting dalam penempatan posisi pemimpin. Tidak hanya di tingkat lokal berkembang dinasti dengan cara demikian, yang mampu mempertahankan jabatan politik selama beberapa generasi. Di tingkat pemerintah perkembangan ini terlihat paling jelas di India. Keluarga Nehru di generasi ketiga dan empat berada di puncak posisi pemerintah; di Sri Lanka kedua partai besar, *United National Party* dan *Sri Lanka Freedom Party*, dikendalikan oleh keluarga Senanayake dan Bandaranaike, yang darinya muncul sampai sekarang lima dari enam kepala pemerintahan. Di Taiwan, Chiang Ching-kuo (1975) menggantikan ayahnya, Chiang Kai-sek. Di Singapura dan di Korea Utara berlangsung perkembangan yang sama. Partai honorer masih ada sekarang di Thailand dan Filipina, Partai Kongres dan beberapa partai India juga memperlihatkan beberapa elemennya. Mereka mempunyai hubungan dengan partai-partai yang didirikan "dari atas" oleh negara dan pemerintah dalam rezim otoriter, yang dapat memenuhi fungsi mereka sebagai rezim yang loyal dan memobilisasi massa, akhirnya hanya dapat bertopang pada inti pemegang jabatan. Mereka jelas berbeda dari partai kader komunis dan bukan komunis dengan basis massa (seperti *Baath* dan *Kuomintang*) yang memelihara sel-sel dan anggota partainya serta anggota aktifnya di semua bidang ekonomi dan perumahan.

3. *Sistem partai*: di Asia hanya ada sedikit sistem multipartai dengan demokrasi persaingan. Jika mengambil pertukaran pemerintah dan par-

lemen sebagai ukuran, hal ini hanya terjadi di India dan Sri Lanka, terbatas juga di Filipina (sampai tahun 1972) serta di Malaysia (dengan pertukaran partai pemerintah di beberapa negara bagian). Di Singapura, Indonesia, Korea Selatan, Taiwan, dan Filipina (1978–1986) beberapa partai saling bersaing, tetapi partai oposisi tidak mempunyai peluang yang sebenarnya untuk menggantikan partai pemerintah, akibat UU pemilihan, suap, dan manipulasi dalam pemilihan serta mempengaruhi pemilihan oleh pemerintah. Partai-partai mengalami kekalahan. Bentuk ini merupakan sistem hegemoni satu partai. Penggolongan ini membungkam negara-negara yang parlemen dan partai pemerintahnya tidak berperan (Filipina sampai tahun 1986, Indonesia). Dalam kasus ini sebenarnya dapat dikatakan sebagai rezim (militer) otoriter dengan partisipasi partai yang terbatas. Thailand, Pakistan, dan Bangladesh paling lama termasuk dalam kategori, terutama dalam sejarah mereka yang penuh pertukaran pemerintahan.

Negara-negara komunis di Myanmar, Suriah, dan Irak, dipasang sistem satu partai, di beberapa kasus dalam bentuk rezim front rakyat, di bawah pimpinan partai komunis, *Baath* masih mengizinkan keberadaan partai-partai lain dan ikut serta sebagai mitra yang bergantung pada pemerintah.

Kepustakaan: D.L. Sheth (ed.), *Citizens and Parties. Aspects of Competitive Politics in India*, Bombay 1975; D. Nohlen/F. Nuscheler (ed.), *HDW II*, 6, 7, 8, Hamburg 1982; Lim Joo-Jock (ed.), *Armed Communist Movement in South-East Asia*, Singapore 1984; H. Fukui (ed.), *Political Parties of Asia and the Pacific*,

London 1986; U. Steinbach/R. Hofmeier/M. Schönborn (ed.), *Politisches Lexikon Nahost*, cet. ke-4, München 1988.

rh
partisipasi Untuk pengertian partisipasi pertama-tama perlu dibedakan antara partisipasi politik dalam pengertian keikutsertaan pada proses politik dan partisipasi dalam pengertian turut memiliki barang-barang material dan kultural di dalam suatu masyarakat. Dalam teori pembangunan yang baru dan usaha-usaha untuk mendefinisikan kembali arti pembangunan, kedua aspek partisipasi tersebut dilihat dalam suatu keterkaitan yang erat. Di dalam dokumen PBB sejak tahun '70-an juga terdapat definisi mengenai partisipasi yang mengaitkan keikutsertaan politik dan keikutsertaan sosial serta diperluas oleh aspek ketiga, yaitu turut sertanya penduduk secara aktif dalam proses pembangunan. Suatu studi Sekretariat PBB tahun 1976 telah mendefinisikan partisipasi sebagai suatu "proses tindakan penduduk yang di dalamnya termasuk: ikut serta dalam keputusan politik ...; ikut serta dalam usaha-usaha pembangunan; distribusi barang-barang yang diproduksi secara adil". Pengertian multidimensi mengenai partisipasi yang mendasari strategi pembangunan sudah tentu membawa beberapa masalah analitis. Jika misalnya distribusi yang adil menurut definisi merupakan bagian dari partisipasi, pertanyaan mengenai apakah keikutsertaan penduduk yang semakin meningkat dalam bidang politik dapat mengubah banyak model distribusi yang selama ini berlaku, akan tidak dilihat sebagai masalah lagi. Padahal pertanyaan ini penting untuk dikedepankan, jika pengertian

partisipasi semakin kurang dikaitkan pada hubungan antara pekerja dan alat-alat produksi. Di lain pihak, pengertian multidimensi menutup mata terhadap kesalahan pembangunan menurut macam konjugasi, seperti ter-baca pada dinding-dinding di Paris tahun 1968: "*je participe, tu participes ... vous participez, ils profitent*". Keikutsertaan politik yang hanya bersifat formal saja tidak sesuai lagi dengan tuntutan politik pembangunan dalam pengertian partisipasi.

Pernyataan ini berdasarkan pengalaman dalam usaha mengambil alih gagasan demokrasi Barat ke negara berkembang. Kebebasan memilih dan kebebasan organisasi yang pluralistis, selain kesempatan turut serta dalam lembaga politik lokal yang formal dan informal, merupakan elemen inti dari pengertian partisipasi Adelman/Morris, sama sekali tidak memperkuat pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial sesuai dengan asumsi difusionis gagasan demokrasi Eropa. Konsekuensi yang dapat ditarik secara teoretis adalah pertentangan antara partisipasi atau demokrasi Barat dan kebebasan di satu pihak, serta pertumbuhan ekonomi di lain pihak. R. Löwenthal memformulasikannya, "Setiap jengkal kebebasan harus dibayar dengan melambatnya pembangunan, setiap usaha mempercepat pembangunan harus dibayar dengan hilangnya kebebasan." S. Huntington melihat dilema pembangunan dari pelembagaan kekuasaan politik dan partisipasi politik: jika tingkat partisipasi politik lebih tinggi daripada tingkat pelembagaan proses politik, artinya pengakuan aturan main yang meng-

ikat, akibatnya adalah ketidakstabilan politik dan timbulnya masyarakat pre-torian, dengan militer sebagai elite pembangunan mengambil alih kekuasaan politik.

Teori modernisasi membuang gagasan partisipasi—walaupun hal ini terbatas hanya pada aspek formal—dan lebih bertitik berat pada stabilitas dan pertumbuhan. Kelanjutan dari pertentangan antara pertumbuhan atau demokrasi di negara berkembang adalah penghancuran lembaga-lembaga partisipasi formal dan informal, langsung dan tidak langsung, serta usaha untuk menghapus kembali mobilisasi sosial. Politik ini mengambil bentuknya yang sangat represif jika penduduk yang selama ini tidak mendapatkan hak istimewa tidak puas lagi terhadap partisipasi politik dalam pengertian formal, sesuai dengan pengertian menyeluruh mengenai partisipasi menuntut diadakannya perubahan dalam sistem kekuasaan dan pemerataan sosial. Mengedepankan masalah kekuasaan dan memberikan jawaban baru—merupakan persyaratan yang tidak dapat ditawarkan lagi untuk partisipasi yang sebenarnya dari massa penduduk—, di sederet negara berkembang yang relatif memiliki sistem kelembagaan pluralistis-liberal (seperti Cile, Uruguay) telah dibayar dengan hilangnya kebebasan dasar demokrasi. Keterbukaan partisipasi jangan diharapkan dari rezim semacam itu, yang lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi dalam rangka model neoliberal (*Chicago School*). Persyaratan untuk implementasi model pembangunan yang vulgar semacam itu adalah mematikan setiap usaha partisipasi. Jika par-

tisipasi masyarakat yang melewati bentuk demokrasi etalase 'diizinkan, model pembangunan semacam itu tidak mempunyai kesempatan untuk hidup.

Akan tetapi, tugas gagasan demokrasi Barat sama sekali tidak identik dengan penolakan umum terhadap partisipasi. Tuntutan politik pembangunan dan tuntutan partisipasi kemungkinan dapat lebih baik dilaksanakan di dalam sistem satu partai daripada di dalam sistem multipartai. Pengalaman Afrika sedikitnya menunjukkan hal ini, tetapi akan hilang partisipasinya bagi yang mencoba mobilisasi politik di lapisan paling bawah.

Di dalam perdebatan strategi pembangunan yang baru, *self-reliance* dan kebutuhan dasar dengan penekannya pada usaha-usaha sendiri dan percaya pada kekuatan sendiri, kesempatan kerja, teknologi padat modal, pembangunan pedesaan, dll., telah membentuk suatu titik tolak baru untuk masalah partisipasi, sejauh strategi ini sesuai dengan dunia kehidupan dan dunia kerja manusia secara langsung. Di sini dapat timbul motivasi dan bentuk partisipasi baru serta dalam pengertian partisipasi yang luas.

Pertimbangan pragmatis memerlukan partisipasi yang akan meringankan perencanaan dan pelaksanaan langkah-langkah pembangunan, dan dampak-dampak yang menghasilkan efek belajar, pembangunan masyarakat dari bawah ke atas dapat menciptakan perspektif baru partisipasi sebagai alat dan tujuan pembangunan.

Kepustakaan: D. Berg-Schlosser (ed.), *Die politischen Probleme der Dritten Welt*, Hamburg

1972; R. Löwenthal, "Staatsfunktionen und Staatsform in den Entwicklungsländern", dlm.: ibid (ed.), *Die Demokratie im Wandel der Gesellschaft*, Berlin 1873, hlm. 180 dst.; I. Adelman/C.T. Morris, "Die Messung institutioneller Merkmale von Nationen. Methodologische Betrachtungen", dlm.: *HDW I*, 1, Hamburg 1974, hlm. 286 dst.; F. Nuscheler/K. Ziemer, *Politische Organisation und Repräsentation in Afrika*, 2 jild, Berlin/New York 1978; M.A. Seligson/J.A. Booth, *Political Participation in Latin America, Politics and the Poor*, 2 jild, New York 1979; M. Bau, *Politische Partizipation und Entwicklung*, Heidelberg 1982; D. Nohlen, "Regimewechsel in Lateinamerika? Überlegungen zur Demokratisierung autoritärer Regime", dlm.: K. Lindenberg (ed.), *Lateinamerika, Herrschaft, Gewalt und internationale Abhängigkeit*, Bonn 1982, hlm. 63 dst.; D. Nohlen/F. Nuscheler, "Was heisst Entwicklung", dlm.: *HDW II*, 1, Hamburg 1982, hlm. 48 dst.; D. Nohlen, "Mehr Demokratie in der Dritten Welt?", dlm.: *APuZ* 25-26, 1988, hlm. 3. **dn**
Pasar Bersama Amerika Tengah
→ **MCCA**.

Pasar Bersama Karibia Timur → **ECCM**.

Pasar Bersama Negara-Negara Afrika Barat → **ECOWAS**.

pasukan PBB → **UNF**.

patrimonialisme "Bentuk kekuasaan yang landasan keabsahannya adalah loyalitas tradisional dan hasil material Dalam pusat sistem politik berdiri seorang penguasa yang mengendalikan semua keputusan politik melalui jaringan hubungan pribadi. Politikus yang memimpin dan pejabat secara langsung dan tidak langsung bergantung pada pribadi sang penguasa" (P. Pawelka) Karena sikap masing-masing kekuasaan berperan sangat besar, hubungan pribadi ke elite politik dan sistem klien di masing-masing bidang (birokrasi negara, sektor ekonomi negara) berubah sesuai dengan tokoh yang ber-

kuasa. Setiap kelompok elite saling bersaing untuk menarik perhatian sang penguasa yang kemampuannya mempertahankan keseimbangan kekuasaan (artinya tidak sangat menguatkan kelompok tertentu) merupakan faktor stabilitas penting dari sistem kekuasaan patrimonial (→ rezim otoriter).

Kepustakaan: P. Pawelka, *Herrschaft und Entwicklung im Nahen Osten: Ägypten*, Heidelberg 1985.

dn

PBB Persatuan Bangsa-Bangsa, organisasi ini didirikan 24 Oktober 1945 di San Fransisco dalam sebuah konferensi negara-negara pemenang Perang Dunia II. Negara pendiri adalah 49 negara berdaulat dan 2 daerah yang tergantung. PBB berkembang menjadi organisasi dunia dengan tuntutan yang universal, makin banyak negara yang masuk menjadi anggota, terutama (setelah dekolonisasi) negara-negara Afro-Asia. Jumlah anggota negara berkembang: tahun 1945: 29, tahun 1950: 36, tahun 1960: 64, tahun 1970: 89, tahun 1975: 103, tahun 1982: 115, dan tahun 1988: 117. Dengan demikian, negara berkembang merupakan mayoritas yang sangat besar (tahun 1982: 157; tahun 1988: 159). Perubahan komposisi keanggotaan ini berdampak besar atas struktur PBB (hubungan mayoritas yang baru, pendirian organ baru). Arti organ dan tema yang mereka olah juga telah sangat berubah sejak jumlah negara berkembang menjadi sangat banyak. Hal yang tidak berubah adalah Piagam PBB 26 Juni 1945 yang mengatur komposisi dan fungsi 6 organ utama PBB sebagai berikut.

1. Sidang Umum (SU), terdiri atas negara-negara anggota, bersidang se-

tiap tahun di pusat kedudukan PBB di New York. SU memutuskan mengenai komposisi organ utama lainnya, melakukan pengawasan terhadap anggaran dan administrasi PBB, bisa mengemukakan semua pertanyaan dan masalah yang berada dalam kerangka Piagam atau yang bersangkutan dengan wewenang dan fungsi setiap organ lain serta mengarahkan saran yang sesuai ke anggota PBB, Dewan Keamanan, atau keduanya; ECOSOC dan Dewan Peralihan berada di bawah pengawasan SU. 2. Dewan Keamanan (DK), terdiri atas 5 anggota tetap (Republik Rakyat Cina, Perancis, Inggris, Uni Soviet, AS) dan 10 anggota tidak tetap yang dipilih oleh SU dari antara anggota-anggotanya untuk masa 2 tahun. 3. ECOSOC (Dewan Ekonomi dan Sosial). 4. Dewan Peralihan, terdiri atas 5 anggota tetap SU, menangani masalah dekolonisasi. 5. Mahkamah Internasional dengan kedudukan di Den Haag. 6. Sekretariat dengan Sekretaris Jenderal sebagai pejabat administrasi tertinggi PBB yang juga melakukan fungsi politik terhadap organ utama lainnya, terutama SU dan DK. Sekretaris Jenderal dipilih oleh DK atas usul SU untuk masa jabatan 5 tahun. Dalam sistem PBB terdapat komisi-komisi yang dapat didirikan oleh SU dan DK (terdiri atas 7 komisi); komisi yang dapat didirikan oleh ECOSOC (5 komisi ekonomi regional); organ khusus yang dibentuk SU, a.l.a. UNCTAD, UNCDF, UNDP, UNEP, UNHCR, UNICEF, UNIDO, UNITAR; organisasi-organisasi khusus yang didirikan karena perjanjian antarnegara

PBB

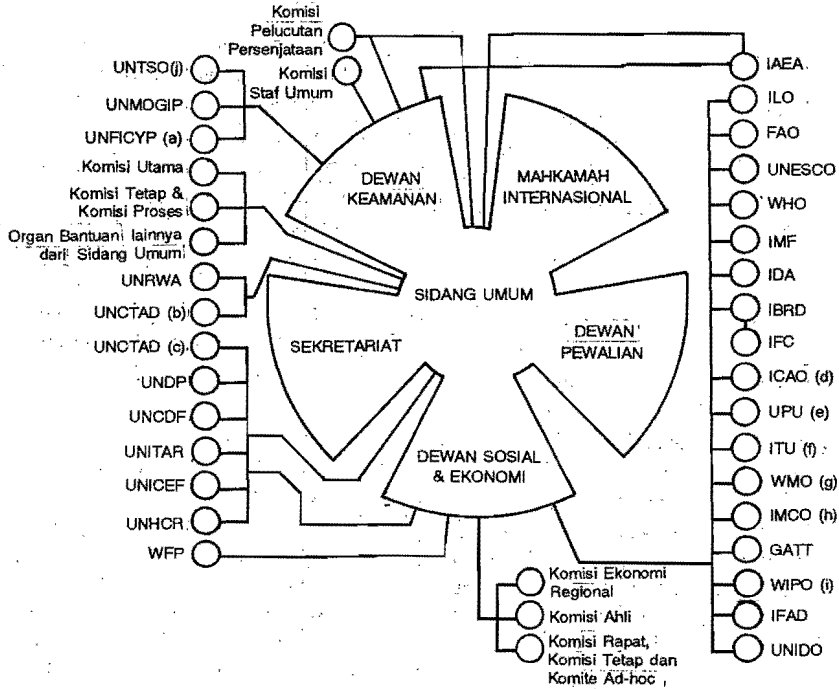
di bidang ekonomi, sosial, kultur, pendidikan, dan kesehatan serta dihubungkan dengan perjanjian khusus ke PBB. Sekarang ada 14 organisasi khusus: FAO, ILO, Bank Dunia, IFC, IDA, IMF, UNESCO, dan WHO, sedangkan IAEA dan GATT tidak termasuk organisasi

khusus dan mempunyai posisi khusus.

Publikasi PBB dapat diperoleh dari: UNO (*United Nations Organization*) - Palais des Nations, 1211 Genf 10, Swiss.

Kepustakaan: K. Hüfner/J. Naumann, *Das System der Vereinten Nationen*, Düsseldorf 1974; P. Pawelka, *Vereinte Nationen und strukturelle Gewalt*, München 1974; F.N. Strotmann, *Third World Group Formation in the United Nations*,

Gambar 7: Organisasi Antarneegara



- a Pasukan PBB untuk menjaga perdamaian di Siprus (*United Nations Force in Cyprus*)
- b Konferensi PBB untuk Perdagangan dan Pembangunan
- c Dewan Perdagangan Dunia dan Dewan Pembangunan dari UNCTAD
- d Organisasi Penerbangan Sipil Internasional
- e Persatuan Pos Dunia
- f Uni Telekomunikasi Dunia
- g Organisasi Dunia untuk Meteorologi
- h Organisasi Penasihat Transportasi Laut Antarneegara
- i Organisasi Dunia untuk Hak Cipta
- j Organisasi PBB untuk Mengawasi Gencatan Senjata di Timur Tengah

Sumber: BMZ, Politik der Partner, Bonn 1981, hlm. 108

Amsterdam 1977; E. Luard, *International Agencies. The Emerging Framework of Interdependence*, London 1977.

dn
PCCM (*Permanent Consultative Committee of the Maghreb*) Komite Konsultatif Tetap untuk Magribi, kedudukan di Tunis; organ tertinggi adalah Konferensi Menteri Ekonomi. Tujuan pokok: koordinasi sistem transportasi, harmonisasi politik ekspor, dan regulasi arus tenaga kerja. Pembangunan sebuah Pasar Bersama Afrika Utara tahun 1967, kurang diikuti oleh langkah-langkah konkret. Uni Arab-Magribi yang didirikan tahun 1989 a.l. mempunyai tujuan-tujuan seperti PCCM.

fn
PDB Produk Domestik Bruto → pendapatan nasional.

Peace Corps → relawan pembangunan.

pedagogi pembebasan/teori pedagogi di Dunia Ketiga Teori pedagogi dan ilmu sosial dari negara-negara industri Barat modern yang berteknik maju tidak dapat diambil alih begitu saja tanpa kritik oleh para pedagog Dunia Ketiga.

Meskipun ada masalah dan standar metodologi serta metode yang serupa dari penelitian pedagog yang saling mendekati, tetapi untuk teori-teori pedagog di negara berkembang ada tugas-tugas khusus. Prioritas utama adalah membahas identitas kultural dengan persyaratan perubahan sosial yang permanen, terbentuk dari nilai-nilai tradisional dan modern yang saling menumpuk. Teori pedagogi paling berpengaruh di Dunia Ketiga dimengerti sebagai pedagogi pembebasan, meskipun teori-teori ini spesifik menurut masalah dan daerahnya, berasal dari seorang pengacara

dan pedagog Brasilia, Paulo Freire (lahir tahun 1921); pendeta Ivan Illich (lahir tahun 1926) yang lama berpengaruh di Meksiko; Presiden Senegal, penyair, dan filsuf, Leopold S. Senghor (lahir tahun 1906); Presiden Tanzania dan mantan guru, Julius K. Nyerere (lahir tahun 1922); serta pejuang kemerdekaan India dan beragama Hindu, Mohandas K. (diberi nama Mahatma, "jiwa besar") Gandhi (1869–1948). Dampak pedagogi masing-masing pribadi ini berkaitan dengan tindakan politik yang luas.

Kampanye pemberantasan buta aksara yang dilakukan Paulo Freire di daerah kumuh dan pemukiman kaum buruh di Brasilia (1961–1964 masa pemerintahan Goulart) diarahkan menentang setiap bentuk domestifikasi, penaklukan dalam jiwa penduduk yang tertindas. Ia aktif mengkritik *educacao bancaria* yang hanya menjiwai kekuasaan asing dan menggantikannya dengan model *educacao problematizadora* yang dibuat sebagai alternatif yang diharapkan berdampak penyadaran (*consientizacao*) terhadap hubungan kekuasaan. Penemuan bahan pelajaran, yaitu kata-kata generatif dan tema-tema generatif (kata-kata kunci dan pengalaman-pengalaman dasar yang mencakup pengalaman si pelajar) dipakai untuk menyadarkan situasi kehidupan si pelajar dan pengalamannya dari situasi ini. Sebagai metode aksi kultural dalam tujuan pembebasan, sejak mula tidak dipakai setiap bentuk agitasi yang menyampaikan ideologi atau invasi kultural karena humanisasi yang diinginkan secara konsekuen sesuai dengan bentuk-bentuk

pendidikan yang diarahkan ke dialog dan swadaya. Setelah Freire membangun hampir 20.000 lingkaran budaya, di sana yang buta aksara tidak hanya dapat membaca dan menulis dalam waktu singkat, melainkan juga mendapatkan sebuah kesadaran diri baru. Ia diusir dari Brasilia setelah kudeta militer tahun 1964, sejak tahun 1973 tidak diinginkan keberadaannya di Cile. Lalu, ia pergi a.l. ke Guinea-Bissau. Pedagogi Freire mempunyai pengaruh besar terhadap berbagai pendekatan pedagogi dan pelayanan sosial di negara-negara industri Barat.

Tesis provokatif dari Ivan Illich juga mengenai perlunya masyarakat tidak sekolah, merupakan pencerminan dari humanisme radikal. Menurutnya, pendidikan yang murni berorientasi sekolah tidak berguna karena tidak menciptakan kesempatan yang sama seperti yang diproklamlirkan, melainkan lebih membesarkan kesenjangan sosial antara mayoritas yang tersisih dengan kelompok elite yang dilegitimasi melalui pendidikan sekolah, terutama di Dunia Ketiga. Sekolah tidak hanya meluluskan manusia, melainkan juga mendegradasi mereka sehingga juga menunjang bentuk-bentuk politik diskriminasi. Illich (1960-1975 yang juga menjadi pimpinan *Centro Intercultural de Documentacion* di Cuernavaca yang terkenal di seluruh dunia) dalam teori pedagoginya memperlihatkan kemungkinan belajar dalam sarana pendidikan luar sekolah, seperti proses produksi, pendidikan orang dewasa, dan proses belajar informal. Lembaga ini juga harus mengalami perubahan

radikal agar sesuai dengan keinginan pendidikannya.

Jalan lain diajukan oleh teori pedagogi L. Senghor. Ia secara kritis membahas pendidikan tradisional yang dialaminya sendiri dan pengalamannya semasa kolonial Perancis sebagai anggota parlemen dalam Rapat Nasional Perancis (1945-1948), serta mengenal baik sektor pendidikan. Di satu pihak ia berusaha berasimilasi dengan kultur Perancis, tetapi di lain pihak mencari jalan sendiri kultur Afrika dan sivilisasi. Banyaannya mengenai pendidikan mendekati arti filsafat-sosial dari pendidikan di Eropa. Pendidikan yang dibuat sadar tidak dikonsepsikan sebagai perubahan sistem yang radikal dengan berorientasi ke konflik dan antagonisme, melainkan ditujukan sebagai pengayaan perorangan yang makin maju. Proses ini tidak diharapkan menjadi individualis begitu saja, melainkan pendidikan sebagai sumbangan pembangunan sebuah sivilisasi universal, yang menggambarkan prinsip-prinsip kehidupan bersama manusia. Tuntutan Senghor akan pendidikan yang permanen bertujuan keterbukaan manusia terus-menerus untuk perkembangan kultur dan kemanusiaan.

J.K. Nyerere pada pembangunan sosialisme yang disesuaikan dengan situasi Tanzania, bertopang terutama pada pendidikan dan perluasan sistem pendidikan. Tujuan sosialisme *ujamaa*, misalnya menghapuskan ketergantungan sebelah pihak dari luar negeri melalui mobilisasi sumber daya lokal, meningkatkan partisipasi penduduk pada semua keputusan po-

litik, menghapuskan pemilikan pribadi atas alat produksi, mengembangkan sektor pertanian, mendemokratisasikan ekonomi dan masyarakat serta menghapus ketidakadilan sosial. Realisasi strategi *self-reliance* ini terkait pada penghapusan terus-menerus buta aksara. Oleh karena itu, Nyerere juga menekankan pentingnya membangun pendidikan elementer dan memberikan pendidikan yang berfungsi meningkatkan solidaritas nasional penduduk di atas batas kesukuan. Isi pelajaran di sekolah atau di universitas berorientasi dekat dengan kenyataan dan permasalahan yang berguna bagi pembangunan negara. Pendidikan baginya merupakan proses seumur hidup yang juga berlangsung informal sebagai pertikaian yang simetris antargenerasi di pedesaan.

Dampak pedagogi Gandhi berlandaskan idealisme politiknya yang tidak dapat ditundukkan, yang memungkinkannya tidak hanya mempropagandakan metode perjuangan tanpa kekerasan, melainkan juga menjadikannya sebagai contoh. Otoritas moralisnya didasari oleh pantang diri, kesinambungan, dan disiplin melalui kesabaran bangsa India, naik menjadi kekuatan yang tidak terukur besarnya, merupakan sebuah alasan yang memaksa Inggris untuk menyerahkan kekuasaannya atas India. Metode perjuangan tanpa kekerasan berlandaskan terutama tidak ikut serta pada lembaga Inggris dan pembangkangan sipil. Gandhi, sosok pribadi yang sangat religius dan lihai berpolitik, sangat terkait erat dengan pemikiran hinduisme. Namun, ia menginginkan

penghapusan sistem kasta tradisional dan peningkatan standar kehidupan lapisan bawah. Dalam pertikaian antara Hindu dan Islam, ia menjadi korban kekerasan.

Teori dan praktek, aksi dan refleksi, bagi para wakil suatu pedagogi pembebasan berkaitan erat. Oleh karena itu, ajaran-ajaran mereka tidak hanya sebagai teori pedagogi, melainkan juga ada dalam cerminan spesifik dalam gerakan pendidikan rakyat yang dilakukan besar-besaran.

Kepustakaan: M. Gandhi, *Die Geschichte meiner Experimente mit der Wahrheit*, Wien 1960; J.K. Nyerere, *Freedom and Unity*, Nairobi/Dar-es-Salaam 1965; H. Rau, *Mahatma Gandhi in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten*, Reinbek 1970; I. Illich, *Entschulung der Gesellschaft*, Reinbek 1972; *ibid*, *Schulen helfen nicht*, Reinbek 1972; P. Freire, *Pädagogik der Unterdrückten. Bildung als Praxis der Freiheit*, Reinbek 1973; I. Illich *et al*, *After Deschooling, What?*, New York 1973; F. Axt, *Leopold Sedar Senghor und die Erziehungspolitik der Republik Senegal*, Frankfurt 1979; R. Bendit/A. Heimbucher, *Von Paulo Freire lernen*, München 1979; E.A. Yoloye, "Paradigms of Educational Research in Africa", dlm.: Y. Flechsig, *Educational Research for Development*, Bonn, D.S.E. 1980, hlm. 21-40.

rti
pelarian dari pedesaan Merupakan perpindahan penduduk di negara berkembang, disebabkan oleh proses urbanisasi yang meningkat makin pesat, tetapi jarang menyebabkan kolonisasi daerah-daerah yang belum terbuka. Motif untuk pelarian dari pedesaan adalah situasi kehidupan yang sangat buruk di pedesaan akibat berbagai hal: struktur lama pemilikan akan tanah dan air, produktivitas yang rendah, kurangnya penyerapan (→ pengangguran) tenaga kerja yang ada, dan pengabaian sektor pertanian dan sangat kronis mengabaikan pen-

litik, menghapuskan pemilikan pribadi atas alat produksi, mengembangkan sektor pertanian, mendemokratisasikan ekonomi dan masyarakat serta menghapus ketidakadilan sosial. Realisasi strategi **self-reliance* ini terkait pada penghapusan terus-menerus buta aksara. Oleh karena itu, Nyerere juga menekankan pentingnya membangun pendidikan elementer dan memberikan pendidikan yang berfungsi meningkatkan solidaritas nasional penduduk-di atas batas kesukuan. Isi pelajaran di sekolah atau di universitas berorientasi dekat dengan kenyataan dan permasalahan yang berguna bagi pembangunan negara. Pendidikan baginya merupakan proses seumur hidup yang juga berlangsung informal sebagai pertikaian yang simetris antargenerasi di pedesaan.

Dampak pedagogi Gandhi berlandaskan idealisme politiknya yang tidak dapat ditundukkan, yang memungkinkannya tidak hanya mempropagandakan metode perjuangan tanpa kekerasan, melainkan juga menjadikannya sebagai contoh. Otoritas moralisnya didasari oleh pantang diri, kesinambungan, dan disiplin melalui kesabaran bangsa India, naik menjadi kekuatan yang tidak terukur besarnya, merupakan sebuah alasan yang memaksa Inggris untuk menyerahkan kekuasaannya atas India. Metode perjuangan tanpa kekerasan berlandaskan terutama tidak ikut serta pada lembaga Inggris dan pembangkangan sipil. Gandhi, sosok pribadi yang sangat religius dan lihai berpolitik, sangat terkait erat dengan pemikiran hinduisme. Namun, ia menginginkan

penghapusan sistem kasta tradisional dan peningkatan standar kehidupan lapisan bawah. Dalam pertikaian antara Hindu dan Islam, ia menjadi korban kekerasan.

Teori dan praktek, aksi dan refleksi, bagi para wakil suatu pedagogi pembebasan berkaitan erat. Oleh karena itu, ajaran-ajaran mereka tidak hanya sebagai teori pedagogi, melainkan juga ada dalam cerminan spesifik dalam gerakan pendidikan rakyat yang dilakukan besar-besaran.

Kepustakaan: M. Gandhi, *Die Geschichte meiner Experimente mit der Wahrheit*, Wien 1960; J.K. Nyerere, *Freedom and Unity*, Nairobi/Dar-es-Salaam 1965; H. Rau, *Mahatma Gandhi in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten*, Reinbek 1970; I. Illich, *Entschulung der Gesellschaft*, Reinbek 1972; *ibid*, *Schulen helfen nicht*, Reinbek 1972; P. Freire, *Pädagogik der Unterdrückten. Bildung als Praxis der Freiheit*, Reinbek 1973; I. Illich *et al*, *After Deschooling, What?*, New York 1973; F. Axt, *Leopold Sedar Senghor und die Erziehungspolitik der Republik Senegal*, Frankfurt 1979; R. Bendit/A. Heimbucher, *Von Paulo Freire lernen*, München 1979; E.A. Yoloye, "Paradigms of Educational Research in Africa", dlm.: Y. Flechsig, *Educational Research for Development*, Bonn, D.S.E. 1980, hlm. 21-40.

rti
pelarian dari pedesaan Merupakan perpindahan penduduk di negara berkembang, disebabkan oleh proses urbanisasi yang meningkat makin pesat, tetapi jarang menyebabkan kolonialisasi daerah-daerah yang belum terbuka. Motif untuk pelarian dari pedesaan adalah situasi kehidupan yang sangat buruk di pedesaan akibat berbagai hal: struktur lama pemilikan akan tanah dan air, produktivitas yang rendah, kurangnya penyerapan (→ pengangguran) tenaga kerja yang ada, dan pengabaian sektor pertanian dan sangat kronis mengabaikan pen-

didukung oleh penduduk kota (dalam hal pendapatan, keadaan kesehatan, pendidikan, dsb.). Pelarian meninggalkan desa biasanya berkaitan dengan harapan akan kerja dan upah yang lebih baik di kota. Akibatnya, mereka hidup dan bekerja secara serabutan di daerah-daerah kumuh kota. Marjinalitas perkotaan tetap dianggap sebagai suatu perbaikan dibandingkan situasi di pedesaan yang penduduknya tumbuh terus meskipun berlangsung migrasi. Pembangunan pedesaan, reformasi pertanian, dan strategi kebutuhan dasar paling cocok untuk menangani permasalahan dari akarnya dan mengurangi pelarian meninggalkan desa.

dan pelayanan kesehatan Di negara berkembang terdapat pluralisme sistem pengadaan kesehatan. Setiap kultur dan sivilisasi, termasuk Barat, mengembangkan sistem kesehatannya sendiri berlandaskan bayangan masing-masing mengenai kesehatan. Penelitian sistem kesehatan dan antropologi kesehatan (*etnomedicine*) yang bisa diperbandingan antarkultur, menangani masalah-masalah ini secara ilmiah. Secara umum sistem perawatan si sakit berciri ilmu pengetahuan Barat disebut sebagai pelayanan kesehatan, tetapi ini terutama merupakan kedokteran yang bersifat kuratif dan kurang tindakan-tindakan mempertahankan kesehatan dan pencegahan. Di negara berkembang, sesuai dengan masing-masing situasi sosio-ekonominya, terdapat dualisme dalam tingkat pengadaan dengan kedokteran modern. Sekitar 70%–80% penduduk tidak memiliki atau sangat terbatas akses pengadaan kesehatan

yang memadai. Pelayanan kesehatan negara biasanya terorganisasi dalam sebuah piramida dengan sedikit rumah sakit khusus dan referensi di puncaknya, di tingkat menengah adalah rumah sakit di tingkat daerah dan sebuah basis luas sentra-sentra kesehatan dan pos-pos pertolongan pertama. Dua pertiga anggaran kesehatan negara masuk ke rumah sakit khusus yang sebenarnya merupakan 10%–20% kebutuhan, sementara sepertiga anggaran harus mencukupi 80% kebutuhan di periferi. Dalam sepuluh tahun terakhir basis sektor awam diperluas dengan program-program untuk pekerja kesehatan desa dan bidan awam yang diakui secara resmi bersaing dengan bidan tradisional (→ *Primary Health Care*). Selain itu, sesuai dengan masing-masing situasi ada sektor pengadaan kesehatan bersifat sosial, kebanyakan dilakukan pihak gereja (di sejumlah negara meliputi lebih dari 50% pengadaan kesehatan) dan sebuah sektor pengadaan kesehatan untuk elite kota, kelompok sasaran swasta atau tertentu yang berada di industri, pertambangan, agroindustri atau militer, dsb., sering lebih baik daripada yang dibiayai negara. Anggaran kesehatan negara biasanya meliputi 4%–7% anggaran negara. Sektor personal menggunakan 60% darinya. Krisis ekonomi di negara berkembang mengenai pelayanan kesehatan yang secara umum sudah mundur. Ada kesulitan-kesulitan pengadaan dalam bidang teknis, terutama obat-obatan.

hjd pelucutan persenjataan dan pembangunan Sampai sekarang telah berlangsung tiga kali konferensi PBB

(1978, 1982, 1987) mengenai hubungan antara persenjataan dan keterbelakangan dengan pengurangan persenjataan dan pembangunan. Dasarnya adalah gagasan bahwa sumber daya dana yang tidak terpakai dengan terjadinya pelucutan persenjataan dapat digunakan untuk tugas-tugas pembangunan. Negara berkembang menuntut negara adidaya dan sekutusekutunya untuk mengurangi anggaran persenjataan mereka yang sangat besar melalui persetujuan pengurangan persenjataan internasional yang terarah untuk memungkinkan alih sumber daya dana. Dari tiga konferensi yang berlangsung untuk masalah itu, tidak satu pun menelurkan hasil-hasil yang substansial. Negara-negara industri memang tidak menyangkal adanya ancaman mendasar yang timbul dari kedua bidang permasalahan tersebut bagi umat manusia, tetapi sejak semula mereka tidak bersedia untuk mengakui kedua hal tersebut sebagai masalah-masalah yang saling berkaitan (dengan alasan ini AS memboikot konferensi tahun 1987), atau mereka menutup telinga terhadap tuntutan negara berkembang (misalnya pembentukan sebuah dana pembangunan yang berasal dari hasil pengurangan persenjataan atau dari pajak persenjataan), dengan argumentasi bahwa mereka hanya akan menggunakan anggaran untuk senjata yang benar-benar diperlukan (misalnya Uni Soviet). Negara-negara industri Barat juga menuding pengeluaran negara berkembang untuk persenjataan dan mencoba menguraikan kaitan tersebut sebagai masalah internal Dunia Ketiga. → perang di Dunia Ketiga

Kepustakaan: H. Wulf, "Die VN-Konferenz 'Abrüstung und Entwicklung'", dlm.: *Interdependenz*, No. 1/1988 (juga dicetak dlm. *Handbuch für Internationale Zusammenarbeit*, Baden-Baden, III A 03 20, 253 edisi Juli 1988).

bt
pembagian kerja internasional Dimengerti sebagai pembagian fungsi dalam proses memanfaatkan dan mengakumulasi modal dalam ukuran dunia di berbagai negara dan kelompok negara. Pembagian kerja internasional bukan merupakan sesuatu yang bersifat statistik, melainkan merupakan sebuah proses. Secara historis dapat dibedakan berbagai tipe pembagian kerja internasional. Pembagian kerja internasional klasik selama beberapa abad merupakan pengelompokan negara berdasarkan pasokan bahan mentah dan produksi modal serta barang konsumsi; identik dengan pembagian dunia menjadi negara berkembang dan negara industri. Negara berkembang saat ini sering dipaksa turut dalam pembagian kerja internasional melalui kolonialisme dan imperialisme (misalnya penghancuran industri tekstil India). Negara industri hanya membolehkan adanya industri pengolahan di negara berkembang.

Pembagian kerja internasional klasik berubah ketika terjadi krisis ekonomi dunia tahun 1929 dan industrialisasi di berbagai negara berkembang menurut model substitusi impor. Di negara berkembang muncul industri barang konsumsi (sebagian dengan modal asing)-dirangsang keinginan nasionalisasi negara berkembang di sektor pertanian-yang makin berpusat pada sektor industri, teru-

tama untuk pengadaan kebutuhan pasar dalam negeri.

Terjadinya pembagian kerja internasional yang baru ditentukan oleh kondisi pemanfaatan dan akumulasi modal: tersedianya tenaga kerja murah di negara berkembang, pemilahan proses produksi barang, kemajuan dalam teknologi transportasi dan komunikasi, dsb. Dengan demikian pemindahan tempat produksi barang industri ekspor ke negara berkembang membawa keuntungan di negara berkembang. Beberapa negara berkembang bereaksi terhadap perubahan struktural ekonomi dunia dengan menyesuaikan strategi pembangunannya (menyediakan zone produksi bebas, rangsangan investasi, menegatkan pengawasan politik dan sosial atas tenaga kerja lokal, stabilisasi sistem politik [yang represif]), menggantikan pembagian kerja internasional klasik dengan makin banyak memindahkan komponen-komponen produksi industri untuk pasar dunia ke negara berkembang.

Pro: tujuan politik pembangunan industrialisasi berorientasi ekspor di negara berkembang dalam konsep pembagian kerja internasional baru dijabarkan oleh UNIDO: a. menciptakan lapangan kerja sehingga mengurangi pengangguran di negara berkembang; b. memperbaiki penerimaan devisa, menyeimbangkan neraca pembayaran; c. mendidik pekerja di negara berkembang dan membuka akses ke teknik industri modern.

Kontra: a. efek kesempatan kerja yang dilematis: menciptakan struktur kesempatan kerja yang timpang, mengabaikan cabang-cabang produk-

si untuk pasar dalam negeri, menciptakan ketidakstabilan permintaan akan kesempatan kerja dan bergantung pada pasar dunia; b. penerimaan devisa bergantung pada kalkulasi intern perusahaan dan pengawasan pusat; mereka menghadapi beban devisa yang berat terutama sekali pada pembangunan dan operasionalisasi zone-zone produksi bebas (infrastruktur); c. produksi yang berorientasi pasar tetap terpisah dari ekonomi dalam negeri (nasional), dan hampir tidak memperlihatkan *linkage-effects*; d. negara berkembang bersaing menarik pemindahan industri dengan mengorbankan tenaga kerja lokal, yang karena murah merupakan *ultima ratio* pembagian kerja internasional baru; e. pembagian kerja internasional baru menguatkan ketergantungan dan mendorong ke arah pembangunan yang tidak seimbang.

Pembagian kerja internasional negara-negara sosialis dengan berbagai tingkat pembangunan berusaha mengatasi mekanisme tradisional pembagian kerja internasional klasik (lihat hubungan Uni Soviet ke Kuba); perubahan ini digantikan oleh model ketergantungan yang baru.

Kepustakaan: F. Fröbel et al, *Die neue internationale Arbeitsteilung*, Hamburg 1977; A. Schmidt (ed.), *Internationale Arbeitsteilung und ungleicher Tausch*, Frankfurt 1980; F. Fröbel/J. Heinrichs/O. Kreye, *Umbruch in der Weltwirtschaft - Die globale Strategie: Verbilligung der Arbeitskraft/Flexibilisierung der Arbeit/Neue Technologien*, Hamburg 1986.

pembangunan/teori-teori pembangunan Pengertian pembangunan tidak dapat didefinisikan secara umum, tidak bebas nilai, dan tidak ditentukan sebelumnya, tetapi bergantung pada ruang dan waktu, terutama norma-

norma yang dimiliki individu atau kolektif. Selanjutnya pembangunan adalah pengertian normatif, termasuk gagasan mengenai arah perubahan masyarakat yang dikehendaki, teori mengenai penyebab keterbelakangan, pernyataan mengenai kelompok penunjang sosial dan model transformasi sosio-ekonomi, keputusan-keputusan mengenai instrumen untuk melaksanakan dan mempertahankannya, dll. Selain keinginan-keinginan politik (misalnya pembangunan yang bersifat kapitalistis atau sosialis), juga adanya perspektif masing-masing disiplin ilmu pengetahuan menimbulkan perbedaan pandangan mengenai masalah pembangunan. Selain itu, pengertian pembangunan tunduk pada perubahan historis dan memasukkan pengalaman yang berasal dari proses pembangunan di negara berkembang, terutama sejak keluar pernyataan bahwa pembangunan di Dunia Ketiga merupakan tugas internasional. Sejak itu pendekatan-pendekatan kuantitatif tertentu yang diformulasikan secara internasional (→ dasawarsa pembangunan) dalam kritik terhadap strategi pembangunan yang dipilih, dijadikan ukuran kesesuaian pengertian pembangunan yang mendasarinya. Kegagalan politik pembangunan turut mendorong perkembangan lanjut pengertian pembangunan.

Dari teori-teori pembangunan lama, a.l. berasal dari ilmu ekonomi, pertumbuhan ekonomi menjadi titik berat pengertian pembangunan dan seluruh pertimbangan strategi pembangunan. Rumus "Pembangunan = Pertumbuhan" (→ teori dan strategi

pertumbuhan) yang dimasukkan dalam politik pembangunan, terdapat dalam laporan PBB tahun 1951. Menyamakan pertumbuhan dengan pembangunan, dengan memakai satu-satunya indikator, yaitu pendapatan per kapita sebagai ukuran kemajuan pembangunan, berasal dari gagasan teori dan strategi pertumbuhan sendiri. Jika pertumbuhan ekonomi cukup besar, menurut teori ini, otomatis masalah sosial dan politik dapat terselesaikan. Perubahan struktur menu-rutnya adalah kelanjutan dari pertumbuhan ekonomi. Kecilnya pertumbuhan yang dicapai dan tidak munculnya kemajuan pembangunan sosial yang dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi pada awal tahun '60-an, menyebabkan makin diperluasnya pengertian pembangunan. Komponen-komponen perubahan sosial dimasukkan dalam pengertian pembangunan; definisi pembangunan lalu berbunyi: pertumbuhan dan perubahan. Perubahan menyangkut perubahan di dalam sistem nilai dan perilaku masyarakat (→ perubahan kultur), modernisasi lembaga politik ke arah sistem politik dan administrasi yang lebih berprestasi (→ teori modernisasi), serta investasi di bidang sosial (pangan, kesehatan, pendidikan, dsb.) dan distribusi yang adil (reformasi pertanian, distribusi pendapatan). Selama tahun '60-an pengertian pembangunan dan teori pembangunan diperluas dengan menempatkan keterbelakangan dalam hubungan antara negara industri dan negara berkembang yang diciptakan melalui pasar dunia dan model pembagian kerja internasional (→ teori *dependencia*).

Teori *dependencia* mempertanyakan pendapat yang mengatakan bahwa pembangunan di periferi dapat dimungkinkan meskipun ada ketergantungan pada metropol, dan menyelidiki bentuk-bentuk pembangunan tergantung yang berlangsung di setiap negara. Teori ini juga menekankan bahwa keterbelakangan bukan merupakan suatu stadium yang harus dilalui oleh negara berkembang, melainkan lebih merupakan deformasi struktur dan ekonomi negara berkembang, tidak dapat dibebaskan dari jalan buntu "keterbelakangan yang makin berkembang" tanpa mendapatkan kebebasan, kemandirian nasional dalam masalah produksi, diversifikasi, distribusi, dan konsumsi (A.G. Frank). Pertumbuhan, perubahan, dan kemerdekaan merupakan elemen-elemen definisi pembangunan yang mencoba mengaitkan teori pembangunan modernisasi dan teori *dependencia*.

Suatu pendekatan definisi pembangunan yang ada pada tahun '70-an berangkat dari kebutuhan dasar manusia dengan gagasan pokok aktualisasi diri manusia. Persyaratan psikis dan fisik yang diperlukan untuk itu menjadi inti dari pengertian pembangunan yang multidimensi dan berorientasi pada nilai-nilai sosial dan hasil kualitatif. Sebagai persyaratan struktural dan material yang diperlukan untuk mewujudkan kemungkinan-kemungkinan yang ada dalam diri manusia, D. Seers mengusulkan pangan, pekerjaan, dan keadilan sosial. Pembangunan selanjutnya berarti perbaikan kehidupan massa penduduk, perbaikan bahan pangan, kese-

hatan, kesempatan kerja, tempat tinggal, dsb. Untuk mengukur pembangunan diperlukan banyak indikator. Pertumbuhan ekonomi juga termasuk dalam elemen inti pengertian pembangunan. D. Nohlen/Nuscheler dalam *Handbuch der Dritten Welt* mengangkat aspek-aspek komplementer dan tujuan pembangunan menjadi pengertian pembangunan segi lima: pekerjaan/kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial/perubahan struktur, partisipasi, serta kemerdekaan politik, dan partisipasi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dikaitkan dengan tujuan pembangunan yang menginginkan partisipasi masyarakat dalam keputusan politik dan turut memiliki hasil-hasil dari kemajuan yang telah dicapai.

Hal ini juga menyangkut pertumbuhan yang secara kualitatif lain. Sebaliknya, pembangunan tanpa pertumbuhan adalah tidak masuk akal. Laporan Brandt pertama tahun 1980 menekankan, "Jika kualitas pertumbuhan dan perubahan sosial diabaikan, kita tidak dapat berbicara mengenai pembangunan." Selanjutnya, "Pembangunan tidak hanya mengandung gagasan kemakmuran materi, melainkan juga martabat manusia, keamanan, keadilan, dan kesamaan."

Dari Deklarasi Cocoyoc muncul dorongan-dorongan penting untuk pemikiran pembangunan alternatif yang berorientasi pada konsep-konsep *self-reliance*, *collective self-reliance*, dan berusaha menjalankannya dengan memakai kembali nilai-nilai kultural dan tradisi negara berkembang.

Tahun-tahun terakhir masalah lingkungan (→ ekologi) makin ditempatkan dalam kaitan masalah dan definisi pembangunan. Dengan demikian, perlindungan basis hidup alami sebagai tujuan pembangunan meluaskan definisi pembangunan yang dibuat oleh Nohlen/Nuscheler (1982): perkembangan mandiri tenaga produktif untuk menjamin masyarakat keseluruhan akan pengadaan barang-barang material yang penting untuk hidup, serta barang kultural dan jasa dalam kerangka sebuah tata sosial dan politik yang memberikan anggota-anggota masyarakat persamaan peluang, mengikutsertakan mereka pada keputusan politik, dan membiarkannya ikut menikmati kemakmuran yang dicapai.

Refleksi mengenai apa arti pembangunan, tetap berlangsung dalam diskusi mengenai teori dan strategi pembangunan.

Kepustakaan: D. Seers, "Was wollen wir messen", dlm.: HDW, vol. 1, Hamburg 1974, hlm. 222 dst.; D. Nohlen/F. Nuscheler, "Entwicklungstheorien und Entwicklungsbegriff", dlm.: HDW, vol. 1, Hamburg 1974, hlm. 13 dst.; Brandt-Kommission, *Das Überleben sichern*, Köln 1980; D. Nohlen/F. Nuscheler, "Was heisst Entwicklung", dlm.: HDW II, 1, Hamburg 1982, hlm. 48-72.

dn
pembangunan alternatif Menurut Laporan Dag-Hammarskjöld, pembangunan alternatif (pembangunan berbentuk lain, *another development*) mencakup elemen-elemen: orientasi pada pemenuhan kebutuhan diawali dengan menyingkirkan miskin, *self-reliance*, dan tidak membebani lingkungan. Ketiga elemen tersebut dianggap akan dapat saling berkaitan secara harmonis, saling mengisi, dan saling menguatkan. Namun, hal ini

diragukan. Hal yang belum jelas adalah, apakah pembangunan alternatif juga dimengerti sebagai pembangunan yang sosialis, bagaimana batasannya untuk Dunia Ketiga, atau tidakkah harus lebih diperjuangkan secara global? Pengertian pembangunan alternatif yang sederhana akan merasa cukup dengan salah satu elemen definisi tersebut, yang kurang tepat dibandingkan strategi pemenuhan kebutuhan dasar, *self-reliance*, atau ekologi.

dn
pembangunan kultural → Dasarwarsa Kultur Dunia.

pembangunan otosentris Pembangunan yang mandiri, konsep strategi pembangunan yang semula berasal dari kubu teori *dependencia*. Bertolak dari asumsi bahwa ekonomi negara berkembang adalah ekonomi yang sudah cacat dan tidak mengenal daur ekonomi yang tertutup; strategi pembangunan otosentris menganjurkan pembangunan sebuah ekonomi yang mampu hidup, ditopang oleh sumber daya lokal dan ditandai oleh pengaitan dan penjalinan ekonomi yang menciptakan bentuk terintegrasi. Untuk itu diusulkan langkah-langkah politik ekonomi yang dapat dilakukan sekaligus: a. pembangunan sebuah sektor industri sendiri untuk produksi barang-barang produksi dan barang setengah jadi; b. pembangunan teknologi, terutama teknologi tepat-guna serta pengembangan lanjut dan penyesuaian teknologi-teknologi yang sudah ada; c. peningkatan produktivitas dalam pertanian; d. produksi industri untuk barang konsumsi massa yang sesuai untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. Pemba-

ngunan otosentris dimengerti berorientasi dalam negeri dan mempropagandakan disosiasi dari pasar dunia jika cara lain tidak dapat membangkitkan reorganisasi struktural sebuah ekonomi negara berkembang. Sejak pengalaman dengan NIB terutama di Asia Tenggara, ditinggalkan semua asumsi yang mengatakan bahwa pasar dunia dengan ongkos lebih murah di dalam struktur asimetris hubungan pertukaran antara negara industri dan negara berkembang, akan memperdalam kerusakan struktural ekonomi yang kurang produktif. Sejak itu dianggap pembangunan otosentris dapat dicapai melalui berbagai strategi. Dengan demikian hilang kaitan yang dulu erat antara definisi ini dengan teori *dependencia*. Perubahan definisi ini dapat dilihat dalam tulisan-tulisan D. Senghaas.

Kepustakaan: D. Senghaas, *Weltwirtschaftsordnung und Entwicklungspolitik. Plädoyer für Dissoziation*, Frankfurt 1977; U. Menzel/D. Senghaas, *Europas Entwicklung und die Dritte Welt*, Frankfurt 1986.

dn
pembangunan pedesaan Sejak pertengahan tahun '70-an muncul strategi pembangunan yang ingin kembali ke pertanian (bukan konsentrasi meluas ke industrialisasi) dan berkaitan erat dengan pengolahan konsep kebutuhan dasar. Pembangunan pedesaan diharapkan dapat berdampak pemanfaatan ekonomis faktor produksi tenaga kerja yang berlebih di negara berkembang. Di pedesaan negara berkembang hidup 80% penduduk yang menganggur dan kerja sambilan, dengan rendahnya tingkat urbanisasi di negara berkembang yang berpenduduk banyak: India 22%, Indonesia 19%, dan Bangladesh

19%. Pembangunan pedesaan bertujuan meningkatkan produksi, mengikutsertakan usaha kecil dan terkecil (sektor subsistensi) dalam daur ulang ekonomi, menciptakan pendapatan (pembagian lebih merata) dan daya beli untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Kepustakaan: DIE, *Grundbedürfnisorientierte ländliche Entwicklung*, Berlin 1980; R. Hanisch/R. Tetzlaff (ed.), *Die Überwindung der ländlichen Armut in der Dritten Welt*, Frankfurt 1979; R. Wesel, *Das Konzept der 'Integrierten ländlichen Entwicklung': Neuan-satz oder Rhetorik*, Saarbrücken/Fort Lauderdale 1982.

dn
pembangunan yang tergantung dari luar Dalam teori pembangunan dimengerti sebagai bentuk khusus pembangunan yang gaya pertumbuhannya ditujukan terutama ke luar atau berorientasi ekspor. Ciri-ciri pembangunan yang tergantung adalah: a. struktur produksi: bukan memproduksi barang-barang kebutuhan penduduk, melainkan memproduksi barang-barang keperluan pasar dunia dan disesuaikan dengan kebutuhan negara industri; b. model integrasi sektor-sektor pertumbuhan: bukan memperkuat diri ke dalam, melainkan terintegrasi ke dalam sistem produksi internasional dalam bentuk vertikal (hasil-hasil pertanian, bahan mentah mineral, hasil barang industri setengah jadi); c. asalnya modal dan teknologi: bukan dari dalam, melainkan dari luar, merupakan "dinamika dan stagnasi yang diinduksikan dari luar" (Senghaas); d. pembagian keuntungan: keuntungan dalam jumlah yang sangat sedikit disisakan di negara berkembang, sementara sebagian besar keuntungan dialihkan ke negara industri oleh perusahaan transnasio-

nal; yang tersisa di negara berkembang didistribusikan tidak merata.

Pembangunan yang tergantung merupakan hasil dari hubungan dengan model pembagian kerja internasional. Pengertian pembangunan yang tergantung dalam teori pembangunan memperlihatkan bahwa pertumbuhan (\rightarrow teori dan strategi pertumbuhan) ekonomi tidak sama dengan pembangunan.

dan pemberantasan buta aksara Dengan mengaitkan pertumbuhan penduduk, tingkat penyekolahan dan keberhasilan kampanye antibuta aksara, UNESCO memperlihatkan sebuah penurunan tingkat buta aksara di seluruh dunia pada umur kurang dari 15 tahun sekitar 33% (1970) menjadi 29% (1980), dan sekitar 28% (1985). Masih diragukan apakah penurunan tingkat buta aksara yang diramalkan untuk tahun 1990 (Tahun Aksara Internasional) sebesar 26% dapat dicapai, menjadi dipertanyakan akibat stagnasi atau malah akan terjadi turunnya tingkat penyekolahan, terutama di negara-negara LLDC. Di awal tahun '80-an—di luar sekitar 200 juta buta aksara di Cina yang tidak masuk dalam statistik internasional—sekitar 1 miliar manusia buta aksara. Seseorang digolongkan buta aksara (menurut sebuah definisi UNESCO tahun 1958, dikutip pada Fordham tahun 1985, 16) adalah jika tidak mampu membaca dan menulis suatu komentar pendek mengenai kehidupannya sehari-hari secara dimengerti. Meskipun di negara industri sendiri buta aksara belum dapat dihilangkan sama sekali, tetapi jelas sebagian besar manusia buta aksara hidup di

Dunia Ketiga. Sebagian penduduk pedesaan dan perkotaan yang termarginalisasi, kaum remaja tanpa kemungkinan bersekolah, terutama anak-anak perempuan dan perempuan (di beberapa negara berkembang malah mencapai 80% buta aksara), merupakan kelompok utama dalam buta aksara. Buta aksara merupakan indikator keterbatasan peluang pembangunan dan menghalangi partisipasi aktif pada pembentukan lingkungan sendiri.

Beberapa pakar buta aksara memperingatkan agar jangan mendiskriminasi seseorang yang buta aksara dengan beranggapan buta aksara = bodoh = hina dan menilai rendah bentuk-bentuk komunikasi yang tidak terikat dengan tulisan dalam dunia kehidupan yang tidak mengenal tulisan (Hinzen, 1985).

Kampanye buta aksara yang relatif berhasil di berbagai negara sosialis (Kuba tahun 1960/1961; Vietnam tahun 1945/1946, 1954–1961, 1976–1978; Cina tahun '50-an; Etiopia) memperlihatkan bahwa buta aksara dengan usaha-usaha yang ada dapat disingkirkan hampir dalam dua dasawarsa. Kampanye massa ini dengan eksplisit ciri politik masing-masing doktrin negara dan partai. *World Experimental Literacy Programme* yang dimulai UNESCO tahun 1965 bertujuan pemberantasan buta aksara fungsional yang mengaitkan belajar membaca dan menulis dengan isi pendidikan kejuruan dan sosial. Metode pemberantasan buta aksara yang dibuat Freira tahun '60-an di Brasilia dan Cile, tahun '70-an di Guinea-Bissau, mengaitkan belajar

membaca-menulis dengan penyadaran politik. Kesadaran politik makin tumbuh karena si pelajar belajar masalah-masalah dari dunia kehidupannya sendiri. Pengalaman keberhasilan dan kegagalan (misalnya bubarnya program pemberantasan buta aksara di Somalia, masalah besar dalam kampanye antibuta aksara di India) dibahas dalam organisasi-organisasi yang ikut serta (terutama UNESCO dengan berbagai lembaga seperti *International Institute for Educational Planning* di Paris, *UNESCO Institute for Education* di Hamburg, *International Institute for Adult Literacy Methods* di Teheran, serta *International Council for Adults Education*) dalam trend diskusi (a.l. dapat dibaca dalam Deklarasi Persepolis/Iran tahun 1975, Udaipur/India tahun 1982): a. kampanye pemberantasan buta aksara memerlukan orientasi baru prioritas kepada mereka yang sangat tidak terprivilese; b. kampanye tersebut memerlukan dan memungkinkan partisipasi kelompok-kelompok penduduk yang bersangkutan; c. tahap belajar membaca-menulis tidak dibebankan dengan tuntutan pendidikan fungsional dalam hal pendidikan kejuruan, belajar membaca dan menulis merupakan tugas kemauan sendiri; d. tahap aksara yang dicapai harus diikuti *Post-Literacy-Programmes* untuk mencegah jatuh kembali ke situasi buta aksara; e. kesulitan metodis pemberantasan buta aksara (misalnya jenis linguistik: dalam beberapa negara perlunya belajar membaca dalam bahasa lokal dan bahasa lalu lintas regional serta negara dan internasional), dapat diatasi; f. langkah-langkah

pemberantasan buta aksara pada orang dewasa harus bersamaan dengan perluasan sekolah dasar. Koordinasi a.l. memerlukan sebuah ekivalen tawaran pendidikan formal dan informal bagi yang lulus.

Kepustakaan: J. Robbins Kidd *et al*, *UNESCO/UNDP, The Experimental World Literacy Programme. A Critical Assessment*, Paris 1976; J. Müller, *Alphabetisierung und Entwicklung*, Bonn 1982 (DSE Dok. 1122 B, SE 21-09-82); H. Hinzen, "Alphabetisierung und Fortschritt. Skizzen, Materialien, Meinungen und Dokumente", dlm.: Ch. Wulf/T. Schöfthales (ed.), *Im Schatten des Fortschritts*, Saarbrücken/Fort Lauderdale 1985, hlm. 143-159; P. Fordham (ed.), *One Billion Illiterates - One Billion Reasons for Action. Report on the International Seminar "Cooperating for Literacy"*, Berlin (West) October 1983; DSE/ICAE, 1985. VI

pemberantasan obat bius → UNFDAC.

pembiayaan bersama Pembiayaan bersama usaha-usaha pembangunan oleh sejumlah kreditor (negara dan organisasi) dan andil negara berkembang. Biasanya hanya menyangkut bantuan pembangunan pemerintah (ODA). Dalam kasus-kasus tertentu pembiayaan bersama (*co-financing*) juga merupakan kombinasi pembiayaan pembangunan ekonomi swasta dan pemerintah, misalnya Bank Dunia: kombinasi antara ODA, bank kredit ekspor, dan swasta. Keuntungan dibandingkan bentuk pembiayaan yang lama adalah dapat membiayai proyek-proyek yang jangkauannya melampaui kapasitas setiap kreditor; penyatuan modal dan pengalaman; pembagian kerja pada pengujian dan pelaksanaan, andil OPEC yang tinggi sehingga tabungan yang berharga (*recycling*) uang minyak untuk negara berkembang dan peluang pemasokan tambahan untuk negara industri ka-

rena OPEC tidak mampu memasok sendiri untuk kegiatan yang dibiayainya.

bg
pembiayaan campuran Kombinasi pembiayaan proyek oleh bantuan pembangunan pemerintah (ODA), kegiatan ekonomi, dan perusahaan swasta. Di awal tahun '80-an terlihat ada *trend* meningkat bentuk pembiayaan campuran. Terutama sekali Bank Dunia sejak beberapa tahun melakukan pembiayaan campuran dari dana ODA, kredit ekspor swasta dan kredit dari bank-bank usaha. Dengan cara ini dalam tahun fiskal 1979-1988 digunakan 48,5 miliar US\$, di antaranya 15% dibiayai oleh Bank Dunia sendiri. Tahun 1983 Bank Dunia menciptakan posisi wakil presiden yang khusus menangani pembiayaan campuran dan menempatkan instrumen-instrumen pembiayaan campuran yang baru. Terutama sekali di samping kredit (ODA) yang diberikan sendiri, Bank Dunia ikut dalam kredit yang berlangsung paralel dari lembaga-lembaga komersial (dengan 15%-20%) sehingga dapat memperbaiki persyaratan kredit dari kredit komersial untuk negara berkembang. Penting: pada Bank Dunia dan beberapa lembaga internasional lainnya berlangsung pembiayaan campuran dengan nama 'pembiayaan bersama' (*co-financing*).

bg
pembiayaan kembali Istilah bidang politik keuangan dan perbankan. Umum: cara dan metode tertentu yang dipakai bank untuk mendapatkan dana dan dikeluarkan dalam bentuk kredit. Dalam bank komersial (di dunia internasional) berlaku: pemberian kredit sampai jumlah tertentu ditutup oleh

dana sendiri (dari tabungan). Selebihnya bank-bank usaha harus mengambil kredit terlebih dahulu (di dunia internasional: mengambil kredit dari bank sentral dengan cara menjual surat berharga, membeli atau menjual kembali wesel).

Pembiayaan kembali dan persyaratan untuk kredit yang diberikan mempunyai kaitan langsung. Mekanisme ini mempunyai arti sangat besar dalam politik pembangunan (tepatnya: dalam pembiayaan pembangunan internasional) dan menyangkut semua lembaga internasional yang bergerak di kegiatan-kegiatan mirip perbankan, yaitu yang mencari dana dan memberikan kredit. Selain sebagai lembaga donor kecil, mereka adalah bank-bank pembangunan regional yang makin penting (ADB, dsb.), terutama kelompok Bank Dunia. Sejak awal tahun '80-an mereka mengalami kesulitan pembiayaan kembali yang sangat besar.

Hal ini di satu pihak disebabkan oleh situasi keuangan internasional yang sulit (tingkat bunga yang tinggi, krisis anggaran, dan paksaan menabung di negara-negara kreditor), sementara di lain pihak (terutama dalam kasus IDA) adalah politik bantuan pembangunan AS di bawah pemerintah Reagan yang hampir menjadikan pembiayaan pembangunan multilateral sebagai musuh ideologis. Bank Dunia melakukan pembiayaan kembali sebagian besar dengan persyaratan yang umum dipakai di pasar modal internasional sehingga memberikan kredit dengan syarat yang berat, sementara itu IDA mendapatkan dana untuk kreditnya (yang

sangat lunak untuk negara berkembang) dari iuran negara-negara anggotanya. Namun, turunnya kesediaan AS secara drastis untuk membayar iuran karena alasan politik di bawah pemerintah Reagan, menyebabkan IDA di tahun 1981–1982 mengalami defisit 1,1 miliar US\$ (ditambah pengurangan 516 juta US\$ dari negara-negara industri lain yang mengikuti jejak Reagan).

bg pembiayaan kompensatoris Metode untuk menyeimbangkan ketidakstabilan hasil dari ekspor bahan mentah; berbeda dengan indeksasi tidak langsung, pembiayaan kompensatoris membiayai negara berkembang jika hasil ekspor turun di bawah tingkat referensi tertentu yang perlu dibayar kembali dan jika hasil ekspor naik di atas tingkat referensi. → STABEX, SYSMIN. **dn pemisahan diri** → disosiasi.

pendapatan nasional Merupakan ukuran hasil kegiatan-kegiatan ekonomi sebuah perekonomian nasional dalam satu periode ekonomi yang ditentukan. Jumlahnya sesuai dengan nilai seluruh barang (barang dan jasa) yang diproduksi dalam satu periode dan berkaitan dengan nilai barang dalam periode yang sama kembali digunakan dalam proses produksi lokal. Dengan demikian, liputan pendapatan nasional memberi ukuran untuk hasil tahunan keseluruhan sebuah perekonomian nasional dan memperlihatkan apa yang ditetapkan dalam satu periode dapat diciptakan dari jasa dan barang, apa yang mengalir ke faktor-faktor produksi, dan apa untuk konsumsi, serta apa yang tersedia untuk investasi sehingga penciptaan,

distribusi, dan pemanfaatan pendapatan nasional menjadi landasan utama perhitungan keseluruhan perekonomian nasional.

Namun, pendapatan nasional merupakan konsep yang kurang mengena. Untuk penandaan secara lebih tepat dari hasil ekonomi keseluruhan, dipakai tiga pasang definisi sebagai berikut. a. Produk bruto dan netto. Dalam produk netto telah dikurangi semua amortisasi (penyusutan, turunnya kualitas kekayaan produksi). b. Harga pasar dan harga faktor: dalam harga pasar terkandung subsidi negara dan pajak yang ditarik untuk menyelesaikan ongkos faktor. c. Produk domestik dan produk nasional. Dalam konsep domestik hanya mengandung barang dan pendapatan yang tercipta di dalam negeri (juga faktor-faktor produksi asing). Sebaliknya, produk nasional berkaitan dengan penerimaan kerja dan kekayaan dari kesatuan ekonomi dalam negeri tidak bergantung pada letak geografis produksinya (juga dari kegiatan produksi di luar negeri). Dapat dibedakan antara: a. *Produk Nasional Bruto* (PNB) yang merupakan penjumlahan dari konsumsi negara dan individu, investasi netto dan saldo ekspor dan impor (jumlah luar negeri); b. *Pendapatan Nasional Netto ke harga pasar* (PNN) = PNB dikurangi penyusutan; c. *Pendapatan Nasional* = PN dikurangi pajak tidak langsung dan subsidi; d. *Produk Domestik Bruto ke harga pasar* (PDB) merupakan hasil semua proses produksi di dalam batas geografis sebuah negara; e. *Produk Domestik Netto ke harga pasar* (PDN) = PDB dikurangi

penyusutan; f. *Produk Domestik Netto ke ongkos faktor* = PDN dikurangi pajak tidak langsung dan subsidi.

Berbagai ukuran pendapatan nasional dapat dihitung berdasarkan masing-masing harga atau harga pada sebuah tahun basis ke harga riil dan konstan. Pendapatan per kapita mengukur PDB dalam hubungannya dengan penduduk sebuah negara. Pencerminan kemampuan sebuah masyarakat ekonomi dalam ukuran-ukuran pendapatan nasional pada tahun-tahun terakhir makin dipertanyakan. Perhitungan perekonomian keseluruhan dalam rangka penelitian untuk indikator-indikator sosial berhadapan dengan konsep perhitungan sosial keseluruhan yang masih ditentukan lebih rinci, mengikutsertakan situasi-situasi nyata seperti distribusi barang dan pendapatan, jaminan sosial, tingkat kesehatan suatu populasi, faktor-faktor lingkungan, dsb. Untuk masyarakat negara berkembang, layak diajukan kritik terhadap angka-angka pertumbuhan ekonomi yang lama bahwa faktor-faktor moneter saja yang memiliki kekuatan di bidang ekonomi (→ ekonomi subsistensi), serta data-data target dan evaluasi berhubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi dalam permasalahan pembangunan.

hk/dn

Pendapatan Nasional Netto → pendapatan nasional.

pendapatan per kapita Merupakan salah satu indikator pembangunan ekonomi terpenting dalam perbandingan antarnegara, meskipun kekuatan argumentasinya terbatas dibandingkan anggapan yang ada. Pen-

dapatan per kapita terbentuk dari distribusi PDB atau PNB (→ pendapatan nasional) terhadap jumlah penduduk sebuah negara dan dipakai sebagai indikator pokok tingkat perkembangan sebuah negara dalam usaha mengelompokkan negara berkembang, misalnya pengelompokan negara berkembang berdasarkan tingkat pembangunan (*ranking*) menurut Bank Dunia. Pertumbuhan ekonomi ditetapkan terutama dari pertumbuhan tahunan pendapatan per kapita.

Meskipun pendapatan per kapita tidak dipakai lagi sebagai satu-satunya indikator pembangunan, seperti dalam kasus teori dan strategi pertumbuhan ekonomi, tetap ada kritik pada indikator pendapatan per kapita. Pendapatan nasional hanya mengukur barang dan jasa secara ekonomi pasar. Jadi, untuk negara berkembang sangatlah tidak lengkap karena ada bagian produksi dan pemenuhan kebutuhan (pangan, tempat tinggal) yang berlangsung tidak melalui pasar, artinya melalui kegiatan ekonomi subsistensi. Dari ketidaklengkapan ini timbul salah penilaian terhadap proses pembangunan yang berusaha diperlihatkan melalui pendapatan. Jika terjadi peningkatan pengadaan dan perbaikan situasi hidup sebagian besar penduduk, hal ini tetap tidak terliput dalam perhitungan pendapatan nasional. Sebaliknya, jika terjadi peningkatan produktivitas di dalam sektor dan perusahaan yang memproduksi untuk pasar, terutama untuk pasar dunia, hal ini terlihat dalam bentuk pertumbuhan pendapatan nasional, tanpa sebenarnya membawa perubahan pada situasi penduduk. Jika diperhatikan

struktur distribusi pendapatan di negara berkembang, pendapatan nasional terutama sekali mengukur pendapatan dan kenaikan pendapatan kelompok 40% atas struktur pendapatan penduduk; mereka memiliki 75%-80% PNB.

pendekatan kultur-pluralisme → etnisitas.

pendidikan Dalam diskusi internasional makin dibedakan antara pengertian pendidikan formal, non-formal, dan informal. Ketiga bentuk pendidikan tersebut dibedakan berdasarkan tingkat pengorganisasian dan spesifikasi fungsional proses pendidikan.

1. Pendidikan formal berlangsung dalam lembaga sistem sekolah dengan semua jenjang dan ciri, mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Hanya di beberapa masyarakat saja sekolah merupakan lembaga peninggalan zaman prakolonial (misalnya pesantren di negara-negara Islam, sekolah koptik-Kristen di Etiopia). Sekolah di kebanyakan negara Dunia Ketiga didirikan terutama untuk kepentingan penguasa kolonial. Dalam perspektif teori modernisasi, negara-negara yang merdeka menganggap perluasan pendidikan sebagai instrumen pembangunan yang penting untuk bidang-bidang masyarakat lainnya. Terlihat jelas kelangsungan ekspansi sekolah sejak tahun 1960 sampai tahun '80-an. Akhir tahun '70-an sampai pertengahan tahun '80-an terlihat bahwa akan dapat tercapai tingkat penyeskolahan rata-rata 2/3 dari umur yang bersangkutan di negara berkembang. Akan tetapi, sejak par pertama tahun '80-an tingkat penye-

kolahan mengalami stagnasi atau malah menurun, terutama di LLDC. Dampak krisis ekonomi mengenai ke sistem pendidikan. Kekecewaan atas harapan yang terkait dengan ekspansi pendidikan formal menimbulkan sederet kritik terhadap sekolah di akhir tahun '70-an yang diartikulasi sendiri di Dunia Ketiga.

a. Sekolah merupakan lembaga yang berfungsi tidak secara ekonomis dan tidak menyediakan keterampilan yang diperlukan untuk pembangunan ekonomi. Nyatanya ongkos untuk sistem pendidikan sangat tinggi (pada awal dasawarsa pembangunan kedua meliputi 18,1% anggaran negara berkembang). Dengan tingginya angka pengulang dan *drop-out*, sekolah telah menghamburkan sumber daya yang sangat penting untuk bidang lainnya. Secara sepihak sekolah menyiapkan pendidikan untuk kegiatan dalam sektor ekonomi modern, tetapi di tahun '70-an hanya 20%-30% lulusan sekolah yang dapat memperoleh kerja di perusahaan dan pemerintah. Selain pengangguran lulusan tingkat sekolah dasar, sekolah menengah, malah perguruan tinggi, untuk bidang tertentu lainnya terus terdapat kebutuhan akan tenaga ahli.

b. Sekolah meneruskan atau malah memperbesar kesenjangan sosial. (Nyatanya studi-studi empiri mengenai kaitan asal usul sosial, penyeskolahan, dan posisi profesi, memperlihatkan bahwa jika masyarakat memodernisasi dirinya sedemikian rupa akan membentuk struktur kelas/lapisan modern yang diinduksikan sesuai dengan ekonomi, sekolah lebih merupakan sarana kenaikan jenjang sosial

bagi mereka yang tidak mempunyai privilese, dan menjadi sarana mempertahankan status bagi mereka yang sudah memiliki privilese.)

c. Sekolah dilihat dari masalah pembangunan juga tidak relevan untuk bidang masyarakat di luar ekonomi; mengikuti tingkat sekolah tertentu sering menghasilkan keterampilan yang tidak lebih dari kelanjutan belajar di tingkat sebelumnya.

Meskipun ada kritik, tetap saja tidak ada satu negara pun merencanakan penghapusan sekolah secara radikal. "Who says 'education does not matter' shall try ignorance," demikian kalimat yang diucapkan ilmuwan pendidikan dari Nigeria tahun 1982 masih tetap sesuai dengan keyakinan dasar perencanaan pendidikan di Dunia Ketiga. Sebagai jalan keluar dipikirkan sebuah reformasi sekolah yang meninggalkan tradisi *bookish school*. Di samping reformasi organisasi yang pragmatis, misalnya model pengajaran bertahap, peningkatan frekuensi sekolah, memajukan umur masuk sekolah dasar, dilakukan percobaan untuk mengkonstruksi *curriculum* yang relevan dengan pembangunan dalam setiap mata ajaran (misalnya *Science Education Programme for Africa*, SEPA). Ada juga titik tolak pemikiran untuk ruralisasi atau orientasi profesi sampai ke model-model sekolah baru (sekolah produksi di Botswana atau Benin, "sekolah desa" di Kuba, *Village Polytechnics* di Kenya). Untuk tingkat tersier, konsep ini terlihat dalam istilah-istilah orientasi masyarakat, kemandirian, orientasi permasalahan, partisipasi (yang terkena proses ilmu

pengetahuan), fleksibilitas (menjawab kebutuhan penduduk) pada pendidikan, penelitian, dan kegiatan konsultasi perguruan tinggi.

2. Definisi pendidikan nonformal yang diterima secara meluas adalah: "... setiap kegiatan pendidikan/pelatihan di luar sistem formal-dijalankan baik tersendiri atau merupakan bagian dari kegiatan pendidikan yang lebih luas-ditujukan pada kelompok sasaran yang dapat diidentifikasi dan untuk mencapai tujuan belajar tertentu" (Coombs *et al* dlm.: Evans 1981, hlm. 27), meliputi sejumlah besar tawaran pendidikan di seluruh dunia. Berdasarkan tipe hubungan usaha pendidikan nonformal untuk pendidikan sekolah, dibedakan antara pendidikan nonformal yang komplementer (untuk murid-murid dalam sistem pendidikan formal dan penambah pendidikan sekolah), yang suplementer (berkaitan untuk masa setelah pendidikan sekolah dan memberikan pengetahuan serta keterampilan baru yang diperluas kepada murid), dan yang substitutif (menggantikan pendidikan formal). Dua bentuk pendidikan nonformal yang terakhir terutama mempunyai arti kuantitatif dalam hal mencapai massa yang ter-marginalisasi. Isi pendidikan itu meliputi kursus pemberantasan buta aksara, mulai dari penyuluhan perbaikan higiene, konsultasi gizi, tawaran pendidikan lanjut untuk profesi. Tingkat kualifikasi yang dituju dapat berada di bidang pendidikan dasar, tetapi dapat juga sampai ke spesialisasi. Melalui diskusi ilmu setelah tahap pengumpulan dan pendokumentasian di seluruh dunia, usa-

ha-usaha pendidikan nonformal sedang dalam perjalanan menuju pembuatan teori pendidikan nonformal. Teori tersebut membahas a.l. masalah pelaku, pembiayaan (pendidikan nonformal tidak selalu murah dan tidak cenderung dapat mencakup lebih banyak manusia dibandingkan pendidikan formal), sentralisasi *versus* desentralisasi, berorientasi kepada masyarakat setempat, pengaitan dengan struktur ekonomi lokal, regional dan nasional, partisipasi pelajar, jaminan standar kurikulum, metode belajar/pengajaran tepat-guna, sertifikasi, ekuivalen dengan lulusan pendidikan dalam sistem formal.

3. Pendidikan informal bukanlah kategori akhir. Interaksi pendidikan yang hampir tidak terorganisasi dan kurang dispesifikasi, misalnya dalam keluarga dan di antara kelompok pemuda yang seumur. Pendidikan informal menandai batas terminologi ke sosialisasi selanjutnya (dimengerti sebagai pendidikan dan pertahanan jati diri pribadi dalam konteks tindakan). Berdasarkan keragaman fenomena yang dapat terlihat di semua masyarakat Dunia Ketiga, dapat disebutkan sarana penelitian yang berusaha mencakup proses pendidikan informal sebagai berikut. a. Penelitian kognisi-kultur yang dalam penggunaan terbarunya mencari tingkat yang spesifik kultur dari perkembangan kognitif individual dan perkembangan penilaian moral. Teori universalistis ini disesuaikan dengan eropasentrisme yang sebenarnya berbeda dalam cita-cita humanismenya. b. Penelitian kultur dan pribadi yang berakar pada etnologi, misalnya membahas ketergan-

tungan bentuk pendidikan pada struktur-sistem kekerabatan. Pada tradisi ini dikritik relativisme budaya. c. Penelitian modernisasi individual, di sini misalnya dianggap ada jaminan bahwa "akulturasi dan proses modernisasi (meningkatkan) gaya kognitif suatu kemerdekaan dari ruang sosial yang sempit (serta ...) ... bentuk penggambaran hubungan sosial yang lebih abstrak." Dengan adanya kritik atas teori modernisasi, penilaian terhadap hasil penelitian modernisasi individual menjadi kontroversial. Untuk keberhasilan proses pendidikan di Dunia Ketiga diperlukan tidak hanya kesesuaian antara ruang gerak aksi pendidikan dengan bagian sistem dalam masyarakat lainnya (ekonomi, politik, budaya), melainkan juga harus membahas hubungan antara pendidikan informal, nonformal, dan formal. Jika tidak, heterogenitas struktural masyarakat berlangsung sekaligus tanpa berpengaruh pada heterogenitas proses pendidikan ini dan terbatas pada kemampuan tindakan subjek yang termasyarakatkan.

Kepustakaan: W. Mitter/Th. Hanf (ed.), *Bildungspolitik und Bildungsreform in der Dritten Welt. Bildung und Erziehung* 33, 1980, H. 5; V. Lenhart, *Die Evolution erzieherischen Handelns*, Frankfurt/Bern, dtl., 1987; World Bank, *Education in Sub-Sahara-Africa. Policies for Adjustment, Revitalization and Expansion*, Washington D.C. 1988; D. Berstecher, "Wirtschaftskrise und Bildungswesen in der 'Dritten Welt'", dlm.: *Zft. für Kulturaustausch* 38, 1988.

vi
pendidikan dasar. Konsep pendidikan dasar yang semula kabur mulai menjadi nyata di paro kedua tahun '70-an, terutama karena pengaruh definisi yang menekankan pentingnya "kebutuhan belajar minimal" (*mini-*

mum learning needs) yang diajukan oleh *International Council for Education Development* dan dipakai oleh organisasi-organisasi internasional seperti UNICEF, Bank Dunia, yaitu pengetahuan dasar dalam membaca, menulis, menghitung, higiene, keterampilan kerja dasar, kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, menata pembangunan masyarakatnya sendiri.

Pendidikan dasar mengenal berbagai bentuk kelembagaan. Pendidikan dasar dalam pendidikan formal (→ pendidikan) berarti sebuah reformasi sekolah dasar yang ada. Organisatoris adalah berbagai model jenjang pelajaran, peningkatan frekuensi kelas, membagi peran guru dengan menyertakan tenaga pengajar ahli dari bidang kejuruan tertentu di lingkungan sekolah sebagai pengajar lepas, pengurangan masa sekolah dasar dengan memberikan bekal pengetahuan dasar minimum yang memberikan kemampuan berorientasi ke lingkungan sosial dan mencegah terjadinya kembali buta aksara. *Curricular* berarti acuan pendidikan dasar ke perubahan sasaran belajar dan mata ajaran sekolah dasar dengan tendensi-tendensi: orientasi lingkungan dan integrasi sebagian mata ajaran yang ada, politeknisasi dan orientasi praktek, mata ajaran yang langsung mengacu pada lingkungan, misalnya kesehatan, perawatan anak, gizi, peluang-peluang swadaya dalam politik-ekonomi. Dengan sasaran dan isi belajar demikian sering dituntut penghapusan metode pengajaran frontal sehingga dapat meningkatkan belajar yang produktif dan menyelesaikan masalah sebagai ganti

belajar yang reseptif (bersifat menerima).

Pendidikan dasar dalam bidang pendidikan nonformal merupakan semua kebutuhan belajar dasar yang mengacu pada tawaran pendidikan untuk anak-anak, remaja, dan orang dewasa luar sekolah dan diorganisasi oleh berbagai pihak. Di antaranya adalah kursus-kursus untuk menambah atau mengulangi bagian-bagian dari sekolah formal melalui pemberantasan buta aksara dan kampanye pembangunan sosial, serta usaha-usaha pendidikan prasekolah, pengajaran, dan pendidikan lanjut, termasuk program ekstensifikasi pertanian, pendidikan keterampilan untuk menciptakan tempat kerja sendiri dan pendidikan buruh dalam sektor modern. **vi pendidikan formal** → pendidikan. **pendidikan informal** → pendidikan.

pendidikan kejuruan Tidak hanya berarti keterampilan tenaga kerja, melainkan memungkinkan berbuat sesuatu di sekitar kegiatan kerja. Tentu saja pendidikan kejuruan merupakan bagian dari pendidikan yang ditujukan langsung pada sistem ekonomi. Jika pembagian teori ekonomi dalam sektor primer (pertanian), sekunder (pengrajin, industri), tersier (pendidikan, jasa) dikombinasi dengan teori pembangunan dalam sebuah sektor modern, informal, dan tradisional, yaitu kategori yang bergantung pada asumsi pembangunan paradigmatis, muncul pokok-pokok pendidikan kejuruan di negara berkembang, yaitu sektor sekunder/modern, industri; sektor sekunder/informal, yaitu *urban informal sector*, sektor primer/tradi-

sional, pertanian yang subsisten atau berorientasi pasar yang sederhana.

1. Industri di negara berkembang termasuk kecil. Tahun 1970 hanya 16% tenaga kerja negara berkembang mendapatkan kerja di industri. Sebuah studi UNIDO (1981) berasumsi bahwa pertumbuhan tahunan kesempatan kerja di industri adalah 2,6%, kenaikan produktivitas 3,8%, dan pertumbuhan dorongan produktivitas 6,4%, merupakan perluasan kesempatan kerja sebesar 50% di tahun '90-an dibandingkan tahun 1975. Pelatihan untuk buruh dan teknisi berlangsung terus melalui: sekolah kejuruan yang sesuai dengan bidang; mekanisme kualifikasi di dalam perusahaan; lembaga pelatihan supra-perusahaan. Sebuah kombinasi tempat belajar sering dilakukan dengan cara tertentu sehingga keterampilan dalam perusahaan berkaitan dengan pendidikan kejuruan untuk suatu tempat kerja tertentu. Beberapa negara, terutama di Amerika Latin, berusaha mempraktekkan sebuah *dual system* pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan formal untuk sektor modern di Amerika Latin hanya mencapai sekitar 5% dari suatu tingkat umur tertentu. Di samping bantuan antarnegara pada pendidikan, telah dikembangkan sebuah pasar internasional untuk pendidikan industri. UNIDO meramalkan biaya itu berjumlah 5 miliar US\$ (sesuai harga tahun 1980) di tahun 1990. Pada banyak perjanjian pemasaran antarperusahaan di negara berkembang dan negara industri, misalnya pada pembangunan instalasi, dihitung 10%-20% ongkos keseluruhan untuk usaha pendidikan. Berdasarkan

keyakinan bahwa negara-negara Dunia Ketiga harus mampu mengendalikan proses industrialisasinya sendiri dan mencapai kemandirian teknologi, dalam diskusi internasional dikemukakan usul-usul reformasi sebagai berikut. a. Dalam pendidikan industri diinginkan sebuah *vocational mobility*. b. Untuk itu harus berani mengambil risiko ketidaksesuaian temporer dan parsial antartingkat dan profil keterampilan antara yang bekerja dan kebutuhan. c. Penelitian yang berorientasi pada pendidikan, misalnya atas dasar analisis kompleksitas, ingin agar teknologi dikuatkan. d. Perlu memperluas mekanisme koordinasi tingkat nasional di negara berkembang dan negara industri yang mendokumentasi kebutuhan dan penawaran pendidikan serta melakukan usaha-usaha yang sesuai. e. Organisasi-organisasi internasional, terutama UNIDO, ILO, UNESCO harus ikut bekerja dalam rangka tugas mereka untuk memperbaiki pendidikan industri. f. Berdasarkan kenyataan bahwa sarana yang tersedia untuk pendidikan di banyak negara berkembang berkaitan dengan ekspansi sistem pendidikan umum, pembiayaan pendidikan industri tetap merupakan tugas komunitas internasional (begitulah formulasi kompromi dalam konsultasi UNIDO tahun 1982).

2. Satuan-satuan ekonomi sektor informal di perkotaan adalah usaha kecil yang dikerjakan dengan tingkat teknologi yang sederhana dan persyaratan yang tidak menguntungkan. Meskipun demikian, sektor ini semakin mendapatkan arti ekonominya. Di Kenya, misalnya, 20% penduduk

kota bekerja di sektor ini; sebuah studi lokal oleh Belo Horizonte menunjukkan angka 69% di Brasilia. Bentuk pendidikan yang ada untuk kegiatan dalam sektor informal adalah belajar secara informal atau hubungan pengajaran bersifat non-formal (→ pendidikan) dalam usaha itu sendiri. Untuk kota-kota di Afrika Barat terlihat bahwa 70%-90% yang bekerja di sektor informal mendapatkan pelajaran kejuruan informal "langsung di tempat".

Intervensi pendidikan kejuruan ke sektor informal dapat disimpulkan dalam tipologi pendidikan kejuruan: a) dalam rangka usaha peningkatan usaha; b) sebagai keterampilan untuk dapat muncul dalam sebuah pasar yang anonim; c) dalam kerangka usaha pengembangan regional dan masyarakat; d) dalam proyek-proyek kerja sosial.

3. Keterampilan tenaga kerja dalam pertanian subsisten dan pertanian kecil yang sebagian berorientasi pasar, terus berlangsung dalam proses pendidikan informal. Selain sebuah perubahan keterampilan dasar melalui perluasan sekolah primer, usaha pendidikan nonformal di bidang ini juga merupakan kemungkinan reformasi terpenting. Coombs/Manzoor (1974) membedakan antara program ekstensif pertanian yang bertujuan peningkatan langsung produksi dan produktivitas, dengan kursus-kursus pendalaman yang bertujuan menyampaikan pengetahuan dan keterampilan teknik pertanian dan ekonomi, serta pendidikan dalam kualifikasi pendidikan nonpertanian. Hal ini mulai dari cara pembuatan alat, pemeliharaan mesin

sampai koperasi, bantuan memasarkan, dan pengambilan kredit.

Semua usaha pendidikan kejuruan di semua sektor di satu pihak perlu memperhatikan hubungannya dengan pendidikan umum yang mendasar dan di lain pihak dengan kemungkinan peluang kerjanya.

Kepustakaan: Ph. H. Coombs/A. Manzoor, *Attacking Rural Poverty. How Nonformal Education Can Help*, Baltimore/London 1974; G. Heintze, "Die Berufsbildungshilfe der Bundesrepublik Deutschland", dlm.: ASA-Programm (ed.), *Nachfragen zur Entwicklungspolitik*, Saarbrücken 1986; Alvarez, dkk., "Berufsbildung in der Entwicklungszusammenarbeit", dlm.: K. Beck dll. (ed.), *Erziehung und Bildung als öffentliche Aufgabe, Zeitschrift für Pädagogik*, 23, Beiheft, Weinheim/Basel 1988; V. Lenhart, "Bildung und Ausbildung im informellen Sektor", dlm.: W. Mikus dll., *Die Praxis der Entwicklungsländerforschung*, Heidelberg 1988.

vi penduduk Penduduk dunia tetap tidak berubah dalam pertumbuhannya yang cepat. Tahun 1988 jumlah penduduk mencapai 5 miliar; 3,8 miliar di antaranya hidup di negara berkembang. Diramalkan tahun 2000 jumlah penduduk dunia akan mencapai 6,1 miliar (hampir 5 miliar di negara berkembang). Dengan demikian, hampir seluruh pertumbuhan terjadi di negara berkembang. Peledakan penduduk sangat berkaitan dengan hampir semua bagian permasalahan pembangunan. Apakah masalah pangan, kesehatan, pelarian dari pedesaan dan urbanisasi, kemiskinan, serta distribusi pendapatan, tetap saja berperan masalah pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Memang pertumbuhan tahunan biasanya menurun (→ tabel dalam lampiran), tetapi penurunan tidak dapat diartikan

penduduk

Tabel 7: Tingkat Pertumbuhan Penduduk Dunia

Tahun	Penduduk Keseluruhan	Tingkat Pertumbuhan Tahunan	Waktu Penggandaan
1 juta sM	beberapa ribu	-	-
8000 sM	8 juta	0,0007%	100.000 tahun
1	300 juta	0,046%	1.500 tahun
1750	800 juta	0,06%	1.200 tahun
1900	1.650 juta	0,48%	150 tahun
1970	3.600 juta	1,9%	70 tahun
2000	6.200 juta	1,7%	35 tahun

Sumber: UNESCO

sebagai titik balik dalam perkembangan penduduk.

Dinamika penduduk pertama-tama memperlihatkan arah suatu pertumbuhan yang besar; ramalan PBB mengatakan bahwa jika dicapai jumlah 9-12 miliar manusia akan terjadi stagnasi. Tahun 1989 pertumbuhan tahunan penduduk dunia keseluruhan adalah 1,7%; untuk Eropa (dan Uni Soviet) dan Amerika Utara: 0,6%; untuk negara berkembang: 2,0% (Amerika Latin 2,3%; Afrika 2,8%; Asia 1,8%, yaitu di antaranya Cina 1,0%, India 2,3%). Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan tahunan untuk tahun 1990 sampai 2000 untuk negara industri adalah 0,4%, sedangkan untuk negara berkembang adalah 1,9%.

Terus naiknya pertumbuhan penduduk, hasil dari perbaikan mendasar dalam sistem kesehatan (→ kesehatan), menyulitkan pembangunan. Mula-mula hal ini merelatifkan hasil absolut pembangunan yang didapat. Bukan hanya demi perbandingan internasional, tetapi juga untuk melihat hubungan riil dan perubahannya.

Oleh karena itu, penting untuk menghitung hasilnya pada nilai pendapatan per kapita (PNB [→ pendapatan nasional], peningkatan produksi pertanian, dsb.). Lalu, sering muncul fenomena yang telah dikenal, yaitu hasil absolut yang terlihat dapat berubah menjadi negatif karena pertumbuhan penduduk yang cepat, seperti dalam kasus produksi bahan makanan yang pertumbuhan tahunannya dikalahkan oleh pertumbuhan penduduk. Pembuatan perbandingan ini selalu menghadapi bahaya disalahmengertikan sebagai hubungan kausalitas, seakan-akan peledakan penduduk merupakan penyebab sedikitnya pertumbuhan bahkan penyebab keterbelakangan. Dengan demikian, penyebab struktural (sering dengan sengaja) mulai dihilangkan dari analisis. Pertumbuhan penduduk dengan cara tertentu berkaitan dengan pembangunan sosial dan ekonomi, serta dimengerti bergantung pada tingkat perkembangan sebuah negara, juga tidak diakui. Oleh karena itu, peledakan penduduk lebih merupakan simptom keterbelakangan daripada penyebabnya. Pemi-

kiran penting ini sama sekali tidak menjauhi tuntutan mendesak dalam politik pembangunan untuk membatasi pertumbuhan penduduk di negara berkembang. Jika hal ini terhambat, masalah kesempatan kerja dan pangan tidak terpecahkan, tekanan pada lingkungan dan sumber daya tidak tertahankan. Di tahun-tahun terakhir masalah penduduk-ekologi-sumber daya ini, mulai mendapat perhatian (lihat UNFPA tahun 1988). Karena pertumbuhan penduduk di daerah pedesaan, manusia terpaksa mencari makan, air, dan bahan bakar (kayu) sehingga menghancurkan basis bahan mentah. Pertumbuhan penduduk yang berlebihan meningkatkan keresahan sosial, makin menajamkan masalah ketimpangan sosial. Akibatnya, usaha pembangunan ekonomi dan sosial harus dikaitkan dengan usaha politik kependudukan. Laporan Brandt yang pertama dalam kaitan ini mewakili pendapat bahwa politik kependudukan nasional harus termasuk dalam politik pembangunan yang mencari keseimbangan yang benar antara penduduk dan sumber daya, dengan cara bersedia menerima bantuan untuk keluarga berencana dan menyetujui usaha-usaha lain demi kemakmuran dan perubahan sosial.

Kunci untuk masalah kependudukan adalah: a. mengangkat standar hidup massa penduduk melalui strategi pengikutsertaan penduduk miskin ke dalam proses pembangunan, yang mencerminkan konsep-konsep terbaru mengenai pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan pedesaan, industrialisasi yang padat karya, dll., se-

bagai kerangka pemikiran yang sesuai; b. keluarga berencana yang berlangsung dalam tanggung jawab masing-masing negara berkembang.

Kepustakaan: UNC (ed.), *The Population Debate, Dimensions and Perspectives*, 2 jilid, New York 1975; J. Schmid, *Einführung in die Bevölkerungssoziologie*, Reinbek 1976; K.M. Bolte/D. Kappe/J. Schmid, *Bevölkerung*, Opladen 1980; L. Bondestam/S. Bergström (ed.), *Poverty and Population Control*, London 1980; J. Schmid, "Bevölkerung", dlm.: D. Nohlen/P. Waldmann (ed.), *Dritte Welt*, München 1987, hlm. 95 dst.

dn
penelitian dan pembangunan → alih teknologi, UNCST, hubungan Selatan-Selatan.

penelitian pendidikan Penelitian mengenai masalah pendidikan di Dunia Ketiga sampai sekarang merupakan dominasi ilmuwan sosial dan pendidikan Barat, terutama AS; adanya aliran penelitian yang mendominasi di Eropa dan AS. Salah satu aliran yang berpengaruh di Dunia Ketiga, terutama di tahun '60-an adalah *development education*. Hal ini mensyaratkan modernisasi, dalam arti negara-negara yang terindustrialisasi sebagai tujuan mengakui investasi dalam pendidikan formal sebagai peran kunci. Baru di tahun-tahun terakhir tumbuh kritik atas kerangka pemikiran yang berlandaskan pengetahuan tersebut, lebih tertuju pada fungsi pendidikan formal menurut model Barat yang menghambat pembangunan. Penelitian pendidikan di Eropa semakin jelas dalam perspektif ini.

Untuk menghapus ketidakseimbangan dan ketergantungan di Dunia Ketiga dalam hal penelitian pendidikan, semakin penting arti keinginan akan penelitian yang bersifat lokal

dan bersahabat dalam rangka bantuan pendidikan nasional dan internasional.

Kepustakaan: M. Fremerey, "Erziehung und Entwicklung als Gegenstand deutscher Forschung", dlm.: *Bildung und Erziehung*, th. 33, vol. 5, Oktober 1980, hlm. 475 dst.; D. Goldschmidt, "Ortsbestimmung und Aufgaben erziehungswissenschaftlicher Forschung über die Dritte Welt", dlm.: *Zeitschrift für Pädagogik*, 16, Beiheft 1981, hlm. 17 dst.

mf penelitian perdamaian Tidak merupakan sebuah disiplin ilmu yang terpisah. Penelitian ini berhubungan dengan sebuah bidang permasalahan ilmu sosial yang terdeferensiasi kompleks dan dalam pembahasan disiplin yang ada menggunakan masing-masing teori, pendekatan, dan metode spesifiknya. Sumbangan-sumbangan pemikiran dari setiap ilmu pengetahuan lepas dari kaitan spesifik ilmunya, menerobos dalam pengenalan diri dan orientasi nilai yang tumbuh dari diskusi definisi perdamaian.

1. *Definisi perdamaian*: dalam pengertian yang umum berlaku, perdamaian biasanya didefinisikan sebagai tidak adanya perang. Istilah perang dingin berakar kuat dalam pemakaian bahasa umum sejak awal tahun '50-an, tetapi merelatifisasi pengertian ini. Istilah ini mengalihkan perhatian ke suatu stadium peralihan antara perang dan perdamaian, pada sebuah situasi tidak adanya perang yang belum berarti dalam situasi damai. Pengertian selanjutnya yang kurang dipakai menandai sebuah situasi seperti situasi konflik dalam negeri: gerakan perlawanan tanpa kekerasan menandai definisi "kehilangan perdamaian".

Kedua definisi ini disamakan jika stadium peralihan yang disebut di atas

didefinisikan sebagai situasi yang tidak dapat melakukan konflik kepentingan, dengan latar belakang kepentingan yang tidak dapat saling disepakati karena keterbatasan tertentu. Untuk stadium peralihan perang dingin pada tingkat internasional ditonjolkan kondisi yang membatasinya dan dampaknya: pelaku konflik perang dingin menghindari sebuah perang panas karena setiap hasil yang dapat terpikirkan darinya—paling buruk kehancuran keduanya—tidak berhubungan ke penyebab konflik. Konflik bergerak terus di bawah gelombang pemakaian kekerasan langsung—ini mempunyai dampak yang mendasar pada situasi dalam si lawan: selalu tidak percaya, saling menakuti, ketegangan permanen. Menurut seorang peneliti perdamaian, Dieter Senghaas, stadium antara ini dalam konflik Timur-Barat menjadi kukuh dalam situasi "kehilangan perdamaian yang terorganisasi", yang menentukan bukan lagi konflik kepentingan semula, melainkan perkiraan ancaman kedua belah pihak menentukan perilaku si pelaku konflik. Jaminan perdamaian dalam konstelasi konflik demikian, menurutnya akan menjadi tugas politik intern primer dari penyingkiran perkiraan ancaman dan dampaknya (terutama persenjataan).

"Kehilangan perdamaian" yang semula merupakan tanda situasi politik dalam negeri suatu stadium peralihan antara kekerasan dan perdamaian, disebabkan oleh keterbatasan sebagai berikut dengan dampaknya: konflik kepentingan terdiri atas dua lawan yang sangat berbeda kekuatannya, dalam kasus ekstrem adalah an-

tara yang ditindas dan yang menindas. Lawan yang lemah harus menghindari pecahnya konflik secara kekerasan karena hal ini akan lebih memberatkan penindasan terhadap dirinya atau malah akan menghancurkannya sehingga bergerak terus di bawah gelombang perlawanan: perlawanan dilakukan dalam bentuk perlawanan tanpa kekerasan, tetapi biasanya terorganisasi sebagai sistem penindasan yang semu damai. Peneliti perdamaian, Johan Galtung, menamakan situasi ini sebagai "kehilangan perdamaian yang terorganisasi" pada pelaku-pelaku yang tidak seimbang akibat kekerasan struktural. Situasi damai akan dicapai jika kekerasan struktural ini sudah dapat disingkirkan.

Dalam jangkauan pengertian yang dibatasi dengan sebuah pengertian perdamaian negatif dan positif, sekaligus terdeferensiasi kepentingan pengenalan diri dan orientasi nilai pada penelitian perdamaian: penelitian perdamaian yang konvensional dan berorientasi jangka panjang bertujuan mencegah pemakaian kekerasan langsung melalui pengawasan atau penghapusan ketegangan. Penelitian perdamaian jangka panjang melihat perdamaian sebagai kombinasi strategi penghapusan ketegangan dan penyebabnya, tanpa wajib mencari gambaran model yang penting dari penyebab "kehilangan perdamaian". Penelitian perdamaian jangka panjang berorientasi pada model-model aturan normatif yang berbeda-beda dari sebuah dunia damai, dan penyingkiran kekuasaan struktural dalam penger-

tian luas: damai berarti "keadilan sosial", demikian menurut Galtung.

2. *Permasalahan dan titik berat penelitian*: konflik Timur-Barat yang mendominasi sampai tahun '60-an (perang dingin) berlangsung terutama di AS, menghasilkan sebuah penelitian perdamaian berorientasi jangka pendek dan menengah dengan tujuan mengendalikan dan menghapuskan ketegangan. Sebagai forum internasional yang penting dari haluan penelitian ini adalah majalah AS, *Journal of Conflict Resolution*, didirikan tahun 1957. Peredaan ketegangan secara berangsur-angsur dari konflik Timur-Barat dan sekaligus eskalasi perang Vietnam sejak pertengahan tahun '60-an, meningkatkan perhatian ke Konflik Utara-Selatan. Kritik mula-mula ditujukan terhadap penggunaan kekerasan oleh AS secara terbuka terhadap musuh yang jelas jauh lebih lemah dan akhirnya bermuara pada peningkatan kegiatan membahas situasi hubungan ketegangan antara Dunia Ketiga dan Dunia Pertama. Impuls-impuls terpenting untuk itu datang terutama dari Skandinavia (lihat laporan Galtung 'kekerasan struktural') dan dari Amerika Selatan ('teori *dependencia*'). Sebagai forum internasional penting adalah majalah Norwegia, *Journal of Peace Research*, didirikan tahun 1964.

Sekelompok peneliti berkonsentrasi pada analisis persenjataan dan perang, terutama faktor-faktor konflik dan perang di Dunia Ketiga yang intern di masyarakat dan antarnegara, tetapi terlepas dari konflik Utara-Selatan. Peneliti lain meluaskan per-

masalah ini dengan meneliti dampak sosio-ekonomi ekspor-persenjataan dari Utara dan perluasan aparat militer di negara-negara Dunia Ketiga serta memasukkan hal ketergantungan dan keterbelakangan dalam konteks ini. Penentuan keterbelakangan ini akibat struktural hubungan ketergantungan yang berat sebelah dan asimetris antara Utara dan Selatan (*model sentra-periferi), memotivasi sebuah kritik umum terhadap model-model yang menjanjikan sebuah modernisasi untuk negara-negara terbelakang, sebagai hasil kerja sama makin kuat di antara negara-negara Dunia Ketiga dan Dunia Pertama (dalam hal liberalisasi perdagangan dunia dengan saling membuka pasar masing-masing). Sebagai ganti meningkatkan pemaksaan pembangunan yang tergantung, harus dibantu sebuah pembangunan otosentris yang berorientasi pada kebutuhan negara-negara terbelakang. Konflik yang mengambang antara Utara dan Selatan tidak dapat—seperti konflik Timur-Barat yang simetris—dilakukan hanya dengan banyaknya kerja sama, melainkan melalui pemisahan yang terarah (*disosiasi) dari kepentingan Utara dan Selatan. Peran perusahaan transnasional, tuntutan akan sebuah tata ekonomi dunia baru, dan fungsi sektor pertanian (struktur pertanian) di negara terbelakang akan menjadi fokus penelitian perdamaian jangka panjang (→ pembangunan pedesaan). Kepustakaan: E.-O. Czempel, "Der Stand der Wissenschaft von den Internationalen Beziehungen und der Friedensforschung in der Bundesrepublik Deutschland", dlm.: K.v. Beyme (ed.), *Politikwissenschaft in der Bundesrepublik*

Deutschland, PVS-Sonderheft 17/1986, Opladen 1986, hlm. 250–263.

dg
pengaitan ke belakang → *external economies, linkage effects*.

pengaitan ke depan → *external economies, linkage effects*.

pengangguran Salah satu masalah paling mendesak di negara berkembang adalah makin tumbuhnya pengangguran, saling berkaitan erat dengan situasi miskin. Perbedaan fundamental antara pengangguran di negara industri dan pengangguran di negara berkembang adalah hampir tidak adanya jaminan sosial. Liputan statistik untuk pengangguran mempunyai beberapa kesulitan karena pengangguran dimengerti dalam dua kategori: pengangguran terbuka dan stasioner yang diliput oleh statistik nasional; pengangguran terselubung: tenaga kerja yang ada dari seorang pekerja dipakai hanya sebagian. Ada tiga bentuk pengangguran terselubung: *pengangguran musiman*: potensi tenaga kerja dipakai sepenuhnya hanya semasa penyiapan tanah dan panen; *pengangguran siklis*: tingkat kerja bergerak sesuai dengan gerak permintaan (terutama pada tanaman ekspor); *pengangguran stasioner*: kesempatan kerja kurang struktural dari anggota keluarga yang ikut membantu (terutama dalam sektor subsistensi, di *minifundia). Ketiga bentuk ini berkaitan dengan penduduk di daerah pedesaan. Pengangguran terselubung di kota berbentuk pedagang kaki lima, pedagang kelontong, penyemir sepatu, dsb. Angka pengangguran terselubung sangat jauh melampaui pengangguran terbuka yang menurut negara berkembang adalah pengangguran resmi. Tahun 1980 di

Amerika Latin 60% pengangguran berada di perkotaan. Kemungkinan mereka untuk mendapatkan penerimaan dari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup, secara struktural terbatas. Pengangguran justru konsubstansial dengan kesempatan kerja di sektor informal, yang armada angkatan kerjanya masuk ke bidang perdagangan dan jasa, seperi lainnya ke industri pengolahan. Menurut perhitungan ILO (1980), rata-rata 6% dari angkatan kerja di semua negara berkembang memiliki pengangguran terbuka. Sesuai negara dan tingkat perkembangannya, kuota antara 3,4%-14,8%. Data-data demikian memberikan gambar yang sangat tidak lengkap dari situasi sebenarnya karena pengangguran terselubung jauh lebih tinggi. Tahun 1982 (data ILO) sekitar 330 juta manusia di negara berkembang menganggur atau kadang-kadang bekerja, mencakup sekitar 40% angkatan kerja (tanpa Cina). Kelompok manusia ini dan orang-orang yang langsung bergantung padanya, biasanya terdapat pada kelompok yang hidup dalam kemiskinan.

Ada yang dengan beberapa sebab bertitik tolak bahwa luasnya pengangguran di tahun '80-an di Dunia Ketiga makin memburuk. 1) Pertumbuhan penduduk menyebabkan kenaikan jumlah angkatan kerja tidak dapat diserap oleh pasar kerja yang sering tumbuh jauh lebih lambat; 2) dengan perkembangan sektor industri, turun intensitas kerja produksi (sehubungan dengan urbanisasi, muncul angkatan kerja terutama di sentra-sentra industri di perkotaan); 3) per-

ubahan konjungktural dan struktural dalam ekonomi dunia sejak tahun '70-an menyebabkan kenaikan angka pengangguran di seluruh dunia.

Karena jangkauan permasalahan ini sangat besar, kesempatan kerja sejak pertengahan tahun '70-an makin menjadi pusat perhatian pemikiran strategi pembangunan (→ teknologi tepat guna, kebutuhan dasar, pembangunan pedesaan, ILO). dan pengawasan rencana → evaluasi. **pengungsi** Seseorang dianggap sebagai pengungsi jika telah meninggalkan tanah airnya dan dikejar karena ras, agama, nasionalitas atau pandangan politik, menetap di luar negaranya dan tidak dapat kembali ke negara asalnya.

Definisi sempit dari pengungsi politik sejak akhir tahun '60-an terus diperluas terutama dari pihak Dunia Ketiga. Misalnya, OAU (1969) mendefinisikan seseorang sebagai pengungsi jika melarikan diri akibat agresi dari luar, pendudukan, kekuasaan asing atau peristiwa yang sangat mengganggu aturan umum. Dalam definisi ini pengungsi juga termasuk tipe sosial (pengungsi ekonomi) dan seseorang yang tercabut dari tanah asalnya: akibat bencana alam (pengungsi karena bencana alam). Terjadi perdebatan mengenai pengakuan terhadap mereka ini sebagai pengungsi dalam hukum internasional dan dalam hukum nasional negara industri. PBB telah sejak awal menerima pengungsi. Dalam resolusi yang menyangkut masalah ini pada Sidang Umum PBB Februari 1948 berbunyi: a. masalah pengungsi merupakan masalah yang langsung mendesak dan

mempunyai arti serta jangkauan internasional; b. seorang pengungsi atau orang yang ikut terseret, tidak boleh dipaksa kembali ke tanah airnya, kecuali jika ia melakukan tindak kriminal; c. pengungsi dan orang yang ikut terseret perlu berada di bawah naungan sebuah organisasi internasional. Masalah pengungsi berbeda dengan harapan yang dulu ada (ketika itu dipikirkan sebuah jalan keluar masalah pengungsi Eropa setelah Perang Dunia II), dan tetap merupakan masalah mendesak yang langsung; tetapi masalahnya telah berpindah dari Eropa ke Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Jumlah pengungsi di Dunia Ketiga sejak awal tahun '80-an diperkirakan sedikitnya 10 juta. Usaha-usaha internasional untuk mencari jalan keluar dan pengurangan permasalahan pengungsi (jaminan hukum, penanganan dalam kamp-kamp) berlangsung melalui organisasi-organisasi PBB seperti *UNHCR dan *UNRWA (untuk pengungsi Palestina). Sejak Juli 1951 untuk menjamin kegiatan perlindungan hukum disepakati sebuah konvensi yang sampai kini telah diratifikasi oleh 67 negara.

Kepustakaan: G. Lachermann/U. Otzen, *Die Weltflüchtlingsproblematik - eine Herausforderung für die Entwicklungspolitik*, Berlin 1981; F. Nuscheler, *Nirgendwo zu Hause, Menschen auf der Flucht*, Baden-Baden 1984; L. Kühnhart, *Die Flüchtlingsfrage als Weltordnungsproblem*, Wien 1984; K.-H. Rosen (ed.), *Jahrbuch für UNO-Flüchtlingshilfe 1988*, Baden-Baden 1989.

dn
pengungsi karena masalah lingkungan Manusia yang karena kerusakan lingkungan secara alami atau antropogen, terpaksa untuk sementara waktu atau seterusnya meninggalkan

tempat asalnya karena kualitas hidupnya sangat dirugikan atau bahkan eksistensinya terancam. Dalam hukum internasional tertentu mereka dibedakan dari seseorang yang didefinisikan sebagai "pengungsi karena alasan takut dari pengejaran akibat ras, kepercayaan, nasionalitas, keanggotaan ke kelompok tertentu atau akibat keyakinan politiknya berada di luar negara yang merupakan kewarganegaraannya" (Konvensi Pengungsi Jenewa tahun 1951).

Pengungsi karena masalah lingkungan ditandai akibat kecelakaan bom atom atau kimia dan—dalam jumlah besar—desertifikasi yang terus meluas (kebanyakan di negara-negara Afrika) atau akibat bencana alam yang disebabkan oleh perubahan iklim atau *ekologi akibat perbuatan manusia. Dalam konteks ini termasuk bencana banjir di negara-negara Asia Tenggara. Penyebab kerusakan terutama disebabkan oleh pembabatan hutan serta masalah ekologi dalam metode penanaman. Menurut perkiraan *Worldwatch Institute*, setiap tahun paling sedikit ada 10 juta pengungsi karena kerusakan lingkungan. Ramalan lembaga yang sama mengatakan bahwa di masa depan akan terjadi peningkatan pesat jumlah pengungsi tipe ini karena pemanasan global yang ditimbulkan efek rumah kaca, kutub-kutub akan mencair dan kenaikan permukaan laut yang di negara berkembang akan menjadi penyebab utama kehilangan tanah.

Kepustakaan: P.J. Opitz, *Das Weltflüchtlingsproblem*, München 1988; *Worldwatch Institute Report, Zur Lage der Welt 1988/1989*, Frankfurt 1988; J.L. Jacobsen, *Environmental*

penjadwalan utang – perang di Dunia Ketiga

Refugees, Worldwatch Paper 86, Washington 1988.

ms
penjadwalan utang Dimengerti sebagai pembaruan perjanjian antara negara berkembang dan negara kreditor mengenai persyaratan pembayaran kembali lebih ringan dari kredit yang telah diambil. Penjadwalan utang merupakan akibat makin besarnya utang negara berkembang dan makin tumbuhnya kesulitan untuk memenuhi beban utang. Dengan alasan, utang yang makin cepat naik,

Tabel 8: Perkembangan Perundingan Pembaruan Utang Multilateral 1956-1985

	Jumlah dim. miliar US\$	Rata-rata jumlah penjadwalan per tahun dim. miliar US\$	Jumlah kasus
1956-1965	2,364	0,236	8
	(1,1%)		
1966-1970	3,298	0,666	10
	(6,0%)		
1970-1975	3,015	0,603	12
	(1,4%)		
1976-1980	12,553	2,511	17
	(5,8%)		
1981-1985	196,757	9,351	120
	(90,3%)		
Jumlah 1956-1985	217,987	7,266	167

Sumber: Bigler, hlm. 46

ketidakmampuan membayar tinggi, dan jumlah penjadwalan utang meningkat pesat.

Pada perundingan penjadwalan utang tahun 1982 dalam 10 kasus dijadwalkan seluruhnya, 2,38 miliar US\$; tahun 1985 ada 31 kasus sejumlah 92,79 miliar US\$.

Kepustakaan: M. Bigler, *Schuldendienst-probleme von staatlichen Schuldner in Entwicklungsländern*, Grösch (CH) 1988.

dn
penyakit tropis → kesehatan.

penyebab sirkuler → *circulus vitiosus*; G. Myrdal mengembangkan sebuah teori penyebab sirkuler dengan dampak kumulatif yang berbeda dengan teori klasik keuntungan ongkos komparatif, dalam hubungan perdagangan internasional ada kecenderungan negara kaya akan menjadi kaya sementara negara miskin akan menjadi miskin.

Kepustakaan: G. Myrdal, *Ökonomische Theorie und unterentwickelte Regionen*, Stuttgart 1959.

dn
penyesuaian struktur → bantuan struktur sosial, utang, Bank Dunia, IMF.

perang di Dunia Ketiga Masyarakat prakolonial, tidak tercakup dalam negara dan kebudayaan tinggi yang terorganisasi masa lalu di Dunia Ketiga sekarang, telah melakukan perang. Kolonialisme dan perang-perang Eropa yang makin banyak sejak abad ke-18 dan dilakukan juga di luar Eropa, telah menginternasionalisasi fenomena perang.

Sejak akhir Perang Dunia II, panggung konflik militer hampir semuanya dipindahkan ke Dunia Ketiga. Dari 160 perang yang berlangsung antara tahun 1945-1984, 151 di antaranya mengikutsertakan lebih dari

60 negara di daerah-daerah Dunia Ketiga. Dalam perang yang sering berlangsung lama (perang Indocina dan Perang Vietnam: 30 tahun), diperkirakan paling sedikit terbunuh 20 juta manusia.

Dalam abad ke-20 selain perang pembebasan antikolonial (terutama dilakukan di paro pertama abad ini) bertipe perang antarnegara, ada konflik militer intern negara berupa perang antirezim, atau sebagai perang antarsuku, kepercayaan atau perang separatis, meliputi lebih dari separo pertikaian militer sejak tahun 1945, kebanyakan disebut perang saudara yang terinternasionalisasi akibat campur tangan pihak ketiga (negara berkembang atau negara industri).

Usaha untuk menyaring dari banyak alasan meletusnya kekerasan militer, sangat sulit; tetapi terlalu mudah jika menempatkan perang sebagai sebuah keterpaksaan yang tidak dapat

dicegah. Selain itu, setiap tipe perang yang disebutkan di atas biasanya sebagian disebabkan model penyebab yang selalu kembali sama.

Perang intern negara sering disebabkan oleh konflik basis struktural di negara berkembang yang diakibatkan distribusi pendapatan, kekayaan, dan peluang hidup (→ kekerasan struktural) yang sering sangat tidak seimbang, atau (terutama di Asia dan Afrika) pembentukan negara (sering sewenang-wenang tanpa memperhatikan wilayah yang dibatasi oleh keragaman etnis dan kultural, → etnisitas) yang dalam proses historis dihasilkan dari kolonialisme. Perang antarnegara sering dimengerti sebagai konflik memperebutkan kekuasaan, wilayah dan/atau bahan mentah atau dengan faktor-faktor intern masyarakat (kelompok-kelompok penguasa berusaha menstabilkan posisi dengan bantuan sebuah perang).

Kebanyakan konflik militer di Dunia Ketiga memperlihatkan bentuk historis (→ imperialisme, kolonialisme) dan sekarang ketergantungan negara berkembang (→ Konflik Utara-Selatan). Setelah Perang Dunia II, perang di Dunia Ketiga jelas ditandai oleh konflik Timur-Barat (bantuan langsung atau tidak langsung untuk negara berkembang yang sedang melakukan perang atau intervensi dari pihak adikuasa dan para sekutunya). Dimensi internasional perang ini di daerah-daerah krisis seperti Indocina dan Timur Tengah juga memuncak, mengancam sebuah perluasan dan eskalasi nuklir (efek Sarajewo). Namun, faktor-faktor internasional, seperti

Tabel 9: Pembagian Perang Setelah Perang Dunia II Sampai Tahun 1984, Berdasarkan Tipe Perang

Tipe Perang	Jumlah	kelikutsertaan pihak asing ketiga
perang anti-rezim	55	25
sebab intern lainnya	23	4
antarnegara	25	5
perang dekolonisasi	14	4
tipe campuran	42	24
Jumlah	159	62

Sumber: menurut Gantzel/Mayer-Stamer (ed.)

konflik Timur-Barat atau Utara-Selatan, tidak bertanggung jawab sendiri untuk kekerasan militer di atau antar-negara berkembang. Sejak awal tahun '70-an keikutsertaan negara industri dalam perang di Dunia Ketiga mengalami penurunan; beberapa negara berkembang juga merupakan kekuasaan yang melakukan intervensi (a.l. Cina, India, Suriah, Libia, Maroko). Faktor-faktor regional dan politik, sosial dan kultur nasional, serta pengeluaran yang tinggi untuk persenjataan (sering ikut menjadi penting karena posisi kuat militer) juga memperlihatkan ikut bertanggungjawabnya pemimpin politik di negara berkembang untuk sebuah statistik perang yang menyedihkan. Di belakang angka-angka ini ada penderitaan yang tidak terbayangkan bagi ratusan juta manusia (mati, cacat, pengungsi, anak-anak korban perang, lapar, penghancuran ruang-ruang alam). Selain itu, penghamburan sumber daya besar-besaran yang sebenarnya lebih diperlukan untuk mengatasi keterbelakangan. → gerakan pembebasan, → Konflik Timur-Tengah, → Perang Irak-Iran, → konflik Amerika Tengah, → *counterinsurgency*.

Kepustakaan: U. Borchardt *et al.*, "Die Kriege der Nachkriegszeit: Interne und internationale bewaffnete Konflikte von 1945 bis 1985", dlm.: *Vereinte Nationen*, 34, No. 2 (1986); K.J. Gantzel/J. Mayer-Stamer (ed.), *Die Kriege nach dem Zweiten Weltkrieg bis 1984. Daten und erste Analysen*, München, Köln, London 1986; M.A. Ferdowsi, "Militante Konflikte in der Dritten Welt. Dimensionen-Ursachen-Perspektiven", dlm.: *APuZ* 8/87; V. Matthies, *Kriegsschauplatz Dritte Welt*, München 1988. bt

Perang Irak-Iran Perang dimulai 23 September 1980 dengan sebuah ofensif kilat Irak dan diakhiri untuk

sementara waktu dengan menerima resolusi 598 Dewan Keamanan PBB tanggal 20 Juli 1988 dan permulaan perundingan gencatan senjata 20 Agustus 1988 dari perang yang sudah berlangsung hampir delapan tahun. Perang ini tidak saja merupakan perang konvensional terlama di abad ini, melainkan merupakan perang yang paling menghancurkan dan paling kejam sejak Perang Dunia II, dengan 500.000 korban jiwa dan sekitar 1 juta luka-luka, menghabiskan biaya sekitar 350 miliar US\$.

Meskipun perang ini sampai kini diinterpretasikan sebagai sebuah pertikaian antara rezim *Baath* yang laizistis melawan negara berideologi Syiah atau kembali merupakan pencerminan pertikaian prahistoris antara orang Parsi dan Arab, meletusnya perang akhirnya merupakan manifestasi kekerasan sebuah konflik "yang terseret" sejak tahun 1823 mengenai garis perbatasan *Schaat-al-Arab*, yang beberapa kali merupakan bahan pertikaian: mula-mula antara Kerajaan Osmania dan Persia (1823 dan 1912/1913) serta antara Irak dan Iran (1924, 1935/1937, 1957/1958, dan 1969) setelah Perang Dunia I.

Ikut campurnya negara-negara adikuasa Rusia dan Inggris serta kelanjutannya setelah Perang Dunia II –meskipun AS lalu lebih berfungsi menjadi lawan Rusia–mencegah sebuah eskalasi konflik menjadi sebuah perang panas. Konstelasi kekuasaan ini juga mencegah pengaturan persengketaan perbatasan. Tahun 1975 Iran dengan perjanjian Aljir memaksa Irak untuk mengalihkan dan mengakui tuntutan perbatasan

dan kekuasaan Iran di Teluk, tetapi situasi penghentian konflik ketika itu pun berarti bahwa jika ada perubahan situasi kekuatan, konflik akan menyulut.

Perkiraan ini terbukti ketika tidak lama setelah revolusi, Iran menuntut kepada penguasa baru pengakuan kedaulatan di daerah *Schatt-al-Arab* dan penolakan keras tuntutan ini oleh pemerintah Irak yang diikuti sebuah "perang kilat". Keputusan ini diuntungkan isolasi Iran oleh luar negeri akibat "skandal sandera", serta pelumpuhan tentara Iran setelah terjadi revolusi. Namun, perang ini dimungkinkan pertama-tama melalui pergeseran kekuasaan sejak akhir tahun '70-an, di satu pihak karena Iran memisahkan diri dari persekutuan dengan AS, di lain pihak dengan mendinginnya hubungan Uni Soviet-Irak setelah ada pengambilan kekuasaan oleh Saddam Hussain di Irak tahun 1979.

Harapan Irak juga berperan dalam hal ini. Sebelum perang Irak berharap dapat melemahkan atau malah menyapakan pemerintah revolusi Iran. Dengan demikian, Irak tidak saja dapat mengusulkan monarki-monarki Arab yang konservatif sebagai penunjang yang ingin mengamankan diri dari penjalaran api revolusioner, dan dalam publik dunia merupakan penjamin setelah rezim Shah jatuh, paling dapat mengisi kevakuman di Teluk dibandingkan negara-negara lain. Bagi Iran, perang ini merupakan "hadiah dari langit", menawarkan kemungkinan untuk mengabsahkan semua kegagalan ekonomi dan sosial yang ada, mengendalikn tenaga revolusioner keluar dan memberi kerja pada tentara

dan pengawas revolusi. Kelangsungan perang nyatanya tidak memenuhi harapan Irak, malah menghancurkan segala ramalan akan segera hancurnya Iran. Iran-setelah beberapa kekalahan-dapat membebaskan daerah yang diduduki (Mei 1982) dan dalam serangan kemudian dapat menduduki daerah Irak, seperti Pulau Madgnum (1984) dan Fao (1986). Setelah beberapa kegagalan usaha merebut kembali daerahnya, Irak mencari kemandangan di lautan. "Perang kapal tanker" diharapkan tidak saja dapat "mengeringkan" sumber keuangan Iran, tetapi Irak juga ingin memprovokasi Iran dengan ancaman menutup Selat Hormuz untuk semua ekspor minyak bumi jika ekspor minyak Iran tidak diblokir. Lalu, AS berdasarkan doktrin Carter tahun 1980, yang juga dikuatkan oleh pemerintah Reagan, harus memenuhi kewajiban yang tertera, yaitu menjamin kebebasan lalu lintas kapal di jalur tanker di dalam dan di tepi Teluk. Dengan demikian tidak diragukan, konflik akan terinternasionalisasi, dengan Irak yang sangat mengharapkan suatu akhir perang. Meskipun ada sejumlah besar kapal diserang dan dirusak (disebutkan 546 kasus), harapan ini tidak terpenuhi. Ironi sejarah: setelah penghancuran fregat AS "Starks" tanggal 17 Mei 1987 oleh Irak, menyebabkan AS dan beberapa negara Eropa Barat menggiatkan lebih banyak militernya dan mengirimkan kapal-kapal perang. Sejak awal 1988 Irak menguatkan usaha memaksa Iran agar bersedia maju ke meja perundingan melalui pemboman kota-kota Iran, instalasi ladang minyak, dan instalasi industri-tampak

cukup berhasil. Dalam pidato 20 Juli 1988 pemimpin revolusi, Khomeini, mengabsahkan resolusi gencatan senjata PBB dengan kata-kata "untuk melakukan keputusan ini, lebih pahit daripada menelan racun", dan sesuai dengan beberapa asumsi bahwa sebuah kelanjutan perang tidak saja akan menyebabkan kehancuran terus situasi ekonomi, melainkan juga sebuah perang saudara yang dapat membahayakan kelangsungan Republik Islam. Sebuah penjelasan selanjutnya mengatakan, "Aku bersumpah untuk berjuang sampai titik darah penghabisan dan sampai tarikan nafas penghabisan. Keputusan hari ini berdasarkan kepentingan Republik Islam."

Baik perkembangan historis konflik serta persaingan politik-ideologi yang mendasarinya, dari kedua negara memperlihatkan bahwa harapan masa depan sebuah penyelesaian damai dalam jangka pendek dan jangka menengah kurang menguntungkan. Karena kedua pihak tidak mencapai tujuan perang, sebuah jalan keluar damai mula-mula adalah penyingkiran sederet kendala politik dalam negeri, meskipun rakyat telah lelah berperang. Kendala utama di pihak Iran adalah kekhawatiran akan prestise revolusi Iran. Hal yang tidak jelas apakah Republik Islam dapat menahan hati berdampingan dengan "musuh Islam"-nya. Di pihak Irak sebaliknya menyangkut masalah keamanan dan sebuah perjanjian perdamaian yang sepasti mungkin, setelah Irak tidak mungkin memaksa Iran mengakui tuntutananya. Selain itu, Irak harus mempunyai kepastian bahwa langkah perdamaian Iran lebih berarti diban-

dingkan sebuah tindakan taktis untuk memenangkan waktu istirahat.

Kedua pihak mempunyai kebersamaan, yaitu setelah sebuah perjanjian perdamaian tidak dapat ditolak akan menghadapi masalah liberalisasi politik dalam negeri. Tampaknya, kedua pihak lebih mudah bertahan hidup dalam situasi perang daripada dalam situasi damai. Keperluan pembangunan ekonomi juga kembali menghadapkan pemerintah kedua negara tersebut ke tantangan-tantangan besar.

Kepustakaan: P. Hünseler, *Der Irak und sein Konflikt mit Iran* (Arbeitspapiere zur internationalen Politik, vol. 22), Bonn 1982; A. Malanowski/M. Stern (ed.), *Iran-Irak. "Bis die Gottlosen vernichtet sind"*, Reinbek 1987; M.A. Ferdowsi, *Die Ursprünge und Verlauf des iranisch-irakischen Krieges* (Forschungsinstitut für Friedenspolitik), cet. ke-2 yang diperbarui, Starnberg 1988.

maf
perdagangan dunia → teori perdagangan luar negeri.

perdamaian Pertentangan yang meluas antara miskin dan kaya sebagai tanda dasar hubungan Utara dan Selatan, menciptakan tugas politik perdamaian yang mendesak di zaman sekarang. Realisasi tanpa kekerasan dan tanpa perang harus tetap menjadi motivasi utama. "Masalah perubahan secara damai merupakan salah satu masalah perdamaian paling sulit di dunia" (Röling 1971, hlm. 102). Selain itu, miskin absolut yang ditemui di negara berkembang telah menghasilkan struktur tidak ada perdamaian dalam pengertian kekerasan struktural. Diperhitungkan bahwa dengan meningkatnya kesadaran akan situasi, akan tumbuh perlawanan dengan kekerasan balasan. Selain kesenjangan Utara-Selatan sebagai di-

mensi konflik global, di Dunia Ketiga ada sejumlah bidang konflik yang harus juga menjadi tema untuk refleksi pedagogi perdamaian. Penarikan batas wilayah yang dilakukan oleh bekas penguasa kolonial sering berdasarkan perspektif politik kekuasaan, menyebabkan etnis menjadi terpisah, dan karena ada kebersamaan kultur dan bahasa mendesak untuk bersatu kembali sehingga menimbulkan sebuah konflik yang permanen. Potensi konflik ketiga adalah keinginan akan sebuah otonomi kultural, yang muncul makin kuat sejak tahun '60-an dalam bentuk afrikanisasi, arabisasi, dan islamisasi. Mereka merealisasi usaha melawan pengasingan kultur sendiri. Perlawanan ini tumbuh secara organis menghadapi pengaruh Barat. Semua lahan konflik ini masing-masing memiliki dinamika yang dapat distabilkan melalui motivasi perdamaian dunia yang menyeluruh. Dalam banyak kasus hal ini sampai sekarang dimengerti sebagai tujuan historis yang belum terpenuhi dan baru terlihat dapat direalisasi dengan latar belakang dekolonisasi sehingga dapat menciptakan persyaratan untuk sebuah tata perdamaian yang permanen. Hal fundamental penting adalah aspek yang meluas dan wajib dari sebuah tata dunia baru sebagai landasan sebuah perdamaian dunia yang stabil sehingga sejak mula merupakan motif utama.

Perdamaian dunia akan menjadi lebih pasti melalui pemecahan permasalahan sosial-politik di bidang internasional, melalui kerja sama penuh kepercayaan antara negara kaya dan negara miskin dan bukan melalui

penumpukan persenjataan untuk suatu anggapan pertahanan nasional. Keamanan nasional dan internasional dalam sebuah era politik intern dunia berkaitan sedemikian eratny sehingga jika melanggar salah satu prinsip-prinsip ini dapat membahayakan perkembangan lanjutnya. Hanya melalui perundingan, langkah-langkah yang membentuk kepercayaan dan aksi bantuan untuk swadaya, dapat mengembangkan sebuah solidaritas yang mencakup dunia dan berdampak menstabilkan dalam masa-masa krisis. Negara-negara Dunia Ketiga harus dikaitkan dalam konsep ini. Di satu pihak, Dunia Ketiga dapat menjadi faktor keamanan penting dalam proses yang diperlukan untuk menyingkirkan konfrontasi antara kedua adikuasa dan pemindahan kekuasaan ke beberapa sentra. Di lain pihak, perdamaian dunia hanya dapat dipertahankan jika Konflik Utara-Selatan yang makin tajam dalam rangka model sentra-periferi mendapatkan jalan keluar melalui strategi global yang dibatasi secara politis dan ekonomi.

Tema yang akan muncul harus mempunyai hubungan dengan pembangunan dan perdamaian. Jika perdamaian diartikan menenangkan diri, bagaimana perdamaian di bawah kondisi etnohistoris dan politik dapat bertahan dalam sejarah? Pembangunan akan dapat ditentukan dalam berbagai ragam irama lingkaran hidup yang telah ditentukan sebelumnya sehingga perdamaian dan kebahagiaan manusia baru dapat dikembangkan melalui selesainya melaksanakan tugas-tugas pembangunan. Pembangunan dengan

campur tangan pihak luar berbahaya karena akan menguatkan struktur intern keluarga dan suku sehingga melahirkan bibit ketidakpuasan, kehancuran bentuk-bentuk yang tumbuh secara historis, dan adat istiadat yang berkaitan dengannya.

Interdependensi yang telah ada ini sebelumnya perlu dilihat dan diperhatikan, jika pembentukan manusia internal yang berkembang dan tumbuh secara organis serta sistem sosialnya tidak ingin dikorbankan melalui pembangunan demi tipe berpikir, berencana, dan berekonomi yang baru. Kepuasan dalam situasi makmur dan sejahtera merupakan sebuah harga yang terlalu tinggi jika didapatkan dari pengorbanan bentuk-bentuk hidup yang membuat dan melindungi keamanan intern dan ketenteraman sosial. Penyertaan manusia dengan ciri etnis tersendiri tanpa dipikirkan dalam harapan dan kebiasaan tata kehidupan kapitalis, tidak begitu saja merupakan pembangunan dan perdamaian. Sebuah politik bantuan pembangunan yang ditentukan oleh *lex* dan *pax oeconomica*, karenanya terancam bahaya digantikan pembangunan dengan proses pemaksaan sehingga menciptakan ketidakdamaian, bukan perdamaian. Sebagian politik pembangunan Barat tidak dapat bebas dari konsep-konsep ini, yang sering bertujuan baik, tetapi penuh kesalahpahaman. Selain itu, mengatasi bahaya kelaparan permanen di banyak bagian Dunia Ketiga merupakan tugas pokok politik perdamaian yang ada. Aspek politik dunia dari bantuan pembangunan dan sumbangan langsungnya ke konsolidasi perdamaian dunia,

tidak selalu dilihat secara sadar. Sering bantuan pembangunan tetap merupakan inisiatif nasional bekas penguasa kolonial yang menginginkan sebuah kerja sama politik ekonomi dengan persyaratan-persyaratan baru yang terliberalisasi karena bahasa yang sama, serta bentuk ekonomi dan administrasi yang dekat.

Dalam rangka bantuan pembangunan ekonomi, arus bawah neokolonialisme layak mendapatkan kritik. Dengan latar belakang kritik ini sejak Laporan Pearson dituntut penguatan bantuan pembangunan multilateral dan sebuah dukungan prinsip kerja sama yang seimbang. Organisasi-organisasi internasional ingin mengatasi motivasi neokolonial dan pewalian politik nasional di pihak negara kreditor. Dari pendekatan supranasional karena banyaknya persaingan antarnegara berkembang, diperkirakan bahwa akan didapatkan sebuah dampak menyeimbangkan yang menjamin persyaratan-persyaratan untuk sebuah kerja sama regional atau malah integrasi. Sebuah politik pembangunan yang berorientasi internasional dalam rangka sebuah rencana pembangunan yang ditentukan supranasional dan diartikulasi terutama dari keinginan reformasi sendiri, dimengerti sebagai tenaga pendorong untuk pembangunan sebuah sistem sosial dan ekonomi infrastruktur yang mandiri.

Kepustakaan: H. Röhrs, *Schule und Bildung im internationalen Gespräch*, Frankfurt 1966; ibid, *Erziehung zum Frieden*, Stuttgart 1971; B.V. Röling, *Krieg ist kein Schicksal*, cet. ke-2, Neukirchen-Vluyn 1971; W. Böhl, "Revision der Industriekultur?", dlm.: H.v. Nussbaum (ed.), *Die Zukunft des Wachstums. Kritische Antworten zum "Bericht des Club of Rome"*,

Düsseldorf 1973, hlm. 247 dst.; M. Mushkat, "Underdevelopment: A Threat to International Security", dim.: *Die Dritte Welt* 2, 1973, hlm. 145 dst.; H. Röhrs, *Die Friedenspädagogik im Modell der Internationalen Gesamtschule*, Hannover 1975; *ibid.*, "Bildungsstrategische Interdependenzen zwischen Industrie- und Entwicklungsländern", dim.: *Verante Nationen* 2, 1977, hlm. 46 dst.; *idem/V. Lenhart*, *Deutsche Entwicklungshelfer in der Lehrerbildung Afghanistans*, Meisenheim 1978; A. Peccei (ed.), *Zukunftschance Lernen. Club of Rome. Bericht für die achtziger Jahre*, cet. ke-4, Wien dll. 1981; I. Illich, "Das Recht auf würdiges Schweigen", dim.: M. Gronemeyer/G. Gronemeyer (ed.), *Frieden vor Ort*, Frankfurt 1982, hlm. 153 dst.; H. Röhrs, *Friede - eine pädagogische Aufgabe*, Braunschweig 1983; J. Calliess/R.E. Lob (ed.), *Praxis der Umwelt- und Friedenserziehung*, Düsseldorf 1987.

hr
perempuan di Dunia Ketiga Masalah pengisapan ganda terhadap perempuan dalam ekonomi dan rumah tangga di negara berkembang, muncul dalam bentuk yang dipertajam. 50% tenaga kerja adalah perempuan dan 100% untuk reproduksi dan penyedia pangan, tetapi posisi mereka dalam ekonomi dan masyarakat tetap di bawah. Pekerjaan perempuan sangat sedikit didokumentasikan dalam statistik.

1. Perempuan di Dunia Ketiga secara tradisional merupakan bagian dari masyarakat tani dan mempunyai bidang perekonomian sendiri yang mandiri (pertanian, kerajinan, perdagangan). Oleh karena itu, perempuan di beberapa kultur mendominasi bidang ekonomi, sementara di tempat lain disejajarkan dengan laki-laki, tidak berarti juga mendapatkan kedudukan yang sama di bidang politik-kultural. Proses pembangunan kapitalis yang bergantung mulai menghancurkan sisa terakhir dari tradisi

matriarkal serta memburukkan posisi sosial dan ekonomi perempuan dibandingkan laki-laki. Perempuan di bidang pertanian dan pengolahan pangan telah kehilangan pengawasan yang terdahulu atas produksi dan distribusi. Penanaman untuk penjualan didominasi oleh laki-laki yang mempunyai akses ke tempat-tempat penyuluhan, pelatihan, dan kemungkinan kredit; untuk perempuan sering tertutup. Selain itu, kegiatan-kegiatan perempuan di bidang kerajinan dan perdagangan didesak oleh ekspansi perusahaan-perusahaan kapitalis di sektor *marjinal. Kegiatan utama perempuan di negara berkembang kini adalah "produksi untuk bertahan hidup" (kerja di bidang-bidang ekonomi yang termajinalisasi, kerja di rumah dan mendidik, merawat orang sakit dan tua tanpa dibayar), yang harus ada untuk menjadi eksistensi keluarga. Sektor kapitalis mendapatkan keuntungan dari kerja perempuan untuk bertahan hidup ini, tanpanya tidak akan terealisasi upah murah, tidak adanya jaminan sosial, dan kerja musiman. Kerja mempertahankan hidup sering berkaitan dengan kekacauan keluarga karena untuk mencari sesuap nasi kaum lelaki harus pergi ke pertambangan, *perkebunan, kota-kota industri atau keluar negeri, dan meninggalkan perempuan dengan pertanian, anak-anak, dan rumah tangga. Perempuan umumnya mendapatkan pekerjaan lebih berat dan upah lebih murah dari laki-laki. Pekerjaan paling rendah dalam usaha tani besar kebanyakan diserahkan kepada perempuan, sementara itu di bidang-bidang industri (tekstil, elektronika, meka-

nika ringan, optik) perempuan merupakan cadangan tenaga kerja murah untuk perusahaan multinasional. Banyak perempuan yang dalam perjuangan hidup di perkotaan mencari jalan keluar dengan menjadi pelacur. Sekalipun jika ada pekerjaan perempuan yang diliput statistik, terbagi sebagai berikut. Pertanian: Afrika 34%, Asia 39%, Amerika Latin 9% angkatan kerja; industri: 20%, 29%, 16%; jasa: 32%, 23%, 39%.

2. Tugas kedua perempuan terpenting adalah "memproduksi" tenaga kerja untuk masa depan. Tingginya jumlah anak yang biasa terjadi di negara berkembang a.l. merupakan pencerminan keharusan ekonomi untuk menjamin kehidupan keluarga dan jaminan hari tua. Praktek-praktek tradisional untuk pengawasan kelahiran telah sangat mundur, seperti juga risiko kehidupan kolektif (klan, keluarga besar) berpindah ke keluarga kecil. Degradasi masalah pembangunan pada peledakan penduduk menyebabkan dikampanyekannya pengawasan kelahiran, yang sering menemui kegagalan karena terbentur masalah hubungan kultural dan religius, serta kebutuhan ekonomi. Selain itu, sering digunakan obat-obatan, yang di negara industri dilarang ataupun sedang dalam tahap percobaan, dan perempuan sering digunakan sebagai kelinci percobaan. Malah di negara-negara Amerika Latin dan Afrika perempuan disteril tanpa sepengetahuan dan seizin mereka.

3. Dari posisi sosial dan ekonomi perempuan dihasilkan tingkat pendidikan perempuan yang rendah. Tahun 1970 di Afrika 82% perempuan buta

aksara (laki-laki: 58%). Sektor pendidikan di Dunia Ketiga terutama ditandai oleh tingkat pertumbuhan yang tinggi, dan perempuan dapat juga menikmatinya, meskipun lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Pangsa buta aksara di Afrika tahun 1980 masih 73% (perempuan) dan 48% (laki-laki).

4. Posisi hukum dan sosial perempuan berada di bawah laki-laki, berbeda berdasarkan daerahnya, sesuai dengan tradisi religius dan kultural, tingkat penurunan peran tradisional perempuan dan politik negara. Secara hukum formal perempuan sejak tahun '50-an memiliki hak pilih aktif dan pasif (kecuali Nigeria). Selain batasan-batasan yang memang sudah ada (pembatasan buta aksara, klientelisme), penjalanan hak pilih, seperti hak-hak lainnya, masih bergantung pada tingkat dominasi laki-laki. Di Amerika Latin misalnya, hukum sering membatalkan keputusan-keputusan mandiri perempuan yang sudah menikah (perjalanan, kegiatan profesi, membuka rekening, dsb.). Perintang kultural tambahan dalam pembentukan kehidupan perempuan terbentuk pada tempat yang berlaku mania laki-laki, yang disebut *machismo*.

5. Agama dan moral perkawinan menghalangi perempuan di Dunia Ketiga mengembangkan pribadi dan seksualnya (kultus keperawanan di bangsa-bangsa beragama Kristen dan khitan di negara-negara berorientasi Islam). Di Afrika saja sedikitnya terdapat 74 juta anak perempuan dan perempuan yang dikhitan.

6. Ada berbagai *trend* mengatasi masalah penindasan perempuan: a)

situasi kehidupan di daerah-daerah kumuh dan di pedesaan telah memaksa pendirian organisasi-organisasi swadaya, di mana perempuan mendorong proyek-proyek infrastruktur dan penciptaan lapangan kerja (pengadaan air minum dan listrik, pendirian taman kanak-kanak dan dapur umum, membuat barang-barang untuk penggunaan sehari-hari) dan melalui pekerjaan ini perempuan mengembangkan jati diri baru sebagai perempuan; b) perempuan di lapisan menengah dan atas perkotaan membuat kegiatan-kegiatan perempuan dengan tuntutan-tuntutan emansipatoris; c) pada tingkat internasional masalah diskriminasi perempuan mendapatkan perhatian. Tahun 1975-1985 dijadikan Dasawarsa Perempuan oleh PBB. Lebih dari hanya kata-kata yang muluk, ketika pemerintah-pemerintah atas tekanan moralis publik umum karena adanya tekanan legitimasi, mengembangkan politik menghapuskan diskriminasi perempuan. Sejak itu telah berlangsung tiga Konferensi Perempuan Dunia (Meksiko tahun 1975, Kopenhagen tahun 1980, Nairobi tahun 1985). Hasilnya adalah pedoman-pedoman (*Forward Looking Strategies*) yang akan menentukan politik perempuan di negara-negara yang menandatangani, tetapi tidak bersifat mengikat. Setidaknya-tidaknya formulasi pedoman demikian telah merupakan suatu keberhasilan jika dibandingkan dengan kongres-kongres raksasa mengenai perempuan. Hal yang dikritik adalah masalah delegasi. Misal di Nairobi, dari 125 delegasi hanya 106 dipimpin perempuan, dan mereka dapat hadir

karena a.l. posisi mereka sebagai istri kepala-kepala negara (Uganda, Kosta Rika, Mesir). Di lain pihak, pembahasan tema-tema yang tidak spesifik perempuan (Timur Tengah, apartheid) mengancam terpecahnya kongres di Nairobi. Selain itu, muncul konflik antara perempuan dari Dunia Ketiga dan dari negara industri. Hal terakhir ini dituduh ingin mendominasi dan bersifat etnosentris.

7. Perempuan dan politik. Di Amerika Latin meskipun berlaku *machismo* makin tumbuh arti politik perempuan. Perempuan-perempuan lapisan menengah di Cile misalnya, ikut ambil bagian dalam kejatuhan pemerintahan sosialis Allende (demonstrasi "panci kosong"). Perempuan-perempuan di Cile dan Argentina bersatu melawan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan diktator militer di negaranya (Argentina: *Madres de la Plaza de Mayo*/Perempuan-perempuan di Plaza de Mayo). Gerakan gerilya juga makin menggunakan potensi politik perempuan: jika dalam gerakan-gerakan gerilya dulu di Kolombia dan Kuba perempuan masih sedikit dan hanya berfungsi sebagai pendukung, kini mereka makin banyak ikut dalam gerakan-gerakan gerilya baru (Tupamaros, Sandinista, gerilya di El Salvador, Sendero Luminoso di Peru) sebagai pejuang aktif dan dalam posisi komando.

Kepustakaan: V. Bennholdt-Thomsen, "Marginalität in Lateinamerika - eine Theoriekritik", dlm.: *Lateinamerika, Analysen und Berichte 4*, Berlin 1980; New Internationalist (ed.), *Frauen - ein Weltbericht*, Berlin 1986; United Nations, *World Survey on the Role of Woman in Development*, New York 1986; S. Bauer, *Die Rolle der Frau im politischen Prozess in Chile*

und Argentinien, Heidelberg 1987 (karya magister); *Peripherie* 8 (1988), 30/31, Frauen: Arbeit, Organisation.

ks/uw
periferisasi Dalam teori kapitalisme, periferi menandai pembentukan serta pengukuhan (*metropol) periferi dalam rangka pembagian kerja internasional jika ekonomi negara yang sudah sangat maju menukar barang dengan ekonomi negara berkembang. → model sentra-periferi, disosiasi, ikut secara selektif. **dn**

Perjanjian Bahan Mentah Merupakan perjanjian antara negara produsen dan negara konsumen mengenai produksi, ekspor, dan harga bahan mentah. Negara berkembang sebagai pengekspor bahan mentah berkepentingan akan Perjanjian Bahan Mentah untuk menstabilkan hasil eksportnya karena dapat melindungi negara berkembang terhadap gerak harga jangka pendek dari produk eksportnya serta jatuhnya harga jangka panjang (→ *terms of trade*). Namun, berbagai proses tidak menghasilkan hal yang sama. Dapat dibedakan antara: a. proses kuota atau kontingen, kesepakatan mengenai volume produksi dan ekspor bahan mentah; b. proses *long term contract*, jaminan membeli dalam jangka panjang dengan harga yang disepakati; c. proses *buffer stock*, menciptakan cadangan-cadangan penyangga untuk menyeimbangkan pasar.

Perjanjian Bahan Mentah jelas meliputi negara-negara pemasok, biasanya berusaha mempengaruhi jumlah melalui kuota ekspor dan harga melalui jumlah. Sistem kontingentasi demikian digunakan dalam perjanjian gula dan kopi dahulu. Perjanjian bersama antara negara pemasok dan pe-

nerima biasanya berpusat pada harga maksimal dan minimal yang harus ditawarkan dan dibeli dalam jumlah tertentu. Penetapan harga maksimal tidak boleh dilewati oleh pengekspor dan penetapan harga minimal tidak boleh ditawar lebih murah lagi oleh importir. Perjanjian gandum disepakati menurut tipe kontrak multilateral ini. Pada perjanjian *buffer stock* juga ditetapkan harga tertinggi dan terendah. Untuk mempertahankan tingkat harga tertinggi, *buffer stock* harus mempunyai barang di gudang agar dapat mempertahankan harga pada ambang batas atas melalui penjualan sendiri. Untuk mempertahankan harga terendah perjanjian harus dilengkapi dengan sebuah dana pembiayaan yang akan mengambil tawaran yang berlebihan dari pasar. Jadi, secara prinsipil bahan mentah harus mampu digudangkan dan harus dapat menekan ongkos pengangkutan serendah mungkin. Untuk seorang manajer *buffer stock* ada sebuah masalah tambahan, bagaimana mendiagnosis perkembangan harga di masa datang secara tepat. Karena barang di gudang dan pembiayaan yang terbatas, mereka hanya dapat mengatasi fluktuasi yang relatif berjangka pendek. Mereka memperlihatkan keterbatasan hasil pada ketidakseimbangan berjangka panjang. Pengalaman yang ada sampai sekarang dengan masing-masing perjanjian *buffer stock*, tidak meyakinkan.

Sejak penetapan harga pada ambang batas atas dan bawah sering muncul konflik kepentingan antara negara penawar dan peminta. Stabilisasi harga juga tidak selalu berarti

dapat menstabilkan hasil. Fluktuasi harga yang disebabkan perubahan penawaran malah cenderung berdampak menstabilkan, sementara fluktuasi harga akibat perubahan permintaan, terutama disebabkan oleh kelangsungan konjungtur di negara industri, sangat mendestabilisasi hasil. Proses yang dipakai langsung pada penstabilan harga, diutamakan karena alasan tersebut. Hal ini juga disukai oleh negara industri karena tidak menyentuh mekanisme pasar dunia dan mengoreksi dampaknya. Untuk negara industri yang berorientasi ekonomi pasar, perspektif ini merupakan sebuah tema perundingan yang penting.

Tahun 1988 ada Perjanjian Bahan Mentah dengan tujuan menstabilkan harga: kopi (sejak tahun 1963), kakao (sejak tahun 1975), karet (sejak tahun 1979). Perjanjian Bahan Mentah dengan tujuan transparansi pasar dan pertukaran informasi untuk minyak zaitun (sejak tahun 1963), daging sapi (sejak tahun 1980), gandum (sejak tahun 1949), serat yute (sejak tahun 1984), kayu tropis (sejak tahun 1985), dan gula (sejak tahun 1984).

dn Perjanjian Bea dan Perdagangan Umum → GATT.

Perjanjian Camp-David → Konflik Timur-Tengah.

Perjanjian Lome Sampai sekarang telah diputuskan tiga perjanjian di Lome, ibu kota Togo, antara ME dan Negara AKP, untuk masing-masing lima tujuan dan sarana kerja sama kedua kelompok negara di bidang perdagangan, industri, dan pertanian (sejak Lome II), pada stabilisasi hasil bahan mentah serta luasnya bantuan keuangan dan bantuan teknik dari

ME ke negara-negara AKP. (→ politik bantuan pembangunan ME).

Lome I ditandatangani 25 Februari 1975 (ME dan 46 negara AKP) dan berlangsung dari 1 April 1975 sampai 1 Maret 1980. ME melalui EIB dan EDF menyediakan dana sebesar 3,5 miliar ERE. Selain pendirian sebuah organ bersama (Dewan Menteri ME-AKP, sidang konsultasi antara anggota parlemen ME-AKP), perjanjian tersebut mempunyai ketentuan-ketentuan penting a.l.: a. perdagangan: akses bebas hampir semua barang (99,5%) dari Negara AKP ke pasar ME; sebaliknya penyediaan prioritas dari pihak Negara AKP untuk barang-barang ME, garansi harga dan pembelian untuk ekspor gula dari negara AKP dengan harga yang ditetapkan setiap tahun; b. bahan mentah: pendirian sebuah dana STABEX, sejenis sistem asuransi untuk menstabilkan hasil ekspor Negara AKP pada produk pertanian; c. industri: ME menjangkau tujuan-tujuan Negara AKP untuk industrialisasi yang dipercepat melalui perluasan dan diversifikasi sektor industri serta pemindahan jangka panjang sektor/proyek industri dari negara industri ke Dunia Ketiga, untuk membangun sebuah struktur ekonomi yang homogen, pendirian sebuah *Center for Industrial Development* (CID) di Brussel untuk menunjang investasi di Negara AKP.

Lome I memberikan harapan besar; negara-negara AKP memandang perjanjian tersebut sebagai langkah pertama untuk pembentukan baru hubungan ekonomi antara negara berkembang dan negara industri serta mengharapakan impuls pembangunan

yang penting. Namun, kenyataannya neraca Lome I mengecewakan mereka. Struktur perdagangan tetap menganut model lama pembagian kerja internasional, dan tidak terlihat efek industrialisasi.

Lome II disepakati 30 Oktober 1979 (58 negara AKP) dan kembali berlaku pada 1 April 1980 untuk masa lima tahun sampai 28 Februari 1985. Perjanjian ini berada jauh dari tuntutan dan harapan Negara AKP akan sebuah perbaikan mendasar untuk menunjang industri dan politik bahan mentah. Perjanjian ini hampir tidak mempunyai pembaruan substansial, melainkan menginginkan perluasan Lome I. Melalui EIB dan EDF, ME menyediakan 5,6 miliar ERE. Ketentuan pokok: a. melanjutkan penghapusan sebelah pihak kendala perdagangan (di negara industri akses pasar yang bebas, di Negara AKP prioritas), meningkatkan perdagangan antarnegara AKP (→ hubungan Selatan-Selatan); b. perluasan STABEX, a.l. melalui pengikutsertaan makin banyak bahan mentah; tindakan-tindakan untuk mempertahankan dan mengembangkan kapasitas produksi dalam pertambangan negara-negara AKP (tembaga, kobalt, fosfor, timah, bauksit), melalui a) pendirian SYSMIN, sebuah dana yang menjamin Negara AKP terhadap risiko yang tidak terkendali pada ekspor bahan mentah mineral (pembayaran berbeda dengan STABEX, berkaitan dengan kegiatan) dan b) penguatan bantuan teknik dan modal (pinjaman, subsidi, bantuan investasi untuk investor Eropa) untuk eksplorasi dan penambangan bahan mentah mineral; c. pening-

katan sedikit pinjaman EIB melalui suku bunga yang dimurahkan untuk proyek-proyek industri. Dana industrialisasi yang dituntut oleh Negara AKP ditolak ME yang di lain pihak gagal menuntut pengaturan yang terikat untuk perlindungan investasi; d. tindakan-tindakan di bidang pembangunan pedesaan: meningkatkan produsen kecil dan koperasi, pendirian sebuah sentra untuk kerja sama di bidang penelitian dan teknik pertanian. Di setiap bidang ada kewajiban ME yang lebih besar terhadap 35 negara di AKP, termasuk negara berkembang yang paling tidak berkembang (di antaranya tiga negara pedalaman dan 19 negara kepulauan).

Lome II juga tidak membawa keberhasilan yang berarti baik pada perdagangan (pertengahan tahun '80-an pangsa Negara AKP pada perdagangan ME tetap 7% seperti sepuluh tahun sebelumnya) maupun pada pembangunan industri, melainkan hanya dapat mencegah makin memburuknya situasi negara-negara AKP, a.l. terlihat penyediaan untuk STABEX dan SYSMIN terlalu sedikit karena jatuhnya harga bahan mentah (1980/1981); kurang dari separo tuntutan kompensasi negara-negara AKP yang biasa dibayar.

Lome III diputuskan 8 Desember 1984 (65 negara AKP) dan berlaku mulai 1 Maret 1985 dengan masa berlaku sampai 28 Februari 1990. Perlengkapan keuangan perjanjian oleh ME berjumlah 8,5 miliar ECU, berdasarkan inflasi berarti stagnasi riil, meskipun karena buruknya kerangka persyaratan ekonomi dunia untuk pembangunan negara-negara

AKP (utang, jatuhnya harga bahan mentah) sangat memerlukan sebuah peningkatan arus masuk modal.

Sementara Lome I dan II mempunyai aksen strategi pembangunan dengan industrialisasi dan infrastruktur, Lome II jelas melakukan langkah strategi bertujuan pembangunan pedesaan dan pemenuhan kebutuhan dasar. Isi pokok perjanjian: a. perbaikan situasi pangan dan tingkat pengadaaan Negara AKP dengan bantuan program untuk pembangunan pedesaan dan pemasaran produk pertanian menjadi tujuan terpenting dari kerja sama, untuk tujuan ini diatur ketentuan yang mengikat mengenai sebuah dialog politik pembangunan. Titik berat selanjutnya adalah program jangka panjang untuk memerangi musim kering dan desertifikasi (→ Zone Sahel); b. pengembangan lanjut Perjanjian Preferensi sebelah pihak melalui sebuah aturan, memberikan akses bebas ke pasar ME untuk produk industri AKP yang mengandung pangsa relatif tinggi pada elemen-elemen pengolahan yang tidak berasal dari kawasan AKP; c. perluasan keuangan STABEX dan SYSMIN, penurunan gelombang pengganti pada STABEX; d. meningkatkan industri kecil dan madya, perbaikan kerja sama antara perusahaan AKP dan Eropa, rangsangan untuk meningkatkan investasi langsung melalui pengakuan prinsip perlindungan investasi bilateral melalui perbaikan pertukaran informasi.

September 1988 di Brussel dimulai perundingan untuk Lome IV; bertolak dari kerangka orientasi yang diajukan oleh komisi ME dikatakan

bahwa dalam perjanjian ini ME akan melanjutkan dan meluaskan elemen-elemen struktur baru kerja sama (program pembangunan sektoral, jaminan pangan, tindakan untuk perlindungan lingkungan, dialog politik) yang diciptakan Lome III, dengan pengertian sebuah politik pembangunan jangka panjang.

Meskipun pembangunan negara-negara AKP sampai kini tidak mendapatkan impuls yang benar-benar efektif dari tiga perjanjian tersebut sehingga keberhasilannya hanya merupakan "perlindungan" dari situasi makin terbelakang, perjanjian-perjanjian Lome karena pendekatannya yang meluas dan jumlah mitra perjanjian yang besar, merupakan bentuk model kerja sama multilateral antara negara berkembang dan negara industri, yang mendorong dialog Utara-Selatan dalam langkah-langkah perundingan konkret.

Kepustakaan: E. Frey-Wouters, *The European Community and the Third World. The Lomé Convention and its Impact*, New York 1982; Mir. A. Ferdowsi (ed.), *Die Verträge von Lomé zwischen Modell und Mythos*, München 1983; D. Frisch, "Lomé III-Das neue Abkommen zwischen der EG und den AKP-Staaten", dlm.: EA 13 (1985), hlm. 57-68; J. Natzold/K. Frhr. von der Ropp, "Lomé III: Neubeginn der Kooperation EWG/AKP", dlm.: *Aussenpolitik*, 36 (1985), hlm. 173-188.

dn/bt
Perjanjian Multiserat Mengatur perdagangan tekstil internasional antara negara berkembang dan negara industri. Perjanjian ini tahun 1974 menggantikan perjanjian kapas yang diputuskan tahun 1962; diperpanjang tahun 1977, 1981, 1986; dan berakhir tahun 1991. Perjanjian ini diputuskan dalam rangka GATT dan menetapkan jumlah terbanyak untuk impor

tekstil dan garmen masing-masing negara industri dari negara berkembang tertentu. Perjanjian multiserat ini bertujuan: a. pembangunan yang seimbang dan perluasan perdagangan tekstil; b. mengurangi batasan perdagangan; c. mencegah gangguan di negara-negara pengekspor dan pengimpor; d. menjamin pangsa yang lebih besar negara berkembang pada perdagangan tekstil dunia, dengan demikian peningkatan hasil eksportnya dari tekstil. Tingkat pertumbuhan riil ekspor tekstil dari negara berkembang ditetapkan mula-mula 6% setiap tahun.

Persaingan makin kuat dari NIB yang banyak memasok (Korea, Taiwan, Hong Kong, dan Makao) menimbulkan masalah penyesuaian struktural yang besar dalam industri tekstil negara industri, berkaitan dengan penurunan kesempatan kerja lebih dari 40% dalam satu dasawarsa. Perjanjian ini jadinya ditangani dengan lebih bersifat proteksionis: tingkat pertumbuhan ekspor dari negara berkembang dikurangi drastis dan di-deferensiasi berdasarkan tingkat kepekaannya. Selain itu, negara pemasok ditangani berbeda-beda: LLDC mendapatkan tingkat pertumbuhan tertinggi, tetapi potensi pemasokan mereka minimal (2% dari impor ME). Negara berkembang yang kuat memasok dan telah mempunyai pangsa pasar relatif tinggi, hanya boleh meluaskan sedikit ekspor mereka ke ME, malah kini mereka harus memperhitungkan suatu penurunan. **hpn**
Perjanjian Pasifik Selatan mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Perdagangan → SPARTECA.

Perjanjian Pembatasan Diri Merupakan instrumen pembatasan yang tersebar luas dalam politik perdagangan luar negeri, termasuk bentuk proteksionisme terselubung. Negara yang berkepentingan akan pembatasan impor sebuah barang tertentu, memaksa mitra dagangnya, ekonomi sering lebih lemah, melalui ancaman tindakan-tindakan paksaan (stop impor, serta penarikan atau peningkatan bea, dan kontingentasi), termasuk pembatasan diri dalam ekspor secara sukarela yang memang memberikan kemungkinan ekspor bagi negara pemasok, tetapi sekaligus membatasi jumlahnya. Jika hal ini dibandingkan dengan stop impor sama sekali, untuk negara pemasok dengan berbagai alasan—kerugian besar pada stop impor tiba-tiba (misalnya pada produk pertanian yang tidak dapat digudangkan), masalah hukum, perencanaan dan kemungkinan untuk menyingkir—sering mengesalkan; "kerelaan" sebenarnya (misalnya mengalah politis) jarang terjadi. Jenis proteksionisme ini meluas di semua bidang perdagangan luar negeri (misalnya ekspor kendaraan Jepang ke Jerman, ekspor baja Eropa ke AS, Perjanjian Multiserat, dsb.), sangat mempengaruhi negara berkembang akibat ketergantungannya yang besar dari ekspor jenis barang yang sedikit, terutama politik perdagangan ME (pasar penjualan terbesar untuk negara berkembang) di sini mempunyai nama yang tidak bagus, a.l. di bidang aturan pasar pertanian. Sistem Preferensi Umum dan klausul perlindungan berfungsi sebagai alat peredam yang sampai kini tidak pernah dipakai meskipun ada

dalam **Perjanjian Lome** (→ politik bantuan pembangunan ME). bg **Perjanjian Perdagangan Dunia** → **GATT**.

Perjanjian Preferensi Penanganan impor yang berbeda-beda menurut negara atau kelompok negara, seperti misalnya dalam **Perjanjian Lome** antara ME dengan **Negara AKP** atau dalam perjanjian preferensi regional (*Preferential Trade Area for Eastern and Southern African States*, **PTA**, 1981). Penanganan preferensial memang melanggar prinsip **klausul prioritas**, tetapi terdapat dalam **GATT**. Ukuran penilaian perjanjian preferensi didapatkan dari efek perolehan perdagangan atau pengendalian perdagangan. Jika preferensi mendesak produk lokal yang berongkos mahal, hal ini disebut sebagai penciptaan perdagangan. Pengendalian perdagangan terjadi jika seorang produsen berongkos murah dari negara yang tidak mendapatkan preferensi terdesak oleh produsen berongkos lebih murah dari negara yang mendapatkan preferensi. Dilihat dalam ekonomi dunia, penciptaan perdagangan dianggap positif, sementara pengendalian perdagangan negatif jika sebagai ukuran dipakai alokasi sumber daya sebaik mungkin. → **Sistem Preferensi Umum**. dn

perkampungan kumuh → tempat tinggal, *squatters*.

perkebunan Bentuk usaha kegiatan pertanian di negara berkembang dengan cara memproduksi rasional, padat kerja dan/atau padat modal, kebanyakan menghasilkan produksi **monokultur** untuk pasar dunia. Biasanya investasi untuk pengolahan hasil

yang ditanam merupakan bagian dari perkebunan sehingga dapat disebut sebagai usaha besar pertanian dan industri.

Hasil **cash crops** perkebunan yang khas adalah kapas, tebu, kopi, teh, kakao, tembakau, kacang tanah, pisang, dan karet. Secara historis, dulu perkebunan dilakukan oleh orang Eropa di negara berkembang, sekarang ini untuk memenuhi kebutuhan permintaan Eropa dengan memanfaatkan keuntungan komparatif (iklim, tanah) di seberang lautan dan mengatasi masalah kekurangan tenaga kerja yang dulu ada melalui perbudakan (orang negro) atau mengontrak manusia (Asia).

Keuntungan: usaha besar modern dan mampu bersaing di pasar dunia; penerimaan devisa; menurunnya intensitas kerja pada produksi. Kerugian: integrasi ke pasar dunia dengan membebankan integrasi nasional dan pengadaan; modal asing. dn **peronisme** → **Argentina**.

persenjataan Perlombaan persenjataan merupakan fenomena yang meluas di dunia, **Dunia Ketiga** tidak

Tabel 10: Pengeluaran Militer dan Impor Senjata Dunia Ketiga 1981–1985 Menurut Daerah (dlm. % dari Jumlah Dunia Ketiga)

Daerah	Pengeluaran Militer	Impor Senjata
Timur Tengah	32	50
Asia Selatan	6	10
Timur Jauh	22	9
Republik Rakyat Cina	20	1
Afrika	9	17
Amerika Latin	11	13

Sumber: SIPRI Yearbook 1986

persenjataan

terhindar. Sebaliknya, hal ini telah menular ke negara berkembang, terutama sejak Dasawarsa Pembangunan Kedua. Konflik-konflik militer (perang, sengketa perbatasan, perang pembebasan, perjuangan merebut otonomi nasional) kini muncul terutama di Dunia Ketiga (→ perang di Dunia Ketiga). Pertentangan Timur-Barat terutama juga dilakukan dengan sarana perang (Vietnam, Afghanistan). Kebutuhan akan keamanan nasional (ke luar dan ke dalam) meningkat di negara berkembang (→ Doktrin Pertahanan Nasional), apalagi di bawah pertikaian atom para adikuasa, dilakukan jaringan perang dengan senjata konvensional. Senjata non-nuklir meliputi 80% pengeluaran persenjataan dunia. Pengeluaran militer di dunia tahun 1980 mencapai

sekitar 500 miliar US\$. Perbandingan dengan tahun 1980 sekitar 36 miliar US\$ bantuan pembangunan pemerintahan memperjelas, mengapa bagi aktivis politik pembangunan persenjataan dianggap sebagai suatu pemborosan yang luar biasa.

Proses persenjataan di negara berkembang berpihak terutama pada transfer senjata (peralatan senjata, teknologi, penasihat) dari negara industri Barat dan negara-negara sosialis. Persenjataan menguatkan ketergantungan teknologi dan berdampak negatif terhadap ekonomi luar negeri negara berkembang. Sejak awal tahun '70-an mulai dibangun instalasi produksi persenjataan di negara berkembang.

Beberapa negara berkembang (India, RRC, Brasilia, Taiwan, Korea

Tabel 11: Ekspor Senjata Besar ke Dunia Ketiga¹ Menurut Negara Asal
(dlm. Juta US\$, Harga Tahun 1985)

Rata-rata Tahunan				
Negara	1975	1975-1985	1985	1987
Uni Soviet	2874 (21,1%)	7148 (34,8%)	7754 (39,2%)	9697 (39,0%)
AS	7074 (52,1%)	6314 (30,7%)	4113 (20,8%)	5829 (23,4%)
Perancis	1144 (8,4%)	2634 (12,8%)	3784 (19,1%)	3213 (12,9%)
Inggris	1196 (8,8%)	1076 (5,2%)	942 (4,7%)	1641 (6,6%)
Jerman Barat	261 (1,9%)	556 (2,7%)	520 (2,6%)	630 (2,5%)
Dunia Ketiga ¹	491 (3,6%)	1145 (5,5%)	1413 (7,1%)	1900 (7,6%)
Lainnya	1727 (12,9%)	1521 (7,4%)	1.952 (9,8%)	1904 (7,6%)
Jumlah	13571 (100%)	20523 (100%)	19768 (100%)	24814 (100%)

¹Tanpa Cina

Sumber: SIPRI Yearbook 1988

Utara, Korea Selatan, Argentina) membangun industri senjata yang kuat dan mengekspor sebagian senjatanya ke negara berkembang lain. Institut Internasional Stockholm untuk Penelitian Perdamaian (SIPRI) memperkirakan bahwa pengeluaran militer Dunia Ketiga di tahun '70-an meningkat dua kali lipat. Menurut SIPRI, antara tahun 1974 dan 1979 ekspor senjata ke Dunia Ketiga naik 25%/tahun. Jumlah tahun 1978: 14 miliar US\$. Hampir 70% ekspor senjata dunia dikirim ke Dunia Ketiga. Tahun 1978 AS (47%) dan Uni Soviet (27%) merupakan 74% pengimpor senjata Dunia Ketiga. Di tahun '80-an hubungan kedua negara tersebut mulai terbalik (lihat tabel 11) dan beberapa negara industri Barat meningkatkan pangsaanya dalam bisnis senjata dengan Dunia Ketiga. → pelucutan persenjataan dan pembangunan.

Kepustakaan: P. Lock/H. Wulf, "Rüstung und Unterentwicklung", dim.: *APuZ* 18/1979, hlm. 3 dst.; Stockholm International Peace Research Institute (ed.), *World Armaments and Disarmament*, London 1979; M. Brzoska, *Rüstung und Dritte Welt. Zum Stand der Forschung*, München dll., 1981; U. Albrecht et al, *Mit Rüstung gegen Arbeitslosigkeit*, Reinbek 1982; P. Lock/H. Wulf, "Zum Zusammenhang von Aufrüstung und Unterentwicklung", dim.: *HDW II*, 1, Hamburg 1982, hlm. 257 dst.; M. Brzoska, "Neue Richtlinien für den Waffenexport aus der Bundesrepublik Deutschland in die Dritte Welt", dim.: *Jahrbuch Dritte Welt I*, München 1983, hlm. 87 dst.; *Aufrüstung und Unterentwicklung. Aus den Berichten der Vereinten Nationen*, Reinbek 1983; L. Köllner, *Rüstung und Entwicklung*, München dll. 1986; M. Wöhlke, *Brasilien als Produzent und Exporteur von Rüstungsgütern*, Baden-Baden 1987; H. Volger, *Der Wandel der Perception von Abrüstung, Entwicklung und Konversion in der UNO*, Frankfurt 1987. **dn**
Persia → Iran.

Pertemuan Puncak La Havanna → nonblok.

Pertemuan Puncak Lusaka → nonblok.

pertukaran tidak seimbang Diskusi imperialisme dari pihak marxis dalam waktu lama membatasi diri pada hubungan antara negara industri kapitalis dengan koloni dan setengah koloni dengan aspek masalah akumulasi modal yang didapatkan negara. Hubungan pertukaran internasional, kalau pun ada, dibahas sedikit. Tidak hanya teori yang diwar-nai Raul Prebisch mengenai kegagalan sekuler *terms of trade* dalam hal ini telah memberikan sebuah reorientasi. Bertopang pada teori nilai kerja marxis, orang berusaha menginterpretasi kegagalan *terms of trade* pada tingkat harga yang dapat diamati untuk barang primer sebagai pencerminan pertukaran tidak seimbang dari nilai-nilai nasional dan jumlah kerja yang berbeda-beda. Selain itu, karena tempo perkembangan yang berbeda antara negara berkembang dan negara industri, serta fenomena keterbelakangan secara keseluruhan, dimengerti sebagai pengisapan negara berkembang oleh negara industri. Diskusi mengenai pertukaran tidak seimbang dimulai dengan publikasi A. Emmanuel (1969), selanjutnya cepat diikuti oleh publikasi lainnya, di antaranya yang penting adalah karya Ch. Palloix, S. Amin, dan E. Mandel.

Konsep pertukaran tidak seimbang sangat mempengaruhi beberapa pendekatan penelitian negara berkembang (→ teori *dependencia*, → kapitalisme periferi) dan sebagian

memberikan kesimpulan meluas berhubungan dengan penyebab keterbelakangan (pengisapan dan pertukaran tidak seimbang), kemungkinan pembangunan kualitatif di kapitalisme periferi dan kepentingan sistem untuk melakukan pengisapan di negara berkembang oleh kapitalisme metropol. Dalam pendekatan sistem dunia oleh Wallerstein juga dilihat pertukaran tidak seimbang sebagai elemen penting dalam proses hierarkisasi global (metropol, semiperiferi, periferi), dan baru-baru ini K. Raffer berusaha sekali lagi memberikan penjelasan konsepsional dari berbagai versi pertukaran tidak seimbang dan menempatkan konsep tersebut dalam kerangka analisis sistem dunia. Namun, diskusi mengenai pertukaran tidak seimbang telah mati dan penulis-penulis marxis sekarang menilai secara pesimis kegunaan dan nilai teoretis dari konsep ini. Hal ini disebabkan oleh masalah yang tidak pernah selesai dalam menentukan tanda-tanda konstitutif dari pertukaran tidak seimbang, sedikitnya kemungkinan untuk dijalankan dan akibatnya-sangat kekurangan landasan empiris. Selanjutnya-juga pada beberapa penulis marxis-bobot pada penjelasan keterbelakangan dan pembangunan lebih kuat beralih ke tanda-tanda struktur pasar dunia, terutama kembali pada struktur intern di negara berkembang, hubungan pertukarannya jelas memperlihatkan nilai turunan sebuah ukuran.

Kepustakaan: A. Emmanuel, *L'échange inégal*, Paris 1969; E. Mandel, *Der Spätkapitalismus*, Frankfurt 1973; S. Amin, *Die ungleiche Entwicklung*, Hamburg 1975; W. Bärtschi, *Ausbeutung und Einkommensumverteilung in den*

internationalen Wirtschaftsbeziehungen, Berlin (West) 1976; M. Massarat, "Die Theorie des ungleichen Tauschs in der Sackgasse", *dlm.: Die Dritte Welt* 6, 1978; A. Schmidt, *Internationale Arbeitsteilung oder ungleicher Tausch*, Frankfurt/New York 1980; I. Wallerstein, *The Modern World System II. Mercantilism and the Consolidation of The European World Economy. 1600-1750*, New York etc. 1980; H. Elsenhans, *Abhängiger Kapitalismus oder bürokratische Entwicklungsgesellschaft. Versuch über den Staat in der Dritten Welt*, Frankfurt/New York 1981; *Probleme des Klassenkampfes (PROKLA)*, no. 59 (1985).

ab
pertumbuhan seimbang → balanced growth.

pertumbuhan tidak seimbang → unbalanced growth.

Peru Sebagai negara pengekspor bahan mentah dengan industri yang kecil dan sangat bergantung pada pemasokan asing, negara di pegunungan Andes ini sangat berat terkena resesi dunia dan jatuhnya harga bahan mentah internasional. Namun, situasi ekonomi dan sosial sebelumnya memang sudah sulit. Karena tindakan IMF maupun konsep heterodoks tidak membawa keringanan, negara itu terjebak dalam arus kehancuran, sementara gerakan gerilya dan kegiatan perdagangan obat bius di sana hanya merupakan simtomnya.

1. Peru (luas 1.285.216 km²) secara topografi terbagi atas 3 ruang. a. Dataran rendah di pantai. Daerah subur hanya di sekitar 50 oase sungai, sebagian besar berupa gurun. Meskipun demikian 1/3 daerah di negara itu yang dapat ditanami menghasilkan 45% produksi pertanian. Komposisi produk terdiri atas ekspor agroindustri (kapas, gula, beras) dan bahan pangan dasar untuk kebutuhan dalam negeri perkotaan (sayuran, tembakau, anggur, dsb.). Armada pe-

penangkapan ikan Peru tahun 1970 dengan 12 juta ton meliputi lebih dari 1/6 penangkapan dunia (nomor 1 di dunia) dengan demikian mencakup 37% ekspor dari tahun yang disebutkan (terutama tepung ikan). Akibat bertahun-tahun menangkap ikan secara berlebihan dan faktor-faktor ekologi (fenomena angin topan El Nino), hasil penangkapan turun (tepung ikan tahun 1987: 10% ekspor). Hampir semua industri Peru berpusat di daerah pantai. Di Lima menghasilkan 2/3 produksi bruto (71% pekerja industri). Di daerah pinggiran Lima terletak kawasan-kawasan industri pengolahan hasil pertanian atau bahan mentah mineral. Sekitar 80% seluruh ekspor dihasilkan di daerah pantai. b. Daerah Andes merupakan daerah pemukiman utama orang Indian yang melakukan kegiatan ekonomi subsistensi atau untuk produksi lokal dengan bercocok tanam dan kegiatan di padang rumput. Penambangan bahan mentah mineral memiliki bobot ekonomi besar. Peru merupakan negara produsen terbesar tembaga, perak, dan timah. Timah hitam, besi, dan batu bara ditambang dalam jumlah cukup banyak. Sebagian dari logam yang ditambang diolah di tempatnya. c. Daerah hutan di timur merupakan daerah hutan hujan tropis yang dilalui banyak sungai. Di daerah peralihan ke daerah Andes diproduksi kopi dan teh untuk ekspor dan bahan pangan untuk konsumsi dalam negeri. Lembah Amazona makin dibuka dalam rangka sebuah politik kolonisasi yang agresif. Rangsangan terkuat adalah cadangan minyak. Sebagian besar eksploitasi

minyak Peru, 170.000–190.000 barel/hari (30%–40% diekspor), tidak lagi berasal dari daerah produksi yang lama di pantai-pantai utara, melainkan dari daerah hutan.

2. Sensus penduduk tahun 1981, Peru berpenduduk 17,8 juta; tahun 1987 melewati batas 20 juta. Pertumbuhan tahunan turun sejak tahun '60-an, dari 2,9% menjadi 2,3% sekarang. 70% penduduk hidup di daerah berpenduduk lebih dari 20.000 orang (tahun 1970: 40%). Tingkat urbanisasi tertinggi terlihat di sepanjang pantai (12% areal, 50% penduduk, 70 penduduk/km²). 1/4 orang Peru hidup di ibu kota Lima dan sekitarnya, yang tumbuh sekitar 200.000 manusia/tahun a.l. akibat pelarian meninggalkan desa. Di propinsi di dataran tinggi yang berpenduduk sama banyak, hidup 40% penduduk (22 penduduk/km²). Di dataran rendah sebelah timur di 58% areal, hidup 2,5 juta manusia, di antaranya 350.000 orang Indian-hutan.

Pangsa penduduk remaja tinggi, 41% di bawah 15 tahun. Komposisi etnis: 50% Indian, 33% mestis, masing-masing 12% kulit putih dan hitam, mulat dan minoritas Asia.

3. Penakluk Spanyol awal abad ke-16 membangun kerajaan kolonial di atas puing-puing Kerajaan Inca yang berkultur tinggi dengan perekonomian yang berkembang, mencakup daerah Cile sekarang sampai Ekuador. Pengadaan sendiri yang berorientasi pasar dalam negeri dari orang Inca mereka ubah menjadi kegiatan ekonomi dengan tiang utama pertambangan berorientasi ekspor (perak, emas) dan membentuk latifundia

yang memasok bahan pangan untuk pasar lokal. Setelah merdeka (1821), Peru memasok guano dan salpeter, keuntungan *boom* ekspor ini (1840–1880) diinvestasikan ke pembangunan enklave ekspor pertanian dan pertambangan (gula, kapas, tembaga, minyak bumi). Permintaan pasar dunia akan guano turun dan cadangan salpeter jatuh ke tangan Chile ketika berlangsung perang Pasifik (1879–1884), tetapi struktur ekspor yang relatif terdeferensiasi memungkinkan sebuah siklus baru berorientasi ekspor dalam republik aristokrat tersebut. Sistem politik didominasi kelompok heterogen (oligarki) lapisan atas (eksporir, borjuasi perdagangan, tuan tanah kaya yang memproduksi secara prapitalis yang memungkinkan memproduksi secara prapitalis) yang memungkinkan modal AS setelah peralihan abad mengambil alih sektor pertambangan dan minyak bumi yang memberikan keuntungan besar. Ketidakmampuan negara oligarki untuk mengintegrasikan tuntutan proletar kota dan desa yang makin besar serta lapisan atas akan partisipasi politik dan reformasi-reformasi sosial, akibat kuatnya gerakan anti-oligarki dan anti-imperialis (istilah organisasi: partai sosialis yang didirikan oleh Mariategui dan APRA yang populis), menyebabkan penguasa diktator kembali berkuasa (Leguia tahun 1919–1930, Sanchez Cerro tahun 1930–1933, Benavides tahun 1933–1939, Odria tahun 1948–1956). Sementara beberapa intermezo demokrasi (di bawah pemerintah Prado 1939–1945, Bustamante tahun 1945–1948, dan *Convivencia* APRA-Prado tahun 1956–1962), APRA

memberlakukan hukum dan membantu wakil-wakil kepentingan borjuis-oligarki dengan memenangkan pemilihan.

Setelah Perang Dunia II dengan keikutsertaan kuat modal AS berlangsung sebuah proses industrialisasi substitusi impor. Pemberontakan petani, migrasi penduduk pedesaan ke perkotaan, radikalisasi beberapa bagian lapisan menengah dan munculnya sebuah borjuasi nasional, mengubah situasi kekuatan dengan menguntungkan oposisi reformistis, yang dalam rangka demokrasi parlementer tidak dapat menang, karena kurang koheren dan makin kuatnya perlawanan dari kelompok oligarki yang mendapat dukungan APRA. Sebuah kudeta militer tahun 1968 menggantikan pemerintah Belaunde yang gagal. Militer berusaha menciptakan persyaratan modernisasi kapitalis negara itu melalui reformasi struktur. Kegagalan rencana ini menyebabkan kembali ke model ekonomi ekspor dan ke demokrasi parlementer. Pemerintah Belaunde (1980–1985) dihadapkan dengan sebuah perekonomian yang sudah kacau balau dan situasi pasar dunia yang tidak menguntungkan. Mereka melikuidasi banyak reformasi yang dilakukan militer dan menggantikannya dengan konsep penyehatan neoliberal yang diinspirasi oleh IMF. Pemilihan tahun 1985 untuk pertama kalinya dimenangkan oleh APRA yang berdiri sejak tahun 1924. Politik ekonomi heterodoks dari Presiden Garcia (perlakuan permintaan, rangsangan produksi, moratorium utang, dsb.) dan strategi populisnya dengan penjamin-

an dari pengejaran politik, berhasil sampai tahun 1987. Kini masalah ekonomi menjadi lebih sulit, tidak saja akibat keberhasilan destabilitas yang dilakukan dua kelompok gerilya yang telah mengawasi sebagian besar *hinterland* (daerah belakang).

4. Sejak akhir abad lalu produk dari enklave pertanian dan pertambangan yang sama, menentukan peran Peru dalam sistem pembagian kerja internasional. Tahun 1987 ekspor 17% terdiri atas tembaga dan 23% dari logam lainnya serta bijih (timah, timah hitam, perak, besi, dsb.), masing-masing 10% minyak bumi, tepung ikan, dan 13% produksi perkebunan (terutama kopi, selain kapas dan gula). Ekspor nontradisional yang baru (tekstil dan barang setengah jadi) meliputi 1/4 penerimaan devisa. Aparat produksi ekonomi Peru berkembang sampai ke tahap substitusi impor di tahun '50-an sehingga sangat bergantung pada sektor ekspor. Sektor ini sekarang memiliki separo kapasitas industri untuk pemasokan dan pengolahan (setengah jadi) produk ekspor. Hampir semua barang ekspor dan barang setengah jadi harus diimpor (barang modal 35%-40%, barang setengah jadi dan bahan mentah industri sekitar 50% impor). Karena kuatnya jalinan ke luar negeri, ekonomi Peru sangat peka terhadap gerak harga di pasar bahan mentah dunia. Turunnya penerimaan secara periodik, defisit neraca perdagangan, dan pembayaran yang disebabkan, sampai sekarang tidak dapat lagi diimbangi dengan pemanfaatan cadangan bahan mentah yang mudah didapat dan perluasan produk-

si pertanian berorientasi ekspor, kemungkinan-kemungkinan ini sudah habis. Oleh karena itu, pemerintah kembali mencari bantuan kredit sehingga mendorong utang luar negeri Peru mencapai 2/3 PDB. Modal asing sejak dulu telah mempunyai peran dominan di Peru. Modal AS setelah peralihan abad menggantikan modal Inggris yang sebelumnya dominan (titik berat: perdagangan, keuangan, transportasi) dan memusatkan investasinya ke bidang-bidang produktif (pertambangan, minyak, pertanian). Asing berperan besar dalam industrialisasi substitusi impor di tahun '50-an. Antara tahun 1968 dan 1980 sebuah rezim militer yang reformis mencari sebuah Jalan Ketiga antara kapitalisme dan sosialisme, antara pengurangan ketergantungan dan integrasi pasar. Dalam rangka reformasi industri oleh militer, dominasi modal asing memang tidak terputuskan, tetapi ruang geraknya jelas berkurang (nasionalisasi perusahaan-perusahaan minyak asing, perusahaan pertambangan dan industri bahan dasar). Pengawasan negara dan nasional atas dana akumulasi, impuls penyalinan dan perluasan infrastruktur, diharapkan dapat memungkinkan sebuah pertumbuhan yang mandiri dan berorientasi ke dalam; sebuah reformasi pertanian yang meluas dan subsidi kepada konsumsi bahan dasar diharapkan dapat memperbaiki situasi sosial mayoritas miskin dan membuka peluang partisipasi.

Proyek ini menemui kegagalan di paro kedua tahun '70-an karena adanya pertikaian haluan dalam militer,

perlawanan sipil, dan sebuah krisis ekonomi yang berat.

Dari pertanian hidup 1/3 penduduk. Kontribusi mereka yang sedikit, 8%, ke PDB memperlihatkan produktivitas yang rendah. Industri menyerap 14% angkatan kerja dan menghasilkan 40% PDB. Reformasi pertanian militer memang secara parsial telah mengubah situasi pemilikan dan menggulingkan kekuasaan oligarki tanah. Namun, hanya 1/4 petani yang mendapatkan tanah atau tempat kerja tetap. Melalui politik tanah dan pertanian tahun '80-an, masalah ini kembali menajam dan arus migrasi ke sektor informal di perkotaan menguat.

5. Perbedaan besar antara kaya dan miskin menandai pembagian pendapatan di Peru. Sementara 20% kelompok kaya memiliki lebih dari 61% pendapatan, kelompok 40% bawah hanya menerima 7% pendapatan. Pemakaian kalori rata-rata hanya memenuhi 85% kebutuhan; kurang makan terutama di daerah Andes sangat meluas. Hanya 40% penduduk, terutama di daerah pedesaan, tidak mendapatkan pengadaan kesehatan karena konsentrasi sarana kesehatan dan personal kedokteran di daerah kota; di ibu kota saja ada 3/4 dokter dan 50% pengeluaran untuk kesehatan. Kematian anak di tahun-tahun pertama dengan 120 anak per seribu sangat tinggi; di daerah mencapai 240. Peluang pendidikan orang miskin di kota dan di pedesaan sangat kecil (buta aksara 28%, di antaranya 3/4 di daerah pengunungan). Dari dua anak yang sekolah hanya seorang mengakhiri sekolah dasar karena banyak

anak harus ikut bekerja: 20% anak berumur 5-12 tahun di Lima adalah buruh anak.

6. Dalam UUD tahun 1978 dipertahankan konstruksi tradisional sebuah republik presidensial dengan parlemen dua kamar (DPR dan senat). Intensi untuk mengukuhkan cara demokrasi terlihat a.l. dengan pemberlakuan pemilihan untuk kelompok buta aksara dan penurunan umur pemilihan menjadi 18 tahun. Faktor kekuasaan terpenting adalah tentara yang di tahun-tahun terakhir berulang-ulang merebut kekuasaan (terakhir tahun 1968-1980), sejak tahun 1960 mempunyai keinginan reformasi. Kepartaian terbagi dalam tiga blok: a. APRA yang melahirkan Presiden Alan Garcia, partai massa tertua di Amerika Latin, sekarang berada di haluan tengah moderat berorientasi reformasi; b. *Acción Popular* yang kanan-liberal dipimpin penulis Vargas Llosa, terbentuk menjadi blok borjuis; c. Persatuan Kiri (*IU/Izquierda Unida*) meliputi pengelompokan mulai dari kiri-radikal sampai sosial-demokrat. Empat organisasi yang membawahi 4.800 serikat buruh dengan 800.000 anggota (tingkat organisasi 12%) berpengaruh besar. Dipimpin organisasi terbesar (CGTP/*Confederacion General de Trabajadores del Peru*, Konfederasi Umum Buruh Peru) yang dikendalikan kelompok kiri, serikat buruh berhasil melakukan tuntutan terhadap pemerintah, terutama melalui mogok-mogok umum. Lobi yang juga berpengaruh kuat adalah 15 organisasi perusahaan yang bersatu tahun 1984 dalam sebuah organisasi wadah

(CONFIEP) yang dipengaruhi oleh perusahaan-perusahaan besar. Situasi politik dalam negeri menjadi tidak stabil sejak tahun 1980 dengan adanya gerilya desa, Sendero Luminoso yang maois dan sejak tahun 1983/1984 gerilya sosialis-kiri "Tupac Amaru". Daerah pertikaian selain kota-kota, juga di daerah luas pegunungan Andes. Di sana tentara melakukan "perang kotor" menghadapi pemberontakan, dengan korban lebih dari 10.000 jiwa, ribuan orang "hilang", pengungsian besar-besaran petani ke perkotaan. Separa orang Peru hidup dalam situasi darurat militer. Di tepi timur Andes, tempat zone pengaruh gerilya bertemu dengan produsen kokain, bekerja sama dalam pemberontakan dan jaringan obat bius. Dalam dasawarsa terakhir jaringan obat bius mengukuhkan diri menjadi penguasa ekonomi dan politik; Peru merupakan produsen koka dan pemasok kokain terbesar di dunia setelah Bolivia.

Secara mengejutkan dalam pemilu tahun 1990 sebuah partai baru *Cambio 90* (Peralihan 90) memenangkan pemilu dan sejak Juli 1990 Alberto Fujimori, seorang Peru keturunan Jepang, menjadi presiden. Fujimori kembali ke haluan ekonomi pasar dan menjalankan politik stabilitas ekonomi yang keras dan menaikkan beberapa kali lipat harga-harga yang selama itu disubsidi-sesuai kehendak IMF-untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi masa Garcia. Tindakan ini menimbulkan situasi darurat, penjarahan, dan mogok umum. April 1992 Fujimori yang terpilih secara demokratis, melakukan

kudeta dengan bantuan militer, membubarkan parlemen, dan tidak melaksanakan UUD. Kudeta ini tidak memperbaiki masalah ekonomi, malah menimbulkan aksi lebih keras dari pihak gerilya kiri, yang merasa makin terancam oleh aksi-aksi militer yang kini tidak dikendalikan lagi oleh parlemen. Fujimori menjanjikan pemilu bukan Oktober 1992.

7. Paling jelas berpengaruh dalam pembangunan ekonomi sejak tahun '60-an adalah usaha menggantikan model ekspor bahan mentah para oligarki yang sedang menghadapi krisis dengan diversifikasi ekspor, melakukan industrialisasi, dan memulai reformasi struktur yang meluas antara tahun 1968 dan 1980 oleh militer. Sekarang kekuasaan oligarki telah terpatahkan, negara menjadi faktor ekonomi penting, tokoh politik kiri serta serikat buruh memiliki posisi tawar yang kuat. Namun, ketergantungan dari ekspor bahan mentah tetap tinggi, industri tidak dapat melampaui stadium substitusi impor, integrasi kelompok marjinal kota dan desa menemui kegagalan. Sejak pertengahan tahun '70-an negara itu terjebak dalam krisis ekonomi yang makin menajam; PDB per kapita sekarang berada di tingkat seperti tahun '60-an, utang luar negeri pemerintah mencapai 2/3 PDB. Baik strategi penyehatan ortodoks (militer antara tahun 1975-1980 dan pemerintah Belaunde tahun 1985-1990) ataupun kembali ke ekonomi pasar (masa Fujimori sejak tahun 1990) tidak dapat mengatasi krisis. Sejak tahun 1987 ekonomi meluncur turun setelah mengalami sebuah tahap istirahat,

terus berlangsung. Kehancuran ekonomi, erosi monopol kekuasaan negara oleh kaum gerilya dan produsen obat bius (dan baru-baru ini penembak misterius dan milisi petani bersenjata) menghadapkan sistem politik dan persatuan masyarakat pada masalah besar.

Kepustakaan: A.F. Lowenthal (ed.), *The Peruvian Experiment. Continuity and Change under Military Rule*, Princeton 1975; G.D.E. Philip, *The Rise and Fall of the Peruvian Military Radicals 1968–1976*, London 1978; D.S. Palmer, *Peru. The Authoritarian Tradition*, New York 1980; R. Witzel de Ciudad, *Die peruanische Unternehmensreform im Industriesektor*, Heidelberg 1981; B. Biesinger, *Der Bergbausektor in peruanischen Reformprozess 1968–1975*, Heidelberg 1981; D. Dirmoser/U. Wachendorfer, "Peru", dlm.: *HDW II*, 2, Hamburg 1982, hlm. 197 dst.; U. Wachendorfer, *Bauernbewegungen in Peru*, Heidelberg 1983; J. Barolo, "Der Erleuchtete Pfad in die Finsternis. 'Sendero Luminoso' zwischen Guerillakampf und Terrorismus", dlm.: M. Ehrke et al (ed.), *Lateinamerikanische Analysen und Berichte* 9, 1985, hlm. 111 dst.; W. Mikus (ed.), *Struktur- und Entwicklungsprobleme der Industrie Perus*, Heidelberg 1985; D. Dirmoser, "Peru: Charisma contra Währungsfonds", dlm.: W. Mikus (ed.), *Lateinamerika. Analysen und Berichte* 10, 1986, hlm. 259 dst.; E.v. Oertzen, *Peru*, München 1988; A. Wachendorfer, *Gewerkschaft und Militärs in Peru 1968–1978*, Heidelberg 1989; *Der neue Mann hat noch kein Rezept für Peru*, *Frankfurter Allgemeine*, 20 Juli 1990, dlm.: *BMZ-Spiegel der Presse*, 18/90, hlm. 574–575; B. Hilder, "Fujimori braucht rasche Erfolge, Hannoverische Allgemeine Zeitung", 19 Juli 1992, dlm.: *BMZ-Spiegel der Presse*, 13/92, hlm. 414.

dd
perubahan kultur Menurut F.E. Behrendt perubahan kultur berarti perubahan cara bersikap dan berperilaku lama dalam sebuah bidang kultur tertentu yang mempengaruhi struktur atau fungsinya masyarakat. Perubahan kultur dapat mencakup: a. pertahanan nilai, kepentingan jiwa,

gambaran religius, metode, serta lembaga pendidikan dan pengajaran; b. cara teknik dan ekonomi serta kemampuan produksi; c. bentuk pencerminan pendidikan seni, musik, puisi, dan tari; d. luas dan intensitas hubungan antara manusia; jumlah kepadatan dan pembagian penduduk; bentuk pembagian kerja; struktur ekonomi dan kesempatan kerja; lapisan sosial dan arti bangunan sosial yang mendasar seperti keluarga, marga, masyarakat, negara, dsb. Perubahan kultur dapat disebabkan endogen (intrakultural, melalui penciptaan) atau eksogen (interkultur, melalui akulturasi). Sebagai masalah pembangunan yang pokok, pengertian perubahan kultur merupakan suatu perubahan yang terkendali dan dinamis oleh sosiologi pembangunan yang bekerja, artinya penciptaan persyaratan jiwa, pikiran, dan masyarakat tertentu untuk pembangunan, mempelajari pembaruan, menerima kebiasaan-kebiasaan yang rasional-tujuan dalam berpikir, bekerja, dan etos menabung, perencanaan hidup yang teratur dalam individu maupun kolektif, prinsip prestasi. Bantuan pembangunan terutama bertujuan meningkatkan kesiediaan pembangunan, akulturasi yang aktif-dinamis dan kemampuan mengubah perilaku.

Kepustakaan: R.F. Behrendt, *Soziale Strategie für EL*, Frankfurt 1968; W. Zapf (ed.), *Theorien des sozialen Wandels*, Köln 1969. **dn**
perubahan sosial Merupakan definisi yang sering dipakai dalam literatur ilmiah, tetapi tidak mempunyai sebuah kesatuan definisi. Bagi T. Parson, perubahan sosial merupakan perubahan struktur sistem-sistem sosial; sementara penulis-penulis lain me-

ngatakan sebagai perubahan-perubahan struktur sosial, lainnya mengaitkan dengan pengertian "perubahan personal dalam posisi pimpinan dalam lembaga-lembaga kekuasaan" (R. Dahrendorf) atau perubahan "struktur institusional sebuah sistem sosial" (D. Lockwood) atau "aspek sosial-kultural dari perubahan ekonomi" (B. Hoselitz). F. Berendt mengaitkan perubahan sosial dengan definisi mobilitas. Ia melihat perubahan sosial "dalam mobilitas struktur masyarakat yang pertumbuhan diferensiasinya berkaitan dengan peran dan fungsi anggota-anggotanya serta makin meluasnya mobilitas horizontal (geografis) maupun vertikal (sesuai lapisannya)". Ia membatasi antara perubahan sosial dengan perubahan teknis dan ekonomi, serta memberikan perubahan sosial arti yang pokok karena ini merupakan "perubahan dari gagasan pokok, perilaku, dan lembaga (bertindak) yang mendasar, biasanya berakar dalam, yang darinya bergantung keputusan-keputusan mengenai tujuan kegiatan ekonomi dan kemasyarakatan serta mengenai penggunaan faktor-faktor teknik dan ekonomi".

Minat penelitian terhadap perubahan sosial mula-mula timbul dari pertanyaan, akibat sosial dan kultural bagaimana yang muncul dari perkembangan ekonomi ke produktivitas lebih tinggi. Ketika teori dan strategi pertumbuhan mengalami kegagalan, minat penelitian bertumpuk pada pertanyaan, sejauh mana perubahan sosial merupakan persyaratan sehingga pembangunan ekonomi dapat dijalankan serta berlangsung terus-menerus. Lalu, perubahan sosial dimengerti se-

bagai perubahan yang perlu untuk pertumbuhan dalam struktur sosial negara berkembang (W.H. Hoffmann). Pembangunan sesuai dengan itu dimengerti sebagai perkembangan ekonomi dan perubahan sosial, dan diajukan tuntutan akan sebuah strategi pembangunan sosial yang termanifestasi pada pengertian perubahan kultur dan akulturasi. Teori modernisasi meluaskan pendekatan pada permasalahan yang ada akibat kemodernan sosio-kultural yang diimpor-dengan keterbatasan utama adalah meyakinkan faktor-faktor eksogen (dinamis) sebagai fungsi positif. Pencarian kembali identitas kultural kini merupakan jawaban banyak negara berkembang terhadap politik perubahan sosial yang tidak bebas dari congkakan pihak negara industri.

Kepustakaan: W. Zapf (ed.), *Theorien des sozialen Wandels*, Köln-Berlin 1969; B. Fritsch (ed.), *Entwicklungsländer*, Köln-Berlin 1968; R.F. Berendt, *Soziale Strategie für EL*, Frankfurt 1965; G. Wisede/T. Kutsch, *Sozialer Wandel*, Darmstadt 1978. dn

perundingan bea → GATT.

perundingan global → *Global Negotiations*.

perusahaan multinasional → perusahaan transnasional.

perusahaan multinasional di negara berkembang 1. Landasan utama kerja sama ekonomi negara berkembang (ECDC/*Economic Cooperation among Developing Countries*, → hubungan Selatan-Selatan)-hal ini membuktikan analisis ekonomi-historis proses kerja sama dan integrasi regional-bukanlah perdagangan, melainkan bidang produksi. Dari primat produksi dihasilkan pencarian akan lembaga pelaku yang mencari keun-

tungan dalam rangka ECDC, mengikuti kepentingan bersama regional dan supraregional yang selektif dan sesuai dengan berbagai sistem rencana ekonomi nasional serta tujuan-tujuan pembangunan. Motor institusional demikian dari kerja sama dan integrasi adalah perusahaan multinasional, yang dapat didefinisikan sebagai "kesepakatan formal dan lebih dari sifat sementara antara dua atau lebih negara-negara Dunia Ketiga—atau warga negaranya—untuk saling menjalankan tujuan-tujuan ekonomi yang diinginkan dalam produksi, pertukaran dan/atau penciptaan jasa" (R. Green). Bentuk yang umum adalah *joint venture*.

2. Pembangunan sebuah perusahaan multinasional negara berkembang—tidak sama dengan perusahaan multinasional negara-negara OECD yang disebut sebagai perusahaan transnasional—merupakan tuntutan utama konsep ECDC. Karena fleksibilitasnya yang besar, perusahaan ini mampu mengembangkan kerja sama dalam bentuk yang disepakati. Sebagai titik berat program Kelompok 77 dan gerakan nonblok, tuntutan akan perusahaan demikian mencerminkan arti yang makin besar dari investasi langsung dan alih teknologi di samping ekspor barang.

3. Menurut perkiraan proyek Harvard, telah ada lebih dari 1.000 perusahaan multinasional jenis ini. Majalah *Fortune* memperlihatkan bahwa di antara 500 perusahaan multinasional non-AS, di antaranya adalah 104 perusahaan multinasional Dunia Ketiga (namun dua kasus—di antaranya *General Motors do Brazil*—adalah

anak perusahaan multinasional OECD). Negara asal dari perusahaan multinasional terutama *Newly Industrializing Countries* (NIC, NIB) di Amerika Latin (Argentina, Brasilia, Kolombia, Meksiko), Asia Selatan, dan Asia Tenggara (India, Korea Selatan, Hong Kong, Singapura).

4. Negara-negara tempat investasi cukup banyak dan tersebar secara geografis: di Amerika Latin di negara-negara besar ada kegiatan yang saling mengisi; negara-negara yang lebih kecil biasanya muncul sebagai pembeli pada negara-negara yang lebih besar. Negara-negara tempat investasi di Afrika Timur, terutama Tanzania dan Kenya, di Afrika Barat adalah Ghana dan Nigeria, dan di Asia Tenggara adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina.

5. Dalam hal pendirian dan kepemilikan dapat dibedakan empat kategori perusahaan sebagai berikut. a. Perusahaan yang terutama berdasarkan pangsa modal swasta dan peningkatan penjualan. Mereka terutama aktif di sektor barang konsumsi (pakaian, sepatu, dsb.) dan sangat disukai terutama oleh perusahaan-perusahaan di India, Mesir, Meksiko, dan Brasilia. b. Perusahaan yang karena inisiatif dalam sektor publik berlandaskan bilateral atau multilateral, tetapi berada di luar kerangka pengelompokan regional dan subregional. Kegiatan mereka terutama berada pada industri basis (besi dan baja, permesinan). Negara terkemuka di sini adalah India, Argentina, Brasilia, dan Meksiko. c. Perusahaan yang dibangun dalam kerangka pengelompokan regional dan subregio-

nal. Contoh jenis ini hampir semua terdapat di Amerika Latin, dibangun terutama melalui gabungan-gabungan yang sesuai melalui SELA dan Pakta Andes di sektor bahan mentah (bauksit, pisang, pupuk buatan), dalam perbankan dan di bidang energi dan transportasi. d. Cabang perusahaan-perusahaan ECDC (*Economic Cooperation among Developing Countries*) mendapat peran yang kecil.

6. Alasan penggerak utama untuk gabungan kerja sama produksi multilateral terutama adalah sempit dan/atau pekanya pasar dalam negeri, kesulitan memasarkan keuntungan persaingan melalui kontrak dan lisensi atau perjanjian serupa, serta batasan impor dari pihak negara industri. Sebagai tujuan ekonomi pokok adalah: a. integrasi berbagai tahap produksi sebuah proses produksi sektoral melalui pemanfaatan sumber daya regional dan komplementaritas pasar; b. pemanfaatan sumber daya yang tidak dapat dikembangkan dengan satu-satunya basis pasar nasional (misalnya di sektor minyak bumi: PETROBRAS dan produksi baja SIDEBRAS di Brasilia; dalam pengolahan bahan mentah: CORDEMEX di Tanzania); c. pembagian risiko dan penghematan ongkos melalui ukuran usaha yang optimal dan pemanfaatan ongkos pengolahan yang murah; d. pembangunan bersama daerah-daerah perbatasan; e. peningkatan kemungkinan perdagangan (pembangunan sebuah posisi pasar menghadapi transnasional OECD) melalui penciptaan perusahaan transportasi dan perdagangan yang dilakukan untuk tujuan ini; f. pembangunan sistem komunikasi

khusus dengan landasan hubungan langsung Selatan-Selatan; g. peningkatan posisi tawar negara berkembang melalui penciptaan perusahaan ekspor dan impor multinasional. Kemungkinan sektoral menawarkan terutama untuk bidang penyelesaian dan pembangunan, perdagangan, dan infrastruktur, termasuk pengadaan energi, jasa termasuk komunikasi dan sumber daya alami.

7. Penentu keberhasilan perusahaan multinasional adalah kemurahan di bidang pembiayaan, informasi, periklanan, teknologi, manajemen, infrastruktur dan hukum serta hukum perpajakan. Tindakan-tindakan penunjang demikian sangat membantu, misalnya penyamaan perusahaan ini dengan perusahaan nasional sejenis, usaha-usaha standardisasi spesifikasi produk, *clearing agreement* untuk jalinan lalu lintas pembayaran internasional, serta sekretariat untuk Dunia Ketiga, yang sangat memungkinkan kerja sama seperti itu. Pada pendirian perusahaan multinasional dimungkinkan berbagai struktur dan kombinasi elemen-elemen kerja sama (sumber daya alam, modal sendiri, modal pinjaman, teknologi, manajemen, hubungan produk dan pasar) antarnegara mitra. Karena perusahaan multinasional sering mempunyai tujuan melampaui keuntungan jangka pendek, sektor publik, terutama perusahaan negara mempunyai peran sangat besar dalam pendirian dan pelaksanaannya.

8. Dampak yang dihasilkan kegiatan perusahaan multinasional pada perekonomian nasional negara penerima, diperlihatkan oleh penelitian

komparatif di daerah Asia Timur (Thailand, Indonesia, dan Hong Kong), yaitu perusahaan multinasional dalam hal ongkos impor variabel (untuk bahan mentah, mesin, dan perlengkapan), transfer keuntungan dan pembayaran hak paten memperlihatkan neraca yang sangat menguntungkan dibandingkan transnasional OECD. Hal yang juga menghemat ongkos untuk negara penerima adalah perusahaan multinasional negara berkembang tidak memproduksi barang-barang dengan merek yang dilindungi dan ongkos pemasarannya lebih kecil dibandingkan perusahaan-perusahaan OECD.

Negara asal mendapat keuntungan dari investasi perusahaan multinasional jika menginvestasi keuntungan ini di negaranya sendiri dan dalam sektor-sektor produktif seperti terlihat pada kegiatan luar negeri *joint ventures* India. Keuntungan-keuntungan ekonomi yang dapat diperolehnya tersingkir oleh ketakutan-ketakutan politik, terutama di negara-negara lebih kecil, akan adanya penguasaan oleh negara yang lebih besar.

Dampak negara ketiga, dapat dilihat terutama pada perusahaan-perusahaan OECD yang lebih kecil dan perusahaan negara Eropa Timur. Dalam memproduksi barang industri yang di standarisasi dengan teknologi madya, mereka mendapat saingan dari perusahaan multinasional baru ini. Persaingan antara perusahaan multinasional OECD dan negara berkembang, sebenarnya masih terbatas. Selangkah lebih majunya perusahaan transnasional di bidang pengetahuan dan pengembangan teknologi, pema-

saran dan pembiayaan proyek, memperlihatkan bahwa keduanya-transnasional dan multinasional-beroperasi pada bidang yang berbeda, jika dilihat dalam jangka panjang lebih memperlihatkan kerja sama pembagian kerja daripada bersaing.

9. Perusahaan multinasional negara berkembang bukan merupakan tambahan untuk kerangka hubungan Selatan-Selatan, melainkan lebih merupakan sumbangan penting untuk pengembangan lanjut pembaruan institusional, termasuk kerangka *collective self-reliance* dan pendirian kerja sama dalam hubungan Selatan-Selatan dan kerja sama Utara-Selatan. Bagian-bagian dari kerangka ini jelas baru diformulasikan dan didiskusikan dalam pendekatan-pendekatan.

Kepustakaan: D. Lecraw, *Direct Foreign Investment by Firms from Less Developed Countries*, Oxford Economic Papers, Oktober 1977; R.H. Green, "Die multinationalen Unternehmen der Entwicklungsländer: Anmerkungen zu einer operationellen Komponente der wirtschaftlichen Zusammenarbeit der Dritten Welt", dlm.: K.M. Khan (ed.), *Self-reliance als nationale und kollektive Entwicklungsstrategie*, München 1980, hlm. 367 dst.; P. O'Brien, "The New Multinationals. Developing-Country Firms in International Markets", dlm.: *Futures*, Agustus 1980, hlm. 303 dst.; K. Kumar, "Third World Multinationals. Growing Force in International Relations", dlm.: *International Studies Quarterly* 26 (1982), no. 3, hlm. 397 dst.; L.T. Wells, *Third World Multinationals: The Rise of Foreign Investment from Developing Countries*, Cambridge (Mass.) 1983; S. Lall, *Multinationale Konzerne aus der Dritten Welt*, Frankfurt/New York 1984; D. Hansohm/K. Wohlmuth, "Transnationale Konzerne der Dritten Welt und der Entwicklungsprozess armer Länder", dlm.: *Peripherie* (1985), no. 21, hlm. 60 dst.; K.M. Khan, *Multinationals of the South. New Actors in the International Economy*, New York 1986. kb perusahaan transnasional (*Transnational Corporation/TNC*) Disebut

perusahaan transnasional

juga perusahaan multinasional/multis/
perusahaan internasional, dalam pe-
ngertian umum merupakan perusa-
haan dunia seperti Exxon, Shell,

Texaco, British Petroleum, General
Motors, Ford, Chrysler, Daimler
Benz, Volkswagen, Toyota, General
Electric, IBM (*International Business*

Pro	Argumentasi	Kontra
1. Pertukaran teknologi dan *alih tek- nologi di negara-negara yang kurang berkembang	1. Menghindari pemanfaatan di seluruh dunia dari kemajuan teknik melalui pemakaian hak paten selektif	
2. Peningkatan perkembangan ekonomi; pengenalan: - proses pemasaran baru - produk baru - teknik manajemen baru Meningkatkan pertumbuhan kemakmuran di seluruh dunia	2. "Pengisapan" bahan mentah dan tenaga kerja	
3. Peningkatan kualifikasi personal Penciptaan tempat kerja baru	3. Pemindahan tempat kerja ke negara lain Penyedotan modal uang dan barang	
4. Mengalir masuk devisa	4. Pemindahan keuntungan Manipulasi kurs devisa melalui politik modal yang berorientasi internasional	
5. Dukungan politik ekonomi nasional yang ditujukan kepada kesempatan kerja penuh, pertumbuhan, dan ke- seimbangan neraca pembayaran	5. Melanggar politik ekonomi negara asal perusahaan dan negara pene- rima Merugikan politik uang nasional (me- nyedikitkan uang negara dengan tujuan memerangi inflasi melalui pengambilan kredit internasional) Menghindari pembatasan devisa na- sional Manipulasi pemerintah nasional	
6. Peningkatan pendapatan dari pajak	6. Melanggar perpajakan melalui harga oleh harga perusahaan	
7. Intensifikasi persaingan dengan tuju- an pengadaan yang lebih baik	7. Merugikan konsumen melalui politik harga yang bersifat monopoli Pembatasan penjualan Menghalangi pesaing nasional yang lebih lemah Cenderung menguasai pasar dan membatasi persaingan	
Tanda-tanda tanpa argumentasi bantahan		
- Pembangunan industri-industri ekspor	- Efek kultur negatif pada negara pe- nerima yang lebih kecil	
- Pembangunan sarana pendidikan	- Melemahkan serikat buruh	
- *Substitusi impor (barang yang sela- ma ini harus diimpor karena dari struktur ekonomi negara berkem- bang kekurangan devisa, dibuat sendiri di dalam negeri)	- Menyetujui dan menjalankan inter- vensi politik, ekonomi, dan militer dari negara asal demi kepentingan perusahaan transnasional (misalnya ITT di Cile)	
	- Membesarkan ketidakseimbangan re- gional melalui pemindahan dalam kutub-kutub pertumbuhan	

Sumber: M. Tolsdorf, *Multinationale Konzerne*, Berlin (West) 1982, hlm. 113 dst.

Machine), ITT (*International Telephone and Telegraph*), Philips, Siemens, Hoechst, BASF (*Badische Anilin und Soda Fabrik*), dsb. Kapan sebuah perusahaan dinamakan sebagai transnasional atau internasional, masih diperdebatkan. Suatu definisi minimal dapat berbunyi, sebuah perusahaan adalah internasional jika memiliki perusahaan yang terikat di satu atau lebih negara, jadi tidak bergantung pada ukuran atau hasil penjualan perusahaan tersebut. Meskipun ada internasionalitas kegiatan usahanya, perusahaan transnasional tetap bersifat nasional dalam hal modal asal nasional, pusat perusahaannya, dan politik kepentingannya. Diukur dari hasil penjualan dunia, yang sekarang mendominasi adalah perusahaan transnasional AS, diikuti Jerman dan Jepang.

Investasi langsung perusahaan transnasional berpusat sejak awal tahun '70-an dengan perbandingan negara industri : negara berkembang adalah 70 : 30, terutama karena pasar dan kestabilan politik yang lebih besar di negara industri. Investasi langsung di negara berkembang terutama bertujuan mengamankan sumber-sumber bahan mentah, penurunan ongkos sampingan (transportasi, bea, perlindungan lingkungan, dsb., pemindahan ke zone produksi bebas), mengamankan pasar penjualan, dan penghematan ongkos upah (negara-negara berupah murah).

Dari perspektif negara berkembang, kegiatan perusahaan transnasional sering dikategorikan sebagai neokolonialisme. Tuduhan ini berhadapan dengan argumentasi per-

dagangan bebas dunia yang ditonjolkan oleh pihak negara industri.

Kepustakaan: K. Busch, *Die multinationalen Konzerne*, Frankfurt 1974; V. Bethke/G. Koopmann, *Multinationale Unternehmen und Entwicklungsländer*, Hamburg 1975; D. Senghaas/U. Menzel (ed.), *Multinationale Konzerne und Dritte Welt*, Opladen 1976; G. Breidenbach, *Internationale Konzerne*, Reinbek 1977; U. Holtz, *Europa und die Multis. Chance für die Dritte Welt?*, Baden Baden 1978; V. Bornschier (ed.), *Multinationale Konzerne Wirtschaftspolitik und nationale Entwicklung im Weltsystem*, Frankfurt 1980; H. Kerner/Leffler/P. Schmitz/R. Tiedtke, *Multinationale Menschenrechte in der Dritten Welt*, Bornheim-Merten 1985; R. Tetzlaff, "Internationale Konzerne/Transnationale Unternehmen", dlm.: D. Nohlen/P. Waldmann (ed.), *Dritte Welt*, München 1987, hlm. 366 dst. **rs**

Petrolatin Perusahaan multinasional, didirikan pertengahan tahun 1982 dalam rangka *SELA oleh perusahaan-perusahaan minyak bumi yang dinasionalisasi di Brasilia, Meksiko, dan Venezuela. **Tujuan:** pemanfaatan yang baik sumber daya regional. Petrolatin merupakan hasil sementara dari sederet usaha kerja sama Amerika Latin dalam sektor energi, sejak tahun 1965 berlangsung perjanjian untuk saling membantu dalam hal eksploitasi dan pembagian minyak negara dan *OLADE tahun 1973. **wh**

Physical-Quality-of-Life-Index → miskin.

Piagam Aljir Pernyataan prinsip Kelompok 77 dalam konferensi tahun 1967 di Aljir. Negara berkembang memformulasikan posisi dan tuntutan untuk *UNCTAD II a.l. preferensi untuk produk jadi dan setengah jadi, penghapusan bea di negara industri tanpa tuntutan sebaliknya ke negara berkembang. **dn**

Piagam Banjul → hak asasi manusia.

Piagam Hak dan Kewajiban Negara-Negara dalam Ekonomi Dokumen tambahan dalam masalah politik ekonomi untuk deklarasi hak asasi manusia yang diusulkan dalam UNCTAD III di Cile (1972) oleh mantan Presiden Meksiko Echevarria, dan diterima 12 Desember 1972 oleh sidang umum PBB dengan mayoritas suara. Piagam, bertolak dari kedaulatan ekonomi bangsa-bangsa dan sebuah kewajiban sosial internasional dari tindakan ekonomi, berisi tuntutan mendasar Dunia Ketiga untuk pembangunan sebuah tata ekonomi dunia baru.

Kepustakaan: (Teks Piagam dari bahasa Jerman): R. Jonas/M. Tietzel (ed.), *Die Neuordnung der Weltwirtschaft*, Bonn Bad Godesberg, 1976. vgl

Piagam Havana → GATT.

Piagam Sosial Eropa → hak asasi manusia.

Pitcairn → Kepulauan Pasifik.

PL 480 (*Public Law* no. 480) Berdasarkan AS dapat mengirim bahan pangan ke negara berkembang dengan persyaratan prioritas; ada kemungkinan untuk membayar kembali dalam mata uang sendiri. Sebagian dana (*counterpart funds*) digunakan untuk membiayai sarana-sarana AS di negara berkembang (kedutaan besar, program penelitian) serta untuk proyek-proyek pembangunan. wpz

place-system → Lesotho.

PLO Palestine Liberation Organization (Organisasi Pembebasan Palestina), atas dorongan Nasser tahun 1964 berdiri organisasi, wadah dari hampir semua kelompok gerilya Palestina. Wakil yang diakui untuk

semua orang Palestina (anggota Liga Arab dan gerakan nonblok), sejak tahun 1969 dipimpin oleh Yasser Arafat. Tujuan maksimalnya, yaitu pendirian sebuah negara demokratis dan nyata di perbatasan Palestina tahun 1948, dengan Islam, Yahudi, dan Kristen dapat hidup berdampingan dengan hak yang sama (*National Charta*, Ayat 2 dan 19), tidak dapat disatukan dengan eksistensi Israel. Untuk memperjuangkan tujuan-tujuannya sampai sekarang, strategi PLO dapat dibedakan secara umum dalam tiga hal yang selama ini dilakukannya: a. pertikaian bersenjata dengan Israel; kekalahan militer negara-negara Arab memperlihatkan kurang berhasilnya strategi ini; selanjutnya Israel dapat terus menguasai tanah Palestina; b. kegiatan gerilya; memang mengalihkan perhatian publik dunia ke masalah Palestina, tetapi tidak dapat menaklukkan Israel; c. jalan keluar politik yang diharapkan memungkinkan realisasi hak menentukan sendiri melalui perundingan (mula-mula) di daerah Yordan Barat dan Jalur Gaza yang diduduki Israel.

Sejak tahun 1973 perkembangan PLO ditandai oleh konflik internal mengenai nilai jalan keluar politis. Sementara kelompok PLO radikal (Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina, Front Demokrasi) menentang jalan keluar melalui perundingan, sekelompok mayoritas di tahun '70-an dan '80-an memperjuangkan usaha penyelesaian politik berdampingan dan tekanan militer, serta sebuah jalan keluar negara kecil sebagai posisi awal yang menguntungkan untuk realisasi sebuah negara Palestina

keseluruhan. Sikap negara-negara Arab dalam 'Konflik Timur-Tengah banyak mempengaruhi garis politik PLO, setelah tahun 1973 di bawah kekuatan moderat dan Arafat menyebabkan orientasi besar ke pemecahan politik, yang memberikan makin banyak pengakuan internasional kepada PLO.

Sejak awal tahun '80-an dari pernyataan di lingkungan Arafat dapat disimpulkan bahwa PLO dapat menerima sebuah koeksistensi dengan Israel. Hal ini menimbulkan ketegangan besar di dalam organisasi karena pemikiran demikian sama sekali tidak dapat diterima oleh front penolakan yang berpegang teguh pada tujuan maksimal. Setelah terjadi invasi Israel ke Lebanon tahun 1982—jelas bertujuan menghancurkan PLO—yang menyebabkan PLO mengalami kekalahan dan pejuang-pejuang Palestina harus menarik diri (hampir semua) dari pusat pangkalan di Beirut (sejak itu di Tunis), konflik strategi intern mengakibatkan perpecahan *de facto* PLO. Arafat berusaha mencari kerja sama dengan kekuatan-kekuatan Arab yang moderat (Mesir, Yordania), sementara kelompok radikal yang tertinggal di Lebanon didukung oleh Suriah tetap bersikap nonkompromi. Arafat (1983) memang dikuatkan oleh Dewan Nasional Palestina (DNP, parlemen Palestina di pengungsian) sebagai pimpinan PLO, tetapi dalam rapat DNP berikutnya November 1984 (Aljir) terlihat perpecahan organisasi dengan menjauhkan diri dari kelompok radikal. Pertikaian makin menajam, ketika Arafat—makin dipertanyakan dalam kelompoknya sendiri,

Fatah—Februari 1985 melakukan perjanjian Amman dengan Raja Hussein dari Yordania, yang menginginkan realisasi hak menentukan sendiri orang Palestina di dalam sebuah konfederasi Palestina-Yordania mengenai perundingan perdamaian internasional dengan keikutsertaan semua pihak (termasuk Israel). Adanya pergeseran koalisi yang meluas di kubu Arab memungkinkan sebuah rujukan antarfraksi yang bermusuhan. Raja Hussein Februari 1986 mengumumkan peredaan ketegangan (sementara) antara Yordania dan Suriah dalam rangka perjanjian Amman tersebut, yang tidak diterima secara positif baik oleh Liga Arab maupun Israel. Perang kubu yang dimulai pada tahun yang sama di Lebanon antara orang Palestina dan milisi *Amal* yang didukung Suriah, juga membangkitkan kebutuhan di antara kelompok-kelompok radikal akan sebuah persatuan di dalam PLO. Setelah Arafat membatalkan perjanjian Amman dan menyatakan diri kembali ke posisi PLO lama yang keras (misalnya penolakan perjanjian terpisah menurut model perjanjian Mesir-Israel tahun 1979; tidak ada jalan keluar antarnegara), dalam rapat DNP April 1987 (Kongres Rujukan) ia dipilih kembali sebagai pemimpin PLO. Masa-masa berikut, persatuan PLO ditingkatkan, terutama melalui pemberontakan (yang diinisiatifkan) penduduk sipil (*intifada*, sejak akhir tahun 1987) di daerah-daerah yang diduduki Israel. Sementara Israel berusaha mengendalikannya, PLO makin mempunyai posisi kunci dalam Konflik Timur-Tengah, ketika Raja

Hussein (Juli 1988) akhirnya menyerahkan Yordan Barat demi negara Palestina yang baru tercipta. November 1988 DNP di Aljir memproklamasikan berdirinya sebuah "negara merdeka Palestina di atas tanah Palestina" dan sekaligus bersedia melakukan perundingan dengan Israel mengenai jalan pemecahan dua negara, serta kesediaan PLO untuk tidak melakukan terorisme di masa depan. Dengan demikian, haluan Arafat yang moderat dan realistis dapat dijalankan, sekaligus pemikiran persatuan dalam PLO karena kekuatan-kekuatan radikal tunduk pada keputusan mayoritas DNP dengan pernyataan bersedia melakukan bersama *intifada*. Dengan keputusan ini AS tidak dapat lagi menolak untuk mengakui PLO sebagai mitra bicara (Desember 1988). PLO dalam waktu singkat telah membuat loncatan besar, dari bahaya tidak mempunyai arti sampai ke pengakuan internasional, sebagai pihak yang pantas melakukan perundingan, sementara Israel awal tahun 1989 dalam posisi kalah karena sikap kerasnya yang (masih) menolak.

Kepustakaan: A. Frangi, *PLO und Palästina*, Frankfurt 1982; M.S. Nasser, *PLO - Theorie und Praxis. Versuch einer kritischen Analyse*, Frankfurt 1985; U. Rombach, *Die Palästinenser und die PLO*, Pfaffenweiler 1987; A. Hottinger, "Arafats Friedensangebot an Israel", dim.: EA 20 (1989), hlm. 39 dst. dn/bt

poblaciones → marginalitas.

poder popular Perkembangan *poder popular* (kekuasaan rakyat) berasal dari negara-negara Amerika Latin yang populis dan sosialis, terutama Kuba. Namun, sebagai konsep politik juga dapat ditemukan di be-

berapa negara di luar Amerika Latin, misalnya Angola.

Poder popular dalam pengertian luas adalah konsep politik pembangunan sebuah sistem kekuasaan rakyat yang dikukuhkan melalui pembangunan lembaga-lembaga negara dengan sifat demokrasi basis dan perlu dijamin secara institusional. Pertama-tama adalah mengikutsertakan lapisan sosial yang tidak mendapatkan perhatian (marginal, petani kecil, petani subsisten, buruh tani, dsb.) di kebanyakan negara berkembang dan tidak terwakilkan. Melalui organ basis *poder popular* mereka diutamakan dalam proses revolusioner dan sistem politik sehingga menciptakan landasan institusional dari *poder popular*. Tujuan organ basis adalah meningkatkan peluang partisipasi mayoritas penduduk yang tidak diperhatikan selama ini pada proses pendidikan keinginan politik dan proses pengambilan keputusan, menangkap kepentingan mereka dan lebih memperhatikannya, serta mendidik lapisan ini untuk mengartikulasi kepentingan mereka dan partisipasi politik yang aktif.

Bentuk institusional spesifik *poder popular* dalam sistem politik di beberapa negara berbeda-beda: mulai dari bentuk yang berkembang *poder popular* seperti di Kuba, dengan organisasi basis kekuasaan rakyat yang dibangun dalam bentuk pertemuan *munizipal* untuk landasan pembangunan negara dan proses pengambilan keputusan politik pemerintahan, sampai ke pendekatan-pendekatan perkembangan, seperti di Panama, dengan organ partisipasi negara dari *poder popular* selain partai-partai dan

kelompok yang kurang mempunyai pengaruh.

Namun, dalam bentuknya yang sudah berkembang, kekuasaan pengambilan keputusan dari *poder popular* dapat dipatahkan oleh instansi pemerintah pusat. Kelemahan kekuatan politik ini terutama karena sebagian besar dibentuk oleh pimpinan revolusioner dan tidak diperjuangkan oleh rakyat. Selain itu, pengaruh kekuasaan *poder popular* tetap mempunyai arti yang kecil, selama partisipasi politik lapisan bawah terisolasi dan direalisasi tanpa sekaligus emansipasi ekonomi dan sosial.

ks
Polinesia-Perancis → Kepulauan Pasifik.

POLISARIO (*Frente Popular para Liberacion de Saquia El Hamra y Rio de Oro*, Front Rakyat Pembebasan Saquia El Hamra dan Rio de Oro) → Mauritania, Sahara Barat.

politik bantuan pembangunan Seluruh sarana dan usaha yang dipakai serta dijalankan negara berkembang dan negara industri untuk menunjang pembangunan sosial dan politik di negara berkembang, artinya memperbaiki situasi kehidupan penduduk di negara berkembang. Politik pembangunan berdiri di atas premis-premis dan perspektif teoretis tertentu untuk masalah pembangunan, pada tujuan politik nasional dan internasional dari lembaga dan organisasi nasional dan internasional yang bersifat pemerintah dan swasta yang ikut ambil bagian dalam formulasi dan pelaksanaannya; politik pembangunan memerlukan kelompok penunjang yang terorganisasi di negara berkembang dan negara industri serta sebuah sarana yang di-

sesuaikan dengan tujuan politik pembangunan.

politik bantuan pembangunan AS Bantuan luar negeri AS (*foreign assistance*) pernah merupakan pengertian pokok legislatif, dan pada semua koreksi haluan secara retorik-programatis tetap merupakan sebuah produk persaingan sistem Timur-Barat. Sejarahnya yang berawal dengan program *Point IV* Presiden Truman (Doktrin Truman) setelah berlangsung Marshall-Plan (1949-1952) dapat dibagi dalam 5 tahap: a. masa *Mutual Security Act* (1953-1961), bantuan luar negeri merupakan instrumen utama politik antikomunis yang dipakai pada front-front perang dingin; b. strategi kemajuan sosial yang dicanangkan Presiden Kennedy setelah kejadian *Kuba shock* dan disimbolkan dalam *Alliance for Progress*, yaitu bantuan luar negeri yang mensyaratkan reformasi struktur intern kekuatan perlawanan demokratis untuk melepaskan gerakan revolusioner (tetapi menemui jalan buntu karena keraguan titik tolak reformasi dan *counterinsurgency*); c. tahap Perang Vietnam, kerangka pemikiran bantuan luar negeri yang berorientasi pembangunan tenggelam sama sekali, sebagian besar bantuan ekonomi dan militer dipakai untuk "program penenangan" paramiliter (→ *civic action*); d. tahap bantuan luar negeri yang lebih kuat berorientasi pada kebutuhan dasar yang dicanangkan tahun 1973 oleh kongres melalui pedoman-pedoman baru dan diperluas oleh Presiden Carter dengan politik hak asasi manusia; e. tahap Reagan setelah tahun 1980, bantuan luar negeri kembali

politik bantuan pembangunan AS

Tabel 12: Bantuan Ekonomi AS dlm. juta US\$

	1953-1961	1962-1981	1981	1988 ²
AID (dan sebelumnya)	16885	53650	4209	5466
- SSA/ESF ¹	8853	21642	2199	3200
Food for Peace	6416	25945	1542	1482
- Titel I	3867	16376	774	852
- Titel II	2549	9569	768	630
Peace Corps	-	1754	105	146
Bantuan luar negeri multilateral	189	12022	986	1450
Jumlah	24053	97437	7305	10068

¹ Security Supporting Assistance dan Economic Support Fund (sejak tahun 1979)

² Disetujui Kongres

Sumber: *US Overseas Loans and Grants*; AID: Congressional Presentation (untuk tahun 1981/1988).

mengutamakan fungsi keamanan dan politik peredaman.

Melalui semua tahap ini, bantuan luar negeri AS tetap merupakan variabel yang tidak bebas dari politik pembangunan dalam negeri dan luar negeri, sebuah alat pertikaian sistem di dunia, politik peningkatan ekspor dan pengamanan bahan mentah dan perlindungan politik untuk operasi modal swasta. Hal ini diurus oleh kartel kepentingan kementerian luar negeri—diciptakan tahun 1961 oleh Presiden Kennedy—yang berada di bawah dinas pembangunan AID, dari Departemen Keuangan (*Treasury*), sebagai pelindung neraca pembayaran dengan dilengkapi hak-hak istimewa mempunyai peran dalam politik pembagian dana, serta kementerian perdagangan yang berusaha meningkatkan ekspor dan mengamankan bahan mentah. Departemen Keuangan, bukan AID, yang menentukan politik proyek, didampingi oleh kementerian lainnya. Selain itu, kongres ikut menentukan pembentukan ke-

inginan politik bantuan pembangunan melalui hak persetujuannya dalam sebuah proses perundingan yang rumit dalam dan antara berbagai komisi dan subkomisi.

Dengan berbagai macam program dan banyaknya lembaga yang ikut ambil bagian, masalah koordinasi dan konflik tujuan pun timbul antara kementerian dan kepentingan yang bersaing. AID juga menemui kegagalan pada tugas koordinasinya yang berakar secara hukum, demikian pula *Development Coordination Committee* (DCC) yang kehabisan tenaga dalam memproduksi laporan-laporan. Tahun 1979 dengan pendirian *International Development Cooperation Agency* (IDCA), Kongres berusaha kembali mencakup kegiatan politik bantuan pembangunan secara organisatoris dan menarik kembali bidang penanganan setiap kementerian. Usaha ini juga menemui kegagalan karena adanya kepentingan kementerian yang sudah mapan sehingga dalam

politik bantuan pembangunan AS

Tabel 13: Bantuan Militer AS dlm. juta US\$

	1953-1961	1962-1981	1982	1988 ¹
Tunjangan MAP ²	16547	28169	176	701
Credit Sales	161	19796	750	4049
Program pendidikan	717	1184	38	52
Jumlah	19302	61040	922	5329

¹Disetujui Kongres

²MAP = Military Assistance Program

Sumber: seperti Tabel 12

Kongres didiskusikan kembali penghapusan IDCA.

Bantuan luar negeri yang biasanya disetujui setiap tahun berdasarkan hukum, mula-mula harus diserahkan pada dua badan bantuan ekonomi bilateral dan multilateral (*Economic Assistance*) dan bantuan militer atau keamanan (*Military dan Security Assistance*). Hal yang sulit adalah menggolongkan *Economic Support Fund*, ESF (dulu bernama *Security Supporting Assistance*, SSA), jumlahnya sebesar bantuan ekonomi bilateral bersama bantuan pangan. ESF ini mengalir berdasarkan titik berat tertentu ke daerah krisis di Timur Tengah dan Afrika bagian Selatan, kadang-kadang juga untuk membiayai pangkalan-pangkalan militernya (seperti di Spanyol, atau di Turki) dan baru-baru ini menjadi karcis masuk untuk "pasukan gerak cepatnya" (yang dipakai dari Maroko melalui Tunisia sampai Kenya dan Somalia). SSA/ESF memang muncul dengan nama anggaran AID, tetapi dikoordinasi oleh *Security Assistance Agency* di bawah Pentagon bersama bantuan militer lainnya.

Bantuan ekonomi sebaliknya harus dibagi lagi sebagai berikut. a. Bantuan keuangan dan bantuan

teknik bilateral (tahun 1982 merupakan 22% bantuan luar negeri) yang ada diurus oleh AID. b. Tiga organ *Food for Peace Program* yang ada di bawah Kementerian Pertanian. Organ pertama yang terbesar-dioraganisasi oleh perusahaan swasta dengan kredit dibiayai oleh *Commodity Credit Corporation*-membiayai penjualan kelebihan hasil pertanian sampai ke persyaratan yang menyimpang dari persyaratan pasar. Organ kedua, organisasi bersifat sosial (seperti CARE) dan program bahan makanan dunia (*WFP*) yang menyediakan kelebihan hasil pertanian secara gratis dan memberikan bantuan untuk bencana alam. Organ ketiga yang makin tumbuh dari hasil organ pertama untuk *Food for Development Program* disediakan ke negara berkembang termiskin. c. Bantuan personal dari *Peace Corps*-juga didirikan oleh Presiden Kennedy. d. Berbagai program khusus seperti bantuan untuk pelarian politik. e. Bantuan untuk organisasi-organisasi khusus PBB, program khusus internasional dan regional (seperti *UNRWA* atau Program Sahel). f. Tunjangan dan kredit ke organisasi keuangan multilateral (*Bank Dunia*, *Bank Pembangunan Regional*). Tabel 12 memperlihatkan

ukuran besar berbagai program ini, tetapi tidak pergeseran di dalam dan di antara masing-masing program, misalnya menurut pedoman-pedoman baru tahun 1973 untuk sementara waktu lebih menekankan pada bantuan untuk mayoritas miskin.

Bantuan multilateral sejak lama merupakan konflik politik bantuan pembangunan berkepanjangan antara kaum bilateral dan kaum multilateral dalam administrasi dan kongres. Argumentasi bahwa bantuan dengan banyak tunjangan ini akan kembali mengalir sebagai kontrak-kontrak barang dan jasa, serta tujuan memper tahankan pengaruh organisasi dan agen-agen pembangunan internasional, membuat para kritikus multilateralisme menjadi kembali terdesak ke minoritas.

Pada bantuan militer yang dianggap wajar sebagai strategi politik dan militer ditambahkan ke tujuan bantuan luar negeri, titik berat penyediaan senjata bergeser ke *credit sales*, artinya melalui kredit internasional yang murah membiayai ekspor senjata. Selain itu, garansi kredit pemerintah (1983) sebesar 4 miliar US\$ telah merupakan bisnis senjata yang berkembang dengan Dunia Ketiga.

Pernyataan pemerintah Reagan untuk kembali menaikkan pangsa bantuan militer yang sangat dikurangi sejak akhir perang Vietnam, kembali menjadi sebesar 60% dari seluruh paket bantuan luar negeri, mendapat perlawanan kongres. Selain itu, dana untuk bantuan pembangunan bilateral dan multilateral mengalami kemacetan, sedangkan pembelian senjata yang dibiayai kredit (*credit sales*) naik

pesat. Bagian bantuan PNB yang diakui ODA turun menjadi 0,23%. Kerangka baru fundamental yang dicanangkan administrasi Reagan dalam politik bantuan pembangunan, selanjutnya adalah penggunaan bantuan luar negeri lebih banyak sebagai alat politik keamanan dan ketertiban; penekanan inisiatif swasta dan politik pertumbuhan yang berorientasi kembali pada efek menetes ke bawah (*teori *trickle-down*). Di tahun-tahun terakhir bantuan luar negeri administrasi Reagan makin disesuaikan dengan politik penyesuaian struktur IMF dan Bank Dunia. Bantuan neraca pembayaran dan bantuan barang dari dana ESF meningkat menjadi 40% bantuan luar negeri bilateral. Hal yang lebih penting dari pergeseran dalam paket bantuan luar negeri ini adalah haluan perundingan berat yang diberi alasan ideologis "kekuatan pasar yang magis" terhadap tuntutan akan suatu keringanan utang atau akan suatu konsesi politik perdagangan. Keluarnya AS dari UNESCO dan pengurangan iuran untuk organisasi-organisasi PBB memperlihatkan sebaliknya AS dari multilateralisme kooperatif, jika tidak sesuai lagi—berbeda dengan kasus IMF dan Bank Dunia—dengan kepentingan ekonomi luar negeri dan politik luar negerinya. Kepustakaan: J. Tendler, *Inside Foreign Aid*, Baltimore/London 1975; R.L. Hough, *Economic Assistance and Security*, Washington, D.C. 1982; F. Nuscheler, *Entwicklungspolitische Wende in den USA* (Friedrich Ebert-Stiftung, Analysen Nr. 114), Bonn 1984; S. Erbe, "USA", dim.: M. Holthus/D. Kerschull (ed.), *Die Entwicklungspolitik wichtiger OECD-Länder*, Hamburg 1985, hlm. 103; B. May, *Reagan und die Entwicklungsländer*, München 1987.

fn

politik bantuan pembangunan Austria Austria mempunyai sederet persyaratan objektif dalam politik bantuan pembangunannya: Republik Austria tidak mempunyai sejarah kolonial dan karena keterbatasan sumber daya tidak memiliki kemungkinan pengaruh kekuasaan politik. Sebagai negara yang selalu netral (sejak tahun 1955) Austria bekerja untuk menghapuskan ketegangan dalam *Konflik Utara-Selatan; dalam pengertian ini "tugas baik"-nya sebagai negara netral adalah mempertahankan tetap terjadinya dialog Utara-Selatan (a.l. tempat kedudukan organisasi dan konferensi internasional, mengirimkan Pasukan Perdamaian PBB). Setelah ada beberapa usaha tersendiri dalam tahap tahun 1955-1963, politik bantuan pembangunan Austria secara konsepsional disimpulkan dalam prinsip-prinsip untuk politik bantuan pembangunan (1963) dan sejak itu diorganisasi dalam *Interministeriellen Komitee für Entwicklungshilfe* (Komitee Antar-kementerian untuk Bantuan Pembangunan), beranggotakan wakil-wakil dari 13 (!) Kementerian yang dipimpin oleh kanselir. Tahun 1970 pemerintah tunggal dari partai sosialis mengubahnya menjadi Komite Menteri untuk Bantuan Pembangunan. Tahun 1973 dalam rangka reformasi UU Menteri Negara, administrasi untuk bantuan pembangunan dari pemerintah ditempatkan di bawah kantor kanselir yang memiliki sekretaris negara tersendiri, a.l. mengurus koordinasi ekonomi, perusahaan negara, dan bantuan pembangunan. Bagian-bagian bidang politik bantuan pembangunan ditempatkan di

bawah kementerian luar negeri (*bantuan teknik multilateral), kementerian keuangan (*bantuan keuangan multilateral), dan kementerian perdagangan (*GATT, *UNCTAD, dsb.). Landasan hukum untuk bantuan pembangunan dari pemerintah diciptakan melalui UU Bantuan Pembangunan tahun 1974, di dalam Pasal 7 menentukan pembentukan Dewan Penasihat untuk bantuan pembangunan dan telah dibentuk tahun 1975. Tahun 1975-1977 Dewan Penasihat mempunyai 40 anggota lalu sekarang 26 anggota. Tugasnya adalah memberikan konsultasi kepada kanselir dan sekretaris negara mengenai masalah politik bantuan pembangunan dan bantuan pembangunan, serta memberikan komentar sebelumnya untuk laporan tiga tahun sekali mengenai bantuan pembangunan kepada parlemen. Berdasarkan susunannya yang heterogen (wakil-wakil partai politik, kementerian, kelompok profesi, bank, organisasi bantuan pembangunan swasta, dan ahli-ahli) Dewan Penasihat sulit menjalankan tugasnya dan sampai kini tidak dapat mengembangkan fungsi inisiatif sebenarnya. Dalam rangka pengalihan tugas setelah terjadi perubahan dalam pemerintah September 1984, urusan bantuan pembangunan dari kantor kanselir dialihkan ke kementerian luar negeri. Dengan demikian, sekarang ini hanya ada dua kementerian-luar negeri dan keuangan yang mengurus masalah bantuan pembangunan sehingga untuk pertama kalinya terdapat kemungkinan semua bantuan dari kementerian-kementerian lainnya ditayangkan dalam suatu

konsep politik bantuan pembangunan seluruh Austria yang menyatu.

Sejak tahun 1981 pemerintah Austria menerbitkan Program Tiga Tahun politik bantuan pembangunan. Selain itu, Yayasan Austria untuk penelitian bantuan pembangunan sejak tahun 1984 setiap tahun menerbitkan brosur lengkap mengenai politik bantuan pembangunan Austria. Untuk mengumpulkan kegiatan organisasi-organisasi swasta yang tersebar dan untuk memperbaiki kerja pelayanan yang penting, kantor kanselir tahun 1979 mulai membangun dinas informasi tersendiri untuk masalah bantuan pembangunan, yang juga menerbitkan majalah bulanan yang kritis *Entwicklungspolitische Nachrichten*. Meskipun relatif banyak orang Austria (25%) menaruh minat pada masalah Utara-Selatan, tingkat informasi dan kesadaran umum sebenarnya di Austria masih rendah.

Jika dibuat evaluasi mengenai politik bantuan pembangunan Austria dapat dikatakan—selalu terlihat dalam bidang kelembagaan—bahwa politik bantuan pembangunan itu berada dalam kepentingan politik ekspor dan pengamanan bahan mentah. Pengaruh kepentingan ekonomi yang tercakup dalam istilah mitra sosial terhadap politik bantuan pembangunan Austria dari pihak pemerintah, dapat dilihat melalui penempatan administrasi seksi bantuan pembangunan di bawah seksi nasionalisasi industri di kantor kanselir. Sejak pengaturan baru administrasi politik bantuan pembangunan tahun 1974 berlaku prinsip mitra dalam pembangunan yang mengandung penolakan terhadap bentuk

bantuan pembangunan yang tidak menguntungkan kepentingan sendiri melainkan demi orang lain, yaitu melalui bantuan pembangunan negara-negara Dunia Ketiga harus dijadikan mitra ekonomi dan perdagangan. Ciri khas lain politik bantuan pembangunan Austria adalah perbedaan antara pernyataan programatis mengenai politik bantuan pembangunan di satu pihak dan praktek politik bantuan pembangunan di lain pihak. Secara jelas Austria kehilangan tujuan kuantitatifnya yang terlihat di tempat terbawah dalam statistik DAC (tahun 1970: 0,07%, tahun 1987: 0,17% dari PNB; rata-rata DAC: 0,34%), situasi yang tidak dapat dilegitimasi dengan alasan sedikitnya kekuatan ekonomi. Selain itu, Austria memasukkan hasil yang tidak jelas dalam statistik bantuan pembangunannya, seperti ongkos perguruan tinggi umum, termasuk ongkos mahasiswa dari negara berkembang yang studi di sana, serta kredit bank pengawas untuk menjamin risiko dalam bisnis ekspor. Bertentangan dengan pernyataan, terutama akan memberikan lebih banyak bantuan kepada LLDC dan MSAC dengan persyaratan lebih lunak, jumlah bagian bantuan pembangunan pemerintah untuk negara-negara tersebut di pertengahan tahun '70-an hanya 2,4%. Pernyataan Kanselir Kreisky, "Marshall Plan untuk Dunia Ketiga", juga tidak mendapat tunjangan di kubu sendiri. Sampai akhir tahun '70-an bantuan pembangunan swasta melampaui bantuan yang berasal dari pemerintah. Bantuan pembangunan seluruh Austria tahun 1987 berjumlah

sekitar 2,5 miliar öS, di antaranya 500 juta öS merupakan multilateral dan 2 miliar öS bantuan bilateral. Untuk LLDC diberikan hanya sekitar 0,03% PNB. Persyaratan bantuan pembangunan Austria berdasarkan tingginya bagian kredit pemerintah yang terikat, harus dikatakan keras.

Kerja sama antara Austria dan negara-negara Dunia Ketiga berlangsung secara bilateral, multilateral, dan melalui ikut ambil bagian dalam Dialog Utara-Selatan. Bantuan bilateral (keuangan dan teknik) jumlahnya selalu di atas 2/3 keseluruhan bantuan pemerintah, dan terkonsentrasi ke Afrika. Sisanya untuk bantuan multilateral (teknik dan keuangan), di antaranya melalui IMF, World Bank, IDA, ADB, dan BID. Dalam Dialog Utara-Selatan dengan 1 April 1972 Austria menjalankan Sistem Preferensi Umum, diperluas pada 1 Januari 1975 (menghindari bea diperkirakan sekitar 1 miliar öS/tahun) dan tahun 1979 memenuhi sebagian tuntutan UNCTAD akan keringanan utang negara berkembang (14,8% jumlah utang dihapuskan). Selain itu, Austria ikut dalam Perjanjian Bahan Mentah internasional dan menjanjikan 2 juta US\$ untuk Dana Bersama.

Melalui perdagangan dengan negara berkembang, mengalir masuk kembali bagian yang besar (sekitar 60%) bantuan pembangunan Austria dalam bentuk kontrak-kontrak. Bagian perdagangan dengan negara berkembang pada perdagangan luar negeri Austria jelas turun karena dalam tahun-tahun terakhir semakin berorientasi ke pasar Eropa. Selama tahun 1980, 16,7% ekspor dan 13,4%

impor Austria masih dilakukan dengan negara berkembang, sedangkan bagian perdagangan dengan negara berkembang pada perdagangan luar negeri keseluruhan tahun 1987 hanya 7,4%.

Kepustakaan: H. Ornaier, "Zur österreichischen Entwicklungshilfe und Entwicklungshilfe-politik", dlm.: *Österreichisches Jahrbuch für Politik*, 1978, hlm. 313; A. Skuhra, "Österreich im Nord-Süd-Konflikt während der siebziger Jahre", dlm.: *Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft* 2/1981, hlm. 119 dst; ÖFSE (ed.), *Österreichs Entwicklungspolitik*, 1988.

wh
politik bantuan pembangunan Belanda Berasal dari tradisi politik luar negeri negara itu—di antaranya memengaruhi miskin dan mempertahankan hak asasi manusia. Di tahap pertama antara tahun 1947 dan 1962 Belanda memusatkan perhatian pada kerja sama dengan negara-negara bekas jajahannya, yaitu Antila-Belanda, Indonesia, dan Hindia-Barat. Sejarah kolonial menentukan secara positif dan negatif asal usul, jenis, dan ukuran politik bantuan pembangunan. Antara tahun 1963 dan 1973 berlangsung tahap kedua perluasan politik bantuan pembangunan yang ditandai dengan membesarnya bantuan (bagian PNB tahun 1963: 0,92%; tahun 1972: 1,42%) dan perluasan geografis kerja sama. Pendekatan kerja sama bilateral dengan bekas negara jajahan ditinggalkan demi pendekatan multilateral. Dengan pembangunan sebuah dewan untuk kerja sama pembangunan dan kementerian pembangunan yang mandiri (1965), organisasi politik bantuan pembangunan disistematisasikan. Tahun 1963–1977 berlangsung sebuah reformasi struktur di bawah Menteri Sosialis Jan Pronk. Setelah krisis minyak dan krisis eko-

nomi dunia, tujuan politik pembangunan Belanda bertujuan pemerataan kekuasaan dan kekayaan di dunia. Kriteria pemberian bantuan terpenting kemudian adalah memerangi kemiskinan dan penderitaan efektif serta swadaya di dan oleh negara berkembang. Selain itu, situasi historis, ukuran, dan stabilitas politik negara penerima, efisiensi pemberian yang sampai sekarang dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, mempunyai peran penting.

Sejak tahun 1975 bagian bantuan pembangunan pada PNB mencapai 0,7% seperti ditetapkan PBB sebab tujuan ini dilakukan dengan sungguh baik oleh pemerintah, partai, maupun pers dan kelompok-kelompok masyarakat. Politik pembangunan sejak tahun '70-an telah menjadi bagian pokok politik luar negeri Belanda. Sejak tahun 1976 diinginkan bahwa 1,5% pendapatan nasional netto dipakai untuk kerja sama pembangunan. Dengan bantuan sebuah rencana empat tahun dan anggaran bantuan pembangunan yang dikaitkan dengan pendapatan nasional, ditempatkan tersendiri dari anggaran lainnya dan tidak boleh dipotong, tujuan politik bantuan pembangunan tersebut semakin dapat direalisasi.

Tahun '80-an-dipimpin politikus Kristen-demokrat-seperti sebelumnya, Belanda ingin memerangi secara struktural kemiskinan di dunia. Lagi pula Perdana Menteri Lubbers (1986) dalam pernyataan pemerintah mengatakan bahwa negara berkembang harus menjalankan politik yang mengacu pada tujuan politik tertentu dan membuka semua bidang masya-

rakat untuk proses pembangunan. Negara berkembang juga diharapkan dapat berdampak lebih besar pada perekonomian Belanda. Dengan demikian titik tolak progresif tahun '70-an kehilangan maknanya.

Hubungan bantuan pembangunan bilateral dan multilateral Belanda bervariasi dari 1 ke 4 dan dari 1 ke 3. Politik bantuan pembangunan bilateral Belanda tahun '80-an bertitik berat pada regional. Belanda melakukan kerja sama pembangunan secara kontinu dengan 10 negara yang pendapatan per kapitanya ada di bawah batas IDA dan melakukan politik sosial dan ekonomi yang mencontoh pengertian Belanda; Mesir, Bangladesh, India, Indonesia, Kenya, Yaman Utara, Pakistan, Sri Lanka, Sudan, dan Tanzania. Secara multilateral Belanda terutama bekerja sama dengan PBB, Bank Dunia, dan ME, yang menginginkan suatu koordinasi lebih baik dalam aliansi Eropa.

Kepustakaan: J.J. Voorhoeve, *Peace, Profits and Principles - A Study of the Foreign Policy*, Den Haag 1979; M. Rudgers, "Die Entwicklungspolitik der Niederlande", dlm.: J. Bellers (ed.), *Entwicklungshilfepolitik in Europa*, Münster 1988.

ww

politik bantuan pembangunan Inggris Sejak tahun 1929 Inggris melalui *Colonial Development Acts* menjalankan semacam bantuan pembangunan yang lebih merupakan kepentingan kolonial daripada untuk pembangunan bangsa-bangsa jajahan. Politik bantuan pembangunan baru dilembagakan sejak tahun 1964 ketika *Labour Party* mendapat kemenangan dalam pemilu dan menciptakan *Ministry of Overseas Development* (ODM) yang ingin menyatukan

politik bantuan pembangunan Inggris

Tabel 14: Bantuan Pembangunan Pemerintah Inggris

	1975-1977	1980	1982	1984	1985	1986
dlm. juta pound	968	1.854	1.800	1.429	1.530	1.750
dlm. % GNP	0,40	0,35	0,37	0,33	0,33	0,32
bagian multilateral ¹	-	31,2	-	-	39,8	-

¹Untuk masing-masing tahun ganda, dalam % seluruh hasil netto

Sumber: DAC Uji tahunan 1987

semua kegiatan dan keahlian politik bantuan pembangunan. Akan tetapi, ruang gerak tetap terikat di bawah dewan antarkementerian yang menentukan kementerian luar negeri dan perdagangan. ODM yang berfungsi menjadi badan pelaksana saja ketika pemerintahan Heath kembali lagi ditempatkan pada kementerian luar negeri, di bawah pemerintahan *Labour* berikutnya (1974-1979) menjadi kementerian tersendiri (tanpa tingkat kabinet). Pada pemerintahan Thatcher, ODM dikembalikan di bawah kementerian luar negeri sebagai *Overseas Development Administration* (ODA). Posisi ODM yang tidak pasti di bawah organisasi pemerintah *Whitehall* selain menyebabkan tidak mempunyai arti kemandirian politik, juga terlihat fungsionalisasi politik luar negeri bantuan pembangunan.

Di luar semua pertukaran pemerintahan dan berbagai pernyataan partai-partai, tetap terdapat kontinuitas besar dalam programatika, petunjuk fungsi, ukuran, dan pembagian titik berat kegiatan dari bantuan pembangunan Inggris. Pemerintah *Labour* (dengan Judith Hart yang energik dalam ODM) dalam buku putihnya tahun 1975 (*More Help for the Poorest*) membuat sebuah strategi kebutuhan dasar baru meskipun mengalami defisit anggaran yang be-

sar, meningkatkan dana untuk bantuan dan bagian LLDC dari 13% (1974) menjadi 23% (1978). Pemerintah Thatcher memang mengumumkan revisi total dengan prinsip filsafat ekonomi dan masyarakat neoliberal serta pemotongan besar-besaran bantuan, tetapi sampai sekarang baru sedikit memotong bantuan (nyata) dari yang direncanakan dan terus melanjutkan politik pembagian dana yang dijamin melalui kontrak-kontrak (lihat Tabel 14). Thatcher mengumumkan penghapusan bantuan multilateral, tetapi mempertahankannya di tingkat yang tinggi sekitar 42%; mula-mula mempertajam ikatan pemasokan (tahun 1980: 84%), tetapi melonggarkan kembali selama kelangsungan stabilisasi ekonomi (tahun 1986: 46%); Thatcher ingin meluaskan instrumen *Aid Trade Provision* (ATP, sejenis pembiayaan campuran) yang ditangani kementerian perdagangan, tetapi tahun 1980-1985 membatasi bagiannya sekitar 8% dari bantuan pembangunan bilateral. Falsafah ekonomi perdagangan bebas didampingi dengan stabilisasi neraca perdagangan dan pembayaran, meningkatkan pemakaian secara halus sarana yang proteksionis.

Sekitar 3/4 bantuan pembangunan Inggris mengalir ke *Commonwealth*. Titik berat tetap di Asia:

India yang turun pangsaanya dari 20% (1970) menjadi sekitar 10% (1985/1986), Bangladesh, Malaysia, dan Pakistan; di Afrika: Sudan, Kenya, Zambia, Ghana, dan Tanzania. Terdapat pergeseran di antara daftar preferensi ini, tetapi tidak ada yang menonjol dan memberikan dampak sanksi politik. Bagian yang lebih dari proporsi diterima oleh sisa *empire*. Misalnya, orang-orang di Falkland dan St. Helen tahun 1980 per kepala menerima 5.000 kali lebih banyak daripada orang India (tidak termasuk investasi militer di Falkland setelah perang dengan Argentina).

Pemerintah Thatcher yang tidak tertarik pada suatu politik kemakmuran internasional dan lebih memegang dampak pembangunan dari investasi swasta, mula-mula mengurangi anggaran untuk bantuan pembangunan, tetapi meningkatkan kembali setelah tahun 1985 dan mengumumkan akan terus menaikkannya. Lagi pula bagian ODA pada PNB, yaitu 0,39% (1980) menjadi 0,32% (1986). Bantuannya dapat disamakan dalam luas dan kualitas dengan negara-negara OECD yang kaya. Misalnya, tahun 1985/1986 mendapatkan *grants element* yang lebih dari rata-rata, yaitu 99,6%. Lord Bauer tetap merupakan kritikus tajam dari "diplomasi hadiah" ini.

Kepustakaan: D. Seers/P. Streeten, "Overseas Development Policies", dlm.: W. Beckerman (ed.), *The Labour Government's Economic Record*, London 1972, hlm. 118; V. Cable, "Labour and International Inequality", dlm.: N. Bosanquet/P. Townsend, *Labour and Equality*, London 1980, hlm. 63; R. Kuhlmann, "Grossbritannien", dlm.: M. Holthus/D. Keschull (ed.), *Die Entwicklungspolitik wichtiger OECD-Länder*, Hamburg 1985, hlm. 241; F.

Nuscheler, *Die Entwicklungspolitik der Regierung Thatcher* (Friedrich Ebert Stiftung, Analysen Nr. 122), Bonn 1986.

fn
politik bantuan pembangunan Jepang
Di tahun '60-an Jepang masih merupakan negara penerima kredit nomor dua terbesar dari Bank Dunia setelah India. Sekarang, "negara dengan keajaiban ekonomi" di Asia Timur ini bukan saja telah menjadi kreditor terbesar di dunia, melainkan tahun 1988 telah melampaui AS sebagai pemberi kredit terbesar untuk bantuan pemerintah. Berkat peningkatan nilai mata uang Yen, kewajiban Jepang memberikan bantuan ke negara berkembang meningkat dari 1,35 trilyun Yen menjadi 10 miliar dolar. Sementara bantuan pemerintah dari negara-negara OECD lain sebagian besar mengalami stagnasi atau menurun, bantuan Jepang sejak tahun 1976 dalam dua periode lima tahun (1976-1980, 1981-1985), masing-masing meningkat dua kali lipat. Pemerintah Jepang mengumumkan peningkatan bantuan dua kali lipat sampai tahun 1992, walaupun di bidang politik lain-kecuali bidang pertahanan-dijalankan penghematan. Akan tetapi, jika melihat kekuatan ekonomi Jepang, peningkatan bantuan ini tidak seberapa besar: dibandingkan dengan negara-negara OECD lainnya tahun 1986 Jepang dengan bagian bantuan pemerintah sebesar 0,29% dari PNB hanya berada pada urutan ke-14. Kepala pemerintahan Jepang pada setiap pertemuan puncak ekonomi telah menjanjikan untuk lebih banyak lagi memberikan bantuan ekonomi, tetapi tidak pernah menetapkan sebesar 0,7% dari PNB sesuai dengan tujuan negara-negara DAC.

Motivasi peningkatan bantuan pertama-tama terletak pada kepentingan Jepang sendiri. Prioritas pada mengamankan bahan mentah dan membuka pasar di luar Jepang untuk melemparkan hasil produksi. Akan tetapi, kepentingan primer ekonomi luar negeri ini yang ditangani Kementerian untuk perdagangan luar negeri dan industri (MITI/Ministry for International Trade and Industry) telah kehilangan arti karena adanya kelebihan penawaran bahan mentah dan surplus neraca pembayaran Jepang.

Sejak awal tahun '80-an di kalangan pengusaha dan pemerintah yang terjalin erat satu sama lain, dengan dukungan kuat AS, menyadari bahwa Jepang sebagai kekuatan ekonomi harus mengambil lebih banyak tanggung jawab internasional. Bantuan pembangunan yang dimasukkan ke dalam konsep "keamanan menyeluruh", terutama ditujukan untuk stabilitas ekonomi dan politik negara tetangga di Asia Timur dan Asia Tenggara yang merupakan pemasok bahan mentah utama, pasar ekspor yang penting, negara tujuan untuk investasi dan jalur pelayaran penting; bantuan ini juga untuk negara-negara yang pernah diduduki Jepang selama Perang Dunia II dan membangun politik "bertetangga dengan baik"; selain itu bantuan pembangunan ini menciptakan simpati dan pengaruh di seluruh dunia dengan semakin meningkatnya globalisasi "negara tanpa kawan" (Helmut Schmidt).

Hingga saat ini dua pertiga bantuan pemerintah Jepang terkonsentrasi di Asia (Afrika 11%, Timur

Tengah 9%, Amerika Latin 8%). Jepang merupakan negara pemberi kredit bilateral terbesar untuk 18 negara Asia (diantaranya Republik Rakyat Cina yang menerima bantuan terbesar dari seluruh bantuan tahun 1986: 8,2%; diikuti Filipina: 7,5%, Indonesia: 5,8%, Thailand: 5,7%, Myanmar: 4,0%, Bangladesh: 3,6%) dan menggeser posisi AS sebagai saudara tua-jika tidak dihitung pemasokan senjata. Jepang secara berhati-hati meluaskan perannya sebagai kekuatan regional yang bukan berdasarkan kekuatan militer, melainkan berdasarkan perdagangan, investasi, dan "diplomasi sedekah".

Parlemen dan media sejak lama kurang tertarik pada pelaksanaan birokrasi bantuan pembangunan. Karena di Jepang tidak terdapat kementerian untuk bantuan pembangunan, di parlemen juga tidak terdapat komisi untuk itu. Usaha yang dilakukan beberapa anggota parlemen untuk menyelesaikan undang-undang mengenai bantuan pembangunan dan untuk memperkuat pengawasan parlemen, telah mengalami kegagalan. Angket yang dilakukan secara teratur menunjukkan bahwa mayoritas penduduk (sekitar tiga perempat) menerima adanya bantuan pembangunan pemerintah, tetapi kurang informasi dan kurang berminat. Memang terdapat banyak sekali NGO, tetapi jauh lebih sedikit dibandingkan NGO di negara industri Barat yang ikut serta dalam "perdebatan pembangunan"; terutama tidak terdapatnya "lobby pembangunan" dari pihak gereja yang melakukan tekanan legitimasi moral terhadap instrumen multi-

guna politik dan ekonomi bantuan pembangunan pemerintah. Budaya politik Jepang yang tertutup memasukkan kategori moral seperti keadilan dan solidaritas hanya untuk kehidupan politik dalam negeri. Tingkat kenaikan bantuan pembangunan pemerintah yang tinggi telah menghidupkan diskusi politik pembangunan. Media massa lebih sering menanggapi pertanyaan, "Apa yang terjadi dengan jumlah bantuan yang semakin meningkat?" Laporan-laporan mengenai objek-objek prestis diktator Ferdinand Marcos yang dibiayai Jepang dan penyingkapan praktek korupsi, menyebabkan pembentukan komisi penyelidikan di parlemen. Para kritikus menggunakan argumentasi yang sering digunakan dalam diskusi di negara industri Barat.

Jepang memberikan persyaratan yang relatif berat untuk bantuan pembangunan dibandingkan negara-negara OECD lainnya. Elemen subsidi tahun 1983 hanya sebesar 55%, tetapi setelah itu meningkat menjadi 78%. Elemen subsidi rata-rata anggota DAC sebesar 95%. Salah satu alasan rendahnya elemen subsidi yang diberikan Jepang adalah sekitar dua pertiga bantuan pembangunan pemerintah diberikan kepada negara-negara "berkembang dengan pendapatan menengah" di Asia yang tidak dikualifikasikan dalam persyaratan lunak IDA. Akan tetapi, elemen subsidi ini di tahun-tahun mendatang akan ditingkatkan.

Jepang lebih mendahulukan pembiayaan untuk proyek-proyek besar yang memberikan order untuk industrinya sendiri. Sebanyak 37% ban-

tuan pembangunannya—sehingga jauh lebih tinggi daripada negara kreditor lain—ditujukan membiayai bendungan-bendungan, pembangkit tenaga listrik, dan proyek besar lainnya untuk infrastruktur material. Karena tingginya surplus perdagangan, ikatan pemasokan Jepang memang mengalami penurunan dari sekitar 70% (1980) menjadi 30% (1984), tetapi keterlibatan yang kuat dari perusahaan dagang besar dalam menemukan, merencanakan, dan melaksanakan proyek-proyek pembangunan, telah mengikat sebagian besar bantuan pembangunan pemerintah pada order pemasokan perusahaan Jepang walaupun sejak tahun 1985 nilainya meningkat pesat.

Kritik di Jepang sendiri telah memberatkan birokrasi bantuan pembangunan pemerintah yang terikat erat dengan kepentingan perusahaan transnasional dan perusahaan dagang besar. Kepentingan mereka berhasil masuk dalam birokrasi pemerintahan yang sedikit tenaga kerjanya, kurang berpengalaman, dan berkaitan erat dengan industri besar. Untuk mendapatkan proyek-proyek, perusahaan swasta Jepang sering memberikan uang pelicin (merupakan hal yang biasa jika hal tersebut untuk kesejahteraan keluarga Jepang). Pemerintah Jepang terutama menghindari tindakan pengawasan terhadap negara tetangga dalam penggunaan bantuannya agar tidak menumbuhkan kecurigaaan hegemoni dan imperialisme. Oleh karena itu, pemerintah Jepang berhati-hati dengan semboyan dialog politik. Mereka mendapatkan kesulitan besar untuk mengurus anggaran ODA yang

semakin besar. Tidak terdapat Kementerian khusus, melainkan terdapat pembagian wewenang di antara berbagai departemen. Pergesekan birokrasi ini dianggap menjadi masalah utama politik bantuan pembangunan Jepang. Untuk mengurus bantuan modal didirikan *Overseas Economic Cooperation Funds* (OECF) yang secara formal berada di bawah *Economic Planning Agency* dengan status yang lemah dalam hierarki departemen. Mengenai politik pemberian kredit ditentukan oleh tiga departemen lain yang berpengaruh dan saling bersaing: sementara MITI dan departemen keuangan mengurus kepentingan perekonomian dengan luar negeri (pengamanan bahan mentah, mendukung perdagangan, dan investasi). Departemen luar negeri lebih banyak berusaha mendapatkan kawan dan pengaruh di Dunia Ketiga melalui "diplomasi sedekah" dan berusaha mendekati norma-norma sikap yang ditentukan oleh komisi *Development Assistance Committee* dengan cara memberikan perbaikan persyaratan pemberian kredit. Departemen keuangan yang sangat berpengaruh (pejabat tinggi OECF berasal dari sini) membawahi *Export-Import-Bank of Japan* (EIBJ) yang memberikan kredit ekspor dan mengurus sebagian besar program untuk *recycling* 30 miliar US\$ yang berasal dari surplus neraca pembayaran Jepang.

Japan International Corporation Agency (JICA) yang mengurus bantuan teknik dan pemberian subsidi, berada di bawah departemen luar negeri. Namun, dalam pengambilan keputusannya ikut serta enam departemen lainnya.

Dengan semakin besarnya bagian subsidi, JICA semakin lebih berbobot terhadap OECF dan departemen luar negeri semakin besar pengaruhnya dalam proses pengambilan keputusan untuk politik bantuan pembangunan Jepang. Namun, masalah sebenarnya dalam pengurusan politik bantuan pembangunan terletak pada kurangnya personal dari organisasi pelaksana. Jumlah personal di OECF dan JICA dalam waktu sepuluh tahun terakhir hanya meningkat 11%, sedangkan volume bantuan pembangunan Jepang meningkat empat kali lipat. Penghematan ongkos personal ini turut bertanggung jawab terhadap beberapa kekurangan pada bantuan pembangunan Jepang, misalnya: a. didahulukannya proyek-proyek besar yang mempermudah pengurusan dan arus uang keluar sehingga tidak dapat mencegah macetnya kewajiban memberi wewenang; b. kurangnya pengujian usulan proyek menurut kriteria politik bantuan pembangunan; c. besarnya pengaruh perusahaan konsultan dan perusahaan dagang untuk pemilihan dan pelaksanaan proyek yang jarang berorientasi pada kebutuhan kelompok miskin; d. mudah terjadi korupsi pada pemberian dana karena tidak adanya pengawasan yang cukup.

Kepustakaan: N. Akao (ed.), *Japans Economic Security*, Aldershot 1984; D. Hofmann, *Japans Entwicklungspolitik*, Berlin (DIE) 1984; M. Holthus, "Japan", dlm.: M. Holthus/D. Krebschul (ed.), *Die Entwicklungspolitik wichtiger OECD-Länder*, Hamburg (HWA) 1985; M. Pohl, "Die japanische Entwicklungshilfe in den 80er Jahren", dlm.: *Nord-Süd aktuell* Nr.1/1987; S. Okita, *Developing Economics and Japan*, Tokyo 1986; A. Rix, *Japans Economic Aid*, London 1980; B. May, *Japans Entwicklungspolitik als Element der Beziehungen zu Amerika*, dlm.: *Beiträge*

zur Konfliktforschung 19, 1989, 1, hlm. 73 dst.

in politik bantuan pembangunan Jerman 1. Politik bantuan pembangunan merupakan bidang kegiatan yang baru di dalam spektrum kegiatan politik. Dampaknya ke negara-negara lain dan dilihat dari tujuan jangka panjangnya, politik bantuan ini berbeda banyak dengan bidang-bidang politik lain sehingga diperlukan penanganan yang sangat khusus. Dengan tujuan membantu pembangunan dan tanpa mengharapkan imbalan yang seimbang, politik bantuan merupakan bagian dari kerja sama dengan negara berkembang, yaitu dalam ukuran kriteria DAC, yang merupakan bagian politik bantuan dari OECD. Hal inilah yang mendasari kemandiriannya relatif. Di lain pihak, politik bantuan pembangunan merupakan bagian dari politik keseluruhan sehingga mengandung impuls penting atas dasar motivasi nasional. Sebagai politik yang melewati batas negara, politik bantuan merupakan bagian dan bentuk khusus dari politik luar negeri (diplomasi, politik perdagangan luar negeri). Dengan demikian, politik bantuan tidak terpisahkan dari motivasi, tujuan, dan instrumen politik luar negeri yang bersifat strategis, ideologis, dan kepentingan perdagangan luar negeri. Penggambaran politik bantuan pembangunan sebagai bidang politik yang fungsional mandiri *sui generis* bergantung pada apakah tokoh-tokoh yang bertanggung jawab di Jerman terutama Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ)—berhasil menjelaskan tujuan-pembangunan negara-negara yang didefinisikan ter-

belakang-, bukan sebagai subtujuan politik nasional, melainkan sebagai tujuan yang cenderung hanya melayani tercapainya kepentingan nasional Jerman.

2. Sesuai dengan kemajemukan kepentingan kelompok dalam politik dalam dan luar negeri Jerman, yang tercermin dalam kepentingan nasional dan tercermin kembali dalam kaitan antara dasar dan tujuan politik bantuan pembangunan, politik bantuan pembangunan Jerman dimengerti sebagai suatu sistem tugas yang multifungsi. Banyaknya organisasi kelembagaan memperlihatkan politik bantuan pembangunan yang multifungsi di Jerman sebagai berikut. a. Di samping negara, yang diwakili oleh pemerintah Jerman, NGO juga aktif dalam politik bantuan pembangunan. Dengan demikian, politik bantuan pembangunan tidak hanya berlangsung di tingkat internasional, melainkan juga dalam tingkat hubungan transnasional. b. Administrasi politik bantuan pembangunan Jerman dapat digambarkan sebagai variabel yang memberikan batasan tanggung jawab kementerian dan bawahannya, dengan struktur organisasi dan proses pengambilan keputusan harus dimengerti sebagai jawaban terhadap teori khusus serta masalah politik dan sosial khusus dari tingkat nasional dan internasional.

3. Penekanan yang berbeda antara pertimbangan rasional mengenai politik bantuan pembangunan sesungguhnya dan pertimbangan rasional mengenai politik perekonomian luar negeri dan diplomasi, mencerminkan sejarah politik bantuan pembangunan

Jerman hingga saat ini. Sejarah politik bantuan pembangunan Jerman Barat dibagi menjadi 4 tahap: a. *tahap improvisasi dan penyusunan*: politik bantuan pembangunan sebagai alat diplomasi dan politik perekonomian luar negeri (sekitar tahun 1956 sampai paro kedua tahun '60-an); b. *tahap inovasi*: politik bantuan pembangunan sebagai politik aktif (1969/1970-1973/1974); c. *tahap stagnasi dan semakin kuatnya pragmatisme*: politik bantuan pembangunan sebagai manajemen krisis (1974 dst.); d. *tahap koalisi liberal-konservatif* (mulai tahun 1982): politik bantuan pembangunan menguat kembali dengan mengutamakan kepentingan Jerman.

4. Tahap improvisasi dan penyusunan: dasawarsa pertama kerja sama pembangunan di bawah Menteri untuk Bantuan Pembangunan, W. Scheel (1961-1966) dan Wischniewski (1966-1968), secara konsepsional ditandai oleh instrumentalisasi politik perekonomian dan politik luar negeri. Kementerian luar negeri yang bertanggung jawab untuk bantuan teknik mengerti bantuan luar negeri terutama sebagai alat perjuangan Barat di seluruh dunia untuk menghadapi masuknya komunisme di Dunia Ketiga. Dengan latar belakang terbagi duanya negara Jerman, Kementerian Luar Negeri Jerman menggunakan politik bantuan pembangunan dalam konsep Doktrin Hallstein, yaitu sebagai instrumen hukuman untuk menghalangi pengakuan diplomatik negara-negara Dunia Ketiga terhadap negara Jerman Timur. Kementerian Ekonomi Jerman yang berwenang memberikan

*bantuan keuangan menambahkan tujuan-tujuan politik luar negeri tersebut dengan penekanan terhadap usaha wiraswasta, politik ekspor, dan politik bahan mentah dalam kerangka ekonomi pasar sosial Jerman. Konsep politik bantuan pembangunan yang menentukan politik negara lain, makin dikuatkan oleh kedua menteri tersebut yang menyetujui konsep Kementerian Luar Negeri Jerman dan Kementerian Ekonomi Jerman serta menolak penggambaran secara jelas mengenai politik bantuan itu sendiri.

Pada tingkat organisatoris konsep improvisasi dan penentuan negara lain dari politik bantuan pembangunan merupakan sebuah sistem dengan penanggung jawab yang kurang jelas dan sulit terkoordinasi, tanpa ada kekuatan integrasi instansi yang bertanggung jawab penuh. BMZ yang didirikan tahun 1961 setelah beberapa tahun berhasil mendapatkan wewenang sebagai penanggung jawab politik bantuan pembangunan (tahun 1964 mengambil alih bantuan teknik dari wewenang Kementerian Luar Negeri, tahun 1972 mengambil alih bantuan keuangan dari wewenang Kementerian Ekonomi). Proses pengambilan keputusan politik bantuan berada dalam sebuah sistem komisi antarmenteri, dengan hak veto pada Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Ekonomi. Kurang keluarnya integrasi BMZ sama seperti desintegrasi organisasi-organisasi non-pemerintah yang melakukan bantuan pembangunan. Hal ini dikarenakan kurangnya kemampuan BMZ dan kelabilan struktur instansi ini yang se-

dang berada dalam tahap pembangunan.

Tidak adanya kemandirian fungsional dari politik bantuan pembangunan dan kekacauan organisasinya sesuai dengan situasi kevakuman teoretis politik pembangunan ketika itu. Sebagai landasan teoretis tindakan politik bantuan pembangunan digunakan elemen-elemen teori modernisasi yang sudah disederhanakan.

5. Tahap inovasi: perubahan politik luar negeri (politik peredaan ketegangan, berdirinya nonblok) dan parameter politik dalam negeri Jerman (tahun 1969 awal koalisi partai sosial dan liberal) pada akhir dasawarsa pembangunan pertama menciptakan persyaratan-persyaratan untuk perluasan ruang gerak pelaksanaan politik bantuan pembangunan. Peredaan ketegangan politik dunia serta antardua negara Jerman, menyebabkan Jerman Barat membuat politik luar negeri dengan horizon jangka panjang. Kemakmuran ekonomi dan makin kuatnya posisi Jerman Barat sebagai kekuatan ekonomi kedua di dunia, menciptakan politik ekonomi luar negeri dengan perspektif jangka panjang. *Trend* ini meringankan menteri kerja sama pembangunan, E. Eppler—ditunjang sebagian masyarakat yang aktif dalam bantuan pembangunan—untuk menyesuaikan kepentingan politik luar negeri Kementerian Luar Negeri (politik perdamaian) dan kepentingan politik ekonomi luar negeri dengan kepentingan politik BMZ (politik bantuan pembangunan sebagai politik dunia serta sebagai politik sosial yang meluas di dunia). Diuntungkan oleh situasi reformasi saat

itu, politik bantuan pembangunan dimengerti sebagai politik aktif dalam arti ganda, yaitu sebagai penggambaran politik BMZ dan sebagai politik bantuan pembangunan yang aktif dan mengacu pada kebutuhan-kebutuhan negara berkembang. Inovasi-inovasi yang dilakukan dalam bidang program a.l. mengolah studi-studi negara dan regional, program bantuan dari negara-negara bagian di Jerman Barat dan bantuan untuk proyek-proyek yang terikat (ikatan antara bantuan teknik dengan bantuan modal dan investasi).

Pembaruan konsepsional dan organisasi ini pada tingkat profesionalisme sesuai dengan keahlian yang besar dan merupakan konsekuensi kemajuan teori pembangunan (dengan meninggalkan kenafian teori-teori modernisasi) serta pengalaman-pengalaman yang didapatkan dalam berbagai proyek.

6. Tahap stagnasi dan pragmatisme: krisis ekonomi dunia dan dampak kejutan minyak bumi, sejak tahun 1973 secara bertahap mengembalikan politik pembangunan primer untuk manajemen krisis yang dikonsepkan politik luar negeri dan politik ekonomi luar negeri Jerman. Pengganti Eppler, Bahr (1974–1976) menitikberatkan politik pembangunannya dalam kerangka politik ekspor bahan mentah dan politik kesempatan kerja untuk kepentingan Jerman. Perbedaan antar-negara berkembang sebagai dampak krisis energi dihadapinya dengan perbedaan instrumen politik pembangunan. Menurutnya, kerja sama ekonomi dan keuangan harus kembali pada negara-negara pinggiran

(MSAC, LLDC) sesuai pengertian awalnya (strategi kebutuhan dasar), sementara negara-negara menengah (NIB) mendapatkan bentuk-bentuk baru kerja sama teknik-ekonomi. Dilihat dari politik Jerman Barat secara keseluruhan, politik bantuan pembangunan bukan lagi merupakan bidang politik yang secara fungsional mandiri (seperti dalam tahap kedua), melainkan dalam jalinan erat dengan politik perdagangan, ekonomi, dan luar negeri Jerman. Garis ini tidak berubah di bawah menteri-menteri selanjutnya. Jika Schlei (1976-1978) membatasi diri dengan bentuk klasik kerja sama ekonomi dan politik bantuan makin aktif di daerah selatan Sahara, Offergeld (1978-1982) menitikberatkan pada efisiensi. Perbedaan kecil adalah Offergeld relatif menjauhi politik *Containment* yang dilakukan pemerintahan Reagan karena terjadi penajaman konflik Timur-Barat dan makin aktifnya negara-negara COMECON di Dunia Ketiga (terutama di Afrika).

7. Politik bantuan pembangunan di antara falsafah ekonomi liberal, konsep politik konservatif, dan pembaruan-pembaruan perangkat bantuan (1982 dst.): politik bantuan pembangunan dari koalisi partai konservatif dan liberal mempunyai motto mengutamakan kepentingan Jerman sendiri. Berada dalam konsep filsafat ekonomi neoliberal (percaya pada kekuatan pasar, swastanisasi) dan konsep politik yang konservatif, paternalistik (politik bantuan pembangunan sebagai politik pengaturan dan politik pembendungan; dialog politik), bantuan pembangunan terutama

kembali sebagai perangkat meningkatkan ekspor (makin banyak pembiayaan campuran dan ikatan pemasokan; penemuan proyek secara aktif; berdampak penciptaan kesempatan kerja) dan merupakan pendukung politik luar negeri sekutu-sekutu Jerman. Keputusan-keputusan politik bantuan berjalan paralel dengan penerapan "Perencanaan Proyek Berorientasi Sasaran" dan reformasi-reformasi institusionalisasi untuk mendapatkan impuls-impuls untuk meningkatkan efisiensi.

Berlangsungnya krisis di seluruh dunia (krisis pertumbuhan dan kesempatan kerja, inflasi dan utang, proteksionisme), kevakuman teoretis politik bantuan, stagnasi Dialog Utara-Selatan, dan krisis tujuan politik pembangunan, menimbulkan dugaan bahwa ruang gerak politik bantuan yang secara fungsional relatif mandiri di masa depan akan makin dipersempit. Apalagi jika melihat situasi terakhir, yaitu runtuhnya sistem politik dan ekonomi di Eropa Timur, menyebabkan makin jelas adanya kepentingan untuk mendahulukan kepentingan pembangunan Jerman Timur.

Kepustakaan: K. Bodemer, *Entwicklungshilfe - Politik für wen? Ideologie und Vergabepraxis der deutschen Entwicklungshilfe in der ersten Dekade*, München 1974; M. Martinek, *Die Verwaltung der deutschen Entwicklungshilfe und ihr Integrationsdefizit*, Bad Honnef 1981; Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung (HSFK) dll. (ed.), *Hilfe + Handel = Frieden? Die Bundesrepublik in der Dritten Welt = Friedensanalysen 15*, vol. N.F. 97, Frankfurt 1982; M. Glagow (ed.), *Deutsche Entwicklungspolitik. Aspekte und Probleme ihrer Entscheidungsstruktur*, Saarbrücken 1983; M. Dauberstadt/A. Pfaller, *Bestandsaufnahme und Bewertung neuer entwicklungspolitischer*

politik bantuan pembangunan Jerman

Tabel 15: Bantuan Netto Jerman Barat ke Negara-Negara Berkembang dan Lembaga Multilateral tahun 1950-1987 (dlm. juta DM)

Jenis Bantuan	1984	1985	1986	1987	1950-1987
I. Kerjasama Pemerintah (ODA)¹	7916,5	8656,7	8317,5	7895,1	119583,4
1. Bilateral	5315,7	5826,1	5736,2	5556,8	84846,3
a) Tunjangan	3569,2	4197,7	3904,9	3894,6	50090,5
- Kerja sama teknik ²	2496,6	2576,3	2670,6	2760,6	32390,5
- Tunjangan lain	1072,6	1621,4	1234,4	1134,0	17700,0
b) Kredit dan bantuan kredit yang lain	1746,5	1628,4	1831,3	1662,2	34755,8
2. Multilateral	2600,8	2830,6	2581,3	2338,3	34737,1
a) Tunjangan ke organisasi-organisasi internasional	1663,3	1608,0	1471,0	1369,9	19341,8
b) Saham modal/subskripsi	946,9	1235,3	1123,9	983,6	15058,1
c) Kredit	-9,4	-12,7	-13,6	15,2	337,2
II. Bantuan Pemerintah lainnya	2830,6	2699,6	2464,4	2608,8	24507,0
1. Bilateral	2859,1	2731,7	2473,1	2612,4	21876,3
a) Kredit dari KfW	1146,3	798,5	788,4	-200,4	10111,0
b) Re-pembiayaan BMF	1691,7	1893,9	1641,3	2755,5	11257,9
c) Kredit lain	21,1	39,3	43,4	57,3	507,4
2. Multilateral	-28,5	-32,1	-8,7	-3,6	2630,7
III. Bantuan Pembangunan Swasta	1088,1	1246,9	1182,5	1159,6	12942,3
IV. Bantuan Swasta dengan kondisi seperti pada pasar	6680,6	4314,0	5162,0	4237,6	134662,2
1. Bilateral	5721,6	3194,2	4140,4	3521,5	112012,5
a) Investasi dan lalu lintas modal yang lain	4367,0	2504,0	2996,6	2945,5	82216,6
b) Kredit ekspor	1354,6	690,2	1143,8	576,0	29795,9
2. Multilateral	959,0	1119,8	1021,6	716,1	22649,7
V. Bantuan keseluruhan	18515,8	16917,2	17126,4	15901,1	291694,9

¹ Tunjangan bilateral dan multilateral serta kredit dan bantuan modal lain dengan kondisi khusus

² Sejak tahun 1984 termasuk ongkos tempat kuliah untuk mahasiswa dari negara berkembang

³ Tunjangan untuk organisasi nonpemerintah (misalnya gereja, yayasan, perkumpulan) dari dana sendiri dan sumbangan ke negara berkembang

Sumber: JHE 1988, hlm. 58 dst.

Ansätze, München dll. 1984; K. Bodemer, "Programmentwicklung in der Entwicklungspolitik der Bundesrepublik Deutschland", dlm.: F. Nuscheler (ed.), *Dritte-Welt-Forschung. Entwicklungstheorie und Entwicklungspolitik*, terbitan khusus PVS 16, Opladen 1985; Deutscher Bundestag, *Entwicklungspolitik. Bilanz und Perspektiven* (Zur Sache 2/1986), Bonn 1986; D. Oberndörfer/Th. Hanf (ed.), *Entwicklungspolitik*, Stuttgart 1986; F. Nuscheler, *Lern- und Arbeitsbuch Dritte Welt*, ckt. ke-2, Bonn 1987; S. Pater/T. Striepke, *Entwicklungspolitik nach der Wende*, Dortmund 1987; S.J. Spranger/L. Brock, *Die beiden deutschen Staaten in der Dritten Welt*, Opladen 1987; BMZ, *Achter Bericht zur Entwicklungspolitik der Bundesregierung*, Bonn 1988.

kb
politik bantuan pembangunan ME
Dalam perundingan mendirikan MEE, Perancis berpendirian untuk mengikutsertakan daerah jajahannya ke dalam pasar bersama (bertentangan dengan keinginan Jerman yang lebih berorientasi global dengan alasan politik ekonomi luar negeri dan politik Jermanya). Dalam Pasal 131-136 perjanjian pendirian MEE dijelaskan tujuan membantu "perkembangan ekonomi dan sosial" daerah seberang lautan yang terikat dengan ME melalui "hubungan istimewa" dan menciptakan ikatan ekonomi yang erat dengan mereka. ME menawarkan kepada mereka: a. dana kredit dan dana subsidi; b. secara bertahap memberikan akses ke pasar ME; c. kondisi khusus sepihak, yang memungkinkan mereka mempertahankan hubungan dagang istimewa dengan masing-masing "negara induk" dan mereka sekaligus dapat menetapkan bea masuk untuk melindungi industrialisasi sendiri. Dalam pembukaan (Ayat 7) dan Pasal 238 (mengenai asosiasi dengan negara ketiga) membuka per-

syarat bagi politik bantuan pembangunan ME yang bersifat global.

Perjanjian asosiasi I di Jaunde (1963) masih terbatas pada 18 Asosiasi Negara-Negara Afrika dan Madagaskar, menyetujui bebas bea masuk ke ME bagi 11 jenis produk ekspor pertanian, sepakat mendirikan secara bertahap zone perdagangan bebas timbal balik, mengizinkan Asosiasi Negara Afrika dan Madagaskar menetapkan bea masuk untuk melindungi industri mereka dan Dana Eropa untuk Pembangunan menyediakan 730 juta RE. Perjanjian selanjutnya tahun 1969 (Jaunde II) menghasilkan persetujuan untuk menurunkan bea masuk ke ME bagi produk-produk tropis dan meningkatkan dana Eropa untuk pembangunan menjadi 828 juta RE (untuk lima tahun). Sebelumnya, ME-tidak disetujui AS dan Inggris-melakukan asosiasi dengan Nigeria dan (1966) tiga negara EAC (Kenya, Uganda, Tanzania).

Tiga Perjanjian Lome (1975, 1979, 1984) sampai saat ini menambah lingkaran negara-negara yang bekerja sama dengan ME dari 46 menjadi 66 negara-negara AKP (Afrika, Karibia, Pasifik), memperluas akses preferensi ke pasar ME (tanpa imbalan preferensi untuk ME ke pasar AKP), tetapi dengan pembatasan jumlah untuk barang-barang yang "peka", diterapkan sistem stabilisasi penerimaan hasil ekspor STABEX dan SYSMIN serta ditambah Dana Eropa untuk Pembangunan (selama berlangsung Lome III, sebesar 7,4 miliar ECU selain 1,1 miliar ECU untuk kredit lunak dari EIB). Jika jumlah ini dibagi 66 negara AKP selama lima

tahun, dapat dimengerti ketidakpuasan negara-negara penerima kredit terhadap sumbangan ME tersebut.

Perundingan mengenai hasil perjanjian Lome IV (mulai tahun 1990) dimulai pada musim gugur tahun 1988. Haiti dan Republik Dominika mengajukan permohonan menjadi anggota. Kecenderungan baru sudah terlihat dalam Lome III (1985-1989), yaitu bantuan proyek yang ada digantikan dengan bantuan program dan ini semakin dikoordinasikan dengan program penyesuaian struktur dari IMF dan Bank Dunia. "Dialog politik" ditujukan meyakinkan negara penerima bantuan akan perlunya suatu reformasi struktur yang berorientasi ekonomi pasar.

Perjanjian Lome di satu pihak disambut sebagai model kerja sama Utara-Selatan dan di lain pihak sebagai model tandingan terhadap tata ekonomi dunia baru dan dicurigai sebagai virus di antara Dunia Ketiga. Selain terbatasnya dana yang diterima, hanya sebesar 8% dari anggaran bantuan pembangunan negara-negara ME, juga perjanjian politik perdagangan tidak memenuhi harapan negara-negara AKP. Pangsa mereka dalam perdagangan luar negeri ME mengalami stagnasi, hanya sebesar 7%, karena rendahnya tingkat industrialisasi mereka tidak dapat menggunakan kesempatan keringanan bea masuk ke ME atau terbentur pada pembatasan jumlah untuk barang-barang yang peka. STABEX dan SYSMIN, yang hanya meliputi 18% dari dana Eropa untuk pembangunan (dalam Lome II), mungkin agak dapat mengurangi masalah perdagangan

luar negeri mereka (seringkali tidak banyak membantu produsen yang sering terkena musibah dalam produksi atau jatuhnya harga karena pembayaran ganti rugi diberikan kepada pemerintahnya).

Anggapan yang umum ada bahwa perjanjian asosiasi ME telah memecah belah Dunia Ketiga dan tetap mempertahankan ruang lingkup pengaruh kolonial, bertentangan dengan kenyataan semakin bertambahnya globalisasi Dana Eropa untuk Pembangunan: a. melalui perjanjian perdagangan dan kerja sama dengan negara-negara Laut Tengah, yang sangat mirip dengan persyaratan khusus Lome; b. melalui perlakuan istimewa (preferensi) bea masuk umum yang telah ditetapkan, yaitu membuka pasar ME untuk kurang lebih 3.000 barang jadi dan setengah jadi dari seluruh negara berkembang, walaupun perlakuan istimewa ini telah dihapuskan, tetapi persyaratan khusus untuk negara-negara AKP tetap berlaku; c. melalui persetujuan perdagangan nonpreferensi dengan beberapa negara Asia dan Amerika Latin a.l. mengandung perjanjian mengenai perlakuan yang sama dan dihapuskannya hambatan perdagangan non-tarif; d. melalui perjanjian dengan ASEAN, yang menetapkan perjanjian perdagangan serta bantuan keuangan dan bantuan teknik; e. melalui penawaran bantuan keuangan dan bantuan teknik sebesar 730 juta ERE kepada negara berkembang di luar perjanjian kerja sama regional; f. melalui bantuan pangan (dari surplus pangan ME), yang dari awalnya telah melampaui batas AKP dan ber-

saing dengan politik penggunaan surplus pangan AS; g. keikutsertaan pada Dana Bantuan Segera *PBB (sekurang-kurangnya 720 juta US\$) dan langkah bantuan khusus multilateral untuk negara-negara berkembang paling miskin (mayoritas merupakan negara-negara kelompok AKP).

Globalisasi Dana Eropa untuk Pembangunan ini menunjukkan bahwa pembatasan kerja sama dengan lingkaran AKP bukan kepentingan politik luar negeri dan perdagangan mayoritas ME. Oleh karena itu, yang lebih meyakinkan daripada "tesis pecah belah" adalah argumentasi yang mengatakan bahwa ME berasosiasi dengan negara-negara miskin AKP karena mereka mampu membiayai asosiasi ini dan dapat memetik manfaat politik. Dana Eropa untuk Pembangunan terutama telah memberikan sumbangan yang besar untuk kerja sama Eropa di bidang politik yang masih berfungsi baik dalam hubungannya dengan Dunia Ketiga walaupun kepentingan perdagangan nasional masing-masing negara ME dan kepentingan bahan mentah serta kecenderungan proteksionis tidak menyentuh bidang yang sampai kini menunjang integrasi ME.

Kepustakaan: M. Schulz, *Europäische Gemeinschaft und Entwicklungsländer*, Frankfurt 1978; H. Hasenpflug, *Die EG-Aussenbeziehungen*, Hamburg 1979; B. Friedrich/S.-J. Park/R. Wiegmann, *Entwicklungspolitik der EG*, Frankfurt/New York 1980; H.H. Schumacher, *Die Nahrungsmittelhilfe der Europäischen Gemeinschaft*, Baden-Baden 1981; ODI/IDS, *EEC and the Third World, A Survey*, 2 jilid, London, dsb. 1981/1982; M. Dausterstädt et al., *EG-Politik der Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern* (Forschungsberichte des BMZ, 25), Köln 1982; H.J. Petersen (ed.), *Die*

Beziehungen zwischen der EG und Lateinamerika, Baden-Baden 1983.

fn
politik bantuan pembangunan Perancis Perancis sebagai mantan kekuatan kolonial kedua terbesar dalam perundingan mengenai perjanjian ME (1957), berhasil menggolkan keinginan bahwa *Union Francaise*, yaitu daerah bekas jajahan, dimasukkan dalam perjanjian bersama. Melalui perjanjian ME direncanakan memberikan ganti rugi Perancis kepada bekas daerah jajahannya dan diperkuatnya hubungan satu sama lain. Negara induk mengambil risiko menderita kerugian dalam politik perdagangan, sebaliknya negara-negara seberang lautan membuka pasar untuk produk Perancis. Selain itu, ditawarkan barang-barang industri dengan harga murah serta *investasi dari negara-negara ME. Pada mulanya perubahan Uni Perancis ditujukan menjadi Masyarakat Perancis Raya, telah mendorong Perancis pada awal tahun '60-an menjalankan politik bantuan pembangunan yang akan membawa kemerdekaan politik bekas daerah jajahannya. Agar hubungan dengan bekas daerah jajahannya dimulai di atas landasan yang baru, empat perubahan berikut ini harus dilaksanakan: a. melepaskan keinginan asimilasi; b. membuat konsep pengelolaan komplementer; c. diakhirinya eksklusivisme bantuan Perancis; d. dihapuskannya struktur administrasi yang pernah diciptakan untuk membantu pembangunan ekonomi.

Melalui politik bantuan pembangunannya Perancis mengharapkan keuntungan-keuntungan politik ekonomi dan kultural dengan kerja sama erat dengan mantan daerah jajahan-

nya. Konsekuensi politik bantuan pembangunan Perancis di negara-negara Dunia Ketiga adalah kehadiran ekonomi dan kebudayaan Perancis. Sebagai motivasi politik bantuan pembangunan Perancis disebutkan di dalam laporan resmi pemerintah tahun 1963: solidaritas, pengaruh, keuntungan. Tujuan politik bantuan pembangunan Perancis adalah untuk mencegah munculnya pengelompokan kekuatan di Dunia Ketiga yang memusuhi pemerintah Perancis dan dapat mengancam sistem politik dan sosialnya. Politik bantuan pembangunan digunakan sebagai bagian dari politik luar negeri dan keamanan gaullistis. Bantuan pembangunan dimaksudkan mengatasi pertentangan Timur-Barat, sebagai alat untuk memerangi neo-imperialisme, yang oleh de Gaulle dilihat telah dipraktekkan oleh AS, dan memapankan kedudukan Perancis sebagai kekuatan global.

Sejak pertengahan tahun '70-an dalam konsep mondialisme Giscard, Dunia Ketiga dinilai penting dikarenakan krisis ekonomi dunia dan krisis energi. Perancis mengembangkan gagasan dialog Utara-Selatan-berlangsung hampir tanpa hasil di Paris antara tahun 1975-1977 dalam bentuk konferensi kerja sama ekonomi internasional dan berkeinginan memainkan peran pendahulu dalam pengaturan masalah-masalah global antara negara industri dan negara berkembang. Di tahun '70-an, daerah-daerah yang diutamakan dalam politik bantuan pembangunan Perancis adalah Afrika tropis dan daerah Laut Tengah dari Maghribi sampai Timur Tengah. Hubungan tradisional dan adanya

sumber daya (minyak bumi) yang penting bagi Perancis, menjelaskan kepentingan khusus Perancis terhadap daerah ini. Dengan politik Afrika, Giscard mencoba melonggarkan bipolaritas negara adikuasa, menutup akses mereka ke Afrika, memperkuat posisi Eropa dalam politik internasional melalui kerja sama erat antara Perancis dan Afrika, akhirnya menjalankan kepentingan politik, ekonomi, dan militer Perancis.

Politik bantuan pembangunan Perancis di bawah Presiden Mitterand yang sosialis pada awalnya ditandai oleh kuatnya solidaritas dengan Dunia Ketiga. Politik ini ditujukan membangun tata internasional baru, selain perdagangan, mata uang, keuangan juga mencakup ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan informasi. Tujuannya menciptakan kerangka kemerdekaan dan nonblok yang diakui dan dilindungi untuk Dunia Ketiga sehingga negara-negara Dunia Ketiga dapat menemukan perannya. Perancis di bawah Mitterand menolak jalan keluar secara ekonomi pasar murni, yang memperburuk kemampuan bersaing negara-negara Dunia Ketiga dan yang akan mencekik mereka. Demikianlah, atas usul Mitterand pada pertemuan puncak ekonomi tahun 1988 disepakati untuk membebaskan sebagian utang negara-negara sebelah Selatan Sahara, diikuti dengan penjadwalan kembali pelunasan utang dan keringanan suku bunga.

Politik Dunia Ketiga Perancis mendapatkan dimensi baru yang sangat menekankan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Tahun 1981 Perancis menjalankan embargo

politik bantuan pembangunan Perancis

Tabel 16: Jumlah Netto Bantuan Pembangunan Pemerintah Perancis untuk Negara Berkembang dan Instansi Multilateral

	Rata-rata						
	1975-1977	1980	1982	1983	1984	1985	1986
juta US-\$	2168	4162	4034	3815	3788	3995	5105
% PNB	0,60	0,63	0,74	0,74	0,77	0,78	0,72

Sumber : Penilaian Development Assistance Committee tahun 1987

senjata terhadap Afrika Selatan, mengecam invasi AS ke Grenada tahun 1983, dan mendukung Kelompok Contadora dalam proses perdamaian di Amerika Tengah.

Setelah pada awalnya pemerintah sosialis melaksanakan politik bantuan pembangunan yang bersifat global-Meksiko, Aljazair, dan India mendapatkan perhatian khusus-, politik Dunia Ketiga Perancis dikonsentrasikan ke benua Afrika. Bahkan bantuan pembangunan sekarang melebar ke negara-negara *anglophon* dan negara-negara Arab. Instrumen penting politik Afrika Perancis meliputi politik militer, politik mata uang dan kredit serta politik kebudayaan. a. Perancis di bawah Mitterand juga menjalankan politik militer yang intervensionistis dan tampil di daerah pengaruhnya di Afrika Barat dan Afrika Tengah-didukung oleh perjanjian keamanan melalui bantuan teknik militer-sebagai kekuatan yang menjaga ketertiban. Sekaligus menjadi pemasok senjata yang besar untuk Afrika. Dalam bidang politik ekonomi, negara-negara Afrika bagian Selatan seperti sebelumnya berperan sebagai pemasok bahan mentah. Namun, Perancis terutama memasok persenjataan ke Timur Tengah agar mendapatkan minyak bumi yang diperlukan. b. Dengan tetap dipertahankannya politik mata uang dan kredit di kedua daerah

satuan administrasi Perancis, Afrika Barat dan Afrika Khatulistiwa, kedua negara ini terikat dalam hubungan nilai tetap mata uangnya dengan Franc Perancis (*Franc-Zone*). c. Dalam politik kebudayaan, paling jelas dilihat kesinambungan ketergantungan negara-negara Afrika terhadap Perancis. Sebagian besar tenaga bantuan pembangunan dari Perancis untuk Afrika bekerja di bidang pendidikan. Bahasa di sekolah negara-negara *frankophon* adalah bahasa Perancis. Sebagian besar kurikulum masih berpijak pada gagasan Perancis dan pengaruh Perancis sangat dominan di universitas. Pengambilalihan sistem administrasi, hukum, dan pendidikan Perancis ketika merdeka, telah memperlancar pengaruh ini. Volume bantuan pembangunan pemerintah sampai tahun 1980 menurun menjadi 6% dari PNB, di bawah Mitterand tahun '80-an meningkat dan melampaui target 0,7% dari PNB. Hal yang perlu diperhatikan adalah dalam keterangan bantuan pembangunan pemerintah sampai akhir tahun '70-an juga termasuk pengeluaran untuk daerah seberang lautan Perancis sehingga bagian bantuan pembangunan dalam PNB hanya sebesar 0,3%-0,35%.

Kepustakaan: A. Bourgi, *La Politique française de coopération en Afrique*, Paris 1979; Ministère de la Coopération, *Panorama de l'action du*

Ministère de la Coopération, Paris 1980; A. Grosser, *Affaires Extérieures de la France 1944/1984*, Paris 1984; S. Cohen/M.S. Smouths (ed.), *La politique extérieure de Valéry Giscard d'Estaing*, Paris 1985; W. Woyke, *Frankreichs Außenpolitik von de Gaulle zu Mitterrand*, Leverkusen 1987.

politik bantuan pembangunan Uni Soviet dan negara-negara Eropa Timur Negara-negara yang termasuk **COMECON (Council of Mutual Economic Aid)* tidak mempublikasikan statistik mengenai bantuan pembangunan yang mereka berikan. Oleh karena itu, data-data kuantitatif untuk politik bantuan pembangunan negara-negara sosial berikut ini hanya akan berupa angka-angka perkiraan (misalnya dari **OECD*). Selain masalah teknik untuk menghitung mata uang tidak konvertibel, juga muncul masalah batasan pengertian antara bantuan pembangunan dengan pengertian perdagangan dan hubungan ekonomi atau bantuan militer.

Dibandingkan bantuan internasional, bantuan dari negara-negara ini relatif kecil. Tahun 1986 **COMECON* diperkirakan memberikan sekitar 10% (tahun 1980: 6,6%) dari jumlah bantuan netto yang diberikan oleh kelompok utama pemberi bantuan (**OPEC*: 10%, **DAC*: 80%). Dilihat dari kekuatan ekonominya, bantuan negara-negara sosialis dengan pangsa rata-rata 0,29% (tahun 1980: 0,18%) pada PNB (\rightarrow pendapatan nasional) tahun 1986, berada di belakang kelompok pemberi bantuan lain (*OPEC*: 0,95%, *DAC*: 0,35%).

Dari segi arah maupun ukuran, Uni Soviet tetap merupakan kekuatan penentu dalam **COMECON*. Walaupun dari sisi pemikiran ideologi-

teoretis tidak selalu merupakan penentu untuk orientasi politik bantuan pembangunan Rusia, terutama tidak di daerah kepentingan strategis Uni Soviet terhadap AS dan Cina. Paling tidak struktur kerja sama pembangunan dan hubungan ekonomi Uni Soviet dan negara berkembang sedikitnya sampai tahun '80-an berlatar belakang kelompok teoretis sistem-sistem masyarakat di **Dunia Ketiga*.

Tahun 1961 dalam program partai komunis Uni Soviet (kini telah dibubarkan) terkristal sebuah teori pembangunan yang tidak kapitalistik, berarti sebuah langkah menjauhi posisi ideologis yang ortodoks dengan anggapan bahwa sosialisme akan dapat dibangun hanya di bawah pimpinan partai komunis (lihat von Beyme, 1985). Negara-negara Dunia Ketiga dikelompokkan menjadi tiga berdasarkan dekatnya mereka pada sosialisme dalam gambaran Uni Soviet.

a. Negara berkembang yang ada di kubu sosialis (a.l. Vietnam, Kuba, Mongolia); b. negara berkembang yang mempunyai orientasi sosialis (a.l. Aljazair, Angola, Etiopia, Yaman Selatan); c. negara berkembang dalam kubu kapitalis. Pengelompokan teoretis ini tidak dipertahankan secara konstan. Dalam masa ketegangan hubungan Timur-Barat di tahun '70-an, kelompok kedua dikeluarkan dari teori pembangunan Uni Soviet; dengan demikian dicoret kemungkinan sebuah **Jalan Ketiga*. Berdasarkan pengelompokan teoretis ini tidak heran apabila bantuan pembangunan **COMECON* sangat terpusat pada beberapa negara berkembang sosialis saja, yang dalam beberapa tahun ter-

politik bantuan pembangunan Uni Soviet dan negara-negara ...

Tabel 17: Perkiraan Bantuan Netto Negara-Negara COMECON ke Negara Berkembang dan Organisasi-Organisasi Multilateral (dlm. juta US\$)

	1982	1983	1984	1985	1986	1987
A. Bantuan bilateral menurut penerima						
Negara berkembang anggota COMECON	2164	2361	2427	2497	2949	3519
Negara berkembang komunis lainnya	462	589	416	500	641	538
Negara Berkembang lain	164	232	254	345	599	462
Beasiswa	255	270	275	290	310	330
Jumlah	3045	3472	3372	3632	4499	4849
B. Bantuan multilateral	27	9	26	13	14	18
C. Jumlah keseluruhan menurut pemberi bantuan	3072	3481	3398	3645	4513	4867
Uni Soviet	2504	3046	2889	3099	3991	4321
Negara-Negara Eropa Timur	568	435	509	546	522	546

*Afghanistan, Kamboja, Korea Utara, Laos

Sumber: OECD, 1988

akhir jumlahnya agak turun. Menurut perkiraan OECD (1987) sekitar 70% bantuan COMECON diberikan kepada Kuba, Mongolia, dan Vietnam (ketiganya anggota COMECON), 17% ke Afghanistan, Kamboja, Cina, dan Laos. Tahun 1980 pangsa bantuan ke negara-negara tersebut masih berjumlah 95%. Dilihat dari struktur sektoral dan teknik bantuan, Uni Soviet memberikan ciri-ciri: sekitar 80% bantuan mengalir ke proyek-proyek di bidang industri (termasuk eksploitasi bahan mentah) dan mengarah terutama pada penguatan sektor pemerintah; dengan bantuan kecil ke pertanian, tetapi bukan untuk menunjang usaha tani kecil, melainkan untuk pertanian besar milik negara. Kebanyakan kredit bantuan dari Uni Soviet dikaitkan dengan ikatan proyek dan ikatan pemasokan. Biasanya kredit diberikan dengan kondisi (tem-

po 10-15 tahun, 2%-5% bunga, 2-5 tahun bebas cicilan) yang lebih murah dibandingkan pasar-pasar uang internasional, tetapi lebih tinggi dibandingkan kredit IDA misalnya. Elemen tunjangan kredit untuk negara berkembang sosialis sekitar 30%, untuk negara berkembang kapitalis sekitar 5%. Secara resmi Uni Soviet dengan bantuan pembangunan bertujuan mengaitkan negara berkembang yang bersangkutan dalam sebuah "pembagian kerja sosialis internasional" dan menginginkan pembangunan hubungan ekonomi yang saling menguntungkan. 47,5% impor Uni Soviet (1986) datang dari perusahaan-perusahaan Dunia Ketiga yang dibangun dengan bantuan Uni Soviet (tahun 1974: 12%). Karena struktur barang impor ini terutama adalah bahan mentah dan bahan makanan, angka-angka ini memperlihatkan

bahwa "pembagian kerja sosialis internasional" tidak berbeda jauh dengan "pembagian kerja internasional dalam pengertian ekonomi klasik.

Di bawah Gorbachev terlihat adanya orientasi baru politik bantuan pembangunan Uni Soviet ke Dunia Ketiga, yang merupakan dampak tekanan reformasi ekonomi internal, pergeseran kepentingan politik luar negeri dan politik ekonomi luar negeri, serta kegagalan Uni Soviet di Afghanistan. Makin besarnya kesediaan untuk berintegrasi ke ekonomi dunia juga dianggap sebagai persyaratan oleh pimpinan-pimpinan Uni Soviet untuk dinamika ekonomi internalnya, berdampak terhadap politik perdagangan dan ekonomi untuk Dunia Ketiga. Misalnya, dalam UNCTAD VII tuntutan negara berkembang akan kelonggaran perdagangan oleh negara-negara Eropa Timur, tidak lagi dengan memperlihatkan ketidakbersalahan Uni Soviet akan akibat "kolonialisme dan ketergantungan negara berkembang. Dunia Ketiga mempunyai peran kunci dalam strategi perdagangan luar negeri Uni Soviet. Di satu pihak sebagai pemasok bahan mentah untuk perkembangan ekonomi, di lain pihak sebagai pasar penjualan untuk barang-barang ekspor Uni Soviet yang strukturnya didiversifikasi dan di masa akan datang lebih berupa mesin dan barang-barang investasi, bukan-seperti dulu-bahan mentah dan bahan makanan. Berdasarkan hal ini muncul kebutuhan, selain pengurangan persenjataan dan peredaran ketegangan dengan Barat, juga mempererat hubungan ekonomi dengan negara-negara ber-

kembang kapitalis, terutama NIB. Dalam teori pembangunan Uni Soviet, pergeseran kepentingan ini terlihat jelas, apalagi model pembangunan sosialis makin diterima pesisimis, dan sebagian besar negara berkembang kini berada di kubu kapitalis atau nonblok. Kerja sama ekonomi dengan Dunia Ketiga dari sisi institusional akan diperluas dan dibuat efisien. Tahun 1988 untuk tujuan ini kementerian untuk perdagangan luar negeri dan komite ekonomi luar negeri yang berwenang untuk bantuan pembangunan, dilebur dalam sebuah kementerian kerja sama ekonomi luar negeri yang baru. Di masa depan proyek-proyek kerja sama ekonomi makin banyak berlangsung dengan dasar *joint venture*. Dampak konkret perubahan politik Dunia Ketiga yang sebagian diinginkan dan sebagian sudah dijalankan oleh Uni Soviet, pada akhir tahun '80-an belum bisa dinilai dengan sesuai.

Kepustakaan: H. Machowsky/S. Schulz, *RGW-Staaten und Dritte Welt. Wirtschaftsbeziehungen und Entwicklungshilfe*, Bonn 1981; K. von Beyme, *Die Sowjetunion in der Welt-politik*, cet. ke-2, München 1985; W. Kühne, "Neuer Realismus in Moskau Afrika Politik?", dlm.: *APuZ* 7-8, 1988; J. Betz, "Sowjetische Dritte Welt-Politik unter Gorbatschow", dlm.: *Jahrbuch Dritte Welt*, 1988; OECD, *Development Cooperation*, Paris 1988.

rs/bt
politik perdagangan luar negeri
Berhasil atau gagal suatu negara berkembang dalam usahanya menggabungkan diri dalam pembagian kerja internasional ditentukan terutama oleh politik perdagangan luar negerinya sendiri serta mitra dagangnya, negara industri Barat dan negara sosialis serta negara berkembang lainnya. Tujuan politik perdagangan

luar negeri suatu negara adalah untuk mengendalikan arus perdagangan (ekspor dan impor) yang diinginkan dengan cara tertentu. Motivasinya a.l. melindungi produsen dalam negeri termasuk tenaga kerja, melawan usaha persaingan yang tidak jujur dari pesaing luar negeri, memudahkan penyesuaian struktural perekonomian dalam negeri, mencegah terjadinya kekurangan devisa (pada nilai tukar tetap). Instrumennya adalah bea cukai (hambatan perdagangan tarif, artinya pajak untuk ekspor dan impor) dan hambatan perdagangan nontarif, misalnya pembatasan jumlah barang, larangan impor, persyaratan kesehatan atau keamanan, standar teknik, bea variabel, subsidi untuk produksi yang harus bersaing dengan barang impor, mengutamakan pengusaha dalam negeri untuk kontrak-kontrak pemerintah dan langkah-langkah membatasi diri.

Hambatan perdagangan tarif dan nontarif dampaknya sangat mirip. Bea impor sebesar 10% dari suatu nilai produk tertentu akan menaikkan harga sebesar 10%. Dengan demikian menurunkan kemampuan bersaing produsen luar negeri di dalam negeri, sedangkan produsen dalam negeri dapat menaikkan harga dan penjualan barang. Konsumen dalam negeri harus membayar harga yang lebih mahal sebelum ditarik bea untuk barang-barang dari luar negeri. Jika impor tidak sepenuhnya dapat dihentikan, seperti dalam kasus bea perlindungan dalam rangka proteksionisme, penerimaan bea masuk sebesar 10% dari nilai produk yang diimpor ditarik oleh negara. Hal yang sama berlaku

juga untuk hambatan nontarif; tentu saja tidak ada penerimaan bea masuk untuk kas negara.

Perbedaan akibat hambatan perdagangan antara harga di dalam negeri dan harga di pasar dunia untuk suatu produk dinamakan proteksi nominal. Proteksi ini berbeda dengan proteksi sebenarnya atau yang efektif dinikmati produsen dalam negeri. Pada proteksi yang efektif diperhatikan bahwa proteksi nominal seringkali meningkat dengan tingkat pengolahan produk. Misalnya, besarnya bea masuk nominal untuk bahan mentah biasanya rendah atau bahkan nol, sedangkan barang setengah jadi dan barang jadi dikenakan bea masuk yang tinggi. Proteksi nominal berhubungan dengan perbedaan harga akibat hambatan perdagangan, sebaliknya proteksi efektif berhubungan dengan perbedaan dalam nilai cipta.

Proteksi nominal dan proteksi efektif akan dijelaskan dalam contoh berikut ini. Besarnya bea impor untuk kulit mentah di ME adalah 0%, sedangkan untuk sepatu dari kulit dikenakan bea masuk sebesar 10%. Kulit dalam jumlah tertentu yang di pasar dunia berharga 100 DM, di ME juga berharga 100 DM (di luar ongkos pengangkutan); proteksi nominal untuk kulit mentah di ME adalah 0%. Sekarang diumpamakan saja bahwa sejumlah kulit di pasar dunia berharga 100 DM dapat dibuat sepatu berharga 300 DM (harga di pasar dunia). Akibat bea masuk sebesar 10%, produsen sepatu di ME dapat meningkatkan harganya menjadi 330 DM dan memperbesar penjualan, sedangkan produsen di luar yang memasok sepatu ke

ME hanya mendapatkan 300 DM dan harus menerima kerugian penjualannya; proteksi nominal besarnya 10%. Produsen sepatu di ME mendapatkan nilai cipta sebesar 230 DM (330 DM hasil penjualan sepatu dikurangi 100 DM untuk kulit mentah); dari pengolahan lanjut kulit mentah menjadi sepatu (dilihat secara sederhana), sebaliknya saingannya dari luar negeri hanya mendapatkan 200 DM (300 DM dikurangi 100 DM). Artinya, produsen sepatu di ME dapat menaikkan nilai cipta sebesar 30 DM karena adanya perlindungan bea nominal sebesar 10% dibandingkan situasi sebelumnya yang tidak menarik bea masuk; proteksi efektif adalah 15% (30/200). Perlindungan yang diberikan kepada produsen sepatu di ME terhadap saingannya dengan demikian secara efektif lebih tinggi daripada perlindungan bea nominal. Produsen luar negeri akan lebih mengalami kesulitan untuk menjual barangnya di pasar ME. Bagi mereka biasanya akan lebih menguntungkan jika mengekspor barang mentah ke ME, bukan barang jadi. Dengan cara ini besarnya bea masuk yang dikaitkan dengan tingkat pengolahan di negara industri akan menghambat pengolahan lanjut bahan mentah di negara berkembang.

nw
populisme, populistis Merupakan definisi yang banyak dipakai untuk berbagai gerakan politik di berbagai tempat dan masa. Elemen pokok sebagai berikut. a. Populisme merupakan gerakan politik dengan basis massa, bukan partai politik. Keanggotaan tidak ditentukan secara formal, organisasi longgar, hubungan

antarpersonal lebih bersifat person-sentris (personalisme). b. Gerakan populis muncul dalam tahap-tahap perubahan sosial yang cepat, menghancurkan struktur kekuasaan tradisional yang ada dan/atau kekuasaan otoriter, atau paling tidak menyebabkan timbulnya krisis (hegemoni). Namun, tidak semua krisis atau proses reformasi melahirkan gerakan populis. c. Populisme bukan fenomena yang spesifik kelas, basis sosialnya terdiri atas berbagai lapisan yang bobotnya (desa/kota, lapisan menengah/proletar) dapat berganti-ganti dan ditentukan per kasus. d. Pelaku biasanya lapisan sosial tertentu yang dirugikan oleh tata politik dan sosial yang ada dan menuntut peluang lebih baik dan partisipasi memadai dalam kegiatan ekonomi (yang kemungkinan sedang tumbuh); dan pada proses pengambilan keputusan politik (hak memilih). Lapisan tidak terprivilese biasanya bergabung dengan lapisan lebih tinggi, yang sedang melawan batasan-batasan yang diberikan oleh tata politik yang sedang berlaku, serta banyak mendidik pimpinan dan kader gerakan populis. e. Tuntutan programatik dari populisme dapat dibatasi pada nasionalisme (disebut populisme nasional dan pembangunan ekonomi, pertumbuhan) sebagai inti ideologi. Populisme di Amerika Latin bisa ditentukan secara lebih jelas: setelah tahun 1929 disebabkan krisis ekonomi dunia dan proses industrialisasi, terutama dilakukan sektor perkotaan yang makin menentukan sistem politik.

dn
poverty-index → distribusi pendapatan.

PQLI → miskin, indikator.

pre-feasibility study → *feasibility study*.

Primary Health Care Penanganan kesehatan primer, konsep politik kesehatan penting yang disepakati dalam konferensi internasional di Alma Ata (Uni Soviet) yang diorganisasi oleh WHO dan UNICEF tahun 1978. Konsep yang berorientasi pada kebutuhan dasar ini meliputi prinsip-prinsip orientasi sebab dan kelompok sasaran, partisipasi masyarakat, tanggung jawab sendiri, kerja sama intersektoral delapan bidang yang relevan dengan kesehatan.

Pendidikan untuk pengenalan, pencegahan, dan penanggulangan masalah kesehatan setempat: pengadaan bahan pangan dan menjamin pangan, pengadaan air minum dan sarana sanitasi; perawatan kesehatan ibu dan anak termasuk keluarga berencana; imunisasi terhadap penyakit-penyakit infeksi; pencegahan dan penanggulangan penyakit endemis; perawatan penyakit-penyakit biasa dan luka dengan peralatan sederhana; pengadaan sejumlah obat-obatan. *Primary Health Care* sampai tahun 2000 ingin memberikan pengadaan kesehatan yang memadai (strategi WHO: *Healith for all by the year 2000*, HFA 2000) kepada semua manusia.

Pendekatan yang mengacu secara partisipatoris, terintegrasi, dan mencakup "horizontal" (*PHC/Primary Health Care comprehensive*) dibuat oleh UNICEF dengan bertolak dari sebuah studi dari Walsh dan Waren (1979), menandingi sebuah strategi yang mengacu pada penyakit, berbentuk "vertikal", tidak bersifat partisi-

patoris dan bergantung dari luar (*selective PHC*). UNICEF mempropagandakan delapan usaha ini, yang sudah dikenal; sebagai suatu keberhasilan revolusioner dan memberi bantuan keuangan secara besar-besaran: BOAIKPP (= pemantauan berat anak, rehidrasi oral jika muntah, ASI, imunisasi, keluarga berencana, pendidikan perempuan, substitusi pangan). Keberhasilan aksi jangka pendek ini sulit dibuktikan, demikian juga pendekatan PHC jangka panjang dan berorientasi pembangunan.

hjd

Produk Domestik Bruto → PDB.
produktivitas Hubungan antara hasil produksi (*output*) dengan masukan (*input*) terhadap faktor-faktor produksi (kerja, modal, dsb.). Hal yang diukur adalah dengan masukan faktor tertentu (semua jumlah masukan = P global; suatu faktor tertentu = P yang berkaitan dengan faktor, kira-kira produktivitas modal) berapa banyak hasil produksi yang diperoleh. Jumlah masukan dari faktor kerja diukur dengan jumlah pekerja dan waktu kerja yang mereka hasilkan.

dan program bahan mentah terintegrasi Merupakan usaha sebuah politik bahan mentah yang dikonsepkan antara negara berkembang dan negara industri. Pedoman-pedoman pokoknya dirancang Mei 1976 oleh UNCTAD IV di Nairobi dan dituangkan oleh negara berkembang. Dalam program ini diikuti sertakan 18 bahan mentah, yaitu 10 bahan mentah pokok: kakao, kopi, teh, gula, kapas dan benang wol, serat yute dan produk dari bahan serat yute, serat sisal dan produk dari serat sisal, karet, tem-

baga, serta timah. Untuk bahan mentah tersebut disepakati dan dilanjutkan perjanjian *bufferstock*. Delapan bahan mentah lain: pisang, minyak dari tumbuhan (termasuk minyak zaitun), biji-bijian minyak, kayu tropis, daging, bijih besi, mangan, dan fosfat. Bahan mentah pokok meliputi tiga perempat nilai ekspor negara berkembang pada ke-18 bahan mentah tersebut. Program tersebut menginginkan tujuan-tujuan: a. stabilisasi harga bahan mentah pada sebuah tingkat yang "menguntungkan dan adil" untuk negara berkembang, *fair* untuk negara industri (indeksasi harga bahan mentah); b. stabilisasi hasil ekspor; c. perluasan pengolahan bahan mentah di negara berkembang; d. perbaikan akses pasar untuk bahan mentah negara berkembang yang belum diolah dan sudah diolah di pasar-pasar negara industri; e. perbaikan kemampuan bersaing bahan mentah alami menghadapi produk sintetis; f. perbaikan sistem penjualan, transportasi, dan distribusi untuk bahan mentah negara berkembang. Tujuan-tujuan ini menuntut perundingan-perundingan di dalam berbagai organisasi internasional, seperti dalam hal pembukaan pasar: GATT; stabilisasi hasil: IMF; Dana Bersama untuk membiayai Perjanjian Bahan Mentah: UNCTAD. Tuntutan negara berkembang untuk program bahan mentah ini sampai kini menemui kegagalan akibat perlawanan negara industri yang mengkhawatirkan naiknya tingkat inflasi, meningkatnya pengaruh bersifat mengendalikan dalam perdagangan dunia dan beban pembiayaan sebelah pihak. Namun,

mereka menyetujui jalan keluar kecil, yaitu Dana Bersama.

Kepustakaan: St. Baron *et al*, *Internationale Rohstoffpolitik, Ziele, Mittel, Kosten*, Tübingen 1977; D. Kerschul *et al*, *Das integrierte Rohstoffprogramm*, Hamburg 1977. dn

Program Kesempatan Kerja Dunia → kesempatan kerja, kebutuhan dasar/strategi kebutuhan dasar.

Program Lingkungan PBB → UNEP.

Program Pangan Dunia → WFP.

Program Pembangunan PBB → UNDP.

proteksionisme Politik perdagangan yang melindungi produsen dalam negeri menghadapi saingan asing melalui bea, kontingentasi, dsb. Lawannya: perdagangan bebas. → hambatan perdagangan, → GATT, → Perjanjian Preferensi. dn

PTA (Preferential Trade Area for Eastern and Southern Africa States) Kawasan Preferensi Bea untuk Afrika Timur dan Afrika Selatan, didirikan Desember 1981 oleh Zambia, Kenya, Uganda, Somalia, Etiopia, Malawi, Mauritius, Jibouti, dan Komora. Lesotho, Swaziland, Zimbabwe, dan Tanzania masuk ke Perjanjian Preferensi ini tahun 1981. dn

Puerto Rico Bukan merupakan sebuah negara merdeka. Puertorikanisasi merupakan istilah untuk menggambarkan bagaimana negara-negara Amerika Latin jatuh ke dominasi AS, mula-mula secara ekonomi dan kemudian politik. Di tahun '80-an mulai sebuah proses kembali secara sosio-struktural dan konflik antara kaum nasionalis pribumi dengan AS.

1. Puerto Rico adalah pulau terkecil dan terletak paling ujung dari Kepulauan Antila Besar (luas 8.897

km²). Potensi alam untuk pembangunan adalah pertanian: tebu, tembakau, kopi, jeruk; peternakan: sapi (30% nilai produk pertanian).

Pertanian kehilangan posisi sebagai sektor ekonomi terpenting Puerto Rico akibat industri pengolahan. Puerto Rico memiliki beberapa jenis bijih tambang, di antaranya hanya tembaga yang dieksploitasi secara komersial, serta beberapa cadangan minyak bumi. Sumber-sumber pendapatan lain adalah turisme dan penangkapan ikan.

2. Puerto Rico sampai tahun 1899 merupakan koloni Spanyol. Pada abad ke-19 terutama di daerah pantai muncul latifundia tebu yang berproduksi untuk ekspor ke Eropa. Kekuasaan kolonial AS menandai dua tahap ketergantungan struktural dalam perkembangan Puerto Rico. a. Dengan masuknya modal AS, mulai berkembang produksi perkebunan tebu yang monokultur. Ekonomi Puerto Rico diarahkan pada kebutuhan pasar AS dan merupakan pasar penjualan penting untuk barang-barang jadi AS. b. Sejak tahun 1940 di bawah Presiden Luis Munos yang sosial-reformis, berlangsung sebuah pembangunan ekonomi kapitalistik yang pesat dan bergantung pada AS. Pembangunan sebuah industri pengolahan memang mampu menyingkirkan ketergantungan dari produksi gula yang monokultur, tetapi pengarahannya ke ekspor dalam struktur ekonomi tidak mengurangi ketergantungan impor dari AS.

3. Penduduk Puerto Rico tahun 1986 diperkirakan berjumlah 3,5 juta, kepadatan penduduk 393,4 orang/km². Ibu kota San Juan: 1,1 juta

penduduk. Peledakan penduduk dihambat dengan berlangsungnya gelombang imigrasi ke AS dan usaha keluarga berencana. Secara etnis penduduk terdiri atas mayoritas kulit putih (sekitar 75%), Mulat dan Mestis (20%), serta kulit hitam (5%).

4. Sebagai akibat pertumbuhan ekonomi yang pesat, berkembang lapisan menengah. Kurangnya kesempatan kerja di pertanian, terutama di sektor gula, menyebabkan migrasi penduduk desa ke kota-kota atau ke AS. Meskipun dijalankan reformasi pertanian, masalah pembagian tanah yang tidak seimbang hampir tidak mengalami perubahan: tahun 1952: 3% memiliki pabrik, 56,8% memiliki tanah, 94% pabrik menguasai sekitar 33% tanah. Berkurangnya jumlah tenaga kerja dalam industri sejak tahun '60-an mencerminkan *trend* produksi dalam industri yang padat modal dengan kesempatan kerja yang sedikit dan membutuhkan kualifikasi tinggi, dan pemindahan industri yang padat karya ke pulau-pulau di Karibia lainnya (akibat upah yang meningkat dan tidak adanya kemurahan pajak). Masalah yang pokok adalah makin meningkatnya pengangguran (tahun 1977: 20%-40%) dan marginalisasi sebagian penduduk.

Dengan latar belakang ini terlihat bahwa model pembangunan Puerto Rico meskipun menghasilkan tingkat pertumbuhan yang tinggi dan pendapatan per kapita yang tinggi, membawa permasalahan lain. Sebanyak 25% penduduk hidup dalam miskin ekstrem, 20% keluarga termiskin menikmati hanya 5% pendapatan nasional, dan 20% kelompok pendapatan

tertinggi menikmati 51% pendapatan nasional. Industrialisasi yang didorong oleh negara dan peningkatan turisme menyebabkan makin meningkatnya utang luar negeri dan neraca perdagangan yang negatif.

5. Pengaruh masa kolonial Spanyol terlihat misalnya dalam agama orang Puerto Rico (85% Katolik) dan bahasa. Bahasa resmi adalah Spanyol dan Inggris. Sebanyak 16% penduduk berbahasa dua, yang lain berbahasa Spanyol sebagai bahasa ibu. Dalam sistem nilai dan gaya hidup lapisan atas, menengah, dan aristokrat pekerja, pengaruh Spanyol terasimilasi ke nilai-nilai AS. Kemajuan besar adalah pemberantasan buta aksara (tahun 1980: 89%) dan tingkat penyekolahan, serta pengadaan kesehatan untuk penduduk.

6. Tahun 1952 Puerto Rico mendapatkan status negara asosiasi bebas dengan AS (*Estado Libre Asociado*). Puerto Rico seperti sebuah negara federal AS, berada di bawah hukum AS. Orang Puerto Rico memiliki kewarganegaraan AS dan setiap empat tahun sekali memilih *Comisionado Residente* yang mewakili Puerto Rico dalam Kongres AS, tetapi tidak memiliki hak suara. Oleh karena itu, Puerto Rico tidak dapat ikut ambil bagian dalam pemilihan presiden, tidak membayar pajak federal, tidak ada batasan bea antara AS dan Puerto Rico. UUD tahun 1952 menetapkan pemilihan seorang gubernur dan kongres (terdiri atas Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat) setiap empat tahun sekali. Lembaga politik ini berwenang a.l. untuk polisi, pendidikan, pengadilan, dan komunikasi.

Gerakan kemerdekaan yang masih kuat di tahun '50-an, kehilangan pengaruh akibat berlangsungnya pembangunan ekonomi. Dua partai politik terbesar di Puerto Rico berbeda dalam posisi mereka terhadap status politik negara itu. *Partido Nuevo Progresista* (PNP) menginginkan keanggotaan Puerto Rico ke federal AS sebagai negara bagian AS ke-51. Sementara itu, *Partido Popular Democrático* di bawah Gubernur R. Hernández Colón merupakan partai terkuat dalam pemilihan tahun 1984 dan 1988, menginginkan status politik Puerto Rico seperti yang ada sekarang.

Tahun 1967 melalui sebuah referendum, 60,5% orang Puerto Rico menginginkan status yang ada seperti sekarang, 38,9% menginginkan integrasi ke AS, dan 0,6% memilih kemerdekaan Puerto Rico.

Kepustakaan: L.J. Dietz, "Imperialism and Puerto Rico", dlm.: *Monthly Review* 29 (4), 1978; R.A. Johnson, *Puerto Rico, Commonwealth or Colony?*, New York 1980; D. Nohlen, "Puerto Rico", dlm.: *HDW II*, 3, Hamburg 1982, hlm. 491 dst.; A. Morales Carrión, *Puerto Rico. A Political and Cultural History*, New York 1983.

Ks
Pusat Penelitian Arab untuk Daerah Gurun dan Kering → ACSAD.
pusat uang offshore Merupakan daerah yang dalam ukuran tertentu berhasil menarik bank-bank internasional untuk mendirikan cabang-cabangnya, mengembangkan usaha di sana yang hanya terbatas pada transaksi mata uang asing, artinya tabungan luar negeri ditransfer ke penerima kredit asing. Sistem mata uang nasional negara tuan rumah (tempat pusat uang) tidak tersentuh kegiatan ini. Dibandingkan pusat-pusat uang tradisional, misalnya London dan

New York, pusat-pusat uang baru mempunyai daya tarik khusus: keharusan memiliki modal sendiri cukup kecil, akses mendirikan cabang cukup mudah, dan kedudukan bank praktis bebas pajak, serta tidak ada kewajiban memiliki cadangan minimal.

Selain Luksemburg, terutama sekali banyak negara berkembang yang sukses mendirikan pusat-pusat uang *offshore*, misalnya Bahamas, Filipina, Hong Kong, Kenya, Kepulauan Caymann, Panama, Singapura, dan Uni Emirat Arab. Volume tabungan dan kredit di tahun '70-an dan '80-an ditandai oleh tingkat pertumbuhan di atas rata-rata. Pusat-pusat uang ini sebagian besar menerima petro-dolar sebagai tabungan dan mengubahnya (*recycling*) menjadi kredit (*euro-kredit*).

Kepustakaan: R.C. Effros (ed.), *Emerging, Financial Centers Legal and Institutional Framework*, IMF Washington, 1982; keputakaan lainnya → *eurokredit*. hpn

Putaran Kennedy Perundingan penurunan bea yang dilakukan oleh GATT tahun 1964–1967 diikuti oleh 17 negara dengan tujuan menghapus hambatan ekspor untuk negara berkembang dari pihak negara industri—tanpa kewajiban serupa dari pihak negara berkembang. Putaran Kennedy menghasilkan penurunan bea sebesar 13% sehingga lebih berhasil dibandingkan perundingan-perundingan lain yang bertujuan menurunkan bea (Ancecy tahun 1949: 2%; Torquay tahun 1950/1951: 3%; Jenewa tahun 1955/1956: 2%, Jenewa tahun 1961/1962: 7%). Negara industri mendapatkan keringanan tarif pada 70% impor industrinya yang wajib pajak. Dalam

sektor industri, negara pengimpor utama (AS, ME, Jepang) menurunkan beanya sekitar sepertiga. Tujuan penurunan sebesar 50% tidak tercapai. Negara industri membuat konsesi terutama untuk barang-barang pertanian dan kelompok produk tropis. Tingkat bunga nol dalam bidang pertanian meningkat dari 11% menjadi 19% pada barang jadi dan dari 5% menjadi 7% pada barang setengah jadi. Penurunan bea tertinggi terjadi pada barang sukarela, terutama yang diperdagangkan antarnegara industri. UNCTAD menilai hasil Putaran Kennedy lebih menguntungkan perdagangan negara industri daripada negara berkembang. Namun, Putaran Kennedy telah menguatkan kesadaran akan masalah perdagangan negara berkembang dalam GATT. → Putaran Uruguay, → Putaran Tokyo. dn

Putaran Tokyo Perundingan penurunan bea ke-7 setelah Putaran Kennedy dalam GATT yang berlangsung pada awal tahun 1975 dan selesai April 1979. Negara industri mengakui melakukan hambatan perdagangan tarif dan nontarif terhadap negara berkembang. Selain itu, diberikan perlakuan istimewa terhadap LLDC melalui klausul prioritas GATT, serta memungkinkan negara berkembang mensubsidi ekspor barang industri sendiri. dn

Putaran Uruguay Perundingan perdagangan ke-8 dalam rangka GATT, pelaksanaannya disepakati September 1986 di Punta del Este (Uruguay). Isi kerangka diperluas dibandingkan perundingan-perundingan bea sebelumnya (→ Putaran Kennedy, → Putaran Tokyo): selain bidang-bidang pemi-

Putaran Uruguay

likan industri, investasi asing, dan perdagangan dengan jasa, yang menjadi tema perdebatan tahun 1988 a.l. tuntutan negara berkembang dalam perundingan di Montreal/Kanada setelah penghapusan perjanjian tekstil dunia, dan liberalisasi perdagangan hasil pertanian. Putaran Uruguay merupakan perubahan dalam prinsip-

prinsip GATT, terutama dalam hal subsidi dan klausul perlindungan dalam perundingan yang diundur di Jenewa tahun 1989.

Kepustakaan: E. Thiel, "Vor den neuen GATT-Verhandlungen", dlm.: *EA* 41 (1986), hlm. 285 dst.; J. Betz, Welthandel, "GATT, Protektionismus und die Entwicklungsländer", dlm.: *Jahrbuch Dritte Welt*, 1987, hlm. 62 dst. pb

Q

Qatar 1. Emirat Qatar (luas 110.000 km²) terletak di Semenanjung Qatar (ke utara-selatan 180 km), menjorok dari Semenanjung Arab ke Teluk Persia. Daerah Qatar merupakan padang pasir, ditumbuhi sedikit tanaman akibat sedikitnya hujan musim dingin sehingga negara tersebut mempunyai daerah usaha padang rumput. Di Qatar dan *offshore* di Teluk Persia ada cadangan besar minyak dan gas, yang eksploitasinya menggolongkan Qatar sebagai negara produsen minyak (99% nilai ekspor = minyak bumi).

2. Penduduk Qatar sebagian besar adalah suku nomaden, sampai abad ke-19 memakai sistem kepala suku. Tahun 1872 (orang Turki membangun garnisun paling timur di Doha) dan tahun 1916 (Perjanjian Syekh dinasti setempat, al-Thani, dengan Inggris menjadikan Qatar daerah protektorat Inggris diwakili pemerintahan Inggris di India), penguasa-penguasa asing baru mengintervensi di Qatar. Tahun 1971 Inggris menghapuskan kewajiban-kewajiban seperti tercantum dalam perjanjian, Qatar merdeka.

3. Penduduk Qatar tahun 1986 (diperkirakan) 372.000 jiwa (ibu kota Doha, 21.800 penduduk). Konflik-

konflik sosial secara struktural terjadi karena penduduk asli hanya sekitar 25% dari seluruh penduduk. *Boom* minyak sejak tahun '50-an menimbulkan pertumbuhan penduduk yang pesat, terutama adanya arus pendatang dari Pakistan, India, Iran, negara-negara Arab tetangga, dan negara-negara Arab di daerah Laut Tengah. Seluruh penduduk asli menganut Islam (Suni dengan tendensi kuat ke gerakan Wahab Saudi Arabia). Kultur negara itu ditentukan oleh tradisi-tradisi suku dan hukum Islam (*syariat*).

4. Kekayaan negara mengubah situasi sosial penduduk. Pemerintah menyediakan: pendidikan gratis (wajib sekolah, pembangunan sebuah universitas), tunjangan terhadap ekonomi (menguntungkan perusahaan-perusahaan dalam negeri), perubahan lingkungan (rumah batu, rumah bertingkat, listrik, air bersih mengalir ke rumah, jalan, telepon, bantuan dalam pembelian rumah), dan jasa publik (imunisasi, jaminan kesehatan gratis, konsultasi untuk ibu, pembangunan rumah-rumah sosial, kredit murah).

5. Emir merupakan satu-satunya penguasa atas kekayaan negara. Ia mewarisi kekuasaan dari keluarga al-

Thani sesuai dengan UUD tahun 1972 (sekarang: Syekh Khalifa bin Hamad). Ia mengangkat perdana menteri dan kabinet. Dari 30 orang anggota badan permusyawaratan rakyat yang mempunyai hak atas inisiatif hukum, tidak seorang pun di antaranya perempuan karena mereka tidak mempunyai hak pilih. Tidak ada partai-partai dalam pengertian Barat. Kemungkinan tatap muka secara pribadi kepada emir atau perwakilan kepentingan melalui wakil-wakil (misalnya pimpinan-pimpinan suku), menggambarkan sebuah elemen partisipatoris dalam sistem pemerintahan Qatar yang patriarkat-autokratis.

6. Ekonomi minyak, politik eksploitasi setelah nasionalisasi (terhadap kompensasi) ditentukan oleh keputusan negara, hampir merupakan satu-satunya sumber penghasilan Qatar. Untuk pemanfaatan kekayaan tambang yang lebih baik, pemerintah menginginkan program industrialisasi yang luas (produksi besi, baja dan pupuk, pencairan gas, industri petrokimia), dengan memakai terutama cadangan gas negara sebagai sumber energi.

Kepustakaan: D.E. Long, *The Persian Gulf. An Introduction to its People, Politics and Economics*, Boulder (Col.), 1978; Middle East Economic Digest, *Qatar*, London 1981, 1982; H.P. Kotthaus, "Katar", dlm.: *HDW II*, 6, Hamburg 1983, hlm. 379 dst. rs

R

rasisme → OAU, apartheid.

Rastafarians → Jamaika.

RCD (*Regional Cooperation for Development*) Kerja Sama Regional Untuk Pembangunan, juga sering disebut CRD (*Coopération Régionale de Développement*), gabungan yang tidak mengikat antara Pakistan, Iran, dan Turki sejak tahun 1964, berasal dari konsep tambahan terhadap CENTO. Sampai kini proyek bersama, seperti dalam lalu lintas, komunikasi, dan infrastruktur militer, tidak banyak direalisasi, Iran tidak aktif sejak jatuhnya Shah. wpz

RE (*Rechnungseinheit*) Satuan hitungan, merupakan kunci mata uang internasional yang tidak bergantung pada gerak naik turun mata uang nasional, terikat pada paritas emas (0,88867 g emas murni, artinya 1 US\$; tahun 1976: 1 RE = 3,08 DM).
Tercipta ERE → ECU, SDR berdasarkan pengaitan US\$ ke paritas emas. dn

redistribution with growth → distribusi pendapatan, teori dan strategi pertumbuhan, Bank Dunia.

reformasi pendidikan Reformasi sistem pendidikan merupakan tujuan politik dalam negeri yang paling sering dicanangkan oleh negara-negara

yang baru merdeka di Dunia Ketiga. Penyebab utamanya adalah sistem pendidikan di Asia, Afrika, dan Amerika Latin diperkenalkan dan dibentuk oleh negara-negara kolonial serta dikembangkan menurut model Eropa Barat. Diskusi-diskusi tentang reformasi di Dunia Ketiga mempunyai tiga aspek pokok, yaitu keinginan akan kebebasan dari pewalian luar, cita-cita akan suatu identitas sendiri, dan menitikberatkan pada kebutuhan-kebutuhan sosial dan ekonomi sendiri yang spesifik. Tujuan-tujuan reformasi yang berhubungan dengan hal ini a.l. termasuk pengajaran dalam bahasa nasional, penyusunan kurikulum ilmu bumi dan mata ajaran-mata ajaran sosial yang disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan nasional dan regional; perluasan peluang pendidikan; serta penyesuaian secara didaktis, metadis, dan struktural pada situasi kehidupan dan kerja yang konkret. Namun, realisasi politik pendidikan biasanya jauh tertinggal oleh keinginan tujuan reformasi semacam itu. Hanya identitas nasional dan regional dalam hal bahasa dan isi dapat terwujud dalam lingkup yang agak luas. Sementara itu, syarat-syarat seleksi apalagi aspek didaktis dan struktural

yang mendasar dalam sistem pendidikan, sedikit sekali mendapatkan impuls reformasi yang menyeluruh. Alasannya, di satu pihak kekurangan kapasitas riset pendidikan dan perencanaan pendidikan; di lain pihak yang lebih penting adalah kepentingan pribadi kelompok elite, kebanyakan mendapat kedudukan dan kekuasaan berkat sistem pendidikan menurut model negara industri Eropa.

Beberapa negara yang telah memulai reformasi pendidikan adalah Tanzania, Mozambik, Kuba, Peru, dan Republik Rakyat Cina. Karakteristik yang sama dari model-model reformasi ini a.l. menciptakan kurikulum yang dekat pada kehidupan dan kerja, untuk mendapatkan hubungan antara belajar dan kerja nyata (kebanyakan di bidang pertanian), untuk mencapai desentralisasi dan partisipasi lebih luas pada keputusan-keputusan politik pendidikan, untuk mencapai suatu hubungan antara pendidikan sekolah dengan pendidikan pemuda dan orang dewasa di luar sekolah (→ pedagogi pembebasan: Freire, Nyerere). Selain itu, percaya akan kekuatan sosialisasi pendidikan sekolah, dalam pengertian pendidikan sosialisme atau menjadi manusia baru. Berbeda halnya dengan indoktrinasi dan penjalanan kekuasaan pihak pimpinan politik; dalam dua hal terakhir ini negara mempertahankan kekuasaan dengan jargon revolusioner.

Keberhasilan usaha-usaha reformasi berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ada, harus lebih dinilai pesimis. Di satu pihak usaha-usaha ini tidak lepas dari antagonisme antara penitikberatan pendidikan massa de-

ngan kebutuhan akan ahli dan pakar: dualisme antara pembentukan golongan elite (di kota) dalam lembaga-lembaga pendidikan dengan taraf akademis yang relatif tinggi dan pendidikan fungsional untuk massa penduduk (di desa) (→ pendidikan dasar) tidak dapat dihilangkan, dalam kasus-kasus tertentu malah lebih diperkuat. Di lain pihak justru perencanaan dan pengendalian terpusat mengancam reformasi yang telah dicanangkan, yaitu dalam hal partisipasi lebih luas pada keputusan politik pendidikan dan dalam penyesuaian isi pendidikan terhadap situasi setempat. Bertahannya lembaga pendidikan yang berorientasi Eropa Barat disebabkan terutama oleh keinginan dan tuntutan yang terus ada dari sebagian besar penduduk akan suatu pendidikan formal yang memungkinkan akses ke kedudukan di luar usaha pertanian yang kebanyakan keadaannya sangat menyedihkan.

Kepustakaan: Th. Hanf/W. Mitter (ed.), *Bildungspolitik und Bildungsreform in der Dritten Welt, Bildung und Erziehung*, th. ke-33, vol. 5, Okt. 1980; D. Elbers/H. Kull, *Bildungsreformen in Ländern der Dritten Welt, Zft. für Pädagogik*, sisipan no. 16, 1981, hlm. 117 dst.; H. Weiland, "Sozialisation und Modernisierung: Bildungsexport in die Dritte Welt", dlm.: G. Trommsdorff (ed.), *Sozialisation im Kulturvergleich*, Stuttgart 1989. **mf**

reformasi pertanian Suatu perubahan struktur pertanian di suatu negara secara mendasar, yaitu penciptaan suatu proporsi baru pemilikan atas tanah dan air. Usaha-usaha yang perlu untuk itu a.l.: penyediaan kredit; pembebasan dari penyerahan hasil garapan atau pajak yang berlebihan; penyediaan alat-alat bantu teknis, bibit dan pupuk; pembangunan sistem pema-

saran dan industri untuk pengolahan lanjut produk-produk pertanian; perbaikan infrastruktur material dan sosial. Unsur-unsur lain reformasi pertanian juga sering disebut partisipasi langsung petani dan buruh tani pada proses reformasi dan pembentukan koperasi. Reformasi pertanian harus mengutamakan manusia yang mengolah tanah atau yang hidup di pedesaan, selain itu berguna untuk produktivitas pertanian dalam ekonomi nasional secara keseluruhan.

T. Bergmann (tahun 1980: 90) menyusun suatu daftar tujuan reformasi pertanian, yang tidak pernah lengkap, tetapi telah berhasil membuat pengelompokan tujuan-tujuan: a. tujuan politik: 1) perubahan struktur sosial dan pasar pedesaan, 2) pelucutan kekuasaan kelas tuan tanah (berorientasi konsumtif), 3) pemenuhan kebutuhan tani kecil, penggarap, proletariat desa yang memberontak, 4) demokratisasi masyarakat, 5) pengamanan masyarakat terhadap revolusi; b. tujuan politik pertanian: 1) bantuan untuk usaha tani milik sendiri (*owner-cultivation*), 2) reorganisasi struktur ukuran usaha tani, 3) penciptaan usaha tani ukuran besar dengan sifat koperasi; c. tujuan ekonomi: 1) pembagian tanah, 2) pengurangan ketimpangan pemilikan tanah, 3) pembagian usaha-usaha tani besar, 4) perlindungan bagi penggarap, penurunan kewajiban memberi imbalan dari hasil garapan, pembatasan atau penghapusan sistem garap untuk mendorong timbulnya hak milik, 5) pembagian baru hasil sewa tanah sebagai bagian penting dari pendapatan nasional, 6) penghapusan segala bentuk pemba-

yan yang tidak produktif (garapan, bunga atas utang), 7) intensifikasi produksi pertanian, mobilisasi potensi produksi pertanian, kolonisasi daerah baru, 8) mempercepat penyebaran pembaruan yang bersifat teknis produksi, 9) rasionalisasi hubungan pasar para produsen, mempercepat kontribusi pasar, 10) peningkatan kontribusi faktor pertanian bagi ekonomi nasional secara keseluruhan, 11) diversifikasi produksi; d. tujuan sosial dan psikologis: 1) pemerataan sosial penduduk pertanian, 2) mobilisasi politik dan kebudayaan tani kecil dan proletariat desa, 3) kesempatan kerja yang lebih merata melalui pekerjaan-pekerjaan pembangunan di pedesaan. Bergmann memperlihatkan hubungan timbal balik antara sub-sub tujuan dengan berbagai kemungkinan pengelompokan (tujuan-tujuan ekonomi sering mempunyai dampak politis dan sosial) dan konflik-konflik tujuan.

Keinginan akan reformasi pertanian berumur lebih tua dari diskusi-diskusi pembangunan modern (lihat Revolusi Meksiko tahun 1910), tetapi setelah Perang Dunia II menjadi tema perdebatan mengenai tujuan politik pembangunan dalam organisasi-organisasi internasional. Bertolak dari laporan PBB dan FAO tentang situasi ekonomi pertanian di negara-negara berkembang, tahun 1951 berlangsung konferensi internasional pertama tentang reformasi pertanian. Reformasi pertanian dimengerti sesuai dengan makna di atas, yaitu merupakan tindakan-tindakan yang lebih daripada sekadar pendistribusian baru atas tanah atau pembukaan lahan baru. Namun, politik-politik pembangunan

internasional dan nasional sampai pertengahan tahun '60-an masih dipengaruhi gagasan-gagasan pokok teori modernisasi. Industrialisasi mendapat prioritas karena dengan industrialisasi diharapkan pemecahan persoalan pertanian melalui teknologi, peningkatan hasil dan penampungan tenaga kerja pertanian yang ada. Reformasi struktur pertanian yang serius boleh dikatakan tidak dilakukan di mana pun, kecuali di Kuba. Ketika pertengahan Dasawarsa Pembangunan I mulai tampak bahwa industrialisasi akan mendinamisasi sektor pertanian di negara berkembang dan peledakan penduduk lebih pesat dibandingkan pertumbuhan hasil pertanian sehingga mengakibatkan bencana kelaparan, konferensi internasional kedua mengenai reformasi pertanian tahun 1966 mencanangkan peningkatan produksi pertanian melalui jalan keluar teknis. Bukannya melakukan reformasi pertanian, melainkan mempropagandakan Revolusi Hijau. Hanya di beberapa negara dilakukan reformasi pertanian (Cile, Peru, Aljazair, dll.).

Revolusi Hijau yang bermata pisau ganda (memang meningkatkan hasil, tetapi juga mengokohkan struktur keterbelakangan di daerah pedesaan) sejak pertengahan tahun '70-an menyebabkan para teoretikus pembangunan kembali pada tuntutan-tuntutan politik pertanian tahun 1950. Reformasi pertanian lebih disorot dalam hubungan dengan pembangunan pedesaan, artinya sebagai usaha yang bermanfaat bagi mayoritas penduduk di negara berkembang dan bertujuan memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Konferensi Dunia Ketiga mengenai reformasi pertanian dan pembangunan pedesaan. WCARRD (Roma tahun 1979) sepakat untuk memprioritaskan bidang pertanian. Sementara program-program pelaksanaan yang menuntut adanya usaha dari negara berkembang diterima bulat, negara industri menolak beberapa bagian dari rencana tersebut yang wajib mereka lakukan di bidang politik pembangunan (bantuan pembangunan, tata ekonomi dunia baru, nasionalisasi). Dalam dimensi-dimensi baru telah dapat melihat reformasi pertanian dalam hubungannya dengan masalah-masalah pembangunan pedesaan dan ekonomi dunia (a.l. Perjanjian Bahan Mentah). Tampaknya reformasi struktur pertanian dalam makna definisi di atas (perubahan penguasaan atas tanah dan air) tetap terhenti pada status janji yang muluk.

Kepustakaan: E. Feder, *Agrarstruktur und Untereentwicklung in Lateinamerika*, Frankfurt 1973; H. Elsenhans (ed.), *Agrarreform in der Dritten Welt*, Frankfurt 1980; R. Hanisch/R. Tetzlaff (ed.), *Die Überwindung der ländl. Armut in der Dritten Welt*, Frankfurt 1979; T. Bergmann, *Agrarreform und ländliche Entwicklung*, dim.: J.H. Hohnholz (ed.), *Die Armut der ländlichen Bevölkerung in der Dritten Welt*, Baden-Baden 1980, hlm. 85-102; H. Priebe/W. Hankel, *Der Agrarsektor im Entwicklungsprozess*, Frankfurt 1980; J. Escada, *Ausbildung und Beratung im Agrarreformprozess. Dargestellt am Beispiel Chile und Peru*, Heidelberg 1982; U. Wachendorfer, *Bauernbewegung in Peru*, Heidelberg 1984.

dn
reformasi tanah → reformasi pertanian.

reintegrasi Integrasi kembali mahasiswa yang mendapatkan pendidikan di luar negeri serta tenaga-tenaga ahli yang bekerja di luar negeri → *brain drain*.

relawan pembangunan Seseorang yang bekerja di negara berkembang untuk kemajuan negara tersebut tanpa niat melakukan usaha mendapatkan uang.

dn rencana pembangunan Seperti di negara industri, di negara berkembang tidak ada tata ekonomi yang ideal, melainkan bentuk-bentuk campuran. Di sebagian besar negara berkembang, elemen-elemen ekonomi terencana lebih kuat terwakili dibandingkan di negara industri yang menganut sistem ekonomi pasar. Hal ini mempunyai beberapa alasan.

Untuk banyak negara berkembang, industrialisasi yang pesat di Uni Soviet merupakan bukti akan pentingnya sebuah politik pembangunan nasional yang terkendali dan terencana dari pusat. Selain itu, kemerdekaan politik yang didapatkan negara berkembang setelah Perang Dunia II ingin ditambahkan sebuah kemandirian ekonomi. Banyak negara ini menyamakan kolonialisme dengan imperialisme dan kapitalisme (sesuai teori imperialisme). Mereka ingin melenyapkan imperialisme dan kapitalisme dengan mengambil bentuk tatanan yang sering disebut Jalan Ketiga antara kapitalisme dan sosialisme, atau mereka membentuk tatanan yang dinamakan sosialisme, tetapi sering jauh dari ide-ide sosial maupun sosialis.

Dasar selanjutnya untuk makin banyaknya pengambilan elemen-elemen ekonomi terencana adalah adanya saran-saran pemberi bantuan bilateral dan multilateral yang sering menjadikan rencana pembangunan nasional sebagai syarat pemberian

bantuan pembangunan negara yang bersangkutan.

Selain itu, di banyak negara berkembang, seperti di beberapa negara industri, ada ketidakpercayaan mendasar terhadap tata ekonomi pasar. Pengalaman buruk dalam krisis ekonomi tahun '20-an dan '30-an merupakan alasan dalam kaitan ini, hasil-hasil mekanisme pasar dirasakan tidak adil dan merupakan penanggung jawab untuk situasi yang tidak menyenangkan di negara berkembang. Dulu maupun sekarang tidak dapat dibayangkan bagaimana masalah-masalah yang dihadapi negara berkembang dapat dipecahkan tanpa adanya campur tangan negara. Jadi, rencana pembangunan dalam ukuran tertentu menjadi mantera untuk politik pembangunan.

Rencana pembangunan merupakan usaha untuk memperbaiki dan mempercepat situasi pembangunan ekonomi dan sosial berdasarkan sebuah perencanaan menyeluruh dan rasional. Rencana pembangunan merupakan sejenis supra-instrumen politik pembangunan dengan memberikan tujuan dan sarana untuk realisasi dalam sasaran jenis dan ukuran yang telah ditetapkan sebelumnya. Rencana ini digunakan hampir di seluruh negara berkembang dalam berbagai variasi. Sampai kini rencana pembangunan nasional di banyak negara berkembang merupakan kerangka untuk segala kegiatan yang akan mempengaruhi kelangsungan pembangunan.

Proses pembangunan dalam konsep teoretis dibagi dalam tahap-tahap kerja umum horizontal yang ber-

langsung berurutan dan saling menopang, serta vertikal dalam tingkat perencanaan dengan tingkat yang berbeda dan diatur secara hierarkis. Dalam tahap pertama dikumpulkan informasi-informasi penting (potensi sumber daya, faktor-faktor kendala, tendensi historis, dsb.) dan dihitung secara statistik. Setelah dibuat perkiraan pertama mengenai perspektif pembangunan berdasarkan temuan-temuan tersebut, diolah urutan sasaran-sasaran sosial dan ekonomi serta dipilih strategi untuk merealisasikannya sebagai haluan politik pembangunan. Pada tahap ketiga rencana pembangunan sebenarnya dan nilai-nilai sarananya disusun dan diputuskan berdasarkan tujuan-tujuan yang pasti serta dihitung secara matematis. Pada tahap keempat rencana ini dijalankan dan diperiksa hasil, kemampuan berfungsi lembaga-lembaga yang disertakan dan dasar-dasar keberhasilan maupun kegagalannya (evaluasi).

Dalam pembagian tingkat rencana secara vertikal mula-mula dibedakan dalam kerangka waktu, yaitu rencana jangka pendek (bulanan, tahunan), jangka menengah (2-6 tahun, sering 5 tahun), dan rencana (perspektif) jangka panjang untuk masa lebih dari 10 tahun. Secara geografis dibagi menurut perencanaan lokal, regional, dan nasional. Untuk luasnya perencanaan dibedakan menurut rencana proyek (bendungan, jalan, pembangunan tenaga), rencana sektoral (pertanian, industri, energi, lingkungan), dan rencana global ekonomi keseluruhan. Secara horizontal semua tingkat rencana disesuaikan dan dikaitkan

dalam sebuah rencana pembangunan menyeluruh, disebut rencana pembangunan terintegrasi (*comprehensive planning*).

Hasil-hasil rencana pembangunan yang dipraktekkan di banyak negara berkembang dalam masa lebih dari 3 dasawarsa, mengecewakan dan menimbulkan rasa pesimis. Harapan baru yang banyak tumbuh di negara berkembang berlandaskan penolakan terhadap campur tangan negara terlalu banyak ke dalam proses ekonomi dan penguatan mekanisme harga sebagai sarana pengendali. Campur tangan negara di masa lalu telah banyak menimbulkan pergeseran harga pada pasar faktor dan pasar barang. Pergeseran harga ini merupakan penyebab salah pengendalian dan pemborosan sumber daya yang tidak banyak jumlahnya, sebenarnya lebih merupakan tanggung jawab negara industri dibandingkan negara berkembang. **nm**

rencana sektoral → rencana pembangunan.

Republik Afrika Tengah 1. Republik Afrika Tengah (623.000 km², tahun 1989 berpenduduk sekitar 3 juta dengan pertumbuhan 2,7%/tahun) yang merdeka sejak tahun 1960 adalah bekas koloni Perancis Ubangi-Schari, termasuk negara termiskin di dunia (pendapatan per kapita tahun 1989: 390 US\$). Masalah pembangunan adalah letaknya sebagai negara pedalaman, dampak kekuasaan kolonial yang membangun perusahaan-perusahaan konsesi (→ kolonialisme) pada awal abad ke-20 secara sangat brutal masih terlihat sampai kini, serta warisan kekuasaan mantan

"kaisar" Bokassa yang membawa bangkrut negaranya. Di daerah timur dan timur laut (sabana kering) hampir tidak berpenghuni akibat penjarangan semasa kekuasaan kolonial. Sebagian besar penduduk (bangsa Sudan: Baya-Madjia 40%, Banda 30%, Sara 8%; kelompok-kelompok suku Bantu di barat daya [M'Baka yang sangat banyak terwakili dan posisi-posisi pimpinan, Kaka, dsb.] di bawah 5%; sekitar 16.000 orang Pigmaen), terpusat di daerah selatan (sabana basah dan hutan tropis barat daya), terutama di tepi Sungai Ubangi dan di sekitar ibu kota Bangui (tahun 1987 sekitar 340.000 penduduk). Jumlah penduduk kota (tahun 1989: 46%) terus naik. Hampir 30% penduduk beragama Kristen, sekitar 20.000 penduduk beragama Islam, mayoritas penduduk animisme. Bahasa yang dimengerti hampir oleh semua penduduk adalah Sango.

2. Faktor ekonomi terpenting adalah pertanian (tahun 1987: 80% angkatan kerja, 40% PDB, 60% hasil ekspor). Produksi kapas (tetap komoditas ekspor terpenting), sampai kini tidak populer akibat tanam paksa di masa kolonial dan di tahun-tahun terakhir terus mundur (tahun 1970-1975: 135.000 ton, tahun 1987: 25.000 ton), setelah harga pasar jatuh dibatasi menjadi maksimal 30.000 ton/tahun untuk melakukan diversifikasi pertanian (minyak sawit, karet, kakao, ubi kayu, dll.). Perkebunan kopi di hutan di daerah barat daya dan selatan (ekspor tahun 1987: 11.800 ton) memburuk akibat jatuhnya harga pasar dunia dan karena kondisi tanaman yang berasal dari perkebunan besar masa kolonial

(70% luas kebun). Republik Afrika Tengah seluas 5,5% masih tertutup oleh kayu-kayu mulia yang jarang jenisnya, tetapi populasi menurun akibat penebangan yang tanpa perhitungan, transportasi yang jauh, dan harga di pasar dunia yang turun-naik. Potensi sumber pendapatan yang besar adalah penambangan emas (220-250 kg/tahun), terutama intan (tahun 1978: 51% nilai ekspor). Produksi tahunan yang diberitakan secara resmi sebanyak 350.000 karat, pasti terlalu rendah. Perkiraan angka sebenarnya adalah 1 juta karat, sebagian besar diselundupkan ke luar negeri. Untuk penambangan bijih besi, uran, dan tembaga yang prospektif, kekurangan uang untuk investasi dan pembukaan infrastruktur jalan di Republik Afrika Tengah. Kekurangan jalan (dari 4.400 km, hanya 450 km yang diaspal) dan jaringan transportasi air itu, terutama untuk mengatasi jarak yang jauh ke laut, yang makin sulit karena tindakan diskriminatif negara-negara tetangga. Sektor bahan pangan, kapas, dan sektor sekunder pengolahan kayu (pangsa pada PDB sekitar 10%) menderita akibat tindakan ini sehingga dengan berat harus melawan sempitnya pasar, ongkos energi yang tinggi, dan terutama penyelundupan dari negara-negara tetangga yang sulit diperkirakan jumlahnya. Perusahaan-perusahaan yang berjumlah sekitar 50 buah dan selalu defisit, sebagian besar dilikuidasi atau diswastanisasi dalam rangka sebuah rencana penyehatan. Rencana untuk mengurangi jumlah pegawai pemerintah mendapat perlawanan besar, apalagi melihat makin tingginya jumlah

pengangguran di perkotaan. Neraca perdagangan sering negatif (penutupan impor melalui ekspor tahun 1987: 68%), utang luar negeri tumbuh terus meskipun sebagian besar merupakan bantuan pembangunan yang bersifat tunjangan, jumlah sampai tahun 1988 adalah 585 juta US\$ (PDB 770 juta US\$) → utang. Anggaran pemerintah yang kronis defisit ditutup oleh IMF (*Special Drawing Rights*) dan Perancis, yang merupakan mitra dagang (diikuti negara-negara ME lainnya, Zaire dan AS), dan kreditor terpenting.

3. Setelah "Bapak Bangsa", B. Boganda, meninggal tahun 1959 akibat kecelakaan pesawat udara yang sampai kini tidak jelas penyebabnya, lingkaran penguasa kolonial Perancis mengangkat D. Dacko yang ketika itu berumur 29 tahun dan sangat bergantung pada Perancis, sebagai pemimpin negara dan pemerintah. Tanggal 1 Januari 1966 Dacko digulingkan oleh militer dipimpin J.B. Bokassa. Kekuasaan Bokassa yang kejam menganggap negara sebagai milik pribadi (1/3 anggaran negara masuk ke kas pribadi), tahun 1976 menjadikan dirinya sebagai kaisar dan tahun 1977 melakukan upacara penobatan dengan mencontoh Napoleon, sementara situasi ekonomi, terutama sosial, terus memburuk (tingkat buta aksara tahun 1960: 92%, tahun 1975: 94%; tahun 1987: 67% dengan tingkat penyekolahan 50%). Hampir tidak ada infrastruktur politik (partai [sejak tahun 1962 menjadi partai persatuan] yang didirikan oleh Boganda hanya merupakan partai semu), administrasi pemerintah di tingkat terbawah pun ti-

dak berjalan sepenuhnya. Tahun 1979 Bokassa menjadi terkenal di dunia karena turut membunuh sekitar 100 murid-murid sekolah dan pendekatannya ke Libia (bahaya serangan dua front di Cad yang sedang diamuk perang saudara), menjadi tidak menyenangkan bagi Perancis yang sampai saat itu membiayai semua tingkah laku Bokassa. Pada saat Bokassa sedang berkunjung ke luar negeri, Perancis menggantinya dengan mendudukkan mantan Presiden Dacko yang dibawa tentara Perancis ke Bangui, sebagai pimpinan pemerintah. Usaha Dacko menghidupkan legitimasi demokrasi, menemui kegagalan. Kemenangan Dacko pada pemilu Maret 1981 yang tampak dimanipulasi (dengan hasil sedikit di atas 50% lebih unggul dari Bokassa dan calon lainnya, yaitu Perdana Menteri A. Patasse yang hidup dalam pengasingan di Paris, resminya 33%), tidak dapat mengokohkan posisinya yang makin lemah akibat masalah-masalah ekonomi yang terus meningkat. September 1981 militer dipimpin Jenderal A. Kolingba mengambil alih kekuasaan; ia tidak berhasil mengintegrasikan oposisi ke rezimnya. Setelah berlangsung usaha kudeta oleh A. Patasse (Maret 1982) yang kemudian mendapatkan suaka politik di Togo, berlangsung konflik antara Kolingba dan pemerintah Perancis. Pendirian partai kesatuan *Rassemblement Démocratique Centrafricain/RDC* (1986) dalam tahun yang sama berhasil mengokohkan Kolingba sebagai presiden melalui referendum (91% setuju dengan keikutsertaan pemberi suara 1/3 penduduk). Setelah diberlakukan UUD

baru tahun 1987 dengan 50% keikutsertaan dalam pemilu dari 142 calon (semua RDC) dipilih sebuah Dewan Nasional yang terdiri atas 52 anggota. Penguasa tertinggi tetap Perancis, yang menempatkan 1.100 pasukan elite di Republik Afrika Tengah.

Kepustakaan: P. Kalck, *Histoire de la R.C.A. des origines préhistoriques à nos jours*, Paris 1974; R. Delpey, *Affaires centrafricaines*, Paris 1985; T. O'Toole, *The Central African Republic: The Continent's Hidden Heart*, Aldershot 1987.

kz

resiprositas Klausul (prinsip) resiprositas merupakan sebuah prinsip dasar yang tertanam kuat dalam lalu lintas perdagangan internasional. Menurutnyanya, suatu klausul prioritas hanya akan berlaku jika negara mitra kontrak menyediakan imbalan yang sesuai.

dn

Reunion 1. Pulau Reunion yang terbagi dua oleh gunung berapi setinggi 3.069 m dengan berbagai zone iklim (dari tropis sampai sejuk), sejak diduduki Perancis di abad ke-17 berorientasi ekspor yang monokultur (mula-mula kopi, sejak awal abad ke-19 tebu). Keturunan kuli-kuli kontrak yang dibawa ke Reunion (sampai tahun 1848 bernama Pulau Bourbon) dalam beberapa masa konjungtur politis (pembebasan perbudakan, pada saat itu terdapat 60.000 budak dan 50.000 orang bebas) dan kemajuan ekonomi, menghasilkan berbagai corak etnis. Mayoritas penduduk adalah orang kulit putih yang datang pada abad ke-18 dan pertengahan abad ke-19 (sekitar 25% jumlah penduduk), orang Madagaskar dan Afrika, orang India dan Cina serta berbagai campuran; mereka berbahasa Perancis dengan dialek tersen-

diri dan hampir seluruhnya beragama Katolik. Ledakan penduduk sejak akhir Perang Dunia II telah meningkatkan jumlah penduduk dari 241.000 orang (1946) menjadi 569.000 orang (1987) karena situasi ekonomi (pelarian dari pedesaan disebabkan proses sentralisasi di perkebunan tebu) telah memperuncing masalah-masalah sosial (tahun 1987: 36% penganggur; 75% pekerja bekerja sebagai pegawai negeri; imigrasi kaum muda yang didukung pemerintah ke Perancis, setiap tahun mencapai 4.500 orang; di sana hidup sekitar 70.000 orang emigran dari Reunion)

2. Perekonomian Reunion hanya berorientasi pada gula dan hasil dari gula seperti rum dan melase (80% dari ekspor) dan sejak bertahun-tahun sering ditimpa krisis. Produksi yang selalu mundur dalam beberapa tahun belakangan memang mengalami peningkatan, tetapi masih jauh untuk memenuhi permintaan. Hanya sebagian kecil impor dapat ditutup hasil ekspor (tahun 1987: 10,1%).

3. Sejak tahun 1946 Reunion adalah sebuah *Département* (propinsi luar dari Perancis dan mempunyai tiga wakil dalam parlemen Perancis a.l. M. Debre' sejak tahun 1963). Ketegangan-ketegangan sosial yang terus-menerus tumbuh—60% penduduk bergantung pada berbagai bentuk subsidi sosial—tertuang dalam pertikaian-pertikaian politis besar yang penuh kekerasan antara partai kanan dan kiri (kurang lebih dalam spektrum kepartaian di Perancis); pemerintah Perancis sampai tahun 1981 sangat membantu golongan konser-

vatif. Sejak awal tahun '70-an mayoritas golongan kiri dipimpin ketua Partai Komunis yang populer P. Vergès (anggota parlemen Eropa) menuntut otonomi (hak-hak menentukan pemerintahan sendiri yang lebih luas) untuk Reunion, dimulai oleh OAU, tetapi ditolak golongan konservatif dan pemerintah Perancis sampai kemenangan pemilihan umum Mitterand tahun 1981. Tahun 1982 dari Paris dimulai suatu usaha ke arah pemberian otonomi yang lebih luas (a.l. penggantian *präfekt* [setaraf gubernur] oleh ketua parlemen yang dipilih Reunion).

Kepustakaan: K. Ziemer, "Réunion", dlm.: *HDW II*, 5, Hamburg 1982, hlm. 486 dst.; A. Scherer, *La Réunion*, Edisi ke-2, Paris 1985.

kz
revolusi Penggunaan bahasa politik membedakan arti revolusi. Akan tetapi, dalam ilmu pengetahuan juga tidak ada kesatuan pendapat tentang isi makna. Definisi cepat disepakati untuk pengertian bahwa revolusi merupakan perubahan mendasar suatu sistem politik dan susunan tata masyarakat. Dengan demikian, lingkup perubahan politik dan sosial merupakan dasar penentu terpenting. Makin intensif dan makin luas perubahan itu, makin absah penggunaan kata revolusi. Oleh karena itu, revolusi istana, pemberontakan atau kudeta yang tidak atau hanya secara minimal mengubah struktur sosial ekonomi suatu negara dan hanya menggantikan sekelompok orang yang memegang posisi hegemoni politik, tidak dapat digolongkan dalam pengertian ini. Masih diperdebatkan sejauh mana penggunaan kekerasan merupakan ciri suatu revolusi, juga masih dipertanyakan apakah suatu revolusi harus berjalan

secara serentak. Maksudnya, bentuk revolusi dapat terjadi dengan kekerasan dan berdarah, tetapi ada juga yang terjadi relatif secara damai dan berlangsung dalam jangka waktu agak panjang. Pendekatan teori-teori revolusi baru mengingatkan agar berhati-hati terhadap sorotan berlebihan pada aspek kekerasan. Tampak juga suatu kecenderungan menganggap revolusi sebagai subkelompok bawah dari gejala-gejala perubahan sosial politik.

Kedua pengertian tentang arti revolusi tersebut makin meningkatkan penggunaannya di negara-negara berkembang, pada gejala/proses revolusi yang diharapkan lebih mungkin terjadi. Ternyata, revolusi dalam banyak kasus merupakan syarat yang tidak dapat dielakkan untuk kemajuan-kemajuan pembangunan yang mendasar. Revolusi diarahkan untuk menentang struktur sosial dan kondisi hegemoni politik yang bersifat mengeksploitasi, yang dikokohkan oleh keterbelakangan internal. Negara-negara industri sering menutup mata pada keadaan-keadaan sosial-politik semacam itu di negara-negara berkembang (berdasarkan kepentingan-kepentingan sendiri yang sangat picik) menolong rezim-rezim ini mempertahankan kekuasaannya.

Teori-teori revolusi membuat pernyataan tentang sebab-sebab revolusi yang dipakai untuk meneliti revolusi. Masih diperdebatkan, apakah ada satu-satunya kondisi historis di negara-negara yang terjadi revolusi, atau apakah ada kemiripan kondisi yang dapat dibandingkan. Penelitian revolusi yang secara empiris bertitik

tolak dari kemiripan, telah banyak meneliti persoalan-persoalan, kapan revolusi terjadi, bagaimana kondisi sosial politik, terutama perubahan-perubahan bersifat kekerasan dan serentak terjadi atau mungkin terjadi. Hasil penelitian membuktikan bahwa revolusi jarang terjadi jika kondisi sosial penduduk memaksa untuk lebih mengutamakan keamanan eksistensi mereka (→ marjinalitas), melainkan terjadi pada saat kemajuan sosial ekonomi tidak dapat memuaskan harapan-harapan yang ditimbulkannya. Perbedaan yang tumbuh antara tuntutan-tuntutan masyarakat dengan hasil-hasil pembangunan, meningkatkan potensi revolusi. Kaitan ini menyangkut kurang lebih tesis yang diberlakukan untuk Dunia Ketiga tentang harapan-harapan yang terus meningkat.

Berdasarkan hal ini revolusi dapat dibedakan menurut golongan/lapisan sosial mana yang menghasilkan revolusi, menentang kondisi sosial mana revolusi ini ditujukan, dengan tujuan-tujuan sosial politik mana perubahan ini dilaksanakan. Kriteria-kriteria ini menghasilkan dua tipe revolusi, borjuis demokratis dan sosialis. Pertentangan mengenai mana dari kedua tipe ini yang aktual dalam sejarah negara berkembang akibat struktur pramodern dan pra-industri masyarakatnya, telah menentukan sebagian besar perdebatan-perdebatan dan pertentangan fraksi antara golongan-golongan politik kiri. Juga dibedakan antara revolusi sosial yang menyeluruh dan perubahan mendasar dalam bidang-bidang sosial tertentu. Itulah sebabnya dapat dibenarkan jika

kita berbicara tentang revolusi industri, revolusi pertanian, atau revolusi teknologi. Penggunaan ungkapan ini sekali lagi menyatakan bahwa perubahan yang berjalan dengan damai dapat saja membuktikan pengertian revolusi.

Kepustakaan: A. Arendt, *Über die Revolution*, München 1963; K. Lenk, *Theorien der Revolution*, München 1973; K. von Beyme (ed.), *Empirische Revolutionsforschung*, Opladen 1973; G. Chaliand, *Revolution in the Third World*, Harmondsworth 1978; T. Skocpol, *States and Social Revolution*, Cambridge 1979; E. Zimmermann, *Krisen, Staatsstürze und Revolutionen*, Opladen 1981.

dn
Revolusi Hijau Peningkatan produktivitas pertanian melalui metode-metode baru. Jadi, tidak sama dengan reformasi pertanian, melainkan merupakan bentuk produksi yang lebih padat modal dan berinvestasi lebih tinggi melalui bibit yang lebih baik sehingga menjamin panen yang lebih tinggi dan beberapa kali dalam setahun dengan penggunaan jumlah air, energi, pupuk, dan obat-obatan pemberantas hama dan penyakit tanaman yang lebih banyak melalui mekanisasi pertanian. Revolusi hijau berkaitan dengan jenis-jenis padi dan gandum unggul yang dibibitkan di Meksiko dan Filipina, merupakan hasil dari penelitian pertanian internasional (lihat *E+Z* 3/1983, hlm. 21), dan mendapat dukungan kelompok konsultan untuk penelitian pertanian internasional. Kritik terhadap revolusi hijau karena menguntungkan petani kaya, menimbulkan pengangguran di pertanian, menajamkan perbedaan pendapatan, dan meningkatkan impor (perlengkapan dan modal asing). Nyatanya peningkatan produksi dalam revolusi hijau yang terjadi ter-

utama di daerah yang mendapatkan pengairan secara teratur, tempat dapat ditanami bibit unggul dan digunakan pupuk buatan, tetap terbatas. Akses yang lebih baik ke modal (kredit) dan teknologi menguntungkan perusahaan milik usaha petani besar tertentu yang dekat pasar sehingga keterbelakangan relatif usaha tani kecil, terutama petani yang masih subsisten, makin meningkat. Hal yang ditunjang bukannya reformasi pertanian, melainkan menimbulkan pemusatan pemilikan serta meningkatkan perbedaan pendapatan regional dan individu.

Sejak muncul kritik-kritik ini, penelitian pertanian internasional makin memusatkan perhatian pada hasil-hasil yang dapat ditanam oleh usaha tani kecil, tidak padat alat produksi dan resisten terhadap sederet penyakit tanaman, serta dapat tumbuh di daerah tropis.

dn

Revolusi Kebudayaan → Aljazair, Cina, Libia.

Revolusi Putih → Iran.

rezim internasional Di bidang hubungan internasional dan politik internasional menandai kerangka tatanan yang dibangun berdasarkan prinsip, norma, aturan, dan proses pengambilan keputusan. Tatanan ini merupakan "usaha menciptakan sebuah koordinasi politik dalam sebuah dunia dengan makin tumbuhnya kompleksitas dan keinginan interdependensi, walaupun ada posisi-posisi kepentingan yang tidak dapat disatukan" (Senghaas, 1987). → GATT, → Bank Dunia, → tata ekonomi dunia baru, → tata informasi dunia baru, → Hukum Laut Internasional, → program bahan mentah terintegrasi, → STABEX.

Kepustakaan: D. Senghaas, "Internationale Regime", dim.: K. von Beyme *et al.* (ed.), *Politikwissenschaft*, vol. III: Aussenpolitik und Internationale Politik, Stuttgart 1987, hlm. 180 dst.

mik

rezim militer → rezim otoriter.

rezim otoriter Selain rezim demokratis (→ demokratisasi) dan totaliter, merupakan suatu tipe rezim tersendiri. Tidak seperti di negara-negara industri Barat yang kini tidak terdapat rezim otoriter, di negara-negara Dunia Ketiga hal ini hampir merupakan sesuatu yang lumrah. Hampir dua pertiga dari negara berkembang saat ini diperintah secara otoriter. Bentuk dan corak rezim otoriter berlain-lainan. Untuk tujuan deskriptif analitis dapat dibedakan beberapa ciri, yang kombinasi-kombinasinya pada kasus konkret menentukan tipe rezim otoriter tersebut.

a. *Basis kekuasaan sosial dan politik*: rezim otoriter dapat dibentuk oleh berbagai golongan masyarakat, dapat berlandaskan kekuatan sipil, militer, etnis, religius dan/atau (jika birokrasi dalam negara dan ekonomi negara mempunyai posisi kunci) birokratis. Kombinasi ciri-ciri ini sering terjadi. Dalam rezim militer menonjol unsur-unsur kekuatan sipil-militer, sedangkan dalam otoriterisme baru di Amerika Latin adalah kekuatan militer-birokratis. Di daerah Arab misalnya, kerajaan-kerajaan Saudi Arabia dan Maroko dapat dikelompokkan dalam tipe religius-etnis. b. *Pola legitimasi*: rezim otoriter bervariasi antara legitimasi tradisional, karismatis, politis-situatif, dan ideologi pembangunan. Konsep legitimasi tradisional berakar pada Max Weber yang menamakannya otoritas kolot: tindakan

semena-mena dan membangun kelembagaan berdasarkan kebiasaan untuk mempertahankan tradisi yang disucikan. Hal ini mencakup pengabsahan religius otoritas politik, seperti dilakukan di negara-negara Islam berdasarkan kitab suci Al Qur'an. Konsep legitimasi karisma juga bertumpu pada Max Weber, yaitu pengakuan seorang pemimpin oleh para pengikutnya dalam bentuk kepasrahan pribadi yang timbul karena antusiasme atau penderitaan dan harapan. Rezim otoriter disahkan secara politis-situatif apabila rakyat misalnya merasa diselamatkan dari suatu perkembangan yang lebih gawat, melalui kudeta militer (Cile tahun 1973); legitimasi demikian waktunya terbatas dan tidak lama kemudian mencontoh model legalisasi lain. Di negara berkembang biasanya berbentuk pemecahan bersifat teknokratis dan prestasi-prestasi pembangunan. Legitimasi pembangunan yang bersifat ideologis ini berlandaskan pada (kemungkinan) prestasi-prestasi lebih tinggi dari rezim otoriter dan merupakan inti berbagai bentuk alternatif sosialisme dan nasionalisme di Dunia Ketiga. c. Ciri ketiga berkaitan dengan struktur kekuasaan politik dan berkisar pada masalah pembagian kekuasaan dalam rezim otoriter dan mekanisme apa yang mengikat pimpinan dan elite penguasa satu dengan yang lain. Biasanya rezim otoriter melakukan sentralisasi kekuasaan. Pembagian kekuasaan secara horizontal dalam eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta pembagian kekuasaan secara vertikal (berbagai tingkat sistem dengan wewenang keputusan yang otonom)

jika ada hanya bersifat formal, tidak substansial. Ini adalah ciri definisi rezim otoriter. Lembaga-lembaga politik yang secara formal mirip dengan sistem demokrasi karenanya harus ditunjang agar dapat berfungsi secara benar dalam proses politik. Selain itu, di negara berkembang, dibanding dengan negara industri, ditemukan suatu personifikasi politik yang berlebihan, baik pada rezim demokratis maupun otoriter. Pimpinan bersifat pribadi apabila kekuasaan terpusat pada satu orang dan tidak hanya atau berakar sekunder pada lembaga politik. Seringkali pelaksanaan kekuasaan berjalan dengan pemimpin-pemimpin karismatis (*Nasser, *Nkrumah, Sekou Toure, *Soekarno, *Nyerere). Caudilismo juga dapat didefinisikan sebagai tipe kekuasaan otoriter, yang tidak berakar pada kelembagaan, melainkan berlandaskan terutama pada kualitas pemimpin secara pribadi atau kelompok penguasa. Berbeda dari tradisi caudalistis dengan penguasaan politik oleh militer di Amerika Latin, pimpinan politik dalam otoriterisme birokratis-militeristis, tidak bersifat pribadi, terlihat dalam rotasi personal pada pelaksanaan jabatan kepresidenan (Brasilia, Argentina, Peru). Variasi terpenting bentuk kekuasaan pribadi adalah klientelisme dan patrimonialisme. d. Hubungan antara pemegang kekuasaan dan yang dikuasai dalam rezim otoriter ditandai oleh suatu kesatuan motif: kekuasaan dari atas. Pelanggaran hak asasi manusia dan mengalirnya pengungsi adalah buktinya. Namun, ukuran dan bentuk represinya berbeda-beda. Sehubungan dengan ini rezim otoriter dapat di-

bedakan antara tipe eksklusif dan inklusif, bergantung apakah keikutsertaan politik dari penduduk dilarang (pelarangan partai-partai politik dan kelompok kepentingan dalam masyarakat otonom, terutama serikat buruh) atau dikendalikan melalui saluran-saluran partisipasi yang terkendali. Dalam hal ini misalnya digunakan bentuk-bentuk demokratis (pemilihan umum, plebisit), yang sebenarnya telah dilumpuhkan (tidak ada saingan bagi partai/gerakan pendukung pemerintah, tidak ada kebebasan memilih) dan sering dipalsukan (manipulasi pemilihan umum). Istilah-istilah mobilisasi dan populistis yang ditonjolkan oleh rezim otoriter mempunyai efek dalam rangka menarik massa sebagai penopang rezim dan tujuan-tujuan politik mereka. e. Selain itu, rezim otoriter harus dilokalisasi dalam konteks historisnya (terutama historis struktural), hal ini dapat berbeda dari rezim ke rezim, tetapi sangat menentukan tipe khusus dari rezim otoriter. Misalnya, rezim otoriter akan lebih represif dan lebih bersifat demobilisasi apabila merupakan kelanjutan keadaan yang sangat dipolitisasi dan sosial revolusioner. f. Selanjutnya, rezim otoriter berbeda-beda dalam orientasi politiknya; dalam kebijaksanaanannya mereka sama sekali tidak terikat, walaupun rezim otoriter yang sosial-progresif lebih jarang ditemukan daripada yang terikat pada *status quo* (→ demokratisasi).

Kepustakaan: G. O'Donnell, *Modernization and Bureaucratic Authoritarianism*, Berkeley 1973; J.J. Linz, "Totalitarian and Authoritarian Regimes", dlm.: F.I. Greenstein/N.W. Polsby (ed.), *Handbook of Political Science*, vol. 3, hlm. 175-411, F. Büttner et al., *Reform in Uniform? Militärherrschaft und Entwicklung in der Drit-*

ten Welt, Bonn-Bad Godesberg 1976; D. Collier (ed.), *The New Authoritarianism in Latin America*, Princeton 1979; F. Nuscheler, "Erscheinungs- und Funktionswandel des Prätorianismus in der Dritten Welt", dlm.: *CIVITAS* 16 (1979), hlm. 171-213; H.F. Illy/R. Siedaff/N. Werz, *Diktatur-Staatsmodelle für die Dritte Welt*, Freiburg 1980; F. Nuscheler (ed.), *Dritte Welt Forschung. Entwicklungstheorie und Entwicklungspolitik*, Opladen 1985. **dn**

Rhodesia → Zimbabwe.

Rocas → Sao Tome & Principe.

Rwanda 1. Dengan PNB per kapita sebesar 320 US\$ (1989) dan termasuk dalam golongan LLDC, Rwanda merupakan negara terkecil nomor tiga di Afrika (26.338 km²), kepadatan penduduknya tertinggi (tahun 1986: 238 penduduk/km²). Pemenuhan kebutuhan pangan bagi penduduk yang meningkat pesat (tahun 1986: 6,27 juta penduduk, pertumbuhan 3,2%/tahun, ditambah pengungsi dari Burundi), merupakan masalah pembangunan terbesar.

Pemanfaatan tanah yang melampaui kemampuan tanah melalui penanaman produk-produk subsistensi dan makanan pokok (kacang, pisang, ubi kayu) dan peternakan ekstensif (sapi Watussi, domba, kambing) serta penebangan hutan untuk kayu bakar, dalam tahun-tahun terakhir menyebabkan erosi tanah dan sangat menurunkan kesuburan tanah. Letak geografis (±1.500 km dari laut) juga merupakan beban berat untuk pembangunan selanjutnya negara pedalaman ini. Hampir seluruh pengangkutan barang harus dilakukan Rwanda melalui dua pelabuhan ekspor, Dar es Salaam (Tanzania) dan Mombasa (Kenya) dengan ongkos transportasi yang tinggi. Dengan demikian Rwanda terpaksa harus membina hubungan

politik yang baik dengan kedua negara tetangga tersebut. Melalui kerjasama regional (→ CEPGL, → ODECA) diusahakan membangun ruang ekonomi lebih luas dan terintegrasi, serta membuka sumber-sumber alam daerah itu (pembangkit listrik tenaga air, gas metan). Potensi pembangunan Rwanda pada saat ini ditentukan oleh kekayaan mineral (kasiterit, wolfram) dan hasil-hasil pertanian perkebunan (kopi, teh, piretrum).

Penduduk terdiri atas suku Hutu (90%), Tutsi (9%), dan suku Tura jenis Pygmi (1%), terbagi dalam Katolik (50%), Protestan (12%), Islam (9%), dan animis.

2. Dengan kontribusi sebesar 45% terhadap PDB (1985) dan menyerap 85% (1985) dari angkatan kerja, pertanian unggul dibandingkan industri dan pariwisata yang baru tumbuh. Pertambangan menghasilkan sekitar 5%, kopi lebih dari 50% dari keseluruhan nilai ekspor. Mitra dagang utama adalah Belgia (14%), ME, Kenya, Tanzania, Jepang, AS, dan Zaire.

Produksi insektisida piretrin (tanaman piretrum) yang mendapat bantuan UNIDO, dalam masa mendatang diharapkan dapat memperbaiki hasil panen dan situasi pangan melalui pembasmian penyakit menular pada hewan. Sektor subsistensi ditandai oleh produktivitas lahan yang rendah dan metode produksi yang kadaluwarsa. Penanganan erosi tanah dilaksanakan melalui program-program terintegrasi di bidang perladangan, perhutanan, dan peternakan yang didukung oleh UNDP. Kebutuhan akan daging dan susu tidak dapat dipenuhi lagi oleh peternakan sapi

semodel Peternakan-Tutsi, yang secara historis terbukti mempunyai banyak kelemahan. Sampai saat ini industri (15% dari PDB) terbatas pada pengolahan produk pertanian (pangan pokok, kulit, kopi, bir dari pisang) dan secara regional terpusat di sekitar ibukota Kigali. Tingginya tingkat buta aksara (tahun 1980: 50%), kematian anak, tingkat harapan hidup yang rendah (tahun 1986: 48 tahun), dan penyediaan tenaga dokter yang sangat buruk (tahun 1981: 32.150 penduduk/dokter) merupakan ciri perkembangan sosial yang miskin.

3. Perkembangan sejarah Rwanda yang merdeka tahun 1962 (tahun 1918–1946 daerah mandat PBB, tahun 1946–1962 daerah perwalian PBB di bawah pemerintahan Belgia), selalu diliputi pertentangan etnis dan politis antara suku Tutsi (nomad peternak) dan suku Hutu (petani ladang, suku Bantu). Perlawanan suku Hutu yang ditindas dalam sistem feodal Kerajaan Tutsi dukungan Belgia, meledak dalam pemberontakan Bahutu (1959), yang selain berlangsung pembantaian ribuan orang telah mengakibatkan pengusiran sekitar 150.000 orang suku Tutsi ke negara-negara tetangga. Melalui referendum di bawah pengawasan PBB, 79% penduduk mendukung penghapusan kerajaan. Tahun 1961 partai PARMEHUTU (*Parti de Mouvement de l'Emancipation Hutu*) pimpinan G. Kayibanda menjadi partai terkuat hasil pemilu dan Kayibanda menjadi presiden pertama republik Rwanda. Pertikaian-pertikaian etnis yang terus-menerus menyebabkan penghapusan prulisme partai dan di bidang politik luar

negeri telah membubarkan (1964) pakta ekonomi dan keuangan dengan Burundi, di mana suku Tutsi berkali-kali mencoba menerobos ke daerah Rwanda. Pembantaian suku Hutu yang hidup di Burundi oleh suku Tutsi yang berkuasa di sana, telah menjatuhkan Presiden Kayibanda. Setelah terjadi pengambilalihan kekuasaan secara militer, J. Habyarimana menjadi presiden baru. Habyarimana yang termasuk golongan Hutu moderat, berusaha mendamaikan golongan-golongan suku dan sejak tahun 1975 melalui partai persatuan MRND (*Mouvement Révolutionnaire Nationale pour le Développement*), berusaha mengalihkan perhatian kekuatan-kekuatan negeri itu dari pertikaian-pertikaian regional dan etnis serta memobilisasi mereka untuk pembangunan nasional. Mirip *ujamaa* (Tanzania) dan *fokonolona* (Madagaskar), *umunganda*, pelaksanaan kolektif dan tidak dibayar untuk pekerjaan-pekerjaan pembangunan, sangat berperan dalam menentukan mobilisasi masyarakat luas untuk proses pembangunan. UUD disusun menurut model Perancis, yang memberikan jaminan ke-

dudukan utama kepada presiden dalam proses pengambilan keputusan politik dan angkatan bersenjata, mengamankan kekuasaan Habyarimana (tahun 1978 dipilih, kembali terpilih Desember 1983).

Masa depan pembangunan yang akan datang sangat bergantung pada bantuan luar negeri, ditentukan apakah negara ini berhasil mengurangi ketergantungan dari kopi melalui diversifikasi struktur ekspor dan menemukan jalan keluar dari masalah pertumbuhan penduduk dan pangan. Hubungan baik dengan negara-negara tetangga, kemajuan kerja sama regional dan kontinuitas politik keseimbangan etnis, merupakan persyaratan penting. Pemberi bantuan pembangunan utama Rwanda adalah EDF (hasil teh) dan Jerman (infrastruktur lalu lintas).

Kepustakaan: G. Philipp, "Rwanda", dlm.: F. Nuscheler/K. Zimmer, *Politische Organisation und Repräsentation in Afrika*, Berlin/New York 1978, hlm. 1691 dst.; A. Hildenbrand, "Rwanda", dlm.: *HDW II*, 5, Hamburg 1982, hlm. 153 dst. Internationale Solidarität und Kommunikation (ISOKO) (ed.), *Amahuru ki? Überleben in Rwanda/Vivre au Rwanda*, Frankfurt/Main 1987.

gp

S

SAAFA → bantuan pembangunan Arab ke Afrika.

SAARC (*South Asian Association for Regional Cooperation*) Organisasi Kerja Sama Regional Asia Selatan merupakan asosiasi regional dalam kerangka kerja sama hubungan Selatan-Selatan, satu-satunya di Asia yang hanya beranggotakan negara-negara nonblok. Asosiasi ini mencakup sekitar 1/5 penduduk dunia yang termiskin di antara yang miskin.

1. *Anggota*: India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, dan Maladewa. Usul untuk melakukan kerja sama regional Asia Selatan muncul tahun 1980 atas gagasan Presiden Ziaur Rahman (Bangladesh) dan langsung diterima, kecuali oleh India dan Pakistan. India mula-mula khawatir akan dilakukannya usaha menekan India secara kolektif oleh negara-negara kecil (*to gang up against India*) untuk memperbaiki situasi mereka sendiri. Pakistan dalam asosiasi ini mula-mula melihat akan menguatnya dominasi India dan khawatir akan memperburuk situasi politiknya dalam masalah Kashmir. Namun, sejak tahun 1981 berlangsung pertemuan konsultasi tujuh sekretaris negara dengan dasar pemikiran adanya kesama-

an masa lalu historis dan kultural serta keuntungan kerja sama dibandingkan persaingan. Pertemuan-pertemuan tersebut bermuara pada pertemuan menteri luar negeri tahun 1983 (New Delhi) yang memproklamkan *South Asian Regional Cooperation* (SARC). Kerja sama dilakukan pertama-tama di bidang yang tidak menimbulkan pertikaian. Kerja sama ini dilembagakan pada pertemuan puncak pertama (Desember 1985) di Dhaka. Para peserta menandatangani Piagam SAARC yang mempunyai dasar prinsip-prinsip koeksistensi damai. Sejak itu, berlangsung konferensi puncak di Bangalore (1986), Kathmandu (1987), dan Islamabad (1988).

2. *Tujuan*: mempercepat pembangunan ekonomi, sosial, dan kultural di masing-masing negara; meningkatkan *collective self-reliance*; perluasan perdagangan intraregional; kerja sama di bidang pertanian, pengetahuan, teknologi kesehatan/keluarga berencana, transportasi, pos, komunikasi, perang terhadap terorisme dan obat bius, peningkatan perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Selatan; penghapusan rasa saling tidak percaya dan politik pendekatan jangka panjang; meningkatkan kerja sama de-

ngan negara berkembang lainnya; kerja sama di forum-forum internasional untuk kepentingan bersama; pembedungan pengaruh kekuatan-kekuatan adikuasa di wilayah tersebut. Kerja sama regional bukan menggantikan kerja sama bilateral dan multilateral, melainkan menambahkan. Keputusan diambil dengan suara bulat, dielakkan masalah-masalah yang dipertikaikan secara bilateral.

3. *Organ*: a. pertemuan tahunan kepala pemerintahan; b. dewan menteri yang memformulasi tujuan organisasi; c. komisi tetap, memutuskan mengenai prioritas-prioritas dalam pemilihan proyek, mengkoordinasi program, menetapkan modal untuk pembiayaan; d. komisi teknik, mengolah program, mengorganisasi pertemuan tenaga ahli dan ilmuwan; e. komisi aksi menjalankan dan mengawasi proyek yang berkaitan dengan lebih dari dua negara, tetapi bukan semua negara anggota; f. sekretariat SAARC bertanggung jawab untuk administrasi dan organisasi, didirikan tahun 1986 (kedudukan: Kathmandu). Keikutsertaan dalam pembiayaan proyek-proyek SAARC bersifat sukarela, keikutsertaan pihak luar hanya dengan persetujuan komisi tetap.

4. *Permasalahan*: perbedaan politik yang berakar pada perbedaan sistem-sistem politik di Asia Selatan; banyak masalah bilateral tidak terselesaikan yang dalam jangka panjang tidak dapat diabaikan; dominasi India di kawasan tersebut, ketidakseimbangan dalam hal ekonomi dan militer; wilayah India mencakup lebih dari 73% wilayah SAARC, 77%

penduduk memiliki 78% PNB regional dan menjalankan 60% keseluruhan perdagangan luar negeri yang ada di sana; proses yang tidak sama dalam *"nation building"* (India yang termaju); tidak ada ekonomi komplementer dengan dampak kecilnya harapan pertumbuhan perdagangan interregional; perbedaan hubungan struktural ke pasar dunia dan dalam sistem-sistem sosial, masalah perbatasan; konflik etnis (Tamil); persaingan antara "musuh bebuyutan" India dan Pakistan.

5. *Hasil-hasil*: tiga tahun sejak berdiri, SAARC tidak banyak hasil yang diperoleh. Dalam bidang kerja sama ekonomi tidak terlihat kemajuan. Pertemuan-pertemuan puncak menciptakan retorika keinginan baik. Baru di Kathmandu (1987) kepala pemerintah dan kepala negara menyetujui pendirian sebuah cadangan bahan pangan sebanyak 219.000 ton gandum untuk menjamin pengadaan sendiri (regional). Selanjutnya dibentuk kelompok pakar yang menangani masalah lingkungan dan perlindungan terhadap bencana alam, serta sebuah konvensi untuk memerangi terorisme. Kemajuan besar didapatkan di bidang hubungan politik. Dialog yang berlangsung dalam pertemuan-pertemuan puncak telah menimbulkan pendekatan antara India dan Pakistan serta pakta tidak saling menyerang dengan senjata nuklir. Beberapa kali usaha Afghanistan untuk menjadi anggota, sampai kini ditolak. Apakah kerja sama dalam SAARC di masa depan akan mempunyai bentuk-bentuk yang konkret, belum diketahui.

Masalah ini sangat bergantung pada hubungan antara India dan Pakistan. Kepustakaan: W.-P. Zingel, "Südasiens auf dem Weg zu einer wirtschaftlichen Kooperation?", dlm.: *APuZ*, No. 26, 1983, hlm. 14-27; S.D. Muni/A. Muni, *Regional Cooperation in South Asia*, New Delhi 1984; B. Sen Gupta, *ASEAN-SAARC, Prospects and Problems of Inter-regional Cooperation*, New Delhi 1988; B. Sen Gupta, *South Asian Perspectives. Seven Nations in Conflict and Cooperation*, New Delhi 1988.

ra

SABA → Buthelezi.

SAC (*Sociedad de Agricultores de Columbia*, Masyarakat Pertanian Kolombia) → PBB.

SACU (*Southern African Customs Union*) Uni Bea Afrika Selatan antara Republik Afrika Selatan, *homeland, dan negara-negara BLS (Botswana, Lesotho, Swaziland). Lesotho dan Swaziland berdasarkan mata uangnya termasuk wilayah mata uang Rand. Tahun 1976 Botswana keluar dari wilayah mata uang ini. Sejak tahun 1983 ketegangan antara negara-negara BLS dan Afrika Selatan memuncak karena penolakan Afrika Selatan untuk membayar pendapatan bea yang terlambat dibayar, selain itu karena ada blokade ekonomi Afrika Selatan terhadap Lesotho serta tekanan dari negara-negara BLS untuk mengakui homeland secara diplomatik.

fn

SADCC (*Southern Africa Development Coordination Conference*) Konferensi Koordinasi Pembangunan Afrika Selatan. Rencana kerja sama regional yang tidak begitu ketat di Afrika bagian Selatan, berawal dari inisiatif lima negara garis depan (Angola, Botswana, Mozambik, Tanzania, Zambia) Mei 1979, kemudian Juli 1979 melahirkan konferensi pembentukannya di Arusha. Konferensi

tingkat tinggi pertama diadakan di Lusaka, dengan Lesotho, Malawi, Swaziland, dan Zimbabwe menjadi anggota SADCC. April 1980 SADCC mengeluarkan deklarasi prinsip-prinsip mengenai pembebasan ekonomi Afrika bagian Selatan dengan tujuan-tujuan pembangunan, yaitu: a. mengurangi ketergantungan ekonomi dari Republik Afrika Selatan; b. membangun hubungan untuk terciptanya integrasi ekonomi regional; c. mobilisasi sumber daya untuk membantu politik nasional antarnegara dan regional; d. koordinasi aksi-aksi kerja sama antarbangsa dalam rangka strategi pembebasan ekonomi. Bentuk kerja sama ini terlihat pragmatis, bertitik tolak dari bidang-bidang konkret, yang memberikan kesempatan kerja sama antaranggota. Arahnya bukan model integrasi yang biasa berlaku (pasar bebas, masyarakat ekonomi), melainkan pendekatan-pendekatan lebih mutakhir, dikaitkan dengan konsep-konsep *collective self-reliance* dan hubungan Selatan-Selatan. Titik berat proyek SADCC sampai kini terletak di bidang lalu lintas dan komunikasi; ketergantungan ekspor negara-negara SADCC dari sistem transportasi Republik Afrika Selatan telah sangat berkurang.

Kepustakaan: R. Hofmeier, "Die Southern Africa Development Coordination Conference", dlm.: *Afrika, Spectrum* 16/1981, hlm. 245-266. dn SAEMU (*Southern African Economic and Monetary Union*) Uni Ekonomi dan Keuangan Afrika Bagian Selatan.

Sahara Barat Sesuai dengan Perjanjian Pembagian di Madrid yang ditandatangani November 1975 antara Spanyol, Maroko, dan Mauri-

tania, tentara Spanyol sampai akhir Februari 1976 ditarik dari bekas daerah koloni Spanyol tersebut. Mauritania dan Maroko sepakat untuk memerintah negara itu bersama; referendum penentuan nasib sendiri yang dituntut PBB dengan harapan penduduk Sahara Barat menentukan masa depan sendiri, tidak diselenggarakan. Dengan pembagian ini Maroko mendapat ladang fosfat yang kaya di negeri itu, nomor dua terbesar di dunia (selain itu cadangan bijih besi, tembaga, minyak, dan timah), dengan keikutsertaan Mauritania dalam penambangannya. Sejak sekitar tahun 1973 gerakan pembebasan Sahara mulai menarik perhatian karena pembunuhan dan aksi-aksi gerilya. Tanggal 28 Februari 1976 Front Rakyat untuk Pembebasan Seguia al Hamra dan Rio de Oro (F. POLISARIO), dukungan Aljazair (pintu masuk ke Atlantik), memproklamlirkan Republik Arab Demokrasi Sahara (DARS) setelah penarikan mundur tentara Spanyol. Perang hancur-hancuran oleh POLISARIO dan masalah-masalah politik dalam negeri memaksa Mauritania menandatangani suatu perjanjian perdamaian dengan POLISARIO 5 Agustus 1979 dan menyerahkan kawasan tersebut, setelah itu Maroko menggabungkan seluruh wilayah negara itu. Tahun 1979 tiga kursi untuk Sahara Barat tersedia di parlemen Maroko.

Tujuan-tujuan DARS adalah sosialisme koperasi dengan partisipasi penduduk selalu mungkin, pembangunan pertanian, dan ikut memperjuangkan persatuan Arab dan Afrika serta solidaritas di Dunia Ketiga.

Saat ini sekitar 120.000 pengungsi Sahara Barat hidup di kamp-kamp penampungan Aljazair, yang perlu mendapat peningkatan terutama di bidang pendidikan, pemberantasan buta aksara, dan kesadaran nasional, bukan kesukuan.

PBB dan nonblok mengusahakan pelaksanaan Resolusi OAU 104 (perundingan gencatan senjata dan referendum penentuan nasib sendiri di bawah pengawasan internasional).

Penolakan raja Maroko untuk berunding dengan Front POLISARIO secara resmi menyebabkan wakil-wakil PBB dan OAU untuk sementara mengadakan pembicaraan-pembicaraan pendahuluan tidak langsung. Tanggal 4 dan 5 Januari 1989 untuk pertama kalinya Raja Hassan II menerima wakil-wakil POLISARIO, tetapi pembicaraan ini tidak menghasilkan perundingan yang mengikat. Masuknya DARS dalam OAU tahun 1984 setelah berlangsung banyak pertikaian berat selama dua tahun, menyebabkan Maroko keluar dari OAU.

Konflik mengenai Sahara Barat juga menjadi kendala penting untuk Uni Arab-Magribi: menurut keterangan POLISARIO, Aljazair (sampai tahun 1984 juga Libia) merupakan pemasok senjata utama; Libia, Aljazair, dan Mauritania mengakui DARS secara diplomatis; Tunisia menyokong sikap PBB dan OAU atas hak untuk menentukan nasib sendiri.

Tahun 1987 ada 70 negara yang mengakui DARS secara diplomatik. Walaupun Front POLISARIO diakui sebagai wakil rakyat Sahara oleh beberapa partai politik, Maroko tetap menerima bantuan keuangan dan

militer dari negara-negara Eropa Barat yang secara resmi bersikap netral serta dari AS (perjanjian militer tahun 1982) untuk melakukan perang di wilayah tersebut yang menelan pengeluaran militer 40% dari seluruh anggaran belanja.

Kepustakaan: U. Clausen, *Der Konflikt um die Westsahara*, Hamburg 1978; V. Thompson/R. Adloff, *The West Saharans*, London 1980; C. Kühlein, "Westsahara - Positionen und Kompromisse", dlm.: *Aussenpolitik* 32, 1981, hlm. 58 dst.; M. Barbier, *Le conflit du Sahara occidental*, Paris 1982; C. Viol, *Der Westsahara-Konflikt und die Rolle der Organisation für Afrikanische Einheit (OAU)*, *Zulassungssarbeits*, Heidelberg 1982; U. Clausen, "Westsahara", dlm.: R. Hofmeier/M. Schönborn, *Politisches Lexikon Afrika*, (cet. ke-4.) München 1988, hlm. 430 dst.

rs/pb

Saint Lucia → Karibia.

Saint Vincent & Grenadin → Kepulauan Pasifik.

Samoa → Kepulauan Pasifik.

Sandinista → Nikaragua.

Sao Tome & Principe 1. Kedua pulau yang terletak di seberang Pantai Gabon (Sao Tome: 836 km², Principe: 128 km²) memiliki sumber daya alam yang menguntungkan untuk pertanian tropis karena iklimnya yang sangat berbeda-beda akibat perbedaan ketinggian, kekayaan air, dan tanah gunung api yang subur. Penduduk (tahun 1986: 11.000 jiwa, ibu kota: Sao Tome), 30% hidup diperkotaan, terdiri atas suku Mulat dan sisa orang Portugis, sebagian besar adalah suku Negro berasal dari benua yang bertetangga. Mayoritas penduduk beragama Katolik. Pertumbuhan penduduk sekitar 2,2%/tahun (rata-rata tahun 1973-1985). Komoditas ekspor andalan pertanian yang dominan: coklat (90%), kopi, kopra, dan minyak sawit. Mitra dagang utama ada-

lah Portugal, Jerman, dan negara ME lain serta Angola. Tujuan jangka panjang reformasi pertanian yang dimulai dengan nasionalisasi semua perkebunan asing adalah menjamin pemenuhan kebutuhan pangan pokok, yang impornya (90% seluruh bahan pangan) menghabiskan devisa. Dengan penanaman nanas dan pisang, ingin dicapai diversifikasi ekspor komoditas pertanian. Stabilisasi pemasukan dari komoditas coklat sangat penting bagi Negara AKP yang terbuka untuk modal dari luar negeri ini. Pendidikan dan pelayanan kesehatan rakyat tidak dipungut bayaran. Tingkat harapan hidup 65 tahun (1986), tertinggi di Afrika. Tingkat buta aksara dapat ditekan dari 70% (1975) menjadi 12%.

3. Pulau-pulau yang ditemukan oleh pelaut-pelaut Portugis (1471) ini dulu merupakan tempat persinggahan perdagangan budak dengan Amerika Utara dan Amerika Selatan. Sejak menjadi pemukiman (1486) para tahanan, orang Yahudi dan budak Negro, orang-orang Portugis mulai membuka perkebunan besar (*rocas*), mula-mula mempekerjakan budak, kemudian buruh kontrak (kondisinya mirip dengan budak) dari Angola, Mozambik, dan Kepulauan Kapverde. Mula-mula diawali dengan penanaman tebu, akhir abad ke-18 kopi dan tahun 1822 coklat. Setelah Sao Tome dan Principe mendapat status propinsi seberang lautan dari Portugal tahun 1955, atas desakan pejuang-pejuang kemerdekaan di koloni-koloninya tahun 1974 Portugal memberikan otonomi dalam negeri dan kemudian 12 Juli 1975 memberikan kemerdekaan

setelah diadakan perundingan-perundingan dengan gerakan kemerdekaan MLSTP (*Movimento de Libertacao de Sao Tomé e Principe*) yang beroperasi dari Gabon.

4. MLSTP adalah partai kader tipe marxistis-leninistis yang sering bercirikan pertikaian fraksi dalam proses penentuan kebijaksanaan (tahun 1979 penangkapan Perdana Menteri Trovoadá), menguasai kehidupan politik di negara berpartai tunggal ini. Pemimpin MLSTP, Pinto da Costa, sejak kemerdekaan menjadi kepala negara. Namun, 29 Januari 1988 dibentuk suatu pemerintahan peralihan (C. Rocha da Costa sebagai perdana menteri), dengan pemimpin oposisi pada saat itu C. da Gracas menjadi menteri luar negeri. Dua usaha kudeta gagal dilakukan oleh angkatan bersenjata (5 Februari dan 8 Maret 1988), dengan tuduhan yang dilemparkan kepada Front Perlawanan Nasional Sao Tome dan Principe (FRNSTP/*Front de Rebeldes Nationales de Sao Tome e Principe*) yang beroperasi dari Libreville (Gabon) sebagai biang keladinya, merupakan bukti ketidakstabilan situasi politik. Dalam politik luar negeri, di satu pihak Sao Tome dan Principe membina hubungan perdagangan dengan Barat (tahun 1980: perjanjian persahabatan dan kerja sama dengan Portugal), dan di lain pihak memiliki hubungan erat dengan kubu sosialis (sekitar 1.000 tentara Kuba dan Angola di Sao Tome dan Principe).

Kepustakaan: D. Nohlen/R. Sturm, "Sao Tomé und Principe", dlm.: *HDW II*, 4, Hamburg 1982, hlm. 444 dst.

ah
Saudi Arabia Walaupun harga minyak tahun '80-an terlihat jatuh, pe-

luang-peluang pembangunan Saudi Arabia tetap dinilai baik.

1. Kerajaan Saudi Arabia (luas 2.149.600 km²) meliputi bagian terbesar peta Arab, terpisah dari Afrika di sebelah Barat sepanjang Laut Merah oleh sebuah palung dan terjal menghadap daerah pantai (Tihana), dibatasi pegunungan setinggi 3.000 m (di dataran tinggi utara dari Hejaz, di Asir Selatan). Negara yang datarannya ke arah timur dan tenggara menurun ini sebagian besar terdiri atas setengah gurun pasir atau gurun pasir penuh yang miskin tumbuhan, kecuali di pegunungan tinggi tepi sebelah Barat dan Tihana merupakan potensi pertanian yang baik (perladangan hujan/Asir, perladangan dengan irigasi/Tihana), akibat banyaknya hujan.

2. Tahun 1989 penduduk Saudi Arabia diperkirakan berjumlah 14 juta orang. Pertumbuhan penduduk 5%/tahun dan masih terus tumbuh dengan cepat (tingkat harapan hidup rata-rata 64 tahun). Penduduk terpusat di kota-kota pusat minyak (tingkat *urbanisasi tahun 1989: 76%, ibukota Riyadh tahun 1980: 1,3 juta penduduk) dan daerah-daerah yang menguntungkan karena kekayaan airnya (Asir, Oasis). Karena sektor minyak meledak, terjadi imigrasi besar pekerja-pekerja asing yang tidak dan berketerampilan tinggi dari negara-negara tetangga (Arab, Asia, dan negara industri). Perbandingan penduduk asing dengan keseluruhan penduduk diperkirakan mencapai 41,4%, tetapi karena resesi dan berakhirnya beberapa proyek besar, jumlah ini menurun pada waktu terakhir. Selain itu, kebijaksanaan ekonomi dan pen-

didikan pemerintah Saudi Arabia, telah mengurangi jumlah tenaga asing. Diperkirakan sekitar 1/3 penduduk asli adalah suku Beduin setengah nomad atau nomad tetap. 99% penduduk Saudi Arabia beragama Islam, mayoritas adalah kaum Suni Wahabi, sedangkan minoritas (15%) adalah kaum Syiah.

3. Penghasilan dari minyak selain untuk investasi di bidang infrastruktur ekonomi, juga digunakan untuk perbaikan-perbaikan nyata di bidang kesehatan dan pendidikan. Tahun 1989 seorang dokter tersedia untuk 740 orang penduduk (tahun 1970: 5.366 penduduk/dokter). Namun, di daerah pedesaan masih tetap terlihat kekurangan penyediaan kebutuhan hidup. Kebijakan pendidikan pemerintah Saudi Arabia bertujuan memobilisasi potensi tenaga kerja dalam negeri, melalui perbaikan sarana pendidikan tinggi (perguruan tinggi/kejuruan, balai penyelidikan) dan program pendidikan orang dewasa. Jumlah buta aksara masih tinggi: 51% untuk usia di atas 15 tahun (1984).

4. Pada awal abad ke-16 Semenanjung Arab merupakan bagian dari Kerajaan Osmania. Di abad ke-18 dan awal abad ke-19 Abdul al-Aziz Ibn Saud II berhasil menduduki sebagian besar Semenanjung Arab dan menyatukan suku-suku Beduin dengan landasan gerakan pembaruan Islam kaum Wahabi yang dengan ketat berpedoman pada Al-Qur'an. Walaupun terjadi kemunduran-kemunduran sepanjang abad ke-19, dinasti Saud perlahan-lahan berhasil menguasai seluruh daerah semenanjung

dengan bantuan pasukan sukarelawan yang dipersenjatai dan dikumpulkan dari suku Beduin. Tahun 1926 Ibn Saud memproklamirkan diri sebagai Raja Nadj dan Hejaz. Tahun 1932 kerajaan tersebut diubah menjadi Kerajaan Saudi Arabia. Melalui pemberian konsesi tambang minyak pertama kepada *Standard Oil Company of California*, tahun 1933 dimulai pembangunan modern negara itu, walaupun penambangan minyak besar-besaran baru dimulai setelah Perang Dunia II.

5. Tulang punggung perekonomian Saudi Arabia adalah cadangan minyak yang kaya dan berkualitas tinggi, meliputi sekitar seperempat cadangan minyak yang diketahui ada di dunia sekarang. Penambangan minyak saja menghasilkan 1/3 PDB (1984), bersama dengan sektor pengolahan persentase ini mencapai 56%. Saudi Arabia melalui sektor minyak menjadi sangat terintegrasi ke pasar dunia sehingga sangat bergantung pada fluktuasi harga. Perusahaan minyak terbesar adalah *Arabian American Oil Company* (ARAMCO), yang sejak tahun 1944 ikut serta pada pembangunan perminyakan dan infrastruktur negara itu. Setelah berlangsung nasionalisasi menyeluruh (1979), tahun 1981 ARAMCO menghasilkan 3,51 miliar barel senilai 99,18 miliar US\$, atau lebih dari 98% seluruh penambangan minyak Saudi Arabia dalam setahun, yang dalam tahun tersebut mencapai jumlah tertinggi. Hasil tambang minyak masuk ke kas negara yang di tahun '60-an mulai memacu diversifikasi dan industrialisasi perekonomian Saudi Arabia. Rencana

pembangunan Saudi Arabia bertujuan memperbaiki taraf hidup, tetapi bersama itu dasar-dasar tradisional agama dan kebudayaan masyarakat tetap dipertahankan. Pemerintah ingin menciptakan kondisi untuk suatu perkembangan ekonomi negara yang berorientasi pasar dan berlandaskan inisiatif swasta melalui pembangunan sistem transportasi dan pendidikan serta mendirikan instalasi-instalasi industri besar yang padat modal (kilang minyak, pusat pengumpulan dan distribusi gas alam, petrokimia), dan melalui rangsangan-rangsangan kebijaksanaan ekonomi. Karena kebanyakan proyek-proyek besar di bidang infrastruktur telah selesai, Saudi Arabia tidak terlalu terkena resesi tahun '80-an dibandingkan negara-negara penghasil minyak lain, walaupun pemasukan dari penjualan minyak cukup menurun akibat perkembangan harga dan pengurangan eksploitasi minyak. Tahun 1981 pemasukan Saudi Arabia dari minyak mencapai 100 miliar US\$ dan tetap berada di bawah angka 21 miliar US\$ sampai tahun 1987. Resesi minyak menyebabkan kemunduran perkembangan ekonomi (tahun 1987 menunjukkan sedikit kenaikan), tetapi hal ini mengakibatkan perlunya pengurangan besar pada anggaran negara, yang tidak dapat menghindarkan penurunan pendapatan keuangan negara itu.

Titik berat kedua rencana pembangunan Saudi Arabia adalah peningkatan bidang pertanian, tahun 1989 mempunyai kontribusi 8% ke PDB. *Boom* minyak menimbulkan pelarian besar-besaran dari sektor pertanian. Tahun 1950 90% penduduk

masih bekerja di bidang pertanian (kebanyakan subsistensi), tahun 1985 jumlahnya kurang dari 25%. Kendala-kendala utama perkembangan produksi pertanian adalah kondisi iklim yang ekstrem, kekurangan air, dan warisan tradisional sistem hak atas air dan tanah. Menurut FAO hanya 0,5% dari seluruh wilayah Saudi Arabia berupa tanah ladang. Melalui program-program mekanisasi, pengairan modern dan besar, pemerintah berusaha, dengan sejumlah keberhasilan, memperluas areal perladangan dan mengintensifikasi produksi. Proyek-proyek pembangunan pedesaan tersebut sebagian meliputi rencana pemukiman untuk suku Beduin. Setelah diadakan pelipatgandaan produksi pangan antara tahun 1979 dan 1986, tahun 1987 Saudi Arabia mencapai swasembada gandum, telur, unggas, dan susu.

6. Kerajaan Saudi tidak ada UUD formal, parlemen, partai politik maupun pemilihan umum. Raja secara lahiriah dan spiritual merupakan pimpinan tertinggi negara. Keluarga Kerajaan Saudi melegitimasi kekuasaannya sejak penandatanganan suatu pakta antara Muhammad Ibn Saud dan pemimpin keagamaan Muhammad Ibn Abd al-Wahhab tahun 1745, melalui suatu ikatan yang ketat pada hukum Islam (syariat) yang bersumberkan Al-Qur'an dan Sunnah, juga menjadi pedoman untuk seluruh kehidupan masyarakat dan perilaku masing-masing individu. Dalam persoalan-persoalan penting raja harus berunding dengan beberapa kekuatan politik negeri itu, dan raja bergantung pada kesetiaan mereka. Dalam peme-

rintahan Saudi Arabia modern, selain kelompok-kelompok kepala suku yang tradisional, para ulama (menafsirkan syariat) dan tokoh-tokoh penting ekonomi (a.l. pengusaha), termasuk kaum teknokrat, menangani pemerintah dengan administrasi yang makin rumit. Sejak tahun 1982 (wafatnya Raja Khalid, pengganti Raja Faisal, saudaranya yang tahun 1975 dibunuh oleh salah seorang anggota keluarga kerajaan), Saudi Arabia dipimpin oleh Raja Fahd.

Stabilitas pemerintahan yang konservatif ini tampaknya tidak tergoayakan, walaupun terdapat potensi pusat-pusat kerusuhan di tahun '80-an. Aliran-aliran nasionalis yang ada dalam ketentaraan dikendalikan oleh Garda Nasional yang setia (secara organisatoris terpisah dari tentara). Sekelompok oposisi kaum Islam fundamentalis yang terutama menonjol setelah revolusi Iran (tahun 1979: menduduki Masjidil Haram dengan kekerasan) sebagian berasal dari golongan Syiah Arab, yang lama ditindas oleh kaum Suni yang merupakan golongan mayoritas. Namun, sejak tahun 1980 pemerintah berhasil meredakan potensi destabilisasi ini dengan rencana-rencana pembangunan terarah di daerah-daerah propinsi sebelah Timur yang dihuni kaum Syiah.

7. Untuk membendung perluasan Revolusi Islam Iran, pemerintah Saudi membantu pemerintah partai Baath Irak dalam perang Irak-Iran. Dalam Liga Arab dan sebagai anggota Dewan Teluk (*Gulf Cooperation Council/GCC*), Saudi Arabia erat berorientasi ke Barat atas pertimbangan ekonomi (alih teknologi, ekspor minyak)

dan keamanan, serta sangat berusaha memperkuat golongan moderat dunia Arab. Dalam Konflik Timur-Tengah negara ini juga lebih condong pada penyelesaian-penyelesaian lunak. Dalam rencana perdamaian Timur Tengah yang dikemukakan oleh Fahd tahun 1981 (ketika itu masih putra mahkota), hampir seluruhnya diambil alih oleh Konferensi Tingkat Tinggi Liga Arab di Fez (1982), dengan menitikberatkan hak eksistensi semua negara di kawasan itu, untuk pertama kalinya dinyatakan pengakuan atas Israel. Untuk kebanyakan negara berkembang (a.l. Afrika), Saudi Arabia, negara kaya minyak itu, merupakan negara pemberi bantuan yang penting (→ bantuan pembangunan Arab ke Afrika).

Kepustakaan: H. Blume (ed.), *Saudi-Arabien. Natur, Geschichte, Mensch und Wirtschaft*, Tübingen/Basel 1976; W. Kopf, *Saudi-Arabien - Insel der Araber*, Stuttgart 1982; J.D. Anthony, *Saudi Arabias Influence in the Arab World*, New York 1982; H. Hecklau, "Saudi-Arabien", dlm.: HDW II, 6, hlm. 440 dst., Hamburg 1982; H.J. Philipp (ed.), *Saudi Arabia, Bibliography on Society, Politics, and Economy*, Heidelberg, 1984; R. Knauerhase, "Saudi-Arabien", dlm.: U. Steinbach/R. Robert (ed.), *Der Nahe und Mittlere Osten*, jilid 2, Opladen, 1988, hlm. 329 dst.; T. Koszinowski/H. Mattes (ed.), *Nahost-Jahrbuch* 1987, Opladen 1988.

ah/bt

SDR (Special Drawing Rights) Hak-Hak Khusus Penarikan Kredit. Suatu hak untuk mendapat pinjaman khusus sebagai sarana tambahan (sama nilainya dengan emas, devisa, alternatif dana lainnya) diputuskan dan disepakati tahun 1967 dalam sebuah konferensi IMF di Rio de Janeiro, diberlakukan mulai tahun 1969. SDR adalah suatu uang dunia yang diciptakan secara buatan melalui suatu

kesepakatan internasional, disimpan pada rekening khusus IMF dan hanya digunakan sebagai alat pembayaran antarbank sentral. SDR diberikan kepada setiap anggota IMF, berbentuk sertifikat hak mendapatkan dana yang dibagikan berdasarkan kuota tertentu dan dalam waktu yang dibatasi dapat menarik sejumlah mata uang yang konvertibel; artinya, mata uang konvertibel dapat ditarik dengan menukarkan SDR. Dengan demikian SDR sekaligus merupakan kredit dan alat pembayaran, berbeda dengan fasilitas kredit lainnya, merupakan cadangan mata uang tambahan untuk masing-masing negara. Jika SDR sudah diberikan, setiap negara tanpa izin atau persyaratan lain dapat menggunakannya. Namun, dalam jangka waktu yang dibatasi SDR ini harus dibeli kembali dengan menggunakan mata uang yang konvertibel, kalau tidak seluruhnya, paling sedikit sebagian. Pembagian kuota pertama disetujui oleh dewan gubernur tahun 1969 untuk kurun waktu antara tahun 1970–1972 sebesar 9,5 miliar SDR. Pada awalnya SDR dinilai dalam emas dan 1 SDR sama dengan 1 US\$, tetapi mulai tahun 1972 nilai SDR dihitung setiap hari dalam "keranjang" yang berisi 16 mata uang utama anggota IMF, dengan bobot setiap mata uang disesuaikan dengan pentingnya negara bersangkutan. Dengan ratifikasi perubahan kedua keputusan IMF tahun 1978 ini, emas sebagai harga resmi dihapus, dan mewajibkan anggota IMF menjadikan SDR suatu sarana cadangan utama dan SDR menjadi satuan hitungan IMF. hk

SEAMEO (*South East Asian Ministers Education Organization*) → ASEAN.

SEATO (*South-East Asia Treaty Organization*) Pakta Asia Tenggara, didirikan tahun 1954 di Manila. Anggota: AS, Perancis, Inggris, Australia, Selandia Baru, Pakistan, Thailand, dan Filipina. *Tujuan*: membendung komunisme di kawasan tersebut; pembangunan sebuah persekutuan semacam NATO. Setelah Perancis (1967) dan Pakistan (1972) secara *de facto* mengundurkan diri, pakta ini bubar, Juni 1977 akibat gagal mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. **dn** sektoral, sektor → sektor ekonomi. **sektor ekonomi** Pembagian suatu perekonomian nasional dalam: a. sektor primer: produksi bahan dasar (pertanian, pertambangan); b. sektor sekunder: sektor industri dan usaha; industri penyelesaian (industri konsumsi dan barang investasi); c. sektor tersier: bidang administrasi dan jasa, perdagangan, asuransi, komunikasi. Di sebagian besar negara berkembang berlaku sektor lain, yaitu sektor subsistensi atau ekonomi subsistensi; sektor ini tidak masuk pada perhitungan perekonomian keseluruhan (→ pendapatan nasional) yang berlandaskan perhitungan moneter. **dn** **sektor formal** Tidak seperti sektor informal, sektor formal (modern dan terlindungi) di negara berkembang memiliki ciri-ciri: pembayaran yang tinggi, tingkat organisasi pekerja yang tinggi, pertahanan hukum perlindungan hak pekerja, konsentrasi kegiatan pada perusahaan besar (sering perusahaan transnasional) yang memproduksi menggunakan teknologi pa-

dat modal dan giat pada pasar-pasar yang oligopolis.

ah
sektor informal Bagian dari masalah kesempatan kerja di negara berkembang adalah kesempatan kerja (kurang) dalam sektor informal (biasanya tidak terlindungi hukum). Ciri-cirinya: produksi padat karya, teknologi sederhana, tidak ada atau sedikit tersedia kualifikasi tenaga kerja yang ada, pembayaran yang rendah, tingkat pengorganisasian pekerja yang rendah, tidak adanya jaminan masa tua dan jika sakit, serta membelakangi hukum perlindungan kerja. Sebagian besar manusia di sektor informal bekerja dalam sektor perdagangan dan jasa. Misalnya, semir sepatu, pedagang asongan, buruh anak dalam produksi tekstil, dsb. → sektor formal.

ah
SELA (*Sistema Economico Latinoamericano*) Sistem Perekonomian Amerika Latin, diprakarsai Presiden Meksiko dan Venezuela, Echevarria dan Perez. Berdiri 17 Oktober 1975: Penandatanganan Perjanjian Panama (*Convenio de Panama*) setelah masa perundingan hanya 16 bulan. Anggota-anggota pendiri: 23 negara Amerika Latin dan untuk pertama kali negara kawasan Karibia. Sejak tahun 1978: 26 anggota (Puerto Rico dan negara-negara bekas jajahan Perancis tidak menjadi anggota). Pengucilan AS dan pemasukan Kuba (kebalikan dari OAS dan CECLA) memperlihatkan arah politik SELA; pengakuan pluralisme ideologi.

Tujuan: a. pengembangan kerja sama regional; b. koordinasi proses integrasi yang ada sampai saat ini; c. pengembangan proyek-proyek pem-

angunan ekonomi dan sosial; d. koordinasi sikap dan pengolahan suatu posisi bersama untuk seluruh Amerika Latin terhadap negara industri dan organisasi internasional; e. membantu negara-negara yang agak terbelakang di kawasan ini. Dibandingkan dengan persekutuan-persekutuan integrasi Amerika Latin sebelumnya, tujuan-tujuan SELA lebih pragmatis dan lebih luwes. Organ dan bidang kerja sebagai berikut. a. Dewan Amerika Latin. Setiap negara diwakili seorang menteri (kebanyakan menteri perdagangan). Rapat dewan yang diadakan setahun sekali di Caracas disiapkan oleh pertemuan-pertemuan para ahli. Peninjau dari organisasi-organisasi negara Amerika Latin dan organisasi internasional diperkenankan untuk ikut serta. Wewenang a.l.: menetapkan politik SELA, memilih sekretariat, dan menyusun anggaran belanja. Dalam hal-hal penting harus diputuskan dengan suara bulat, selain itu hanya diperlukan dua pertiga mayoritas suara. Kedudukan ketua dan wakil dipilih secara bergantian dengan giliran menurut abjad. b. Sekretariat tetap: juru bicara dan mitra perundingan para anggota dengan pihak luar; kedudukan tetap di Caracas. Tugasnya termasuk pengajuan saran-saran kepada dewan pelaksanaan keputusan-keputusan, koordinasi komite pelaksana, pengaturan pertemuan-pertemuan para ahli, pembinaan hubungan dengan organisasi-organisasi regional dan internasional lainnya. Sekretaris yang memimpin sekretariat dan wakilnya terdiri atas kewarganegaraan yang berbeda, dipilih oleh dewan 4 tahun sekali. c. Panitia

Pelaksana (PP) merupakan pengelompokan beberapa negara yang berkepentingan, dibentuk secara desentralisir untuk jangka waktu tertentu (pengunduran diri sebelum batas waktu berakhir diperbolehkan), bertujuan menyiapkan dan melaksanakan proyek-proyek bersama. Panitia ini merupakan instrumen yang luwes dan pragmatis dalam kerja sama intraregional dan multilateral bentuk SELA yang khusus. Sekurang-kurangnya tiga negara dapat membentuk PP yang berkedudukan di ibu kota salah satu negara terlibat. Setiap PP mempunyai sekretariat dan membiayai proyeknya sendiri. Bidang kerja: proyek pembangunan di bidang pertanian, industri, teknik, dan sosial. Tujuan: menggunakan sumber daya sendiri, memenuhi kebutuhan dasar, membantu daerah yang terbelakang dan miskin di kawasan tersebut, serta mengurangi ketergantungan. Selain Panitia Pelaksana Solidaritas Amerika Latin (bantuan gempa bumi untuk Guatemala, pembangunan kembali Nikaragua dan membantu Argentina setelah pertikaian Malvinas/Falkland), terdapat juga PP untuk produksi kerajinan tangan, produksi laut dan air tawar, turisme, pembangunan perumahan rakyat, pendirian jaringan informasi teknologi Amerika Latin, penggabungan perusahaan-perusahaan negara untuk perdagangan luar negeri dan untuk kantor berita Amerika Latin, akhir-akhir ini juga di bidang jasa dan utang.

Hasil PP Amerika Latin: a. pembentukan kelompok kerja sama regional seperti Organisasi Penangkapan Ikan Amerika Latin OLDEPESCA

(*Organizacion Latinoamericana para el Desarrollo Pesquero*), yang telah bekerja dengan sukses sejak tahun 1982, Bank Ekspor Amerika Latin (BLADEX/*Banco Latinoamericano de Export*) sejak tahun 1977, kantor berita ALASEI (1983), jaringan informasi teknologi Amerika Latin RITLA (1983) dan Organisasi Pembangunan Perumahan dan Perawatan Rakyat Amerika Latin (*Organización Latinoamericana de los Asentamientos Humanos*, 1984); b. konglomerat multinasional Amerika Latin seperti MULTIFERT (*Empresa Multinacional de Fertilizantes*, Perusahaan Multinasional untuk Pembelian Pupuk, 1980), COMUNBANA (*Comercializadora Multinacional del Banano*, Perusahaan Multinasional Perdagangan Pisang), GEPLACEA (*Grupo Especial de Paises Latinoamericanos y del Caribe Exportadores de Azucar*, Kelompok Eksportir Gula Amerika Latin dan Karibia), NAMUCAR (*Naviera Multinacional del Caribe*, Perusahaan Pelayaran Multinasional, 1975), dan Petrolatin (Perusahaan Minyak Multinasional, 1975).

Kegiatan SELA terbagi dalam strategi ke dalam dan ke luar. Strategi ke dalam termasuk kerja sama dengan lembaga-lembaga regional (BID, CEPAL, SIECA, OLADE, INTAL) dan mekanisme integrasi lainnya (Pakta Andes, MCCA, CARICOM, ALADI), yang menjalankan komisi pelaksana serta membentuk perusahaan-perusahaan Amerika Latin dan perusahaan-perusahaan multinasional. Strategi keluar termasuk hubungan dengan organisasi-or-

ganisasi internasional (*FAO, *Bank Dunia, *IMF, *UNIDO, ME). SELA merupakan satu-satunya organisasi regional Amerika Latin yang hadir pada konferensi-konferensi internasional (sejak *CIEC) dan berstatus peninjau (misalnya pada konferensi-konferensi *UNCTAD sejak tahun 1976); SELA tampil sebagai juru bicara Amerika Latin. Hubungan SELA dengan AS masa lampau diliputi konfrontasi, tetapi keinginan untuk perbaikan hubungan makin kuat. SELA menguatkan hubungan dengan ME untuk mengurangi ketergantungan ekonomi dari AS (tuduhan: penelantaran Amerika Latin dibanding dengan *Negara AKP dan proteksionisme terutama dalam kebijaksanaan pertanian).

Dengan dua strategi, yaitu usaha pembaruan kualitatif hubungan Utara-Selatan dan intensifikasi hubungan Selatan-Selatan, SELA menjalankan konsep *collective self-reliance*. Berbeda dengan kegiatan-kegiatan koordinasi dan konsultasi, usaha-usaha untuk kerja sama intraregional memperlihatkan hasil yang kurang memuaskan. Sebab, sikap negara-negara anggota sendiri yang di satu pihak mengerti akan keharusan suatu aksi bersama, tetapi di lain pihak menolak pemecahan-pemecahan persoalan yang bersifat kompromi, apabila hal ini telah menyinggung kedaulatan nasional.

Kepustakaan: R.K. Fürtak, "Das Sistema Economico Latinoamericano: Kooperation im Zeichen kollektiven Selbstvertrauens", dlm.: *Jahrbuch für Geschichte*, Köln/Wien 1979, hlm. 407-435; E. Garzon Valdes, "SELA - Eine Organisation der Lateinamerikanischen Entwicklungspolitik", dlm.: *Die Dritte Welt*, Neustadt 1980, hlm. 86-101; M. Mols, "Das

Lateinamerikanische Wirtschaftssystem SELA", dlm.: *ibid* (ed.), *Integration und Kooperation in Lateinamerika*, Paderborn 1981, hlm. 249 dst.; F. Salazar Santos, "SELA: antecedentes y realizaciones", dlm.: *Integración Latinoamericana*, 108/1985, hlm. 3-27.

as/pb
self-employment → pendidikan kejuruan.

self-reliance Dalam perdebatan kritis dengan strategi pembangunan Barat yang kapitalistis, muncul konsep pembangunan-dengan dasar kepercayaan akan kekuatan diri sendiri yang ingin menggunakan sumber daya sendiri untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Hal ini dicoba dicapai melalui mobilisasi massa, memusatkan perhatian untuk pembangunan pasar dalam negeri, dan partisipasi penduduk dalam pengambilan keputusan politik di semua tingkat. *Self-reliance* berkaitan dengan pencarian jalan pembangunan yang sesuai dengan masing-masing tradisi negara berkembang, dan dimengerti sebagai alternatif terhadap strategi pembangunan yang berorientasi pasar dunia dan pertumbuhan.

Kepustakaan: J. Galtung *Self-Reliance*, München 1983.

dn
self-sustained growth → take-off.

Sendero Luminoso (Jalan Bercahaya) Organisasi gerilya di Peru yang berideologi marxistis-leninistis dan maois. Didirikan tahun 1970, awalnya didukung terutama oleh kaum cendekiawan. Mula-mula Sendero Luminoso berusaha memobilisir kaum tani di propinsi dataran tinggi Ayacucho dalam pertikaian politik yang damai. Setelah demokratisasi Peru tahun 1980, kemudian mereka memulai perjuangan bersenjata. Selain makin miskinnya penduduk pedesaan,

pertikaian etnis (Indian vs kulit putih) dan perbedaan antara periferi dan pusat (→ model sentra-periferi), merupakan penyebab mengapa Sendero Luminoso telah menemukan potensi rekrutisasi yang cukup berarti di antara penduduk pedesaan. Jumlah gerilyawan diperkirakan mencapai angka beberapa ribu orang. Tahun 1983 militer ditugaskan untuk memberantas gerilyawan, bersamaan dengan dilakukannya pengawasan politik di kawasan-kawasan yang terlibat di daerah pusat; sepertiga dari seluruh propinsi dinyatakan berada di bawah UU darurat (1989). Pertikaian-pertikaian ini awalnya berpusat di propinsi-propinsi dataran tinggi yang miskin, tetapi sejak tahun 1988 pertikaian ini menjalar ke pusat-pusat perkotaan. Awal tahun 1989 Sendero Luminoso diperkirakan telah menguasai sekitar seperempat negara itu dan segera akan dapat mematahkan arus pengadaan kebutuhan ke ibu kota Lima. Tidak seperti gerilyawan negara-negara lain atau dasawarsa-dasawarsa sebelumnya, orang percaya akan kemungkinan keberhasilan Sendero Luminoso. Di samping ancaman langsung ini, dengan eskalasi tindakan-tindakan kekerasan terhadap demokrasi Peru, tumbuh pula ancaman kudeta militer.

hb
Senegal Republik Senegal (*MSAC, *Negara AKP) berasal dari koloni Perancis tertua. Sejak abad ke-19 Senegal mempunyai pengalaman yang tidak pernah putus dalam hal kelembagaan politik modern dan sistem multipartai, yang merupakan contoh bagi Afrika Barat. Perkembangan ekonomi Senegal dilanda krisis faktor

ekonomi yang dominan, yaitu kacang tanah dan bahaya kebangkrutan negara.

1. Tahun 1988 berpenduduk sekitar 7,1 juta jiwa (suku Wolof sekitar 35%, Peul 18% dan Tukulör 9%, Serer 17%, dll.). Negara seluas 197.000 km² itu terbagi atas empat zone iklim utama: *Zone Sahel di utara, daerah subur di pantai utara dan timur, serta zone hutan hijau di Casamance di sebelah Selatan yang dipisahkan oleh Gambia dari daerah-daerah lainnya. Daya tarik utama untuk berbagai migrasi adalah semenanjung Cap Vert dengan ibukota Dakar (1 juta jiwa lebih), meliputi 0,28% dari luas wilayah Senegal dan berpenduduk 15% dari jumlah seluruh penduduk (pertumbuhan penduduk 5,4%/tahun, Senegal keseluruhan 2,9%), sedangkan di daerah timur (30,4% dari wilayah negara) hanya hidup 6% penduduk. Sekitar 85% penduduk beragama Islam, jemaahnya (Tidjania, Mouridiya, Quadriya) mempunyai pengaruh politik dan ekonomi yang besar. Umat Kristen 5%, sisanya (a.l. di Casamance) animisme.

2. Daerah pertanian yang sampai awal abad ke-20 bersifat autarki diubah menjadi monokultur kacang tanah (kacang tanah dan produk-produk dari kacang tanah merupakan pangsa terbesar dari hasil ekspor sejak puluhan tahun). Hal ini dilakukan atas kerja sama perusahaan Perancis dan pemerintah kolonial di satu pihak dengan pemimpin-pemimpin suku Mourid yang saat ini menguasai sekitar separo dari seluruh panen di lain pihak. Setelah merdeka tahun 1960, didahului dengan pembentukan se-

buah federasi dengan Mali sekarang yang hanya berlangsung selama dua bulan, hampir seluruh petani terorganisir dalam koperasi. Namun, keuntungan-keuntungan dari koperasi dinikmati oleh kelas negara yang korup, bukan oleh pengusaha swasta. Organisasi pemasaran yang dimonopoli negara, ONCAD, tahun 1980 harus dibubarkan dengan defisit sekitar 640 juta DM.

Setelah Presiden Senghor dengan bantuan militer memenangkan suatu pertikaian kekuasaan menghadapi Perdana Menteri M. Dia (1962), dijalankan suatu politik bantuan pembangunan yang berorientasi pasar bebas. Hal ini bertambah jelas ketika tahun '80-an partai pemerintah PS menyetujui tindakan-tindakan yang disyaratkan IMF, yang memaksanya untuk meluruskan arah ekonomi pasarnya yang telah dibuat dalam bentuk dokumen-dokumen intern partai. Pemerintah menarik diri dari lembaga-lembaga pertanian. Namun, setelah dicanangkan kebijakan pertanian baru tahun 1985 yang ingin meningkatkan produksi pertanian melalui pemberian rangsangan-rangsangan harga di sektor pertanian, perkembangan harga di pasar dunia untuk kacang tanah tidak mendukung pembiayaan kebijaksanaan pertanian ini. Senegal adalah pengeksport kacang tanah terbesar di dunia, paradoksnya rekor panen Senegal tahun 1987/1988 (950.000 ton) justru menekan harga pasar dunia. Harga beli untuk produsen Senegal tahun '60-an dan '70-an sekitar 50%-70% di bawah harga pasar dunia, sedangkan Mei 1988 harga beli ini mencapai 50% di atas-

nya sehingga pemerintah Senegal menurunkan harga beli dari 90 menjadi 70 F CFA untuk musim panen selanjutnya. Di sektor sekunder modal Perancis tetap menguasai sebagian besar perusahaan pengolahan substitusi impor dan hasil pertanian. Selain kacang tanah (1/4 hasil penjualan di bidang industri adalah dari pabrik-pabrik minyak), yang menonjol adalah produk di bidang agrobisnis yang dibangun di sekitar daerah pesisir tahun '60-an yang berorientasi ekspor (sayur-sayuran, buah-buahan, dan beras) serta penangkapan ikan. Ekspor fosfat menjadi penting setelah kenaikan harga pasar dunia pertengahan tahun '70-an dan kini memberikan kontribusi terbesar pemasukan dari ekspor. Pembangunan suatu daerah bebas pajak Dakar sejak tahun 1976 tidak seperti diharapkan (tahun 1988: 10 perusahaan, 571 tempat kerja). Sebaliknya, pariwisata mengalami lonjakan. Defisit neraca perdagangan kronis (penutupan impor oleh ekspor tahun 1987: 58%). Perancis tetap merupakan mitra dagang terpenting (tahun 1987: 36% perdagangan luar negeri). 40% pemasukan anggaran belanja negara (1988/1989) didapatkan dari subsidi pihak ketiga atau pinjaman luar negeri. Tindakan-tindakan penyesuaian struktural sejak tahun 1983 (rencana tahun 1989 a.l. swastanisasi 26 BUMN/Badan Usaha Milik Negara yang mengalami defisit besar) memperlihatkan hasil awal yang positif (a.l. pengurangan pangsa utang luar negeri pada PNB dari 91% [1984/1985] menjadi 74,3% [1987/1988]) dan mendapat pinjaman IMF sebesar 197 juta US\$ November 1988

yang dibagi dalam tiga tahun. Namun, di lain pihak tindakan penyesuaian ini menumbuhkan ketegangan eksplosif di kota-kota, yang pecah menjadi kerusuhan-kerusuhan sebelum dan setelah pemilu tahun 1988 sehingga dikeluarkan UU darurat sementara.

3. Dalam pembangunan sosial, penduduk pedesaan (sekitar 2/3 penduduk adalah petani) jelas dirugikan: perbandingan pendapatan kaum tani dan pegawai negeri awal tahun '70-an adalah 1:32 dan sejak itu kesenjangan tersebut terus melebar. Pengangguran di perkotaan diperkirakan sekitar 41%. Pelayanan kesehatan (tahun 1981: 13.070 penduduk/dokter), sistem pendidikan (jumlah anak wajib sekolah yang tertampung pada akhir tahun '70-an: 41%) dll., berkumpul di kawasan Cap Vert dan kota-kota, sedangkan penduduk pedesaan menderita kekurangan fasilitas-fasilitas ini. Orang Perancis tetap menguasai posisi kunci di bidang pendidikan dan perguruan tinggi serta perekonomian; golongan minoritas Lebanon dan Suriah menguasai terutama bidang perdagangan perantara.

4. Kebudayaan politik Senegal mempunyai pengalaman lebih dari seratus tahun dengan pemilu dan parlemen (tahun 1848 dan sejak tahun 1876 pemilu di 4 kota pantai untuk memilih wakil-wakil Parlemen Perancis dan Dewan Perwakilan Daerah Tingkat I dan II). Klan politik yang terus tumbuh, dalam era partai tunggal pun secara terbuka memperlihatkan persaingan kuat intern partai. Partai-partai politik berdiri sejak tahun '30-an. Namun, partai tokoh L.S.

Senghor dan M. Dias yang berhasil menjadi partai berkuasa sampai proklamasi kemerdekaan tahun 1960, dan setelah diberlakukan larangan serta peleburan partai-partai tersisa tahun 1966-1974 menjadi partai kesatuan yang memerintah. Sejak itu berlangsung proses perintisan ke arah sistem multipartai (tahun 1988: 17 partai diizinkan). Dalam serikat-serikat buruh juga mulai tumbuh pluralisme. L.S. Senghor, sejak tahun 1960 menjadi presiden dan ketua partai yang berkuasa (sekarang: *Parti Socialiste* PS, sejak tahun 1976 anggota Persatuan Partai-Partai Sosialis Dunia), telah mengundurkan diri (karena usia lanjut) secara sukarela dan kejadian ini merupakan yang pertama kali di Afrika Hitam. Sebagai pengganti sesuai dengan UUD adalah Perdana Menteri Abdou Diouf, tahun 1988 dipilih kembali dengan 73,4% suara (tahun 1983: 83,5%). Pemimpin oposisi Abdoulaye Wade mendapat 25,8% suara (tahun 1983: 14,7%). Berkat sistem pemilihan yang menguntungkan partai pemerintah, a.l. pemalsuan-pemalsuan suara, PS berhasil memenangkan kembali pemilihan umum tahun 1988 dengan mayoritas mutlak di parlemen (73,4% suara dan 103 dari 120 mandat), partai oposisi terpendung PDS mendapatkan 22,2% suara dan 17 kursi.

Setelah intervensi militer Senegal di Gambia untuk membantu Presiden Jawara yang terguling di musim panas (1981), tahun 1982 dibentuk konfederasi Senegambia, yang memiliki pelembagaan yang sama dengan keuntungan pihak Senegal (A. Diouf, parlemen, dll.), tetapi secara

formal kedua mitra mempertahankan kedaulatan masing-masing.

Kepustakaan: Ch. Coulon, *Le marabout et le prince: islam et politique au Sénégal*, Paris 1981; K. Ziemer, *Demokratisierung in Westafrika? Die politischen Systeme von Senegal, Elfenbeinküste und Togo nach zwei Jahrzehnten Unabhängigkeit*, Paderborn 1984; G. Hesseling, *Histoire politique du Sénégal: Institutions, droit et société*, Paris/Leiden 1985; R. Fattou, *The Making of a Liberal Democracy: Senegal's Passive Revolution 1975-1985*, London 1987.

kz

Senghor, Leopold Sedar Lahir di Joal (Senegal) tahun 1906 sebagai putra dari orang tua yang kaya, mendapat pendidikan di sekolah-sekolah misi dan di Perancis. Setelah tamat dari Universitas Sorbonne, ia merupakan orang Afrika pertama yang membuat ujian negara untuk guru pendidikan tinggi dan hidup di Perancis sebagai guru sampai tahun 1945. Senghor memformulasikan pengertian *negritude*, yang menjelaskan kekhususan dan martabat orang Afrika, serta berusaha membangun jembatan antara kebudayaan Afrika dan Eropa. Selama hidupnya ia merupakan seorang filsuf, penyair, sekaligus negarawan (tahun 1968 menerima Hadiah Perdamaian dari Persatuan Penerbit Buku Jerman). Tahun 1945-1958 menjadi wakil Senegal di parlemen Perancis (pernah menjadi Sekretaris Negara Perancis) dan tahun 1959/1960 menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Federasi Mali yang berumur pendek. Penganut agama Katolik ini tahun 1960-1980 menjadi Presiden Senegal yang mayoritas beragama Islam. Tahun 1948 Senghor mendirikan partai politik yang dalam waktu singkat menjadi partai dominan dan tahun 1966-1974 menjadi

partai kesatuan. Setelah Mamadou Dias, politisi paling berkuasa di Senegal, jatuh tahun 1962, Senghor memapankan sebuah pemerintahan yang sangat liberal dengan warna UUD Perancis dan negara Barat lainnya, jika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Afrika, meskipun mengalami masa-masa represi yang kuat (di bidang sosial ekonomi dan krisis politik seperti tahun 1968). Senghor, presiden pertama di Afrika Hitam, mengubah secara bertahap sistem partai tunggal menjadi sistem multipartai. Bersama partainya (tahun 1976: *Parti Socialiste*) menggabungkan diri dalam Sosialis Internasional. Dengan alasan usia, Senghor tahun 1980 mengundurkan diri dari jabatan presiden dan menyerahkan jabatan ini kepada Abdou Diouf, penggantinya yang berhak menurut UUD.

Kepustakaan: I.L. Markovitz, *Leopold Sédar Senghor and the Politics of Negritude*, London 1969; L.S. Senghor, *Liberté III. Négritude et Civilisation de l'Universel*, Dakar/Paris 1977.

kz
SEPA → pendidikan.
serikat buruh (di Dunia Ketiga) Kondisi pembentukan, perkembangan, dan fungsi serikat buruh: berdirinya serikat buruh secara historis berkaitan erat dengan menerobosnya cara produksi kapitalistik. Melalui ekspansi kapitalisme industri di Eropa dan AS pada paro kedua abad ke-19, makin banyak tenaga kerja yang ditarik dalam sistem kerja berdasarkan upah. Oleh karena itu, kelompok pekerja yang terbentuk dengan jumlah besar dan relatif homogen, merupakan basis sosial serikat buruh di negara industri.

Model pembagian kerja internasional menghindarkan terjadinya sebuah proses industrialisasi yang serupa di Dunia Ketiga. Hanya sedikit negara berkembang (Argentina, Brasilia, Meksiko) mengalami proses industrialisasi yang berarti di tahun '30-an dalam rangka industrialisasi substitusi impor. Struktur kapitalis modern di negara berkembang lainnya terbatas pada sektor-sektor ekonomi berorientasi ekspor, merupakan enklave ekspor. Menguatnya investasi asing yang dilakukan perusahaan transnasional, menimbulkan dorongan industrialisasi di Dunia Ketiga, terutama di kawasan Asia Tenggara, India, Afrika Selatan, dan Brasilia. Namun, sebagian besar penduduk negara berkembang—terutama di Afrika dan di beberapa bagian Asia—tetap hidup dalam situasi produksi yang tidak kapitalistik, tidak terjangkau oleh pengorganisasian dalam buruh, misalnya tani kecil, penggarap, buruh tani yang bergantung pada tuan tanah, komunitas desa dan suku, pedagang kecil dan asongan, buruh keluarga, pelayan/pembantu, dsb. Dalam sektor-sektor ekonomi yang pada prinsipnya mungkin timbul organisasi serikat buruh (industri, jasa, pertambangan, agrobisnis, dsb.), pembentukan serikat buruh menjadi sulit dan dihindari oleh faktor-faktor sosio-ekonomi, politik, dan sosio-kultural. Penyebabnya a.l. tingkat pengangguran yang tinggi, kesenjangan yang terlihat jelas di antara sesama buruh dalam hal pendapatan, kesadaran, pendidikan, jaminan tempat kerja, mekanisme represi dan larangan pihak pemerintah, tradisi kultural

yang spesifik, dan ideologi masyarakat yang secara historis berbeda-beda. Banyaknya hambatan struktural ini menyebabkan hanya sedikit terbentuk gerakan serikat buruh yang berarti di negara-negara berkembang yang kuat terindustrialisasi, terutama di Amerika Latin, dan di beberapa negara Afrika dan Asia (misalnya Afrika Selatan dan India). Selain itu, serikat buruh yang relevan hanya terbentuk di negara berkembang dengan enklave ekspor yang penting. Namun, justru karena fungsi enklave terpusat untuk perekonomian nasional yang tidak stabil dan sering digoncang oleh krisis, serikat buruh yang terbentuk mempunyai kekuatan perundingan yang berarti. Mogok yang berlangsung lama yang diorganisir baik oleh serikat buruh dan sering sangat militan, membuat serikat buruh mampu menggoncangkan keseluruhan sistem politik (misalnya mogok di pertambangan, sektor minyak, dan perkebunan). Namun, terlihat tendensi melemahnya posisi perundingan serikat buruh diakibatkan makin digantikannya bahan mentah oleh pengolahan bahan kimia sehingga menurunkan arti bahan mentah di pasar dunia.

Berbagai cara bagaimana serikat buruh menempatkan posisi di berbagai negara berkembang, bergantung pada konteks masyarakat secara keseluruhan dan tradisi sosio-kultural. Makna serikat buruh yang lebih mengikuti Eropa terdapat di Amerika Latin, yang memiliki tradisi serikat buruh sekitar 1 abad. Di beberapa negara berkembang dengan tingkat perkembangan industri yang rendah, terutama di Afrika Hitam, serikat bu-

ruh terbentuk oleh pekerja dan karyawan yang berkualifikasi dan memiliki pendapatan serta status sosial yang tinggi sehingga sebagian besar terpisah dari kelompok bawah. Serikat buruh di sana membentuk sebuah komunitas yang mempertahankan posisi privilensya terhadap bukan anggota sehingga memenuhi fungsi kelompok kepentingan borjuasi negara berkembang. Di negara berkembang lainnya, sebagian di kawasan Asia, serikat buruh sering dikendalikan oleh pemerintah atau berasosiasi dengan perusahaan. Selanjutnya, misal di Amerika Latin, meskipun dalam konteks yang berbeda, di Afrika Selatan, serikat buruh juga mengambil alih fungsi-fungsi yang melampaui peran tradisionalnya. Situasi memperjuangkan hak-hak politik dan sosial untuk sebagian besar penduduk, kelemahan struktural atau marginalisasi partai-partai politik dan menurunnya tingkat hidup lapisan bawah terutama di tahun-tahun terakhir, menyebabkan serikat buruh memperoleh peran pimpinan dalam perjuangan untuk hak-hak demokrasi dan melawan situasi hidup masyarakat luas yang makin memburuk.

Secara umum dapat dikatakan bahwa perubahan ekonomi dunia di tahun-tahun terakhir tidak saja telah melemahkan posisi serikat buruh selain di negara industri, juga di negara berkembang. Dengan demikian tidak hanya terjadi kemunduran tingkat pengorganisasian serikat buruh akibat likuidasi kehancuran tempat-tempat kerja industri atau likuidasi keseluruhan enklave ekspor, bobot politik juga menurun. Fenomena ini tidak

terjadi pada serikat buruh di Brasilia dan Afrika Selatan yang berhasil mengembangkan dinamika khususnya.

Organisasi serikat buruh internasional di Dunia Ketiga: sebagian serikat buruh nasional di negara berkembang tergabung dalam tiga organisasi internasional dan regional yang ada. Di beberapa bagian dunia terbentuk asosiasi-asosiasi bebas regional dengan organisasi-organisasi internasional ini (misalnya di Afrika tahun 1973 terbentuk *Organization of African Trade Union Unity*, OATUU) atas prakarsa menteri tenaga kerja. Namun, secara keseluruhan politik serikat buruh internasional makin jelas didominasi oleh organisasi-organisasi serikat buruh Eropa Barat, AS, dan Eropa Timur yang memiliki jumlah anggota yang besar dan sering mendapat dukungan pihak negara.

Organisasi Serikat Buruh Bebas (*International Confederation of Trade Unions*, ICFTU), berkedudukan di Brussel dan kini memiliki 83 juta anggota, terbentuk tahun 1949 sebagai hasil perpecahan organisasi serikat buruh dunia. Termasuk di dalamnya semua organisasi serikat buruh Eropa Barat, dengan pengecualian beberapa organisasi wadah yang dipengaruhi komunis dan gereja. Sejak tahun 1982 terbentuk serikat buruh AS AFL/CIO (*American Federation of Labour/Congress for Industrial Organization*) yang keluar dari ICFTU tahun 1969. Organisasi regional ICFTU di Asia adalah ARO dengan kedudukan di New Delhi (India) dan organisasi serikat buruh India (*Indian National Trade Union Congress/INTUC*) memiliki lebih dari 3,2 juta

anggota. Di Afrika adalah AFRO yang kurang berarti dengan kedudukan di Freetown (Sierra Leone) dan di Amerika adalah ORIT (*Organización Regional Interamericana de Trabajadores*) dengan kedudukan di Mexico City. ORIT, organisasi yang memiliki banyak anggota, begitu juga serikat buruh Meksiko CMT dan Venezuela CTV/*Confederación de Trabajadores de Venezuela*/Konfederasi Buruh Venezuela (CGT di Argentina adalah anggota langsung ICFTU), baru-baru ini dikendalikan oleh organisasi wadah AS (AFL/CIO) dan lama mengikuti kepentingan politik AS sehingga mengakibatkan pendiskreditan dan penolakan organisasi ini oleh sebagian besar gerakan serikat buruh di Amerika Latin. Sejak beberapa tahun ORIT berusaha memperbaiki citra dengan menjalankan sebuah politik yang progresif. Organisasi Pekerja Dunia berkedudukan di Brussel dan kini memiliki 15 juta anggota, terbentuk dari gerakan serikat buruh Kristen dan merupakan organisasi lanjutan dari Asosiasi Internasional Serikat Buruh Kristen yang didirikan tahun 1920. Setelah mula-mula terbatas hanya di Eropa, organisasi ini meluas ke Amerika Latin dengan berdirinya organisasi regional CLASC (*Confederación Latinoamericana de Sindicalistas Cristianos*) tahun 1954, dan CLAT (*Centro Latinoamericano de Trabajadores*) sejak tahun 1971. Selanjutnya, berdiri organisasi regional di Afrika UPTC (*Union Pan-Africaine des Travailleurs Croyants*) dan BATU (*Brotherhood of Asian Trade Unions*). Dengan perluasan Organi-

sasi Pekerja Dunia di dalam organisasi yang pada awalnya konservatif menerobos gagasan-gagasan progresif terutama dari Amerika Latin dan Perancis. Namun, perbedaan politik dan berbagai perkembangan menyebabkan organisasi ini melemah. Organisasi regional di Afrika melepaskan diri tahun 1974, sedangkan di Asia hanya ada di atas kertas. Anggota terpenting, yaitu CFDT di Perancis, mengundurkan diri tahun 1978 sehingga bobot organisasi ini juga berkurang di Eropa. Sementara ini CLAT di Amerika Latin kehilangan pengaruh dan citra akibat perilaku yang ambivalen.

Organisasi Serikat Buruh Dunia yang berkedudukan di Praha (Ceko-slowakia) memiliki 206 juta anggota, dan berdiri atas inisiatif komisi Inggris-Soviet (1947) dalam rangka perjuangan bersama melawan rezim Hitler. Pada pendiriannya ikut sebagian besar organisasi wadah di negara-negara Eropa Timur dan AS (CIO). Tahun 1949 terjadi perpecahan antara organisasi komunis dan non-komunis. Organisasi nonkomunis bersama organisasi serikat buruh AS (AFL) mendirikan ICFTU. Sebagian besar Organisasi Serikat Buruh Dunia ini kini terdiri atas serikat-serikat buruh Eropa Timur (120 juta), setelah Cina, Yugoslavia, dan (1978) Italia (CGIL/*Confederazione Generale Italiano del Lavoro*, Konfederasi Umum Buruh Italia) mengundurkan diri. Organisasi Serikat Buruh yang berarti di Eropa Barat adalah CGT di Perancis dan Portugal. Di Amerika Latin berdiri CPUSTAL (*Congreso Permanente de Unidad Sindical de*

los Trabajadores de America Latina, Kongres Tetap Uni Serikat Buruh Amerika Latin) mencakup beberapa organisasi wadah yang penting (Kuba, Peru, Nikaragua), *de facto* adalah organisasi regional dari Organisasi Serikat Pekerja Dunia. Pengaruh organisasi ini di Afrika relatif kecil, sedangkan di Asia tergabung beberapa organisasi lebih besar dari negara-negara komunis dan non-komunis.

Asosiasi serikat buruh internasional di tingkat sektoral, misalnya buruh metal, buruh tambang, dan pegawai negeri mempunyai arti penting. Dalam Organisasi Serikat Buruh Dunia terdapat 11 organisasi demikian, sementara di dalam Organisasi Pekerja Dunia terdapat 12. Namun, yang paling dinamis dan penting dalam sektor ini adalah Organisasi Sekretaris Internasional yang memang bekerja erat dengan ICFTU, tetapi secara formal tidak tergantung.

Di beberapa daerah, terutama di Amerika Latin sebelah selatan yang merupakan daerah organisasi-organisasi serikat buruh terpenting di Dunia Ketiga, terdapat organisasi-organisasi penting di luar organisasi serikat buruh internasional. Di sana berkembang bentuk-bentuk koordinasi yang mandiri (sebagian bekerja sama dengan ICFTU/ORIT). Terbentuknya inisiatif dan koordinasi Amerika Latin dari pihak serikat buruh berkaitan dengan masalah utang luar negeri.

Kepustakaan: S. Mielke (ed.), *Internationales*

Gewerkschaftshandbuch, Opladen 1983. aw

Seychelles 1. Kelompok Kepulauan Seychelles terdiri atas 92 pulau-pulau kecil yang terletak di sebelah barat Samudera Hindia dengan luas daratan

seluas 290 km², merupakan negara terkecil di Afrika. Di 56 pulau yang dihuni tahun 1986 hidup sekitar 70.000 jiwa (tahun 1983: 68.000, sensus tahun 1977: 61.430, pertumbuhan penduduk 2,1%/tahun), dari jumlah tersebut hampir 90% hidup di pulau terbesar, Mahe (143 km²), sekitar 25% hidup di ibu kota Victoria. Penduduk Kepulauan Seychelles adalah keturunan perantau Perancis dan budak-budaknya (90% Katolik, 8% Anglikan), berbahasa Kreol dengan warna bahasa Perancis yang kuat (sejak tahun 1981 merupakan bahasa nasional), sekitar 60% dapat membaca dan menulis. Suatu kelompok kecil oligarki pulau yang terdiri atas kelompok kulit putih murni pemilik perkebunan yang sudah lama menetap di sana (*Grand Blond Set*), menguasai 3/4 negeri itu dan sampai kini merupakan elite nasional.

2. Kepulauan yang ditemukan oleh Vasco da Gama abad ke-16 dan sampai saat itu belum dihuni, setelah diduduki Perancis untuk sementara waktu (1756–1810), tahun 1914 menjadi milik Inggris bersama Mauritius dan tahun 1903 dinyatakan menjadi jajahan kerajaan. Kepulauan Seychelles lambat menjadi negara merdeka (1976). Dengan proses dekolonisasi tumbuhlah suatu kontradiksi yang sampai sekarang menentukan corak politik negeri itu. *Seychelles People's United Party* (SPUP) yang didirikan oleh France-Albert René tahun 1964 dengan dukungan Tanzania dan OAU, untuk pertama kalinya menuntut kemerdekaan segera. Sebaliknya, *Seychelles Democratic Party* (SDP) yang seminggu kemudian didirikan

oleh James Mancham sebagai wakil kepentingan pemilik kepulauan, menginginkan hubungan yang erat dengan negara penjajah. Dengan demikian mulai awal tahun '70-an Inggris kehilangan minatnya akan negeri tersebut dan memaksakan berlangsung dekolonisasi, tidak hanya untuk mengelakkan kritik terhadap kolonialisme (tahun 1970 reformasi UUD, tahun 1975 otonomi dalam negeri, tahun 1975/1976 Konferensi penyusunan UUD di London, 29 Mei 1976 pengakuan kemerdekaan secara hukum internasional).

3. Kontroversi yang sengit setelah pemilu tahun 1974 (SDP: 52,4%, mendapat 13 dari 15 kursi; SPUP: 47,6% hanya mendapat 2 kursi) baru dapat diselesaikan dengan tekanan Inggris melalui pembentukan koalisi besar—dalam suatu kabinet presidential Mancham diangkat menjadi presiden, René (sebagai mitra junior) menjadi perdana menteri.

Susunan pemerintahan yang rapuh ini berakhir Mei 1977, ketika kelompok pengikut SPUP menggulingkan Mancham yang sedang berada di luar negeri dan René mengambil alih pimpinan negara. Setelah pemerintahan Mancham sangat berorientasi Barat, René membuka jalan menuju sosialisme, dengan orientasi pada sosialisme Tanzania dahulu.

Juni 1978 ia mengubah SPUP menjadi partai sosialis bersatu, SPPF (*Seychelles People's Progressive Front*), menjadi suatu partai sosialis bersatu, Maret 1979 mengamankannya menjadi partai pemerintah melalui UUD baru dan memenangkan 97,9% suara dan seluruh kursi (25)

yang diperebutkan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pemilu Juni 1979. Untuk politik luar negeri yang aktif, René dalam nonblok (mempertahankan hubungan baik dengan Barat) berusaha membangun hubungan lebih erat dan kerja sama ekonomi dengan negara-negara Eropa Timur dan RRC. Di bidang politik dalam negeri, selain usaha-usaha sosial politik (perbaikan upah, bantuan bagi pembangunan perumahan rakyat dan tata pendidikan), ia mencanangkan suatu reformasi pertanian menyeluruh. Selain menunjang bidang pertanian dan perikanan yang sangat terlantar, juga direncanakan pengawasan pemerintah yang lebih ketat, a.l. di bidang pariwisata yang hampir seluruhnya dikuasai modal asing. Namun, campur tangan yang kuat dalam masalah pembagian tanah dan pembagian pendapatan belum tampak. Pernyataan sosialis yang secara verbal revolusioner (a.l. kerja sama politik luar negeri dengan dua negara kepulauan yang sosialis di Samudera Hindia, Madagaskar, dan Mauritius) bertentangan dengan tindakan-tindakan politiknya.

4. Keterpencilan pulau-pulau yang dulu berstruktur pertanian murni (mayoritas penduduk hidup dari subsistensi pertanian dan penangkapan ikan) berakhir dengan dibukanya lapangan terbang tahun 1971 dan sejak itu dimulai perubahan struktur perekonomian besar-besaran di kepulauan itu. Dalam jangka waktu singkat pariwisata menjadi sektor ekonomi andalan: 3.175 turis (1971), 71.760 (1980), 47.000 (1982), 72.642 (orang Perancis 17%, orang Inggris 13%) tahun 1985. Terutama akibat dina-

mika ekonomi yang diimpor ini, Seychelles masuk dalam kelompok Afrika termaju dengan PNB tahun 1983: 2.400 US\$ (tahun 1979: 1.400 US\$) dan memiliki angka pertumbuhan tahunan relatif tinggi tahun 1982: 3,7%. Ekspor tidak berarti. Ekspor kayu manis, minyak kayu manis, kopra, dan kelapa (mitra dagang utama: MEE, Afrika Timur, dan Afrika Selatan) dalam jumlah kecil, hanya dapat menutup 20% kebutuhan impor yang mencakup hampir semua komoditas (termasuk bahan pangan). Turisme menghasilkan 40% PDB (tahun 1974: 61%), disusul industri 15%, pertanian/perikanan 8,4%. Sektor utama turisme berkembang subur tahun '70-an, tetapi akibat resesi dunia sejak tahun 1980 menyebabkan berkurangnya jumlah wisatawan dan membuat Seychelles makin bergantung pada kredit dan bantuan luar negeri. Revaluasi mata uang Rupie Seychelles, menurunnya standar hotel serta ketidakamanan politik setelah kegagalan kudeta (1981), merupakan penyebab penurunan jumlah wisatawan. Awal tahun '80-an defisit neraca pembayaran melonjak empat kali lipat akibat kenaikan impor (kebutuhan konsumsi yang meningkat, rencana-rencana pembangunan). Meredanya krisis perekonomian dunia sejak tahun 1984 meningkatkan jumlah wisatawan ke Seychelles. Namun, resesi tahun 1978-1985 menurunkan jumlah pekerja; di bidang perikanan dan pertanian turun sekitar 19,9% (bidang produksi 12,5%, bangunan 41,5%). Walaupun sektor jasa dapat mempertahankan kesempatan kerja, pengangguran di

sektor ini naik 15% (1983), pekerja-pekerja luar negeri tetap didatangkan. Angka-angka ini mewarnai perkembangan ekonomi yang menentukan struktur dasar perekonomian Seychelles: tidak adanya bahan baku dan kecilnya kemungkinan untuk industrialisasi (terbatasnya pasar), menyebabkan turisme merupakan potensi utama untuk pembangunan. Selain dampak-dampak positif pembangunan ini (turisme menyerap 3.000 pekerja meliputi 1/3 angkatan kerja, biasanya merupakan penyeimbangan neraca perdagangan yang sering defisit), terdapat beberapa akibat mengkhawatirkan (inflasi, berkurangnya daya beli, urbanisasi sehingga menurunkan produksi sektor pertanian, pengaruh kebudayaan asing, spekulasi tanah, impor tidak terkendali yang hampir menyamai nilai PNB). Pemerintahan René berusaha membatasi gejala-gejala negatif ini melalui suatu politik turisme eksklusif di daerah terbatas (pariwisata masa yang tumbuh tidak terkendali). Masalah yang belum terpecahkan adalah masalah ketergantungan struktural dari luar: bidang-bidang utama ekonomi negara kepulauan ini (*agrobusiness*, turisme) hampir seluruhnya bergantung pada permintaan luar negeri. Hal ini, secara langsung atau tidak langsung, menentukan pendapatan sebagian besar penduduk serta melalui pajak dan cukai, anggaran belanja negara (1/3 dibiayai luar negeri).

5. Walaupun tingkat pemenuhan kebutuhan dasar secara relatif dapat dikatakan baik, tetapi masih ada potensi oposisi cukup berarti (dari kalangan bekas SDP), yang aktif baik

di dalam negeri atau di luar negeri serta berhubungan dengan Mancham yang hidup di pengasingan di London. Komplotan pertama terbongkar April 1978. Sejak itu berkali-kali tentara-tentara bayaran internasional berusaha untuk menggulingkan kekuasaan dengan kekerasan.

Agustus 1982 terjadi pemberontakan militer yang baru saja dibentuk dengan sekitar 1.000 orang, dan dapat dihancurkan dengan bantuan penasihat-penasihat dari Tanzania. Tahun 1984 dua orang anggota *Seychelles Liberation Committee* yang didirikan di Paris tahun 1979, terbunuh melalui bom, tahun 1985 bekas pemimpin oposisi G. Hoarau, pemimpin gerakan perlawanan *Mouvement Pour la Résistance* (MPR), dibunuh di London. Ia dicurigai merencanakan pemberontakan. September 1986 terjadi suatu percobaan kudeta yang tidak diketahui orang, diduga dengan partisipasi menteri pertahanan Berlouis yang beberapa waktu sebelumnya diberhentikan. René menolak tuduhan bahwa ia telah meminta pertolongan Uni Soviet dan sebagai imbalannya menyetujui pembangunan pangkalan militer di sana. Pemberontakan dan desas-desus kudeta yang terus-menerus ini sebetulnya bukan mempersoalkan prinsip politik, melainkan hanya merupakan persaingan uang dan kekuasaan.

Kepustakaan: W. Marquardt, *Seychellen-Komoren-Maskarenen*, München 1976; F. Nuscheler, "Seychellen", dlm.: F. Nuscheler/K. Ziemer, *Politische Organisation und Repräsentation in Afrika*, Berlin/New York 1978, hlm. 871 dst.; R. Hofmeier, "Seychellen", dlm.: *HDW II*, 5, Hamburg 1982, hlm. 279 dst. bg

share cropping Sistem penggarapan tanah dengan sistem bagi hasil antara tani penggarap dan pemilik tanah/kuasa pemilik tanah/perantara pemilik tanah yang ditetapkan terlebih dahulu dan kebanyakan dalam bentuk hasil bumi. Pembagian ini bermacam-macam, bergantung pada apakah si pemilik tanah selain menyediakan tanah juga menyediakan air, sarana membajak, benih atau sarana-sarana usaha lain (pupuk, pestisida, kredit, mesin-mesin, dsb.); penggarap sering hanya menyediakan tenaga saja. *Share cropping* bergantung pada hasil dan berdampak menghambat inovasi—namun mengurangi risiko bagi penggarap. Sistem ini mensyaratkan produksi yang mudah dibagi dan diawasi sehingga mempengaruhi struktur produksi (terutama penanaman gandum). Sistem ini banyak terdapat di Asia Tenggara dan menyebabkan tidak mungkin dibuat perbedaan antara petani pemilik, penggarap, atau buruh tani. **wpz**

shifting cultivation Sistem pertanian ladang berpindah tradisional tanpa pupuk di daerah hutan hujan tropis, dengan cara menanam bergantian areal-areal kecil (kurang lebih 0,5 ha) di sekeliling pemukiman pertanian setelah dilakukan penebangan dan pembakaran (pemupukan dengan abu). Meskipun ada masa bera/kosong (6–7 tahun) dan jumlah panen bertambah, hasil panen di seluruh lahan terus turun sehingga pemukiman dipindahkan (*shifting away*) dan dimulailah pembukaan lahan di tempat lain. Berbeda dengan sistem perladangan tetap yang monokultur di areal luas, *shifting cultivation* yang memerlukan

lahan luas, miskin panen, dan padat karya ini, disesuaikan dengan ekosistem hutan hujan dan telah dijadikan pendekatan-pendekatan baru pembangunan pertanian di daerah tropis (*ecofarming*). Dilema: pemendekan masa bera dan penebangan pohon besar-besaran menyebabkan hancurnya potensi-potensi pembangunan ekologi di banyak tempat. ah

SID (*Society for International Development*) Lembaga Pembangunan Internasional, sebuah LSM internasional yang didirikan di Washington tahun 1957 oleh orang-orang dari berbagai kelompok profesi yang menggeluti masalah-masalah politik pembangunan dalam teori dan praktik. Sebagai forum diskusi yang terorganisir di seluruh dunia, SID menentukan sikap secara terbuka terhadap masalah-masalah politik pembangunan yang aktual dalam rangka konferensi-konferensi regional atau internasional. *Round Table* Utara-Selatan yang diselenggarakan SID membahas masalah-masalah energi, pangan, alih sumber daya alam, dan perundingan global. Publikasi: *International Development Review* (tiga bahasa, terbit setiap triwulan), *Compass* (bahasa Inggris), dan *Newsgram* (kantor berita). ah

SIECA → **MCCA**.

Sierra Leone 1. Luas 71.740 km², termasuk negara termiskin di dunia. Lebih dari 70% penduduk bekerja di pertanian (kebanyakan ekonomi subsisten). Hasil utama negeri itu adalah intan, penambangannya menentukan struktur ekonomi Sierra Leone (lebih dari separo nilai ekspor). Selain itu,

ditambang bauksit, rutil, dan bijih besi.

2. Tahun 1808 Sierra Leone berada di bawah pengawasan Kerajaan Inggris. Tahun 1890-1896 Inggris memperluas kekuasaan sampai ke pedalaman. Sesuai dengan tradisi kolonial Inggris, daerah protektorat Sierra Leone diperintah kaum bangsawan tradisional (*indirect rule*). Komoditas ekspor andalan adalah bijih dan minyak kelapa sawit. Di tahun '30-an abad ke-20 dimulai penambangan bijih besi dan intan. Sierra Leone terintegrasi dalam ekonomi dunia melalui sektor pertambangan ini, sampai saat ini bergantung pada gejolak permintaan. Kemerdekaan negara (1961) yang dipimpin *Sierra Leone People's Party* (SLPP), tidak mengubah situasi. Setelah berlangsung pertikaian dengan kekerasan tahun 1968, SLPP sebagai partai pemerintah diganti oleh *All People's Congress* (APC). Sejak tahun 1978 Sierra Leone menjadi negara berpartai tunggal dipimpin APC. S. Stevens berkuasa sampai pengunduran dirinya (1985), walaupun menghadapi berbagai situasi yang mengancam (tahun 1971 ia dapat menyelamatkan diri dengan bantuan tentara Guinea); jabatan diserahkan kepada Mayor Jenderal J.S. Momoh; dalam tahun yang sama ditetapkan sebagai presiden sipil. Maret 1987 dapat digagalkan sebuah kudeta menentang Momoh; dengan Stevens sebagai salah seorang tokoh.

3. Penduduk Sierra Leone tahun 1989 diperkirakan 4 juta jiwa. Penduduk tumbuh dengan pesat dan terkumpul di kutub-kutub pertumbuhan

negara itu: di kawasan penambangan intan, di pusat-pusat lalu-lintas dan perdagangan, serta di ibu kota Freetown (tahun 1985: 448.000 penduduk). Masalah pembangunan regional dibebani oleh persaingan antarsuku. Kelompok-kelompok etnis terbesar adalah suku Mende dan Temne, selain itu Soso, Kuranko, dan Limba. Kelompok Kreol (2%) terwakili lebih dari proporsional di semua bidang kemasyarakatan. Bahasa mereka, Krio yang bersumber dari bahasa Inggris, menjadi *lingua franca* (bahasa resmi: Inggris). Suku Kreol kebanyakan penganut agama Kristen, selain itu 39,4% Islam (terutama suku Temne). Mayoritas penduduk menganut animisme.

4. Pertanian Sierra Leone menghasilkan 1/3 PDB. Makanan utama dan hasil pangan utama adalah beras, tetapi produksi beras dalam negeri tidak dapat memenuhi kebutuhan. Usaha pemerintah untuk menekan harga dan musim kering (1985), berdampak negatif. Komoditas ekspor andalan adalah kopi dan coklat. Hanya 6% angkatan kerja bekerja di pabrik-pabrik dengan karyawan lebih dari 5 orang. Sektor pertanian dan usaha kecil nonpertanian tidak terkait dengan sektor ekonomi modern dan hanya mendapat dorongan yang tidak berarti dari pemerintah.

5. "Penentu struktur kekuasaan dalam negeri adalah penguasaan secara efektif atas hak-hak, peluang penggunaan, pendapatan, dll., bukan pemilikan formal atas alat-alat produksi" (peran bangsawan-bangsawan tradisional) (Mühlenberg/Wolff 1982). Asal usul kesukuan, peluang

pendidikan dan karir, berkaitan erat satu sama lain. Distribusi pendapatan regional dan sektoral yang sangat tidak seimbang disebabkan oleh partisipasi penduduk secara tidak seimbang dalam perekonomian serta dalam posisi sosial dan profesi.

6. Makanan yang tidak cukup, lingkungan yang tidak sehat, dan pengadaan air yang kurang, memperburuk situasi kesehatan penduduk (malaria, angka kematian bayi yang tinggi, tingkat harapan hidup tahun 1989: 42 tahun). Sekitar 2/3 dokter dan banyak rumah sakit terpusat di Freetown (1 dokter untuk 17.000 penduduk). Untuk bidang pendidikan, Sierra Leone telah berbuat agak lumayan (buta aksara masih 71%). Sistem pendidikan terganggu oleh sarana pendidikan yang secara regional sangat berbeda-beda dan pendirian sarana pendidikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan negara.

7. Usaha Sierra Leone di bidang politik pembangunan sampai saat ini tidak mencapai tahap rencana pembangunan dengan dampak perbaikan nyata bagi mayoritas penduduk. Masalah-masalah nasional yang sudah mendesak secara ekonomis semakin meruncing dan bertambah akibat ketergantungan pada bahan mentah. November 1987 Presiden Momoh mengumumkan keadaan darurat ekonomi dan mengambil tindakan-tindakan tegas terhadap spekulasi devisa dan penumpukan barang. Sierra Leone dalam politik luar negerinya berusaha menjaga hubungan baik dengan negara-negara tetangga, Guinea dan Liberia, (Mano River Union, tahun 1986: dibentuk komite peng-

hubung bersama untuk keamanan) dan membina hubungan dengan negara-negara industri Barat (mitra dagang utama: ME).

Kepustakaan: G. Williams, *A Bibliography of Sierra Leone 1925-1967*, New York 1971; H. Harbach, *Soziale Schichtung und Mobilität in Freetown*, Münster 1973; A.P. Kup, *Sierra Leone. A Concise History*, Newton 1975; F. Mühlberg/H.-U. Wolff, "Sierra Leone", dlm.: *HDW II*, 4, Hamburg 1982, hlm. 347 dst. **rs/pb SIFIDA** (*Societe International Financiere pour les Investissements et le Developpement en Afrique*, Asosiasi Penunjang Investasi Swasta di Afrika) → AFDB.

Singapura Republik Singapura, sama dengan Hong Kong, merupakan kasus khusus di antara negara berkembang. Karena kecilnya kawasan negara itu, Singapura secara keseluruhan terpaksa mengintegrasikan diri dalam pembagian kerja internasional. Selain itu, perkembangan pascakolonial negara kota ini merupakan suatu contoh menonjol dari jalinan erat faktor-faktor ekonomi dan politik dalam proses pertumbuhan cepat dan berorientasi ekspor.

1. Di Pulau Singapura (luas 622 km²) hidup 3 juta penduduk (1989), angka pertumbuhan penduduk tahun 1980-1989: 1,2%/tahun. Hanya 9,5% luas tanah dapat digunakan untuk pertanian; 51% merupakan kawasan pemukiman, sebagian besar memiliki kepadatan penduduk yang tinggi (4.158 penduduk/km²). Singapura tidak memiliki kekayaan tambang atau sumber daya alam lain, kecuali letak geografisnya yang sangat menguntungkan, yaitu terletak di jalur perdagangan ke Timur Jauh dan Australia (sehingga negara adikuasa dagang

Inggris sejak tahun 1819 mengubah Singapura menjadi pangkalan militer), sarana pelabuhan yang baik dan tenaga kerja penduduknya. Sampai proklamasi kemerdekaan tahun 1965 (sejak tahun 1959: otonomi daerah; tahun 1963-1965: bagian dari Malaysia) sebagian besar penduduk hidup dari pekerjaan di pelabuhan, bongkar muat/angkutan dan pengolahan barang-barang dari negara tetangga, Malaysia dan Indonesia, serta dari industri kecil dan jasa (perhotelan). Semua ini merupakan kegiatan dalam rangka pembagian kerja kolonial. Penarikan mundur pasukan Inggris menyebabkan Singapura kehilangan pendapatan dari pangkalan militer. Kemerdekaan Malaysia dan Indonesia juga menyebabkan Singapura kehilangan sebagian penerimaan dari perdagangan perantara karena kedua negara tersebut membangun sendiri sarana-sarana pelabuhan dan pengolahan lanjut produk-produk mereka. Untuk Singapura yang memisahkan diri dari Malaysia, hanya ada satu pilihan, yaitu melakukan industrialisasi yang cepat dan membangun negara kota itu menjadi suatu pusat reparasi, perdagangan, dan jasa internasional. Karena untuk tujuan ini tidak tersedia modal dalam negeri dan teknologi modern, ditarik investor-investor asing untuk mengamankan kelanjutan hidup negara pulau tersebut dalam bentuk yang diinginkan. Persyaratan untuk ini adalah upah rendah dan prasarana-prasarana di Singapura, terutama kesediaan tidak mengarahkan produksi pada kebutuhan mayoritas penduduk (kemampuan beli yang rendah, pasar dalam negeri yang

sempit), melainkan pada kebutuhan pasar dunia.

2. Dengan mengikuti model industrialisasi yang tergantung ini, Singapura sejak tahun 1960 melakukan perubahan struktur dan politik besar-besaran. Penduduk bertambah sebanyak 850.000 jiwa; di antara 1,2 juta jiwa pekerja (1986) kurang dari 1% bekerja di pertanian dan perikanan (tahun 1957: 6,9%), 35% bekerja di industri (tahun 1957: 14,3%), dan lebih dari 60% bekerja di sektor jasa; dari jumlah ini 21% bekerja di pemerintahan (tahun 1957: 73%). Selanjutnya, kesempatan kerja di bidang industri yang dipindahkan (tekstil dan elektro) bertambah sehingga masalah pengangguran dapat diatasi (tahun 1986: 6,5%). Di masa-masa *boom* ekonomi dan untuk menekan tarif upah, didatangkan buruh tamu dari negara-negara tetangga (tahun 1981: sekitar 120.000 orang), yang hak-haknya tidak disamakan dengan penduduk Singapura. Pelabuhan Singapura diperluas menjadi pelabuhan bongkar muat terbesar kedua di dunia (perdagangan perantara dan pelabuhan reparasi), tumbuh rumah-rumah susun (75% penduduk tahun 1986 tinggal di rumah-rumah yang disubsidi negara), dan kapasitas hotel melonjak 15 kali lipat. Singapura dalam jangka waktu 20 tahun telah berkembang dari sebuah *colonial city* menjadi sebuah *global city*, menjadi pusat investasi dan perbankan kawasan Asia Tenggara.

3. Namun, pertumbuhan yang menakutkan ini bertumpu pada suatu dasar yang rapuh karena masa depan ekonomi negara pulau ini sangat ber-

gantung pada faktor-faktor luar (pasar dunia). Posisi geografisnya terancam pembangunan terusan di Krah (Thailand Selatan). Selain itu, muncul ongkos politik dan sosial. Kemajemukan struktur penduduk dan pendapatan (76% Cina, 15% Melayu, 6% India, Pakistan, Eurasia, dll.) sering menimbulkan masalah-masalah seperti komunalisme dan ketidakpuasan sosial, yang ditekan dengan segala cara oleh pemerintah, tetapi tidak diselesaikan. Dalam rangka industrialisasi terbentuk suatu kelas menengah di satu pihak, tetapi situasi pendapatan 70% penduduk lapisan bawah tidak mengalami perbaikan (sebagian besar pengangguran di antara penduduk Melayu dan kesempatan kerja kurang) di lain pihak. Oleh karena itu, satu keluarga hanya dapat menutup kebutuhan hidupnya secara cukup jika seluruh anggota keluarga ikut bekerja. Tingkat upah yang secara keseluruhan rendah akibat persaingan dengan negara-negara berupah rendah lain (Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, Cina, dan India), menyebabkan terjadinya pertumbuhan daya beli riil yang rendah. Selain itu, industrialisasi Singapura benar-benar dapat dikatakan bergantung karena di dalam negeri hampir tidak ada inovasi dan perbaikan teknik, sedangkan sebagian besar keuntungan segera mengalir kembali keluar. Misalnya, impor, proses, dan ekspor minyak mentah memainkan peranan besar dalam neraca perdagangan; tetapi bagi penduduk Singapura tidak ada yang tersisa kecuali pencemaran lingkungan yang luar biasa. Lemahnya perekonomian Singapura terlihat terutama pada

tahun resesi 1985, ketika perdagangan luar negeri dan impor menyusut sebesar 3% akibat gejolak ekonomi.

Untuk keluar dari dilema ini pemerintah Singapura mencari jalan keluar dengan rencana *second industrial revolution*, yaitu melalui peningkatan teknologi (pangsa industri elektro dan elektronik pada PDB tahun 1986: 27%) dan intensifikasi produksi (dan disiplin kerja). Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi ini di Singapura dapat diamati proses depolitisasi penduduk serta pembentukan sektor ekonomi pemerintah dan kelas negara yang terdiri atas pegawai negeri yang menikmati privilese, politisi, dan teknokrat, yang memerintah negara pulau ini dalam bentuk diktator sipil. Sistem politiknya bercirikan sebuah parlemen yang sangat lemah dan dominasi sekelompok elite politik yang mengabdikan pada satu partai, yaitu *People's Action Party* (PAP), tahun 1959–1982 pada pemilihan umum telah dapat memenangkan seluruh kursi. Pengawasan sosial dan politik yang ketat (misalnya serikat buruh yang dikendalikan, sensor pers, penangkapan yang semena-mena kelompok oposisi, dll.) dilakukan pemerintah dengan alasan mempertahankan kepentingan ekonomi tersebut dan diabsahkan sebagai syarat kelangsungan hidup Singapura. Loyalitas massa dan eksistensi kelas negara hanya dapat dijamin jika pemerintah dapat mempertahankan yang telah dicapai serta merealisasikan tujuan-tujuan pembangunan. Monopoli kekuasaan ini telah didobrak November 1981 ketika seorang calon dari oposisi *Worker's Party* memenangkan se-

buah kursi parlemen dalam pemilihan susulan. Sejak itu, kelompok elite PAP dan ketuanya, Lee Kwan Yew, memikirkan suatu reformasi lembaga politik (memperkuat kedudukan presiden, jaminan 3 kursi bagi partai oposisi), yang dengan cara di satu pihak diharapkan dapat menjamin kestabilan sistem, sedangkan di lain pihak setidaknya membuka untuk kaum oposisi saluran pengaruh yang dapat dibatasi. Namun, tindakan ini bukan bertujuan melakukan liberalisasi politik.

Kepustakaan: H.U. Luther, *Ökonomie, Klassen und Staat in Singapur*, Frankfurt 1980; idem, "Singapur", dlm.: *HDW II*, 7, Hamburg 1983, hlm. 436 dst.; T. Schönenberger, *Der britische Rückzug aus Singapur 1945-1976*, Zürich 1981; W. Holtgrave, *Industrialisierung in Singapur*, Frankfurt/New York 1987.

hul
SIPRI → persenjataan.

Sistem Bretton-Wood → Bank Dunia, hubungan Selatan-Selatan, IMF.
sistem kasta → India.

sistem kuota Penentuan volume produksi dan ekspor bahan mentah melalui perjanjian internasional. Sistem kuota ini bertujuan menstabilkan harga bahan mentah. → Perjanjian Bahan Mentah, → *buffer stock*, → program bahan mentah terintegrasi. dan
sistem ladang berpindah → *shifting cultivation*.

Sistem Penstabilan Hasil Ekspor Mineral → SYSMIN.

Sistem Preferensi Umum Sejak bertahun-tahun negara berkembang mengeluh bahwa proteksionisme yang dilakukan negara industri menghambat usaha-usaha mereka melakukan pertumbuhan berorientasi ekspor dan industrialisasi (→ substitusi impor). Sampai kini perdagangan Selatan-

Selatan masih lemah (tahun 1978 hanya 26% ekspor dan 14% impor negara berkembang, tanpa minyak bumi) sehingga akses bebas ke pasar-pasar negara industri sangat penting artinya bagi negara berkembang. Mula-mula dalam UNCTADI (1964) negara berkembang menuntut pelaksanaan sebuah sistem preferensi umum dalam hal penurunan sebelah pihak bea di negara industri untuk produk ekspor mereka. Namun, karena sistem preferensi yang sebelah pihak terhadap sejumlah negara (hanya negara berkembang) akan merupakan sebuah pelanggaran terhadap prinsip klausul prioritas (Pasal I anggaran dasar GATT), pertama-tama harus ada kesesuaian dalam GATT. Pada Bagian IV (ditambahkan tahun 1965) dalam anggaran dasar GATT mengenai perdagangan dan pembangunan, memang negara industri menyingkirkan penanganan resiprositas dari pihak negara berkembang, tetapi di lain pihak tidak mengandung sistem preferensi umum.

Untuk mendukung keinginan akan terbentuknya sebuah sistem preferensi umum, Kelompok 77 dalam konferensi UNCTAD II (1968) berhasil mengeluarkan resolusi yang mengakui sebuah sistem preferensi umum: a. tidak melakukan resiprositas (negara berkembang yang diuntungkan tidak wajib memberlakukan keringanan pajak yang serupa); b. tidak melakukan diskriminasi (preferensi berlaku untuk semua negara berkembang); c. berlaku umum (preferensi pada prinsipnya diberikan oleh semua negara industri). Diharapkan sistem preferensi ini dapat direalisasi sampai tahun 1970; ke-

cuali Australia yang sejak tahun 1966 memberikan keringanan untuk negara berkembang secara umum, sampai waktu yang ditetapkan tidak ada negara industri lain yang bersedia melakukannya. Akhirnya, 26 Juni 1971 pihak-pihak penandatanganan dalam GATT menyetujui sistem preferensi GATT melalui izin pengecualian (*waiver*, sesuai Pasal XXV Ayat 5 anggaran dasar GATT) dan memberikan jangka waktu 10 tahun penandatanganan kewajiban prioritas. Dengan landasan sistem preferensi umum yang mendasar ini, beberapa kelompok negara industri menjalankan sistem-sistem preferensi mereka yang spesifik. Pendahulunya adalah ME (1 Juli 1971) dalam rangka Perjanjian Lome dan preferensi khusus untuk Negara AKP; negara industri lain menjalankan sistem preferensi sendiri; AS membutuhkan waktu lebih dari 6 tahun untuk memberlakukan sistem preferensi umum, mulai 1 Januari 1976. Setelah berlangsung perluasan ME tahun 1975, 1982, 1985 dan pengambilalihan sistem preferensi umum ME oleh enam negara yang baru masuk, di wilayah negara industri Barat ada berbagai sistem preferensi umum. Negara-negara Eropa Timur seperti Hongaria, Cekoslowakia, Bulgaria, Polandia, dan Uni Soviet juga memberikan keringanan bea bagi negara berkembang.

Puncak sementara dialami negara berkembang dalam memperjuangkan posisi negara berkembang pada 28 November 1979 (Putaran Tokyo) dengan keputusan GATT dan pihak-pihak berkepentingan mengenai perlakuan prioritas terhadap negara ber-

kembang (→ *enabling clause*). Pada konferensi di Beograd 14 April 1988, 48 negara berkembang dalam Kelompok 77 menandatangani sebuah persetujuan sistem global preferensi perdagangan antar negara berkembang yang dapat saling meringankan perdagangan di antara mereka. Perjanjian ini merupakan sebuah instrumen murni dari integrasi Selatan-Selatan yang berada dalam kewajiban prioritas sendiri. Sebuah Komite Negara-Negara Anggota merupakan organ pembentuk keinginan (biasanya berdasarkan prinsip konsensus). Direncanakan keringanan istimewa dalam rangka sistem preferensi perdagangan global untuk negara berkembang yang paling sedikit berkembang.

Kepustakaan: A. Bormann/Chr. Bormann/M. Steeger, *Das Allgemeine Zollpräferenzsystem der EG*, Hamburg 1979; F. Franzmeyer/H. Petersen (ed.), *Neuorientierung in den Beziehungen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und den Entwicklungsländern*, Berlin 1984; E. Westreicher, *Der Grundsatz der Gegenseitigkeit in den Handelsbeziehungen zwischen Industrie- und Entwicklungsländern*, Berlin 1984. wh

slums → tempat tinggal.

snob-effect → *external economies*.

SNPA → LLDC.

social demand approach → ekonomi pendidikan.

Soekarno (1901-1970) salah seorang pemimpin terpenting Dunia Ketiga dalam perjuangan kemerdekaan politik, menjadi simbol persatuan Indonesia dan pembebasan nasional di zaman kolonial Belanda. Setelah merdeka tahun 1949 menjadi presiden Indonesia dan menyatukan kekuasaan pada dirinya-tidak saja karena pertikaian partai-partai politik. Soekarno memformulasikan konsep sebuah demokrasi dipimpin dan jalan pema-

ngunan melalui *nasionalisasi dan pengambilalihan perusahaan oleh negara (tahap nasional dan demokrasi) menjadi sebuah ekonomi sosialis. Masalah ekonomi yang terus meningkat, keikutsertaan kelompok komunis dalam kekuasaan dan haluan konfrontasi terhadap Malaysia, menimbulkan usaha sebuah kudeta tahun 1965. Soekarno tersingkir dari seluruh jabatan yang ada padanya, dua tahun setelah peralihan kekuasaan.

Kepustakaan: B. Dahm, *Sukarnos Kampf um Indonesiens Unabhängigkeit*, Frankfurt/Berlin 1966. dn

Somalia Dengan *pendapatan per kapita 170 US\$ (1989), Somalia adalah negara termiskin di negara berkembang, termasuk kelompok negara-negara LLDC dan MSAC. Dalam tahun-tahun terakhir negara ini menderita karena kekeringan (→ Zone Sahel) maupun pertentangan politik (Ogaden) sehingga mengangap perlu untuk menukar haluan politik dunianya.

1. Alam Somalia (luas: 637.657 km², ibu kota: Mogadishu) bercirikan miskin hujan dan temperatur yang tinggi, sebagian negeri kebanyakan merupakan sabana yang kering hanya memungkinkan peternakan nomad atau setengah nomad. Hanya daerah-daerah pengairan di sepanjang pantai dan satu-satunya daerah antara dua sungai (Juba, Shebelle) di Somalia yang memiliki air secara teratur, memungkinkan dilakukan *perkebunan (pisang, tebu). Kecuali tambang-tambang bijih besi, gips, kapur, dan berilium, Somalia miskin akan sumber mineral yang layak ditambang.

2. Sebanyak 40% penduduk (tahun 1989: sekitar 6 juta jiwa, selain

itu 839.000 *pengungsi dari Ogaden) adalah nomad dan merupakan kelompok yang secara budaya dan etnis homogen. 95% penduduk termasuk suku-suku Kuschit Somalia (Digil, Dir, Issas, Hawiya, dll.), ditambah kelompok penduduk negrito (sekitar 100.000 suku Bantu), 30.000 orang Arab serta minoritas India, Pakistan, Inggris, dan Italia. Sejak tahun 1972 bahasa Somalia menjadi bahasa resmi, sedangkan bahasa Arab, Italia, dan Inggris merupakan bahasa perdagangan. Agama resmi adalah Islam Suni (4.000 penganut Kristen, kebanyakan Katolik). Pertumbuhan penduduk 3%/tahun (1980-1989), tingkat harapan hidup rata-rata 48 tahun (1989) dan tingkat urbanisasi 34% (1985), merupakan ciri keadaan demografinya. Pelayanan kesehatan pada umumnya sangat kurang. Sekitar 90% penduduk tani dan nomad tidak mendapat pelayanan kesehatan. Kamp-kamp dipadati pengungsi-pengungsi dari Etiopia akibat pertikaian Ogaden, menambah permasalahan bagi pelayanan kesehatan. Dengan angka 128 kematian bayi per 1.000 kelahiran, Somalia mempunyai angka kematian bayi tertinggi di dunia. Dalam rangka perubahan masyarakat Somalia yang diprakarsai Presiden S. Barre dan didukung ide-ide sosialisme dan Islam, bidang pendidikan berperan penting untuk mobilisasi penduduk. Negara menyediakan 8% anggaran untuk pendidikan. Angka buta aksara adalah 88%.

3. Pertanian (tahun 1989: 65% PDB, menyerap 65% penduduk), mendominasi perekonomian Somalia. Titik berat pertanian adalah peter-

nakan, yang menghasilkan lebih dari 2/3 ekspor (hasil peternakan, pisang, sayuran, kayu, kapas, tumbuhan merambat). Mitra dagang utama *Negara AKP adalah Saudi Arabia dan Italia (masing-masing 20%-25%) serta Uni Soviet (10%). Sejak awal tahun 1985 Somalia berusaha menggalakkan ekspor dalam rangka penyehatan ekonomi yang dibantu IMF, (a.l. melakukan devaluasi *shilling* Somalia). Sehubungan dengan utang luar negeri yang tinggi (tahun 1985: 53,5% PNB), produksi pertanian yang sedikit akibat musim kering mengakibatkan ketergantungan pada impor pangan, terutama dari negara-negara Barat (Italia, terutama ME). *Industrialisasi masih berada pada tahap awal, digunakan untuk substitusi impor dan mengolah produk-produk pertanian dalam negeri. Upah yang tinggi di negara-negara Teluk telah menarik pekerja-pekerja pendatang Somalia (saat ini 350.000 pekerja) dan telah mengakibatkan *brain drain* terus-menerus.

4. Ujung Afrika ini di abad ke-19 menjadi ajang konflik kepentingan antara Perancis (tahun 1884/1885: Jibouti), Inggris (tahun 1886: protektorat Somalia-Inggris), Italia (tahun 1889: Somalia-Italia), dan Etiopia yang memperluas daerahnya ke Timur. Somalia-Italia dan Somalia-Inggris 1 Juli 1960 memproklamasikan kemerdekaan dan menyatukan diri menjadi Republik Somalia. Tujuan dalam UUD tahun 1961, yaitu menyatukan kembali rakyat Somalia yang terpecah menjadi tiga oleh garis perbatasan dengan Etiopia dan Kenya, merupakan penyebab pertikaian terus-menerus dengan Etiopia dan Kenya.

Pendekatan politik ke Barat oleh Presiden Shermarke dan Perdana Menteri Egal menyulutkan kembali ketegangan dengan negara-negara tetangganya setelah pernah terjadi masa perdamaian ketegangan yang dibina sejak tahun 1967. Setelah Shermarke terbunuh (1969) dan militer dipimpin Jenderal M.Z. Barre mengambil alih kekuasaan, Somalia diubah menjadi Republik Demokrasi Somalia dengan orientasi sosialis dan memakai sistem partai tunggal (SRSP/*Somali Revolutionary Socialist Party*) serta memiliki Dewan Revolusi (SRC/*Supreme Revolutionary Council*). Untuk mendapat dukungan para ulama Islam, Barre menekankan kebersamaan antara Islam dengan sosialisme ilmiah. Unsur-unsur penting politik pembangunan Somalia yang sosialis adalah nasionalisasi industri-industri kunci, begitu pun tanah, rencana pembangunan otosentris dan *Land Orientation Centres*, yang bertujuan meningkatkan mobilisasi dan partisipasi penduduk. Bersamaan dengan kecondongan di negara-negara Arab, hubungan dengan negara-negara kubu sosialis dipererat. Armada Uni Soviet mendapat hak berlabuh di sana dan mempersenjatai tentara Somalia menjadi yang terbaik di Afrika Hitam. Barre menyatukan kekuasaan sosial dan politik dalam dirinya: tahun 1969-1976 Ketua Dewan Revolusi Tertinggi, sejak tahun 1976 presiden (dikukuhkan tahun 1986 melalui pemilihan umum), kepala pemerintahan (sejak Januari 1987 dengan Perdana Menteri Ali Samantar) dan Sekretaris Jenderal SRSP. Barre membantu secara militer gerakan Front Pem-

bebasan Somalia Barat (WSLF) dalam perjuangannya merebut Ogaden, kini hampir seluruhnya dikuasai oleh WSLF. Tahun 1977 mulai berlangsung pertukaran haluan politik luar negeri. Penasihat-penasihat militer dan sipil Uni Soviet diusir karena Uni Soviet maupun Kuba telah membantu Etiopia sehingga Ogaden direbut kembali oleh lawan dengan kekalahan Somalia. Di pihak lain, hubungan Somalia dengan negara-negara Arab yang konservatif (Saudi Arabia, Uni Emirat Arab) yang ingin tetap mempertahankan pengaruh Arab di kawasan Laut Merah menjadi baik, demikian juga dengan negara-negara Barat yang tetap menolak memberikan bantuan militer besar-besaran kepada Somalia. Ketegangan dengan Etiopia akhir-akhir ini terlihat agak mereda. Kedua pihak yang bertikai ini kehabisan nafas menghadapi kemiskinan, kelaparan, dan penyakit, dan sejak awal tahun 1986 mengadakan pembicaraan-pembicaraan perdamaian. Hubungan dengan Kenya (Somalia membuang gagasan penyatuan kembali yang tercantum dalam UUD tahun 1979) dan Jibouti baik. Dengan Yaman dan Sudan dibuat suatu perjanjian kerja sama kawasan Laut Merah. Dengan AS disepakati kerja sama di bidang militer tahun 1981 (bantuan militer AS, manuver bersama, penggunaan pelabuhan laut dan udara oleh angkatan bersenjata AS).

Januari 1991 *United Somalian Congress* (UNC) setelah beberapa minggu perjuangan berhasil menggulingkan Presiden M.Z. Barre, dan mengangkat Ali Mahdi Mohamed sebagai presiden baru. Sementara itu,

pertikaian bersenjata di bagian selatan negara itu terus berlangsung.

Kepustakaan: P. Decraene, *L'expérience socialiste somalienne*, Paris 1977; V. Matthies, *Der Grenzkonflikt Somalias mit Äthiopien und Kenia*, Hamburg 1977; H. Heinzmeier, "Der Konflikt am Horn von Afrika", dlm.: *APuZ* 16/1978; I.M. Lewis, *A Modern History of Somalia*, London 1980; Th. Labahn, "Somalia", dlm.: *HDW II*, 5, Hamburg 1982, hlm. 82 dst; Die Welt, "Blutige Unruhen: überziehen Afrika", 16-10-1991, dlm.: *BMZ - Spiegel der Presse*, 21/91.

ah
sosialisme Pengertian sosialisme di "Dunia Ketiga sangat luas dan beraneka ragam serta tidak dapat dibatasi hanya pada beberapa unsur pengertian. Pengertian sosialisme di negara-negara Eropa secara teoretis berarti penghapusan hak milik pribadi atas alat-alat produksi untuk menciptakan suatu masyarakat yang lebih bebas dan harmonis sebagai sesuatu yang mendasar dan dampak perubahan revolusioner hubungan produksi sebagai tujuan politik gerakan-gerakan sosialis dan partai-partai. Program politik gerakan dan partai sosialis di Dunia Ketiga lebih luas. Dasar-dasar penting gerakan sosialisme Dunia Ketiga adalah: a. persyaratan dan perkembangan masyarakat di Dunia Ketiga yang berbeda (a.l. tidak ada feodalisme, keterbelakangan "industrialisasi, dominasi sektor pertanian, yang berarti tidak samanya basis dengan suprastruktur); b. keinginan negara berkembang akan "Jalan Ketiga sendiri di antara kapitalisme dan komunisme, yang menolak model-model masyarakat yang diciptakan bangsa-bangsa di Eropa; c. usaha untuk menghubungkan warisan budaya dan masyarakat prakolonial dengan sosialisme, serta menjelaskan

kondisi masyarakat prakolonial sebagai gagasan-gagasan pokok perkembangan sosialisme; d. titik beratnya khas anti-kolonialisme, anti-imperialisme, dan perjuangan kemerdekaan negara berkembang, serta pengalaman-pengalaman yang telah dibuat; e. struktur konflik dan tujuan politik untuk mengubah hubungan antara negara berkembang dan negara industri akibat ketergantungan struktural dan keterbelakangan, serta dampak perbedaan pembentukan ekonomi, negara dan masyarakat yang diakibatkannya; f. konfrontasi ideologi sosialisme yang berbeda-beda di tingkat dunia, terutama jalan pembangunan yang berbeda di kubu sosialisme yang dominan (Uni Soviet, RRC); g. pengalaman konkret sistem sosialisme di negara berkembang dan dampak baliknya pada konsep sosialisme di Dunia Ketiga.

Pada gilirannya pengertian sosialisme di Dunia Ketiga memberikan jawaban pada tantangan-tantangan khusus emansipasi politik dan masyarakat, yang dihadapi oleh berbagai negara berkembang dengan berbagai tahap pembangunannya. Dengan latar belakang ini berkembang berbagai teori dan variasi sosialisme (sosialisme Arab, Afrika, Islam, Kuba, Cile, Birma, dll. Lihat juga tulisan mengenai negara-negara dalam kamus ini serta → nasserisme, *ujamaa*).

Kepustakaan: S. Rose (ed.), *Socialism in Southern Asia*, London dll. 1959; G. Grohs (ed.), *Theoretische Probleme des Sozialismus in Afrika*, Hamburg 1971; R. Debray/S. Allende, *Der chilenische Weg*, Neuwied dll. 1972; A.M. Said, *Arab Socialism*, London 1972; B. Tibi, *Militär und Sozialismus in der Dritten Welt*, Frankfurt 1973; J.K. Nyerere, *Afrikanischer Sozialismus*, edisi ke-2, Stuttgart

1974; O. Silveira, *Africa South of the Sahara. Party Systems and Ideologies of Socialism*, Upsala 1976; H.C.F. Mansilla, *Der süd-amerikanische Reformismus*, Rheinstetten 1977; W. Pfenning dli. (ed.), *Entwicklungsmodell Tanzania: Sozialismus in Afrika*, Frankfurt/New York 1980; D. Senghaas, "Sozialismus. Eine entwicklungsgeschichtliche und entwicklungstheoretische Betrachtung", dlm.: *Leviathan* 8/1980, hlm. 10 dst.; A.M. Babu, *African Socialism or Socialist Africa*, London 1981; G. White, "Entwicklungsstaaten und sozialistische Entwicklung in der Dritten Welt", dlm.: *Österreichische Zeitschrift für Soziologie*, No. 4, 1984.

dn

sosialisme Arab → Irak, nasserisme, sosialisme, Suriah.

SPARTECA (*South Pacific Regional Trade and Economic Cooperation Agreement*) Perjanjian Pasifik Selatan mengenai Kerja Sama Perdagangan Regional, disepakati oleh negara-negara anggota SPEC dan diratifikasi tahun 1981. Perjanjian ini ingin membuka akses bebas bea dan tidak bersifat resiprositas ke pasar-pasar terbesar di kawasan tersebut, Australia dan Selandia Baru, untuk ekspor dari negara-negara pulau di Pasifik Selatan.

fn

SPC (*South Pacific Regional Commission*) Komisi Regional Pasifik Selatan, didirikan tahun 1947 oleh bekas penguasa kolonial dan mandat (sebagian masih ada) untuk mengkoordinasi kepentingan kolonial bersama di kawasan Kepulauan Pasifik Selatan. Gremium yang melakukan rapat setiap tahun dengan anggota 25 negara/wilayah, sampai kini tidak menjadi inti organisasi politik kerja sama untuk mendapatkan otonomi regional karena negara-negara adikuasa yang ada tidak saja memberikan sebagian besar anggaran di sana, tetapi juga warna politik.

fn

SPEC (*South Pacific Bureau for Economic Cooperation*) Biro Kerja Sama Ekonomi Pasifik Selatan, didirikan tahun 1973 oleh SPF, bertujuan menguatkan kerja sama antarnegara di Pasifik Selatan dalam bidang lalu lintas, perdagangan, turisme, dan perikanan.

Proyek-proyek kerja sama: *Pacific Forum Line*, *South Pacific Trade Commission* (di Australia), *Association of South Pacific Airlines* (Koordinasi Perusahaan Penerbangan Regional), *South Pacific Fisheries Agency* (tahun 1977 penciptaan sebuah zone ekonomi 200 mil laut), *South Pacific Regional Disaster Fund*, dan *South Pacific Regional Environment Programme*.

fn

Special Drawing Rights → SDR.
SPF (*South Pacific Forum*) Forum Pasifik Selatan, didirikan tahun 1971 oleh negara-negara kepulauan Pasifik Selatan yang saat itu sudah mampu mengadakan perundingan, sebagai konsekuensi gerakan pembebasan tahun '60-an yang makin gencar dan protes terhadap pengendalian pihak luar melalui SPC. Anggota (1980): Australia, Selandia Baru, Kepulauan Cook, Fiji, Kiribati, Nauru, Niue, Papua Nugini, Tonga, Samoa, Kepulauan Salomon, Tuvalu, Vanuatu, Kepulauan Marshall, dan Serikat Kepulauan Mikronesia. Selain kritik terhadap politik kolonial dan percobaan atom di kawasan tersebut yang sering dinyatakan SPF melalui banyak resolusi, tahun 1973 juga didirikan SPEC sebagai gremium selanjutnya dari kerja sama Pasifik Selatan. Politik kerja sama dalam rangka SPF dan SPEC didukung oleh organisasi-organisasi

internasional (*ESCAP, *ADB, ME). Dalam rangka pembentukan Kelompok Ujung Tombak Melanesia tahun 1988 (Vanuatu, Papua Nugini, Kepulauan Salomon), muncul kritik yang gencar bahwa pembentukan asosiasi-asosiasi subregional akan mengancam persatuan kelompok-kelompok negara di kawasan tersebut.

fn spill-over-effect Menggambarkan pengambilalihan tujuan; perilaku; teknik produksi; hasil sebuah sektor, sebuah bidang, sebuah usaha oleh satuan-satuan lain. Konsep *spill-over* dalam teori karena adanya suatu ketidakseimbangan dan memandang ketidakseimbangan ini sebagai fungsional untuk kemajuan di sektor-sektor lain, atas dasar fakta interdependensi (saling ketergantungan) bereaksi dengan menyamakan diri ke tingkat sektor yang lebih berkembang. → teori dan strategi pertumbuhan, → *unbalanced growth*.

dn spot checks → evaluasi.

spread effects → teori perdagangan luar negeri.

SPREP (South Pacific Regional Environment Programme) Program lingkungan negara-negara anggota *SPEC, disepakati tahun 1980 di Noumea/Kaledonia Baru.

mm SPTDP (South Pacific Telecommunication Development Programme) Program Regional Negara-Negara anggota *SPEC untuk pembangunan telekomunikasi, disepakati tahun 1983 di Canberra/Australia.

dn squatters Orang yang menetap di atas tanah tanpa status (ilegal) dan mendirikan tempat tinggal. Pondok-pondok yang didirikan biasanya sangat primitif, tanpa pengadaan air dan

listrik, tanpa pelayanan pembuangan sampah sehingga terbentuk kecenderungan pembentukan slums. *Squatters* secara umum termasuk lapisan penduduk termiskin.

dn Sri Lanka Republik Sosialis Sri Lanka, sampai tahun 1972 bernama Ceylon, merdeka sejak tahun 1948. Anggota *Commonwealth*, merupakan negara pertanian dengan masalah-masalah besar dalam memenuhi pengadaaan kebutuhan sendiri bagi penduduk. Selain pembangunan pertanian kini diinginkan industrialisasi dalam rangka orientasi ekonomi pasar dan peningkatan ekspor, agar dapat mengatasi masalah pengangguran (Sri Lanka termasuk *MSAC). Konflik suku Tamil dengan kerusuhan mirip perang saudara, tetap sangat membahayakan.

1. Pulau Sri Lanka yang terletak di ujung tenggara India (luas: 65.610 km²) terbagi atas 3 wilayah: dataran rendah yang lembab terletak di pantai barat daya, merupakan daerah perekonomian dan pemukiman utama (50% penduduk hidup di 20% wilayah Sri Lanka); daerah pegunungan di pedalaman bagian selatan (perkebunan teh); dataran rendah yang kering di pantai barat laut, timur, dan timur laut (sekitar 60% wilayah Sri Lanka dengan hanya sekitar 20% penduduk). Sri Lanka relatif miskin akan kekayaan tambang, tetapi memiliki potensi pertanian dan perhutanan yang besar karena situasi iklimnya. Titik berat pertanian sejak masa kolonial Inggris (sejak tahun 1796; sebelumnya Portugis: tahun 1505–1658, Belanda: tahun 1658–1796) adalah monokultur yang berorientasi ekspor (teh, karet,

produksi kelapa, serta rempah-rempah) sehingga menciptakan orientasi besar ekonomi Sri Lanka keluar. Usaha tani kecil ditelantarkan sehingga (sampai kini) harus diimpor beras untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

Perkebunan dan perbankan, perdagangan ekspor dan impor mula-mula hanya berada di tangan orang Eropa.

2. Penduduk Sri Lanka (tahun 1989: 17 juta; 249 penduduk/km²) mempunyai penduduk remaja yang tinggi (tahun 1989: 32,5% di bawah 15 tahun), sedangkan angka pertumbuhan penduduk relatif rendah (tahun 1980-1988: 1,5%) yang diakibatkan terutama oleh migrasi balik orang Tamil-India ke India Selatan tahun 1964 dan usaha-usaha keluarga berencana yang relatif berhasil. Urbanisasi di Sri Lanka dengan kenaikan antara 19,1%-21% (1963-1989) relatif kecil, sebagai hasil pembangunan pedesaan yang dilakukan setelah merdeka. Sekitar 1/5 penduduk kota hidup di ibu kota Kolombo (tahun 1985: 664.000 penduduk), di antaranya sekitar 60% hidup di daerah *slums* (→ tempat tinggal).

Ciri yang berlaku pada masyarakat Sri Lanka adalah segmentasi etnis, kepercayaan, bahasa, dan regional. Orang Singhala (tahun 1981: 74%) merupakan kelompok penduduk yang dominan, kemudian 30% Tamil terpecah dalam 2 kelompok: Tamil-Sri Lanka (12,7%) hidup di daerah timur dan utara Sri Lanka serta Tamil-India-orang Sri Lanka termiskin (5,5%; sejak abad lalu datang dari India Selatan sebagai tenaga kerja sangat murah di daerah perke-

bunan). Selain itu, orang Moor (7,1%, keturunan pedagang Arab) sebagai minoritas, hidup di daerah timur pulau itu.

Pembagian kepercayaan sesuai dengan pembagian etnis; tahun 1981: 69,3% beragama Buddha (Singhala), 15,5% Hindu (Tamil), 7,6% Islam (Moor), dan 7,6% Kristen (6,9% Katolik). Bahasa Singhala dan Tamil adalah bahasa nasional (sejak peralihan pemerintahan tahun 1977, bahasa Inggris dan bahasa Tamil yang disingkirkan oleh Presiden Bandaranaike, digunakan kembali).

3. Pertanian merupakan bidang ekonomi pokok Sri Lanka. Bidang ini tahun 1985 menyerap sekitar 54% angkatan kerja dan tahun 1989 memberikan sekitar 26% kontribusi ke PDB, serta sekitar 60% ke ekspor. Namun, pertanian menghadapi masalah terlalu tuanya kondisi pohon (teh dan karet), dan kegagalan panen akibat musim kering (terutama pada beras dan kelapa). Dengan demikian, indeks produksi pangan per penduduk dari 100 (1979) menjadi 77 (1978). Tahun 1988 sekitar 37% anak di bawah usia 5 tahun menderita kurang makan yang akut.

Setelah tahun 1977 dengan akhir pemerintahan Bandaranaike yang menjalankan strategi sosialis-kolektif, berlangsung liberalisasi perdagangan luar negeri dan penghidupan kembali inisiatif pengusaha swasta; semua ini memberikan impuls-impuls baru untuk perekonomian. Namun, industrialisasi Sri Lanka masih berada pada tahap awal (sampai kini terutama produksi bahan makanan, tekstil, dan pengolahan minyak bumi). Mes-

kipun demikian pangsa industri pada PDB tahun 1965–1989 naik dari 21% menjadi 27% dan pangsa ekspor barang naik dari 1% menjadi 27%. Dengan pembangunan zone-zone produksi ekspor (→ enklave) pemerintah a.l. melalui rangsangan pajak, berusaha menarik investor asing. Turisme sangat mundur akibat konflik Tamil. Sebuah sumber devisa yang penting adalah banyaknya tenaga kerja yang bekerja di luar negeri. Situasi ekspor ke pasar dunia menguntungkan Sri Lanka terutama karena naiknya harga pasar dunia untuk teh (*terms of trade*: tahun 1980: 100; tahun 1986: 111). Pengangguran merupakan sebuah masalah besar: tahun 1986 (diperkirakan) 25%; jumlah besar remaja yang hanya memiliki ijazah pendidikan menengah. PNB tahun 1989 (didistribusi sangat tidak merata) per kapita rata-rata 430 US\$; utang tahun 1986 mencapai 17% ekspor. Di atas 1/4 penduduk hidup di bawah batas miskin.

Sri Lanka memiliki angka buta aksara terendah di Asia (tahun 1985: 12,9% penduduk di atas 15 tahun), yang merupakan hasil dari pendidikan sekolah, sejak tahun 1951 tidak dipungut bayaran. Sri Lanka juga memiliki pelayanan kesehatan yang relatif baik dan tidak dipungut bayaran (tahun 1989: 1 dokter untuk 5.520 penduduk; tingkat harapan hidup: 71 tahun). A. Ariyaratne mendirikan gerakan *Sarvodaya-Shramadana* di Sri Lanka yang ingin meningkatkan bantuan untuk swadaya di daerah pedesaan dengan berlandaskan filsafat dan prinsip hidup Buddha.

4. Dalam UUD tahun 1948 dan 1972 Sri Lanka mengikuti model Westminster, tahun 1978 dijalankan sistem pemerintah presidential menurut model Perancis (Presiden pertama: J.R. Jayewardene) dan pemilihan dengan mayoritas relatif digantikan pemilihan perbandingan.

Setelah merdeka bergantian berkuasa *United National Party* (UNP: tahun 1948–1956, 1960, 1965–1970, sejak tahun 1977) yang konservatif, multietnis, dan berorientasi Barat, dengan *Sri Lanka Freedom Party* (SLFP: tahun 1956–1960, 1960–1965, 1970–1977) merupakan partai orang Singhala, bersifat nasionalis, budhisme, dan sosialis. Tahun 1977 UNP dengan Jayewardene mendapat kemenangan besar (50,9% suara, tetapi 83,3% kursi) di atas Nyonya Bandaranaike dengan SLFP (29,7%; 4,8% kursi). Partai oposisi terkuat adalah *Tamil United Liberation Front* (TULF: 6,7%; 10,7%) yang menginginkan pemisahan Tamil di daerah utara dan timur. Untuk mengkonsolidasi dominasi UNP, Presiden Jayewardene Desember 1982 mengadakan referendum yang berhasil memperpanjang masa kerja parlemen yang seharusnya berakhir tahun 1983, menjadi tahun 1989.

Konflik etnis antara orang Singhala dan minoritas Tamil sejak tahun 1956 telah banyak menimbulkan kerusuhan, kemudian menajam tahun 1983 dengan adanya kerusuhan anti-Tamil dan keputusan mengeluarkan TULF dari parlemen, yang kemudian menimbulkan situasi mirip perang. Pemberontakan Tamil sejak tahun 1983 diorganisir dari daerah India dan

paling tidak didukung secara tidak langsung dari India (terutama oleh politisi dan penduduk Tamil Nadu di India Selatan). Presiden Jayewardene sejak tahun 1983 mempersenjatai tentara Sri Lanka dan berusaha mendapatkan dukungan negara-negara lain yang tidak disukai India (yang pasti adalah bantuan militer dari Pakistan dan Israel). Di samping lemahnya militer, pemerintah karena alasan-alasan politik dalam negeri tidak mampu menyelesaikan konflik ini secara keras dengan senjata, melainkan sekaligus melakukan perundingan mengenai otonomi dengan kaum separatis. Suatu perubahan konflik terjadi awal tahun 1987 ketika organisasi gerilya *Liberation Tigers of Tamil Eelam* (LTTE) memulai pembangunan administrasi politik sendiri di Semenanjung Jaffna. Ketika Mei 1987 tentara Sri Lanka memulai serangan untuk merebut kembali Jaffna, India (seperti Sri Lanka adalah anggota penting dalam 'nonblok') masuk ke wilayah udara Sri Lanka dan melemparkan bahan makanan ke daerah timur dan barat. Ini merupakan tanda yang jelas dukungan India terhadap gerakan ini. Pemerintah pusat India terutama ingin menghindarkan internasionalisasi konflik ini, sekaligus mendemonstrasikan peran India sebagai penguasa regional. Selain itu, India juga mengkhawatirkan penyebaran tendensi separatis ke wilayah sendiri. 29 Juli 1987 ditandatangani perjanjian antara India dan Sri Lanka yang berisi a.l. mempertahankan persatuan Sri Lanka; reformasi propinsi yang memberikan otonomi bagian kepada orang Tamil; pengiriman tentara

perdamaian India (PKF), yang menerima penyerahan senjata LTTE, untuk menjaga terlaksananya perjanjian; amnesti untuk gerilyawan. Setelah terjadi kegagalan realisasi perjanjian ini, India menguatkan kontingen PKF dari 6.000 (diperkirakan) menjadi 100.000 tentara (sama artinya dengan invasi ke Sri Lanka) dan sebuah penyerangan besar berhasil menguasai Jaffna. Namun, hal ini tidak menyebabkan muncul perdamaian di Sri Lanka, gerilyawan dapat bertahan di bagian timur negara itu. Di Sri Lanka makin banyak terjadi teror yang dilakukan LTTE Tamil dan *Janata Vimukti Peramuna* (JVP) Singhala yang radikal dan nasionalistis, sejak adanya perjanjian dengan India menacitakan perang terutama terhadap anggota-anggota UNP yang memerintah.

Pada pemilihan presiden Desember 1988 (dalam kampanye terjadi sekitar 650 pembunuhan), kepala pemerintah Premadasa (UNP) menang sedikit di atas Nyonya Bandaranaike (44,9%) yang menuduh pemerintah melakukan manipulasi pemilu. Akibat adanya teror, keikutsertaan dalam pemilu hanya 55%. Pemilihan parlemen Februari 1989 kembali ditandai oleh aksi-aksi kekerasan; memberikan kemenangan bagi UNP. Presiden Premadasa berjanji akan memerangi kemiskinan, mengadakan usaha-usaha baru untuk mencari jalan keluar dari konflik etnis serta mengusir PKF. Peluang suksesnya dapat dikatakan kecil.

Kepustakaan: K.M. de Silva (ed.), *Sri Lanka, A Survey*, Hamburg 1977; A.J. Wilson, *The Gaullist System in Asia, The Constitution of Sri Lanka* (1978), London 1980; J. Donner,

"Sri Lanka", dim.: *HDW II*, 7, Hamburg 1983, hlm. 226 dst.; C.D. Maass, "Sri Lanka: Frieden durch Intervention Indiens?", dim.: *Jahrbuch Dritte Welt* 1989, München 1988. **bh/rn**

SSA → politik bantuan pembangunan AS.

STABEX Sistem dan dana untuk Stabilisasi hasil Ekspor Negara AKP untuk bahan dasar pertanian dalam perdagangan dengan ME. STABEX yang diatur dalam rangka Perjanjian Lome dapat disamakan dengan jaminan untuk tahun-tahun panen yang buruk. Negara-negara AKP dapat menarik kredit dari dana jika produk yang terjamin dalam STABEX mengalami situasi kegagalan panen, turunnya harga, dsb. sehingga dapat menderita kerugian dalam hasil ekspor. Untuk itu ada dua aturan: a. produk tersebut harus memiliki pangsa minimal dalam ekspor keseluruhan (semacam ambang ketergantungan); b. kerugian harus melampaui bagian tertentu dari hasil penjualan produk rata-rata dibandingkan empat tahun sebelumnya (semacam ambang penyebab).

Jadi, STABEX menstabilkan hasil ekspor nominal, bukan riil, untuk komoditas ekspor tertentu dari negara tertentu. Oleh karena itu, diperlukan indeksasi harga bahan mentah, yang memang diajukan UNCTAD, tetapi ditolak oleh negara industri. Mula-mula 29 komoditas dicakup dalam STABEX (Lome I). Daftar komoditas terus meningkat menjadi 34 (1979), di Lome II (1980) 44, dan di Lome III (1985) 48. Dana untuk membiayai STABEX dalam Lome I berjumlah 382 juta ERE, bertambah menjadi 557 juta ERE di Lome II, dan 925 juta ECU di Lome III.

Ambang ketergantungan dan ambang penyebab pada mulanya 7,5% dan paralel diturunkan menjadi 6,5% dalam Lome II (serat sisal 5%) dan 6% di Lome III (serat sisal 4,5%). Untuk LLDC di antara negara-negara AKP ambang ini terletak lebih rendah: di Lome I: 2,5%, Lome II: 2%, dan Lome III: 1,5%. Negara-negara ini yang sekitar 42% penduduknya masuk dalam kelompok negara AKP, selanjutnya memperoleh keuntungan karena mendapatkan STABEX sebagai tunjangan, sementara negara berkembang lain mendapatkannya sebagai kredit tanpa bunga. Pengalaman sampai tahun 1981 memperlihatkan bahwa 88% transfer STABEX untuk 3 komoditas (kopi, kakao, kacang tanah) dan 73% dana mengalir ke 5 negara AKP (dari 46 yang dulu berhak).

STABEX II (1980-1985) memperlihatkan bahwa dana yang tersedia menjadi sedikit untuk dapat menunjang dampak jatuhnya harga di pasar bahan mentah (terutama kopi dan kakao). Meskipun jumlah dana meningkat 70,7 juta ERE, tetapi hanya dapat memenuhi 46,5% permintaan yang berhak dari LLDC dan hanya 41,9% tuntutan negara berkembang lain. Penggunaan STABEX yang telah dibayarkan adalah bebas (berbeda dengan SYSMIN yang ditetapkan dalam Lome II untuk produk pertambangan). Namun, dalam Lome III disepakati sebuah aturan yang mewajibkan negara berkembang menjelaskan tujuan kegunaan dan memberikan laporan terbuka dari dana yang diberikan. Dengan demikian, ingin dijamin bahwa dana benar-

benar digunakan untuk rencana-rencana pembangunan. → fasilitas pembiayaan keseimbangan. dn/bt stabilitasi hasil ekspor → STABEX.

stand-by-loan → IMF.

St. Christopher (St. Kitts), Nevis, & Sombrero → Karibia.

studi kelayakan Studi proyek dalam bidang pendahuluan perencanaan proyek; prastudi proyek yang pada prinsipnya menguji masalah layaknya pelaksanaan sebuah proyek. dn

subsidi bunga Tunjangan ke negara berkembang untuk membantu pembayaran kembali kredit, terutama untuk mereka yang tidak mampu membayar kewajiban utang dari kredit yang dikenai bunga tinggi. Subsidi bunga praktis berarti penurunan tingkat bunga. dn

subsistensi → ekonomi subsistensi.

substitusi impor Industrialisasi melalui substitusi impor merupakan strategi pertama beberapa negara berkembang (terutama di Amerika Latin) untuk melakukan diversifikasi struktur produksi dalam negerinya. Substitusi impor ini kurang terencana, lebih bereaksi terhadap dampak krisis ekonomi, turunnya harga ekspor, dan jalur sempit impor yang disebabkan. Strategi ini merupakan pemanfaatan sebuah industri dalam negeri dengan mengikuti model barang konsumsi yang diimpor dari pasar dalam negeri yang terbatas. Jadi, tidak berkaitan dengan pembangunan industri barang investasi maupun produksi untuk masyarakat luas. Hal ini berakibat: a. berlangsung penarikan impor untuk barang investasi, bahan mentah, dan barang setengah jadi (be-

ban terus berlangsung atas neraca devisa); b. jumlah yang diminta (skala hasil) tetap sedikit sehingga dibandingkan dengan pasar dunia hanya dapat diproduksi dengan merugi sehingga industri yang substitusi impor harus dilindungi dari saingan asing melalui bea tinggi dan pengawasan devisa. Hal ini kembali menguntungkan usaha yang tidak produktif dan yang bekerja dengan ongkos tinggi serta berpengaruh negatif atas kemajuan teknik jika dilihat dari penggunaan kapasitas yang sedikit. Jika dilihat sekarang, dampak yang paling merugikan untuk politik substitusi impor ini adalah terhadap distribusi pendapatan. Dengan adanya perlindungan bea yang tinggi untuk menjaga industri dalam negeri, harga relatif dalam negeri disingkirkan untuk keuntungan industri dengan merugikan pertanian. Strategi substitusi impor memang menghasilkan efek pertumbuhan di beberapa negara berkembang, tetapi juga menghasilkan krisis sektor-sektor yang secara tradisional dominan (pertambangan, pertanian) dalam ekonomi keseluruhan. Dalam konsepnya, strategi ini mempunyai keterbatasan, yang menjadikannya gagal sebagai strategi industrialisasi.

Kepustakaan: B. Balassa dll., *The Structure of Protection in Developing Countries*, Baltimore and London 1971. dn

Sudan Pertikaian regional antara golongan utara yang berkebudayaan Arab dan beragama Islam dengan golongan Selatan berkulit hitam, kekecewaan terhadap harapan-harapan pembangunan serta letak geopolitis-nya yang penting di tepi Laut Merah, merupakan ciri Sudan yang tergolong

negara termiskin di antara negara berkembang (LLDC, MSAC).

1. Republik Sudan dengan luas 2.505.813 km² merupakan negara terluas di Afrika. Selain lembah Sungai Nil, tumpuan kehidupan bagi sebagian besar penduduk, daerah-daerah kering (padang pasir) di utara dan Sudan Tengah (ujung *Zone Sahel: Goz*) hanya memberikan kemungkinan kecil untuk pertanian. Sebelah selatan *Zone Goz*, di daerah banjir Sungai Nil, terdapat perladangan dengan irigasi yang potensial selain peternakan yang dilakukan tani kecil (kapas untuk ekspor, jagung, dan jawawut ekonomi subsistensi). Hanya sekitar 15% lahan produktif yang digunakan. Sudan memiliki sejumlah kekayaan tambang (a.l. besi, krom, tembaga, emas, penemuan minyak awal tahun '80-an), tetapi kebanyakan sukar untuk ditambang.

2. Tahun 1989 penduduk Sudan diperkirakan berjumlah 24 juta jiwa. Pertumbuhan penduduk (1980-1989) adalah 2,8%/tahun. Kota-kota mengalami pertumbuhan yang cepat. Dalam waktu 10 tahun urbanisasi meningkat dari 20,4% (1975) menjadi 22% (tahun 1989; ibu kota Khartum berpenduduk 1,3 juta jiwa). Struktur kependudukan Sudan ditandai keanekaragaman luar biasa budaya, etnis (450 kelompok etnis, 19 suku bangsa besar), dan bahasa (19 bahasa digunakan oleh lebih dari 100.000 orang, bahasa resmi: bahasa Arab). Di sebelah utara dan timur laut hidup kelompok-kelompok Arab atau yang dipengaruhi Arab yang beragama Islam (40%-50% penduduk) dan Nubier (10%), di sebelah barat hidup suku

Nuba (negro Sudan), dan di selatan penduduk terdiri atas Sudanide, Nilot, dan Nilohamit. Penduduk Sudan Selatan adalah penganut animisme dan Kristen; karena Islam adalah agama resmi, perbedaan-perbedaan agama dan etnis ini menimbulkan ketegangan-ketegangan politik yang langsung meningkat setelah kemerdekaan dan tahun 1983 pecah menjadi perang saudara. Sekitar 10% penduduk adalah nomad. Selain itu, di selatan hidup sekitar 700.000 pengungsi dari Etiopia, Uganda, Cad, dan Zaire.

3. Struktur perekonomian Sudan memperlihatkan Sudan sebagai negara pertanian yang bergantung pada pasar dunia. Pertanian yang sebagian besar dikuasai pemerintah, menghasilkan sekitar 1/3 PDB (1985), menyerap 2/3 angkatan kerja dan menghasilkan 95% nilai ekspor negara itu. *Cash crops* terutama kapas (sekitar 50% ekspor), kacang tanah, dan wijen merupakan komoditas andalan ekspor sehingga perekonomian Sudan sangat bergantung pada perubahan harga komoditas ini di pasar dunia dan naik-turun hasil panen yang sangat dipengaruhi iklim. Industri (tahun 1985: 18% PDB) kurang berkembang karena kekurangan infrastruktur, modal, langkanya *know-how*, sempitnya pasar dalam negeri, dan karena kuatnya konsentrasi pada barang konsumsi (bahan makanan, tekstil, kulit), bentuk-bentuk produksi yang padat modal, ketergantungan impor dan konsentrasi regional (di sekitar ibu kota: 75% pabrik).

Dalam sejarah rencana pembangunan Sudan sejak tahun 1960 terus terjadi kegagalan. Percobaan dan

kegagalan terbesar sampai saat ini adalah yang disebut "strategi keranjang roti" tahun '70-an, yaitu meningkatkan produksi pangan (beras, gandum, gula) dengan bantuan investasi pemerintah dan swasta (terutama dari negara-negara Arab penghasil minyak) sampai 500%, dengan tujuan menjadikan Sudan lumbung negara-negara tetangga Arab. Karena faktor iklim (musim kering), situasi investasi yang tidak menguntungkan (keadaan politik dalam negeri dan infrastruktur yang buruk telah menakutkan investor asing) dan dampak memburuknya *terms of trade* Sudan, rencana tersebut dibatalkan. Kendala pembangunan Sudan terbesar saat ini adalah besarnya utang luar negeri (tahun 1986: sekitar 12 miliar US\$). Persyaratan politik ekonomi IMF (a.l. devaluasi mata uang, penghapusan subsidi bahan pangan pokok) yang harus dilakukan oleh pemerintah apabila ingin mendapat kredit lagi, telah memperuncing ketegangan-ketegangan sosial di tahun '80-an (1982, 1987) dan mengakibatkan kerusuhan berdarah.

4. Sejak tahun 1821 di bawah kekuasaan Turki dan Mesir, bersama pembukaan terusan Suez (1869), Sudan makin berada di bawah pengaruh Eropa. Tahun 1885 gerakan pembaruan kaum Mahdi yang anti-Eropa, religius, dan nasionalis dipimpin Mohamed Ahmed al Mahdi yang teokratis, berhasil merebut kekuasaan. Setelah Inggris menaklukkan kaum Mahdi secara militer, tahun 1898 Sudan menjadi daerah kondominium Inggris dan Mesir. Dengan demikian, Sudan praktis berada di

bawah administrasi pemerintah kolonial Inggris, dengan berbagai dampak negatif terhadap perkembangan Sudan selanjutnya (monokultur kapas berlahan luas di kawasan pertemuan Sungai Nil Biru dengan Sungai Nil Putih, pemerintah dengan prinsip *indirect rule*, pemisahan secara politis dan kultur daerah utara dan selatan). Setelah terjadi revolusi Mesir dan pertikaian-pertikaian berkepanjangan tentang Sudan, dibuat suatu perjanjian antara Inggris dan Mesir yang menciptakan persyaratan untuk kemerdekaan negeri ini secara hukum internasional, dan telah terlaksana tahun 1956. Partai-partai yang muncul dalam gerakan nasional (*Umma*: pro Inggris dan mewakili kepentingan pertanian; *National Union Party/NUP*: kepentingan kaum pengusaha) tidak mampu mengatasi masalah ekonomi dan pertikaian di Sudan Selatan karena penduduk kulit hitam dengan alasan agama dan kebudayaan menuntut otonomi dari Sudan bagian utara yang beragama Islam. Bersamaan dengan proklamasi kemerdekaan, meluas bentrokan-bentrokan serupa perang saudara. Tahun 1958 militer memberontak terhadap pemerintah parlementer pertama. Setelah pemerintah militer gagal, tahun 1965-1969 berlangsung suatu periode pemerintah koalisi yang tidak stabil antara *Umma* dengan NUP. Terutama perang saudara yang berkelanjutan (oposisi Sudan Selatan menentang rencana UUD Islam), menimbulkan kudeta tidak berdarah tahun 1969 dan membawa Kolonel Numeiri ke puncak kekuasaan. Tahun 1972 Numeiri berhasil meng-

akhiri perang saudara dengan perjanjian Addis Ababa, yang menjamin daerah selatan otonomi di bidang kebudayaan dan politik regional. Tumpuan pemerintah Numeiri, di samping perjanjian tersebut, adalah partai kesatuan yang didirikan tahun 1972, *Sudanese Socialist Union/SSU* (partai lain dilarang sejak tahun 1969) dan UUD tetap yang diresmikan tahun 1973. UUD ini memberikan suatu kekuasaan tidak terbatas kepada Numeiri sebagai presiden dan panglima tertinggi angkatan bersenjata, yang digunakan secara autokrat melalui dekret dan UU darurat. Otonomi yang diberikan kepada penduduk Sudan Selatan, tidak memberi kemungkinan kepada penduduk di sana untuk melakukan partisipasi sesungguhnya. Pertikaian dalam negeri Utara-Selatan Sudan tetap ada dan karena keadaan ekonomi dan sosial terus buruk sehingga negara itu secara politis tidak pernah tenang. Ketika Numeiri dalam rangka kebijaksanaan desentralisasinya membagi administrasi Sudan Selatan menjadi tiga propinsi selatan dengan menentang keinginan penduduk di sana; selain itu mulai melakukan islamisasi daerah selatan (September 1983: memberlakukan hukum Islam, syariat), ketegangan di Selatan menyulut kembali menjadi perang saudara dipimpin partai oposisi *Sudan People's Liberation Army*.

Tanggal 6 April 1985 Numeiri digulingkan militer. Setahun kemudian diadakan pemilihan umum yang bebas dan demokratis. Mei 1986 militer menyerahkan pemerintahan kepada koalisi yang terdiri atas *Umma*

(perdana menteri: Sadiq al Mahdi), *Democratic Unionist Party* (DUP), dan beberapa partai Sudan Selatan, dengan tujuan membatalkan islamisasi paksa yang dilakukan Numeiri, mengakhiri perang saudara dan memperbaiki perekonomian Sudan yang ambruk. Setahun setelah pembentukan pemerintahan, koalisi pecah lagi karena pertikaian mengenai pemberlakuan kembali hukum Islam. Jalan keluar masalah ini, syarat mutlak untuk mengakhiri perang saudara, dipersulit karena *National Islamic Front*, sebuah kelompok politik yang kuat dan militan menuntut dipertahankannya syariat. Agustus 1987 Presiden Dewan Negara Ali al Mirghani (DUP) yang mulai berkuasa sejak Mei 1986, memberlakukan UU darurat, berlangsung sampai tahun 1989 (alasan: keadaan darurat ekonomi, perang saudara yang tidak hentinya, banjir besar tahun 1988).

5. Sudan di bawah Numeiri merupakan mitra loyal terhadap Barat. Sudan bagi AS merupakan sekutu yang penting karena letak geopolitisnya (bertetangga dengan negara yang anti-Barat: Etiopia, Yaman, dan Libia). Di kawasan itu sendiri, Numeiri membina hubungan baik a.l. dengan Mesir, yang berpuncak pada Charta Integrasi yang ditandatangani tahun 1982 dengan tujuan melakukan integrasi ekonomi dan politik kedua negara tersebut. Pimpinan politik Sudan setelah Numeiri melalui peredaaan ketegangan dengan Libia dan pelonggaran hubungan dengan Mesir serta membuka hubungan lebih intensif dengan kubu nonblok, berusaha dengan hati-hati mengubah haluan

politik luar negerinya. Tentu saja hal ini disadari oleh pemerintah Sudan agak sulit, akibat ruang gerak pemerintah terbatas karena situasi ekonomi secara keseluruhan, terutama besarnya utang.

Kepustakaan: R. Tetzlaff/K. Wohlmuth (ed.), *Der Sudan. Probleme und Perspektiven der Entwicklung eines weltmarktabhängigen Agrarstaates*, Frankfurt 1980; Ev. Missionswerk im Bereich der Bundesrepublik Deutschland und West-Berlin (ed.), *Religion und Staat im Sudan*, Hamburg 1986; H. Sellin/R. Tetzlaff, "Sudan", dim.: *HDW II*, 5, Hamburg 1982, hlm. 98 dst.; U. Steinbach/R. Robert (ed.), *Der Nahe und Mittlere Osten*, Jilid 2, Opladen 1988, hlm. 371 dst.

bt/ah

sumber daya Dalam ekonomi pembangunan dimengerti sebagai semua sarana yang pantas untuk produksi barang dan jasa serta pembangunan ekonomi dan sosial sebuah negara, terutama kekayaan tambang/bahan mentah, lahan yang dapat digunakan untuk pertanian, kanalisasi, modal, situasi pendidikan penduduk (*human capital*), dsb.

dn

SUNFED (*Special United Nations Fund for Economic Development*) Dana Khusus PBB untuk Pembangunan Ekonomi.

Suriah Sejak akhir tahun '70-an dengan terjadinya berbagai krisis di Timur Tengah (→ Lebanon, → Konflik Timur-Tengah, → Perang Iran-Irak) Suriah naik menjadi kekuatan penentu di kawasan itu. Karena ambisi kekuasaannya bersifat ofensif, Suriah makin terjerumus dalam kesukaran-kesukaran ekonomi.

1. Republik Arab Suriah mencakup 185.180 km², yang terbagi atas jalur pantai alami (dari barat ke timur) di tepi Laut Tengah, zone penghubung yang berbukit, dan dataran

yang dibelah oleh Sungai Efrat dengan padang rumput serta gurun pasir. Sekitar 1/3 wilayah (terutama di daerah pantai dan di utara) merupakan tanah yang dapat ditanami. Sebagian besar pertanian dilakukan dengan sistem perladangan hujan sehingga produksi pertanian Suriah sangat bergantung pada situasi iklim. Kekayaan alam utama adalah minyak bumi (tahun 1984 ditemukan sumber-sumber baru) dan fosfat.

2. Tahun 1988 penduduk Suriah diperkirakan berjumlah sekitar 11,7 juta jiwa. Hampir 50% penduduk yang sejak dahulu berkembang dengan pesat (angka pertumbuhan penduduk tahun 1980-1985: 3,6%/tahun), hidup di kota-kota pantai yang merupakan pusat-pusat industri dan perdagangan (ibu kota Damaskus: 1,3 juta, Aleppo: 1,2 juta penduduk). Mayoritas penduduk (sekitar 80%) menganut Islam Sunni. Kaum Alawiyah (sekte Syiah) meliputi 10%-12% penduduk, merupakan minoritas agama terpenting, disusul Kristen (sekitar 6%) dan kaum Druse (2%). Lebih dari 95% penduduk adalah orang Arab Suriah; suku Kurdi dan Armenia merupakan minoritas etnis. Selain itu, terdapat sekitar 250.000 (1986) pengungsi Palestina hidup di kamp-kamp yang dikelola UNRWA.

3. Wilayah Suriah sekarang hanya merupakan sebagian dari propinsi Suriah di bawah Kesultanan Osmania dulu, saat itu mencakup Yordania, Israel, dan kawasan-kawasan yang kini diduduki Israel. Setelah Perang Dunia I gerakan nasional Arab Suriah mengharapakan kemerdekaan sebagai imbalan bantuan senjata Arab

kepada Inggris untuk melawan Turki. Akan tetapi, ketika terjadi pembagian Kesultanan Osmania oleh Inggris dan Perancis, tahun 1920 Suriyah dijadikan daerah mandat Perancis. Lebanon dan Palestina dipisahkan dari propinsi Kesultanan Osmania. Perlawanan yang terus tumbuh, melahirkan pemberontakan nasional tahun 1945. Dengan penarikan tentara Perancis terakhir April 1946, Suriyah menjadi merdeka.

4. Setelah mengalami masa penuh ketidakstabilan ekonomi, sering bergantinya pemerintahan serta pemberontakan militer, tahun 1958 Suriyah bersekutu dengan Mesir dalam Republik Persatuan Arab. Dominasi Mesir dalam persekutuan ini menimbulkan perlawanan di dalam negeri, dan setelah terjadi pemberontakan militer Suriyah keluar dari persekutuan tersebut (1961). Kejadian sangat penting adalah pemberontakan militer 8 Maret 1963 yang membawa partai *Baath* ke tampuk kekuasaan. Setelah terjadi pertikaian antarsayap dalam partai *Baath*, a.l. mengakibatkan perpecahan *Baath*-Suriyah dan *Baath*-Irak yang sampai sekarang masih berlangsung, tahun 1970 partai *Baath* dipimpin sayap militer di bawah Hafiz al-Assad, sekarang menjadi presiden, mengambil alih pemerintahan dan memulai politik bersempayan "gerakan koreksi", yaitu liberalisasi politik dalam negeri dan ekonomi yang terkendali. Sejak tahun 1972 memerintah Front Nasional Progresif yang dikuasai partai *Baath* di negara ini, selain partai *Baath* juga tergabung Uni Sosialis Arab Suriyah, Organisasi Kaum Union Sosialis,

Gerakan Sosialis Arab, dan Partai Komunis. Sesuai UUD tahun 1973, Suriyah adalah negara demokrasi rakyat (parlemen: Dewan Rakyat dipilih setiap empat tahun), dengan posisi presiden yang kuat (sejak tahun 1971 H. Assad juga panglima tertinggi angkatan bersenjata) yang dengan wewenang penuh menjalankan kekuasaan eksekutif.

5. Setelah pengambilalihan kekuasaan oleh partai *Baath*, sepanjang tahun '60-an perekonomian Suriyah makin dikendalikan pemerintah. Pimpinan politik melalui rencana pembangunan berusaha mendorong industrialisasi negara di satu pihak dan meningkatkan produksi pertanian dengan memperluas lahan di lain pihak. Proyek pembangunan terbesar sampai saat ini adalah bendungan Efrat yang selesai tahun 1978 (dengan pembangkit tenaga listrik), menyumbang sampai 30% kebutuhan energi negara dan merupakan basis dari pelipatgandaan lahan pengairan yang direncanakan (tahun 1980: 539.000 ha lahan mendapat pengairan, sampai tahun 1990 direncanakan akan dibuka 550.000 ha). Produksi pertanian setelah mengalami beberapa reformasi pertanian, sebagian besar berada di tangan swasta (70% dari seluruh lahan), masih tetap merupakan basis perekonomian Suriyah. Kontribusi pada pendapatan nasional (1986) adalah 26%, menyerap sekitar 1/3 angkatan kerja dan dengan kapasitasnya menghasilkan komoditas ekspor nomor dua terpenting negara itu (tahun 1985: 8,5% ekspor, komoditas pertanian lain: gandum, jelai, sayuran, buah-buahan). Tujuan politik per-

tanian pemerintah Suriiah untuk mencapai swasembada pangan masih jauh tercapai. Tahun 1985 pangsa pangan pada impor Suriiah adalah 17%. Industri Suriiah bertumpu pada bahan mentah (kilang minyak yang juga memproses minyak impor, produksi pupuk; tekstil) dan memberikan kontribusi 14% dalam PDB tahun 1986. Penambangan dan pengolahan minyak menghasilkan 74% (1985) nilai ekspor. Tahun '80-an Suriiah makin terjerumus dalam krisis ekonomi yang berat (neraca pembayaran terus defisit, utang yang tinggi, tahun 1987: 3,5 miliar US\$). Tahun 1987 Suriiah mengalami kesulitan pengadaan pangan pokok yang memang sudah terbatas sebelumnya, inflasi (tahun 1987 diperkirakan 40%–50%) memacu kenaikan ongkos hidup yang ditentukan oleh kebijakan harga pemerintah. Akibatnya, pemerintah partai Baath di bawah Assad, memang tidak pernah mendapat dukungan kuat dari rakyat, menghadapi potensi destabilisasi dalam negeri yang berusaha diredam dengan kampanye antikorupsi (a.l. perombakan kabinet tahun 1987) dan tindakan-tindakan liberalisasi ekonomi terkendali (a.l. rangsangan untuk ekonomi swasta). Sebab-sebab krisis ekonomi selain keadaan politik yang morat-marit (korupsi, sasaran perencanaan yang tidak realistis) adalah memburuknya *terms of trade* Suriiah (jatuhnya harga minyak) dan dampak-dampak negatif krisis Teluk. Suriiah termasuk kekuatan radikal Arab yang menolak seluruh saran pemecahan politik pertikaian Timur Tengah yang pernah diajukan (1989). Negara ini merupa-

kan satu-satunya negara Arab yang setelah perang Oktober 1973 berhadapan langsung dalam konfrontasi militer dengan Israel (1982 di Lebanon) dan menegakkan tuntutan kekuasaan regional berdasarkan prinsip-prinsip ideologi nasionalisme Arab (→ nasserisme), yang menimbulkan ongkos tinggi (tentara: 400.000 orang, di antaranya tahun 1987: 25.000 ditempatkan di Lebanon; 50% anggaran negara untuk persenjataan). Oleh karena itu, perkembangan Suriiah di masa datang sangat tergantung, apakah atau bagaimana pemerintah berhasil mengatasi ketegangan hubungan antara ambisi sebagai pemimpin regional dalam politik luar negeri dan kekacauan ekonomi dalam politik dalam negeri. Kepustakaan: H. Mahr, *Die Baath-Partei, Porträt einer panarabischen Bewegung*, Wien 1981; F. Nuscheler, "Syrien", dlm.: *HDW II*, 6, Hamburg 1983, hlm. 464 dst.; G. Krämer, *Arabismus und Nationalstaatlichkeit. Syrien als nahöstliche Regionalmacht*, Ebenhausen (Stiftung Wissenschaft und Politik) 1987; T. Koszinowski, "Syrien", dlm.: U. Steinbach/R. Robert, *Der Nahe und Mittlere Osten*, jilid 2, Opladen 1988, hlm. 385 dst. **bt**

Suriname 1. 80% wilayah Suriname (163.265 km²) ditutup hutan hujan tropis. Namun, keuntungan dari penebangan dan pengolahan kayu yang dimungkinkan di sini, dalam dasawarsa terakhir telah hilang artinya, akibat ongkos produksi yang meningkat dan kesulitan pemasaran. Untuk pertanian (lahan potensial 40%) hanya digunakan jalur sepanjang pantai yang subur (80% ladang, 20% padang rumput). Diperkirakan atau telah dibuktikan adanya banyak bahan mentah di Suriname. Bauksit menguasai perekonomian Suriname (termasuk hasil peng-

olahan yang mencakup lebih dari 70% ekspor). Satu-satunya sumber energi adalah pembangkit tenaga listrik air (PLTA Brokopondo).

2. Tahun 1667 Belanda menduduki Suriname (dikukuhkan melalui Perdamaian Breda sebagai imbalan penyerahan New-Amsterdam—kini New York—kepada Inggris). Keunggulan teknologinya dalam pengolahan tebu dan teknik pembangunan tanggul irigasi atas dasar perbudakan serta perkebunan, menjadikan Suriname koloni perkebunan terbesar di Karibia. Dalam paro kedua abad ke-19 berlangsung keruntuhan ekonomi Suriname: larangan perbudakan (1863), jatuhnya harga pasar dunia untuk gula; pembukaan Terusan Suez (Hindia Timur lebih menguntungkan untuk investasi); tidak lagi memiliki keunggulan teknologi.

Kekayaan tambang yang ditemukan awal abad ke-20, mengubah orientasi ekonomi negeri itu pada komoditas ekspor andalan, bauksit. Tahun 1954 koloni Suriname mendapat otonomi (dalam status kerajaan) dan tahun 1975 mendapat kemerdekaan penuh.

3. Penduduk Suriname tahun 1988 diperkirakan berjumlah 380.000 jiwa ($2,3$ jiwa/ km^2), terpusat pada kawasan pantai dan perkotaan (sekitar 65% penduduk hidup di sekitar ibu kota Paramaribo). Pertumbuhan penduduk per tahun ($0,2\%$ tahun 1973–1985) berkurang karena migrasi ke Belanda dan pelarian dari pemerintah Bouterse ke negara tetangga, Guyana Perancis. Komposisi penduduk mencerminkan tahap politik kolonial. Keturunan budak kulit hitam (31% penduduk

adalah suku Kreol) dan keturunan kuli kontrak yang didatangkan dari India (37% penduduk) dan Jawa (15%) setelah perbudakan dihapus, merupakan tiga kelompok terbesar.

4. Struktur perekonomian Suriname ditandai oleh besarnya ketergantungan dari luar dan ketidakseimbangan sektoral. Sektor kapitalistis dari luar memproduksi untuk ekspor yang dinamis, terdiri atas perkebunan tradisional dan produksi serta pengolahan bauksit (SURALCO dan anak perusahaan multinasional AS, ALCOA) dan BILLITON (anak perusahaan Shell) hidup berdampingan dengan sektor kapitalistis dalam negeri yang terdiri atas industri kecil, perdagangan, dan jasa, serta pertanian sawah yang tidak kapitalistis milik penduduk India dan Jawa (pangsa beras pada ekspor hasil pertanian adalah 50%, 74% petani menguasai 26,5% lahan pertanian).

5. Golongan atas negara ini terdiri atas pimpinan atau pemegang saham berkebangsaan asing dari perusahaan transnasional yang beroperasi di Suriname, beberapa pemilik industri dalam negeri, sekelompok pedagang besar, dan wiraswastawan serta pegawai tinggi pemerintah. Kelas menengah terdiri atas pegawai negeri, eksekutif di sektor perdagangan dan jasa serta tenaga ahli pada perusahaan asing. Penganggur dan buruh industri kecil dalam negeri dan perusahaan pertanian milik negara, merupakan golongan bawah.

6. Masa lalu kolonial Suriname menyebabkan adanya keanekaragaman agama (37% Kristen, 33% Hindu, 22% Islam) dan bahasa (selain dialek

masing-masing etnis, 78% penduduk berbahasa Sranang [bahasa Inggris kaum kulit hitam], 40% berbahasa resmi yaitu bahasa Belanda, sedangkan bahasa Inggris adalah bahasa perdagangan). Pelayanan kesehatan Suriname adalah untuk umum (sejak tahun 1960 ada asuransi kesehatan negara). Wajib sekolah dikenakan kepada anak-anak berumur antara 6–12 tahun, walaupun hanya dinikmati oleh penduduk daerah pantai yang padat. Sistem pendidikan mengikuti model pendidikan Belanda. Pendidikan sekolah dasar tidak dikenakan biaya.

7. Sistem politik Suriname ditandai pertikaian kesukuan. Kesanggupan berfungsinya pemerintah parlementer bertahun-tahun dimungkinkan adanya kerja sama para pimpinan kelompok-kelompok etnis yang bertikai dan relatif tertutup satu dengan lainnya. Terbentuk kartel elite, merupakan kompromi antara orang Kreol dan Jawa dengan mengorbankan penduduk asal India, ternyata tidak mampu (akibat korupsi, sistem koneksi) mengatasi masalah-masalah pembangunan negara. Tahun 1980 militer mengadakan kudeta. Tahun 1982 orang kuat negara itu, Letnan Kolonel Daysi Bouterse, secara formal mengambil alih kekuasaan. Pemerintahannya yang brutal (Desember 1982 sedikitnya 15 pemimpin terkemuka ditembak mati) menyebabkan bantuan keuangan dari Belanda dihentikan dan makin mengucilkan negara tersebut, yang juga sedang menderita jatuhnya harga bauksit (pangsa ekspor 80%). Akhir tahun 1986 orang kulit hitam (Buschneger)

dipimpin Ronny Brunswick memberontak terhadap Bouterse yang berasal dari suku Kreol. Akibat kekacauan dalam negeri, masalah keuangan dan tekanan internasional, tahun 1987 Bouterse mengadakan referendum untuk membentuk UUD baru, melicinkan jalan suatu pemilihan umum yang bebas. Koalisi oposisi Front untuk Demokrasi dan Pembangunan memenangkan 85% suara, Bouterse mendapat 15% suara. Januari 1988 penduduk sipil Ramsewak Shankar terpilih menjadi presiden untuk masa jabatan lima tahun.

Kepustakaan: E. Dew, *The Difficult Flowering of Surinam. Ethnicity and Politics in a Plural Society*, Den Haag 1978; R. Singelenberg, "Surinam", dlm.: *HDW II*, 3, Hamburg 1982, hlm. 412 dst.; H.E. Chin/H. Buddingh, *Surinam. Politics, Economics, and Society*, London 1987.

rs
sur-place-programme Di bidang bantuan pendidikan adalah bantuan untuk orang dari negara berkembang di negara berkembang, artinya di negara sendiri atau di negara ketiga yang bertetangga. Program *sur-place* lebih disesuaikan pada keadaan setempat di negara berkembang: diselenggarakan dalam bahasa setempat (hilangnya ongkos pendidikan bahasa yang mahal); tidak ada masalah penyamaan ijazah sekolah atau perguruan tinggi dan masalah seperti reintegrasi.

dn
surplus Kelebihan suatu produksi setelah dikurangi kebutuhan eksistensi dari orang-orang yang memproduksinya dan setelah dikurangi penggantian alat-alat produksi yang habis terpakai. Pengertian surplus mencakup masalah pembentukan, pemilikan, dan penggunaan kelebihan dalam

dua tingkat: a. tingkat nasional: mereka yang dalam sistem ekonomi tersebut menikmati keuntungan darinya; b. tingkat internasional: masalah hubungan eksploitasi antara negara industri dan negara berkembang. Seperti yang dilihat oleh T. Hurtienne, terutama di tahun '60-an dalam diskusi mengenai negara berkembang terdapat kecenderungan melihat penyebab keterbelakangan pada transfer surplus terus-menerus dari satelit-satelit terakhir melalui ketergantungannya pada metropol ke metropol utama (Baran/Sweezy, Frank dll.). Makin kuat ketergantungan suatu negara berkembang, makin kecil peluang perkembangannya, menurut tesis ini.

Menentang tesis yang mengatakan bahwa negara berkembang tidak dapat berkembang dikarenakan transfer terus-menerus kelebihan perekonomian nasional ke negara industri, digunakan sanggahan: a. lingkup transfer surplus tidak terbukti secara empiris; b. apabila perhatian dikonsentrasikan pada pemotongan (bagian) surplus, akan diabaikan organisasi sebenarnya dari masing-masing produksi nasional tersebut, yang tingkat perkembangannya jelas berbeda-beda. Kepustakaan: P. Baran, *Pol. Ökonomie des Wachstums*, Neuwied/Berlin (West) 1966 (mula-mula dalam bahasa Inggris 1957); P. Baran/P. Sweezy, *Monopolkapital*, Frankfurt/M. 1966; A.G. Frank, *Kapitalismus und Unterentwicklung in LA*, Frankfurt/M. 1968; T. Hurtienne, "Zur Ideologiekritik der lateinamerik. Theorien der Unterentwicklung und Abhängigkeit", dlm.: *Probleme des Klassen-kampfs* 14/15 (1974), hlm. 213 dst.

hk/rs

Survival International Organisasi yang memperjuangkan kelompok minoritas yang terancam (a.l. kon-

ferensi pers untuk wakil-wakil mereka, bantuan proyek, bantuan untuk mendapatkan suaka).

ph

swadaya → LSM/LPSM.

SWAPO → Namibia.

Swaziland Penduduk (tahun 1987: sekitar 691.000 jiwa, 60% Kristen, 40% animis) negara terkecil di Afrika (luas: 17.363 km², ibu kota: Mbabane) setelah Gambia, secara etnis terdiri atas suku Swasi (90%), Zulu, Shangaan, Njassa, Sotho serta beberapa ribu orang kulit putih dan campuran. Swaziland mempunyai angka pertumbuhan penduduk 2,6%/tahun, sekitar 46% penduduk berumur di bawah 15 tahun. Selain kekayaan tambang (batu bara, asbes, intan dan sampai tahun 1977 juga bijih besi) yang hampir habis, iklim yang menguntungkan pertanian dan kehutanan serta tanah subur dengan pemandangan indah (turisme), merupakan sumber daya pembangunan terpenting. Dualisme yang mencolok antara ekonomi subsistensi tradisional, relatif tidak produktif dan harus memberi makan sekitar 70% penduduk, dengan sektor modern yang berorientasi ekspor dan hampir seluruhnya dikuasai kepentingan asing yang padat modal, diharapkan dapat diatasi melalui perubahan sektor tradisional secara bertahap menjadi produksi yang lebih berorientasi pasar. Penentuan pihak asing atas perekonomian Swaziland (PNB per kapita tahun 1985: 650 US\$) dimulai sejak tahun 1879 (penemuan emas) oleh perusahaan-perusahaan Afrika Selatan, yang merampas sebagian besar negara itu dan hak-hak tambang dari Raja Swasi Mbandzeni yang tidak begitu paham

akan pengertian hak pemilikan Eropa. Setelah orang Inggris (1903) menghentikan arus penjajahan kaum Buren Afrika Selatan atas protektorat Swaziland yang diperintah dengan pola *indirect rule*, sampai pengakuan kemerdekaan secara internasional (1968), 44,7% wilayah negara itu masih menjadi milik perusahaan-perusahaan Afrika Selatan. Sampai sekarang ekonomi ekspor (pertambangan, peternakan, perkebunan gula, kapas), perusahaan pengolahan lanjut produk hutan dan pertanian serta perusahaan terpenting di bidang perkreditan, perdagangan, dan pariwisata, dikuasai modal asing (Afrika Selatan, Jepang), yang dalam rangka strategi antara substitusi impor dan pembagian kerja internasional baru, menemukan kondisi investasi yang menguntungkan (upah murah, dll.). Bukan saja melalui investasi langsung, melainkan juga melalui uni mata uang dan bea *Rand* (walaupun memiliki mata uang sendiri, *Emalangen*). Letak geopolitik yang tidak menguntungkan dan ancaman intervensi pada perkembangan yang tidak diinginkan serta keinginan penyatuan dengan daerah-daerah pemukiman Swasi di Afrika Selatan (RSA), menyebabkan Swaziland sangat bergantung pada negara tetangga: sekitar 90% seluruh impor datang dari Republik Afrika Selatan. Sejak berlangsung situasi yang mirip dengan perang saudara di Mozambik (akhir tahun 1984), hanya tertinggal jalur lalu-lintas melalui Afrika Selatan yang tersedia bagi negara pedalaman yang tergantung ini.

Dengan bertambahnya kerawanan politik di Afrika Selatan, Swazi-

land memang menjadi menarik untuk tempat industri, tetapi hambatan-nya adalah kekurangan tenaga kerja terampil. Efek kesempatan kerja di bidang-bidang yang sedang tumbuh pun kecil. Selain itu, ada kesenjangan upah antara orang kulit putih dan kulit hitam yang memiliki kemungkinan kecil naik ke posisi pimpinan. Walaupun setelah musim kering tahun 1982/1983 pertumbuhan ekonomi di sektor modern naik lagi, tetapi dampak teori *trickle-down* tidak juga muncul; kehidupan mayoritas penduduk di pedesaan tidak mengalami perubahan. Sektor subsistensi (perladangan jagung dan gandum, sorgum dan kentang; peternakan ekstensif) akibat kemacetan struktural tidak mampu memberi makan penduduknya. Tanah yang menjadi kurus akibat terlalu dipaksa untuk peternakan (ternak/symbol status), perlawanan kepala-kepala suku yang autokrat terhadap reformasi tanah dan kenyataan bahwa padang rumput terbaik dimiliki orang kulit putih dan sering tidak terpakai, bukan saja menghambat produktivitas, juga memaksa petani subsisten untuk bekerja sebagai buruh tani di perkebunan-perkebunan milik asing. Selain itu, sekitar 16.000 orang Swasi bekerja sebagai buruh pengembara di tambang-tambang Afrika Selatan. Kekurangan secara kualitatif dan kuantitatif pada pangan dan dampak negatif pada kesehatan (tingkat harapan hidup tahun 1984: 54 tahun), merupakan kegagalan pembangunan sosial sebagai akibat pengendalian ekonomi dari luar. Situasi ini makin diperburuk oleh infrastruktur yang buruk (mi-

salnya penyakit massa tipus akibat pengadaan air yang buruk). Bidang pendidikan juga terbelakang: hanya sekitar 2/3 anak-anak berumur 7-14 tahun bersekolah; akibat uang sekolah, kuota *drop-out* tinggi (buta ak-sara tahun 1985: 32%).

Di tahun-tahun terakhir peran turisme tumbuh, tetapi pariwisata seks dari Afrika Selatan (tabu *apartheid*) menimbulkan beberapa masalah bagi Swaziland, misalnya pelacuran dan kriminalitas.

Dalam jangka panjang kekayaan alam, pembangunan pertanian dan kesehatan dapat menjadi landasan suatu politik pembangunan otosentris, dalam pemerintahan Raja (*Ngwenyama*) Sobhuza II dengan pemerintahan autokrat di Swaziland dari tahun 1921-1982, tidak dapat diharapkan terwujud. Tahun 1973 terjadi pelarangan partai-partai oposisi dan tahun 1977 penghapusan sistem parlementer. Sejak Sobhuza II meninggal, timbul berbagai intrik dalam istana dan pertikaian antarsayap, a.l. rebutan pewaris tahta di antara anaknya yang diperkirakan berjumlah 600 orang, serta mengambil keputusan apakah negara ini akan terus diperintah secara otoriter. Pangeran Makhosetive yang berusia 18 tahun dan dinobatkan April 1986 menjadi Raja Mswati III, bersama Perdana Menteri Dlamini, berhasil mengurangi kekuasaan Dewan Negara Tertinggi (*Liqoqo*). Politik luar negeri Swaziland tetap bergantung pada Republik Afrika Selatan, dan di lain pihak menjadi anggota SADCC.

Kepustakaan: E. Klimm/K.G. Schneider/B. Wiese, *Das südliche Afrika I. Republik Südafrika-Lesotho-Swaziland*, Darmstadt 1980; E.

Adam/F. Nuscheler, "Swaziland", dlm.: *HDW II*, 5, Hamburg 1982, hlm. 380 dst.; B. Nyeko, *Swaziland* (Bibliography), Oxford 1983. ah/ph
SYSMIN Suatu sistem untuk stabilisasi hasil ekspor mineral (atau disebut Minex, yaitu Sistem Stabilisasi Hasil Ekspor Mineral). Sistem pembiayaan hasil pertambangan ini dibuat pada Perjanjian Lome II untuk melengkapi STABEX. Sistem ini diharapkan dapat menyelamatkan sarana produksi dan kapasitas ekspor Negara AKP yang memproduksi bahan mentah mineral dan mengekspornya ke ME, juga pada situasi turunnya harga atau pendapatan. Sistem ini dilengkapi dana sebesar 415 juta ECU. Dana ini tersedia untuk membiayai bahan mentah: tembaga, kobalt, bauksit, aluminium, mangan, timah, fosfat, bijih besi, dan belerang. Jika sebuah negara AKP ingin menggunakan dana SYSMIN, harus memenuhi syarat-syarat: a. bahan mentah yang memerlukan dana ini harus sedikitnya mencakup 15% seluruh nilai ekspor; untuk negara AKP paling terbelakang serta negara AKP pedalaman dan kepulauan berlaku 10% sebagai ambang batas persyaratan; b. akibat tingginya penurunan hasil ekspor ada bahaya bahwa potensi produksi minimal jatuh 10% (ambang batas penyesaban). Jika kedua persyaratan tersebut dipenuhi, negara yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan kepada ME untuk mendapat dana pembiayaan. Akan tetapi, dana ini (berbeda dengan STABEX) tidak berupa subsidi anggaran, melainkan terikat pembiayaan rencana atau program yang bertujuan untuk menyelamatkan kapasitas produksi dan ekspor. Dana ini hanya diberikan

SYSMIN

sebagai pinjaman dengan bunga 1%,
dan jangka waktu pinjaman 40 tahun
serta tenggang waktu bebas pem-

bayaran selama 10 tahun. SYSMIN
merupakan bagian Lome II yang
berakhir tahun 1990. hpn

T

TAB (*Technical Assistance Board*, Dewan Bantuan Teknik) → ECO-SOC.

TAC (*Technical Assistance Committee*) Komite Penasihat Teknik Perserikatan Bangsa-Bangsa.

tahanan politik → *amnesty international* (ai).

Taiwan Resmi: Republik Cina; seringkali disebut sebagai Cina Nasional. Dalam diskusi politik pembangunan, sejauh menyangkut diskusi tentang Cina, telah terjadi perubahan paradigma. Di tahun '70-an Republik Rakyat (→ Cina) pada umumnya dilihat sebagai model politik pembangunan. Sebaliknya, Taiwan dilihat sebagai kasus mencolok suatu kapitalisme periferi, dan yang lebih buruk lagi adalah: hanya sebagai daerah jajahan Amerika Serikat dan hanya mampu bertahan hidup melalui bantuan ekonomi dan militer AS. Sementara di Cina telah berlangsung perubahan ideologi dan politik pembangunan, Taiwan sejak waktu yang sama terhitung sebagai NIB (Negara Industri Baru), bahkan yang terkemuka. Untuk sementara dapat dikatakan bahwa Taiwan telah menjadi negara industri kedua di Asia setelah Jepang.

1. Pulau kecil yang terletak di seberang daratan Cina (luas: 36.000 km², tahun 1986: 19,5 juta penduduk; tidak memiliki bahan mentah yang berarti) tahun 1960 masih termasuk negara termiskin di dunia dengan pendapatan per kapita 234 US\$. Tahun 1987 a.l. berkat revaluasi mata uang (NT-\$), pendapatan ini meningkat menjadi 5.000 US\$. Hal ini mungkin, karena sejak awal tahun '50-an ditandai oleh pertumbuhan PNB yang mendekati 10%, suatu *trend* yang tidak melemah walaupun terjadi resesi dunia tahun '70-an dan '80-an.

Indikator pembangunan lain menunjukkan hasil yang mirip: pertumbuhan penduduk dapat dikurangi dari 3,7% menjadi 1,1% setiap tahun, tingkat harapan hidup meningkat menjadi rata-rata 73 tahun; kontribusi sektor pertanian terhadap PNB menurun dari 36% menjadi hanya 6,6%, sedangkan kontribusi terhadap sektor industri meningkat dari 18% menjadi 47%; investasi bruto (35%) tidak hanya secara keseluruhan dibiayai oleh tabungan dalam negeri, bahkan sejak beberapa tahun Taiwan telah menjadi pengekspor modal yang berarti; setelah Jepang dan Jerman, Taiwan merupakan negara yang memiliki ca-

dengan devisa nomor tiga terbesar di dunia. Juga di sisi kesempatan kerja, bagian yang bekerja di sektor pertanian menurun dari 56% (1952) menjadi 17% (1986), sedangkan yang bekerja di sektor industri sebesar 42%. Kuota pengangguran resmi sebesar 2%. Pendapatan per kapita sejak tahun '70-an meningkat sehingga massa penduduk dapat turut menikmati kemakmuran nasional.

Perbaikan ini terlihat pada koefisien GINI mengenai distribusi pendapatan: di tahun '50-an adalah 0,56 dan akhir tahun '80-an sekitar 0,3. Angka ini bahkan berada di bawah negara-negara Eropa Barat yang sosial demokratis. Kuota buta aksara menurun dari 42% (1952) menjadi 8%.

2. Dibandingkan dengan Republik Rakyat Cina, keberhasilan Taiwan ini dicapai dengan kondisi yang berbeda: orientasi pasar dunia, mengadakan teknologi modern, alih modal, dan alih teknologi dari negara industri Barat serta mengikuti strategi ekonomi pasar yang liberal.

Taiwan, seperti halnya Jepang, sejak awal tahun '80-an ditandai oleh peningkatan ekspor yang mencolok. Secara absolut nilai ekspor meningkat dari 2 miliar US\$ (1972) menjadi 53 miliar US\$ (1987), walaupun sekaligus terjadi peningkatan nilai impor, tetapi tercapai surplus dalam neraca perdagangannya sebesar hampir 20 miliar US\$. Jika tidak terjadi dua kali kenaikan harga migas yang meningkatkan nilai impor, dapat dikatakan bahwa Taiwan dapat mencapai keadaan ini sudah pada tahun '70-an. Berbeda dengan Jepang, surplus ini oleh

Taiwan tidak banyak digunakan untuk ekspor modal, melainkan digunakan terutama untuk meningkatkan cadangan devisa dan emas, yang pada tahun 1987 telah mencapai jumlah lebih dari 77 miliar US\$. Besarnya pertumbuhan ekspor baru akan jelas jika dibandingkan dengan PNB. Angka ini yang di tahun 1960 baru sebesar 10% dari PNB telah meningkat menjadi 55%. Dengan demikian, volume ekspor Taiwan jelas berada di atas Republik Rakyat Cina. Suatu penggolongan jenis ekspor menurut cabang industri menunjukkan bahwa Taiwan telah lama tidak lagi menjadi negara dengan upah rendah dan masuk ke bidang kegiatan industri dengan teknologi tinggi. Sekitar 40% ekspor ditujukan untuk pasar Amerika yang penuh persaingan keras, membuat Taiwan menjadi sasaran tuntutan politik perdagangan dari politisi dan serikat buruh AS. Seperti halnya Yen Jepang, sejak tahun 1987 NT-\$ Taiwan juga harus berkorban dengan apresiasi nilainya. Tanpa apresiasi mata uang NT-\$, terlihat peningkatan ekspor.

3. Perbedaan yang mencolok dengan keberhasilan ekonomi ini adalah gambaran keadaan politik di Taiwan. Tidak seperti halnya dengan anggapan wakil-wakil teori modernisasi, perubahan ekonomi sampai sekarang tidak diikuti perubahan politik yang berarti. Taiwan seperti sebelumnya tetap merupakan suatu diktator pembangunan, yang memang mengetahui untuk menjalankan keajaiban ekonomi, tetapi sekaligus tidak memberikan kesempatan membuka proses demokratisasi.

Jika kita bertanya mengenai sebab keberhasilan ekonomi yang spektakuler dan juga sistem politik yang kaku, penjelasannya adalah menoleh pada masa lalu Taiwan, termasuk warisan kolonialnya. Taiwan sejak tahun 1895–1945 merupakan jajahan Jepang dan pada tahap ini telah mendapatkan dorongan modernisasi, terutama terlihat di sektor pertanian dan infrastruktur. Tidak seperti halnya kekuatan kolonial Eropa, Jepang ketika itu juga masih merupakan kekuatan kolonial yang baru; agar dapat memperkokoh posisinya dalam deretan kekuatan besar, pembukaan daerah jajahan secara sistematis dan menyeluruh hanya untuk kepentingan Jepang. Taiwan pada paro pertama abad ke-20 dijadikan pemasok beras dan gula untuk negara induk. Hal ini menimbulkan dampak, yaitu pulau ini setelah perang Pasifik memiliki sektor pertanian paling produktif nomor dua di Asia setelah Jepang. Rezim kolonial di Taiwan juga tidak sekeras seperti halnya di Korea.

Faktor selanjutnya adalah konflik yang berlangsung antara penduduk asli Taiwan dan orang Cina daratan sejak tahun 1946/1947 yang setelah kekalahan Jepang, terutama sejak tahun 1948, mendarat di pulau tersebut. Dilihat secara historis, Taiwan hanya dalam waktu singkat termasuk daerah Cina. Penduduk asli yang ditemukan orang Portugis tahun 1590 merupakan keturunan Melayu, menamakan pulau itu Ilha Formosa; sekarang ini mereka merupakan kelompok minoritas. Sejak tahun 1624 Taiwan jatuh ke tangan kolonial Eropa, ketika Belanda menancapkan

kaki di sana dan berhasil mengusir saingannya, orang Spanyol. Tahun 1662 orang Belanda kembali terusir oleh loyalis Ming, Zheng Chenggong (Koxinga), yang ingin mendirikan negara bajak laut di pulau tersebut. Di masa pendudukan Belanda berlangsung imigrasi besar pertama dari daratan Cina, terutama dari propinsi Fujian dan propinsi Guangdong yang berdekatan dengan Taiwan. Tahun 1683 Dinasti Qing (1644–1911) mengontrol pulau tersebut dan memasukkan kegiatan administrasinya ke daerah Fujian. Tahun 1887 pulau tersebut mendapatkan status propinsi. Selama masa 200 tahun ini ditandai oleh pemberontakan kecil dan besar terhadap kekuasaan daratan Cina. Delapan tahun kemudian setelah kalah perang, dalam perjanjian Shimonoseki, Taiwan diberikan kepada Jepang, dan sampai tahun 1945 menjadi daerah jajahan Jepang.

Pulau ini tidak merdeka setelah Jepang menyerah, melainkan jatuh ke tangan pemerintah Cina nasionalis, seperti disepakati dalam konferensi Kairo tahun 1943. Pengambilalihan kekuasaan pemerintah tanggal 25 Oktober 1945 ini oleh penduduk asli Taiwan lebih banyak dirasakan sebagai pendudukan daripada sebagai pembebasan, dan sebagian besar barang-barang investasi dibongkar dan diangkut ke daratan Cina. Selama 18 bulan kekacauan ekonomi dan penolakan penduduk asli untuk ikut serta dalam pemerintahan, telah meledakkan pemberontakan pada 28 Februari 1947 yang baru dapat dipadamkan dengan kekerasan pada 9 Maret 1947. Banyak penduduk asli

Taiwan mencari suaka di luar negeri sejauh mereka dapat melepaskan diri dari penahanan. Sejak itu terdapat konflik yang hampir tidak terdamaian antara orang Cina daratan dan penduduk asli Taiwan. Konflik ini kembali memuncak ketika terjadi pelarian orang-orang Kuomintang dari daratan Cina setelah mereka menderita kekalahan dari komunis dan membangun kembali pemerintahan pada awal musim panas tahun 1949. Tanggal 10 Desember 1949 Taipei dijadikan "ibu kota sementara" dan pada 1 Maret 1950 oleh Chiang Kai Sek diproklamkan Republik Cina. Sekitar 1,3 juta orang Cina daratan, di antaranya elite politik, militer, dan pengusaha Kuomintang melarikan diri ke Taiwan dan sejak itu memegang posisi pimpinan. Dua front yang dihadapi oleh pimpinan Cina nasionalis, melawan komunis dan oposisi warga Taiwan asli, merupakan alasan dan pembenaran diberlakukannya keadaan darurat dan tidak berlakunya sebagian besar UUD tahun 1947. Keadaan darurat ini baru dicabut tahun 1987.

Dengan pecahnya perang Korea Juni 1950 dimulai juga dukungan ekonomi dan politik AS untuk Taiwan. Untuk meredam meluasnya komunisme di Asia Timur dan menghalangi meluasnya pengaruh Uni Soviet, pemerintah Truman memutuskan tidak hanya melakukan intervensi di Korea, melainkan sekaligus menempatkan armada ketujuh AS di teluk Taiwan. Ketika pasukan AS di Korea mendekati perbatasan Cina, pasukan rakyat Cina harus dipindahkan dari Fujian ke Manchuria dan rencana

menyerang Taiwan akhirnya ditanggukhan.

Situasi politik ini juga menimbulkan konsekuensi ekonomi, yang akan memberikan penjelasan mengenai pertumbuhan ekonomi. Sebagai titik tolak untuk merebut kembali Cina daratan dan tuntutan sebagai satu-satunya wakil Cina, Taiwan tidak hanya memerlukan suatu aparat militer dan administrasi yang besar, tetapi juga basis ekonomi yang diperlukan untuk itu. Konflik dengan penduduk asli Taiwan memerlukan pembangunan aparat penindasan ke dalam dan semua posisi penting diduduki oleh kader-kader Kuomintang. Dijauhkannya orang Taiwan dari kekuasaan telah mengganggu legitimasi politik di dalam negeri. Jadi, paling sedikit harus dicapai keberhasilan ekonomi, tidak hanya dalam rangka persaingan dengan sistem komunis, melainkan karena alasan dalam negeri sendiri agar dalam jangka panjang dapat memuaskan penduduk.

Tahun 1952 Jepang atas tekanan AS menandatangani perjanjian perdamaian dengan Taiwan yang mengantar pada pendekatan kembali di bidang ekonomi kepada mantan negara induk. Tahun 1954 disepakati pakta pertahanan bersama dengan AS yang menjadi dasar bantuan militer besar-besaran ke Taiwan. Selain itu, AS menjamin pengiriman penasihat dan bantuan modal dalam jumlah besar. Bantuan modal ini pada awalnya sekitar 10% dari PNB Taiwan. Taiwan mendapatkan bantuan per kapita dari AS nomor dua terbesar setelah Israel. Paling penting adalah dibukanya pasar AS untuk produk Taiwan dengan nilai

tukar yang dapat menjamin kemampuan bersaing Taiwan. Langkah penting selanjutnya untuk perkembangan ekonomi Taiwan adalah pelaksanaan reformasi pertanian dengan bantuan AS. Hasil pemerataan pemilikan tanah yang dilaksanakan secara konsekuen (dengan ganti rugi untuk pemilik tanah) merupakan pembagian tanah yang sangat merata bagi petani yang sekarang memiliki tanah dan berusaha sendiri. Langkah-langkah lanjutannya seperti didirikannya koperasi paksa a.l. untuk pemasaran, pengelolaan, badan penasihat pertanian, tunjangan penelitian pertanian, pembangunan industri yang menopang pertanian (pupuk dan pabrik pemuliaan hasil pertanian), dan impor makanan ternak dari AS, sejak tahun 1953 telah menghasilkan pertumbuhan pertanian luar biasa yang tercermin pada peningkatan ekspor hasil pertanian yang meningkat pesat. Tingginya pertumbuhan sektor pertanian telah memberikan berbagai macam prestasi yang diberikan sektor pertanian untuk kegiatan ekonomi lainnya, merupakan persyaratan penting untuk pelaksanaan industrialisasi di tahun '60-an. Sekali lagi atas tekanan AS, sejak tahun 1961 dilaksanakan industrialisasi strategi ekspor, yang awalnya dimulai di bidang ekspor pemuliaan hasil pertanian (a.l. sayuran kaleng), industri ringan (tekstil) dilanjutkan dengan produk perakitan padat karya (di sini muncul citra negara berupah rendah) dan secara bertahap memasuki produksi padat modal dan teknologi intensif (kendaraan bermotor, mesin, elektronik). Berkat tumbuhnya pasar dalam negeri, perluasan industri eks-

por diiringi pembangunan industri berat di bidang industri dasar dan industri antara, walaupun agak tertunda telah memperluas kegiatan ekspor sehingga sekarang terdapat sektor industri yang lengkap. Strategi pertumbuhan dilaksanakan dengan bantuan intervensi negara (badan perencanaan pusat, rencana pembangunan empat tahun). Perusahaan negara pada awalnya memiliki bagian sebesar 50%-60% dan sekarang hanya memiliki 20% dari seluruh industri. Sekarang ini terdapat pembagian kerja pemerintah-swasta, pemerintah membiayai industri basis yang berorientasi pasar dalam negeri dan memerlukan modal besar serta mempunyai risiko besar. Sedangkan perusahaan swasta, yaitu perusahaan dalam negeri Taiwan berkonsentrasi dalam kegiatan industri ekspor yang lebih kecil. Namun, pusat keputusan kebijaksanaan ekonomi tetap berada di tangan aparat kader Kuomintang yang dibangun dengan struktur ganda seperti halnya partai komunis di daratan Cina. Pengendalian tidak langsung, terutama meliputi sektor perdagangan luar negeri yang mempraktekkan proteksionisme menyeluruh di satu pihak dan tunjangan ekspor melalui subsidi di lain pihak. Selain itu, dibangun zone perekonomian khusus sejak tahun 1965 yang juga memberikan perlakuan istimewa untuk investasi asing.

Mengingat tingkat perekonomian saat ini, pimpinan politik Taiwan sekarang menghadapi dua masalah. Di bidang politik luar negeri, Taiwan semakin mendapat tekanan dari AS yang dirugikan oleh surplus perdagangan Taiwan. Seperti terhadap Je-

pang, AS menuntut Taiwan agar lebih membuka pasar dalam negeri dan melakukakan apresiasi NT-\$ (dolar Taiwan), untuk mengurangi surplus ekspor; hal ini mungkin akan menimbulkan krisis. Namun, yang lebih mencolok adalah kontradiksi politik dalam negeri yang makin meningkat antara kemakmuran yang telah dicapai dan kurangnya partisipasi politik yang tetap dipertahankan dengan alasan yang sukar dipercaya, yaitu ancaman militer dari daratan Cina dan penyusupan komunis. Hal yang lebih masuk akal adalah kekhawatiran orang Taiwan asli bahwa suatu saat akan terjadi kesepakatan antara Kuomintang dan partai komunis Cina dengan mengorbankan mereka. Mengingat pada tahap akhir kekuasaan Chiang Chingguo (anak tertua Chiang Kai Sek) terdapat sedikit liberalisasi, yang memuncak tanggal 15 Juli 1987 dengan penghapusan UU keadaan darurat yang sudah berlaku sejak tahun 1948, tetapi sekaligus disahkan juga UU keamanan nasional yang mempertahankan keadaan lama.

Badan pemerintahan yang dipilih tahun 1947 di daratan Cina tidak mengalami perubahan (juga komposisi personalnya). Hanya anggota parlemen dari propinsi di Taiwan dipilih secara periodik. Kekuasaan tetap berada di tangan Kuomintang, yang terorganisir seperti partai komunis menurut prinsip leninis. Dari sekitar 2,3 juta anggota, sekitar 65% orang Taiwan. Semakin tinggi seseorang naik dalam hierarki kepemimpinan, makin besar bagian orang-orang yang berasal dari daratan Cina atau keturunannya, yang secara informal masih

dianggap orang Cina daratan walaupun mereka juga dilahirkan di Taiwan. Pusat kekuasaan berada pada 150 anggota komite sentral dengan 30 anggota komisi tetap. Li Denghui yang dipilih pada 13 Januari 1988 sebagai presiden menggantikan Chiang Chingguo adalah seorang reformis, merupakan orang Taiwan pertama memegang jabatan ini. Pimpinan Kuomintang sekarang ini terdiri atas dua kelompok, yaitu kelompok liberal-konservatif yang berkiblat pada partai demokrat liberal yang berkuasa di Jepang, dan "garis keras", yaitu golongan tua yang masih hidup dan aktif di militer maupun parlemen dan menolak setiap perubahan *status quo*. Di hadapan kedua kelompok ini berdiri kelompok oposisi Taiwan yang juga terpecah dalam beberapa kelompok. Terdapat orang Taiwan yang anggota Kuomintang (pejabat karir dan lapisan pengusaha baru), di dalam Kuomintang sendiri termasuk sayap reformis; selanjutnya oposisi yang mengorganisir dirinya dalam bentuk partai demokrat progresif terpecah dalam dua kelompok: wakil-wakil elite pribumi Taiwan (a.l. mantan tuan tanah), terutama menuntut turut berkuasa, pemilu yang baru dan perubahan UU, tetapi tidak menginginkan perubahan sistem. Di sisi lain adalah oposisi radikal yang menuntut demokrasi dan kemerdekaan Taiwan dari daratan Cina. Jadi, masalah yang dihadapi Kuomintang adalah dari alasan politik maupun ekonomi (juga dalam hal reputasi politik luar negeri), harus membiarkan berlangsungnya suatu reformasi yang demokratis, terutama dengan lapisan peng-

usaha baru Taiwan yang makin mengimbangi dominasi pemerintah. Namun, jika Kuomintang mengabdikan tuntutan lapisan pengusaha Taiwan, kemungkinan besar Kuomintang secara politis akan menjadi golongan minoritas karena mayoritas penduduk justru terdiri atas orang Taiwan asli dan bukan pendatang dari daratan Cina. Selain itu, dalam jangka panjang politik satu-Cina akan terancam, juga andaikata Kuomintang dapat membebaskan diri dari isolasi politik luar negeri, yang hanya akan berguna bagi perkembangan ekonomi selanjutnya.

Kepustakaan: H. Asche, *Industrialisierte Dritte Welt? Ein Vergleich von Gesellschaftsstrukturen in Taiwan, Hong Kong, und Südkorea*, Hamburg 1984; U. Menzel, *In der Nachfolge Europas. Autozentrierte Entwicklung in den ostasiatischen Schwellenländern Südkorea und Taiwan*, München 1985; A. Gälli, *Taiwan R.O.C. Eine chinesische Herausforderung*, München 1988.

um **take-off** Istilah kunci dalam perdebatan teori pembangunan di tahun '50-an dan '60-an, yang memperlihatkan tahap penting pertumbuhan ekonomi dalam model mula-mula tiga tahap dan kemudian lima tahap dari Walt W. Rostow, yang memisalkan suatu perekonomian nasional dengan lepas landasnya pesawat terbang. Tahap-tahapnya adalah: a. masyarakat tradisional; b. penciptaan persyaratan untuk lepas landas; c. tahap lepas landas; d. menuju perekonomian yang matang; e. zaman konsumsi massa. Rostow menyebutkan tiga persyaratan untuk mencapai tahap lepas landas: a. peningkatan investasi produktif dari 5% atau kurang sampai 10% atau lebih dari pendapatan nasional; b. pembangunan satu atau banyak sektor industri penting dengan tingkat per-

tumbuhan yang tinggi; c. adanya atau cepat timbulnya kerangka kelembagaan sosial dan politik.

Kritik: jalan rencana pembangunan yang terlalu kaku, berasal dari proses historis negara industri, menganggap dapat begitu saja diterapkannya ke negara berkembang, melokalisir terutama hambatan pembangunan intern; memiliki penjelasan kausalitas yang sangat minim dan kecilnya kemampuan melakukan ramalan.

Kepustakaan: W.W. Rostow, *The Process of Economic Growth*, New York 1952; *ibid*, *Stadien wirtschaftlichen Wachstums*, Göttingen 1960.

dn **tanaman ekspor** Hasil-hasil pertanian yang seluruh atau hampir seluruhnya untuk ekspor. Definisi lain untuk itu adalah *cash crops*. Tanaman ekspor biasa ditanam di perkebunan dengan metode pengolahan modern (menggunakan sarana produksi yang kurang bersifat padat karya).

dn **Tanzania** Merupakan model pembangunan sosialis di Afrika. Apa yang dapat dimengerti sebagai sosialisme Afrika, kebanyakan berorientasi pada Tanzania dan prinsip-prinsip mengenai jalan pembangunan ekonomi yang dilakukan Tanzania. Tanzania merupakan negara LLDC dan MSAC serta Negara AKP. Tanzania merupakan negara Afrika yang menerima bantuan pembangunan terbanyak dari Jerman.

1. Dari pantai Afrika Timur dan pulau-pulau Sansibar serta Pemba dataran semakin menanjak ke arah pedalaman dengan dataran tinggi berbukit (*Southern Highlands* dan Kili-manjaro) dan berlembah, merupakan bentuk relief negara ini. Sesuai de-

ngan keadaan alam, Tanzania memiliki berbagai macam daerah tumbuh-tumbuhan dan iklim, penyebaran daerah subur secara tidak merata, banyak hujan dan berguna untuk pertanian berkorelasi dengan penyebaran penduduk.

2. Lebih dari 2/3 penduduk (tahun 1987: 24,2 juta jiwa; ibu kota yang resmi adalah Dodoma, tetapi secara *de facto* masih Dar es Salaam) mendiami 1/10 luas daratan (945.187 km²); daerah yang padat dihuni (Kilimanjaro, pantai dan danau) berhadapan dengan daerah yang hampir tidak dihuni manusia (kepadatan penduduk 26 jiwa/km²). Penduduk Afrika di Afrika daratan terdiri atas suku Bantu (90%), Massai, dan Suaheli (campuran Arab dan Negro). Selain orang Eropa (Inggris) dan Arab terdapat kelompok minoritas India-Pakistan, yang karena keunggulannya di bidang perdagangan dan perekonomian serta kurangnya keinginan mereka untuk berintegrasi ke masyarakat Tanzania, telah menimbulkan masalah tersendiri. Politik nasionalisasi yang dijalankan pada tahun-tahun terakhir, menyebabkan makin berkurangnya penduduk India-Pakistan. Sejak tahun 1967 Kiswahili dijadikan bahasa nasional, sedangkan bahasa Inggris tetap berfungsi sebagai bahasa perdagangan dan pendidikan. Kelompok agama terdiri atas Islam (30%), Kristen (30%), Hindu, dan Animis (suku Bantu). Situasi demografis Tanzania ditandai oleh rendahnya bagian penduduk usia kerja (49% penduduk berusia di bawah 15 tahun), tingginya pertumbuhan penduduk (1980-1989: 3,1%), dan rendahnya tingkat perkem-

bangsan ekonomi yang diikuti semakin meningkatnya urbanisasi (penduduk perkotaan: tahun 1960 sekitar 5%; tahun 1989: 31%), tingkat harapan hidup 49 tahun (1989).

3. Hal yang dominan dalam perekonomian Tanzania adalah sektor pertanian, menyumbang sebesar 66% PNB dan 75% nilai ekspor. Lebih dari separo produksi pertanian berasal dari kegiatan ekonomi subsistensi; bagian produksi untuk pasar dihasilkan desa-desa *ujamaa* yang diorganisir dalam koperasi di tanah pertanian negara oleh petani besar dan di perkebunan yang berorientasi ekspor. *Cash crops* terpenting adalah kopi (40%), kapas, tembakau, kacang mete, serat sisal, cengkeh (terutama dari Pemba), dan teh. Pertanian saat ini sedang mengalami krisis; walaupun ada bantuan terarah untuk pembangunan pedesaan dalam kerangka konsep *ujamaa*, tetapi produksi menurun. Sejak tahun 1978 bahan pangan untuk penduduk dari produksi sendiri tidak mencukupi sehingga Tanzania harus mengeluarkan sebagian besar penerimaan ekspor untuk mengimpor bahan pangan. Politik harga yang tidak menarik di tahun-tahun belakangan ini, tidak adanya barang konsumsi sebagai daya tarik di pedesaan, masalah ekologi di beberapa daerah dan dampak dari transmigrasi paksa penduduk yang hidup terpencar dalam desa-desa yang besar, menghambat petani untuk memasarkan produk mereka. Konsekuensinya adalah kembali ke produksi subsisten, juga penyelundupan bahan pangan ke negara tetangga serta pasar gelap. Industri

yang relatif sedikit berkembang terkonsentrasi pada pengolahan bahan mentah dalam negeri. Pangsa pada PDB meningkat dari 3% (1962) menjadi 7% (1989). Walaupun di tahun-tahun terakhir telah didorong diversifikasi dan ekspansi industri melalui investasi besar-besaran, *output* tetap tidak banyak mengalami perubahan. Dalam rangka Deklarasi Arusha, sejak tahun 1967 perusahaan asing dinasionalisasi. Perusahaan negara kebanyakan diawasi *National Development Corporation* (NDC); perusahaan dengan mitra asing biasanya berlangsung dalam rangka *joint venture*. Tahun 1984 dan 1986 sebaliknya dijalankan tindakan liberalisasi dan sebagian swastanisasi perekonomian. Kurangnya daerah pemasaran, gangguan energi dan air, terutama kurangnya bahan mentah dan suku cadang akibat kurangnya devisa—untuk impor minyak bumi tahun 1980 harus digunakan separo dari seluruh hasil ekspor—merupakan faktor-faktor yang membatasi perkembangan industri sehingga menyebabkan rendahnya kapasitas kerja industri (25%).

Negara ini memiliki cadangan mineral yang belum banyak diteliti (uran, nikel, tembaga, emas, bijih besi, fosfat, batu bara); penambangan intan hampir mencapai akhirnya, belum lama ini ditemukan gas bumi. Mitra dagang terpenting Tanzania adalah MEE, selanjutnya Indonesia dan India. Integrasi ekonomi regional dengan Kenya dan Uganda sejak EAC dibubarkan, tidak berfungsi lagi. Sejak akhir tahun '60-an situasi perdagangan luar negeri makin memburuk. Karena Tanzania bergantung

pada perkembangan pasar dunia untuk hasil pertanian (75% hasil ekspor keseluruhan berasal dari produk pertanian), jatuhnya harga produk pertanian di pasar dunia dan bersamaan dengan krisis ekonomi dalam negeri Tanzania, membawa dampak negatif untuk perdagangan luar negeri sekaligus tingginya ketergantungan impor untuk alat-alat pertanian dan industri serta barang modal untuk program investasinya. Ketimpangan ekonomi di bidang-bidang seperti sistem fiskal, sektor produktif/tidak produktif, dan sektor formal/informal akan mengganggu masa depan perspektif pembangunan Tanzania (R. Hofmeier, hlm. 166). Memburuknya *terms of trade*, perang dengan Uganda, kelaparan dan konsekuensi internal dari politik perekonomian dan sosial yang kurang dipertimbangkan, juga berpengaruh negatif terhadap pembangunan.

4. Sebelum pengaruh Eropa (abad ke-16) masuk, daerah pantai timur Afrika dikuasai oleh bangsa Arab. Akibat konflik antarsuku yang menyangkut perdagangan budak dan perpindahan penduduk di daerah Tanzania sekarang ini, muncul kepala suku yang menang perang. Posisi kepala suku makin diperkuat selama masa penjajahan dalam rangka *indirect rule* Jerman dan Inggris, makin kehilangan wibawa di mata penduduk akibat ketergantungannya pada pemerintahan kolonial dan penghapusan sistem kepala suku. Setelah Perang Dunia I berakhir, daerah yang sejak tahun 1891 dikuasai kerajaan Jerman sebagai Jerman-Afrika Timur diambil alih oleh Inggris sebagai daerah man-

dat liga bangsa-bangsa. Penanaman tanaman ekspor yang telah dimulai oleh orang Jerman dilanjutkan Inggris karena ketidakpastian hukum Tanganyika sebagai daerah mandat PBB, dibandingkan Inggris-Afrika Timur (Kenya) keterlibatan Jerman di sana kecil. Karena kecilnya perbedaan di antara 120 suku, dicapai kemerdekaan Tanzania tahun 1961 dengan jalan damai dipimpin Nyerere melalui gerakan pembebasan TANU (*Tanganyika African National Union*). Sansibar, setelah penandatanganan perjanjian Helgoland-Sansibar sejak tahun 1890, merupakan protektorat Inggris dan diperintah oleh Sultanat Arab dan tahun 1963 mendapatkan kemerdekaannya. Dalam kerangka *indirect law* Inggris, orang Arab dan Asia selama dijajah Inggris dapat mempertahankan posisi tradisional mereka sebagai elite politik dan ekonomi serta menghalangi setiap kesempatan orang Afrika untuk tampil ke muka. Setelah penindasan yang berlangsung lama oleh partai-partai yang dikuasai orang Arab, pada setiap pemilu dapat mengubah posisi dari minoritas menjadi mayoritas melalui manipulasi, tahun 1964 ASP (*Afro Shirazi Party*) mewakili kepentingan orang Afrika mengambil alih kekuasaan. Elite Arab dibubarkan dan Sansibar sampai tahun 1977, ketika untuk pertama kalinya diadakan kembali pemilu sejak tahun 1963, diperintah secara despotis oleh diktator Karume. Tahun 1977 berlangsung penyatuan Tanganyika dan Sansibar menjadi Perserikatan Republik Tanzania. Di bawah pengganti Karume (dibunuh tahun 1972), Jumbe, ASP, dan TANU

bergabung menjadi partai kesatuan yang baru CCM (*Chama Cha Mapinduzi*, Partai Revolusi). Walaupun ada kesadaran bersama sebagai bangsa Afrika di kalangan elite, tetapi usaha integrasi Tanzania dipersulit oleh banyaknya perbedaan (misalnya di Tanzania: Kristen/pedesaan - Sansibar: Islam/perkotaan) sehingga perlawanan laten yang ada sejak lama pada awal tahun '80-an pecah menjadi gerakan; daerah Pemba juga merasa dirugikan. Presiden Jumbe tahun 1984 meletakkan jabatan; penggantinya adalah Ali Hassan Mwinyi. Ia melaksanakan liberalisasi ekonomi dan politik, serta melalui banyak perubahan UU telah menyesuaikan sistem politik dan sistem kepartaian untuk demokrasi satu partai Union. Partai CCM memainkan peran dominan dalam sistem presidial sebagai pemberi dorongan untuk suatu gagasan tujuan politik masyarakat dan konsep pembangunan dan dalam UU yang baru (1977) secara formal berkedudukan lebih tinggi daripada parlemen dan pemerintah. Dengan perubahan UU yang membatasi jabatan presiden selama dua kali masa jabatan, mempermudah keinginan pergantian jabatan presiden tahun 1985 yang diusulkan Nyerere tahun 1980. Penggantinya adalah Mwinyi (di Sansibar: S.S. Hamad, sejak awal tahun 1988: O.A. Juma).

5. Tahun 1967 dengan Deklarasi Arusha, oleh Presiden dan Ketua Partai Yulius Nyerere telah dirancang pengembangan model sosialisme *ujamaa*, bertujuan membangun negara sosial yang disesuaikan dengan situasi khas Tanzania melalui pertum-

buhan ekonomi, mengurangi ketergantungan sepihak terhadap luar negeri, demokratisasi ekonomi dan masyarakat serta menghapus ketimpangan sosial. Titik tolak strategi pembangunan otosentris diwarnai oleh contoh pembangunan Cina dan gagasan tradisi Afrika mengenai komunalisme, adalah pembangunan sektor pertanian sesuai dengan prinsip *self-reliance*. Dengan dikumpulkannya penduduk pedesaan dan diorganisir dalam bentuk koperasi di desa-desa *ujamaa*, selain perbaikan produksi kolektif dan penyediaan infrastruktur, juga dimobilisasi kesadaran politik yang diperlukan bagi pembangunan demokrasi langsung melalui pendidikan agar masyarakat mampu berpartisipasi pada semua proses keputusan. Untuk mewujudkan *self-reliance*, selain mobilisasi penduduk untuk proyek-proyek swadaya dan desentralisasi pemerintahan, juga bidang pendidikan yang berorientasi baru, tidak lagi bersifat formal tetapi lebih menjurus pada praktek, memainkan peranan penting. Untuk mengendalikan dan mengawasi perubahan struktur yang direncanakan, banyak didirikan lembaga-lembaga pemerintah dan setengah pemerintah; birokrasi yang berlebihan, lamban, dan korup ini menunjukkan diri sebagai kontra produktif. Konsentrasi untuk usaha-usaha pembangunan bidang sosial dan aspek distribusi telah melalaikan produksi perekonomian. Walaupun ada keberhasilan besar, terutama di bidang pendidikan (tingkat melek huruf sekitar 80%) dan di bidang kesehatan (sekitar 90% penduduk berada kurang dari 10 km

dalam jangkauan pelayanan kesehatan), disebabkan rendahnya keikutsertaan dan tidak efisiennya pelaksanaan kegiatan, secara keseluruhan desa-desa *ujamaa* tidak menimbulkan hasil pembangunan yang memuaskan (penolakan terhadap langkah pembangunan birokrasi "dari atas").

Dukungan terhadap gerakan pembebasan di Afrika bagian Selatan, panafricanisme, gerakan nonblok dan tuntutan akan peranan negara berkembang yang lebih kuat untuk mengembangkan tata ekonomi dunia baru, menandai politik luar negeri Tanzania sejak masa kemerdekaannya. Nyerere a.l. pernah menjadi juru bicara negara garis depan dan ketua OAU (1984/1985). Di tahun '70-an meningkatkan kerja sama dengan SADCC dan negara tetangga di Afrika Tengah. Krisis ekonomi dan politik di tahun-tahun terakhir, percobaan perebutan kekuasaan di tahun 1983 dan bertambahnya kritik terhadap liberalisasi ekonomi yang dijalankan oleh Mwinyi, dituduh telah meninggalkan prinsip sosialisme, telah menimbulkan keraguan akan adanya stabilitas politik, yang juga telah dijamin oleh Nyerere (Oktober 1987 dipilih kembali sebagai ketua CCM).

Kepustakaan: V. Hundsdoerfer/W. Küper, *Bibliographie zur sozialwissenschaftlichen Erforschung Tansanias*, München 1977; J. Nyerere, *Die Arusha-Deklaration 10 Jahre danach*, Verlag Internationale Solidarität 1977; P. Meyns, *Nationale Unabhängigkeit und ländliche Entwicklung in der Dritten Welt. Das Beispiel Tansania*, Berlin 1978; W. Pfennig/K. Voll/H. Weber (ed.), *Entwicklungsmodell Tansania: Sozialismus in Afrika*, Frankfurt 1980; J.D. Barkan/J.J. Okumu, *Politics and Public Policy in Kenya and Tanzania*, New York 1982; R. Hofmeier, "Tanzania", dlm.: *HDW II*, 5, Hamburg 1982, hlm.: 162 dst.; R. Hofmeier, "Tan-

target lima - tata ekonomi dunia baru

sania- 'Entwicklungsmodell' oder Entwicklungsbankrott?', dlm.: *Jahrbuch Dritte Welt I*, München 1983, hlm. 204-220.

ah

target lima → UNIDO.

TASF (*Technical Aid Special Fund*, Dana Khusus Bantuan Teknik) → ADB.

tata ekonomi dunia baru Sejak UNCTAD III yang diadakan di Santiago de Chile tahun 1972, tuntutan negara berkembang mengenai tata ekonomi dunia baru telah menjadi tema yang menguasai konferensi-konferensi internasional terutama dalam kerangka sistem PBB. Maksud pengertian itu sendiri adalah hubungan ekonomi internasional antara negara berkembang dan negara industri, dengan keuntungan di pihak negara industri, harus diubah melalui reformasi sehingga negara berkembang dapat lebih banyak mendapatkan manfaat dari perekonomian dunia. Gagasan ini tidak harus berisi keinginan untuk melakukan perubahan mendasar tata ekonomi dunia, seperti halnya yang dituntut oleh kelompok radikal dan yang ditakuti oleh kelompok konservatif dan liberal.

Tuntutan akan adanya sebuah tata ekonomi dunia baru bermuara tahun 1974 dengan pengesahan dua pernyataan melalui Sidang Umum PBB.

Pernyataan dan program aksi untuk membangun sebuah tata ekonomi dunia baru pada 9 Mei 1974 dan Piagam Hak dan Kewajiban Negara-Negara dalam Ekonomi negara-negara anggota pada 12 Desember 1974. Pada prinsipnya berdasarkan dua argumentasi: a. negara-negara industri harus bersedia memberi ganti rugi kepada negara berkembang terhadap kerugian yang mereka tim-

bulkan akibat kolonialisme dan neokolonialisme, pengisapan selama masa penjajahan dan ketidakadilan dalam hubungan perdagangan setelah masa penjajahan; b. kerja sama dan persamaan hak antara negara industri dan negara berkembang merupakan persyaratan sehingga negara berkembang tidak dirugikan oleh hambatan perdagangan yang dilakukan negara industri, dan negara industri berkewajiban membantu negara berkembang dalam pembangunannya melalui alih sumber daya dan alih modal, teknologi, dsb.

Menurut pengelompokan BMZ, daftar tuntutan negara berkembang akan sebuah tata ekonomi dunia baru meliputi: a. *politik global*: pengakuan terhadap negara berkembang sebagai mitra penuh dan mempunyai hak yang sama dalam masyarakat internasional; pengakuan akan hak setiap negara atas jalan pembangunan yang dipilih sendiri; pengakuan penuh terhadap kedaulatan setiap negara atas kekayaan alam termasuk haknya untuk menasionalisasi perusahaan asing menurut peraturan nasionalnya; b. *perdagangan dan ekonomi*: perubahan pembagian kerja internasional agar menjamin negara berkembang mendapatkan bagian yang lebih besar dalam produksi industri dunia dan memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan (→ UNIDO); pengurangan tindakan proteksi negara industri; akses ke pasar di negara industri untuk barang jadi dan setengah jadi dari negara berkembang; penghapusan hambatan perdagangan tarif dan nontarif; perjanjian preferensi untuk negara berkembang di bidang

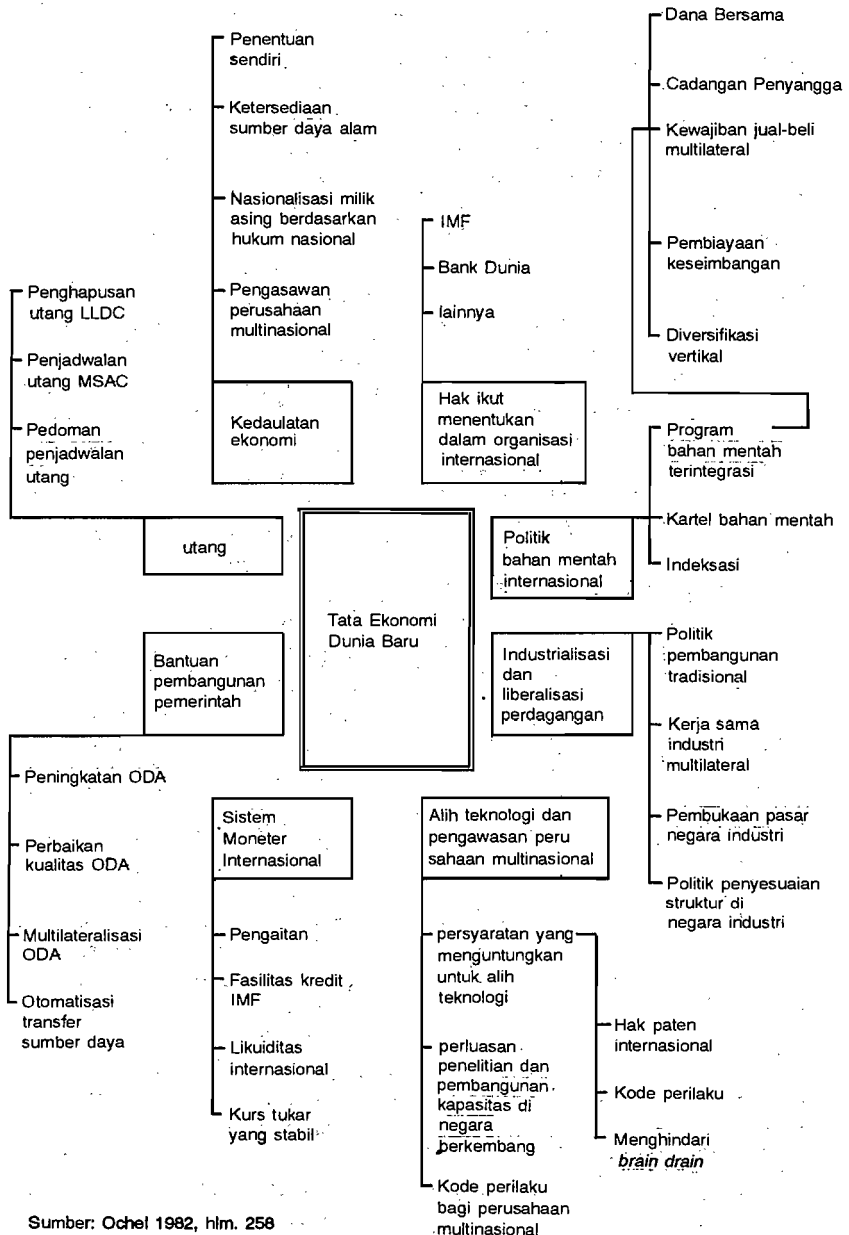
perdagangan dan bidang lainnya; pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan perusahaan transnasional; dukungan untuk kerja sama antar-negara berkembang (*ECDC, *TCDC, *collective self-reliance); c. *bahan mentah*: Perjanjian Bahan Mentah untuk setiap jenis bahan mentah sebagai bagian dari program bahan mentah terintegrasi; bantuan untuk pengolahan lanjut bahan mentah di negara asal dan dengan demikian meningkatkan nilainya; pengizinan *kartel bahan mentah; peningkatan daya saing produk alam terhadap produk sintetis; pencegahan pemborosan sumber daya alam; akses mendapatkan hasil dasar laut untuk negara berkembang (→ konferensi hukum laut); d. *industrialisasi*: peningkatan investasi di sektor industri, agar negara berkembang mencapai bagian yang lebih tinggi dalam produksi industri dunia (25% sampai tahun 2000); e. *energi dan teknologi*: pengertian akan keterbatasan cadangan minyak dan gas bumi; pengamanan terhadap daya beli yang berasal dari hasil ekspor energi; pengembangan sumber energi baru (energi yang regeneratif dan tidak merusak lingkungan); bantuan untuk mengembangkan teknologi tepat guna untuk negara berkembang; alih teknologi dari negara industri dengan persyaratan khusus (paten, lisensi, dsb.); f. *jasa*: peningkatan keikutsertaan negara berkembang dalam bidang pengangkutan laut, asuransi serta pariwisata; g. *pertanian*: peningkatan dan diversifikasi produk pertanian negara berkembang untuk memenuhi kebutuhan pangan (→ pangan); peningkatan bantuan

keuangan untuk pembangunan sektor pertanian; perbaikan program bantuan bahan pangan yang ada (→ program pangan dunia); h. *mata uang dan keuangan*: perhatian terhadap kepentingan negara berkembang dalam aturan baru sistem mata uang dunia; akses yang lebih baik ke pasar modal bagi negara berkembang; lebih banyak lagi hak negara berkembang untuk turut menentukan dalam organisasi keuangan internasional terutama di *IMF dan penghapusan pengawasan detil atas penggunaan dana dari organisasi ini untuk tindakan penyehatan perekonomian di negara berkembang; peningkatan dana untuk menyeimbangkan neraca pembayaran; tindakan untuk melindungi negara berkembang terhadap akibat dari inflasi; tindakan baru untuk mengurangi utang negara berkembang; i. *bantuan pembangunan*: perwujudan tujuan bantuan pembangunan oleh negara industri (0,7% PNB); penyesuaian dan kemudahan persyaratan pemberian bantuan pembangunan; peningkatan dana untuk organisasi bantuan pembangunan internasional (*Journalisten Handbuch Entwicklungspolitik*, 1988, hlm. 246 dst.).

V. Matthies memberikan kesimpulan sementara mengenai perdebatan tata ekonomi dunia baru: "Walupun telah diadakan banyak konferensi dan perundingan di tahun-tahun kemudian, tetapi—diukur dengan luas dan jangkauan daftar tuntutan negara berkembang—hasil usaha-usaha yang dijalankan hingga kini untuk mewujudkan tata ekonomi dunia baru relatif kecil. Paling tidak setelah ber-

tata ekonomi dunia baru

Gambar 8: Daftar tuntutan negara berkembang untuk sebuah tata ekonomi dunia baru



Sumber: Ochel 1982, hlm. 258

tahun-tahun diadakan perundingan tanpa hasil, pada konferensi UNCTAD V di Manila telah dicapai kesepakatan mengenai elemen dasar pembiayaan bersama untuk membiayai program bahan mentah terintegrasi (Maret 1979). Namun setelah adanya terobosan ini, dalam perundingan politik bahan mentah antara negara industri dan negara berkembang masih diperlukan perdebatan berlarut-larut, sebelum program bahan mentah yang direncanakan—dalam dimensi yang sangat kecil daripada yang direncanakan—dapat diterima. Dibandingkan dengan suasana euforia di pihak negara berkembang dan kegugupan di pihak negara industri di tahun 1974, sekarang ini di mana-mana lebih banyak terlihat gejala kelelahan dan kejenuhan".

Kecenderungan baru dalam hubungan antara negara industri dan negara berkembang di tahun-tahun terakhir: orientasi baru dalam mendukung politik pembangunan di bidang kebutuhan dasar serta usaha-usaha di banyak negara berkembang melakukan reformasi ekonomi untuk menyesuaikan diri pada perubahan ekonomi dunia.

Hingga tahun 1984 tidak ada tuntutan dari negara berkembang yang terwujud atau hanya terwujud dalam bentuk yang telah banyak mengalami perubahan.

Kepustakaan: K. Dorner, *Probleme der weltwirtschaftlichen Integration der EL*, Tübingen/Basel 1974; R. Jonas/M. Tietzel (ed.), *Die Neuordnung der Weltwirtschaft*, Bonn-Bad Godesberg 1976; T. Dams/G. Grohs (ed.), *Kontroversen in der internat. Rohstoff-politik*, München/Mainz 1977; K.P. Sauvant/H. Hasenpflug (ed.), *The New International Economic Order. Confrontation or Cooperation between North*

and South, Frankfurt 1977; V. Matthies, *Neue Weltwirtschaftsordnung. Hintergründe, Positionen, Argumente*, Opladen 1980; W. Ochel, *Die Entwicklungsländer in der Weltwirtschaft*, Köln 1982; J.S. Singh, *A New International Economic Order*, New York 1982; U. Andersen, *Entwicklungspolitik und "neue Weltwirtschaftsordnung" in der Kontroverse*, cet. ke-2, Stuttgart 1983; H. Elsenhans, *Nord-Süd-Beziehungen. Geschichte-Politik-Wirtschaft*, cet. ke-2, Stuttgart 1987.

dn
tata informasi dunia baru Atau tata informasi internasional baru; untuk pertama kalinya tahun 1976 dengan tegas dituntut oleh negara-negara nonblok dan tahun 1980 diformulasi sebagai tujuan dalam suatu resolusi di konferensi UNESCO. Sampai pertengahan tahun 1980 tata ini merupakan penyulut dalam diskusi-diskusi tingkat internasional. Konsep tata informasi dunia baru berakar a.l. dalam kritik terhadap sifat searah arus informasi di seluruh dunia dan perbedaan besar dalam struktur komunikasi antara negara industri dan negara berkembang: berita-berita, program televisi, film di bioskop, musik dan video, buku-buku, iklan, juga informasi ilmu pengetahuan, teknik dan ekonomi, dll., terutama mengalir dari Utara ke Selatan. Pertukaran informasi di antara negara berkembang sendiri sangat kurang. Negara industri memiliki wewenang luas dalam media massa (kantor berita, stasiun tv, perusahaan multinasional surat kabar) dan teknologi komunikasi modern (satelit, komputer, telepon, telex, dll.). Singkatnya: negara industri melalui monopoli dapat menghasilkan dan menyebarluaskan informasi; negara berkembang tetap mempunyai peran sebagai penerima berita yang pasif. Diskusi mengenai tata infor-

masi dunia baru (dalam sorotan Konflik Utara-Selatan) dengan demikian bertema ketergantungan yang ekstrem negara berkembang terhadap luar negeri dalam bidang informasi dan akibatnya, misalnya untuk integritas kultural, kedaulatan nasional, dan perkembangan ekonomi negara berkembang. Tata informasi dunia baru berkaitan erat dengan tujuan akan sebuah tata ekonomi dunia baru, sekaligus merupakan elemen dan persyaratan tata ekonomi dunia baru karena di satu pihak informasi merupakan sumber daya ekonomi khusus, di lain pihak setiap pertukaran ekonomi memerlukan adanya komunikasi.

Kritik terhadap tata informasi yang berlaku dimulai pada awal tahun '70-an, dilontarkan terutama dari pihak negara nonblok dan masuk ke dalam forum internasional. Tahun 1973 secara bertahap dan tahun 1976 secara eksplisit dituntut mereka serta diperdebatkan dalam UNESCO. Di pihak negara industri mewakili doktrin arus informasi bebas (*free flow of information*), artinya yang diatur melalui pasar, sedangkan negara berkembang (dengan dukungan negara sosialis) menuntut arus informasi yang bebas dan seimbang (*free and balanced flow of information*). Termasuk instrumen ini: pengawasan negara terhadap media. Negara industri melihatnya sebagai suatu usaha untuk mengubur kebebasan pers dan mengabsahkan sensor pemerintah, tetapi dengan demikian cenderung mengesalkan masalah arus informasi bebas terbatas pada perlindungan media dari intervensi pemerintah. Bahwa selain itu ketimpangan dalam tata in-

formasi dunia yang ada bertentangan dengan prinsip pertukaran informasi bebas, diperjelas terutama dalam laporan MacBride. Laporan yang diterima secara aklamasi dalam konferensi UNESCO tahun 1980 mengatasi perdebatan yang berlangsung hingga kini—di sana kebebasan pers, di sini sensor pemerintah—melalui analisis struktural ketergantungan global dalam bidang informasi dan bermuara dalam 82 daftar anjuran lewat sebuah tata informasi dunia baru. Pilar utama adalah: a. mendorong ke arah kemandirian negara berkembang dalam bidang informasi, terutama melalui strategi komunikasi nasional, perluasan kapasitas komunikasi yang ada serta aksi-aksi internasional; b. dampak sosial dari komunikasi dikendalikan sesuai perkembangan melalui integrasi ke dalam strategi pembangunan, partisipasi penduduk dalam pengambilan keputusan; dikurangnya segi komersialisasi komunikasi dan akses yang sama ke informasi teknik; c. menciptakan situasi untuk jurnalisme bebas dan bertanggung jawab serta penyebaran informasi mengenai negara lain yang lengkap dan berdasarkan kenyataan; d. demokratisasi kegiatan komunikasi, dalam pengertian hak-hak yang luas, individual, dan kolektif untuk berkomunikasi; e. mengembangkan dan mengintensifkan kerja sama internasional yang sederajat di bidang informasi.

Konferensi di Beograd (1980) dinilai sebagai puncak perdebatan mengenai tata informasi dunia baru; negara berkembang menuntut tindakan-tindakan konkret. Namun, usaha-

usaha mereka secara keseluruhan hanya membuahkan hasil yang sedikit: negara industri sampai saat ini melalui bantuan teknik dan keuangan untuk pembangunan infrastruktur komunikasi di negara berkembang dapat menolak tuntutan akan suatu perubahan struktural daripada *status quo*. Negara berkembang juga tidak lagi bersikeras menuntut adanya instrumen yang memang masih dipersoalkan, yaitu pengawasan negara terhadap arus informasi yang dapat digunakan baik sebagai pendorong pembangunan maupun represif dan mengamankan kekuasaan. Perkembangan penting berlangsung di bidang pemberitaan: monopoli kantor berita skala dunia yang sering dikritik seperti *Associated Press* (AP), *United Press International* (UPI), *Reuters*, *Agence France Press* (AFP), dan *Tass* mulai melunak: sementara itu hampir setiap negara berkembang memiliki kantor berita nasional dan setiap kawasan geografi Dunia Ketiga memiliki sistem pertukaran berita regional. Kebanyakan inisiatif ini dilakukan atau dipersiapkan oleh pemerintah atau UNESCO; sebaliknya inisiatif non-pemerintah—seperti IPS—bisa dikatakan jarang.

Pertengahan tahun '80-an keterlibatan negara berkembang mengenai tata informasi dunia baru terasa berkurang—mengingat masalah utang dan tindakan penertiban negara industri yang berpengaruh (ancaman-ke luar atau keluar dari UNESCO, pemotongan dan penundaan iuran untuk berbagai organisasi PBB). Tujuan tata informasi dunia baru tetap seperti

sebelumnya, tetapi sekarang ini realisasinya (menyeluruh) tidak terlihat.

Kepustakaan: H. Koschwitz, "Freiheit der Information" oder "Kommunikationsimperialismus", dlm.: *APuZ* 15/77, hlm. 11-38; *Viele Stimmeneine Welt. Bericht der Internationalen Kommission zum Studium der Kommunikationsprobleme unter dem Vorsitz von Sean MacBride an die UNESCO*, Konstanz 1981; R. Dill, "Zwischen Freiheit und Gleichgewicht", dlm.: *Vereinte Nationen* 31 (1983), hlm. 179 dst.; M. Pendakur, "The New International Information Order after the MacBride Commission Report: an International Powerplay Between the Core and the Periphery Countries", dlm.: *Media Culture and Society* 5/1983; G. Turner/G. Zeidler (ed.), *Dritte Welt und technische Kommunikation*, Stuttgart 1983; B.C. Witte, "Medienförderung in der Dritten Welt", dlm.: *Vereinte Nationen* 31 (1983), hlm. 184 dst.; J. Becker, "Massenkommunikation", dlm.: *Nord-Süd-Konflikt*, Frankfurt 1985; H. Reimann, "Massenkommunikation", dlm.: D. Nohlen/P. Waldmann (ed.), *Dritte Welt*, München 1987, hlm. 315 dst.; B. Schenk, "Struktur des internationalen Nachrichtenflusses: Analysen der empirischen Studien", dlm.: *Rundfunk und Fernsehen* 36 (1988), I, hlm. 36 dst.; J. Becker, "Internationaler Nachrichtenfluss: Eine Stellungnahme zum Aufsatz von Birgit Schenk", dlm.: *Rundfunk und Fernsehen* 36 (1988), I, hlm. 45 dst.; R.A. White, "Progress Toward a New World Information and Communication Order. A Third World Perspective", dlm.: *The Third Channel - IBS Journal of International Commission* 6 (1988), hlm. 783 dst.

mik

TCDC (*Technical Cooperation among Developing Countries*) Kerja Sama Teknik Antar negara Berkembang: strategi pembangunan yang didukung oleh konsep *collective self-reliance* dalam rangka hubungan Selatan-Selatan, sejak awal Dasawarsa Pembangunan Kedua menjadi sorotan kepentingan politik pembangunan. Titik tolak di satu pihak adalah makin meningkatnya kesadaran akan peran teknologi dalam proses pembangunan dan di lain pihak adalah kritik ter-

hadap dampak problematis politik pembangunan, yaitu alih teknologi (vertikal) dalam bentuk ongkos langsung dan tidak langsung (menajamnya masalah kesempatan kerja, reproduksi ketergantungan teknologi, efek belajar yang kecil, alih teknologi yang terbalik: *brain drain*).

Karena lebih mengutamakan penanganan masalah ekonomi dalam kerja sama Selatan-Selatan, ECDC, baru dalam konferensi TCDC tahun 1978 di Buenos Aires disepakati definisi TCDC menyeluruh. Jika teknik dimengerti sebagai produk situasi sosio-kultural, akan dijaui pengertian mekanistik, seperti menjadi ciri kerja sama teknik yang ada selama ini. Dengan adanya kaitan erat antara pengetahuan dan teknik di satu pihak dan pembangunan ekonomi di lain pihak, TCDC mendefinisikan kerja sama meluas di berbagai bidang dengan tujuan meningkatkan pembangunan yang ditentukan sendiri di negara-negara Dunia Ketiga. Tujuan utama adalah prinsip solidaritas aktif pada realisasi kepentingan bersama.

Rencana aksi yang disepakati di Buenos Aires untuk meningkatkan dan mengimplementasikan TCDC, tetap tidak seperti yang diharapkan. Hal ini bukan saja disebabkan posisi negara berkembang yang saling bertentangan, juga karena terbatasnya minat negara industri akan makin kuatnya kerja sama Selatan-Selatan.

1. Sesuai dengan definisi menyeluruh TCDC, bidang aksi yang spesifik dan banyak merupakan bidang kerja sama yang luas. Bidang ini mencakup sektor-sektor ekonomi, teknik-pengetahuan, kultural, dan so-

sial. Sesuai dengan keragaman ini, beragam juga bentuk-bentuk organisasinya. Dalam hal tingkatan pelaksanaannya, dapat dibedakan antara bentuk organisasi nasional, bilateral (subregional), regional, inter-regional, dan global. Di tingkat nasional terlihat bahwa pembuatan rencana-rencana teknologi yang terintegrasi, sangatlah mendesak. Sebagai instrumen untuk implementasi rencana-rencana ini adalah pusat-pusat teknologi nasional, serta usaha-usaha di bidang pendidikan. TCDC di tingkat subregional, regional, dan inter-regional terealisasi terutama dalam pengelompokan (*pooling*) dan organisasi kapasitas pengetahuan-teknologi yang ada, kegiatan-kegiatan di sektor pendidikan, penggunaan bersama pusat-pusat penelitian, perluasan kerja sama teknik dalam rangka kerja sama politik antarnegara berkembang yang memiliki kepentingan religius-kultural dan ekonomi bersama, mencari jalan keluar bersama masalah-masalah sektoral serta pendirian perusahaan multinasional regional. Pada tingkat global TCDC merupakan instrumen sebuah tata teknologi internasional baru. Sasaran utama pemikiran reformasi mendasar secara struktural adalah sistem dalam PBB. Usul-usul untuk itu mencakup mulai dari pendirian organ kerja sama yang permanen—semacam OECD Selatan (Oteiza/Rahman)—pembentukan sebuah Persatuan Internasional untuk TCDC (Sagasti), usul untuk membuat sebuah Komisi Khusus Dunia Ketiga untuk TCDC (Gunatilleke) sampai pada penguatan peran UNDP (pen-

dirian pusat-pusat administrasi baru dan dana untuk TCDC).

2. Peran negara industri berangkat dari tesis bahwa kemandirian tidak berarti autarki, melainkan lebih berarti "otonomi pada pengambilan keputusan" (Deklarasi Kuwait, 1977). Harapan-harapan konkret adalah: a. reorientasi metode dan konsep program-program tradisional dan praktek bantuan teknik bilateral dan multilateral; b. penyediaan dana untuk TCDC; c. pengutamaan proyek-proyek TCDC dalam rangka kerja sama teknik vertikal.

3. *Directory of services for TCDC* yang diterbitkan oleh UNDP sejak tahun 1977 memberitakan kegiatan-kegiatan TCDC. Pertengahan tahun '80-an dengan pembangunan sebuah sistem informasi TCDC dimulai *TCDC Information Referral System* (INRES). Sistem yang dibantu data oleh lebih dari 3.200 lembaga dan perusahaan, menyediakan sekitar 100 negara berkembang informasi-informasi berdasarkan subkategori tertentu (program pendidikan, jasa dan pelayanan tenaga ahli, dsb.) dalam bidang: perdagangan internasional, pemerintahan, pengetahuan, dan teknologi. Dalam tahap percobaan sejak tahun 1978 juga terdapat sebuah sistem data dengan jaringan komputer mengenai teknologi (*Technological Information Pilot System* [TIPS]) dengan 10 negara anggota. Sejak pertengahan tahun '80-an di tempat yang berpindah-pindah dilakukan pertemuan secara teratur untuk membuat program regional dan inter-regional, yang juga disebut "pasar TCDC". Di tahun 1986 dan 1987 saja 70 negara

berkembang berpartisipasi dalam pasar TCDC tersebut dan menyepakati 1.000 kegiatan TCDC. Mengenai kemajuan dan kegiatan-kegiatan TCDC, diinformasikan oleh majalah *TCDC-News* dan *Cooperation South* yang dikeluarkan UNDP.

4. Setelah rencana aksi dari Buenos Aires, TCDC diharapkan dapat membiayai diri sendiri. Selain dana untuk proyek-proyek tersendiri berdasarkan kategori tertentu berlangsung selama 5 tahun, akan diberikan dana tambahan untuk proyek-proyek multilateral pada tingkat regional, inter-regional, dan global, serta dana khusus untuk pengolahan proyek dan pengembangan pendekatan-pendekatan inovatif. Sumber-sumber dana selain UNDP adalah organisasi dalam PBB lainnya dan bank-bank pembangunan regional.

5. Kesenjangan antara harapan yang tinggi dan hasil kegiatan TCDC dapat dilihat dalam 4 sebab: a. dalam hal memformulasi tujuan (kurangnya pengaitan balik *collective self-reliance* dan *self-reliance*, kurangnya operasionalitas tujuan-tujuan sosial dan ekonomi serta konflik-konflik yang ada di antara tujuan-tujuan ini); b. dalam hal faktor-faktor lingkungan internasional (mekanisme kerja sama teknologi vertikal yang didominasi negara industri); c. batasan internal dalam hal material, personal, dan pandangan; d. hubungan antarnegara berkembang (heterogenitas di negara berkembang, pembentukan subsentra-subsentra regional—terutama yang dilakukan NIB, kurangnya komunikasi antarnegara berkembang). Namun, kendala yang paling sulit diatasi ter-

dapat dalam internasionalisasi produksi yang makin meningkat.

6. Seperti terlihat dalam konferensi untuk mengadakan evaluasi (*review-meetings*), sulit untuk diharapkan kemajuan-kemajuan spektakuler di bidang TCDC; yang lebih akan terjadi adalah meningkatnya hierarkisasi kerja sama teknologi dalam rangka pembagian kerja internasional. Usaha-usaha untuk penggunaan pengetahuan dan teknik untuk pembangunan dalam rangka sistem PBB, akhirnya tetap merupakan pertikaian pembagian antarelite nasional akan *the world's intellectual capital* dalam sistem ekonomi dunia yang didominasi oleh negara industri kapitalistis dan beberapa subsentra Selatan.

Kepustakaan: F.R. Sagasti, "Technological Self-Reliance and Cooperation Among Third World Countries", dlm.: *World Development* 4 (1976), no. 10/11, hlm. 939 dst.; B. Morse, "South-South-Technical Cooperation, Collective Self-Reliance and the UNDP", dlm.: *Development Dialogue* II/1977, hlm. 101 dst.; *The Buenos Aires Plan of Action for Promoting and Implementing TCDC*, UNDP, New York o.J.; E. Oteiza/A. Rahman, "Technische Kooperation zwischen Entwicklungsländern als Dimension einer neuen internationalen Ordnung", dlm.: K.M. Khan (ed.), *Self-reliance als nationale und kollektive Entwicklungsstrategie*, Köln 1980, hlm. 241 dst.; W. Hummer, "Regionale Technische Kooperation und Transfer von Technologie am Beispiel Zentral- und Südamerikas sowie der Karibik", dlm.: *German Yearbook of International Law* 24/1981, hlm. 377 dst.; K. Bodemer, *Technische Zusammenarbeit zwischen Entwicklungsländern. Rahmenbedingungen, Strategien, Perspektiven*, *FES-Analysen no. 94, Bonn 1981; *ibid*, "Technische Zusammenarbeit zwischen Entwicklungsländern (TCDC) - ein Weg zur Überwindung von Abhängigkeit?", dlm.: *Gegenwartskunde* 4 (1982), hlm. 19 dst. kb

TCP (*Technical Cooperation Program*) Program Kerja Sama Teknik (1976), bantuan cepat untuk proyek-

proyek pembangunan pertanian dan pedesaan kecil berjangka pendek dalam rangka FAO.

TDB (*Trade Development Board*, Dewan Pengembangan Perdagangan) → UNCTAD.

teknologi gen Dimengerti sebagai keseluruhan metode yang mengisolasi material gen, membentuk kombinasi-kombinasi baru, serta menggunakan dan mengembangbiakkan material turunan yang telah dikombinasikan baru. Teknologi gen berguna untuk negara berkembang jika digunakan untuk keuntungan tempat (tersedianya bahan mentah, akses yang mudah ke bidang-bidang penelitian) dan di lain pihak untuk menghadapi langsung masalah-masalah konkret (pangan dan kesehatan, pengadaan energi, pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan).

Di berbagai negara berkembang mulai dilakukan penelitian teknologi gen dan bio sendiri (misalnya India, Singapura, Cina, Thailand, Brasilia, Kuba). Selain itu, terdapat proyek-proyek pembangunan bilateral, kerja sama multilateral di pusat-pusat penelitian teknologi gen di pertanian negara berkembang.

Pihak yang menyetujui teknologi gen ber alasan bahwa melalui penerapannya di negara berkembang dapat dihadapi penyakit infeksi, terutama penyakit tropis, secara efektif. Sekaligus diharapkan dapat ditemukan jalan keluar masalah energi melalui substitusi minyak bumi, bensin, dan kayu, penghancuran beban kimia (terutama nitrat) dan pembasmi hama serta penyakit pada tanaman, selain itu juga diharapkan peningkatan

produksi pangan. Sebaliknya, kritikus teknologi gen mengkhawatirkan makin kuatnya ketergantungan negara berkembang dari bank-bank gen milik negara industri, terutama pada hak paten milik perusahaan transnasional yang dilindungi hukum. Selanjutnya para kritikus memperlihatkan bahwa keragaman genetika flora dan fauna makin menurun, masalah ekologi akibat produksi pertanian yang monokultur akan meningkat, dimungkinkan pengembangbiakan resistensi melalui tanaman-tanaman perkebunan baru, secara keseluruhan utang negara berkembang tumbuh bersama metode produksi dan pengolahan yang baru.

Sulit untuk menilai teknologi gen: dampak jangka menengah dan panjang belum diteliti, serta standar keamanan pada penelitian dan pengembangan teknologi bio tidak dapat dialihkan dari negara industri ke negara berkembang—tidak saja karena terjadi *brain drain*.

Kepustakaan: "Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages zu 'Chancen und Risiken der Gentechnologie'", dlm.: *Bundestags-Drucksache 10/6775* tgl. 6 Januari 1987, hlm. 248 dst.; J. Spangenberg, "Mehr oder billigere Energie durch Biotechnik?", dlm.: *Der Überblick* 1/1988, hlm. 27 dst.; E. Römppczyk, "Entwicklung durch Biotechnologie?", dlm.: *E+Z* 4/1988, hlm. 4 dst.; ibid, *Gentechnologie im Nord-Süd-Kontext*, Bonn 1988.

ms
teknologi tepat guna Dimengerti sebagai kebutuhan teknologi negara berkembang akan teknologi yang sesuai. Kebutuhan-kebutuhan ini memperhatikan situasi masalah pembangunan yang dihadapi oleh kebanyakan negara berkembang. Misalnya, masyarakat negara berkembang—kecuali negara-negara OPEC yang

kaya—ditandai oleh kekurangan modal dan pengangguran. Mereka hanya mendapatkan bagian kecil (5%) dari sumber daya investasi negara industri, tetapi potensi tenaga kerja mereka tiga kali lebih besar. Akibatnya, teknologi yang padat modal dan hemat modal terlihat lebih cocok untuk situasi negara berkembang dibandingkan alih teknologi termmodern (padat modal dan tidak butuh banyak tenaga kerja). Penggunaan teknologi tepat guna penting artinya bagi pembangunan, terutama sekali dalam rangka strategi kebutuhan dasar. Jika produksi negara berkembang diubah untuk memenuhi pengadaan penduduknya, akan dapat diproduksi barang-barang yang sederhana secara padat karya; kesempatan kerja yang meningkat akan mengurangi marginalitas, membantu distribusi pendapatan menjadi lebih adil dan membentuk pasar dalam negeri.

Perkembangan konsep teknologi tepat guna yang berorientasi faktor produksi kerja, berasal dari Schumacher/London. Penelitian-penelitian selanjutnya—terutama menyangkut penggunaan konkret—dilakukan a.l. oleh Bank Dunia, ILO, FAO, UNIDO, UNESCO, dan DAC. Pendukung teknologi tepat guna beranggapan bahwa negara industri akan memberikan negara berkembang teknologi termmodern hanya jika menguntungkan negara industri sendiri. Tidak saja kurangnya penerimaan konsep ini oleh pengambil keputusan di negara berkembang, yang menyebabkan konsep teknologi tepat guna tidak berperan dalam pembangunan di negara berkembang. Neraca alih teknologi

yang padat modal memaksa untuk berpikir lain. Teknologi tepat guna yang padat karya sebagian besar masih harus dikembangkan. Usaha-usaha di negara industri bertujuan melakukan atau mendukung penelitian-penelitian yang sesuai atau juga membantu rencana-rencana negara berkembang untuk mendirikan biro-biro informasi mengenai teknologi tepat guna (misalnya dalam rangka TCDC).

Kepustakaan: E.F. Schumacher, *Die Rückkehr zum menschlichen Mass*, Reinbek 1977; H. Singer, *Technologies for Basic Needs*, Genf 1977; R.S. Eckans, *Appropriate Technologies for Developing Countries*, Washington 1977; F. Stewart/J. James, *The Economics of New Technology in Developing Countries*, Pinter 1982; J. Meyer-Stamer, "Technologie und Dritte Welt", dlm.: *Jahrbuch Dritte Welt* 1989, hlm. 100 dst.

tempat tinggal Menurut perkiraan PBB sekitar 1 miliar manusia tidak terpenuhi kebutuhan dasar akan tempat tinggal. Tidak dimungkinkan mendapat angka-angka kebutuhan yang lebih tepat untuk daerah tempat tinggal, akibat kurangnya angka-angka statistik, dan karena tidak adanya kesatuan definisi untuk tempat tinggal yang manusiawi (HABITAT). Hal yang pasti, masalah tempat tinggal dalam sepuluh tahun terakhir terus menajam. Penyebabnya adalah pertumbuhan penduduk (→ penduduk) dan urbanisasi yang meningkat akibat pelarian dari pedesaan, serta kekurangan sumber daya untuk pembangunan rumah oleh konsumen (tidak ada daya beli akibat distribusi pendapatan yang tidak merata) dan pemerintah (neraca anggaran, utang, disparitas anggaran alternatif). Akibat jumlah penduduk yang makin meningkat, tumbuh dengan cepat pe-

mukiman kumuh yang ditolerir di pingiran-pinggiran kota (*slums, favelas, barriadas, bidonvilles*). Lingkungan tempat tinggal yang sempit dan tidak adanya jasa negara (pembuangan limbah air dan padat, rumah sakit, dsb.) membuatnya menjadi potensi konflik sosial (kriminalitas, alkoholisme, pelacuran) dan merugikan kesehatan jiwa raga penduduk. Di Caracas, misalnya, sekitar 40% penduduk hidup di perkampungan kumuh, di Mexico City 42%, di Kalkuta 67%, dan di Buenaventura 80%.

Meskipun ada usaha-usaha internasional untuk mengatasi masalah global kekurangan tempat tinggal (HABITAT), kegiatan praktis berada di tangan pemerintah nasional. Namun, usul-usul perencanaan dan usaha mereka (program *low-cost-housing*, memusnahkan perkampungan kumuh, "pusat penangkapan" potensi pelarian dari pedesaan) sering memerangi hanya gejala, bukan penyebab ekonomi dan sosial dari kekurangan tempat tinggal tersebut (miskin, pengangguran, banyak anak).

Kepustakaan: D. Hampel/H. Hinzen/E. Schmidt, *Wohnen in der Dritten Welt*, Darmstadt 1981; G. Heilig, "Das Städtewachstum in der Dritten Welt", dlm.: P.J. Opitz (ed.), *Die Dritte Welt in der Krise*, München, 1984; M. Boleat, *National Housing Finance Systems*, London dll., 1985; J.S. Tulchin, *Habitat, Health and Development*, London 1986; DESWOS-Brief (6 x setahun); K. Kohut (ed.), *Die Metropolen in Lateinamerika - Hoffnung und Bedrohung für den Menschen*, Regensburg 1986; UNCHS, *Global Report on Human Settlements* 1986, Oxford 1987; Seong-Kyu Ha (ed.), *Housing Policy and Practice in Asia*, London 1987.

ah/rs
teologi pembebasan Pertengahan tahun '60-an muncul berbagai aliran teologi Amerika Latin yang merupa-

kan refleksi terhadap usaha pembebasan manusia yang ditindas di Amerika Latin. Dari sana diturunkan primat ortopraksi di depan ortodoksi dan pilihan bebas tanpa syarat untuk si miskin. Teologi pembebasan mengerti analisis pengetahuan sosial sebagai bagian konstitutif dari teologi dan berangkat terutama dari teori *dependencia*. Teologi ini digunakan untuk menentang pemisahan sejarah duniawi dan sejarah mitos, serta menekankan arti politis gereja dengan secara umum mensyaratkan antikekerasan; kekerasan ditolerir hanya dalam situasi-situasi terpaksa. Pengertian pembebasan mempunyai tiga tingkat arti: a. pembebasan dari penyebab yang menghasilkan ketergantungan struktural (pembebasan ekonomi, sosial, politik, kultural); b. pembebasan manusia sepanjang proses sejarah dengan menekankan pada peran pendidikan; c. pembebasan dari dosa. Menurut model "Gereja Rakyat" (E. Dussel), usaha berorientasi kepada semacam jemaat basis yang di antara mereka perlu diadakan demokratisasi gereja dari bawah. Di banyak daerah hal ini menjadi penunjang banyak organisasi swadaya (serikat buruh, gerakan rakyat seperti gerakan tani yang tidak memiliki tanah). Konflik seputar teologi pembebasan berlangsung sekitar tahun 1983 dan 1984; selain dituduh disusupi ajaran marxis, ada juga masalah struktur gereja yang menyorot hubungan pembebasan politik dan penyelamatan oleh Tuhan serta konsekuensi politik dari "keinginan untuk si miskin". Wakil-wakil utama teologi pembebasan berada dalam sebuah spektrum yang melampaui batas

anutan kepercayaan: R. Alves, H. Assmann, C. Boff, L. Boff, E. Cardenal, L.F. Castillo, E. Dussel, J.R. Garcia-Murga, E. Gera, G. Gutiérrez, J.C. Scanono, dan J.L. Segundo.

Kepustakaan: G. Gutiérrez, *Theologie der Befreiung*, München 1973; L. Boff, *Aus dem Tal der Tränen ins gelobte Land*, Düsseldorf 1982; E. Dussel, *Herrschaft und Befreiung. Ansatz, Stationen und Themen einer lateinamerikanischen Theologie der Befreiung*, Fribourg 1985; N. Greinacher (ed.), *Konflikte um die Theologie der Befreiung. Diskussion und Dokumentation*, Zürich 1985.

pb teori dan strategi pertumbuhan

Ketika dengan pembebasan politik negara berkembang di tahun '50-an dan '60-an muncul masalah pembangunan, terdapat pendekatan-pendekatan penjelasan teoretis yang berasal terutama dari tiga teori ekonomi penting dan dapat digunakan untuk memformulasi sebuah politik pembangunan: teori jenjang *a la* Rostow yang menjelaskan secara ekonomi-historis, teori pertumbuhan *a la* Harrod-Domar dan teori perdagangan luar negeri *a la* Smith, Ricardo, dan Heckscher-Ohlin. Pembangunan dan pertumbuhan menurut teori-teori ini adalah identik.

Teori jenjang Rostow membedakan 5 tahap perkembangan sejarah yang akan dilalui oleh semua negara: masyarakat tradisional, masyarakat peralihan, masyarakat tinggal landas, masyarakat industri yang matang, dan masyarakat konsumsi massa. Perkembangan sejarah memperlihatkan bahwa negara industri yang sekarang sedang hidup di tahap ke-4 dan ke-5, sementara masalah pokok negara berkembang terletak di tahap ke-3, yaitu sedang berusaha menerobos lingkaran setan kemiskinan dan mencapai pro-

ses pertumbuhan yang ditopang sendiri. Lingkaran setan kemiskinan (*'circulus vitiosus'*) terdiri atas mata rantai kausalitas sirkuler, yang mengatakan bahwa dalam situasi miskin dimungkinkan tabungan yang sedikit untuk melakukan investasi yang memang sudah kecil, berarti hanya akan terjadi pendapatan yang sedikit dan pada gilirannya berakibat situasi miskin. Menurut teori-teori pertumbuhan yang dikenal, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dideterminasi oleh hubungan kuota tabungan ke koefisien modal (*capital-output-ratio*). Kendala pembangunan yang menentukan adalah kurang modal akibat ketidakmampuan memiliki tingkat tabungan dalam negeri. Untuk suatu *'take-off'* yang sukses, menurut Rostow, paling sedikit harus ditabung 15%-20% PDB dan disalurkan ke investasi-investasi yang produktif. Kesenjangan modal akan dijabatani dengan sebuah *'big push'*. Dana pembiayaan yang diperlukan didapat dari bantuan pembangunan dan investasi langsung swasta. Peningkatan besar-besaran faktor modal dianggap sebagai syarat yang harus dan cukup untuk mencapai sebuah proses pertumbuhan yang ditopang sendiri. Impuls-impuls pertumbuhan "dari atas", yang keluar dari investasi modal, menginduksi sebuah perubahan struktur produksi secara teknik-ekonomi, mengantarkannya ke *horizon of rising expectations* dan beralih ke perilaku ekonomi yang rasional dan pada gilirannya akan mengubah struktur sosial-ekonomi keseluruhan.

Pengalaman Eropa dengan Marshall Plan sejak lama menjadi model.

Pada analogi penggunaan konsep ini terhadap negara berkembang, diabaikan beberapa perbedaan mendasar: memang situasi Eropa setelah perang dunia ditandai oleh sangat kurangnya modal dalam bentuk sumber daya teknik dan keuangan, serta standar hidup di sana ketika itu berada di bawah beberapa negara berkembang, tetapi ketika itu mereka memiliki faktor produksi yang menentukan, *human capital*. Di sini suatu masyarakat yang telah berkembang maju, memiliki *know how* teknik dan organisasi sebuah perekonomian modern, sedang menderita kekurangan modal barang. Situasi pembangunan kembali Eropa dengan demikian sangat berbeda dengan pembangunan pertama sebuah perekonomian nasional modern, seperti yang harus dilakukan oleh negara berkembang. Negara berkembang harus membentuk sebuah struktur ekonomi-teknik yang paralel dan timbal balik dengan perilaku ekonomi-rasional dan sistem-sistem politik.

Kegagalan strategi pertumbuhan yang melulu menekankan pada hal ekonomi-teknik menyebabkan pencarian kendala-kendala pembangunan selanjutnya. Disiplin-disiplin terdekat, yaitu politologi dan sosiologi, berusaha mengidentifikasi banyak *constraints* yang terlebih dahulu atau setidaknya disingkirkan paralel dengan proses pertumbuhan ekonomi. Hasil pendekatan ini disebut sebagai *'teori modernisasi'*. Tujuan mencapai struktur-struktur sosial-ekonomi baru, menurut pendekatan ini akan dituntun melalui perubahan kesadaran, pembentukan cara berpikir yang rasional

dan pengenalan nilai-nilai baru serta perilaku ekonomi yang baru.

Teori-teori perdagangan luar negeri melihat perdagangan internasional sebagai *engine of growth* (→ teori perdagangan luar negeri). Kekayaan sumber daya bahan mentah banyak negara berkembang, menurut teori ini akan hanya berguna bagi negara berkembang melalui kemungkinan perdagangan internasional (teori *vent for surplus*, A. Smith, Myint). Sebagai imbalan, negara berkembang dapat mengimpor barang modal yang sangat dibutuhkan. Karena kebanyakan negara berkembang kaya akan tenaga kerja, dari teori faktor-proporsional Heckscher & Ohlin dikatakan bahwa secara prinsip negara berkembang memiliki keuntungan ongkos komparatif dengan membuat produksi yang padat karya. Dari sini diturunkan strategi pembangunan berorientasi ekspor: proses produksi padat karya dipindahkan ke negara berkembang atau diambil alih sesuai teori siklus produksinya. Dan benar, sederet NIB dengan strategi industrialisasi berhasil mendapatkan tingkat pertumbuhan di atas rata-rata (Korea Selatan, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Meksiko, Brasilia). Namun, ekspor mereka makin kuat dihadapkan pada hambatan-hambatan perdagangan dari pihak negara industri. Hal ini menjerumuskan negara-negara tersebut ke krisis utang dan keuangan yang dalam.

Di tahun '70-an strategi pertumbuhan menjadi sasaran kritik terus-menerus. Di negara-negara dengan tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita di atas rata-rata pun terlihat

bahwa pertumbuhan ini biasanya hanya mengalir ke kelompok kecil elite sosio-ekonomi. Efek teori *trickle down* yang berarti, tidak muncul. Masalah distribusi pendapatan menjadi sorotan pokok diskusi politik pembangunan. Bank Dunia mempostulasi sebuah strategi *redistribution with growth*. Menurutny, paling tidak di masa depan pertumbuhan pendapatan dapat dibagi merata.

Kepustakaan: W.A. Lewis, *Die Theorie des wirtschaftlichen Wachstums*, Tübingen/Zürich 1956; A.O. Hirschman, *The Strategy of Economic Growth*, Cambridge 1960; W.W. Rostow, *Stadien wirtschaftlichen Wachstums*, Göttingen 1967; B. Fritsch (ed.), *Entwicklungsländer*, Köln/Berlin 1968; M. Bohnet (ed.), *Das Nord-Süd-Problem*, cet. ke-3, München 1974; J.B. Donges/L. Müller-Ohlsen, *Aussenwirtschaftsstrategien und Industrialisierung in Entwicklungsländern*, Tübingen 1978.

hpn
teori dependencia Pertengahan tahun '60-an di Amerika Latin muncul studi-studi ekonomi dan sosial yang meletakkan pengertian *dependencia* (ketergantungan) di tengah-tengah sorotan analisis dan diharapkan: pada tingkat teori menjadi sebuah penjelasan mengenai keterbelakangan serta kemacetan pembangunan (→ pembangunan/teori-teori pembangunan) di Amerika Latin, dan di tingkat politik diharapkan memasok elemen-elemen strategi mengatasi keterbelakangan dan ketergantungan.

Bukan merupakan suatu kebetulan bahwa studi-studi *dependencia* muncul di masa itu, dan bahwa tema "ketergantungan" dalam waktu singkat memonopoli diskusi ilmu sosial di Amerika Latin. Hasil yang tidak memuaskan dari dasawarsa pembangunan yang diproklamirkan PBB dan *Alliance for Progress* di Amerika

Latin yang dielu-elukan, artinya krisis pertumbuhan Amerika Latin di awal tahun '60-an, tidak saja menghapus kepercayaan terhadap strategi-strategi pembangunan yang sedang dilakukan, juga terhadap teori-teori pembangunan yang menjadi landasan dari pemikiran-pemikiran pembangunan yang berlaku. Terutama sekali teori modernisasi asal AS makin mendapat kritik karena pandangannya bersifat tidak historis dan karena etnosentrismenya yang jelas. Untuk ilmuwan-ilmuwan marxis, P.A. Baran, menawarkan pendekatan untuk orientasi baru teoretis, karena dengan definisi alih *surplus* ia berhasil melampaui batasan khas struktur motif dari ekspansi metropol yang imperialistis dalam penelitian imperialisme marxis, dan untuk pertama kalinya membahas secara sistematis konsekuensi imperialisme terhadap negara-negara yang terkena. Pada sisi nonmarxis, Raul Prebisch dengan teori mengenai memburuknya secara sekuler *terms of trade* untuk barang primer sebagai hubungan perdagangan antara negara-negara Amerika Latin dan negara industri, yang dimengerti sebagai pengisapan, dan sebagai alasan terpenting kesulitan pembangunan di Amerika Latin. Kedua pendekatan tersebut dengan demikian mempertanyakan secara radikal proses yang biasa terjadi menurut penelitian berdasarkan teori modernisasi, yang membahas negara-negara Dunia Ketiga sebagai sistem tertutup dan menganggap kendala-kendala pembangunan sebagai kekurangan modernisasi akibat masalah endogen.

Penulis-penulis *dependencia* mengambil pendekatan-pendekatan ini dan mempertanyakan penjelasan-penjelasan yang sudah ada mengenai keterbelakangan: keterbelakangan tidak lagi diinterpretasikan sebagai tertinggal di belakang tingkat perkembangan modern negara industri dan sebagai dampak kurangnya integrasi ke dunia modern, melainkan terbalik, sebagai konsekuensi integrasi negara berkembang (periferi) yang sangat efisien ke pasar dunia yang dikuasai negara industri yang kapitalis (sentra, metropol). Jadi, keterbelakangan tidak lagi dianggap sebagai semacam situasi alami prasejarah, melainkan sebagai hasil sebuah proses historis yang determinan-determinannya perlu diteliti. Dengan demikian telah digambarkan kebersamaan pendekatan yang berada dalam pengertian umum teori *dependencia*. Kaitan kausalitas antara ketergantungan dan keterbelakangan tetap diperdebatkan, seperti pandangan mengenai karakter pembangunan yang tergantung dari luar serta kemungkinan mengatasi ketergantungan dan keterbelakangan dalam kerangka pasar dunia yang kapitalis. Sederet penulis-penulis marxis melihat untuk periferi hanya ada kesempatan untuk sebuah perkembangan keterbelakangan (Frank) dan karenanya sebagai konsekuensi menganjurkan pemisahan dari pasar dunia, yang dalam pandangannya mensyaratkan sebuah revolusi sosialis. Penulis-penulis lain sebaliknya tidak menutup kemungkinan sebuah pembangunan kapitalistis di periferi, selama beberapa persyaratan kerangka

pasar dunia yang kapitalistis dapat diubah (→ tata ekonomi dunia baru).

1. *Ketergantungan dan keterbelakangan.* Sehubungan dengan elemen-elemen konstitutif dari ketergantungan dan pengaitannya ke proses keterbelakangan, secara umum dapat dibedakan dua posisi. Sebuah posisi sangat menekankan hal pengisapan dari sisi negara industri oleh perusahaan transnasional dengan dampak dekapitalisasi negara berkembang, baik melalui perdagangan (jatuhnya *terms of trade* dalam versi marxis, pertukaran tidak seimbang) dan/atau melalui transfer keuntungan yang besar. Posisi lain memang melihat aspek pengisapan, tetapi lebih menyorot jaringan struktural ekonomi periferi dengan sentra dan pendirian ekonomi periferi dengan berorientasi pada kebutuhan sentra.

Pada variasi melihat pengisapan melalui perdagangan sebagai kendala pembangunan utama (T. Dos Santos, A.G. Frank dalam karya-karya terdahulunya, G.M. Marini, D.F. Maza Zavala, dll.), ditekankan bahwa jatuhnya *terms of trade* dan pertukaran yang tidak seimbang di negara berkembang, memaksa untuk dilakukan lebih banyak ekspor agar dapat mempertahankan volume impor yang pernah diterima (pertumbuhan kemiskinan). Hal ini menuntut makin besarnya pengisapan tenaga kerja secara berlebihan, dengan penurunan daya beli yang berkaitan dengannya menimbulkan penyempitan pasar internal dan kesulitan pada industrialisasi substitusi impor yang telah dikenal. Pengisapan melalui perdagangan dihubungkan langsung dengan ketidak-

berdayaan ekonomi periferi untuk melaksanakan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan penduduk. Argumentasi serupa juga dikemukakan oleh penulis-penulis yang menyorot pengisapan oleh investasi asing. Transfer keuntungan yang sering sangat banyak dari negara berkembang berdampak dekapitalisasi, kemudian merugikan akumulasi modal dan pada gilirannya merugikan pengembangan kekuatan produktif. Akumulasi dalam kondisi ini tidak dimungkinkan tanpa pengisapan habis-habisan tenaga kerja, berdampak terus menurunnya pendapatan riil sebagian besar penduduk, dengan demikian menyempitkan pasar dalam negeri, kembali menjadi penyebab kemacetan industrialisasi.

Walaupun tesis dekapitalisasi kenyataannya bertopang pada studi dengan basis angka-angka agregat (terutama Bornschieier) serta melalui penelitian-penelitian spesifik negara dan industri (kebanyakan oleh instansi perencanaan di Amerika Latin) yang memberikan beberapa petunjuk empiris, tetapi pernyataan mengenai pengisapan melalui perdagangan mempunyai kelemahan pada konstruksi teoretis yang menjadi landasannya dan kekurangan landasan empiri serta ketidakjelasan temuan empiri. Suatu penjelasan umum dan cukup mengenai keterbelakangan tidak akan lahir dari konsep pengisapan model apa pun, jika tidak membahas sekaligus bahwa perubahan yang sering cepat dari *terms of trade* bukan merupakan kerangka persyaratan yang stabil untuk pembangunan dan jatuhnya harga ekspor sering menjadi penyulut ben-

cana-bencana pembangunan (krisis → utang).

Variasi strukturalis dari *dependencia* (C. Furtado, O. Sunkel, F.H. Cardoso, A. Quijano, A. Cordova, dll.) mempunyai keuntungan karena mereka tidak perlu mengambil teori-teori konsumsi kurang versi baru, yang dalam perdebatan mengenai imperialisme terdahulu mendapatkan nama buruk—dan memang pantas. Selain itu, mereka memberikan rekonstruksi historis proses periferisasi sebagai konsep pengisapan yang sebagian besar sangat skematis. Proses ini dimengerti sebagai dampak perubahan struktur internal dalam kerangka situasi pasar dunia yang selalu berubah-ubah dengan perubahan-perubahan struktur yang menimbulkan dorongan-dorongan modernisasi parsial dan terbatas pada masing-masing sektor ekspor saja, sementara sektor masyarakat lainnya memang berada di bawah kebutuhan sektor ekspor yang modern, tetapi tidak terintegrasi dalam sektor modern tersebut. Heterogenitas struktural ini berlaku sebagai ciri terpenting masyarakat periferi, yang membedakan dari masyarakat yang terkapitalisir seluruhnya dalam tipe metropolitan. Kapitalisme periferi juga tidak mempunyai dinamika pengembangan tenaga produktif metropolitan, tercermin terutama dari tidak adanya pembangunan otosentris (Samir Amin) akibat saling interaksinya berbagai formasi masyarakat dan pembatasan pasar internal yang berkaitan dengannya untuk barang-barang sektor kapitalis. Dengan demikian tidak terlihat adanya dinamika pertumbuhan menurut pola metropoli-

tan dari situasi interaksi produksi barang konsumsi massa dan sektor modal.

2. *Negara dan kekuasaan serta mengatasi ketergantungan.* Dengan beberapa pengecualian (terutama F.H. Cardoso), masalah negara dan kekuasaan politik di kapitalisme periferi dibahas sangat dangkal dalam literatur-literatur *dependencia*. Struktur kelas dan situasi kekuasaan yang meliputinya dianggap sebagai hasil ketergantungan pembangunan kapitalistik, serta sebagai jaminan kelas penguasa dalam memperlak negara agar cocok untuk persyaratan operasionalisasi modal yang optimal akibat adanya identitas kepentingan dengan sektor eksternal, dan kemudian muncul sebagai batu loncatan kepentingan modal metropol. Argumentasi mengenai negara dan kekuasaan demikian biasanya diturunkan dari premis-premis ekonomi. Analisis negara dan penelitian struktur-struktur kelas serta perubahannya, jarang dilakukan oleh penulis-penulis *dependencia*. Kekurangan ini terutama sekali dalam hal analisis negara, telah menimbulkan diskusi sengit mengenai "Negara dalam Kapitalisme Periferi" (T. Evers, W. Hein, G. Simonis, R. Tetzlaff, B. Töpfer, dll.) di Jerman, Amerika Latin, dan AS mengenai Negara Otoriter-Birokratis (O'Donnell, Collier, dll.), yang hasilnya tidak saling menunjang, tetapi bagaimanapun juga telah memberikan pengertian berbeda mengenai negara.

Kuatnya pemusatan penulis-penulis *dependencia* pada situasi pembangunan yang ditimbulkan oleh metropol kapitalis dan kurangnya pene-

litian mengenai struktur-struktur kelas serta situasi kepentingan kelas-kelas sosial, mungkin merupakan penyebab bahwa argumentasi-argumentasi untuk mengatasi ketergantungan dan keterbelakangan sering diformulasikan secara umum. Pernyataan seperti "hasil ketergantungan adalah makin besarnya ketergantungan" (G.M. Marini), memperlihatkan pengertian akan pembangunan yang sangat statis (dan pasti tidak dialektis, seperti yang diinginkan penulisnya) dan berharap bahwa perubahan sebenarnya akan terjadi hanya melalui revolusi dan tidak melihat adanya perubahan kualitatif di bawah gelombang ini. Pernyataan mengenai pelaku yang mungkin dari revolusi demikian juga sangat banyak: beberapa penulis mengatakan proletariat, yang lain mengatakan subproletariat yang termajinalisir, sementara yang lain lagi menunjuk tani miskin tanpa tanah, mahasiswa, dan secara umum massa yang makin menjadi miskin, dsb. Apakah dalam revolusi akan ada kemungkinan mengatasi ketergantungan dan keterbelakangan, bergantung juga apakah sistem dunia kapitalis dianggap dapat direformasi atau tidak. Barang siapa, a.l. seperti H.R. Sonntag, yang beranggapan bahwa "jika pembangunan di negara yang sudah berkembang secara implisit mempertahankan keterbelakangan, selama ada dominasi cara produksi kapitalis", harus berkesimpulan lain dibandingkan dengan yang mengatakan "perjanjian baru dengan metropol untuk persyaratan baru yang me-ningkatkan pembangunan otosentris" (D. Senghaas).

3. *Catatan penutup. Dependencia* sampai tahun '70-an menguasai diskusi ilmu sosial di Amerika Latin. Namun, penerapan tesis-tesis teori *dependencia* ke daerah-daerah lain di Dunia Ketiga, relatif terbatas. *Dependencia* dalam penelitian Afrika melihat beberapa titik temu dengan penelitian yang berorientasi pada definisi → neokolonialisme di sana. Sementara itu penelitian *dependencia* di Asia relatif lambat dan dalam bentuk selanjutnya memperhatikan pendekatan sistem dunia yang diajukan Wallerstein. Sejak itu, sederet pengembangan teori-teori *dependencia* dipertanyakan, sedikitnya tuntutan-tuntutan yang diformulasikan secara paradigmatis. NIB di Asia Timur justru dengan strategi industrialisasi berorientasi pasar dunia, mencapai keberhasilan pertumbuhan yang tidak dapat dibantah dan mengalami pembangunan otosentris menurut semua standar yang ada. Hal ini tidak dapat dijelaskan secara cukup oleh pendekatan-pendekatan *dependencia*. Selain itu, dinamika pembangunan yang sangat berbeda-beda di dalam Dunia Ketiga diperlihatkan oleh teori-teori *dependencia* dengan membagi dunia menjadi sentra dan periferi serta diberikan ciri-ciri struktur untuk kedua kategori ini, tidak dapat lagi melingkup proses diferensiasi di Dunia Ketiga secara analitis. Kegagalan akan realitas yang sangat terdeferensiasi ini berkaitan erat dengan ketidakberhasilan menerapkan pengertian historis yang mereka inginkan dalam proses keterbelakangan dan ketergantungan. Pada dasarnya mereka tidak keluar dari keterbalikan tesis teori moder-

nisasi: ekspansi global kapitalisme bagi teori modernisasi merupakan awal pembangunan, sedangkan bagi teori dependencia merupakan awal keterbelakangan. Apa yang telah ada sebelumnya, menurut teori modernisasi ada pramodern, sedangkan untuk teori *dependencia* adalah prakapitalis, dan pada kedua kasus tersebut tidak diteliti masing-masing dampak spesifik pada proses-proses pembangunan dan kemacetan-kemacetan selanjutnya. Teori modernisasi melihat penyebab keterbelakangan pada faktor endogen, sedangkan teori *dependencia* pada faktor eksogen. Meskipun sering ada tuntutan yang dialektis dari banyak penulis *dependencia*, interaksi situasi pasar dunia yang selalu berubah dan perkembangan internal di negara berkembang jarang dibahas secara dialektis, melainkan perubahan-perubahan politik dan sosio-ekonomi di negara berkembang dilihat sebagai refleksi kerangka situasi yang ditetapkan pasar dunia. Bahwa masyarakat-masyarakat negara berkembang bereaksi sangat berbeda-beda terhadap penentuan pasar dunia, memperjelas bahwa *dependencia* dengan pemusatan ke pasar dunia sangat mengabaikan penyebab-penyebab *endogen* dari pembangunan dan keterbelakangan. Arah yang benar dilakukan D. Senghaas akhir tahun '70-an mewakili posisi *dependencia*. Ia melakukan penelitian berbagai transformasi dan kemampuan inovasi setiap masyarakat.

Dengan demikian, terlihat satu jawaban atas krisis teori-teori *dependencia*, yaitu kembali ke pertanyaan yang muncul pada teori modernisasi,

tetapi jelas tidak dapat disamakan dengan versi baru dari teori modernisasi lama. Teori sistem dunia kapitalis terutama berawal dari I. Wallerstein, merupakan usaha selanjutnya untuk mengatasi krisis teori *dependencia*. Dalam pengabsolutan pasar dunia sebagai sistem dunia yang mendeterminasi semuanya dan dengan tuntutan paradigma yang tidak ada hentinya, pendekatan ini lebih mendekati sebuah *apothese* (pengelu-eluan) *dependencia*, dan bukan mengatasinya. Dengan pendekatan Fordis juga diusahakan mengatasi masalah pemusatan *dependencia* hanya ke pasar dunia dan menentukan situasi baru dan kemungkinan pembangunan di bagian-bagian Dunia Ketiga.

Jika di masa puncak *dependencia* dapat ditunjuk langsung penyebab keterbelakangan dan ketergantungan, kini sulit dijawab masalah dasar teori pembangunan akibat terjadinya proses diferensiasi yang makin besar di Dunia Ketiga dan teori krisis yang mendampinginya, serta karena makin dipertanyakannya pengertian pembangunan menurut pihak Barat yang industrialistis. Begitu pula (tetapi tidak hanya) *dependencia* mengalami kegagalan dengan semua tuntutan teoretisnya; memperdebatkannya sebagai teori, karenanya sangat menarik untuk dibawa dalam perspektif sejarah teori. Jika hal ini dimengerti lebih sederhana sebagai analisis situasi yang berbeda dengan pendekatan-pendekatan teori modernisasi yang terlebih dulu ada dengan membahas secara kritis hierarkisasi politik dan ekonomi dunia dan → pembagian

kerja internasional yang berkaitan dengannya, *dependencia* tidak akan hilang keaktualannya untuk sebagian besar Dunia Ketiga. Masuknya aspek-aspek ini dalam diskusi, merupakan jasa *dependencia*, tetapi mengabsolutkannya secara teoretis, merupakan kelemahannya.

Kepustakaan: D. Senghaas (ed.), *Imperialismus und strukturelle Gewalt*, Frankfurt 1972; ibid (ed.), *Peripherer Kapitalismus*, Frankfurt 1974; F.H. Cardoso/E. Faletto, *Abhängigkeit und Entwicklung in Lateinamerika*, Frankfurt 1976; D. Senghaas, *Weltwirtschaftsordnung und Entwicklungspolitik*, Frankfurt 1977; I. Wallerstein, *The Capitalist World Economy*, Cambridge, dll. 1979; R. Schweers, *Kapitalistische Entwicklung und Unterentwicklung*, Frankfurt 1980; A. Boeckh, "Dependencia und kapitalistisches Weltssystem, oder: Die Grenzen globaler Entwicklungstheorien", dlm.: F. Nuscheler (ed.), *Dritte Welt-Forschung. Entwicklungstheorie und Entwicklungspolitik*, Opladen 1985, hlm. 56–74; U. Menzel/D. Senghaas, *Europas Entwicklung und die Dritte Welt. Eine Bestandsaufnahme*, Frankfurt 1986.

ab
teori faktor keseimbangan → teori perdagangan luar negeri.

teori faktor proporsional → teori perdagangan luar negeri.

teori imperialisme → imperialisme.

teori ketergantungan → teori *dependencia*.

teori modernisasi Perbedaan secara umum perspektif permasalahan yang sejak lama menguasai teori-teori pembangunan, menimbulkan berbagai alternatif dari persaingan antara teori modernisasi dan teori *dependencia*. Pengelompokan berbagai subteori dan pendekatan untuk menjelaskan keterbelakangan dalam dua arus teori, dilihat dari sejarah teori jelas rumit. Teori yang terkelompok dalam teori modernisasi (teori dan strategi pertumbuhan, teori perubahan sosial,

dsb.) adalah berbagai teori yang berangkat dari sebuah proses penurunan dan penyamaan masyarakat terbelakang ke masyarakat maju dunia industri Barat. Proses modernisasi memiliki pengertian tradisi dan modern sebagai awal dan akhir jalan yang harus ditapak oleh masyarakat negara berkembang. Dalam kelangsungan proses yang digerakkan dari luar ini (eksogen), nilai, perilaku, dan cara berpikir tradisional serta struktur-struktur dalam masyarakat didinamisasi dan dimodernisasi. Masing-masing bidang politik dan berbagai disiplin ilmu pengetahuan berkaitan dengan sub-sub bagian proses modernisasi (modernisasi kultural, ekonomi, masyarakat, politik-kelembagaan, teknologi), yang dibayangkan pada awalnya oleh para teoretikus modernisasi sebagai uniform (untuk semua negara berkembang sama) dan unilini (berjalan dalam garis lurus pada gambaran tujuan masyarakat). Dari ketentuan-ketentuan yang sangat kaku ini, a.l. berlandaskan definisi-definisi pokok yang masih perlu dipertanyakan (tradisi dimengerti sebagai apa saja yang tidak modern, dan modernitas masyarakat-masyarakat negara industri Barat dimutlakkan menjadi gambar panutan pembangunan), teori modernisasi sudah tidak terpakai lagi. Telah diakui kembali adanya berbagai ragam jalan-jalan pembangunan alternatif.

Gambaran dan asumsi-asumsi dasar berikut ini merupakan ciri-ciri teori modernisasi. a. Lokalisasi teoretis dari permasalahan: keterbelakangan merupakan stadium awal perkembangan masyarakat. Masyarakat

yang terbelakang dan masyarakat peralihan berada pada jalan dari tradisi menuju modern. b. Munculnya permasalahan: penyebab keterbelakangan sangat sedikit dibahas oleh teori modernisasi. Teori ini berangkat dari situasi keterbelakangan kini dan mempertanyakan faktor-faktor yang menghambat perubahan sosial dengan melokalisasi faktor-faktor ini terutama pada situasi endogen. Teori modernisasi menekankan situasi internal keterbelakangan. Pengaruh-pengaruh eksternal diberikan fungsi-fungsi politik positif (sebagai panutan, elemen-elemen dinamis, *input*) dan tidak ditanyakan sejauh mana pengaruh eksternal ini menyebabkan dan mempertahankan keterbelakangan. c. Definisi model hubungan antara negara berkembang dan negara industri: bagi teori modernisasi, negara industri adalah panutan dan tujuan proses pembangunan yang harus dicontoh. d. Konseptualisasi struktur masalah internal dalam masyarakat terbelakang: struktur internal masyarakat berkembang bersifat dualistik. Terdapat sektor perilaku modern dan tradisional (kawasan, cabang, dsb.); keduanya ada bersama relatif tanpa berhubungan. e. Konseptualisasi proses pembangunan: negara-negara yang kini terbelakang melakukan pembangunan dengan jalan sama yang pernah dilakukan negara-negara yang kini maju, dan yang sangat menentukan adalah masalah kelengkapan faktor (*sumber daya alam, modal, kerja) dan penerapannya pada tempo proses-proses pembangunan (dapat diukur berdasarkan indikator-sosial). Melalui *akulturasi, perluasan kultur

perkotaan, sektor modern, atas segmen dan ruang tradisional, melalui kapitalisasi menyeluruh perekonomian nasional dan mencapai **take-off* maka *dualisme internal dan keterbelakangan dapat diatasi.

Selain membahas masalah pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial dalam kerangka teori modernisasi yang dikerjakan sebelum datangnya modernisasi dan tanpa masalah diintegrasikan dalam perspektif teori modernisasi, dilakukan penelitian-penelitian yang berangkat dari pendekatan-pendekatan sebagai berikut. a. Pendekatan sosial-psikologi: studi-studi mengenai motivasi prestasi, kepribadian yang mobil dan masyarakat yang mobil, digunakan terutama pada elite masyarakat untuk meneliti kemampuan mereka, mengarahkan inovasi (pembaruan); pengertian empati: kemampuan untuk melihat diri sendiri dalam situasi orang lain. b. Pendekatan teori komunikasi: studi-studi mengenai perubahan komunikasi dalam masyarakat tradisional dan modern; perubahan komunikasi personal dan langsung dilakukan melalui media (pers, radio, televisi), komunikasi tidak langsung, dsb. c. Pendekatan **nation-building*: studi-studi pembangunan bangsa negara berkembang dan pengalihan loyalitas lokal pada tingkat lebih luas, artinya menciptakan sebuah kesadaran nasional. d. Pendekatan *political-culture*: studi-studi untuk penyesuaian kultural sistem-sistem politik pada tuntutan-tuntutan modern dalam berbagai kemampuan dan kriteria hasil yang diperlukan: kapasitas usaha, kapasitas kemakmuran dan pemeataan, dsb. Di

antara berbagai pendekatan dibahas berbagai subteori modernisasi yang juga kontradiktif, yang tidak dibahas selanjutnya di sini. Sebagai contoh adalah bidang masalah partisipasi politik, yang di satu pihak dilihat bahwa keikutsertaan politik termasuk diferensiasi lanjut yang perlu dari sistem-sistem politik dalam proses modernisasi, di lain pihak adanya tesis dari S. Huntington mengatakan bahwa jika partisipasi politik kelembagaan politik telah demikian melangkah, akan mengakibatkan ketidakstabilan politik dan rezim-rezim militer (→ rezim otoriter). Rezim militer di satu pihak bertentangan dengan kultur politik demokrasi Barat yang digunakan sebagai panutan proses negara berkembang; di lain pihak, militer menurut L.W. Pye dikatakan sebagai elite modernisasi. Kontroversi sub-sub teori ini berdiri di atas landasan definisi pengetahuan yang empiris-analitis dibagi-bagi oleh semua teoretikus modernisasi. Arah teori modernisasi berangkat dari penelitian mikro-sosiologi dan perilaku (*behaviour*)—berbeda dengan *dependencia* yang berorientasi makro-sosiologi dan masalah struktur.

Kritik-kritik penting terhadap teori modernisasi: a. pemusatan panutan modernisasi pada masyarakat industri Barat yang kapitalis; b. definisi yang secara analitis salah mengenai tradisi dalam dua hal: pertama sebagai definisi umum (kategori residual) untuk semua yang tidak modern, dengan demikian mengelompokkan hubungan-hubungan sosial-politik dan perilaku sosial yang sangat berbeda-beda dalam satu definisi, di lain pihak

mengabaikan deformasi masyarakat negara berkembang akibat kolonialisme; c. pemusatan perspektif permasalahan pada struktur-struktur internal dan faktor-faktor endogen yang menghambat pembangunan; mengabaikan dimensi internasional dan faktor-faktor eksternal yang menghambat pembangunan; d. pemusatan masing-masing pendekatan dari studi-studi wajib pada faktor-faktor parsial, yaitu kurangnya motivasi hasil sebagai faktor yang menjelaskan keterbelakangan dalam studi-studi yang berargumentasi secara sosial-psikologis, artinya ada kecenderungan model penjelasan yang monoklasikal; e. kegagalan dalam praktek akibat strategi mengatasi keterbelakangan yang jauh dari realitas, seperti strategi integrasi ke pasar dunia dengan dasar teori perdagangan luar negeri neoklasik tanpa memperhatikan struktur asimetris hubungan ekonomi antara negara berkembang dan negara industri. (→ pembagian kerja internasional).

Berikut ini akan dijelaskan beberapa kelebihan teori modernisasi. Teori-teori berorientasi marxis yang berpegang pada dialektika antara tenaga produktif dan hubungan produksi pada urutan sekuensi yang ditetapkan Engels (dari masyarakat tanpa kelas melalui berbagai tahap masyarakat kelas menuju sosialisme penuh), terlihat tidak mampu melihat keanekaragaman model pembangunan yang ada di Dunia Ketiga masa kini, maupun peran faktor-faktor ekonomi-luar negeri. Justru dalam sejarah di negara-negara kubu sosialis berlangsung proses yang menjauhi hukum-hukum evolusi marxis: pertama,

negara-negara tersebut tidak mengikuti periodisasi yang diasumsikan oleh kaum marxis ortodoks, dan di lain pihak kembali menguatkan arti (dan jumlah) kelompok pimpinan elite, lepas dari isi sosio-ekonomi masing-masing rezim. Hancurnya kelas lama yang berkuasa dan pengambilalihan alat-alat produksi terpenting (di Eropa Timur maupun di banyak negara Dunia Ketiga) tidak menimbulkan kesamaan bagi semua dan demokratisasi yang diinginkan di semua bidang kehidupan, melainkan memunculkan hubungan situasi model baru yang dinikmati elite militer, teknokrasi, dan birokrasi. Menurut teori modernisasi, perkembangan demikian perlu dan tidak dapat dihindari karena sejarah tidak berjalan dari tata masyarakat feodal dan kapitalis menuju sosialisme, melainkan dari tahap masyarakat agraris yang statis dan religius menuju tata masyarakat industri yang dinamis dan makin sekuler; untuk peralihan ini fungsi memimpin, mendinamisasi, dan menginovasi dari elite yang berorientasi paradigma modern, harus ada.

Modernisasi menekankan peran panutan yang sering tidak bersifat ekonomi, diharapkan merangsang kegiatan elite, serta dimensi-dimensi sosio-kultural, yang di dalamnya berlangsung perubahan masyarakat. Berbagai studi teori modernisasi yang membahas orientasi nilai perubahan sosial, mengangkat momen-momen kultural, religius, bahkan mitologis yang relevan untuk pembentukan keseluruhan pandangan sosio-politis masing-masing; di dalam struktur-struktur yang kompleks tersebut pemba-

ngunan ekonomi memang mempunyai peran penting, tetapi bukan yang menentukan karena proses sejarah secara umum ditentukan oleh banyak variabel yang saling menjalin. Dengan bertopang pada M. Weber, dihasilkan beberapa penelitian teori modernisasi mengenai fungsi kepercayaan religius di negara berkembang, terutama mengenai peran dogma ketaatan dan sekulerisme, serta mitos-mitos yang dipercaya massa dalam peralihan dari tata masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Masalah identitas kolektif (Eisenstadt), indoktrinasi nasionalisme dan gerakan yang resivilisasi (membangkitkan kembali masa lalu yang dianggap zaman emas dan sebagai panutan), dalam waktu lama tidak disorot ilmu pengetahuan sosial, tetapi hanya oleh teori modernisasi dalam penelitian hermeneutis, ideologi-kritik, dan perbandingan. Hal relevan dalam rangka re-islamisasi adalah makin kuatnya kebutuhan akan identitas nasional yang dianggap positif dan pembangkitan kembali tendensi-tendensi otokhtonis (asli) di banyak negara berkembang.

Teori modernisasi terlihat berguna pada pembahasan masalah yang berada di batas bidang antara sosiologi, antropologi, dan sosial-psikologi. Pengambilalihan teknologi dan perilaku dari negara industri telah menimbulkan fenomena-fenomena kultur-anomi (Durkheim, M. Mies), kultur-defensif (R. König, B. Tibi), dan keruntuhan politik-kelembagaan (Eisenstadt, Huntington) pada masyarakat di negara-negara berkembang. Setiap pengambilalihan standar modern dalam ruang lingkup produksi

dan konsumsi negara berkembang (sebagian pem-"barat"-an) berlangsung sangat berbeda menurut lapisan dan wilayah. Akibatnya, konflik loyalitas, perasaan ambivalen massa terhadap peradaban metropolitan, masalah akulturasi dengan berbagai intensitas, dan pembentukan mekanisme pertahanan sosio-kultural.

Kelebihan teori modernisasi selanjutnya adalah kesulitan-kesulitan yang dihadapi teori-teori lain dalam menjelaskan realitas sejarah masyarakat negara berkembang melalui definisi dan kategori, serta menginterpretasikan apa yang berlaku sebagai eropasentris (→ etnosentris) dan sering berdampak gambar yang salah dari negara berkembang. Teori modernisasi menghindari definisi dan kategori pengelompokan (seperti proletariat, borjuasi, perjuangan kelas, feodalisme, kapitalisme) yang tidak dapat dipisahkan dari asalnya di Eropa Barat karena penerapannya berbeda-beda pada realitas yang sangat berlainan hanya akan mengakibatkan interpretasi secara eropasentris masyarakat yang dianalisis. Teori modernisasi memberikan kerangka kategori hanya pada penandaan titik-titik kait evolusi (tradisional/modernitas). Definisi pokok teori modernisasi dianggap relatif dapat menyesuaikan diri dan cukup jauh untuk meliputi berbagai proses perkembangan di negara berkembang. Kerangka ini tidak mendiktekan urutan sekuensi yang berlaku umum dan obligatoris, karenanya tidak berdekatan dengan strategi pemecahan masalah tertentu, meskipun demikian memperhatikan realitas bahwa berbagai model sosio-

ekonomi dan politis-kultural model negara berkembang, mencontoh paradigma metropolitan tertentu.

Kepustakaan: G.A. Almond/J.S. Coleman, *The Politics of the Developing Areas*, Princeton 1960; D.E. Apter, *The Politics of Modernization*, Chicago 1965; S.P. Huntington, *Political Order in Changing Societies*, New Haven and London, 1968; W. Zapf (ed.), *Theorien des sozialen Wandels*, Köln/Berlin 1971; D. Berg-Schlosser (ed.), *Die politischen Probleme der Dritten Welt*, Hamburg 1972; S.N. Eisenstadt/S. Rokkan, *Building States and Nations*, 2 jilid, Beverly Hills and London 1973; P. Flora, *Modernisierungsforschung*, Opladen 1974; H.-U. Wehler, *Modernisierungstheorie und Geschichte*, Göttingen 1975; H.C.F. Mansilla, *Entwicklung als Nachahmung*, Meisenheim 1978; S.N. Eisenstadt, *Tradition, Wandel und Modernität*, Frankfurt 1979; D.E. Apter, *Rethinking Development*, London 1987; M. Weiner/S. Huntington, *Understanding Political Development*, Boston/Toronto 1987.

dn/hm

teori neofaktor proporsional → teori perdagangan luar negeri.

teori neoklasik → teori perdagangan luar negeri.

teori pembangunan → pembangunan.

teori perdagangan luar negeri
Mempunyai 3 permasalahan yang menjadi pokok penelitian: a. dengan apa menentukan ukuran, struktur, dan arah pertukaran barang internasional?; b. dengan apa menentukan tingginya *terms of trade*?; c. bagaimana menentukan pembagian keuntungan dari perdagangan luar negeri (*gains from trade*) untuk negara-negara yang turut serta dalam perdagangan? Inti penjelasan pembagian kerja internasional melalui perdagangan luar negeri adalah teori keuntungan ongkos komparatif. Menurut teori, perdagangan luar negeri tidak berlangsung karena ada keuntungan produksi absolut atau surplus produksi (*vent for surplus*)

yang tidak digunakan di dalam negeri, seperti maksud A. Smith. D. Ricardo lebih memperlihatkan bahwa sebuah negara akan mendapat keuntungan dalam pertukaran barang internasional jika produksi komoditas yang diekspor absolut berada di bawah produksi semua barang, selama negara itu memperlihatkan keuntungan produksi komparatif dengan hanya memproduksi beberapa barang.

Kemunculan keuntungan produksi komparatif dijelaskan melalui faktor yang sangat berbeda-beda dalam teori perdagangan luar negeri. D. Ricardo menyorot perbedaan produktivitas kerja relatif (*output/tenaga kerja* yang digunakan) di setiap negara sebagai dasar teori ini. Seperti pada umumnya para ekonom klasik, ia menganggap kerja sebagai faktor penentu produksi. Iklim dan kerangka kondisi lainnya dari produksi berdampak perbedaan ongkos yang relatif sehingga menimbulkan kerugian dan keuntungan produksi komparatif yang relatif.

Pembatasan yang agak tidak realistis pada sebuah faktor dapat diabaikan dengan tidak menghitung ongkos faktor, melainkan ongkos pengabaian, jika produksi sebuah barang diperluas dengan ongkos lainnya (ongkos oportunitas).

Berbeda dengan Ricardo, teori faktor proporsional (Heckscher/Ohlin) menyorot fungsi-fungsi produksi yang identik. Negara yang relatif kaya modal memperlihatkan keuntungan komparatif jika memproduksi barang yang dihasilkan secara padat karya, sedangkan negara yang relatif kaya tenaga kerja mendapatkan

keuntungan pada produksi barang yang padat karya. Jika Heckscher dan Ohlin hanya membedakan faktor kerja dan modal, teori neofaktor proporsional membagi faktor produksi atas modal barang, modal pendidikan dan kerja yang tidak terampil. Hal ini dekat dengan realitas bahwa faktor kerja secara internasional sama sekali tidak homogen, melainkan memperlihatkan tingkat kualifikasi yang sangat berbeda-beda. Penelitian-penelitian empiris memperlihatkan bahwa pendekatan ini sangat cocok untuk menjelaskan pertukaran barang industri antara negara industri dan negara berkembang.

Seperti kualifikasi tenaga kerja, tingkat teknologi secara internasional juga tidak identik. Fungsi-fungsi produksi karenanya secara internasional juga berbeda dan mengalami perubahan dalam perjalanan waktu. Hasil-hasil industri dapat menjalani sebuah arus lingkaran produksi. Untuk mengembangkan sebuah produk baru diperlukan penelitian dan *know-how* perusahaan. Proses-proses produksi baru harus dikembangkan dan dicoba. Dengan makin matangnya dan makin tingginya standarisasi, proses produksi menjadi makin mudah, dan tumbuh arti barang modal dan tenaga kerja yang tidak terampil. Bersamaan dengan perjalanan siklus produksi, keuntungan produksi komparatif dipindahkan dari negara industri maju yang memiliki banyak pengetahuan teknologi, ke negara berkembang yang relatif memiliki banyak tenaga kerja. Demikianlah keuntungan produksi komparatif dapat dipindahkan secara dinamis ke negara lain jika

persyaratan produksi untuk barang tertentu atau jika produktivitas kerja serta kelengkapan faktor relatif di sebuah negara berubah.

Pendekatan-pendekatan yang telah digambarkan mengutamakan penjelasan struktur pembagian kerja ekonomi dunia. Sebaliknya, sederet teori lain mempertanyakan, bagaimana dampak khusus pembagian kerja ekonomi dunia terhadap negara berkembang yang turut serta, dan memusatkan perhatian pada masalah *gains from trade* dan *terms of trade*. Teori perdagangan luar negeri berusaha mencari keterbelakangan pada faktor-faktor eksternal dengan menyorot pengaitan negara berkembang ke pembagian kerja internasional sebagai penjelasan penting mengenai kesenjangan perkembangan antara negara berkembang dan negara industri. Teori ini bertitik tolak bahwa konsep keseimbangan teori neoklasik untuk perdagangan internasional, terutama teori keseimbangan faktor harga dan juga keseimbangan pendapatan sebagai dampak perdagangan, tidaklah sesuai untuk perdagangan antara negara berkembang dan negara industri, malah sebaliknya, yaitu menimbulkan titik berat kekuasaan yang berbeda-beda dengan menguntungkan negara industri dan menimbulkan asimetri sehingga berlangsung pembagian kerja dunia yang merugikan negara berkembang.

Ada 4 pendekatan pokok, yaitu teori ekonomi yang dominan dari Perroux (*economie dominante*); dampak efek-konter internasional dari Myrdal; teori ekonomi periferi dari Prebisch dan tesis Prebisch/Singer mengenai

makin memburuknya secara sekuler situasi *terms of trade* negara berkembang; dan teori pertumbuhan kesengsaraan oleh Bhagwati

Baik Perroux maupun Myrdal menyorot dampak negatif integrasi negara berkembang ke pembagian kekuasaan yang tidak seimbang dalam hubungan pertukaran internasional.

Menurut Perroux terdapat dominasi yang diinginkan dan tidak diinginkan pihak negara-negara maju, akibat adanya perbedaan kekuatan tawar dan ukuran masing-masing negara yang ikut serta dalam perdagangan internasional tersebut. Ia menggunakan analisis hubungan antara negara industri dan negara berkembang tidak saja untuk membahas elemen-elemen penawaran dan permintaan ekonomi, melainkan juga membahas faktor-faktor sosio-politik, seperti kekuasaan dan paksaan. Efek dominasi yang dijalankan menimbulkan ketidakseimbangan dalam perdagangan internasional dengan merugikan negara berkembang yang didominasi karena pendekatan neoklasik untuk keseimbangan neraca pembayaran (harga, mekanisme pendapatan dan bunga) telah gagal dan pada gilirannya menimbulkan pembagian kerja yang menguntungkan perekonomian nasional yang mendominasi. Hal ini dikokohkan melalui bantuan neraca pembayaran, bantuan pembangunan dari negara industri untuk mempertahankan kemampuan membayar negara berkembang, yang merupakan pemasok bahan mentah dan sekaligus merupakan pasar penjualan bagi negara industri.

Myrdal melihat teori neoklasik mengenai keseimbangan harga barang dan harga faktor telah dibantah oleh realitas. Ia menyatakan bahwa variabel-variabel ekonomi hanya berubah ke satu arah sehingga proses ketidakseimbangan menguat secara kumulatif ke arah kehancuran. Tanpa campur tangan politik ekonomi, hal ini akan menimbulkan konsentrasi efek positif di negara industri, sementara di negara berkembang tersisa efek-konter yang negatif (*back-wash effects*, misalnya *brain drain*), yang jauh melebihi efek positif yang sedikit didapat (*spread effects*) dari perdagangan luar negeri. Kerugian ini ditopang oleh lalu lintas barang dan modal.

Efek dominan dari Perroux maupun efek-konter dari Myrdal tidak dapat dibuktikan secara empiris. Usaha pembuktian empiri dilakukan oleh Prebisch untuk mengokohkan teorinya mengenai ekonomi periferi, yang membagi dunia dalam sebuah sentra (negara-negara industri maju) dan sebuah periferi (negara berkembang). Perbedaan kedua kubu ini terletak pada perbedaan elastisitas harga dan pendapatan dari permintaan berdasarkan barang primer dan produk-produk industri, serta perbedaan difusi kemajuan-kemajuan produktivitas yang di negara industri dilanjutkan dalam pendapatan lebih tinggi, sedangkan di negara berkembang dalam bentuk harga yang lebih rendah. Ia berkesimpulan, hubungan pertukaran riil (*terms of trade*) negara berkembang yang sebagian besar mengekspor barang primer, makin memburuk, artinya mengalir sebuah arus penda-

patan terus-menerus ke negara industri yang sebagian besar menawarkan produk industri. Tesis ini juga diwakili oleh Singer.

Prebisch berusaha membuktikan hal ini secara empiris dengan meneliti perkembangan *commodity terms of trade* Inggris dalam periode 1876/1880-1946/1947. Kritik terhadap teori ini tertuju pada kurang kuatnya argumentasi *terms of trade* global untuk negara industri dan negara berkembang, serta pada metode perhitungan statistik (indeks, pilihan tahun basis) dan analisis pembuktian (pilihan konsep *terms of trade*). Masalah makin memburuk atau makin membaiknya *terms of trade* untuk negara berkembang, sampai kini secara empiris belum terbukti.

Teori pertumbuhan kesengsaraan (*immiserizing growth*) dari Bhagwati menggambarkan konkretisasi tesis Prebisch/Singer. Melalui sebuah model sederhana, 2 negara - 2 model barang, Bhagwati memperlihatkan bahwa sebuah pemaksaan ekspansi sektor ekspor di negara berkembang dalam situasi permintaan yang tidak elastis di pasar dunia, dapat menimbulkan kesalahan lokasi faktor-faktor produksi dan kehilangan pendapatan riil (kesengsaraan). Sebab, keuntungan pertumbuhan yang mungkin dihasilkan diimbangi secara berlebihan oleh kerugian *terms of trade* akibat tawaran yang naik sehingga menurunkan harga. Pemikiran ini terlihat relevan hanya untuk negara berkembang sebagai mono eksportir barang primer penting dapat mempengaruhi harga pasar dunia.

Pada bidang teori yang melakukan perdebatan kritis mengenai dampak perdagangan dunia terhadap negara berkembang dan menyorot pendekatan teori imperialisme pos kolonial, juga mengedepankan masalah hubungan kekuasaan yang tidak seimbang dalam perdagangan luar negeri (misalnya Jalee), teori pertukaran tidak seimbang (terutama Emmanuel), dan pemikiran dari teori *dependencia*. → tata ekonomi dunia baru, stabilisasi hasil ekspor, STABEX, GATT.

Kepustakaan: H.R. Heller, *Internationaler Handel, Theorie und Empirie*, Würzburg/Wina 1975; H. Hesse/H. Sautter, *Entwicklungstheorie und politik*, vol. 1: *Entwicklungstheorie*, Tübingen 1977; H.R. Hemmer, *Wirtschaftsprobleme der Entwicklungsländern, Eine Einführung*, München 1978; W. Ochel, *Die Entwicklungsländer in der Weltwirtschaft*, Köln 1982; N. Wagner/M. Kaiser/F. Beimdiek, *Ökonomie der Entwicklungsländer*, cet. ke-2, Stuttgart/New York 1983.

fb/nw
teori trickle-down Teori menetes ke bawah. Teori ini berasumsi bahwa proses pertumbuhan yang terjadi di negara berkembang akibat berlangsungnya transfer modal (bantuan pemerintah, investasi langsung) akan menetes ke bawah sehingga tidak saja meningkatkan tingkat hidup elite sosial, melainkan juga memperbaiki situasi hidup massa penduduk. **dn**
Tepi Barat → Yordania, Konflik Timur-Tengah.

terms of trade Dimengerti sebagai hasil bagi indeks harga impor dan harga ekspor sebuah negara atau kelompok negara. Hubungan pertukaran ini dinamakan juga sebagai *commodity terms of trade* atau *net barter terms of trade*. Harga berdasarkan indeks ke perbatasan bebas, artinya

pada impor harga sudah termasuk ongkos asuransi dan ongkos transportasi sampai ke perbatasan (c.i.f. = *cost, insurance, freight*), pada ekspor harga termasuk ongkos transpor sampai ke perbatasan (f.o.b. = *free on board*). Pada *single* dan *double factorial terms of trade* dua negara atau kelompok negara, *commodity terms of trade* dimultiplikasi dengan sebuah indeks produktivitas barang-barang yang diekspor sehingga pengaruh perkembangan produktivitas pada hubungan pertukaran dapat diawasi. Namun, *factorial terms of trade* hanya sedikit digunakan akibat kesulitan data pada pengukuran perkembangan produktivitas. Pada *income terms of trade*, indeks harga ekspor diukur dengan indeks volume ekspor. Dengan demikian dapat dilihat perubahan-perubahan pada relasi defisit.

Berbagai perhitungan *terms of trade* mencoba mengukur peningkatan dan pengurangan kemakmuran akibat perdagangan luar negeri di sebuah negara atau kelompok negara yang ada. Makna teori pembangunan dan politik pembangunan didapatkan *terms of trade* terutama melalui Raul Prebisch, seorang ekonom asal Argentina dan ketua CEPAL selama bertahun-tahun. Teori memburuknya secara sekuler *terms of trade* yang untuk pertama kalinya diformulasikan Prebisch tahun 1950—dengan membantah argumentasi teori perdagangan luar negeri neoklasik—menduga jatuhnya harga relatif dalam jangka panjang untuk barang-barang primer yang diekspor oleh negara berkembang dibandingkan barang industri yang diekspor oleh negara in-

dustri. Hal ini mendesak negara berkembang untuk terus meningkatkan jumlah barang primer agar dapat mengimpor barang industri dalam jumlah tetap.

Perbedaan perkembangan harga barang primer dan barang jadi industri, dijelaskan oleh Prebisch terutama dengan dua faktor: pertama, rendahnya elastisitas pendapatan dari pihak peminta barang primer di negara industri dan tingginya elastisitas dari pihak peminta barang industri di negara berkembang; kedua, perbedaan difusi kemajuan teknik, yang di negara industri mencakup secara merata semua bidang ekonomi, sementara di negara berkembang hal ini hanya terbatas pada sektor ekspor. Dari interaksi kedua faktor tersebut Prebisch menyimpulkan bahwa akibat kekurangan tenaga kerja relatif di negara industri, berlangsung pertumbuhan produktivitas yang kuat dan upah yang meningkat pesat sehingga tidak berdampak penurunan harga, sedangkan di negara berkembang terjadi kebalikannya. Penawaran berlebihan akan tenaga kerja di negara berkembang menyebabkan turunnya tingkat upah. Dengan demikian, kemajuan produktivitas yang dihasilkan dalam sektor ekspor negara berkembang menghasilkan penurunan harga sehingga hal ini hanya menguntungkan negara industri yang kemudian mampu memonopoli hasil-hasil kemajuan teknologi. Karenanya kejatuhan *terms of trade* berarti transfer pendapatan riil negara berkembang ke negara industri, berkaitan dengan masalah-masalah pembangunan banyak negara berkembang: keku-

rangan kronis akan devisa, defisit neraca pembayaran, dan turunnya kapasitas impor yang berkaitan dengannya.

Teori yang dipaparkan tersebut menjadi populer di negara berkembang, tidak saja karena memberikan landasan argumentasi pada negara-negara untuk usaha-usaha stabilisasi harga barang-barang ekspor mereka (dana bahan mentah, dsb.) dalam usahanya memperjuangkan sebuah tata ekonomi dunia baru (\rightarrow UNCTAD). Dalam diskusi ilmiah teori ini mendapat dukungan ekonom-ekonom terkenal (G. Myrdal, W.A. Lewis) dan kritik dari berbagai pihak. Pada tingkat empiri dapat dibuktikan bahwa indeks harga yang digunakan Prebisch tidak memperhatikan turunnya harga transpor sehingga selanjutnya tidak dapat dibuktikan bahwa jatuhnya *terms of trade* mengenai pada semua bahan mentah. Akibatnya, kegunaan universal faktor-faktor yang diajukan Prebisch untuk jatuhnya *terms of trade* menjadi dipertanyakan, demikian pula dengan argumentasi universal mengenai *terms of trade* negara berkembang. Pada tingkat teoretis dibuktikan terutama oleh ekonom-ekonom AS adanya berbagai ketidaksesuaian dalam konstruksi teoretis. Oleh karena itu, mereka menolak kesimpulan karakter pengisapan dalam hubungan pertukaran antara negara industri dan negara berkembang. Dari sisi marxis dicoba untuk mentransformasikan teori dari tingkat harga ke tingkat teori nilai kerja marxis, untuk membandingkan jumlah tenaga kerja dan membentuk teori pembentukan nilai nasional dan inter-

nasional (→ pertukaran tidak seimbang).

Walaupun ada kritik, jangan dilupakan bahwa pendekatan Prebisch justru menggoncangkan teori perdagangan luar negeri nonmarxis yang telah dipuja menjadi dogma dengan asumsi kegunaan sebuah perdagangan dunia yang bebas untuk semua pihak dalam sistem pembagian kerja internasional yang berlaku, dan menimbulkan pengujian kritis terhadap premis-premis dan metode-metode penelitian yang selama ini diterima. Walaupun *terms of trade* untuk negara berkembang tidak memburuk secara sekuler, melainkan lebih berada dalam gerak gelombang jangka panjang dan meskipun tidak dibuat pernyataan umum mengenai *terms of trade* semua negara berkembang, tidak sangkal bahwa jatuhnya *terms of trade* untuk setiap negara ataupun untuk seluruh kelompok negara berkembang dapat menjadi penyulut krisis pembangunan. Jatuhnya *terms of trade* untuk banyak bahan mentah di akhir tahun '70-an, menyulut krisis utang di banyak negara berkembang yang berlangsung sampai kini (→ utang).

Kepustakaan: R. Prebisch, *The Economic Development of Latin America and Its Principal Problems*, New York 1950; H. Sieber, *Die realen Austauschverhältnisse zwischen Entwicklungsländern und Industriestaaten*, Tübingen/Zürich 1968; W. Baer, "The Economics of Prebisch and ECLA", dlm.: C.T. Nisbet (ed.), *Latin America: Problems of Economic Development*, New York 1969, hlm. 203 dst.; R. Prebisch, *Change and Development. Latin America's Great Task*, Washington 1970; W. Bartschi, *Ausbeutung und Einkommensverteilung in den internationalen Wirtschaftsbeziehungen*, Berlin (West) 1976; CEPAL, "La crisis en la América Latina: su evaluación y perspectivas",

dlm.: *El Trimestre Económico* 51: 4 (1984), hlm. 885 dst.

ab
tesis Prebisch/Singer → teori perdagangan luar negeri.

Thailand 1. Daerah Kerajaan Thailand meliputi sekitar 514.000 km². Dataran Mae Nam Chao Phraya di daerah tengah merupakan gudang beras Thailand. Di daerah yang lebih tinggi juga ditanam jagung (sangat diperluas), ubi kayu, tebu, henep, kapas, dan sayuran serta buah-buahan di dekat Bangkok. Karet dan timah terutama datang dari selatan dan tenggara negara itu. Batu bara, minyak, dan gas bumi makin banyak ditambang.

2. Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Sejarahnya dimulai dengan pemapanan Kerajaan Sukothai di abad ke-13. Kerajaan Thai mencapai daerah terluas dan puncak kekuasaan di abad ke-17. Selama berlangsung kolonialisasi negar-negara tetangga, dalam masa berikutnya makin besar tekanan penguasa kolonial ke Siam (namanya berubah menjadi Thailand tahun 1939 dan 1947). Thailand harus melakukan sederet perjanjian yang tidak seimbang, dan terus membuka negara itu untuk imigran buruh dari Cina. Sekitar 1/3 negara diberikan kepada penguasa kolonial Perancis dan Inggris, terutama berfungsi sebagai pemasok beras untuk pengadaan penduduk koloni-koloni tersebut yang berat sebelah berorientasi tanaman ekspor. Tahun 1982 dinasti Cakri yang berkuasa sampai sekarang didirikan oleh Rama I (kepala negara sekarang: Raja Bhumibol Adulyadej). Sejak pertengahan abad ke-19 keluarga raja me-

mimpin sebuah proses modernisasi: perbudakan dihapuskan; dibangun perbankan, pendidikan, dan kesehatan menurut model Barat dan pemerintahan direorganisasi. Melalui revolusi (1932) Thailand berubah dari monarki absolut menjadi monarki konstitusional. Namun, ini hanya merupakan awal pertikaian kekuasaan antara kelompok-kelompok yang bersaing: kader pimpinan militer, modal, elite teknokrat, birokrat, dan sosial. Akibatnya, banyak penggulingan dan perubahan pemerintahan. Periode demokrasi parlemen tidak lama dibandingkan kekuasaan militer. Pada kedua tahun 1977 dibentuk Dewan Politik Nasional yang *de facto* merupakan kekuasaan pengambil keputusan. Setelah berlaku UUD baru Desember 1978 ada parlemen dua kamar terdiri atas senat (anggota ditunjuk raja, terutama perwira tinggi dan pejabat negara) dan kamar anggota parlemen dengan 347 kursi. Ketika koalisi pemerintah terancam pecah, mantan Jenderal Prem Tinsulanonda yang terpilih sebagai perdana menteri (dipilih parlemen, tetapi terutama bergantung pada kepercayaan militer dan raja), membubarkan parlemen dan melakukan pemilihan 24 Juli 1988. Karena Prem menolak memegang jabatan dalam periode berikutnya, lima partai sepakat untuk berkoalisi: *Chart Thai* (87 kursi), Partai Aksi Sosial (54), Partai Demokrasi (48), *Rasadorn* (31), dan Persatuan Partai Demokrasi (5), untuk menjadikan ketua *Chart Thai*, purnawirawan Mayor Jenderal Chatichai Choonhavan, sebagai kepala pemerintah baru.

3. Penduduk Thailand (tahun 1989 diperkirakan 55 juta) mempunyai jumlah penduduk remaja yang tinggi (tahun 1985: 33,4% di bawah 15 tahun), terkonsentrasi pada daerah pertanian. Tingkat urbanisasi keseluruhan kecil (tahun 1989: 22%; pertumbuhan tahunan 1980-1989: 4,7%), tetapi lebih dari 10% penduduk hidup di daerah padat Thailand, ibu kota Bangkok (tahun 1985: 5,4 juta; 3.425 penduduk/km²; di atas 1/4 hidup di daerah kumuh). Penduduk Thailand 85% terdiri atas suku-suku Thai, terutama Siam, Shan, dan Lao, selain itu keturunan Cina: 6%-10%; Melayu: 3%, dan akhir-akhir ini pengungsi dari Kamboja. Buddha Hinayana (*theravada*) dianut oleh 93% penduduk, merupakan agama negara. Aturan hidup biara dan Buddha berperan besar dalam masyarakat Thailand. Agama lain di negara itu adalah Islam (3%-4% dipeluk orang Melayu di selatan) dan Kristen (0,5%, terutama Katolik). Sekolah umum pertama didirikan tahun 1878, sejak tahun 1921 ada wajib sekolah umum (buta aksara tahun 1980: 10,4%). Bahasa resmi adalah Thai (Siam), bahasa perdagangan adalah Inggris. Pelayanan kesehatan umum mempunyai rumah sakit di Bangkok, di semua kota utama di propinsi, dan di beberapa kota. Seluruh negara dikaitkan dalam sebuah jaringan stasiun kesehatan umum (harapan hidup: 66 tahun).

4. Sejak Perang Dunia II produksi industri (tahun 1989: 38% PDB) dan sektor tersier (terutama pariwisata) makin penting. Thailand (anggota ASEAN) tetap bergantung pada ekspor bahan pangan (tahun

1984: 49,3% ekspor; beras saja 14,8%, serta jagung, gula, kopi, tapioka, nanas). Selain itu, yang penting adalah ekspor karet dan timah. Kayu jati mentah, sebuah komoditas ekspor tradisional Thailand, dikenakan larangan ekspor. *Terms of trade* untuk Thailand makin buruk (tahun 1980: 100, tahun 1986: 83); terutama karena harga impor yang naik untuk negara itu. Di tahun-tahun terakhir dipaksakan pembangunan zone-zone industri untuk mengurangi beban kepadatan Bangkok. Dengan demikian, usaha produksi (terutama tekstil dan garmen, mebel, produk perikanan, dan penyediaan gas dan minyak bumi) makin diperluas. Pertanian berstruktur kecil dan menengah. Sekitar 58% usaha kurang dari 5 ha. Masalah utama politik pertanian adalah beban utang petani yang tinggi, sebagian besar bergantung pada makelar, yang harus dibayar dengan bunga yang mencekik dan mengijonkan tanamannya. Pengangguran (tahun 1987 diperkirakan 16%) di Thailand sering merupakan kesempatan kerja kurang struktural dalam bentuk usaha keluarga dengan pekerja yang terlalu banyak. Selain itu, kesempatan kerja musiman di pertanian makin berkurang. Pemerintah sampai kini ragu-ragu menangani krisis pertanian ini dan berusaha mencegah pemanfaatan tanah negara serta membuka tanah baru dengan reformasi pertanian.

5. Sejak November 1987 muncul pertikaian perang karena sengketa perbatasan antara Thailand dan Laos, di kedua pihak jatuh korban sekitar 700 jiwa. Februari 1988 atas usul

Laos disepakati sebuah gencatan senjata di daerah perbatasan langsung.

Kepustakaan: K.E. Weber, *Thailand Research Bibliography*, 3 jilid, Südasien-Institut der Universität Heidelberg, Heidelberg 1970, 1971, 1974; W. Donner, *The Five Faces of Thailand. An Economic Geography*, London 1977; K. Wenk, *Thailand*, Heidelberg 1977; J. Hohnholz (ed.), *Thailand*, Tübingen 1980; F.W. Fuhs/K.E. Weber, "Thailand", dlm.: *HDW II*, 7, Hamburg 1983, hlm. 464 dst.; P. Janisch, "Aspekte aktueller Regionalplanung in Süd-Thailand", dlm.: *Asien*, H 22, 1987, hlm. 62, dst.; K.A. Pretzell, "Malaysias 5. Entwicklungsplan und der 6. Entwicklungsplan Thailands. Vergleichende Notizen", dlm.: *Südostasien aktuell*, H 1, 1987, hlm. 70 dst.

rs/bh

Third-Worldism (Tiersmondismus)
→ imperialisme.

TIAR → OAS.

tied aid Bantuan mengikat. Persyaratan dari pihak pemberi bantuan pembangunan kepada negara pemohon bantuan agar menggunakan kredit bantuan pembangunan untuk membeli barang-barang dari negara pemberi bantuan (sering disebut kredit pemasokan) atau implisit: pengambil kredit membeli di negara pemberi kredit untuk mempertahankan situasi baik agar dapat memperoleh bantuan pembangunan selanjutnya. Model bantuan demikian dituduh menyebabkan ketergantungan karena keterikatan ke negara donor tertentu telah melanggar aturan internasional dan menghalangi pemilihan tawaran paling menguntungkan untuk negara berkembang. → ikatan pemasokan.

wpz

tingkat harapan hidup Rata-rata pada kelahiran, diberikan dalam tahun, merupakan indikator terpenting, meskipun bukan terbaik, untuk tingkat pangan dan kesehatan penduduk (populasi). Tingkat harapan hi-

dup termasuk indikator yang memperlihatkan tingkat pemenuhan kebutuhan dasar suatu masyarakat. Tingkat harapan hidup di semua negara berkembang terlihat meningkat. Perbedaan berdasarkan negara dan kelompok negara, seperti sebelumnya, tetap besar. Menurut Bank Dunia, tingkat harapan hidup untuk negara berkembang dengan pendapatan per kapita yang rendah adalah 50 tahun (1979) dan 61 tahun (1986); untuk negara berkembang dengan pendapatan per kapita menengah adalah 60 tahun (1979) dan 63 tahun (1986); untuk negara industri Barat adalah 74 tahun (1979) dan 76 tahun (1986).

dn tingkat kelahiran Disebut juga tingkat kesuburan (fertilitas), ukuran untuk kelahiran per seribu dari keseluruhan penduduk dalam periode tertentu; untuk membandingkan tingkat kesuburan (fertilitas) berbagai penduduk; merupakan titik tolak untuk usaha politik kependudukan, terutama di negara berkembang (keluarga berencana).

dn tingkat kematian Ukuran untuk kematian (mortalitas) per seribu dari keseluruhan penduduk dalam periode tertentu. Bersama tingkat kelahiran menentukan tingkat pertumbuhan penduduk dan dinamika penduduk (jika dilihat dari migrasi).

dn Tito, J. Broz Lahir 25 Februari 1892 sebagai anak tani kecil di Kumrovec (Kroasia), sejak tahun 1937 menjadi Sekjen Partai Komunis Yugoslavia, dan sejak tahun 1944 menjadi kepala partai dan kepala pemerintah. Tahun 1948 Partai Komunis Yugoslavia memutuskan hubung-

an dengan Moskow dan merintis jalan menuju sosialisme model Yugoslavia. Untuk politik luar negeri, Tito mencari jalan di antara blok yang dipimpin AS dan yang dipimpin Uni Soviet. Bersama-sama dengan pimpinan politik Dunia Ketiga (Nasser, Nehru, Soekarno) ia mendirikan gerakan nonblok tahun 1961, yang melakukan konferensi puncak pertama di Beograd. Warisan Tito yang meninggal 4 Mei 1980 selain menyatukan nasionalitas di Yugoslavia yang mempunyai banyak etnis, adalah jalan sendiri menuju sosialisme dan prinsip nonblok.

rs Togo Republik Togo (Negara AKP) termasuk negara terkecil dan terpadat di Afrika. Pembangunan proyek-proyek mercu suar setelah terjadi *boom* fosfat pada pertengahan tahun '70-an, menyebabkan Togo terlibat utang yang tinggi dan terus membengkak di tahun '80-an, walaupun ada orientasi baru politik pembangunan.

1. Di wilayah seluas 56.000 km² tahun 1989 hidup sekitar 4 juta penduduk (pertumbuhan penduduk 3,5%/tahun), terdiri atas 18-40 kelompok etnis, bergantung pada kriteria yang dipakai, di antaranya Ewe di Selatan (44% keseluruhan penduduk) dan kelompok Kabye (23%) yang dominan di Togo Tengah dan Togo Selatan. Tahun 1970 hampir 27% penduduk beragama Katolik, sekitar 12% Islam, dan 50% Animisme. Di daerah pesisir dan di daerah belakangnya sebagian besar ditanam jagung, ubi kayu, sawit, dan kelapa. Pada dataran tinggi yang menjadi penyambung tumbuh coklat, kopi, dan kapas, yang tetap merupakan komoditas ekspor an-

dalan. Jika di Togo Tengah dan Togo Utara (sabana berbukit dan kering sedikit demi sedikit beralih ke *Zone Sahel) berpenduduk jarang, di daerah sekitar Lama Kara seperti juga daerah pesisir berpenduduk terlalu padat. Kesenjangan infrastruktur sosial-ekonomi Utara-Selatan di bidang ekonomi yang diciptakan semasa kolonialisme Jerman (1884-1914), dipolitisasi setelah Perang Dunia II dan masih terlihat sampai sekarang. Pendidikan (tingkat penyekolahan seluruh Togo tahun 1980: sekitar 90%), pembangunan jalan dari ibu kota Lome yang tahun 1988 berpenduduk 375.000 orang (tahun 1914 berupa 3 jalur jalan sepanjang 340 km), pembangunan perkebunan, dsb. terpusat di Selatan. Di sana di antara orang Brasilia (keturunan budak-budak asal Brasilia yang telah dibebaskan), berkembang sebuah kelompok kecil borjuasi pertanian dan perdagangan, termasuk juga di antaranya inang-inang (*revendeuses*) yang secara politik berpengaruh di daerah pesisir.

2. Sejak awal tahun '70-an ekspor fosfat merupakan sumber penghasilan terpenting Togo (tahun 1985: 25% pendapatan negara, 38% nilai ekspor, 10% PDB). Setelah harga pasar dunia naik menjadi 5 kali lipat, tahun 1974 perusahaan fosfat dinasionalisasi dan dijalankan program investasi padat modal dan sedikit menciptakan tenaga kerja pada industri yang sampai waktu itu masih bersifat substitusi impor dan pengolahan (modal asing, terutama Perancis, dan modal negara) serta hampir seluruhnya terpusat di Selatan. Proyek-proyek berukuran jauh melam-

pau kebutuhan dalam negeri (a.l. rafineri minyak berkapasitas 1 juta ton per tahun pada 100.000 ton kebutuhan dalam negeri). Peningkatan kapasitas tempat tidur hotel dari 1.000 menjadi 2.000 dari tahun 1976-1980 (kebanyakan pembiayaan kelas mewah yang mahal) sampai sekarang terisi hanya 40%. Untuk meningkatkan *turisme didirikan taman nasional dengan mengusir ribuan penduduk di daerah utara negara tersebut pada tahun '80-an. Walaupun titik berat investasi telah dipindahkan ke sektor pertanian yang terlantar (tahun 1977 proklamasi *Revolusi Hijau), setelah harga fosfor turun 50% (1976), utang makin membengkak dari 45 miliar F CFA menjadi 342 miliar (1988), disebabkan a.l. jatuhnya secara drastis harga bahan mentah di pasar dunia. Dengan volume ekspor 251 miliar F CFA (cukup untuk membiayai 47,4% impor), beban utang dan bunga tahun 1988 sudah mencapai 82 miliar F CFA. Anggaran negara dapat diringankan melalui penutupan 10% BUMN dan menswastanisasi 40% (sebagian besar kepada modal asing) BUMN yang sebagian besar merugi. Tahun 1988 Togo tidak ada kesulitan untuk mendapatkan *standby-loan* sebesar 50 juta US\$ dari IMF dan untuk menjadwalkan utang menjadi 16 tahun melalui *Kelompok Paris. Walaupun dalam pertanian pada akhir tahun '70-an dicapai peningkatan besar produksi, tetapi tujuan swasembada bahan pangan tidak tercapai. Karena perubahan kebiasaan makan (hasil gandum Eropa makin disenangi di kota-kota), jumlah impor bahan makanan naik dua kali lipat dari ta-

hun 1978 (10,1 miliar) menjadi 20 miliar F CFA tahun 1988. Sejak pengaspalan jalan penghubung Utara-Selatan selesai dilakukan (650 km), makin meningkat arti pelabuhan laut dalam Lome (jumlah bongkar-muat pada pembukaan tahun 1968: 40.000 ton; tahun 1987: mencapai 1,85 juta ton) juga untuk negara pedalaman yang menjadi tetangganya.

3. Togo yang sekarang ini sejak tahun 1914 berada di bawah administrasi Perancis, bagian barat Togo yang mulanya dijajah Jerman jatuh ke tangan Inggris dan selanjutnya ke tangan Ghana. Dalam pemilu tahun 1960 di bawah pengawasan PBB, Partai Ewe yang cenderung antipenjajah Perancis menang dan setelah merdeka tahun 1960, pemimpinnya, S. Olympio, menjadi kepala pemerintahan. Dengan rezim yang makin represif ia membangun sistem satu partai. Setelah ia terbunuh 13 Januari 1963 oleh tentara Togo yang dipecat dari dinas tentara Perancis dan tidak diterima pada ketentaraan Togo, empat partai utama yang dibentuk kembali di bawah pimpinan Presiden Grunitzky gagal membangun landasan bersama untuk sistem pemerintahan sipil. Tanggal 13 Januari 1967 tentara mengambil alih kekuasaan *de facto*. Di bawah Presiden baru dari Utara, Eyadema, partai-partai yang ada dilarang dan tahun 1969 dibentuk partai kesatuan RPT (*Rassemblement du Peuple Togolais*) sejak pertengahan tahun '70-an dalam situasi yang makin represif mempropagandakan ideologi untuk mobilisasi massa dan kembali ke keaslian Afrika. Akhir tahun 1979 ditetapkan

sebuah UU baru melalui referendum yang mengesahkan RPT menjadi partai kesatuan. Bersamaan juga dipilih kembali presiden (Eyadema) dan kongres. Rezim yang 13 Januari 1980 memproklamkan Republik Ketiga ini juga bertopang pada koalisi antara militer, birokrasi, dan kelompok-kelompok penting lainnya (kepala suku tradisional, inang-inang, borjuasi pertanian, dll.). Setelah berlangsung kerusuhan besar (Agustus 1991), Presiden Eyadema mau tidak mau menyetujui pembentukan pemerintahan sipil sementara. Tanggal 1 Oktober 1991 kudeta militer yang dilakukan pengikut Presiden Eyadema terhadap pemerintahan sipil sementara, dapat digagalkan.

Kepustakaan: K. Ziemer, *Demokratisierung in Westafrika? Die politischen Systeme von Senegal, Elfenbeinküste und Togo nach zwei Jahrzehnten Unabhängigkeit*, Paderborn 1984; K. Toulabor, *Le Togo sous Eyadéma*, Paris 1986; *Le Togo* (Themenheft), *Politique Africaine*, no. 37, 1987; *Die Welt*, "Blutige Unruhen überziehen Afrika", 16 Okt. 91, dlm.: *BMZ-Spiegel der Presse*, 21/91.

kz

Tonga → Kepulauan Pasifik.

tribalisme Menggambarkan cara berpikir dan perilaku kesukuan. Digunakan terutama untuk Afrika. Tribalisme lama dimengerti sebagai konsep ilmiah untuk menginterpretasi realitas sosio-politik (organisasi partai, bentuk regional, korupsi, konflik-konflik sosial dan politik) Afrika. Namun, jika definisi suku dipertanyakan (problem definisi: kriteria seperti otonomi, ekonomi subsistensi, penyamaan relatif tidak cocok lagi sejak zaman kolonial; definisi itu hanya berlaku untuk satu kelompok kecil dan terawasi; definisi itu mengesampingkan perubahan, dll.), konsep tri-

balisme kehilangan maknanya. Literatur yang lebih baru mengganti kata "suku" menjadi "kelompok etnis", "tribalisme" digantikan "etnisitas".

Definisi tribalisme masih tetap digunakan; di satu pihak di media massa Barat sebagai penjelasan sederhana akan hubungan-hubungan yang rumit dengan landasan praduga-praduga sejak zaman kolonialisme ("suku" = primitif). Di lain pihak, rezim-rezim di Afrika menggunakan tuduhan tribalisme sebagai strategi mempertahankan kekuasaan. Oposisi dituduh bersifat tribalisme, berarti oposisi mempertanyakan kesatuan nasional, karenanya absah untuk menindak. Strategi *divide et impera* yang membagi-bagi kerajaan atau kelompok bahasa terlepas dari bentuk organisasi sosio-politik dalam berbagai "suku", untuk variasi masa kini terlihat pada politik *homeland* yang dilakukan Afrika Selatan.

Kepustakaan: O. Nnoli, "Tribalismus oder Ethnizität: Ideologie gegen Wissenschaft", dlm.: R. Jestel (ed.), *Das Afrika der Afrikaner*, Frankfurt 1982, hlm. 99 dst.; L. Vail (ed.), *The Creation of Tribalism in Southern Africa*, London 1988.

als
Trinidad & Tobago Salah satu negara berkembang yang harus mencoba perubahan ke arah diversifikasi struktur ekonomi setelah harga minyak turun, tanpa kehilangan stabilitas politik.

1. Trinidad & Tobago dengan luas 5.128 km² (Trinidad: 4.828 km², 34 km ke arah Timur Laut adalah Tobago: 300 km²) merupakan pulau paling selatan dari Kepulauan Antila Kecil. Produksi pertanian terpusat pada komoditas ekspor andalan, gula (dataran rendah di bagian barat)

dan coklat (daerah perbukitan, pegunungan, dan Tobago). Selain itu, ekspor kopi, jeruk, kelapa; dan penanaman padi, pisang, ubi kayu untuk kebutuhan sendiri (karena produksi berorientasi ekspor, setengah dari bahan makanan harus diimpor). Kegiatan ekonomi didominasi produksi minyak dan gas bumi (*onshore* sejak tahun 1909, *offshore* sejak tahun 1954) dan pengolahannya (persediaan minyak diperkirakan 700 juta barel; cadangan gas bumi diperkirakan berjumlah 31,2 juta *cubic feet*, yang dapat dieksploitasi 16,6 juta *cubic feet*. Sejak pertengahan tahun '70-an hampir 50% PDB dan 80% ekspor dihasilkan melalui industri minyak dan gas bumi).

2. Trinidad & Tobago semasa penjajahan merupakan daerah perkebunan monokultur Kerajaan Inggris, terutama menghasilkan coklat dan gula. Ketergantungan pertanian negara ini pada pasar dunia tidak dapat diubah, meskipun muncul larangan perbudakan (1833) (digantikan oleh *apprenticeship* dan *Indentur*: tahun 1845-1917 datang sekitar 145.000 orang India yang kebanyakan berbahasa Hindi), menguatnya persaingan (pangsa produksi gula bit Eropa pada impor gula Inggris tahun 1853: 14%, tahun 1896: 75%), dan kelebihan produksi, yang mengecilkan arti produk pertanian dalam ekonomi. Muncul ketergantungan struktural yang sampai sekarang masih ada, dan sejak penemuan minyak awal abad ke-20 makin berpaling ke AS (konglomerat minyak: AMOCO, TEXACO).

3. Trinidad & Tobago tahun 1989 diperkirakan berpenduduk 1 juta jiwa (Tobago 40.000), kepadatan penduduk 230 jiwa/km². Sebagian besar penduduk hidup di pantai timur Trinidad (*Gulf of Paria*): sebagian di dua kota besar San Fernando (tahun 1984: 60.000 jiwa) di selatan dan di ibu kota Port-of-Spain (tahun 1984: 150.000, ditambah sekitarnya menjadi 200.000 jiwa), sedangkan sebagian besar lainnya tetap hidup di pedesaan. Sejak tahun 1945 penduduk menjadi dua kali lipat, di antaranya melalui imigrasi karena tertarik akan pendapatan per kapita di Karibia yang tinggi. Komposisi etnis tahun 1978: 41% keturunan Afrika, 41% India, 14% campuran, 2% Eropa, dll. Perbedaan mencolok antara Trinidad & Tobago: di Tobago hampir semua orang kulit hitam.

4. Industri minyak dan gas bumi (kurang dari 4% tenaga kerja berproduksi untuk 60% anggaran negara) serta bagian industrialisasi yang terpaut dengannya (tahun 1985: 34% pekerja di pertambangan) tidak dapat menampung turunnya kesempatan kerja di sektor pertanian (tahun 1955: 28,3 pekerja, tahun 1985: 10% pekerja dengan kontribusi 3% ke PNB). Pembagian tanah yang tidak merata tahun 1972: 11 perkebunan besar memiliki 35.000 ha, 13% perusahaan memiliki tanah lebih dari 200 ha, 80% kurang dari 4 ha, dan 50% penduduk pedesaan tidak memiliki tanah.

Pengangguran tahun 1985 mencapai 15,5%, di lain pihak kekurangan tenaga ahli, yang mendapat gaji tinggi pada perusahaan trans-

nasional. Di kota-kota jumlah orang-orang ter-marginal bertambah (a.l. sebagai dampak kesenjangan upah desa-kota yang semakin tajam). Terdapat kesenjangan antara minoritas orang asing dan pribumi yang kaya di satu pihak dengan sebagian besar penduduk di lain pihak.

5. Bahasa negara Trinidad & Tobago adalah Inggris, selain itu bahasa pergaulan Spanyol, *Patois*-Perancis, dan Hindi. 34% penduduk beragama Katolik, 20% Protestan, 25% Hindu, 6% Islam, dan 15% agama lain. Di Trinidad & Tobago berlaku wajib sekolah umur 6-12 tahun. Sebagian besar sekolah memakai dualsistem, merupakan kerja sama antara pemerintah dengan gereja, perusahaan minyak, dll. Sebagai dampak industrialisasi yang pesat, muncul masalah-masalah sosial yang belum teratasi, misalnya kenaikan harga, kekurangan tempat tinggal, masalah infrastruktur (kekurangan air, listrik, telepon), pengabaian, pengadaan kesehatan penduduk pedesaan dan orang miskin (tahun 1989 tingkat harapan hidup 71 tahun). Tahun 1972 diberlakukan sistem asuransi wajib (tunjangan hari tua, kesehatan, kecelakaan, kehamilan), dan sejak tahun 1976 dijamin upah minimum.

6. Kelembagaan politik Trinidad & Tobago mengambil contoh model Inggris, yaitu *responsible government*: parlemen terdiri atas senat (saat ini 31 anggota) yang diangkat oleh presiden: 16 orang diajukan oleh perdana menteri, 6 oleh pimpinan oposisi, dan 9 dipilih langsung; kongres yang sejak tahun 1966 terdiri atas 36 anggota terpilih selama 5 tahun

menurut mayoritas relatif. Sejak tahun 1980: parlemen regional di Tobago (15 anggota).

Dekolonisasi: Trinidad tahun 1498-1797 jajahan Spanyol, tahun 1797 Inggris, tahun 1802 Inggris dengan seorang gubernur, Tobago: sejak tahun 1498 jajahan Spanyol, abad ke-17 dan 18 menjadi rebutan karena letaknya yang strategis antara Belanda, Perancis, Spanyol; tahun 1814 jajahan Inggris; tahun 1889 Trinidad & Tobago disatukan menjadi jajahan Kerajaan Inggris dengan seorang gubernur, tahun 1958-1961 anggota Federasi Hindia Barat (*Federation of West Indies*), tahun 1962 (31 Agustus) merdeka; tahun 1976 (1 Agustus) menjadi Republik. Menganut sistem kepartaian terbuka, tetapi *de facto* condong ke kekuasaan satu partai PNM (*People's National Movement*), tahun 1956-1981 dikuasai Dr. Eric E. Williams sebagai kepala negara. Setelah kematiannya, digantikan oleh George Chambers sebagai perdana menteri dan menteri keuangan. Dalam pemilu Desember 1986 PNM kehilangan kekuasaan karena hanya mendapat 3 kursi di parlemen. Kepala negara yang baru dari oposisi, Arthur Napoleon Raymond Robinson, didukung oleh aliansi oposisi (*National Alliance for Reconstruction*). Aliansi ini secara politis ternyata tidak stabil. Robinson, ketua *Democratic Action Congress* yang mendominasi di Tobago dan dikuasai orang berkulit hitam, tahun 1988 memberhentikan menteri luar negeri yang berasal dari keturunan India pimpinan *United Labour Front* yang terbentuk dari organisasi buruh kiri di

industri minyak dan gula. Selain itu, Robinson didukung organisasi buruh yang dibentuk oleh orang hitam, *Organisation for National Reconstruction*, dan *Tapia House* yang merupakan klub intelektual dari *University of West Indies*. Sampai sekarang berhasil dihindarkan eskalasi yang berhubungan dengan pendesakan penduduk keturunan India.

7. Kegagalan konsep *industrialization by invitation* hanya menyebabkan pembatalan sebagian konsep tersebut. Meningkatnya pendapatan negara melalui kenaikan 4 kali lipat harga minyak sejak krisis minyak tahun 1973 (Trinidad & Tobago tidak di OPEC) memungkinkan penataan baru perekonomian tanpa adanya konflik dengan perusahaan transnasional. Strategi yang sama, mengakui pemilihan yang sudah ada, juga diterapkan pada politik pertanian. Strategi ini selanjutnya terbatas di daerah pemukiman baru dan pembagian 35% tanah negara Trinidad. Dengan berakhirnya *boom* minyak pertengahan tahun '80-an memaksa dilaksanakan penghematan anggaran negara, kenaikan pajak, dan pengurangan tenaga kerja di lingkungan pemerintahan sehingga menimbulkan ketegangan politik dalam negeri.

Kepustakaan: E. Williams, *Capitalism and Slavery*, Chapel Hill 1944; Z. Henry, *Labour Relations and Industrial Conflict in Commonwealth Caribbean Countries*, Port-of-Spain 1972; S.D. Ryan, *Race and Nationalism in Trinidad and Tobago*, Toronto 1982; R.-O. Schultze, "Trinidad and Tobago", dlm.: *HDW II*, 3, Hamburg 1982, hlm. 425 dst.; R. Sturm, "Trinidad and Tobago, Länderbeitrag", dlm.: S. Mielke (ed.), *Internationales Gewerkschaftshandbuch*, Opladen 1983, hlm. 1094 dst. rs

tropical forest action → ekologi.

Tunisia Walaupun perkembangan ekonomi secara keseluruhan menguntungkan (turisme) dan ada beberapa keberhasilan dari Bourgibisme yang Islam liberal di bidang pendidikan dan keluarga berencana, pengangguran, serta produktivitas pertanian yang tidak memuaskan tetap merupakan masalah pembangunan yang penting. Sejak penggulingan Presiden H. Bourgiba 7 November 1987, terlaksana demokratisasi terbatas dalam masyarakat.

1. Tunisia (luas 163.610 km²) terdiri atas daerah utara "Tell" yang beriklim mediteran basah (dataran rendah/penanaman gandum, kebudayaan mediteran/daerah pesisir), daerah stepa dan padang pasir-stepa (peternakan) dengan daerah pesisir yang dipengaruhi iklim mediteran (perkebunan, pohon-pohon minyak/Sahel daerah Sousse dan Sfax; Zarzis, Djerba), dan padang pasir Sahara (*Grand Erg Oriental*), dan dataran tanah garam (*Schott Djerid*). Selain kekayaan alam (minyak, fosfat, timah, tembaga), keindahan alam (turisme) merupakan sumber devisa penting.

2. Penduduk (tahun 1989: 8 juta penduduk) terkonsentrasi di daerah utara (ibu kota: Tunis) dan di pesisir Timur (Sousse, Sfax), sedangkan daerah stepa di luar oase hanya ditempati oleh sedikit orang nomad. Jumlah penduduk kota terus meningkat karena berlangsung migrasi dan menjadi 56% (1986). Pertumbuhan penduduk (tahun 1980-1989: 2,5%/tahun) sampai sekarang menurun akibat perangnya orang-orang Tunisia menjadi buruh tamu. Setelah berlangsung krisis ekonomi di negara

tempat bekerja (Perancis), pengiriman buruh tamu keluar terhenti sehingga pengangguran meningkat. Keberhasilan diperoleh di bidang pendidikan. Pendidikan yang dibangun menurut model Perancis, gratis. Hampir 1/4 pengeluaran anggaran negara untuk sektor ini. Selain bahasa Arab sebagai bahasa nasional, tetap digunakan bahasa Perancis sebagai bahasa perdagangan dan pendidikan. Penduduk 95% beragama Islam Suni sebagian besar terdiri atas bangsa Arab dan bangsa Barbar yang terkena pengaruh Arab. Selain itu, ada juga bangsa Perancis, Italia, dan minoritas bangsa Malta serta kelompok Barbar yang masih hidup dalam kelompok suku.

3. Pertanian (ekspor: kurma, zaitun, anggur, buah-buahan, jeruk, gandum), mencakup lebih dari 50% luas negara, tetap mempunyai arti sangat penting (tahun 1989: 14% PDB) untuk ekonomi Tunisia (pendapatan per kapita tahun 1989: 1.260 US\$), walaupun industri masa sekarang menjadi lebih penting (tahun 1989: 33% PDB). Sebagian besar ekspor (selain hasil-hasil pertanian, terutama minyak bumi, garmen, fosfat) ke ME dan AS. Sejak tahun 1972 perkembangan industri dipacu dengan pembangunan "zone produksi bebas yang memberikan modal asing (*incentives*) untuk pendirian cabang industri yang berorientasi ekspor (terutama tekstil, garmen). Titik berat perencanaan pembangunan ke-6 (1982-1986) diletakkan pada sektor pertanian dan pengelolaan air (pembangunan bendungan) sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada impor bahan

makanan, sedangkan perencanaan pembangunan ke-7 (1987-1991) bertitik berat pada perluasan kapasitas industri. Jangka panjang akan diadakan desentralisasi kawasan industri yang sampai sekarang terpusat di Tunis, Sfax, Biserta, dan Gabes. Produksi minyak bumi dan pertambangan (Tunisia adalah penghasil fosfat nomor 5 dunia) menyumbang kontribusi 10% atau 1,5% PDB. Selain hasil-hasil ini dan pengiriman devisa dari buruh tamu di luar negeri, *tourisme* yang terus berkembang merupakan penghasil devisa (tahun 1987: 627,8 juta US\$) dan pemberi kerja yang penting. Tahun 1984 sejumlah 35.000 orang bekerja langsung di sektor ini; jika sektor-sektor lain (kerajinan, industri bangunan, industri makanan, dll.) dimasukkan, 100.000 tenaga kerja bergantung pada *tourisme*.

4. Tahun 1574-1871 Tunisia adalah bagian dari Kerajaan Osmania dan mempunyai otonomi relatif di bawah dinasti Hussein. Tahun 1871 Tunisia menjadi protektorat Perancis, dinasti tetap ada, tetapi kekuasaan pemerintahan absolut berada di tangan Perancis. Pemberlakuan bahasa Perancis sebagai syarat untuk masuk ke pemerintahan kolonial, pemaparan norma hukum Eropa (terutama penting hak pemilikan pribadi) dan perubahan cara produksi tradisional pra-kapitalis melalui pengolahan secara kapitalistik tanah-tanah yang direbut dari rakyat, merupakan hasil-hasil penting dari penjajahan. Dengan tujuan mencapai kemerdekaan Tunisia melalui strategi "langkah-langkah kecil" (tahun 1954 otonomi dalam negeri), H. Bourgiba tahun 1934 mem-

bentuk *Néo-Destour-Partei*. Bourgiba dikritik oleh sekjen partai waktu itu, S.B. Youssef (terbunuh tahun 1961), yang menginginkan pemutusan hubungan secara radikal dengan Perancis dan orientasi ke dunia Arab. Dengan bantuan Perancis dan A.B. Salahs, pimpinan organisasi buruh UGTT (*Union Générale des Travailleurs de Tunisie*), Bourgiba menang terhadap kelompok Youssef. Tahun 1956 Tunisia merdeka dan Bourgiba menjadi presiden (mulai tahun 1974 seumur hidup). UUD yang diilhami konsep Perancis dan AS memberikan kekuasaan penuh pada presiden. Bourgiba melalui kepemimpinannya yang karismatik dan berakar di rakyat, memperbesar kekuasaan. Partai tunggal, *Parti Socialiste Destourien* (PSD, dulunya *Néo-Destour*, sejak Februari 1988 dengan nama *Rassemblement Constitutionnel Démocratique*/RCD), menguasai kehidupan politik Tunisia. Sebagai front nasional bersama-sama dengan organisasi tunggal buruh UGTT, partai ini mendapat kembali semua kursi (125) pada pemilihan parlemen November 1986. Kelompok oposisi yang penting (*Mouvement des Démocrates Socialistes*/MDS, gerakan Islam fundamentalis/MTI, partai komunis, dan RSP) memboikot pemilihan tersebut. M. Mzali yang dipersiapkan Bourgiba untuk menggantikannya (mulai April 1980 perdana menteri, sekjen PSD) dan mulai memberi sedikit demokratisasi, dipecat oleh Bourgiba dari jabatan perdana menteri Juni 1986 setelah muncul kritik dari organisasi buruh dan sebagian anggota PSD. Tahun 1987 konfrontasi antara kelompok Islam

fundamental (terutama *Mouvement de la Tendance Islamique*/MTI) dan rezim Bourgiba meningkat. Awal April 1987 terjadi kerusuhan yang diprakarsai kelompok Islam fundamentalis, dan September 7 anggota MTI yang dituduh merencanakan penggulingan rezim, dijatuhi hukuman mati. Z.A. Ben Ali yang awal Oktober diangkat oleh Bourgiba dari menteri dalam negeri menjadi perdana menteri (menggantikan R. Sfar yang sejak Juli 1986 menjabat perdana menteri), 7 November 1987 otomatis menjadi presiden (perdana menteri baru adalah H. Baccouche), setelah Bourgiba yang berumur 85 tahun menurut Pasal 57 UU dinyatakan secara jasmani dan rohani tidak dapat lagi menjalankan jabatannya, dikuatkan dengan visum dokter. Desember 1987 Ben Ali memberi pengampunan kepada hampir 700 tahanan politik (terutama anggota MTI, pimpinan oposisi A. Mestiri). Juni 1988 ia mengumumkan UUD baru dan UU yang memberi kebebasan pers lebih besar. Melalui UU kepartaian April 1988 dilembagakan sistem multipartai.

Politik luar negeri Tunisia berorientasi ke Barat (perjanjian saling membantu dengan AS dan Prancis, Perjanjian Preferensi Bea dengan ME). Pemindahan kedudukan Liga Arab dari Kairo ke Tunis (1979) dan penampungan pimpinan PLO, citra Tunisia di dunia Arab meningkat. Hubungan dengan Libia (tahun 1974 percobaan bersatu kedua negara gagal) sampai sekarang sangat ambivalen. Setelah Bourgiba jatuh, hubungan dengan Libia belakangan membaik (28 Desember 1987 dibuka

kembali hubungan diplomatik yang terputus tahun 1985). Tahun 1988 hubungan diplomatik ini berpengaruh positif terhadap hubungan kooperatif Tunisia dengan Aljazair, Maroko, Mauritania, dan Libia yang tercermin dalam rangka suatu gagasan pembentukan sebuah "Uni Arab Magribi. Dengan menuduh Iran mendukung aksi Islam fundamental Tunisia, hubungan dengan Iran (putus hubungan diplomasi 26 Maret 1987) di waktu ini tegang.

Kepustakaan: P. Frankenberg, *Tunesien. Ein Entwicklungsland im maghrebinischen Orient*, Stuttgart 1979; H. Mensching, *Tunesien. Eine geographische Landeskunde*, cet. ke-3, Darmstadt 1979; K. Schliephake (ed.), *Tunesien. Natur, Geschichte, Kultur, Gesellschaft, Staat, Politik, Wirtschaft. Erdmann Ländermonographie 14*, Tübingen 1981; A.M. Findlay/A.U. Findlay/R.A. Lawless, *Tunisia* (Bibliography), Oxford 1982; M. Dridi, "Tunesien", dlm. *HDW II*, 6, Hamburg 1983, hlm. 161 dst.; V. Behr, *Auswirkungen der Arbeitse migration auf die wirtschaftliche Entwicklung Tunesiens*, Frankfurt 1984; S. Faath, *Tunesien. Die politische Entwicklung seit der Unabhängigkeit 1956-1986, Mitteilungen des Deutschen Orient-Instituts*, 27, Hamburg 1986.

ah
Tupamaros → gerilya, Uruguay.
turisme Pangsa turisme di negara berkembang pada keseluruhan turisme internasional terus meningkat dalam 2 dasawarsa terakhir karena meningkatnya cadangan ekonomi dan waktu dari turis serta penuhnya daerah wisata di negara industri. Ada berbagai macam turisme, yaitu turis bisnis, turis avonturir, turis dalam rangka pendidikan atau turisme seks. Negara-negara tujuan utama adalah Meksiko, Karibia, beberapa negara di selatan dan tenggara Laut Tengah serta negara-negara Asia Selatan dan Asia Timur. Di Amerika Selatan,

khususnya di Afrika, turisme terbatas pada beberapa daerah. Pemerintah, juga swasta dan perusahaan transnasional di negara berkembang ikut ambil bagian pada pengembangan turisme dan pembangunan infrastruktur yang diperlukan. Khusus di tahun '60-an turisme di negara berkembang dianggap sebagai bagian penting untuk memajukan pembangunan karena keuntungan ekonomi (dampak dari devisa, kesempatan kerja, pendapatan, multiplikasi). Perkiraan bentuk dan dampak sampingan perlu dibahas secara kritis dalam dimensi ekonomi dan sosial sebagai berikut a. Walaupun kurang informasi data, dampak devisa dari turisme dapat diketahui, yaitu hanya 30%-35% penghasilan devisa bruto yang masuk ke negara tujuan; bagian terbesar tinggal pada biro perjalanan di negara asal turis. Kebanyakan diperlukan impor bahan investasi dan bahan keperluan untuk industri turisme. Pengeluaran untuk iklan dan kredit luar negeri mempersulit penggunaan bebas dari hasil devisa. b. Kekurangan kualifikasi personal yang sering terjadi di sektor turisme, khususnya di bagian pimpinan, memaksa untuk menggunakan tenaga asing sehingga membatasi dampak ketenagakerjaannya. Di lain pihak, turisme merangsang inovasi: terlihat terutama dari meningkatnya mobilitas sosial dan bertambahnya jumlah perempuan yang bekerja sehingga struktur penghambat pembangunan dapat dikurangi. Meskipun ada penambahan kesempatan kerja di sektor-sektor hilir seperti produksi makanan, bangunan, usaha kecil, dll., tetapi sektor-sektor ini pun sangat

bergantung pada masa puncak turisme: di waktu sebelum dan sesudah musim turis terjadi penurunan tajam dampak-dampak di atas dibandingkan rata-rata per tahun, sebaliknya lonjakan permintaan bahan makanan pada musim turis menyebabkan kenaikan harga dan kesulitan penyediaan bahan-bahan tersebut. c. Perbaikan pendapatan melalui turisme di negara berkembang jangan terlalu dibesarkan karena hanya sebagian daerah dan sebagian dari masyarakat yang kebagian. Selain itu, dampak sosial dari turisme seperti biasa ditunjukkan, yaitu mempererat hubungan antarbangsa, harus diragukan karena keterbatasan komunikasi (kekurangan bahasa, informasi, pembentukan kelompok-kelompok satu bangsa atau pengisolasian di hotel, kelompok, dan program).

Dampak positif seperti pemeliharaan atau pembangkitan kembali tradisi-tradisi terdahulu dan penyerapan kebudayaan asing, harus dibandingkan dengan komersialisasi keramahan dan kesenian, peningkatan kriminalitas, prostitusi, dan penyakit kelamin serta munculnya kebutuhan dan harapan (misalnya kebutuhan akan kesenangan duniawi) serta penghancuran struktur sosial yang telah ada. Hal positif yang dilihat dalam rangka perkembangan regional adalah pembangunan infrastruktur (listrik, pelabuhan, lapangan terbang, jalan-jalan, bank, dan komunikasi), pemeliharaan situs budaya dan apresiasi daerah asal tradisional. Kegunaan turisme sering terbatas pada ruang masing-masing dan sangat bergantung pada tingkat partisipasi rakyat dan penentuan dari

luar dan penentuan sendiri: pada peningkatan turisme yang padat modal terjadi kekurangan investasi untuk rakyat sendiri, muncul pertentangan antara pembangunan sektor pertambangan dan pertanian dengan turisme. Khusus pada proyek besar turisme, muncul dampak ekologi seperti penggunaan berlebihan energi dan air, pembuangan air, pencemaran lingkungan melalui penambahan kendaraan dan pengotoran pantai dengan bahan-bahan perusak kesehatan (→ kesehatan). Pengembangan hanya satu sisi pusat turisme yang monofungsi harus dibuang dari politik bantuan pembangunan. Selain itu, pengembangan turisme seharusnya dimasukkan dalam konsep-konsep global perencanaan politik. Hal yang juga perlu adalah pembangunan usaha-usaha peningkatan kualifikasi (informasi, pendidikan) untuk menyiapkan dan melaksanakan perjalanan bagi turis, pemandu wisata, dan penduduk setempat.

Kepustakaan: R. Siebert, *Ferntourismus als Entwicklungshilfe? Soziale und wirtschaftliche Folgen des verstärkten Touristenstroms in Entwicklungsländer*, Bensheim 1980; A. Vielhaber/P. Aderhold, "Tourismus in Entwicklungsländern", dlm.: *Entwicklungspolitik*, diterbitkan BMZ (Materialien, 67), Bonn 1981; Informationszentrum dritte welt (iz3w), *Klar, schön war's, aber... Tourismus in die Dritte Welt*, 1986; W. Mikus, *Tourismus in D. Nohlen/P. Waldmann (ed.), Dritte Welt. Pipers Wörterbuch zur Politik*, jilid 6, München 1987, hlm. 587-591; C. Scherrer, *Dritte-Welt-Tourismus, Entwick-*

lungsstrategische und kulturelle Zusammenhänge, Berlin 1986; World Tourism Organization, *World Tourism Statistics, Yearbook*, Madrid.

rs/ph

Tutu, Desmond Mpilo Lahir 7 Oktober 1931 di Klerksdorp, Afrika Selatan. Tahun 1955-1958 bekerja sebagai guru dan setelah itu menyelesaikan sekolah teologi. Tahun 1961 diangkat menjadi pendeta dan tahun 1962-1966 melanjutkan sekolah teologi di London. Tutu sebagai profesor teologi mengajar di Universitas Roma di Lesotho, sebelum diangkat menjadi dekan katedral anglikan dari Johannesburg (1972) dan menjadi uskup Lesotho (1976). Dari tahun 1977-1984 menjadi Sekjen Dewan Gereja Afrika Selatan; sejak tahun 1984: pimpinan gereja anglikan negaranya dan uskup agung wilayah Kapstadt. Untuk menghargainya sebagai pimpinan pergerakan untuk melawan apartheid secara tanpa kekerasan, Tutu mendapat Hadiah Nobel Perdamaian tahun 1984. Dalam kehidupan politik luar parlemen di Afrika Selatan, peranan Tutu semakin penting. Ia menggunakan sanksi-sanksi sebagai alat untuk menghapuskan apartheid. Baginya, gereja dan politik saling berhubungan sehingga menimbulkan kritik tidak hanya dari lawan.

ajh

Tuvalu (dulu Kepulauan Ellice) → Kepulauan Pasifik.

U

UAM → Kelompok Brazzaville.

UAMBD (*Union Africaine et Malgache de Banques pour le Développement*) Uni Bank-Bank Pembangunan Afrika-Madagaskar.

UDEAC (*Union Douanière et Economique de l'Afrique Centrale*) Uni Bea dan Ekonomi Afrika Tengah, inti *CCEAC.

UDEAO (*Union Douanière Economique de l'Afrique de l'Ouest*) Uni Bea dan Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat.

UEAC (*Union des Etats de l'Afrique Centrale*) Uni Negara-Negara Afrika Tengah.

Uganda Harapan akan stabilisasi politik dan pembangunan kembali perekonomian setelah penggulingan diktator militer di bawah Idi Amin melalui intervensi tentara Tanzania (1979), tidak terpenuhi sampai sekarang. Dampak dari diktator dan perang, benar-benar menghancurkan perekonomian dan menyebabkan sangat kekurangan bahan pangan. Dengan masuknya *National Resistance Army* (NRA) Januari 1986 dan rezim Yoweri Museveni, perang saudara berhenti dan pembangunan kembali perekonomian dapat dilaksanakan.

1. Uganda adalah sebuah * negara pedalaman (luas 236.000 km²), beriklim tropis. Selain bagian timur laut yang kering (peternakan sapi ekstensif dan setengah nomad), Uganda memiliki potensi pertanian yang menguntungkan (kopi, teh, kapas, kacang tanah). Kekayaan ikan di danau-danau dan cadangan energi tenaga air yang besar (khususnya dari Sungai Nil) dihadapkan dengan sedikitnya sumber daya yang layak ditambang (tembaga).

2. Penduduk (tahun 1989: sekitar 17 juta jiwa), 10% hidup di perkotaan (ibu kota Kampala), terpusat di daerah pertanian sekitar Danau Victoria. Pertambahan penduduk tahunan yang tinggi (rata-rata 3,2%), harapan hidup yang rendah (tahun 1989: 49 tahun), buta aksara (tahun 1977: 52%, tahun 1985: 42,7%), dan tingginya jumlah penduduk muda, menggambarkan kesulitan-kesulitan pembangunan yang dihadapi. Sektor kesehatan sangat buruk, obat-obat dan alat-alat kedokteran paling sederhana pun tidak ada. Angka kematian anak-anak tinggi dan penyakit massa (a.l. malaria, batuk 100 hari, sakit perut, dan *AIDS) sangat tersebar (→ kesehatan). Uganda memiliki sekitar 40

kelompok etnis yang berbeda, struktur etnisnya termasuk paling heterogen di Afrika. Selain etnis Sudan, Nilot, dan Hamit serta minoritas India dan Arab, Bantu adalah etnis terbesar (50% penduduk). Suku Baganda (18% penduduk keseluruhan) merupakan suku terbesar. Pangsa orang India yang mendominasi di perdagangan, perusahaan, dan tenaga ahli dikurangi secara drastis oleh Idi Amin dengan mengusir mereka tahun 1972. Bahasa terpenting adalah Inggris dan Kisuaheli; 60% penduduk beragama Kristen. Di daerah Bantu ditambah dengan animisme; jumlah agama Islam dan Hindu mengecil akibat pengusiran tersebut.

3. Sektor pertanian adalah basis ekonomi Uganda. Sektor ini menyumbang 99% hasil ekspor dan lebih dari 90% penduduk menggantungkan hidup di sini. Dengan sistem penanaman dan situasi tanah yang berbeda-beda pada setiap suku, 40% produksi pertanian digunakan untuk kebutuhan subsisten (pisang, gandum). Diversifikasi produksi pertanian digalakkan melalui penanaman sayur-sayuran, buah-buahan, dan coklat dengan pembangunan perkebunan negara dan bantuan luar negeri. Selain peternakan (sapi Zebu) dan perhutanan yang hancur semasa perang, banyaknya daerah perikanan air tawar membuka kemungkinan masa depan yang baik. Industri yang pangasanya pada PDB mencapai 7% (1989), berkembang lambat. Industri barang konsumsi yang hanya mengolah produksi pertanian setempat terpusat hanya di Kampala dan Jinja/Njeru, akibat letak yang tidak menguntungkan, yaitu

jauh dari pantai. Sektor pemerintah dan campur tangan pemerintah pada perusahaan swasta meningkat sejak pengusiran orang-orang Asia. Dalam rangka politik ugandasasi yang dijalankan Idi Amin, dinasionalisasi kebun-kebun teh dan 8 perusahaan perdagangan; tahun 1973 hampir semua perusahaan Uganda berada di tangan orang Afrika (afrikanisasi). Karena pengusiran orang-orang Asia dan keadaan kacau balau di bawah kekuasaan Idi Amin, produksi hampir terhenti sama sekali. Penerimaan negara turun tajam, dan sebagian besar sumber-sumber keuangan yang ada digunakan untuk keperluan militer dengan mengabaikan kebijaksanaan sosial dan infrastruktur. Pemerintah Obote (1980-1985) yang dirongrong oleh kerusuhan sosial, penyelundupan, korupsi (*magendo*), dan kriminalitas, mencoba menstabilkan keadaan ekonomi melalui *crash-programs* (1981) disesuaikan dengan persyaratan IMF (devaluasi yang drastis, melepaskan pengendalian harga, pembatasan pengeluaran pemerintah). Program pembangunan kembali dimulai tahun 1987 menitikberatkan sektor pertanian. Akan tetapi, tingkat inflasi dan pengangguran tetap tinggi.

4. Uganda yang bergantung pada impor barang produksi dan minyak, sangat bergantung baik secara kualitatif (kopi: kira-kira 95% dari hasil ekspor keseluruhan) maupun negara tujuan (ME, AS, Jepang, Kenya). Pasaran Bersama Masyarakat Afrika Timur (Tanzania, Kenya, Uganda) yang dilindungi dengan cukai bersama dan perspektif integrasi ekonomi regional, pupus dengan hilang-

nya EAC. Uganda mengeksport listrik ke Kenya dan sebaliknya mendapatkan produk-produk minyak bumi.

5. Tahun 1894 Uganda, yang terbentuk dari beberapa daerah kekuasaan dipimpin raja suku Buganda, menjadi daerah protektorat Inggris. Sisa-sisa penting penjajahan yang terbentuk dalam rangka politik *indirect rule* Inggris adalah pengarah ekspor Uganda untuk pasar dunia, infrastruktur jalan yang relatif baik, dan naiknya orang-orang Asia yang dulu didatangkan untuk membangun jalan kereta api ke lapisan pimpinan dalam ekonomi dan perdagangan. Perbedaan etnis yang ada, tendensi partikuler setiap kelompok terutama antara Buganda (suku Baganda) dengan daerah lain (*Democratic Party*/DP yang Katolik, *Uganda People's Congress*/UPC pimpinan M. Obote) memberatkan jalan Uganda menuju kemerdekaan (1962). Obote yang mulanya menjadi perdana menteri demokrasi federasi parlemen dengan menguntungkan posisi Buganda, berhasil memaksakan sistem satu partai (ideologi pembangunan bersemboyan *Move to the Left*) untuk membangun masyarakat sosialis. Gagasannya yang tertulis dalam *Common Man's Charter* berorientasi pada Deklarasi Arusha dari Nyerere, tidak disetujui lapisan kaya pedesaan maupun oleh lapisan menengah perkotaan. Setelah penggulingan militer, tahun 1971 diktator Idi Amin yang brutal mulai memerintah; kira-kira 500.000 jiwa mati terbunuh oleh tentara. Negara ini terbenam dalam kekacauan ekonomi dan terisolasi di antara negara-negara Afrika. Setelah tentara Idi Amin

menyerbu daerah Tanzania, satuan-satuan gerilya dari orang-orang suka Uganda dan bersama tentara Tanzania berhasil menguasai Uganda dan memaksa Idi Amin lari ke luar negeri, ke negara Arab. Y. Lule, ketua *Uganda National Liberation Front* (UNLF), yang didukung oleh pengikut Obote dan suku Baganda (musuh Idi Amin), memegang pemerintahan sementara, tetapi tahun 1979 ia disingkirkan oleh G. Binaisa. Tahun 1980 komisi militer UNLF (ketua: Muwanga, wakil ketua: Museveni) memegang kekuasaan setelah penggulingan dan mengadakan pemilihan umum pertama setelah kemerdekaan. Obote (dari partai UPC) yang pulang dari suka menjadi presiden. Tuduhan manipulasi pada pemilihan umum yang dimungkinkan melalui pembojoran (dalam parlemen), menyebabkan terbentuknya berbagai organisasi gerilya antara tahun 1981-1985 diperangi oleh pemerintah dengan operasi-operasi militer (pembunuhan dan penghancuran). Perpecahan antara pengikut Langi dan Acholi dalam militer menimbulkan peperangan terbuka di Kampala (1985) yang menyebabkan Obote digulingkan tentara Acholi (27 Juli 1985). Berturut-turut 2 presiden diangkat, Muwanga dan Walingo. Perjanjian perdamaian yang ditandatangani tahun 1985 di Nairobi oleh *National Resistance Army* (NRA) dan dewan penasihat militer, tidak dipatuhi, sampai NRA menyerbu ibu kota dan mengangkat Museveni menjadi presiden (21 Januari 1986). Rezim baru menandatangani perjanjian perdamaian tahun 1988 dengan kelompok gerilya terpenting

(UPDA) dan menghancurkan gerakan berdasarkan keagamaan dari Alice Lakwena. Organisasi-organisasi hak asasi manusia seperti *amnesty international* menuduh NRA melanggar hak-hak asasi manusia.

Orientasi keluar Uganda kebanyakan pada negara industri Barat (mitra dagang utama); pengaruh Tanzania yang mula-mula sebagai negara pelindung, berkurang. Tahun 1987/1988 terjadi baku tembak dengan Kenya di perbatasan karena tuduhan saling membantu oposisi di negara masing-masing.

Kepustakaan: P. Woodward, "Ambiguous Amin", dlm.: *African Affairs* 307, 1978, hlm. 153 dst.; S. Kiwunza, *Amin and the Tragedy of Uganda*, München/London 1979; R.I. Collison, *Uganda* (Bibliography), Oxford 1981; D. Berg-Schlosser, "Uganda", dlm.: *HDW II*, 5, Hamburg 1982, hlm. 186 dst.; G. Baumhögger, "Uganda", dlm.: R. Hofmeyer/M. Schönborn (ed.), *Politisches Lexikon Afrika*, cet. ke-4, München 1988. ah/pb

UIP (*Union Industri Paraguaya*, Uni Industri Paraguay) → UNESCO. *ujamaa* Dalam bahasa Swahili berarti hidup seperti satu keluarga adalah landasan ideologi sosialisme Tanzania. *Ujamaa* adalah ideologi yang diutarakan oleh J.K. Nyerere yang menggambarkan masyarakat petani tradisional Afrika tanpa kelas (pemilikan bersama, pekerjaan bersama, saling menghormati). Tujuan-tujuan penting sosialisme *ujamaa* adalah alat-alat produksi menjadi milik masyarakat, pemerataan pendapatan dan kekayaan, partisipasi seluruh penduduk pada proses pembangunan, mengakhiri ketergantungan dan pengisapan, *self-reliance*, penerimaan sosialisme oleh rakyat tanpa paksaan. Dasar-dasar ini dapat di-

temukan pada Deklarasi Arusha tahun 1967.

Sejak tahun 1967 dikumpulkan penduduk pedesaan yang tercerai-berai ke desa *ujamaa* (politik desa terencana) yang memiliki infrastruktur (air, sekolah, rumah sakit) lebih baik dan memungkinkan partisipasi penduduk pada pengambilan keputusan politik. Selain prinsip-prinsip *ujamaa* di atas, dalam sektor pendidikan coba direalisasi hubungan antara pekerjaan jasmani dan rohani serta pendidikan yang berorientasi praktek untuk mencapai swasembada dan gotong royong. Walaupun banyak kesulitan (khususnya kekurangan manajemen organisasi, kurangnya hujan, jatuhnya harga produk ekspor) dan kritik pada tindakan pemerintah daerah yang sebagian kasar (tahun 1975: 5 juta petani di desa *ujamaa*), jalan *ujamaa* merupakan pendekatan mobilisasi yang prospektif.

Kepustakaan: R.D. Baldus, *Zur operativen Effizienz der Ujamaa-Kooperativen Tansanias*, Marburg 1976; J. Boesen dli., *Ujamaa-Socialism from above*, Uppsala 1977. dn

UMOA (*Union Monétaire Ouest-Africaine*) Uni Mata Uang Afrika Barat

UN (*United Nations*) → PBB.

unbalanced growth Kebalikan dari *balanced growth*. Konsep yang diwakili A.O. Hirschman ini dari asumsi kurangnya dana investasi dan menganjurkan penggunaan dana pertama-tama untuk peningkatan satu pihak beberapa industri saja. Dengan demikian akan muncul jalur-jalur sempit di sektor bidang hulu dan hilir yang kemudian akan merangsang pengusaha untuk meningkatkan in-

vestasi di bidang masing-masing. Efek yang sama muncul kembali di sektor dan bidang selanjutnya. Dengan munculnya ketidakseimbangan secara sistematis dan terencana diharapkan akan menimbulkan perkembangan ekonomi dan menguatkannya. *Kontra*: kritik terhadap konsep ini menjelaskan bahwa justru jenis perusahaan yang rasional dan dinamis tidak ada di negara berkembang.

Hal yang juga menarik di sini adalah penggunaan elemen penting dalam analisis mengenai keterbelakangan, yaitu dualisme, yang dipoles menjadi faktor strategis untuk mengatasi keterbelakangan. Perroux mengembangkan konsep *unbalanced growth* dan mempropagandakan sentra-sentra pertumbuhan yang terbatas secara geografis, yaitu kutub pertumbuhan, sebagai instrumen keberhasilan strategi pembangunan jangka panjang. Berhadapan dengan konsep ini adalah G. Myrdal yang membuktikan bahwa hal ini bukan saja tidak akan meringankan kesenjangan pembangunan regional untuk sementara waktu, melainkan daerah yang sudah kaya akan bertambah kaya, sedangkan daerah yang memang sudah miskin akan makin miskin. Myrdal menggunakan gambaran *circulus vitiosus* serta penyebab sirkuler kepada strategi politik pembangunan.

Kepustakaan: A.O. Hirschman, *The Strategy of Economic Development*, New Haven, 1958; G. Myrdal, *Asian Drama. An Inquiry into the Poverty of Nations*, 3 jilid, New York, 1968. **dn** **UNCAST** (*United Nations Conference on the Application of Science and Technology to Development*) Konferensi PBB untuk Penerapan

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam Proses Pembangunan.

UNCDF (*UN-Capital Development Fund*) Dana Modal PBB untuk Pembangunan, merupakan instrumen bantuan modal untuk negara berkembang yang didirikan tahun 1966 oleh Sidang Umum PBB dengan suara dari negara berkembang. Dana ini diharapkan dapat menjadi alternatif lembaga keuangan internasional, Bank Dunia, dan IMF, yang dikuasai negara-negara kreditor, yaitu negara industri Barat. UNCDF berada dalam pengawasan Sidang Umum PBB, dengan demikian berada di bawah wewenang mayoritas negara berkembang. Dana ini diharapkan akan mentransfer sumber daya untuk perekonomian nasional negara berkembang melalui tunjangan dan kredit dengan persyaratan jangka panjang dan berbunga rendah. Masalah inti, mengumpulkan dana, sampai kini tidak dapat diselesaikan karena negara industri Barat menjauhi konferensi-konferensi yang membahas iuran untuk itu. Dana tahun 1976: 6 juta US\$, tahun 1985: 21 juta US\$, dan tahun 1987: 18 juta US\$.

dn **UNCED** (*United Nations Conference on Environment and Development*) → Konferensi Lingkungan Dunia, Agenda 21, Konvensi mengenai Perlindungan Keanekaragaman Hayati, Konvensi mengenai Perubahan Iklim.

UNCLOS → Hukum Laut Internasional.

UNCOD (*United Nations Conference on Desertification*) Konferensi PBB mengenai Gurun, berdiri sejak tahun 1977 di Nairobi, membahas

masalah daerah-daerah yang terkena masalah desertifikasi (misalnya Zone Sahel).

Kepustakaan: UNCOD (ed.), *Desertification: Its Causes and Consequences*, Oxford dll., 1977. ah
UNCST (UNCSTED) (*UN-Conference on Science and Technology for Development*) Konferensi PBB mengenai Ilmu Pengetahuan dan Teknik untuk Pembangunan, didirikan oleh ECOSOC, berlangsung 20-31 Agustus 1979 di Wina. *Tema*: masalah pembagian kerja internasional dalam bidang pengetahuan dan teknologi, a.l. membahas ketergantungan teknologi negara berkembang pada negara industri, kerangka persyaratan alih teknologi, efek pembangunan dari teknologi yang diimpor, peningkatan teknologi tepat guna, serta penguatan kemampuan pengetahuan dan teknologi di negara berkembang. Konferensi ini tidak memberikan kemajuan-kemajuan yang berarti.

Kepustakaan: K.H. Standke, "Prioritäten von und Perspektiven für Wissenschaft und Technologie im Dienste der Entwicklung", dlm.: *HTZ III A 0051* (Nov. 1988).

UNCTAD (UN-Conference on Trade and Development) Konferensi PBB untuk Perdagangan Dunia dan Pembangunan, didirikan atas desakan negara berkembang dan diresmikan pertama kali tahun 1964 melalui keputusan ECOSOC. Berbeda dengan keinginan negara berkembang, UNCTAD didirikan bukan sebagai organisasi perdagangan dunia yang mandiri, melainkan sebagai organ tetap Sidang Umum PBB. Namun, UNCTAD makin banyak mengambil alih fungsi-fungsi ECOSOC. Konferensi-konferensi sejak tahun 1964 berlangsung dalam jarak 4 tahun se-

kali, antara UNCTAD IV dan UNCTAD V sebagai pengecualian hanya berjarak 3 tahun: UNCTAD I di Jenewa (1964); UNCTAD II di New Delhi (1968); UNCTAD III di Santiago de Chile (1972); UNCTAD IV di Nairobi (1976); UNCTAD V di Manila (1979); UNCTAD VI di Beograd (1983); UNCTAD VII di Jenewa (1987). UNCTAD beranggotakan semua anggota PBB dan organisasi-organisasi khususnya. Organ tetap UNCTAD di masa antara konferensi adalah Dewan Perdagangan dan Pembangunan, sampai tahun 1972: 55 anggota, tahun 1981: 131 anggota. Dewan ini secara kontinu bertemu paling sedikit dua kali dalam setahun; pengambilan keputusan dengan suara mayoritas. Organ administrasi adalah Sekretariat Tetap (kedudukan di Jenewa), dibawah seorang Sekretaris Jenderal.

Perundingan-perundingan dalam UNCTAD berlangsung atas landasan pembentukan kelompok intern, mula-mula dalam pembagian negara A, B, C, D, dan sejak tahun 1972 mempunyai struktur: Kelompok 77 (tahun 1988: 125) negara berkembang adalah Kelompok A dan C (tanpa Israel), Kelompok B (negara industri Barat atau negara-negara OECD), Kelompok D (negara-negara sosialis di Eropa Timur). Republik Rakyat Cina muncul sebagai kelompok tersendiri. Mayoritas negara berkembang terlihat juga dalam susunan organ tetap tersebut. Sebuah studi yang dikeluarkan oleh *Commonwealth Group of Experts* tahun 1982 (*The North-South Dialogue, Making it Work*, London) mengkritik teknik perundingan yang

ada dalam sistem kelompok ini; menurutnya pengelompokan tersebut tidak efisien dan membuang waktu. Pengolahan posisi kelompok memerlukan 75% waktu perundingan, dengan demikian menyampingkan tema perundingan sebenarnya. Kelompok pakar dan Laporan Brandt kedua tahun 1983 membuat usulan reformasi teknik perundingan Utara-Selatan: pengelompokan negara berkembang menurut situasi kepentingan untuk pengambilan suara hanya langsung di antara yang bersangkutan dan efisiensi yang lebih tinggi; kelompok-kelompok perunding: negara-negara OPEC, negara berkembang pengekspor minyak lainnya, NIB, LLDC, negara-negara dengan pendapatan per kapita di atas 750 US\$, India, dan negara-negara pedalaman.

Konferensi UNCTAD yang pernah berlangsung sampai kini tidak memenuhi harapan negara berkembang. → tata ekonomi dunia baru. Alamat: Palais des Nations, CH-1211 Genf 10, Swiss.

Kepustakaan: R.L. Rothstein, *Global Bargaining. UNCTAD and the Quest for a New International Economic Order*, Princeton 1979.

dn UNDA (United Nations Development Authority) Dinas Pembangunan PBB UNDOF (United Nations Disengagement and Observer Force) Tentara Pelucutan Senjata dan Pengamanan PBB.

UNDP (UN-Development Program) Program Pembangunan PBB yang didirikan tahun 1965 melalui pelepasan EPTA (program bantuan teknik yang diperluas) dan dana khusus. Merupakan organ khusus PBB yang berada di bawah pengawasan politik Sidang Umum dan ECOSOC, sejak

tahun 1970 melalui reformasi sistem pembangunan PBB menjadi pusat dan tempat koordinasi semua organ PBB yang melayani bantuan pembangunan (bantuan teknik).

Organ: Dewan Administrasi, 48 anggota (negara berkembang 27, negara industri Barat 17, negara sosialis 4), dipilih ECOSOC atas keinginan Sidang Umum untuk masa jabatan 3 tahun; pengambilan keputusan berdasarkan suara mayoritas, sampai kini selalu suara bulat. Kepala administrasi ini adalah seorang administrator yang dipilih Dewan Administrasi untuk masa jabatan 4 tahun.

Tugas: bantuan proyek (perencanaan program, realisasi, pelaksanaan, evaluasi). Titik berat: a. peneuman dan pemanfaatan sumber daya alam; b. pendidikan tenaga kerja ahli; c. perbaikan administrasi pemerintahan; d. penanggulangan penyakit/perluasan bidang kesehatan; e. penyediaan dan penggunaan teknologi yang sesuai untuk pembangunan; f. penciptaan rangsangan-rangsangan untuk peningkatan alih modal dari pihak sektor-sektor swasta; g. perbaikan kerja sama ekonomi antar-negara berkembang.

Pembiayaan: iuran sukarela anggota; 90% dana berasal dari negara industri Barat. Tahun 1973-1980 anggaran UNDP naik 14%/tahun, kemudian turun (tahun 1986-1991: 18%/tahun). Dalam siklus perencanaan kedua tahun 1976-1981 UNDP menyediakan 3,2 miliar US\$; dalam siklus perencanaan ketiga tahun 1982-1986: 3,9 miliar US\$, sedangkan untuk siklus perencanaan keempat tahun 1986-1991: 4,4 miliar

US\$. Tahun 1985 UNDP menunjang lebih dari 7.000 proyek di sekitar 150 negara dan wilayah. Di atas 90% disalurkan melalui organisasi-organisasi khusus PBB: FAO, UN (DT-CD), UNIDO, ILO, dan UNESCO. Pembagian sektoral tahun 1985: pertanian 22% (pengeluaran keseluruhan), lalu lintas dan pemberitaan 12%, rencana pembangunan 15%, sumber daya alam 13%, industri 12%, dan pendidikan 5%. Pembagian secara regional tahun 1985: Afrika 29%, Asia dan Pasifik 29%, Amerika Latin 12%, negara-negara Arab 9%, sisanya (global, inter-regional, dsb.) 20%. Tahun 1976-1981 1/3 bantuan terpusat ke negara berkembang dengan pendapatan per kapita di bawah 500 US\$; tahun 1986-1991 sampai 80% untuk negara berkembang dengan pendapatan per kapita tahunan kurang dari 750 US\$.

dn
UNEDA (*United Nations Economic Development Administration*) Kantor PBB untuk Pembangunan Ekonomi. UNEF (*UN-Environment Fund*) Dana Lingkungan PBB yang berada di bawah UNEP; dana berasal dari iuran sukarela anggota, 80% berasal dari negara industri Barat. Volume tahunan sejak tahun 1983 sekitar 30 juta US\$.

dn
UNEP (*United Nations Environment Programme*) Program Lingkungan PBB. Didirikan tahun 1972 oleh Sidang Umum PBB setelah berlangsung Konferensi Lingkungan Dunia. Kedudukan: Nairobi (Kenya) dengan kantor-kantor regional di Bangkok, Mexico City, Manama (Bahrain), Jenewa, Athena, New York, dan Washington D.C.

Tugas: koordinasi kegiatan organisasi PBB yang relevan dengan lingkungan, seperti FAO, WHO, ILO, UNESCO, UNDP serta organisasi nonpemerintah, seperti *World Wildlife Fund* (WWF) dan *International Union for Conservation of Nature and Natural Resources* (IUCN). UNEP kurang bersifat operasi langsung, melainkan bersifat katalisator dengan cara merangsang usaha-usaha dan mempercepat penciptaan kesadaran lingkungan serta menunjang tokoh-tokoh lingkungan global. Kerja UNEP sangat terbatas dibandingkan organisasi internasional lain, akibat sedikitnya personal dan dana yang tersedia serta tidak adanya kapasitas penelitian.

Sarana dan instrumen politik: memberikan saran dan pedoman untuk Sidang Umum PBB, mendorong perkembangan hukum lingkungan internasional (aturan dan perjanjian internasional), menunjang proyek-proyek pembangunan konkret dari organisasi internasional lain dan mengintegrasikan konsep-konsep ekologi ke dalam hubungan internasional. Kegiatan UNEP terbagi berdasarkan tema (misalnya desertifikasi) atau titik berat regional (misalnya program Laut Tengah). Kerja UNEP kini dan di masa depan ditentukan oleh penerapan tuntutan-tuntutan yang dikeluarkan oleh Laporan Brundtland mengenai lingkungan.

Organ: Dewan Administrasi (58 negara anggota, di antaranya 15 dari Afrika, 6 Eropa Timur, 14 Asia Timur, 13 Eropa Barat dan negara-negara lainnya), dipilih oleh Sidang Umum PBB untuk masa jabatan 3 tahun, dipimpin oleh seorang direktur

eksekutif yang dipilih oleh Sidang Umum atas usul Sekretaris Jenderal dengan masa jabatan 4 tahun (sejak tahun 1976: Mostafa K. Tolba). Pekerjaan lingkungan Sekretariat dan instansi yang berada di bawah wewangannya berhubungan dengan penyusunan daftar situasi lingkungan (pengamatan dan pengumpulan data), melakukan usaha-usaha lingkungan secara aktif dalam rangka program-program konkret serta pemberian bantuan, misalnya untuk pendidikan lingkungan.

Alamat: P.O. Box 30552, Nairobi, Kenya.

Kepustakaan: Holdgate dll., *Umwelt-weltweit*, Berlin 1983; L.K. Caldwell, *International Environmental Policy*, Durham 1984; M. Kilian, *Umweltschutz durch Internationale Organisationen*, Berlin 1987; UNEP (ed.), *The State of the World Environment*, Nairobi 1987; UNEP (ed.), *Programme a moyen terme 1990-1995*, Nairobi 1988.

ms

UNESCO (*UN-Educational, Scientific and Cultural Organization*) Organisasi PBB untuk Pendidikan, Pengetahuan, dan Kebudayaan, didirikan tahun 1945. Tahun 1979: 144 dan tahun 1988: 158 anggota penuh. Kedudukan: Paris.

Organ: Konferensi Umum (bersidang setiap 2 tahun), Dewan Eksekutif (kini 51 anggota: negara-negara OECD: 10, Eropa Timur: 4, Amerika Latin: 9, Asia dan Pasifik: 8, Afrika: 14, Arab: 4), Sekretariat dengan Direktur Jenderal (dipilih oleh Konferensi Umum), komisi-komisi nasional di hampir semua negara anggota. **Tugas:** meningkatkan kerja sama internasional di bidang pendidikan, pengetahuan, kebudayaan, dan informasi dalam rangka menjamin perdamaian dan perluasan kemakmuran manusia (Anggaran Dasar UNESCO).

Tahun 1950 perluasan dalam 7 bidang utama: pendidikan (terutama memerangi buta aksara), pengetahuan alam, ilmu-ilmu sosial, kebudayaan (pertukaran kebudayaan internasional), pertukaran tenaga ahli, komunikasi, dan bantuan kesehatan. Pertengahan tahun '50-an masuk Uni Soviet dan negara-negara sosialis lainnya, di awal tahun '60-an dalam rangka dekolonisasi banyak negara berkembang, mayoritas suara berada pada negara berkembang. Di tahun '70-an UNESCO makin beralih ke masalah-masalah dan kegiatan-kegiatan politik. Formulasi sebuah media politik (Komisi McBride, → tata informasi dunia baru) akhir tahun '70-an menimbulkan pertikaian ideologi secara terbuka antara negara-negara sosialis dan negara berkembang di satu kubu (konsep etatisme politik informasi) dan negara industri di kubu lain, yang berpuncak keluarnya AS (Desember 1984), Inggris dan Singapura (Desember 1985), dengan alasan politisasi organisasi dan kesalahanpahaman mengenai pembayaran iuran dan kemungkinan pengaruh politik terutama dari pihak AS, pemborosan keuangan untuk ongkos administrasi. Sejak tahun 1985 dilakukan program reformasi dan penghematan, akibat kritik negara industri Barat dan berkurangnya anggaran sebesar 25% karena keluarnya AS. Bidang program utama di masa depan dan titik berat pekerjaan UNESCO (disepakati Juni 1988): a. pendidikan untuk masa depan; b. pengetahuan alam dan teknologi untuk kemajuan dan lingkungan; c. kebudayaan dan sejarah; d. komunikasi untuk pela-

yanan kemanusiaan; e. individu dan masyarakat dalam dunia yang mengalami perubahan; f. sumbangan UNESCO untuk strategi pembangunan; g. sumbangan UNESCO untuk perdamaian, hak asasi manusia, penyingkiran semua bentuk diskriminasi. Tahun 1988-1997 dicanangkan Dasawarsa Dunia untuk Pembangunan Kebudayaan (→ Dasawarsa Kultur Dunia, → Warisan Dunia).

Kepustakaan: K. Dicke, "Krise und Reform der UNESCO", dlm.: *Jahrbuch Dritte Welt* 1989, München 1988, hlm. 72-88.

dn
UNESOB (*United Nations Economic and Social Office in Beirut*) Biro PBB untuk masalah Ekonomi dan Sosial di Beirut.

UNF (*United Nations Forces*) Pasukan PBB, tahun 1988: bertugas di tujuh daerah krisis (ongkos: sekitar 266 juta US\$); tahun 1988 menerima Hadiah Nobel Perdamaian. **mlk**
UNFDAC (*United Nations Fund for Drug Abuse Control*) Dana PBB untuk Pengawasan Terhadap Penyalahgunaan Narkotik, didirikan tahun 1971 oleh Sidang Umum PBB. UNFDAC mendukung pemerintah, instansi, dan organisasi dalam usaha-usaha pemberantasan narkotik. Pekerjaan UNFDAC diarahkan terutama pada bidang sosial-kultural dan ekonomi dalam permasalahan di negara-negara Dunia Ketiga. Titik berat pekerjaan adalah pencarian alternatif-alternatif terhadap penanaman pohon-pohon penghasil narkotik (misalnya koka), dikaitkan dengan program-program untuk integrasi pembangunan pedesaan (tahun 1988: 46,7% pengeluaran). Titik berat regional adalah Amerika Latin (Bolivia tahun 1988: 24,6% dana), Asia Selatan

(Pakistan 9,5%), dan Asia Tenggara (Thailand 9,6%). Negara pemberi dana terpenting tahun 1971-1988: Italia (52%), AS (16,4%), Jerman (6,5%), Norwegia (5,8%), dan Swedia (5,3%). Meningkatkan dana yang disediakan oleh UNFDAC (anggaran tahun 1971: 2,8 juta US\$, tahun 1982: 6,4 juta US\$, tahun 1989: 62,6 juta US\$) mencerminkan kesadaran yang makin tumbuh akan kaitan antara penyalahgunaan narkotik di satu pihak dan masalah-masalah ekonomi, sosial, dan politik di lain pihak.

Dalam lingkungan PBB yang juga menangani masalah narkotik: *Commission on Narcotic Drugs* (komisi fungsional dari ECOSOC), *Division on Narcotic Drugs* (pusat know-how teknik dalam masalah narkotik), dan *International Narcotics Control Board*, yang mengawasi dipegangnya tiga perjanjian internasional terpenting, yaitu *Single Convention on Narcotic Drugs* tahun 1961 (ditambahkan tahun 1972), *Convention on Psychotropic Substances* tahun 1971, dan *Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic* tahun 1988.

Alamat: UNFDAC, Vienna International Centre, P.O. Box 500, 1400 Wina, Austria. **als**
UNFPA (*UN-Fund for Population Activities*) Dana Kependudukan PBB, didirikan tahun 1967; tahun 1969 dibawah **UNDP**, tahun 1979 dijadikan organ pendamping Sidang Umum PBB. Sejak tahun 1971 menjadi pusat untuk semua usaha-usaha politik kependudukan dari PBB. *Tugas*: a. pengumpulan dasar, partisipasi pelaksanaan wawancara terhadap penduduk di negara berkembang; b. pengolahan dan penyediaan

pengetahuan mengenai kependudukan, pendidikan untuk ahli demografi sosial; c. pengolahan program-program politik kependudukan (a.l. organisasi konferensi-konferensi [dunia]); d. keluarga berencana: pembangunan sistem distribusi regional untuk alat-alat pencegah kehamilan dan penyuluhan dalam teknik-teknik pengaturan kesuburan; informasi dan kampanye untuk program keluarga; e. mendukung usaha-usaha infrastruktur sosial (kesehatan, pendidikan). 60% dana UNFPA disalurkan untuk keluarga berencana. Dana didapatkan melalui sumbangan sukarela dan tunjangan pemerintahan (terutama dari negara industri).

Publikasi: Laporan Penduduk Dunia, terbit setiap tahun.

Alamat: Daily News Building, 220 East 42nd Street, New York, N.Y. 10017, USA. **dn**

UNFSST (*United Nations Financial System for Science and Technology for Development*) Sistem Pembinaan PBB untuk Pengetahuan dan Teknologi untuk Pembangunan.

UNHCR (*UN-High Commissioner for Refugees*) Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi, didirikan tahun 1951 oleh Sidang Umum PBB, kedudukan di Jenewa. Tugas: melindungi dan membantu seseorang yang meninggalkan tanah airnya sebagai pengungsi. Mandat UNHCR berlaku di seluruh dunia, tetapi berjangka waktu dan harus diperpanjang setiap empat tahun sekali oleh Sidang Umum. Oleh karena itu, wewenang UNHCR terbatas jika organisasi-organisasi PBB lain melindungi pengungsi, misalnya saat ini UNRWA yang menangani pengungsi Palestina sebagai dampak Konflik Timur-Tengah.

Komisaris Tinggi dipilih oleh Sidang Umum atas usul Sekretaris Jenderal serta bertanggung jawab kepada Sidang Umum dan ECOSOC dengan memberikan laporan tahunan. Komisaris Tinggi didampingi oleh Dewan Administrasi (berhak memberikan petunjuk) yang terdiri atas 41 anggota (wakil-wakil negara), menetapkan sasaran-sasaran program dan memberikan izin untuk setiap proyek. Tugas-tugas terbagi dalam usaha perlindungan hukum, dengan penjaminan hak-hak pengungsi yang berorientasi pada hak asasi manusia, dan usaha-usaha untuk mengatasi masalah pengungsi dalam bentuk integrasi di negara penerima atau di negara asal karena kembali.

Tabel 18: Pengeluaran untuk Program Pengungsi UNHCR dalam juta US\$

	Program Umum	Program Khusus
1970	6,4	1,9
1975	14,1	54,8
1980	281,8	215,0
1984	345,9	98,2
1985	281,9	175,9
1986	281,0	159,6

Pembiayaan berasal dari anggaran PBB dan sumbangan sukarela dari pemerintahan, Organisasi Non-Pemerintah dan pribadi. Kini di seluruh dunia terdapat 12 juta pengungsi yang ditangani oleh UNHCR, sebagian besar hidup di Dunia Ketiga.

Publikasi: Buletin Informasi.

Alamat: Sekretariat UNCHR, Palais des Nations, CH-1211 Genf, Swiss. **dn**

Uni Arab-Magribi → *Arabian Maghreb Union.* **dn**

UNICEF (*UN-Children's Fund*). Dana Bantuan PBB untuk Anak-Anak, didirikan tahun 1946 oleh Sidang Umum PBB; sampai tahun 1953 mempunyai program yang berjangka waktu; sejak itu merupakan program tetap PBB. *Pimpinan:* Dewan Administrasi, 41 wakil negara-negara anggota PBB, dipilih oleh ECOSOC. UNICEF melakukan kegiatan atas permohonan pemerintah bersangkutan (sebelum tahun 1950 di negara industri, sejak itu di negara berkembang). *Tugas:* menjaga anak di seluruh dunia dari penyakit dan lapar, memberikan sumbangan untuk pendidikan sekolah. Sekitar 25% pembiayaan berasal dari iuran sukarela negara-negara, sekitar 25% berasal dari sumbangan pribadi dan hasil penjualan (kartu-kartu selamat); dana yang disesuaikan dengan tujuan meliputi sekitar 40% pendapatan tahun 1986, seluruhnya berjumlah 463 juta US\$. Pengeluaran tahun 1986 untuk program-program (a.l. pemasokan barang) sebesar 326 juta US\$, personal UNICEF di negara berkembang 66 juta US\$. 37% pengeluaran program untuk kesehatan (termasuk air minum dan higiene 75%). Distribusi regional: Asia 43,5%, Afrika 35,3%, Timur Tengah dan Afrika Utara 9,9%, serta Amerika Latin 8,5%.

Material: brosur, film, *slides*, dan majalah.

Alamat: 866 United Nations Plaza, New York, N.Y. 10017, USA.

Kepustakaan: UNICEF, *The State of World's Children*, New York 1987. dn

UNIDF (*United Nations Industrial Development Fund*). Dana PBB untuk Pembangunan Industri → UNIDO.

UNIDO (*UN-Industrial Development Organization*) Organisasi Khusus PBB untuk Pengembangan Industri, didirikan tahun 1966 berdasarkan keputusan Sidang Umum PBB atas tuntutan negara berkembang (UNCTAD, 1964), mula-mula untuk menggantikan komisi PBB untuk pembangunan industri yang didirikan tahun 1960. Setelah mempunyai anggaran dasar baru (1979), diperlukan ratifikasi dari 80 negara untuk mulai berfungsi. *Organ:* organ tertinggi sampai tahun 1986 adalah Sidang Umum PBB, sejak itu mempunyai konferensi umum negara-negara anggota sendiri yang dilakukan setiap dua tahun sekali. Mereka memiliki *Industrial Development Board* (IDB), terdiri atas 53 negara anggota (33 negara berkembang, 15 negara industri Barat, 5 negara sosialis). Masa jabatan selama 3 tahun. Atas usul IDB, konferensi umum memilih seorang direktur untuk masa jabatan 4 tahun. Konferensi umum pertama dilakukan Agustus 1985 di Wina. Sebelumnya berlangsung konferensi-konferensi UNIDO: Juli 1971 di Santiago de Chile, Maret 1975 di Lima, Februari 1980 di New Delhi (2.500 delegasi dari 133 negara), Agustus 1984 di Wina (1.050 delegasi dari 139 negara, 30 organisasi internasional dan gerakan pembebasan nasional). *Tujuan:* mempercepat pembangunan industrial di Dunia Ketiga, peningkatan kerja sama industrial antara negara industri dan negara berkembang, koordinasi semua usaha politik industri PBB. *Dana:* 2/3 dana berasal dari UNDP, 15% dari Dana PBB untuk Pembangunan Industri

(UNIDF), sekitar 5% dari program PBB untuk bantuan teknik dan 10% dari sumber-sumber lain.

Pada konferensi ke-2 (UNIDO II) disepakati Target Lima yang menyatakan bahwa negara berkembang sampai tahun 2000 akan menaikkan pangsaanya di produksi industri keseluruhan dari 9% menjadi 25%. Pada konferensi ke-3 negara berkembang menuntut pembangunan sebuah dana dunia Utara-Selatan untuk industrialisasi di negara berkembang dalam jumlah 300 miliar US\$ sampai tahun 2000, yang dibiayai oleh negara industri dan negara-negara penghasil minyak, diurus dan diawasi oleh negara berkembang. Target Lima dibagi dalam tujuan jangka menengah, sektoral, dan regional. Konferensi-konferensi industri khusus dijadikan program tetap UNIDO. Di sana akan dibahas masalah restrukturisasi industri, aspek-aspek sosial industrialisasi, alih teknologi (pembangunan sebuah bank data untuk industri dan teknik, *INTIB/Industry and Technique Databank*), dsb. UNIDO III berakhir dengan kegagalan. Dalam penentuan suara terakhir negara-negara sosialis memang mendukung negara berkembang untuk Deklarasi Delhi dan Program Aksi, tetapi menolak dana dunia tersebut, serta 22 negara industri.

Alamat: Internationales Zentrum, P.O. Box 300, 1400 Wina, Austria.

dn

Uni Emirat Arab Merupakan federasi negara minyak yang terdiri atas beberapa negara kecil yang relatif otonom dengan struktur sosial tradisional-konservatif. Kekayaan minyak Emirat ini juga disalurkan ke negara-

negara *Dunia Ketiga dalam bentuk *bantuan pembangunan.

1. UEA (luas seluruhnya sekitar 77.000 km²) berdiri tahun 1971 dengan bergabungnya Abu Dhabi (luas 65.000 km²), Dubai (3.900 km²), Sharjah (2.600 km²), Fujairah (1.150 km²), Umm al Quawain (750 km²), Ajman (250 km²), dan Ras al-Khaimah (1.700 km², masuk tahun 1972). Wilayah UEA adalah gurun pasir. Kurang dari 1,5% luas keseluruhan dapat digunakan untuk pertanian. Oase paling penting di sana adalah di Buraimi dan Al Ain (kurma, jeruk, mangga, pisang, sayuran, makanan ternak, gandum) yang terletak di perbatasan antara Kesultanan Oman dan Emirat Abu Dhabi. Sebagian penduduk UEA hidup setengah nomad dan mengkombinasi penanaman kurma, penanaman di kebun, dan peternakan kambing. Penambangan minyak bumi (terutama di Abu Dhabi) menandai karakter UEA.

2. Dari abad pertengahan sampai awal abad ke-19 gurun pasir di wilayah UEA, merupakan daerah perdagangan budak dan bajak laut. Tahun 1820 Perusahaan India Timur milik Inggris mengadakan perjanjian perdamaian dengan suku Quawasim yang sebagian besar bertanggung jawab atas aksi-aksi pembajakan di laut. Tahun 1893 Inggris menjadi pelindung militer Emirat ini, sultan menjamin bahwa tidak akan ada kekuatan asing-kecuali Inggris yang boleh berpangkalan di sana. Tahun 1968 ditandatangani *Federal Agreement* mengenai pendirian sebuah federasi oleh 9 emirat, termasuk Bahrain dan Qatar. Namun, dua negara

terakhir ini lalu mengambil keputusan untuk sementara tidak masuk federasi.

3. Berdasarkan sensus tahun 1985 penduduk UEA seluruhnya berjumlah sekitar 1,6 juta orang (Abu Dhabi: 670.000, Dubai: 420.000, Sharja: 269.000, Ras al-Khaima: 116.000, Ajman: 64.300, Fujairah: 54.400, Umm al-Quawain: 29.200).

Hanya sekitar 1% wilayah UEA dihuni (terutama di daerah gurun). Sejak *boom* minyak terjadi pertumbuhan penduduk yang sangat pesat di beberapa kota besar (tingkat urbanisasi: 78%), kota terbesar Dubai tahun 1980: 265.000 penduduk. Pertumbuhan penduduk tahunan antara tahun 1975-1980: 13,8%/tahun dan pertengahan tahun '80-an menurun di bawah 5%.

Penyebab pertumbuhan penduduk ini adalah arus masuk buruh tamu (tidak terampil dan terampil) dari Pakistan, Oman, Iran bagian selatan, India, negara-negara Arab lainnya, dan Eropa. Jumlah penduduk pribumi keseluruhan turun dari 90% (1906) menjadi sekitar 20%-25% (sekarang). 70% pribumi adalah orang Arab (10% nomad). Bahasa nasional adalah Arab dan bahasa pergaulan adalah Inggris. Penduduk beragama Islam (95% Suni). Dari penghasilan minyak dibangun pendidikan (wajib sekolah sejak tahun 1972, hampir semua anak dimungkinkan masuk sekolah), kesehatan, dan sarana infrastruktur lain.

4. Masyarakat UEA secara sosial tetap ditentukan oleh struktur kesukuan tradisional, kemudian beralih ke ketegangan hubungan antara pribumi dan orang asing. Di samping itu,

berkembang lapisan pengusaha kaya baru yang mengambil keuntungan dari aturan bahwa perusahaan asing yang akan berpangkalan di UEA harus mempunyai mitra pribumi yang ikut ambil bagian dalam keuntungan perusahaan tersebut.

5. UEA merupakan sebuah federasi emirat patriarkat-otokratis otonom. UUD sementara yang ada sampai kini memberikan kekuasaan kepada Dewan Tertinggi atas 7 negara anggota dan memilih presiden untuk masa jabatan 5 tahun (sejak tahun 1972 Syekh Zaid bin Sultan al Nahayan, penguasa Abu Dhabi; pemimpin pemerintah: Rashid bin Said al Maktum, penguasa Dubai). Abu Dhabi dan Dubai memiliki hak veto dalam Dewan tertinggi. Selain itu, ada rapat penasihat yang mempunyai 40 anggota yang ditunjuk atau dapat dipilih oleh masing-masing negara bagian. Abu Dhabi dan Dubai masing-masing mempunyai 8 wakil; negara-negara bagian lain, bergantung dari besarnya, mempunyai 6 atau 4 wakil.

6. Negara-negara anggota UEA mempunyai perbedaan-perbedaan besar, baik dalam hal luas wilayah dan jumlah penduduk, maupun dalam hal potensi ekonomi. Ongkos untuk pemerintah pusat sampai kini hampir seluruhnya ditanggung oleh Abu Dhabi yang kaya akan minyak. Abu Dhabi, Dubai, dan Sharjah mendominasi UEA. Arti Dubai terletak terutama pada fungsinya sebagai pelabuhan bongkar muat, berkaitan dengan sebuah industri jasa. Untuk UEA keseluruhan dengan adanya penerimaan dari ekspor minyak, tidak

mempunyai masalah untuk membiayai rencana-rencana ekonominya, meskipun ukuran sebenarnya, efektivitas (birokratisasi) dan penentuan rencana-rencana pembangunan (kapasitas berlebihan, persaingan tidak ada gunanya) sering tidak memadai. Selain minyak bumi, makin banyak diekspor gas bumi. Kedua industri yang juga merupakan strategi industrialisasi yang dilakukan terutama di Abu Dhabi (misalnya rafineri, produksi pupuk, pemisahan garam dari air laut) makin berada di tangan negara, meskipun UEA berbeda dengan negara-negara anggota OPEC lainnya, tidak melakukan nasionalisasi sektor minyak bumi, dan seperti sebelumnya tetap memberikan konsensi untuk eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi untuk perusahaan-perusahaan asing.

Kepustakaan: M.M. Abdullah, *The Modern History of the United Arab Emirates*, London 1978; R. el-Mallokh, *The Economic Development of the United Arab Emirates*, London 1978; H.W. Maull, "VAE", dlm.: *HDW II*, 6, Hamburg 1983, hlm. 520 dst.; H.W. Maull, "Vereinigte Arabische Emirate", dlm.: U. Steinbach/R. Robert (ed.), *Der Nahe und Mittlere Osten*, vol. 2, Opladen 1988, hlm. 451 dst.

UNIFIL (*United Nations Interim Force in Lebanon*) Tentara Interim PBB di Lebanon

Uni Mata Uang Eropa → ECU.

UNISIST (*United Nations International System on Information on Science and Technology*) Sistem Informasi Internasional PBB mengenai Pengetahuan dan Teknologi

UNITA → Angola, gerakan pembebasan.

UNITAR (*UN-Institute for Training and Research*) Institut PBB untuk Pelatihan dan Penelitian; didirikan

tahun 1965 oleh Sekretaris Jenderal PBB, merupakan pengait antara sistem PBB dengan dunia akademi. *Tugas*: mendidik orang-orang negara berkembang, terutama ditujukan untuk kebutuhan konkret PBB (pegawai internasional); penelitian dihubungkan dengan struktur dan fungsi PBB, masalah proses, model pemecahan konflik secara damai, pengembangan hukum internasional melalui PBB, hak asasi manusia, dsb. Pembiayaan berasal terutama dari iuran sukarela.

Konvergensi dan pendekatan fungsi-fungsi PBB melalui Universitas PBB (UNU) yang didirikan tahun 1972 dan menyatukan institut-institut serta sarana penelitian yang tersebar di seluruh dunia. Titik berat penelitian: kelaparan di Dunia Ketiga, manajemen dan pemanfaatan sumber daya alam, pembangunan manusia dan sosial.

United Fruit Company Produsen pisang terbesar di dunia, didirikan tahun 1899, dimiliki perkebunan pisang terbesar di Amerika Tengah dan Karibia; memonopoli sektor pisang, mendominasi ekonomi di republik-republik kecil produsen pisang; mengawasi bagian-bagian penting infrastruktur material di negara-negara yang diterobos (jalur kereta api, pelabuhan, kapal, telepon).

Universal Declaration of Human Rights → hak asasi manusia.

UNMOGIP (*United Nations Military Observation Group in India and Pakistan*) Kelompok Pengamat Militer PBB di India dan Pakistan.

UNPRO (*United Nations East Pakistan Relief Operation*) Aksi Bantuan PBB untuk Pakistan Timur.

UNRISD (*UN-Research Institute for Social Development*) Institut Penelitian PBB untuk Pembangunan Sosial, didirikan tahun 1964 sebagai institut otonom dalam PBB, memiliki 12 staf peneliti selain pakar dan penasihat. *Tugas:* penelitian di bidang pembangunan dan perencanaan sosio-ekonomi, menunjang institut perencanaan dan penelitian regional dan nasional. Titik berat sampai kini adalah penelitian indikator.

Alamat: Palais des Nations, 1211 Genf 10, Swiss.

dn
UNRWA (*UN-Relief and Works Agency for Palestinian Refugees*) Lembaga Bantuan PBB untuk Pengungsi Palestina, mulai bekerja Mei 1950, mandat selalu diperpanjang oleh Sidang Umum PBB. *Pembia-yaan:* berasal dari iuran sukarela, luas bantuan bergantung pada penerimaan yang selalu naik-turun. UNRWA tahun 1988 memiliki sekitar 17.000 pekerja lokal dan menangani sekitar 2 juta pengungsi di 5 negara: Lebanon, Suriah, Yordania, Mesir, dan Israel, artinya di daerah Pantai Barat Yordania dan Jalur Gaza yang diduduki Israel. *Anggaran:* tahun 1978/1979: sekitar 143 juta US\$, tahun 1982: 265 juta US\$, dan tahun 1988: 216 juta US\$. Di tahun '80-an kesulitan makin banyak untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan. *Struktur tugas:* pendidikan (lebih dari 600 sekolah UNRWA untuk lebih dari 350.000 anak) di atas 50%, bantuan sosial (pangan, bantuan darurat, misalnya setelah perang di Lebanon tahun 1982) sekitar 28%, pengadaan kesehatan sekitar 15%.

dn
UNSCC (*United Nations Conference on the Conservation and Utili-*

zation of Resources) Konferensi PBB untuk Mempertahankan dan Memanfaatkan Sumber Daya.

UNSO (*United Nations Sahel Office*) Biro PBB untuk Zone Sahel.

UNTSOP (*United Nations Truce Supervision Organization in Palestine*, juga disebut UNSO) Organisasi PBB untuk Mengawasi Gencatan Senjata di Palestina.

UNU (*United Nations University*) Universitas PBB.

UNV (*United Nations Volunteers Programme*) Program Sukarela PBB, didirikan tahun 1970 atas keputusan Sidang Umum. Tahun 1985 memiliki sekitar 1.000 relawan pembangunan di lebih dari 80 negara berkembang.

Kepustakaan: Das Freiwilligen-Programm der Vereinten Nationen (UNV). HIZ III A, 25, 30 (Maret 1988).

dn
UPEB (*Unión de Países Exportadores de Banano*) Didirikan tahun 1974 di Panama, mulai berlaku tahun 1976. UPEB merupakan persatuan 8 negara Amerika Latin yang memproduksi pisang (Kolombia, Kosta Rika, Republik Dominika, Guatemala, Honduras, Nikaragua, Panama, Venezuela) untuk mewakili kepentingan mereka terutama dalam menghadapi perusahaan-perusahaan pisang AS. *Tujuan:* memperjuangkan harga minimal untuk produknya, harmonisasi kapasitas ekspor dan permintaan, pembukaan pasar-pasar baru, perundingan perjanjian-perjanjian internasional mengenai perdagangan pisang, serta pengawasan lebih besar atas pemasaran produksi pisang (tahun 1977 pendirian organisasi pemasaran COMUNBANA). Bekerja sama

dengan FAO, MCCA, UNCTAD, dan UNDP. mm

UPTC → serikat buruh.

urban informal sector → pendidikan kejuruan.

urbanisasi Fenomena pendamping dan faktor yang mendinamisasi perubahan struktur ekonomi dan sosial, di dasawarsa-dasawarsa terakhir menjadi masalah negara berkembang. Tingkat urbanisasi (penduduk kota di atas 20.000 penduduk menurut statistik PBB) tahun 1960 masih 15%, naik menjadi 28% akibat pertumbuhan penduduk perkotaan dari 4%/tahun menjadi 4,2%/tahun. Tahun 1950-1985 penduduk kota di negara berkembang menjadi empat kali lipat, dari 286 juta menjadi 1,14 miliar. Menurut perkiraan PBB, tahun 2000 sekitar 80% penduduk di Amerika Latin, 40% di Asia Timur, 35% di Asia Timur, dan 39% di Afrika akan hidup di perkotaan. Pembengkakan kota juga sangat besar. Tahun 1950 di Dunia Ketiga hanya ada satu kota dengan sejuta penduduk: Buenos Aires. Tahun 1985 ada 12 kota dengan penduduk di atas 7 juta jiwa. Sebuah penelitian BMZ mengatakan, "Urbanisasi yang pesat dalam jumlah sangat besar, kebanyakan tidak terawasi dan terpusat di beberapa sentra dan secara sosial sangat tidak seimbang, di banyak negara berkembang menyebabkan kemampuan kota jelas makin berada di belakang kebutuhan dasar penduduk (kerja, tempat tinggal, situasi lingkungan yang ramah terhadap manusia, kesehatan, pendidikan, partisipasi) dan fungsi kota untuk pembangunan negara dan regional (misalnya pasar penjualan,

pusat administrasi, dan jasa), serta makin tidak dapat memenuhi secara memuaskan. Masalah perkotaan yang tidak dapat dipecahkan makin merugikan tujuan-tujuan politik pembangunan nasional dan membahayakan kemampuan tawar politik dan ekonomi negara berkembang" (*Sektor-papier Urbanisierung*, 1978). Sebab-sebab urbanisasi berada pada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelarian meninggalkan pedesaan, struktur sosial dan ekonomi yang keropos, peluang pembangunan yang kecil dan kesengsaraan massa di pedesaan; urbanisasi dengan demikian juga merupakan akibat strategi pembangunan yang salah, lebih mengutamakan industri dibandingkan pertanian, mengutamakan perluasan perkotaan sebagai pusat-pusat produksi dan jasa sehingga mendatangkan harapan bagi massa pedesaan untuk datang ke perkotaan. Namun, hanya sedikit industri di negara berkembang yang mampu menyediakan tempat kerja. Menurut Oesterreich (1980) "slums" tumbuh sebagai berikut: tingkat pertumbuhan tahunan untuk urbanisasi 5%, perluasan kota 10%, dan slum 20%. 1/4 sampai lebih dari 2/3 penduduk kota hidup dalam situasi tidak manusiawi.

Aktivitas pemerintah di negara berkembang sering berada "antara pengacuan secara ekstrem masalah slum dan pembersihan slum secara kekerasan (*slum clearing*)" (Sturm).

Usaha-usaha pembangunan dilakukan dalam dua jalur: di satu pihak mengurangi arus masuk selanjutnya ke kota-kota besar melalui pembangunan pedesaan dan sekaligus pe-

ngembangan kota-kota kecil dan menengah menjadi pusat-pusat regional; di lain pihak mengatasi dampak urbanisasi melalui memerangi pengangguran dan usaha pembangunan perumahan, memberikan bantuan kepada LSM, penguatan kapasitas perencanaan, organisasi dan pelaksanaan administrasi perkotaan, dsb.

Kepustakaan: B. Dwyer (ed.), *The City in the Third World*, London 1974; J. Oesterreich, *Elendquartiere und Wachstumspole*, Köln 1980; A. Gilbert/J. Gugler, *Cities, Poverty and Development: Urbanization in the Third World*, Oxford 1982; G. Kohlhepp, "Bevölkerungswachstum und Verstädterung in Latein-amerika", dlm.: H. Wilhelm dll., *Lateinamerika*, Stuttgart dll. 1982, hlm. 60 dst.; R. Sturm, "Wohnverhältnisse/Habitat", dlm.: D. Nohlen/P. Waldmann (ed.) *Dritte Welt*, München 1987, hlm. 669 dst.

Uruguay Republik Uruguay, karena perkembangannya yang pernah merupakan negara makmur dalam dasawarsa pertama abad ke-20 dan stabilitas lembaga-lembaga demokratis, merupakan pengecualian di antara negara-negara Amerika Latin. Setelah terjadi krisis ekonomi yang berat, masalah sosial serta pertentangan politik yang bertambah hebat, kekuasaan diambil alih oleh militer pada awal tahun '70-an. Ketidaktahuan militer mengenai politik, kekuatan ekonomi yang lemah, dan oposisi yang teguh dari kekuatan-kekuatan demokrasi, menunjang proses redemokratisasi tahun 1984/1985.

1. Dengan luas 186.926 km² Uruguay merupakan negara terkecil di Amerika Selatan. Uruguay terbentuk tahun 1828 sebagai negara penyangga antara Brasilia dan Argentina, muncul dari perang kemerdekaan dan perselisihan kedua negara tetangga tersebut. Kekayaan Uruguay

terletak pada tanah dan iklim yang sangat cocok untuk pertanian, terutama peternakan (tanah perbukitan yang rendah, iklim subtropis; 88% dari luas wilayah dapat digunakan untuk pertanian). Bahan mentah mineral (bijih besi, emas, perak, tembaga, dll.) dapat ditemukan, tetapi hampir tidak ditambang karena jumlahnya sedikit. Penduduk Uruguay tahun 1989: 3 juta jiwa, pertumbuhan rata-rata 0,6%/tahun dalam periode 1980-1989. Tingkat urbanisasi yang tinggi: 85%; harapan hidup: 73 tahun.

2. Syarat penting untuk stabilisasi sistem politik di abad ke-19 adalah integrasi ekonomi ke pasar dunia yang sangat berhasil. Uruguay menggunakan keuntungan ongkos komparatif peternakan dalam bentuk orientasi produksi dalam negeri untuk ekspor hasil-hasil peternakan (ternak hidup, kulit, bulu, tanduk, daging asin). Dua partai tradisi, *Colorados* (wakil kepentingan pengusaha) dan *Blancos* (wakil tuan tanah) yang tadinya saling memerangi dengan kekerasan, dapat berkompromi (sebagai fraksi kelas penguasa) dalam pembagian kekuasaan. Partai-partai tersebut, khususnya *Colorados*, membuka diri untuk sektor-sektor sosial baru yang timbul dalam pembangunan ekonomi dan mulai menjadi besar (juga disebabkan banyaknya imigrasi). Lapisan menengah dan lapisan bawah perkotaan, terbentuk dari tenaga kerja pedesaan yang mengganggu akibat modernisasi ekonomi pertanian ekspor. Jika di abad ke-19 segala bahan untuk keperluan hidup diimpor, sejak awal abad ini berkem-

bang perusahaan yang memproduksi barang setengah jadi untuk mencukupi pasar dalam negeri. Kenaikan tajam juga dialami oleh sektor jasa. Meningkatnya pertentangan dalam perkembangan masyarakat (urbanisasi yang tinggi, membesarnya kesenjangan distribusi kekayaan, meningkatnya pengangguran) mendesak negara untuk lebih aktif dalam kehidupan ekonomi. Di bawah Presiden José Battley y Ordóñez (1903-1907) yang memperhatikan bidang sosial, sebagian besar infrastruktur negara yang sampai saat itu dikuasai oleh pemilik modal asing dinasionalisasi, atau dijadikan milik negara (sektor energi, kendaraan/transportasi, kredit, asuransi, pelabuhan-pelabuhan, dll.). Melalui birokrasi yang diperlukan untuk itu, dilakukan investasi lebih lanjut dan pembentukan perusahaan sendiri; negara memperbesar pasar kerja. Bersamaan juga disahkan UU sosial yang sangat maju untuk Amerika Latin (8 jam kerja, gaji minimal untuk pekerja pertanian, UU kecelakaan kerja, perlindungan untuk pekerja perempuan, tunjangan hari tua, dll.). Lapisan baru secara sosial terintegrasi sepenuhnya dan kekuasaan politik dipindahkan kepada lapisan menengah yang terdiri atas kelompok-kelompok heterogen. Kedua partai tradisi menyetujui satu sistem politik yang mengikutsertakan oposisi politik dan kelompok minoritas pada pemerintahan, seperti sistem kolegial di Swiss.

Kemakmuran, tingkat konflik sosial yang rendah, sistem kelembagaan politik yang berfungsi, semuanya sangat bergantung pada ekonomi luar

negeri. Nyatanya, perubahan pasar dunia dalam bentuk penurunan penerimaan ekspor komoditas-komoditas tradisional, mempunyai dampak langsung di dalam negeri. Kerugian besar dikarenakan tidak menggunakan keuntungan besar ekspor semasa ekonomi berjalan baik untuk memperbanyak alat-alat produksi, melainkan diborosan oleh sekelompok minoritas untuk konsumsi kemewahan. Krisis ekonomi dunia tahun 1927 memperlihatkan negara tersebut akan pekanya model ekonomi impor terhadap krisis, tetapi krisis ini dapat diatasi dengan baik melalui peralihan ke industrialisasi substitusi impor. Tekanan pasar kerja dikurangi selain melalui pertumbuhan besar di sektor industri, juga dengan meluaskan birokrasi sehingga buruh yang kesejahteraannya dijamin negara dapat diintegrasikan dalam sistem politik dan enggan condong ke ekstremisme politik. Lapisan menengah yang baru dan tergantung tersebut menjadi klien sistem politik dan mengembangkan kepentingan kuat untuk mempertahankan struktur politik yang ada.

Setelah Korea-boom berakhir yang sekali lagi meningkatkan hasil ekspor, pertumbuhan ekonomi yang diperlukan untuk menunjang negara sosial tidak dapat dicapai melalui ekspor pertanian dan industrialisasi substitusi impor yang sudah jenuh. Krisis ekonomi Uruguay yang timbul akibat bentuk spesifik hubungan ekonomi Uruguay dengan pasar dunia, yaitu model pembagian kerja internasional, mempertajam pertentangan sosial. Kemampuan distributif negara yang tadinya menstabilkan sistem,

menjadi berkurang. Pembangunan negara yang dulu bersifat sosial dan pembengkakan birokrasi (tahun 1961: 21,1% angkatan kerja, memakan 35% anggaran negara) menyebabkan negara tidak mampu mengemudikan sektor investasi. Pada dasawarsa selanjutnya semua lapisan sosial, dari lapisan menengah atas sampai ke bawah, mengalami penurunan pendapatan riil dan tingkat hidup yang tajam serta membesarnya ketidakseimbangan dalam distribusi pendapatan. Di dalam krisis ini pertentangan politik mengambil bentuk kekerasan terbuka, terlihat pada perlawanan bersenjata Tupamaro yang menentang sistem politik dan penindasan politik dari atas di akhir tahun '60-an, mula-mula oleh pemerintah terpilih secara demokrasi, kemudian oleh militer yang mengambil kekuasaan melalui kudeta.

3. Setelah pemilihan umum tahun 1971 di bawah Presiden Bordaberry, sesuai dengan keinginan militer dan kelompok kekuasaan sipil, lambat-laun terjadi perubahan dari demokrasi ke diktator sampai tahun 1976, yaitu pembubaran parlemen tahun 1973; sentralisasi kekuasaan melalui penyatuan seluruh angkatan bersenjata termasuk polisi yang dididik secara militer dalam komando junta tertinggi, pelarangan partai dan organisasi, meletakkan pemerintah daerah dan sektor-sektor masyarakat (perusahaan negara, perguruan tinggi, sekolah) dipimpin militer, dll. Sebagai ganti organ-organ yang dihapuskan melalui dekret adalah lembaga-lembaga yang memperlihatkan seolah-olah ada kontinuitas legal. Parlemen

diganti oleh Dewan Penasihat (*Consejo del Estado*), terdiri atas militer dan sipil. Sebanyak 25 anggota yang dipilih pemerintah bersama dengan 20 perwira tinggi membentuk Dewan Negara (*Consejo de la Nación*) yang bertugas membuat UU dan memilih presiden. Organ kekuasaan terpenting adalah Dewan Pertahanan Nasional COSENA (*Consejo de Seguridad Nacional*), sebelum pengambilalihan kekuasaan sudah dibentuk oleh militer, terdiri atas presiden, menteri dalam negeri, menteri pertahanan, panglima angkatan bersenjata, dan 3 kepala staf ketiga pasukan. Asas ideologi militer adalah Doktrin Pertahanan Nasional yang dikembangkan oleh pemikir-pemikir militer Brasilia.

Struktur ekonomi di bawah rezim militer diubah secara mendasar. Hal ini terlihat pada dasar orientasi politik ekonomi, yaitu: a. liberalisasi: penghapusan proteksi (pajak pelindung) yang menguntungkan hasil-hasil industri dalam negeri dan sektor pertanian; b. swastanisasi: pemindahan perusahaan negara di sektor industri (rumah-rumah pendingin, pabrik semen) dan sektor jasa (telepon) ke swasta; c. menunjang industri ekspor nontradisional, yaitu perusahaan-perusahaan yang sampai waktu ini terutama memproduksi untuk pasar dalam negeri (makanan, barang-barang kulit, tekstil, mineral-mineral nonmetal); d. menunjang investasi langsung asing. Model ekspor baru tidak membawa hasil yang diharapkan. Pertumbuhan ekonomi yang relatif kecil, di lain pihak adalah inflasi yang tetap tinggi, penurunan drastis gaji riil, dan penurunan taraf hidup

penduduk serta pembengkakan utang. Hal yang mahal terutama adalah ongkos sosial dan politik dari politik ekonomi ini: penindasan kebebasan rakyat (7.000 tahanan politik), pelanggaran keras hak asasi manusia, a.l. melalui siksaan, eksodus 600.000 orang Uruguay, terutama tenaga terdidik (ilmuwan, tenaga ahli, seniman) keluar.

4. Re-demokratisasi tumbuh dari usaha-usaha kekuatan-kekuatan penunjang pemerintah untuk mengabsahkan kekuasaan sendiri dan menentukan perkembangan politik Uruguay lebih lanjut. UU baru diajukan tahun 1980 untuk menjalankan referendum, tetapi ditolak oleh 57,2% pemilih yang terdiri atas 86,8% pemilih hak pilih. Untuk pertama kali dalam sejarah Amerika Latin, suatu diktator tidak berhasil mengesahkan UU melalui keputusan rakyat/referendum walaupun ditunjang oleh media massa yang mendukung diterimanya rencana UU tersebut. Penyebabnya terletak pada kekeliruan militer yang memuji bahwa UU baru menjamin tidak akan kembalinya kondisi-kondisi terdahulu; padahal sebagian besar pemilih merasa politik masa lalu positif.

Setelah kekuasaan dipegang oleh fraksi militer yang mendukung kembali ke demokrasi, tahun 1981 diajukan sebuah rencana redemokratisasi baru dengan mengikutsertakan partai-partai tradisional. Sebagai langkah pertama, November 1982 diadakan pemilihan badan-badan pimpinan partai-partai yang diizinkan (*Colorados*, *Blancos*, *Bürgerliche Union*), dan berakhir dengan kekalahan ke-

lompok-kelompok yang dekat dengan pemerintah di dalam partai masing-masing. Sebagai langkah kedua, Mei 1983, diadakan pembicaraan antara militer dan partai-partai yang juga memasukkan *Frente Amplio* sehingga *Blancos* menarik diri. Pembicaraan tersebut membuahkan Perjanjian Club Naval Agustus 1984 yang akan mengadakan pemilihan presiden dan parlemen. Pemilihan November 1984 dimenangkan *Colorados* dengan jumlah suara sama seperti tahun 1971. Maret 1985 J.M. Sanguinetti mengambil alih jabatan presiden. Pengaruh politik militer yang ada di belakang layar tetap besar. Hal ini dapat dilihat dalam masalah penyelesaian hukum dari pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan rezim militer. Di sini pemerintah menyokong kepentingan militer dengan UU amnesti (Desember 1986). Meskipun akhirnya oposisi dapat mengadakan referendum, tetapi 56% pemilih memilih amnesti.

5. Pemerintahan Sanguinetti mengambil haluan stabilisasi ekonomi dan dapat memperbaiki krisis awal tahun '80-an di beberapa bidang. Pendapatan per kapita belum membaik (tahun 1981-1988: -9,8%), tetapi pendapatan riil mencapai yang sama dengan tingkat tahun 1980. Pengangguran di kota turun dari 15,5% (1983) menjadi 9,2% (1988). *Terms of trade* yang menguntungkan menyebabkan neraca perdagangan menjadi positif. Uruguay dengan beberapa keberhasilan mengisi terutama pasar-pasar di negara tetangga yang lebih besar, seperti Brasilia dan Argentina. Walaupun utang mem-

bengkak (tahun 1988: 6.050 juta US\$), tingkat beban utang turun dari 34,8% (1984) menjadi 23,4% (1988). Masih dipertanyakan apakah Uruguay di pasar regional dapat mencari alternatif lain selain integrasi ke pasar dunia yang seperti dahulu dapat menghubungkan kembali negara tersebut pada kesejahteraan sosial.

Kepustakaan: H.-J. Puhle, *Politik in Uruguay*, Hannover o.J.; M. Weinstein, *Uruguay, The Politics of Failure*, Westport, Conn. 1975; M.H.J. Finch, *A Political Economy of Uruguay since 1870*, London/Basingstoke 1981; D. Nohlen, "Uruguay", dlm.: *HDW II*, 2, Hamburg 1982, hlm. 334-357; D. Nohlen/ H. Barrios, "Redemokratisierung in Südamerika", dlm.: *APuZ* 4/1989, hlm. 3 dst.

URUPABOL Kerja sama antara Uruguay, Paraguay, dan Bolivia di beberapa bidang politik ekonomi (perdagangan, infrastruktur, perhubungan), terbentuk atas inisiatif Paraguay, mula-mula dalam rangka **BID**, kemudian dalam rangka **ALALC**.

Organ: Sekretariat Tetap, Komisi Gabungan Tetap sebagai organ konsultasi dan kerja sama politik. Keikutsertaan tiga negara tersebut dalam integrasi dan kerja sama lainnya (**ALALC**, **Kelompok La Plata**, **SELA**, **ALADI**; Bolivia adalah anggota **Pakta Andes** dan **Kerja Sama Amazona**), menyebabkan diperlukannya perjanjian baru tahun 1963. Mei 1981: penandatanganan *Acta de Asuncion*. Dengan demikian terbentuk grup **URUPABOL** (Uruguay, Paraguay, dan Bolivia) secara formal. September 1982 Paraguay tiba-tiba menyatakan keluar dari kelompok **URUPABOL**. **Alasan:** tujuan kerja sama dapat juga dicapai dalam kelompok La Plata. Dengan demikian secara hukum internasional muncul

pertanyaan, apakah tujuan anggaran dasar kelompok tersebut dapat dicapai dua negara atau kelompok **URUPABOL** tenggelam dengan keluarnya Paraguay.

Kepustakaan: W. Hummel, "Die URUPABOL-Gruppe (GRUPO URUPABOL) als subregionaler Kooperationsmechanismus im Cono Sur", dlm.: D. Nohlen/M. Fernández Baeza/O. Bareiro (ed.), *Kooperation und Konflikt im La Plata-Becken*, Saarbrücken 1986, hlm. 205 dst.

wh **US-Foreign-Assistance Act** → kebutuhan dasar.

utang Utang negara berkembang terhadap kreditor swasta dan pemerintah negara industri merupakan salah satu masalah pembangunan yang mendesak dan merupakan beban berat untuk hubungan ekonomi internasional, walaupun sekarang ini tidak lagi dikhawatirkan ambruknya struktur kredit internasional (seperti tahun-tahun sebelumnya). Seluruh utang negara berkembang adalah 100 miliar US\$ (1970), menjadi 334 miliar US\$ (1977), tahun 1982 sebesar 763 miliar US\$, akhir tahun 1987 sekitar 1.200 miliar US\$, dan diperkirakan mencapai 1.223 miliar US\$ tahun 1992. Hingga awal tahun '80-an utang naik rata-rata 20% setiap tahun. Setelah tahun 1982, ketika Meksiko sebagai negara berkembang pertama yang menyatakan ketidakmampuan membayar utang—sejak saat itu orang menyebut krisis utang internasional—, tingkat pertumbuhan utang turun kembali. Namun, pertumbuhan utang selalu dan di mana saja lebih besar dari pendapatan nasional negara berkembang yang bersangkutan.

Pembagian utang secara regional terlihat terkonsentrasi di Amerika Latin (sejak tahun '70-an sekitar 40%)

dan beberapa *NIB. Brasilia, Argentina, dan Meksiko tahun 1987 berutang sekitar 1/5 dari seluruh utang negara berkembang. Sampai akhir tahun 1991 Indonesia merupakan negara pengutang terbanyak nomor 4 di dunia (68,9 miliar US\$) setelah Brasilia (117,4 miliar US\$), Meksiko (91,1 miliar US\$), dan India (72,0 miliar US\$), serta berada di atas Argentina (53,8 miliar US\$), Cina (44,3 miliar US\$). Jumlah utang ini jauh berada di atas utang yang dimiliki sesama anggota negara ASEAN, seperti Filipina (31,6 miliar US\$), Thailand (7,5 miliar US\$), dan Malaysia (21,3 miliar US\$). Negara Eropa juga mempunyai utang yang besar (Polandia, Yugoslavia). Meskipun demikian utang bukan masalah regional. Di mana-mana di *Dunia Ketiga negara pengutang harus menyisihkan sebagian besar penerimaan ekspor untuk membayar beban utang (utang dan bunganya) sehingga mereka tidak memiliki lagi devisa untuk *investasi pembangunan; bagian ini (*debt service ratio* - perbandingan beban utang dengan nilai ekspor) tahun 1977 rata-rata masih 17%, terus meningkat dan melewati batas kritis 20% (tahun 1986: 26%). Tahun 1986 Amerika Latin mempunyai beban 46%, Afrika 33,5%, Asia 13,1%, dan Timur Tengah 34,6%. Beban utang negara berkembang lambat laun makin besar sehingga sejak tahun 1985 setiap tahun lebih banyak dana mengalir dari Dunia Ketiga ke negara industri daripada sebaliknya.

Struktur teknik pembiayaan utang sejak negara berkembang terjerat dalam lingkaran utang, telah mengalami

banyak perubahan dengan sangat merugikan negara berkembang. Di tahun '70-an pangsa kredit dengan kondisi khusus (misalnya kredit bantuan pembangunan bilateral dan multilateral berbunga rendah) makin turun dibandingkan kredit bank komersial berbunga tinggi. Hampir separo pertumbuhan utang antara tahun 1971-1985 berasal dari kredit bank dengan bunga yang berlaku di pasar uang, sampai tahun 1979 masih bisa menguntungkan negara berkembang. Namun, politik keuangan AS di bawah Reagan telah menaikkan suku bunga secara drastis. Oleh karena itu, beban negara berkembang makin bertambah berat, bukan hanya untuk kredit baru, melainkan juga untuk utang sebelumnya karena untuk kredit komersial biasanya disepakati suku bunga yang berubah-ubah.

Penyebab krisis utang dapat dibedakan menjadi dua: a. eksternal, apakah ia termasuk kondisi dan perkembangan ekonomi dunia atau; b. internal, penyebabnya dapat juga ditemukan di dalam negara berkembang itu sendiri. Selanjutnya dapat juga dibedakan penyebab struktural dan kondisi konjungktural jangka pendek.

Sejak tahun '60-an pertumbuhan utang (a.l. di Amerika Latin dan di Asia Tenggara) merupakan ungkapan usaha industrialisasi negara berkembang yang perlu pembiayaan makin besar dari kredit bank negara industri. Sejak itu, utang berkaitan erat dengan dominasi strategi pembangunan tertentu serta realitas bahwa negara berkembang tidak memiliki sektor kredit sendiri, melainkan

utang

ditandai oleh apa yang dinamakan banking luar negeri.

Goncangan pertama harga minyak tahun 1973/1974 (→ OPEC) berdampak negatif atas neraca pembayaran negara berkembang pengimpor minyak; sementara itu di sektor

perbankan, a.l. di AS, tersedia sejumlah besar apa yang dinamakan *petro dollar* (hasil ekspor negara OPEC yang disimpan di bank-bank negara industri). Dana ini dipakai oleh bank-bank negara industri untuk memenuhi permintaan kredit yang

Tabel 19: Utang jangka menengah dan jangka panjang serta beban utang negara berkembang 1980-1987 (dim. miliar US\$)

	Seluruh negara berkembang			Negara pengutang besar ^a			Afrika sebelah selatan Sahara		
	1980-85	1986	1987 ^b	1980-85	1986	1987 ^b	1980-85	1986	1987 ^b
Utang	604,2	884,9	886,0	299,7	420,8	440,6	58,3	89,6	100,3
pemerintah	324,0	357,4	353,0	83,1	98,3	102,9	34,0	59,0	65,9
swasta	280,2	527,5	533,0	216,6	322,5	337,7	24,3	30,6	34,4
Utang dlm. % GNP	29,3	41,2	38,5	36,9	55,2	56,9	34,8	61,6	79,0
Beban utang ^c	94,0	116,9	123,4	50,3	48,7	46,7	6,5	7,1	7,1
Bunga	46,3	55,6	56,0	28,4	30,0	28,1	2,8	2,8	3,1
pemerintah	8,7	15,3	17,0	3,0	5,5	6,5	0,8	1,4	1,6
swasta	37,6	40,3	39,0	25,4	24,5	21,6	2,0	1,4	1,5
Pelunasan utang	47,7	61,3	67,4	21,9	18,7	18,6	3,7	4,3	4,0
pemerintah	10,3	18,0	21,0	3,8	6,6	7,0	0,9	1,6	1,5
swasta	37,4	43,3	45,8	18,1	12,1	11,6	2,8	2,7	2,5
Pembayaran beban utang dlm. % ekspor barang dan jasa	15,6	25,2	23,8	32,9	37,6	31,9	15,7	22,0	21,5
Suku bunga rata-rata ^d	9,5	6,9	n.d.	11,6	8,0	n.d.	7,1	5,3	n.d.
Pembayaran bruto	104,5	85,7	84,3	47,0	23,6	25,8	10,4	8,6	7,0
pemerintah	31,7	36,9	36,3	11,8	12,4	12,2	4,7	5,3	4,5
swasta	72,8	48,8	48,0	35,2	11,2	13,6	5,7	3,3	2,5

Catatan:

Utang pemerintah dan utang yang dijamin pemerintah serta utang yang dijamin swasta dari 109 negara, yang dimasukkan dalam sistem laporan Bank Dunia untuk masalah utang.

^{a)} Argentina, Bolivia, Brasilia, Cile, Kosta Rika, Pantai Gading, Ekuador, Jamaika, Yugoslavia, Kolombia, Maroko, Meksiko, Nigeria, Peru, Filipina, Uruguay, dan Venezuela

^{b)} Sementara (keadaan pada akhir Juni 1988)

^{c)} Dalam tunai, artinya pembayaran yang sudah dilakukan

^{d)} Bunga rata-rata yang telah dibayar dari utang yang belum lunas

n.d. : non data

Sumber: Bank Dunia, Washington, D.C., 1988.

makin meningkat dari banyak negara berkembang (*Dollar-Recycling*). Antara tahun 1973-1980 tercatat tingkat pertumbuhan kredit tertinggi. Perubahan dari pertumbuhan utang ke dalam suatu krisis berlangsung sejak akhir tahun '70-an melalui tiga faktor yang muncul bersamaan: guncangan harga minyak kedua tahun 1979/1980 (makin mahalnya impor negara berkembang), jatuhnya harga bahan mentah (menurunnya penerimaan devisa negara berkembang) dan politik suku bunga tinggi yang dipraktekkan AS (semakin mahalnya impor modal). Perkembangan eksternal ini tidak diduga oleh negara berkembang dan mereka juga tidak mempunyai kesempatan nyata untuk melepaskan diri dari dampak resesi ekonomi dunia, seperti dilakukan oleh negara industri dengan bantuan proteksionisme baru, tentu saja menyebabkan makin memburuknya neraca pembayaran negara berkembang.

Beban utang yang berbeda di antara negara berkembang yang telah disebut di atas juga menunjukkan adanya penyebab internal di negara berkembang itu sendiri. Seringkali kredit yang diterima tidak dimanfaatkan untuk proyek yang menunjang pembangunan, melainkan lebih banyak digunakan untuk proyek mercu suar atau untuk peningkatan kesejahteraan yang tidak dapat dibenarkan. Kelemahan politik anggaran belanja negara dan politik perekomian negara, juga merupakan faktor-faktor yang turut bertanggung jawab. Selain itu, sebagian besar negara berkembang ditandai oleh sangat tingginya pelarian modal ke luar negeri (di

beberapa negara berkembang jumlahnya lebih dari separo dari modal yang diimpor): investor yang potensial (tuan tanah, industriawan) tidak menanam modalnya di dalam negeri sendiri, melainkan di negara industri karena labanya besar dan aman.

Setelah pernyataan kebangkrutan Meksiko, Brasilia, dan negara berkembang lain tahun 1982/1983, pertama-tama dikhawatirkan ambruknya sistem keuangan internasional. Bukan saja karena tingginya utang, melainkan juga karena kreditor utama adalah bank-bank swasta AS yang sebagian pinjamannya melampaui jumlah modal sendiri untuk bisnis *Dollar-Recycling*, yang pada awalnya memberi keuntungan besar. Lembaga kredit swasta, (karena kecerobohannya memberikan kredit) turut bertanggung jawab atas terjadinya krisis, lalu tiba-tiba menarik diri dari bisnis kredit dengan negara berkembang. Pemberian kredit ke negara-negara pengutang utama tahun 1982 masih sebesar 40 miliar US\$, tetapi tahun 1984 hanya sebesar 5 miliar US\$.

Akibat utang ini sama seperti suatu lingkaran setan. Tingginya utang suatu negara berkembang menyebabkan ketidakmampuan membayar kembali sehingga tidak layak lagi menerima utang dengan akibat makin memburuknya neraca pembayaran dan akhirnya kembali makin membesar ketidakmampuan membayar utang, begitu seterusnya. Sejak tahun 1985 lebih banyak modal mengalir dari Dunia Ketiga ke negara industri daripada sebaliknya (tahun 1986: 29 miliar DM). Artinya, negara berkembang yang bersangkutan (misalnya

LLDCs sebelah selatan Sahara) tidak memiliki modal yang sangat diperlukan untuk pembangunan struktur ekonomi yang homogen (\rightarrow heterogenitas struktural). Selain itu, makin memburuknya situasi akibat utang, terjadi bersamaan dengan ketidaklayakan menerima kredit dan memburuknya *terms of trade*. Di negara-negara berkembang Afrika hal tersebut mengakibatkan turunnya pendapatan per kapita sebesar 25% sejak awal tahun '80-an.

Reaksi terhadap krisis utang muncul sejak tahun 1982 dalam berbagai bentuk pengelolaan teknik keuangan dan pengelolaan krisis politik, tetapi hingga kini tidak menjanjikan harapan akan pemecahan masalah. Instrumen terpenting adalah penjadwalan utang, artinya persetujuan kasus demi kasus mengenai restrukturisasi utang antara kreditor swasta dan kreditor pemerintah yang tergabung dalam Kelompok Paris dengan negara-negara berkembang yang bangkrut. Dengan demikian pembayaran utang yang sudah jatuh tempo dimundurkan waktunya. IMF berperan khusus pada pengelolaan krisis semacam ini. Negara berkembang yang menginginkan penjadwalan utang kembali harus mengadakan perjanjian dengan IMF, dan untuk mendapatkan persetujuan dari IMF harus memenuhi persyaratan ekonomi dan politik keuangan terlebih dahulu yang biasanya sangat berat. Dengan tujuan menyeimbangkan defisit anggaran belanja negara dan defisit neraca pembayaran, persyaratan IMF pada tahap awal krisis biasanya adalah tindakan penghematan yang ketat

di sektor pemerintahan, devaluasi mata uang, dan pembentukan harga secara bebas misalnya untuk bahan pangan penting (misalnya makanan pokok yang di banyak negara berkembang disubsidi oleh pemerintah). Di banyak negara berkembang hal ini mengakibatkan makin meningkatnya ketegangan ekonomi dan sosial dan sebagian juga menimbulkan kerusuhan politik (misalnya di Zambia, Sudan). Penjadwalan utang pertamanya disepakati hanya untuk jangka pendek, biasanya dibayar dengan ongkos yang tinggi dan kenaikan bunga bagi negara penerima utang. *Baker-Plan* dan penjadwalan utang semacamnya yang lebih ringan (rentangan waktu yang lebih panjang, tidak ditambah biaya administrasi, dikaitkan dengan kredit baru) dimulai tahun 1985/1986, dalam jangka panjang mencoba memperbaiki dan memulihkan kemampuan membayar utang negara pengutang utama. Suatu tujuan serupa dilakukan juga oleh konsep perubahan utang, yaitu utang ditukar dengan obligasi berdasarkan nilai mata uang negara pengutang atau ditukar dalam bentuk saham perusahaan. *Debt-equity-swaps* ini bagi bank pemberi kredit memang terkait dengan sedikit kerugian, tetapi dengan cara ini dapat membebaskan diri dari piutang yang mengandung risiko besar dan mencegah kemungkinan kerugian yang lebih besar. Namun, pemecahan masalah melalui mekanisme perubahan utang yang berorientasi pasar seperti itu tidak dapat diharapkan karena volume utang yang dapat dilunasi melalui cara demikian relatif kecil. Hal sama

berlaku juga bagi perluasan fasilitas kredit IMF (1987) dan program khusus Bank Dunia (fasilitas Afrika) untuk membantu program penyesuaian struktur negara-negara berkembang Afrika. Di tingkat bilateral dan dalam tingkatan yang berbeda-beda negara industri merencanakan atau menjalankan perubahan kredit bantuan pembangunan resmi mereka menjadi tunjangan dan perbaikan persyaratan untuk pemberian kredit (misalnya orientasi pada kredit IDA). Semua tindakan dalam hubungan dengan krisis utang ini berdasarkan gambaran bahwa negara berkembang, dalam jangka panjang, melalui pertumbuhan ekonomi dapat membayar lunas utangnya. Kebanyakan LLDCs dibebaskan utang yang berasal dari kredit bantuan pembangunan bilateral. Dalam hubungan dengan negara pengutang utama sejak tahun 1988 diisyaratkan suatu pandangan bahwa pemecahan masalah utang tidak dapat dicapai tanpa pembebasan sebagian utang. Pandangan ini tercetus dalam persetujuan penjadwalan utang untuk Meksiko dan Brasilia serta pernyataan masing-masing bank swasta.

Dari berbagai pihak diusulkan untuk menjalankan suatu pemecahan krisis utang menurut model perbandingan hukum perdata. Untuk setiap situasi khusus suatu negara pengutang disepakati pemecahan politik di bawah suatu kesatuan kriteria, lembaga, dan instrumen internasional. Dasar gagasan strategi semacam itu hanya melalui pembebasan sebagian utang dapat membuat suatu negara pengutang yang bangkrut mampu

membayar sisa utang sesuai kemampuan ekonomi, menyehatkan perekonomian, dengan demikian kembali menjadi mitra bisnis yang "baik", artinya layak menerima kredit. Hanya dengan cara ini, demikian pertimbangannya, dapat dipulihkan kembali kesediaan bank memberikan kredit yang saat ini cenderung menuju titik nol, dan dapat dihentikannya arus keluar modal dari Dunia Ketiga dan membalik ke arah yang berlawanan. Penyehatan perekonomian setiap negara pengutang untuk jangka waktu lama harus dijamin dengan tindakan penyesuaian struktur, merupakan bagian kewajiban yang telah disepakati dan pelaksanaannya memungkinkan pihak kreditor mempunyai pengaruh untuk memantau politik perekonomian negara pengutang. Tentu saja ditekankan bahwa tindakan penyesuaian semacam itu harus berlangsung dengan memperhatikan keadaan sosial kelompok penduduk miskin. Selain itu, merupakan kewajiban negara industri melakukan tindakan penyesuaian struktur ekonomi, seperti menghapuskan proteksionisme, terutama koordinasi politik perekonomian dan politik keuangan serta pengawasan kredit merupakan persyaratan yang diperlukan untuk kesepakatan akan pemecahan masalah. Tentu saja masih dipertanyakan, apakah dengan persyaratan demikian justru akan menyebabkan krisis yang lebih mendalam. Padahal hal serupa terlihat jelas dari posisi ketergantungan negara berkembang terhadap pasar dunia, dominasi strategi industrialisasi dengan biaya dari luar dan pembangunan berorientasi ekspor (pertum-

buhan yang dibayar dengan utang) yang bertentangan dengan usaha pendobrakan "circulus vitiosus utang.

Kepustakaan: E. Altwater (ed.), *Die Armut der Nationen, Handbuch der Schuldenkrise von Argentinien bis Zaire*, Berlin 1987; D. Boris (ed.), *Schuldenkrise und Dritte Welt, Stimmen aus der Peripherie*, Köln 1987; T. Kampffmeyer, *Die Verschuldungskrisis der Entwicklungsländer. Probleme und Ansatzpunkte für eine Lösung auf*

dem Vergleichswege, Berlin 1987; W. Hankel, "Hintergründe der internationalen Schuldenkrise", dlm.: *APuZ*, 33-34/1988, hlm. 13 dst.; U. Holz (ed.), *Verschuldungskrise der Entwicklungsländer*, Baden-Baden 1988; K. Schröder, "Der Weg in die Verschuldungskrise", dlm.: *APuZ*, 33-34/1988, hlm. 3 dst.; Alfons Ims, "Zwischen Großbanken und Kleptokraten, ea", dlm.: *ila*, no. 156, Juni 1992. **bt**

V

Vanuatu → Kepulauan Pasifik.

VAP (*Voluntary Assistance Program*)
Program Bantuan Para Relawan.

Venezuela Venezuela yang memperlihatkan tradisi otoriter, sejak tahun 1958 mempunyai sistem demokrasi yang berfungsi dan dianggap sebagai negara Amerika Latin dengan politik yang stabil. Namun, dampak krisis ekonomi tahun '80-an yang makin berat, menyebabkan akhir-akhir ini pendapat demikian mulai disangsikan.

1. Venezuela (luas: 912.050 km²) berbatasan dengan Kolombia, Brasilia, dan Guyana. Dengan Kolombia ada perselisihan perbatasan di daerah pantai (minyak bumi), selain itu Venezuela mengklaim 2/3 daerah negara Guyana. Venezuela kaya akan cadangan sumber daya alam. Kekayaan alam nomor satu adalah cadangan minyak bumi yang diperkirakan berjumlah 55,5 miliar barel (cadangan minyak bumi nomor 4 terbesar di dunia), di antaranya 18 miliar barel adalah cadangan di Orinoco yang diduga malah lebih banyak dan dinyatakan sebagai salah satu cadangan energi terbesar dunia. Selain minyak bumi dan gas bumi, Venezuela juga mempunyai banyak cadangan

mineral (terutama bijih besi). Pembangkit listrik tenaga air memegang peranan penting. Dengan pembangkit energi Guri (52 miliar kW) tahun 1986 selesai dibangun kompleks hidroelektrik terbesar dunia.

2. Sektor ekonomi yang dominan adalah pemboran minyak di daerah barat dan timur dengan pangsa 80% pada penerimaan ekspor. Venezuela berdasarkan perjanjian San José tahun 1980 memasok minyak bumi ke sembilan negara Amerika Tengah dan Karibia dengan syarat-syarat yang mudah. Setengah ekspor minyak Venezuela adalah ke Republik Dominika, Panama, dan Jamaika. Mitra dagang terpenting adalah AS (48,5% perdagangan luar negeri). Cabang industri terpenting adalah rafineri minyak. Produk-produk petrokimia merupakan produk ekspor terpenting selain produk-produk metal (aluminium). Pemanfaatan gas bumi yang keluar pada eksploitasi minyak, makin mempunyai arti di tahun-tahun terakhir ini. Nasionalisasi sektor gas bumi terutama untuk memenuhi kebutuhan kota-kota dilaksanakan tahun 1971, sedangkan nasionalisasi sektor minyak tahun 1976. Pemerintah juga mempunyai saham besar pada per-

usaha-perusahaan pengolahan lainnya. Sektor sekunder mempunyai pangsa 37,3% pada PDB (menyerap 25,3% angkatan kerja). Pangsa sektor pertanian pada PDB 7,8% dan menyerap 15% angkatan kerja, merupakan yang terendah di Amerika Latin. Setelah puluhan tahun menelantarkan pertanian karena menitikberatkan investasi di sektor minyak bumi sehingga Venezuela yang mempunyai potensi pertanian besar menjadi importir bahan makanan, makna pertanian makin besar pada tahun '80-an. Ketergantungan impor di bidang ini pada tahun-tahun terakhir turun dari 74% (1983) menjadi sekitar 20% (1988). Terutama sekali penangkapan ikan berkembang pesat sehingga penangkapan ikan tuna Venezuela maju menjadi nomor 3 terbesar dunia. Penangkapan hewan sejenis kepiting dsb. terutama untuk ekspor makin penting artinya. Produk-produk pertanian tradisional adalah peternakan sapi (40% dari produksi pertanian meningkat cepat tahun-tahun terakhir), jagung, sorgum, dan padi. Sejak tahun 1983 pertanian tumbuh rata-rata 6%/tahun, bidang ini juga didominasi negara (70% tanah milik negara). Kemajuan tahun-tahun terakhir diperoleh terutama oleh pertanian swasta yang didukung pemerintah.

3. Venezuela tahun 1989 berpenduduk 19 juta jiwa, dengan kepadatan penduduk 21,4 jiwa/km². Kenaikan penduduk rata-rata 2,8% (1980-1989) sangat tinggi. 38,5% penduduk lebih muda dari 15 tahun. Penyebaran penduduk secara regional tidak merata. Lebih dari 2/3 penduduk hidup di utara, sedangkan pegunungan Gua-

yana hampir tidak berpenduduk. Di Carácas hidup 2,45 juta jiwa (1.270 jiwa/km²). Tingkat urbanisasi 84%. Komposisi etnis: 34% Mestis, 33% Mulat, 20% kulit putih terutama keturunan Spanyol dan Italia, 9% kulit hitam, 2% Indian, dan 2% lainnya. Orang Indian hidup terutama di delta Orinoco, di timur laut dan di pegunungan Guayana. 84% penduduk beragama Katolik, kira-kira 50.000 Protestan, dan 9.000 Yahudi. Harapan hidup 70 tahun, jumlah penduduk per tempat tidur rumah sakit adalah 378 dan seorang dokter untuk setiap 1.210 penduduk. Tingkat penyekolahan 85%. Perbedaan sosial sangat tajam: kini 40% penduduk hidup di bawah garis kemiskinan.

4. Tahun 1498 Venezuela ditemukan Columbus, mula-mula tidak penting bagi Spanyol (tidak ada cadangan metal berharga). Sejak tahun 1718 Venezuela menjadi milik wakil Kerajaan New-Granada. Dengan perkembangan perdagangan hasil perkebunan (coklat, kopi), Venezuela secara ekonomi di abad ke-18 menjadi jajahan Kerajaan Spanyol terpenting. Tahun 1811 mulai berlangsung perang kemerdekaan yang sangat lama dan meminta korban sangat besar. Tahun 1821 Venezuela merdeka dari Spanyol sebagai bagian dari Kolombia Raya. Akhirnya, tahun 1830 Venezuela merdeka dengan memisahkan diri dari Kolombia Raya. Pembangunan politik mula-mula didominasi oleh oligarki perdagangan yang konservatif (1830-1847). Setelah berlangsung perang saudara (1861-1868; 350.000 korban jiwa) yang dimenangkan oleh kelompok

pro UUD federasi, Venezuela jatuh dalam kekacauan politik. Sejak diktator Jenderal Guzmán Blanco (1870–1888) terbentuk stabilisasi dan awal modernisasi (pembangunan jalan kereta api). Di bawah Jenderal Gómez (1908–1935) terbentuk sentralisasi melalui penghancuran *caudillos* setempat. Penambangan minyak bumi dimulai tahun 1917. Industrialisasi dilakukan sejak tahun '40-an. Industri berkembang pesat karena diuntungkan oleh bea cukai yang tinggi, dan diawali dengan pengolahan produk-produk pertanian sendiri. Model ekonomi ekspor tradisional berdasarkan ekonomi *'latifundia'* digantikan perekonomian nasional yang makin berorientasi ke sektor produksi. Cabang penting adalah produksi aluminium dan industri petrokimia. *Acción Democrática* (AD) yang dibentuk tahun 1941 merupakan partai massa pertama dengan basis pedesaan dan program sosial politik, dapat mengganti rezim Jenderal López Contreras dan Medina Angarita melalui kudeta. Namun, tahun 1948 demokratisasi terputus melalui kudeta dipimpin Jenderal M. Pérez Jiménez. Pembentukan koalisi militer dan sipil diiringi gerakan sosial demokrat, berhasil menjatuhkan diktator dan memilih presiden sipil. (R. Betancour, dari partai AD; 1959–1964).

5. Melalui UUD ke-26 negara tersebut tahun 1961, diciptakan sistem presidentil demokratis (pemilihan umum setiap 5 tahun, parlemen 2 kamar). Setelah berlangsung masa ketidakstabilan akibat usaha penghancuran sistem yang mapan tersebut oleh *'gerilya'* kiri dipimpin partai

komunis Venezuela dan oleh MIR (pecahan dari AD), terjadi konsolidasi demokrasi Venezuela. Kelompok kiri dapat diintegrasikan dalam sistem politik (amnesti tahun 1969). Kedua partai yang dominan, partai sosial demokrat AD dan Kristen demokrat COPEI (*Comité de Organización Política Electoral*, Komite Organisasi Politik Pilihan Bebas) tahun 1968–1973 pertama-tama memegang jabatan presiden, berganti-ganti pemerintahan karena pada setiap pemilihan umum partai yang menjadi oposisi selalu menang. Hal ini terputus untuk pertama kali Desember 1988 dengan terpilihnya Carlos Andrés Pérez (AD) yang pernah menjadi presiden tahun 1974–1979 (presiden sebelum pemilu tahun 1988 dari partai AD). Di tahun '70-an Venezuela mengalami *boom* akibat harga minyak melonjak. Penerimaan negara dapat ditingkatkan secara drastis melalui nasionalisasi sektor minyak bumi sehingga menarik banjir investasi negara di bidang produksi minyak bumi. Akibatnya, kedudukan negara di perekonomian bertambah besar. Dengan turunnya harga minyak sejak tahun 1983, terlihat kelalaian masa lalu (kurangnya *'diversifikasi'* sektor ekspor, stagnasi pertanian, disparitas ekonomi, utang luar negeri); Venezuela hanyut dalam krisis yang pada tahun '80-an bertambah besar, walaupun pemerintah berusaha mengubah haluan (mendukung pertanian, swastanisasi untuk menguatkan persaingan). Penerimaan minyak jatuh dari 16,3 miliar US\$ (1981) menjadi 8,4 miliar US\$ (1988). Gaji riil turun 38% sejak tahun 1983, tingkat inflasi naik men-

jadi 35,5% (1988). Utang yang berjumlah 33 miliar US\$ merupakan nomor 4 tertinggi di Amerika Latin. Beban utang tahun 1988: 45% hasil ekspor. Venezuela selalu membayar bunga utangnya, sejak tahun 1982 berjumlah sekitar 30 miliar. US\$. Pemerintah baru di bawah C.A. Pérez awal tahun 1989 untuk pertama kalinya menghentikan pembayaran tersebut. Untuk mendapatkan *stand-by-loan* dari IMF sebesar 1,5 miliar US\$ (bagian kredit pertama disetujui Maret 1989), pemerintah menjalankan politik pengencangan ikat pinggang secara ketat yang hanya dapat dirongkan sedikit melalui kenaikan gaji minimum dan gaji pegawai negeri. Kenaikan harga menimbulkan perlawanan spontan di kota-kota besar dengan korban 350 jiwa dan 1.800 luka-luka karena kekerasan pihak pasukan keamanan. Meningkatnya kekerasan politik yang juga berkaitan dengan kegiatan mafia kokain, ketegangan sosial, dan keresahan dalam militer, merupakan faktor-faktor ancaman terhadap demokrasi di Venezuela.

Kepustakaan: O. Araujo, *Venezuela. Die Gewalt als Voraussetzung der Freiheit*, Frankfurt 1971; K. Lindenberg/D. Nohlen, "Venezuela", dlm.: HDW I, 2, Hamburg 1976, hlm. 461 dst.; A. Boeckh, "Venezuela", dlm. HDW II, 2 Hamburg 1982, hlm. 358 dst.; N. Wetz, *Parteien, Staat und Entwicklung in Venezuela*, München 1983.

hb

vent for surplus → teori perdagangan-luar negeri.

vernacular Definisi dari bahasa Inggris untuk bahasa rakyat yang sekaligus merupakan bahasa ibu dan bahasa negara. Bahasa rakyat berbeda dengan bahasa budaya dalam hal tidak mempunyai literatur dan miskin

akan literatur, dan kemudian terbatas pada sebuah literatur yang terutama hanya digunakan pada pendidikan dasar dan pendidikan kesadaran politik. Di kelas sekolah yang lebih tinggi pelajaran diberikan dalam bahasa budaya. Perbedaan dan dampak politik pendidikan yang ada bersamanya berkaitan erat dengan kekuasaan kolonial dan politik bahasa, budaya, asimilasi, dan alienasi yang dijalan-kannya. Sejak dekolonisasi, bahasa-bahasa rakyat berkembang lambat ke arah kategori bahasa budaya. **dn** **Vietnam** Masalah terbesar yang dihadapi Vietnam sekarang adalah penyingkiran kerusakan-kerusakan akibat dua perang Indocina, perselisihan dengan RRC, pembiayaan aparat militer negara, dan pembiayaan pasukan yang ditempatkan di Kamboja, pembangunan struktur perekonomian yang sama antara Vietnam Utara dan Selatan, penyingkiran kesenjangan Utara dan Selatan, penjaminan pengadaaan bahan makanan, dan perbaikan taraf hidup penduduk.

1. Vietnam Utara (luas keseluruhan Vietnam: 332.556 km²) hampir seluruhnya bergunung dan ditumbuhi hutan belantara, hanya 15%–20% luas keseluruhan bekas Vietnam Utara berupa dataran rendah. Kebanyakan orang Vietnam hidup di delta Sungai Merah, salah satu daerah terpadat di dunia. Banjir terus-menerus di delta yang rendah letaknya dan memiliki jaringan kanalisasi dan bendungan yang baik, iklim yang menguntungkan serta tanah yang subur, menyebabkan daerah tersebut sangat baik untuk daerah penanaman padi. Daerah yang juga seperti itu adalah delta

Sungai Mekong di Vietnam Selatan (40% luas bekas Vietnam Selatan). Di dataran tinggi dari Vietnam Selatan ditanam kopi, teh, tembakau, dan karet; di dataran rendah tengah ditanam padi (hampir seluruhnya), penangkapan ikan dan industri kecil.

2. Tahun 111 SM sampai tahun 939 dikuasai langsung oleh Cina. Vietnam yang kemudian merdeka memperoleh 3 pusat politik: Tongking (ibu kota Hanoi) di utara, Annam (ibu kota Huế) di tengah, dan Cochinchina (ibu kota Saigon) di selatan. Antara penduduk selatan dan utara terdapat ketegangan-ketegangan sejak abad ke-16, ketika Selatan mulai mengembangkan identitas sendiri. Lebih dari 2 abad (1593-1802) perbatasan antara kedua bagian tersebut ditutup dan hanya sekali-sekali dilalui tentara dan ekspedisi. Penyatuan nasional kembali (1802) yang dicapai dengan cara militer dan diterima oleh Utara secara tidak rela karena dinasti Nguyen dan seterusnya berasal dari Selatan.

Pada abad ke-19 Vietnam masuk dalam sistem kekuasaan penjajahan dengan latar belakang kepentingan Eropa akan jalan masuk ke Cina. Perancis mengadakan intervensi tahun 1858 dan sampai tahun 1887 menyatukan Vietnam, Laos, dan Kamboja dalam Uni Indocina Perancis. Juni 1940 Jepang menjadikan Vietnam daerah perlindungannya dan menyingkirkan Perancis dari administrasi negara. Ketika 9 Maret 1945 Jepang mengembalikan kemerdekaan kepada Vietnam, ia melanggar perjanjian dengan Perancis. Tanggal 11 Maret 1945 Kaisar Bao Dai dari suku

Annam membatalkan perjanjian protektorat dengan Perancis yang dibuat tahun 1884. Karena hal ini hanya berlaku untuk Annam dan Tongking, Cochinchina tetap dikuasai asing (saat itu Jepang). Tanggal 25 Agustus 1945 Kaisar Bao Dai mengundurkan diri dan menyerahkan kekuasaan kepada Vietminh (didirikan sebagai gerakan kemerdekaan antipenjajahan Mei 1945, pendahulu: a.l. Partai Komunis Indocina yang didirikan Ho Chi Minh tahun 1930) untuk menghindari perang saudara.

2. Ho Chi Minh 2 September 1945 memproklamkan Republik Demokrasi Vietnam (RDV). Republik ini memang diakui Perancis Maret 1946, tetapi dalam perang Indocina I bekas penjajah tersebut mencoba menghapuskan perkembangan yang telah berlangsung. Penyerangan ke utara dikaitkan Perancis dengan usaha membentuk pemerintahan tandingan di selatan. Kaisar Bao Dai terbuju untuk kembali ke tahta (1949). Setelah kekalahan militer Perancis di Dien Bien Phu (1954), dalam Konferensi Indocina di Jenewa ditetapkan 17⁰ LU sebagai garis perbatasan antara Vietnam Utara dan Selatan, dengan demikian menciptakan landasan hukum internasional untuk pemisahan pembangunan kedua bagian negara tersebut, yang juga dapat dibangun pada landasan kesadaran regional di utara dan selatan. Sementara awal baru dan pembangunan ekonomi Vietnam Utara dipimpin Ho Chi Minh (kekuasaan satu partai, sentralisme, perekonomian terencana) berlangsung menurut kriteria-kriteria marxis-leninisme dibantu oleh Uni

Soviet dan RRC, di selatan AS dengan cepat menggantikan Perancis sebagai penguasa. Tahun 1955 diktator Ngo Dinh Diem menggulingkan kaisar dan memproklamkan Vietnam Selatan sebagai republik dengan dirinya sebagai presiden. Sebagai etalase demokrasi, Vietnam Selatan tahun berikutnya memperoleh UUD yang mengacu pada demokrasi presidentil model AS. Peningkatan ekonomi yang terjadi dengan bantuan AS secara deras (sejak tahun 1958 AS membiayai lebih dari separo anggaran Vietnam Selatan), hanya menguntungkan lapisan atas tradisional dan kepentingan AS. Reformasi pertanian tahun 1956 tidak menyingkirkan kemiskinan petani. Tuan tanah besar (2% dari penduduk) memiliki 45% lahan. Representasi yang lebih dari proporsional orang-orang Katolik di pemerintahan menimbulkan oposisi dari golongan Buddha. Setelah Diem jatuh (1963) dengan keterlibatan CIA, berlangsung serentet penggulingan kekuasaan dan penggantian pemerintahan; pengaruh militer dalam pemerintah makin besar. Hal ini merupakan dampak lanjutan dari persengketaan-persengketaan bersenjata yang bertambah besar dalam diri Vietnam Selatan pada perang Indocina II (perang Vietnam). Gerilya Front Kemerdekaan Nasional (NLF/Vietkong) dengan dukungan rakyat menguasai sebagian besar Vietnam Selatan dan Januari 1968 juga menyerang kota-kota (serangan Tet). Sampai Desember 1966 AS menempatkan 400.000 tentara di Vietnam Selatan, di satu pihak mendapat protes dari seluruh dunia yang bertambah besar karena

keterlibatan militer, dan di lain pihak menghadapi kegagalan tindakan militer yang brutal (pemboman Vietnam Utara dengan kerusakan sangat besar, peracunan daerah negara tersebut di wilayah sangat luas, pelemparan bom napalm dan bom pecahan). Sejak tahun 1968 pihak-pihak yang bersengketa bertemu di Paris untuk mengadakan pembicaraan, dan berakhir dengan perjanjian gencatan senjata tahun 1973. AS mulai menarik pasukannya dan mengubah bentuk bantuan kepada rezim Saigon (politik vietnamisasi). Walaupun demikian persengketaan tetap belum berakhir. Tahun 1975 tentara Vietnam Utara memasuki Saigon dan menyatukan kembali Vietnam (2 Juli 1976: Republik Sosialis Vietnam).

4. Usaha-usaha pembangunan kembali negara tersebut condong ke model Moskow, pada mulanya memberikan kedudukan khusus pada Vietnam Selatan dan terjadi perselisihan pada puncak Partai Komunis Vietnam (PKV) mengenai masalah apakah akan mengikuti Uni Soviet atau RRC. Uni Soviet dan anggota COMECON (Vietnam juga menjadi anggota tahun 1978), memberi senjata dan kebutuhan persenjataan. Kebijakan ekonomi dan politik menentang sektor luas perdagangan yang berstruktur kapitalis dan didominasi oleh minoritas Cina, arus imigrasi sebagai dampaknya (pengungsi, *Boat People*), sengketa sebuah pulau yang kaya minyak di Laut Cina Selatan dan perjanjian kerja sama Vietnam-Uni Soviet (3 November 1978), menguatkan konflik Cina-Vietnam yang meledak menjadi pertikaian bersenjata awal

tahun 1979 setelah tentara Vietnam menduduki Kamboja. Aksi penghukuman terhadap Vietnam ini berlangsung dari 17 Februari–5 Maret 1979, tentara Cina menduduki garis perbatasan 20 km–25 km dan menghancurkan desa-desa perbatasan.

5. Penduduk Vietnam tahun 1984 diperkirakan 58,3 juta jiwa. Lebih dari 1/2 juta sekarang hidup di penampungan pengungsi. Ibu kota Hanoi (tahun 1985: 3 juta jiwa), Saigon (4 juta jiwa) tahun 1976 diubah menjadi Ho Chi Minh (tahun 1983 sekitar 20% penduduk hidup di perkotaan). Buddha Jahajana adalah agama dominan, selain itu terdapat minoritas Katolik yang kuat (5%–6%, 2/3 di Selatan) dan agama Tao, Konfucu, dan pengikut sekte-sekte. Bahasa Vietnam adalah bahasa nasional, bahasa perdagangan dan pendidikan sebagian Perancis, di selatan Inggris. 83% penduduk Vietnam adalah suku Vietnam (Minh), selain itu ada kelompok kecil di perbatasan Thailand-Cina dan suku minoritas Cina.

6. Untuk pertama kalinya, 25 April 1976, kongres seluruh Vietnam dipilih dengan daftar tunggal (492 wakil rakyat; 249 dari Vietnam Utara dan 243 dari Vietnam Selatan). Kekuatan terpenting negara adalah Partai Komunis Vietnam (Sekjen: Le Duan), kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri Pham Van Dong. Setelah pertama-tama menekankan pada kepemilikan bersama dan produksi industri berat, partai komunis Vietnam tahun 1979 berorientasi baru, dan memberi peluang inisiatif swasta serta memprioritaskan peningkatan produksi di pertanian dan industri konsumsi.

Walaupun persyaratan cuaca/iklim tidak menguntungkan (kekeringan/banjir), lahan pertanian di tahun-tahun terakhir berhasil ditingkatkan dengan pesat. Walaupun demikian padi masih harus diimpor untuk menjamin pengadaan makanan penduduk. Perkembangan di sektor industri berlangsung lambat, terutama akibat penyetopan bantuan pembangunan dari negara industri dan organisasi-organisasi internasional setelah terjadi invasi Vietnam di Kamboja. Meskipun demikian Vietnam—seperti negara-negara tetangga, Laos dan Kamboja—mengharapkan peningkatan investasi langsung dari NIB Asia Timur serta Jepang pada waktu-waktu mendatang. Sebuah UU *joint venture* Februari 1988 membuka kemungkinan untuk itu. Pembukaan ekonomi berjalan bersama dengan peredaan ketegangan politik: sejak kedua negara adi kuasa, Uni Soviet dan RRC, duduk kembali di meja perundingan dan Uni Soviet mengakui peran RRC sebagai kekuatan penstabil regional, berlangsung kembali pembicaraan antara RRC dan Vietnam (Januari 1989). Hasil nyata dari pembicaraan tersebut adalah pernyataan Vietnam untuk menarik seluruh tentara dari Kamboja sampai September 1989.

Kepustakaan: D. Brötel, *Französischer Imperialismus in Vietnam*. Freiburg 1971; H. Dohmen, "Vietnam", dlm.: *HDW I*, 4, Hamburg 1978, hlm. 733 dst.; K.-A. Pretzell/J. Bode, *Indochina II: Vietnam, eine Auswahlbibliographie* (Dokumentationsstelle des Instituts für Asienkunde, jilid 14), Hamburg 1980; W. Draguhn/P. Schier (ed.), *Indochina: Der permanente Konflikt?* (= Mitteilungen des Instituts für Asienkunde, jilid 117), Hamburg 1981; N.T. Hung, "Politische und wirtschaftliche Veränderung in Vietnam seit dem 6. ZK-Plenum der

Vietnam – Volta Hulu

KPVN" (Sept. 1979), dlm.: *Berichte des Bundesinstituts f. ostwissenschaftl. u. internat. Studien* 4, 1981; W.J. Duiker, *Vietnam, A Nation in Revolution*, London 1983; O. Weggel, "Vietnam", dlm.: *HDW II*, 7, Hamburg 1983; *ibid*,

Indochina: Vietnam, Kambodscha, Laos, München 1987. rs

villas miserias → marjinalitas.

Volta Hulu → Burkina Faso.

W

wabah → FAO.

Wallis & Futuna → Kepulauan Pasifik.

Warisan Dunia Tahun 1972 konferensi umum UNESCO mengeluarkan sebuah perjanjian untuk perlindungan warisan budaya dan alam dunia (*Convention for The Protection of the World Cultural and Natural Heritage*). Negara-negara yang ikut serta (tahun 1989: 100 negara) wajib meregistrasi, melindungi, dan mempertahankan barang-barang budaya dan alam (tahun 1989: 288) karena berbagai alasan (sejarah, estetika, pengetahuan, dsb.) memiliki "nilai universal yang luar biasa". **mlk**

WCARRD (*World Conference on Agrarian Reform and Rural Development*) Konferensi Dunia Mengenai reformasi pertanian dan pembangunan pedesaan, dilaksanakan oleh FAO 12-20 Juli 1979 di Roma. **dn**

WCC (*World Council of Churches*) Dewan Gereja Dunia, atau Dewan Oikumene Gereja, didirikan tahun 1948, kedudukan di Jenewa. **Anggota:** 286 gereja Kristen non-Katolik dan lembaga-lembaga bantuan lebih dari 100 negara. **Tugas:** menyebarkan kepercayaan Kristen di dunia;

kerja sama di antara gereja dan organisasi yang menjadi anggota; membantu misi-misi. **dn**

WFC (*World Food Council*) Dewan Pangan Dunia, organ koordinasi dan pimpinan tertinggi dalam sistem PBB di bidang pangan dunia, didirikan tahun 1974 atas usul Konferensi Pangan Dunia. **Organ:** Dewan (*Council*) dengan 36 anggota yang dipilih setiap 3 tahun oleh ECOSOC atas pertimbangan wakil-wakil regional dan politik yang seimbang, berlangsung rotasi tahunan dari 1/3 anggota. WFC memiliki sekretariat yang berada dalam administrasi FAO dan seorang direktur eksekutif. Anggaran tahun 1988/1989: 5,1 juta US\$ (bagian dari anggaran PBB).

Setiap tahun anggota dewan mengadakan sidang di tingkat menteri dan wakil menteri serta mengkoordinasi strategi untuk pemecahan masalah pangan. WFC mempunyai fungsi konsultasi dan pelaksana; usaha untuk mengatasi masalah pangan dilakukan oleh pemerintah dan organisasi-organisasi khusus PBB (terutama FAO, IFAD, WFP).

Alamat: Via delle Terme di Caracalla, 00142, Roma, Italia. **mlk**

WFP (World Food Program) Program Pangan Dunia dari PBB dengan kedudukan di Roma, didirikan tahun 1963 untuk menjamin secara tetap bantuan proyek dan bantuan humaniter di bidang pangan, terutama melalui bantuan-bantuan surplus pertanian. Bantuan WFP di satu pihak bertujuan memerangi langsung kelaparan di daerah darurat, di lain pihak mendukung dalam jangka panjang pembangunan ekonomi dan penjaminan pangan yang mandiri serta menghindari potensi efek sampingan yang fatal dari bantuan pangan. Berdasarkan permintaan pemerintah negara berkembang, WFP melakukan konsultasi dan membantu pembagian pangan terutama untuk proyek-proyek jangka panjang dengan tujuan menjamin kebutuhan dasar kelompok penduduk miskin dan mendorong pembangunan pedesaan (*project food aid*). Pada bantuan situasi darurat dengan bahan pangan yang koordinasi internasionalnya dilakukan oleh WFP, melalui proyek-proyek *food-for-work* diusahakan mendapat efek pembangunan. Peningkatan produksi pangan setempat dan perbaikan situasi pendapatan produsen kecil lokal, merupakan kriteria-kriteria penentu dari bantuan proyek. Dana yang dibagikan oleh WFP berasal dari: a. sumbangan-sumbangan nasional langsung secara sukarela dalam bentuk bahan makanan, uang, dan jasa; b. barang-barang dari cadangan bahan pangan internasional IEFIR; c. iuran wajib melalui perjanjian pangan PBB. Dana dari sumbangan langsung sejak tahun 1963/1965 (85 juta US\$) terus meningkat dan tahun 1985/1986 men-

capai 861.125 miliar US\$. Banyak negara berkembang menjadi pemberi maupun penerima sumbangan. Tahun 1986 dibagikan 2,25 juta ton bahan pangan melalui WFP. Pembagian sumbangan dilakukan melalui sebuah komite, beranggotakan 30 orang dan dipilih oleh organ-organ PBB. Mereka menentukan sasaran sumbangan dalam waktu sekali dua tahun. Komisi dipimpin seorang direktur eksekutif yang ditunjuk Sekjen PBB dan seorang direktur jenderal yang ditunjuk FAO.

Alamat: Via Cristoforo Colombo, 426 00145 Roma, Italia.

bt

WHO (World Health Organization) Organisasi Kesehatan Dunia, didirikan tahun 1948, merupakan organisasi khusus PBB, tahun 1988 beranggotakan 166 negara. Volume keuangan tahun 1988/1989: 634 juta US\$.

Tujuan: semua bangsa di dunia menjadi sehat. Program dan kerja WHO di bidang: a. pelayanan peringatan wabah; b. perang terhadap narkotika; c. standardisasi obat-obatan; d. penelitian kedokteran internasional; e. pembasmian penyakit massa (malaria); f. bantuan pendidikan personal kedokteran; g. konferensi para pakar; h. proyek-proyek: menunjang usaha-usaha nasional dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pengadaan kesehatan. *Organ:* Sidang Umum anggota setiap tahun; Dewan Eksekutif: 24 pakar yang ditunjuk oleh anggota untuk masa jabatan 3 tahun, bersidang dua kali setahun; Sekretariat; dan Sekretaris Jenderal.

Keberhasilan WHO terlihat terutama dalam memerangi wabah. Se-

baliknya, WHO tidak berhasil menghapuskan kesenjangan pengadaan kesehatan yang sangat besar melalui pelayanan kesehatan. Strategi WHO yang disepakati tahun 1973 memperhatikan masalah ini.

Publikasi: World Health Statistics Annual, World Health Statistics Report, WHO-Chronicle. Alamat: 20, Avenue Appia, CH-1211 Genf 27, Swiss.

dn
windfall profits Keuntungan perusahaan atau perekonomian nasional yang didapatkan tidak melalui kegiatan usaha perusahaan atau ekonomi negara, melainkan melalui perubahan basis sumber daya alam (misalnya penemuan minyak bumi), terutama melalui konstelasi pasar yang menguntungkan. Keuntungan ini muncul (dan menghilang) melalui faktor-faktor yang mempengaruhi dimensi global penawaran dan permintaan pada masing-masing pasar. Perubahan dalam kerangka persyaratan pasar (peraturan pasar, misalnya Perjanjian Bahan Mentah, sistem monetar) juga mempunyai pengaruh. Bagi negara berkembang *windfall profits* didapatkan terutama karena kurangnya (dan kenaikan harga) di sektor bahan mentah, misalnya kegagalan panen, habisnya persediaan atau dorongan permintaan (misal dalam perang Korea atau perang Vietnam). **hg**
WIPO (World Intellectual Property Organization) Organisasi Dunia untuk Hak Cipta Intelektual.

World Bank → Bank Dunia.

World Experimental Literacy Program → pemberantasan buta aksara.

World Resources Institute → ekologi.

World Vision International Sebuah NGO AS yang didirikan tahun 1950, menangani pengadopsian anak, memberikan bantuan untuk bencana alam, dan kurang aktif dalam proyek-proyek pembangunan. Bekerja sama terutama dengan mitra gereja di Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Dana didapatkan terutama dari sumbangan.

mik
WSLF → Etiopia, gerakan pembebasan, Somalia.

WUS (World University Service) NGO anggota-anggota perguruan tinggi yang memiliki lebih dari 50 komite nasional dan hubungan di Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Mempunyai status konsultasi pada banyak organisasi bawah PBB, bekerja sama dengan NGO lainnya. *Tujuan:* meningkatkan kebebasan dalam studi, pengajaran dan penelitian, meningkatkan kegiatan sosial perguruan tinggi; memerangi segala bentuk diskriminasi, pengisapan, dan ketidakadilan, terutama di bidang pendidikan. *Titik berat:* meningkatkan saling membantu dan solidaritas antarperguruan tinggi dan anggota-anggotanya di seluruh dunia; melaksanakan program-program beasiswa untuk mahasiswa-mahasiswa dari ke-lompok pengungsi; melaksanakan bantuan proyek pembangunan di negara-negara Dunia Ketiga; meningkatkan pendidikan internasional.

Alamat: WUS Headquarter, 5 Chemin des Iris, 1216 Genf, Swiss.

kg
WVA (Welt Verband der Arbeitnehmer, Uni Buruh Dunia) → serikat buruh (di Dunia Ketiga).

Y

Yaman Mei 1990 berlangsung penyatuan dua negara Yaman (Yaman Utara/Republik Yaman Arab dan Yaman Selatan/Republik Demokrasi Rakyat Yaman) dengan ibu kota Sana'a. Penyatuan yang dalam waktu 25 tahun beberapa kali dibicarakan, bukan merupakan kehendak rakyat, melainkan keputusan dari atas. Kaum sosialis di selatan kekurangan uang akibat perubahan situasi di negara-negara Eropa Timur dan AS mengurangi bantuan keuangannya ke Yaman Utara. Presiden Yaman bersatu adalah Ali Abdallah Saleh (Yaman Utara) dengan Perdana Menteri Haider Abu Bakr al-Attas (Yaman Selatan).

A. *Yaman Utara* (Republik Yaman Arab) berbeda dengan Yaman Selatan (Republik Demokrasi Rakyat Yaman), berorientasi politik dalam dan luar negeri kepada Saudi Arabia dan blok Barat. Sejarah politik Yaman Utara sebagian besar diwarnai konflik-konflik tradisional, terutama masalah politik dan ekonomi, antara penganut mazhab Zaidi yang hidup di dataran tinggi sebelah utara dan penganut mazhab Safei di selatan dan Tihama (\rightarrow tribalisme).

1. Republik Yaman Arab terletak di sebelah barat daya semenanjung

Arab dengan luas 195.000 km². Cadangan air (hasil hujan dan irigasi) menentukan perekonomian (1/6 luas wilayah dimanfaatkan untuk pertanian) dan konsentrasi penduduk (di barat daya) Yaman Utara tersebut. Sejak awal tahun '80-an dieksploitasi minyak bumi di sebelah barat; Desember 1987 minyak bumi mulai diekspor.

2. Yaman di zaman purbakala merupakan pusat perdagangan antara India dan daerah Laut Tengah, dimasukkan dalam Kerajaan Islam tahun 630 dan tahun 1517-1918 menjadi bagian Kerajaan Osmania. Imam Yahia (pimpinan spiritual kaum Zaidi), mengkoordinasi perlawanan anti-Osmania dan berhasil menyatukan seluruh Yaman di bawah kekuasaannya. Konsolidasi negara melalui pemberlakuan hukum Islam (*Syariah*), administrasi terpusat, dan wewenang pajak, diwarnai peperangan dengan suku-suku lain sampai awal tahun '30-an. Yahia (terbunuh tahun 1948) dan anaknya yang sekaligus menjadi pewaris (sampai tahun 1962) berkuasa secara autokratis dan tidak banyak berhubungan dengan luar negeri. Pechahnya Ahmad dengan Mesir (semasa Nasser) tahun '50-an menguatkan oposisi yang melawan Imam,

terdiri atas penduduk kota, terutama kaum intelektual, anggota militer, dan pedagang (menentang monopol perdagangan keluarga Imam) serta pengikut Syafei dan pimpinan rohani Zaidi (menentang sistem patron yang menguntungkan keluarga Imam). Tahun 1962 meletus perang saudara, setelah terjadi kudeta militer terhadap al-Badr, pengganti Ahmad. Dalam perang tersebut Mesir mendukung kaum republik, sementara Inggris mendukung kaum royalis. Setelah tahun 1967 (penarikan mundur tentara Mesir) dimungkinkan kompromi politik dalam negeri, tahun 1970 dijadikan UUD, dan kedua kelompok (republikan dan royalis) bersama-sama memerintah dalam sebuah Republik Arab. Tahun 1974 militer dipimpin Kolonel Al-Hamdi membubarkan pemerintahan yang tidak stabil tersebut dan berusaha memperkuat kekuasaan pusat untuk melawan suku-suku. Sejak tahun 1978 (Al-Hamdi dibunuh tahun 1977) Letkol Ali Abdallah Saleh menjadi kepala negara.

3. Republik Yaman Arab dengan penduduk 9,1 juta jiwa (1987) merupakan bagian terbesar penduduk di semenanjung Arab. Menurut Bank Dunia, penduduk tumbuh 2,8%/tahun. Tahun 1985 20% penduduk hidup di kota-kota (di ibu kota Sana'a tahun 1987 diperkirakan hidup 427.000 jiwa) (→ urbanisasi). Dalam struktur masyarakat yang lebih berdasarkan klientelisme dan aliran kepercayaan, bukan etnis, separonya merupakan pengikut Zaidi yang Syiah dan separo lagi pengikut Syafei yang Suni. Suku-suku, terutama di utara dan timur laut didukung loyalitas pe-

nuh dari anggota (dikatakan sebagai ekonomi tribalisme) dan mempertahankan otonomi terhadap kekuasaan pusat.

Pendidikan masih terbelakang. Tahun 1980 36% penduduk usia sekolah (45% penduduk lebih muda dari 15 tahun) bersekolah di sekolah dasar; walaupun ada usaha besar dalam memberantas buta aksara, lebih 80% penduduk masih buta aksara. Indikator-indikator kesehatan memperlihatkan keterbelakangan besar, terutama akibat kurang pangan dan tidak ada higiene di tempat tinggal yang sangat tidak memadai. Walaupun jumlah dokter (tahun 1980: 603; tahun 1984: 1.069) dan personal kesehatan lain dapat ditingkatkan, keberadaan pengobatan tidak mencukupi, terutama untuk pedesaan. Harapan hidup tahun 1986: 46 tahun.

4. Ekonomi Republik Yaman Arab, yang termasuk LLDC di satu pihak dipengaruhi oleh struktur kerja dan produksi tradisional; 75% angkatan kerja terserap di pertanian (tidak terjadi reformasi pertanian, banyaknya tuan tanah kaya) menghasilkan 1/5 PDB. Industri yang kebanyakan terorganisir dalam usaha-usaha kecil, sebagian tumbuh pesat, tetapi dengan pangsa 17% pada PDB berada jauh di belakang sektor jasa (57% PDB) yang berkembang pesat karena pertumbuhan sektor pemerintah yang lebih besar di atas rata-rata. Di lain pihak, situasi devisa negara yang baik, paling tidak sampai awal tahun '80-an, berasal terutama dari transfer uang 700.000 buruh tamu Yaman di negara-negara Arab lainnya (tahun 1984: 1.000 juta US\$; tahun

1987: 600 juta US\$), memungkinkan tingkat hidup yang tinggi. Namun, tinggi maupun struktur pendapatan ini tidak tercermin dalam PDB karena PDB hanya meliputi pendapatan yang dihasilkan di dalam negeri. Adanya imigrasi pekerja yang sangat tinggi menimbulkan salah satu masalah pembangunan Republik Yaman Arab, yaitu kekurangan tenaga kerja di bidang pertanian—memang sejak lama mengalami stagnasi—dan di bidang industri (kekurangan tenaga ahli dan masalah pembuatan infrastruktur). Produksi pertanian (a.l. padi-padian, buah-buahan tropis, dan kurma) kebanyakan dihasilkan dalam ekonomi subsistensi, sebagian besar tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri sehingga bahan makanan (tahun 1984: 30% impor) harus diimpor. Sampai kini Yaman Utara hampir tidak melakukan ekspor sehingga memperlihatkan defisit perdagangan yang sangat besar dan diharapkan berkurang melalui ekspor minyak yang dimulai tahun 1987 akan menghasilkan devisa sebesar 700 juta US\$.

5. Kekuasaan politik di Republik Yaman Arab terlihat rumit terutama dalam hubungannya dengan masalah-masalah pembangunan yang muncul di tahun '80-an (berkurangnya bantuan keuangan dari Arab dan turunnya transfer uang dari pekerja Yaman di luar negeri akibat krisis minyak). Di medan ketegangan antara tradisi dan modernitas, ada gerakan oposisi berdasarkan kesukuan, fundamental agama, dan demokrasi. Tahun 1987 setelah absen lama muncul kembali aktivitas gerilya. Pada pemilihan parlemen Juni 1988 yang

tidak mengizinkan partai-partai untuk ikut serta, wakil suku-suku dan fundamental Islam menang masing-masing 1/4 kursi, sedangkan mayoritas kursi jatuh pada calon-calon republik. Politik luar negeri Republik Yaman Arab yang menjadi anggota Liga Arab, berpegang pada cita-cita penyatuan dengan Yaman Selatan.

B. *Yaman Selatan* (Republik Demokrasi Rakyat Yaman) berusaha melakukan modernisasi masyarakat tradisional Arab menurut prinsip-prinsip marxis-leninis. Dalam hubungan internasional pelabuhan di ibu kota Aden (salah satu pelabuhan dunia yang tertinggi omzetnya) merupakan basis penting dan strategis Uni Soviet, apalagi dilihat dari jalur kapal tanker minyak dunia.

1. Yaman Selatan terletak di ujung selatan semenanjung Arab meliputi luas 332.968 km². Hanya sebagian kecil wilayah (kurang dari 1%) dapat digunakan (kebanyakan melalui irigasi daerah-daerah lembah gurun) sebagai daerah pertanian untuk memenuhi sebagian kebutuhan sendiri (terutama jawawut, gandum, melon). Kekayaan ikan dari laut di sekitarnya sangat penting untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun ekspor. Eksploitasi cadangan minyak masih pada tahap awal (tahun 1987: sekitar 10.000 barel per hari).

2. Yaman tahun 630 merupakan bagian kerajaan Islam dan di abad ke-16 menjadi bagian Kerajaan Osmania. Tahun 1839 Inggris menduduki Aden dan memasukkannya dalam administrasi Inggris-India. Dengan demikian, Inggris dapat mengawasi simpul perdagangan yang

penting di kawasan tersebut dan jalan laut ke India. Tahun 1937 Aden menjadi jajahan Kerajaan Inggris melalui seorang gubernur dan sisanya negara protektorat barat dan timur. Tahun 1963 mulai muncul gerakan kemerdekaan melawan Inggris, dipimpin terutama oleh Front Pembebasan Nasional (NLF) yang dapat mengalahkan Front Pembebasan Yaman Selatan (*FLOSY/Front Liberation of South Yemen*) dukungan Mesir, dan tahun 1967 berhasil secara politik dan militer mengawasi negara protektorat-protektorat dan Aden. Tanggal 30 November 1967 Yaman Selatan merdeka. Sejak itu, perkembangan politik negara tersebut selalu diwarnai perebutan kekuasaan dalam elite politik. Tahun 1969 pada pertikaian haluan intern, NLF fraksi kiri menang, kemudian kelompok ini berkembang menjadi tenaga politik utama dan partai pelopor sosial Front Nasional (*NF/Nationale Front*) serta memulai politik reformasi radikal (a.l. reformasi pertanian, nasionalisasi). Tahun 1978 usaha presiden untuk memenangkan pertikaian intern dengan bantuan militer, menemui kegagalan. NF kemudian diubah menjadi *Yemeni Socialist Party* (YSP). Tahun 1986 terjadi lagi perebutan kekuasaan secara kekerasan; Presiden Muhammad digulingkan dan diganti oleh Abu Bakr al-Attas dari sayap kiri YSP, tetapi moderat.

3. Tahun 1991 Yaman Selatan berpenduduk 2,5 juta jiwa, 40% hidup di perkotaan. Ibu kota Aden berpenduduk 367.000 jiwa adalah kota terbesar. Angka pertumbuhan penduduk berkisar antara 2,6%–3,1%.

Lebih dari 90% penduduk yang secara etnis dan agama homogen adalah Islam aliran Suni. Islam adalah agama negara, tetapi ada kebebasan beragama.

Sejak merdeka dilaksanakan usaha besar perbaikan pendidikan. Tingkat penyekolahan di sekolah dasar tahun 1984 (wajib sekolah dasar) adalah 3/4 dari kelompok umur yang relevan (sebelum merdeka hanya 25%), pangsa buta aksara tahun 1985 tetap tinggi, yaitu 59%. Kesehatan masih tetap tidak cukup berkembang; standar pengadaan pengobatan terhitung paling rendah di Timur Tengah, walaupun jumlah penduduk per dokter dapat diturunkan dari 9.163 (1976) menjadi 5.264 (1984). Harapan hidup adalah 50 tahun (1986).

4. Ekonomi Yaman Selatan sejak tahun 1969 diawasi negara. Pertanian diorganisir di koperasi dan di perkebunan negara. Perikanan dinasionalisasi. Tahun 1977 nasionalisasi tercapai hampir seluruhnya dengan mengambil alih kilang-kilang minyak *British Petrol* (BP) di Aden yang merupakan satu-satunya industri besar negara tersebut. Nasionalisasi juga berlaku untuk tempat tinggal di kota. Kemudian, pengawasan negara terutama di pertanian diperlonggar ke arah aktivitas pribadi dalam rangka koperasi. Perencanaan pembangunan nasional (1971–sekarang) terutama untuk perbaikan infrastruktur, peningkatan produksi pertanian, dan penggalakan ekonomi perikanan. Rencana pembangunan ke-3 tidak dapat dilaksanakan tepat pada waktunya karena perebutan kekuasaan tahun 1986, dan volume juga harus

sangat diperkecil akibat kerugian ekonomi yang diderita semasa perang perebutan kekuasaan tersebut. Rencana pembangunan ke-3 akan memajukan perekonomian energi dan air, serta industrialisasi.

Tahun 1985 43% pekerja bekerja di pertanian dan perikanan, diikuti sektor jasa yang menyerap 37% (sisanya: industri). Awal tahun '80-an diperkirakan 300.000 orang Yaman Selatan bekerja sebagai buruh tamu, terutama di negara-negara Arab lain. Transfer uang dari buruh tamu tersebut (tahun 1987: 260 juta US\$; tahun 1983: 451 juta US\$) merupakan sumber devisa yang penting dan sebagian digunakan untuk menyeimbangkan neraca pembayaran. Namun kerugiannya, tamu adalah besarnya kekurangan tenaga kerja di dalam negeri.

Perdagangan luar negeri (mitra dagang terpenting adalah ME) memperlihatkan defisit yang terus meningkat. Tahun 1984 defisit mencapai 897 juta US\$ (tahun 1979: 458 juta US\$). Karena pertanian sangat tidak mencukupi pengadaan pangan, bahan pangan harus diimpor; ekspor terpenting adalah derivat minyak, ikan, dan kapas. Perbaikan neraca pembayaran diharapkan dari ekspor minyak yang telah direncanakan. Utang luar negeri diperkirakan mencapai 1,4 miliar US\$, lebih tinggi dari PDB (tahun 1985: 1,07 miliar US\$); pemberi kredit utama adalah Uni Soviet dan RRC. Yaman Selatan termasuk LLDC, mempunyai sistem distribusi yang sangat merata dalam perbandingan tingkat dunia.

5. Menurut UUD tahun 1978, Presiden al-Attas yang disahkan jabatannya pada pemilihan November 1986, juga menjadi ketua presidium kongres (wakil rakyat yang mengesahkan UU). YSP adalah partai tunggal, terbagi dalam 6 wilayah administrasi Yaman Selatan. Politik luar negeri Yaman Selatan berusaha menyatukan diri dengan Yaman Utara dan sebagai anggota Liga Arab memelihara hubungan terutama dengan negara-negara Arab radikal seperti Aljazair, Libya, dan Suriah.

Kepustakaan: M. el-Azzazi, *Die Entwicklung der Arabischen Republik Jemen*, Tübingen 1978; M.A. Zabarah, *Yemen. Traditionalist vs Modernity*, New York 1982; T. Koszinsky/F. Nuscheler, "Jemen - Arabische Republik", dlm.: *HDW II*, jilid 6, Hamburg 1983, hlm. 329 dst.; H. Hansen, "Arabische Republik Jemen", dlm.: U. Steinbach/R. Robert (ed.), *Der Nahe und Mittlere Osten*, jilid 2, hlm. 175 dst. W. Daum, *Jemen. Das südliche Tor Arabiens. Eine Länderkunde*, Tübingen 1981; H. Hansen, "Demokratische Volksrepublik Jemen", dlm.: U. Steinbach/R. Robert (ed.), *Der Nahe und Mittlere Osten*, jilid 2, Opladen 1988, hlm. 187 dst.; V. Steozel, "Marxismus in Arabien. Der Südjemen nach zwanzig Jahren Unabgängigkeit", dlm.: *Aussenpolitik*, No. 39 (1988), hlm. 270 dst.; Nuemberger Nachrichten, "Märchen-hafte Hauptstadt des vereinten Jemen", 1 Oktober 1991, dlm.: *BMZ-Spiegel der Presse*, 21/91.

bt/rs
yanacona, yanaconaje Di antara suku Inca, *yanaconas* merupakan kelas sosial terbawah, semacam budak. Di bawah kekuasaan kolonial untuk menamakan pelayan-pelayan asal suku Indian. Setelah kemerdekaan, *yanacona* adalah sebutan untuk penggarap dari suku Indian yang menggarap sebidang tanah (juga disebut *Aparceria*) dengan menanggung risiko sendiri. *Yanacona* harus menyerahkan sebagian panennya kepada tuan tanah (latifundia). *Yanaconaje*

di Bolivia dihapuskan melalui reformasi pertanian tahun 1952 dan di Peru juga melalui reformasi pertanian tahun 1969.

dn Yordania Negara Arab Yordania yang moderat dan berorientasi Barat, berperan penting dalam Konflik Timur-Tengah karena faktor-faktor geografis, sejarah, dan politiknya.

1. Kerajaan Yordania mencakup luas 9.740 km², tanpa Yordan Barat seluas 7.090 km² yang diduduki Israel. Daerah Yordan Barat yang diduduki Israel dilepas Raja Hussein tahun 1974 (resmi tahun 1988) untuk pembentukan negara Palestina. Sekitar 12% luas wilayah digunakan untuk pertanian yang sangat bergantung pada situasi iklim yang berbeda-beda.

2. Sampai Perang Dunia I Yordania milik Kerajaan Osmania sebagai bagian dari Suriah Raya berdasarkan perjanjian rahasia Sykes-Picot (1916) dalam perjanjian perdamaian Seyre (1920) dibagi antara Inggris dan Perancis. Inggris menyerahkan daerah mandat Palestina kepada Transyordania dan tahun 1921 mengangkat Emir Abdallah Ibn Hussein sebagai penguasa di bawah administrasi Inggris. Setelah langkah demi langkah perluasan kedaulatan, Transyordania secara formal menjadi kerajaan merdeka tahun 1946, menganeksi Yordan Barat dan Timur setelah perang Arab-Israel tahun 1947/1948 dan mengambil nama Kerajaan Hasemit Yordan tahun 1950. Setelah Abdallah terbunuh (1951), cucunya yang bernama Hussein naik tahta (1952).

Pendudukan Yordan Barat oleh Israel pada perang Juni 1967 berdampak ekonomi dan sosial yang dalam bagi Yordania. Kehilangan Tepi Barat berarti kehilangan bagian terbesar dari produksi perekonomian di semua sektor (sekitar 50% di industri dan jasa, 2/3 pada buah dan sayuran) dan beban tambahan dari sekitar 1 juta pengungsi Palestina. Tahun 1970/1971 terjadi adu kekuatan antara Hussein dan PLO, yang beroperasi melawan Israel dari Yordania dan telah berkembang menjadi negara dalam negara di Yordania. PLO dihancurkan oleh tentara Yordania yang tunduk pada kerajaan dan berasal dari suku Beduin (suku Beduin hanya 5% dari jumlah penduduk dan mempunyai posisi cukup kuat). Tindakan Yordania tersebut menyebabkan pengisolasiannya oleh negara-negara Arab lain dan baru berakhir ketika Hussein tahun 1974 tunduk pada keputusan konferensi puncak negara-negara Arab yang menetapkan PLO sebagai wakil sah Palestina.

3. Tahun 1987 Yordania (tanpa Yordania Barat) berpenduduk sekitar 2,8 juta orang, penduduk bertambah dengan pesat (3,8%/tahun), dan lebih dari 70% hidup di perkotaan. Angka ini cenderung meningkat (ibu kota Amman, tahun 1986: 1,2 juta).

Sistem sekolah yang bebas biaya (wajib sekolah umur 6–15 tahun) terus dibangun. Tingkat buta aksara dapat diturunkan dari 68% (1965) menjadi 25% (1985). Selain sekolah negeri, lembaga-lembaga pendidikan dari UNRWA penting artinya untuk para pengungsi Palestina.

Sejak awal tahun '70-an dicapai perbaikan besar di bidang kesehatan. Perbandingan penduduk/dokter dari 2.476 (1970) menjadi 1.123 (1984). Jumlah rumah sakit dalam waktu yang sama diperbanyak dari 27 menjadi 41. Namun, daerah pedesaan tidak cukup dilayani, akibat kesenjangan kota-desa yang besar.

4. Perekonomian Yordania terutama berorientasi pasar dan inisiatif-inisiatif pribadi yang didukung oleh pemerintah, berkembang dinamis sejak pertengahan tahun '70-an. Namun, perekonomian di tahun '80-an dikonfrontasikan pada masalah-masalah pembangunan akibat krisis regional, walaupun negara tersebut mendapat keuntungan ekonomi sebagai tempat perdagangan dan industri dalam perang Irak-Iran maupun dalam perang saudara di Lebanon. Sekitar 2/5 penduduk hidup langsung atau tidak langsung dari pertanian yang pada tahun 1985 meliputi 12% PDB (produk penting adalah biji-bijian, jeruk, dan sayuran). Perencanaan pembangunan nasional di sektor ini terutama bertujuan memanfaatkan cadangan-cadangan air untuk menstabilisasi produksi yang sampai saat ini masih 90% diusahakan dengan cara tadah hujan. Produksi memang dapat dinaikkan jika dibandingkan dengan perkembangan penduduk, tetapi berada di belakang tujuan kedua rencana pembangunan lima tahun (1976-1980, 1981-1985).

Pertambangan (bahan baku terpenting adalah fosfat, Yordania tidak mempunyai cadangan minyak yang berarti) dan industri (terutama perekonomian bangunan dan kimia, teks-

til dalam jumlah kecil) menghasilkan 1/5 dari PDB (1985) setelah diadakan industrialisasi besar-besaran sejak tahun '70-an (73% sektor jasa adalah yang tertinggi); tetapi pertumbuhan industri di tahun '80-an tetap masih di bawah tujuan rencana. Kegagalan perencanaan dan faktor-faktor luar menunjukkan perlunya perbaikan instalasi industri yang sebagian merugi. Yordania hampir tidak mengeksport sehingga memperlihatkan defisit neraca perdagangan yang besar. Sampai awal tahun '80-an defisit ini ditutup oleh transfer uang dari buruh tamu Yordania dan bantuan keuangan dari Arab sehingga memungkinkan neraca pembayaran Yordania tetap berimbang. Semua ini menurun akibat jatuhnya harga minyak. Sementara sektor pertanian kekurangan tenaga kerja, industri tidak dapat menyediakan kesempatan kerja untuk lulusan pendidikan tinggi.

5. Menurut UUD tahun 1952 Yordania adalah kerajaan konstitusi. Baik dewan menteri maupun kongres tidak dapat mengontrol wewenang kekuasaan raja secara efektif, sejak tahun 1967 tidak pernah dilakukan lagi pemilihan yang sebenarnya. Partai-partai dilarang sejak tahun 1957. Politik negara tersebut tetap stabil disebabkan oleh kelihaihan politik dan kepribadian Hussein, terutama terhadap tentara yang harus setia. Posisi Yordania di antara negara-negara Arab terus menguat. Yordania sebagai anggota Liga Arab, menerima Mesir kembali setelah perjanjian perdamaian dengan Israel dikeluarkan (1979); mendukung Irak di Perang Teluk dan berbaikan dengan PLO.

Yordania

Juli 1988 Raja Hussein menerangkan berakhirnya hubungan administratif dan hubungan secara hukum antara Yordania dan Yordania Barat. Dengan demikian menciptakan persyaratan penting untuk proklamasi negara Palestina oleh Dewan Nasional

Palestina bulan November 1988 di Aljir.

Kepustakaan: M. Haas, *Husseins Königreich. Jordaniens Stellung im Nahen Osten*, München 1975; G. Krämer, "Jordanien", dlm.: *HDW II*, 6, München 1983, hlm. 357 dst.; T. Kozinowski, "Jordanien", dlm.: U. Steinbach/R. Robert (ed.), *Der Nahe und Mittlere Osten*, jilid 2, Opladen 1988, hlm. 197 dst. **bt**

Z

Zaire Kaya akan sumber daya (Negara AKP, CEPGL), di bawah Mobutu tidak dapat menyelesaikan masalah-masalah penting mayoritas penduduk (kurang gizi, buta aksara). Oposisi dijawab dengan represi berdarah. Namun, di dunia internasional Mobutu mengerti bagaimana caranya mendapatkan bantuan (melalui tentara Perancis dan Belgia) dan kepercayaan (kunjungan Paus tahun 1980).

1. Zaire terletak di lembah Kongo Afrika Tengah, merupakan negara ketiga terbesar di Afrika dengan luas 2.345.409 km². Negara yang seluruhnya terletak di daerah tropis terbentang pada zone-zone iklim yang berlainan. Kecuali suatu daerah kecil, Zaire subur untuk pertanian (lahan pertanian sekitar 25%, hutan 40%). Kira-kira separo lahan pertanian digunakan untuk menanam produk-produk subsisten (ubi jalar, jagung, pisang). Perkebunan, terutama di timur laut dan utara, menghasilkan sebagian besar produk-produk pertanian untuk ekspor seperti kelapa sawit, kapas, kopi, dan karet. Sektor ekonomi terpenting adalah pertambangan di selatan dan barat daya (Kasai, Shaba). Zaire adalah produsen kobalt dan intan terbesar di dunia.

Sumber daya ini dan lainnya, seperti tembaga, bijih timah, bijih mangan, seng, uran, batu bara atau minyak bumi, baru diusahakan sebagian.

2. Menguatnya penetrasi daerah Afrika Tengah sejak abad ke-18 oleh pedagang-pedagang Eropa dan misionaris-misionaris Kristen berakhir pada akhir abad ke-19 dengan penyeberangan lembah Kongo oleh H. Stanley. Ia membangun perusahaan-perusahaan dagang Eropa atas nama raja Belgia, sebelum Kongo (Zaire sekarang) tahun 1885 sebagai "Kongo bebas" menjadi milik pribadi Raja Leopold II. Ia mewariskan miliknya (1908) sebagai *Congo belge* kepada negara Belgia. Doktrin penjajahan Belgia yang dinamakan paternalisme, melarang partisipasi politik orang Afrika sampai tahun '50-an. Aktivitas-aktivitas misionaris Kristen saling mendukung dengan politik paternalisme: pembentukan personal untuk keperluan sendiri dan pendidikan tenaga kerja Afrika untuk administrasi, militer, dan ekonomi. Ketika Zaire merdeka tahun 1960 tidak ada dokter dan insinyur pribumi.

Tahun 1958 meletus untuk Belgia sangat tiba-tiba-kerusuhan politik yang besar di beberapa pusat per-

kotaan Zaire. Setelah usaha menyelesaikan "krisis kolonial" dengan taktik memundurkan waktu terhadap *Evolués* Afrika, Belgia dalam *Table Ronde Politique* harus mengizinkan UUD sementara untuk Kongo dan kemerdekaannya 1 Juli tahun itu juga. P.E. Lumumba, pemimpin *Mouvement National Congolais* yang menjadi partai terkuat pada pemilihan parlemen pertama, terpilih menjadi Perdana Menteri Republik Demokrasi Kongo. Ketika kota propinsi tembaga Shaba (Katanga) yang kekuatan ekonominya menyumbang 60% penerimaan negara, mengumumkan pemisahan diri, republik muda tersebut terancam terpecah-pecah. Persengketaan intern (perang saudara, beberapa pemisahan diri selanjutnya dan pemberontakan) dan keberadaan hampir 20.000 pasukan PBB di Zaire, menyebabkan negara tersebut sampai pertengahan tahun '60-an menjadi daerah krisis terus-menerus.

3. Tahun 1989 Zaire merupakan negara terpadat di Afrika, yaitu sekitar 34 juta jiwa. Daerah luas di lembah Zaire, juga Shaba, berpenduduk sangat sedikit. Namun, zone pinggiran di selatan dan utara dengan 150 jiwa/km² dan propinsi Bas-Zaire dengan ibu kota Kinshasa dengan 60 jiwa/km², memperlihatkan kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Tingkat urbanisasi adalah 39%, tumbuh dua kali lipat dalam waktu 1/4 abad terakhir (ibu kota Kinshasa tahun 1985 diperkirakan 2,78 juta penduduk). Sebab utama migrasi ke kota-kota adalah situasi perang saudara sampai pertengahan tahun '60-an, hancurnya infrastruktur dan pengadaan di seba-

gian besar negara tersebut serta harapan pekerjaan yang lebih baik di perkotaan.

Penduduk Zaire terdiri atas 5 kelompok etnis utama: Bantu, Sudan, Nilot, Hamit, dan Pygmaen. 140 suku berbahasa Bantu mencakup 70% penduduk, suku Sudan di timur dan timur laut 20%, Nilot dan Hamit (Tutsi) di timur kurang dari 10%, dan Pygmaen di hutan belantara tropis lembah Zaire kurang dari 1%. Selain bahasa lokal yang banyak jumlahnya, Suaheli, Kikongi, Tsiluba, terutama Lingala, makin banyak digunakan sebagai bahasa perhubungan. Lingala tersebar di seluruh negeri sebagai bahasa militer. Dengan demikian sekitar 1/4 penduduk berbahasa Lingala. Perancis merupakan bahasa birokrasi yang hanya dikuasai minoritas kecil.

4. Kehancuran produksi dan ekspor pertanian yang disebabkan pelarian massal *Colons* Eropa dan perang saudara (1960-1965) bertambah parah di tahun-tahun berikutnya (penurunan produksi pertanian tahun 1970-1985 sekitar 15%). Kini Zaire harus mengimpor bahan makanan untuk mencukupi kebutuhan penduduk yang tinggal di perkotaan. Perusahaan-perusahaan pertambangan yang dinasionalisasi, terutama perusahaan tembaga *Gecamines*, menyumbang 50% seluruh penerimaan pemerintah. Turunnya harga tembaga di pasar dunia menyebabkan berlangsungnya krisis moneter terus-menerus. Militer, pendidikan, dan *presidence* (kantor presiden) menerima anggaran pemerintah sampai 50%; sektor pemerintah menyerap 1/4 angkatan pekerja. Kemunduran pertanian melepas banyak

tenaga kerja yang hanya sebagian saja tertampung pada sektor tersier yang diperluas.

5. Sebagian besar petani adalah petani subsisten, pembantu, dan pengangguran di perkotaan (85%); 10% termasuk kelas menengah bawah, sekitar 4% kelas menengah atas, dan sekitar 5.000 orang kelas atas duduk pada posisi pimpinan di pemerintahan. Mereka menggantikan lobi penjajah Belgia. Mayoritas penduduk secara material tidak lebih baik dari masa sebelum kemerdekaan. Kelompok kecil lapisan atas mengisap sekitar separo dari seluruh gaji. Situasi pangan rawan karena kelebihan produksi subsisten jarang dapat dipasarkan (masalah transpor). Sekitar 80% penduduk kekurangan gizi. Pengadaan kesehatan (1 dokter untuk 14.000 penduduk) hanya cukup di kota-kota besar. Harapan hidup tahun 1989 adalah 53 tahun. Sektor pendidikan sampai tahun 1960 terletak pada misi-misi. Mereka memajukan SD sehingga membantu usaha-usaha pemberantasan buta aksara (tahun 1985: 55%) terhitung tertinggi di Afrika Hitam. Pekerjaan misi di pedesaan menyebabkan setengah penduduk Zaire merupakan anggota gereja Kristen (1/3 Katolik, 10% Protestan, 10% Kimbangu [gereja Kristen Afrika]); 1% Islam; sisanya penganut agama asli setempat.

6. Pembangunan Zaire sejak kemerdekaan ditandai ketergantungan struktural pada negara industri melalui pasar bahan mentah internasional. Tindakan pertama militer (1965) yang mengambil alih kekuasaan melalui penggulingan tidak ber-

darah adalah stabilisasi politik dalam negeri dan penciptaan iklim yang menguntungkan para investor dan bantuan pembangunan Barat. Walaupun demikian ketergantungan dari ekspor tembaga, kobalt (40% hasil dunia), dan industri intan yang dalam dasawarsa terakhir bertambah besar mencakup 90% nilai ekspor.

Industrialisasi sangat sedikit berorientasi pada kebutuhan pembangunan nasional. Akibat salah investasi dan kelebihan kapasitas, tahun 1982 tingkat produktivitas industri hanya 30%. Produksi menurun, terutama disebabkan kekurangan suku cadang dan bahan mentah. Keuangan negara hancur. Utang luar negeri tahun 1987 berjumlah sekitar 9 miliar US\$. Reformasi mendasar menemui kegagalan akibat situasi kekuasaan yang berlaku.

Sebagai ganti sistem multipartai yang hancur tahun 1965, muncul gerakan *Mouvement Populaire de la Révolution* (MPR) tahun 1967 dengan presiden baru, Jenderal Mobutu. Setiap orang Zaire menjadi anggota MPR sejak lahir. Kelompok-kelompok pimpinan politik di aparat MPR, *presidence*, kementerian, dan tentara jelas diwarnai berdasarkan etnis. Karakter rezim yang represif tidak berubah. Desember 1990 Mobutu digulingkan oleh Partai Buruh Kongo yang kemudian Juni 1991 menunjuk Andre Milongo sebagai kepala pemerintahan sementara sampai diadakan pemilihan presiden Mei 1992. November 1991 diputuskan UUD baru. Kepustakaan: J.P. Breitenegross, "Zaire", dlm. *HDW I*, 2, Hamburg 1976, hlm. 596 dst.; G. Gran, *Zaire, the Political Economy of Underdevelopment*, New York 1979; B. Wiese,

Zaire, Darmstadt 1980; S. Nout, "Zaire", dlm. *HDW II*, 4, Hamburg 1982, hlm. 468 dst.; P. Körner, "Hilfe für eine Kleptokratie", dlm.: *der überblick* 2/88; Die Welt, "Blutige Unruhen überziehen Afrika", 16 Oktober 1991, dlm.: *BMZ-Spiegel der Presse*, 21/91, hlm. 661.

gp
Zambia Pada dasawarsa ketiga kemerdekaan, Republik Zambia dihadapkan pada membesarnya kesulitan-kesulitan ekonomi: seluruh perekonomian yang bergantung pada produk ekspor tembaga (90% hasil ekspor) tertekan akibat menurunnya permintaan di pasar dunia. Selain itu, Oktober 1987 Zambia dilarang mengambil kredit lebih lanjut dari IMF. Harapan untuk memperbaiki situasi ekonomi dalam negeri Zambia setelah kemerdekaan juga tidak terpenuhi; perang saudara di negara-negara tetangga, Angola, Mozambique, Zimbabwe, dan Namibia, menghalangi perkembangan negara Zambia yang bergantung pada transportasi darat.

1. Sekitar separo wilayah Zambia (752.614 km²) tertutup hutan. Kecuali beberapa dataran rendah tepi sungai yang dapat dilakukan peternakan dan pertanian, hampir semua hanya dapat diolah dalam sistem peladangan berpindah. Zambia sangat kaya bahan mentah: sekitar 1/4 cadangan bijih tembaga sulfida dunia, selain itu batu bara, bijih seng, bijih timah, bijih kobalt, bijih kadmium, bijih mangan, bijih perak, dan bijih emas serta batu mulia yang penambangannya baru dimulai.

2. Di pertengahan abad ke-19 hampir seluruh wilayah Zambia diselidiki oleh Livingstone. *British South African Company* (BSAC) yang didirikan oleh Cecil Rhodes

mendapatkan hampir semua hak pemilikan tanah dan kekayaan alam sejak tahun 1890 melalui "perjanjian-perjanjian" dengan berbagai kepala suku. Tahap pertama "revolusi tembaga Rhodesia" dimulai awal tahun '20-an, dengan adanya kemajuan teknologi yang membuat penambangan tembaga menguntungkan, didukung modal dari Inggris, AS, dan Afrika Selatan. Tahun 1924 administrasi Zambia beralih dari tangan BSAC ke Kerajaan Inggris. Prinsip administrasi *indirect rule* yang selain bertujuan menguatkan kekuasaan kepala suku, juga membangun organ-organ perwakilan dengan keikutsertaan orang Afrika (Adam, 1982).

3. Penduduk Zambia tahun 1989 diperkirakan 8 juta jiwa. Kepadatan penduduk sekitar 9,5 penduduk/km². Mereka berkembang tidak merata akibat migrasi besar-besaran buruh-buruh pengembara dengan tingkat pertumbuhan pesat di sekitar daerah produksi tembaga. Zambia dengan 49% mempunyai tingkat urbanisasi tertinggi Afrika Hitam (ibu kota Lusaka tahun 1980: 538.000 penduduk). Mayoritas penduduk adalah anggota suku Bantu (CiBemba, CiTonga, CiNyanja, Lunda-Luvale, Silozi, Mambwe). 10.000 orang Asia berperan penting dalam perdagangan negara tersebut, sedangkan beberapa ribu orang Eropa menduduki posisi-posisi pimpinan di pertambangan, administrasi, dan pertanian besar Zambia. Penduduk kebanyakan pemeluk agama asli setempat, terdapat minoritas Kristen (sekitar 30%) yang kuat.

4. Dominasi industri tembaga merupakan penyebab ketergantungan

struktural Zambia dari pasar dunia. Tahun 1969 perusahaan holding negara, *Zambia Mining and Industrial Development Corporation*, mengambil alih 51% saham pertambangan. Perusahaan multinasional yang bersangkutan mendapat ganti rugi penuh. Sampai tahun 1974 mereka mempertahankan pengawasan terhadap perdagangan dan penjualan tembaga, sampai sekarang Zambia tetap bergantung pada bantuan teknologi mereka. Industri pengolahan *de facto* didominasi oleh perusahaan multinasional. Mereka memegang manajemen, memasok peralatan dan permesinan, mengendalikan produksi, serta mempunyai saham minoritas, sedangkan pemerintah yang bersangkutan menjamin iklim investasi yang menarik, infrastruktur sosial dan material serta pasar yang stabil. Hasilnya adalah pembangunan tempat-tempat produksi yang padat modal, berorientasi kebutuhan konsumsi minoritas, dan kepentingan mitra asing. Beberapa ratus pengusaha pertanian besar dan komersial, kebanyakan dipimpin oleh orang Eropa atau anggota kelas negara Zambia, memproduksi jauh di atas setengah produk-produk yang dipasarkan. Sekitar 3.000 tani kecil terpisah dari pasar karena tidak tersedia infrastruktur; perginya pekerja dari pedesaan (pelarian dari pedesaan) menyebabkan kekurangan tenaga kerja pria. Petani subsisten (ekonomi subsistensi) harus mengambil pekerjaan tambahan untuk dapat hidup terus. Di kota-kota terdapat kesulitan pengadaan yang akut; sebagian besar pangan harus diimpor.

5. Distribusi pendapatan dalam banyak hal tidak merata: a. penduduk perkotaan mendapat hampir semua PDB; b. ada perbedaan mencolok antara gaji yang tinggi di pertambangan (diorganisir oleh serikat buruh) dan gaji yang rendah di pertanian; c. bukan orang Afrika sering berpendapatan lebih dari orang Afrika; d. di kota-kota 10% golongan atas dari penerima gaji tertinggi mendapat 42% dari gaji keseluruhan; e. sebagian besar keluarga yang hidup di perkotaan—khususnya sekitar 50% penganggur—hampir tidak ada jaminan untuk hidup lebih lanjut.

6. Zambia merdeka dengan tingkat pendidikan yang sangat rendah dan tidak sama di antara ras-ras. Sejak merdeka, Zambia dapat mencapai kemajuan-kemajuan besar, terutama dalam hal penurunan tingkat buta aksara (tahun 1985: 24%, sedangkan tahun 1960: 71%). Pengadaan penduduk kota dengan pekerjaan dan infrastruktur sosial merupakan masalah-masalah terbesar negara tersebut (harapan hidup 50 tahun).

7. Zambia merdeka dipimpin partai antipenjajahan terkuat, UNIP (Uni Partai Kemerdekaan Nasional) dipimpin Kenneth D. Kaunda. Zambia adalah republik presidensial dengan Kaunda di puncak pimpinan. Tahun 1973 ia menggolkan UUD dan menjadikan UNIP partai tunggal sehingga kekuasaan Kaunda dapat memperoleh legitimasi marjinal. Potensi sistem patron diperluas; sebaliknya transparansi dan partisipasi basis dalam pengertian "demokrasi partisipasi" dari "humanisme Zambia" yang dipropagandakannya, tidak ditingkatkan.

Kaunda (Oktober 1988) terpilih lagi untuk 5 tahun berikutnya, mempropagandakan secara keras penghapusan utang Afrika dan boikot ekonomi terhadap Afrika Selatan.

Kepustakaan: P.E. Ollawa, *Participatory Democracy in Zambia/The Political Economy of National Development*, Devon 1979; E. Adam, *Tribalism und Ungleiche Entwicklung in Zambia. Zur Politischen Ökonomie gesellschaftlicher Konflikte*, Bad Honnef 1980; M. Bratton, *The Local Politics of Rural Development. Peasant and Party State in Zambia*, London 1980; E. Adam, "Zambia", dlm.: *HDW II*, 5, Hamburg 1982, hlm. 394 dst.; S. Cunningham, *The Cooper Industry in Zambia. Foreign Mining Companies in a Developing Country*, New York 1982; P. Meyns, "Zambia", dlm.: R. Hofmeier/M. Schönborn, *Politisches Lexikon Afrika*, edisi kedua, München 1988.

rs/pb

ZANU → Zimbabwe, gerakan pembebasan.

Zapata, Emiliano Z. (1879-1919) adalah pemimpin petani yang menonjol dalam revolusi Meksiko (1910-1917). Tentara petani Zapata yang beroperasi di Meksiko Selatan ikut mengambil bagian terbesar dalam menjatuhkan diktator Porfirio Diaz. Ketika pemerintah baru tidak menjalankan reformasi pertanian seperti yang dijanjikan, petani dalam Rencana Ayala (1911) menyerukan revolusi dan menuntut pengembalian tanah yang dirampok selama kekuasaan Diaz, serta penyerahan 1/3 kepemilikan tanah besar yang tersisa pada kepemilikan bersama. Semua *zapatistas* harus bersumpah pada dokumen tersebut, prinsipnya moderat dan tidak begitu berbeda dengan UUD yang disahkan tahun 1917 dan berlaku sampai sekarang. Dalam pertikaian kekuasaan yang terus berlanjut, Zapata (1919) dikhianati dan dibunuh. Zapata termasuk pahlawan

nasional Meksiko; situasi penduduk pedesaan Meksiko masih tetap parah. Zapata merupakan simbol gerakan petani Amerika Latin.

Kepustakaan: J. Womack, *Sterben für die Indios. Zapata und die mexikanische Revolution*, Zürich u. Freiburg i. Br. 1972.

vgl

ZAPU → Zimbabwe.

Zimbabwe Setelah perang saudara berdarah, tidak terduga berlangsung proses dekolonisasi yang berhasil di Zimbabwe. "Model Zimbabwe" terus mendapatkan pujian, meskipun ada beberapa kesulitan ekonomi. Suatu politik ekonomi dan kemasyarakatan yang pragmatis di bekas negara apartheid ini, memungkinkan kerukunan antarras yang berjalan hampir tanpa masalah, menghindarkan eksodus massal kulit putih serta kehancuran ekonomi. Perspektif politik dan ekonomi Zimbabwe positif.

1. Zimbabwe, dulu bernama Rhodesia (Rhodesia; status internasional sampai merdeka adalah jajahan Inggris sebagai Rhodesia Selatan), mencapai kemerdekaan yang diakui dunia internasional 18 April 1980. Negara pedalaman yang terletak di antara Limpopo dan Sambesi mencakup luas 389.361 km². Dengan kondisi yang menguntungkan di sektor primer, bahan baku yang banyak, dan strategis penting (krom, asbes, nikel, tembaga, emas, dll.) serta industri yang maju dan terdiversifikasi, Zimbabwe mempunyai potensi ekonomi yang besar dan persyaratan pembangunan perekonomian keseluruhan yang sangat baik.

Jumlah penduduk tahun 1989 adalah 10 juta jiwa, di antaranya sekitar 300.000 orang Asia dan sekitar 100.000 kulit putih. Jumlah

kulit putih sebelum perang sekitar 300.000, hampir 150.000 orang bermigrasi semasa perang tahun 1977–1980 (biasanya ke Afrika Selatan). Setelah merdeka lebih sedikit kulit putih meninggalkan Zimbabwe daripada yang dikhawatirkan (sekitar 63.000 orang tahun 1980–1986). Sejak tahun 1984/1985 banyak imigran balik dari Afrika Selatan, diperkirakan 1.000 keluarga setiap tahun. Penduduk kulit putih terutama berasal dari Inggris dan Afrika Selatan. Penduduk Bantu terdiri atas 2 kelompok etnis utama: 3/4 penduduk adalah Shona (juga disebut Mashona), 1/3 adalah Ndebele (atau Matabele), selain itu ada kelompok-kelompok minoritas (Tonga, Yenda, Sotho, dll.).

2. Pertengahan abad ke-19 tentara rakyat Ndebele berhasil menundukkan Kerajaan Shona-Zimbabwe. Cecil Rhodes, namanya digunakan untuk negara Rhodesia, dan *British South Africa Company* (BSAC) miliknya, berhasil memperoleh hak-hak eksklusif untuk menambang kekayaan bumi melalui sebuah perjanjian-layak dipertanyakan—dengan Raja Ndebele Lobengula (1889). BSAC yang memperoleh wewenang Inggris untuk menghuni, membangun administrasi, dan mengusahakan perekonomian, menguasai negara tersebut setelah mematahkan perlawanan Afrika (1892–1903) sampai tahun 1904. Tahun 1891 Zimbabwe menjadi protektorat Inggris, tetapi sampai tahun 1923 tetap berada di bawah administrasi BSAC dan setelah penduduk pendatang menentang penggabungan dengan Afrika Selatan dalam sebuah referendum tahun 1923, menjadi ja-

jahan Inggris sebagai Rhodesia Selatan dengan otonomi internal (*responsible government*) yang besar dengan seorang gubernur. Tahun 1953–1963 membentuk federasi Afrika Tengah dengan Rhodesia Utara (sekarang Zambia) dan Njassaland (sekarang Malawi). Federasi yang didominasi oleh kepentingan kaum pendatang kulit putih, akhirnya berantakan akibat perlawanan kaum nasionalis Afrika dari Zambia dan Malawi yang merdeka tahun 1964. Kemerdekaan demikian juga dituntut rezim pendatang di Salisbury. Inggris bersedia memberikan kemerdekaan dengan syarat penghapusan diskriminasi ras dan penyerahan kekuasaan kepada pemerintah mayoritas kulit hitam. Ian Smith, pemimpin *Rhodesian Front* (RF) yang radikal kanan dan rasis menjawab "tidak pernah akan terjadi selama hidupku" dan bereaksi atas "pengkhianatan" negara induknya dengan proklamasi kemerdekaan sebelah pihak (1965) dengan dukungan luas mayoritas kulit putih yang secara hukum internasional ilegal. Inggris, tanpa menggunakan militer, tidak berhasil membujuk rezim pemberontak itu untuk membatalkan tindakan melalui perundingan dan sanksi ekonomi yang didukung PBB. Akibatnya, semua usaha diplomasi dan politik menemui kegagalan. Justru perang gerilya di awal tahun '70-an makin gencar dan dilakukan gerakan pembebasan akhirnya berhasil mendesak rezim minoritas kulit putih untuk menyerahkan kekuasaan kepada mayoritas kulit hitam dalam Konferensi Rhodesia tahun 1979 di London (merdeka 18 April 1980).

3. Struktur-struktur sosial ekonomi Zimbabwe kini terbentuk melalui kolonialisme dan kekuasaan rasial. Kecewa karena tidak tercapainya harapan kelangsungan *Gold-Rush* kedua dan peralihan ke pertanian, orang kulit putih merusak pertanian milik orang kulit hitam yang menjadi saingannya. BSAC membagi negara tersebut menjadi daerah Eropa dan daerah Afrika (*Tribal Trust Land, TTL*). Jika orang kulit putih mendapat lebih dari separo tanah yang sangat berharga untuk pertanian dan infrastruktur terbaik, orang kulit hitam ditumpuk di daerah-daerah yang tidak subur untuk pertanian. Situasi di daerah itu tidak memungkinkan dilakukan kegiatan subsistensi sendiri sehingga mereka terpaksa menjual tenaga kerja kepada orang kulit putih (pertanian, pertambangan, jasa). Dampak serupa dihasilkan oleh penarikan berbagai macam pajak (pajak pondok, pajak kepala). Dengan demikian TTL-TTL tersebut menjadi cadangan tenaga kerja murah dan banyak, menghemat pengeluaran sosial oleh sektor metropolitan (pendidikan anak-anak, tunjangan sakit dan tunjangan hari tua, dll.). Selain itu, berlaku ideologi *apartheid* yang dibawa orang Bur (orang Bantu dilahirkan dalam kedudukan yang rendah). Hal ini sejak masa BSAC menyebabkan pemisahan menyeluruh secara ruang, ekonomi, politik, dan sosial penduduk, menyebabkan privilese tanpa batas minoritas kulit putih dengan jargon sivilisasi dan menyebabkan penindasan sosial, pengisapan, serta diskriminasi rasial terhadap mayoritas kulit hitam. Lan-

dasan historis ketimpangan sosial adalah pembagian tanah (*Land Apportionment Act* tahun 1930/*Land Tenure Act* tahun 1969). Sampai kemerdekaan, seluruh orang kulit hitam yang berjumlah 6,9 juta memiliki tanah sama luas dengan 0,26 juta kulit putih (masing-masing pihak memiliki 47% luas keseluruhan, 6% milik negara).

Walaupun ada politik pembagian tanah (dengan sangat hati-hati), kepemilikan tanah tidak berubah banyak sampai sekarang. Seluruh tanah tidak subur merupakan milik bekas TTL (kini bernama *Communal Lands*) dan 98% tanah subur pertanian intensif merupakan milik orang Eropa (*Commercial Lands*). Sebagian besar penduduk laki-laki kulit hitam masih tetap bekerja di pusat-pusat kegiatan ekonomi kulit putih seperti dulu, dengan meninggalkan keluarganya di TTL. Penduduk *Communal Lands* masih tetap menghadapi situasi tanah tidak subur, telah menjadi semak belukar dan berproduktivitas rendah. Namun sejak merdeka, situasi orang kulit hitam mulai membaik akibat usaha-usaha pembangunan yang gencar dan sebagian besar berhasil (pendidikan, kesehatan, kredit pertanian, penyuluhan, dan pemasaran hasil-hasil pertanian). Tahun 1986 hidup 4 juta kulit hitam di bekas TTL-TTL (16,3 juta ha) dan 0,4 juta kulit putih di 14,8 juta ha *Commercial Lands*. Di dalam pertanian "kulit putih" PDB per kapita mencapai sekitar 850 US\$, sedangkan di pertanian "kulit hitam" 120 US\$. Jika *Communal Farmer* tidak mencapai upah minimum yang ditetapkan negara, sebagian besar dari

4.500 petani besar adalah jutawan dolar.

Dalam industri *de facto* tetap ada perbedaan gaji yang mencolok. *Industrial Relations Act* (1959) melalui *job reservations* menjamin privilese kulit putih dan memblokir jenjang karir kulit hitam. Tahun 1976 perbandingan upah antara kulit hitam dan kulit putih adalah 1:10. Reformasi-reformasi seperti politik upah minimum, revisi sistem perpajakan, pembatasan upah tertinggi, mengurangi kesenjangan yang ada. Dengan besarnya kebutuhan tenaga ahli industri serta tingginya tingkat pendidikan sekolah dan kejuruan di Zimbabwe, secara otomatis akan mengurangi kesenjangan tersebut. Monopoli usaha tani besar kulit putih juga terpatahkan. Tahun 1986 di sektor tembakau yang banyak memberi keuntungan dan devisa, 10% petani adalah kulit hitam.

Keadaan sosial kulit hitam menjadi lebih baik sejak merdeka. Keberhasilan perluasan kesehatan menyebabkan (terutama di pedesaan) harapan hidup rata-rata meningkat pesat (laki-laki dari 55,7 tahun menjadi 62,4 tahun; perempuan dari 59,1 tahun menjadi 65,9 tahun), tertinggi di Afrika. Sama halnya dengan pembangunan pendidikan. Sebelum merdeka di Zimbabwe terdapat 800.000 murid, sekarang 3,1 juta (tahun 1986: 2,5 juta murid SD, 0,54 juta murid sekolah lanjutan). Pendidikan menjadi hak dasar, sekolah dasar bebas biaya, kebutuhan akan guru sangat besar, walaupun ada 1.600 tenaga asing tahun 1988 masih kosong 3.000 posisi guru. Setiap tahun 185.000 murid

(1989) meninggalkan bangku sekolah lanjutan dan memadati pasar tenaga kerja di perkotaan yang mengalami stagnasi, hanya dapat menampung kurang dari 10%. Awal tahun '90-an terdapat 300.000 lulusan sekolah yang tidak mempunyai peluang kerja. Para kritikus menyatakan bahwa kampanye "pendidikan untuk semua" melebihi kebutuhan. 10% pengangguran (di perkotaan 20%), tahun 1986: kira-kira 1,35 juta, tumbuh terus. Ini merupakan masalah masa depan Zimbabwe yang setengah industri.

4. Perekonomian (PNB per kapita tahun 1986: 620 US\$) ditandai oleh: a. politik pragmatis dengan ketimpangan pendapatan dan kepemilikan berdasarkan warna kulit; b. ketergantungan ekonomi terhadap Afrika Selatan; c. eksistensi sektor industri modern dan terdiversifikasi (tidak ditemukan di negara berkembang Afrika Hitam lain). Industri memberikan kontribusi 46% PDB. (1986). Di pertambangan (sekitar 5% PDB) produksi emas, nikel, dan tembaga mengalami stagnasi sejak resesi global, hanya bijih krom dan asbes yang menguntungkan. Zimbabwe sangat penting sebagai pemasok bahan mentah untuk negara industri Barat terutama untuk krom (Zimbabwe mempunyai 550 juta ton atau 34% cadangan dunia) karena krom merupakan logam pemulia baja yang strategis sangat penting artinya dan tidak dapat digantikan. Pertambangan maupun industri dikuasai 95% dan 70% oleh modal asing (terutama Inggris dan Afrika Selatan). Akhir tahun '80-an semua kerusakan perang telah diper-

baik. Jaringan jalan (10.000 km), kereta api (3.400 km), dan komunikasi dalam keadaan baik. Sektor jasa dan administrasi negara bekerja sangat baik, untuk perbandingan Afrika sangat efisien. Oleh karena itu, 'turisme menjadi penting (tahun 1987: 170.000 wisatawan). Pertanian untuk pengadaan dan pekerjaan tetap terpenting (tahun 1986: 11% PDB). Zimbabwe merupakan swasembada dan mengekspor kelebihan produksi (terutama pangan dasar jagung, tahun 1987: 800.000 ton) yang sebagian besar dihasilkan *Communal Farmer*. Tidak ada orang kelaparan di Zimbabwe. Namun, untuk pengadaan seluruh Zimbabwe serta untuk ekspor, 4.500 usaha tani besar kulit putih tetap penting untuk menghasilkan 45% hasil pertanian, menghasilkan sampai 65% ekspor, dan mempekerjakan lebih dari 1 juta orang. *Commercial Farmers' Union* (CFU) yang berkuasa dan secara politik konservatif memuji politik pertanian Mugabe sebagai "keuntungan dunia ini". Untuk keberhasilan pertanian, Mugabe (1988) dinyatakan sebagai kepala negara Afrika terbaik tahun itu. Meskipun berlangsung musim kemarau berat (1983-1985 dan 1987) dan penurunan tajam harga bahan mentah tahun 1983-1987 (karena resesi dunia), ekonomi Zimbabwe tidak mengalami kemunduran. Sektor pertanian meningkat rata-rata 3,4% setiap tahun sejak tahun 1980. Walaupun demikian proyeksi pertumbuhan ekonomi keseluruhan 8% tidak tercapai. Pendapatan per kapita riil mengalami stagnasi akibat pertumbuhan penduduk. Tahun 1987 peme-

rintah memberlakukan stop kenaikan gaji. Utang luar negeri sebesar 3,2 miliar DM (relatif kecil) dibayar Zimbabwe secara konsekuen (25%-35% ekspor) sehingga dijalankan politik penghematan devisa ketat dan kekurangan pengadaan yang besar pada produk-produk impor, terutama sekali sektor pengolahan sangat dirugikan karena kekurangan suku cadang dan bahan pengolah. Kuota investasi turun dari 25% ke angka kritis 15% PDB. Investasi asing menurun dan keengganan investasi meningkat. Keadaan APBN sangat tegang (defisit 1 miliar DM), sebagian diakibatkan kegiatan militer di Mozambik.

Dengan 15.000 tentara dan biaya sekitar 2,5 juta DM/hari (1 juta DM di antaranya untuk ongkos devisa) Zimbabwe membantu pemerintah Mozambik berperang melawan RENAMO yang kanan dan dikendalikan Republik Afrika Selatan; dengan alasan Mozambik pernah mengizinkan partai pemerintah Zimbabwe sekarang, ZANU, melakukan perang kemerdekaan dari wilayah Mozambik, untuk mempertahankan fungsi koridor Baira bagi kepentingan ekspor sendiri. Sumbu jalan sepanjang 300 km antara perbatasan Zimbabwe dan kota pelabuhan Mozambik, Baira, adalah satu-satunya alternatif untuk ekspor Zimbabwe tidak melalui Afrika Selatan (pelabuhan Durban) dan lebih murah. 80% ekspor dan impor Zimbabwe masih tetap dilakukan melalui Afrika Selatan dengan pangsa 30%-40% tetap merupakan negara pengekspor terpenting; diikuti Inggris, AS, dan Jerman. 25% modal produktif Zimbabwe

dipegang perusahaan-perusahaan Afrika Selatan. Ketergantungan, hanya sedikit berkurang sejak merdeka, tetap ada. Andaikan Afrika Selatan menutup perbatasan (misalnya karena sanksi), ekspor tembakau Zimbabwe yang harus melalui udara tidak akan mampu bersaing lagi. Oleh karena itu, Zimbabwe tidak mengikuti sanksi-sanksi internasional terhadap Afrika Selatan, walaupun menuntutnya secara politik. Zimbabwe adalah penggerak dan pusat organisasi regional SADCC yang ingin menghapus ketergantungan kawasan tersebut dari Afrika Selatan.

5: Dari berbagai pendahulu tahun 1967 terbentuk *African National Congress* (ANC) dipimpin Joshua Nkomo, pendiri nasionalisme Zimbabwe, sebagai gerakan oposisi pertama yang penting. Setelah masa ilegal, mula-mula dibentuk *National Democratic Union* dan akhirnya tahun 1961 dibentuk *Zimbabwe African People's Union* (ZAPU). Tahun 1963 terjadi perpecahan dan pemisahan akibat pertikaian mengenai strategi dan gaya kepemimpinan Nkomo, terbentuk *Zimbabwe African National Union* (ZANU), mula-mula dipimpin Pendeta Ndabaningi Sithole. Akhir tahun '60-an kedua organisasi tersebut dengan sayap militernya (ZAPU: *Zimbabwe People's Revolutionary Army*, ZIPRA/Tentara Revolusioner Rakyat Zimbabwe); ZANU: *Zimbabwe African National Liberation Army*, ZANLA/Tentara Kemerdekaan Nasional Zimbabwe Afrika) memulai perang pembebasan bersenjata. Ketergantungan di dan antara kedua kelompok, menyebabkan terbentuk *Front for the*

Liberation of Zimbabwe (FROLIZI/ Front Pembebasan Zimbabwe, belakangan dibubarkan) tahun 1971 dipimpin James Chikerema. Pada tahun yang sama sebagai reaksi pembaruan perjanjian-perjanjian Inggris Rhodesia, *African National Council* (ANC, dipimpin uskup gereja Methodis, Abel Muzorewa) untuk Komisi *Pearce* menyatakan sikap Afrika terhadap model UUD, mengorganisir sebuah kampanye nasional untuk "tidak". Di bawah tekanan lima negara garis depan, ZANU, ZAPU, dan FROLIZI bergabung di bawah naungan ANC yang tetap legal yang menjadi ANC yang diperluas (*United African National Council*), dan mengadakan pembicaraan dengan Smith yang sejak tahun 1974/1975 (melalui kemerdekaan Angola dan Mozambik blok militer dan perekonomian kulit putih di Afrika bagian Selatan runtuh) harus lebih mau mengadakan pembicaraan. September 1975 pembicaraan-pembicaraan gagal, gerakan oposisi berpisah kembali satu-persatu. Tidak lama kemudian ZAPU dan ZANU bersatu (pemimpin: Robert Mugabe, sedangkan Sithole didesak) di dalam aliansi dengan politis menjadi *Patriotic Front* (PF) dan mempergencar perang gerilya (ZIPRA dan ZANLA tetap terpisah). Konferensi Rhodesia di Jenewa tahun 1976/1977 yang diadakan oleh sebuah misi Kissinger maupun rencana pengaturan dari AS dan Inggris (Rencana Owen-Young) di musim panas tahun 1977, gagal akibat sikap Smith yang tanpa kompromi. Smith malah mengadakan perjanjian dengan "golongan tengah" (Muzorewa, Sithole, dan Chirau) Maret 1978

untuk suatu "penyelesaian intern", yang tidak diakui dunia internasional. Dalam pemilihan intern April 1979 UANC (*United African National Council*, Dewan Nasional Afrika Bersatu) dari Muzorewa menang, tetapi di bawah pemerintahannya tidak terjadi perubahan yang menguntungkan kulit hitam, perang bertambah besar, dengan singkat ia dinyatakan sebagai boneka kulit putih. Setelah ada inisiatif negara-negara garis depan untuk sebuah konferensi *Commonwealth* di Lusaka (Agustus 1979), diadakan di Inggris konferensi-semua-pihak di bawah naungan pemerintah Thatcher (Inggris) dipimpin menteri luar negeri Inggris, Lord Carrington. Selain kemampuan diplomasi Inggris, kelelahan perang semua pihak (terutama Zambia dan Mozambique) merupakan penyebab penting keberhasilan konferensi ini. Sesuai dengan Perjanjian *Lancaster House* 21 Desember 1979 Rhodesia menjadi legal kembali dan di bawah gubernur Lord Christopher Soamers menjadi jajahan Inggris kembali selama 4 bulan. Perbatasan dibuka, sanksi-sanksi internasional dicabut, 22.000 gerilyawan dikumpulkan di penampungan, Nkomo dan Mugabe pulang dari pengasingan. Tanggal 17/19 Februari 1980 perang 7 tahun yang tidak ada duanya dalam sejarah penjajahan dan dilaksanakan secara kejam oleh kedua pihak (30.000 korban), berakhir di kotak pemilihan. Dalam pemilihan bebas dan *fair* (diikuti 93,6% pemilih) yang diorganisir oleh Inggris dan diawasi internasional, ZANU-PF memperoleh mayoritas dengan 69 suara dan 57 kursi dari 80 kursi untuk kulit hitam

(seluruhnya 20 kursi untuk kulit putih dimenangkan RF). Partai Nkomo yang maju sebagai PF mendapat 20 kursi, sedangkan Muzorewa 3 kursi. Mantan pemimpin gerilya, Mugabe, yang diejek Barat sebagai setan marxistis, memperlihatkan diri sebagai kepala negara yang moderat, menganjurkan kerukunan antarras, dan memimpin dengan berhasil bekas negara apartheid menjadi masyarakat multiras (*multiracial society*). Mugabe berhasil mengatasi kesulitan terbesar, tidak kehilangan kepercayaan dari kulit putih meskipun melakukan politik pemerataan.

Tidak lama setelah kemerdekaan yang penting adalah memenuhi harapan-harapan yang tinggi, terutama orang kulit hitam pedesaan, untuk menjalankan reformasi pemilikan tanah yang tidak adil. Semula diperkirakan perlu transmigrasi untuk sekitar 3 juta manusia. Rencana transmigrasi negara (1981-1985) mencakup 165.000 kepala keluarga, tetapi yang benar-benar ditransmigrasikan sampai akhir tahun '80-an hanya 40.000 kepala keluarga. Untuk pelaksanaannya, pemerintah Mugabe memegang teguh pada aturan Perjanjian *Lancaster House* yang tidak mengizinkan usaha tani kulit putih dinasionalisasikan. Tahun 1982 ketidakpuasan umum yang timbul dalam hal pembagian tanah yang dirasakan berjalan lambat, muncul dalam pemogokan pertama oleh 60.000 *squatters* (pendudukan tanah milik orang Eropa). Perebutan tanah sebagian dilegalisir, sebagian lagi diakhiri dengan kekerasan. Kini masalah tanah kehilangan dinamika.

Konflik antarras berkurang sejak kemerdekaan, tetapi perbedaan kesukuan antara Shona dan Ndebele bertambah tajam; sampai tahun 1988 konflik ini menentukan politik dalam negeri Zimbabwe. Desember, 1980 terjadi pertikaian berdarah antara pejuang ZIPRA dan ZANLA. Setelah kerusuhan di basis Ndebele Bulawayo (ZIPRA menentang pelucutan senjata secara umum), brigade ke-5 Mugabe mengakhirinya dengan banjir darah, 400 korban meninggal. Penemuan senjata di tanah-tanah pertanian ZAPU secara misterius, menimbulkan krisis Februari 1982. Nkomo, kedudukannya sudah diturunkan menjadi menteri tanpa tugas tertentu, dikeluarkan dari pemerintahan, dan ia meninggalkan negara untuk sementara waktu karena mengkhawatirkan keselamatannya. Walaupun Mugabe secara formal mempertahankan 2 menteri ZAPU dalam koalisi ZANU dan ZAPU, pemberontakan di daerah Matabele terus berlangsung. Mantan pejuang-pejuang ZIPRA meninggalkan tentara nasional; 13 pesawat perang diledakkan tahun 1982. Seruan Nkomo untuk meredakan ketegangan diacuhkan terutama oleh pemuda Ndebele. Khusus tahun 1982-1985 seluruh daerah Matabele menjadi tidak aman dengan adanya *dissidents* yang merusak tempat-tempat yang dilaluinya. Secara resmi ZAPU disalahkan, tetapi kelompok bersenjata ini hanya sebagian terdiri atas mantan pejuang-pejuang ZAPU. Pemilihan tahun 1985 memperlihatkan front-front konflik ini; memang Mugabe menang secara keseluruhan dengan 77% suara, tetapi di daerah Matabele

semua kursi jatuh pada Nkomo-ZAPU. Tahun 1987 ZAPU memang tidak resmi, tetapi *de facto* dilarang, banyak pimpinan ditahan, kantor-kantor partai ditutup, dan diperintahkan pembubaran di seluruh negeri (tetapi tidak dilaksanakan).

Di lain pihak sejak tahun 1986 pembicaraan penyatuan dijalankan dengan tujuan melebur ZANU dan ZAPU. Sebenarnya, hampir tidak ada perbedaan politik di dalam program ZANU dan ZAPU; dengan mengacu kembali pada tradisi perang pembebasan bersama diharapkan persaingan Nkomo (Ndebele) dan Mugabe (Shona) dapat disingkirkan. Sekitar tahun 1986 sejak kedua pesaing ini meninggalkan keinginan-keinginan militer, ZAPU Nkomo (melalui pindah partai dan dipersulit) menderita kerugian dan Mugabe tidak menginginkan keberhasilannya dibayarkan oleh konflik kesukuan, terjadi fusi ZANU dan ZAPU Desember 1987 setelah berlangsung perundingan-perundingan yang sulit dan beberapa kali terputus. ZAPU masuk ke ZANU-PF (*Zimbabwe African National Union - Patriotic Front*) yang dominan. Ketua tetap Mugabe; Nkomo menjadi supermenteri untuk masalah komunal dan pembangunan dengan kabinet beranggotakan 27 orang. Untuk *dissidents* diberi amnesti umum. Fusi partai harus dilihat sebagai langkah awal sistem partai tunggal yang diinginkan Mugabe (parlemen satu kamar dengan 140 kursi; partai lebih berkuasa dari pemerintah) yang akan disahkan mulai tahun 1990 setelah Perjanjian Lancaster House berakhir.

Perjanjian ini menentukan sistem politik Zimbabwe tahun '80-an. Selain jaminan perlindungan minoritas kulit putih (hak pensiun untuk pelayan, tidak ada nasionalisasi, hak rakyat yang tidak dapat diganggu gugat), PF menyetujui sistem multipartai dalam parlemen menurut model Westminster. Pemilihan dilakukan terpisah menurut ras. Sebanyak 20 kursi dari 100 kursi di kamar rendah untuk penduduk kulit putih yang berjumlah 1,2%. Dalam pemilihan tahun 1980 semua kursi jatuh ke RF (kini *Republican Front*), tahun 1985 partai *Conservative Alliance of Zimbabwe* (CAZ) yang dipimpin oleh Smith dan merupakan kelanjutan RF, memperoleh 15 kursi. Menurut *Lancaster House*, ketentuan representasi berlebihan sampai 25 kali lipat ini sampai tahun 1987 hanya dapat diubah dengan suara bulat, setelah itu cukup hanya 70 suara. Setelah 6 kulit putih (di antaranya 3 wakil CAZ) pindah ke ZANU, perubahan UUD tahun 1987 meniadakan privilese 20 kursi tersebut (diterima masyarakat kulit putih tanpa protes). Untuk 20 kursi yang kosong ZANU menominasi 11 kulit putih (di dalamnya mantan musuh RF). Selanjutnya, Mugabe mengangkat 2 kulit putih dalam kabinet. Setelah perubahan UUD Mugabe memerintah sejak 1 Januari 1988 sebagai presiden (sebelumnya sebagai perdana menteri) dengan kekuasaan eksekutif penuh yang dapat semaunya membubarkan parlemen. Sebagai sekretaris pertama dan presiden ZANU (sejak fusi praktis menjadi partai tunggal) ia menyatakan kekuasaan yang penuh masa-

lah. Walaupun ZANU tidak membatalkan demokrasi internal, pemerintahan dan administrasi di Zimbabwe menjadi lebih otoriter. Mugabe yang sangat dihormati oleh mayoritas rakyat (juga oleh Ndebele) hidup sederhana dan tanpa cacat. Usahanya untuk menghindarkan penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum-oknum pejabat melalui *leadership-code*, gagal paling lambat tahun 1988/1989, ketika muncul sederet skandal korupsi. Mugabe memerintahkan pembongkaran tuntas skandal dan memberhentikan a.l. 5 menteri. Kebiasaan korupsi di Zimbabwe tetap sedikit.

Walaupun Zimbabwe sejak merdeka menyatakan dirinya penganut sosialisme berlandaskan marxis-leninis, terlihat bahwa praktek politiknya tidak akan lebih dari perombakan sosial kapitalisme. Meskipun setelah merdeka dibuka hubungan diplomasi ke semua negara-negara blok timur dan RRC, dominasi negara Barat (terutama Inggris) dalam sektor keuangan dan perdagangan tetap tidak terganggu. Di Afrika dijalin hubungan istimewa dengan negara-negara garis depan, khususnya dengan Mozambik. Hubungan dengan Afrika Selatan dikurangi sampai seperlunya saja. Karena ketergantungan ekonomi pada Afrika Selatan, yang juga melancarkan politik destabilisasi (aksi-aksi komando bersenjata sampai ke Harare), meskipun Zimbabwe menuntut sanksi-sanksi, menerangkan tidak dapat ikut melaksanakannya. Mugabe menghindarkan konfrontasi dan melarang operasi ANC dari Zimbabwe walaupun menekankan dukungan untuk gerakan pembebasan

tersebut. Zimbabwe melaksanakan politik nonblok yang patuh. Titik berat politik luar negeri meningkat pesat di Barat, OAU dan nonblok. Ini terlihat Agustus 1986, ketika diadakan konferensi puncak di Harare, Robert Mugabe terpilih sebagai ketua untuk masa 3 tahun.

Kepustakaan: G. Arrighi, *The Political Economy of Rhodesia*, Den Haag 1967; W.H. Morrison-Jones (ed.), *From Rhodesia to Zimbabwe: Behind and Beyond Lancaster House*, London 1980; D. Martin/P. Johnson, *The Struggle or Zimbabwe*, Salisbury, Mardon Printers Ltd, 1981; L.H. Gann/T.H. Henriksen, *The Struggle for Zimbabwe*, New York 1982; G. Baumhögger, "Zimbabwe", dlm.: HDW II, 5, Hamburg 1982, hlm. 417 dst.; C. Reichert, *Das neue Zimbabwe: Gesellschaft im Übergang, issa-wiss, Reihe 18, informationsstelle südl. Afrika e.V.*, Bonn 1984; P. Ripken/G. Krämer-Prein, *Zimbabwe, Mai's Weltführer 38*, Frankfurt 1986; G. Braun, "Zimbabwe: Sozialistisches Land ohne Sozialismus", dlm.: VRÜ 21 (I), hlm. 40-54; C. Stoneman/L. Cliffe, *Zimbabwe: Politics, Economics, Society*, London (Printer).

bg
Zone Perdagangan Bebas Amerika Latin → ALALC.

zone produksi bebas Wilayah tempat produksi industri di negara berkembang yang berorientasi pasar dunia dan berusaha menempatkan diri pada pembagian kerja internasional. Negara berkembang melalui pembangunan zone ini menyediakan prasarana besar untuk produksi yang menguntungkan dengan tujuan memberikan rangsangan pemindahan perusahaan atau cabang industri ke negara berkembang. Prasarana ini (atas saran UNIDO) adalah a. pembebasan penuh bea dan pajak untuk kurun waktu tertentu; b. pembebasan pajak pendapatan untuk 5-10 tahun dan pembebasan sementara atau penurunan tingkat pajak langsung dan tidak

langsung, yang harus dibayar perusahaan dalam negeri; c. tidak melakukan pengawasan terhadap lalu lintas pembayaran internasional dan garansi status demikian juga untuk masa depan; d. repatriasi bebas dari keuntungan yang diterima sampai tingkat tertentu; kemurahan-kemurahan keuangan lainnya, penyediaan kredit jangka pendek, menengah, dan jangka panjang; e. tarif prioritas untuk jasa transportasi dan jasa lain; f. penyediaan infrastruktur material.

Kepustakaan: F. Fröbel et al, *Die neue internationale Arbeitsteilung*, Reinbek 1977.

dn
Zone Sahel Zone selebar ratusan kilometer yang meliputi pantai barat Afrika sampai ke Sudan termasuk Sahara bagian selatan. Tahun 1968-1973 dan 1977/1978 kawasan ini terlanda bencana musim kering yang berat. Negara-negara di Zone Sahel yang paling berat terlanda bencana adalah Mauritania, Senegal, Mali, Volta Hulu, Niger, dan Cad. Penyebab musim kering dan tidak jatuhnya hujan di kawasan ini adalah iklim makrotropis yang spesifik. Jika zone bertekanan tinggi St. Helena di daerah utara pada musim panas tidak sampai ke khatulistiwa atau zone bertekanan tinggi Azora dan Libya tidak sampai ke utara dibandingkan situasi normal, zone konvergensi dan tekanan rendah yang terletak di antara kedua zone bertekanan tinggi tersebut tidak akan berpindah ke utara. Massa udara dari iklim musim barat daya yang mengalir membawa hujan selama musim hujan di musim panas (Mei-Oktobre) dalam situasi ini tidak lagi mencapai Zone Sahel. Apakah efek rumah kaca (→ ekologi) menyebabkan curah hujan yang lebih tinggi

atau lebih sedikit di Zone ini, tidak dapat dikatakan sekarang.

Perekonomian berdasarkan pertanian dan peternakan tradisional (terutama bersifat nomad) di Zone Sahel disesuaikan dengan situasi iklim yang ada di sana, hanya sekitar 10%-20% tanah dimanfaatkan oleh peladangan berpindah yang ekstensif dengan masa-masa bera di antaranya (Dürste/Fenner, tahun 1981: 10). Sejak masa kolonial yang melakukan perubahan-perubahan dalam pemanfaatan ekonomis dengan konsekuensi-konsekuensi menghancurkan ekosistem, menyebabkan musim kering menjadi bencana (terutama kematian ternak, kelaparan) dan terus memajukan proses desertifikasi. Faktor-faktor alami (misalnya pengembaran) bukan merupakan penyebab makin keringnya daerah Sahel dan makin sedikitnya tumbuhan, melainkan tindakan manusia.

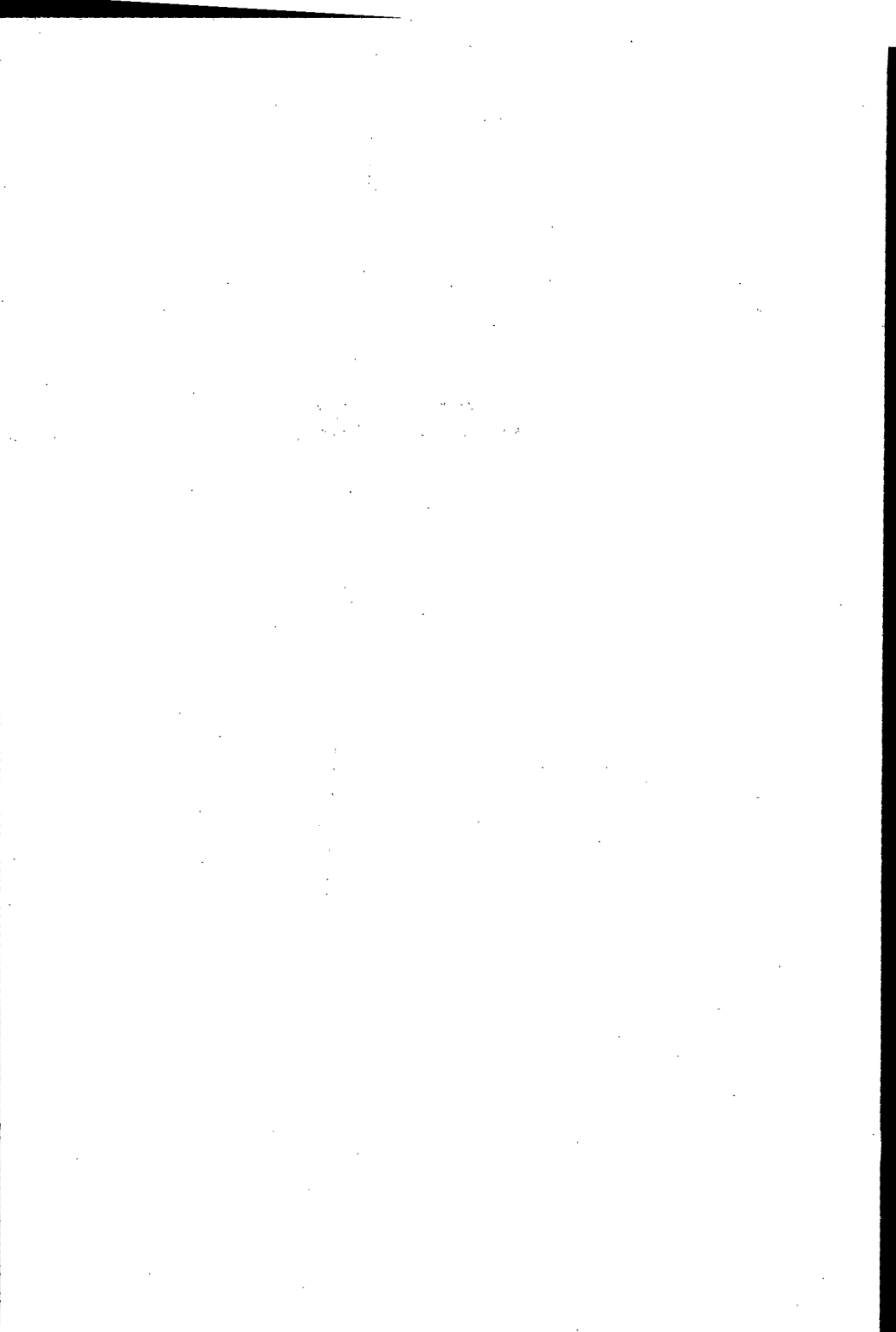
Pajak kepala yang ditetapkan pemerintah kolonial, memaksa petani berproduksi *cash crops* berorientasi pasar, dengan demikian harus mengabaikan produksi pangan untuk kebutuhan sendiri sehingga muncul ketergantungan akan impor pangan; struktur dasar ekonomi ini tetap ada akibat ketergantungan dari penerimaan ekspor melalui *cash crops* di negara-negara Zone Sahel, juga setelah mereka merdeka: tetap tidak ada perubahan. Kebutuhan untuk peningkatan produksi-akibat tekanan penduduk-menyebabkan masa bera diperpendek dan dilakukan pemanfaatan secara intensif areal yang selama itu dimanfaatkan secara ekstensif. Penye- dotan tanah dan erosi angin, sebagian

dikarenakan penebangan untuk mendapatkan kayu bakar, merupakan dampak-dampak ekologi. Perluasan padang semak belukar dengan merugikan tanah olahan, perluasan padang rumput, dan turunnya permukaan air tanah, merupakan konsekuensi-konsekuensi merusak dari suatu produksi daging yang terus ditingkatkan dalam sektor peternakan, merupakan suatu perkembangan yang ditunjang oleh perkembangan pembangunan sumur-sumur dan kedokteran hewan.

Sejak awal tahun '70-an masalah Sahel menjadi tema diskusi internasional (UNCOD, UNSO) dan dalam rangka kerja sama CILLSS, negara-negara di daerah Sahel berusaha mencari jalan keluar dari masalah musim kering dan desertifikasi. Selama elite penguasa setempat berkon-sentrasi pada proyek-proyek pembangunan (misalnya pengairan) di daerah Sahel, terutama pada perkebunan besar yang berorientasi ekspor dan mengabaikan pengadaan pangan sendiri dengan landasan produksi yang disesuaikan dengan pertanian kecil dan ekologi maka dalam waktu dekat sulit dicari jalan keluar untuk masalah Sahel.

Kepustakaan: H. Mensching, *Die Sahelzone. Ursachen und Konsequenzen der Dürrekatastrophe in Afrika*, Umschau 10, 1975, hlm. 305 dst.; D. Klaus, "Klimatologische Aspekte der Dürre im Sahel", dlm.: H. Schifffers, *Nach der Dürre. Die Zukunft des Sahel, Afrika-Studien des IFO-Instituts*, München 1976, hlm. 43 dst.; H. Dürste/M. Fenner, *Die Sahel-Zone. Strategien gegen die Dürre*, Bonn (FES) 1981; K. Ziemer, "Politik, Dürre und Hunger in der Sahelzone", dlm.: HDW II, 4, Hamburg 1982, hlm. 115 dst.; E+Z 10/1983, hlm. 26 dst.; L. Timberlake, *Krisenkontinent Afrika, Der Umwelt-Bankrott. Ursachen und Abwendung*, Bonn 1985. ah

LAMPIRAN



Tabel 1: Dunia Ketiga Berdasarkan Kelompok Negara

Negara	Masuk PBB	Kelompok 77	Nonblok	LLDC	MSAC	OPEC	AKP
Afghanistan	1946	0	0	0	0		
Aljazair	1962	0	0			0	
Angola	1976	0	0				0
Antigua & Barbuda	1981	0					0
Argentina	1945	0	0				
Bahama	1973	0					0
Bahrain	1971	0	0				
Bangladesh	1974	0	0	0	0		
Barbados	1966	0	0				0
Belize	1981	0	0				0
Benin	1960	0	0	0	0		0
Bhutan	1971	0	0	0			
Bolivia	1945	0	0				
Botswana	1966	0	0	0			0
Brasilia	1945	0					
Brunei	1984						
Burkina Faso	1960	0	0	0	0		0
Burundi	1962	0	0	0	0		0
Cad	1960	0	0	0	0		0
Cile	1945	0	dikeluar- kan				
Cina, Republik Rakyat	1945						
Dominika	1978	0	0				0
Dominika, Republik	1945	0					
Ekuador	1945	0	0			0	
El Salvador	1945	0			0		
Etiopia	1945	0	0	0	0		0
Fiji	1970	0					0
Filipina	1945	0					
Gabun	1960	0	0			0	0
Gambia	1965	0	0	0	0		0
Ghana	1957	0	0		0		0
Grenada	1974	0	0				0
Guatemala	1945	0			0		

Negara	Masuk PBB	Kelompok 77	Nonblok	LLDC	MSAC	OPEC	AKP
Guinea	1958	0	0	0	0		0
Guinea-Bissau	1974	0	0	0	0		0
Guinea-Khatulistiwa	1968	0	0	0			0
Guyana	1966	0	0		0		0
Haiti	1945	0		0	0		
Honduras	1945	0			0		
Hong Kong	-						
India	1945	0	0		0		
Indonesia	1950	0	0			0	
Irak	1945	0	0			0	
Iran	1945	0	0			0	
Jamaika	1962	0	0				0
Jibouti	1977	0	0	0			0
Kamboja	1955	0	0		0		
Kamerun	1960	0	0		0		0
Kapverde	1975	0	0	0	0		0
Kenya	1963	0	0		0		0
Kiribati	-			0			0
Kolombia	1945	0	0				
Komora	1975	0	0	0			0
Kongo	1960	0	0				0
Korea Selatan	-	0					
Korea Utara	-	0	0	0			
Kosta Rika	1945	0					
Kuba	1945	0	0				
Kuwait	1963	0	0			0	
Laos	1955	0	0	0	0		
Lebanon	1945	0	0				
Lesotho	1966	0	0	0	0		0
Liberia	1945	0	0				0
Libia	1955	0	0			0	
Madagaskar	1960	0	0		0		0
Maladewa	1965	0	0	0			
Malawi	1964	0	0	0			0
Malaysia	1957	0	0				
Mali	1960	0	0	0	0		0

Negara	Masuk PBB	Kelompok 77	Nonblok	LLDC	MSAC	OPEC	AKP
Maroko	1956	0	0				
Mauritania	1961	0	0	0	0		0
Mauritius	1968	0	0				0
Meksiko	1945	0					
Mesir	1945	0	0		0		
Mongolia	1961			0			
Mozambik	1975	0	0		0		0
Myanmar	1948	0		0	0		
Nauru							
Nepal	1955	0	0	0	0		
Niger	1960	0	0	0	0		0
Nigeria	1960	0	0			0	0
Nikaragua	1945	0	0				
Oman	1971	0	0				
Pakistan	1974	0	0		0		
Panama	1945	0	0				
Pantai Gading	1960	0	0		0		0
Papua Nugini	1975	0					0
Paraguay	1945	0					
Peru	1945	0	0				
Qatar	1971	0	0			0	
Republik Afrika Tengah	1960	0	0	0	0		0
Reunion							
Rwanda	1962	0	0	0	0		0
Salomon	1978	0					0
Samoa	1976	0		0	0		0
Sao Tome & Principe	1975	0	0	0			0
Saudi Arabia	1945	0	0			0	
Senegal	1960	0	0		0		0
Seycheles	1976	0	0				0
Sierra Leone	1961	0	0	0	0		0
Singapura	1965	0	0				
Somalia	1960	0	0	0	0		0
Sri Lanka	1955	0	0		0		

Negara	Masuk PBB	Kelompok 77	Nonblok	LLDC	MSAC	OPEC	AKP
St. Christopher (St. Kitts), Nevis & Sombbrero	1983						
St. Lucia	1979	0	0				0
St. Vincent & Grenadin	1980	0					0
Sudan	1956	0	0	0	0		0
Suriah	1945	0	0				
Suriname	1975	0	0				0
Swaziland	1968	0	0				0
Taiwan	-						
Tanzania	1961	0	0	0	0		0
Thailand	1946	0					
Togo	1960	0	0	0			0
Tonga	-	0					0
Trinidad & Tobago	1962	0	0				0
Tunisia	1956	0	0				
Tuvalu	-			0			0
Uganda	1962	0	0	0	0		0
Uni Emirat Arab	1971	0	0		0		
Uruguay	1945	0					
Vanuatu	1981	0	0	0			0
Venezuela	1945	0				0	
Vietnam	1977	0	0	0			
Yaman Selatan	1967	0	0	0	0		
Yaman Utara	1947	0	0	0	0		
Yordania	1955	0	0				
Zaire	1960	0	0				0
Zambia	1964	0	0				0
Zimbabwe	1980	0	0				0
Jumlah keseluruhan							
akhir tahun 1988	121	120	96	44	45	13	66

Catatan:

1. Selanjutnya yang masuk Kelompok 77 adalah PLO, Yugoslavia, Malta, Rumania, dan Siprus
2. Selanjutnya yang masuk Nonblok adalah Yugoslavia, Malta, PLO, SWAPO, dan Siprus

Tabel 2: Indikator-Indikator Demografi

Negara	Penduduk 1989 & Proyeksi 2000 (juta jiwa)		Tingkat Pertumbuhan Penduduk/ tahun		Penduduk Usia Kerja (dlm. %)	Tingkat Fertilitas	Tingkat Urbanisasi
	1989	2000	1965-80	1980-89	1985	1986	1985
Afghanistan	13,4 ^a	-	2,4	-	53 ^a	8,0 ^a	12 ^a
Aljazair	24,4	33	3,1	3,0	52,1	5,2	51
Angola	9,7	14	2,8	2,6	52,3	6,5	28
Antigua & Barbuda	0,1 ^d	-	1,3 ⁱ	1,2 ^h	57 ^c	2,1 ^d	48 ^c
Argentina	31,9	36	1,6	1,4	61,1	2,8	86
Bahama	0,3 ^d	0,3	2,2 ⁱ	2,0 ^h	58 ^c	3,1 ^d	66 ^c
Bahrain	0,4 ^d	0,6	5,1 ⁱ	4,6 ^h	63 ^c	4,4 ^d	62 ^c
Bangladesh	110,7	139	2,7	2,6	52,7	4,9	16
Barbados	0,3 ^d	0,3	0,5 ⁱ	0,3	62 ^c	1,9 ^d	42 ^c
Belize	0,2 ^d	0,2	1,9 ⁱ	1,9 ^h	49 ^c	4,6 ^d	50
Benin	4,6	6	2,7	3,2	49,6	6,4	37
Bhutan	1,4	2	1,6	2,1	56,7	5,5	5
Bolivia	7,1	10	2,5	2,7	52,9	5,9	51
Botswana	1,2	2	3,5	3,4	48,9	4,9	26
Brasil	147,3	178	2,4	2,2	57,9	3,3	74
Brunei	0,2 ^d	-	5,7 ⁱ	-	-	4,2 ^b	-
Burkina Faso	8,8	12	2,1	2,6	51,7	6,5	9
Burundi	5,3	8	1,9	2,9	50,8	6,8	5
Cad	5,5	7	2,0	2,4	54,7	5,9	29
Cile	13,0	15	1,7	1,7	63,4	2,6	85
Cina, Republik Rakyat	1113,9	1294	2,2	1,4	66,9	2,5	53
Dominika	0,1 ^d	0,1	2,7	2,4 ^h	53 ^c	3,1 ^d	55 ^c
Dominika, Republik	7,0	9	2,7	2,3	58,4	3,6	59
Ekuador	10,3	13	3,1	2,7	56,3	4,1	55
El Salvador	5,1	6	2,8	1,4	52,1	4,7	44
Etiopia	49,5	72	2,7	3,0	50,6	7,5	13
Fiji	0,7 ^d	0,9	1,9 ⁱ	1,9 ^h	59 ^c	3,6 ^d	41 ^c
Filipina	60,0	73	2,8	2,5	56,4	3,9	42
Gabun	1,1	1	3,6	3,7	56,5	5,7	45
Gambia	13,2 ^d	1,1	2,4 ⁱ	3,5 ^h	55 ^c	6,5 ^d	21 ^c

Negara	Penduduk 1989 & Proyeksi 2000 (juta jiwa)		Tingkat Pertumbuhan Penduduk/ tahun		Pen- duduk Usia Kerja (dim. %)	Tingkat Fertilitas		Tingkat Urbanisasi
	1989	2000	1965-80	1980-89		1986	1985	
Ghana	14,4	20	2,2	3,4	50,2	6,3		33
Grenada	0,1 ^d	0,1	1,6 ^f	0,1 ^h	60 ^c	3,5		51 ^a
Guatemala	8,9	12	2,8	2,9	51,5	5,5		39
Guinea	5,6	8	1,5	2,5	51,3	6,5		25
Guinea-Bissau	0,9 ^d	1,2	4,3 ^g	3,7 ^h	52 ^c	6,0 ^d		27 ^c
Guinea-Khatulistiwa	0,4 ^d	0,5	1,8 ^f	1,7 ^h	58 ^e	5,3 ^d		60 ^c
Guyana	0,8 ^d	0,9	1,1 ^f	0,8 ^h	58 ^e	3,2		32
Haiti	6,4	8	1,7	1,9	55,8	4,9		28
Honduras	5,0	7	3,2	3,5	51,7	5,3		43
Hong Kong	5,7	6	2,0	1,5	69,6	1,6		94
India	832,5	1007	2,3	2,1	58,6	4,1		27
Indonesia	178,2	213	2,4	2,1	59,3	3,3		30
Irak	18,3	26	3,4	3,6	50,7	6,2		71
Iran	53,3	77	3,1	3,5	53,0	6,1		56
Jamaika	2,4	3	1,3	1,3	59,2	2,5		52 ^a
Jibouti	0,4 ^d	0,6	10,2 ^g	0,6 ^h	51 ^c	6 ^d		72 ^c
Kamboja	7,0 ^a	-	0,3	-	51 ^a	5,4 ^a		12 ^a
Kamerun	11,6	16	2,7	3,2	49,3	6,5		40
Kapverde	0,3 ^d	0,5	0,9 ^g	1,6 ^h	50 ^c	5,5 ^d		24 ^a
Kenya	23,5	34	3,6	3,9	46,7	6,7		23
Kiribati & Tuvalu	0,1 ^d	0,1	1,7 ^g	1,8 ^h	56 ^c	4,5 ^d		33 ^c
Kolombia	32,3	38	2,5	2,0	60,0	2,9		69
Komora	0,4 ^d	0,7	2,5 ^g	2,6 ^h	54 ^c	7,0 ^d		22 ^c
Kongo	2,2	3	2,8	3,4	51,0	6,5		40
Korea Selatan	42,4	47	2,0	1,2	68,7	1,8		71
Korea Utara	20,9 ^d	28	2,7 ^a	2,5 ^b	56 ^c	3,7		63 ^c
Kosta Rika	2,7	3	2,7	2,4	59,6	3,1		47
Kuba	10,2 ^d	11	1,5 ^e	0,9 ^h	66 ^c	1,8 ^d		71 ^d
Kuwait	2,0	3	7,1	4,4	62,5	3,7		95
Laos	4,1	6	1,9	2,7	53,1	6,7		18
Lebanon	2,6 ^b	-	1,6 ^e	-	52 ^a	4,8		65 ^a

Negara	Penduduk 1989 & Proyeksi 2000 (juta jiwa)		Tingkat Pertumbuhan Penduduk/ tahun		Penduduk Usia Kerja (dim. %)	Tingkat Fertilitas	Tingkat Urbanisasi
	1989	2000	1965-80	1980-89	1985	1986	1985
Lesotho	1,7	2	2,3	2,7	53,2	5,7	20
Liberia	2,5	3	3,0	3,2	59,1	6,4	45
Libia	4,4	6	4,3	4,2	51,4	7,1	69
Madagaskar	11,3	16	2,5	2,9	50,3	6,5	24
Maladewa	0,2 ^d	0,3	3,0 ^f	3,0 ^h	53 ^c	6,5	28 ^e
Malawi	8,2	12	2,9	3,4	50,8	7,6	12
Malaysia	17,4	22	2,5	2,6	56,2	3,6	42
Mali	8,2	11	2,1	2,5	50,4	7,0	19
Maroko	24,5	32	2,5	2,6	55,2	4,7	47
Mauritania	1,9	3	2,4	2,4	52,4	6,8	45
Mauritius	1,1	1	1,6	1,0	65,1	1,9	41
Meksiko	84,6	103	3,1	2,1	58,3	3,4	72
Mesir	51,0	62	2,1	2,5	56,5	4,2	46
Mongolia	2,1	3	2,6	2,7	55,6	4,8	52
Mozambik	15,3	21	2,5	2,7	52,9	6,4	26
Myanmar	40,6	51	2,3	2,1	58,4	3,9	25
Namibia	1,7	2	2,4	3,1	51,2	6,0	27
Nepal	18,4	24	2,4	2,6	54,9	5,7	9
Niger	7,4	11	2,6	3,4	50,4	7,1	19
Nigeria	113,8	160	2,5	3,4	50,2	6,6	35
Nikaragua	3,7	5	3,1	3,4	51,3	5,4	59
Oman	1,5	2	3,6	4,7	51,7	7,1	10
Pakistan	109,9	155	3,1	3,2	52,2	6,6	32
Panama	2,4	3	2,6	2,2	59,9	2,9	53
Pantai Gading	11,7	18	4,1	4,1	48,8	7,3	40
Papua Nugini	3,8	5	2,4	2,5	56,3	5,1	16
Paraguay	4,2	6	2,8	3,2	55,4	4,7	47
Peru	21,2	27	2,8	2,3	58,1	3,9	70
Qatar	0,3 ^d	0,5	6,9 ^a	6,5 ^b	-	6,8 ^d	88 ^e
Republik Afrika Tengah	3,0	4	1,9	2,7	54,8	5,8	46
Reunion	0,5 ^c	-	1,8 ^f	-	62 ^j	2,2 ^b	-
Rwanda	6,9	-	3,3	-	-49,4	8,3	7

Negara	Penduduk 1989 & Proyeksi 2000 (juta jiwa)		Tingkat Pertumbuhan Penduduk/ tahun		Penduduk Usia Kerja (dim. %)	Tingkat Fertilitas	Tingkat Urbanisasi
	1989	2000	1985-80	1980-89	1985	1986	1985
Salomon	0,3 ^d	0,4	3,3 ^g	3,3 ^h	48 ^c	6,8 ^d	10 ^c
Samoa Barat	0,2 ^d	0,2	0,9 ^f	0,7 ^h	55 ^c	5,2 ^d	22 ^c
Sao Tome & Principe	0,1 ^d	-	1,8 ^f	2,2 ^h	54 ^c	5,0 ^d	38
Saudi Arabia	14,4	21	4,6	5,0	51,8	7,1	76
Senegal	7,2	10	2,9	3,0	50,6	6,3	38
Seychelles	0,1 ^d	-	2,7 ^f	1,1 ^h	56 ^c	3,4	36 ^c
Sierra Leone	4,0	5	2,0	2,4	53,7	6,5	32
Singapura	2,7	3	1,6	1,2	70,8	1,9	100
Somalia	6,1	9	2,6	3,0	51,2	6,8	36
Sri Lanka	16,8	19	1,8	1,5	62,3	2,5	21
St. Christopher (St. Kitts), Nevis & Sombro	0,04 ^d	0,1	0,6 ^f	0,2 ^h	55 ^c	3,2 ^d	45
St. Lucia	0,1 ^d	0,2	1,8 ^f	2,0 ^h	47 ^c	4,2 ^d	-
St. Vincent & Grenadin	0,1 ^d	-	2,2 ^f	1,9 ^h	58 ^c	3,2 ^d	-
Sudan	24,5	33	3,0	2,8	52,1	6,4	22
Suriah	12,1	18	3,4	3,6	49,0	6,5	50
Suriname	0,4 ^d	0,5	-0,6 ^f	0,2 ^h	43 ^a	3,9 ^d	46
Swaziland	0,7 ^d	1,2	3,2 ^f	3,4 ^h	49 ^c	6,8 ^d	19 ^c
Taiwan	19,5 ^d	22	2,3 ^g	1,5 ^h	66 ^c	1,7 ^d	94 ^c
Tanzania	23,8	34	2,9	3,1	50,3	6,5	31
Thailand	55,4	64	2,9	1,9	61,9	2,5	22
Togo	3,5	5	3,0	3,5	49,1	6,7	25
Tonga	0,1 ^d	0,1	1,4 ^f	0,7 ^h	-	4,3 ^d	26 ^c
Trinidad & Tobago	1,3	1	1,2	1,7	61 ^c	2,9 ^d	64 ^c
Tunisia	8,0	10	2,1	2,5	57,5	4,0	54
Uganda	16,8	25	2,9	3,2	49,1	7,3	10
Uni Emirat Arab	1,5	2	16,5	4,6	67,4	4,6	85
Uruguay	3,1	3	0,4	0,6	62,7	2,3	78
Vanuatu	0,1 ^d	0,2	3,4 ^f	2,9 ^h	52 ^c	5,7 ^d	25 ^c
Venezuela	19,2	24	3,5	2,8	57,9	3,6	84
Vietnam	64,8	83	2,9 ^f	2,1	51 ^c	4,0	22
Yaman Selatan	2,2 ^d	-	2,0 ^g	-	48,8	6,6 ^d	37 ^c
Yaman Utara	11,2	-	2,3	-	48,8	7,7	28

Negara	Penduduk 1989 & Proyeksi 2000 (juta jiwa)		Tingkat Pertumbuhan Penduduk/ tahun		Pen- duduk Usia Kerja (dlm. %)	Tingkat Fertilitas	Tingkat Urban- isasi
	1989	2000	1965-80	1980-89		1985	1985
Yaman Selatan	2,2 ^d	3	2,0 ^e	3,1 ^h	48,8	6,6 ^d	37 ^e
Yaman Utara	11,2	17	2,3	3,4	48,8	7,7	28
Yordania	3,9	5	2,6	3,3	40,4	6,3	67
Zaire	34,5	48	2,8	3,1	51,3	6,1	39
Zambia	7,8	12	3,0	3,7	48,6	6,7	49
Zimbabwe	9,5	13	3,1	3,5	51,5	5,1	27

Catatan:

- a) 1973
- b) 1984
- c) 1985
- d) 1986
- e) 1965-1980
- f) 1970-1980
- g) 1970-1984
- h) 1980-1986
- i) 1982
- j) 1979
- tidak tersedia data

Tabel 3: Indikator-Indikator Ekonomi

Negara	PNB/ kepala (US\$)	Tingkat Pertum- buhan PNB/ kepala tahunan (%)	Tingkat Industri- alisasi		Pangsa Ekspor barang Primer	Terms of Trade	Utang (juta US\$)	Indeks Pro- duksi Pangan per Kepala
	1989	1965-89	1985	1986	1989	1989	1989	1987-89
Afghanistan	430 ^{am}	-	-	-	83	-	-	99 ^k
Aljazair	2.230	2,5	34	44	96	88	26.067	97
Angola	610	-6,2 ^j	-	22 ^a	97	-	-	84
Antigua & Barbuda	2.380 ^e	2,9 ^j	-	-	-	-	-	96 ^k
Argentina	2.160	-0,1	42	44	68	110	64.745	91
Bahama	7.190 ^e	1,9 ^j	-	-	-	-	-	-
Bahrain	8.510 ^e	0,8 ^j	-	38	91 ^d	71 ^e	-	-
Bangladesh	180	0,4	11	14	29	94	10.712	93
Barbados	5.150 ^e	1,5 ^j	-	24 ^c	25 ^e	97	-	87 ^k
Belize	1.170 ^e	-0,1 ^j	-	20 ^b	-	-	-	95 ^k
Benin	380	-0,1	8	13	97	74 ^e	1.177	114
Bhutan	150 ^e	-	-	-	-	-	79	1211
Bolivia	620	-0,8	31	23	95	117	4.359	102
Botswana	1.640	8,5	19	56	35	-	513	68
Brasilia	2.540	3,5	33	39	48	124	111.290	115
Brunei	15.400 ^e	-1,2 ^j	-	-	-	-	-	-
Burkina Faso	320	1,4	20	22	88	98	756	115
Burundi	220	3,6	-	17	93	86	867	98
Cad	190	-1,2	15	4 ^a	94	-	368	101
Cile	1.770	0,3	40	29 ^j	90	126	18.241	107
Cina, Republik Rakyat	350	5,7	38	46	30	104	44.857	128
Dominika	1.210 ^e	2,8 ^j	-	21 ^c	-	126	-	126 ^k
Dominika, Republik	790	2,5	22	30	30	117	4.066	94
Ekuador	1.020	3,0	22	42	97	102	11.311	106
El Salvador	1.070	-0,4	22	41	80	114	1.851	90
Etiopia	120	-0,1	14	15	97	107	3.013	89
Fiji	1.810 ^e	1,0 ^j	-	21 ^b	87 ^e	85 ^e	-	99 ^k
Filipina	710	1,6	28	32	38	107	28.902	86
Gabun	2.960	0,9	34	35	90	96	3.175	81

Negara	PNB/ kepala (US\$)	Tingkat Pertum- buhan PNB/ kepala tahunan (%)	Tingkat Industri- alisasi		Pangsa Ekepor barang Primer	Terms of Trade	Utang (juta US\$)	Indeks Pro- duksi Pangan per Kepala
	1989	1965-89	1965	1986	1989	1989	1989	1987-89
Gambia	230	-2,7 ⁱ	-	14 ^a	93 ^o	77 ^o	-	120 ^k
Ghana	390	-1,5	19	17	92	82	3.078	109
Grenada	1.240 ^o	0,1 ⁱ	-	-	68 ^o	-	-	-
Guatemala	910	0,9	16 ⁱ	20 ⁱ	83	107	2.601	103
Guinea	430	-0,3 ⁱ	-	22	89	-	2.176	90
Guinea-Bissau	170 ^o	-1,8 ⁱ	-	14 ^a	-	-	-	125 ^k
Guinea-Khatulistiwa	430 ^{om}	-4,5 ^h	-	-	-	-	-	-
Guyana	500 ^o	-2,3 ⁱ	2	29 ^a	84 ^o	84 ^o	-	81 ^k
Haiti	360	0,3	16 ^f	23 ⁱ	14	97	802	93
Honduras	900	0,6	19	25	88	120	3.350	88
Hong Kong	10.350	6,3	40	29	3	100	-	61
India	340	1,8	22	29	27	101	62.509	113
Indonesia	500	4,4	13	32	68	97	53.111	124
Irak	-	-	46	-	98	-	-	98
Iran	3.200	0,5	-	36	94	68	-	87
Jamaika	1.260	-1,3	37	40	42	106	4.322	103 ^k
Jibouti	970 ^d	-	-	-	-	-	-	-
Kamboja	430 ^{om}	-	-	-	-	-	-	145 ^k
Kamerun	1.000	3,2	17	35	97	101	4.743	96
Kapverde	460 ^o	4,9 ⁱ	-	-	-	-	-	-
Kenya	360	2,0	18	20	87	107	5.690	101
Kiribati & Tuvalu	450 ^d	-12,0 ⁱ	-	-	-	-	-	-
Kolombia	1.200	2,3	25	25	75	84	16.887	102
Komora	320 ^o	-1,5 ⁱ	-	-	-	-	-	-
Kongo	940	3,3	19	54	91	90	4.316	98
Korea Selatan	4.400	7,0	25	42	7	106	33.111	96
Korea Utara	-	-	-	-	-	-	-	107 ^k
Kosta Rika	1.780	1,4	23	29	70	109	4.468	89
Kuba	-	-	-	-	-	-	-	109 ^k
Kuwait	16.150	-4,0	73	58 ^c	96	77	-	-
Laos	180	-	-	-	-	-	949	116

Negara	PNB/ kepala (US\$)	Tingkat Pertum- buhan PNB/ kepala tahunan (%)	Tingkat Industri- alisasi	Pangsa Ekspor barang Primer	Terms of Trade	Utang (juta US\$)	Indeks Pro- duksi Pangan per Kepala	
	1989	1965-89	1965	1986	1989	1989	1987-89	
Lebanon	1.200 ^{em}	-	21	-	30 ^o	-	520	113 ^k
Lesotho	470	5,0	5	27	64e	-	324	80
Liberia	460 ^o	-1,4 ^g	40	26	59	115	1.761	95
Libia	5.310	-3,0	63	64 ^a	97	91	-	109
Madagaskar	230	-1,9	16	16	91	108	3.607	93
Maladewa	310 ^o	3,3 ^g	-	-	-	-	-	-
Malawi	180	1,0	13	18	94	101	1.394	85
Malaysia	2.160	4,0	25	36 ^b	56	97	18.576	142
Mali	270	1,7	-	13	90	102	2.157	97
Maroko	880	2,3	28	30	53	80	20.581	120
Mauritania	500	-1,5	36	24	99	114	2.010	88
Mauritius	1.990	3,0	23	32	38	98	832	100
Meksiko	2.010	3,0	31	39	55	98	95.642	98
Mesir	640	4,2	27	29	64	82	48.799	109
Mongolia	-	-	-	-	-	-	-	91
Mozambik	80	-4,5i	-	12	52	91	4.737	83
Myanmar	200 ^o	2,3 ^g	13	13	84	124	4.171	124 ^k
Namibia	1.030	-	-	-	-	-	-	95
Nepal	180	0,6	11	11	13	100	368	107
Niger	290	-2,4	3	16	97 ^o	79	1.578	86
Nigeria	250	0,2	19	29	99	86	32.832	96
Nikaragua	790 ^o	-2,2 ^g	24	33	97	110	9.205	63
Oman	5.220	6,4	23	59 ^a	90	37 ^a	2.974	-
Pakistan	370	2,5	20	28	34	99	18.509	103
Panama	1.760	1,6	19	18	80	152	5.800	92
Pantai Gading	790	0,8	19	24	92	91	15.412	96
Papua Nugini	890	0,2	18	26	91	81	2.496	97
Paraguay	1.030	3,0	19	26	92	120	2.490	115
Peru	1.010	-0,2	30	38	81	88	19.875	101
Qatar	13.200 ^o	8,5 ⁱ	-	-	-	-	-	-
Republik Afrika Tengah	390	-0,5	16	12	47	113	716	90

Negara	PNB/ kepala (US\$)	Tingkat Pertum- buhan PNB/ kepala tahunan (%)	Tingkat Industri- alisasi		Pangsa Ekepor barang Primer	Terms of Trade	Utang (juta US\$)	Indeks Pro- duksi Pangan per Kepala
	1989	1985-89	1985	1986	1989	1989	1989	1987-89
Reunion	3.580 ^c	0,6 ⁱ	-	-	-	-	-	86 ^k
Rwanda	320	1,2	7	23	99	121	652	77
Salomon	530 ^a	1,9 ^j	-	-	-	-	-	96 ^k
Samoa Barat	680 ^a	0,0 ⁱ	-	11 ^k	-	-	-	95 ^k
Sao Tome & Principe	340 ^a	1,0 ⁱ	-	8 ^a	-	-	-	-
Saudi Arabia	6.020	2,6	60	50	92	92	-	184 ^k
Senegal	650	-0,7	18	27	91	103	4.139	106
Seychelles	2.430 ^d	2,7 ⁱ	-	-	-	-	-	-
Sierra Leone	220	0,2	28	22	62	78	1.057	89
Singapura	10.450	7,0	24	38	27	98	-	86
Somalia	170	0,3	6	9	96	111	2.137	97
Sri Lanka	430	3,0	21	27	46	100	5.101	87
St. Christopher (St. Kitts), Nevis & Sombbrero	1.700 ^a	3,3 ^j	-	20 ^a	-	-	-	-
St. Lucia	1.320 ^a	2,9 ^j	-	17 ^d	-	-	-	124 ^k
St. Vincent & Grenadin	960 ^a	2,3 ^j	-	18	-	-	-	145 ^k
Sudan	320 ^a	-0,2 ^g	9	15	96	106	12.965	87
Suriah	980	3,2	22	21	93	84	5.202	86
Suriname	2.510 ^a	1,7 ⁱ	-	27 ^b	-	-	-	110 ^k
Swaziland	690 ^a	0,7 ⁱ	27	-	-	-	-	104 ^k
Taiwan	3.841 ^a	14,3 ^g	30	46	16	112	-	98 ^a
Tanzania	130	-0,1	14	10	88	108	4.918	90
Thailand	1.220	4,2	23	30	46	99	23.466	104
Togo	390	0,0	21	20	91	107	1.186	89
Tonga	740 ^a	6,4 ^j	-	11 ^b	-	-	-	85 ^k
Trinidad & Tobago	3.230	0,4	48	35	69	92	2.012	86
Tunisia	1.260	3,3	24	33	34	99	6.899	96
Uganda	250	-2,8	13	6	99	88	1.809	87
Uni Emirat Arab	18.430	-1,0 ⁱ	-	69	93	96	-	-

Negara	PNB/ kepala (US\$)	Tingkat Pertum- buhan PNB/ kepala tahunan (%)	Tingkat Industri- alisasi		Pangsa Ekapor barang Primer	Tema of Trade	Utang (Juta US\$)	Indeks Pro- duksi Pangan per Kepala
	1989	1965-89	1965	1986	1989	1989	1989	1987-89
Uruguay	2.620	1,2	32	33	61	110	3.751	106
Vanuatu	720 ^d	-5,7 ⁱ	-	-	-	-	-	90 ^e
Venezuela	2.450	-0,1	41	37	92	118	33.144	88
Vietnam	430 ^{em}	-	-	-	87	-	-	111
Yaman Selatan	470 ^g	3,1 ⁱ	-	-	99 ^g	78 ^g	-	89 ^k
Yaman Utara	650	4,7 ^g	-	16	3 ^g	99 ^g	5.685	109 ^k
Yordania	1.640	5,5 ^h	-	28	55	112	7.418	117
Zaire	260	-2,0	26	36	91	98	8.843	94
Zambia	390	-2,0	54	48	95	90	6.874	97
Zimbabwe	650	1,2	35	46	57	95	3.088	90

Catatan:

- a) 1982
- b) 1983
- c) 1984
- d) 1985
- e) 1986
- f) Rata-rata 1960-1962, tanpa pertambangan
- g) 1965-1986
- h) 1970-1978
- i) 1970-1981
- j) 1973-1985
- k) 1984-1986
- l) Rata-rata 1984-1986, tanpa pertambangan
- m) Perkiraan tertinggi
- tidak tersedia data

Tabel 4: Indikator-Indikator Sosial

Negara	Pengadaan Air Minum	Pengadaan Kalori Harian Per Kepala	Kuota Penyeko- lah- an Tingkat Dasar	Angka Kematian Bayi	Angka Kematian Anak-Anak	Tingkat Harapan Hidup pada Kelahiran	Penduduk Per Dokter
	1985*	1988	1988	1989	1986	1989	1984
Afghanistan	3	2.175	-	205 ^c	35 ^c	-	-
Afrika Selatan	-	2.926	-	74 ^k	7	61 ^k	-
Aljazair	85	2.726	96	69	88	36	2.320
Angola	-	1.725	-	132	30	47	17.990
Antigua & Barbuda	21	2.719	-	-	-	73 ^k	2.310 ^b
Argentina	57	3.118	111	30	1	20	370
Bahama	65	2.699	-	23 ^k	1 ^c	70 ^k	1.160 ^f
Bahrain	99	-	-	30 ^k	3	70 ^k	900g
Bangladesh	40	1.804	58	106	18	37	6.730
Barbados	98	3.215	-	19 ^f	1	74 ^k	1.250

Negara	Pengadaan Air Minum	Pengadaan Kalori Harian Per Kepala	Kuota Penyekolah- an Tingkat Dasar	Angka Kematian Bayi	Angka Kematian Anak-Anak	Tingkat Harapan Hidup pada Kelahiran	Penduduk Per Dokter
	1985*	1988	1988	1989	1986	1989	1984
Burkina Faso	30	2.061	32	135	29	47	265.250
Burundi	24	2.253	70	70	23	48	21.030
Cad	30	1.852	51	127	27	44	38.360
Cile	84	2.584	102	19	1	23	1.230
Cina, Republik Rakyat	50	2.632	134	30	2	22	1.010
Dominika	77	2.641	-	14 ^d	4 ^c	75 ^k	7.800 ^g
Dominika, Republik	62	2.357	101	61	6	30	1.760
Ekuador	59	2.338	117	79	5	32	820
El Salvador	55	2.415	80	55	5	35	2.830
Etiopia	15	1.658	36	133	38	52	78.770

Negara	Pengadaan Air Minum	Pengadaan Kalori Harian Per Kepala	Kuota Penykolah- an Tingkat Dasar	Angka Kematian Bayi	Angka Kematian Anak-Anak	Tingkat Harapan Hidup pada Kelahiran	Penduduk Per Dokter
	1985*	1988	1988	1989	1986	1989	1984
Guinea-Bissau	31	2.073	-	159 ^b	31	39 ^k	7.300 ^b
Guinea-Khatulistiwa	47 ^a	-	-	137 ^l	29	45 ^k	62.000 ^b
Guyana	73	2.451	-	34 ⁱ	2	66 ^k	7.350 ^g
Haiti	33	1.911	83	94	22	36	7.130
Honduras	69	2.164	106	66	7	39	1.510
Hong Kong	100	2.899	106	7	(.)	14	1.070
India	54	2.104	99	95	11	31	2.520
Indonesia	33	2.670	119	64	12	27	9.460
Irak	80	2.962	96	67	7	42	1.740
Iran	71	3.100	116	90	17	44	2.840

Negara	Pengadaan Air Minum	Pengadaan Kalori Harian Per Kepala	Kuota Penyeko- lahan Tingkat Dasar	Angka Kematian Bayi	Angka Kematian Anak-Anak	Tingkat Harapan Hidup pada Kelahiran	Penduduk Per Dokter
	1985*	1988	1988	1989	1986	1989	1984
Komora	-	2.214	-	85 ^k	16	56 ^k	16.000 ^f
Kongo	25	2.512	-	55	7	48	5.330 ^h
Korea Selatan	83	2.878	104	23	2	16	1.160
Korea Utara	-	3.113	-	25 ^k	2	50 ^k	-
Kosta Rika	84	2.782	100	17	(.)	26	960
Kuba	-	3.088	-	14	(.)	75 ^k	720 ^g
Kuwait	100	3.132	93	15	1	27	640
Laos	41	2.637	110	105	23	47	1.360
Lebanon	94	3.046	-	47 ^c	3c	-	510 ^g
Lesotho	18	2.307	112	96	14	41	18.610

Negara	Pengadaan Air Minum	Pengadaan Kalori Harian Per Kepala	Kuota Penyeko- lah-an Tingkat Dasar	Angka Kematian Bayi	Angka Kematian Anak-Anak	Tingkat Harapan Hidup pada Kelahiran	Penduduk Per Dokter
	1985*	1988	1988	1989	1986	1989	1984
Mauritania	37	2.528	52	123	25	48	11.900
Mauritius	99	2.679	105	21	1	18	1.900
Meksiko	74	3.135	117	40	3	28	1.242
Mesir	90	3.213	90	68	11	32	770
Mongolia	-	2.456	102	64	4	35	400 ⁹
Mozambik	9	1.632	68	137	22	46	36.970 ⁹
Myanmar	21	2.572	103	66	7	30	3.740
Namibia	-	1.889	-	-	-	49	-
Nepal	16	2.078	86	124	20	41	30.220
Niger	36	2.340	30	130	28	51	39.670
Nigeria	30	2.022	68	117	21	47	6.440

Negara	Pengadaan Air Minum	Pengadaan Kalori Harian Per Kepala	Kuota Penyeko- lahan Tingkat Dasar	Angka Kematian Bayi	Angka Kematian Anak-Anak	Tingkat Harapan Hidup pada Kelahiran	Penduduk Per Dokter
	1985*	1988	1988	1989	1986	1989	1984
Peru	52	2.269	-	79	11	31	1.040
Qatar	95	-	-	36 ^k	3	69 ^k	1.300 ^g
Puerto Rico	-	-	-	-	(.)	76	-
Republik Afrika Tengah	16	1.980	67	100	27	42	22.530 ^g
Reunion	-	-	-	-	-	70	-
Rwanda	60	1.768	64	118	26	52	35.090
Salomon	27	2.091	-	86 ^k	4 ^c	58 ^k	7.500 ^f
Samoa Barat	95	2.389	-	51 ^h	4 ^c	65 ^k	2.590 ^f
Sao Tome & Principe	52	2.442	-	70 ^k	-	65 ^k	2.260 ^h

Negara	Pengadaan Air Minum	Pengadaan Kalori Harian Per Kepala	Kuota Penyeko- lah- an Tingkat Dasar	Angka Kematian Bayi	Angka Kematian Anak-Anak	Tingkat Harapan Hidup pada Kelahiran	Penduduk Per Dokter
	1985 ^a	1988	1988	1989	1986	1989	1984
St. Lucia	70	2.395	-	32 ^h	2 ^c	72 ^k	3.700 ^g
St. Vincent & Grenadin	75	2.723	-	36 ^h	13 ^c	69 ^k	4.180 ^f
Sudan	40	1.996	49	104	18	44	10.190
Suriah	71	3.168	110	44	4	45	1.260
Suriname	89	2.673	-	46 ⁱ	1	66 ^k	1.750 ^f
Swaziland	38	2.556	-	125 ^j	27	55 ^k	7.000 ^f
Taiwan	78	2.878	-	6 ^k	6	73 ^k	1.330 ^g
Tanzania	52	2.151	66	112	22	47	24.980
Thailand	70	2.287	87	28	3	22	6.290
Togo	34	2.133	101	90	12	49	8.700
Tonga	74	2.845	-	50 ^k	2 ^c	64 ^k	2.685 ^f

Negara	Pengadaan Air Minum	Pengadaan Kalori Harian Per Kepala	Kuota Penyekolah- an Tingkat Dasar	Angka Kematian Bayi	Angka Kematian Anak-Anak	Tingkat Harapan Hidup pada Kelahiran	Penduduk Per Dokter
	1985*	1988	1988	1989	1986	1989	1984
Vietnam	42	2.233	-	43	4	32	950
Yaman Selatan	52	2.252	-	142 ^a	30	50 ^a	7.110 ⁹
Yaman Utara	31	2.322	-	125	34	53	7.120 ⁹
Yordania	97	2.907	-	53	3	43	1.120
Zaire	18	2.034	76	94	20	45	12.940
Zambia	48	2.026	97	76	15	49	7.150
Zimbabwe	52	2.232	128	46	7	37	6.700

Catatan:

* Perkiraan data-data terakhir yang tersedia sekitar tahun 1985

a) Hanya penduduk kota

b) Data rata 1983 - 1985

Penjelasan Teknis Lampiran Tabel 2, 3, dan 4

Lampiran Tabel 2: Indikator-Indikator Demografi

Angka-angka kependudukan merupakan angka perkiraan untuk pertengahan tahun 1989 jika tidak ada penjelasan lainnya. Proyeksi penduduk untuk tahun 2000 berdasarkan informasi mengenai struktur usia dan jenis kelamin, angka fertilitas dan kematian yang ada di masing-masing negara, begitu juga bagian-bagian gerak perpindahan penduduk di tahun basis 1980. Tingkat pertumbuhan penduduk adalah rata-rata setiap periode yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk di masing-masing pertengahan tahun. Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia di atas 14 tahun sampai di bawah 65 tahun. Tingkat fertilitas (angka kelahiran keseluruhan) mengukur jumlah anak rata-rata yang dapat dilahirkan oleh seorang perempuan—dengan memperhatikan angka kesuburan sesuai usianya jika ia hidup sampai batas usia kemampuannya melahirkan. Tingkat urbanisasi memberikan angka persentase penduduk perkotaan. Karena pengertian masing-masing nasional mengenai "kota" sangat berbeda-beda, hanya dimungkinkan perbandingan lintas antarnegara secara terbatas.

Lampiran Tabel 3: Indikator-Indikator Ekonomi

Data-data mengenai Pendapatan Nasional Bruto per kepala dihitung oleh Bank Dunia berdasarkan sebuah sistem khusus (Sistem Atlas). Tidak diberikan perbandingan internasional sepenuhnya karena adanya perbedaan dalam perhitungan keseluruhan perekonomian nasional, luasnya, begitu juga dapat diandalkannya informasi-informasi statistik yang melandasinya. Selain itu, terdapat pergeseran data-data PNB yang dihitung dari berbagai mata uang nasional ke dalam US\$. Tingkat pertumbuhan PNB per kepala tahunan rata-rata dihitung dengan bantuan metode kuadrat terkecil. Tingkat industrialisasi memberikan angka persentase sektor industri ke Produk Domestik Bruto; termasuk sektor industri adalah pertambangan, industri pengolahan, bangunan, pengadaan listrik, air, dan gas. Pangsa ekspor barang produksi primer memperlihatkan berapa persen nilai keseluruhan ekspor barang kelompok bahan bakar, mineral, dan metal, serta bahan mentah lainnya (*Standard International Trade Classification, Rev. 3, Section 3, Divisions 27, 28, 68, dan Sections 0, 1, 2, 4, tanpa Divisions 27, 28*). *Terms of trade*

dihitung sebagai perbandingan indeks harga rata-rata dari ekspor sebuah negara dengan indeks harga rata-rata dari impornya; hubungan pertukaran netto ini dengan demikian mengukur perubahan tingkat harga ekspor sebagai tingkat persentase harga impor terhadap tahun 1987—dan tahun 1980 jika ada tanda-tanda tahun lainnya. Utang luar negeri meliputi seluruh pinjaman yang berasal dari pihak pemerintah, swasta, penggunaan kredit IMF, utang jangka pendek. Indeks produksi pangan per kepala menghitung jumlah pangan rata-rata yang dihasilkan tahun 1987–1989 berdasarkan produksi rata-rata tahun 1979–1981. Produksi pangan mencakup padi-padian, umbi-umbian, dan akar-akaran yang mengandung tepung, tebu, bit gula, gandum-gandum, tanaman untuk produksi minyak goreng, kacang-kacangan, sayuran, ternak, dan hasil dari ternak; tidak termasuk pakan ternak, bibit untuk pertanian, serta kerugian dalam pengolahan dan penjualan.

Lampiran Tabel 4: Indikator-Indikator Sosial

Indikator pengadaan air minum memperlihatkan pangsa penduduk keseluruhan secara persentase penduduk yang memiliki akses ke pengadaan air bersih. Pengadaan air bersih dikatakan tersedia jika dalam jarak dan waktu yang dapat diterima memiliki akses ke air bersih, termasuk air permukaan yang sudah disaring atau belum disaring, juga air yang tidak tercemar—seperti dari sumur bor, mata air, dan PAM. Data-data yang diberikan merupakan angka perkiraan dari WHO, yang internasional hanya dapat diperbandingkan secara terbatas. Penyediaan kalori harian per kepala diperoleh dari pembagian nilai kalori yang ada pada penyediaan pangan di sebuah negara oleh angka penduduknya. Penyediaan pangan meliputi produksi dalam negeri, impor, dikurangi ekspor dan perubahan-perubahan jumlah; tidak termasuk pakan ternak, bibit untuk pertanian, dan jumlah pangan yang hilang pada pengolahan dan penjualan. Kuota penyesuaian untuk tingkat dasar memberikan persentase jumlah anak usia sekolah yang bersekolah di sekolah dasar. Rasio bruto untuk bersekolahnya anak di sekolah dasar di negara-negara dengan sistem sekolah dasar menyeluruh atau dengan kuota pengulangan yang tinggi, dapat melampaui atau jauh di bawah nilai 100 jika sekolah dikunjungi anak yang melewati atau di bawah usia sekolah resmi. Di banyak negara

usia 6–11 tahun merupakan usia sekolah dasar, tetapi ini tidak berlaku untuk seluruhnya. Rasio bruto untuk bersekolah di sekolah dasar karenanya dapat berbeda berdasarkan definisi usia sekolah dasar dan lamanya pendidikan sekolah dasar sehingga sebuah perbandingan internasional hanya mungkin secara terbatas. Angka kematian bayi mengukur jumlah bayi yang meninggal setiap 1.000 kelahiran per tahun sebelum mengakhiri usia setahun. Angka kematian anak mengukur kasus kematian anak per seribu kelahiran bayi yang hidup dalam tahun yang diberikan pada usia 1–4 tahun dari kelompok usia yang sama. Tingkat harapan hidup pada kelahiran memperlihatkan jumlah bayi yang mungkin akan hidup dalam setahun, jika dalam hidupnya dihadapkan pada risiko kematian yang spesifik usianya, yang pada kelahirannya berlaku untuk keseluruhan penduduk. Data-data untuk jumlah penduduk per dokter merupakan angka perkiraan WHO karena adanya perbedaan definisi, hanya berlaku untuk perbandingan lintas antar-negara. Kuota buta aksara memberikan persentase penduduk dalam usia 15 tahun dan lebih yang dapat membaca dan menulis. Angka-angka ini merupakan perkiraan UNESCO, yang dianggap kurang dapat diandalkan; suatu perbandingan internasional hanya mungkin dengan sangat terbatas akibat adanya perbedaan dalam definisi dan keandalan data-data awalnya.

Sumber:

- EUROSTAT: ACP Basic Statistics 1987. Luxembourg 1987.
 FAO: Production Yearbook, vol. 40 (1986), Rome 1987.
 INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK: Annual Report 1987. Washington, D.C. 1988.
 REPUBLIC OF CHINA (Bureau of Statistics/DGBAS): Monthly Bulletin of Statistics, vol. XIV, No. 6, Taipei 1988.
 STATISTISCHE BUNDESAMT: Länderbericht Taiwan 1988. Wiesbaden 1988.
 UNESCO: Statistical Yearbook: 1987. Paris 1987.
 UNITED NATIONS: Demographic Yearbook 1986. New York 1988.
 UNITED NATIONS: Industrial Statistics Yearbook 1985, vol. I dan II. New York 1987.
 WORLD BANK: Social Indicators of Development 1987. Washington, D.C. 1987.
 WORLD BANK: World Bank Atlas 1983. Washington, D.C. 1983.
 WORLD BANK: World Bank Atlas 1987. Washington, D.C. 1987.
 WORLD BANK: World Debt Tables 1986-1987. Washington, D.C. 1987.
 WORLD BANK: World Debt Tables 1987-1988. Washington, D.C. 1988.
 WORLD BANK: World Development Report 1983. Washington, D.C. 1983.
 WORLD BANK: World Development Report 1987. Washington, D.C. 1987.
 WORLD BANK: World Development Report 1988. Washington, D.C. 1988.
 WORLD BANK: World Development Report 1991. Washington, D.C. 1991.
 WORLD BANK: World Tables 1987, from the data files of the World Bank. Washington, D.C.

1988.

hs/kas

INDEKS

A

AASM
 ABEDA
 absentisme
 Abu Dhabi
 ACAST
 ACC
 ACDA
 ACSAD
 ADB
 ADB
 AEF
 AFDB
 AFESD
 Afghanistan
 African Medical and Research
 Foundation
 Afrika Selatan
 AFTAAAC
 Agenda 21
 AID
 AIDS di Dunia Ketiga
 akulturasi
 akumulasi
 ALAB
 ALADI
 ALALC
 ALC
 ALECSO
 ALIDE
 alih teknologi

aliran Chicago
 Aljazair
 Allende Gossens, Salvador
 Alliance for Progress
 amnesty international
 AMREF
 analisis biaya-hasil
 analisis risiko politik
 ANC
 Angola
 ANRPC
 Antigua dan Barbuda
 Antilla-Belanda
 AOF
 apartheid
 APRA
 Arabian Maghreb Union
 Arafat, Jassir
 Argentina
 Arias Sanchez, Oscar
 arus lingkar produksi
 ASEAN
 asosiasi
 Asosiasi Integrasi Amerika Latin
 ASPAC
 Associated States
 Asuransi Hermes
 ATP
 AZAPO

B

backward linkages

backwash effects

BADEA

Bahama

bahan dasar

Bahrain

Baker-Plan

balanced growth

Bangladesh

Bank Arab-Amerika Latin

Bank Dunia

Bank Investasi Eropa

Bank Pembangunan Afrika

Bank Pembangunan Asia

Bank Pembangunan Inter-Amerika

Bank Pembangunan Multilateral

Bank Pembangunan Regional

Bank untuk Keseimbangan

Pembayaran

bantuan barang

bantuan humaniter

bantuan/kerja sama teknik

bantuan kesehatan

bantuan keuangan/kerja sama

keuangan/bantuan modal

bantuan netto

bantuan pangan

bantuan PBB untuk pengungsi

Palestina

bantuan pembangunan

bantuan pembangunan Arab ke

Afrika

bantuan pemerintah

bantuan pendidikan

bantuan pengetahuan

bantuan personal

bantuan program

bantuan proyek

bantuan struktur sosial

bantuan untuk bencana alam

barang investasi

barang modal

Barbados

Barbuda

basic needs

BATU

batu loncatan

BCEAO

BCIE

BDD

BEAC

beban utang

Belau

Belize

Benin

Better Living Societies

Bhutan

BID

big push

bilateral, multilateral

bilateralisme

Birma

Biro Pasifik Selatan untuk Kerja

Sama Ekonomi

BIZ

BLADEX

BMZ

Bolívar, Simon

Bolivia

Botswana

Brady-Plan

brain drain

Brasilia

Bretton-Wood-System

Brunei

BSAC

Buenos-Aires-Plan

buffer stock

built-in evaluation

Burkina Faso

buruh anak

buruh pengembara

buruh tamu

Burundi

buta aksara

Buthlezi, Gatsha

C

Cabinda
 Cabral, Amílcar
 Cad
 CADA
 cadangan penyangga
 CADC
 CAEU
 CAF
 CAFRAD
 callampas
 Camara, Dom Helder
 campesino
 CAPEL
 Cardenal, Ernesto
 CARICOM
 CARIFTA
 cash crops
 CASTARAB
 Castro, Fidel
 caudillo, caudillismo
 CBLT
 CCEAC
 CCM
 CCP
 CDB
 CDC
 CDF
 CDP
 CDPP
 CEAO
 CEC
 CECAS
 CECLA
 CEIM
 CELAM
 CENTO
 CEPAL
 Cepalismo
 CEPGL
 CESCO
 Ceylon
 CGFPI

CGI
 CGIAR
 Christ for the Socialism
 CIAP
 CID
 CIDSE
 CIEC
 CIES
 c.i.f.
 Cile
 CILLSS
 Cina, Republik Rakyat
 CIPEC
 circulus vitiosus
 civic action
 CLASC
 Club of Dacar
 Club of Paris
 Club of Rome
 CMET
 CMT
 collective self-reliance
 Colonial Development Acts
 colonos
 COMECON
 commodity terms of trade
 Commonwealth
 Communauté Financière Africaine
 Communauté Français
 Communauté Rurale
 community development
 COMUNBANA
 concessional terms
 CONDECA
 cono sur
 Conseil de l'Entente
 contra
 Convenio de Panama
 COPAL/CPA
 Corea-Plan
 cost benefit analysis
 counterinsurgency
 counterpart

CPCM
CPUSTAL
CRD
critical minimum effort
CSTD
Cuenca del Plata

D

DAC
daerah jajahan
daerah mandat
daerah yang bergantung dari luar
Dahomay
Dana Bersama
Dana Eropa untuk Pembangunan
Dana Internasional untuk
Pembangunan Pertanian
Dana Moneter Internasional
Dana OPEC untuk Pembangunan
Internasional
Dana PBB untuk Kependudukan
Dana PBB untuk Lingkungan
Dana PBB untuk Modal
Pembangunan

DARS

Dasawarsa Kultur Dunia
dasawarsa pembangunan
DCC
Deklarasi Arusha
Deklarasi Bern
Deklarasi Cocoyoc
Deklarasi Haager
Deklarasi Rio
Deklarasi Vancouver
dekolonisasi
demokrasi/redemokratisasi
desarrollismo
desertifikasi
Development Committee (DC)
development education
Dewan Antarnegara dari
Negara-Negara Pengeksport
Tembaga

Dewan Ekonomi dan Sosial
Interamerika
Dewan Ekonomi dan Sosial PBB
Dewan Gereja Dunia
Dewan Negara-Negara Teluk
Dewan Pangan Dunia
Dewan Persatuan Ekonomi Arab
Dewan Pertahanan Amerika Tengah
Dialog Arab-Eropa
dinas pembangunan
disembodied technology
diskriminasi
disosiasi
distribusi pendapatan
diversifikasi
DMC
Doktrin Monroe
Doktrin Pertahanan Nasional
Dominika, Republik
DPI
DTCD
dualisme
Dunia Keempat
Dunia Ketiga

E

EAAFRO
EAC
EAD
EADB
EADI
ECA
ECAFE
ECCM
ECDC
ECLA
ecodevelopment
ecofarming
economic assistance
economie dominante
economies of scale
ECOSOC
ECOWAS

ECU
 ECWA
 EDCS
 EDF
 EDI
 efek dominasi
 efek konter
 efek skala
 EIB
 ejido
 ekologi
 ekonomi subsistensi
 eksogen
 Ekuador
 elemen tunjangan
 El Salvador
 embodied technology
 employment and redistribution
 enabling clause
 encomienda
 endogen
 energi
 enklave
 EPLF
 EPTA
 ERE
 ESCAP
 ESF
 Esquivel Perez, Adolfo
 Etiopia
 etnis, etnisitas
 etnomedicine
 etnosentrisme, entosentris
 eurokredit
 evaluasi/kontrol keberhasilan
 export-economy model
 external economies
 extra-profit

F

FAC
 Fanon, Frantz
 FAO

fasilitas Afrika
 fasilitas minyak
 fasilitas pembiayaan keseimbangan
 favelas
 FCD
 F CFA
 F CFP
 feasibility study
 Federasi Afrika Tengah
 Federasi Hindia Barat
 FELICA
 FES
 FIDES
 Fiji
 Filipina
 FLDW
 FNL/NLF
 FNLA
 FNS
 f.o.b.
 fokonolona
 Food Aid Convention
 Food for Development Program
 Food for Peace Program
 Food for Work Projects
 foquismo
 foreign assistance
 Forum Pasifik Selatan
 forward linkage
 Franc-Zone
 Frei Montalva, Eduardo
 Freire, Paulo
 FRELIMO
 Friedrich Ebert-Stiftung
 Friedrich Naumann-Stiftung
 FROLINAT
 Funds in Trust

G

Gabon
 gains from trade
 Gambia
 gamonal(ismo)

Gandhi, Mahatma
 Garcia Marques, Gabriel
 GATT
 GAWI
 GCC
 geopolitik
 GEPLACEA
 gerakan Inkatha
 gerakan Pan
 gerakan pembebasan
 gerakan Sarvodaya-Shramadana
 gerilya
 Ghana
 Global 2000
 Global Negotiations
 GNP
 Goethe-Institut
 grant element
 Grenada
 GSP
 GTZ
 Guadeloupe
 Guatemala
 Guevara, Ernesto Che
 Guinea
 Guinea-Bissau
 Guinea-Khatulistiwa
 Guyana
 Guyana-Perancis

H

HABITAT
 hacienda
 Haiti
 hak asasi manusia dan proses
 perlindungan internasional
 hak dasar
 hambatan perdagangan
 hambatan perdagangan nontarif
 hambatan perdagangan tarif
 harapan hidup rata-rata
 Harrod-Domar
 Heckscher-Ohlin

heterogenitas struktural
 hipotesis U
 Ho Chi Minh
 homeland
 Honduras
 Hong Kong
 huasipungo, huasipunguero
 hubungan Selatan-Selatan
 hukum internasional untuk
 pembangunan
 Hukum Laut Internasional
 human capital
 humanisme Afrika
 hutan hujan tropis

I

IAEA
 IBA
 IBD
 IBFG
 IBRD
 ICAP
 ICDC
 ICFTU
 IDA
 IDB
 IDCA
 IEA
 IEFR
 IFAD
 IFC
 IGADD
 IGGI
 IIF
 IINA
 ikatan pemasokan
 ikut secara selektif
 Illich, Ivan
 ilmu ekonomi pendidikan
 ILO
 ILPES
 ILRAD
 IMF

immiserizing growth
 impact evaluation
 imperialisme
 income terms of trade
 indeksasi
 India
 indikator
 indikator kesehatan
 indirect rule
 Indonesia
 industrialisasi
 industrialization by invitation
 infrastruktur
 inisiatif Arusha
 Input-Output Analyse (Leontief)
 inquilinos
 Institut Amerika Latin untuk
 Rencana Pembangunan
 Ekonomi dan Sosial
 Institut PBB untuk Pelatihan dan
 Penelitian
 Institut Penelitian PBB untuk
 Pembangunan Sosial
 INTAL
 integrasi
 integrasi ekonomi regional
 International Council for Adult
 Education
 International Council for
 Educational Development
 International Emergency Food
 Reserve
 International Institute for Adult
 Literacy Methods
 International Institute for
 Educational Planning
 International Program for the
 Development of Communication
 International Security and
 Economic Cooperation Program
 Inter Press Service
 investasi
 investasi langsung

IPDC
 IPPF
 IPS
 Irak
 Iran
 IRO
 IsDB
 islamisasi/re-islamisasi
 Itaipu
 ITO
 ITU

J

Jalan Ketiga
 Jalur Gaza
 Jamaika
 Jibouti
 joint venture

K

Kaledonia Baru
 Kamboja
 Kamerun
 kapitalisme periferi
 Karibia
 kartel bahan mentah
 KAS
 Kaunda, Kenneth
 kebutuhan dasar, strategi
 pembangunan berorientasi pada
 kebutuhan dasar
 kekerasan struktural
 kelas negara
 Kelompok Brazzaville
 Kelompok Casablanca
 Kelompok Contadora
 Kelompok Dakar
 Kelompok Delapan
 Kelompok La Plata
 Kelompok Monrovia
 Kelompok Paris
 Kelompok Roma
 Kelompok Sepuluh

Kelompok 77
keluarga berencana
kemampuan absorpsi
Kementerian Kerja Sama Ekonomi

Jerman

Kenya

Kenyatta, Jomo

Kepulauan Bermuda

Kepulauan Cayman

Kepulauan Kapverde

Kepulauan Marshall

Kepulauan Pasifik

Kepulauan Salomon

Kepulauan Turc & Caicos

Kepulauan Virgin

kerawanan ekologi di daerah tropis

Kerja Sama Amazona

Kerja Sama Regional untuk

Pembangunan

Kerja Sama Segitiga

kesehatan

kesempatan kerja

Kesepakatan Kredit Umum

ketentuan wewenang

keterbelakangan

ketergantungan

ketergantungan pada bahan mentah

keuntungan ongkos komparatif

Khomeini, Ayatollah Ruhollah

Kim-Il-Sung-isme

Kiribati

klausul prioritas

klientelisme

know-how

kode perilaku

koefisien GINI

Kolombia

koloni

kolonialisme

Komisi AS untuk Hak Asasi

Manusia

Komisi Dunia untuk Lingkungan

dan Pembangunan

Komisi Inter-Amerika untuk Hak
Asasi Manusia

Komisi Kawasan Pasifik Selatan

Komisi Khusus untuk Koordinasi
Amerika Latin

Komisi PBB untuk Hak Asasi
Manusia

Komisi Penengah PBB untuk
Masalah Palestina

Komisi Selatan-Selatan

Komisi untuk Pembangunan Danau
Cad

Komisi Utara-Selatan

Komite Konsultasi Tetap

Negara-Negara Maghribi

Komora

komunalisme

Konferensi Alma Ata

Konferensi Bandung

Konferensi Cancun

Konferensi Dunia mengenai Ilmu
Pengetahuan dan Teknik untuk
Pembangunan

Konferensi Dunia mengenai
Reformasi Pertanian dan
Pembangunan Pedesaan

Konferensi Gurun PBB

Konferensi Hukum Laut

Konferensi Islam

Konferensi Kerja Sama Ekonomi
Internasional

Konferensi Lingkungan Dunia

Konferensi Lingkungan PBB

Konferensi Pangan Dunia

Konferensi PBB mengenai
Perdagangan Dunia dan
Pembangunan

Konferensi PBB mengenai
Perkotaan dan Pemukiman

Konferensi Penduduk Dunia

Konferensi Penduduk PBB

Konferensi Perdagangan Dunia

Konferensi Perempuan Dunia

konfesionalisme
 Konflik Amerika Tengah
 Konflik Arab-Israel
 Konflik Eritrea
 Konflik Falkland/Malvinas
 Konflik Ogaden
 Konflik Timur-Barat
 Konflik Timur-Tengah
 Konflik Utara-Selatan
 Kongo (Brazzaville)
 Kongres Nasional Afrika
 Konrad Adenauer Stiftung
 kontingensi
 Konvensi Afrika untuk Hak Asasi Manusia
 Konvensi Amerika untuk Hak Asasi Manusia
 Konvensi mengenai Perlindungan Keanekaragaman Hayati
 Konvensi mengenai Perubahan Iklim
 Konvensi Pengungsi PBB
 koperasi
 Koperasi Pembangunan Oikumene
 Korea Selatan
 Korea Utara
 Kosta Rika
 kredit anggaran
 kredit Eropa
 Kuba
 Kultus Voodoo
 kuota akumulasi
 kuota desersi
 kuota drop-out
 kuota ekspor
 kuota produksi
 kuota tabungan
 kuota upah
 kurang makan
 Kurva Lorenz
 Kuwait

L

Ladinos

LAFTA
 Lagos Plan of Action
 landlocked countries
 landreform
 Laos
 Laporan Brandt
 Laporan Brundtland
 Laporan Dag-Hammarskjöld
 Laporan Jackson
 Laporan Linowitz
 Laporan Pearson
 Laporan Pembangunan Dunia
 Laporan Rio
 Laporan Rockefeller
 latifundia, latifundisme
 LDC
 learning by doing effect
 Lebanon
 Lembaga Swadaya Masyarakat/Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat
 Lesotho
 Liberia
 Libia
 LIBOR
 LIC
 Liga Arab
 ligas campesinas
 lingkaran setan
 lingua franca
 link
 linkage-effects
 LLDC
 local planning
 long term contract process
 low-intensity conflict
 LSM/LPSM

M

Machismo
 Madagaskar
 Maghreb Union

Mahkamah Afrika untuk Hak Asasi
 Manusia
 Mahkamah Inter-Amerika untuk
 Hak Asasi Manusia
 Mahkamah Internasional
 Maladewa
 Malawi
 Malaysia
 Mali
 Malvinas
 Mandela, Nelson Rolihlahla
 Mano-River-Union
 manpower approach
 Mao Tse-tung
 marjinalitas
 Maroko
 marronage
 Marti, Jose
 Martinique
 masalah Palestina
 Masyarakat Afrika Barat
 Masyarakat Afrika Timur
 Masyarakat Ekonomi Afrika Timur
 Masyarakat Karibia
 Mauritania
 Mauritius
 mayordomo
 MCCA
 MDBs
 Meksiko
 Mesir
 Mestis
 metropol
 MIC
 MIGA
 Mikronesia
 Military Assistance Program
 MINEX
 minifundia, minifundisme
 minimum learning needs
 minoritas
 miskin

miskin absolut
 mixed economy
 MNLF
 model Bariloche
 model dunia
 model ekonomi ekspor
 model pembangunan
 model sentra-periferi
 model Westminster
 moneterisme
 Mongolia, Republik Rakyat
 monitoring
 monokultur/monostruktur
 Montserrat
 Mozambik
 MPLA
 MSAC
 Mujahiddin
 MULPOC
 MULTIFERT
 multilateral
 Mutual Security Act
 Myanmar
 Myrdal, Gunnar

N

Namibia
 nasionalisasi
 nasionalisme
 Nasser, Gamal Abdel
 nasserisme
 nation building
 Nauru
 Negara AKP
 negara berkembang
 Negara BLS
 negara garis depan
 negara industri baru
 Negara-Negara Persemakmuran
 negara pedalaman
 negara dengan perdagangan luar
 negerinya berada di tangan
 negara

negritude
 neokolonialisme
 Nepal
 neraca jasa
 neraca modal
 neraca pembayaran
 neraca perdagangan
 Neruda, Pablo
 NGO
 NIB
 NIC
 Niger
 Nigeria
 Nikaragua
 Nkrumah, Kwame
 nonblok, gerakan nonblok
 Nyerere, Julius Kambaragene

O

OAMCAF
 OAMCE
 OAPEC
 OAS
 OATUU
 OAU
 OCAM
 OCAS
 OCBN
 ODA
 ODCA
 ODECA
 ODM
 OEA
 OECD
 OECS
 OERS
 offshore
 OIAC
 OIC
 OLADE
 OLAS
 OLDEPESCA
 Oman

OMDKRB
 OMVG
 OMVS
 ongkos oportunitas
 OPEC
 open-door policy
 operational evaluation
 Organisasi Bauksit Internasional
 Organisasi Buruh Internasional
 Organisasi Energi Amerika Latin
 Organisasi Energi Atom
 Internasional
 Organisasi Kesehatan Dunia
 Organisasi Negara-Negara Amerika
 Organisasi Negara-Negara Amerika
 Tengah
 Organisasi Negara-Negara
 Pengekspor Minyak
 Organisasi Non-Pemerintah
 Organisasi Pangan dan Pertanian
 PBB
 Organisasi PBB untuk Anak-Anak
 Organisasi PBB untuk
 Pembangunan Industri
 Organisasi PBB untuk Pendidikan,
 Ilmu Pengetahuan, dan
 Kebudayaan
 Organisasi Pembangunan
 Internasional
 Organisasi untuk Kerja Sama
 Ekonomi dan Pembangunan
 Organisasi untuk Pengembangan
 Sungai Senegal
 Organisasi untuk Persatuan Afrika
 Organisasi Solidaritas Amerika Latin
 ORIT

P

PAC
 padat karya
 padat modal
 PAIGC
 pakar pembangunan

Pakistan
 Pakta Andes
 Pakta Asia Tenggara
 Pakta Bagdad
 Pakta Rio
 Palang Merah
 PANA
 panafrikanisme
 PANAFTEL
 Panama
 pangan
 Pantai Gading
 Papua Nugini
 Paraguay
 partai politik di Afrika
 partai politik di Amerika Latin
 partai politik di Asia
 partisipasi
 Pasar Bersama Amerika Tengah
 Pasar Bersama Karibia Timur
 Pasar Bersama Negara-Negara
 Afrika Barat
 Pasukan PBB
 patrimonialisme
 PBB
 PCCM
 PDB
 Peace Corps
 pedagogi pembebasan/teori
 pedagogi di Dunia Ketiga
 pelarian dari pedesaan
 pelayanan kesehatan
 pelucutan persenjataan dan
 pembangunan
 pembagian kerja internasional
 pembangunan/teori-teori
 pembangunan
 pembangunan alternatif
 pembangunan kultural
 pembangunan otosentris
 pembangunan pedesaan

pembangunan yang tergantung dari
 luar
 pemberantasan buta aksara
 pemberantasan obat bius
 pembiayaan bersama
 pembiayaan campuran
 pembiayaan kembali
 pembiayaan kompensatoris
 pemisahan diri
 pendapatan nasional
 Pendapatan Nasional Netto
 pendapatan per kapita
 pendekatan kultur-pluralisme
 pendidikan
 pendidikan dasar
 pendidikan formal
 pendidikan informal
 pendidikan kejuruan
 penduduk
 penelitian dan pembangunan
 penelitian pendidikan
 penelitian perdamaian
 pengaitan ke belakang
 pengaitan ke depan
 pengangguran
 pengawasan rencana
 pengungsi
 pengungsi karena masalah
 lingkungan
 penjadwalan utang
 penyakit tropis
 penyebab sirkuler
 penyesuaian struktur
 perang di Dunia Ketiga
 Perang Irak-Iran
 perdagangan dunia
 perdamaian
 perempuan di Dunia Ketiga
 periferisasi
 Perjanjian Bahan Mentah
 Perjanjian Bea dan Perdagangan
 Umum

Perjanjian Camp-David
 Perjanjian Lome
 Perjanjian Multiserat
 Perjanjian Pasifik Selatan mengenai
 Kerja Sama Ekonomi dan
 Perdagangan
 Perjanjian Pembatasan Diri
 Perjanjian Perdagangan Dunia
 Perjanjian Preferensi
 perkampungan kumuh
 perkebunan
 peronisme
 persenjataan
 Persia
 Pertemuan Puncak La Havanna
 Pertemuan Puncak Lusaka
 pertukaran tidak seimbang
 pertumbuhan seimbang
 pertumbuhan tidak seimbang
 Peru
 perubahan kultur
 perubahan sosial
 perundingan bea
 perundingan global
 perusahaan multinasional
 perusahaan multinasional di negara
 berkembang
 perusahaan transnasional
 Petrolatin
 Physical-Quality-of-Life-Index
 Piagam Aljir
 Piagam Banjul
 Piagam Hak dan Kewajiban
 Negara-Negara dalam Ekonomi
 Piagam Havana
 Piagam Sosial Eropa
 Pitcairn
 PL 480
 place-system
 PLO
 poblaciones
 poder popular

Polinesia-Perancis
 POLISARIO
 politik bantuan pembangunan
 politik bantuan pembangunan AS
 politik bantuan pembangunan
 Austria
 politik bantuan pembangunan
 Belanda
 politik bantuan pembangunan Inggris
 politik bantuan pembangunan Jepang
 politik bantuan pembangunan
 Jerman
 politik bantuan pembangunan ME
 politik bantuan pembangunan
 Perancis
 politik bantuan pembangunan Uni
 Soviet dan negara-negara Eropa
 Timur
 politik perdagangan luar negeri
 populisme, populistis
 poverty-index
 PQLI
 pre-feasibility study
 Primary Health Care
 Produk Domestik Bruto
 produktivitas
 program bahan mentah terintegrasi
 Program Kesempatan Kerja Dunia
 Program Lingkungan PBB
 Program Pangan Dunia
 Program Pembangunan PBB
 proteksionisme
 PTA
 Puerto Rico
 Pusat Penelitian Arab untuk Daerah
 Gurun dan Kering
 pusat uang offshore
 Putaran Kennedy
 Putaran Tokyo
 Putaran Uruguay

Q

Qatar

R

rasisme
 Rastafarians
 RCD
 RE
 redistribution with growth
 reformasi pendidikan
 reformasi pertanian
 reformasi tanah
 reintegrasi
 relawan pembangunan
 rencana pembanguana
 rencana sektoral
 Republik Afrika Tengah
 resiprositas
 Reunion
 revolusi
 Revolusi Hijau
 Revolusi Kebudayaan
 Revolusi Putih
 rezim internasional
 rezim militer
 rezim otoriter
 Rhodesia
 Rocas
 Rwanda

S

SAAFA
 SAARC
 SABA
 SAC
 SACU
 SADCC
 SAEMU
 Sahara Barat
 Saint Lucia
 Saint Vincent & Grenadin
 Samoa
 Sandinista
 Sao Tome & Principe

Saudi Arabia
 SDR
 SEAMEO
 SEATO
 sektoral, sektor
 sektor ekonomi
 sektor formal
 sektor informal
 SELA
 self-employment
 self-reliance
 self-sustained growth
 Sendero Luminoso
 Senegal
 Senghor, Leopold Sedar
 SEPA
 serikat buruh
 Seychelles
 share cropping
 shifting cultivation
 SID
 SIECA
 Sierra Leone
 SIFIDA
 Singapura
 SIPRI
 Sistem Bretton-Wood
 sistem kasta
 sistem kuota
 sistem ladang berpindah
 Sistem Penstabilan Hasil Ekspor
 Mineral
 Sistem Preferensi Umum
 slums
 snob-effect
 SNPA
 social demand approach
 Soekarno
 Somalia
 sosialisme
 sosialisme Arab
 SPARTECA

SPC
 SPEC
 Special Drawing Rights
 SPF
 spill-over-effect
 spot checks
 spread effects
 SPREP
 SPIDP
 squatters
 Sri Lanka
 SSA
 STABEX
 stabilisasi hasil ekspor
 stand-by-loan
 St. Christopher (St. Kitts), Nevis, &
 Sombrero
 studi kelayakan
 subsidi bunga
 subsistensi
 substitusi impor
 Sudan
 sumber daya
 SUNFED
 Suriah
 Suriname
 sur-place-programme
 surplus
 Survival International
 swadaya
 SWAPO
 Swaziland
 SYSMIN

T

TAB
 TAC
 tahanan politik
 Taiwan
 take-off
 tanaman ekspor
 Tanzania

target lima
 TASF
 tata ekonomi dunia baru
 tata informasi dunia baru
 TCDC
 TCP
 TDB
 teknologi gen
 teknologi tepat guna
 tempat tinggal
 teologi pembebasan
 teori dan strategi pertumbuhan
 teori dependencia
 teori faktor keseimbangan
 teori faktor proporsional
 teori imperialisme
 teori ketergantungan
 teori modernisasi
 teori neofaktor proporsional
 teori neoklasik
 teori pembangunan
 teori perdagangan luar negeri
 teori trickle-down
 Tepi Barat
 terms of trade
 tesis Prebisch/Singer
 Thailand
 Third-Worldism
 TIAR
 tied aid
 tingkat harapan hidup
 tingkat kelahiran
 tingkat kematian
 Tito, J. Broz
 Togo
 Tonga
 tribalisme
 Trinidad & Tobago
 tropical forest action
 Tunisia
 Tupamaros
 turisme

Tutu, Desmond Mpilo
Tuvalu

U

UAM
UAMBD
UDEAC
UDEAO
UEAC
Uganda
UIP
ujamaa
UMOA
UN
unbalanced growth
UNCAST
UNCDF
UNCED
UNCLOS
UNCOD
UNCST (UNCSTED)
UNCTAD
UNDA
UNDOF
UNDP
UNEDA
UNEF
UNEP
UNESCO
UNESOB
UNF
UNFDAC
UNFPA
UNFSST
UNHCR
Uni Arab-Magribi
UNICEF
UNIDF
UNIDO
Uni Emirat Arab
UNIFIL
Uni Mata Uang Eropa
UNISIST

UNITA
UNITAR
United Fruit Company
Universal Declaration of Human Rights
UNMOGIP
UNPRO
UNRISD
UNRWA
UNSCC
UNSO
UNTSOP
UNU
UNV
UPEB
UPTC
urban informal sector
urbanisasi
Uruguay
URUPABOL
US-Foreign-Assistance Act
utang

V

Vanuatu
VAP
Venezuela
vent for surplus
vernacular
Vietnam
villas miserias
Volta Hulu

W

Wabah
Wallis & Futuna
Warisan Dunia
WCARRD
WCC
WFC
WFP
WHO
windfall profits

WIPO
World Bank
World Experimental Literacy
Program
World Resources Institute
World Vision International
WSLF
WUS
WVA

Y

Yaman
yanacona, yanaconaje

Yordania

Z

Zaire
Zambia
ZANU
Zapata, Emiliano Z.
ZAPU
Zimbabwe
Zone Perdagangan Bebas Amerika
Latin
zone produksi bebas
Zone Sahel

PERPUSTAKAAN
PUSAT PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN BAHASA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN

10



2

07-5544

Peta Amerika Selatan

SKALA 1 : 30.000.000



URUTAN

9	7	-	617
---	---	---	-----